

Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A.

MANIFESTO WACANA KIRI

Membentuk Solidaritas Organik

DISKURSUS SEJARAH KETERTINDASAN MASYARAKAT
INDONESIA ♦ DISKURSUS SEJARAH PEMIKIRAN NEGARA ♦ DISKURSUS
DEMOKRASI INDONESIA ♦ DISKURSUS MATERI DASAR KE-PMII-
AN ♦ DISKURSUS IDEOLOGI GENDER, FEMINISME & SEJARAH GERAKAN
PEREMPUAN ♦ DISKURSUS PENDIDIKAN KAUM TERTINDAS ♦ DISKURSUS
ISLAM & TEOLOGI PEMBEBASAN PROGRESIF ♦ DISKURSUS PEMIKIRAN
HEGEL, MARX, GRAMSCI & HABERMAS ♦ DISKURSUS TEORI
PEMBANGUNAN DUNIA KETIGA ♦ DISKURSUS IDEOLOGI KAPITALISME &
DEVELOPMENTALISME ♦ DISKURSUS GLOBALISASI & SEJARAH
EKONOMI INTERNASIONAL ♦ DISKURSUS ANALISIS SOSIAL &
STRATEGI GERAKAN SOSIAL.



BUKU PANDUAN PELATIHAN BASIS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① الَّذِي خَلَقَ

الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ②

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ ③

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ④ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ

إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ⑤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

بِمِصْبَاحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ

السَّعِيرِ ⑥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَبُسُّ الْمَصِيرُ ⑦

إِذَا الْقَوَا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ⑧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ⑨

كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ⑩ قَالُوا بَلَى

قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا

فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ⑪ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ

السَّعِيرِ ⑫ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑬

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدينِ ① فَذَلِكَ الَّذِي
يَدْعُ الْيَتِيمَ ② وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ③
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ④ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ⑤
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ⑥ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ⑦

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelembar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab: "Benar ada", sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

(Q.S. Al-Mulk [67]: 1-12)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

(Q.S. Al-Maa'uun [107]: 1-7)

MANIFESTO WACANA KIRI

Membentuk Solidaritas Organik

Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A.

Alumnus (S.1) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Alumnus (S.2) Program Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial & Politik UGM/ Dosen Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Kabupaten Cilacap/ Kader Kultural Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jogjakarta/ Direktur pada Komunitas Santri Progressif (KSP) Cilacap, Lembaga Kajian Sosiologi Dialektis (LKSD) Cilacap-Jogjakarta/Institute for Philosophical and Social Studies (INSPHISOS) Cilacap-Jogjakarta/Komunitas Diskusi Eye On The Revolution + Revdem Cilacap-Jogjakarta/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com/ skristeva@gmail.com Hp. 085 647 634 312/ 087 838 520 977/ Website: www.negamarxis.blogspot.com/ www.sosiologidialektis.wordpress.com

Cetakan Pertama, Desember 2007

Cetakan Kedua, Juli 2008

Cetakan Ketiga, Maret 2009

Cetakan Keempat, November 2009

Edisi Revisi, Cetakan Kelima, November 2012

Anti-Copyright©2012

**Edisi Khusus Komunitas untuk Agitasi & Propaganda Wacana Kiri,
Untuk Kader Inti Ideologis Jaringan Sayap Kiri PMII**



Diterbitkan, dicetak & didistribusikan atas kerjasama:

Komunitas Santri Progressif (KSP) Cilacap, Lembaga Kajian Sosiologi Dialektis (LKSD) Cilacap-Jogjakarta, Institute for Philosophical and Social Studies (INSPHISOS) Cilacap-Jogjakarta, Komunitas Diskusi Eye On The Revolution + Revdem Cilacap-Jogjakarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jaringan Inti Ideologis Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Alamat Kantor Cilacap 1: Kompleks Pondok Pesantren *Al-Madaniyah Al-Islamiyah As-Salafiyah*, Jl. Pucang D.37 RT. 01 RW IX Gumilir, Cilacap-Utara, Cilacap. 53231, Alamat Kantor Cilacap 2: Jl. Urip Sumoharjo No. 71 RT. 03 RW III Mertasinga, Cilacap Utara, Cilacap, Jawa Tengah 53232



Anti-Copyright: dengan mencantumkan penulis sebagai hak dan pengakuan intelektual penulis, maka penulis dan penerbit memperbolehkan untuk mengutip, mereproduksi atau memperbanyak, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini dengan cara elektronik, mekanik, fotokopi, perekaman, scanner, microfilm, vcd & cd-room, rekaman suara atau dengan teknologi apapun dengan izin atau tanpa seizin penulis dan penerbit. Dokumen intelektual ini diterbitkan dan disebarakan demi kebutuhan gerakan sosial. edisi khusus komunitas untuk agitasi & propaganda wacana kiri. Untuk kader inti ideologis jaringan sayap kiri. Sebarkan dan berorganisasilah! baca & lawan!

MANIFESTO WACANA KIRI; *Membentuk Solidaritas Organik*

Edisi Revisi, Cetakan Kelima, November 2012

Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A.

All rights reserved. Edisi Revisi tahun 2012 ini Diterbitkan, dicetak & didistribusikan atas kerjasama: Komunitas Santri Progressif (KSP) Cilacap, Lembaga Kajian Sosiologi Dialektis (LKSD) Cilacap-Jogjakarta, Institute for Philosophical and Social Studies (INSPHISOS) Cilacap-Jogjakarta, Komunitas Diskusi Eye On The Revolution + Revdem Cilacap-Jogjakarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jaringan Inti Ideologis Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Derevisi, disunting dan ditambahkan isi buku ini sesuai dengan asli dan demi kebutuhan gerakan sosial dari buku asli *Manifesto Wacana Kiri; Membentuk Solidaritas Organik* © Nur Sayyid Santoso Kristeva, 2012.

Buku panduan pelatihan basis untuk gerakan sosial ini pertama kali terbit tahun 2007 yaitu diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kaderisasi PMII Komisariat Imam Ghazali Cilacap, kemudian dicetak ulang oleh Departemen Pendidikan dan Kaderisasi PMII Rayon Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2008.

Manifesto Wacana Kiri; Membentuk Solidaritas Organik,
Anti-Copyright © 2012, untuk diterbitkan dan disebar
Demi kebutuhan Kader Inti Ideologis dan kebutuhan gerakan sosial.

Penulis : Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A.
Editor : Tim Kreatif Eye On The Revolution + Tim Kreatif Revdem
Penyunting : Tim Kreatif Eye On The Revolution + Tim Kreatif Revdem
Lay-Outer : Tim Kreatif Eye On The Revolution + Tim Kreatif Revdem
Desain Grafis : Tim Kreatif Eye On The Revolution + Tim Kreatif Revdem

Cetakan Pertama, Desember 2007

Cetakan Kedua, Juli 2008

Cetakan Ketiga, Maret 2009

Cetakan Keempat, November 2009

Edisi Revisi, Cetakan Kelima, November 2012

Diterbitkan & Dicetak:

Eye On The Revolution + Revdem Cilacap-Jogjakarta

Buku panduan pelatihan basis ini diterbitkan & dicetak atas solidaritas, dukungan dan kerjasama: Komunitas Santri Progressif (KSP) Cilacap, Lembaga Kajian Sosiologi Dialektis (LKSD) Cilacap-Jogjakarta, Institute for Philosophical and Social Studies (INSPHISOS) Cilacap-Jogjakarta, Komunitas Diskusi Eye On The Revolution + Revdem Cilacap-Jogjakarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jaringan Inti Ideologis Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Penulis adalah Alumnus (S.1) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Alumnus (S.2) Program Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial & Politik UGM/ Dosen Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Kabupaten Cilacap/ Kader Kultural Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jogjakarta/ Direktur pada Komunitas Santri Progressif (KSP) Cilacap, Lembaga Kajian Sosiologi Dialektis (LKSD) Cilacap-Jogjakarta/Institute for Philosophical and Social Studies (INSPHISOS) Cilacap-Jogjakarta/Komunitas Diskusi Eye On The Revolution + Revdem Cilacap-Jogjakarta/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com/ skristeva@gmail.com Hp. 085 647 634 312/ 087 838 520 977/ Website: www.negamarxis.blogspot.com/ www.sosiologidialektis.wordpress.com



Anti-Copyright: dengan mencantumkan penulis sebagai hak dan pengakuan intelektual penulis, maka penulis dan penerbit memperbolehkan untuk mengutip, mereproduksi atau memperbanyak, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini dengan cara elektronik, mekanik, fotokopi, perekaman, scanner, microfilm, vcd & cd-room, rekaman suara atau dengan teknologi apapun dengan izin atau tanpa seizin penulis dan penerbit. Dokumen intelektual ini diterbitkan dan disebar demi kebutuhan gerakan sosial. Edisi khusus komunitas untuk agitasi & propaganda wacana kiri. Untuk kader inti ideologis jaringan sayap kiri. Sebarkan dan berorganisasilah! baca & lawan!

☸ Daftar Isi ☸

DAFTAR ISI	6
DAFTAR DIAGRAM	14
PERSEMBAHAN	15
PENGANTAR PENULIS	16
KISAH CINTA TAN MALAKA	20
 BAGIAN PERTAMA: DISKURSUS SEJARAH KETERTINDASAN MASYARAKAT INDONESIA	 22
1. Hand-Out 01 SEJARAH INDONESIA	23
Prasejarah—Era sebelum Penjajahan—Sejarah Awal—Kerajaan Hindu-Buddha—Kerajaan Islam—Era penjajahan—Penjajahan Portugis—Penjajahan Syarikat Hindia Timur Belanda—Penjajahan Belanda—Gerakan Nasionalisme—Perang Dunia II—Pendudukan Jepang—Era Kemerdekaan—Persiapan Kemerdekaan—Perang Kemerdekaan INDONESIA: ERA 1945-1949—Teks Proklamasi—Demokrasi Parlementer—Demokrasi Terpimpin—Konfrontasi Indonesia-Malaysia—Irian Barat—Gerakan 30 September—Era Orde Baru—Irian Jaya—Timor Timur—Krisis ekonomi—Era Reformasi—Pemerintahan Habibie—Pemerintahan Wahid—Pemerintahan Megawati—Pemerintahan Yudhoyono.	
2. Hand-Out 02 SEJARAH INDONESIA (1945-1949)	29
1945: Kembalinya Belanda bersama Sekutu—Latar belakang—Mendaratnya Belanda diwakili NICA—Pertempuran melawan Sekutu dan NICA—Ibukota pindah ke Yogyakarta—1946: Perubahan sistem pemerintahan—Diplomasi Syahrir—Penculikan terhadap PM Sjahrir—Kembali menjadi PM—Konferensi Malino—Terbentuknya “negara” baru—1946-1947: Peristiwa Westerling—Perjanjian Linggarjati—Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil perundingan Linggarjati—Proklamasi Negara Pasundan—Agresi Militer I—Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri—1948: Perjanjian Renville—Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Hatta sebagai Perdana Menteri—1948-1949: Agresi Militer II—Perjanjian Roem Royen—Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta—Konferensi Meja Bundar—Penyerahan kedaulatan oleh Belanda.	
3. Hand-Out 03 SEJARAH REVOLUSI INDONESIA	37
Pecahnya Revolusi—	
4. Hand-Out 04 PKI, ANARKISME DAN AKUMULASI KETERTINDASAN	44
Prawacana—Akumulasi Kekecewaan Masyarakat—PKI dan Ketertindasan: Holocaust Terhadap PKI—Kebiasaan pasca G30 S/ PKI.	
 BAGIAN KEDUA: DISKURSUS SEJARAH PEMIKIRAN NEGARA	 48
5. Hand-Out 05 SEJARAH PEMIKIRAN NEGARA	49
Prawacana—Tinjauan Kesejarahan—Asal Mula Negara—Plato—Epicurus—Cicero—Hugo Grotius—Thomas Hobbes—John Locke.	
6. Hand-Out 06 NEGARA DAN KONSTITUSI	55
Prawacana—KONSTITUSIONALISME—Gagasan tentang Konstitusionalisme—Negara Konstitusional—KONSTITUSI NEGARA—Pengertian Konstitusi—Kedudukan Konstitusi—Konstitusi sebagai Hukum Dasar—Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi—UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA—Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia—Proses Amandemen UUD 1945—Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945—SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA—Bentuk Negara Kesatuan—Bentuk Pemerintahan Republik—Sistem Pemerintahan Presidensial—Sistem Politik Demokrasi.	

BAGIAN KETIGA: DISKURSUS DEMOKRASI INDONESIA	62
7. Hand-Out 07 STUDI DASAR DEMOKRASI	63
HAKIKAT DEMOKRASI—Pengertian Etimologis Demokrasi—Pengertian Terminologis Demokrasi—Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan—Demokrasi sebagai Sistem Politik—Demokrasi sebagai Sikap Hidup—DEMOKRATISASI—Nilai (Kultur) Demokrasi—Lembaga (Struktur) Demokrasi—Ciri Demokratisasi—DEMOKRASI DI INDONESIA—Demokrasi Desa—Demokrasi Pancasila—Perkembangan Demokrasi Indonesia—SISTEM POLITIK DEMOKRASI—Landasan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia—Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Indonesia—Mekanisme dalam Sistem Politik Demokrasi Indonesia—Masa Depan Demokrasi—APPENDIKS: [1] PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA, [2] DEMOKRASI, KESEJAHTERAAN, DAN NEGARA KORPORASI	
8. Hand-Out 08 SEJARAH PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA	74
Prawacana—Sejarah dan Perkembangan Demokrasi—Demokrasi di Indonesia—Tantangan dan Harapan Demokrasi.	
9. Hand-Out 09 NEGARA, MASYARAKAT SIPIL & DEMOKRASI: SKETSA HIBRIDITAS	79
Prawacana—Rezim Hibrida—Masyarakat Sipil Pascafordisme.	
BAGIAN KEEMPAT: DISKURSUS MATERI DASAR KE-PMII-AN	85
10. Hand-Out 10 HISTORISITAS PMII & GENELOGI GERAKAN MAHASISWA	86
SEKILAS HISTORISITAS PMII—SEJARAH GEOPOLITIK-EKONOMI NASIONAL, INTERNASIONAL—Pelacakan Gerakan Mahasiswa Level Makro—Strategi Gerakan Sosial—Mahasiswa dan Globalisasi: Sebuah Kajian Sejarah—Legitimasi Sejarah Gerakan Mahasiswa—Gerakan Mahasiswa Mengusung Isu Pendidikan—Mahasiswa dan Pusaran Arus Neoliberalisme—Progresifitas Gerakan Mahasiswa—GENEOLOGI GERAKAN MAHASISWA INDONESIA—Akar Sejarah di Indonesia—Gerakan Mahasiswa Indonesia 1978—NKK/BKK—Latar Belakang Perlawanan—Penolakan Pembentukan BKK—GENESIS GERAKAN MAHASISWA 1998—Sejarah Gerakan Tahun 1998—Gerakan Mahasiswa 1998—Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)—Kelompok Diskusi dan Pers Mahasiswa—Badan Koordinasi Mahasiswa (BKM)—Gerakan Moral dan Gerakan Politik—GERAKAN ANTI ORDE BARU (GAOB)—Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)—Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)—Forum Komunitas Mahasiswa se-Jabotabek (FKMsJ/Forum Kota)—Front Nasional & Pusat Informasi & Jaringan Aksi untuk Reformasi (PIJAR)—HMI Majelis Penyelamatan Organisasi (MPO)—DINAMIKA GM PASKA MEI 1998—Pasca kejatuhan Soeharto 1998—GERAKAN MAHASISWA INTRA KAMPUS—Senat Mahasiswa—Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)—Unit Kegiatan Mahasiswa—Badan Perwakilan Mahasiswa—Badan Eksekutif Mahasiswa—Himpunan Mahasiswa Jurusan—Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus—ORGAN GERAKAN MAHASISWA 1998.	
11. Hand-Out 11 REKAM JEJAK GERAKAN MAHASISWA ISLAM PASCA REFORMASI	108
Napak Tilas—Pergerakan Perlawanan Kaum Santri—Terhadap Imperialisme dan kolonialisme (Abad ke 19)—Pergerakan Sosial, Dakwah dan Pendidikan—Gerakan Politik—Pergerakan Pelajar—Pergerakan Mahasiswa—Sekilas Gerakan 1998—Gerakan Mahasiswa Islam Pasca Reformasi—Harapan ke Depan.	
12. Hand-Out 12 NILAI DASAR PERGERAKAN PMII	113
Terminologi NDP—Fungsi NDP Kerangka Refleksi. Kerangka Aksi. Kerangka Ideologis—Kedudukan NDP—Rumusan NDP—Tauhid—Hubungan Manusia dengan Allah—Hubungan Manusia dengan Manusia—Hubungan Manusia dengan Alam—NDP: Landasan Gerak Berbasis Teologis—Pemaknaan dan Arti NDP—Fungsi, Peran dan Kedudukan NDP—	

Landasan Pijakan PMII—Landasan Berfikir PMII—Sumber Motivasi PMII—Rumusan dan Isi NDP—Ketuhanan atau Tauhid—Hubungan Manusia dengan Tuhan-Nya (Allah SWT)—Teologi sebagai Dasar Filosofi Pergerakan.

- 13. Hand-Out 13 AHLUSSUNAH WAL JAMA'AH** 117
- Kontroversi Aswaja—Ahlussunah Wal Jama'ah—Perebutan Atas Bendera Aswaja—Aspek Historisitas—Aspek Aswaja sebagai Manhaj al-Fikr—SEJARAH & DOKTRIN ASWAJA—Definisi & Historis Kemunculan Aswaja—Garis-Garis Besar Doktrin Aswaja—Doktrin Keimanan—Doktrin Keislaman—Doktrin Keihisanan—Metodologi Pemikiran (*Manhajul fikr*) Aswaja—*Tawasuth* (Moderat)—*Tawâzun* (Berimbang)—*Ta'âdul* (Netral dan Adil)—*Tasâmuh* (toleran)—Esensi Khilafah dalam Pandangan Aswaja—AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH SEBAGAI *MANHAJUL FIKR*—Prawacana—Membaca Sketsa Sejarah—Pengertian Ahlussunnah Wal Jama'ah—Tuntutan Dunia Baru—Formula Baru Aswaja—Peluang & Ancaman—Aswaja Sebagai *Manhaj Al-Fikr*—Prinsip Aswaja Sebagai *Manhaj*—Bidang Aqidah—Bidang Sosial Politik: Prinsip Syura (musyawarah), Prinsip Al-'Adl (*Keadilan*), Prinsip Al-Hurriyyah (*kebebasan*), Prinsip Al-Musawah (*Kesetaraan Derajat*) —Bidang Istinbath Al-Hukm (*Pengambilan Hukum Syari'ah*)—Bidang Tasawuf—Kongklusi.

- 14. Hand-Out 14 PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF** 137
- Prawacana—Paradigma Kritis-Transformatif PMII—Hassan Hanafi—Mohammad Arkoun—Dasar Pemikiran Paradigma Kritis Transformatif PMII—Apakah Paradigma itu?—Apakah yang disebut Teori kritis?—Pengertian 'Kritik' dalam Tradisi Teori Kritis—Kritik dalam pengertian Kantian—Kritik dalam Arti Hegelian—Kritik dalam Arti Marxian—Kritik dalam Arti Freudian—Tiga Jenis Utama Paradigma—Order Paradigm (Paradigma Keteraturan)—Conflic Paradigm (Paradigma Konflik)—Plural Paradigm (Paradigma plural)—Terbentuknya Paradigma Kritis—Kritis dan Transformatif—Transformasi dari Elitisme ke Populisme—Transformasi dari Negara ke Masyarakat. —Transformasi dari Struktur ke Kultur—Transformasi dari Individu ke Massa—Paradigma Kritis Transformatif (PKT) yang diterapkan di PMII?—Mengapa PMII memilih Paradigma Kritis Transformatif?.

BAGIAN KELIMA: DISKURSUS IDEOLOGI GENDER, FEMINISME DAN SEJARAH GERAKAN PEREMPUAN 147

- 15. Hand-Out 15 IDEOLOGI GENDER** 148
- Prawacana—Pengertian Gender—Perbedaan Sex dan Gender—Implikasi Perbedaan Biologis Terhadap Manusia—Laki-laki (Masculine)—Perempuan (Feminine)—Gender dan Marginalisasi Perempuan—Gender dan Subordinasi—Gender dan Stereotipe—Gender dan Kekerasan—Gender dan Beban Kerja (Double Burden)—Perpektif Teori Gender—Teori Psikoanalisa/ Identifikasi—Teori Fungsionalis Struktural—Teori Konflik—Teori-teori Feminis—Feminisme Liberal—Feminisme Marxis-Solisialis—Feminisme Radikal—Teori Sosio-Biologis—Kodrat Perempuan dalam Islam—Hak-Hak Dalam Bidang Politik—Hak-hak dalam Memilih Pekerjaan—Hak memperoleh pekerjaan.

- 16. Hand-Out 16 FEMINISME** 155
- Sejarah—Gelombang Pertama—Gelombang Kedua—Perkembangan di Amerika Serikat—Aliran Feminisme—Feminisme liberal—Feminisme Radikal—Feminisme Post-modern—Feminisme anarkis—Feminisme Marxis—Feminisme sosialis—Feminisme postkolonial.

- 17. Hand-Out 17 SEJARAH GERAKAN PEREMPUAN** 160
- Awal Gerakan Perempuan di Dunia—Aliran-Aliran Gerakan Perempuan—Feminisme ortodoks—Post-Femnisisme—Gerakan Perempuan Di Indonesia—Politik Gender dari Rezim Orba—Gerakan Perempuan Masa Reformasi.

18. Hand-Out 18 SEJARAH GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA SEBELUM KEMERDEKAAN	164
Politik Etis Adalah Pedang Bermata Dua—Kartini—Pembebasan Nasional—Periode Kedua Gerakan Perempuan—Nasionalisme vis-à-vis Feminisme?—SEKILAS PERJALANAN GERWANI (GERAKAN WANITA INDONESIA)—Pembentukan ini diawali dengan Kongres—Tujuan GERWANI—Latar Belakang Berdirinya GERWANI—Hubungan GERWANI dengan PKI—Keterlibatan GERWANI dengan peristiwa 1965	
19. Hand-Out 19 ISLAM & KETERTINDASAN PEREMPUAN	172
Prawacana—Ranah Domestik—Jilbab—'Public Sphere'.	
BAGIAN KEENAM: DISKURSUS PENDIDIKAN KAUM TERTINDAS	175
20. Hand-Out 20 GAGASAN PENDIDIKAN KRITIS PAULO FREIRE	176
Prawacana—Siapa Sebenarnya Paulo Freire?—Freirean, Pendidikan untuk Bebas dari Dominasi dan Penindasan!—Konsientisasi sebagai Tema Pokok Pendidikan Freire—Pendidikan yang Memanusiakan Guru dan Peserta Didik—Sebuah Postulat: Freire Membela yang Tertindas.	
21. Hand-Out 21 PARADIGMA PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP METODE DAN PRAKTEK PENDIDIKAN POLITIK	181
Prawacana—Paradigma Pendidikan Giroux and Aronowitz (1985)—Paradigma Pendidikan Konservatif—Paradigma Pendidikan Liberal—Paradigma Pendidikan Kritis—Tipologi Kesadaran Masyarakat Paulo Freire (1970)—Implikasi Paradigma Pendidikan dalam Metodologi—Kesadaran Magis (Magical Consciousness)—Kesadaran Naif (Naïval Consciousness)—Kesadaran Kritis (Critical Consciousness)—Implikasi Paradigma Pendidikan pada Pendekatan Pendidikan: Pedagogy v.s. Andragogy—Menuju Pendidikan untuk Transformasi Sosial—Postulat: Sebuah Kesimpulan Reflektif Pendidikan Kritis.	
22. Hand-Out 22 REFLEKSI KRITIS FREIRE; DARI TATANAN EKONOMI GLOBAL SAMPAI KAPITALISASI PENDIDIKAN	187
Hakikat Pendidikan Kritis Freire—Pendidikan Revolusioner: Melawan Kapitalisme—Refleksi dan Aksi.	
23. Hand-Out 23 EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN KRITIS	189
Prawacana—Epistemologi Islam & Hakikat Manusia—Paradigma Pendidikan—Habermas, Kiri Ideologi atas Kurikulum Emansipatoris—Epilog.	
24. Hand-Out 24 KOMODIFIKASI PENDIDIKAN SEBAGAI ANCAMAN KEMANUSIAAN	191
Prawacana—Pendidikan sebagai Hak asasi Manusia—Komoditisasi Pendidikan sebagai ancaman Kemanusiaan—Refleksi Pendidikan.	
25. Hand-Out 25 RELASI PENDIDIKAN, KEKUASAAN NEGARA DALAM JERATAN ARUS GLOBALISASI	195
Prawacana—Diskursus Pendidikan dan Kekuasaan—Dehumanisasi Rasionalitas Globalisasi—Visi Pendidikan di Era Globalisasi—Epilog.	
BAGIAN KETUJUH: DISKURSUS ISLAM DAN TEOLOGI PEMBEBASAN PROGRESIF	198
26. Hand-Out 26 SEJARAH TEOLOGI PEMBEBASAN AMERIKA LATIN (TAHUN 60-AN)	199
Prawacana—Terminologi Teologi Pembebasan—Belajar dari Teologi Pembebasan Amerika Latin—Apakah yang Dimaksud dengan Lingkaran Hermeneutik?—Teologi Pembebasan Islam, Adakah?—Ali Syariati dan Humanisme Islam—Asghar Ali Engineer dan Elemen Pembebasan dalam Qur'an—Hassan Hanafi dan Kiri Islam—Penutup.	

27. Hand-Out 27 ISLAM & TEOLOGI TRANSFORMATIF	210
Prawacana—Islam Tradisional—Islam Modernis—Islam Neomodernis—Islam Fundamentalisme—Islam Liberal—Islam Kiri/ Kiri Islam—Islam Alternatif, Rasional, Inklusif—Catatan Tambahan.	
28. Hand-Out 28 CIVIL SOCIETY: PERADABAN BARU INDONESIA	216
Rekonstruksi Paradigma Politik Islam dalam Perspektif Hubungan Negara dan Masyarakat—Civil Society: Rekonstruksi Gagasan Negara—Civil Society: Mencari Bentuk Peran Negara dan Masyarakat.	
29. Hand-Out 29 TEOLOGI PEMBEBASAN RASIONAL	223
Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita—Tentang Teologi Pembebasan Rasional.	
30. Hand-Out 30 TRADISI VERSUS MODERNISASI ISLAM	225
Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer—Gerakan Islam dan Kapitalisme Global: Membela Agama Tuhan.	
31. Hand-Out 31 TELAAH KRITIS PEMIKIRAN HASSAN HANAFI	227
Riwayat Hidup dan Kondisi Sosio-Kultural Mesir—Hassan Hanafi Masa kecil—Hermeneutika Pembebasan Hassan Hanafi Serta Sikap “LA” (Tidak) Terhadap Tradisi Barat.	
BAGIAN KEDELAPAN: DISKURSUS PEMIKIRAN HEGEL, MARX, GRAMSCI DAN HABERMAS	235
32. Hand-Out 32 LATAR HISTORIS PEMIKIRAN GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL	236
Prawacana—Kehidupan Dan Karya—Metode Dialektika.	
33. Hand-Out 33 IDE DASAR DAN DIALEKTIKA FILSAFAT GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL	237
Dialektika Hegel—	
34. Hand-Out 34 LATAR HISTORIS PEMIKIRAN KARL MARX	242
Riwayat Hidup Karl Marx—Manifesto Komunis—Sejarah Materialisme dan Dialektika—Teori Nilai Lebih—Komunisme dan Masyarakat Tanpa Kelas—Analisis.	
35. Hand-Out 35 PETA PEMIKIRAN KARL MARX (1818-1883): MATERIALISME DIALEKTIKA & MATERIALISME HISTORIS	246
Karl Marx dalam Lintasan Sejarah—Komunisme—Hakekat Manusia Menurut Karl Marx—Keterasingan & Emansipasi Manusia—Tendensi Akar Materialisme—Materialisme Dialektis—Materialisme Historis—Epilog.	
36. Hand-Out 36 PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG KRITIK EKONOMI-POLITIK	251
Prawacana: Tentang Das Kapital—Dasar Kritik Ekonomi-Politik—Sejarah Kapitalisme Eropa dan Asia—Tiga Fase Imperialisme—Kelas dan Kapitalisme.	
37. Hand-Out 37 PEMIKIRAN POLITIK ANTONIO GRAMSCI (1891-1937)	259
Prawacana—Konsep Hegemoni Gramsci—Hubungan kekuasaan—Nasional-kerakyatan—Revolusi Pasif.	
38. Hand-Out 38 TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI; MENGENAL HEGEMONI DARI KACAMATA ANTONIO GRAMSCI	264
Memahami pentingnya studi Gramsci mengenai Hegemoni—Negara dan Hegemoni menurut Gramsci—Akan Selalu Ada Hegemoni.	

39. Hand-Out 39 SEJARAH MAZHAB FRANKFURT; IMAGINASI DIALEKTIS DALAM PERKEMBANGAN TEORI KRITIS	267
Mazhab Frankfurt—Sejarah Mazhab Frankfurt—Fase Pertama—Teori Kritis dan Sejarah—Kritik Terhadap Positivisme—Bencana Modernitas.	
40. Hand-Out 40 TEORI KRITIK SOSIAL MENURUT JURGEN HABERMAS	270
Sejarah dan Prawacana Jurgen Habermas—Pemikiran Jurgen Habermas—Teori Epistemologi kaitannya dengan Karl Marx —Analisa Habermas tentang Kapitalis Modern—Jurgen Habermas untuk Menuju Teori Praktis—Rumusan Strategi Teori Epistemologi—Dogma Marxisme dan Kaitannya dengan Struktur Sosial—Pendekatan Historis Menurut Habermas—Kesimpulan.	
BAGIAN KESEMBILAN: DISKURSUS TEORI PEMBANGUNAN DUNIA KETIGA	274
41. Hand-Out 41 TEORI PEMBANGUNAN DAN KETERBELAKANGAN MARXIS DAN NEO-MARXIS	275
Konsekuensi Politik Teori Pembangunan—Keterbelakangan Marxis dan Neo-Marxis.	
42. Hand-Out 42 TEORI-TEORI PEMBANGUNAN; SEBUAH ANALISIS KOMPARATIF	283
Teori-teori Utama Pembangunan Ekonomi: Lima Pendekatan—Dekade 1950-an dan 1960-an—Dekade 1970-an—Aliran Pemikiran yang Pertama—Aliran Pemikiran yang Kedua—Dekade 1980-an—Akhir 1980-an dan Awal 1990-an—Teori Tahapan Linier —Rostow: Stages of Growth Models of Development (Model-model Pembangunan Pertumbuhan Bertahap)—Harrod-Domar Growth Model (Model Pertumbuhan Harrod-Domar)—Syarat-syarat yang Diperlukan dan yang Harus Ada: Beberapa Kritik Terhadap Model Pembangunan Bertahap—Necessary Condition (Syarat Perlu) —Sufficient Condition (Syarat Cukup)—Model Perubahan Struktural—Model Perubahan Struktural—Structural Transformation (Transformasi Struktural)—Lewis Two- Sector Model (Model Dua-sektor Lewis)—Revolusi Ketergantungan Internasional (International Dependence Revolution)—Model Ketergantungan Neokolonial (Neocolonial Dependence Model)—Model Paradigma Palsu (False-paradigm Model of Underemployment)—Tesis Pembangunan Dualistik—Kontrarevolusi Pasar Bebas Neoklasik (Neoclassical Free-market Counterrevolution);—Pasar Bebas—Pilihan Rasional—Ramah Terhadap Pasar—Teori Pertumbuhan Neoklasik Tradisional ('Lama') Traditional (Old) Neoclassical Growth Theory—Teori Pertumbuhan yang Baru (New or Endogenous Theory of Economic growth).	
43. Hand-Out 43 PERSPEKTIF TEORI MODERNISASI DAN TEORI DEPENDENSI	288
Prawacana—Gambaran Teori Modernisasi—Gambaran Teori Dependensi —Analisa—Kesimpulan.	
44. Hand-Out 44 PEMBANGUNAN, MODERNISASI, DAN PERMASALAHANNYA	292
BAGIAN KESEPULUH: DISKURSUS IDEOLOGI KAPITALISME DAN DEVELOPMENTALISME	294
45. Hand-Out 45 PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN KAPITALISME	295
Pengertian Kapitalisme—Sejarah Perkembangan Kapitalisme—Prinsip-Prinsip Dasar Kapitalisme—Tiga Asumsi Kapitalisme Menurut Ayn Rand—Akumulasi Kapital—Dorongan Untuk Mengakumulasi Kapital (Heilbroner)—Tinjauan Kritis Kapitalisme—Kekuatan Kapitalisme—Kelemahan Kapitalisme—Epilog: Sebuah Catatan Kritis.	
46. Hand-Out 46 GAGASAN DASAR KAPITALISME	300
Teori Dasar Ekonomi-Kapitalisme—Akar Historis Kapitalisme—Kapitalisme Awal (1500-1750)—Kapitalisme Klasik (1750-1914)—Kapitalisme Lanjut (Pasca 1914).	

47. Hand-Out 47 DEVELOPMENTALISME DAN DAMPAK INDUSTRIALISASI DI NEGARA DUNIA KETIGA (PERSPEKTIF EKONOMI-POLITIK)	308
Perspektif Diakronis Developmentalisme—Pembangunan Sebagai Konsep Perubahan Masyarakat—Relasi Pembangunan, Negara dan Masyarakat Dunia Ketiga—Akar Sejarah Developmentalisme—Developmentalisme dan Gagasan Dasar Kapitalisme—Industrialisasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Di Negara Dunia Ketiga—Eksplotasi Ekonomi dan Ketergantungan—Hegemoni Kultural, Ideologi, dan Politik—Hegemoni Pengetahuan—Kerusakan Lingkungan dalam Pembangunan.	
BAGIAN KESEBELAS: DISKURSUS GLOBALISASI DAN SEJARAH EKONOMI INTERNASIONAL	333
48. Hand-Out 48 GLOBALISASI EKONOMI & POLITIK INTERNASIONAL	334
Pengertian—Ciri Globalisasi—Teori Globalisasi—Sejarah Globalisasi—Globalisasi Perekonomian—Ciri Berkembangnya Globalisasi Kebudayaan—Reaksi Masyarakat: Gerakan Pro-Globalisasi.	
49. Hand-Out 49 GLOBALISASI; TEORI MODERNITAS KONTEMPORER	339
Prawacana—Perspektif Neo-Marxian Kellner tentang Globalisasi—Giddens tentang “Runaway World” dari Globalisasi—Beck dan Politik Globalisasi—Buman tentang Konsekuensi Globalisasi Manusia—Ritzer tentang “Globalization of —Nothing”/“Landscape” Appadurai—Ada lima lanskap dalam inti pemikiran Appadurai.	
50. Hand-Out 50 GLOBALISASI, SEJARAH EKONOMI INTERNASIONAL DAN KRISIS MASYARAKAT KAPITALISME	346
Globalisasi Ekonomi Internasional—Teori Sistem Dunia—Faktor Pendorong Globalisasi—Kekuatan Kaum Kapitalis Internasional—Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi—Dukungan Pemerintah Negara-negara Sedang Berkembang—Globalisasi dan Krisis Masyarakat Kapitalisme.	
51. Hand-Out 51 GLOBALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKONOMI INDONESIA DAN KRITIKNYA	359
Latar Belakang Globalisasi—Globalisasi Neo-liberal—Poin-poin Pokok Neo-liberal—Indonesia sebagai Korban Globalisasi—Perampokan Besar-besaran Bank Sentral—Tambal Sulam Kemiskinan Lewat Utang—Penghancuran Ketahanan Pangan—Penciptaan Pasar Tanah—Penguasaan Air Minum—Mafia Utang lewat Kredit Ekspor—Penjarahan Kekayaan Intelektual Masyarakat/ Komunitas—Globalisasi Utang—Globalisasi Privatisasi—Globalisasi Perdagangan.	
BAGIAN KEDUABELAS: DISKURSUS ANALISIS SOSIAL DAN STRATEGI GERAKAN SOSIAL	373
52. Hand-Out 52 PETA ANALISIS SOSIAL	374
Uraian tentang Paradigma Sosiologi—Teori Perubahan Sosial—Langkah Praxis Analisis Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat—Prawacana—BAGIAN I—Paradigma-paradigma Ilmu-ilmu Sosial—Ilmu Sosial Paradigma Dominatif Lawan Emansipatoris—Dari Paradigma Reformasi ke Transformasi: Peta Kesadaran Freire—Kesadaran Magis (magical consciousness)—Kesadaran Naif (naïval consciousness)—Kesadaran Kritis (critical consciousness)—Paradigma-paradigma Sosiologi—Paradigma Fungsionalis—Paradigma Interpretatif (Fenomenologi)—Paradigma Humanis Radikal—Paradigma Strukturalis Radikal—Catatan Kritis—BAGIAN II—Langkah Praxis Analisis Sosial—Apakah Analisa Sosial Itu?—Wilayah Analisa Sosial—Pendekatan Dalam Analisa Sosial—Bagaimana Hasil Analisa Sosial?—Batas Analisa Sosial—Siapa Pelaku Analisa Sosial?—Mengapa Gerakan Sosial Membutuhkan Analisa Sosial?—Signifikansi Analisa Sosial—Orientasi Analisa Sosial—	

Prinsip-Prinsip Analisa Sosial—Tahap-Tahap Analisa Sosial—Apa Yang Penting Ditelaah dalam Melakukan Analisa Sosial—Model Telaah dalam Analisa Sosial: Tradisional, Liberal, Transformatif—Tahap Penarikan Kesimpulan Analisa Sosial—Dasar Penarikan Kesimpulan Analisa Sosial.

53. Hand-Out 53 TEKNIK LOBBY DAN NEGOSIASI	391
Teknik Negosiasi Untuk Sukses—Kuadran Kalah-kalah (Menghindari konflik)—Kuadran Menang-kalah (Persaingan)—Kuadran Kalah-menang (Mengakomodasi)—Menang-menang (Kolaborasi)—Pentingnya Sikap Terhadap Perselisihan Dan Konflik—Mengembangkan Filosofi Sama-Sama Menang Dalam Negosiasi—Pokok masalah yang dinegosiasikan—Persiapan negosiasi—Mencapai suasana yang tepat—Taktik-Taktik Negosiasi—Gaya-gaya negosiasi—Mencari penyelesaian—Situasi fall back—Perilaku dalam negosiasi—Mengakhiri Negosiasi—Tahapan-tahapan Negosiasi—Langkah-langkah Bernegosiasi—Persiapan—Pembukaan—Zona Tawar Menawar (The Bargaining Zone)—The “It’s a Game” Poker School—The “Do the Right Thing Even If It Hurts” Idealist School.	
54. Hand-Out 54 TEKNIK AGITASI DAN PROPAGANDA	400
Pengantar—Agitasi—Propaganda—Retorika.	
55. Hand-Out 55 PENGORGANISASIAN MASYARAKAT	403
Prawacana—Landasan & Tujuan pengorganisasian—Landasan Pengorganisasian—Tujuan Pengorganisasian—Manfaat Melakukan Pengorganisasian—Kerja Pengorganisasian (Pengorganisir)—Mengapa Warga Mengorganisir Diri atau Menolak untuk itu?—Dimana melakukan Kerja-Kerja Pengorganisasian—Apa yang harus Kita Kerjakan dalam Pengorganisasian?—Membangun Jaringan.	
REFERENSI PRIMER	407
TENTANG PENULIS	417

DAFTAR DIAGRAM

Hand-Out 11 REKAM JEJAK GERAKAN MAHASISWA ISLAM PASCA REFORMASI	108
▪ Diagram 1: Gerakan Organisasi Politik	109
 Hand-Out 14 PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF	137
▪ Diagram 1: Order Paradigm (Paradigma Keteraturan)	143
▪ Diagram 2: Conflic Paradigm (Paradigma Konflik)	144
▪ Diagram 3: Plural Paradigm (Paradigma Plural)	144
 Hand-Out 36 PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG KRITIK EKONOMI-POLITIK	251
▪ Diagram 1: Indeks Potensi Kekuatan Industri pada Beberapa Negara Eropa, 1980 (Nilai Absolut)	255
 Hand-Out 47 DEVELOPMENTALISME DAN DAMPAK INDUSTRIALISASI DI NEGARA DUNIA KETIGA (PERSPEKTIF EKONOMI-POLITIK)	308
▪ Diagram 1: Analisa Struktural Developmentalisme	324
 Hand-Out 52 PETA ANALISIS SOSIAL	374
▪ Diagram 1: Peta Analisis Kesadaran Masyarakat, Paulo Freire (1970)	380
▪ Diagram 2: Peta Analisis Sosial Barnet & Morgan (1979)	383
▪ Diagram 3: Peta Aktivitas Analisis Sosial, H.A. Taufiqurrahman (1999)	386
▪ Diagram 4: Peta Proses Analisis Sosial, H.A. Taufiqurrahman (1999)	387
▪ Diagram 5: Peta Kerangka Pikir Analisis Sosial	388
▪ Diagram 6: Model-Model Perubahan dan Implikasinya	389
▪ Diagram 7: Model Perubahan Interpretatif	389
▪ Diagram 8: Penmpang dari Sisi Analisis Piringan Kompleksitas Sosial	390



KARYA INI SAYA DEDIKASIKAN UNTUK

Untuk Para Pendiri Republik Indonesia dan Para Alim Ulama

Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Aidit, Nyoto, Hadratus Syaikh Kiai Hasyim Asy'ari, Ali Syariati, Asghar Ali Engineer, Hasan Hanafi, Arkoun, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Junaidi, Imam Ghozali, dll.

Untuk Semua Guru Intelektual

Sokrates, Plato, Aristoteles, Nikolas Copernicus, Johanes Kepler, Galileo Galilei, Nicolo Machiavelli, Thomas More, Francis Bacon, Rene Descartes, Blaise Pascal, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, John Locke, GW Leibniz, Cristian Wolff, George Berkeley, David Hume, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, JC Fichte, FWJ Schelling, GWF Hegel, Arthur Schopenhauer, August Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, William James, John Dewey, Henry Bergson, Edmund Husserl, Max Scheller, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Herbert Marcuse, Ibnu Khaldun, Arnold Toynbee, Patrice A. Sorokin, Emile Durkheim, Friedrich Engels, Talcott Parsons, Neil Smelser, Everett E. Hagen, David McClelland, Thorstein Veblen, WF Ogburn, Al-Ghazali, Mohammed Arkoun, Paulo Freire, Michel Foucault, Ivan Illich, Jurgen Habermas, Neil Postman, Henry Giroux, dll.

Untuk Kedua Orang Tuaku

Kedua orang tuaku Bapak H. Muhammad Nur Sayyidi, Ibunda tercinta Hj. Khamidah Nurul Jannah, Kakakku Almarhumah Komyati Azizah, serta kepada semua intelektual, akademisi, aktivis, pelajar, semua pecinta ilmu pengetahuan.

Untuk Para Aktivis Gerakan

Untuk mereka yang telah membunuh egoisme dan watak sektarianisme.

Untuk mereka yang telah menumbalkan dirinya pada realitas sosial. Untuk mereka yang mengorbankan dirinya demi kaum miskin dan tertindas. Untuk mereka yang telah mendedikasikan dirinya demi meneruskan ruh perjuangan pada pahlawan, para syuhada, para alim ulama. Untuk mereka yang telah menitikan dirinya demi perjuangan ummat manusia disekeliling mereka. Untuk mereka yang tidak pernah patah semangat, yang terus-menerus berproses demi mencapai dan menemukan eksistensi dirinya. Untuk mereka yang tidak rela nilai-nilai kemanusiaan dinista oleh sebuah rezim kekuasaan yang aristokratik. Untuk mereka yang tidak pernah tunduk pada rezim tiranik. Untuk mereka yang cinta kebenaran dan keadilan.

Untuk mereka para martir revolusi sosial.

Untuk Seseorang yang Mengusik Hatiku

Engkaulah laut pada perahuku—karena dirimulah yang selalu memberikan harapan, selalu menuntun dan dengan sabar menunjukkan padaku cita-cita mulia. Engkaulah layar pada perahuku—karena dirimulah yang telah memberi dorongan dengan tetes air mata. Engkaulah nahkoda pada perahuku—karena dirimulah yang telah mengarahkan diriku dan menunjukkan pada jalan yang diridhoi oleh-Nya. Buat laut, layar dan nahkodaku, ketika perahu terombang-ambing nyaris kehilangan arah, teruslah menatighi langkah hidupku tuk sebuah harapan cita-cita mulia. Jangan mengharapkan balasan cinta dari orang yang engkau cintai, dan tunggulah sampai cinta berkembang dihatinya. Ketika cinta telah bersemayam dihatinya, maka dia akan memberikan cinta tanpa engkau memintanya. Tetapi jika tidak, berbahagialah karena cinta telah tumbuh dihatimu. Karena pecinta sejati selalu berusaha memberi tanpa meminta dan berharap. Janganlah mencintai wanita karena kecantikannya, tetapi buatlah dia merasa cantik karena engkau mencintainya.

PENGANTAR REFLEKTIF PENULIS



Minimnya kelompok *radikal-transformatif* di kampus-kampus merupakan kegelisahan sendiri apakah transformasi sosial dapat mungkin terjadi lagi. Padahal keyakinan untuk menciptakan perubahan itu justru diharapkan terjadi lewat gerakan mahasiswa ini. Tragisnya, justru pada

level gerakan sosial ini muncul *fragmentasi* dalam gerakan-gerakan reaksioner yang elitis. Hal ini mungkin terjadi karena keringnya ruang mediasi intelektual sebagai basis *dialektika-refleksi* atas sekian aksi yang dilakukan. Sebuah hal yang mustahil kerangka kerja *revolusioner* itu akan tercipta tanpa adanya sebuah transformasi wacana yang massif dan tradisi dialektis yang tertuang dalam narasi kaderisasi yang sistemik.

PMII sebagai komunitas ideologis yang berbasis kaum *tradisionalis-radikal*, harus mampu menjawab tantangan-tantangan zaman atas sekian proses eksploitasi, dehumanisasi, ketimpangan dan sekian persoalan lain yang tidak saja membutuhkan alat analisa yang jeli, tetapi juga proses itu bergulir tidak secara terlihat dengan kasat mata. Mustahil kita dapat menganalisa aras sosial apabila tanpa gagasan dasar kaderisasi formal dan informal yang memiliki bobot pengetahuan dan pembacaan yang jelas. Sehingga issue apapun yang sedang diusung, merupakan issue actual, strategis dan populis, bukan issue elitis, usang dan hanya menjadi tunggangan kepentingan politik pragmatis.

Pertanyaannya adalah apakah PMII sudah mampu mengusung sekian mandat sosial yang diembannya? dan apakah PMII sudah mampu memposisikan organisasi dalam proses transformasi sosial? ataukah hanya menjadi bagian dari reproduksi sosial? Beberapa kegelisahan ini harus bisa dijawab dengan kaderisasi sistemik dengan wacana-wacana yang dikembangkan dengan melihat kebutuhan kader, organisasi dan bangsa.

Pelatihan Basis di PMII merupakan upaya pembentukan kader yang tangguh dan mampu menjawab tantangan zaman. Prinsip dasar dalam melakukan pengkaderan adalah upaya *liberasi* sebagai manifestasi kebebasan manusia dalam bertindak dan berpikir, sehingga ada kesesuaian antara kebenaran berpikir dan kebenaran bertindak. Basis kebenaran itu sendiri tertuang dalam ideologi PMII, paradigma gerakan dan *platform* gerakan sosial. PMII harus mengedepankan nilai-nilai independensi dalam arti bahwa PMII jauh dari kepentingan politik sesaat.

Ruang mediasi intelektual bagi kader merupakan hal yang sangat *signifikan*, kebutuhan ini menjadi mendesak untuk dilakukan karena pada dasarnya seluruh kegiatan PMII berorientasi pada pemberdayaan intelektual. Ketika ruang pengetahuan kader kosong, nisbi, nihil, bahkan tidak ada *tradisi dialektika*, maka yang terjadi adalah stagnasi gerakan pemikiran dan gerakan sosial. Tidak mungkin ketika ruang pengetahuan kosong akan terjadi gerakan revolusioner, yang terjadi hanyalah gerakan reaksioner yang elitis. Organisasi sebagai suatu sistem yang menyeluruh, membutuhkan *basis kontinue* yang *militant* dan *ideologis*, hal ini tidak akan terwujud tanpa ada gagasan dasar kaderisasi formal atau informal yang mempunyai bobot pengetahuan.

Pertanyaan fundamental bagi sebuah ruang mediasi intelektual adalah; pengetahuan apa yang ditransformasikan kepada kader? Hal ini penting untuk dijawab karena tidak semua pengetahuan bisa dijadikan kerangka kerja revolusioner, sebagaimana terjadinya *Revolusi Rusia 1917* yang menuntut keadilan dimana tidak ada penghisapan manusia oleh manusia lain, juga mempunyai dasar pengetahuan dan tidak lain adalah *ajaran marxisme*. Nah, ruang gerak sosial juga membutuhkan dasar pengetahuan sosial yang jelas. Fragmentasi gerakan di aras sosial misalnya, sangat mungkin terjadi karena gerakan di level sosial politik tidak memahami posisi masing-masing dan apa pengaruhnya.

Apakah mungkin kader yang tolol dan dungu dengan segudang kemiskinan pengetahuan dalam otaknya mampu melakukan perubahan! Nampaknya suatu hal yang mustahil. Dapat kita refleksikan statemen Seorang tokoh komunis, Nyoto—bahwa pengetahuan akan menuntun kepada gerakan nyata—dalam Makalah Kulianya "*Filsafat Proletariat*" di Universitas Rakyat, Jakarta, 29 Juni

1961: *"Permasalahan revolusi sama sekali tidak mudah dan tidak sederhana. Hanya dengan senjata filsafat yang benar-benar revolusionerlah permasalahan revolusi itu bisa dijawab dengan tepat".* Jelaslah dari statemen tersebut, semua gerakan revolusioner membutuhkan dasar pengetahuan. Dan mudah-mudahan—untuk tidak mengatakan tidak mungkin—bahwa pelatihan ini bisa menciptakan kader yang bisa mengawal perubahan, mengawal segala bentuk penindasan kemanusiaan, penghisapan ekonomi rakyat, pemasungan kebebasan bertindak, eksploitasi kelas sosial—menuju keadilan hakiki.



Renungan ini saya tulis untuk mereka yang faham dan percaya, bahwa kuliah hanyalah satu tempat singgah menghabiskan luang waktu yang tersisa, sekedar bersuka ria selagi usia masih muda; *gaudeamus igitur iuvenusdum sumus*.

Makin sering saya kuliah maka semakin buntu jalan pikiran ini. Otak ini menjadi semakin picik dan busuk, karena otak ini serasa disumbat tumpukan diktat sakral yang selalu ditenteng oleh dosenku; yaitu dewa kesucian yang tidak pernah salah. Semua ucapannya bagaikan kitab suci yang tidak terbantahkan. Dosenku adalah mahaguru yang tahu segalanya dan saya adalah manusia tolol dan penurut. Diktat yang telah usang dimakan rayap terus dijejalkan sampai mulutku penuh dan mau muntah. Ketika merasakan kejenuhan intelektual, saya teringat refleksi kritis A.S. Neil (1883-1973), beliau mengatakan; *"Saya percaya bahwa memaksakan apapun dengan kekuasaan adalah salah. Seorang anak seharusnya tidak melakukan apapun sampai ia mampu berpendapat—pendapatnya sendiri—bahwa itulah yang harus dilakukan."*

Bayangkan!! Suasana belajar yang menyebalkan harus saya jalani selama kurang lebih 1770 hari atau sekitar lima tahun. Apakah selama lima tahun yang telah saya jalani sudah bisa menjamin menjadi manusia sesungguhnya. Saya rasa belajar di kampus justru membodohkan, karena dosenku selalu memberikan instruksi dan peraturan ketat. Sampai-sampai lidah ini terasa kaku, karena selama lima tahun tidak boleh berbicara, apalagi bernada membangkang dan mengkritik. Ternyata sikap dosen yang anti-dialogis telah sukses menghantarkan saya menjadi sarjana tolol, lugu dan tidak tahu diri. Saya tidak pernah diberi kesempatan untuk belajar mempertanyakan sesuatu yang membuat saya ragu akan entitas kebenaran.

Apa sebenarnya belajar itu? Sepertinya dosenku belum pernah berkenalan dengan pemikiran almarhum Heidegger (1889-1976); bagi Heidegger, *"Belajar berarti membuat segala sesuatu yang kita jawab menjadi hakikat-hakikat yang selalu menunjukkan dirinya sendiri kepada kita setiap saat..."*. Mengajar lebih sulit daripada belajar, karena apa yang dituntut dari mengajar: membiarkan belajar.

Setelah melakukan refleksi kritis saya baru sadar setelah keluar dari gedung perkuliahan, ternyata gedung yang selama ini saya tempati adalah gudang mitos. Karena dalam pelajaran dosenku, perbedaan mitos dan realitas menjadi kabur. Sangat ironis memang. Benar-benar membosankan. Sebagaimana telah diekspresikan oleh Ivan Illich (1926-2002), bahwa; *"Sistem sekolah saat ini menjalankan tiga fungsi umum gereja sepanjang sejarahnya, yakni menjadi gudang mitos masyarakat, pelembagaan kontradiksi dalam mitos tersebut, dan lokus ritual yang mereproduksi serta menyelubungi perbedaan antara mitos dan realitas"*.

Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada semua dosenku yang telah berjasa sebagai teman belajar, secara tidak sadar sebenarnya kalian juga yang telah menjerumuskan saya pada lembah nista manusia dungu, dimana saya harus menalan mentah-mentah teori basi, metodologi berfikir yang rancu, menelisik hakikat realitas yang melulu normatif, dan harapan-harapan hidup yang utopis. Saya juga masih merasakan kupingku saat ini masih panas, aku betul-betul muak dengan kata-kata manis setiap kali kuliah karena terlalu bijak dan menggurui. Tetapi saya tetap berdo'a semoga jasa kalian mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan. Saya juga berdo'a agar segera diikuti menjadi manusia mulia dan bertaqwa, dan semoga tersesat kejalan yang benar dan diridhoi-Nya.

Rasanya bisa bernafas untuk menghirup udara bebas, karena telah keluar dari penjara yang selama ini memasung kebebasanku untuk berekspresi dan berkoar-koar tentang wacana kiri, idealisme dan aktivitas politik subversif. Manusia-manusia garang penjual diktat telah hilang dari

aktivitas keseharianku. Mimpi buruk kuliah telah musnah seiring penobatan saya sebagai sarjana, kemudian menjadi pengisi data statistik para penganggur dan menambah beban negara. Saya telah keluar dari perkampungan para birokrat akademisi yang formalistik. Aku muak dengan gelar sarjana yang sering digunakan orang untuk mengejar pangkat, jabatan dan popularitas. Tetapi biarlah gelar sarjanaku itu menempel sebagai hiasan semu seorang mahasiswa untuk sekedar menghibur dan menipu diri. Dasar tolol.

Selama berdialektika di organisasi saya berkenalan dengan pemikiran filosof barat, yaitu Friedrich Nietzsche (1844-1990). Nietzsche pernah berfikir "Tuhan telah mati" dan keyakinannya, bahwa karena itu kita harus menciptakan manusia baru seorang "Adimansia" (Übermensch). Kalau anda masih mempunyai akidah segeralah beribadah, agar hidupmu mendapatkan berkah. Nietzsche melalui perenungannya sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita agar manusia tidak hanya pasrah dan berdo'a, tetapi manusia sebenarnya juga mempunyai kekuatan dan kehendak untuk menentukan eksistensi dirinya.

Selanjutnya patut kita pertanyakan, apakah sarjana itu menjamin bahwa mereka mempunyai kesadaran penuh untuk membela manusia-manusia tertindas? Atau justru para sarjana nantinya bangga dengan sepatu mengkilap, berjas dan berdasi kemudian berjalan-jalan dikantor menenteng seberkas data kemiskinan yang akan dijual kepada modal. Dan mungkin juga ada yang mempunyai karir akademik sukses dengan sederet gelar panjang disandangnya, tetapi mata hatinya buta melihat ketimpangan sosial. Mereka semua hanya akan menjadi manusia najis. Refleksi saya ini sejalan dengan pernyataan Tan Malaka sebagaimana disitir oleh Franz Magnis-Suseno; "Dalam negara ini akan terdapat tugu peringatan manusia najis, penghianat negara, penjual rakyat, kusta masyarakat. Puluhan, ya ratusan nama dan gelar manusia najis yang dituliskan disemua sisi tugu raya ini. Yang termasuk golongan manusia najis nomor satu ialah mereka yang langsung membantu penjajah, penindas, penghisap dan pembunuh rakyat Indonesia." Semoga aku bukan bagian dari sarjana najis yang akan menjadi kusta masyarakat.

Sebagai perenungan terakhir untuk menenangkan jiwa yang gelisah dan terasing, Kahlil Gibran Sang Penyair termasyhur dari Libanon Utara melukiskan; "Kehidupan adalah sebuah pulau yang memiliki batu-batu harapan, yang memiliki batu-batu impian, yang memiliki bunga-bunga kesepian, yang memiliki musim semi kehausan—ditengah lautan kesunyian dan pengasingan."



Atas nama solidaritas dan persahabatan, terima kasih atas amanah dan kepercayaan. Saya tidak pernah menaruh dendam kesumat dan amarah pada siapapun, sebesar apapun kesalahan orang itu. Bagi saya watak penghianat, dusta, sombong, busuk dan picik: karena watak egosentris dan mau menang sendiri. Berfikirlah sebelum bertindak apapun.

Ketahuilah sahabat, sudah lama ku membunuh perasaanku, karena ku sadar hal ini bisa menjadi penyakit bagi persahabatan, proses organisasi dan solidaritas gerakan. Sudah terlalu sering kebbaikanku dipandang negatif dan dibalas dengan cacian dan kesombongan. Saya tidak pernah patah semangat, takut dan bermuram durja atas semua masalah dalam proses hidupku. Jangan pernah sebut aku sahabatmu, jika dirimu jauhi aku saat aku dalam keadaan susah dan salah. Atas nama persahabatan sejati, mulai saat ini dan detik ini, marilah kita belajar menjadi manusia bernalar dan dewasa.

Maaf sahabat, ku berusaha menjauh dari watak pengecut dan pendusta. Jangan pandang rendah keseriusanku dalam proses transformasi nilai dan pengetahuan. Ku tidak pernah menggadaikan proses organisasi dengan urusan picik tentang perasaan yang absurd. Ku muak dengan kata maafmu, munafik jika hanya berhenti di lisan. Maafkanlah dirimu sendiri, hormatilah dan hargailah dirimu!! Maaf, ku hanya berusaha disiplin dalam berfikir, berbuat dan bertindak. Ku sadar, bahwa ku tidak lebih mulia dari dirimu. Dengan segala kerendahan hati, terimalah sahabatmu yang penuh dengan kekurangan ini.



Setelah sekian tahun saya menjadikan kampus UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada dengan hiruk pikuk Kota Yogyakarta sebagai ruang eksperimentasi gagasan dan pengetahuan, saya mengalami kekeringan spiritual. Ternyata ruang dialektika pengetahuan disekian komunitas yang saya masuki atau saya ciptakan hanya sebuah ruang kamuflase, sementara hati, jiwa dan kebutuhan spiritual ini menjadi terabaikan. Bahkan ketauhidan saya sempat beku dan hampir mati setelah saya berkenalan dengan pemikir-pemikir kiri, misalnya saja uraian pemikiran Karl Marx yang begitu ilmiah dan argumentatif, tentang emansipasi manusia dari keterasingan agama, kritik terhadap masyarakat kapitalisme, materialisme tinjauan filsafat islam, sampai antropologi metafisika hakekat manusia. Otak saya juga semakin meragukan segala sesuatu setelah saya berkenalan dengan pemikiiran Sokrates, Plato, Aristoteles, Nikolas Copernicus, Johaner Kepler, Galileo Galilei, Nicolo Machiavelli, Thomas More, Francis Bacon, Rene Descrates, Blaise Pascal, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, John Locke, GW Leibniz, Cristian Wolft, George Barkeley, David Hume, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Immanuelt Kant, JC Fictte, FWJ Schelling, GWF Hegel, Athur Scopehauer, August Comte, John Struat Mill Herbert Spencer, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Soren Kiegarard, Friedrich Nietzsche, William James, John Dewey, Henry Bergson, Edmund Husserl, Max Scheller, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Herbert Marcus, Ibnu Khaldun, Arnold Toynbee, Patirin A. Sorikin, Emile Durkheim, Friedrich Engels, Talcots Parson, Neil Smeller, Everett E. Hagen, David McClelland, Thorstein Veblen, WF Orgburn, Al-Ghozali, Moammed Arkoun, Paulo Freire, Michel Foucault, Ivan Illich, Jurgen Habermas, Neil Posman, Henry Giroux, dll.

Setelah semua wacana itu saya konsumsi saya menjadi semakin tergugah, mengapa tuhan ada, mengapa manusia ada, mengapa alam ada, mengapa kita bisa berfikir tentang alam, apakah hakikat kehidupan, mengapa ada ketertindasan dimana-mana, mengapa orang kaya selalu tertawa dengan lumuran dosanya, segudang pertanyaan muncul sebagai akibat nihilisme dan common sense. Tahukah engkau sahabat, dirimu akan menjadi sia-sia ketika engkau tidak selalu berfikir akan kekurangan dan kepalsuan dirimu. Apakah engkau sudah merasa menjadi manusia yang fitrah atau engkau masih terlalu banyak kekurangan dan kelemahan. Namun aku percaya bahwa sahabatku orang yang selalu berefleksi dan progressif untuk mencari aktivitas yang produktif dan kreatif.



Buku panduan pelatihan basis untuk gerakan sosial: *Manifesto Wacana Kiri; Membentuk Intelektual Organik*—Edisi Revisi, yang sedang anda baca ini merupakan sebuah akumulasi pergulatan intelektual penulis dengan buku, pemikiran, realitas sosial dan sebuah ambisi untuk mewujudkan amunisi pengetahuan. Eksponen intelektual yang genuin, tangguh, tidak udah patah, militan, ideologis dan mampu menjadikan dirinya sebagai mata rantai pengetahuan. Atas terbitnya buku panduan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di organisasi gerakan yang telah terlibat dalam proses dialektika, tanpa mampu menyebut satu-persatu. []

***Dipenghujung Tahun 2009, Blimbingsari-Bulaksumur-Yogyakarta
Diruang kontemplasi dan Refleksiku***

**Dzulhijjah 1433 H/ November 2012 M
Ruang Refleksi & Perenungan Spiritual
PONPES AL-MADANIYYAH AL-ISLAMIYYAH AS-SALAFIYYAH,**

NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, S.Pd.I., M.A.



KISAH CINTA TAN MALAKA:

*Romantisme Sang Kiri Nasionalis di Tengah Perjuangan
Merebut Kemerdekaan 100% Menuju Republik dari
Keterpasungan Kolonialisme dan Imperealisme*

Kisah cinta Tan Malaka sama tragis dengan hidupnya yang klandestin. Mengidamkan sosok Kartini, ditolak dua kali oleh perempuan yang sama.

RAPAT tetua adat Nagari Pandan Gadang, Lima Puluh Kota, berlangsung sengit. Ibrahim, yang belum genap 17 tahun, menolak gelar datuk. Padahal dia anak lelaki tertua keluarga Simabur, yang harus memangku gelar itu sebelum ayahnya meninggal. "Ibunya memberi pilihan: menolak gelar atau kawin," kata Zulfikar Kamaruddin, 60 tahun, keponakan Ibrahim, kepada Tempo pada Juli lalu.

Ibrahim menyerah dan menerima gelar tertinggi dalam adat Minang itu. Maka nama lengkapnya menjadi Ibrahim Datuk Tan Malaka. Sebagai datuk, ia membawahkan keluarga Simabur, Piliang, dan Chaniago. Pesta penobatannya, pada 1913, digelar tujuh hari tujuh malam.

Pesta itu sekaligus penyambutan orang rantau yang baru lulus sekolah raja (Kweekschool) di Bukittinggi dan pesta perpisahan. Sebab, datuk muda itu akan segera ke Belanda. Ibrahim mendapat beasiswa sekolah guru di Rijkskweekschool, Haarlem. Hal ini berkat jasa baik guru Belanda yang mencintainya: Gerardus Hendrikus Horensma, setelah uang saweran orang sekampung tak cukup untuk ongkos Ibrahim.

Rupanya, penolakan Ibrahim terhadap perjodohan yang diatur Sinah, ibunya, ada bersebab. Telah ada gadis lain di hatinya: Syarifah Nawawi, anak keempat Nawawi Sutan Makmur—guru bahasa Melayu di Kweek yang membantu Charles van Ophuijsen menyusun Kitab Logat Melajoe (dikenal sebagai tata bahasa Ophuijsen) pada 1901.

Syarifah adalah perempuan Minang pertama yang mengecap pendidikan ala Eropa. Ada 75 murid di sana. Menurut Gedenkboek Kweekschool 1873-1908, Syarifah dan Ibrahim angkatan 1907. Jumlah murid di kelas mereka 16 orang. Syarifah menjadi kembang karena satu-satunya perempuan di sekolah yang kini menjelma jadi SMA Negeri 2 Bukittinggi itu. Dan Ibrahim satu dari tiga siswa yang melanjutkan studi ke Belanda.

Ibra dan Syarifah pun terpisah ribuan mil. Tapi itu bukan halangan bagi sang Datuk untuk terus menjalin hubungan. Ia rajin mengirim surat kepada Syarifah, yang melanjutkan studi sekolah guru di Salemba School, Jakarta. Tapi cinta itu ternyata bertepuk sebelah tangan.

Menurut sejarawan Belanda yang menulis biografi Tan Malaka, Harry A. Poeze, Syarifah tak pernah sekali pun membalas surat-surat itu. "Tan Malaka? Hmm, dia seorang pemuda yang aneh," begitu katanya kepada Poeze sewaktu mereka bertemu pada 1980. Syarifah tak menjelaskan di mana keanehan orang yang menaksirnya itu.

Syarifah kemudian menikah dengan R.A.A. Wiranatakoesoema, Bupati Cianjur yang sudah punya lima anak dari dua selir, pada 1916. Maka muncullah anekdot di keluarga dan di kalangan penulis sejarah Tan Malaka: Tan menjadi Marxis karena kegagalannya dalam cinta pertama. Dia menjadi amat antiborjuis dan feodal untuk melawan orang yang merebut pujaan hatinya. "Tapi ini cuma anekdot," kata sejarawan Bonnie Triyana.

Tan kemudian mulai membuka hatinya untuk gadis lain: Fenny Struyvenberg, mahasiswi kedokteran berdarah Belanda. Dia terlihat sering datang ke pondokan Tan. Dengan Fenny, Tan kabarnya menjalin hubungan cukup serius. Fenny bahkan sempat ke Indonesia menyusul Tan. Sayang, tak ada banyak catatan dan keterangan soal hubungan mereka. Fenny keburu meninggal saat akan ditemui Poeze.

Di Rusia, sewaktu menghadiri sidang Komunis Internasional dan tinggal tiga tahun, Tan diberitakan sempat berhubungan dengan seorang perempuan sana. Menurut Poeze, ada satu koran yang menulis hubungan percintaan Tan dengan perempuan tersebut.

Tan Malaka memang selalu punya hubungan mendalam dengan perempuan di setiap negara yang ia kunjungi. Di balik cerita heroiknya berpindah dari satu negara ke negara lain dalam pelarian, selalu muncul sosok perempuan: yang menolong, yang merawat tubuhnya yang sakit, atau sekadar teman.

Dalam memoarnya, *Dari Penjara ke Penjara*, Tan menulis nama-nama perempuan di sekitar hidupnya. Tapi tak ada penjelasan apakah hubungan itu juga dilandasi cinta. Di Kanton, misalnya, ia menyebut “Nona Carmen”, anak perempuan Rektor Universitas Manila yang memberi petunjuk masuk Filipina, merawat, dan mengajarnya bahasa Tagalog. Di Cina, pada 1937, ada gadis 17 tahun yang ia sebut AP sering datang mengadu dan meminta diajari bahasa Inggris.

Sesudah Proklamasi 1945, Tan yang tak lagi klandestin tersiar punya hubungan serius dengan Paramita Rahayu Abdurrachman. Perempuan 25 tahun ini keponakan Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo. Dia tinggal di paviliun rumahnya di Cikini. Tan sering datang ke sana.

Saking lengketnya mereka, teman-teman dekatnya menganggap Paramita tunangan Tan. Padahal umur mereka terpaut 26 tahun. Kepada Poeze yang menemui Paramita pada 1980, perempuan yang tak menikah hingga meninggal pada 1986 itu mengaku mencintai Tan. Namun “pertunangan” itu tak sampai ke jenjang pernikahan.

Situasi politik membuat Tan kembali harus lari dan bersembunyi dari kejaran Kempetai Jepang. Hubungan mereka pun retak. Lagi pula, kata Paramita kepada Poeze, Tan Malaka orang yang hidup tak normal. “Dia kelewat besar buat saya,” katanya. “Dia menginginkan saya seperti sosok Raden Ajeng Kartini.”

Ironisnya, ibu Paramita tak lain teman karib Syarifah Nawawi. Minarsih Soedarmo-Wiranatakoesoema, anak bungsu Syarifah, sama-sama aktif di Palang Merah Indonesia dengan Paramita. “Ibu saya cuma bilang kenal Tan sewaktu di Kweekschool,” kata Minarsih, 84 tahun. Paramita, sebetulnya, waktu itu menaksir pemuda Hatta, yang juga sering berkunjung ke rumah Soebardjo.

Syarifah sudah menjadi janda dengan tiga anak. Wiranatakoesoema menceraikannya pada 1924 karena menganggap Raden Ayu ini tak bisa mengikuti tata krama Sunda yang amat feodal. Cinta lama Tan pun bersemi kembali. Menurut Minarsih, Tan mendatangi ibunya dan meminang, tapi lagi-lagi ditolak.

Lalu siapa perempuan yang betul-betul dicintai Tan Malaka seumur hidupnya? Syarifah? Sepertinya bukan.

Syahdan, suatu hari Adam Malik—koleganya di Persatuan Perjuangan yang menjadi wakil presiden pada zaman Soeharto—bertanya kepada Tan Malaka, “Bung, apa Bung pernah jatuh cinta?”

Tan, seperti ditulis Adam dalam *Mengabdikan Republik*, langsung menjawab, “Pernah. Tiga kali malahan. Sekali di Belanda, sekali di Filipina, dan sekali lagi di Indonesia. Tapi, yah, semua itu katakanlah hanya cinta yang tak sampai, perhatian saya terlalu besar untuk perjuangan.”

S.K. Trimurti, Menteri Perburuahan pada zaman Soekarno, menyatakan itu jawaban jujur Tan Malaka. Kepada Poeze, Trimurti bercerita, Tan yang dipanggil “Macan” sewaktu di Belanda relatif “bersih” dalam urusan asmara. “Beliau belum pernah bicara soal perempuan dalam hubungannya dengan tuntutan seks,” tulisnya dalam *Peringatan Sewindu Hilangnya Tan Malaka* (1957).

Itu pula sebabnya, ketika tetua adat Pandan Gadang “melelang”-nya dalam upacara perijodohan sewaktu ia pulang dari Belanda pada 1919, Tan menolak banyak pinangan. Setelah tak tahan mengajar di sebuah perusahaan perkebunan di Deli, si Macan menyiapkan keberangkatannya ke Semarang. Dia menyongsong hidup dan kematiannya yang—mengutip kalimat Poeze—“lebih dahsyat ketimbang fiksi”.[]

Tan Malaka





BAGIAN PERTAMA

DISKURSUS SEJARAH KETERTINDASAN MASYARAKAT INDONESIA



Peta: Hindia-Belanda
(George McTurnan, 1995: 5)

Sejarah Rakyat Indonesia adalah Sejarah Ketertindasan. Gelora reformasi yang terjadi sekarang, telah melupakan hakikat ketertindasan karena seolah-olah setelah kita mendapatkan kebebasan politik atau demokrasi politik, maka ketertindasan struktural berupa kesengsaraan dan kebodohan pun tidak terjadi lagi. Dengan kebebasan politik itu, seolah-olah rakyat pastilah akan mencapai kebahagiaan.

"Revolusi adalah penggulingan kekuasaan pemerintah yang sah serta penghapusan konstitusi pemerintah oleh kelas sosialis yang bertujuan mengubah struktur sosial masyarakat"
(Pakar Marxis Prof. Dr. Herberth Marcuse, Guru Besar Universitas Harvard)

"Revolusi harus tahu mana lawan mana kawan, Aku cinta kaum nasionalis tetapi kaum nasionalis yang revolusioner, Aku cinta kaum agama tetapi kaum agama yang revolusioner, Aku cinta komunis tetapi kaum komunis yang revolusioner" (Ir. Soekarno, McTurnan, 1995: 622)

Arti kemerdekaan dapat kita refleksikan dari para tokoh kemerdekaan Indonesia sebagai berikut; Ki Hajar Dewantara menulis; "Dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan bersifat tiga macam: berdiri sendiri (*zelstandig*), tidak tergantung pada orang lain (*onafhankelijk*), dan dapat mengatur dirinya sendiri (*vrijheid, zelfsbeschikking*).". Kalau istilah Belanda itu diterjemahkan kedalam jargon yang lebih dikenal sekarang, maka ketiga komponen kemerdekaan itu ialah *self-reliance*, *independence*, dan *self-determination*. Sukarno lebih menekankan *independence*, yaitu terlepasnya Indonesia dari penguasaan oleh suatu bangsa dan penguasaan asing. Hatta dan Syahrir lebih menekankan *self-reliance* yaitu otonomi setiap individu dalam memutuskan apa yang harus dikerjakan. Tan Malaka selepas sekolah guru di Harlem, Belanda, memilih menjadi guru untuk anak-anak para kuli kontrak di perkebunan Deli, melihat kemerdekaan sebagai *self-determination*, yaitu kesanggupan setiap kelompok sosial menentukan nasibnya sendiri dan tidak menggantungkan peruntungannya pada kelompok sosial lainnya. Perbedaan tekanan itu menjadi lebih jelas kalau dilihat dari hubungan dengan apa yang hendak ditentang. Kemerdekaan sebagai *independence* secara telak menolak penjajahan. Kemerdekaan sebagai *self-reliance* membatalkan ketergantungan. Sedangkan kemerdekaan sebagai *self-determination* menampik segala jenis penindasan dan pembodohan.

Hand-Out 01 SEJARAH INDONESIA

Prasejarah

Secara geologi, wilayah Indonesia modern muncul kira-kira sekitar Zaman Pleistocene ketika wilayah itu masih terhubung dengan Asia Daratan. Pemukim pertama wilayah tersebut yang diketahui adalah manusia Jawa pada masa sekitar 500,000 tahun yang lalu. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya Zaman Es.

Era sebelum Penjajahan

Sejarah Awal

Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau Kerajaan Jawa Dwipa Hindu di pulau Jawa dan Sumatera pada sekitar 200 SM. Kerajaan Taruma menguasai Jawa Barat pada sekitar tahun 400, dengan agama Buddha tiba di wilayah tersebut pada tahun 425. Pada Zaman Pembaharuan Eropa, Jawa dan Sumatera telah mempunyai warisan peradaban yang berusia ribuan tahun dan sepanjang dua buah kerajaan besar.

Kerajaan Hindu-Buddha

Berawal dari abad ke-4 di Kerajaan Kutai tepatnya di Kalimantan Timur merupakan Kerajaan Hindu pertama di Nusantara. kemudian perkembangan berlanjut antara abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddhisme Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. I Ching, penjelajah China, mengunjungi ibu kotanya di Palembang pada sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Tanah Melayu. Abad ke-14 juga memperlihatkan kebangkitan sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Antara tahun 1331 hingga tahun 1364, Gajah Mada, patih Majapahit, berhasil menguasai wilayah yang kini merupakan sebagian besarnya Indonesia bersama-sama hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari zaman Gajah Mada termasuk pengekodan undang-undang dan kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam roman kesateriaan *Ramayana*.

Kerajaan Islam

Islam tiba di Indonesia pada sekitar abad ke-12 dan melalui bercampur bebas, menggantikan agama Hindu sebagai agama yang terutama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera; hanya Bali yang tetap mempertahankan majoriti penganut Hindunya. Di kepulauan-kepulauan di timur, paderi-paderi Kristian dan ulama-ulama Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17 dan pada saat ini, adanya sebagian yang besar penganut kedua-dua agama ini di kepulauan-kepulauan tersebut. Penyebaran Islam didorong oleh hubungan perdagangan di luar Nusantara; umumnya para pedagang dan ahli kerajaanlah yang pertama menganut agama baru tersebut. Kerajaan-kerajaan yang penting termasuk Mataram di Jawa Tengah, serta juga Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku Timur.

Era penjajahan: Penjajahan Portugis

Penjajahan Syarikat Hindia Timur Belanda

Mulai tahun 1602, Belanda memanfaatkan diri dengan perpecahan antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit, dan beransur-ansur menjadi penguasa wilayah yang kini merupakan Indonesia. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis yang tetap dikuasai oleh Portugal sehingga tahun 1975 ketika ia bergabung dengan Indonesia untuk dijadikan salah sebuah provinsi dengan nama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun kecuali dua waktu yang singkat, yakni ketika sebagian kecil dari Indonesia dikuasai oleh Britain selepas Perang Jawa Britain-Belanda, serta semasa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kuasa penjajah yang terkaya di dunia. Bagi sebagian orang, penjajahan Belanda selama 350 tahun adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian selepas Belanda mendekati daerah jajahannya. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh syarikat perdagangan yang bernama Syarikat Hindia Timur

Belanda (bahasa Belanda: *Verenigde Oostindische Compagnie* atau *VOC*). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan kegiatan penjajah di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602, dengan ibu pejabatnya di Batavia yang kini dinamai Jakarta.

Tujuan utama Syarikat Hindia Timur Belanda adalah untuk mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempahnya di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan ancaman kekerasan terhadap para penduduk di kepulauan-kepulauan penanaman rempah, dan terhadap orang-orang bukan Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual buah pala kepada pedagang Inggris, angkatan tentara Belanda membunuh atau mengusir hampir seluruh penduduknya, dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala kemudian dihantar untuk tinggal di pulau-pulau tersebut sebagai ganti. Syarikat Hindia Timur Belanda menjadi terlibat dalam politik dalaman Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

Penjajahan Belanda

Selepas Syarikat Hindia Timur Belanda (SHTB) menjadi muflis pada akhir abad ke-18 dan selepas penguasaan United Kingdom yang singkat di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih pemilikan SHTB pada tahun 1816. Belanda berjaya menumpaskan sebuah pemberontakan di Jawa dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenali sebagai *cultuurstelsel* dalam bahasa Belanda mula diamalkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dan sebagainya. Hasil-hasil tanaman itu kemudian dieksport ke luar negara. Sistem ini memberikan kekayaan yang besar kepada para pelaksananya-baik orang Belanda mahupun orang Indonesia. Sistem tanam paksa ini yang merupakan monopoli pemerintah dihapuskan pada masa yang lebih bebas selepas tahun 1870.

Pada tahun 1901, pihak Belanda mengamalkan apa yang dipanggil mereka sebagai Politik Beretika (bahasa Belanda: *Ethische Politiek*) yang termasuk perbelanjaan yang lebih besar untuk mendidik orang-orang pribumi serta sedikit perubahan politik. Di bawah Gabenor Jenderal J.B. van Heutsz, pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang waktu penjajahan mereka secara langsung di seluruh Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan asas untuk negara Indonesia pada saat ini.

Gerakan Nasionalisme

Pada tahun 1908, Budi Utomo, gerakan nasionalis yang pertama, ditubuhkan, diikuti pada tahun 1912 oleh gerakan nasionalis besar-besaran yang pertama, Sarekat Islam. Belanda membalas dengan langkah-langkah yang menindas selepas Perang Dunia I. Para pemimpin nasionalis berasal dari sekumpulan kecil yang terdiri dari para profesional muda dan pelajar, mereka itu dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjarakan karena kegiatan politik mereka, termasuk juga Sukarno, presiden Indonesia yang pertama.

Perang Dunia II

Pada awal Perang Dunia II dalam bulan Mei 1940, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman, dan Hindia-Belanda mengumumkan keadaan berjaga-jaga. Pada bulan Juli, Hindia-Belanda mengalihkan eksport untuk Jepang ke Amerika Syarikat dan Britain. Perundingan-perundingan dengan Jepang tentang pembekalan bahan api kapal terbang gagal pada bulan Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara pada bulan Desember tahun tersebut. Pada bulan yang sama, Sumatera menerima bantuan Jepang untuk memulai pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda. Angkatan tentara Belanda yang terakhir dikalahkan oleh Jepang pada bulan Maret 1942.

Pendudukan Jepang

Pada bulan Juli 1942, Sukarno menerima tawaran Jepang untuk membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawapan kepada keperluan-keperluan tentara Jepang. Sukarno, Mohammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo diberipangkat dan jabatan oleh maharaja Jepang pada tahun 1943. Tetapi pengalaman Indonesia dari penguasaan Jepang amat berbeda-beda, bergantung kepada tempat duduk seseorang serta status sosialnya. Bagi mereka yang tinggal di daerah yang

dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, penganiayaan seks kanak-kanak, penahanan sembarangan dan hukuman mati, serta kejahatan-kejahatan perang yang lain. Orang Belanda dan orang campuran Indonesia-Belanda merupakan sasaran yang utama untuk kezaliman pada zaman penguasaan Jepang di Indonesia.

Pada bulan Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Dalam keputusan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo menyatukan negara dan membantah individualisme; sementara itu, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus menuntut Sarawak, Sabah, Tanah Melayu, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang. Pada 9 Agustus 1945, Sukarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat terbang ke Vietnam untuk bertemu dengan Marsyal Terauchi. Akan tetapi mereka diberitahu bahwa angkatan tentara Jepang sedang menuju ke arah kehancuran. Walaupun demikian, Jepang berkeinginan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Era Kemerdekaan

Persiapan Kemerdekaan

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti di atas, Sukarno membaca "Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia" pada hari berikutnya, yaitu 17 Agustus 1945. Berita tentang pelaksanaan kemerdekaan disebarkan melalui radio dan risalah, sementara angkatan tentara Indonesia, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), serta para pemuda dan lain-lainnya berangkat untuk mempertahankan kediaman Sukarno.

Pada 29 Agustus 1945, kumpulan tersebut melantik Sukarno sebagai Presiden Indonesia, dengan Mohammad Hatta sebagai wakilnya, melalui lembaga yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara sehingga pemilihan umum dapat dijalankan. Lembaga tersebut menjalankan pemerintahan baru pada 31 Agustus, dengan Republik Indonesia terdiri dari 8 buah provinsi, iaitu:

1. Sumatera
2. Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei)
3. Pulau Jawa, iaitu Jawa Barat Jawa Tengah, dan Jawa Timur
4. Sulawesi
5. Maluku (termasuk Irian Barat/Papua)
6. Nusa Tenggara.

Perang Kemerdekaan INDONESIA: ERA 1945-1949

Teks Proklamasi

Antara tahun 1945 hingga tahun 1949, persatuan laut Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan Indonesia melarang segala pelayaran Belanda pada sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai sebarang dukungan logistik mahupun bekalan yang diperlukan untuk memulihkan kekuasaan penjajahnya di Indonesia.

Usaha-usaha Belanda untuk kembali berkuasa menghadapi pertentangan yang hebat. Selepas kembali ke Jawa, angkatan tentara Belanda segera merebut kembali ibu kota Batavia, dengan akibat bahwa para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai Ibu Negara mereka. Pada 27 Desember 1949, setelah empat tahun peperangan dan perundingan, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Persekutuan Indonesia. Pada tahun 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Demokrasi Parleментар

Tidak lama setelah itu, Indonesia meluluskan undang-undang baru yang mencipta sebuah sistem demokrasi parlementer yang dewan eksekutifnya dipilih oleh parlemen atau MPR dan bertanggungjawab kepadanya. MPR pada mula-mula terdiri dari partai-partai politik sebelum dan selepas pilihan raya umum yang pertama pada tahun 1955 sehingga pemerintahan yang stabil tercapai. Peranan Islam di Indonesia menjadi masalah yang rumit, dengan Sukarno cenderung memilih sebuah sistem pemerintahan sekular yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang terdiri dari syariat Islam.

Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau yang lain yang dimulakan sejak tahun 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan sebuah perlembagaan yang baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada tahun 1959, ketika Presiden Sukarno pada dirinya sendiri mengembalikan perlembagaan 1945 yang bersifat sementara dan yang memberikan kuasa presiden yang besar kepadanya, beliau tidak menghadapi pertentangan.

Antara tahun 1959 hingga tahun 1965, Presiden Sukarno memerintah melalui sebuah rejim yang autoritarian di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Beliau juga mengejar hubungan luar negeri, suatu langkah yang disokong oleh para pemimpin utama di negara-negara bekas jajahan yang juga menolak ikatan yang resmi dengan Blok Barat maupun Blok Kesatuan Soviet. Para pemimpin tersebut mengadakan Persidangan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 untuk mendirikan asas yang kelak menjadi Negara-negara Non-Blok (NAM).

Pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an, Sukarno bergerak lebih rapat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meskipun PKI merupakan partai komunis yang terbesar di dunia di luar Kesatuan Soviet dan China, orang ramai tidak menunjukkan sokongan kepada ideologi komunis seperti di negara-negara lainnya.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Sukarno menentang pembentukan Persekutuan Malaysia karena menurut beliau, ini merupakan sebuah "rancangan neo-kolonialisme" yang bertujuan untuk melanjutkan keinginan perdagangan pihak Inggris di wilayah tersebut. Masalah ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara Indonesia dengan Malaysia dan United Kingdom.

Irian Barat

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaannya terhadap bahagian barat pulau Irian (Irian), dan mengizinkan langkah-langkah yang menuju ke arah pemerintahan sendiri serta persiapan kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Perundingan-perundingan dengan Belanda terhadap penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dengan pasukan-pasukan laskar terjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara angkatan-angkatan tentara Indonesia dan Belanda pada tahun 1961 sehingga tahun 1962. Pada tahun 1962, Amerika Syarikat menekan Belanda agar setuju dengan perbincangan-perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dengan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei 1963.

Gerakan 30 September

Sehingga tahun 1965, PKI telah menguasai banyak perserikatan besar-besaran yang dibentuk oleh Sukarno untuk memperkuat dukungan terhadap rejimnya. Dengan persetujuan dari Sukarno, pertubuhan-pertubuhan tersebut memulai untuk membentuk "Angkatan Kelima", dengan mempersenjatai para pendukungnya. Pihak tertinggi dalam angkatan tentara Indonesia menentang masalah ini. Pada 30 September 1965, enam orang jenderal kanan dan beberapa orang yang lain dibunuh dalam sebuah percobaan perebutan kekuasaan yang disalahkan kepada para pengawal istana yang taat setia kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mejar Jenderal Suharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Suharto kemudian mempergunakan keadaan ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang yang dituduh sebagai komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban pada tahun 1966 mencapai setidaknya 500.000 dengan pengorbanan yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

Era Orde Baru

Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Suharto untuk waktu lima tahun sebagai presiden Indonesia. Beliau kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Suharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatik mengubah dasar-dasar luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang diikuti oleh

Sukarno pada akhir kepresidenannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan membubarkan struktur yang dikuasai oleh tentara atas nasihat dari ahli-ahli ekonomi didikan Barat. Selama waktu pemerintahannya, dasar-dasar ini dan eksploitasi sumber alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan amat dikurangkan pada dekade-dekade 1970-an dan 1980-an. Bagaimanapun, beliau juga memperkaya diri, keluarga, dan rakan-rakan rapatnya melalui amalan rasuah yang menular.

Irian Jaya

Setelah menolak pengawasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah Indonesia menjalankan "Tindakan Pilihan Bebas " (*Act of Free Choice*) di Irian Jaya pada tahun 1969 yang memilih 1,025 orang ketua daerah Irian untuk dilatih dalam bahasa Indonesia. Mereka akhirnya memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Sebuah ketetapan Perhimpunan Agung PBB kemudian mengesahkan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya selepas perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam suasana yang lebih terbuka selepas tahun 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.

Timor Timur

Sejak dari tahun 1596 sehingga tahun 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenali sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat Revolusi Anyelir di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak berundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pilihan raya tempatan pada tahun tersebut, Partai Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagiannya oleh orang-orang yang menyokong faham Marxisme, bersama-sama UDT, menjadi partai-partai yang terbesar, selepas sebelumnya membentuk organisasi untuk berkampanye agar memperoleh kemerdekaan dari Portugal.

Pada 7 Desember 1975, angkatan tentara Indonesia masuk ke Timor Timur. Indonesia yang mempunyai dukungan senjata dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan oleh Amerika Syarikat dan Australia, berharap bahwa dengan memiliki Timor Timur, mereka akan memperoleh tambahan sumber minyak dan gas asli serta lokasi yang strategis. Pada peringkat awal, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200,000 orang penduduk Timor Timur melalui pembunuhan langsung, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi semasa Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pungutan suara yang dijalankan oleh PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 75% memilih untuk merdeka. Setelah keputusan pungutan suara diumumkan, angkatan tentara Indonesia dengan segeranya melanjutkan pemusnahan di Timor Timur, umpamanya pemusnahan infrastruktur di daerah tersebut. Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekret 1976 yang menggabungkan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, dan Peralihan PBB (UNTAET) mengambil alih tanggungjawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002.

Krisis ekonomi

Suharto mengumumkan peletakan jabatannya didampingi B.J. Habibie. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dilanda oleh krisis keuangan dan ekonomi Asia (baca: Krisis Keuangan Asia), disertai kemarau yang terburuk dalam waktu 50 tahun terakhir dan harga-harga minyak, gas asli dan komoditi-komoditi eksport yang lain yang semakin jatuh. Nilai rupiah jatuh, inflasi meningkat, dan perpindahan modal dipercepat. Unjuk rasa yang dipimpin oleh para mahasiswa mendesak peletakan jabatan Suharto. Di tengah-tengah kekacauan yang meluas, Suharto meletakkan jabatan sebagai presiden Indonesia pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya. Suharto kemudian memilih penggantinya, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Era Reformasi

Pemerintahan Habibie

Presiden Habibie dengan segera membentuk sebuah kabinet, dengan salah satu tugas yang utamanya memperoleh dukungan dari luar negeri untuk rancangan pemulihan ekonominya. Beliau juga membebaskan para tahanan politik dan melonggarkan kawalan terhadap kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pemerintahan Wahid

Pemilihan umum untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999, dengan Partai PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri, anak perempuan Sukarno, muncul sebagai pemenang dalam pilihan raya parlemen dengan mendapatkan 34%; Golkar (partai Suharto yang sebelumnya selalu merupakan pemenang dalam pemilu) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil Presiden untuk waktu lima tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan rombakan kabinetnya pada Agustus 2000.

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokrasi dan perkembangan ekonomi di bawah keadaan-keadaan yang berlawanan. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antara kelompok-kelompok etnik dan antara agama-agama, khususnya di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan oleh rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang diakibatkan oleh para orang militan Timor Timur pro-Indonesia menimbulkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin menentang kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

Pemerintahan Megawati

Dalam MPR pertama pada bulan Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggungjawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan penunjuk perasaan menyerbu MPR dan mendesaknya agar meletakkan jabatan atas alasan keterlibatannya dalam skandal. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki pemerintahannya, beliau mengumumkan keputusan yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada Megawati, wakil presidennya. Megawati mengambil alih jabatan presiden tidak lama kemudian.

Pemerintahan Yudhoyono

Pada tahun 2004, pemilu diadakan, dengan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal jabatannya menghadapi pengalaman yang pahit seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang membinasakan sebagian Aceh serta gempa bumi di Sumatera pada bulan Maret 2005. Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang berpanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.[]

Hand-Out 02 SEJARAH INDONESIA (1945-1949)

Indonesia: Era 1945-1949 dimulai dengan masuknya Sekutu diboncengi oleh Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya.

1945: Kembalinya Belanda bersama Sekutu

Latar belakang

Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (*South West Pacific Area Command/ SWPAC*).

Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (*South East Asia Command*) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentera Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (*Recovered Allied Prisoners of War and Internees/ RAPWI*).

Mendaratnya Belanda diwakili NICA

Berdasarkan *Civil Affairs Agreement*, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (*Netherland Indies Civil Administration* - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (*statkundige concepti* atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemaikmuran yang di antara anggotanya ialah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.

Pertempuran melawan Sekutu dan NICA

Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:

1. Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya dan sekitarnya.
2. Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya.
3. Perjuangan Gerilya Jenderal Soedirman, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur
4. Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya.

Ibukota pindah ke Yogyakarta

Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api, pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota. Meninggalkan Sjahrir dan kelompok yang pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta.

Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api, yang disebut dengan singkatan KLB (Kereta Luar Biasa). Orang lantas berasumsi bahwa rangkaian kereta api yang digunakan adalah rangkaian yang terdiri dari gerbong-gerbong luar biasa. Padahal yang luar biasa adalah jadwal perjalanannya, yang diselenggarakan diluar jadwal yang ada, karena kereta dengan perjalanan luar biasa ini, mengangkut Presiden beserta Wakil Presiden, dengan keluarga dan staf, gerbong-gerbongnya dipilhkan yang istimewa, yang disediakan oleh Djawatan Kereta Api (DKA) untuk VVIP.

1946: Perubahan sistem pemerintahan

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.

Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

Diplomasi Sjahrir

Ketika Sjahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan (*Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen*), J.H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: "*Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan*". Logemann sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November 1945, "*Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir*". Tanggal 6 Maret 1946 kepada van Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah *persona non grata*.

Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.

Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas. Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil kerajaan. Daerah-daerah yang bermacam-macam di Indonesia yang dihubungkan bersama-sama dalam suatu susunan federasi dan persemakmuran akan menjadi rekan (*partner*) dalam Kerajaan Belanda, serta akan mendukung permohonan keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB.

Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu: "*mau mengakui Republik sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi 10 Februari*". Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan *de facto* Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan Sekutu. Karena Sjahrir tidak dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu bubar dan ia bersama teman-temannya kembali pulang.

Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan *surat rahasia* kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Dalam surat Sjahrir yang khusus ini, ada penerimaan yang samar-samar tentang gagasan van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan kepada Indonesia; ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang kemungkinan Indonesia menyetujui federasi Indonesia - bekas Hindia Belanda dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik sebagai bagian paling penting. Sebagai kemungkinan dasar untuk kompromi, hal ini dibahas beberapa kali sebelumnya, dan semua tokoh politik utama Republik mengetahui hal ini.

Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1946, van Mook mengirim kawat ke Den Haag: *"menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, usul balasan (yakni surat Sjahrir) tidak disetujui oleh Soekarno dan ketika dia bertemu dengannya, dia marah. Tidak jelas, apa arah yang akan diambil oleh amarah itu"*. Pada waktu yang sama, surat kabar Indonesia menuntut dijelaskan desas-desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan *de facto* Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatra.

Penculikan terhadap PM Sjahrir

Tanggal 27 Juni 1946, dalam Pidato Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama Yogyakarta, dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Sjahrir, akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Sjahrir.

Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir, yang sudah terlanjur dicap sebagai "pengkhianat yang menjual tanah airnya". Sjahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, kota dekat Solo, di rumah peristirahatan seorang pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandan Batalyon setempat.

Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan, *"Berhubung dengan keadaan di dalam negeri yang membahayakan keamanan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, saya, Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Kabinet dan sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946, untuk sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah"*. Selama sebulan lebih, Soekarno mempertahankan kekuasaan yang luas yang dipegangnya. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan; namun baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet.

Kembali menjadi PM

Tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri, Sjahrir kemudian berkomentar, *"Kedudukan saya di kabinet ketiga diperlemah dibandingkan dengan kabinet kedua dan pertama. Dalam kabinet ketiga saya harus berkompromi dengan Partai Nasional Indonesia dan Masyumi... Saya harus memasukkan orang seperti Gani dan Maramis lewat Soekarno; saya harus menanyakan pendapatnya dengan siapa saya membentuk kabinet."*

Konferensi Malino - Terbentuknya "negara" baru

Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah menguasai sebelah Timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian; Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.

1946-1947: Peristiwa Westerling

Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda *Depot Speciale Troepen* pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947 selama operasi militer *Counter Insurgency* (penumpasan pemberontakan).

Perjanjian Linggarjati

Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killean. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut :

- Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949,
- Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia
- Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curacao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.

Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pamarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasi dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.

Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil perundingan Linggarjati

Parade Tentara Republik Indonesia (TRI) di Purwakarta, Jawa Barat, pada tanggal 17 Januari 1947. Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S M Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak. Kepergian S M Kartosoewirjo ini dikawal oleh para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung pendapat sangat sengit, yakni antara sayap sosialis (diwakili melalui partai Pesindo), dengan pihak Nasionalis-Islam (diwakili lewat partai Masyumi dan PNI). Pihak sosialis ingin agar KNPI menyetujui naskah Linggarjati tersebut, sedang pihak Masyumi dan PNI cenderung ingin menolaknya. Ketika anggota KNIP yang anti Linggarjati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada S M Kartosoewirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo.

DR H J Van Mook kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal 3 pulau ini. Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan presiden Sukowati, lewat Konferensi Denpasar tanggal 18 - 24 Desember 1946.

Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia. Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia. Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada prakteknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.

Proklamasi Negara Pasundan

Usaha Belanda tidak berakhir sampai di NIT. Dua bulan setelah itu, Belanda berhasil membujuk Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa, memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Secara militer negara baru ini sangat lemah, ia benar benar sangat tergantung pada Belanda, terbukti ia baru eksis ketika Belanda melakukan Agresi dan kekuatan RI henggang dari Jawa Barat.

Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara Pasundan itu memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Namun mereka pun menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakibatkan perang. Oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditi dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet).

Agresi Militer I

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama;
2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama);
5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.

Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus "mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama.

Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.

Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali. Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai 'aksi polisional' tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.

Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli, pengganti Sjahrir adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifudin, dia menolak kursi menteri karena *"ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi"*.

S.M. Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda. Di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah politik Amir Syarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat bahwa Amir Syarifudin ingin membawa politik Indonesia ke arah Komunis.

1948: Perjanjian Renville

Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan itu .

Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati, karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.

Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak "menimbulkan rasa benci Amerika".

Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan sesudah perundingan Linggarjati. Seperti melalui persetujuan Linggarjati, melalui perundingan Renville, Soekarno dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia dan persatuan Yogyakarta hidup lebih lama, jantung Republik terus berdenyut. Ini kembali merupakan inti keuntungan Seperti sesudah persetujuan Linggarjati, pribadi lain yang jauh dari pusat kembali diidentifikasi dengan persetujuan -dulu Perdana Menteri Sjahrir, kini Perdana Menteri Amir- yang dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah.

Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Hatta sebagai Perdana Menteri

Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu 'kabinet presidentil' darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari *sayap kiri* kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.

Memang runtuhnya Amir datang bahkan lebih cepat ketimbang Sjahrir, enam bulan lebih dulu Amir segera dituduh -kembali khususnya oleh Masyumi dan kemudian Partai Nasional Indonesia- terlalu banyak memenuhi keinginan pihak asing. Hanya empat hari sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari 1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden.

Tampaknya kini lebih sedikit jalan keluar bagi Amir dibanding dengan Sjahrir sesudah Perundingan Linggarjati; dan lebih banyak penghinaan. Beberapa hari sesudah Amir berhenti, di awal Februari 1948, Hatta membawa Amir dan beberapa pejabat Republik lainnya mengelilingi Provinsi. Amir diharapkan menjelaskan Perjanjian Renville. Pada rapat raksasa di Bukittinggi, Sumatra Barat, di kota kelahiran Hatta -*dan rupanya diatur sebagai tempat berhenti terpenting selama perjalanan*- Hatta berbicara tentang kegigihan Republik, dan pidatonya disambut dengan hangat sekali.

Kemudian Amir naik mimbar, dan seperti diuraikan Hatta kemudian: *"Dia tampak bingung, seolah-olah nyaris tidak mengetahui apa yang harus dikatakannya. Dia merasa bahwa orang rakyat Bukittinggi tidak menyenangkannya, khususnya dalam hubungan persetujuan dengan Belanda. Ketika dia meninggalkan mimbar, hampir tidak ada yang bertepuk tangan"*

Menurut peserta lain: *"Wajah Amir kelihatannya seperti orang yang sudah tidak berarti"*. Sjahrir juga diundang ke rapat Bukittinggi ini; dia datang dari Singapura dan berpidato. Menurut Leon Salim -kader lama Sjahrir- *"Sjahrir juga kelihatan capai dan jarang tersenyum"*. Menurut kata-kata saksi lain, *"Seolah-olah ada yang membeku dalam wajah Sjahrir"* dan ketika gilirannya berbicara *"Dia hanya mengangkat tangannya dengan memberi salam Merdeka dan mundur"*. Hatta kemudian juga menulis dengan singkat tentang pidato Sjahrir: *"Pidatonya pendek"*. Dipermalukan seperti ini, secara psikologis amat mungkin menjadi bara dendam yang menyulut Amir untuk memberontak di kemudian hari.

Perjanjian Renville tidak lebih baik daripada perundingan di Linggarjati. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh Belanda mendirikan blokade dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948, Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan itu, melaporkan bahwa Indonesia mengeluh akan gencatan senjata yang berulang-ulang.

1948-1949: Agresi Militer II

Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Perjanjian Roem Royen

Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Roem Royen.

Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta

Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan.

Konferensi Meja Bundar

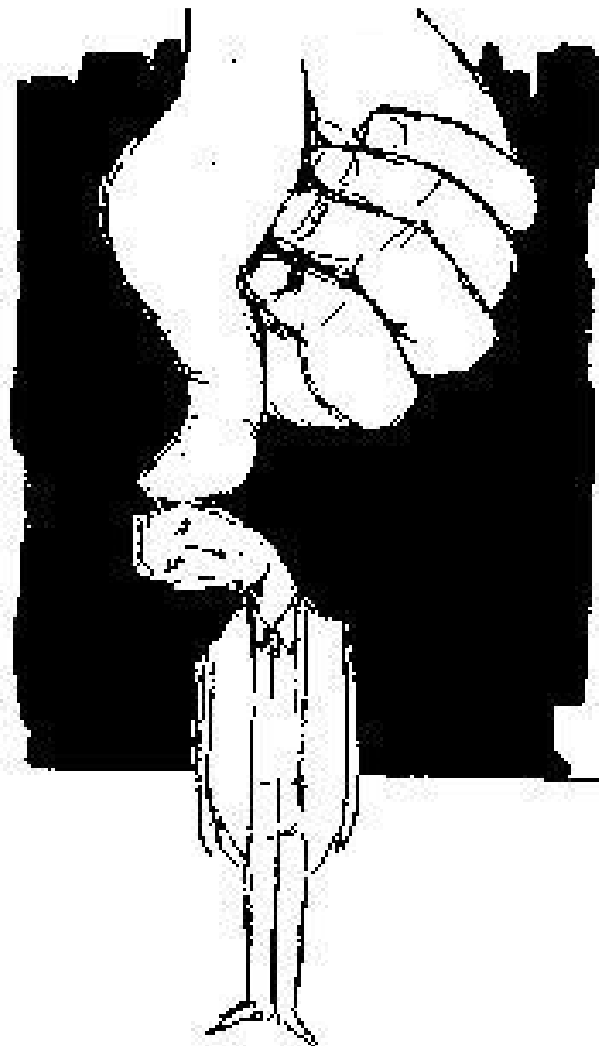
Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Yang menghasilkan kesepakatan:

- Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
- Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

Penyerahan kedaulatan oleh Belanda

Bung Hatta di Amsterdam, Belanda menandatangani perjanjian penyerahan kedaulatan. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, selang empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika *soevereiniteitsoverdracht* (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan *politieele acties* (Aksi Polisi) pada 1945-1949 adalah ilegal.[]

**Lawan! Kolonialisme & imperialisme
berwajah baru!**



Hand-Out 03 SEJARAH REVOLUSI INDONESIA

Pecahnya Revolusi

Desas-desus bahwa Jepang harus, atau akan mengadakan kapitulasi dengan Sekutu memicu aksi beberapa organisasi bawah tanah yang telah bersepakat untuk bangkit melawan Jepang bila Sekutu, mendarat. Bahkan pada tanggal 10 Agustus 1945, setelah mendengar siaran radio yang kebetulan tidak disegel oleh pemerintah militer Jepang bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah, Sjahrir mendesak Hatta agar dia bersama Soekarno, segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia, dan meyakinkannya, bahwa dia akan didukung para pejuang bawah tanah dan banyak unit Peta. Sepulangnya Soekarno dan Hatta dari Dalat pada tanggal, 14 Agustus, Sjahrir memberitahukan mereka bahwa Jepang sudah minta diadakan gencatan senjata dan sekali lagi berusaha mendesak mereka memproklamkan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta yang belum begitu yakin bahwa Jepang telah menyerah, merasa bahwa kelompok-kelompok bawah tanah belum lagi mampu menghimpun kekuatan untuk mengalahkan Jepang, dan khawatir bila hal ini mengakibatkan pertumpahan darah yang sia-sia.

Namun demikian, Sjahrir yang percaya bahwa Soekarno bersedia segera memproklamkan kemerdekaan dengan deklarasi kemerdekaan berisi kata-kata sangat anti-Jepang yang telah disiarkan Sjahrir dan kawan-kawannya, segera mengorganisir kelompok-kelompok bawah tanah dan pelajar Jakarta untuk mengadakan demonstrasi umum dan kerusuhan-kerusuhan militer. Tembusan dan deklarasi kemerdekaan mereka yang anti-Jepang itu sudah dikirim ke semua pelosok pulau Jawa untuk segera diterbit begitu Soekarno memproklamkan kemerdekaan yang diharap bakal terlaksana pada tanggal 15. Setelah persiapan-persiapan mulai dilakukan, menjadi jelas bahwa Soekarno dan Hatta tidak bersedia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 15. Sjahrir tidak dapat menghubungi semua pemimpin organisasinya pada waktu yang tepat untuk memberitahukan pembatalan ini. Revolusipun meletus secara terpisah di Cirebon pada tanggal 15 di bawah Dr. Sudarsono, tetapi berhasil dipadamkan oleh Jepang.

Soekarno dan Hatta masih berharap untuk menghindari pertumpahan darah, sedangkan kelompok-kelompok bawah tanah mengikuti tuntutan Sjahrir untuk segera memproklamkan kemerdekaan berdasarkan syarat-syarat yang begitu anti-Jepang sehingga menuntut seluruh rakyat Indonesia harus berbaris di belakangnya untuk secara mendadak bersama-sama menggulingkan Jepang. Sementara itu, gerakan bawah tanah pimpinan Soekarno yang didukung oleh sejumlah kelompok Persatuan Mahasiswa telah kehilangan kesabaran, dan pada tanggal 16, jam 4.00 pagi, mereka menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke garnisun Peta di rengasdengklok. Di sana mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta, bahwa Jepang sudah benar-benar menyerah. Kemudian mereka berusaha mendesak keduanya untuk segera memproklamkan kemerdekaan. Soekarno berkeras bahwa ada 15.000 pemuda bersenjata di sekitar pinggiran kota Jakarta yang siap masuk kota begitu proklamasi diucapkan. Soekarno dan Hatta yakin bahwa kekuatan bersenjata yang dikatakan Soekarno itu jumlahnya dibesar-besarkan, dan bahwa Jepang dengan mudah dapat menumpas usaha semacam itu. Jelas mereka merasa bahwa ada kemungkinan Jepang mau memahaminya dan karenanya tidak akan menentangnya dengan kekuatan militer. Demi menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu, setidaknya mereka ingin memastikan dulu sikap para pejabat militer Jepang sebelum menggerakkan pemberontakan rakyat. Lebih-lebih lagi, keduanya merasa bahwa setiap deklarasi harus benar-benar meliputi seluruh penduduk Indonesia, karena itu, harus dilaksanakan lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Menurut mereka, dengan cara itu seluruh rakyat Indonesia akan bangkit bersama-sama menegaskan kemerdekaan, dan akan lebih banyak kesempatan menggerakkan penduduk cara berhasil melawan Jepang. Suatu rapat panitia tersebut direnungkan akan diadakan pada tanggal 17, jam 10.00 pagi, dan kemudian mereka mengusulkan untuk memproklamkan kemerdekaan; Sementara itu, Jepang sudah mengetahui perihal penculikan itu, dan Subardjo yang punya hubungan dekat dengan kelompok Soekarno pergi ke Rengasdengklok, jelas sepengetahuan Mayeda, atau setidaknya juga para pejabat militer Jepang, untuk membujuk Soekarno dan para pemimpin mahasiswa itu kembali dengan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Ini meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang mengetahui rencana besar tentang proklamasi kemerdekaan itu, dan mereka menjadi lebih percaya

bahwa kekuatan bersenjata Indonesia di pinggiran ibu kota itu tidak memadai dan sejak itu mereka tidak berpikir lagi untuk mengadakan serangan mendadak.

Begitu kembali ke Jakarta pada tanggal 16 tengah malam Hatta segera mengadakan hubungan dengan tangan-kanan Panglima Angkatan perang Jepang di Jawa. Pejabat ini memberitahunya bahwa menurut syarat-syarat penyerahan Jepang, Jepang hanya "menjadi agen sekutu", dan bahwa mereka sama sekali tidak mungkin menyetujui suatu deklarasi kemerdekaan oleh orang Indonesia. Jadi jelaslah bagi Hatta dan Soekarno, bahwa pertumpahan darah tidak mungkin dan cara yang disarankan oleh Sjahrir, Sukarni, Wikana dan pemimpin gerakan bawah tanah lainnya adalah satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian Sjahrir menemui Soekarno dan memperoleh janji dari Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan; akan tetapi ia tidak dapat memperoleh jaminan dari Soekarno bahwa proklamasi itu akan dilakukan dengan syarat-syarat yang sangat anti-Jepang seperti yang disarankan Sjahrir dan kelompoknya.

Orang Jepang sekarang sudah waspada, dan gerakan-gerakan semua pemimpin Indonesia diawasi dengan ketat. Suatu tema rapat yang bebas dari mata-mata Kempetai sangat penting. Sekitar tengah malam, Hatta menghubungi Marsekal Muda Mayeda yang mau menyediakan rumahnya untuk dipakai sebagai tempat rapat kaum nasionalis. Mayeda meninggalkan rumahnya dan pada tanggal 17, jam 2.00 pagi, Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan dengan Panitia Persiapan dan Subardjo, Wikana serta Sukami untuk merencanakan suatu proklamasi kemerdekaan. Setelah berdebat lama, teks proklamasi ditentukan, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, Soekarno membacakan proklamasi itu di hadapan sekelompok kecil di depan rumah pribadinya. Segera setelah bersama pesan pribadi Hatta kepada sahabat-sahabat nasionalis proklamasi itu disiarkan di seluruh radio Domei Indonesia jaringan telegraf oleh para pegawai Indonesia di balik pintu terkunci kantornya di Jakarta (Batavia).

Revolusi Indonesia sudah dilancarkan, dan mendapat reaksi hebat di seluruh pelosok Nusantara, meskipun tidak segera diketahui di Jakarta. Jepang cepat mengadakan reaksi. Atas perintah panglima militer Jepang di Jawa, Mayeda beserta seluruh stafnya ditangkap, dan pengumuman kemerdekaan yang dikirimkan lewat pos ke seluruh pelosok kota dirobek oleh Kempetai. Pada hari berikutnya, Jepang mengumumkan pembubaran Peta, Hei Ho dan semua organisasi Indonesia bersenjata.

Namun demikian, jelas bahwa para pejabat Jepang semula ragu-ragu tentang tindakan apa yang harus mereka ambil terhadap Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 19, didorong oleh kelompok-kelompok bawah tanah, kedua pemimpin ini mengadakan rapat raksasa yang dihadiri oleh orang-orang Indonesia yang antusias di lapangan pusat Jakarta yang luas. Rapat ini berusaha dicegah oleh tank-tank dan mobil-mobil bersenjata Jepang, dan keinginan mereka yang pertama adalah menangkap Soekarno dan Hatta. Namun demikian, makin besarnya entusias kerumunan rakyat yang besar semakin banyak itu menyebabkan mereka berubah pikiran. Soekarno berpidato di depan massa secara singkat dengan kata-kata yang moderat, tetapi tetap pada tuntutan akan kemerdekaan. Soekarno kemudian menghimbau puluhan ribu orang Indonesia yang mendengarkan pidatonya itu untuk meninggalkan lapangan secara diam-diam dan pulang dengan damai ke rumah masing-masing. Mereka menurut. Tidak ada yang dapat dilakukan Jepang, kecuali terkesan pada demonstrasi kekuatan yang terkendali ini.

Dimana jumlah mereka tidak terlalu sedikit, unit-unit Peta di seluruh wilayah luas di Jawa menolak perintah Jepang untuk meninggalkan senjatanya. Mereka mempertahankan senjatanya bertempur dengan Jepang, dan di beberapa tempat, mereka sendiri melucuti unit-unit tentara Jepang. Garnisun Jepang memang dapat mempertahankan kekuasaan militernya di kota-kota yang lebih besar, akan tetapi di daerah-daerah yang mulai dikuasai kelompok-kelompok kelompok bersenjata Indonesia, Peta, atau unit-unit organisasi pemuda yang sudah memperoleh senjata dari formasi kecil Jepang, baik secara paksa atau dalam banyak hal karena komandannya merasa gentar dan menyerah, bahkan kadang-kadang menyerah begitu saja. Bendera kebangsaan Indonesia dilarang oleh Jepang. Akan tetapi Soekarno yang menganggap bendera itu simbol revolusioner, memerintahkan untuk dikibarkan di semua gedung umum. Para pemuda Indonesia mulai mempertaruhkan nyawanya untuk mengibarkan bendera tersebut. Ini jelas memancing pertempuran dengan Jepang yang segera berusaha menurunkannya. Dalam waktu enam minggu, bendera yang merupakan bukti nyata simbol kemerdekaan itu, sudah berkibar di setiap gedung umum di Jawa. Para mahasiswa yang menjadi

ujung tombak revolusi itu, memimpin para pemuda yang ditarik dari organisasi-organisasi pemuda yang disponsori Jepang, dan bersama mereka merebut senjata dari orang-orang Jepang, menyeret para perwira Jepang keluar mobil mereka mengusir para fungsionaris Jepang dari gedung-gedung pemerintahan dan secara umum menjadi kekuatan pendorong utama belakang Republik baru yang dipimpin Soekarno itu.

Komandan militer Jepang menjadi bingung. Perintah-perintah yang diterima dari Allied Southeast Asia Command jelas menyuruhnya mempertahankan status quo politiknya hingga pasukan Sekutu mengambil alih. Namun mereka percaya, dan Soekarno berjuang mati-matian untuk menambah keyakinannya, bahwa setiap usaha menekan Republik yang baru saja diproklamkan itu di pergerakan kebangsaan yang mendukungnya, akan berakibat suatu pertempuran berdarah yang hebat. Orang Jepang mungkin saja memenangkan pertempuran semacam itu, tetapi harus dibayar dengan korban yang besar. Hingga kedatangan pasukan Sekutu pada akhir bulan September, kebijakan Jepang tidak pasti, maju-mundur, dan penuh kompromi, serta berusaha menghindari konfrontasi dengan revolusi Indonesia. Mereka pada umumnya takut terang-terangan menentang pembetukan suatu pemerintah Indonesia, tetapi dengan lebih bersemangat berusaha menghentikan pertumbuhan kekuatan militer Indonesia.

Pembentukan suatu pemerintah untuk Republik yang baru saja diproklamkan itu berlangsung dengan cepat. Pada rapat yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan menambah enam anggotanya, Subardjo, Kasman Singodimejo (komandan garnisun Peta di Jakarta), Sukami, Wikana dan Chaerul Saleh. Panitia yang makin besar, itu memilih Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Panitia ini menunjuk suatu komisi yang terdiri dari tujuh orang—Soekarno, Hatta, Profesor Soepomo, Subardjo, Otto Iskandar Dinata, Mr. Mohammad Yamin, dan Mr. Wongsonegoro—untuk mengadakan perubahan-perubahan terakhir dan diperlukan dalam Undang-undang Dasar Negara, yang sebagian besar sudah disusun selama bulan terakhir sebelum kapitulasi Jepang. Dalam waktu satu minggu, konsep terakhir Undang-undang Dasar Indonesia sudah diselesaikan, dan meskipun sepenuhnya dianggap sementara, segera disebarluaskan. Dengan diberikannya ruang yang luas bagi perubahan sosial ekonomi, maupun politik, undang-undang dasar itu segera menjadi suatu simbol kekuasaan besar yang revolusioner, suatu pertanda hari cerah setelah digulingkannya kekuasaan asing.

Suatu simbol revolusioner yang lebih meluas, simbol revolusioner yang mengandung persamaan dan persaudaraan, adalah rasa panggilan yang diperkenalkan oleh Soekarno yang segera menjadi populer di seluruh Republik Indonesia. Kata Bung paling tepat diterjemahkan sebagai "Saudara", dan dalam arti kasar bisa dibandingkan dengan kata "citizen (rakyat)" dalam Revolusi Perancis kalau "kamrad" di Rusia. Kata ini diambil dari bahasa Indonesia dialek Jakarta, abang, atau kakak laki-laki (kata ini juga umum dipakai di Jawa Timur). Namun demikian, sebutan ini tidak membedakan Antara kakak laki-laki atau adik laki-laki. Gagasan yang dikandungnya mungkin paling dapat dianggap sebagai suatu sintesa dari "saudara revolusioner", "saudara nasionalis Indonesia", dan "saudara Republikan". Tua dan muda, kaya dan miskin. Presiden dan petani boleh dan biasanya saling memanggil dengan sebutan ini. Seorang pengunjung restoran memanggil pelayan dengan kata "bung", orang menteri kabinet atau petani Indonesia yang paling miskin menyebut Presiden Soekarno sebagai "bung Karno".

Kepala-kepala departemen di bawah pemerintah Jepang segera mengakui pemerintah yang baru. Bersama dengan beberapa orang pilihan baru—Soekarno dan Hatta serta orang-orang yang telah bekerja dengan Jepang (seperti Subardjo), begitu pula yang tidak bekerja dengan Jepang (seperti Amir Sjarifuddin dan Ir. Suraehman)—mereka menyusun kabinet pertama Republik baru itu. Suatu kabinet di bawah Undang-undang Dasar bertanggung jawab kepada Soekarno, Presiden. Berikut ini adalah keanggotaan kabinet pertama Republik Indonesia (31 Agustus, 1945 -14 November, 1945) :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Menteri Luar Negeri | - Mr. Achmad Subardjo |
| 2. Menteri Dalam Negeri | - E.A.A. Wiranata Koesoema |
| 3. Menteri Kehakiman | - Profesor Soepomo |
| 4. Menteri Bidang Ekonomi | - Ir. Suraehman |
| 5. Menteri Keuangan | - Dr. Samsi |
| 6. Menteri Pendidikan | - Ki Hajar Dewantoro |

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 7. Menteri Sosial | - Mr. Iwa Kusuma Sumantri |
| 8. Menteri Penerangan | - Mr. Amir Sjarifuddin |
| 9. Menteri Kesehatan | - Dr. Buntaran Martoatmojo |
| 10. Menteri Perhubungan | - Abikusno Tjokrosujoso |
| 11. Menteri Negara (tanpa potfolio) | - Dr. Amir |
| 12. Menteri Negara (tanpa potfolio) | - Wachid Hasjim |
| 13. Menteri Negara (tanpa potfolio) | - Mr. Sartono |
| 14. Menteri Negara (tanpa potfolio) | - Mr. Sartono |
| 15. Menteri Negara (tanpa potfolio) | - Mr. A.A. Maramis |
| 16. Menteri Negara (tanpa potfolio) | - Otto Iskandar Dinata |
| 17. Menteri Negara (tanpa potfolio) | - Soekardjo Wirjopranoto. |

Setelah tanggal 1 September 1945, kepala-kepala departemen yang dulu bekerja di bawah pemerintahan Jepang, dan orang-orang baru yang dipilih oleh Soekarno dan Hatta sebagai kepala departemen, diberi mandat sebagai menteri Republik. Soekarno membuat dekrit bahwa semua pegawai negeri Indonesia harus tidak mengacuhkan perintah-perintah dari Jepang, dan hanya patuh ke perintah pemerintah Republik saja. Departemen-departemen dikepalai oleh para menterinya segera menerima dukungan hampir semua personil pemerintah Indonesia. Tanpa personlia pemerintah Jepang tidak dapat berfungsi. Waktu itu pengaruh militer di pusat-pusat pedesaan yang besar memang dapat dipertahankan oleh Jepang, tetapi mereka tidak berdaya mencegah masuknya fungsionaris-fungsionaris yang mau bekerja untuk Republik.

Pada tanggal 29 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan dibubarkan oleh Soekarno dan diganti dengan Komite Nasional Indonesia Pusat yang kemudian dikenal sebagai KNIP. Komite ini hanya bertugas sebagai suatu badan penasehat Presiden dan kabinetnya. Tidak mempunyai fungsi dalam perundang-undangan. Dengan bantuan Hatta, Soekarno menunjuk 135 orang (termasuk bekas anggota PPKI) yang dianggap sebagai nasionalis terkemuka dan pemimpin paling penting kelompok utama etnis, agama, sosial dan ekonomi di Indonesia sebagai anggota badan baru itu. Keduanya tidak hanya memilih tokoh-tokoh politik yang dapat diandalkan, tetapi juga pria dan wanita yang hampir semuanya menjadi pemimpin terkemuka masyarakat Indonesia yang disukai dan didukung banyak orang. Dengan suatu dekrit yang dikeluarkan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus, Indonesia sudah dibagi menjadi delapan provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Soekarno memilih seorang Gubernur untuk masing-masing provinsi dari kalangan penduduk setempat, dan KNIP memberi mandat kepada salah seorang anggota dari masing-masing daerah untuk membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) di setiap provinsi guna membantu para gubernur dalam menjalankan pemerintahan. Dengan cepat terbentuklah KNI setempat secara spontan di tingkat distrik maupun kotapraja. Selama suatu periode yang lama, komite-komite setempat yang revolusioner berfungsi sebagai kekuatan pemerintah yang sebenarnya di daerah masing-masing. Semula daerah-daerah itu diatur menurut kehendak pemimpin setempat yang diakui, tetapi kemudian sejak akhir bulan November, diatur menurut suatu pola peraturan yang seragam. Di Jawa dan Madura, dengan suatu akta Pemerintah tanggal 23 November 1945, dibentuklah badan penasehat semacam itu di semua karesidenan, distrik, kota-praja, dan wilayah-wilayah seperti yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. (Pada tanggal 30 Oktober, Sultan Yogya mendekritkan pembentukan badan penasehat yang serupa di wilayahnya sendiri). Menjelang tahun 1946, di mana keadaan dianggap memungkinkan, KNI dibentuk berdasarkan pemilihan setempat.

Pada tanggal 29 Agustus, pemerintah yang baru itu mulai mengorganisir suatu angkatan perang. Berdasarkan unit-unit Peta yang dipersenjatai, dan dari jenjang beberapa organisasi pemuda, dibentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang bermarkas besar di Jakarta. Unsur pokok tentara yang bebas terorganisir ini terdiri dari unit-unit yang sangat otonom dan pada dasarnya bebas bergabung karena punya suatu basis wilayah dan di masing-masing daerah tergantung pada berbagai derajat pengawasan KNI yang bertugas mengurus pemeliharaan dan pengadaannya. Mulai tanggal 5 Oktober 1945, nama angkatan perang nasional diubah dari BKR menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat?) Selama beberapa bulan berikutnya, unit-unit unsur pokoknya, diatur dari pusat dengan derajat pengawasan yang lebih besar tetapi sering tidak efektif. Unit-unit BKR segera terlibat

dalam perjuangan revolusioner. Mereka membantu merebut gedung-gedung pemerintah dari orang Jepang dan menangkap mereka yang menolak untuk meninggalkan gedung-gedung tersebut.

Pertempuran yang tak menentu antara orang Jepang dan Indonesia terjadi makin sering dan makin luas sepanjang bulan September. Usaha-usaha orang Indonesia untuk menguasai senjata, Jepang dan memadamkan perlawanan Jepang terhadap penguasa sipil Indonesia menimbulkan makin banyak lagi pertempuran Pasukan Inggris yang pertama mendarat di Jakarta pada tanggal 2 September 1945, tepat ketika usaha orang Indonesia merebut kekuasaan militer dan sipil dari Jepang sedang memuncak. Selama di minggu pertama bulan Oktober, terjadi pertempuran hebat antar, pasukan Indonesia dan pasukan Jepang untuk menguasai kota-toko Bandung, Carut, Surakarta, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya Pasukan Indonesia dapat menguasai sementara kota Bandun Carut, dan Surabaya, serta berhasil sepenuhnya menguasai kota Yoyakarta hingga tanggal 19 Desember 1948. Pasukan Inggris memasuki kota Semarang pada tanggal 19 Oktober setelah pasukan Indonesia mengorbankan sekitar 2.000 orang untuk menumpas habis garnisun Jepang.

Tugas pasukan Inggris yang baru datang itu sangat berat. Instruksi-instruksi kepala Staf Sekutu yang dijabarkan oleh Lord Mountbatten, panglima Sekutu untuk Asia Tenggara, menyuruhnya menerima penyerahan kekuatan bersenjata Jepang, membebaskan tawanan perang Sekutu dan tahanan sipil, serta melucuti dan mengumpulkan orang Jepang sehingga siap untuk dikirim kembali ke Jepang. Di samping itu, mereka harus membentuk dan menjalankan keamanan dan ketertiban di Indonesia, sampai pemerintah Hindia Belanda sudah dapat berfungsi sendiri. Tentu saja instruksi terakhir ini disebabkan karena sekutu kurang mengerti kejadian-kejadian di Indonesia. Para perwira Inggris di Jawa dan Sumatra, dan perwira Australia di bagian-bagian Sulawesi dan Sunda Kelapa, terikat pada instruksi-instruksi yang berdasarkan syarat-syarat yang tidak lagi absah terhadap kondisi-kondisi di Hindia Belanda. Pasukan Inggris dan Australia yang mendarat di Indonesia pada bulan Oktober, 1945, menghadapi suatu situasi dalam keadaan tidak siap sama sekali. Di kebanyakan daerah, di Jawa dan Sumatra khususnya, pemerintah sipil sudah berjalan dengan derajat efisiensi yang tidak mengherankan pasukan Sekutu.

Soekarno dan Hatta mengeluarkan suatu perintah umum untuk tidak berurusan dengan pasukan Inggris, dan kelompok-kelompok mahasiswa pergi ke lapangan untuk menjelaskan keadaan itu kepada unit-unit Jibaku, dan mengawasi kalau-kalau mereka melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggungjawab. Bagaimanapun juga, tidak hanya Jibaku, tetapi semua orang Indonesia menjadi curiga terhadap tujuan-tujuan Inggris. Tanggal 29 September, Laksamana Patterson, komandan garis belakang Skuadron Tempur Kelima Inggris, mengumumkan bahwa pasukan-pasukan Sekutu datang untuk melindungi rakyat dan untuk "memulihkan keamanan dan ketertiban hingga pemerintah Hindia Belanda yang berwenang berfungsi kembali". Katanya, hukum Belanda harus diterapkan dan ditingkatkan oleh para pejabat pemerintah Belanda di Jawa yang hanya akan tunduk kepada perintah yang diberikan oleh Laksamana Mountbatten. Pada hari yang sama, Letnan Jendral Sir Philip Christison, panglima Sekutu untuk Hindia Belanda, mengumumkan bahwa pasukan-pasukan Jepang di Jawa sementara harus dipakai untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Pengumuman ini segera diikuti oleh pendaratan kontinen-kontinen kecil pasukan Belanda di bawah perlindungan Inggris. Soekarno dan para pemimpin Republik lainnya berkali-kali memperingatkan Inggris untuk menghentikan pendaratan-pendaratan yang dilindunginya itu. Mereka meyakinkan bahwa penduduk Indonesia yang sudah curiga dan menentang pengumuman Patterson dan Christison, pasti akan menganggap kedatangan pasukan Belanda itu sebagai petunjuk positif dari suatu keinginan menggulingkan Republik itu dan kembalinya status penjajahan di Indonesia. Para pemimpin Indonesia: khawatir bila reaksi umum terhadap realisasi ini akan menimbulkan penganiayaan terhadap beribu-ribu tawanan Belanda yang masih ditahan dalam kamp-kamp konsentrasi Jepang.

Setiap keragu-raguan yang masih ada di pihak pendudu Indonesia terhadap keinginan Belanda, dengan cepat menjadi kepastian oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pasukan-pasukan kolonial Belanda. Pengamat militer Amerika Serikat yang termasuk staf Jendral Christison, Mayor F.B. Crockett menyatakan:

Berbarengan dengan kedatangan Jendral van Dyen, di jalan-jalan (Jakarta) mulai tampak barisan patroli Belanda dan Ambon (serdadu KNIL) yang getol menembak. Mereka menembak segala yang tampak mencurigakan, dan bila tidak ada yang dapat menjadi sasaran, mereka tidak segan-segan merampas rumah penduduk, dan tanpa tuduhan atau peringatan, menyeret keluar beberapa atau seluruh penghuninya " Insiden-insiden" itu meningkat. Kaum nasionalis mendapat perintah bahwa setiap perlawanan dari pihak mereka akan ditumpas oleh para penguasa. Untuk mencegah , Soekarno memerintahkan agar semua orang Indonesia menyingkir dari jalan-jalan di Batavia pada malam hari. Menjelang jam 8.00 malam, jalan sudah kosong kecuali barisan patroli Belanda yang mondar-mandir. Ini adalah contoh mengesankan cara Soekarno memerintah rakyat .

Aktivitas semacam itu secara efektif merongrong kemungkinan pelaksanaan kebijakan non intervensi dalam hubungan politik antara Republik dan Belanda yang diharapkan Let. Jen. Christison dapat dijalankannya setelah mengetahui keadaan setempat. Analisis Mayor Crockett tentang situasi ini dan keprihatinan yang timbul dalam hatinya, juga dirasakan oleh para pemimpin Republik. Menurut Crockett:

Dari apa yang saya lihat, jelas bagi saya bahwa ditinjau dari sudut pengumuman Inggris tentang tidak campur tangan secara politik, Belanda akan berusaha dan terus berusaha agar Inggris tidak bisa melepaskan diri dengan merangsang ketidaktenteraman di kalangan penduduk pribumi. Kekurangajaran patroli Belanda itu tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Apa yang bakal mereka peroleh dari taktik-taktik semacam itu sudah jelas: mereka akan membuat Inggris terlalu sibuk sehingga tidak sempat melucuti Jepang (ini adalah alasan utama kedatangan mereka ke sini, dan mereka akan memaksa Inggris memasukan lebih banyak lagi pasukan ke dalam wilayah itu.

Ini berarti Inggris akan lebih banyak lagi terlibat. Aktivitas pasukan-pasukan Belanda seperti itu, yaitu bahwa mereka terus mendarat di bawah perlindungan Inggris, dan pengumuman-pengumuman Inggris yang kurang tegas, secara bersama-sama menunjukkan kepada kebanyakan orang Indonesia, bahwa pernyataan tegas kemerdekaan mereka sedang ditantang disini memancing reaksi mereka yang tajam. Djibaku tidak dapat lagi ditahan. Unit-unitnya dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok tempur yang kecil dan hal ini segera diikuti oleh berbagai unit pemuda bersenjata, yang mengadakan serangan keras terhadap patroli Belanda dan Inggris. Dalam beberapa kasus, biasanya di mana Barisan Pelopor terlibat, sasaran serangan-serangan itu, tidak terbatas kepada pasukan-pasukan asing, tetapi meluas hingga para tahanan sipil Belanda yang tidak bersenjata, termasuk wanita dan anak-anak. Berbarengan dengan itu, semua unit orang Indonesia bersenjata meningkatkan usaha mereka merebut senjata dan kekuasaan dari Jepang.

Komando Sekutu kini memberi prioritas utama kepada usaha pemulihan keamanan dan ketertiban di bawah kekuasaan Inggris di kota-kota besar dan pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera, dan perlucutan Jepang akan dipikirkan nanti. Komando Sekutu memerintahkan para komandan Jepang untuk menyerang dan merebut kembali kota-kota yang sudah dikuasai orang Indonesia seperti Bandung. Dipakainya pasukan Jepang oleh Sekutu untuk melawan Republik selanjutnya mendorong orang Indonesia untuk melawan Inggris sekaligus Belanda, dan memperkuat kecurigaan mereka bahwa Indonesia ingin dikembalikan kepada status penjajahan lagi. Selama bulan November dan Desember, pertempuran yang luas dan terus menerus berkobar di hampir seluruh Jawa dan banyak wilayah Sumatera dan Bali. Pertempuran paling hebat terjadi selama paruh pertama bulan November di Surabaya di mana beberapa organisasi pemuda Indonesia yang bebas bergabung di bawah BKR bertempur melawan satu setengah divisi pasukan Inggris dan India selama 10 hari dan menderita korban yang sangat besar.

Meskipun Inggris dilengkapi dengan pesawat-pesawat terbang dan meriam dalam pertempuran mereka di pelabuhan dan setelah pertempuran yang lama dan pahit akhirnya berhasil menguasai kota, perang itu tetap dan masih dianggap suatu kemenangan oleh orang Indonesia, karena pertempuran di Surabaya merupakan suatu titik balik dalam perjuangan kemerdekaan mereka. Ini merupakan suatu demonstrasi di hadapan Inggris tentang kekuatan berperang dan

kesediaan mengorbankan jiwa raga yang ada di balik gerakan yang sedang ditentang Inggris itu. Ini menyadarkan Inggris akan adanya kenyataan bahwa Republik itu didukung oleh massa Indonesia, tidak secara apatis, tetapi secara positif dan entusias. Pertempuran di Surabaya menyadarkan Inggris secara mengejutkan, akan kenyataan bahwa jika mereka tidak bersedia ke Indonesia mencurahkan kekuatan tentara dan perlengkapan yang jauh lebih besar ke Indonesia, mereka harus meninggalkan kebijakan-kebijakan mereka yang sebelumnya dan mencari tempat berpijak yang sama dengan para pemimpin Republik. Setelah ini menjadi jelas bagi Inggris, maka mereka mulai menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap penolakan Belanda untuk berurusan dengan Republik, dan dengan keras mendesak mereka mengadakan perundingan yang mungkin pada akhirnya akan membawa kompromi secara damai. Jadi, bersama dengan contoh-contoh lain tentang perlawanan orang Indonesia, Pertempuran di Surabaya membuka jalan bagi diadakannya perundingan-perundingan diplomatik selama tahun 1946 dan awal tahun 1947 antara Belanda dan Indonesia.

Selama periode selanjutnya, pertempuran sama sekali tidak berhenti, tetapi keadaannya yang umum dan intensitasnya sangat berkurang dibandingkan dengan yang terjadi selama 10 minggu terakhir tahun 1945. Di Jawa dan Sumatera, Inggris dan kemudian Belanda, membatasi hampir semua operasinya hanya di daerah-daerah yang mereka kuasai sekitar Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang, Medan, dan Palembang. Di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kelapa, Belanda tidak menemui banyak kesulitan di hampir semua wilayah dan segera memasukkan (cukup pasukan untuk mengambil alih tugas pasukan Australia yang mudah melucuti pasukan Jepang yang menguasai daerah itu).

Namun demikian, Bali, daerah Minahasa di Sulawesi Utara, dan Sulawesi barat daya, merupakan perkecualian. Pertempuran antara pasukan Belanda dan Republik terus berlangsung di Bali hingga pertengahan tahun 1948. Perlawanan Republik di Sulawesi barat daya yang padat penduduknya itu begitu alot hingga Belanda harus mencari takti-taktik yang paling brutal untuk memenangkannya. Pada awal tahun 1946, Belanda menugaskan Kapten Westerling yang kejam itu untuk "menenteramkan" wilayah itu; sejumlah besar orang Indonesia, sipil maupun gerilyawan, dicurigai dan dengan tuduhan yang dicari-cari dibunuh oleh pasukan tembaknya. Para penguasa Republik menegaskan bahwa hampir 30.000 orang Indonesia dibunuh dengan cara ini dan dalam pertempuran. Sumber tidak resmi militer Belanda menyatakan bahwa hanya 4.000 orang yang menjadi korban. Pemerintah Belanda mengirim suatu komisi untuk meneliti kebrutalan di pihak tentara Belanda, tetapi tidak pernah ada laporan yang dikeluarkan. Kebanyakan pemimpin yang memberikan perlawanan tetapi tidak terbunuh, dimasukkan ke dalam penjara. Lebih dari seperempat penguasa bangsawan Indonesia di Sulawesi Barat daya (termasuk tokoh mereka yang paling penting) disingkirkan oleh Belanda dan diganti dengan orang-orang yang dipercaya lebih dapat loyalitasnya. Dengan demikian maka bagi yang masih berkuasa, ini peringatan bahwa kedudukan mereka, tergantung pada dukungan mereka kepada kebijakan Belanda.

Di Minahasa, pada bulan Februari 1946, serdadu KNIL Indonesia memberontak melawan Belanda, menyatakan memihak Republik, dan dengan bantuan penduduk sipil setempat, berhasil berkuasa selama satu bulan. Kecuali beberapa periode gencatan senjata yang semuanya sangat pendek kecuali satu, empat tahun pertama dari kehidupan Republik didominasi oleh peperangan melawan musuh-musuh yang kuat—suatu peperangan yang hasilnya dianggap oleh para pemimpinnya sebagai menentukan bagi hidup atau matinya Republik. Baik perundingan-perundingan yang alot antara Republik dan Belanda maupun politik internal revolusi Indonesia, harus dilihat berdasarkan latar belakang kenyataan ini.

Selama beberapa bulan terakhir sebelum penarikan mundur pasukan pendudukan Inggris pada akhir November 1946, dan selama satu atau dua bulan setelah Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947, merupakan masa yang relatif damai. Periode gencatan senjata satu-satunya yang lama adalah setelah Perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948. Sejak itu hingga serangan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, pertempuran antara pasukan Belanda dan Republik hanya terbatas pada bentrokan antar patroli. Namun demikian, bahkan hampir seluruh periode ini dirasa tegang karena terus-menerus siaga terhadap serangan Belanda besar-besaran, terutama setelah bulan Juni, 1948. Pada umumnya tekanan militer yang sungguh atau yang berupa ancaman dari luar oleh musuh yang kuat, tetap merupakan faktor yang menentukan hubungan-hubungan politik internal maupun eksternal Republik sejak kelahirannya hingga akhir tahun 1949.[]

Hand-Out 04

PKI, ANARKISME DAN AKUMULASI KETERTINDASAN

Prawacana

Sejarah Rakyat Indonesia adalah Sejarah Ketertindasan. Gelora reformasi yang terjadi sekarang, telah melupakan hakikat ketertindasan karena seolah-olah setelah kita mendapatkan kebebasan politik atau demokrasi politik, maka ketertindasan struktural berupa kesengsaraan dan kebodohan pun tidak terjadi lagi. Dengan kebebasan politik itu, seolah-olah rakyat pastilah akan mencapai kebahagiaan.

Setelah diselenggarakan pemilu bebas, seolah-olah rakyat langsung akan bisa makan, bisa bekerja, menyekolahkan anak, mendapat keadilan hukum dan sebagainya. Itulah gegap gempitanya reformasi yang pada akhirnya akan menenggelamkan kesadaran rakyat untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Bahkan tidak sedikit kaum terpelajar yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia telah keluar dari ketertindasan sejak runtuhnya benteng kekuasaan Orde Baru.

Akumulasi Kekecewaan Masyarakat

Akumulasi kekecewaan masyarakat dan hilangnya figur yang kredibel menyebabkan pergolakan konflik horizontal kian meluas. Pasca Reformasi di Indonesia banyak terjadi benturan-benturan kepentingan dalam masyarakat secara transparan tanpa lagi mengindahkan kaidah-kaidah umum perundang-undangan dan hukum yang mengatur sehingga banyak menimbulkan guncangan-guncangan sosial dimasyarakat.

Kondisi riil yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini cenderung anarkis, ketika rakyat baru terbebas dari pembungkaman massal, beralih kepada masa kebebasan dalam menyerukan seluruh aspirasinya terkait kepentingan individual atau golongan. Anarkisme saat ini sering terjadi dan seolah-olah telah membudidaya dimasyarakat Indonesia, terbukti dengan adanya tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi pada seluruh perseteruan diseluruh lapisan masyarakat, konflik horizontal seperti pengerusakan tempat ibadah, pemblokiran aktivitas partai politik yang dianggap berbahaya, penyegelan tempat-tempat yang dianggap menjadi tempat penyebaran ajaran sesat seperti kasus toko buku Ultimus di Bandung dll. Sehingga seluruh perseteruan tidak lagi menemukan solusi secara damai.

Menurut Yudi Latief seorang pemikir negara dan kenegaraan dari Universitas Paramadina Jakarta, mengungkapkan: "Sebenarnya pada masa krisis ini, rakyat mencari kepastian-kepastian apalagi ketika situasi hukum tidak berjalan mulus dan biasanya punya imbas keras terhadap keyakinan kepercayaan, yang kemudian rakyat mencari pemimpin-pemimpin panutan yang kira-kira bisa mengkompensasikan kelemahan-kelemahan hukum yang ada". Hukum dan peraturan tidak lagi dihiraukan, tokoh-tokoh masyarakat setempat tidak lagi dapat berperan sebagai mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Apa yang sebenarnya terjadi dalam tradisi masyarakat Indonesia pasca reformasi, dimana yang diandalkan hanya kekuatan otot, dan apa yang sebenarnya juga terjadi terhadap peran serta para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak lagi mendapat kepercayaan dimata masyarakat.

Krisis kepercayaan dalam masyarakat saat ini telah menjadikan masyarakat yang apatis terhadap sesama, bahkan terhadap para tokoh masyarakat itu sendiri. Permasalahan lebih lanjut yakni masyarakat yang kurang dalam segi pendidikan apalagi masalah perpolitikan, kebanyakan akan menilai pemimpin dari sisi kharismatik yang membuat itu akan menjadi suatu sosok ideal dan akhirnya menjadi patronase. Keadaan masyarakat yang terpatron ini dapat dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang berkepentingan dengan memanfaatkan kekuatan konspiratif. Ia menanggapi bahwa "di masa-masa krisis biasanya tokoh-tokoh kharismatik itu tumbuh meyakinkan bahwa dirinya sendiri sebagai alternatif terhadap hukum, jadi pemimpin yang fundamental ini memberikan semacam karang yang stabil ditengah ketidakpastian hidup masyarakat itu." ungkapnya. Namun para tokoh dan pemimpin dalam masyarakat yang mengalami kegagalan dalam mewujudkan keinginan rakyat ini sangat berpengaruh bagi masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat mencari pemimpin panutan, yang sekiranya dapat mengkompensasikan kelemahan hukum yang ada. Pemimpin adil yang diharapkan menjadi alternatif itu ternyata memunculkan fenomena pemimpin kharismatik yang seolah-olah dapat menjawab permasalahan akan kekosongan hukum

yang memberi kepastian. Bagaimana dengan kekuatan dari klan tradisional, yang dulu menjadi sumber keteladanan bagi rakyat. Menurutnya basis-basis tradisional yang diisi oleh tokoh keagamaan, kiai, ulama mulai susut oleh karena krisis yang juga bisa dikonsepsikan dengan urusan ekonomi yang akhirnya peserta tradisional ini pudar akan keteladanan. Secara otomatis saat ini hanyalah bersisa pada pola-pola baru pemimpin karbitan tak lain memberikan interpretasi keagamaan yang terputus, tetapi memberikan jaminan atas kepastian. Untuk hal ini Yudi Latief menilai figur baru ini tidak harus produk pesantren atau produk dengan pemahaman keagamaan yang mendalam, yang akhirnya kharismanya terbatas dan tidak efektif mempengaruhi banyak massa. "orang yang terbatas secara spiritual dan intelektual ya daya pengaruhnya juga pasti terbatas". imbuhnya.

Dampak lain sebagai contoh yakni menipisnya toleransi antar umat beragama dibandingkan dahulu pada zaman Majapahit terkenal dengan sikap toleran yang kental antar umat Hindu dan Budha. Tentunya hal yang harus diperhatikan ialah faktor pada tataran masyarakatnya. Clifford Geertz menyebut hal ini dengan *mix tide* yakni aspek perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat seperti perbedaan agama dapat di-netralisasi karena kesamaan aspek sosial seperti kesamaan suku, kelas sosial, atau latar belakang pendidikan. Semakin banyaknya unsur kesamaan tersebut dapat menjauhkan bahkan meredam potensi konflik yang ada. Persoalan ditingkat *grass root*, seperti dalam kasus kekerasan pada masyarakat, yang harus diperhatikan lebih dahulu ialah bagaimana aparat penegak hukum itu sendiri, apakah telah sesuai dengan perundang undangan, ketegasan dan konsistensi dalam melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang bersalah.

Pakar ilmu pemerintahan Universitas Gadjah Mada AAGN Dwipayana menilai bahwa budaya kekerasan timbul karena terdapat ruang atau peluang penggunaan cara-cara anarkis tersebut. "Masyarakat juga meniru kekerasan yang dilakukan oleh negara selain karena ada ruang untuk melakukan hal tersebut, dan belakangan fenomena munculnya kekerasan dikarenakan struktur yang menindas ketika orang ditindas oleh struktur, maka orang bisa melawan apapun caranya termasuk dengan kekerasan," ungkapnya.

Ia menggarisbawahi yakni terdapat dua hal, pertama karena mereka meniru negara yakni aparat yang melakukan kekerasan. Kedua karena masyarakat ditutup ruangnya untuk melakukan pembelaan terhadap negara "mau tidak mau masyarakat harus melakukan tindakan kekerasan tersebut untuk membela dirinya" jelasnya. Keadaan chaos dalam masyarakat yang berdampak tumbuh suburnya tindakan anarkis merupakan efek dari krisis negara tersebut akibat pada kekuatan konspiratif (pejabat, militer, pengusaha, politisi, dll) gagal dalam kedewasaan mereka berpolitik. Kekuatan tersebut mempunyai kekuatan resonansi sosiologis yang kuat sehingga menyebabkan guncangan pada masyarakat *grass root*.

Konflik horizontal dalam masyarakat seolah tak terhindarkan diperpuruk dengan situasi minus kepemimpinan yang seharusnya menjadi alternatif pada kosongnya hukum dalam memberi kepastian. Sistem dan kondisi masyarakat seharusnya diperbaiki secara berbarengan. Menurut Paulo Freire belum pernah dalam sejarah terjadi sebuah kekerasan yang dimulai oleh mereka yang tertindas. Bagaimana mungkin masyarakat yang selalu tertindas menjadi perintis, jika mereka sendiri yang menjadi hasil dari kekerasan tersebut.

PKI dan Ketertindasan: Holocaust Terhadap PKI

Sudah beberapa tahun ini tidak ada lagi tayangan yang mengerikan, tayangan yang menyuguhkan ke publik tentang setan-setan merah 'PKI' yang melakukan tindakan biadab terhadap para jenderal dan dituding sebagai biqot pancasila. Akankah ini pertanda bahwa 'PKI' telah diampuni? Tanggal 30 September tiap tahunnya—pada masa Soeharto—tayangan 'film' G30 S/PKI selalu hadir dalam TV dan menemani masyarakat di Nusantara. Inilah potret bagaimana sejarah diwariskan pada generasi muda. Pada masa soeharto berkuasa di negeri ini, hampir di setiap tanggal 30 September 'film' G30 S/PKI ditayangkan dan menjadi ritualitas politik. Makanya tidak berlebihan, jika film ini menyamai rating sinetron yang disukai oleh masyarakat Indonesia, faktanya ketika 30 September menjelang mayoritas masyarakat akan nongkrong di depan TVRI dan mengkhidmati film tragedi kemanusiaan ini. Tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh PKI yang telah menelan banyak korban dan kemudian korban itu diabadikan sebagai pahlawan revolusi, jamak ditentang secara global oleh siapa pun. Jelaslah, kekerasan adalah hal yang tidak bisa diterima untuk alasan apa pun.

Maka PKI dengan kesalahannya harus rela dihapus dari konstelasi politik nasional. Dan untuk mengenang keblinger-an 'PKI' ini, 1 Oktober dijadikan hari kesaktian Pancasila, walaupun bisa dikategorikan sebagai 'mitos', namun Hari Kesaktian Pancasila cukup ampuh untuk menanamkan kebencian terhadap PKI. Tidak cukup itu saja, hukuman untuk PKI diakumulasi dengan perlakuan yang diskriminatif terhadap 'anak pinak PKI', tidak boleh menjadi pegawai negeri, dan sampai dengan pencabutan Hak atas akta kelahiran. Maka rentetan demi rentetan kebencian yang ditanamkan oleh rezim soeharto atas PKI bermutasi menjadi holocaust yang setara dengan holocaust yang diciptakan oleh PKI dalam kudeta revolusinya.

Harus diakui tanpa mahasiswa, tanpa ABRI dan tanpa rakyat, 'PKI' tidak akan mampu dipunahkan dari bangsa yang beradab ini, walaupun hanya sebuah 'ilusi', namun tintel bangsa yang beradab telah terlanjur melekat ditengah-tengah ketidak beradaban sebuah bangsa. Maka jejak-jejak 'PKI' mau tidak mau harus dihapus dari kehidupan bangsa. Mungkin kita masih ingat dengan 'TRITURA' dan salah satu pointnya 'hapuskan PKI', sungguh gema 'penghapusan PKI' setara dengan tuntutan penurunan harga kebutuhan bahan pokok. Dalam konteks ini, kekuatan informasi lah yang mampu melembagakan 'kebencian' terhadap bigot seperti PKI, hingga 'kebencian' terhadap PKI pada masa itu setara dengan kebencian terhadap melambungunya harga kebutuhan pokok.

Soeharto terbilang penguasa yang sukses memangkas dan membasmi PKI, dengan seperangkat kebijakan, seperti, ideologisasi bahwa 'PKI' adalah pengkhianatan terhadap Pancasila. Maka di sekolah-sekolah buku-buku pelajaran sejarah dikaburkan sebagai 'ideologisasi' kebencian terhadap PKI. Tidak hanya itu, seperangkat Tap MPR tentang pelarangan PKI ditelurkan sebagai upaya membasmi PKI sampai ke akar-akarnya.

Untuk membenci 'PKI' memang banyak alasan yang direduksi. Kebiasaan yang dilakukan oleh PKI, kemudian ajaran PKI yang diklaim secara membabi buta bertentangan dengan Islam adalah alasan-alasan besar dibalik 'kebencian' terhadap PKI. Kebiasaan PKI minsalnya, dilihat sebagai justifikasi untuk pembrendelan secara subversif terhadap buku-buku yang beraroma komunisme. Bahkan para pemikir yang mengawinkan metodologi komunisme dalam khazanah pemahamannya, tidak luput juga dari 'kambing hitam' sebagai antek-antek komunisme, seperti halnya Pramodya Ananta Toer yang diasingkan ke Digul karena hanya mengkritik penguasa dengan pendekatan ala Marxisme. Rangkaian demi rangkaian yang digubah oleh penguasa untuk menanamkan kebencian terhadap 'PKI', tidak lain adalah legitimasi atas kekuasaan yang dibangun dengan politik pencitraan. Maka dapat dipahami, semua 'kebencian' yang direduksi ini adalah politis dan sepenuhnya ditujukan untuk legitimasi kekuasaan.

Kebiasaan pasca G30 S/PKI.

PKI memang salah, PKI memang 'keblinger', dengan rangkaian tindakan kekerasan yang dipertontonkan hanya untuk kekuasaan. Maka kini 'anak-pinak PKI' terpaksa menanggung penderitaan yang luar biasa. Pengucilan, perlakuan diskriminatif atas hak politik dan atas hak untuk mendapat pekerjaan harus ditanggung sebagai konsekwensi sejarah yang diperlakukan secara tidak 'adil' terhadap putra-putra PKI. jika, kita mau membuka mata dan pikiran secara sehat. Maka sejarah akan berkata lain, ada banyak holocaust balasan yang diciptakan untuk para kader-kader PKI. Dan sampai hari ini, tidak banyak masyarakat yang mengetahui perihal Holocaust yang terjadi besar-besaran di pulau Bali dan Bali seketika, dijadikan sebagai ladang 'pembantaian' untuk kader-kader PKI. kenapa ini tidak pernah disungguhkan ke publik sebagai sebuah sejarah kelam bangsa yang lebih kejam dibanding dengan tragedi G30 S/PKI?

Kebiasaan memang cenderung dibalas dengan kebiasaan yang lain, dan ini menggambarkan watak primitif sebuah bangsa. Ketika PKI membantai para jenderal, maka balasannya semua kader-kader PKI, GERWANI dan semua yang berhubungan dengan PKI akan dibantai secara kejam. Kebiasaan ini, dilupakan begitu saja. Dan hanya segelintir tokoh yang menguraikan dan memaki kebiasaan ini secara terbuka. Soe Hok Gie dalam hal ini, telah menelanjangi kekejaman yang dilakukan atas kader-kader PKI dalam sebuah opininya yang bertajuk "di sekitar peristiwa pembunuhan besar-besaran di pulau Bali" dan dimuat di media mahasiswa pada 1967. Soe Hok Gie telah membukakan mata dunia, bagaimana Bali dipersiapkan sebagai ladang pembantaian untuk kader-kader dan simpatisan PKI.

Dipermulaan tahun 1966, ketakutan dan ketiadaan harapan menyerang Kader-kader PKI dan klimaksnya kader-kader ini menyerah tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, maka sikap 'nrimo' diperlakukan seperti apa pun menjadi sebuah pilihan kader-kader PKI. Pilihan ini terjadi, ketika mass terror diperlakukan berkepanjangan, hingga ketakutan akan mudah menyerang kelompok yang diteror secara ajeg dan akhirnya menyerahkan diri tanpa syarat. Strategi ini telah dipraktikkan oleh Stalin di Rusia dalam menebar 'ketakutan' pada lawan-lawan politiknya. Kekejaman yang tidak lumrah bagi bangsa yang membangun budaya demokrasi, namun sejarah ketika itu dikaburkan, maka pembantaian terhadap kader-kader PKI menjadi hal yang lumrah.

Soe Hok Gie, dalam sisi yang lain juga telah melihat dengan jeli 'bagaimana Pembantaian terhadap PKI' juga didalangi oleh elit-elit yang sepaham dengan PKI yang berupaya membersihkan diri, dengan menghasut rakyat membantai kader-kader PKI. Maka, proses 'self washing' menjadi pilihan elit-elit PKI yang berkhianat ini.

Dipenghujung tahun 1965 dan diawal tahun 1966, tentara-tentara partikelir dengan seragam hitam dan bersenjata golok, pedang, telah melakukan tindakan-tindakan pembantaian, pembakaran terhadap rakyat yang terlibat PKI. ini dilegalkan sebagai tindakan yang sah dan dinamai dengan proses 'warming up' yang ditujukan untuk pembersihan, mirip dengan 'genocide' yang dilakukan di Rwanda, Rusia. Namun ironis ini malah dilakukan kepada sesama bangsa sendiri. Tiga Bulan saja Bali telah berubah menjadi neraka penyembelihan, dan tidak tertutup kemungkinan penyembelihan anak bangsa ini juga dilakukan di daerah-daerah lain di Nusantara, sebab 'kebencian' terhadap PKI waktu itu telah mencapai ubun-ubun kepala dan diledakkan dalam bentuk tindakan-tindakan kekerasan.

Dapat dibayangkan bagaimana holocaust terjadi ketika tokoh-tokoh besar, seperti Wedagama seorang tokoh PNI menghasut rakyat untuk membunuh PKI dan sampai-sampai mengatakan itu adalah tindakan yang dibenarkan oleh Tuhan dan dilegalkan secara hukum. Maka, pembantaian dan pemerkosaan atas GERWANI pada waktu itu dianggap sebuah kebanggaan. Siapa yang bertanggung jawab atas pengkaburan sejarah ini?[]



Marx, Lenin, Mao: Nabi Sosialisme-Komunisme Dunia!



BAGIAN KEDUA DISKURSUS SEJARAH PEMIKIRAN NEGARA



Bahwa manusia adalah makhluk politik yang dapat mencapai apa saja yang diinginkan sepanjang mereka tetap sadar bahwa mereka hidup dalam satu negara. (Aristoteles)

Negara itu muncul karena adanya berbagai kebutuhan dan keinginan manusia semata-mata. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa mengingat kebutuhan dan keinginan manusia yang berbeda-beda dan bahkan bisa bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, mau tidak mau mereka harus bekerjasama agar kebutuhan yang saling berbeda-beda tersebut bisa terwujud. Dalam kerjasama tersebut, masing-masing orang bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. (Plato)

Negara dan masyarakat itu adalah hasil perbuatan manusia sebagai individu-individu, maka negara tidak berbeda dengan benda mati. Negara tidak lebih sebagai suatu mekanisme. Negara tidak lebih dari suatu alat manusia yang dibentuk dengan senjata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jika negara sudah terbentuk, ia harus mengutamakan individu-individu sebagai dasar bagi kepentingan negara. (Epicurus)

Negara adalah suatu kenyataan yang harus ada dalam kehidupan manusia. Negara disusun oleh manusia berdasarkan atas kemampuan rasionya, khususnya rasio murni manusia yang disesuaikan dengan hukum alam kodrat. (Cicero)

Negara terjadi karena adanya suatu perjanjian, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang selalu mempunyai hasrat untuk hidup bermasyarakat. Dan perjanjian itu wajar terjadi karena manusia mampu menggunakan rasionya. Berdasar pada hasrat atau rasio itulah negara terbentuk melalui suatu perjanjian untuk mencapai tujuan bersama, yaitu adanya ketertiban dan keamanan umum. (Hugo Grotius)

Keinginan atau hasrat yang kuat untuk menciptakan perdamaian antara manusia itu bisa terwujud apabila mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut perjanjian masyarakat. (Hobbes)

Bahwa dalam keadaan alamiah itu manusia itu telah mempunyai beberapa hak yang juga bersifat alamiah, seperti hak hidup, hak kebebasan atau kemerdekaan dan hak milik. Dengan demikian sesuai dengan kodratnya manusia itu sejak lahir telah mempunyai hak-hak kodrat atau hak-hak alamiah. (John Locke)

Hand-Out 05 SEJARAH PEMIKIRAN NEGARA

Bahwa manusia adalah makhluk politik yang dapat mencapai apa saja yang diinginkan sepanjang mereka tetap sadar bahwa mereka hidup dalam satu negara.
(Aristoteles, dalam karya besarnya "Politics").

Prawacana

Negara terbentuk berdasarkan adanya: sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah tertentu, pemerintah yang sah yang mengorganisasikannya dan biasanya mempunyai kedaulatan, baik kedalam maupun keluar.¹ Dalam berbagai pembahasan tentang negara menurut pengertiannya yang paling modern, ada dua hal yang sering dibicarakan secara mendalam, yaitu perkembangan kesejarahan dan konsepsi mengenai kedaulatan negara.² Yang tersebut pertama tidak begitu menampilkan permasalahan yang berarti. Boleh jadi konsep kedaulatan, yang dalam banyak sumber dikatakan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, merupakan salah satu konsep yang paling sulit untuk diperoleh kesepakatan pengertiannya.

Karena itu suatu perbedaan harus ditentukan antara negara-negara yang benar-benar berdaulat dengan negara-negara yang setengah berdaulat; atau negara yang bahkan tidak mempunyai kedaulatan sama sekali. Yang pertama (negara berdaulat) jelas mempunyai otonomi secara penuh untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, sementara yang berikutnya (negara setengah berdaulat) seringkali masing dikontrol oleh kekuatan asing dalam setiap gerak langkahnya.

Negara-negara yang tergolong setengah berdaulat memiliki tipe yang harus dibedakan: *Pertama*, negara-negara yang mempunyai kekuasaan penuh dalam mengurus masalah-masalah dalam negeri, tetapi dalam masalah-masalah luar negeri masih tetap dikuasai oleh kekuasaan asing. *Kedua*, negara-negara yang mempunyai kekuasaan penuh untuk berhubungan dengan negara-negara lain, tetapi dalam hubungan dalam masalah-masalah dalam negeri sama sekali tidak mempunyai kekuasaan penuh. *Ketiga*, negara-negara yang hanya mempunyai sedikit kebebasan dalam berbagai hal. Ketiga tipe tersebut diatas dalam batas tertentu bisa menunjukkan beberapa tingkat *kolonialisme*. Dalam hal ini kolonialisme diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, baik secara militer maupun politis.

Perbedaan dalam negara setengah berdaulat tersebut mungkin akibat kelemahan militer, pemberian konsesi-konsesi kepada kekuatan negara lain melindungi apa yang masih tersisa dalam kedaulatannya. Hubungan antara Uni Soviet dengan beberapa negara satelitnya bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kolonialisme. Kebijakan Uni Soviet terhadap negara-negara satelitnya tidak semata-mata dikenakan kepada pemerintah negara yang bersangkutan, tetapi juga terhadap individu warga negaranya. Dengan kata lain segenap warga negara yang ada di negara-negara satelit diharuskan pula menerima pandangan-pandangan pemerintah Uni Soviet, bahkan jika dipandang perlu Uni Soviet bisa melakukan intervensi langsung dengan pasukan-pasukan militernya.

Tinjauan Kesejarahan

Negara dalam pengertian sekarang boleh dikatakan merupakan gejala yang relatif baru. Di jaman Yunani Kuno sebenarnya sudah disadari arti pentingnya negara bagi manusia, tetapi bentuk negara yang ada dalam pandangan mereka tidak lebih luas dari negara-negara kota (*City State*). Manusia memerlukan negara untuk mencapai perkembangan tertinggi dalam peradabannya. Manusia tidak dibawah negara, tetapi merupakan bagian integral dari negara, karena itu seharusnya tidak boleh ada perbedaan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.

Berangkat dari pemikiran semacam itu, Aristoteles dalam karya besarnya "Politics" pernah menjelaskan: bahwa manusia adalah makhluk politik yang dapat mencapai apa saja yang diinginkan sepanjang mereka tetap sadar bahwa mereka hidup dalam satu negara. Untuk mencapai tujuan-

¹ Cheppy Hari Cahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Jogjakarta: TIARA WACANA YOGYA, Cet. II., 1991) hlm. 39.

² Harold J. Laski, *State in Theory and Practice* (1935); Ernst Cassirer, *The Myth of The State* (1946); Reinhold Niebuhr, *Structure of Nations and Empires* (1950); dan juga Stuart Gerry Brown, "State", dalam *Encyclopedi International* (1970).

tujuan itulah manusia harus diberi kesempatan untuk mewujudkan kemampuan moral dan intelektualnya secara penuh.

Faktor-faktor ekonomi, tidak bisa tidak merupakan tumpuan utama untuk mentransformasikan bentuk kerajaan-kerajaan feodal dalam abad pertengahan kearah negara-negara dalam pengertian yang lebih modern. Dalam kaitan ini perkembangan industri sebagai akibat langsung dari tumbuhnya perdagangan dan perniagaan, memperkuat landasan untuk menancapkan suatu sistem moneter dalam perekonomian. Kalau sebelumnya Raja selalu bertumpu pada bangsawan-bangsawan pemilik tanah dan pasukan-pasukan pengawal setianya sebagai tenaga pendukungnya, maka dengan mulai mapannya sistem moneter telah mendorong Raja untuk mulai memungut pajak secara tetap dan mendirikan angkatan perang yang permanen. Tentara kerajaan ini menggantikan tentara-tentara feudal sebelumnya, dan akhirnya mampu menghancurkan kekuatan para bangsawan.

Kasus yang sama juga terjadi dalam perkembangan negara-negara modern. Usaha menemukan dan mengeksploitasi tanah-tanah baru merupakan dua faktor penting yang mampu mengarahkan perkembangan *kebanggaan Nasional* (National Pride). Pertumbuhan kekuatan kelas-kelas pedagang lebih jauh bisa menopang ekspansi perdagangan internasional, membatasi kekuasaan para bangsawan, yang ini merupakan tahap-tahap perkembangan dari negara. Negara melansir konsesi perdagangan didarat dan asing, membangun angkatan darat dan laut untuk melindungi orang-orang dan kapal yang tengah mengusahakan sumber-sumber baru, dan melanjutkan kebijaksanaan lain dalam perdagangan yang memberikan keuntungan bagi kas negara.³ Dalam kerangka perubahan-perubahan ini, masyarakat Eropa mengetengahkan satu kebijaksanaan baru yang dikenal dengan istilah *Merkantilisme*.⁴ Politik semacam ini mencoba menempatkan superioritas negara dalam bidang politik dan ekonomi diatas saingan-saingannya. Kekayaan negara diakumulasikan melalui berbagai penghasilan di daerah-daerah koloninya dan pemeliharaan keseimbangan perdagangan yang sangat menguntungkan. Dengan demikian, kolonialisme menjadi kekuatan utama yang mendorong tumbuhnya konflik-konflik internasional pada abad XVI, XVII dan XVIII. Dengan adanya perjuangan-perjuangan ini, negara nasional sebagai unit politik yang paling dasar menjadi lebih diperhatikan lagi.

Setelah perkembangan negara mencapai puncaknya seperti sekarang ini, konsep kedaulatan mulai diperdebatkan orang. Istilah kedaulatan menunjuk pada kekuatan *absolut* dan *final* dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam kenyataannya, ada banyak bentuk kedaulatan yang bisa dibedakan satu sama lain, misalnya ada kedaulatan *tituler* sebagaimana yang dimiliki oleh Mahkota Kerajaan Inggris, kedaulatan hukum yang didalamnya setiap orang ataupun kelompok berhak menentukan dan mengatur fungsi-fungsi pemerintahannya sendiri, atau ada pula sebutan kedaulatan *politik* dan *konstitusional* dimana masing-masing orang mempunyai kekuasaan penuh sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat.

Gagasan kedaulatan sebenarnya sudah mulai dibicarakan oleh Aristoteles, dimana dalam bukunya "Politics" telah dikatakan, bahwa kekuasaan tertinggi dan sah negara bisa saja dipegang oleh satu tangan, beberapa orang, atau malahan banyak orang. Dalam tradisi Romawi kedaulatan ada ditangan rakyat, kendatipun dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Raja. Sampai dengan munculnya negara modern, masalah kedaulatan masih dirasakan kabur. Penerapan ajaran

³ Untuk membandingkan arti kemerdekaan dapat kita refleksikan dari para tokoh kemerdekaan Indonesia sebagai berikut; Ki Hajar Dewantara menulis; "Dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan bersifat tiga macam: berdiri sendiri (*zelstandig*), tidak tergantung pada orang lain (*onafhankelijk*), dan dapat mengatur dirinya sendiri (*vrijheid, zelfbeschikking*).". Kalau istilah Belanda itu diterjemahkan kedalam jargon yang lebih dikenal sekarang, maka ketiga komponen kemerdekaan itu ialah *self-reliance*, *independence*, dan *self-determination*. Sukarno lebih menekankan *independence*, yaitu terlepasnya Indonesia dari penguasaan oleh suatu bangsa dan penguasaan asing. Hatta dan Syahrir lebih menekankan *self-reliance* yaitu otonomi setiap individu dalam memutuskan apa yang harus dikerjakan. Tan Malaka selepas sekolah guru di Harlem, Belanda, memilih menjadi guru untuk anak-anak para kuli kontrak di perkebunan Deli, melihat kemerdekaan sebagai *self-determination*, yaitu kesanggupan setiap kelompok sosial menentukan nasibnya sendiri dan tidak menggantungkan peruntungannya pada kelompok sosial lainnya. Perbedaan tekanan itu menjadi lebih jelas kalau dilihat dari hubungan dengan apa yang hendak ditentang. Kemerdekaan sebagai *independence* secara telak menolak penjajahan. Kemerdekaan sebagai *self-reliance* membatalkan ketergantungan. Sedangkan kemerdekaan sebagai *self-determination* menampik segala jenis penindasan dan pembodohan.

⁴ Strutt Gerry Brown, "State", dalam *Encyclopedy International* (New York: Glorier, 1970).

feodalisme, dimana sumber-sumber kekuasaan telah ditumbuhkan dengan konflik antara gereja, bangsawan dan otoritas raja, telah menutupi pengertian yang jelas tentang kedaulatan itu sendiri.

Dalam kegelapan ini, muncullah nama Jean Bodin, seorang pemikir Perancis abad XVI yang pertama kali merumuskan konsepsi modern tentang kedaulatan. Dalam pandangan Bodin, sebagaimana telah disinggung diatas, kedaulatan tidak lain merupakan: kekuasaan yang absolut dan final dalam masyarakat. Dari pandangan Bodin itulah kemudian muncul teori tentang negara sebagai kelompok individu dalam satu wilayah tertentu didalam pemerintahan sendiri dan melalui pemerintah melakukan pengawasan kedaulatan terhadap berbagai masalah yang dihadapi.⁵

Asal Mula Negara

Tentang asal mula negara akan disinggung masalah teori *perjanjian masyarakat*. Satu-satunya dasar yang dipakai adalah, teori perjanjian masyarakat paling dekat dengan ajaran-ajaran demokrasi yang diimpikan oleh banyak negara.

Dengan teori perjanjian masyarakat (*social contract, social compact*), dimaksudkan adalah teori yang berusaha menjelaskan asal mula dan sifat negara, termasuk pemerintah, yang dianggapnya sebagai hasil perjanjian antara individu-individu yang mendirikan masyarakat dan negara, atau antara warga negara suatu negara dengan pemerintahnya.

Teori perjanjian masyarakat ini telah memperoleh berbagai bentuknya mulai dari jaman Yunani Kuno sampai jaman modern sekarang ini, dan memperoleh popularitasnya pada abad XVII dan XVIII. Di antara tokoh pemikir teori perjanjian masyarakat yang sudah banyak dikenal adalah Plato, Epicurus, Cicero, St. Agustinus, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant.⁶

Semua teori yang dikemukakan oleh para tokoh diatas, umumnya menandakan bahwa hubungan antara penguasa negara dan yang dikuasai semata-mata dilandasi oleh kesepakatan, baik yang tegas maupun yang tidak, di antara kedua belah pihak, yang mana masing-masing masih diikat oleh kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi demi eksistensi negaranya.

Untuk menjelaskan perkembangan suatu masyarakat sebelum adanya negara sebagaimana bentuknya sekarang ini teori perjanjian masyarakat biasanya mengetengahkan salah satu dari dua sasaran umum. Yang *pertama*, ingin memberikan jastifikasi terhadap kekuatan absolut seorang raja, seperti yang dilakukan Thomas Hobbes dalam bukunya "*Leviathan*" yang boleh dikatakan ingin membela kedudukan Raja Stuart. Yang *kedua*, ingin memberikan justifikasi terhadap beberapa bentuk perlawanan rakyat melalui wakil-wakilnya didalam badan-badan perwakilan, seperti yang dilakukan oleh John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government* yang ingin memberikan justifikasi terhadap "The Glorious Revolution" tahun 1688.

Apabila kita amati tulisan Locke dalam bukunya tersebut akan jelas kelihatan pengaruh koloni Amerika yang dimanifestasikan dalam pernyataan kebebasan dan kemerdekaannya dari kekuasaan Inggris untuk memnuhi kewajiban-kewajiban kontraktual.

Demikian kalau kita amati semua teori mengenai perjanjian masyarakat ini, akan timbul kesan umum bahwa dalam banyak hal teori-teori perjanjian masyarakat ini lebih menekankan pada peranan rakyat itu sendiri dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintahnya. Berikut ini akan dipaparkan penjelasan pemikiran para tokoh tentang teori perjanjian masyarakat.

Plato

Dalam sejarah filsafat, Plato merupakan murid dari Socrates yang paling cemerlang. Tiga buah karya tulis Plato yang banyak kaitannya dengan sejarah pemikiran mengenai negara dan hukum adalah; *Politeia* (tentang negara), *Politikus* (tentang abdi negara), *Nomoi* (tentang undang-undang). Dalam kepustakaan filsafat Plato disebut sebagai pencipta ajaran *alam cita* (*ideeenler*), sementara aliran filsafat yang dikembangkan sering disebut sebagai *Idealisme*. Plato terkesan dengan pemikiran kaum *Sofis*, sehingga pemikirannya banyak dipengaruhi.

⁵ Strurt Gerry Brown, *Ibid*.

⁶ Uraian lebih lanjut tentang pemikiran sarjana ini bisa dilihat dalam Soehino, *Ilmu Negara*, (Jogjakarta: Liberty), khususnya BAB III.

Pandangannya tentang asal mula negara, Plato menggaris bawahi bahwa negara itu muncul karena adanya berbagai kebutuhan dan keinginan manusia semata-mata. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa mengingat kebutuhan dan keinginan manusia yang berbeda-beda dan bahkan bisa bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, mau tidak mau mereka harus bekerjasama agar kebutuhan yang saling berbeda-beda tersebut bisa terwujud. Dalam kerjasama tersebut, masing-masing orang bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang demikian itu dapat berjalan dengan baik diperkirakan semua kebutuhan dan kepentingan tiap-tiap orang akan bisa terpenuhi secara lebih memuaskan.

Adanya kebersamaan dan kesatuan inilah yang nantinya akan membentuk masyarakat atau negara. Masyarakat atau negara muncul karena keinginan dan kesepakatan bersama manusia untuk mempersatukan diri didalam mencapai tujuan bersama.

Epicurus

Ajaran filsafat yang dikembangkan Epicurus dalam segi tertentu sangat berbeda dengan ajaran Aristoteles. Dan ajaran filsafat tersebut dapat dikatakan bertolak belakang. Karena zaman yang dilalui kedua tokoh ini bertolak belakang. Aristoteles hidup pada zaman Alexander Yang Agung, justru Epicurus hidup pada masa kebalikannya. Zaman dimana Epicurus hidup diwarnai dengan perpecahan yang terjadi di Yunani sebagai akibat meninggalnya Raja Alexander tersebut.

Pada zaman Aristoteles, hubungan antara manusia dengan negara demikian harmonis, dimana negara dan masyarakat dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Pada zaman Epicurus sebagai akibat perpecahan tersebut orang mulai bersikap acuh tak acuh terhadap eksistensi negara. Antara manusia sebagai individu dengan negara mulai timbul jurang yang memisahkan secara tegas. Negara tidak lagi dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan, akan tetapi individu yang harus memperhatikan dirinya sendiri. Diaraskan tidak akan ada kemungkinan lagi untuk mendidik para warga negara menjadi pendukung yang setia dan loyal terhadap negara.

Berdasarkan sikap terhadap situasi dan kondisi negara semacam itu, Epicurus menentang ajaran yang banyak bersifat individualistik. Karena itu Epicurus diidentifikasi sebagai pencipta ajaran *Individualisme* yang dalam perkembangan selanjutnya mampu mendesak ajaran *Universalisme* Aristoteles.

Dalam pandangan Individualisme Epicurus, negara dan masyarakat dianggap bukan bagian yang penting dalam kehidupan manusia, tetapi justru manusia itu sendiri yang menempati posisi sentral sebagai anggota negara atau masyarakat. Adanya negara tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan para individu yang tinggal didalamnya. Ajaran Epicurus juga dikenal dengan sebutan *atomisme*, karena memandang masyarakat sebagai suatu keadaan yang kompak, sementara individu-individu dipandang sebagai atom-atom yang menempati posisi vital. Masyarakat mempunyai dasar-dasar kehidupan yang otonom, dan lebih merupakan realitas dibanding masyarakat yang tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri.

Karena negara dan masyarakat itu adalah hasil perbuatan manusia sebagai individu-individu, maka negara tidak berbeda dengan benda mati. Negara tidak lebih sebagai suatu mekanisme. Negara tidak lebih dari suatu alat manusia yang dibentuk dengan senjata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jika negara sudah terbentuk, ia harus mengutamakan individu-individu sebagai dasar bagi kepentingan negara.

Cicero

Cicero adalah pemikir besar Romawi tentang negara dan hukum. Pemikiran Cicero banyak dipengaruhi oleh karya-karya Plato dan ajaran filsafat kaum Stoa. Pengaruh yang demikian besar ini nampak dalam dua karya Cicero, yaitu *De Republica* (tentang negara), dan *De Legibus* (tentang hukum atau undang-undang). Dengan demikian ajaran Cicero tentang asal mula negara tidak berbeda dengan ajaran Plato, yaitu melalui perjanjian masyarakat dan kontrak sosial. Namun demikian Cicero telah memodifikasi pemikiran Plato dengan memasukkan pengaruh-pengaruh Stoa didalamnya.

Dalam pandangan Cicero, negara adalah suatu kenyataan yang harus ada dalam kehidupan manusia. Negara disusun oleh manusia berdasarkan atas kemampuan rasionya, khususnya rasio murni manusia yang disesuaikan dengan hukum alam kodrat. Kendatipun ajaran Cicero berbeda dengan ajaran Epicurus yang menganggap negara sebagai hasil perbuatan manusia yang berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun ajaran Cicero ini jelas menunjukkan konsep perjanjian masyarakat tentang asal mula negara.

Hugo Grotius

Grotius juga dikenal sebagai pemikir besar tentang negara dan hukum. Grotius dikenal sebagai peletak dasar (pelopor) dan bahkan dianggap sebagai pencipta teori *Hukum Alam Modern*. Ajaran hukum alam yang dikemukakan oleh Grotius banyak dipengaruhi oleh hukum alam Yunani Kuno (Aristoteles), pemikiran Stoa (Zeno), dan juga jalan pemikiran Cicero. Pengaruh ini nampak dalam karyanya; *De Jure Belli ac Pacis* (Hukum Perang dan Damai) yang ditulis khusus untuk Raja Louis XIII dari Perancis.

Ajaran Grotius tentang hukum dan negara ini mencoba mengangkat akal manusia sebagai salah satu dasar yang paling efektif untuk mengatasi berbagai perpecahan yang terjadi dalam bidang keagamaan. Selain itu pemikiran tentang asal mula negara sangat dipengaruhi oleh Aristoteles dimana ia berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu mempunyai hasrat hidup bermasyarakat. Namun demikian Grotius lebih memusatkan analisisnya pada akal manusia itu sendiri. Dikatakan bahwa karena manusia itu memiliki akal atau rasio maka kepentingan pribadi atau keuntungan individual tidak akan mengalahkan kepentingan umum.

Dalam pandangan Grotius dan juga penganut aliran hukum alam pada umumnya, negara terjadi karena adanya suatu perjanjian, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang selalu mempunyai hasrat untuk hidup bermasyarakat. Dan perjanjian itu wajar terjadi karena manusia mampu menggunakan rasionya. Berdasar pada hasrat atau rasio itulah negara terbentuk melalui suatu perjanjian untuk mencapai tujuan bersama, yaitu adanya ketertiban dan keamanan umum. Didalam perjanjian itu juga disepakati pula Raja disertai tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Masyarakat selalu tunduk pada perjanjian itu karena menurut rasionya perjanjian itu dianggap benar dan baik.

Thomas Hobbes

Sebagai pemikir besar tentang negara dan hukum, ia memiliki dua buah karya yang cukup populer, *De Cive* (tentang warga negara), dan *Leviathan* (tentang negara). Hobbes dikenal sebagai penganut setia aliran hukum alam seperti Grotius. Dalam banyak hal ajaran Hobbes berangkat dari keadaan manusia sebelum adanya negara, dimana manusia hidup dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun. Dalam keadaan yang disebut *in abstrakto* ini manusia saling bermusuhan, berlawanan, curiga-mencurigai, dan mementingkan dirinya sendiri. Dalam keadaan yang demikian ini tidak jarang terjadi peperangan antara orang yang satu dengan lainnya, antara seorang dengan semua orang, dan juga antara semua orang melawan semua orang, *bellum omnium contra omnes*.

Keadaan yang serba tidak teratur ini sebenarnya berpangkal pada sifat-sifat yang melekat pada tiap-tiap manusia dalam keadaan *in abstrakto*, yaitu *pertama*, *competitio* (competition). Dengan adanya sifat ini manusia cenderung berlomba-lomba untuk mengatasi manusia yang lain. Manusia yang satu berusaha mengungguli manusia yang lain, dan dalam persaingan ini mereka cenderung membenarkan segala cara yang akan ditempuhnya. *Kedua*, *defentio* (defend). Sesuai dengan sifat yang pertama diatas, manusia yang satu tidak mau dikuasai oleh manusia lainnya. Karena itu timbul sifat yang kedua yaitu kecenderungan untuk membela diri, mempertahankan diri dan mengusahakan jaminan bagi keselamatannya. Dan yang *ketiga*, adalah sifat *Gloria*, yaitu sifat ingin selalu dihormati, disegani dan dipuja.

Dalam pandangan Hobbes, keinginan atau hasrat yang kuat untuk menciptakan perdamaian antara manusia itu bisa terwujud apabila mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut perjanjian masyarakat. Perjanjian itu tidak saja membentuk masyarakat tetapi berkembang sampai akhirnya membentuk suatu negara. Dalam negara itulah keselamatan manusia terjamin, melalui negara itu pula manusia dapat memiliki sesuatu yang diinginkan.

Perjanjian masyarakat ini dikatakan bersifat langsung. Ini berarti manusia yang terlibat perjanjian itu secara langsung menyerahkan hak atau kemerdekaannya kepada seorang Raja yang tidak terlibat dalam perjanjian bahkan diluar perjanjian. Raja merupakan pihak yang tidak terkena perjanjian, akan tetap memperoleh kekuasaan dari orang-orang yang mengadakan perjanjian tersebut. Karena pada prinsipnya tidak ikut terlibat dalam perjanjian masyarakat, maka tidak ada kewajiban bagi raja untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Sebenarnya dari kenyataan inilah absolutisme seorang raja memperoleh pembenaran (justifikasi). Raja dapat melaksanakan apa yang diinginkan, dan kalau perlu seorang raja dapat membunuh seseorang demi terciptanya perdamaian sesuai dengan tujuan utama perjanjian masyarakat.

John Locke

Beliau adalah pemikir besar tentang negara dan hukum dari Inggris. Ia hidup pada masa pemerintahan Raja Willem III yang mengendalikan pemerintahannya melalui suatu bentuk *monarkhi terbatas*. Oleh karena itu tidak heran jika ajaran-ajaran Locke, khususnya tentang ajaran negara dan hukum merupakan pembenar terhadap monarkhi terbatas Raja Willem III.

Sebagai penganut hukum alam, Locke sependapat bahwa hukum alam tetap menjadi landasan rasional perjanjian masyarakat yang timbul dari tuntutan penghargaan terhadap hak-hak manusia dalam keadaan yang masih alamiah. Namun demikian Locke berusaha melepaskan cara berfikir yang logis, deduktif, dan matematis untuk kemudian berganti dengan cara yang baru yang lebih realistis dengan berlandaskan pada praktek ketatanegaraan dan hukum yang lebih aktual.

Locke mendasarkan teorinya kepada keadaan alamiah manusia atau keadaan manusia di alam bebas. Sangat berbeda dengan Thomas Hobbes yang melihat keadaan alamiah itu tidak terdapat aturan atau ketentraman, maka Locke mengakui bahwa keadaan alamiah yang mendahului adanya negara itu sebenarnya sudah ada ketentraman dan alam pikiran seperti halnya dalam negara. Bahwa dalam keadaan alamiah itu manusia itu telah mempunyai beberapa hak yang juga bersifat alamiah, seperti hak hidup, hak kebebasan atau kemerdekaan dan hak milik. Dengan demikian sesuai dengan kodratnya manusia itu sejak lahir telah mempunyai hak-hak kodrat atau hak-hak alamiah yang oleh Locke disebut dengan *hak-hak dasar* atau *hak asasi*. Karena itu agar pelaksanaan hak-hak asasi bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, manusia selalu menyelenggarakan suatu perjanjian masyarakat, untuk membentuk masyarakat dan selanjutnya negara.[]



**Rakyat bukan boneka!
Yang selalu dipermainkan para penjilat!**

Hand-Out 06 NEGARA DAN KONSTITUSI

Prawacana

Secara umum negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan: tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar.

Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi. Hal ini dapat dicermati dari kalimat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai berikut: "... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia."

Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional (constitutional state). Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri dari konstitusionalisme (constitutionalism). Jadi, negara tersebut harus pula menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham.

KONSTITUSIONALISME

1. Gagasan tentang Konstitusionalisme

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah. Pemerintah adalah satu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara.

Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Di samping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Mengapa kekuasaan perlu dibatasi? Kekuasaan perlu dibatasi karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan. Ingat hukum besi kekuasaan dari Lord Acton yang mengatakan "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely".

Di dalam gagasan konstitusionalisme, undang-undang dasar sebagai lembaga mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negara (Mirriam Budiardjo, 1977). Jadi dapat disimpulkan, di dalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada konstitusi negara bercirikan dua hal pokok, yaitu sebagai berikut;

1. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
2. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara.

Konstitusi atau undang-undang dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil "Government by law, not by men" (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia).

Pada permulaan abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan mengenai konstitusionalisme, mendapatkan perumusan secara yuridis. Daniel S. Lev memandang konstitusionalisme sebagai paham "negara terbatas". Para ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedang ahli Anglo Saxon seperti AV Dicey memakai istilah Rule of Law. Di Indonesia, istilah Rechtsstaat atau Rule of Law biasa diterjemahkan dengan istilah "Negara Hukum" (Mahfud MD, 1993).

2. Negara Konstitusional

Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Namun tidak setiap negara memiliki undang-undang dasar. Inggris tetap merupakan negara konstitusional meskipun tidak memiliki undang-undang dasar. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai aturan pokok yang timbul dan berkembang dalam sejarah bangsa tersebut.

Negara konstitusional bukan sekadar konsep formal, tetapi juga memiliki makna normatif. Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang menggambarkan pembagian dan tugas-tugas kekuasaan tetapi juga menentukan dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Sementara itu di lain pihak konstitusi juga berisi jaminan akan hak-hak asasi dan hak dasar warga negara. Negara yang menganut gagasan konstitusionalisme inilah yang disebut negara konstitusional (Constitutional State). Adnan Buyung Nasution (1995) menyatakan negara konstitusional adalah negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaannya secara hukum.

KONSTITUSI NEGARA

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis "constituer" yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar.

Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar. Para pendiri negara kita (the founding fathers) menggunakan istilah hukum dasar. Dalam naskah rancangan undang-undang dasar negara Indonesia yang dihasilkan oleh BPUPKI, sebelumnya juga dipergunakan istilah hukum dasar. Barulah setelah disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 diubah dengan istilah undang-undang dasar.

Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu:

1. Herman Heller; membagi pengertian konstitusi menjadi tiga:
 - (a) Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
 - (b) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis,
 - (c) Konstitusi yang ditulis dalam suatu. naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.
2. Prof Prayudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi sebagai berikut:
 - (a) Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.
 - (b) Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.
 - (c) Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.
3. Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut:
 - (a) Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
 - (b) Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar

2. Kedudukan Konstitusi

a. Konstitusi sebagai Hukum Dasar

Konstitusi berkedudukan sebagai Hukum Dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan (lembaga-lembaga negara), dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Jadi, konstitusi menjadi (a) dasar adanya dan (b) sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Oleh karena konstitusi juga mengatur kekuasaan badan legislatif (pembuat

undang-undang), maka UUD juga merupakan (c) dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya.

b. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi (superior) terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itulah aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.

Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Aturan-aturan itu masih bersifat umum dan secara garis besar. Aturan-aturan itu selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada aturan perundangan di bawahnya.

Menurut Mirriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar 11mu Polilik, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuanketentuan sebagai berikut.

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif Dalam negara federal, yaitu masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar.

Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya, Undang-Undang Dasar Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme sebab bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler.

Apabila kita membaca pasal demi pasal dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 maka kita dapat mengetahui beberapa hal yang menjadi isi daripada konstitusi Republik Indonesia ini. Hal-hal yang diatur dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 antara lain:

1. Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas negara.
2. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya.
3. Hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warganya ataupun hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk juga hak asasi manusia.
4. Konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan pertahanan.
5. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar.
6. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.

Gagasan konstitusionalisme menyatakan bahwa konstitusi di suatu negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Sejalan dengan sifat membatasi kekuasaan pemerintahan maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu

1. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik;
2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri;
3. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya (ICCE UIN, 2000).

Selain itu, konstitusi negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2002).

1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara.

4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara,
6. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) serta sebagai center of ceremony.
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi.
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform).

UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundangan negara, UUD 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok Staatsgrundgesetz atau Aturan Dasar/Pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau Norma dasar.

1. Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia

Dalam sejarahnya, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut:

1. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan bagian penjelasan.
2. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.
3. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian.
4. Periode 5 Juli 1959-sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut:

1. UUD 1945 yang belum diamandemen,
2. UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002).

Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut.

1. Mengesahkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 hanya berlaku dalam waktu singkat yaitu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sejak 27 Desember 1949 diberlakukan undang-undang dasar baru yang disebut Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) tahun 1949. Hal ini terjadi karena bentuk negara Indonesia berubah dari bentuk kesatuan ke bentuk serikat atau federal. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) atau (UUD) RIS 1949 berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Dengan demikian UUD RIS 1949 tidak diberlakukan lagi. Periode berlakunya UUD RIS 1949 dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, oleh Moh. Yamin disebut Konstitusi II.

2. Proses Amandemen UUD 1945

Amandemen (bahasa Inggris: amendment) artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UM. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian (Taufiqurohman Syahuri, 2004), yaitu

1. Amandemen Konstitusi (constitutional amendment);
2. Pembaruan Konstitusi (constitutional reform).

UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan.

Perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Amandemen Ke-1 pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 19 Oktober 1999.
2. Amandemen Ke-2 pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 18 Agustus 2000.
3. Amandemen Ke-3 pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 November 2001.
4. Amandemen Ke-4 pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 Agustus 2002.

3. Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia. Selain berisi pernyataan kemerdekaan, ia juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu mencapai Masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tiap-tiap alinea pembukaan UUD 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan.

Alinea pertama berisi pernyataan objektif adanya penjajahan terhadap Indonesia. Selanjutnya mengandung pernyataan subjektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea kedua berisi pernyataan bahwa perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia selama ini telah mampu menghasilkan kemerdekaan. Akan tetapi, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Alinea ketiga ini mengandung makna adanya motivasi spiritual bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diyakini bukan hanya hasil perjuangan dan keinginan luhur bangsa tetapi juga atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa.

Alinea keempat berisi langkah-langkah sebagai kelanjutan dalam bernegara. Dalam alinea keempat ini ditetapkan tujuan bernegara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, konstitusi negara, dan dasar negara.

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

1. Bentuk Negara Kesatuan

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian atau negara yang di dalamnya tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Di dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. pemerintahan pusat ini tertinggi, dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Maka di dalam negara kesatuan hanya terdapat seorang kepala negara, satu Undang-Undang Dasar Negara yang berlaku untuk seluruh warga negaranya, satu kepala pemerintahan, dan satu parlemen (badan perwakilan rakyat).

Dalam praktiknya, kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan negara tersebut dapat dijalankan melalui dua cara yaitu dengan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Kata "sentralisasi" berasal dari kata Centrum yang artinya pusat atau memusat. Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan pemerintahan itu dipusatkan, yaitu pada pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan di seluruh wilayah negara itu. Kata "Desentralisasi" dari kata De dan Centrum, de artinya lepas atau melepas. Decentrum artinya melepas atau menjauh dari pusat. Dengan demikian, dalam Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat kekuasaan yang melepas atau menjauh dari kekuasaan yang ada di pusat. Kekuasaan itu nantinya ada di daerah. Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah negara tersebut. Daerah tersebut menjadi otonom, dalam arti memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu.

2. Bentuk Pemerintahan Republik

Secara teoretis, ada dua klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern, yaitu republik dan monarki atau kerajaan. Klasifikasi ini mengikuti ajaran Niccollo Machiavelli (1469-1527). Perbedaan ini didasarkan pada segi cara penunjukan atau pengangkatan kepala negara. Bentuk pemerintahan disebut republik apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pemilihan, sedangkan bentuk pemerintahan disebut kerajaan apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pewarisan secara turun-temurun.

3. Sistem Pemerintahan Presidensfil

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensfil. Secara teoretis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensfil. Klasifikasi sistem pemerintahan parlementer dan presidensifi didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

Dalam sistem pemerintahan presidensfil, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensfil adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan/majelis.
2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/ legislatif
3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal ini karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensfil adalah sebagai berikut:

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia lima tahun.
3. Penyusunan program ke-a kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kelemahan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut.

1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.
3. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

4. Sistem Politik Demokrasi

Sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hakikat demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Secara teoretis, klasifikasi sistem politik di era modern ini terbagi dua yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik otoritarian. Samuel Huntington dalam buku *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (2001) membuat pembedaan antara sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Sistem politik nondemokrasi atau otoriter ini mencakup: monarki absolut, rezim militer, kediktatoran, rezim korminis, rezim otoritarian, dan fasis. Pembagian atas sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter ini didasarkan atas:

1. Kewenangan pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan warganya
2. Tanggung Jawab pemerintah terhadap warga negara.

Adapun sistem politik disebut demokrasi apabila kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warga negara amat terbatas. Pemerintah negara tidak turut campur atas semua aspek kehidupan warganya. Warga negara dapat mengatur sendiri kehidupannya. Di samping itu, adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya atas apa yang dijalankan.

Secara normatif sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia didasarkan atas nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dasar Pancasila.[]

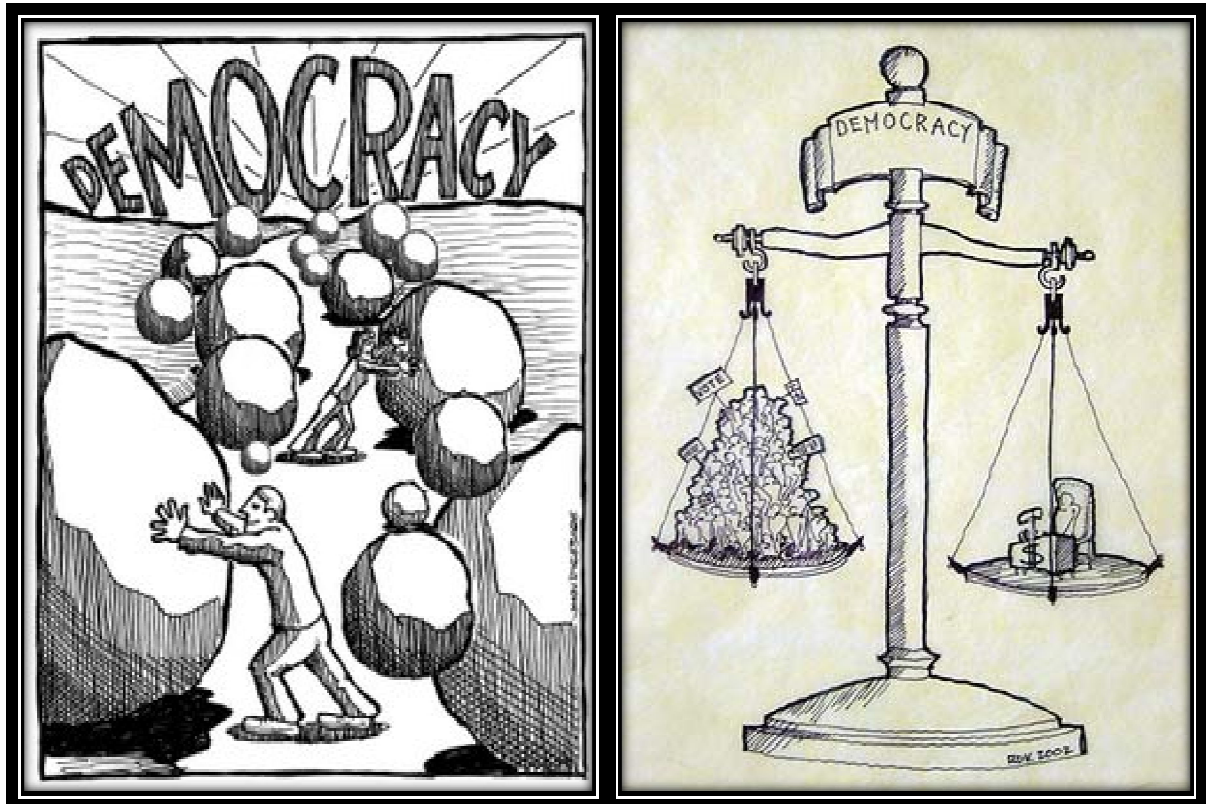


**Para pejabat dan politisi, justru yang mengkerdikan rakyat kecil!
Makna demokrasi menjadi *absurd*! Dengan hilangnya hak-hak bersuara,
berserikat dan berkumpul! Rakyat dihegemoni oleh rezim yang tiranik!**



BAGIAN KETIGA

DISKURSUS DEMOKRASI INDONESIA



Demokrasi di Indonesia harus memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berumpul, berpolitik.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat—government of the people, by the people, and for the people. (Abraham Lincoln)

Demokrasi adalah sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. (Samuel Huntington)

Hand-Out 07 STUDI DASAR DEMOKRASI

HAKIKAT DEMOKRASI

1. Pengertian Etimologis Demokrasi

Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, *demos-cratein* atau *demos-cratos* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM - abad ke-6 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan karena Yunani pada waktu itu berupa negara kota (*polis*) yang penduduknya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya yang berpenduduk sekitar 300.000 orang. Disebabkan adanya perkembangan zaman dan juga jumlah penduduk yang terus bertambah maka keadaan seperti yang dicontohkan dalam demokrasi secara langsung yang diterapkan seperti di atas mulai sulit dilaksanakan, dengan alasan berikut:

1. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak
2. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan.
3. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai, karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir
4. Masalah yang dihadapi negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.

Maka untuk menghindari kesulitan seperti di atas dan agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi, dibentuklah badan perwakilan rakyat. Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Namun pada prinsipnya rakyat tetap merupakan pernegang kekuasaan tertinggi selingga mulailah dikenal "demokrasi tidak langsung" atau "demokrasi perwakilan. Jadi, demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macarn, yaitu

1. Demokrasi langsung adalah paliarn demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum. dan undang-undang.
2. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Untuk negara-negara modem, penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena berbagai alasan, antara lain:

1. Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan;
2. Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak;
3. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara.

2. Pengertian Terminologis Demokrasi

Dari sudut terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi: Menurut Samuel Huntington demokrasi adalah: sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umurn yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer di antara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di negara tersebut. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintahan demokrasi. Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua (Maswadi Rauf 1997), yaitu

1. Kebebasan/ persamaan (freedom/equality), dan
2. Kedaulatan rakyat (people sovereignty).

Dengan konsep kedaulatan rakyat, pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal, pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan.

3. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki/ Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut/ Mutlak. Dalam pandangan ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato, dibedakan beberapa macam:

1. *Monarki*, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
2. *Tirani*, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.
3. *Aristokrasi*, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
4. *Oligarki*, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.
5. *Demokrasi*, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
6. *Mobokrasi/ Oklilokrasi*, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

Adapun bentuk pemerintahan yang dianut atau diterima dewasa ini adalah bentuk pemerintahan modern menurut Niccolò Machiavelli membedakan bentuk pemerintahan, yaitu:

1. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan.
2. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri.

4. Demokrasi sebagai Sistem Politik

Pada masa sekarang demokrasi dipahami tidak semata suatu bentuk pemerintahan tetapi sebagai sistem politik. Sistem politik cakupannya lebih luas dari sekadar bentuk pemerintahan. Beberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem, politik. Misalnya;

1. Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem, politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang

diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

2. Samuel Huntington, menyatakan bahwa sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Sukarno dalam buku *Demokrasi Vs Kediktatoran* (1981) mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi, sebagai berikut:

1. Pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda;
2. Pemerintahan konstitusional;
3. Pemerintahan berdasarkan hukum (Rule of Law);
4. Pemerintahan mayoritas;
5. Pemerintahan dengan diskusi;
6. Pemilihan umum yang bebas;
7. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya;
8. manajemen yang terbuka;
9. Pers yang bebas;
10. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas;
11. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
12. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
13. Pengawasan terhadap administrasi negara;
14. mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah;
15. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun;
16. Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system bukan poll system;
17. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi;
18. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu;
19. Konstitusi UUD yang demokratis;
20. Prinsip persetujuan.

Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau totaliter. Prinsip-prinsip ini bisa disebut sebagai prinsip nondemokrasi, yaitu sebagai berikut.

1. Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja.
2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusi yang sifatnya konstitusional, tetapi pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
3. Rule of Power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksetaraan di depan hukum.
4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekrit.
5. demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat kekuasaan penguasa atau pemerintah negara.
6. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

Demokrasi sebagai Sikap Hidup

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Pemerintahan atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku,

yang senantiasa bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. Pemerintahan demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya performed (eksis dan tegak). Perilaku demokrasi ada dalam manusia itu sendiri, baik selakii warga negara maupun pejabat negara.

DEMOKRATISASI

Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu

1. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa nondemokratis ke penguasa demokrasi;
2. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi;
3. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi;
4. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Dalam rumusan yang hampir sama, Samuel Huntington (2001), menyatakan bahwa proses demokratisasi melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu pengakhiran rezim nondemokratis, pengukuhan rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis. Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap.

1. Nilai (Kultur) Demokrasi

Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiardjo (1990) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela;
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah;
3. Pergantian penguasa dengan teratur;
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin;
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman;
6. Menegakkan keadilan;
7. Memajukan ilmu pengetahuan;
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Kita mengetahui bahwa demokrasi yang semula merupakan bentuk pemerintahan dan sistem politik telah berkembang sebagai suatu pandangan atau budaya hidup, yaitu pandangan hidup demokratis.

2. Lembaga (Struktur) Demokrasi

Menurut Mirriam Budiardjo (1997), untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem dwipartai, multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu dengan masyarakat.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan.

Dengan demikian untuk berhasilnya demokrasi dalam suatu negara, terdapat dua hal penting sebagai berikut:

1. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang inenjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Terbentuk dan betjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan.

Jadi, suatu negara dikatakan negara demokrasi apabila memenuhi dua kriteria, yaitu:

1. Pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi (struktur) demokrasi;
2. Masyarakat demokratis yang berwujud pada adanya budaya (kultur) demokrasi.

3. Ciri Demokratisasi

1. Berlangsung secara evolusioner. Artinya Demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama. Berjalan secara perlahan, bertahap, dan bagian demi bagian.
2. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif. Artinya Demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan. Proses menuju demokrasi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan setiap warga negara.
3. Proses yang tidak pernah selesai. Demokratisasi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus.

DEMOKRASI DI INDONESIA

1. Demokrasi Desa

Menurut Mohammad Hatta dalam Padmo Wahyono (1990), desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut "demokrasi asli". Demokrasi desa memiliki 5 (lima) unsur atau anasir, yaitu

1. Rapat,
2. Mufakat,
3. Gotong-royong,
4. Hak mengadakan protes bersama, dan
5. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.

Demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Namun, kelima unsur demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern menurut Moh. Hatta harus meliputi 3 (tiga) hal, yaitu

1. Demokrasi di bidang politik,
2. Demokrasi di bidang ekonomi, dan
3. Demokrasi di bidang sosial.

2. Demokrasi Pancasila

Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai:

1. Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik;
2. Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi

Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kedaulatan rakyat
2. Republik
3. Negara berdasar atas hukum
4. Pemerintahan yang konstitusional
5. Sistem perwakilan
6. Prinsip musyawarah
7. Prinsip ketuhanan

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut.

1. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial,
2. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan perwakilan.

3. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan sesuai dengan usia Republik Indonesia itu sendiri. Lahimya konsep demokrasi dalam sejarah modem Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. Membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Menurut Mirriam Budiardjo (1997) dipandang dari sudut perkembangan sej arah, demokrasi Indonesia sampal masa Orde Baru dapat dibagi dalam 3 (tiga) masa yaitu sebagai berikut;

1. Masa Republik 1, yang dinamakan masa demokrasi parlementer.
2. Masa Republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin.
3. Masa Republik III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonj olkan sistem presidensil.

Afan Gaffar (1999) membagi alur periodisasi demokrasi Indonesia terdirl atas:

1. Periode masa revolusi kemerdekaan,
2. Periode masa demokrasi parlementer (representative democracy), c.
3. Periode masa demokrasi terpirapin (guided democracy),
4. Periode pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy).

Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat pula dibagi ke dalam periode berikut.

1. Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 sampai 1950.
2. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama yang terdiri:
 - Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959;
 - Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965.
3. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998.
4. Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 sampai 1999,
5. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 sampai sekarang.

Pada masa reformasi ini, masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan bebas untuk melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Pada masa transisi dan reformasi ini juga, banyak terjadi pertentangan, perbedaan pendapat yang kerap menimbulkan kerusuhan dan konflik antarbangsa sendiri. Setelah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Diharapkan penyelenggaraan bernegara secara demokratis dapat dijalankan sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan rakyat.

SISTEM POLITIK DEMOKRASI

1. Landasan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia

Berdasarkan pembagian sistem politik, ada dua pembedaan, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi (Samuel Huntington, 200 1). Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai. prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan dan memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya adalah sistern politik demokrasi.

Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat dalam:

1. Pembukaan UUD 1945 pada Alinea 4 yaitu "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatn UUD Negara RI yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat
2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UM

2. Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Indonesia

Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia sebagai berikut.

1. Ide kedaulatan rakyat
2. Negara berdasar atas hukum
3. Bentuk republik

4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
6. Sistem perwakilan
7. Sistem pemerintahan presidensial

3. Mekanisme dalam Sistem Politik Demokrasi Indonesia

Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia sebagai berikut.

1. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Di samping adanya pemerintah pusat terdapat pemerintah daerah yang memiliki hak otonom.
2. Bentuk pemerintahan republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun DPR. Di samping kabinet, presiden dibantu oleh suatu dewan pertimbangan.
5. Parlemen terdiri dari dua (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
6. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari kepala daerah.
7. Sistem multipartai. Banyak sekali partai politik yang bermunculan di Indonesia setelah berakhir Orde Baru. Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik.
8. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
9. Lembaga negara lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial.

4. Masa Depan Demokrasi

Masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan-persyaratan atau demokrasi perlu syarat hidupnya. Proses demokrasi terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi bencana bagi negara-negara tersebut, baik transisi dari sistem diktator maupun rezim militer ke arah sistem politik demokrasi. Negara-negara maju dan demokratis percaya bahwa transisi menuju demokrasi akan membawa stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi bangsa berkembang. 6 kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi di negara-negara berkembang (David Beetharn dan Kevin Boyle, 2000), yaitu sebagai berikut. a. Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga memungkinkan terwujudnya prinsip kesederajatan warga negara. b. Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan survive warga negara seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. c. Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga negara. d. Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi, dan rasa tanggung jawab kolektif warga negara khususnya masyarakat pemilih. e. Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber publik secara efisien. f. Pengakuan yang berkelanjutan dari negara-negara demokratis terhadap praktik demokrasi yang berjalan dan secara khusus bersedia menawarkan pelatihan dan penyebarluasan praktik demokrasi yang baik dan kredibel.

Pendapat lain menyatakan, diperlukan 6 kondisi yang dianggap mendukung pembangunan demokrasi yang stabil (Soerensen, 2003), yaitu sebagai berikut:

1. Para pemimpin tidak menggunakan instrumen kekerasan, yaitu polisi dan militer untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
2. Terdapatnya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis.
3. Potensi konflik dalam pluralisme subkultural dipertahankan pada level yang masih dapat ditoleransi.
4. Di antara penduduk negeri, khususnya lapisan politik aktif, terdapat budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide dan lembaga demokrasi.
5. Dampak dari pengaruh dan kontrol oleh negara asing dapat menghambat atau mendukung secara positif.[]

APPENDIKS:

[1] PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA⁷

Demokrasi merupakan harapan dari setiap warga negara. Harapan yang akan berujung pada keadilan, kesejahteraan, keterbukaan dan kedudukan yang sama (tanpa adanya ketimpangan). Demokrasi akan membawa masyarakat pada suatu kondisi yang dicita-citakan oleh sebuah negara. Demokrasi mampu menggantikan posisi monarki yang lebih mengedepankan kelompok elit (kerajaan/ darah biru) atau golongan tertentu. Seluruh kelompok masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya dan juga mendapatkan posisi sebagai pemimpin. Demokrasi mengangkat ketidak berdayaan menjadi berdaya. Sebuah harapan yang mampu menjadi pintu masuk sebuah negara yang ideal bagi seluruh kelompok masyarakat.

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaannya berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun lewat keterwakilan. Untuk itu dinegara yang menganut sistem demokrasi dimanapun selalu memiliki dewan perwakilan rakyat atau parlemen. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani "*demokratia*" yang berarti "kekuasaan rakyat". Konsep mengenai demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh filsuf Aristoteles, yang memaknai demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang menekankan bahwa kekuasaan berada ditangan orang banyak (rakyat). Presiden AS, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dengan demikian demokrasi menempatkan kekuasaan berada ditangan rakyat dan rakyat lah yang menentukan nasib negaranya sendiri.

Negara-negara yang memiliki sistem demokrasi secara perlahan-perlahan mulai melaksanakan proses demokratisasi dalam segala aspek kehidupan bernegara. Perlu diingat bahwa menjadi sebuah negara yang demokratis adalah bukan sesuatu yang mudah. Hal ini mengingat akan adanya banyak kepentingan, kompleksitas dan pluralitas. Demokrasi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan lewat proses yang panjang. Negara seperti Amerika Serikat (AS) saja, yang menganut sistem demokrasi dari awalnya masih sulit untuk memperjuangkan hak-hak kaum Indian, yang merupakan penduduk asli dari benua Amerika. Pemerintah boleh dengan tegas mengkonsepkan sistem demokrasi, namun kadangkala sikap rakyat masih mengkotak-kotakan etnik, warna kulit dan kelompok tertentu. Demokrasi mendapatkan tantangannya sendiri. Hal ini juga terjadi di banyak negara demokrasi lainnya. Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi Pancasila tidak dengan mudah menjalankan kendaraan ini. kekayaan geografis, dan pluralitas menjadi tantangan dalam menjalankan sistem ini.

Negara-negara yang telah maju masih berupaya secara keras untuk memainkan sistem yang telah mereka bangun. Amerika telah menunjukannya dengan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama di AS. Dan dunia terpanah dengan kendaraan demokrasi yang telah berhasil dimainkan di Amerika. Amerika menjadi kiblat pembelajaran akan arti demokrasi.

Di Indonesia, demokrasi hanyalah sebuah permainan politik yang menghasilkan perubahan perilaku kearah negatif. Melalui proses demokrasi, para pelaku politik berupaya untuk mengeruk uang rakyat dan memperkaya diri. Demokrasi dari harapan menjadi kebuntuan. Di beberapa daerah, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sudah didominasi oleh Golput (orang-orang yang menolak untuk berperan serta dalam proses demokrasi). Hal ini disebabkan karena kendaraan demokrasi hanyalah kendaraan politik, tanpa tujuan yang jelas. Tujuan bernegara disetir oleh kelompok tertentu dengan mengesampingkan tujuan rakyat. Demokrasi yang seharusnya kekuasaan ditangan rakyat, dipolitisir menjadi kekuasaan ditangan pemimpin-pemimpin (yang bisa membeli) rakyat. Apakah ini demokrasi ? Korupsi, kolusi, nepotisme merupakan buah dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Banyak pemimpin yang lahir dari proses demokrasi diberbagai daerah di Indonesia, menyudahi akhir kepemimpinannya di penjara. Perilaku korupsi menjadi langkah selanjutnya untuk mengembalikan biaya politik dalam proses berdemokrasi. Wakil rakyat menjadi contoh yang kurang baik bagi rakyat, terutama bagi generasi selanjutnya. Demokrasi di Indonesia dicoreng dengan praktek-praktek yang tidak wajar dan mengorbankan rakyat. Selain itu coba lihat, berapa banyak pemimpin yang lahir dari rakyat ? lebih banyak pemimpin dilahirkan dari perjanjian-perjanjian politik antara politisi dan pengusaha. Rakyat menjadi korban dari ketimpangan demokrasi.

⁷ Diambil dari: Ricky Arnold Nggili, *Demokrasi dan Kaderisasi*, Makalah ilmiah, Rabu, 25 Juli 2012

Apakah yang terjadi dengan proses demokrasi di Indonesia ? demokrasi seharusnya lahir dari rakyat. Pemimpin berasal dari rakyat. Partai politik merupakan keterwakilan rakyat, dan bukan kepentingan partai. Demokrasi Indonesia menjadi *absurd*. Pemimpin tidak lahir dari rakyat, disebabkan karena pendidikan demokrasi belum sampai kepada rakyat. Kaderisasi pemimpin dan demokrasi tidak menyentuh kehidupan masyarakat. Kaderisasi merupakan proses pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada kader (dalam hal ini rakyat). Rakyat perlu didik sehingga memahami dan mengerti hak dan kewajibannya dalam melaksanakan proses demokrasi. Kaderisasi merupakan kunci utama demokrasi di Indonesia. Partai-partai politik sudah seharusnya bukan hanya mendoktrinkan falsafah partai, namun juga mendoktrinkan asas demokrasi bagi para kadernya, sehingga kader yang notabene merupakan bagian dari kelompok-kelompok rakyat, memahami dan mampu melaksanakan proses demokrasi. Tujuan Negara haruslah berada diatas tujuan partai, sehingga proses demokrasi dapat dipertanggung jawabkan.

Kaderisasi demokrasi mampu mewujudkan masyarakat yang lebih beradab dengan mengedepankan keadilan dan kesadaran akan Hak Asasi Manusia. Melalui proses pendidikan demokrasi (kaderisasi) yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bersama-sama oleh setiap elemen bangsa, maka kendaraan demokrasi akan lebih dipahami oleh rakyat. Rakyat akan lebih memahami "kekuasaan ditangannya" dan pemimpin "merupakan keterwakilan dari dirinya". Selain itu rakyat pun sudah mampu untuk mengkaderkan dirinya menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia, dikarenakan adanya peluang yang sama dengan orang lain dalam proses demokratisasi di Indonesia. Setiap orang tidak lagi akan melihat warna kulit, agama, etnis, dari daerah mana, jenis kelamin dan hal lainnya yang berbeda. Namun setiap orang akan melihat persamaan, persaudaraan, dan kebersamaan dalam membangun negara ini. Kaderisasi demokrasi merupakan proses pendidikan politik terbaik bagi terwujudnya bangsa Indonesia yang beradab dan bermartabat dimata dunia. Demokrasi berasal dan hanya untuk rakyat, itulah tujuan dari kaderisasi demokrasi bagi bangsa Indonesia.[]

[2] DEMOKRASI, KESEJAHTERAAN, DAN NEGARA KORPORASI⁸

Masyarakat dunia sepakat mengakui bahwa Indonesia termasuk negara paling demokratis. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya "Medali Demokrasi". Medali tersebut diberikan oleh IAPC (Asosiasi Internasional Konsultan Politik), sebuah organisasi profesi yang memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia, karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas Muslim yang dinilai melakukan proses demokrasi dengan sungguh-sungguh.

Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam laporan, "Dukungan Terhadap HAM dan Demokrasi : Catatan AS 2006" yang diserahkan kepada Kongres AS mencatat, "Indonesia, negara demokratis ketiga terbesar di dunia dan tempat bermukimnya populasi muslim terbesar di dunia, telah melangkah lebih jauh untuk mengkonsolidasikan sebuah demokrasi yang pluralistik dan representatif setelah empat dekade berada di bawah pemerintahan yang represif dan otoriter." Itulah pujian dan penghargaan yang diberikan oleh dunia kepada Indonesia atas keberhasilannya membangun demokrasi. Pujian dan penghargaan ini tentu disambut gembira oleh penguasa negeri ini. Sebagai sebuah sistem nilai, demokrasi berhasil ditanamkan, malah kini telah menjadi standar nilai. Impian setinggi langit pun digantungkan kepada demokrasi ini. Banyak orang berharap, dengan demokrasi Indonesia bisa segera terlepas dari keterpurukan dan rakyat menjadi sejahtera. Pertanyaannya, apakah demokrasi berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat? Apakah dengan demokrasi seluruh kebutuhan masyarakat –seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan- tercukupi dengan baik?

Sejahtera dalam Demokrasi?

Kesejahteraan hidup merupakan keinginan setiap orang. Kesejahteraan, dalam kamus bahasa Indonesia, berarti keamanan, ketentraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran. Artinya, kesejahteraan berarti seluruh potensi hakiki yang dimiliki manusia dapat terpenuhi dengan optimal, termasuk kebutuhan akan agama sebagai tuntunan hidup

⁸ Diambil dari: Ahmad Tusi, *Demokrasi, Kesejahteraan, & Negara Korporasi* Tulisan ini dimuat pada Harian Radar Lampung, 15 Januari 2008.

Cara yang ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan hidup itu bisa berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh tolok ukur dan pandangan hidupnya. Pandangan hidup kapitalis-sekular mengagungkan kebebasan dan menjadikan nilai materi sebagai tolok ukur kehidupan. Implikasinya, segala sesuatu distandarkan dan diukur secara fisik, yaitu seberapa besar kemanfaatan fisik yang dapat diperoleh, seberapa banyak materi yang dapat dihasilkan. Produksi menjadi tujuan. Oleh karena itu, pola hidup konsumeris harus sengaja dimunculkan untuk menyerap produk yang diproduksi secara berlebihan. Uang akhirnya menjadi segala-galanya. Itulah penyesatan dari slogan, 'kebutuhan tidak terbatas sedangkan barang dan jasa terbatas'.

Penambangan emas di Puncak Jaya Wijaya oleh Freeport and Co. mampu meraih total pendapatan US\$ 2,3 miliar pada tahun 2004, lalu meningkat menjadi US\$ 4,2 miliar pada tahun 2005. Ironisnya, 50% penduduk kabupaten Jaya Wijaya hidup di bawah garis kemiskinan; 35% diantaranya hidup di daerah pembuangan (tailing) yang penuh dengan zat berbahaya. Tidak hanya itu, indeks pembangunan manusia Papua dengan indikator kesehatan dan pendidikan menduduki peringkat 27, nomor urut lima terbawah di Indonesia (Walhi, SCTV, 21/11/2006). Lalu menurut data Badan Pusat Statistik 2004, Papua memiliki cadangan emas terbesar di dunia justru tergolong provinsi dengan penduduk termiskin terbesar. Papua tidak sendiri, eksploitasi minyak di Arun Riau dan Aceh, dan tempat lain adalah contoh real lainnya. Fokusnya hanyalah bagaimana cara agar produksi meningkat tajam. Kalaupun ada program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah sekitar industri, itu kecil sekali.

Di Indonesia, alih-alih membawa kesejahteraan, demokrasi melahirkan banyak kebijakan liberal yang justru menambah beban masyarakat. Contoh gamblang: kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM yang memberatkan rakyat dan menguntungkan investor asing. Akibat kebijakan ini, terjadi peningkatan jumlah orang miskin. Menurut Tim Indonesia Bangkit, sebagaimana dilansir analis sosial-politik, selama periode 2005/2006 kenaikan harga beras dan BBM turut berpengaruh terhadap kenaikan angka kemiskinan. Bayangkan pada periode Juli 2005 – Juli 2006 harga beras mengalami kenaikan hingga mencapai 43%. Untuk petani biasa, buruh pabrik, nelayan, atau para pedagang kaki lima, kenaikan 43% berdampak pada pemotongan alokasi pendapatan untuk kebutuhan lain yang juga mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jelas sekali, bahwa kebijakan negara menaikkan harga BBM telah melahirkan permasalahan struktural yakni kemiskinan dan pengangguran.

Contoh lain: kebijakan privatisasi BUMN, yang juga mengorbankan rakyat dan menguntungkan asing. Muncul pertanyaan, mengapa penguasa lebih memilih untuk memuaskan kepentingan pengusaha/korporasi, bahkan pengusaha/korporasi asing dari pada rakyat? Seperti kasus pemberian pengelolaan Blok Cepu kepada asing (ExxonMobil) bukan kepada Pertamina (milik negara) yang jelas-jelas menyatakan mampu menangani sumberdaya alam di daerah itu. Hubungan erat demokrasi dengan negara korporasi adalah jawabannya.

Demokrasi dan Negara Korporasi

Sudah diketahui oleh umum, partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana besar. Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan dana segar dari kelompok bisnis. Penguasa dan pengusaha pun kemudian menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi. Bantuan para pengusaha tentu punya maksud tertentu. Paling tidak, untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya; bisa juga demi mendapatkan proyek dari pemerintah. Akibatnya, penguasa didikte oleh pengusaha. Walhasil, sistem demokrasi kemudian melahirkan negara korporasi, yang ciri utamanya adalah lebih melayani kepentingan pengusaha (bisnis) daripada rakyat.

Dominasi korporasi terhadap negara semakin menggurita setelah korporasi multinasional turut bermain. Korporasi multinasional sangat menentukan siapa yang menjadi pemimpin sebuah negara dan apa kebijakan negara tersebut. Korporasi nasional melalui berbagai institusi, baik negara kapitalis maupun organ-organ internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia, mendikte dan sangat mempengaruhi kebijakan sebuah negara. Tony Clarke, seorang akademisi dan aktivis di Kanada, dalam buku *The Case Against the Global Economy* (2001) menyebutkan: dari 100 institusi dunia yang paling kaya, termasuk negara, 52 institusi adalah korporasi transnasional (TNC), dan 70% perdagangan global dikontrol oleh hanya 500 perusahaan. Sebagai ilustrasi, total penerimaan Mitsubishi jauh lebih besar daripada pendapatan kotor domestik (GDP) Indonesia; pendapatan Ford

melebihi GDP Afrika Selatan; dan pendapatan Dutch Shell melebihi GDP Norwegia (www.acmoti.org).

Chiquita, TNC Amerika yang memproduksi dan mengontrol 50% perdagangan pisang dunia, pada 1997 menyogok lebih US\$ 500 ribu untuk kampanye Partai Republik ataupun Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS). Karena kuatnya lobi, koalisi TNC bisa menaikkan sumbangan politisnya ke Partai Republik yang berkuasa, dari US\$ 37 juta (1992) menjadi US\$ 53 juta (2002). Kini 72% pundi partai itu dipasok TNC, terutama TNC agrobisnis (The New York Times, 9/9/2003). Sebagai imbalannya, Presiden Bush pada 2002, antara lain, menandatangani Farm Bill senilai US\$ 180 miliar untuk 10 tahun ke depan.

Contoh di Indonesia, dalam kasus ExxonMobil, seperti ditulis Kwik Kian Gie (Kompas, 23/2/2006), pemerintah AS ikut campur tangan demikian jauh. Tujuannya agar perusahaan minyak AS itu ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengelola Blok Cepu. Tidak tanggung-tanggung, campur tangan dilakukan oleh pemimpin tertinggi ExxonMobil, Duta Besar Ralph Boyce, dan Presiden Bush. Kedatangan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, yang bersamaan dengan panasnya penentuan operator Blok Cepu, juga bukan sebuah kebetulan; meski Menko Perekonomian Boediono membantah ada intervensi atau tekanan.

Mereka juga menjerat negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan utang luar negeri. Lalu mereka menekan negara pengutang tersebut agar memuluskan masuknya korporasi multinasional. Syaikh Abdurrahman al-Maliki, dalam bukunya, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsila* (Politik Ekonomi Ideal), dengan tegas mengatakan bahwa utang luar negeri untuk pendanaan proyek-proyek adalah cara yang paling berbahaya bagi eksistensi negeri-negeri Islam dan senantiasa membuat rakyat menderita, karena merupakan jalan untuk menjajah negara. Apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Maliki pada tahun 1960-an itu kemudian memang terbukti. Lewat utang luar negeri, Barat kemudian berhasil memaksa negara-negara yang diberikan bantuan agar tunduk kepada kepentingan mereka.

Hal ini secara terbuka diakui John Perkins mantan anggota "perusak ekonomi" (Economic Hit Man) dalam bukunya, *Confessions of an Economic Hit Man*. Dalam bukunya itu, Perkins menulis tentang tujuan penugasannya, antara lain untuk membangkrutkan negara-negara pengutang. Negara korporasi tak ubahnya perusahaan yang hanya memikirkan keuntungan. Dalam negara korporasi, subsidi terhadap rakyat, yang sebenarnya merupakan hak rakyat, dianggap pemborosan. Aset-aset negara yang sejatinya milik rakyat pun dijual. Itulah negara korporasi, yang tidak bisa dilepaskan dari sistem politiknya: demokrasi.

Hakikat Sistem Demokrasi

Banyak orang memahami bahwa pemilu yang transparan dan akuntabel, ditambah dengan aktivitas musyawarah para wakil rakyat dalam mengambil keputusan sebagai perwujudan dari demokrasi. Namun Pemilu yang demokratis tidak bisa dijadikan ukuran suksesnya sebuah negara. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan kemakmuran warga negaranya. Padahal, katanya dengan demokrasi diharapkan negara bisa mencapai kemakmuran.

Yang pasti, demokrasi belum mampu menunjukkan bukti membawa kesejahteraan. Rasanya ini patut disadari. Kolom The International Herald Tribune (9/2/1998) menulis, "Democracy does not guarantee that you will never have an economic crises (Demokrasi tidak menjamin bahwa Anda tidak pernah memiliki krisis ekonomi)". Mengapa demokrasi tidak pernah bisa terlepas dari krisis ekonomi? Apa sebenarnya hakikat demokrasi itu sendiri.

Teori demokrasi adalah pemerintahan yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat (as siyadatu lir ra'iyah). Para pemimpin yang diangkat dalam sistem demokrasi terikat dengan kontrak sosial untuk melaksanakan aspirasi rakyat. Adanya kritik, koreksi, bahkan pemecatan pemimpin dalam sistem demokrasi, seluruhnya terkait dengan aspirasi rakyat.

Sistem demokrasi di negara manapun selalu mencerminkan paling tidak dua hal: pertama, Kedaulatan rakyat; kedua, Jaminan atas kebebasan umum. Kita sering mendengar bahwa demokrasi identik dengan jargon "dari rakyat-oleh rakyat-untuk rakyat" atau dengan kata lain, kedaulatan ada di tangan rakyat.[]

Hand-Out 08

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Prawacana

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. secara eksplisit ada 2 prinsip dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat) Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Pengertian lain dari Demokrasi Pancasila adalah sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

Ciri-ciri dari Demokrasi Pancasila adalah:

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Mengandung sistem mengambang.
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

Sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila adalah:

1. Indonesia adalah negara berdasar hukum.
2. Indonesia menganut sistem konstitusional.
3. MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi.
4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah tertinggi di bawah MPR.
5. Pengawasan DPR.
6. Menteri negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Kemudian fungsi dari Demokrasi Pancasila adalah Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Menjamin tetap tegaknya negara RI. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara. Dan menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

Demokrasi di Indonesia

Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.

Akhir milenium kedua ditandai dengan perubahan besar di Indonesia. Regim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya tumbang. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Hanya saja tidak mudah mewujudkan hal ini, karena setelah Soeharto tumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara damai, bertahap dan progresif. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahan genetika sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tak lepas dari pengaruh krisis moneter yang menjalar kepada krisis keuangan sehingga pengaruh depresiasi rupiah berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat. Rakyat Indonesia sebagian besar masuk ke dalam sebuah era demokrasi sesungguhnya dimana pada saat yang sama tingkat kehidupan ekonomi mereka justru tidak lebih baik dibandingkan ketika masa Orde Baru.

Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai ersi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang diperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu. Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini. Selain itu, pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998.

Selepas kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapa kali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat. Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia

memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarkan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik.

Jika diasumsikan bahwa pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya hal ini belum terjadi secara signifikan. Hal ini sebagai akibat masih terlalu kuatnya kelompok yang pro-KKN maupun anti perbaikan.

Demokrasi di Indonesia masih berada pada masa transisi dimana berbagai prestasi sudah muncul dan diiringi "prestasi" yang lain. Sebagai contoh, munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasakan mampu menimbulkan efek jera para koruptor dengan dipenjarakannya beberapa koruptor. Namun di sisi lain, para pengemplang dana bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) mendapat pengampunan yang tidak sepadan dengan "dosa-dosa" mereka terhadap perekonomian.

Namun demikian, masih ada sisi positif yang bisa dilihat seperti lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Demikian pula rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang masih dibahas di parlemen. Rancangan undang-undang ini telah mendapat masukan dan dukungan dari ratusan organisasi Islam yang ada di tanah air. Hal ini juga memperlihatkan adanya partisipasi umat Islam yang meningkat dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sementara undang-undang sistem pendidikan nasional yang telah disahkan parlemen juga pada masa pembahasannya mendapat dukungan yang kuat dari berbagai organisasi Islam.

Sementara itu, ekonomi di era demokrasi ternyata mendapat pengaruh besar dari kapitalisme internasional. Hal ini menyebabkan dilema. Bahkan di tingkat pemerintah, ada kesan mereka tunduk dibawah tekanan kapitalis internasional yang tidak diperlihatkan secara kasat mata kepada publik namun bisa dirasakan.

Tantangan dan Harapan Demokrasi

Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarkan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya, dalam masa transisi ini, hal itu belum terjadi secara signifikan.

Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam masa transisi. Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementara ekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam proses demokratisasi. Ini adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik. Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main. Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi.

Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak. Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat yang seharusnya menguntungkan Indonesia. Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi di Indonesia.

Anarkisme yang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Anarkisme ini merupakan bom waktu era Orde Baru yang meledak pada saat ini. Anarkisme pada saat ini seolah-olah merupakan bagian dari demonstrasi yang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Padahal anarkisme justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam.

Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah ia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa. Misalnya saja, demokrasi bisa memaksimalkan pengumpulan zakat oleh negara dan distribusinya mampu mengurangi kemiskinan. Disamping itu demokrasi diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan.

Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara. Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme.

Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka celah berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini adalah harapan dari implementasi demokrasi itu sendiri.

Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi. Semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak buruk bagi demokrasi karena kuatnya bidang politik ternyata belum bisa mengarahkan kepada perbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi akan berdampak luas kepada bidang lain, seperti masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lemah jelas tidak bisa memperkuat demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi.

Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berumpul, berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.[]

Hand-Out 09

NEGARA, MASYARAKAT SIPIL DAN DEMOKRASI: SKETSA HIBRIDITAS

Prawacana

Banyak orang berasumsi bahwa orde reformasi menandai berlangsungnya sebuah masa transisi; proses peralihan dari otoritarianisme orde baru menuju orde demokrasi baru. Berbagai perangkat kenegaraan dan kemasyarakatan baru disusun dalam upaya meneguhkan agar transisi ini kelak menemukan akhir yang gemilang. Teori-teori tentang transisi demokrasi telah menyuguhkan gambaran tentang bagaimana rezim-rezim otoritarian tumbang dan rezim-rezim baru berupaya meraih sebuah cita-cita tentang demokrasi yang terkonsolidasi (bdk. Diamond et.al., 1988). Teori ini pada mulanya dibangun melalui kajian-kajian tentang fenomena demokratisasi di Amerika Latin dan Afrika. Keruntuhan rezim-rezim otoriter di benua itu, membuat orang berpaling pada sistem demokrasi liberal ala Amerika Serikat dan Eropa Barat. Beberapa teori menambahkan bahwa bahwa nilai-nilai demokrasi di negeri-negeri itu harus dibangkitkan baik dari serpihan-serpihan tradisi setempat maupun digerakkan melalui pembiakan institusi-institusi demokrasi baru.

Demokrasi memang telah menjadi agama global. Hampir tiada satu negeripun di belahan bumi ini yang tidak bereaksi sensitif mendengar kata ini. Tapi, demokrasi juga melahirkan aneka tafsir terhadap dirinya. Tiada satu penjelasanpun tentang demokrasi yang bisa merepresentasikan maknanya yang absolut. Akibatnya, tidak ada satu praktik demokrasi yang seragam di berbagai negara. Meskipun Amerika dan Eropa Barat dianggap sebagai kampiun demokrasi dunia, praktik demokrasi mereka pun berbeda satu sama lain. Tapi, satu hal yang pasti, praktik demokrasi negeri-negeri di kedua kawasan itu mereka menjadi rujukan bagi praktik serupa di berbagai belahan dunia lainnya. Berbagai naskah akademik yang diproduksi oleh para ilmuwan Barat tentang teori-teori demokrasi telah menjadi bacaan wajib bagi para penganjur demokrasi di negara-negara yang kemudian disebut sebagai Dunia Ketiga. Terhadap semua teori itu, respons yang muncul juga beraneka rupa; menelannya habis-habis, menolaknya mentah-mentah atau menyikapinya secara eklektik. Secara teoritis, mereka yang memuntahkannya mentah-mentah akan dicap berada pada kutub otoritarian, yang mencecapnya habis-habis secara otomatis menghuni kutub demokratis, sementara yang bersikap eklektik akan berada pada kutub yang dalam wacana politik kontemporer disebut kutub hibrida.

Untuk mengeksplorasi ketiga variasi ini, penulis akan memulai dari definisi demokrasi yang dianggap standar dalam teks-teks akademis Barat. Seturut teks standar Barat, demokrasi diartikan sebagai cara mengelola pemerintahan dan partisipasi warganegara di dalamnya. Salah satu teori dominan tentang demokrasi yang jamak diterima dalam wacana demokrasi Barat adalah teori yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl. Menurut Dahl, karakteristik inti dari demokrasi memuat tiga hal. Pertama, adanya persaingan yang sehat untuk meraih posisi-posisi dalam pemerintahan; kedua, partisipasi warganegara dalam memilih para pemimpin politik dan; ketiga, terselenggaranya kebebasan sipil dan politik, termasuk terjaminnya hak-hak asasi manusia (Martinussen, 1997: 195). Rezim-rezim politik yang tidak memenuhi ketiga persyaratan ini dapat dikategorikan sebagai rezim otoritarian, sementara mereka yang telah dengan sempurna memenuhinya dapat dianggap telah demokratis. Selanjutnya muncul pertanyaan tentang bagaimanakah "hukumnya" rezim-rezim yang menerapkan hanya sebagian (entah kecil ataupun besar) dari ketiganya; atau mengakomodasi semua persyaratan namun tidak sepenuhnya menerapkannya?

Rezim Hibrida

Para ilmuwan politik seperti Terry Lynn Karl, Friedbert W Rüb dan Heidrun Zinecker (2007) mengajukan tesis baru tentang rezim hibrida. Mereka berupaya mencari titik terang dalam ruang abu-abu antara demokrasi dan otoritarianisme. Menurut Karl, rezim hibrida muncul sebagai persoalan transisi. Dia mengamati fenomena transisi demokrasi di Amerika Tengah di mana perubahan rezim belum diiringi perubahan pemerintahan yang oligarkis. Kondisi ini yang ia sebut sebagai hibriditas. Hibriditas akan berakhir manakala konsolidasi demokrasi telah tercapai. Rub mengajukan pandangan yang berbeda. Menurutnya, rezim hibrida adalah tipe yang bersifat unik dan tidak terkait sama sekali dengan masalah transisi demokrasi. Rezim hibrida adalah buah dari kombinasi dikotomik antara dua karakteristik: di satu sisi adalah demokrasi (dengan pemilu yang

bebas beserta aturan hukum yang mengikat) dan, di sisi lain, otoritarianisme (dengan struktur pemerintahan formal yang tidak pasti dan akses pada pemerintahan yang tidak dibatasi oleh hukum). Rezim model ini bisa berlangsung di manapun dan kapanpun. Sementara itu, Zinecker menyebut pendapat kedua pendahulunya tersebut bersifat teleologis. Rub, menurutnya, secara implisit menyatakan bahwa jalan menuju demokrasi yang ditempuh oleh bekas rezim otoritarian diinterupsi oleh rezim hibrida. Ia pun hanya menggabungkan kedua segmen lama (otoritarianisme) dan baru (demokrasi) sebagai satu tipe baru, tanpa menelaah kompleksitas rezim hibrida itu sendiri yang, menurut Zinecker, bisa saja terdiri dari segmen-segmen non-demokratis dan non-otoritarian sekaligus.

Atas dasar itu, Zinecker kemudian mengajukan tesisnya sendiri tentang rezim hibrida. Ia memberikan lima kriteria untuk membangun apa yang disebutnya model demokrasi/otoritarian dan non-demokrasi/non-otoritarian. Agar sebuah rezim disebut (tidak) demokratis, ia harus memiliki lima hal: Pertama, pemerintahan (non-) sipil. Hal ini untuk menggusur pemerintahan militer dan menegakkan supremasi sipil atas militer. Kedua, (non-) poliarki. Ia berfungsi untuk meluruskan kemungkinan otoritarian dari rezim berpemerintahan sipil dengan menegakkan suatu rezim demokratis-representatif. Versi non-demokratis dari dua segmen pertama ini, pemerintahan non-sipil dan non-poliarki, bisa menggiring pada tampilnya rezim otoritarian. Tapi, tiga segmen sisanya berikut ini dalam versi non-demokratisnya tidak serta merta merefleksikan otoritarianisme, namun mungkin menjadi basis bagi suatu bentuk non-otoritarian dari sebuah rezim non-demokratis. Ketiga, (tidak) adanya aturan hukum (rule of law). Ini membedakan rezim liberal dan non-liberal. Keempat, ke(bi)adaban ([non-] civility). Penghapusan kekerasan yang dilakukan segmen non-negara dari sebuah rezim dengan menegakkan legitimasi monopoli negara atas penggunaan kekuatan dan kekerasan. Kelima, eksklusi/inklusi politik. Penghapusan segmen rezim yang memiliki watak politik eksklusif agar terbuka partisipasi yang tak terbatas dan tanpa kekerasan dari semua kekuatan politik. Singkatnya, adanya sebuah rezim demokratis-parsipatoris dan masyarakat sipil yang otonom.

Yang menarik dari kajian Zinecker adalah analisisnya tentang civil society sebagai satu bagian dari pembentuk rezim hibrida. Rezim politik menyangkut gaya pemerintahan. Ia tidak identik dengan negara; ia bahkan melampaui negara. Maka, kajian tentang rezim tidak hanya menyangkut kajian tentang relasi antar-institusi negara, namun juga menelaah hubungan antara negara dan masyarakat sipil dan, di sisi lain, hubungan di antara warganegara aktif secara politik namun hidup tanpa bergantung pada negara. Agar pemerintahan berjalan efektif, sebuah rezim harus memiliki jangkauan pada masyarakat sipil. Bagi Zinecker, tidak ada pemerintahan yang efektif jika dalam masyarakat sipilnya masih terdapat aktor-aktor yang bisa memveto kekerasan. Dalam rezim non-otoritarian, tindak kekerasan terbesar muncul dari aktor-aktor non-negara yang berada di dalam masyarakat sipil. Keadaban sebuah rezim politik dengan demikian bertumpu pada keadaban masyarakat sipil. Demokrasi yang berlangsung pada level negara tidak selalu berjalan seiring dengan demokrasi pada tingkat masyarakat sipil. Zinecker ingin meluruskan teori-teori yang selalu melihat masyarakat sipil secara normatif dan mengabaikan telaah yang lebih analitis. Ia ingin melihat masyarakat sipil dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Selama ini terdapat pemisahan antara negara yang politis dan masyarakat sipil yang non-politis. Negara yang politis cenderung "buruk" atau tidak beradab (uncivilized) dan masyarakat sipil terkesan "baik" atau beradab (civilized).

Bagi Zinecker, masyarakat sipil adalah semua struktur dan asosiasi yang dibentuk oleh aktor-aktor yang mengisi ruang societal antara keluarga, ekonomi dan negara. Masyarakat sipil bersifat politis dan merupakan bagian dari rezim politik. Ia bisa mencakup segmen demokratis dan non-demokratis, beradab dan biadab sekaligus. Masyarakat sipil yang demokratis adalah pula yang beradab (civilized), namun masyarakat sipil yang beradab tidak mesti demokratis.

Wacana tentang rezim hibrida menarik diperbincangkan dalam konteks Indonesia; apakah ia relevan? Akan tetapi, soal pokok yang terlebih dahulu harus dijawab adalah bagian manakah dari rezim-rezim di Indonesia yang hendak disangkutkan dengan perdebatan ini? Jawaban dari pertanyaan itu terkait dengan posisi terhadap konsep hibriditas itu sendiri. Menurut penulis, hibriditas yang ditawarkan oleh Zinecker tak ubahnya bersifat teleologis, seperti halnya yang ditawarkan oleh dua orang pendahulunya. Zinecker hanya lebih banyak mengakomodasi kompleksitas, namun tetap mempertahankan konsep-konsep yang lebih merupakan klaim-klaim tentang esensi seperti demokrasi dan otoritarianisme. Zinecker memang tidak menyebut secara

spesifik di tanah mana demokrasi sejati telah berhasil disemai. Namun, dalam paparannya ia selalu mengulang-ulang dikotomi antara negara-negara maju dan berkembang dengan mengisyaratkan yang pertama sebagai demokratis dan yang terakhir sebagai otoritarian atau hybrid. Akan tetapi, di sisi yang lain, jawaban dari pertanyaan ini juga harus diletakkan pada konteks spasial dan temporal yang paling relevan dan paling disorot dari Indonesia terkait dengan pengalaman demokratisasinya.

Posisi hibriditas yang menjadi afinitas penulis adalah versi yang banyak dikemukakan oleh teoritis pascakolonial. Hibriditas dalam model ini muncul sebagai strategi dan praktik kebudayaan. Ia senantiasa berada pada ambang liminal yang menghindarkan diri dari setiap kategorisasi yang bersifat biner; demokratis versus otoritarian, maju versus berkembang dan sebagainya. Ia menghuni apa yang oleh Homi Bhaba disebut ruang ketiga dari setiap oposisi biner. Hibriditas mengatakan bahwa semua kategori budaya senantiasa bersifat transnasional dan translasional. Bersifat transnasional karena wacana-wacana pascakolonial kontemporer berakar pada sejarah khusus tentang perpindahan budaya, baik lewat perbudakan, 'pelancongan' dengan misi pemeradaban, migrasi penduduk Dunia Ketiga ke Barat setelah Perang Dunia II, atau lalu lintas para pengungsi politik dan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri-negeri Dunia Ketiga. Bersifat translasional karena sejarah-sejarah spasial tentang perpindahan tersebut—sekarang diikuti dengan ambisi-ambisi teritorial dari teknologi media global—menjadikan persoalan tentang bagaimana budaya menandai, atau apa yang ditandai oleh budaya, sebagai sebuah isu yang kompleks. Demokrasi-pun bersifat transnasional dan translasional. Apa yang oleh Amerika disebut sebagai kampanye demokrasi, misalnya, bagi bangsa-bangsa lain tak lebih sebagai model baru otoritarianisme. Penulis berpendapat bahwa tidak ada sebuah rezim yang selamanya demokratis atau otoritarian, entah di bangsa-bangsa Barat maupun Timur. Karena merupakan sebuah praktik kebudayaan, analisis tentang hibriditas sejatinya tidak terletak pada analisis normatif-institusional, namun dalam praktik yang dilakukan oleh aktor-aktornya. Meskipun bersikap kritis terhadap pendekatan Zinecker, penulis melihat bahwa ia telah menunjukkan adanya ruang ketiga hibriditas dengan kemungkinan hadirnya suatu rezim non-demokratis yang berkarakter non-otoritarian.

Dalam sejarah Indonesia kontemporer, isu ini akan lebih relevan jika dikaitkan dengan perkembangan Indonesia pasca-Reformasi. Pasca keruntuhan rezim orde baru yang oleh banyak pengamat disebut sebagai rezim pembangunan represif-otoritarian (lihat Herbert Feith, 1980), Indonesia memang segera menentukan langkahnya menempuh jalan demokratisasi. Dalam standar teks demokrasi, Indonesia relatif telah terbebas dari otoritarianisme. Persyaratan pertama dan kedua yang diajukan Zinecker telah dipenuhi oleh Indonesia. Supremasi sipil atas militer dan kekuasaan yang representatif relatif telah terpenuhi, meskipun tidak sepenuhnya. Tidak ada lagi kekuatan mayoritas. Dua kali pemilu yang digelar pada tahun 1999 dan 2004 menunjukkan puspa ragam kekuatan politik baru, meski tidak benar-benar baru. Pada pemilu pertama, PDI-P, yang merupakan metamorfosa dari PNI orde lama dan PDI orde baru, menjadi partai pemenang pemilu. Meski demikian, kadernya kalah dalam permainan politik di MPR memperebutkan kursi presiden. Pemenangnya justru kader dari partai pemenang keempat, PKB. Namun, presiden terpilih inipun kemudian terjungkal dalam permainan politik yang sama.

Elitisme memang tidak bisa terkontrol pada tahap awal demokrasi baru ini. Demokrasi dirayakan penuh euforia. Partai-partai bekerja sama secara radikal dan beroposisi secara fundamental pula. Abdurrahman Wahid dipilih dan dijatuhkan oleh orang-orang yang persis sama. Pada tahap selanjutnya, aturan main pun diubah. Konstitusi, kitab suci yang diagungkan sebelumnya, bahkan sudah empat kali diamandemen. Sistem pemilu diubah dari proporsional menjadi semacam perpaduan antara distrik- proporsional. Hal ini untuk memperagam rekrutmen elite bukan hanya atas basis keparpolan, namun juga representasi kedaerahan. Apalagi selanjutnya diatur pembentukan lembaga semacam senat, DPD, demi hanya menyiasati status MPR yang keberadaannya terancam setelah beberapa kewenangannya terpangkas. Presiden memang tidak lagi dipilih MPR, namun dipilih oleh langsung oleh rakyat. DPD-pun tidak memiliki tugas yang jelas layaknya senat dalam sistem demokrasi modern. Pada pemilu 2004, bekas kekuatan politik rezim otoritarian terguling, Partai Golkar, berhasil memenangkan pemilu, meskipun bukan (lagi) sebagai mayoritas tunggal. Namun, yang mengejutkan, presiden pilihan langsung rakyat bukan berasal dari partai pemenang, melainkan dari partai yang sama sekali baru, Partai Demokrat.

Namun, drama politik belum berhenti. Elitisme belum pula pudar. Partai-partai besar di DPR, disponsori PDI-P, Partai Golkar dan PPP, segera membangun aliansi oposisi yang menamakan diri Koalisi Kebangsaan. Partai penguasa yang bersikap panik dan reaktif membangun tandingannya; koalisi kerakyatan. Peta koalispun rontok setelah penguasa berhasil merebut kepemimpinan politik di partai pemenang pemilu, Partai Golkar. Penguasa juga diuntungkan dengan konflik-konflik internal yang terjadi pada beberapa partai besar seperti PPP dan PKB. Konflik itu justru membuat partai-partai tersebut mendekat pada kekuasaan. Akibatnya, di satu sisi, persebaran elite politikpun menjadi timpang. Pemerintah mengalami pengeroposan dari dalam karena banyaknya kekuatan politik yang bermain di dalamnya. Dalam kasus ini, memang rezim otoritarian telah berlalu, tapi rezim yang efektif tidak kunjung nampak pula.

Terkait dengan kriteria ketiga, adanya supremasi hukum, pada tarap permukaan nampak berjalan. Tapi, penegakan hukum lebih mirip sebagai sebuah etalase politik daripada sebuah kinerja mandiri dan terlembaga yang dilakukan oleh para penegak hukum. Beberapa kasus besar yang ditangani para penegak hukum saat ini, misalnya, lebih banyak menjerat para elite penguasa lama yang notabene sekarang

menjadi kekuatan oposisi. Beberapa orang yang terindikasi kasus pelanggaran hukum tertentu, namun berhasil merapat ke kekuasaan terjamin "keselamatan" mereka. Model penegakan hukum semacam itu hanya semakin membuat orang mengembangkan taktik-taktik baru pelanggaran hukum. Jika dahulu, misalnya, budaya korupsi menghuni ranah ketaksadaran, sekarang ia telah menjadi bagian dari praktik kebudayaan yang dilakukan secara sadar. Ia muncul dalam kesadaran ganda aparat birokrasi; sebagai aparatus negara modern dan kuasi aristokrat. Karakter beamptenstaat warisan kolonial memang masih menyisakan persoalan (bdk. Sutherland dalam Kayam, 1989). Bagi para penyelenggara pemerintahan yang berpenghasilan paspasan namun berpenampilan selaksa aristokrat, korupsi adalah cara produksi alternatif dan spekulatif. Selain itu, adanya supremasi hukum di sini lebih banyak berimplikasi pada rapuhnya kuasa negara, terutama, dalam mengontrol persaingan ekonomi. Selain karena perilaku koruptif aparat, para pengusaha kaya juga selalu menyewa pengacara papan atas yang mampu menyiasati tafsiran pasal-pasal sehingga meloloskan mereka dari jerat hukum.

Kriteria keempat menyangkut keadaban sebuah rezim. Sebuah rezim disebut beradab manakala terjadi perpaduan antara civilized state dan civilized civil society. Negara beradab ketika ia memiliki legitimasi atas monopoli penggunaan kekuatan dan kekerasan. Secara hukum TNI dan Polri memiliki legitimasi itu. Persoalan terjadi para ranah masyarakat sipil. Di beberapa tempat masih terdapat unsur-unsur dari masyarakat sipil yang gemar memobilisasi kekuatan melakukan razia bahkan penghakiman sepihak tanpa aparat mampu mencegahnya. Kehadiran laskar-laskar yang seringkali mengatasnamakan agama tertentu dan melakukan aksi-aksi sepihak masih menjadi pemandangan yang menonjol baik di pusat maupun terutama di daerah-daerah. Konflik-konflik komunal di Kalimantan, Ambon, Poso dan Papua juga melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil yang bersenjata. Beberapa analis memang menyebutkan bahwa aparat berwenang memiliki keterlibatan baik dalam pemersenjataan maupun pembiaran aktivitas mereka. Namun, hal itu tidak mengurangi krisis keadaban yang terjadi dalam masyarakat sipil. Kriteria keempat tersebut memiliki korelasi dengan kriteria kelima tentang inklusifitas/eksklusifitas politik sebuah rezim. Dalam rezim reformasi, partisipasi publik memang dibuka secara lebar dan dijamin oleh konstitusi. Meski demikian, masih terdapat segmen tertentu dari rezim baik dari level negara maupun masyarakat sipil yang berwatak eksklusif dan membatasi partisipasi warganegara lainnya. Fatwa-fatwa penyesatan yang dilakukan oleh MUI dan diamini oleh berbagai ormas keagamaan adalah contoh dari pengekan atas partisipasi demokratis. Hal itu ditambah dengan aksi penyerbuan massa terhadap para pengikut ajaran-ajaran tertentu yang tidak sesuai dengan mainstream ajaran tertentu.

Masyarakat Sipil Pascafordisme

Jika menilik kategori standar mengenai masyarakat sipil, memang tidak pada tempatnya meletakkan organisasi-organisasi keagamaan dan etnisitas pada kategori tersebut (lihat Allan). Tapi, tanpa memasukkannya orang tidak akan mendapatkan penjelasan apapun tentang masyarakat sipil di Indonesia. Muhammad AS Hikam telah menjelaskan dengan baik peran strategis ormas-ormas keagamaan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjadi pendorong demokratisasi di

Indonesia. Varian lain dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia, tentu saja, adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mulai berkecambah sejak tahun 1970-an, ormas kepemudaan dan organisasi intelektual. Cerita-cerita tentang organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia era orde baru sarat dengan cerita-cerita kepahlawanan yang romantis. Mereka tampil sebagai penggerak barisan oposisi dan sponsor kemandirian masyarakat. Meskipun, banyak pula dari mereka yang menjadi komprador negara, kepanjangan tangan negara di masyarakat atau bahkan bermuka dua. Watak organisasi masyarakat sipil di Indonesia mulai menampak pascareformasi, terutama, ketika terjadi migrasi besar-besaran aktivis organisasi masyarakat sipil menjadi politisi dan pejabat publik. Agenda demokratisasi yang menjadi misi reformasi-pun semakin gencar disorongkan. Dan, rezim hibrida-pun lahir dari perdebatan mereka. Namun, rezim hibrida selanjutnya melahirkan juga hibrida baru dalam organisasi masyarakat sipil.

Penting dicatat, jalan demokrasi, selain pilihan, adalah juga prasyarat yang diberikan untuk mengakhiri krisis ekonomi. Hibriditas dalam konteks Indonesia, dengan demikian, harus diletakkan dalam konteks upaya Indonesia menyelesaikan krisis ekonominya yang sebagian besar dilakukan dengan menerima resep-resep tawaran IMF dan Bank Dunia. Indonesia sejatinya tengah mengulang kembali sejarah negara-negara Afrika dan Amerika Latin di awal 1990-an yang menempuh transisi demokrasi mereka melalui program penyehatan ekonomi. Dalam paket resep itu, demokratisasi memang menjadi prasyarat utama yang digariskan oleh lembaga-lembaga tersebut. Demokratisasi, dalam hal ini, menyangkut pemenuhan prosedur-prosedur penyelenggaraan kekuasaan tertentu; mulai dari pemilu demokratis hingga good governance (bdk. Abrahamsen, 2004). Pada puncaknya, demokratisasi dimuarakan pada liberalisasi; *the best government is the least government*. Partisipasi publik dibuka lebar-lebar dengan menekan intervensi negara pada batas minimal; dunia usaha harus dibangkitkan kembali dengan menyemarakkan pasar investasi; beberapa perusahaan negara perlu disehatkan dengan melakukan privatisasi dan; aturan hukum dibuat secara ketat untuk menjamin persaingan ekonomi yang sehat.

Demokratisasi dalam konteks itu bagi sebagian besar organisasi masyarakat sipil di Indonesia memiliki dilema tersendiri. Di satu sisi, ia adalah sebuah keharusan sejarah, namun di sisi lain, ia tidak diharapkan karena berkembang melalui intervensi asing. Namun, terlepas dari semua perdebatan tentang liberalisasi, masyarakat sipil-pun "dipaksa" untuk menempatkan diri dalam arus liberalisasi yang berlangsung. (Diper)lemahnya peran negara secara otomatis membuat masyarakat sipil mereguk keuntungan tersendiri. Di satu sisi, lembaga-lembaga donor asing lebih melirik mereka daripada negara. Di sisi lain, negara juga membutuhkan mereka demi mengais legitimasi dan menyewa tenaga profesional mereka. Kucuran donor asing semakin melimpah ruah dan proyek pemerintah pun tak pernah sepi. Organisasi masyarakat sipil inipun bahkan melakukan hal-hal yang semestinya menjadi tugas negara; mulai penghitungan hasil pemilu hingga pengentasan kemiskinan. Merekapun juga mengambil alih banyak tugas-tugas legislatif dan yudikatif; mulai pengawasan kinerja pemerintah hingga investigasi kasus-kasus korupsi. Mereka menyadari posisi strategis ini, sehingga, tak heran jika pascareformasi, industri LSM pun semakin berkecambah.

Maka, alih-alih menyelesaikan misinya sebagai motor gerakan sosial, organisasi masyarakat sipil justru berkembang menjadi industri jasa modern. Mereka memiliki kantor-kantor yang dikelola secara profesional. Bagi institusi-institusi yang mapan, para aktivisnya mengisi lapisan kelas-kelas borjuis baru. Mereka tidak hanya bekerja di satu institusi, namun pada banyak lainnya. Lingkup kerja mereka tidak lagi nasional, namun dalam sistem jaringan transnasional. Institusi masyarakat sipil ini memang menjadi cara produksi kapitalis baru yang mulai meninggalkan sistem produksi massal ala perusahaan manufaktur. Mereka menyemarakkan apa yang disebut sebagai generasi kapitalisme pascafordisme dengan paradigma flexible production (Thompson). Dalam pascafordisme terjadi transformasi bukan hanya tentang bagaimana kita membuat sesuatu, namun juga bagaimana kita hidup dan apa yang kita konsumsi. Kerja dalam cara ini adalah sesuatu yang integral dengan totalitas kehidupan; orang tidak dilokalisasi dalam ruang bersekat atau dibatasi oleh waktu kerja, tapi dibiarkan menentukan ritmenya sendiri. Tidak seperti produksi massal yang mempekerjakan buruh tidak terampil, produksi fleksibel menuntut para pekerja yang terpelajar dan memiliki kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Produksi fleksibel terutama muncul dalam lembaga-lembaga penyedia jasa; klinik, firma hukum, jasa konsulta, institusi pendidikan dan sebagainya. Organisasi masyarakat sipil dapat dimasukkan di dalamnya dengan pertimbangan karakteristik yang sama.

Perbedaannya hanya pada dimensi transaksinya; instansi profit pada umumnya melakukan transaksi horizontal dengan nasabah, customer atau klien, sementara ormas atau LSM bertransaksi secara vertikal dengan donator.

Di sini, kemudian muncul persoalan tentang keadaban (civility) dan kewarganegaraan (civic) yang memberi karakter bagi masyarakat sipil. Keadaban tidak lagi sekadar menyangkut isu-isu kekerasan, namun juga isu kemandirian; sementara kewarganegaraan menyangkut tanggung jawab politis sebagai warganegara. Kedua isu saling bertautan satu sama lain. Kemandirian terhadap negara tidak lantas digantikan pada ketergantungan pada yang lain sehingga mengikis tanggung jawab kewarganegaraannya. Dan, organisasi masyarakat sipil di negeri ini, terbukti dihimpit oleh tekanan negara dan swasta. Secara ekonomi, organisasi masyarakat sipil tersebut adalah organisasi pemburu rente; mereka bergantung pada donor mana yang bersedia menerima program-program mereka atau memberikan proyek-proyek baru bagi mereka. Namun, secara politis, ada empat posisi yang jamak dipilih. *Pertama*, berkolaborasi dan menerima proyek-proyek pemerintah secara total. *Kedua*, menghindari kerjasama dengan negara dengan lebih membuka diri pada swasta. *Ketiga*, menolak kerja sama dengan negara maupun dengan pihak swasta tertentu, semisal lembaga donor internasional atau perusahaan industri berat. *Keempat*, menerima kerja sama dari manapun secara profesional tanpa harus terikat. Pada umumnya, ormas dan NGO memilih posisi keempat. Dan, pada posisi ini, berbagai ideologi dan idealisme diperdebatkan, ditata ulang bahkan ditransgresikan.

Di sini kita sampai pada perdebatan kita tentang hibriditas dan liminalitas. Apakah dengan memungut donasi swasta asing, orang telah menggadaikan kewarganegaraannya? Apakah dengan bekerjasama dengan pemerintah, orang telah membuang kemandiriannya? Apakah dengan menerima keduanya, orang telah melupakan idealismenya? Tiada satupun yang menyangkal bahwa diskursus tentang masyarakat sipil sendiri bukanlah diskursus yang tercipta karena pengalaman domestik, namun diskursus impor yang diappropriasi oleh pengalaman lokal. Di tempat asalnya, masyarakat sipil bersifat mandiri (dari negara) karena hidup beriringan dengan berfungsinya ekonomi pasar kapitalis. Organisasi-organisasinya hidup dari bisnis mandiri, seperti media, atau dari kesadaran filantropis masyarakatnya yang tinggi. Sementara, saat datang ke negeri-negeri berkembang, ide-ide ini dicangkokkan pada ragam organisasi yang ada. Seperti kita persaksikan, iapun selanjutnya dirawat oleh kapitalisme pasar; baik domestik maupun asing. Ia dipromosikan dalam misi liberalisasi dan demokratisasi yang salah satu idenya adalah berkurangnya intervensi negara (terhadap pasar). Namun soalnya, diskursus nasionalisme belumah pudar seluruhnya. Di satu sisi, lembaga-lembaga kapitalis asing masihlah merupakan representasi dari kepentingan entitas-entitas tertentu berlabel bangsa, negara atau kawasan. Di sisi lain, berkurangnya intervensi negara, di sini lebih berarti lemahnya kekuatan dan kekuasaan negara. Karena soalnya selalu kapitalisme, maka, pada tahap domestik, para kapitalis nasional lebih berkuasa daripada institusi tertinggi negara. Dari perombakan kabinet SBY sejak edisi pertama hingga terakhir, misalnya, orang dapat melihat betapa kokohnya posisi Aburizal Bakrie, raja lumpur yang anak perusahaannya telah terbukti—secara sangat meyakinkan sekali—mengubur puluhan desa di Sidoarjo. Namun persoalan-persoalan di atas tidak selalu bekerja dalam aras logika tunggal, ia bersifat sangat kompleks. Dan, masyarakat sipil hibrida selalu menyiasatinya. Sebagaimana pasar yang bekerja mencapai tujuannya sendiri, masyarakat sipil inipun pada akhirnya berkembang menggapai identitasnya sendiri. (Irsyad Zamjani, *Negara, Masyarakat Sipil dan Demokrasi: Sketsa Hibriditas*, Mahasiswa Pascasarjana Departemen Sosiologi UI).[]



BAGIAN KEEMPAT

DISKURSUS MATERI DASAR KE-PMII-AN

Bunga, misalnya, selalu bersih, harum, dan menawan namun tidak pernah memikirkan keindahan dirinya, walaupun dia hidup dari tanah berlumpur. Jika Allah berkehendak, manusia juga bisa sebersih bunga sepanjang hidupnya. Atau bahkan dia tidak pernah jatuh sakit, merasa sakit, dan menderita. Namun manusia telah diciptakan dalam kondisi tak sempurna, lemah, dan butuh perawatan, dan dia harus mengakui ketidakberdayaannya. Segala sesuatu di dunia ini, dicipta sebagai ujian, sehingga semuanya akan tua, lemah, dan mati. Dalam Al-Quran surat 57, Allah mengingatkan tentang kehidupan dunia sesungguhnya: Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sesuatu yang melalikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhiran (nanti) ada Azab yang keras dan Ampunan dari Allah serta Keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu (QS 57: 20).



Hand-Out 10

HISTORISITAS PMII DAN GENELOGI GERAKAN MAHASISWA

SEKILAS HISTORISITAS PMII

Secara historis PMII berdiri pada tahun 1960. Kondisi sosial politik waktu itu sedang terjadi rebutan kekuasaan antara kaum Islam modernis dengan kalangan NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis). Pada waktu itu kekuasaan yang dekat adalah PKI dengan orang-orang tradisional dan nasionalis. Karena ketiga kelompok ini memiliki titik temu dalam garis perjuangan maupun pandangan politiknya. Pada pemilu tahun 1955 PKI dan NU memiliki suara yang sangat signifikan dibandingkan dengan partai yang lainnya. Semua partai politik mempunyai sayap politik ditingkat mahasiswa, antara lain; Masyumi-HMI, PKI-CGMNI, PMI-GMNI. Saat itu terjadi konflik ditingkat HMI yang saat itu merupakan satu-satunya organisasi mahasiswa Islam. Kebetulan dalam organisasi ini ada pula kader-kader NU, yang merasa tidak cocok dengan strategi dan kebijakan organisasi. Sehingga akhirnya Mahbub Junaidi, dkk, keluar dari HMI dan membentuk PMII untuk mewakili mahasiswa tradisional di Surabaya pada tanggal 16 April 1960. Pada awalnya PMII juga merupakan Under-Bow NU, yang kemudian melepaskan diri dari cengkeraman partai pada tahun 1972 dengan deklarasi Murnajati. Pasca kudeta militer tahun 1966 kondisi sosial politik berubah total. Semua pos-pos penting diisi oleh tentara. Kekuatan Islam akomodatif dan konfrontatif dengan negara pada masa ORLA ditimbulkan karena keduanya tidak bisa diajak untuk menciptakan stabilitas keamanan. Dengan ideologi developmentalisme negara korporasi ORBA menerapkan kebijakan pembangunan sebagai panglima untuk mengontrol kesejahteraan kelas menengah, hutang besar-besaran dan World Bank digunakan untuk membangun berbagai proyek yang menguntungkan pemilik modal dan orang kota. Pada dataran inilah PMII dengan semangat kerakyatan dan kebangsaan berada di garis perjuangan membela rakyat tertindas.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda NU (meskipun di kemudian hari dengan dicetuskannya Deklarasi Murnajati 14 Juli 1972, PMII menyatakan sikap independen dari lembaga NU). Di antara pendirinya adalah Mahbub Djunaidi dan Subhan ZE (seorang jurnalis sekaligus politikus legendaris).

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlul-sunnah wal Jama'ah. Dibawah ini adalah beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai penyebab berdirinya PMII:

1. Carut marutnya situasi politik bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959.
2. Tidak menentukannya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada.
3. Pisahnya NU dari Masyumi.

Hal-hal tersebut diatas menimbulkan kegelisahan dan keinginan yang kuat di kalangan intelektual-intelektual muda NU untuk mendirikan organisasi sendiri sebagai wahana penyaluran aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa-mahasiswa yang berkultur NU. Disamping itu juga ada hasrat yang kuat dari kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlul-sunnah Wal Jama'ah.

Organisasi-organisasi Pendahulu

Di Jakarta pada bulan Desember 1955, berdirilah Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) yang dipelopori oleh Wa'il Harits Sugianto. Sedangkan di Surakarta berdiri KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama) yang dipelopori oleh Mustahal Ahmad. Namun keberadaan kedua organisasi mahasiswa tersebut tidak direstui bahkan ditentang oleh Pimpinan Pusat IPNU dan PBNU dengan alasan IPNU baru saja berdiri dua tahun sebelumnya yakni tanggal 24 Februari 1954 di Semarang. IPNU punya kekhawatiran jika IMANU dan KMNU akan memperlemah eksistensi IPNU.

Gagasan pendirian organisasi mahasiswa NU muncul kembali pada Mukhtamar II IPNU di Pekalongan (1-5 Januari 1957). Gagasan ini pun kembali ditentang karena dianggap akan menjadi pesaing bagi IPNU. Sebagai langkah kompromis atas pertentangan tersebut, maka pada mukhtamar III IPNU di Cirebon (27-31 Desember 1958) dibentuk Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang diketuai oleh Isma'il Makki (Yogyakarta). Namun dalam perjalanannya antara IPNU dan Departemen PT-nya selalu terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program organisasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang yang diterapkan oleh mahasiswa dan dengan pelajar yang menjadi pimpinan pusat IPNU. Disamping itu para mahasiswa pun tidak bebas dalam melakukan sikap politik karena selalu diawasi oleh PP IPNU.

Konferensi Besar IPNU

Oleh karena itu gagasan legalisasi organisasi mahasiswa NU senantiasa muncul dan mencapai puncaknya pada konferensi besar (KONBES) IPNU I di Kaliurang pada tanggal 14-17 Maret 1960. Dari forum ini kemudian kemudian muncul keputusan perlunya mendirikan organisasi mahasiswa NU secara khusus di perguruan tinggi. Selain merumuskan pendirian organ mahasiswa, KONBES Kaliurang juga menghasilkan keputusan penunjukan tim perumus pendirian organisasi yang terdiri dari 13 tokoh mahasiswa NU. Mereka adalah:

1. Khalid Mawardi (Jakarta)
2. M. Said Budairy (Jakarta)
3. M. Sobich Ubaid (Jakarta)
4. Makmun Syukri (Bandung)
5. Hilman (Bandung)
6. Ismail Makki (Yogyakarta)
7. Munsif Nakhrowi (Yogyakarta)
8. Nuril Huda Suaidi (Surakarta)
9. Laily Mansyur (Surakarta)
10. Abd. Wahhab Jaelani (Semarang)
11. Hizbulloh Huda (Surabaya)
12. M. Kholid Narbuko (Malang)
13. Ahmad Hussein (Makassar)

Keputusan lainnya adalah tiga mahasiswa yaitu Hizbulloh Huda, M. Said Budairy, dan Makmun Syukri untuk sowan ke Ketua Umum PBNU kala itu, KH. Idham Kholid.

Deklarasi

Pada tanggal 14-16 April 1960 diadakan musyawarah mahasiswa NU yang bertempat di Sekolah Mu'amalat NU Wonokromo, Surabaya. Peserta musyawarah adalah perwakilan mahasiswa NU dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Makassar, serta perwakilan senat Perguruan Tinggi yang bernaung dibawah NU. Pada saat tu diperdebatkan nama organisasi yang akan didirikan. Dari Yogyakarta mengusulkan nama Himpunan atau Perhimpunan Mahasiswa Sunny. Dari Bandung dan Surakarta mengusulkan nama PMII. Selanjutnya nama PMII yang menjadi kesepakatan. Namun kemudian kembali dipersoalkan kepanjangan dari 'P' apakah perhimpunan atau persatuan. Akhirnya disepakati huruf "P" merupakan singkatan dari Pergerakan sehingga PMII menjadi "Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia". Musyawarah juga menghasilkan susunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi serta memilih dan menetapkan sahabat Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum, M. Khalid Mawardi sebagai wakil ketua, dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum. Ketiga orang tersebut diberi amanat dan wewenang untuk menyusun kelengkapan kepengurusan PB PMII. Adapun PMII dideklarasikan secara resmi pada tanggal 17 April 1960 masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1379 Hijriyah. SEMUA itu berkat IPNU

Independensi PMII

Pada awal berdirinya PMII sepenuhnya berada di bawah naungan NU. PMII terikat dengan segala garis kebijaksanaan organisasi induknya, NU. PMII merupakan perpanjangan tangan NU, baik secara struktural maupun fungsional. Selanjutnya sejak dasawarsa 70-an, ketika rezim neo-fasis

Orde Baru mulai mengkerdikan fungsi partai politik, sekaligus juga penyederhanaan partai politik secara kuantitas, dan issue back to campus serta organisasi- organisasi profesi kepemudaan mulai diperkenalkan melalui kebijakan NKK/BKK, maka PMII menuntut adanya pemikiran realistis. 14 Juli 1971 melalui Mubes di Murnajati, PMII mencanangkan independensi, terlepas dari organisasi manapun (terkenal dengan Deklarasi Murnajati). Kemudian pada kongres tahun 1973 di Ciloto, Jawa Barat, diwujudkanlah Manifest Independensi PMII.

Namun, betapapun PMII mandiri, ideologi PMII tidak lepas dari faham Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan ciri khas NU. Ini berarti secara kultural- ideologis, PMII dengan NU tidak bisa dilepaskan. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan benang merah antara PMII dengan NU. Dengan Aswaja PMII membedakan diri dengan organisasi lain.

Keterpisahan PMII dari NU pada perkembangan terakhir ini lebih tampak hanya secara organisatoris formal saja. Sebab kenyataannya, keterpautan moral, kesamaan background, pada hakekat keduanya susah untuk direnggangkan.

Makna Filosofis

Dari namanya PMII disusun dari empat kata yaitu "Pergerakan", "Mahasiswa", "Islam", dan "Indonesia". Makna "Pergerakan" yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. "Pergerakan" dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalifahannya.

Pengertian "Mahasiswa" adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dimnamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

"Islam" yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma ahlussunnah wal jama'ah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, islam, dan ikhsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif demikian platform PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Keberbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (civilized).

Sedangkan pengertian "Indonesia" adalah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD 45.

SEJARAH GEOPOLITIK-EKONOMI NASIONAL, INTERNASIONAL

Pelacakan Gerakan Mahasiswa Level Makro

Kecenderungan menguatnya neo-liberalisme terjadi dimana-mana, terutama di negar berkembang atau negara dunia ketiga. Kecenderungan itu ditunjukkan oleh peran membesar yang dipermainkan oleh berbagai intitusi perekonomian dunia, seperti; [nternational! Monetarian ftmd (IMF), International Bank for Recontruction of Development (IBRD), World Trade Organization (WTO). Institusi yang didukung penuh oleh negara-negara maju begitu ganas mempromosikan struktur perekonomian dunia yang leizes-fair (membiarkan sesuai mekanisme pasar) dan meminimalisir campur tangan negara yang dihegemoni. Neo-liberalisme temyata menjadi gurita panas yang mengecam kekuatan ekonomi di negara berkembang. Pandangan bebasa ini menjadi paradoks dengan sedemikian rupa mengatur mekanisme perekonomian dunia. Dengan melihat struktur perekomian negara-negara pheriphery bisa disimpulkan bahwa kecenderungan neo-liberalisme ini sangat mempengaruhi perekonomian di tingkat akar rumput. Mainstream kapitalisme global dengan wajah baru telah merasuk dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kebijakan di masing-masing negara berkembang. Menghadapi konsekuensi buruk kapitalisme global dan neoliberalisme itu menjadi tesis runtuhnya negara berkembang. Perkembangan global kontemporer dipicu oleh perkembangan teknologi produksi, informasi, telekomunikasi, dan

globalisasi. Kekuatan negara menjadi sernakin rapuh untuk mengontrol fluktuasi ekonomi politik. Keterpurukan negara berkembang setelah tidak bisa mengembalikan tatanan ekonomi ditambah lagi dengan pengabaian Human Right (HAM), konflik etnis, pelecehan seksual, eksploitasi buruh, konflik atas nama agama, inkonsistensi para birokrat, dan sekian rnasalah yang menjadi entitas problem.

Dalam hal perekonomian ciri-ciri struktur keterbelakangan negara indonesia diindikasikan dalam bemagai faktor kehidupan. Salah satu yang menjadi momok besar atau kesulitan menjadi negara maju adalah bahwa Indonesia tidak sanggup untuk bergabung dengan kapitalisme global, teritama sejak ORBA berkuasa tahun 60-an. Indonesia temyata msuk dalam kungkungan anak kandung kapitalisme yaitu developmentalisme (pembangunanisme). Ideologi developmentalisme temyata memaksa Indonesia untuk larut dalam gaya pembangunan kapitalis yang direpresentasikan melauli kebijakan negara yaitu REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), kebijakan ini berdampak pada jaminan kesestabilan politik untuk menarik investor asing. Kestabilan politik ORBA ini dicapai dengan melakukan tindakan yang sangat dominatif dan bersifat Otoritarian-Birokratik terhadap kedaulatan rakyat. Indikasi dari gaya pemerintahan Otoritarian-Birokratik adalah berkuasanya militer secara institusional, penyingkaran dari partisipasi, kooptasi terhadap organisasi massa. Gaya pemerintahan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan filsafat trickle down efek mengisaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus dicapai terlebih dahulu sebelum dibagikan secara m.erata kepada seluruh masyarakat - harus dibayar dengan diberangusnya hak-hak politik rakyat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tinggi ini hanya dinikmati oleh minoritas-hal ini berdampak terjadinya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin.

Strategi Gerakan Sosial

Empat landasan dalam menyusun strategi gerakan sosial, yaitu: *Pertama*, Ideologi, dasar filosofi gerakan merupakan nilai-nilai yang menjadi landasan pergerakan mahasiswa. Sebuah institusi kemahasiswaan yang mengemban idealisme yang tinggi harus memakai filsafat gerakan pembebasan (liberasi) dan kemandirian (interdependensi). Liberasi adalah sebuah metode alternatif untuk mencapai kebebasan individu, sehingga individu tersebut mempunyai kualitas dan mental yang kuat untuk mendobrak dan menggeser kekuasaan negara yang represif dan totaliter dan melakukan perlawanan atas ekspansi hegemoni negara, untuk mengembalikan kekuasaan tersebut kepada otoritas dan kedaulatan rakyat. Liberasi ini juga memberikan kebebasan berekspresi dan kebebasan berfikir tanpa dipasung oleh sebuah rezim. Interdependensi adalah kemandirian dalam mengembangkan kreatifitas, keterbukaan, rasa tanggungjawab dalam dinamika pergerakan untuk membangun moralitas dan intelektualitas sebagai senjata dan tameng dalam setiap aksi. Aksi yang diiringi dengan interdependensi akan mewujudkan kesadaran mahasiswa dalam menjaga jarak dan hubungan dengan kekuasaan, sehingga aksi mahasiwa merupakan kekuatan murni untuk membela kepentingan rakyat dan melakukan transformasi sosial tanpa terkooptasi oleh kepentingan politik kelompok manapun.

Kedua, Falsafah Gerakan, strategi ini lebih kepada falsafah bertindak dengan model pendekatan (approach methode). Dalam pendekatan ini gerakan mahasiswa berupaya mengambil jarak dengan negara tanpa menafikan keberadaan dan legitirnasinya, sehingga kekuatan negara dapat diimbangi oleh kekuatan masyarakat. Model pendekatan ini adalah proses; (a) transformasi dari orientasi massa ke individu, (b) transformasi dari struktur ke kultur, (c) transformasi dari elitisme ke populisme, (d) transformasi dari negara ke masyarakat.

Ketiga, Segmenting, strategi ini merupakan pilihan wilayah gerak. Yang harus dipahami bahwa terbentuknya Student Government adalah sebagai upaya taktis untuk melakukan proses transformasi sosial, berangkat dari student movement menuju ke social movement. Transformasi sosial merupakan wahana yang paling kondusif untuk membebaskan kaum tertindas menuju masyarakat mandiri (civil society). Gerakan mahasiswa juga harus mengarah pada advokasi akan hak-hak kaum bawah, sehingga posisi mahasiswa merupakan penyambung lidah dan jerit kaum yang termarginalkan oleh penguasa. Kebijakan pemerintah yang sentralistik tanpa melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan publik, serta konstalasi politik yang carut marut merupakan lahan garapan mahasiswa baik yang ada di intra

parlemen yaitu BEM atau organisasi ekstra parlementer atau luar kampus seperti PMII, HMI MPO, HMI DIPO, IMM, KAMMI, FPPI, LMND dan organisasi ekstra parlementer lainnya.

Keempat, Positioning, artinya adalah bahwa lembaga eksekutif tersebut harus meletakkan dasar organisasi sebagai institusi profit atau non-profit. Idealnya menurut hemat penulis bahwa lembaga eksekutif ini yang berada pada jalur intra parlementer lembaga kemahasiswaan ini menggeser paradigmanya yang tadinya dari gerakan student movement menjadi social movement. Sehingga aras gerak yang dilakukan lebih kepada pemberdayaan rakyat kecil yang tertindas dan terhegemoni oleh kekuasaan yang represif.

Mahasiswa dan Globalisasi: Sebuah Kajian Sejarah

Gerakan mahasiswa, baik dikomando oleh intra maupun ekstra tidak pernah muncul dalam ruang hampa. Sebuah pergerakan akan tetap muncul dalam fase sejarah apapun. Entah itu fase feodalisme, kolonialisme, kemerdekaan, totalitarianisme, liberalisme, Namun demikian gerakan mahasiswa bukanlah entitas yang seragam. Ada pandangan bahwa "gerakan" akan muncul sebagai sebuah reaksi spontan walaupun tidak terorganisir dengan jelas. Misalnya gerakan mahasiswa akan muncul jika harga sembako naik, BBM melambung tinggi, atau isu-isu lainnya yang dianggap populis. Namun demikian pada hakekatnya sebuah gerakan (movement) merupakan upaya melakukan antitesa dari kondisi status-quo yang konservatif dan tidak memiliki kepekaan akan cita-cita masyarakat yang lebih maju. Mereka percaya atas "testamen" pernyataan sejarah bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Toh, manusia akan selalu ada dalam pergulatan dialektik untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Berangkat dari kondisi inilah saya akan coba memaparkan pandangan tentang hakikat gerakan perubahan yang di dalamnya terkandung subjek sejarah yaitu gerakan mahasiswa. (Saya orang yang percaya bahwa hakikat dari gerakan politik mahasiswa pada umurnya adalah perubahan). Ia (GM-red) tumbuh karena adanya dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan yang ada untuk digantikan dengan situasi yang di anggap lebih memenuhi harapan. Philip G. Albach dalam bukunya *Student in Reolt*, melihat posisi gerakan mahasiswa berada dalam dua level yaitu sebagai proses perubahan, yaitu menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik (Insyaallah sudah diterjemahkan oleh sahabat dari Litera berjudul *Revolusi Mahasiswa* tetapi sampai saat ini saya tidak memberikan pendapat apakah terjemahannya bagus atau tidak). Sejarah juga banyak mencatat bagaimana GM bisa bergerak dalam level sistem politik yang akan meluas pada pengaruh kebudayaan dan sosial. Hidup di negara berkembang seperti Indonesia kita memiliki banyak referensi tentang gerakan mahasiswa baik perkembangan waktu, berbagai perubahan ideologi maupun strategi dan taktiknya. Seeara historis tulisan ini akan melaek mengapa gerakan mahasiswa dibutuhkan dalam konteks perkembangan masyarakat negara Dunia Ketiga.

Legitimasi Sejarah Gerakan Mahasiswa

Mari kita laek latar belakang mengapa gerakan mahasiswa banyak muncul di negara berkembang. *Pertama*, modernisme dalam banyak bidang ekonomi politik, terutama dalam rangkaian dengan kekuasaan, oleh kekuatan dan dominasi ekonomi politik negara-negara Utara terhadap negara-negara Selatan, menyebabkan terjadinya transformasi sosial dalam bentuk kolonialisme, imperialisme sampai neo liberalisme yang terjadi hingga sekarang ini. Fakta akan adanya dominasi dan kesenjangan kelas semakin kentara dan tidak bisa di tutup-tutupi. Ini yang menjadi latar belakang utama kemunculan gerakan-gerakan pembebasan yang banyak didominasi kelompok muda intelektual yaitu mahasiswa. Dalam banyak hal keterlibatan gerakan mahasiswa dalam gerakan-gerakan terutama gerakan politik banyak mendapat pengaruh dari kondisi domestik maupun global. Namun hal yang eukup menjadi dorongan utama adalah kondisi politik dalam negeri. Misalnya saja kediktatoran pemerintah militer Soeharto atau kediktatoran rezim yang sarna di Amerika Latin menjadi pemicu awal dari tumbuhnya gerakan-gerakan demokratik mahasiswa.

Kedua, di Indonesia Gerakan Mahasiswa mendapat suatu legitimasi sejarah atas keturutsertaannya terlibat dalam gerakan kemerdekaan dan semenjak berdirinya negara menjadi bagian yang di akui dari sistem politik. Jika kita telusuri, misalnya, perjuangan kemerdekaan Nasional yang didorong Soekarno Cs lewat kelompok-kelompok studinya, Hatta lewat Perhimpunan

Indonesianya, ternyata efektif dan mampu secara luas membangkitkan perasaan untuk segera mungkin lepas dari belenggu kolonialisme. Kelompok yang dulunya disebut "pemuda pelajar" ini menjadi semacam "martir kelompok terdidik" yang membawa angin perubahan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat akan kemerdekaan. *Ketiga*, kekurangan lembaga dan struktur politik yang mapan. Akibat dari itu adalah relatif mudahnya bagi setiap kelompok yang terorganisir untuk mempunyai dampak langsung terhadap politik. Eksistensi politik GM muncul ketika kebutuhan tersebut hadir. Apalagi di barisan bawah pergerakan yang disponsori rakyat belum terakomodasi menjadi kekuatan perubahan yang signifikan. GM mulai membentuk suatu elit, sehingga merasa berperan dalam kemungkinan terjadinya transformasi sosial yang lebih luas. Akses informasi tentang situasi perpolitikan memungkinkan banyak telaah untuk pembuktian bahwa proses regimentasi politik totaliter harus mendapat tanggapan yang serius dan diterjemahkan dalam bentuk gerakan-gerakan yang lebih konkrit. Banyak di antara universitas yang berada di perkotaan yang sebagian besar populasi mahasiswa berada dalam jarak jangkauan yang mudah terhadap pusat kekuasaan. Ini memungkinkan GM mudah melakukan sebuah aksi untuk memblow-up isu yang potensial dalam upaya pemobilisasian kesadaran massa yang lebih maju. Beberapa fenomena politik mahasiswa menjadi makin membesar karena ia dilakukan di tempat-tempat yang relatif mudah dijangkau media. Peristiwa 1965, 1974, sampai peristiwa Mei 98 menjadi semacam pilot project radikalisme mahasiswa yang bergerak di lini oposisi pemerintahan. GM kemudian meneuati menjadi semacam gerakan-gerakan ujung tombak (*avant garde*), dan eksistensinya semakin menjadi jelas ketika di dalam pereaturan politik di tingkatan negara dan massa akar rumput (*grass roots*), merasa kekurangan oposisi dari sistem politik rezim parlementarian atau sentralisme. Sehingga GM seringkali menjadi "cabang keempat" dari sistem pemerintahan. Berbagai faktor seperti situasi ekonomi politik yang memprihatinkan kehidupan umum, ketidakadilan sosial, kebijaksanaan luar negeri pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, politik yang telah menjadi tidak demokratis, dari semua faktor tersebut, mahasiswa kemudian membuat jalinan ideologis yang dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan gerakan transformasi sosial. Beberapa dekade terakhir GM meneoba untuk membedakan tawaran yang lebih jauh mengenai hubungannya dengan realitas rakyat yang menderita akibat perlakuan rezim. Pasa diberlakukan NKK/ BKK di semua perguruan tinggi, GM yang memilih untuk tetap menjaga jarak dengan kekuasaan langsung bersentuhan dengan kegiatan advokasi permasalahan rakyat. *Isus* Badega, Kedung Ombo, Rancamaya, dB, menjadi saksi kegigihan GM yang tidak lagi mengemukakan ekspresi teoritik dalam diskusi-diskusi tapi langsung bergerak dalam level praksis. Sampai dengan tahun 1998 klimaks GM terjadi dan dalam skala luas memperoleh dukungan luas dari rakyat.

Gerakan Mahasiswa Mengusung Isu Pendidikan

Selain kondisi-kondisi di atas, sebenarnya faktor penting keterlibatan mahasiswa dalam gerakan-gerakan politik yaitu faktor subjektif posisi kelas mahasiswa. Mahasiswa yang terdefiniskan dalam wilayah akademisnya terutama mengenai kondisi pendidikan seringkali menjadi pemie yang eukup material dalam memotivasi GM. Seringkali mahasiswa dari kelas menengah bawah merasa ia adalah generasi yang tersingkirkan terutama saat ideologi developmentalisme gencar dipaksakan oleh rezim orde baru. Sehingga ada gejala para lulusan PT yang kurang memenuhi "kualifikasi" pembangunan dianggap merupakan faktor tersier yang tidak produktif dalam perekonomian. R. Michels merumuskannya sebagai kelas sosial proletar intelektual. Sampai saat ini, kondisi pendidikan yang masih didominasi oleh kenyataan tidak bisa menjadi jaminan sosial seperti harapan untuk menjadi orang-orang yang sukses dan bisa memperoleh keamanan hidup, memancing keresahan. Bayangan banyaknya generasi lulusan yang menganggur, yang tercatat sampai 20% dengan kenaikan 2-3 persen per tahun, membuat banyak mahasiswa kebat-kebit menyaksikan ini. Harapan perubahan yang berkembang menjadi upaya transformasi sosial, membuat kelompok-kelompok mahasiswa bereksperimen membentuk komunitas yang bisa secara lugas akar penyebab ketidakadilan ini. Sehingga saya pikir cara-cara baru sosialisasi, pengembangan pendidikan yang antioriter, serta bentuk-bentuk persahabatan baru, kesemuanya ini bukan hanya upaya untuk mengubah pola-pola masyarakat yang ada tetapi juga usaha memecahkan persoalan-persoalan pribadi mereka. Apalagi sistem pendidikan menjadi sangat rancu dan berorientasi pada pengukuhan dominasi ideologis negara hadir dengan kuatnya. Peran ideologisasi pragmatisme negara

menyebabkan mahasiswa merasa teralienasi. Konsensus kelas menengah mengenai nilai dan norma pendidikan yang hams mengacu pada kebutuhan masyarakat konsumtif, dalam beberapa hal justru menjadikan mahasiswa sadar akan posisi konsumennya” sehingga dalam aksi-aksinya mahasiswa mulai mengidentifikasi kelompoknya sebagai penolakan atas alienasi struktural ini. GM seringkali hadir untuk menjemati gejala alienasi ini untuk secara partisipatif berkenalan dengan realitas sosial.

Mahasiswa dan Pusaran Arus Neoliberalisme

Apa yang tersisa dari GM saat ini? Benarkah ia berada dalam kondisi stagnan? Realitas historis apa yang di hadapi GM saat ini ? Benarkah GM masih terjebak dalam mimpi historis masyarakat yang utopia, yaitu masyarakat imajiner dengan pemenuhan atas hasrat kemanusiaan yang mendalam, mimpi-mimpi paling agung, dan aspirasi-aspirasi kemanusiaan yang paling tinggi. Semua daya fisik, dan sosial bekerja bersama, dalam keselarasan untuk memungkinkan semua hal yang dirasa perlu dan diinginkan oleh rakyat. Untuk menjawab hal tersebut kita mungkin tidak bisa begitu saja membiarkannya menjadi semacam “mimpi kebablasan.” Semua yang bergerak tentu memakai prinsip sebab akibat. Inilah prinsip sejarah yang diperkenalkan Marx sebagai fase dialektika historis yang panjang. Kemampuan self of determination hanya bisa terjadi jika ada fakta material historis yang mendukungnya, yaitu masih dominannya penindasan manusia atas manusia dengan konflik kelasnya. Sehingga ini bisa menjawab kekhawatiran adanya pelegitimasian sejarah masa lampau yang buta dan tidak konteks dengan kondisi kontemporer. Kekhawatiran yang diintrodusir oleh Karl Popper ini sebenarnya mengada-ada.

Jika demikian dasar pemikirannya, tentulah kita diharuskan menganalisa ulang situasi ekonomi politik yang berkembang saat ini, agar bisa melihat kenapa GM seolah terjebak dalam lingkaran kevakuman dan tidak lagi menjadi instrumen politik yang signifikan. Persoalan GM saat ini masih dihadapkan pada tiga permasalahan besar, *pertama*, antara upaya membuka ruang demokrasi nasional dengan harapan munculnya gejolak demokrasi arus bawah yang massif, *kedua*, persoalan perubahan dinamika ekonomi politik global yang bermetamorfosis menjadi kekuatan Neo-liberal yang kuat, yang sekarang ditambah variabel isu terorisme yang dipicu peristiwa “black september”, dan *ketiga*, dan yang masih krusial, adalah bagaimana mendesain ulang format gerakan yang lebih terkonsolidir dan maju.

Ketiga, permasalahan di atas akan terurai dengan kenyataan objektif yang ada di lapangan. Di tingkatan upaya membangun demokrasi nasional masih dihadapkan pada keterbatasan negara. Ketika Gus-Dur naik ada sedikit harapan terjadinya transformasi yang signifikan dalam periode transisi demokrasi. Tuntutan pembersihan negara dari unsur kekuatan lama (Golkar, Miltel, dan borjuasi korup) mengalami kebuntuan. Jelas ini sebuah kekalahan gerakan demokratik. Bahkan ketika terjadi konspirasi parlemen untuk menjatuhkan Gus Dur, gerakan Prodem, terutarna GM, seolah tidak berdaya. Upaya keras mewujudkan transisi demokrasi seperti membentur dinding tebal yang di pasang kekuatan lama dan “generasi oportunis” yang merasa tidak nyaman dengan upaya perubahan yang ada.

Naknya Megawati semakin membawa ketidakjelasan arah gerakan perubahan. Ha ini bisa terlihat dari kenyataan pasca-pemerintahan yang menganut prinsip sentralisme politik menjadi rezim parlementarisme, prinsip demokrasi menjadi ajang jual beli dan menguntungkan kekuatan politik yang memiliki akses kekuasaan yang besar. Tarik ulur kekuasaan mengarah pada bandul otoritarianisme baru. Kedekatan Megawati dengan mantan penjahat HAM seperti letjend. Sutiyoso, dan jendral lainnya, membuat agenda pengadilan HAM terlupakan. Belum lagi permasalahan ekonomi yang semakin runyam dikarenakan pemerintah tidak tegas dalam menyikapi ketergantungan yang diciptakan oleh para agen Neo-liberal, seperti IMF, WB, CGI, dll. Imbas dari kesemuanya adalah Indonesia terperangkap dalam jerat hutang berkisar 3000 triliun yang akan jatuh tempo 2003 ini. Juga, persoalan pengangguran yang mencapai 59, 84 % dari 95, 7 juta angkata kerja, dan penjualan banyak aset negara untuk diwastakan ke perusahaan multinasional yang punya modal besar. Yang paling ironis adalah munculnya lagi gerakan intimidasi/teror ketakutan terhadap gerakan prodem terutama GM dengan kekerasan, penangkapan, dan upaya memobilisasi kekuatan reaksioner untuk mengalau gerakan Prodem. Dalam kondisi yang seperti ini tentu harus ada posisi yang tegas dari GM, konsolidasi demokratik antarelelemen GM yang lemah dan menjadi kritik yang

terbuka. Sebab isolasi sosial akan tetap menjadi kemungkinan karena GM sangat rentan untuk dimarginalisasi dan dialienasi dari sistem politik dan sosial, hanya dengan stigma yang menciptakan ketakutan. Komunisme masih menjadi "momok" historis dan ini yang terus dieksploitasi. Pesta gemerlap "booming" gerakan mahasiswa 1998 yang menjadi sorotan luas periswas politik nasional, saat ini gerakan mahasiswa mesti sudah mengetahui kelemahan strategi dan taktik gerakan yang kurang bisa melakukan injeksi kesadaran massa yang meluas lewat pendidikan politik yang lebih maju dan nir-kekerasan. Karena isolasi sosial yang dialami eM juga tidak terlepas dari kebanyakan masyarakat dunia ke-3. Johan Galtung menyebutnya sebagai hasil dari "kekerasan struktural" yang berasal dari penerapan konflik kepentingan negara dan rakyat yang dikondisikan untuk memenuhi prasyarat Living Condition masyarakat pinggiran, yang berusaha menerapkan butir-butir proyek imperialisasi dunia. eM, dalam kondisi ini harus mencari jawaban bersama, karena dalam kegilaan sistem yang ada saat ini masyarakat, termasuk mahasiswa, akan semakin terseret pada upaya pragmatis untuk membenarkan penindasan yang dilakukan masyarakat industri seperti yang dikatakan H. Marcuse sebagai Masyarakat/ manusia satu dimensi (one dimension man).

Lalu seperti apakah posisi GM di tengah zaman bergerak (age of motion), fase milenium, di mana isu internasional yang berkembang adalah terorisme dan pasar bebas/neo liberalisme. Di tengah konteks seperti ini ada yang menilai bahwa polarisasi orientasi gerakan semakin menajam. Ada analisa yang mengemukakan gerakan-gerakan di dunia akan bergerak pada juga kategori. Kategori pertama adalah gerakan fundamentalis, yang terceritakan lewat gerakan militansi agama yang dogmatis, kedua adalah gerakan Nasionalisme, gerakan ini muncul dan massif ketika gerakan fasis nasionalis mulai menjadi ancaman di banyak negara. Di Prancis, Kekuatan fasis Jean Marie Le Pen, hampir membuka sentiman itu, di Belanda, bahkan di Indonesia mulai banyak bermunculan fasisme gaya baru berupa pensakralan simbol-simbol primordialisme dan ketakutan pemberontakan yang berlebih-lebihan. Ketiga, gerakan anti globalisasi dan neo liberalisme. Pada banyak gerakan demokratik di dunia, termasuk Indonesia, sangat marak tentang penolakan atas situasi ini. Ada banyak tipe gerakan, ada LSM, individu, dan organisasi massa yang solid dan punya garis politik seperti eM. eM dalam banyak diskusi mesh menempatkan situasi ini untuk meluncurkan platform Anti imperialisme. Karena kapitalisme, dalam coraknya yang paling progressif adalah lewat imperialisme. Hal ini tepat seperti yang diramalkan V.I Lenin bahwa "imperialisme adalah puncak kapitalisme". Imperialisme gaya baru ini tentu menimbulkan fase baru penindasan yang lebih licik dan terorganisir.

Kemudian yang juga cukup krusial adalah permasalahan internal eM. Banyak kritik otokritik yang bisa menjadi pelajaran berharga. Namun seringkali memang itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Banyak GM yang mulai memperhatikan pula tentang upaya pendemokratisasian kampus. Persoalan domestik ini menjadi krusial karena bisa menjembatani "kesadaran apolitis" mahasiswa dengan realitas objektif berupa ketidakbeusan negara dalam mengurus pendidikan sekalipun. Dalam beberapa hal, memang jumlah gerakan dalam bentuk demonstrasi maupun aktivitas militansi mahasiswa saat ini tidak bisa dibandingkan dengan gemuruh 98-an, namun aksi-aksi seera sporadis yang menyikapi banyak permasalahan domestik seperti pendidikan, memberikan indikasi bahwa kesadaran politik di dalam gerakan mahasiswa tidak sepenuhnya meluntur dan bahkan isu-isu yang "dramatis" seperti persoalan mekanisme demokratisasi kampus dapat memobilisasi mahasiswa.

Feodalisme pendidikan dalam bentuk "in loco parentis" di tingkatan universitas juga kembali memperoleh perhambaan dari eM. Seera tidak langsung situasi pendidikan yang konservatif, yang masih kaku dalam memenuhi rasa keingintahuan mahasiswa akan dunia politik ini mempengaruhi dinamika mahasiswa. Berbagai macam proyek liberalisasi pendidikan yang dalam perkiraan akan menimbulkan kebebasan berekspresi mahasiswa, justru berkebalikan. Pendidikan tetap tidak bisa menampilkan wajahnya yang humanis ini visanya terdeteksi dengan melambungnya biaya pendidikan dan pembatasan-pembatasan akademik lainnya yang membatasi mahasiswa di dalamnya. Permasalahan komunikasi politik, sebagai bagian dari sosialisasi program dan sikap politik harus tetap menjadi sebuah prioritas utama. Media komunikasi dalam bentuk terbitan, seperti yang dilakukan kawankawan PMII ini, harus tetap digenerkan. Banyak hal komunikasi politik "bawah tanah" ini mendapat sambutan yang lebih luas karena ia bisa menjadi semacam media dalam mata rantai komunikasi yang membantu pembentukan pandangan-

pandangan ideologis dan mengkomunikasikan pandangan tersebut. Kemudian, jika saya amah, aktivitas GM mahasiswa saat ini kembali kepada masa "keakuan," yang seringkali justru menjadi kendala sulit untuk melakukan kembali konsolidasi dalam menyikapi perubahan yang berlangsung cepat. Jika dulu seringkali aktivitas gerakan berfungsi sebagai saluran bagi impuls-impuls mahasiswa yang nakal atau pemberontak, namun saat ini gerakan harus menjadi sesuatu hal yang padu antara intelektualisme dengan praksis gerakan yang radikal. GM sekarang, secara dewasa tentu tidak lagi berdebat tentang permasalahan apakah harus kritik moral ataukah gerakan politik yang lebih luas. Karena jelas, bahwa tentu sebagian besar dari kita sebagai aktivis GM, bisa menjelaskan radikalisme yang muncul sebagai tanggapan atas kesenjangan cita-cita masyarakat yang ideal dengan kondisi aktual yang jelas bertentangan dengan cita-cita tersebut. Sehingga jelas gerakan yang kemudian muncul akan beririsan tegas dengan struktur ekonomi politik negara suprastruktur.

Progresifitas Gerakan Mahasiswa

Kesadaran elit yang abstrak berbaur dengan ketakutan relatif hilangnya posisi kelas (deklassierung). Sejalan dengan kesadaran elit yang abstrak, pada massa yang akan datang sulit akan membayangkan bisa berjalan harapan akan "mesianisme" massa GM. Persoalan peran mahasiswa sebagai intermediary antara state dan society, seringkali menjebak GM hanya pada posisi netral. Konstruksi ini menjadikan GM seringkali sebagai wadah "romantis-romantisan" bagi orang-orang yang ingin melampiaskan syahwat mudanya. Sementara yang lebih penting adalah bahwa perubahan yang harus terus dilakukan tidak bisa berhenti begitu saja. GM tidak saja harus mengimbangi otoritarianisme negara tetapi ke dalam dan antareleman saling memberikan pengalaman dan pendidikan politik. Di tengah deru neo liberalisme yang hampir akan menjadi ideologi dominan, GM makin dituntut untuk bisa membaca dengan jelas berbagai macam kontradiksi di dalam masyarakat industrial. Sehingga ada analisa yang jelas dan konkret mengenai pertanyaan "what's to be done". GM tentu tidak akan berdiri sendiri, ia harus berhubungan dengan sektor perubahan yang lainnya seperti buruh, tani, KMK, dll. Namun akan semakin susah jika gerakan-gerakan sektoral yang sedianya akan menjadi sekutu dekat GM semakin terjebak dalam lingkaran pragmatisme konflik yang menyeret kesadaran politik kelas pekerja menjadi sekedar gerakan-gerakan normatif yang tak berujung pangkal.

Saya sering membayangkan bahwa ada saja kemungkinan GM terperangkap dalam "politik abu-abu" I grey area yang di pasang negara maupun penguasa modal, dengan jalan memberikan respon-respon gerakan yang bisa tidak menyentuh substansi perubahan, yaitu mewujudkan bentuk demokrasi nasional yang akan meluas menjadi revolusi nasional. Semisal saja tentang kebijakan pemerintah di bidang perburuhan, hanya mampu menciptakan diskursus dan gerakan normatif. Sementara untuk perubahan kesejahteraan tidak pernah terwujud. Begitu pula tentang berbagai isu tentang HAM, separatisme, terorisme, amandemen, dll, seolah mengajak kita untuk terus-menerus bersikap reaksioner dan mudah terprovokasi.

Dalam berbagai kasus di Eropa dan Amerika, ketika mahasiswa terjebak dalam kefrustasian konflik masyarakat industrial yang makin pelik, ada kemungkinan akan terjebak dalam bentuk fundamentalisme gerakan. Bahkan mungkin akan menyerempet menjadi gerakan-gerakan teror. Di Italia mungkin masih kita ingat bagaimana GM yang cukup radikal di sana yaitu brigade merah (brigade operaia) atau autonomia operaia menjadi gerakan teror yang menakutkan, di Jerman faksi baader-meinhoff I semipan SDS menjadi faksi frustrasi yang akhirnya menjadi gerakan teror, atau di Jepang GM berubah menjadi pasukan seikeiguntentara merah yang banyak menebar teror dalam tiap aksinya. Di sini, mungkin akan berbeda situasinya. Indonesia yang merupakan negara marginal dan terbelakang, GM akan bersimbiosis erat dengan kekuatan sektoral. Karena masih jelas bentuk kontradiksi yang dihadapi kelas pekerja, bentuk krisis sosial dan ekonomi politik semakin menghebat, dalam beberapa waktu mendatang akan memberikan sebuah realitas historis agar rakyat turut bergerak. Kefrustasian GM akan justru akan terjawab dengan kontradiksi yang lebih terbuka ini. Apalagi ada indikasi melemahnya pusat kekuasaan kapitalisme di Amerika mungkin dalam jangka yang akan panjang menyebabkan pula perubahan pola kepemimpinan ekonomi politik dunia. Dalam resesi yang akan berlanjut, posisi gerakan demokratik terutamanya GM akan mengalaminya fase yang bisa jadi seperti era 98-an, di mana akan memicu keresahan dalam skala yang cukup luas dan ini akan menjadi semacam "reedukasi" perlawanan yang dengan bekal pengalaman sebelumnya akan menjadi

gerakan politik yang lebih matang. Mari kita bekerja, berkarya dan bercinta dengan satu hal: Kemerdekaan.

GENEOLOGI GERAKAN MAHASISWA INDONESIA

Akar Sejarah di Indonesia

Gerakan mahasiswa di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa. Sejarah Gerakan mahasiswa yang tertua yang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia di Belanda, yang didirikan pada 1922 oleh Mohammad Hatta, yang saat itu sedang belajar di *Nederland Handelshogeschool* di Rotterdam. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkaran kekuasaan Orde Baru, di antaranya Akbar Tanjung, Cosmas Batubara Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, dll. Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabinet pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Baru Dalam perkembangannya di kemudian hari, Orde Baru juga banyak mendapatkan koreksi dari germa seperti dalam gerakan-gerakan berikut:

1. Gerakan anti korupsi yang diikuti oleh pembentukan Komite Anti Korupsi, yang diketuai oleh Wilopo (1970).
2. Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang.
3. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut.
4. Gerakan mahasiswa Indonesia 1974. Gerakan memprotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia pada 1974. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, yang mengakibatkan dihapuskannya jabatan Asisten Pribadi Presiden.

Gerakan Mahasiswa Indonesia 1978.

Gerakan yang mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional pada 1977-1978 yang mengakibatkan untuk pertama kalinya kampus-kampus perguruan tinggi Indonesia diserbu dan diduduki oleh militer. Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia. Pasca diberlakukannya NKK/BKK, jalur perjuangan lain ditempuh oleh para aktivis mahasiswa dengan memakai kendaraan lain untuk menghindari sikap represif pemerintah, yaitu dengan meleburkan diri dan aktif di Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti HMI (himpunan mahasiswa islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) atau yang lebih dikenal dengan kelompok Cipayung. Mereka juga membentuk kelompok-kelompok diskusi dan pers mahasiswa. Gerakan yang menuntut kebebasan berpendapat dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di dalam kampus pada 1987 - 1990 sehingga akhirnya demonstrasi bisa dilakukan mahasiswa di dalam kampus perguruan tinggi. Saat itu demonstrasi di luar kampus termasuk menyampaikan aspirasi dengan longmarch ke DPR/DPRD tetap terlarang. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998. Gerakan yang menuntut reformasi dan dihapuskannya "KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada 1997-1998, yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah untuk meredam gerakan ini di antaranya: Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, Tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu 1999.

Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa tahun sembilan puluhan yang ditandai dengan tumbanganya Orde Baru dengan ditandai lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Gerakan ini diawali dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Gedung wakil rakyat, yaitu Gedung DPR/MPR dan gedung-gedung DPRD di daerah, menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto. Organ mahasiswa yang mencuat pada saat itu antara lain adalah FKSMJ, Forum Kota, HMI MPO, KAMMI karena mempelopori pendudukan gedung DPR/MPR. Perjuangan mahasiswa menuntut lengsernya sang Presiden tercapai, tapi perjuangan ini harus melalui tragedi Trisakti dan tragedi semanggi dengan gugurnya beberapa mahasiswa akibat bentrokan dengan aparat militer.

NKK/BKK

Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang Mahasiswa terjun ke dalam politik praktis, yaitu dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, dimana Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT (senat mahasiswa perguruan tinggi). NKK/BKK menjadi dua akronim yang menjadi momok bagi aktivis Gerakan Mahasiswa tahun 1980-an. Istilah tersebut mengacu pada kebijakan keras rezim Soeharto pada tahun 1978 melalui Menteri Pendidikan & Kebudayaan Daoed Joesoef untuk membungkam aksi kritis mahasiswa terhadap jalannya pembangunan & kebijakan pemerintah saat itu.

Latar Belakang Perlawanan

Simbol institusi perlawanan mahasiswa saat itu adalah Dewan Mahasiswa, organisasi intra kampus yang berkembang di semua kampus. Karena Dewan Mahasiswa menjadi pelopor gerakan mahasiswa dalam menolak pencalonan Soeharto pasca pemilu 1977, kampus dianggap tidak normal saat itu dan dirasa perlu untuk dinormalkan. Lahirlah kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) sekaligus pembubaran dan pelarangan organisasi intra universitas di tingkat perguruan tinggi yaitu Dewan Mahasiswa. Dan sejak 1978 itulah, ketika NKK/BKK diterapkan di kampus, aktivitas kemahasiswaan kembali terkonsentrasi di kantung-kantung Himpunan Jurusan dan Fakultas. Mahasiswa dipecah-pecah dalam disiplin ilmu nya masing-masing. Ikatan mahasiswa antar kampus yang diperbolehkan juga yang berorientasi pada disiplin ilmunya, misalnya ada Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) dan sebagainya.

Penolakan Pembentukan BKK

Perjalanan upaya realisasi organisasi kemahasiswaan terpusat dalam kemahasiswaan di kampus-kampus Indonesia berjalan sangat beragam. Pemerintah memang mengganti keberadaan Dewan Mahasiswa (Universitas) dengan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Menurut peraturan menteri, Ketua BKK adalah dosen yaitu Pembantu Rektor III. Bayangkan absurd-nya dan aneh-nya peraturan itu. Sebuah Lembaga Kemahasiswaan, tetapi Ketua nya Dosen. Di ITB, kampus yang paling keras menolak kebijaksanaan tersebut, BKK nyaris tak pernah jelas eksistensinya. Para dosen juga tampaknya enggan bermusuhan dengan para junior-nya, mahasiswa yang jelas menentang habis keberadaan BKK. Di UGM, de facto BKK memang ada namun juga tidak berjalan. Tidak ada Senat Mahasiswa di tingkat Fakultas yang peduli dengan lembaga tersebut. Yang ajaib di UII Yogyakarta. Di Kampus Perguruan Tinggi Islam tertua di Indonesia itu, Dewan Mahasiswa memang dibubarkan. Tetapi reinkarnasi menjadi BKK. Hanya saja Ketua BKK adalah mahasiswa juga, jadi masih dalam format Dewan Mahasiswa juga. Di Salatiga, Kampus Universitas Kristen Satya Wacana juga melakukan kreasi serupa. Keberadaan BKK diakui namun pengurusnya berasal dari mahasiswa sendiri. Sedangkan di ibukota negara, Universitas Indonesia memang memiliki BKK

tetapi fungsi sehari-hari dijalankan oleh Forum para Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, dan dinamakan Forkom UI. Beberapa anggota DPR sempat mengusulkan pengajuan hak interpelasi oleh Syafi'i Sulaiman dan kawan-kawan tentang NKK/BKK, pada tahun 1979. Pengusul adalah anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dari Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan para 24 pengusul lainnya terdiri dari anggota F-PP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI). Inilah satu-satunya usul interpelasi dalam era Orde Baru sejak pemilu 1977.

GENESIS GERAKAN MAHASISWA 1998

Sejarah Gerakan Tahun 1998

Sejarah perkembangan Gerakan Mahasiswa (GM) di Indonesia selalu menarik karena tidak dapat dilepaskan dengan sejarah perkembangan negara Indonesia. Bahkan, keberadaan GM selalu berpengaruh pada situasi politik nasional. Meskipun sudah berkali-kali "diberangus" oleh penguasa di setiap jamannya, GM selalu muncul dengan sikap kritis dan tuntutan untuk memperbaiki keadaan politik nasional. Secara historis, peran GM dalam perubahan politik di Indonesia sangatlah besar. Misalnya, perubahan kekuasaan dari rejim Orde Lama ke rejim Orde Baru pada tahun 1965, peran GM sangat besar dalam melegitimasi kekuasaan Sukarno. Begitu pula pada tahun 1998, tanpa kehadiran ribuan GM di gedung MPR/DPR, sangatlah sukar untuk membuat Soeharto mundur dari jabatan presiden. Bahkan, jika dilihat jauh ke belakang, peran GM lah yang membidani lahirnya negara Indonesia. Sebagai misal adalah didirikannya Boedi Oetomo pada 1908, yang meskipun bersifat primordial etnik, organisasi GM pertama di Jawa ini telah berhasil memberikan semangat kepada mahasiswa dan pemuda lainnya untuk bercita-cita merdeka.

Diskusi mengenai GM mahasiswa di Indonesia penuh dengan dinamika, karena selalu mengalami perubahan karakter dan bentuk pada setiap jamannya. Soewarsono (1999: 1) menyebut bahwa sejarah awal Indonesia moderen tentang GM memiliki empat "tonggak", yaitu "angkatan 1908", "angkatan 1928", "angkatan 1945" dan "angkatan 1966". Selanjutnya, Soewarsono menyebut bahwa keempat angkatan tersebut adalah generasi-generasi dalam sebuah "keluarga", yaitu sebuah catatan-catatan prestasi "satu generasi baru" tertentu. Masing-masing dari keempat angkatan di atas memiliki bentuk dan karakter serta relasi-relasi dengan kelompok yang lain yang khas dibanding angkatan-angkatan yang lain. Namun, tidaklah dapat dikatakan bahwa tiap-tiap angkatan tersebut selalu membawa perubahan dan kemajuan bagi jamannya. Tetapi, tiap-tiap angkatan tersebut dapat pula menjadi pengekor atau epigon yang menerima melalui pewarisan (Soewarsono, 1999: 1-2). Dengan demikian, diskusi mengenai GM di Indonesia, tidak selalu berbicara mengenai perubahan yang positif, tetapi juga dapat sebaliknya. Hal ini tergantung dengan konteks situasi dan relasi-relasi yang dibangun oleh GM itu sendiri.

Selain keempat angkatan tersebut, terdapat satu angkatan generasi lagi yang paling mutakhir dan sangat berpengaruh tidak hanya pergantian politik kekuasaan saja, tetapi juga pada proses demokratisasi di Indonesia, yaitu "angkatan 1988". Pada angkatan ini, GM telah berhasil menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto yang sebelumnya telah berkuasa selama 32 tahun. Selain itu, GM juga mempengaruhi munculnya wacana demokratisasi dan civil society. Meskipun demokrasi dan civil society secara relatif belum sepenuhnya berhasil diterapkan dalam realitas politik di Indonesia, namun peran GM telah menyebabkan proses-proses tersebut dapat dimulai. Tulisan ini akan mendiskusikan tentang GM angkatan 1998 dengan menggunakan pendekatan prosesual. Pendekatan ini akan melihat keragaman dan kesamaan antar kelompok GM, perubahan-perubahan karakternya dan strategi-strategi yang digunakan untuk melawan rejim penguasa serta kontinuitasnya. Proses dan peristiwa-peristiwa dari suatu fenomena sosial merupakan suatu rangkaian yang saling berkesinambungan. Pemahaman tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan berlangsungnya relasi-relasi antara peristiwa satu dengan peristiwa lain merupakan bagian dari penjelasan yang harus dilakukan (Winarto, 1999). Untuk itu, suatu kajian tentang proses harus mampu menunjukkan hubungan yang berangkai dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dengan keterkaitan satu sama lain (Winarto, 1999).

Selain itu, pendekatan ini juga menekankan adanya perbedaan (difference). Konsep-konsep mengenai emosi, agen, gender dan tubuh individu, secara kultural telah dibentuk melalui perbedaan-perbedaan. Dalam artikelnya yang berjudul "Theories of Culture Revisited", Keesing (1994) menyatakan bahwa selayaknya teori kebudayaan yang dikembangkan tidak akan membuat

asumsi-asumsi dengan batas-batas yang tertutup, tetapi biarkan dia memberikan konsep-konsep yang kompleks dan beragam. Aspek lain yang perlu ditekankan dalam pendekatan ini adalah memotret adanya dinamika suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan mempunyai karakter yang dinamis dan selalu mengalami perubahan. Untuk itu, antropolog hendaknya menekankan bagaimana mekanisme dan proses yang berlangsung dalam suatu kelompok masyarakat, hingga hal-hal tersebut dimiliki bersama atau tidak, vice-versa (Winarto, 1999: 26).

Gerakan Mahasiswa 1998

GM telah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perubahan kekuasaan dari rejim Orde Baru Soeharto ke rejim yang konon katanya "reformasi". Ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR di senayan pada bulan Mei 1998 telah membuat anggota dewan tidak dapat bekerja secara efektif. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi anggota dewan untuk memenuhi tuntutan mahasiswa melengserkan Soeharto dari jabatan presiden. Peristiwa tersebut bukanlah peristiwa yang pertama kali dalam sejarah perubahan kekuasaan di Indonesia. Pada tahun 1965, GM juga telah berhasil memelopori perubahan kekuasaan dari rejim Sukarno ke rejim Orde Baru Soeharto. Sebelumnya, pada 1945, peranan mahasiswa dan pemuda sangatlah penting sehingga Sukarno bersedia membacakan teks proklamasi. Keberadaan GM tidaklah taken for granted yang tiba-tiba muncul begitu saja. Perkembangan GM selalu berkaitan erat dengan situasi sosial dan politik, dimana ia merupakan respon dari ketidak-beresan situasi sosial dan politik yang menurut mereka tidak adil. GM akan selalu bergerak dan terus bergerak jika melihat kekuasaan yang menindas rakyat. GM ini sangat sulit untuk dibendung gerakannya, meskipun sudah dilarang oleh penguasa. Sebagai misal adalah GM 1998, yang sejak tahun 1978 telah "ditertibkan" oleh Orde Baru melalui serangkaian regulasi yang membuat GM sulit bergerak. Namun, ternyata GM selalu terus bergerak dengan strategi yang justru lebih kreatif. Berikut ini adalah sejarah kehadiran GM 1998 serta serangkaian strategi yang digunakannya.

Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)

Peristiwa penting yang patut dicatat dalam sejarah GM 1998 adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), Dr. Daoed Joesoef. Nomor: 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kebijakan ini dianggap telah mematikan GM karena membebani mahasiswa dengan serangkaian kewajiban kuliah dan melarang kegiatan politik di kampus. Pada intinya kebijakan ini adalah menjustifikasi pembubaran dan dihilangkannya organisasi mahasiswa yang selama ini merupakan sarana demokratis mahasiswa berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan mahasiswa (Harahap dan Basril, 1999: 55). Sebelumnya, lembaga kemahasiswaan merupakan sarana untuk menentang kebijakan pemerintah maupun perguruan tinggi. Dengan dibubarkannya lembaga pemerintahan kampus, pemerintah Orde Baru berharap GM tidak lagi turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi politik.

Dikeluarkannya kebijakan NKK ini merupakan respon pemerintah atas serangkaian peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh GM pada tahun 1973-1978. Terutama setelah peristiwa Malapetaka 17 Januari 1974 (Malari 1974), GM diawasi secara ketat. Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 028/1974 yang dianggap membatasi aktivitas GM. Antara tahun 1975-1976, protes yang dilakukan oleh GM terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru sedikit mereda. Namun, setelah pemilu tahun 1977, gelombang aksi meningkat lagi. Di Jakarta, mahasiswa UI kembali melakukan aksi memprotes pelaksanaan pemilu yang dianggap tidak adil, karena pihak birokrasi dan militer dianggap memihak ke Golkar. Mereka menganggap tidak sah dan menolak kemenangan Golkar pada pemilu 1977. Aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah, misalnya di Bandung, mahasiswa ITB membentuk Gerakan Anti Kebodohan (GAK), di Yogyakarta, mahasiswa UGM mengusung "keranda matinya demokrasi", bahkan di Surabaya, sejumlah mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

Peristiwa penting yang patut dicatat adalah ketika ketua Dewan Mahasiswa (DM) UI, Lukman Hakim berhasil mengadakan pertemuan 67 DM dan Senat Mahasiswa (SM) se-Indonesia dengan menggunakan dana kegiatan mahasiswa yang berasal dari SPP. Peristiwa tersebut telah membuat khawatir penguasa. Sanit (1999: 58) menuliskan kekhawatiran pemerintah dengan mengutip pernyataan Soedomo sebagai berikut: "...Staf Komando Soedomo menyatakan bahwa

secara sistematis melalui DM, mahasiswa telah melawan hukum dan konstitusi; mahasiswa telah menggunakan diskusi untuk membangun opini untuk mengganti kepemimpinan nasional; tuduhan melalui Ikrar Mahasiswa tanggal 28 November di Bandung bahwa presiden telah menyeleweng dari UUD 1945 adalah melawan kekuasaan MPR; kedatangan DM se-Indonesia ke MPR untuk menyatakan ketidakpercayaan kepada lembaga itu pada tanggal 7 Januari 1978 merendahkan lembaga itu;..”

Segera setelah Soedomo mengeluarkan surat pernyataan tersebut, beberapa tindakan represif diambil oleh pemerintah Orde Baru. Sejumlah kampus diduduki oleh militer dan beberapa koran seperti Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, Indonesian Times, Sinar Pagi dan Pos Sore dilarang terbit (Sanit, 1999: 58). Selanjutnya, untuk menunjukkan sikapnya terhadap GM tersebut, pemerintah melalui Menteri P dan K, Dr. Daoed Joesoef mengeluarkan keputusan Nomor: 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kemudian, di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, Menteri P dan K juga mengeluarkan SK No. 0124 yang memberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan mekanisme mengajar dan belajar terprogram secara intensif. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah mewajibkan mahasiswa menyelesaikan sejumlah beban studi untuk setiap semester yang secara keseluruhan terdiri dari 8 sampai 12 semester untuk jenjang S-1 (Sanit, 1999: 59-60). Akibat dari kebijakan tersebut telah membuat aktivitas politik GM menjadi berkurang. Selain harus menyelesaikan beban studi yang berat, ketatnya pembinaan non akademik mahasiswa telah menyebabkan terbatasnya waktu mahasiswa untuk melakukan gerakan-gerakan kritik terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melakukan “pembinaan ideologi” terhadap mahasiswa melalui penataran P-4 (Pendidikan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Kelompok Diskusi dan Pers Mahasiswa

Serangkaian tindakan represif dan kebijakan yang dilakukan untuk meredam GM ternyata sangat efektif. Dapat dikatakan bahwa sejak tahun awal 1980-an, aktivitas GM mulai surut. Namun, keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Untuk menghindari tindakan represif dari rejim Orde Baru, mahasiswa merubah strateginya. Mereka tidak lagi berteriak turun ke jalan, tetapi dengan membentuk kelompok-kelompok studi (KS) sebagai cara merespon dan mengekspresikan kekecewaannya kepada penguasa. Pada tahun 1983, beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara membentuk Kelompok Studi Proklamasi (KSP) yang bermarkas di jalan Proklamasi. KS ini kemudian diikuti oleh mahasiswa dari UI, IAIN, Unas dan IKIP Jakarta. Diskusi yang biasanya diselenggarakan pada Minggu siang mendiskusikan topik ekonomi dan politik. Setelah KSP, di Jakarta muncul Kelompok Studi Indonesia (KSI), Lingkaran Studi Indonesia (LS), Indonesian Students Forum for International Studies (ISAFIS), KS Pena dan lain-lain. Kemudian, di beberapa kota lainnya juga muncul fenomena yang sama: di Bandung muncul KS Thesa, KS Free School for Socio-Analysis; di Yogyakarta muncul KS Palagan, KS Teknosofi, KS Girli, KS F-16; di Surabaya muncul Kelompok Diskusi Surabaya dan Kelompok Analisa Sosial.

Selain membentuk KS, GM di beberapa kampus juga mengaktifkan penerbitan kampus atau pers mahasiswa (persma). Beberapa media yang lahir pada masa pertengahan 1980-an adalah: majalah Suara Mahasiswa di UI; majalah Balairung di UGM; majalah Arena di IAIN Yogyakarta dan majalah Himmah di UII; majalah Opini dan Manunggal di Undip; dan majalah Dialogue di Unair. Meskipun diterbitkan dengan cara yang sederhana dan oplah yang terbatas, kehadiran majalah kampus ini sempat menjadi media alternatif mengenai berita-berita sosial dan politik yang tidak dimuat di media umum nasional dan lokal. Munculnya KS dan persma tidak lantas membuat mahasiswa berpuas diri. Sebagian dari mereka masih merasa kurang puas hanya dengan melakukan diskusi dan menulis. Mereka tetap mencari cara lain yang lebih efektif untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap ketidakadilan sosial dan politik. Salah satu alternatifnya adalah membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Badan Koordinasi Mahasiswa (BKM)

Masih tidak puas dengan bentuk-bentuk aktivitas yang sudah dilakukan di atas, GM kembali membentuk jaringan lebih yang lebih luas. Di Bandung muncul Badan Koordinasi Mahasiswa Bandung (BKMB) dan Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta (BKMJ). Pembentukan komite-komite ini merupakan realisasi dari apa yang menjadi topik-topik diskusi sebelumnya.

Mereka merasa bahwa berdiskusi saja tidak cukup, untuk itu mereka membentuk jaringan aksi untuk membentuk solidaritas antara mahasiswa. Jaringan aksi tersebut merespons isu-isu yang dianggap tidak adil bagi rakyat. Salah satu jaringan yang melibatkan mahasiswa di beberapa di beberapa kota seperti Salatiga, Yogyakarta, Semarang, Bandung dan Jakarta adalah Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo (KSKPKO). Kelompok ini melakukan advokasi terhadap warga korban penggusuran pembangunan waduk di Kedung Ombo, Boyolali Jawa Tengah dengan mengadakan aksi di kantor Depdagri, Jakarta dan di depan kantor Kodim Boyolali pada 24 Maret 1989.

Isu lain yang cukup menonjol adalah kasus tanah Kacapiring, Jawa Barat. Di Bandung, aktivis Bandung dan Kelompok Mahasiswa Jakarta (KMJ) melakukan aksi dialog dengan walikota Bandung. Aksi ini berakhir dengan bentrok dan 33 mahasiswa ditahan. Kemudian pada 12 April 1989, sekitar 3000 mahasiswa dari Jakarta dan Bandung aksi di depan kantor Poltabes Bandung untuk menuntut pembebasan rekan mereka yang ditahan. Selanjutnya, pada 17 April 1989 mahasiswa melanjutkan aksi di kampus ITB dengan isu yang sama. Pada akhir tahun 1980-an, GM ditandai dengan tumbuhnya komite-komite rakyat yang menjadi bentuk organ dan jaringannya. Antar kelompok GM di berbagai kota saling berkomunikasi dan saling mengunjungi untuk membangun solidaritas. Salah satu bentuk solidaritas adalah bentuk aksi dukungan suatu kelompok GM terhadap aktivitas yang dilakukan kelompok GM di kota lain. Mereka ini selalu sharing mengenai isu-isu sosial dan politik paling mutakhir. Pola-pola semacam ini terus dikembangkan di beberapa wilayah. Mereka semakin memperkuat jaringan dan solidaritas tidak hanya antar universitas di kota, tetapi juga antar kota.

Setelah menjalani masa-masa "bersama", antar kelompok GM mulai terlihat tidak sejalan. Terutama pada tahun 1990-1993, terdapat kecenderungan bubarnya aliansi dan terbentuknya aliansi baru (Gayatri, 1999: 91). Antar kelompok GM tampaknya tidak selalu sejalan, baik dalam hal pemilihan isu maupun pemilihan kelompok mana yang dapat diajak aliansi. Perpecahan ini lebih disebabkan karena egoisme kelompok dan selebihnya ideologi serta pilihan aksi. Egoisme tampak ketika mereka masih mempersoalkan primordialisme universitas sebagai acuan aliansi GM.

Misalnya, di Bandung kelompok GM terpecah menjadi dua, yaitu antara kelompok GM dari ITB dengan kelompok dari Unpad. Perbedaan ideologi dan pilihan bentuk aktivitas tampak terjadi di Jakarta dan Yogyakarta. Gabungan antar KS, persma dan LSM yang telah menghasilkan Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY) terpecah menjadi dua kelompok. Perpecahan ini berbaringan dengan perpecahan GM di Jakarta yang juga terpecah menjadi dua. FKMY terpecah menjadi Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta (DMPY) dan Serikat Mahasiswa Yogyakarta (SMY). DMPY yang berasosiasi dengan kubu Skephi di Jakarta, yang menonjol dengan gaya parlemen jalanan dan empirisme yang didominasi watak gerakan LSM yang praktis dan kongkrit, sedangkan SMY berasosiasi dengan kubu Infight yang menonjol dengan watak teoritik ideologis yang kuat yang menjadi ciri khas KS (Gayatri, 1999: 91).

Pada pertengahan tahun 1990-an, kedua kelompok ini kemudian membentuk jaringan sendiri-sendiri, sehingga terdapat dua jaringan besar kelompok GM yang tersebar di berbagai kota. Perpecahan yang muncul pada awal tahun 1990-an tersebut ternyata telah meluluhkan jaringan solidaritas yang telah dibangun sebelumnya, dan kemudian membentuk jaringan solidaritas yang baru. Kelompok DMPY pada akhirnya nanti menjadi Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), sedangkan dan SMY pada akhirnya menjadi jaringan Persatuan Rakyat Demokratik (PRD).³ Komunikasi di antara kedua kelompok tersebut sangat buruk, bahkan dalam beberapa hal mereka cenderung menjadi rivalitas. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah ketika PRD dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Orde Baru karena dituduh terlibat sebagai dalang peristiwa 27 Juli 1996. Sejak saat itu para aktivis PRD diburu dan ditangkap oleh aparat keamanan. Akan tetapi, yang kemudian ditangkap tidak hanya kelompok PRD, tetapi juga kelompok-kelompok GM yang lain termasuk FPPI. Akibat peristiwa tersebut, hingga sekarang antara kedua kelompok tersebut masih saling menyalahkan. Rivalitas antara kedua kelompok tersebut masih terus berlangsung hingga pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi yang menghantam di Indonesia dan beberapa negara Asia telah menjadi momen yang penting bagi munculnya GM turun ke jalanan. Kedua kelompok ini, dan juga muncul kelompok GM yang baru seperti Forkot, dan kelompok mahasiswa ekstra kampus semakin aktif turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi dan pergantian

kekuasaan. Mereka ini secara maraton dari pertengahan 1997 hingga Mei 1998 terus menerus melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota.

Gerakan Moral dan Gerakan Politik

Muridan S. Widjojo (1999a: 234-289) telah merumuskan dengan baik mengenai GM 1998 dalam dua kelompok, yaitu "gerakan moral" dan "gerakan politik". Pembagian menjadi dua kelompok ini didasarkan pada wacana yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok dalam GM itu sendiri. Gerakan moral mengacu pada wacana yang dikembangkan oleh GM yang mengkritisi kebijakan rejim Orde Baru. Muridan menyebut kelompok ini sebagai Gerakan Kritik Orde baru (GKOB). Sedangkan gerakan politik mengacu pada wacana untuk merobohkan rejim Orde Baru, dan menyebut kelompok ini sebagai Gerakan Anti Orde Baru (GAOB). "Gerakan moral" mendasarkan diri pada pandangan bahwa perubahan politik dapat dilakukan dengan cara "menghimbau" atau "mengingatnkan" kepada elit politik. Berbeda dengan "gerakan politik", gerakan moral ini tidak secara tegas ingin mengganti kekuasaan politik Orde Baru Soeharto saat itu.

Paham ini menekankan "suara" atau "gagasan" sebagai inti gerakan. Ini berarti bahwa kapasitas operasi yang diharapkan dari gerakan moral mahasiswa adalah sebatas "menghimbau" dan atau "mengingatnkan". Dari sini juga dapat dilihat bahwa penganut paham ini percaya bahwa suatu rejim politik bisa diubah dengan cara "dihimbau" atau "diingatnkan" (Widjojo, 1999a: 240). Sedangkan gerakan politik secara tegas ingin mengganti kekuasaan rejim Orde Baru Soeharto. Kelompok ini menolak semua kerangka asumsi yang dibangun Orde Baru. Sebelum tahun 1997, pemerintah rejim Orde Baru telah melarang mahasiswa terjun ke gerakan politik karena hal tersebut bukan karakter mahasiswa. Menurut pemerintah Orde Baru, mahasiswa harus belajar dan menunjukkan prestasi di kampusnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa gerakan politik adalah hal yang tabu bagi mahasiswa saat itu. Akan tetapi tidak bagi kelompok GAOB. Mereka justru ingin menggunakan gerakan politik sebagai senjata untuk melawan pemerintah Orde Baru. Kelompok ini menyatakan bahwa mahasiswa tidak perlu menggunakan pemahaman yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru, karena hal tersebut dapat membatasi peran GM itu sendiri. Dengan menganggap GM sebagai gerakan politik, maka ruang pergerakannya menjadi luas, sehingga dengan demikian dapat berjuang bersama-sama rakyat. Konsekuensi bagi suatu gerakan politik, yaitu menyatunya antara berbagai kekuatan, termasuk dengan rakyat. Kelompok ini secara tegas menginginkan adanya hubungan dengan massa pengikut di luar kampus. Mengutip sebuah wawancara dengan seorang aktivis dari Unila, Lampung, Widjojo menulis: *Pertama kami tegaskan, gerakan kami adalah gerakan politik dan bukan gerakan moral. Langkah yang kami tempuh berupa aksi atau pergerakan massa* (Widjojo, 1999a: 243). Gagasan untuk menggabungkan kekuatan GM dengan massa di luar kampus ini telah menjadi perdebatan yang sengit diantara kelompok GM sendiri. Kelompok yang dikategorikan sebagai GKOB yang menolak unsur non mahasiswa atau rakyat biasa sebagai kekuatannya. Karena GKOB ingin bahwa GM harus steril dari infiltrasi kelompok-kelompok di luar mahasiswa. Sehingga dalam setiap aksinya, GKOB hanya melibatkan mahasiswa sebagai massanya. Hal ini berbeda dengan GAOB yang justru mengundang kelompok non mahasiswa, yang mereka sebut dengan rakyat untuk mendukung gerakannya.

Akibat dari bersatunya kekuatan mahasiswa dan non mahasiswa ini, GM di beberapa kampus mengalami perbedaan yang sangat tajam, terutama pada pandangan mengenai kekuasaan dan strategi aksi. Tidak jarang antara GKOB dengan GAOB tidak dapat melakukan aksi bersama karena alasan di atas. Bahkan secara ekstrem ada kelompok yang menolak bergabung dengan kelompok GM dari universitas lain. Misalnya, Misalnya pada 4 Maret 1998, GKOB dari Universitas Indonesia menolak ajakan mahasiswa IPB untuk melakukan aksi bersama di jalan (Widjojo, 1999b). Berikut ini daftar kelompok GM yang dikategorikan sebagai GKOB dan GAOB yang dibuat oleh Widjojo (1999a: 290-376): GKOB Kelompok aksi yang dapat dikategorikan ke dalam GKOB adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Kelompok ini merupakan produk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) X di Universitas Muhammadiyah Malang pada 29 Maret 1998. Pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 200 aktivis masjid kampus tersebut telah menghasilkan "Deklarasi Malang". Meskipun aktivitas gerakannya telah dimulai sebelumnya, namun peresmian sebagai organisasi massa formal, baru diputuskan pada 1-4 Oktober 1998. Menurut aktivis Fahri Hamzah, kelahiran KAMMI ini diilhami keberadaan GM tahun 1966, yaitu Kesatuan Aksi

Mahasiswa Indonesia (KAMI). Sebagian besar aktivis KAMMI ini berlatar belakang aktivis LDK yang berasal dari organisasi massa besar seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kelompok ini membentuk basis-basis gerakan di beberapa universitas besar seperti UI, UGM, ITB, IPB, Unair, Undip dan lain-lain. Dalam setiap aksinya, baik yang ada di kota Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Surabaya, KAMMI mampu menghadirkan massa yang cukup banyak. Orientasi KAMMI adalah reformasi politik dan ekonomi yang dilandasi moral dan ahlak. Namun, kelompok ini tidak secara tegas menyatakan ingin mengganti rejim kekuasaan. "Tujuan gerakan KAMMI adalah memastikan adanya perubahan yang bermanfaat bagi umat Islam dan dalam jangka panjang berupaya membentuk forum yang mapan" (Widjojo, 1999a: 366). KAMMI menganggap bahwa dialog merupakan saran yang efektif untuk menghindari anggapan bahwa KAMMI adalah kelompok yang fundamentalis.

GERAKAN ANTI ORDE BARU (GAOB)

Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)

Seperti telah disinggung di atas, bahwa GM 1990 terpecah menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok ini mengembangkan jaringannya sendiri-sendiri. Salah satu jaringan besar itu adalah FMPY di Yogyakarta. Kelompok ini mengembangkan jaringannya dari Surabaya, Solo, Semarang, Purwokerto dan Jakarta. Di tiap-tiap kota jaringan ini memiliki organ-organ kecil sendiri, yang sangat khas lokal dan tidak tergantung dengan jaringan besarnya. Begitu juga dalam menyikapi isu-isu sosial dan politik, mereka tidak diharuskan mempunyai kesamaan sikap dan pilihan aksinya. Jaringan ini tidak lebih sebagai bentuk solidaritas dan sharing informasi.

Dalam hal ideologi, jaringan kelompok ini memperlakukan ideologi sebagai pengetahuan, karena belum pernah ada kesepakatan secara eksplisit oleh para aktivisnya (Widjojo, 1999: 303). Namun, jika dilihat dari wacana-wacana yang dikembangkan, kelompok ini menganut paham Sosialisme, Islam dan Nasionalisme. Kelompok ini memandang bahwa realitas politik di Indonesia bersifat unik, karena itu ideologi-ideologi besar tidak relevan bagi gerakan politik (Widjojo, 1999: 303).

Meskipun aktivitasnya sudah lama berjalan, namun sebagai organ resmi yang berskala nasional baru disepakati pada 13 Nopember 1998 di Magelang. Jauh hari sebelum menjadi FPPI, organ-organ dalam jaringan kelompok ini telah aktif melakukan aksi-aksi dalam menuntut reformasi dan melengserkan Soeharto. Beberapa organ-organ tersebut adalah: di Yogyakarta muncul Pusat Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY), Solidaritas Orang Pinggiran untuk Kemanusiaan (SOPINK), Fampera, Fropera; di Jakarta muncul Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) dan Gerakan Mahasiswa Pancasila untuk Reformasi (Gempur); di Purwokerto muncul Aliansi Kebebasan Rakyat Berpendapat (AKRAB) yang kemudian melahirkan Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat (FAMPR), Komite Mahasiswa untuk Demokrasi Indonesia (Komarudin); di Salatiga muncul Semesta, Serikat Mahasiswa Independen (SMI); di Semarang muncul Forum Mahasiswa Sadar Lingkungan (Formasal); di Surabaya muncul Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS); di Malang muncul Gerakan Reformasi untuk Rakyat Malang (Gerram); di Jombang muncul Forum Mahasiswa Jombang (Formajo); dan di Jember muncul Gerakan Mahasiswa Pecinta Rakyat (Gempar).

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

LMND merupakan organ nasional yang merupakan metamorfosis dari PRD, yang memiliki jaringan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Purwokerto. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, kelompok ini memilih ideologi Sosialis Demokratik Kerakyatan (Widjojo, 1999: 326). Kelompok ini memiliki organisasi yang cenderung senafas dengan format yang "sentralisme demokratik" (Widjojo, 1999: 327). Berbeda dengan FPPI, organ-organ yang tergabung dalam kelompok ini memiliki pilihan bahasa yang sama serta isu-isu besar yang sama. Secara organisasi, kelompok lebih rapi dibanding dengan FPPI. Dalam mengantisipasi "incaran" pihak keamanan, kelompok ini menggunakan strategi memilih nama organ "sekali pakai", yaitu menggunakan nama kelompok tertentu hanya pada saat aksi isu tertentu pula dan setelah itu, organ tersebut tidak terdengar lagi. Strategi ini terutama dijalankan setelah peristiwa 27 Juli 1996 hingga akhir tahun 1997.

Adapun organ-organ yang tergabung dalam kelompok ini adalah: di Yogyakarta muncul Komite Nasional Penegak Demokrasi (KNPD), Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP); di Solo muncul Komite Mahasiswa untuk Keadilan dan Demokrasi (KMKD), Dewan Rakyat dan Mahasiswa Surakarta (DRMS), Dewan Ampera Sukoharjo, Dewan Reformasi Rakyat Sragen (DRRS), Dewan Reformasi Rakyat Boyolali (DRRB); di Lampung muncul Persatuan Mahasiswa Pemuda Lampung (PMPL) yang kemudian membentuk Komite Peduli Rakyat (KPR), Komite Mahasiswa Pemuda Rakyat Pelajar Lampung (KMPRPL), Aliansi Demokrasi Indonesia (ALDI); di Jakarta muncul Keluarga Besar UI (KBUI), Kobar, Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (Komrad); di Bandung muncul Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Perubahan (GMIP); di Semarang muncul Forum Pembebasan, Komite Aksi Rakyat Semarang (Keras); dan di Surabaya muncul Aliansi Bersama Rakyat Indonesia (ABRI).

Forum Komunitas Mahasiswa se-Jabotabek (FKMsJ/Forum Kota)

Dalam setiap aksinya, FKMsJ (kemudian berubah menjadi Forkot) yang didirikan pada 7 Maret 1998 mampu menarik massa cukup besar. Kelompok ini dibangun disimpul-simpul kampus yang sebelumnya telah memiliki tradisi perlawanan, seperti ISTN, APP, UKI dan IKIP Jakarta (Widjojo, 1999: 342). Forkot memandang bahwa GM yang dibangunnya sebagai kelompok penekan dalam proses menuju reformasi total (Widjojo, 1999: 342). Forkot sangat populer dan mampu menarik perhatian mahasiswa non aktivis sehingga pada setiap aksinya selalu dihadiri ribuan massa. Ideologi yang dibangun oleh kelompok ini belum begitu jelas, kecuali tuntutan untuk membentuk Komite Rakyat Indonesia sebagai alternatif pemerintahan transisi paska Soeharto. Konsep ini berasal dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dipersiapkan menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kelompok ini pernah membangun jaringan di beberapa kota melalui pertemuan mahasiswa se Jawa dan Bali. Namun, hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya.

Front Nasional & Pusat Informasi & Jaringan Aksi untuk Reformasi (PIJAR)

Selain Forkot, di Jakarta terdapat dua kelompok GM yang cukup signifikan dalam melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut reformasi, yaitu Front Nasional dan PIJAR. Kedua kelompok ini berpusat di Unas. Sama seperti mereka menuntut penyelesaian krisis ekonomi dan melengserkan Soeharto sebagai presiden.

HMI Majelis Penyelamatan Organisasi (MPO)

Agak sulit memposisikan kelompok HMI MPO dalam dikotomi GKOBB dengan GAOB. Tanpa alasan yang cukup jelas, Widjojo (1999a: 369-369) mengkategorikan HMI MPO sebagai GKOBB. Kemungkinan, alasannya karena HMI MPO dianggap memiliki gen organisasi yang sama dengan HMI, yang terbukti beberapa mantan aktivisnya menjadi pembantu presiden Soeharto. Namun, sesungguhnya terdapat perbedaan mendasar antara HMI dengan HMI MPO, yaitu penolakannya terhadap kebijakan "asas tunggal Pancasila". Dari penolakan ini jelas bahwa HMI MPO sejak awal telah berseberangan dengan rejim Orde Baru Soeharto. Bahkan, antara tahun 1985 hingga pertengahan 1998, HMI MPO ini dianggap sebagai organisasi yang ilegal oleh pemerintah Orde Baru.

HMI MPO membentuk tujuh komite aksi yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Semarang (FKMIS), Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Ujung Pandang (FKMIU), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Purwokerto (FKMIP), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Kendari (FKMIK) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Palu (FKMIP). Komite-komite aksi ini akan mempertanggung-jawabkan kegiatannya kepada Dewan Pimpinan Cabang HMI MPO kota setempat. Di Jakarta kelompok ini memiliki basis di Universitas Jayabaya, ABA-ABI, IAIN, Unisma, Universitas Muhammadiyah. Di Yogyakarta, kelompok ini berbasis di Jamaah Shalahuddin UGM dan aktivis HMI MPO di beberapa universitas swasta di Yogyakarta.

Antara tahun 1990-an hingga 1997 akhir, isu-isu yang paling sering diangkat dalam setiap aksinya oleh kelompok ini adalah persoalan perilaku keagamaan. Misalnya, isu jilbab, isu lemak babi, isu haram Sumbangan Sosial Berhadiah (SDSB) dan isu-isu politik internasional seperti isu pro Saddam, anti Israel, dan isu anti Amerika. Pada tahun 1993-1994, kelompok ini mulai melontarkan

isu politik dan ekonomi tentang ketidak-beresan perilaku kekuasaan rejim Orde Baru dengan mengangkat isu kredit macet. Menjelang akhir tahun 1997, kelompok ini mulai mengangkat isu anti Orde baru Soeharto. Bahkan LMMY beberapa kali melakukan aksi bersama dengan kelompok kiri radikal seperti PRD.

DINAMIKA GM PASKA MEI 1998

Pasca kejatuhan Soeharto 1998

Paska kejatuhan Soeharto 1998, antara kelompok-kelompok GM maupun dalam internal kelompok GM mengalami perbedaan pendapat yang sangat tajam. Perbedaan ini mulai muncul ketika mensikapi naiknya Habibie sebagai presiden. Bagi kelompok GKOBB menganggap bahwa perjuangan mereka telah selesai, sedangkan bagi GAOB masih menganggap bahwa Habibie merupakan perpanjangan tangan dari Soeharto.

Akibat dari perbedaan tersebut, pada tanggal 22 Mei 1998, di gedung DPR hampir terjadi bentrok antara kelompok yang mendukung Habibie sebagai presiden melawan ribuan mahasiswa yang menentang Habibie sebagai presiden. Kelompok yang mendukung Habibie antara lain adalah KISDI, Humanika dan kelompok preman yang menamakan dirinya pendekar banten. Humanika ini adalah kelompok yang sebagian aktivisnya merupakan mantan anggota HMI sewaktu mereka menjadi mahasiswa tahun 1978-an. Mereka ini kelompok yang cukup dekat dengan Habibie, terutama setelah Habibie menjadi ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dukungan yang diberikan terhadap Habibie yang ICMI diharapkan akan membawa keuntungan bagi KISDI dan Humanika. Pada 23 Mei 1998, KAMMI Solo dan Salatiga melakukan aksi menerima Habibie sebagai presiden. Sementara di Semarang, pada 25 Mei 1998, kelompok yang menamakan diri SMPT se Jateng mendukung Habibie. Di daerah-daerah lain seperti di Surabaya, Ujung Pandang dan Bandung, kelompok-kelompok yang dikategorikan GKOBB secara serempak melakukan aksi mendukung Habibie.

Tetapi di lain pihak, pada tanggal 28 Mei 1998, Forkot dan FKSMJ aksi di gedung DPR RI menolak Habibie serta menuntut dibentuknya KRI, untuk membentuk eksekutif dan DPRS/MPRS serta menyelenggarakan kabinet sementara serta mempercepat pemilu dan Sidang Istimewa. Tuntutan tersebut bertentangan dengan keinginan kelompok GKOBB untuk menjadikan Habibie sebagai presiden. Pada 22 Mei 1998, LMMY, PMII, GKMI dan kelompok GAOB lainnya di Yogyakarta juga melakukan aksi menolak Habibie dan kabinetnya. DRMS Solo juga melakukan aksi menolak Habibie dengan melakukan aksi di Balaikota Solo. Penolakan yang sama juga dilakukan oleh AMRS di Semarang pada 23 Mei 1998 di Kantor Gubernur Jawa dan FKPI di depan gedung DPRD I pada 25 Mei 1998. Aksi yang sama juga dilakukan oleh kelompok GAOB di seluruh kota-kota besar di Indonesia untuk menolak Habibie sebagai presiden.

Pertentangan tersebut terus mewarnai demonstrasi-demonstrasi di Jakarta dan beberapa kota lainnya antara akhir Mei hingga September 1999. Tetapi, kuantitas aksi demonstrasi mulai menuntut dan menolak Habibie mulai berkurang pada bulan Juli hingga September 1998. Tetapi, wacana tentang perbedaan tersebut makin menajam di antara kelompok GKOBB dengan GAOB pada bulan Oktober 1998. Misalnya pada 28 Oktober 1998 di Bandung hampir terjadi bentrok di antara kelompok tersebut. Pasalnya, aksi yang sebelumnya dilakukan oleh kelompok GAOB dengan memasang spanduk anti Habibie, tiba-tiba dirubah oleh kelompok GKOBB menjadi dukungan terhadap Habibie. Ketegangan-ketegangan tersebut juga terjadi di beberapa kota besar di Indonesia.

Perbedaan ini terus berlanjut dalam menyikapi perkembangan politik nasional. Kedua kelompok di atas seringkali mengambil posisi yang berseberangan dalam menghadapi isu-isu penting nasional. Catatan tambahan: Peristiwa Malari 1974 bermula dari aksi mahasiswa menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka sebagai simbol untuk menentang investasi modal asing. Namun peristiwa tersebut akhirnya berubah menjadi kerusuhan yang telah menyebabkan 9 orang meninggal, 23 orang terluka dan beberapa bangunan termasuk pasar Senen terbakar. Dari peristiwa tersebut, pihak keamanan telah menahan 700 orang dan 45 diantaranya diajukan ke pengadilan. Pada saat yang sama, pemerintahan membredel beberapa koran yang telah memberitakan peristiwa tersebut (Sanit, 1999: 53-54).

Pada tahun 1983, pemerintah rejim Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi yang ada di Indonesia. Kebijakan ini telah berpengaruh pada organisasi HMI yang pada tahun 1984 terpecah menjadi dua kelompok, yaitu HMI Dipo (yang diakui pemerintah Orde Baru) yang menerima asas tunggal Pancasila dan HMI MPO yang menolak asas tunggal Pancasila. Penyebutan HMI Dipo karena kelompok HMI ini bermarkas di jalan Diponegoro, sedangkan HMI MPO berkenginan menyelamatkan organisasi dari campur tangan kekuasaan.

GERAKAN MAHASISWA INTRA KAMPUS

Dewan Mahasiswa dan Majelis Mahasiswa adalah Lembaga intra Kemahasiswaan tingkat Universitas. Dewan Mahasiswa ini sangat independen, dan merupakan kekuatan yang cukup diperhitungkan sejak Indonesia Merdeka hingga masa Orde Baru berkuasa. Ketua Dewan Mahasiswa selalu menjadi kader pemimpin nasional yang diperhitungkan pada jamannya. Dewan Mahasiswa berfungsi sebagai lembaga eksekutif sedangkan yang menjalankan fungsi legislatifnya adalah Majelis Mahasiswa. Di Fakultas-fakultas dibentuklah Komiseriat Dewan Mahasiswa (KODEMA), atau di beberapa perguruan tinggi disebut Senat Mahasiswa. Para Ketua Umum KODEMA atau Ketua Umum Senat Mahasiswa ini secara otomatis mewakili Fakultas dalam Majelis Mahasiswa. Keduanya dipilih secara langsung dalam Pemilu Badan Keluarga Mahasiswa untuk masa jabatan dua tahun. Sedangkan Ketua Umum Dewan Mahasiswa dipilih dalam sidang umum Majelis Mahasiswa. Masa Dewan Mahasiswa dan juga Majelis Mahasiswa di Indonesia berakhir pada tahun 1978-an ketika Pemerintah memberangus aksi kritis para mahasiswa dan Dewan Mahasiswa dibekukan. Kegiatan politik di dalam kampus juga secara resmi dilarang. Kebijakan itu dikenal dengan nama Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan pengganti lembaga tersebut adalah Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).

Senat Mahasiswa

Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intra universitas yang dibentuk pada saat pemberlakuan kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Sejak 1978-1989, Senat Mahasiswa hanya ada di tingkat fakultas, sedangkan di tingkat universitas ditiadakan. Di tingkat jurusan keilmuan dibentuk Keluarga Mahasiswa Jurusan atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang berkoordinasi dengan Senat Mahasiswa dalam melakukan kegiatan intern. Pada umumnya Senat Mahasiswa dimaksudkan sebagai Lembaga Eksekutif, sedangkan fungsi legislatifnya dijalankan organ lain bernama

Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).

Pada tahun 1990, pemerintah mengizinkan dibentuknya Senat Mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi namun model student government ala Dewan Mahasiswa tidak diperbolehkan. Senat Mahasiswa yang dimaksudkan adalah kumpulan para Ketua-Ketua Lembaga Kemahasiswaan yang ada: Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua Umum BPM dan Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa. Model seperti ini di beberapa perguruan tinggi kemudian ditolak, dan dipelopori oleh UGM, Senat Mahasiswa memakai model student government. Senat Mahasiswa menjelma menjadi Lembaga Legislatif, termasuk di tingkat Fakultas. Lembaga Eksekutifnya adalah Badan Pelaksana Senat Mahasiswa. Belakangan nama Badan Pelaksana diganti dengan istilah yang lebih praktis: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Awalnya BEM dipilih, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Sidang Umum Senat Mahasiswa namun sekarang pengurus kedua institusi sama-sama dipilih langsung dalam suatu Pemilihan Raya.

Unit Kegiatan Mahasiswa

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para aktivis yang ada di dalamnya. Unit Kegiatan Mahasiswa sebetulnya adalah bagian/organ/departemen dari Dewan Mahasiswa. Ketika dilakukan pembubaran Dewan Mahasiswa, departemen-departemen Dewan Mahasiswa ini kemudian berdiri sendiri-sendiri menjadi unit-unit otonom di Kampus.

Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari tiga kelompok minat : Unit-unit Kegiatan Olahraga, Unit-unit Kegiatan Kesenian dan Unit Khusus (Pramuka, Menwa, Pers Mahasiswa, Koperasi Mahasiswa, Unit Kerohanian dan sebagainya).

Badan Perwakilan Mahasiswa

Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah organisasi mahasiswa Intra Universitas di Indonesia yang dibentuk pada saat pemberlakuan kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Sejak 1978-1989, Badan Perwakilan Mahasiswa hanya ada di tingkat Fakultas bersama-sama dengan Senat Mahasiswa. Ada kerancuan istilah BPM dengan Senat Mahasiswa karena sama-sama berarti wakil.

Hanya saja menurut aturan main, BPM dianggap berfungsi sebagai badan legislatif sedangkan Senat Mahasiswa menjalankan fungsi eksekutif. Akhirnya, karena ketidakjelasan fungsi BPM itu ketika era Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi atau SMPT fungsi BPM digantikan Senat Mahasiswa.

BPM sendiri dihapuskan. Senat Mahasiswa yang tadinya badan eksekutif berubah menjadi badan legislatif. Sedangkan badan eksekutifnya dibentuk Badan Pelaksana Senat Mahasiswa, yang lantas diubah lagi menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Istilah ini bertahan hingga saat ini.

Badan Eksekutif Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ialah lembaga kemahasiswaan yang menjalankan organisasi serupa pemerintahan (lembaga eksekutif). Dipimpin oleh Ketua/Presiden BEM yang dipilih melalui pemilu mahasiswa setiap tahunnya. Di beberapa kampus seperti Universitas Indonesia, masih digunakan nama Senat Mahasiswa (SM).

Himpunan Mahasiswa Jurusan

Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi mahasiswa intra universitas di Indonesia yang terdapat pada jurusan keilmuan dalam lingkup fakultas tertentu. Umumnya bersifat otonom dalam kaitannya dengan organisasi mahasiswa di tingkat Fakultas seperti Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan umumnya dalam konteks keilmuan, penalaran dan pengembangan profesionalisme. Nama lain Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah Keluarga Mahasiswa Jurusan atau Korps Mahasiswa Jurusan.

Sebagai contoh : Himpunan Mahasiswa Budi Daya Pertanian (Fakultas Pertanian), Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil (Fakultas Teknik), Himpunan Mahasiswa Sejarah (Fakultas Ilmu Budaya), Korps Mahasiswa Komunikasi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Himpunan Mahasiswa Jurusan kelompok sejenis banyak yang membentuk jaringan dengan HMJ lainnya di lain Perguruan Tinggi sehingga seperti juga Senat Mahasiswa.

Maka ada Ikatan Himpunan Mahasiswa Jurusan sejenis skala nasional. Sebut saja nama Ikatan Mahasiswa Komunikasi Indonesia yang menghimpun HMJ Komunikasi Fisip, beberapa diantaranya berstatus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Atau Ikatan Mahasiswa Administrasi Indonesia. Juga ada Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia atau IMAHAGI.

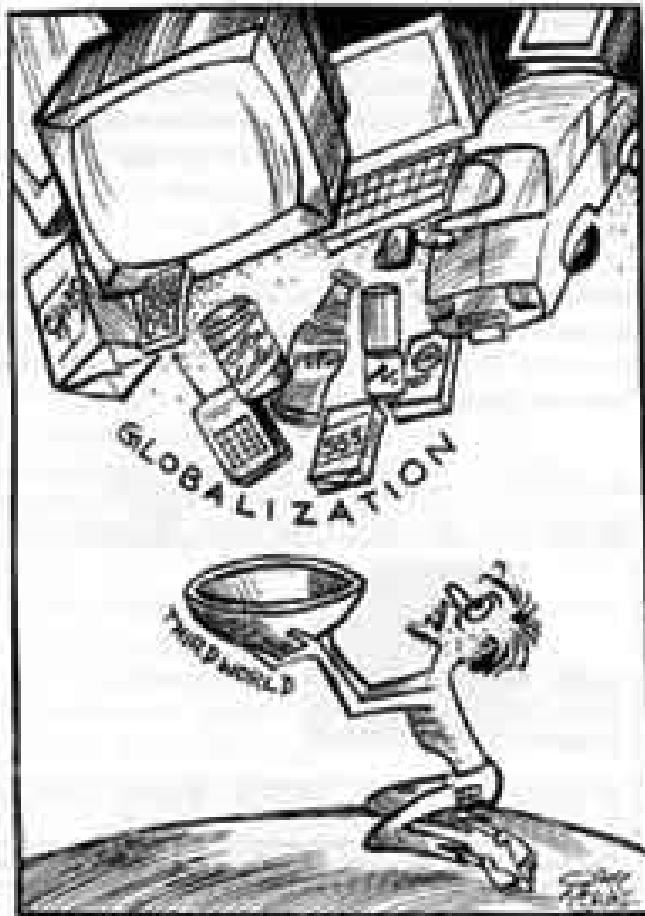
Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus

Organisasi kemahasiswaan yang bersifat ekstra kampus pada umumnya terkait dengan aliran politik atau ideologi tertentu seperti: FMN, GMNI, HMI, PMII, GMKI, PMKRI, Mapancas dan sebagainya. Ada pula organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang didasarkan pada ikatan asal daerah, misalnya Himpunan Mahasiswa Jawa Timur (HIMAJATI), atau Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT). Untuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat kedaerahan umumnya sekretariatnya sekaligus merupakan Asrama Mahasiswa asal daerah yang bersangkutan. Meskipun tidak semua mahasiswa asal daerah tersebut merupakan anggota organisasi atau tinggal di Asrama Mahasiswa daerah yang bersangkutan.

ORGAN GERAKAN MAHASISWA 1998

Daftar Organ gerakan mahasiswa yang berperan dalam gelombang aksi reformasi pada 1998 dan setelahnya. **Aceh:** SMUR - Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat. **Medan:** DEMUD, Agresu - Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera Utara. **Bandung:** FKMB - Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung, FIM B - Front Indonesia Muda Bandung, FAMU - Front Aksi Mahasiswa Unisba, GMIP - Gerakan Mahasiswa Indonesia Untuk Perubahan, KPMB - Komite Pergerakan Mahasiswa Bandung, FAF - Front Anti Fasis, KM ITB - Keluarga Mahasiswa ITB, KM Unpar - Komite Mahasiswa Unpar. **Jakarta:** LMND - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, FKSMJ - Forum Komunikasi Senat

Mahasiswa se-Jakarta, Forkot/Forum Kota-Forum Komunitas Mahasiswa se-Jabotabek, Famred - Front Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi, Front Nasional, Front Jakarta, KamTri - Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti, KAMMI - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, HMI MPO - Himpunan Mahasiswa Islam -Majelis Penyelamat Organisasi, KB UI - Keluarga Besar Mahasiswa UI, FAM UI - Front Aksi Mahasiswa UI, Komrad - Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi, Gempur - Gerakan Mahasiswa untuk Perubahan, Forum Bersama / Forbes, Jaringan Kota / Jarkot, LS-ADI Jakarta - Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia, HMR - Himpunan Mahasiswa Revolusioner. **Bogor:** KBM-IPB - Keluarga Besar Mahasiswa - Institut Pertanian Bogor. **Yogyakarta:** SMKR - Solidaritas Mahasiswa Untuk Kedaulatan Rakyat, KPRP - Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan, FKMY - Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta, PPPY - Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta, FAMPERA - Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat, LMMY - Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta. **Solo:** SMPR - Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat. **Bali:** Posperra - Posko Perjuangan Rakyat, Frontier - Front Demokrasi Perjuangan Rakyat. **Surabaya:** Abri - Aksi bersama rakyat Indonesia, APR - Arek Pro Reformasi, ASPR - Arek Surabaya Pro Reformasi, FORMAD - Forum Madani FPM - Front Perjuangan Mahasiswa, KAMI - Kesatuan Aksi Mahasiswa ITS. **Malang:** FKMM - Forum Komunikasi Mahasiswa Malang. **Makassar:** KONTRA-Komunitas Pelataran Kerakyatan Unhas.[]



**Gerakan mahasiswa pada konteks sekarang dihadapkan pada arus perubahan zaman!
Musuh mahasiswa adalah Imperealisme gaya baru berwajah globalisasi dan ne-Liberalisme!
Masyarakat dunia ketiga telah dihisap, baik kekuatan ekonomi-politik
maupun mentalitas untuk berjuang mengisi kemerdekaan!
Indonesia telah berubah menjadi bangsa pengemis!**

Hand-Out 11

REKAM JEJAK GERAKAN MAHASISWA ISLAM PASCA REFORMASI

Napak Tilas

Indonesia beberapa dekade dikenal sebagai negeri insulindea (kepulauan), dalam bukunya Multatuli menyebut Indonesia sebagai Insulindo yang dimaknai sebagai negeri kepulauan Indonesia. Sebagaimana arti harfiahnya, negara kepulauan secara geografis terdiri atas beberapa pulau, khusus untuk Indonesia memiliki lima pulau besar yang dalam kajian pergerakan bangsa membawa warna pergerakan tersendiri. Kondisi kepulauan ini, memberi efek kepada sifat pergerakan dan metoda pergerakan perjuangan bangsa. Semangat altruisme dan pola perjuangan yang mengandalkan responsifitas lokal membuat perjalanan pergerakan mudah terbaca dan sangat cepat dipadamkan oleh penjajah. Awal abad XX dengan mulai munculnya golongan pelajar, kesadaran pembaharuan pergerakan mulai timbul, maka dimulailah fase perubahan pergerakan. Yakni pergerakan Intelektual yang dimotori oleh para pemuda.

Ketika mengungkap pergerakan mahasiswa Islam ada ushul yang tidak dapat dilepaskan yakni risalah yang dibawa. Dalam menyampaikan risalah berbagai lika-liku perjalanan mesti ditempuh yang bersentuhan dengan sisi geografis, demografi, socio cultural, self capacity dll sehingga semua hal tersebut termaktub sebagai risalah perjuangan. Pemuda (mahasiswa) Islam merupakan actor dalam membawa risalah. Berbagai gebrakan kaum muda Islam telah direkam oleh sejarah baru pasca reformasi, seperti hal berikut :

Pergerakan Perlawanan Kaum Santri Terhadap Imperialisme dan kolonialisme (Abad ke 19)

Pergerakan ini ditandai oleh gerakan massif oleh kaum santri di beberapa daerah terhadap Belanda.

1. Pergerakan Kaum Paderi di Sumatera Barat (1821 – 1825)
2. Pergerakan Santri di Jawa Tengah (Dipenogoro) (1826-1830)
3. Pergerakan di barat Laut P. Jawa (1840-1880) pergerakan ini muncul sebagai respon atas tanam paksa di Banten.
4. Pergerakan Santri Aceh (1873-1903)⁹

Pergerakan Sosial, Dakwah dan Pendidikan

Dalam berbagai referensi Sejarah (Pra-Reformasi) peran-peran keintelektualan Islam di Indonesia sejak awal terpinggirkan (distorsi) sehingga pergerakan konvensional lebih ditonjolkan. Salah satu referensi yang dipakai sejarawan Indonesia dalam kurikulum pendidikan sejarah bangsa Indonesia yaitu buku yang ditulis oleh Dr. Soetomo "Kenang-kenangan", Februari 1934. berikut kutipannya :

Pada penghabisan tahun 1907 datanglah Dr. Wahidin Soedirohoesodo di Jakarta, untuk meneruskan misi perjalanannya dalam mendirikan studiefonds agar anak-anak Indonesia dapat meneruskan pelajarannya. Beliau mengarahkan pemikiran mahasiswa STOVIA bahwasanya dibutuhkan perhimpunan yang memikirkan keselamatan dan kemajuan tanah Jawa dan Madura dengan penduduknya. Beliau seolah-olah membangunkan Boemipoetera dari tidur nyenyak beratus-ratus tahun.

Pada tanggal 20 Mei 1908 maka berdirilah sebuah vereniging yang dinamakan "BOEDI OETOMO". Basis pergerakan intelektual dan penekanan terhadap perbaikan pendidikan menjadi trendsetter Boedi Oetomo. Berdirinya Boedi Oetomo menjadi momentum tumbuhnya organisasi pergerakan mahasiswa baik yang bersifat eksternal maupun internal, karena tiada lama berselang perhimpunan lainnya mulai berdiri dengan nama Ambtenaren di Magelang, Kweekschool voor Inl. Onderwijzers di Jogjakarta dan Burgelijke Avondschool di Surabaya. Pada saat itu Boedi Oetomo belum mengarah pada pergerakan politik karena pada saat itu Undang-Undang Pemerintahan Kolonial melarang keras Boemipoetera melaksanakan aktifitas politik. Sebagaimana diatur dalam pasal III Peraturan Pemerintah yang berbunyi :

⁹ Clifford Gertz, "Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia".

Segala perserikatan dan perkumpulan yang mengandung politik, atau yang mermbahayakan ketertiban umum terlarang didalam di Hindia Belanda. Pelanggaran atas larangan ini dicegah dengan upaya-upaya yang perlu dalam tiap-tiap hal itu.

Sebenarnya jauh sebelum Budi Utomo lahir, pemuda Islam telah memulai gerakan intelektual yang tidak berafiliasi pada politik, dengan data berikut :

TAHUN	GERAKAN (Organisasi Gerakan)	TOKOH
1900	Surau Jembatan Besi Padang Panjang	Syeikh Abdullah
1900	Sumatera Thawalib	Dr. Abdul Malik Karim Amrullah. Syeikh Daud Rasyidi. Laby el Junusi. Syeikh Ibrahim Musa Parabek.
1905	Sarekat Dagang Islam	Samanhudi
1905	Al Jamiatul Khoiriyah	
1912	Muhammadiyah	K.H. Ahmad Dahlan
1916	Al-Irsyad	Ahmad Sukarti al Anshori
1916	Matlaul Anwar	
1923	Persatuan Islam (Persis)	K. H Zamzam
1926	Nahdlatul Ulama	Syeikh Hasyim Asya'ri
1930	Al Jamiatul Washliyah	Abdurrahman Sjihab, Arsjad Thalib Lubis, Udin Sjamsuddin, Adnan Lubis dan Bahrum Djamil.

Gerakan Politik¹⁰

TAHUN	GERAKAN (Organisasi Gerakan)	FOCUS TARGETTING
1923	Partai Syarikat Islam (PSI)	Transformasi dari Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam.
1932	Persatuan Muslimin Indonesia	Bersifat non-cooperatif, dan anti terhadap adat istiadat minangkabau. Dibubarkan pada tahun 1934.
1934	Partai Arab Indonesia	Wadah bagi turunan Indonesia-Arab untuk berjuang bagi tanah air. Pimpinan A.R. Baswedan
1937	Majelis Islam A'la Indonesia	Wadah federasi Kumpulan Islam yang diprakarsai oleh K.H. Dahlan dan K.H. Mas Mansur
1938	Partai Islam Indonesia	
1943/ 1944	Madjlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)	Pengganti M.I.A.I di zaman penjajahan Jepang sebagai gerakan non politik
1952	Partai Politik Islam	Berasal dari NU dengan pimpinan Wahab Chasbullah dan Wahid Hasyim dll.
1968	Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)	Menampung aspirasi bagi umat Islam yang belum berpartai.

Pergerakan Pelajar

Pelajar Islam indonesia (P.I.I independen): Ikatan Pelajar Nahdtul Ulama (IPNU, bawahan NU) Sarikat pelajar Muslimi Indonesia (Sepmi, Bawahan P.S.I.I) Ikatan Pelajar Muhamdiyah (IPM. Bawahan Muhamadiyah)

¹⁰ MR. Kurnia, dkk., *Meretas Jalan Menjadi Politisi Transformatif*, Penerbit Pustaka Al-Azhar, 2005.

Pergerakan Mahasiswa

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia P.M.I.I. (underbow N.U); Sarikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Germahii) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gema Pembebasan dan lain sebagainya.

Sekilas Gerakan 1998

Di akhir tahun 1997 Indonesia mengalami resesi ekonomi sebagai akibat dari kewajiban untuk membayar hutang luar negeri yang sudah mengalami jatuh tempo. Dampak dari krisis ekonomi di Indonesia yang berkepanjangan ini adalah naiknya harga-harga sembako. Bulan-bulan berikutnya ditahun 1998 adalah malapetaka bagi rejim Orba. Tidak seperti yang banyak dibayangkan oleh pakar-pakar politik, perlawanan massa berkembang sedemikian cepat dan masif di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Posko-posko perlawanan sebagai simbol perlawanan terhadap rejim muncul diberbagai kampus dan dalam kesehariannya posko ini sangat disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang politis sifatnya seperti rapat-rapat koordinasi, pemutaran film-filim politik, dll. Tak nampak lagi kultur mahasiswa yang sebelumnya apatis, hedon, cuek, dll (penelitian 1978 oleh Sarlito mahasiswa yang tergolong aktivis 7,2 %, sedangkan 91,8 % non-aktivis) . Hampir di setiap sudut kita dapat menemukan mahasiswa yang berbicara tentang politik, benar-benar sesuatu yang baru!

Puncak dari tindakan represi ini adalah dengan ditembaknya 4 mahasiswa Univ. Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan ini memicu kemarahan massa rakyat, yang representasinya dilakukan dalam bentuk pengrusakan, penjarahan di beberapa tempat di Indonesia. Praktis dalam 2 hari pasca penembakan, Jakarta berada dalam kondisi yang tidak terkontrol. Mahasiswa kemudian secara serempak menduduki simbol-simbol pemerintahan lembaga legislatif beberapa hari kemudian (18 Mei), yang dilakukan hingga Soeharto mundur.

Bentuk-bentuk perlawanan Organisasi mahasiswa pada saat itu adalah membentuk komite-komite aksi ditingkatan kampus yang bergerak bersama elemen eksternal serta massa rakyat untuk menuntaskan Rejim Orba. Tanggal 21 Mei 1998 Gerakan Mahasiswa yang di dukung oleh rakyat mampu melengserkan Soeharto dan menghasilkan amanat reformasi. Amanat Reformasi 1998 :

1. Amandemen UUD 1945
2. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
3. Pemberantasan KKN dan adili antek-antek orde baru
4. Pembudayaan Demokrasi
5. Penegakan Hukum dan Supremasi Hukum
6. Otonomi Daerah

Gerakan Mahasiswa Islam Pasca Reformasi

Berada dalam posisi pasca reform didahului proses pengisian masa peralihan dari Pra-reform. Gerakan Pra-Reform lebih bersifat penentangan terhadap pengkebirian hak-hak umat Islam dalam memenuhi kebutuhan beribadah dan sekaligus penentangan terhadap kebijakan pemerintah yang inkonstitusional, beberapa gerakan yang muncul seperti: Gerakan anti asas Tunggal oleh aktivis Muslim: Tj Priok, Lampung, dll Oposisi umat Islam terhadap Orde Baru. (penangkapan aktivis-aktivis Muslim: Abdul Qodir Jaelani, AM. Fatwa, Tony Ardi dll), Penolakan pemerintah terhadap jilbab Timbulnya idiom SARA

Terlaksananya reformasi maka penyampaian risalah (ideology) mulai dapat dilaksanakan sebab dari sisi policy pemerintah telah memperoleh *pressure effect* , namun proses peralihan ini mengalami perlambatan, terkait instabilitas object (pemerintah) maupun instabilitas subject (pelaku pergerakan). Bahkan perjalanan reformasi mendekati jalan ditempat.

Mekanisme transisi politik dari pemerintahan otoriter ke demokratis ada empat model yang berkembang (Huntington, 1991) :

1. *Model transformasi (transformation)*. Dalam hal ini, inisiatif demokratisasi berasal dari pemerintah. Pemerintahlah yang melakukan liberalisasi sistem politik.
2. *Model replasi (replacement)*. Model ini terjadi ketika pemerintah yang berkuasa dipaksa untuk meletakkan kekuasaannya dan kemudian digantikan oleh kekuatan oposisi (sipili).

3. *Model transplasi (transplacement)*. Model ini merupakan gabungan dari dua model yang sudah disebutkan di atas. Model ini terjadi karena pemerintah yang berkuasa masih kuat, sementara pihak oposisi belum terlalu solid untuk menjatuhkannya. Maka diupayakanlah berbagai proses negosiasi antara pihak pemerintah dan pihak oposisi tentang bagaimana langkah-langkah yang harus diambil bersama untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis secara gradual.
4. *Model intervensi (intervention)*. Model ini terjadi disebabkan oleh keterlibatan pihak eksternal yang turut campur. Contoh kasus yang paling tepat barangkali adalah intervensi angkatan perang AS terhadap pemerintahan Panama dengan tuduhan keterlibatan jaringan perdagangan obat bius. Intervensi akhirnya mendorong dilaksanakan pemilu yang demokratis.

Reformasi Indonesia tidak mewakili secara tepat pola-pola diatas, gerakan 98 menyerupai model replasi sedangkan transisi pasca 98 berjalan menyerupai model transplasi. Sedangkan fenomena gerakan mahasiswa Islam secara general belum menunjukkan arah yang mencerahkan. Beberapa kondisi yang dialami pergerakan mahasiswa Islam :

1. *Euphoria Reformasi*. Reformasi telah merubah segalanya ! merupakan paradigma yang terbentuk dalam diri aktivis muslim, sedangkan mandat reformasi "dititipkan" pada pihak-pihak yang terindikasi pada neo-orba. Sehingga bergelimpanganlah *idle potention* yang menjadi kuburan pergerakan mahasiswa muslim.
2. *Benturan Horizontal*. Munculnya *haroqah* Islam satu sisi memperlihatkan dinamika apik yang berkembang dalam ranah pergerakan, namun sangat disayangkan *haroqah islamiyah* yang muncul di Indonesia menjadi *counter block* antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang kita khawatirkan, tumbuhnya haroqah Islamiyah memunculkan potensi konflik antara satu dengan yang lainnya.
3. *Eksklusivisme*. Jargon mahasiswa untuk rakyat menjadi hampa, dan amanah mahasiswa Islam menjadikan islam sebagai rahmatan lil'alamin. Delapan puluh tujuh tahun yang lalu hal ini telah dikhawatirkan oleh guru bangsa Indonesia yakni H. Agusssalim, ketika organisasi pergerakan telah berjamuran tumbuh dan membawa karakter-karakter tersendiri, secara riil belum berpengaruh besar terhadap rakyat bahkan semakin menjauh dari rakyat. Sebagaimana kutipan pidato beliau yang disampaikan di waltevreden, oktober 1919: "*Hendaklah anak-anak bangsa yang berpendidikan mendekati dan memasuki perserikatan-perserikatan rakyat, untuk membagikan sedikit ilmunya kepada khalayak ramai. Jika hal itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh akan bertambah masalah pergerakan rakyat dan semakin berarti perkumpulan-perkumpulan yang dibuat dalam masyarakat.*"
4. *Soulines of movement* (Pergerakan tanpa ruh). Pergerakan mahasiswa Islam terancam kebekuan ketika risalah yang dibawa tidak melekat dan tidak tercermin dari kepribadian, Islam hanya topeng bagaikan pemanis buatan untuk melengkapi orasi kosong, maka lambat laun pilar peradaban akan roboh dengan sendirinya (Fathi Yakan).
5. *Dis-Orientasi Gerakan*. Munculnya ketidakpercayaan diri dari Gerakan Mahasiswa Islam dalam mengangkat isu-isu ke-Islaman baik bersifat local ataupun dalam skala yang lebih luas (regional-global). Hal ini menjadi jebakan bagi aktivis muslim yang memudahkan identitas hakiki yang mesti mendominasi pergerakan.
6. *Gerakan Reaksioner*. Gebrakan yang dilakukan mahasiswa muslim cenderung tiba-tiba dan sesaat, sehingga tahapan-tahapan yang terkait dengan misi pendukung tidak terlihat jelas. Muncul sebentar kemudian lenyap.

Harapan ke Depan

Kondisi stagnan yang dialami oleh gerakan mahasiswa Islam sangat mengkhawatirkan umat, sebab kebangkitan Islam juga diamanahkan kepada mahasiswa Islam. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mulai memperbaiki kondisi ini :

1. Perubahan baru dengan kepemimpinan baru (*New Reform and New Leader*). Transisi replasi dan transplasi yang dialami oleh Indonesia dari tahun 1998 tetap memberi celah bagi antek-

- antek neo-orba untuk berkembang, bahkan ironisnya disodorkan untuk menjalankan mandate reformasi. Indikator terbesar yang mengakibatkan reformasi jalan ditempat yakni reformasi dijalankan oleh warisan penguasa lama.
2. *Dialog Bilateral dan dialog antar generasi.* Keragaman merupakan realitas sejarah sehingga bukanlah solusi dengan menghapusnya, tetapi yang lebih baik untuk dilakukan dengan mengurangi ekses negative yang ditimbulkan. Walaupun nantinya dalam dialog tidak menemukan kesepakatan bersama, setidaknya hal tersebut menjadi langkah yang memudahkan untuk berbagi dan saling memahami. Pentingnya dialog antar generasi menyimak sering putusnya transfer informasi, sehingga perombakan dan bongkar pasang metode sering terjadi, secara sistematis memperlambat pencapaian akhir.
 3. *Egalitas Gerakan (Membumikan Gerakan).* Merubah paradigma gerakan mahasiswa tertutup dalam kelompok yang terbatas, fungsi mengayomi dan ketawadhu'an menjadi kunci dalam mengurangi gap yang muncul antara gerakan mahasiswa dengan social masyarakat.
 4. *Gradualisme.* Strategi gerakan yang umum digunakan oleh umat Islam ada tiga yakni : structural strategic, cultural strategic, social reform strategic. Semua strategi tersebut mesti dilakukan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan konkrit.
 5. *Perbaikan niat yang tegus untuk berjuang sebagai ibadah.* Semua aktivis muslim melakukan pergerakan sebagai bagian ibadah kepada Allah, dan dalam memegang risalah ini tidak cukup dengan kematangan intelligence saja tetapi perlu pengisian spiritual yang terus menerus.[]



**BERSATU DALAM MASSA AKSI!
Mendidik penguasa dengan perlawanan!
Mendidik rakyat dengan organisasi!
(Tan Malaka)**

Hand-Out 12 NILAI DASAR PERGERAKAN PMII

Terminologi NDP

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) adalah nilai-nilai yang secara mendasar merupakan sublimasi nilai-nilai ke-Islaman, seperti kemerdekaan (*al-hurriyyah*), persamaan (*al-musawa*), keadilan (*'adalah*), toleran (*tasamuh*), damai (*al-shuth*), dan ke Indonesiaan (pluralisme suku, agama, ras, pulau, persilangan budaya) dengan kerangka paham ahlussunah wal jama' ah yang menjadi acuan dasar pembuatan aturan dan kerangka pergerakan organisasi. NDP merupakan pemberi keyakinan dan pembenar mutlak, Islam mendasari dan memberi spirit serta elan vital pergerakan yang meliputi iman (aspek aqidah), Islam (aspek syariah), ihsan (aspek etika, akhlaq dan tasawuf) dalam rangka memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Dalam upaya memahami, menghayati dan mengamalkan Islam tersebut, PMII menjadikan ahlussunah wal jama'ah sebagai *manhaj al-fikr* sekaligus *manhaj al-taghayyur al-ijtima'i* (perubahan sosial) untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi bentuk-bentuk pemahaman dan aktualisasi ajaran-ajaran agama yang toleran, humanis, anti-kekerasan, dan kritis transformatif.

Fungsi NDP

Pertama, Kerangka Refleksi. Sebagai kerangka refleksi NDP bergerak dalam pertarungan ide-ide, paradigma, nilai-nilai yang akan memperkuat level kebenaran-kebenaran ideal. Subtansi ideal tersebut menjadi suatu yang mengikat, absolut, total, universal berlaku menembus ruang dan waktu (*muhlamul qat'i*) kerangka refleksi ini menjadi moralitas gerakan sekaligus sebagai tujuan absolut dalam mencapai nilai-nilai kebenaran, kemerdekaan, kemanusiaan.

Kedua, Kerangka Aksi. Sebagai kerangka aksi NDP bergerak dalam pertarungan aksi, kerja-kerja nyata, aktualisasi diri, analisis sosial untuk mencapai kebenaran faktual. Kebenaran sosial ini senantiasa bersentuhan dengan pengalaman historis, ruang dan waktu yang berbeda dan berubah. Kerangka aksi ini memungkinkan warga pergerakan menguji, memperkuat dan bahkan memperbaharui rumusan kebenaran historisitas atau dinamika sosial yang senantiasa berubah.

Ketiga, Kerangka Ideologis. Kerangka ideologis menjadi rumusan yang mampu memberikan proses ideologisasi disetiap kader, sekaligus memberikan dialektika antara konsep dan realita yang mendorong proses progressif dalam perubahan sosial. Kerangka ideologis juga menjadi landasan pola pikir dan tindakan dalam mengawal perubahan sosial yang memberikan tempat pada demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedudukan NDP

Pertama, NDP menjadi sumber kekuatan ideal-moral dari aktivitas pergerakan. Kedua, NDP menjadi pusat argumentasi dan pengikat kebenaran dari kebebasan berfikir, berucap, bertindak dalam aktivitas pergerakan.

Rumusan NDP

Tauhid

Mengesakan Allah SWT merupakan nilai paling asasi dalam sejarah agama samawi. Didalamnya terkandung hakikat kebenaran manusia. (Al-Ikhlas, Al-Mukmin: 25, Al-Baqarah: 130-131). Subtansi tauhid;

- (1) Allah adalah Esa dalam Dzāt, sifat dan perbuatan-Nya,
- (2) Tauhid merupakan keyakinan atas sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta, serta merupakan manifestasi dari kesadaran dan keyakinan kepada hal yang ghaib (Al-Baqarah:3, Muhammad:14-15, Al-Alaq: 4, Al-Isra: 7),
- (3) Tauhid merupakan titik puncak keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan dan perwujudan nyata lewat tindakan,
- (4) Dalam memahaminya dan mewujudkannya pergerakan telah memilih *ahlussunah wal jama' ah* sebagai metode pemahaman dan keyakinan itu.

Hubungan Manusia dengan Allah.

Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu. Dia mencipta manusia sebaik-baik kejadian dan menempatkan pada kedudukan yang mulia. Kemuliaan manusia antara lain terletak pada kemampuan berkreasi, berfikir dan memiliki kesadaran moral. Potensi itulah yang menempatkan posisi manusia sebagai khalifah & hamba Allah (Al-Anam:165, Yunus: 14.)

Hubungan Manusia dengan Manusia.

Allah meniupkan ruh dasar pada materi manusia. Tidak ada yang lebih utama antara yang satu dengan yang lainnya kecuali ketaqwaannya (Al-Hujurat:13). Pengembangan berbagai aspek budaya dan tradisi dalam kehidupan manusia dilaksanakan sesuai dengan nilai dari semangat yang dijiwai oleh sikap kritis dalam kerangka religiusitas. Hubungan antara muslim dan non-muslim dilakukan guna membina kehidupan manusia tanpa mengorbankan keyakinan terhadap kebenaran universalitas Islam.

Hubungan Manusia dengan Alam.

Alam semesta adalah ciptaan Allah. Allah menunjukkan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah. Berarti juga tauhid meliputi hubungan manusia dengan alam (As-Syura: 20). Perlakuan manusia dengan alam dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi manusia harus mentransendentalisasikan segala aspek kehidupan manusia.

NDP yang digunakan PMII dipergunakan sebagai landasan teologis, normatif dan etis dalam pola pikir dan perilaku. Dari dasar-dasar pergerakan tersebut muaranya adalah untuk mewujudkan pribadi muslim yang berakhlak dan berbudi luhur, dan memiliki konstruksi berfikir kritis dan progressif.

NDP: Landasan Gerak Berbasis Teologis

NDP adalah sebuah kerangka gerak, ikatan nilai atau landasan pijak. Didalam PMII maka kita akan kenal dengan istilah NDP (Nilai Dasar Pergerakan). NDP adalah sebuah landasan fundamental bagi kader PMII dalam segala aktivitas baik-vertical maupun horizontal. NDP sesungguhnya kita atau PMII akan mencoba berbicara tentang posisi dan relasi yang terkait dengan apa yang akan kita gerakkan. PMII berusaha menggali sumber nilai dan potensi insan warga pergerakan untuk kemudian dimodifikasi didalam tatanan nilai baku yang kemudian menjadi citra diri yang diberi nama Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII. Hal ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti motifasi, wawasan pergerakan dan sekaligus memberikan dasar pembenar terhadap apa saja yang akan mesti dilakukan untuk mencapai cita-cita perjuangan.

Insaf dan sadar bahwa semua ini adalah keharusan bagi setiap kader PMII untuk memahami dan menginternalisasikan nilai dasar PMII tersebut, baik secara personal maupun secara bersama-sama, sehingga kader PMII diharapkan akan paham betul tentang posisi dan relasi tersebut. Posisi dalam artian, di diri kita sebagai manusia ada peran yang harus kita lakukan dalam satu waktu sebagai sebuah konsekuensi logis akan adanya kita. Peran yang dimaksud adalah diri kita sebagai hamba, diri kita sebagai makhluk, dan diri kita sebagai manusia.

Ketiga posisi di atas merupakan sebuah kesatuan yang koheren dan saling menyatu. Sehingga Relasi yang terbentuk adalah relasi yang saling topang dan saling menyempurnakan. Akibat dari posisi tersebut maka akan muncul relasi yang sering diistilahkan sebagai *hablun mina Allah, hablun mina an-naas dan mu'amalah*.

Dalam ihtiar untuk mewujudkan perintah Tuhan Yang Maha Kuasa maka ketiga relasi di atas harus selaiu dan selalu berangkat dari sebuah keyakinan IMAN, prinsip ISLAM, dan menuju IHSAN. Inilah yang nantinya akan menjadi acuan dasar bagi setiap warga pergerakan dalam melakukan segala ihtiar dalam segala posisi.

Pemaknaan dan Arti NDP

Secara esensial NDP PMII adalah suatu sublimasi nilai ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an dengan kerangka pemahaman Ahfussunnah waf Jama'ah yang terjiwai oleh berbagai aturan, memberi arah, mendorong serta menggerakkan apa yang dilakoni PMII sebagai sumber keyakinan dan pembenar mutlak. Islam mendasari dan menginspirasi NDP yang meliputi cakupan Aqidah,

Syari'ah dan Akhlaq dalam upaya memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Dalam kerangka inilah PMII menjadikan *Ahussunah wal Jama'ah* sebagai *Manhaj af-fikr* (methodologi mencari) untuk mendekonstruksi bentuk-bentuk pemahaman keagamaan yang benar.

Fungsi, Peran dan Kedudukan NDP

Secara garis besarnya Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII akan berfungsi dan berperan sebagai :

Landasan Pijak PMII

Landasan pijak dalam artian bahwa NDP diperankan sebagai landasan pijak bagi setiap gerak dan langkah serta kebijakan yang dilakukan oleh PMII.

Landasan Berfikir PMII

Bahwa NDP menjadi landasan pendapat yang dikemukakan terhadap persoalan-persoalan yang akan dan sedang dihadapi oleh PMII.

Sumber Motivasi PMII

NDP juga seyogyanya harus menjadi pendorong bagi anggota PMII untuk berbuat dan bergerak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dan terkandung didalamnya.

Sedangkan kedudukan NDP dalam PMII bisa kita letakkan pada, *Pertama*; NDP haruslah menjadi rumusan nilai-nilai yang dimuat dan menjadi aspek ideal dalam berbagai aturan dan kegiatan PMII. *Kedua*; NDP harus menjadi pemicu dan pegangan bagi dasar pembenar dalam berfikir, bersikap dan berperilaku.

Rumusan dan Isi NDP

Selain itu kita juga harus paham betul tentang isi ataupun rumusan atas Nilai Dasar Pergerakan kita yang dapat kita gambarkan seperti berikut :

I. Ketuhanan atau Tauhid.

Pengertian ketuhanan adalah bagaimana kita memaknai ketauhidan kita alas Tuhan. Men-Esa-kan Allah SWT, merupakan nilai paling asasi dalam sejarah agama samawi. Hal ini sesungguhnya mengandung makna, *Pertama*; Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya. Allah SWT adalah dzat, yang fungsional, dalam artian menciptakan, memberi petunjuk, memerintah dan memelihara alam semesta. Allah SWT juga menanamkan pengetahuan, membimbing, menolong manusia. *Kedua*; pada saat keyakinan yang pertama kita wujudkan maka keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi seperti keyakinan terhadap alam semesta, serta kesadaran' keyakinan kepada yang ghaib merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan. *Ketiga*; dari kedua hal tersebut, maka tauhid merupakan titik puncak. Mendasari, memandu dan menjadi sasaran keimanan yang mencangkup keyakinan dalam hati nilai dari ketauhidan tersebut harus termanifestasikan dan tersosialisasikan ke sekelilingnya lewat pemahaman dan penginternalisasian ahlussunah wal jama'ah sebagai tahapan yang terakhir.

II. Hubungan Manusia dengan Tuhan-Nya (Allah SWT)

Pemaknaan hubungan manusia dengan Allah SWT haruslah dimaknai dengan kaffah dan konferehenshif, artinya bahwa Allah SWT adalah sang pencipta yang maha segalanya, termasuk telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya (*ahsanut taqwin*) dan telah menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia. Kedudukan tersebut ditandai dengan pemberian daya fikir, kemampuan berkreasi untuk dilakukan memfungsikan alam sebagai modal dasar sekaligus perangkat mewujudkan kemaslahatan. Kesemua aktifitas yang coba tidak pernah terlepas dari sebuah essensi melarutkan dan mengejawantahkan nilai-nilai ke-tauhid-an dengan berpijak wahyu dan seluruh ciptaan-Nya.

Teologi sebagai Dasar Filosofi Pergerakan

Internalisasi dari nilai-nilai teologis tersebut menumbuhkan filosofi gerak PMII yang disandarkan pada dua nilai yang sangaf fundamental yakni liberasi dan independensi. Liberasi merupakan kepercayaan dan komitmen kepada pentingnya (dengan epistemologi gerak-paradigma) untuk mencapai kebebasan tiap-tiap individu. Praktek dan pemikian liberasi mempunyai dua tema pokok. *Pertama*; tidak menyetujui adanya otoritas penuh yang melingkupi otoritas masyarakat. *Kedua*; menentang segala bentuk ekspansi dan hegemoni negara (kekuasaan) terhadap keinginan keinginan bebas individu dan masyarakat dalam berkreasi, berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan lain sebagainya.

Liberasi didasarkan oleh adanya kemampuan (*syakilah*) dan kekuatan (*wus'a*) yang ada dalam setiap individu. Dengan bahasa lain setiap individu mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengembangkan dirinya. tanpa harus terkungkung oleh pemikiran, kultur dan struktur yang ada disekitarnya, sehingga pada akhirnya akan melahirkan apa yang namanya keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al- musawah*), dan demokrasi (*as-syura*).

Kebebasan dalam arti yang umum mempuntai dua makna, yakni kebebasan dari (*freedom from*) dan kebebasan untuk (*freedom for*). Kebebasan dari merupakan kebebasan dari belenggu alam dan manusia. Sedangkan kebebasan untuk bermakna bebas untuk berbuat sesuatu yang pada dasarnya sebagai fungsi untuk mencapai tingkat kesejahteraan seluruh manusiadi muka bumi. Dalam kaitan ini makasesungguhnya capaian yang harus memuat pada *Usulul al-Khamsah* (lima prinsip dasar) yang meliputi; *Hifdz al-nasl wa al-irdh*, *hifdzul al-'aql*, *hifdzul ai-nasi*, dan *hifdz al-mal*.[]



Satukan tubuh dan jiwamu dengan ruh PMII!

Hand-Out 13 AHLUSSUNAH WAL JAMA'AH

Kontroversi Aswaja

Sejak akhir dasawarsa 1980-an dan awal 1990-an, wacana Aswaja suda ramai diperbincangkan kembali. Perbincangan ini mula-mula ada dikalangan komunitas muda NU, terutama yang tergabung di PMII. Pada mulanya perbincangan aswaja baru seputar pertanyaan mengapa Aswaja menghambat perkembangan intelektual mereka. Diskusi terhadap doktrin ini lalu sampai pada kesimpulan, bahwa kemandekan berfikir ini karena kita mengadopsi mentah-mentah paham Aswaja secara *qaulun* (kemasan praktis pemikiran Aswaja). Lalu dicoba membongkar sisi metodologi berfikirnya (*manhnj al-fikr*), seberapa jauh hal ini akan membuka kran wacana intelektual ditubuh NU? Yakni cara berfikir yang memegang prinsip *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan) dan *ta' addul* (keadilan). Setidaknya prinsip ini dapat mengantarkan pada sikap keberagamaan yang non-ekstrimitas (*tatharruf*) Kiri ataupun Kanan. Gugatan ini sebenarnya belum keluar dari *frame* Aswaja. Artinya, belum ada keberanian untuk mempertanyakan lebih jauh mengapa Aswaja yang taqlid kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi secara teologis, mengikuti madzhab empat secara fiqhiyyah, dan bertasawwuf dalam madzhab Imam Ghozali & Baihaqi, sebagai kebenaran yang masuk surga. Pergulatan intelektual muda NU tidak berhenti sampai disini, kemudian mereka berkenalan dengan pemikiran-pemikiran muslim progressif dan radikal seperti; Ali Syariati, Asghar Ali Engineer (Aliran Syiah), sampai pada tokoh "Kiri Islam" dasa warsa 1990-an yaitu Hassan Hanafi, teolog modern asal Mesir dari aliran Sunni. Kajian histories Said Aqiel Sirajd, dalam disertasi doktoralnya, mendapat reaksi keras dan dianggap sebagai syiah dan bahkan murtad. Karena kajian historis maka watak kajiannya profane, realis, objektif dan apa adanya. Objek kajiannya adalah sejarah pada sahabat Khulafaur Rasyidin sampai munculnya sekte-sekte madzhab pemikiran, termasuk aliran Asy' ariyah dan Maturidiah. Maka tidak heran para kiai yang kurang mengenal metode ilmiah menuduh Said sebagai tindakan yang melecehkan para sahabat. Keyakinan para kiai tersebut pada akhimya bahwa sahabat dan para ularna "tidak boleh salah", dan kalau salah maka ambruklah seluruh bangunan pemikiran Islam yang selama ini diajarkan kepada para santri-santri di pondok pesantren. Namun radikalitas pemikiran Said ini hanya berhenti pada reinterpretasi.

Ahlussunah Wal Jama'ah

Menurut Said Aqiel Siradj, selama ini aswaja sering dipahami sebagai suatu mazhab. Jika dipahami sebagai madzhab maka aswaja akan mengkristal menjadi institusi. Jelas pandangan ini paradoks dengan fakta sejarah kelahiran aswaja. Aswaja itu sebenarnya bukanlah madzhab melainkan hanyalah *manhaj al-fikr* atau paham yang didalamnya memuat banyak aliran dan mazhab. Ciri khas Aswaja yang paling menonjol adalah menempuh jalan tengah (*tawassuth*). Jalan tengah atau moderatisme Aswaja bukanlah harga mati, tetapi harus aspiratif terhadap perkembangan zaman. Sebagai metode berfikir, pemahaman Aswaja harus menjadi titik awal kerangka berfikir menggali hukum (syariat). Ini adalah pembaharuan pemikiran kritis dan progressif serta menjadi karakter NU. Pemikiran Tholchah Hasan memberikan penegasan pemikiran bahwa Aswaja tidak bisa semata-mata dipahami secara doktrinal, tetapi juga historis dan kultural. Aswaja juga mengandung "*aqwal*" (pemikiran-pemikiran yang mapan) sebagai hasil pemikiran dengan menggunakan *mahaj al-fikr*. Upaya pengembangan Aswaja perlu pengkajian dari berbagai sudut pandang ilmu terutama ilmu sosial, sehingga Aswaja bisa diinteroduskan secara rasional, sistematis, dan kontekstual sesuai dengan transformasi cultural yang sedang berjalan. Aswaja tidak hanya dipahami sebagai pemikiran yang berkaitan dengan akidah, fiqih, tasawuf, tetapi perlu dikembangkan secara universal dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dsb. Aswaja pada muaranya memberikan titik tekan pada pola pikir yang digunakan untuk menelaah realitas sosial. *Manhaj al-Fikr* yang dipakai oleh kaum nahdliyyin hams kontekstual sesuai dengan perkembangan khasanah pemikiran Islam dan perkembangan zaman.

Perebutan Atas Bendera Aswaja

Islam sebagai agama yang diyakini akan mampu menolong dan menyelamatkan umat-nya selalu tidak lepas dari *semacam klaim* untuk saling membenarkan. Dipandang dari paradigma tertentu saling mempertahankan atas eksistensi baik golongan, individu sampai pertentangan antar iman. Adanya bermacam aliran ini memang telah disenyalir oleh Rosululloh sendiri dengan statement beliau dalam hadist yang telah kontemporer dalam beberapa riwayat, diantaranya adalah hadist riwayat Abu Tirmidzi. Dalam hadist yang kontemporer tersebut telah jelas bahwa yang akan diakui oleh nabi sebagai satu golongan yang akan terselamatkan, yakni golongan Aswaja. Dalam prespektif pemikiran yang seperti ini, maka untuk menjawab setidaknya ada kajian dalam 4 dimensi: 1) Kajian secara Historis/ akar sejarah-nya, 2) Kajian atas Nubuawah/ Statemen-sinyalemen, 3) Kajian atas Fakta dan logika obyektif, 4) Kajian prespektif transformatif. Dalam kesempatan ini, sengaja kita tidak akan memperdebatkan lebih sampai perdebatan atas klaim ASWAJA, namun lebih pada pembacaan secara singkat atas beberapa perspektif, yakni: 1) Aspek Historisitas Aswaja, 2) Aspek Aswaja sebagai Manhaj al-fikr.

Aspek Historisitas

Pendapat bahwa Aswaja bukan sebagai doktrin merupakan pengingkaran terhadap kenyataan, karena pemahaman yang tersebar dalam berbagai bidang ilmu-ilmu ke-Islam-an, seperti Fiqih, Theologi dan Sufisme yang sekarang dianut oleh kebanyakan umat Islam merupakan doktrin atas Aswaja itu sendiri, kajian atas tradisi pemikiran Islam yang ada sekarang (Fiqih, Theologi, Sufisme dan yang lainnya) tidak lahir dari ruang yang hampa. Ia lahir dari suatu proses pengumpulan yang panjang, dengan aspek-aspek sosio-kultural serta sosio-politik yang melingkupinya. Ada beberapa alasan yang menganggap kajian kesejarahan ini sangat penting yakni; *Pertama*; banyak umat Islam yang mempersepsikan aswaja dengan berbagai variannya hanya sebagai ideologi yang baku, seolah *infallible* dan *immune* terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini Aswaja sering dipahami secara sederhana hanya sebatas antitesis dari faham Syi'ah, Ortodoksi dari heterodoksi atau sunnahdari bid'ah. *Kedua*; aswaja seharusnya tidak hanya dipahami dari sisi doktrinal, tetapi lebih didasarkan atas suatu kenyataan bahwa banyak pendapat para imam yang kita anggap sebagai rujukan namun diantara mereka saling berbeda tajam antara satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya Imam Al-Junaidi yang meniadakan sifat-sifat Allah SWT dan ditentang oleh faham Imam al-Asy'ari yang menyatakan bahwa Allah SWT tetap memiliki sifat, dan lain sebagainya. *Ketiga*; Pemahaman Aswaja seharusnya juga tidak dipahami dalam satu perspektif teologis normatif saja, namun juga harus dipahami dalam sekian kacamata baik Historis, Normatif, maupun kajian secara transformatif.

Aspek Aswaja sebagai Manhaj al-Fikr .

Dalam tradisi yang dikembangkan NU, penganut Aswaja didefinisikan sebagai orang yang mengikuti salah satu madzab empat (Hanafi, maliki, Syafi'i dan Hambali) dalam bidang Fiqih, mengikuti Imam al-Asy'ari dan Maturidi dalam bidang Aqidah dan mengikuti al-Junaidi dan al-Ghozali dalam bidang tasawuf, dalam sejarahnya definisi semacam ini dirumuskan oleh Hadratus Syaikh Kiai Hasyim Asy'ari sebagaimana tertuang dalam *Qonun Asasi Nahdlatul Ulama*. Dalam perspektif pendekatan Aswaja sebagai *Manhaj* bisa dilakukan dengan cara bagaimana melihat Aswaja dalam setting sosial-politik dan kultural saat doktrin tersebut lahir atau dikumandangkan. Dengan demikian dalam konteks Fikih misalnya, yang harus dijadikan bahan pertimbangan bukanlah produknya melainkan bagaimana kondisi sosial politik dan budaya ketika Imam hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali melahirkan pemikiran Fiqih-nya. Dalam pemahaman theologi dan tassawuf juga seharusnya demikian. Berangkat dari pola pendekatan pemahaman Aswaja perspektif *manhaj Al-Fikr* yang paling penting dalam memahami Aswaja adalah menangkap makna dari latar belakang yang mendasari tingkah laku dalam ber-Islam, Bernegara dan bermasyarakat. Dalam karakter yang demikian inilah KH. Ahmad Sidiq (Al-Magfurlah) telah merumuskan karakter Aswaja kedalam tiga sikap, yakni; *Tawasut, I'tidal dan Tawazun (Pertengahan, Tegak Lurus dan Keseimbangan)*. Ketiga inilah yang menjadi landasan atas kerangka mensikapi permasalahan-permasalahan keagamaan dan politik.

SEJARAH & DOKTRIN ASWAJA

Definisi & Historis Kemunculan Aswaja

Istilah *Ahlussunnah wal Jama'ah* (ASWAJA), merupakan gabungan dari tiga kata, yakni *Ahl*, *Assunnah*, dan *Aljamâ'ah*. Secara etimologis, kata *ahl* (أهل) berarti golongan, kelompok atau komunitas. Etimologi kata *assunnah* (السنة) memiliki arti yang cukup variatif, yakni: wajah bagian atas, kening, karakter, hukum, perjalanan, jalan yang ditempuh, dll. Sedangkan kata *aljamâ'ah* (الجماعة) berarti perkumpulan sesuatu tiga ke atas. Adapun terminologi *Ahlussunnah wal Jama'ah*, bukan merujuk kepada pengertian bahasa (*lughawi*) ataupun agama (*syar'i*), melainkan merujuk pada pengertian yang berlaku dalam kelompok tertentu (*urfi*). Yaitu, ASWAJA adalah kelompok yang konsisten menjalankan sunnah Nabi saw. dan mentauladani para sahabat Nabi dalam akidah (*tauhid*), amaliah *badâniyah* (*syar'iah*) dan akhlaq *qalbiyah* (tasawuf). Terminologi istilah *Ahlussunnah wal Jama'ah* ini didasarkan pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa hanya kelompok inilah yang selamat dari 73 perpecahan kelompok umat nabi Muhammad SAW: *Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, umatku akan bercerai-berai ke dalam 73 Golongan. Yang satu masuk surga dan yang 72 masuk neraka. Ditanyakan: "Siapakah mereka (golongan yang masuk surga) itu, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Mereka adalah Ahlussunnah wal Jama'ah".* (HR. Thabrani). Hadits yang lain menjelaskan: *Umat ini nantinya juga akan terpecah menjadi 73 sekte, satu yang selamat, yang lainnya dalam kerusakan. Shahabat bertanya, "Siapa yang selamat?" Nabi menjawab: "Ahlussunnah wal Jama'ah". Mereka bertanya kembali: "Siapa Ahlussunnah wal Jama'ah?" Jawab Nabi: "Adalah apa yang aku dan sahabatku praktekan hari ini".*

Dengan pengertian terminologis demikian, ASWAJA secara riil di tengah-tengah umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, *Ahl Alhadits* dengan sumber kajian utamanya adalah dalil *sam'iyah*, yakni Alqur'an, Assunnah Ijma dan Qiyas. Kedua, para *ahl alkalâm* atau *ahl annadhar* (teologi) yang mengintegrasikan intelegensi (*asshinâ'ah alfikriyyah*). Mereka adalah Asy'irah dengan pimpinan Abu Hasan Al'asy'ari dan Hanafiyah dipimpin oleh Abu Manshur Almaturidi. Sumber penalaran mereka adalah akal dengan tetap meletakkan dalil *sam'iyah* dalam porsinya. Ketiga, *Ahl Alwijdân wa Alkasyf* (kaum shufiyah). Sumber inspirasi mereka adalah penalaran *Ahl Alhadits* dan *Ahl Annadhar* sebagai media penghantar yang kemudian dilanjutkan melalui pola *kasyf* dan *ilham*.^[1] Ketiga kelompok inilah yang paling layak disebut ASWAJA secara hakiki.

Di Indonesia, Nahdlatul Ulama merumuskan ASWAJA dengan dua pengertian. *Pertama*, ASWAJA sudah ada sejak zaman Nabi, sahabat nabi, *tâbi'in* dan *tâbi'inattâbi'in* yang umumnya disebut dengan *assalaf ashshalih*. Pendapat ini didasarkan pada pengertian bahwa ASWAJA berarti golongan yang setia pada *Assunnah* dan *Aljamâ'ah*, yaitu Islam yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. bersama para sahabatnya pada zaman Nabi masih hidup dan apa yang dipraktekan para sahabat sepeninggal beliau, terutama *Khulafa' Arrasyidin*. Dari pengertian ini, ASWAJA dirumuskan sebagai: kelompok yang senantiasa konsisten dan setia mengikuti sunnah Nabi saw. dan thariqah atau jalan para sahabatnya dalam akidah, fiqh dan tasawuf. Kelompok ini terdiri dari para teolog (*mutakallimîn*), ahli fiqh (*fuqahâ'*), ahli hadits (*muhaditsîn*), dan ulama tasawuf (*mutashawwifîn*).

Kedua, ASWAJA adalah paham keagamaan yang muncul (dimurnikan) setelah Imam Abu Alhasan Al'asy'ari dan Imam Abu Manshur Almaturidi memformulasikan akidah Islam yang sesuai dengan Alqur'an dan Assunnah. Itu sebabnya, kelompok ASWAJA juga disebut sebagai penganut paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Syaikh Murtadla Azzubaidi dalam kitab *Al'ittihâf Assâdah Almuttaqîn*, Syarah kitab *Ihyâ' Ulûmiddîn* karya Imam Alghazali menyatakan: *Ketika diucapkan secara mutlak istilah Ahlussunnah wal Jama'ah, maka yang dikehendaki mereka ialah kelompok penganut paham Al'asy'ari dan Almaturidi.*

KH. Hasyim Asy'ari pada sambutan pembukaan deklarasi berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama menandakan: *"Ciri Ahlussunnah wal Jama'ah, adalah mereka yang di bidang tauhid mengikuti Imam Abu Alhasan Al'asy'ari atau Abu Mansur Almaturidi; di bidang fiqh mengikuti madzhab empat: Imam Abi Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i bin Idris atau Ahmad bin Hambal; dan di bidang tasawuf mengikuti ajaran Syaikh Junaid Albaghdadi dan Imam Alghazali."*

Dari terminologi ASWAJA seperti di atas, dapat dimengerti bahwa *Ahlussunnah wal Jama'ah* merupakan istilah yang terbangun melalui nalar '*urfi*', untuk mencirikan umat Muslim sebagai representasi dari *sawâd al'a'dham* (kelompok mayoritas) ketika kondisi perpecahan paham

merajalela dan dirasa perlu merapatkan barisan dan menyepakati sebuah identitas, sebagai upaya membedakan antara yang haq dan bathil, antara mereka yang teguh mengikuti sunnah dan yang menyimpang dengan berbagai macam bid'ah, sebagaimana yang ditekankan Rasulullah saw. dalam sabdanya: *Rasulullah saw. bersabda, Allah tidak akan mengumpulkan umat ini dalam kesesatan selamanya. Kekuatan (pertolongan) Allah berada pada kelompok, maka ikutilah kelompok terbesar, karena sesungguhnya seseorang yang memisahkan diri, ia memisahkan diri ke dalam neraka.*

Sejarah kemunculan istilah ASWAJA sebagai sebuah nama *firqah* (sekte) Islam, sebenarnya dipengaruhi dari perpecahan dalam Islam. Sejak peristiwa pembunuhan khalifah Islam ketiga, Utsman bin Affan, sejak saat itulah episode perpecahan dalam tubuh Islam dimulai. Dari peristiwa ini muncul serangkaian perang antara para sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah saat itu harus berhadapan perang melawan Sayyidah Aisyah, mertuanya sendiri, yang menuntut *qishas* darah Utsman bin Affan. Dalam perang yang dikenal sebagai perang Jamal ini, puluhan sahabat besar dan hapal Alqur'an gugur terbunuh oleh sesama Muslim akibat provokasi dan konspirasi kaum munafiq Yahudi (Abdulah ibn Saba' dkk.). Berikutnya, pecah perang Shiffin antara pasukan Ali berhadapan dengan pasukan Muawiyah yang kemudian memunculkan peristiwa *Tahkim* (*arbitrase*). Ide *Tahkim* dari kubu Muawiyah menjelang kekalahan pasukannya yang disetujui Ali ini, kemudian menyulut perpecahan di antara pasukan Ali, yang dari sini selanjutnya melahirkan sekte Islam Syi'ah yang mendukung kebijakan Ali dan sekte Khawarij yang menolak kebijakannya.

Sejak kematian Ali Ibn Abi Thalib pada tahun 40 H. atau 661 M., umat Islam telah terpecah setidaknya menjadi empat kelompok. *Petama*, Syi'ah yang fanatik kepada Ali dan keluarganya serta membenci Muawiyah Ibn Abi Sufyan. *Kedua*, Khawarij yang memusuhi bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. *Ketiga*, kelompok yang mengakui kekhalifahan Muawiyah. Dan *keempat*, sejumlah sahabat antara lain Ibn Umar, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan lain-lain, yang menghindarkan diri dari konflik dan menekuni bidang keilmuan keagamaan. Dari aktifitas mereka inilah selanjutnya lahir sekelompok ilmuwan sahabat, yang mewariskan tradisi keilmuan kepada generasi berikutnya, sehingga melahirkan tokoh-tokoh *mutakallimîn*, *muhadditsîn*, *fuqahâ'*, *mufasssîrîn*, dan *mutashawwifîn*. Kelompok ini berusaha mengakomodir semua kekuatan dan model pemikiran yang sederhana, sehingga mudah diterima oleh mayoritas umat Islam.

ASWAJA sebagai sebuah sekte Islam, eksistensinya semakin populer ketika Syaikh Abu Alhasan Al'asy'ari menyatakan keluar dari paham Mu'tazilah dan menyerang akidah paham tersebut. Sebelumnya, Abu Alhasan Al'asy'ari adalah seorang penganut Mu'tazilah dan menjadi murid Abu Ali Aljaba'i Almu'tazili, seorang tokoh Mu'tazilah yang sekaligus ayah tirinya. Dalam kutipan akhir perdebatan antara Abu Alhasan Al'asy'ari dengan gurunya, Abu Ali Aljaba'i, dalam rangka membatalkan paham Mu'tazilah, diceritakan: Abu Alhasan Al'asy'ari bertanya pada Abu Ali Aljaba'i: *"Bagaimana pendapatmu tentang tiga saudara yang meninggal dunia, yang satu adalah orang yang taat, yang kedua adalah orang yang durhaka, dan yang ketiga meninggal ketika masih kecil?"* Abu Ali Aljaba'i menjawab: *"yang taat diberi pahala dan masuk surga, yang durhaka disiksa dan masuk neraka, dan yang kecil berada di antara surga dan neraka (manzilah baina almanzilatain), tidak diberi pahala dan tidak disiksa"*. Abu Alhasan bertanya: *"Jika yang kecil mengatakan: 'Wahai Tuhanku, kenapa Engkau mencabut nyawaku ketika aku masih kecil? Jika Engkau biarkan aku hidup, aku akan taat dan masuk surga', lalu bagaimana jawaban Allah?"*. Abu Ali Aljaba'i menjawab: *"Allah akan menjawab: 'Aku maha tahu, jika engkau hidup sampai dewasa, maka engkau akan durhaka sehingga masuk neraka, maka yang terbaik adalah engkau mati ketika masih kecil'"*. Abu Alhasan bertanya lagi: *"Jika yang mati dalam keadaan durhaka mengatakan: 'Wahai Tuhanku, jika Engkau tahu aku akan durhaka, kenapa Engkau tidak mencabut nyawaku ketika aku masih kecil, sehingga Engkau tidak memasukkan aku ke dalam neraka?'", lalu apa yang akan dikatakan Allah?"* Pada pertanyaan terakhir inilah Abu Ali Aljaba'i tak sanggup menjawab untuk membela pahamnya.

Setelah Abu Ali Aljaba'i gagal menjawab pertanyaannya, Abu Alhasan Al'asy'ari lalu menyatakan keluar dari paham Mu'tazilah, dan aktif menulis kitab-kitab untuk menolak akidah Mu'tazilah dan merumuskan akidah *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

Dengan demikian, ASWAJA adalah aliran pemahaman keagamaan yang bercita-cita mengamalkan syari'at Islam secara murni, sesuai yang dikehendaki oleh Allah. ASWAJA meyakini wahyu bersifat 'gaib' dan disampaikan dalam kegaiban. Untuk itu tidak ada yang patut mengaku sebagai pengamal syari'at Islam secara mutlak benar kecuali Rasulullah saw., karena beliaulah yang

menerima dan dituntun wahyu sesuai kehendak Allah. Selain Rasulullah, para sahabat yang selalu dekat dan memperoleh ajaran langsung Rasulullah adalah umat Islam yang kualitas pemahaman terhadap wahyu mendekati sempurna, karena mereka tahu persis bagaimana Nabi Muhammad memahami dan mengamalkan wahyu. Hanya dengan merujuk kepada akidah, amaliah dan akhlak mereka inilah suatu sekte Islam berhak disebut *Ahlussunah wal Jama'ah*.

Apabila dewasa ini semua sekte Islam mengklaim diri sebagai ASWAJA, maka harus ditegaskan bahwa ASWAJA bukanlah klaim, melainkan paham keagamaan dengan bukti kesesuaian akidah, amaliah dan akhlaknya dengan akidah, amaliah dan akhlak Rasulullah dan yang telah disepakati para sahabat di masa *Khulafa' Arrasyidin*, berdasarkan hujjah dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan.

Garis-Garis Besar Doktrin Aswaja

Islam, iman dan ihsan adalah trilogi agama (*addin*) yang membentuk tiga dimensi keagamaan meliputi *syari'ah* sebagai realitas hukum, *thariqah* sebagai jembatan menuju *haqiqah* yang merupakan puncak kebenaran esensial. Ketiganya adalah sisi tak terpisahkan dari keutuhan risalah yang dibawa Rasulullah saw. yang menghadirkan kesatuan aspek eksoterisme (lahir) dan esoterisme (batin). Tiga dimensi agama ini (islam, iman dan ihsan), masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Keislaman seseorang tidak akan sempurna tanpa mengintegrasikan keimanan dan keihsanan. Ketiganya harus berjalan seimbang dalam perilaku dan penghayatan keagamaan umat, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya*. (QS. Albaqarah: 208)

Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, "*hakikat Islam adalah aktifitas badaniah (lahir) dalam menjalankan kewajiban agama, hakikat iman adalah aktifitas hati dalam kepasrahan, dan hakikat ihsan adalah aktifitas ruh dalam penyaksian (musyâhadah) kepada Allah*".

Dalam perkembangan selanjutnya, kecenderungan ulama dalam menekuni dimensi keislaman, melahirkan disiplin ilmu yang disebut fiqh. Kecenderungan ulama dalam menekuni dimensi keimanan, melahirkan disiplin ilmu tauhid. Dan kecenderungan ulama dalam dimensi keihsanan, melahirkan disiplin ilmu tasawuf atau akhlak. Paham ASWAJA mengakomodir secara integral tiga dimensi keagamaan tersebut sebagai doktrin dan ajaran esensialnya. Karena praktek eksoterisme keagamaan tanpa disertai esoterisme, merupakan kemunafikan. Begitu juga esoterisme tanpa didukung eksoterisme adalah klenik. Semata-mata formalitas adalah tiada guna, demikian juga spiritualitas belaka adalah sia-sia. Imam Malik mengatakan: *Barang siapa menjalani tasawuf tanpa fiqh, maka dia telah zindiq, barang siapa memegang fiqh tanpa tasawuf, maka dia telah fasiq, dan barang siapa menyatukan keduanya, maka dia telah menemukan kebenaran*.

1. Doktrin Keimanan

Iman adalah membenaran (*tashdîq*) terhadap Allah, Rasul dan segala risalah yang dibawanya dari Allah. Dalam doktrin keimanan, yang selanjutnya termanifestasi ke dalam bidang tauhid (teologi/kalam) ini, ASWAJA berpedoman pada akidah islamiyah (*ushûluddîn*) yang dirumuskan oleh Abu Alhasan Al'asy'ari (260 H./874 M. – 324 H./936 M.) dan Abu Manshur Almaturidi (w. 333 H.). Kedua tokoh ASWAJA ini nyaris sepakat dalam masalah akidah islamiyah, meliputi sifat-sifat wajib, mustahil dan ja'iz bagi Allah, para rasul dan malaikatNya, kendati keduanya berbeda dalam cara dan proses penalaran. Kedua tokoh ini hanya berbeda dalam tiga masalah yang tidak berakibat fatal. Yaitu dalam masalah *istitsnâ'*, *takwîn*, dan iman dengan taqlid.

Pertama *istitsnâ'*, atau mengatakan keimanan dengan *insya'Allah*, seperti "*Saya beriman, insya'Allah*", menurut Maturidiyah tidak diperbolehkan, karena *istitsnâ'* demikian mengisyaratkan sebuah keraguan, dan keimanan batal dengan adanya ragu-ragu. Menurut Asy'irah diperbolehkan, karena maksud *istitsnâ'* demikian bukan didasari keraguan atas keimanan itu sendiri, melainkan keraguan tentang akhir hidupnya dengan iman atau tidak, *na'ûdzu billah min dzalik*. Atau, *istitsnâ'* demikian maksudnya keraguan dan spekulasi terhadap kesempurnaan imannya di hadapan Allah.

Kedua sifat *takwîn* (mewujudkan), menurut Asyâ'irah sifat *takwîn* (تكوين) tidak berbeda dengan sifat Qudrah. Sedangkan menurut Maturidiyah, *takwîn* adalah sifat tersendiri yang berkaitan dengan sifat Qudrah.

Dan ketiga, tentang imannya orang yang taqlid (ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya). Menurut Maturidi, imannya *muqallid* sah dan disebut *arif* serta masuk surga. Sedangkan Menurut Abu Alhasan Al'asy'ari, keimanan demikian tidak cukup. Sedangkan Asyâ'irah (pengikut Abu Alhasan Al'asy'ari) berbeda pendapat tentang imannya *muqallid*. Sebagian menyatakan mukmin tapi berdosa karena tidak mau berusaha mengetahui melalui dalil; sebagian mengatakan mukmin dan tidak berdosa kecuali jika mampu mengetahui dalil; dan sebagian yang lain mengatakan tidak dianggap mukmin sama sekali.

Dari tingkatan tauhid ini, selanjutnya ada empat strata keimanan. Ada iman *bittaqlid*, iman *biddalil*, iman *bil iyyân* dan iman *bil haqq*. Pertama, iman *bittaqlid* adalah keimanan melalui ungkapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya secara langsung. Keimanan seperti ini keabsahannya masih diperselisihkan. Kedua, iman *biddalil* (*ilmul yaqîn*) ialah keyakinan terhadap *aqâ'id* lima puluh dengan dalil dan alasan filosofinya. Dua strata keimanan ini masih terhalang (محبوب) dalam mengetahui Allah. Ketiga, iman *bil iyyân* (*'ainul yaqîn*) ialah keimanan yang senantiasa hatinya *muraqabah* kepada Allah. Artinya, dalam kondisi apapun, Allah tidak hilang dari kesadaran hatinya. Dan keempat, iman *bil haqq* (*haqqul yaqîn*) yaitu keimanan yang telah terlepas dari segala yang *hadîts* dan tenggelam dalam *fanâ' billah*. Mempelajari ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, hanya akan menghasilkan iman *biddalil* (*ilmul yaqîn*), dan jika keimanan ini senantiasa disertai kesadaran hati dan penghayatan amaliah, maka naik ke strata iman *biliyyân* (*'ainul yaqîn*) hingga puncaknya mencapai pada iman *bil haqq* (*haqqul yaqîn*).

Doktrin keimanan terhadap Allah, berarti tauhid atau meng-Esakan Allah dalam *af'âl*, *shifah* dan *dzât*. Dengan demikian, tauhid terbagi menjadi tiga: *Tauhid fi'li*, yaitu *fana'* dari seluruh perbuatan; *tauhid washfi*, yaitu *fana'* dari segala sifat; dan *tauhiddzati*, yaitu *fana'* dari segala yang *maujud*. *Fana' fi'li* disebut juga dengan *ilmul yaqîn*, *fana' washfi* disebut juga dengan *'ainul yaqîn*, dan *fana' dzati* juga disebut dengan *haqqul yaqîn*. Level tauhid demikian ini merupakan puncak prestasi dari penghayatan firman Allah: *Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.* (QS. Ashshafat: 96). Sebagian ulama *'arif billah* menyatakan: *Barang siapa dapat menyaksikan makhluk tidak memiliki perbuatan, maka ia telah beruntung, barang siapa menyaksikannya tidak hidup, maka itu diperbolehkan, dan barang siapa menyaksikannya praktis tiada, maka ia telah wushul.*

Konsep tauhid ASWAJA mengenai *af'âl* (perbuatan) Allah, berada di tengah antara paham Jabariyah di satu pihak dan Qadariyah dan Mu'tazilah di pihak lain. Ketika Jabariyah menyatakan paham peniadaan kebebasan dan kuasa manusia atas segala kehendak dan perbuatannya secara mutlak, sementara Qadariyah dan Mu'tazilah menyatakan makhluk memiliki kebebasan dan kuasa mutlak atas kehendak dan perbuatannya, maka lahirlah ASWAJA sebagai sekte moderat di antara dua paham ekstrim tersebut. ASWAJA meyakini bahwa makhluk memiliki kebebasan kehendak (*ikhtiyar*) namun tidak memiliki kuasa (*qudrah*) perbuatan selain sebatas *kasb* (upaya). Dalam keyakinan ASWAJA, secara dhahir manusia adalah 'kuasa' (memiliki *qudrah*), namun secara batin, manusia adalah *majbûr* (tidak memiliki *qudrah* apapun).

Dalam doktrin keimanan ASWAJA, keimanan seseorang tidak dianggap hilang dan menjadi kafir, dengan melakukan kemaksiatan. Seseorang yang melakukan maksiat ataupun bid'ah, sementara hatinya masih teguh meyakini dua kalimat syahadat, maka ASWAJA tidak akan memvonis sebagai kafir, melainkan sebagai orang yang sesat (*dhalâl*) dan durhaka. ASWAJA sangat berhati-hati dan tidak gampang dalam sikap *takfîr* (mengkafirkan). Karena memvonis kafir seseorang yang sejatinya mukmin akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Rasulullah saw. bersabda: *Ketika seseorang berkata kepada saudaranya: "wahai seorang yang kafir", maka salah satunya benar-benar telah kafir.* (HR. Bukhari).

Keimanan seseorang akan hilang dan menjadi kafir (murtad) apabila menafikan wujud Allah, mengandung unsur syirik yang tidak dapat dita'wil, mengingkari kenabian, mengingkari hal-hal yang lumrah diketahui dalam agama (*ma'lûm bi adldlarûr*), dan mengingkari hal-hal *mutawâtir* atau *mujma' 'alaih* yang telah lumrah diketahui. Tindakan yang menyebabkan

seseorang dikategorikan kafir bisa meliputi ucapan, perbuatan atau keyakinan, yang mengandung unsur-unsur di atas ketika telah terbukti (*tahaqquq*) dan tidak bisa dita'wil.

2. Doktrin Keislaman

Doktrin keislaman, yang selanjutnya termanifestasi ke dalam bidang fiqh yang meliputi hukum-hukum legal-formal (*ubudiyah, mu'amalah, munakahah, jinayah, siyasah* dan lain-lain), ASWAJA berpedoman pada salah satu dari empat madzhab fiqh: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Ada alasan mendasar mengenai pembatasan ASWAJA hanya kepada empat madzhab ini. Di samping alasan otentisitas madzhab yang terpercaya melalui konsep-konsep madzhab yang terkodifikasi secara rapi dan sistematis, metodologi pola pikir dari empat madzhab ini relatif *tawâzun* (berimbang) dalam mensinergikan antara dalil *aql* (rasio-logis) dan dalil *naql* (teks-teks keagamaan). Empat madzhab ini yang dinilai paling moderat dibanding madzhab Dawud Adhdhahiri yang cenderung tekstualis dan Madzhab Mu'tazilah yang cenderung rasionalis.

Jalan tengah (*tawâsuth*) yang ditempuh ASWAJA di antara dua kutub ekstrim, yaitu antara rasionalis dengan tekstualis ini, karena jalan tengah atau moderat diyakini sebagai jalan paling selamat di antara yang selamat, jalan terbaik diantara yang baik, sebagaimana yang ditegaskan Nabi saw. dalam sabdanya: *Sebaik-baiknya perkara adalah tengahnya*.

Dengan prinsip inilah ASWAJA mengakui bahwa empat madzhab yang memadukan dalil Alqur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas (analogi), diakuinya mengandung kemungkinan lebih besar berada di jalur kebenaran dan keselamatan. Hal ini juga dapat berarti bahwa kebenaran yang diikuti dan diyakini oleh ASWAJA hanya bersifat kemungkinan dan bukan kemutlakan. Dalam arti, mungkin benar dan bukan mutlak benar. Empat dalil (*Alqur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas*) ini dirumuskan dari ayat: *Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)* (QS. Annisa': 59)

Dalam ayat ini secara implisit ditegaskan, bahwa ada empat dalil yang bisa dijadikan tendensi penggalan (*istinbâth*) hukum, yaitu Alqur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Perintah taat kepada Allah dan utusanNya, berarti perintah berpegang pada Alqur'an dan Hadits, perintah taat kepada *ulil amri* berarti perintah berpegang pada Ijma' (konsensus) umat (*mujtahidîn*), dan perintah mengembalikan perselisihan kepada Allah dan RasulNya berarti perintah berpegang pada Qiyas sepanjang tidak ada *nash* dan *ijma'*. Sebab, Qiyas hakikatnya mengembalikan sesuatu yang berbeda pada hukum Allah dan utusanNya.

Disamping itu, ASWAJA juga melegalkan taqlid, bahkan mewajibkannya bagi umat yang tidak memiliki kapasitas dan kualifikasi keilmuan yang memungkinkan melakukan ijtihad. Taqlid hanya haram bagi umat yang benar-benar memiliki kapasitas dan piranti ijtihad sebagaimana yang dikaji dalam kitab Ushul Fiqh. Dengan demikian, ASWAJA tidak pernah menyatakan pintu ijtihad tertutup. Pintu ijtihad selamanya terbuka, hanya saja umat Islam yang agaknya dewasa ini 'enggan' memasukinya. Mewajibkan ijtihad kepada umat yang tidak memiliki kapasitas ijtihad, sama saja memaksakan sesuatu di luar batas kemampuannya. Maka kepada umat seperti inilah taqlid dipahami sebagai kewajiban oleh ASWAJA berdasarkan firman Allah: *Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui*. (QS. Anahl: 43)

3. Doktrin Keihsanan

Tasawuf adalah sebuah manhaj spiritual yang bisa dilewati bukan melalui teori-teori ilmiah semata melainkan dengan mengintegrasikan antara ilmu dan amal, dengan jalan melepaskan (*takhallî*) baju kenistaan (*akhlaq madzmûmah*) dan mengenakan (*tahallî*) jubah keagungan (*akhlaq mahmûdah*), sehingga Allah hadir (*tajallî*) dalam setiap gerak-gerik dan perilakunya, dan inilah manifestasi konkret dari ihsan dalam sabda Rasulullah SAW: *Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatNya, dan jika engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu*.

Doktrin keihsanan, yang selanjutnya termanifestasi ke dalam bidang tasawuf atau akhlaq ini, ASWAJA berpedoman pada konsep tasawuf *akhlaqi* atau *amali*, yang dirumuskan oleh Imam Aljunaid Albaghdadi dan Alghazali. Limitasi (pembatasan) hanya kepada kedua tokoh ini, tidak berarti manafikan tokoh-tokoh tasawuf falsafi dari kelompok ASWAJA, seperti Ibn Al'arabi, Alhallaj dan tokoh-tokoh sufi 'kontroversial' lainnya.

Dari uraian di atas, dapat dimengerti bahwa kelompok yang masuk kategori ASWAJA meliputi ahli tauhid (kalam), ahli fiqh (syariat), ahli tasawuf (akhlaq) dan bahkan ahli hadits (*muhadditsîn*). Dari kelompok-kelompok ini masing-masing memiliki konsep metodologis dan tema kajian sendiri-sendiri yang tidak bisa diuraikan di makalah ringkas ini.

Metodologi Pemikiran (*Manhajul fikr*) Aswaja

Jika kita mencermati doktrin-doktrin paham ASWAJA, baik dalam akidah (iman), syariat (islam) ataupun akhlak (ihsan), maka bisa kita dapati sebuah metodologi pemikiran (*manhaj alfikr*) yang tengah dan moderat (*tawassuth*), berimbang atau harmoni (*tawâzun*), netral atau adil (*ta'âdul*), dan toleran (*tasâmu*). Metodologi pemikiran ASWAJA senantiasa menghindari sikap-sikap *tatharruf* (ekstrim), baik ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Inilah yang menjadi esensi identitas untuk mencirikan paham ASWAJA dengan sekte-sekte Islam lainnya. Dan dari prinsip metodologi pemikiran seperti inilah ASWAJA membangun keimanan, pemikiran, sikap, perilaku dan gerakan.

1. *Tawassuth* (Moderat)

Tawassuth ialah sebuah sikap tengah atau moderat yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, pemikiran moderat ini sangat urgen menjadi semangat dalam mengakomodir beragam kepentingan dan perselisihan, lalu berikhtiar mencari solusi yang paling *ashlah* (terbaik). Sikap ini didasarkan pada firman Allah: *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.* (QS. Albaqarah: 143).

2. *Tawâzun* (Berimbang)

Tawâzun ialah sikap berimbang dan harmonis dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil (pijakan hukum) atau pertimbangan-pertimbangan untuk mencetuskan sebuah keputusan dan kebijakan. Dalam konteks pemikiran dan amaliah keagamaan, prinsip *tawâzun* menghindari sikap ekstrim (*tatharruf*) yang serba kanan sehingga melahirkan fundamentalisme, dan menghindari sikap ekstrim yang serba kiri yang melahirkan liberalisme dalam pengamalan ajaran agama. Sikap *tawâzun* ini didasarkan pada firman Allah: *Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.* (QS. Alhadid: 25).

3. *Ta'âdul* (Netral dan Adil)

Ta'âdul ialah sikap adil dan netral dalam melihat, menimbang, menyikapi dan menyelesaikan segala permasalahan. Adil tidak selamanya berarti sama atau setara (*tamâtsul*). Adil adalah sikap proporsional berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing. Kalaupun keadilan menuntut adanya kesamaan atau kesetaraan, hal itu hanya berlaku ketika realitas individu benar-benar sama dan setara secara persis dalam segala sifat-sifatnya. Apabila dalam realitasnya terjadi *tafâdlul* (keunggulan), maka keadilan menuntut perbedaan dan pengutamaan (*tafdlîl*). Penyetaraan antara dua hal yang jelas *tafâdlul*, adalah tindakan aniaya yang bertentangan dengan asas keadilan itu sendiri. Sikap *ta'âdul* ini berdasarkan firman Allah: *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.* (QS. Alma'idah: 8).

4. **Tasâmuh (toleran)**

Tasâmuh ialah sikap toleran yang bersedia menghargai terhadap segala kenyataan perbedaan dan keanekaragaman, baik dalam pemikiran, keyakinan, sosial kemasyarakatan, suku, bangsa, agama, tradisi-budaya dan lain sebagainya. Toleransi dalam konteks agama dan keyakinan bukan berarti kompromi akidah. Bukan berarti mengakui kebenaran keyakinan dan kepercayaan orang lain. Toleransi agama juga bukan berarti mengakui kesesatan dan kebatilan sebagai sesuatu yang haq dan benar. Yang salah dan sesat tetap harus diyakini sebagai kesalahan dan kesesatan. Dan yang haq dan benar harus tetap diyakini sebagai kebenaran yang haq. Dalam kaitannya dengan toleransi agama, Allah SWT berfirman: *Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku.* (QS. Alkafirun: 6). *Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.* (QS. Ali Imran: 85)

Toleransi dalam konteks tradisi-budaya bangsa, ialah sikap permisif yang bersedia menghargai tradisi dan budaya yang telah menjadi nilai normatif masyarakat. Dalam pandangan ASWAJA, tradisi-budaya yang secara substansial tidak bertentangan dengan syariat, maka Islam akan menerimanya bahkan mengakulturasikannya dengan nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, *tasâmuh* (toleransi), berarti sebuah sikap untuk menciptakan keharmonisan kehidupan sebagai sesama umat manusia. Sebuah sikap untuk membangun kerukunan antar sesama makhluk Allah di muka bumi, dan untuk menciptakan peradaban manusia yang madani. Dari sikap *tasâmuh* inilah selanjutnya ASWAJA merumuskan konsep persaudaraan (*ukhuwwah*) universal. Meliputi *ukhuwwah islamiyyah* (persaudaraan keislaman), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan) dan *ukhuwwah basyariyyah* atau *insâniyyah* (persaudaraan kemanusiaan). Persaudaraan universal untuk menciptakan keharmonisan kehidupan di muka bumi ini, merupakan implementasi dari firman Allah SWT: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.* (QS. Alhujurat: 13). *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".* (QS. Albaqarah: 30)

Esensi Khilafah dalam Pandangan Aswaja

Dalam pandangan ASWAJA, esensi dan hakikat dari sebuah pemerintahan atau negara (khilafah), adalah sebagai salah satu diantara instrumen (*wasâ'il*) untuk usaha terwujudnya aplikasi syariat secara totalitas (*kâffah*) dalam kehidupan umat melalui kewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang menjadi cita-cita dan tujuan akhirnya (*maqâshid*). Karena kedudukannya yang dipandang sebagai *wasilah* untuk *maqâshid* berupa tugas *amar ma'ruf nahi munkar*, maka pemerintahan atau negara tidak harus terikat dengan bentuk, sistem ataupun dasar idiologi negara tertentu. Apapun sistem, bentuk ataupun dasar idiologi yang diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan tidak menjadi rintangan dalam tugas dakwah islamiyah, serta tidak menghalangi umat Islam dalam menjalankan praktek keagamaannya, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan kudeta atau merubahnya. Merubah bentuk, sistem atau dasar idiologi negara, hanya wajib dilakukan —sesuai batas kemampuan— jika nyata-nyata bertentangan dengan syariat.

Pendirian Khilafah Islamiyah bagi ASWAJA (baca: Nahdlatul Ulama) dalam konteks keIndonesiaan, bukanlah cita-cita urgen, sebab eksistensinya hanyalah sebagai *wasilah*. Ada cita-cita (*maqâshid*) yang jauh lebih penting dan esensial dari sekedar membentuk instrumen perjuangan, yaitu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di tengah kehidupan masyarakat, dan tugas *maqâshid* ini bisa dilangsungkan tidak harus melalui pendirian Khilafah Islamiyah.

Pandangan seperti inilah yang mendasari sikap ASWAJA (baca: NU) yang tidak ambisi dan bercita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia. Karena khilafah bukanlah satu-satunya instrumen yang bisa ditempuh untuk menegakkan syariat dalam kehidupan umat. Bahkan selama ini, setiap usaha merubah bentuk dan dasar hukum negara, nyata-nyata lebih banyak memunculkan eksese negatif yang justru merugikan kaum Muslimin sendiri. Gerak perjuangan ASWAJA (NU) dalam

konteks Indonesia, bukan semangat perjuangan mendirikan Khilafah Islamiyah, melainkan semangat perjuangan menegakkan syariat dalam perilaku keseharian umat. Dengan kata lain, perjuangan ASWAJA (NU) tidak dikonsentrasikan pada pembentukan sebuah wadah syariat secara formal, berupa bentuk khilafah atau sistem negara Islam, melainkan lebih dikonsentrasikan pada perjuangan aplikasi syariat dalam perilaku umat sehingga menjadi ruh dan substansi perilaku kehidupan masyarakat. Perilaku umat yang berlandaskan syariat jauh lebih penting dan lebih baik dibanding sekedar formalitas bentuk dan sistem negara islami.

Hal ini logis, sebab jika kita jujur membaca fakta sejarah khilafah dalam Islam, sebenarnya yang layak dilabeli dengan 'islamiyah' (baca: demokratis), hanyalah khilafah era *Khulafa' Arrasyidin* saja. Khilafah pasca *Khulafa' Arrasyidin*, secara umum telah kehilangan label ke-islamiyah-annya, bahkan identik dengan sistem kekaisaran Romawi dan Persi. Dari sejarah ini pula bisa kita tegaskan bahwa sistem pemerintahan demokrasi sebenarnya tidak bisa diklaim sebagai produk kafir, sebab khilafah era *Khulafa' Arrasyidin* adalah pemerintahan paling demokratis dari sistem demokrasi manapun.

Disamping itu, misi pendirian kembali Khilafah Islamiyah yang diusung oleh sebagian sekte dan gerakan Islam dalam konteks Indonesia dewasa ini, faktanya tidak murni hanya mengusung misi mendirikan negara Islam saja, melainkan juga mengusung paham dan ideologi aliran mereka, seperti ideologi Wahabi, Syi'ah atau lainnya. Mereka tidak akan mendirikan Khilafah Islamiyah kecuali paham dan ideologi mereka juga menjadi paham dan ideologi resmi pemerintah. Artinya, ketika khilafah berhasil didirikan, bukan mustahil mereka memberhentikan kelompok ASWAJA yang bertentangan dengan paham mereka, seperti sejarah kekejaman Pemerintahan Arab Saudi dengan paham Wahhabinya.

Inilah yang menjadi alasan fundamental kenapa ASWAJA (NU) menentang setiap gerakan dan sekte yang mengusung Khilafah Islamiyah di Indonesia dan merongrong NKRI yang berideologi Pancasila. Dengan keyakinan bahwa sila pertama yang mencerminkan tauhid Islam telah menjwai sila-sila lain dalam Pancasila, dan mempertimbangkan kenyataan rakyat bangsa Indonesia yang plural dalam ras, suku dan agama, serta mempertimbangkan resiko ancaman integritas bangsa, maka ASWAJA (NU) menyatakan: bahwa NKRI dan Pancasila sebagai ideologinya, adalah final dari segala upaya membentuk negara di Indonesia. Sikap seperti ini bukan berarti ASWAJA (NU) anti khilafah, melainkan lebih demi mempertahankan eksistensi ideologi ASWAJA dan menghindari kekacauan umum (*chaos*) yang harus diprioritaskan dari sekedar mencapai kemaslahatan (mendirikan khilafah), sesuai kaidah fiqh:

رُءُفَاسِدٍ قَدَّمَ عَلَى ذُبِّ صَالِحٍ

Menghindari kekacauan lebih diprioritaskan dari mengupayakan kemaslahatan

Apabila sejauh ini dikenal tiga model hubungan agama-negara, yaitu hubungan intergasi (agama dan negara adalah satu kesatuan); hubungan sekuler (pemisahan peran agama dalam pemerintahan); dan hubungan simbiosis (agama-negara terpisah namun saling membutuhkan dan mengisi secara timbal-balik), maka model ketiga inilah yang menjadi pilihan ASWAJA dalam memandang hubungan agama dan negara. Agama tidak harus diformalkan sebagai sebuah sistem dan bentuk suatu negara, namun agama juga tidak boleh diceraikan dari intervensi peran politik.

Pandangan politik ASWAJA seperti ini, tidak bisa dipertentangkan dengan muatan surat Alma'idah ayat 44, 45 dan 47, yang memvonis kafir, dhalim dan fasiq bagi orang yang tidak memberlakukan hukum-hukum yang diturunkan Allah. Vonis kafir, dhalim dan fasiq dalam tiga ayat tersebut meski berlaku bagi umat Islam atau *ahli alkitab* (non Muslim), namun bila dilakukan orang mukmin, menurut Thawus: *"kekafiran itu tidak mengeluarkannya dari agama"*. Dan menurut Atha'; *"kekafiran di bawah kekafiran, kedhaliman di bawah kedhaliman, dan kefasikan di bawah kefasikan"*. Sedangkan dalam riwayat lain menurut Ibn Abbas, penguasa Muslim yang tidak memberlakukan hukum sesuai apa yang diturunkan Allah dipilah menjadi dua. Ibn Abbas mengatakan: *"Orang yang mengingkari apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah kafir, dan orang yang membenarkannya namun tidak menerapkannya, maka dia dhalim atau fasiq"*. Dari sini bisa dipahami bahwa, apabila tidak memberlakukan hukum-hukum yang diturunkan Allah lantaran ketidakanggapan, atau karena justeru akan menimbulkan bahaya dan kerusakan (*mafâsid*), seperti ancaman disintegrasi bangsa, tekanan internasional dll., maka vonis kafir, dhalim dan fasiq tidak bisa dijatuhkan kepada umat Islam.

AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH SEBAGAI MANHAJUL FIKR

Prawacana

Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) merupakan bagian integral dari sistem keorganisasian PMII. Dalam NDP (Nilai Dasar Pergerakan) disebutkan bahwa Aswaja merupakan metode pemahaman dan pengamalan keyakinan Tauhid. Lebih dari itu, disadari atau tidak Aswaja merupakan bagian kehidupan sehari-hari setiap anggota/kader organisasi kita. Akarnya tertanam dalam pada pemahaman dan perilaku penghayatan kita masing-masing dalam menjalankan Islam. Selama ini proses reformulasi Ahlussunnah wal Jama'ah telah berjalan, bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Tahun 1994, dimotori oleh KH Said Agil Siraj muncul gugatan terhadap Aswaja yang sampai saat itu diperlakukan sebagai sebuah madzhab. Padahal di dalam Aswaja terdapat berbagai madzhab, khususnya dalam bidang fiqh. Selain itu, gugatan muncul melihat perkembangan zaman yang sangat cepat dan membutuhkan respon yang kontekstual dan cepat pula. Dari latar belakang tersebut dan dari penelusuran terhadap bangunan isi Aswaja sebagaimana selama ini digunakan, lahirlah gagasan ahlussunnah wal-jama'ah sebagai *manhaj al-fikr* (metode berpikir).

PMII melihat bahwa gagasan tersebut sangat relevan dengan perkembangan zaman, selain karena alasan muatan doktrinal Aswaja selama ini yang terkesan terlalu kaku. Sebagai *manhaj*, Aswaja menjadi lebih fleksibel dan memungkinkan bagi pengamalnya untuk menciptakan ruang kreatifitas dan menelorkan ikhtiar-ikhtiar baru untuk menjawab perkembangan zaman. Bagi PMII Aswaja juga menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna bagi setiap tempat dan zaman. Islam tidak diturunkan untuk sebuah masa dan tempat tertentu. Kehadirannya dibutuhkan sepanjang masa dan akan selalu relevan. Namun relevansi dan makna tersebut sangat tergantung kepada kita, pemeluk dan penganutnya, memperlakukan dan mengamalkan Islam. Di sini, PMII sekali lagi melihat bahwa Aswaja merupakan pilihan paling tepat di tengah kenyataan masyarakat kepulauan Indonesia yang beragam dalam etnis, budaya dan agama.

Membaca Sketsa Sejarah

Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) lahir dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah. Di wilayah doktrin, debat meliputi soal kalam mengenai status Al-Qur'an apakah ia makhluk atau bukan, kemudian debat antara Sifat-Sifat Allah antara ulama *Salafiyyun* dengan golongan *Mu'tazilah*, dan seterusnya. Di wilayah sejarah, proses pembentukan Aswaja terentang hingga zaman *al-khulafa' ar-rasyidun*, yakni dimulai sejak terjadi Perang Shiffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA dengan Muawiyah. Bersama kekalahan Khalifah ke-empat tersebut, setelah dikelabui melalui taktik arbitrase (*tahkim*) oleh kubu Muawiyah, ummat Islam makin terpecah kedalam berbagai golongan. Di antara mereka terdapat *Syi'ah* yang secara umum dinisbatkan kepada pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib, golongan *Khawarij* yakni pendukung Ali yang membelot karena tidak setuju dengan *tahkim*, dan ada pula kelompok *Jabariyah* yang melegitimasi kepemimpinan Muawiyah. Selain tiga golongan tersebut masih ada *Murjiah* dan *Qadariyah*, faham bahwa segala sesuatu yang terjadi karena perbuatan manusia dan Allah tidak turut campur (*af'al al-ibad min al-ibad*) – berlawanan dengan faham *Jabariyah*.

Di antara kelompok-kelompok itu, adalah sebuah komunitas yang dipelopori oleh Imam Abu Sa'id Hasan ibn Hasan Yasar al-Bashri (21-110 H/639-728 M), lebih dikenal dengan nama Imam Hasan al-Bashri, yang cenderung mengembangkan aktivitas keagamaan yang bersifat kultural (*tsaqafiyah*), ilmiah dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini menghindari pertikaian politik antara berbagai faksi politik (*firqah*) yang berkembang ketika itu. Sebaliknya mereka mengembangkan sistem keberagamaan dan pemikiran yang sejuk, moderat dan tidak ekstrim. Dengan sistem keberagamaan semacam itu, mereka tidak mudah untuk mengkafirkan golongan atau kelompok lain yang terlibat dalam pertikaian politik ketika itu. Seirama waktu, sikap dan pandangan tersebut diteruskan ke generasi-generasi Ulama setelah beliau, di antaranya Imam Abu Hanifah Al-Nu'man (w. 150 H), Imam Malik Ibn Anas (w. 179 H), Imam Syafi'i (w. 204 H), Ibn Kullab (w. 204 H), Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H), hingga tiba pada generasi Abu Hasan Al-Asy'ari (w 324 H) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H). Kepada dua ulama terakhir inilah permulaan faham Aswaja sering dinisbatkan; meskipun bila ditelusuri secara teliti benih-benihnya telah tumbuh sejak dua abad sebelumnya. Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah terbesar di dunia. Mayoritas pemeluk Islam di kepulauan ini adalah

penganut madzhab Syafi'i, dan sebagian terbesarnya tergabung-baik tergabung secara sadar maupun tidak-dalam jam'iyah Nahdlatul 'Ulama, yang sejak awal berdiri menegaskan sebagai pengamal Islam ala Ahlussunnah wal-Jama'ah.

Pengertian Ahlussunnah Wal Jama'ah

Secara semantik arti Ahlussunnah wal jama'ah adalah sebagai berikut. *Ahl* berarti *pemeluk*, jika dikaitkan dengan aliran atau madzhab maka artinya adalah *pengikut aliran* atau *pengikut madzhab* (ashab al-madzhab). *Al-Sunnah* mempunyai arti *jalan*, di samping memiliki arti *al-Hadist*. Disambungkan dengan *ahl* keduanya bermakna pengikut jalan Nabi, para Shahabat dan tabi'in. *Al-Jamaah* berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Bila dimaknai secara kebahasaan, Ahlusunnah wal Jama'ah berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, Para Shahabat dan tabi'in. Nahdlatul 'Ulama merupakan ormas Islam pertama di Indonesia yang menegaskan diri berfaham Aswaja. Dalam *Qanun Asasi* (konstitusi dasar) yang dirumuskan oleh *Hadratussyaikh* KH Hasyim Asy'ari juga tidak disebutkan definisi Aswaja. Namun tertulis di dalam *Qanun* tersebut bahwa Aswaja merupakan sebuah faham keagamaan dimana dalam bidang akidah menganut pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dalam bidang fiqh menganut pendapat dari salah satu madzhab empat (*madzahibul arba'ah* – Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali), dan dalam bidang tasawuf/akhlak menganut Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali.

Selama kurun waktu berdirinya (1926) hingga sekitar tahun 1994, pengertian Aswaja tersebut bertahan di tubuh Nahdlatul Ulama. Baru pada sekitar pertengahan dekade 1990 tersebut, muncul gugatan yang mempertanyakan, tepatkah Aswaja dianut sebagai madzhab, atau lebih tepat dipergunakan dengan cara lain? Aswaja sebagai madzhab artinya seluruh penganut Ahlussunnah wal Jama'ah menggunakan produk hukum atau pandangan para Ulama dimaksud. Pengertian ini dipandang sudah tidak lagi relevan lagi dengan perkembangan zaman mengingat perkembangan situasi yang berjalan dengan sangat cepat dan membutuhkan inovasi baru untuk menghadapinya. Selain itu, pertanyaan epistemologis terhadap pengertian itu adalah, bagaimana mungkin terdapat madzhab di dalam madzhab? Dua gugatan tersebut dan banyak lagi yang lain, baik dari tinjauan sejarah, doktrin maupun metodologi, yang menghasilkan kesimpulan bahwa Aswaja tidak lagi dapat diikuti sebagai madzhab. Lebih dari itu, Aswaja harus diperlakukan sebagai *manhaj al-fikr* atau metode berpikir.

Tuntutan Dunia Baru¹¹

Kehidupan yang terus mengalami perubahan pada semua aspek baik sosial, budaya, ekonomi, dan politik menuntut pembaruan pemahaman *aswaja* yang menjadi pedoman dalam menjalankan syariat dan pembinaan umat. Bukan menggeser isi dan substansi namun menyelaraskan metode kajian (*manhaj*) agar hasil pemaknaan teks yang sudah ada menjadi lebih dapat memberikan manfaat nyata dalam menyikapi berbagai perkembangan dan perubahan. Dalam kehidupan sosial umat tidak lagi berhubungan terbatas antar orang yang memiliki ideologi sama akan tetapi dengan berbagai lapisan kelompok masyarakat yang berlatar belakang bermacam-macam kebutuhan dan kepentingan. Kondisi itu membutuhkan sikap terbuka tidak hanya membatasi pada basis kesamaan ideologi, agar terjadi kenyamanan berinteraksi serta mudah membangun hubungan kerjasama dan bermitra dengan pihak lain berdasar kepentingan organisasi.

Beragam kebutuhan umat tidak lagi dapat dipenuhi oleh fasilitas hidup seadanya yang tersedia di lingkungan. Meningkatnya beragam kebutuhan menjadi pertanda berkembangnya budaya warga yang membutuhkan perimbangan sarana untuk memenuhinya. Tingkat pemenuhan kebutuhan sudah menjadi gaya hidup (*life style*) yang tidak lagi dapat dihindari, selain menjadi symbol status sosial (*social stratification*) juga menjadi pertanda bahwa kesejahteraan warga telah ada perkembangan. Agar tidak terjadi kesenjangan budaya (*cultural gap*) diperlukan strategi bagaimana harus mengonsumsinya sehingga membutuhkan sikap dan pengetahuan tentang berbudaya yang maju serta tidak mengabaikan aturan dan norma sosial keagamaan (*syariat*).

¹¹ Abdul Karim, *Reformulasi Aswaja Sebagai Manhajul-Fikr & Manhajul-Amal*, Tim Aswaja Center Pcnu Pati, 2012.

Tuntutan perbaikan hidup tidak terlepas dari keinginan warga untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Naluri ekonomi warga senantiasa tertantang untuk menangkap setiap peluang ekonomi yang dapat mendatangkan manfaat yang berakhir dengan peningkatan kesejahteraan (taraf hidup). Permasalahannya adalah bagaimana warga dapat merasa 'enjoy' dalam mengembangkan usaha tanpa harus dihadapkan dengan kendala hukum *syariat*, sementara pekerjaan sudah menunggu untuk berkompetisi dengan pihak lain. Dibutuhkan dukungan sikap *entrepreneurship* yang tinggi serta 'kenyamanan' berusaha baik secara material maupun immaterial untuk dapat merubah kualitas hidup warga.

Berhubungan dengan dunia politik memang tidak dapat dihindari, namun perlu sikap yang mengacu pada prinsip yang tegas. Kearifan berpolitik dengan lebih mengedepankan organisasi sebagai kekuatan politik bukan lembaga politik menjadi sebuah keniscayaan, sehingga terhindar dari pertautan langsung dengan politik praktis yang berdampak pada pengambilan manfaat yang serba terbatas. Menggerakkan kekuatan politik (*political power*) untuk membangun dan meningkatkan kepeloporan dalam pemberdayaan masyarakat (*social empowering*) dan demokratisasi memiliki manfaat yang lebih besar karena memiliki posisi tawar yang positif kepada kekuasaan yang dapat berpengaruh pada kesediaan kerjasama dalam pengambilan kebijakan publik untuk kesejahteraan warga.

Keinginan kuat untuk memberikan yang terbaik terutama bagi generasi muda, menjadi dasar gerakan pembaruan dalam memahami rumusan *aswaja* agar lebih dapat memberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas berpikir dan bertindak sehingga lebih produktif. Jika potensi tersebut dibiarkan ada beberapa kemungkinan: *pertama*, mandegnya kegiatan pengembangan kajian segala yang berhubungan dengan faham *aswaja* sebagai akibat ruang yang memberikan kebebasan berpikir terbelenggu oleh pembatasan yang kaku dengan pemahaman yang telah ada. *Kedua*, terputusnya jaringan hubungan kemasyarakatan baik yang bersifat kelembagaan, kelompok, dan perorangan karena tidak adanya akses akibat tidak ada keberanian secara aktif dari warga untuk melakukan hubungan kerja sama apa lagi kemitraan. *Ketiga*, lemahnya rasa kebanggaan dan kepemilikan (*ownership*) terhadap *aswaja* karena dirasa tidak ada lagi sesuatu yang patut dibanggakan sehingga pada saatnya akan terjadi krisis kader dan umat yang bersedia menjadi pengikut.

Pada sisi lain, di tingkat masyarakat terjadi gelombang Islamisasi yang cukup massif dengan munculnya gerakan-gerakan keislaman yang mengaspirasikan ideologi Islam garis keras dan Islam *transnasional* melalui kemunculan organisasi-organisasi keislaman seperti Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Laskar Jihad, dan sebagainya. Agenda politik di balik kemunculan organisasi-organisasi ini adalah hendak mengusung Islamisasi masyarakat yang selama ini dianggap gagal dilaksanakan oleh organisasi-organisasi sosial-kemasyarakatan.

Semaraknya ideologi Islam ke ruang publik, memunculkan sejumlah kekhawatiran yang bisa mengancam komunitas Islam *aswaja*. *Pertama*, terjadinya perebutan massa di akar rumput yang menyebabkan eksodus ideologis warga organisasi Islam moderat ke ideologi Islam radikal. Ancaman "pengambilan" atau perpindahan ideology ini bukan saja dialami oleh NU, tetapi juga terjadi di ormas lain seperti Muhammadiyah. Hal ini terjadi salah satunya akibat "pengosongan atau pembiaran" tempat-tempat ibadah seperti langgar, mushalla dan masjid yang sebelumnya diurus oleh kelompok Islam *aswaja* kemudian diambil alih oleh sekelompok Muslim yang berhaluan garis keras.

Kedua, ancaman juga bisa berupa simpati atau dukungan diam-diam (*tacit support*) yang datang dari kelompok Islam *aswaja* untuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kaum Islam garis keras. Perpindahan ideology dari Islam *aswaja* ke Islam radikal hanya membutuhkan satu langkah saja, yakni munculnya simpati dan dukungan dari kelompok Islam *aswaja* ke Islam garis keras. Mereka berdalih bahwa kaum Islamis ini sedang berjihad melawan "musuh-musuh" Allah, sebuah kondisi yang membutuhkan solidaritas dari seluruh ummat Islam. Ummat Islam dibayangkan sebagai sebuah entitas tunggal yang saling tergantung, membutuhkan dan menolong satu sama lain, dengan mengibaratkan sebuah organisme, maka sebuah organ akan merasa sakit jika organ lainnya sedang sakit.

Hal yang perlu digaris bawahi dari penjelasan di atas adalah pentingnya merumuskan kembali faham *aswaja* yang telah menjadi doktrin organisasi, agar cara-cara yang ditempuh oleh umat tidak terjerebab pada cara-cara radikal yang jelas kontra produktif dengan upaya membangun citra Islam ramah, toleran dan inklusif (*aswaja*). Akibat terbatasnya informasi dan pengetahuan tentang Islam *aswaja* yang benar, maka masyarakat lain membaca dan melihat bahwa Islam di Indonesia disama-ratakan yakni semua memiliki haluan garis keras, padahal kenyataan sesungguhnya tidak demikian.

Formula Baru Aswaja

Sampai pada perkembangan terakhir, *aswaja* masih didefinisikan sebagai berikut : "Paham keagamaan yang dalam **bidang Fiqh** mengikuti salah satu dari madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) ; dalam **bidang Aqidah** mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dan dalam **bidang Tasawuf** mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junayd al-Baghdady". Definisi tersebut sebenarnya merupakan penyederhanaan dari konsep keberagaman bermadzhab dengan tujuan untuk melestarikan, mempertahankan, mengamalkan dan mengembangkan paham Ahlussunnah Waljamaah.

Hal tersebut bukan berarti menyalahkan mazhab-mazhab *mu'tabar* lainnya, melainkan NU sebagai organisasi yang mengkoordinasikan para pengikut paham *aswaja*, berpendirian bahwa dengan mengikuti mazhab yang jelas metode dan produknya, maka warga akan lebih terjamin berada di jalan yang lurus. Menurut NU, sistem bermadzhab adalah sistem yang terbaik untuk melestarikan, mempertahankan, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam, supaya tetap tergolong Ahlussunnah Waljamaah.

Di luar pengertian di atas, KH. Said Agil Siradj memberikan pengertian lain. Menurutnya, Ahlussunnah Waljamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan, dan toleransi. Baginya Ahlussunnah Waljamaah harus diletakkan secara proporsional, yakni Ahlussunnah Waljamaah **bukan sebagai mazhab**, melainkan sebuah ***manhaj al-fikr*** (pendekatan berpikir tertentu) yang digariskan oleh sahabat dan para muridnya, yaitu generasi *tabi'in* yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam menyikapi situasi politik ketika itu. Namun harus diakui bahwa kelahiran Ahlussunnah Waljamaah sebagai *manhaj al-fikr* tidak terlepas dari pengaruh tuntutan realitas sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya.

Dari pengertian di atas terdapat dua konsep utama, *aswaja* sebagai **madzhab fiqh** dan *aswaja* sebagai ***manhaj al-fikr***. Perbedaan mendasar antara keduanya, konsep pertama meletakkan fiqh sebagai sebuah kebenaran ortodoksi, sedangkan konsep kedua menempatkan fiqh sebagai strategi untuk melakukan interpretasi sosial (Badrun, 2000). Dalam konteks implementatif, konsep pertama senantiasa berusaha menundukkan realitas sosial kepada kebenaran fiqh yang secara tekstual jawaban dari permasalahan telah 'disediakan' oleh sumber-sumber rujukan yang disepakati. Konsep kedua menempatkan fiqh sebagai lawan diskusi (*counter discourse*) dalam melakukan pencarian dan penemuan ragam permasalahan sosial yang tengah berlangsung. Bahan-bahan rujukan dipersiapkan secara lintas batas antar madzhab guna menemukan materi jawaban permasalahan yang sedang dicari solusinya.

Cara pertama dirasa oleh para kader banyak menemukan kebuntuan dalam mencari berbagai macam pemecahan atas munculnya beragam permasalahan sosial. Hal semacam ini membuat mereka mengalami '*kejumudan*' dan cenderung tidak berkembang. Selain tidak terbiasa melintas rujukan antar berbagai macam madzhab (*intiqol al-madzhab*), faktor kemampuan serta keterbatasan referensi menambah alasan yang kuat untuk tetap berada pada pemahaman *aswaja* menurut makna pertama. Dampaknya muncul sikap pasif, karena ada kekhawatiran mendapat 'marah atau teguran' dari para Kyai (*masyayih*) terhadap hasil kajiannya yang mungkin dianggap 'menyesatkan'.

Berbeda dengan konsep *aswaja* sebagai ***manhaj al-fikr***, yang belakangan dikembangkan juga sebagai ***manhaj al-amal*** (pendekatan melakukan kegiatan), *aswaja* diposisikan sebagai metode berpikir dan bertinadak yang berarti menjadi alat (*tools*) untuk mencari, menemukan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Sebagai alat, maka sikap pro aktif untuk mencari penyelesaian menjadi lebih bersemangat guna melahirkan pikiran-pikiran yang kreatif dan orisinal.

Dalam hal ini pendapat para ulama terdahulu tetap ditempatkan dalam kerangka *lintas-komparatif*, namun tidak sampai harus menjadi belenggu pemikiran yang dapat mematikan atau membatasi kreativitas.

Menurut Badrun (2000), terdapat lima ciri yang perlu diperhatikan dalam memosisikan *aswaja* sebagai ***manhaj al-fikr*** atau ***manhaj al-amal*** :

1. Selalu mengupayakan untuk interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqih untuk mencari konteksnya yang baru;
2. Makna bermadzhah diubah dari bermadzhah secara tekstual (*madzhab qauly*) menjadi bermadzhah secara metodologis (*madzhab manhajy*);
3. Melakukan verifikasi mendasar terhadap mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furū'*);
4. Fiqih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif;
5. Melakukan pemahaman metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah-masalah sosial dan budaya.

Rumusan *aswaja* seperti itu memberi peluang untuk melakukan terobosan baru dalam menyikapi berbagai perkembangan sosial, ekonomi, politik maupun budaya menjadi terbuka lebar. Proses akomodasi aneka ragam (*pluralitas*) permasalahan akan berjalan sejalan dengan tuntutan perubahan. Hal ini menjadi daya tarik bagi generasi muda kita untuk mengembangkan kreativitas berpikir dan berekspresi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyatakan hengkang dari komunitas Islam *aswaja* dengan alasan merasa ada pembatasan berkreasi dalam banyak hal.

Munculnya pemahaman *aswaja* sebagai *madzhab manhaj* sesungguhnya sebuah pemahaman kembali terhadap esensi "realitas teks-teks" (sumber rujukan) hukum Islam. Menyadari bahwa realitas teks sebenarnya tidak pernah netral, selalu berhubungan dengan motif-motif dibalik turunnya teks atau yang dikenal sebagai *asbabun al nuzul* atau *asbabun al wurud*. Dibutuhkan pemahaman mendalam hal-hal yang melingkupi proses turunnya teks sehingga melahirkan ketentuan hukum. Ketika hukum dirasa tidak lagi berkesesuaian dengan realitas sosial, maka dibutuhkan kembali kontekstualisasi perumusan hukum dengan memperhatikan apa esensi tujuan hukum (*maqasid asy-syari'ah*). Untuk memenuhi hal itu **kaderisasi *aswaja*** menjadi salah satu alternatif yang mesti dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kekosongan kader.

Peluang & Ancaman

Aswaja yang dipahami dan dipakai sebagai sebutan untuk komunitas Islam yang secara teologis setia pada tradisi Nabi dan *salafus shalihin*, dan secara sosial-ideologi-politik mencoba membebaskan dari konflik dua ekstrim yang telah membawa perpecahan dalam sejarah umat Islam, sesungguhnya memiliki peluang besar untuk memobilisasi warga menjadi mandiri melalui program pemberdayaan (*empowering*). Menurut Masdar Farid (2010), peluang itu dapat dilihat dari aspek sejarah yang mendasari, bahwa *aswaja* memiliki karakter:

1. Penganut garis tengah dalam polarisasi teologis Khawarij dan Muktazilah, dalam hal perdebatan nasib mukmin yang berdosa besar;
2. Penganut garis tengah dalam polarisasi politik antara Khawarij di satu pihak dan Syiah di lain pihak perihal masalah imamah Ali RA;
3. Penganut garis tengah (mengikuti Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali) dalam polarisasi fiqih antara madzhab liberal Muktazilah dan Madzhab literal Dawud Dhahiri;
4. Penganut garis tengah (mengikuti Ghazali-Junaidy Al-Baghdadi) dalam hal polarisasi tradisi tasawuf antara penganut madzhab kebatinan yang liar dan pembenci tasawuf kalangan *legalistic-formalistic*.

Karakteristik pemahaman *aswaja* seperti di atas memberikan peluang untuk membangun sikap keberagamaan yang kondusif dalam berbagai kepentingan.

Pertama, terkait dengan sikap warga, akan menjunjung tinggi sikap moderat dan toleran serta menolak segala macam bentuk ekstrimisme.

وَكَذَلِكَ عَلَّانَاكُمْ مَّا مَوْسُطَالَيْتُكُمْ وَتَوَلَّيْتُمْ هَٰذَا عَلَى النَّاسِ (البقرة : 143)

Kedua, dari aspek kehidupan kebangsaan akan melahirkan sikap menghargai kebhinnekaan dan menolak totalitarisme yang memiliki karakter mendominasi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ لَّتَتَعَاضُوا بِهِنَّ وَأَن يَّخْلِفَ بَيْنَكُمْ فَتَتَّعِزُّوا بِهِنَّ وَفِي النَّارِ هُمْ فِي الْأَفْئَاتِ (الحجرات: 13)

Ketiga, dalam pengembangan berpikir menempatkan wahyu dan akal menjadi acuan merumuskan kebenaran yang saling membutuhkan dan saling menguatkan.

وَقُلْ وَاللَّوْكَأَنَّا لَنَسْمَعُ نَعْقُلُ مَا كُنَّا فِى صُدُوحِ اللَّيْلِ سَمِيعِينَ (الملك: 10)

Keempat, dalam aspek kebudayaan akan menghargai kearifan dengan mengambil nilai-nilai tradisi budaya lokal dan kemanusiaan.

أَتَمْبِغُونَ لَّا تَمَّ كَارِمُ الْأَخْلَاقِ (الحديث)

Jika *aswaja* dipahami dengan benar dan menjadi acuan bertindak dalam kehidupan maka akan semakin berkembang potensi dukungan dan dorongan dari berbagai kalangan baik pemerintah, swasta, maupun lembaga non pemerintah untuk melakukan kemitraan terhadap kelompok Islam *aswaja* (NU). Pada akhirnya ada harapan kuat untuk menjadi organisasi Islam Sunni (berhaluan *aswaja*) terbesar yang memiliki peran besar dalam memfasilitasi berbagai konflik untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan.

Kuatnya keinginan untuk melakukan kaderisasi sebenarnya didasari oleh kekhawatiran yang dapat mengancam kelestarian Islam *aswaja*. Ancaman itu antara lain keberadaan lembaga-lembaga yang diyakini menjadi tempat kaderisasi seperti lembaga-lembaga pendidikan pesantren, madrasah dan sekolah-sekolah di lingkungan NU dirasa kurang memiliki daya saing bersamaan munculnya sekolah-sekolah Islam terpadu yang modern.

Berkembangnya pengaruh globalisasi dan masuknya budaya luar dapat memicu munculnya sikap adopsi budaya yang negatif seperti tidak toleran terhadap perbedaan, kekerasan, dan berbagai macam bentuk sikap negatif lainnya yang kesemuanya dapat menodai karakter kelompok Islam *aswaja* (NU) yang dikenal memiliki sikap kearifan, moderat, menghargai budaya lokal, menghargai perbedaan dan anti kekerasan. Dampaknya warga kita akan terkena imbasnya, mengingat mereka sebagian besar masih berada pada kelompok masyarakat menengah ke bawah di bidang pendidikan, politik dan budaya terlebih pada sektor ekonomi yang kesemuanya sangat rentan menjadi sumber konflik.

Aswaja Sebagai Manhaj Al-Fikr

Dalam tradisi yang dikembangkan NU, penganut Aswaja didefinisikan sebagai orang yang mengikuti salah satu madzab empat (Hanafi, maliki, Syafi'i dan Hambali) dalam bidang Fiqih, mengikuti Imam al-Asy'ari dan Maturidi dalam bidang Aqidah dan mengikuti al-Junaidi dan al-Ghozali dalam bidang tasawuf, dalam sejarahnya definisi semacam ini dirumuskan oleh Hadratus Syaikh Kiai Hasyim Asy'ari sebagaimana tertuang dalam *Qonun Asasi Nahdlatul Ulama*. Dalam perspektif pendekatan Aswaja sebagai *Manhaj* bisa dilakukan dengan cara bagaimana melihat Aswaja dalam setting sosial-politik dan kultural saat doktrin tersebut lahir atau dikumandangkan. Dengan demikian dalam konteks Fikih misalnya, yang harus dijadikan bahan pertimbangan bukanlah produknya melainkan bagaimana kondisi sosial politik dan budaya ketika Imam hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali melahirkan pemikiran Fiqih-nya. Dalam pemahaman theologi dan tassawuf juga seharusnya demikian. Berangkat dari pola pendekatan pemahaman Aswaja perspektif *manhaj Al-Fikr* yang paling penting dalam memahami Aswaja adalah menangkap makna dari latar belakang yang mendasari tingkah laku dalam ber-Islam, Bernegara dan bermasyarakat. Dalam karakter yang demikian inilah KH. Ahmad Sidiq (Al-Magfurlah) telah merumuskan karakter Aswaja kedalam tiga sikap, yakni; *Tawasut, I'tidal dan Tawazun (Pertengahan, Tegak Lurus dan Keseimbangan)*. Ketiga inilah yang menjadi landasan atas kerangka mensikapi permasalahan-permasalahan keagamaan dan politik.

Kurang lebih sejak 1995/1997, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia meletakkan Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*. PMII memandang bahwa *Ahlussunnah wal-jama'ah* adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan dengan berlandaskan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran. Aswaja bukan sebuah madzhab melainkan sebuah metode dan prinsip berpikir dalam menghadapi persoalan-persoalan agama sekaligus urusan sosial-kemasyarakatan; inilah makna Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*. Sebagai *manhaj al-fikr*, PMII berpegang pada prinsip-prinsip *tawasuth* (moderat), *tawazun* (netral), *ta'adul* (keseimbangan), dan

tasamuh (toleran). Moderat tercermin dalam pengambilan hukum (*istinbath*) yaitu memperhatikan posisi akal di samping memperhatikan *nash*. Aswaja memberi titik porsi yang seimbang antara rujukan *nash* (Al-Qur'an dan al-Hadist) dengan penggunaan akal. Prinsip ini merujuk pada debat awal-awal Masehi antara golongan yang sangat menekankan akal (*mu'tazilah*) dan golongan fatalis.

Sikap netral (*tawazun*) berkaitan sikap dalam politik. Aswaja memandang kehidupan sosial-politik atau pemerintahan dari kriteria dan pra-syarat yang dapat dipenuhi oleh sebuah rezim. Oleh sebab itu, dalam sikap *tawazun*, pandangan Aswaja tidak terkotak dalam kubu mendukung atau menolak sebuah rezim. Aswaja, oleh karena itu PMII tidak membenarkan kelompok ekstrim yang hendak merongrong kewibawaan sebuah pemerintahan yang disepakati bersama, namun tidak juga berarti mendukung sebuah pemerintahan. Apa yang dikandung dalam sikap *tawazun* tersebut adalah memperhatikan bagaimana sebuah kehidupan sosial-politik berjalan, apakah memenuhi kaidah atau tidak. Keseimbangan (*ta'adul*) dan toleran (*tasamuh*) terefleksikan dalam kehidupan sosial, cara bergaul dalam kondisi sosial budaya mereka. Keseimbangan dan toleransi mengacu pada cara bergaul PMII sebagai Muslim dengan golongan Muslim atau pemeluk agama yang lain. Realitas masyarakat Indonesia yang plural, dalam budaya, etnis, ideologi politik dan agama, PMII pandang bukan semata-mata realitas sosiologis, melainkan juga realitas teologis. Artinya bahwa Allah SWT memang dengan sengaja menciptakan manusia berbeda-beda dalam berbagai sisinya. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan sikap yang lebih tepat kecuali *ta'adul* dan *tasamuh*.

Prinsip Aswaja Sebagai Manhaj

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Aqidah, pengambilan hukum, tasawuf/akhlak dan bidang sosial-politik.

1. Bidang Aqidah

Dalam bidang Aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah *Ahlussunnah wal-Jama'ah* diantaranya yang pertama adalah aqidah *Uluhiyyah* (Ketuhanan), berkait dengan ikhwal eksistensi Allah SWT.

Pada tiga abad pertama Hijriyah, terjadi banyak perdebatan mengenai Eksistensi sifat dan asma Allah SWT. Dimana terjadi diskursus terkait masalah apakah Asma Allah tergolong dzat atau bukan. Abu Hasan Al-Asy'ari (w. 324 H) secara filosofis berpendapat bahwa nama (*ism*) bukanlah yang dinamai (*musamma*), Sifat bukanlah yang disifati (*mausuuf*), sifat bukanlah *dzat*. Sifat-sifat Allah adalah nama-nama (*Asma'*) Nya. Tetapi nama-nama itu bukanlah Allah dan bukan pula selain-Nya. Aswaja menekankan bahwa pilar utama ke-Imanan manusia adalah Tauhid; sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap Muslim bahwa Allah-lah yang Menciptakan, Memelihara dan Mematikan kehidupan semesta alam. Ia Esa, tidak terbilang dan tidak memiliki sekutu.

Pilar yang kedua adalah *Nubuwwat*, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rosul sebagai utusannya. Sebuah wahyu yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga acuan ummat manusia dalam menjalani kehidupan menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam doktrin *Nubuwwat* ini, ummat manusia harus meyakini dengan sepebuhnya bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, yang membawa *risalah* (wahyu) untuk umat manusia. Dia adalah Rasul terakhir, yang harus diikuti oleh setiap manusia.

Pilar yang ketiga adalah *Al-Ma'ad*, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapat imbalan sesuai amal dan perbuatannya (*yaumul jaza'*). Dan mereka semua akan dihitung (*hisab*) seluruh amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka yang banyak beramal baik akan masuk surga dan mereka yang banyak beramal buruk akan masuk neraka.

2. Bidang Sosial Politik

Berbeda dengan golongan *Syi'ah* yang memiliki sebuah konsep negara dan mewajibkan berdirinya negara (*imamah*), *Ahlussunnah wal-jama'ah* dan golongan sunni umumnya memandang negara sebagai kewajiban fakultatif (*fardhu kifayah*). Pandangan *Syi'ah* tersebut juga berbeda dengan golongan *Khawarij* yang membolehkan komunitas berdiri tanpa *imamah* apabila dia telah mampu mengatur dirinya sendiri. Bagi *ahlussunnah wal jama'ah*, negara merupakan

alat untuk mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan dan menjaga kemashlahatan bersama (*mashlahah musytarakah*).

Ahlussunnah wal-Jama'ah tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi, aristokrasi (kerajaan) atau negara-modern/demokrasi, asal mampu memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah otoritas (wewenang) pemimpin negara tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

a) Prinsip Syura (musyawarah)

Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan dan peraturan. Salah satu ayat yang menegaskan musyawarah adalah sebagai berikut: *"Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. (QS Al-Syura, 42: 36-39).*

b) Prinsip Al-'Adl (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu Perintah yang paling banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apapun bentuk pemerintahan itu. Berikut ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan keadilan. *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS An-Nisa, 4: 58)*

c) Prinsip Al-Hurriyyah (kebebasan)

Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warganya. Kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan kodrat asasi setiap manusia. Prinsip kebebasan manusia dalam Syari'ah dikenal dengan *Al-Ushulul-Khams* (prinsip yang lima), yaitu:

- *Hifzhu al-Nafs* (menjaga jiwa); adalah kewajiban setiap kepemimpinan (negara) untuk menjamin kehidupan setiap warga negara; bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk hidup dan berkembang dalam wilayahnya.
- *Hifzhu al-Din* (menjaga agama); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin kebebasan setiap orang memeluk, meyakini dan menjalankan Agama dan Kepercayaannya. Negara tidak berhak memaksakan atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga negara.
- *Hifzhu al-Mal* (menjaga harta benda); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara wajib memberikan jaminan keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat sebagai manusia.
- *Hifzhu al-Nasl*; bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara. Negara harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mangunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu. *Hifzhu al-Nasl* berarti negara harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup di wilayah negaranya.
- *Hifzh al-'Irdh*; jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara. Negara tidak boleh merendahkan warga negaranya karena profesi dan pekerjaannya. Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara.

Al-Ushulul Khams identik dengan konsep Hak Azasi Manusia yang lebih dikenal dalam dunia modern – bahkan mungkin di kalangan *ahlussunnah wal-jama'ah*. Lima pokok atau prinsip di

atas menjadi ukuran baku bagi legitimasi sebuah pemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin di kelak kemudian hari.

d) Prinsip Al-Musawah (Kesetaraan Derajat)

Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. Antara satu manusia dengan manusia lain, bangsa dengan bangsa yang lain tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa lebih tinggi dari yang lain. Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain. Dalam surat Al-Hujuraat disebutkan: *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujuraat, 49: 13)*

Perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis, yakni fakta yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial. Perbedaan merupakan keniscayaan teologis yang Dikehendaki oleh Allah SWT. Demikian disebutkan dalam surat Al-Ma'idah. *Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lomba lah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Al-Maidah; 5: 48)*

Dalam sebuah negara kedudukan warga negara adalah sama. Orang-orang yang menjabat di tubuh pemerintahan memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara. Mereka memiliki jabatan semata-mata adalah untuk mengayomi, melayani dan menjamin kemashlahatan bersama, dan tidak ada *privilege* (keistimewaan) khususnya di mata hukum. Negara justru harus mampu mewujudkan kesetaraan derajat antar manusia di dalam wilayahnya, yang biasanya terlanggar oleh perbedaan status sosial, kelas ekonomi dan jabatan politik.

Dengan prinsip-prinsip di atas, maka tidak ada doktrin Negara Islam, Formalisasi Syari'at Islam dan Khilafah Islamiyah bagi Ahlussunnah wal-Jama'ah. Sebagaimana pun tidak didapati perintah dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas untuk mendirikan salah satu di antara ketiganya. Islam hanya diharuskan untuk menjamin agar sebuah pemerintahan – baik negara maupun kerajaan – harus mampu memenuhi 4 (empat) kriteria di atas.

3. Bidang Istinbath Al-Hukm (Pengambilan Hukum Syari'ah)

Hampir seluruh kalangan Sunni menggunakan empat sumber hukum yaitu:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas

Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum (*istinbath al-hukm*) tidak dibantah oleh semua madzhab fiqh. Sebagai sumber hukum *naqli* posisinya tidak diragukan. Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Sementara As-Sunnah meliputi al-Hadist dan segala tindak dan perilaku Rasul SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh para Shabat dan Tabi'in. Penempatannya ialah setelah proses *istinbath al-hukm* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, atau digunakan sebagai komplemen (pelengkap) dari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an. As-Sunnah sendiri mempunyai tingkat kekuatan yang bervariasi. Ada yang terus-menerus (*mutawatir*), terkenal (*masyhur*) ataupun terisolir (*ahad*). Penentuan tingkat As-Sunnah tersebut dilakukan oleh *Ijma' Shahabah*.

Menurut Abu Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, *Ijma'* adalah *Kesepakatan kelompok legislatif (ahl al-halli wa al-aqdi) dan ummat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus. Atau kesepakatan orang-orang mukallaf dari ummat Muhammada pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus.* Dalam Al-Qur'an dasar *Ijma'* terdapat dalam QS An-Nisa', 4: 115 *"Dan barang siapa menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat*

kembali.” Dan “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia..” QS Al-Baqarah, 2: 143. *Qiyas*, sebagai sumber hukum Islam, merupakan salah satu hasil *ijtihad* para Ulama. *Qiyas* yaitu mempertemukan sesuatu yang tak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *'illat* hukum. *Qiyas* sangat dianjurkan untuk digunakan oleh Imam Syafi'i.

4. Bidang Tasawuf

Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi menjelaskan “Tasawuf artinya Allah mematikan dirimu dari dirimu, dan menghidupkan dirimu dengan-Nya; Tasawuf adalah engkau berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apa pun.” Imam Abu Hamid Al-Tusi Al-Ghazali menjelaskan “Tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah... Aku simpulkan bahwa kaum sufi adalah para pencari di Jalan Allah, dan perilaku mereka adalah perilaku yang terbaik, jalan mereka adalah jalan yang terbaik, dan pola hidup mereka adalah pola hidup yang paling tersucikan. Mereka telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah dan menjadikannya sebagai saluran tempat mengalirnya sungai-sungai yang membawa ilmu-ilmu dari Allah.” “berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apapun” kata Imam Al-Junaid, lalu “menyucikan hati dari apa saja selain Allah.... Mereka (kaum Sufi) telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah..,” kata Imam Al-Ghazali. Seorang sufi adalah mereka yang mampu membersihkan hatinya dari keterikatan selain kepada-Nya.

Ketidakterikatan kepada apapun selain Allah SWT adalah proses batin dan perilaku yang harus dilatih bersama keterlibatan kita di dalam urusan sehari-hari yang bersifat duniawi. *Zuhud* harus dimaknai sebagai ikhtiar batin untuk melepaskan diri dari keterikatan selain kepada-Nya tanpa meninggalkan urusan duniawi. Mengapa? karena justru di tengah-tengah kenyataan duniawi posisi manusia sebagai Hamba dan fungsinya sebagai Khalifah harus diwujudkan. Banyak contoh sufi atau ahli tasawuf yang telah *zuhud* namun juga sukses dalam ukuran duniawi. Kita lihat saja Imam Al-Junaid adalah pengusaha botol yang sukses, Al-Hallaj sukses sebagai pengusaha tenun, Umar Ibn Abd Aziz adalah seorang sufi yang sukses sebagai pemimpin negara, Abu Sa'id Al Kharraj sukses sebagai pengusaha konveksi, Abu Hasan al-Syadzily sukses sebagai petani, dan Fariduddin al-Attar sukses sebagai pengusaha parfum. Mereka adalah sufi yang pada maqomnya tidak lagi terikat dengan urusan duniawi tanpa meninggalkan urusan duniawi.

Urusan duniawi yang mendasar bagi manusia adalah seperti mencari nafkah (pekerjaan), kemudian berbuntut pada urusan lain seperti politik. Dari urusan-urusan itu kita lantas bersinggungan dengan soal-soal ekonomi, politik-kekuasaan, hukum, persoalan sosial dan budaya. Dalam Tasawuf urusan-urusan tersebut tidak harus ditinggalkan untuk mencapai *zuhud*, justru kita mesti menekuni kenyataan duniawi secara total sementara hati/batin kita dilatih untuk tidak terikat dengan urusan-urusan itu. Di situlah *zuhud* kita maknai, yakni *zuhud* di dalam batin sementara aktivitas sehari-hari kita tetap diarahkan untuk mendarmabaktikan segenap potensi manusia bagi terwujudnya masyarakat yang baik.

Kongklusi

Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai *manhaj al fikr* bersifat dinamis dan sangat terbuka bagi pembaruan-pembaruan. Sebagai sebuah metode pemahaman dan penghayatan, dalam makna tertentu ia tidak dapat disamakan dengan metode akademis yang bersifat ilmiah. Dalam metode akademik, sisi teknikalitas pendekatan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi prosedur yang teliti dan nyaris pasti. Namunpun demikian dalam ruang akademis pembaharuan atau perubahan sangat mungkin terjadi. Sebagai metode berpikir, boleh jadi pada saatnya nanti Aswaja akan memiliki kadar teknikalitas sama tinggi dengan metode ilmiah. Namun dalam pandangan kami upaya pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap Aswaja perlu kita upayakan bersama-sama terlebih dahulu. Khususnya terhadap apa yang telah kami sajikan di sini, yang sangat butuh banyak masukan. Sebuah kebutuhan lanjut, semacam jabaran teknis untuk memandu langkah per langkah tindakan dan pandangan gerakan, akan muncul kemudian apabila kenyataan lapangan sungguh-sungguh menuntut dan membutuhkannya. Akan tetapi sepanjang kebutuhan primer kolektif kita masih terletak pada *memahami*, hal semacam itu kami pandang belum menjadi kebutuhan objektif.[]

Hand-Out 14

PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF

Prawacana

Paradigma merupakan sesuatu yang vital bagi pergerakan organisasi, karena paradigma merupakan titik pijak dalam membangun konstruksi pemikiran dan cara memandang sebuah persoalan yang akan termanifestasikan dalam sikap dan perilaku organisasi. Disamping itu, dengan paradigma ini pula sebuah organisasi akan menentukan dan memilih nilai-nilai yang universal dan abstrak menjadi khusus dan praksis operasional yang akhirnya menjadi karakteristik sebuah organisasi dan gaya berpikir seseorang.

Organisasi PMII selama ini belum memiliki paradigma yang secara definitive menjadi acuan gerakan. Cara pandang dan bersikap warga pergerakan selama ini mengacu pada nilai dasar pergerakan (NDP). Karena tidak mengacu pada kerangka paradigmatis yang baku, upaya merumuskan dan membangun kerangka nilai yang dapat diukur secara sistematis dan baku, sehingga warga pergerakan sering dihadapkan pada berbagai penafsiran atas nilai-nilai yang menjadi acuan yang akhirnya berujung pada terjadinya keberagaman cara pandang dan tafsir atas nilai tersebut. Namun demikian, dalam masa dua periode kepemimpinan terakhir (sahabat Muhaimin Iskandar dan sahabat Saiful Bachri Anshori) secara faktual dan operasional ada karakteristik tertentu yang berlaku dalam warga pergerakan ketika hendak melihat, menganalisis, dan menyikapi sebuah persoalan, yaitu sikap kritis dengan pendekatan teori kritis. Dengan demikian secara umum telah berlaku paradigma kritis dalam tubuh warga pergerakan. Sikap seperti ini muncul ketika PMII mengusung sejumlah gagasan mengenai demokratisasi, civil society, penguatan masyarakat dihadapan negara yang otoriter, sebagai upaya aktualisasi dan implementasi atas nilai-nilai dan ajaran kegamaan yang diyakini.

Pengertian Paradigma dalam khazanah ilmu sosial, ada beberapa pengertian paradigma yang dibangun oleh para pemikir sosiologi. Salah satu diantaranya adalah G. Ritzer yang memberi pengertian paradigma sebagai pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu. Paradigma membantu apa yang harus dipelajari, pertanyaan yang harus dijawab, bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma merupakan kesatuan konsensus yang terluas dalam suatu bidang ilmu dan membedakan antara kelompok ilmuwan. Menggolongkan, mendefinisikan dan yang menghubungkan antara eksemplar, teori, metode serta instrumen yang terdapat di dalamnya.

Mengingat banyaknya definisi yang dibentuk oleh para sosiologi, maka perlu ada pemilihan atau perumusan yang tegas mengenai definisi paradigma yang hendak diambil oleh PMII. Hal ini perlu dilakukan untuk memberi batasan yang jelas mengenai paradigma dalam pengertian komunitas PMII agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memaknai paradigma. Berdasarkan pemikiran dan rumusan yang disusun oleh para ahli sosiologi, maka pengertian paradigma dalam masyarakat PMII dapat dirumuskan sebagai titik pijak untuk menentukan cara pandang, menyusun sebuah teori, menyusun pertanyaan dan membuat rumusan mengenai suatu masalah.

Lewat paradigma ini pemikiran seseorang dapat dikenali dalam melihat dan melakukan analisis terhadap suatu masalah. Dengan kata lain, paradigma merupakan cara dalam "mendekati" obyek kajiannya (*the subject matter of particular discipline*) yang ada dalam ilmu pengetahuan. Orientasi atau pendekatan umum (*general orientations*) ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibangun dalam kaitan dengan bagaimana "realitas" dilihat. Perbedaan paradigma yang digunakan oleh seseorang dalam memandang suatu masalah, akan berakibat pada timbulnya perbedaan dalam menyusun teori, membuat konstruk pemikiran, cara pandang, sampai pada aksi dan solusi yang diambil. Pilihan Paradigma PMII disamping terdapat banyak pengertian mengenai paradigma, dalam ilmu sosial ada berbagai macam jenis paradigma. Melihat realitas yang ada di masyarakat dan sesuai dengan tuntutan keadaan masyarakat PMII baik secara sosiologis, politis dan antropologis maka PMII memilih paradigma kritis-transformatif sebagai pijakan gerakan organisasi.

Paradigma Kritis-Transformatif PMII

Dari penelusuran yang cermat atas paradigma kritis, terlihat bahwa paradigma kritis sepenuhnya merupakan proses pemikiran manusia. Dengan demikian ia adalah *secular*. Kenyataan ini yang membuat PMII dilematis, karena akan mendapat tuduhan secular jika pola pikir tersebut diberlakukan. Untuk menghindari tuduhan tersebut, maka diperlukan adanya reformulasi penerapan paradigma kritis dalam tubuh warga pergerakan. Dalam hal ini, paradigma kritis diberlakukan hanya sebatas sebagai kerangka berpikir dan metode analisis dalam memandang persoalan. Dengan sendirinya ia harus diletakkan pada posisi tidak diluar dari ketentuan agama, sebaliknya justru ingin mengembalikan dan memfungsikan ajaran agama yang sesungguhnya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini penerapan paradigma kritis bukan menyentuh pada hal-hal yang sifatnya sacral, tetapi pada persoalan yang profan.

Lewat paradigma kritis di PMII berupaya menegakkan sikap kritis dalam berkehidupan dengan menjadikan ajaran agama sebagai inspirasi yang hidup dan dinamis. Sebagaimana dijelaskan di atas, *pertama*, paradigma kritis berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari berbagai belenggu yang diakibatkan oleh proses sosial yang bersifat profan. *Kedua*, paradigma kritis melawan segala bentuk dominasi dan penindasan. Ketiga, paradigma kritis membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonik. Semua ini adalah semangat yang dikandung oleh Islam. Oleh karenanya, pokok-pokok pikiran inilah yang dapat diterima sebagai titik pijak paradigma kritis di kalangan warga PMII. Contoh yang paling konkrit dalam hal ini bisa ditunjuk pola pemikiran yang menggunakan paradigma kritis dari berbagai intelektual Islam diantaranya:

Hassan Hanafi

Penerapan paradigma kritis oleh Hasan Hanafi ini terlihat jelas dalam konstruksi pemikirannya terhadap agama. Dia menyatakan untuk memperbaharui masyarakat Islam yang mengalami ketertinggalan dalam segala hal, pertama-tama diperlukan analisis sosial. Menurutnya selama ini Islam mengandalkan otoritas teks kedalam kenyataan. Dia menemukan kelemahan mendasar dalam metodologi ini. pada titik ini dia memberikan kritik tajam terhadap metode tradisional teks yang telah mengalami ideologis. Untuk mengembalikan peran agama dalam menjawab problem sosial yang dihadapi masyarakat, Hasan Hanafi mencoba menggunakan metode "kritik Islam" yaitu metode pendefinisian realitas secara kongkret untuk mengetahui siapa memiliki apa, agar realitas berbicara dengan dirinya sendiri. Sebagai realisasi dari metode ini, dia menawarkan "desentralisasi Ideologi" dengan cara menjalankan teologi sebagai antropologi. Pikiran ini dimaksudkan untuk menyelamatkan Islam agar tidak semata-mata menjadi sistem kepercayaan (sebagai *teologi parexellence*), melainkan juga sebagai sistem pemikiran. Usaha Hasan Hanafi ini ditempuh dengan mengadakan rekonstruksi terhadap teologi tradisional yang telah mengalami pembekuan dengan memasukkan hermeneutika dan ilmu sosial sebagai bagian integral dari teologi. Untuk menjelaskan teologi menjadi antropologi, Hanafi memaknai teologi sebagai Ilmu Kalam. Kalam merupakan realitas manusia sekaligus Ilahi. Kalam bersifat manusiawi karena merupakan wujud verbal dari kehendak Allah kedalam bentuk manusia dan bersifat Ilahi karena datang dari Allah.

Dalam pemikiran Hanafi, kalam lebih bersifat "praktis" dari pada "logis", karena kalam sebagai kehendak Allah-memiliki daya imperaktif bagi siapapun kalam itu disampaikan. Pandangan Hanafi tentang teologi ini berbeda dengan teologi Islam yang secara tradisional dimengerti sebagai ilmu yang berkenaan dengan pandangan mengenai akidah yang benar. *Mutakallimin* sering disebut sebagai "*ahl al-ra'yu wa al-nadaar*" yang muncul untuk menghadapi "*ahl-albid'ah*" yang mengancam kebenaran akidah Islam. Dua kelompok ini akhirnya berhadapan secara dialektis. Akan tetapi dialektika mereka bukanlah dialektika tindakan, tetapi dialektika kata-kata. Gagasan teologi sebagai antropologi yang disampaikan oleh Hasan Hanafi sebenarnya justru ingin menempatkan ilmu kalam sebagai ilmu tentang dialektika kepentingan orang-orang yang beriman dalam masyarakat tertentu. Dalam pemikiran Hassan Hanafi, ungkapan "teologi menjadi antropologi" merupakan cara ilmiah untuk mengatasi ketersinggungan teologi itu sendiri. Cara ini dilakukan melalui pembalikan sebagaimana pernah dilakukan oleh Karl Marx terhadap filsafat Hegel. Upaya ini tampak secara provokatif dalam artikelnya "ideologi dan pembangunan "lewat sub-judul; dari tuhan ke bumi, dari keabadian ke waktu, dari taqdie ke hendak bebas, dan dari otoritas ke akal, dari

teologi ke tindakan, dari kharisma ke partisipasi massa, dari jiwa ke tubuh, dari eskatologi ke futurology.

Mohammad Arkoun

Arkoun menilai bahwa pemikiran Islam, kecuali dalam beberapa usaha pembaharuan kritis yang bersifat sangat jarang dan mempunyai ruang perkembangan yang sempit sekali, belum membuka diri pada kemodernan pemikiran dan karena itu tidak dapat menjawab tantangan yang dihadapi umat muslim kontemporer. Pemikiran Islam dianggapnya "naif" karena mendekati agama atas dasar kepercayaan langsung tanpa kritik. Pemikiran Islam tidak menyadari jarak antara makna potensial terbuka yang diberikan wahyu Ilahi dan aktualisasi makna itu dalam sejumlah makna yang diaktualisasikan dan dijemakan dalam berbagai cara pemahaman, penceritaan dan penalaran khas masyarakat tertentu ataupun dalam berbagai wacana khas ajaran teologi dan fiqh tertentu. Pemikiran Islam juga tidak menyadari bahwa dalam proses itu bukan hanya pemahaman dan penafsiran tertentu ditetapkan dan diakui, melainkan pemahaman dan penafsiran lain justru disingkirkan. Hal-hal itu baru dialami oleh berbagai ilmu pengetahuan modern, yang ingin dimasukkan arkoun ke dalam pemikiran Islam. Karena kritiknya terlalu kritis ini, Arkoun sering memberikan jawaban diluar kelaziman umat Islam (*Uncommon Answer*) ketika menjawab problem-problem kehidupan yang dialami umat Islam. Jawaban seperti ini terlihat jelas dalam penerapan teori pengetahuan (*theory of knowledge*).

Teori pengetahuan ini meliputi landasan epistimologi kajian tentang studi-studi agama Islam. Dalam hal ini Arkoun membedakan wacana ideologis, wacana rasional, dan wacana profetis. Setiap wacana memiliki watak yang berbeda sehingga diperlukan kesesuaian dengan wataknya. Selama ini orang dengan mudah menyatakan melakukan kajian secara ilmiah, akan tetapi itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang muslim, melainkan juga oleh orang-orang barat yang mengideologikan sikap mereka dalam memandang Islam. Salah satu corak ideologi adalah unsur kemadegan (tidak dinamis), resistensi (tidak kritis) dan demi kekuatan (tidak transformatif). Untuk merealisasikan jawaban tersebut Arkoun berusaha meletakkan dogma, interpretasi dan teks secara proporsional. Upaya ini dilakukan untuk membuka dialog terus-menerus antara agama dengan realitas untuk menentukan wilayah-wilayah mana dari agama yang bisa didialogkan dan diinterpretasikan sesuai dengan konteksnya. Kedua pola pikir dari intelektual Islam di atas merupakan sedikit contoh yang bisa dijadikan model bagaimana paradigma kritis diberlakukan dalam wilayah pemikiran keagamaan.

Disamping kedua pemikir Islam diatas sebenarnya masih banyak pemikir lain yang menerapkan pemikiran kritis dalam mendekati agama, misalnya Abdullah Ahmed An-naim, Asghar Ali Engineer, Thoha Husein, dan sebagainya. Dari kedua contoh diatas terlihat bahwa paradigma kritis sebenarnya berupaya membebaskan manusia dengan semangat dan ajaran agama yang lebih fungsional. Dengan kata lain, kalau paradigma kritis Barat berdasarkan pada semangat revolusioner sekuler dan dorongan kepentingan sebagai dasar pijakan, maka paradigma kritis PMII justru menjadikan nilai-nilai agama yang terjebak dalam dogmatisme itu sebagai pijakan untuk membangkitkan sikap kritis melawan belenggu yang kadang disebabkan oleh pemahaman yang distortif. Jelas ini terlihat ada perbedaan yang mendasar penerapan paradigma kritis antara barat dengan Islam (yang diterapkan PMII). Namun demikian harus diakui adanya persamaan antara keduanya yaitu dalam metode analisa, bangunan teoritik dan semangat pembebasan yang terkandung didalamnya. Jika paradigma kritis ini bisa diterapkan dikalangan warga pergerakan, maka kehidupan keagamaan akan berjalan dinamis, berjalanya proses pembentukan kultur demokratis dan penguatan civil society akan segera dapat terwujud. Dan kenyataan ini terwujud manakala masing-masing anggota PMII memahami secara mendalam pengertian, kerangka paradigmatic dan konsep teoritis dari paradigma kritis yang dibangun oleh PMII. Dalam pandangan PMII, paradigma kritis saja tidak cukup untuk melakukan transformasi sosial, karena paradigma kritis hanya berhenti pada dataran metodologis konsepsional untuk mewujudkan masyarakat yang komunikatif dan sikap kritis dalam memandang realitas. Paradigma kritis hanya mampu menelanjangi berbagai tendensi ideologi, memberikan perspektif kritis dalam wacana agama dan sosial, namun ia tidak mampu memberikan perspektif perubahan pasca masyarakat terbebas. Pasca seseorang terbebas melalui perspektif kritis, paradigma kritis tidak memberikan tawaran

yang praktis. Dengan kata lain, paradigma kritis hanya mampu melakukan analisis tetapi tidak mampu melakukan organizing, menjembatani dan memberikan orientasi kepada kelompok gerakan atau rakyat. Paradigma kritis masih signifikan untuk digunakan sebagai alat analisis social, tetapi kurang mampu untuk digunakan dalam perubahan sosial. Karena ia tidak dapat memberikan perspektif dan orientasi sebagai kekuatan bersejarah dalam masyarakat untuk bergerak. Karenanya, paradigma kritis yang digunakan di PMII adalah kritik yang mampu mewujudkan perubahan sehingga menjadi paradigma kritis transformatif. Paradigma kritis transformatif PMII dipilih sebagai upaya menjembatani kekurangan-kekurangan yang ada dalam paradigma kritis pada wilayah-wilayah turunan dari bacaan kritisnya terhadap realitas. Dengan demikian paradigma kritis transformatif dituntut untuk memiliki instrumen-instrumen gerak yang bisa digunakan oleh PMII mulai dari ranah filosofis sampai praksis.

Dasar Pemikiran Paradigma Kritis Transformatif PMII

Ada beberapa alasan yang menyebabkan PMII harus memilih paradigma kritis sebagai dasar untuk bertindak dan mengaplikasikan pemikiran serta menyusun cara pandang dalam melakukan analisa: *Pertama*, masyarakat Indonesia saat ini sedang terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme modern. Kesadaran masyarakat dikekang dan diarahkan pada satu titik yaitu budaya massa kapitalisme dan pola pikir positivistic modernisme. Pemikiran-pemikiran seperti ini sekarang telah menjadi sebuah behala yang mengahruskan semua orang untuk mengikatkan diri padanya. Siapa yang tidak melakukan, dia akan ditinggalkan dan dipinggirkan. Eksistensinya-pun tidak diakui. Akibatnya jelas, kreatifitas dan pola pikir manusia menjadi tidak berkembang. Dalam kondisi seperti ini maka penerapan paradigma kritis menjadi suatu keniscayaan.

Kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik etnik, tradisi, kultur maupun kepercayaan. Kondisi seperti ini sangat memerlukan paradigma kritis, karena paradigma ini akan memberikan tempat yang sama bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan kreatifitasnya secara maksimal melalui dialog yang terbuka dan jujur. Dengan demikian potensi tradisi akan bisa dikembangkan secara maksimal untuk kemanusiaan.

Ketiga, sebagaimana kita ketahui selama pemerintahan Orde Baru berjalan sebuah sistem politik yang represif dan otoriter dengan pola yang hegemonik. Akibatnya ruang publik (*public sphere*) masyarakat hilang karena direnggut oleh kekuatan negara. Dampak lanjutannya adalah berkembangnya budaya bisu dalam masyarakat, sehingga proses demokratisasi terganggu karena sikap kritis diberangus. Untuk mengembangkan budaya demokratis dan memperkuat civil society dihadapan negara, maka paradigma kritis merupakan alternatif yang tepat.

Keempat, selama pemerintahan orde baru yang menggunakan paradigma keteraturan (order paradigma) dengan teori-teori modern yang direpresentasikan melalui ideologi developmentalisme, warga PMII mengalami proses marginalisasi secara hampir sempurna. Hal ini karena PMII dianggap sebagai wakil dari masyarakat tardisional. Selain itu, paradigma keteraturan memiliki konsekuensi logis bahwa pemerintah harus menjaga harmoni dan keseimbangan social yang meniscayakan adanya gejolak social yang harus ditekan seecil apapun. Sementara perubahan harus berjalan secara gradual dan perlahan. Dalam suasana demikian, massa PMII secara sosilogis akan sulit berkembang karena tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan diri, mengimplementasikan kreatifitas dan potensi dirinya.

Kelima, Selain belenggu sosial politik yang dilakukan oleh negara dan sistem kapitalisme global yang terjadi sebagai akibat perkembangan situasi, factor yang secara spesifik terjadi dikalangan PMII adalah kuatnya belenggu dogmatisme agama dan tradisi. Dampaknya, secara tidak sadar telah terjadi berbagai pemahaman yang distortif mengenai ajaran dan fungsi agama. Terjadi dogmatisme agama yang berdampak pada kesulitan membedakan mana yang dogma dan mana yang pemikiran terhadap dogma. Agamapun menjadi kering dan beku, bahkan tidak jarang agama justru menjadi penghalang bagi kemajuan dan upaya penegakan nilai kemanusiaan. Menjadi penting artinya sebuah upaya dekonstruksi pemahaman keagamaan melalui paradigma kritis.

Apakah Paradigma itu?

Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Khun, seorang ahli fisika teoritik, dalam bukunya *"The Structure Of Scientific Revolution"*, yang dipopulerkan oleh Robert Friederichs (*The Sociologi Of Sociology*;1970), Lodhal dan Cardon (1972), Effrat (1972), dan Philips (1973). Sementara Khun sendiri, seperti ditulis Ritzer (1980) tidak mendefinisikan secara jelas pengertian paradigma. Bahkan menggunakan kata paradigma dalam 21 konteks yang berbeda. Namun dari 21 pengertian tersebut oleh Masterman diklasifikasikan dalam tiga pengertian paradigma.

1. Paradigma metafisik yang mengacu pada sesuatu yang menjadi pusat kajian ilmuwan.
2. Paradigma Sosiologi yang mengacu pada suatu kebiasaan sosial masyarakat atau penemuan teori yang diterima secara umum.
3. Paradigma Konstrak sebagai sesuatu yang mendasari bangunan konsep dalam lingkup tertentu, misalnya paradigma pembangunan, paradigma pergerakan dll.

Masterman sendiri merumuskan paradigma sebagai "pandangan mendasar dari suatu ilmu yang menjadi pokok persoalan yang dipelajari (*a fundamental image a dicipline has of its subject matter*). Sedangkan George Ritzer mengartikan paradigma sebagai apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dipelajari, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta seperangkat aturan tafsir sosial dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka, jika dirumuskan secara sederhana sesungguhnya paradigma adalah *"How to see the Word"* semacam kaca mata untuk melihat, memaknai, menafsirkan masyarakat atau realitas sosial. Tafsir sosial ini kemudian menurunkan respon sosial yang memandu arahan pergerakan.

Apakah yang disebut Teori kritis ?

Apa sebenarnya makna "Kritis"? Menurut kamus ilmiah populer, kritis adalah *Tajam/ tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian secara mendalam*. Sehingga teori kritis adalah teori yang berusaha melakukan analisa secara tajam dan teliti terhadap realitas. Secara historis, berbicara tentang teori kritis tidak bisa lepas dari Madzhab Frankfurt. Dengan kata lain, teori kritis merupakan produk dari institute penelitian sosial, Universitas Frankfurt Jerman yang digawangi oleh kalangan neo-marxis Jerman. Teori Kritis menjadi disputasi publik di kalangan filsafat sosial dan sosiologi pada tahun 1961. Konfrontasi intelektual yang cukup terkenal adalah perdebatan epistemologi sosial antara Adorno (kubu Sekolah Frankfurt–paradigma kritis) dengan Karl Popper (kubu Sekolah Wina–paradigma neo-positivisme/ neo-kantian). Konfrontasi berlanjut antara Hans Albert (kubu Popper) dengan Jürgen Habermas (kubu Adorno). Perdebatan ini memacu debat positivisme dalam sosiologi Jerman. Habermas adalah tokoh yang berhasil mengintegrasikan metode analitis ke dalam pemikiran dialektis Teori Kritis.

Teori kritis adalah anak cabang pemikiran marxis dan sekaligus cabang marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx (*Frankfurter Schule*). Cara dan ciri pemikiran aliran Frankfurt disebut ciri teori kritik masyarakat *"eine Kritische Theorie der Gessellschaft"*. Teori ini mau mencoba memperbaharui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Ciri khas dari teori kritik masyarakat adalah bahwa teori tersebut bertitik tolak dari inspirasi pemikiran sosial Karl Marx, tapi juga sekaligus melampaui bangunan ideologis marxisme bahkan meninggalkan beberapa tema pokok Marx dan menghadapi masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif. Beberapa tokoh Teori Kritis angkatan pertama adalah Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno (musik, ahli sastra, psikolog dan filsuf), Friedrich Pollock (ekonom), Erich Fromm (ahli psikoanalisa Freud), Karl Wittfogel (sinolog), Leo Lowenthal (sosiolog), Walter Benjamin (kritikus sastra), Herbert Marcuse (murid Heidegger yang mencoba menggabungkan fenomenologi dan marxisme, yang juga selanjutnya Marcuse menjadi "nabi" gerakan *New Left* di Amerika). Pada intinya madzhab Frankfurt tidak puas atas teori Negara Marxian yang terlalu bertendensi determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi berasumsi bahwa perubahan akan terjadi apabila masalah ekonomi sudah stabil. Jadi *basic strurtur* (ekonomi) sangat menentukan *supras truktur* (politik, sosial, budaya, pendidikan dan seluruh dimensi kehidupan manusia).

Kemudian mereka mengembangkan kritik terhadap masyarakat dan berbagai sistem pengetahuan. Teori kritis tidak hanya menumpukkan analisisnya pada struktur sosial, tapi teori kritis juga memberikan perhatian pada kebudayaan masyarakat (*culture society*). Seluruh program teori kritis Madzhab Frankfurt dapat dikembalikan pada sebuah manifesto yang ditulis di dalam *Zeischrift* tahun 1957 oleh Horkheimer. Dalam artikel tentang "Teori Tradisional dan teori Kritik" (*Traditionelle und Kritische Theorie*) ini, konsep "Teori kritis" pertama kalinya muncul. Tokoh utama teori kritis ini adalah Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) dan Herbert Marcuse (1898-1979) yang kemudian dilanjutkan oleh Generasi kedua mazhab Frankfurt yaitu Jurgen Habermas yang terkenal dengan teori komunikasinya.

Diungkapkan Goerge Ritzer, secara ringkas teori kritis berfungsi untuk mengkritisi :

1. Teori Marxian yang deterministic yang menumpukan semua persoalan pada bidang ekonomi;
2. Positivisme dalam Sosiologi yang mencangkok metode sains eksak dalam wilayah sosial-humaniora katakanlah kritik epistimologi;
3. Teori- teori sosiologi yang kebanyakan hanya memperpanjang status quo;
4. Kritik terhadap masyarakat modern yang terjebak pada irrasionalitas, nalar teknologis, nalar instrumental yang gagal membebaskan manusia dari dominasi;
5. Kritik kebudayaan yang dianggap hanya menghancurkan otentisitas kemanusiaan.

Madzhab Frankfrut mengkarakterisasikan berpikir kritis dengan empat hal :

1. Berpikir dalam totalitas (dialektis);
2. Berpikir empiris-historis;
3. Berpikir dalam kesatuan teori dan praksis;
4. Berpikir dalam realitas yang tengah dan terus bekerja (*working reality*).

Pengertian 'Kritik' dalam Tradisi Teori Kritis

Mereka mengembangkan apa yang disebut dengan kritik ideology atau kritik dominasi. Sasaran kritik ini bukan hanya pada struktur sosial namun juga pada ideologi dominan dalam masyarakat. Teori Kritis berangkat dari 4 (empat sumber) kritik yang dikonseptualisasikan oleh Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx dan Sigmund Freud.

1. Kritik dalam pengertian Kantian.

Immanuel Kant melihat teori kritis dari pengambilan suatu ilmu pengetahuan secara subyektif sehingga akan membentuk paradigma segala sesuatu secara subyektif pula. Kant menumpukkan analisisnya pada aras epistemologis; tradisi filsafat yang bergulat pada persoalan "isi" pengetahuan. Untuk menemukan kebenaran, Kant mempertanyakan "*condition of possibility*" bagi pengetahuan. Bisa juga disederhanakan bahwa kritik Kant terhadap epistemologi tentang (*kapasitas rasio dalam persoalan pengetahuam*) bahwa rasio dapat menjadi kritis terhadap kemampuannya sendiri dan dapat menjadi 'pengadilan tinggi'. Kritik ini bersifat transendental. Kritik dalam pengertian pemikiran Kantian adalah kritik sebagai kegiatan menguji kesahihan klaim pengetahuan tanpa prasangka.

2. Kritik dalam Arti Hegelian.

Kritik dalam makna Hegelian merupakan kritik terhadap pemikiran kritis Kantian. Menurut Hegel, Kant berambisi membangun suatu "meta-teori" untuk menguji validitas suatu teori. Menurut Hegel pengertian kritis merupakan *refleksi-diri dalam upaya menempuh pergulatan panjang menuju ruh absolute*. Hegel merupakan peletak dasar metode berpikir dialektis yang diadopsi dari prinsip tri-angle-nya Spinoza Diktumnya yang terkenal adalah *therational is real, the real is rational*. Sehingga, berbeda dengan Kant, Hegel memandang teori kritis sebagai proses totalitas berfikir. Dengan kata lain, kebenaran muncul atau kritisisme bisa tumbuh apabila terjadi benturan dan pengingkaran atas sesuatu yang sudah ada. Kritik dalam pengertian Hegel didefinisikan sebagai refleksi diri atas tekanan dan kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri-rasio dalam sejarah manusia.

3. Kritik dalam Arti Marxian.

Menurut Marx, konsep Hegel seperti orang berjalan dengan kepala. Ini adalah terbalik. Dialektika Hegelian dipandang terlalu idealis, yang memandang bahwa, yang berdialektika adalah pikiran. Ini kesalahan serius sebab yang berdialektika adalah kekuatan-kekuatan material dalam masyarakat. Pikiran hanya refleksi dari kekuatan material (modal produksi masyarakat). Sehingga teori kritis bagi Marx sebagai usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan elienasi yang dihasilkan oleh penguasa di dalam masyarakat. Kritik dalam pengertian Marxian berarti usaha untuk mengemansipasi diri dari alienasi atau keterasingan yang dihasilkan oleh hubungan kekuasaan dalam masyarakat.

4. Kritik dalam Arti Freudian.

Madzhab frankfurt menerima Sigmund Freud karena analisis Freudian mampu memberikan basis psikologis masyarakat dan mampu membongkar konstruk kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Freud memandang teori kritis dengan refleksi dan analisis psikoanalisisnya. Artinya, bahwa orang bisa melakukan sesuatu karena didorong oleh keinginan untuk hidupnya sehingga manusia melakukan perubahan dalam dirinya. Kritik dalam pengertian Freudian adalah refleksi atas konflik psikis yang menghasilkan represi dan manipulasi kesadaran. Adopsi Teori Kritis atas pemikiran Freudian yang sangat psikologistik dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ortodoksi marxisme klasik.

Berdasarkan empat pengertian kritis di atas, teori kritis adalah teori yang bukan hanya sekedar kontemplasi pasif prinsip-prinsip obyektif realitas, melainkan bersifat emansipatoris. Sedangkan teori yang emansipatoris harus memenuhi tiga syarat : *Pertama*, bersifat kritis dan curiga terhadap segala sesuatu yang terjadi pada zamannya. *Kedua*, berfikir secara historis, artinya selalu melihat proses perkembangan masyarakat. *Ketiga*, tidak memisahkan teori dan praksis. Tidak melepaskan fakta dari nilai semata-mata untuk mendapatkan hasil yang obyektif.

Tiga Jenis Utama Paradigma

Paradigma Kritis; Sebuah Sintesis Perkembangan Paradigma Sosial: William Perdue, menyatakan dalam ilmu sosial dikenal adanya tiga jenis utama paradigma:

1. Order Paradigm (Paradigma Keteraturan).

Inti dari paradigma keteraturan adalah bahwa masyarakat dipandang sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan sistemik. Asumsi dasarnya adalah bahwa: Setiap struktur sosial adalah fungsional terhadap struktur lainnya. Kemiskinan, peperangan, perbudakan misalnya, merupakan suatu yang wajar, sebab fungsional terhadap masyarakat. Ini yang kemudian melahirkan teori strukturalisme fungsional. Secara eksternal paradigma ini dituduh a historis, konservatif, pro-satus quo dan karenanya, anti-perubahan. Paradigma ini mengingkari hukum kekuasaan : *setiap ada kekuasaan senantiasa ada perlawanan*. Untuk memahami pola pemikiran paradigma keteraturan dapat dilihat skema berikut:

Elemen Paradigmatik	Asumsi dasar	Type ideal
Imajinasi sifat dasar manusia	Rasional, memiliki kepentingan pribadi, ketidakseimbangan personal dan berpotensi memunculkan disintegrasi sosial	Pandangan hobbes mengenai konsep dasar Negara
Imajinasi tentang masyarakat	Consensus, kohesif/fungsional struktural, ketidakseimbangan sosial, ahistoris, konservatif, pro-status quo, anti perubahan	Negara Republic Plato
Imajinasi ilmu pengetahuan	Sistematic, positivistic, kuantitatif dan prediktif.	Fungsionalisme Auguste Comte, fungsionalisme Durkheim, fungsionalisme struktural Talcott Parson

2. Conflic Paradigm (Paradigma Konflik)

Secara konseptual paradigma Konflik menyerang paradigma keteraturan yang mengabaikan kenyataan bahwa: Setiap unsur-unsur sosial dalam dirinya mengandung kontradiksi-kontradiksi internal yang menjadi prinsip penggerak perubahan. Perubahan tidak selalu gradual; namun juga revolusioner. Dalam jangka panjang sistem sosial harus mengalami konflik sosial dalam lingkaran setan (*vicious circle*) tak berujung pangkal. Kritik itulah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi paradigma konflik. Konflik dipandang sebagai inheren dalam setiap komunitas, tak mungkin dikecuali, apalagi dihilangkan. Konflik menjadi instrument perubahan. Untuk memahami pola pemikiran paradigma konflik dapat dilihat skema berikut:

Elemen paradigmatis	Asumsi dasar	Type ideal
Imajinasi sifat dasar manusia	Rasional, kooperatif, sempurna	Konsep homo feber hegel
Imajinasi tentang masyarakat	Integrasi sosial terjadi karena adanya dominasi, konflik menjadi instrument perubahan, utopia	Negara Republic plato
Imajinasi ilmu pengetahuan	Filsafat materialisme, histories, holistic, dan terapan	Materialisme historis marx

3. Plural Paradigm (Paradigma plural)

Dari kontras atau perbedaan antara paradigma keteraturan dan paradigma konflik tersebut melahirkan upaya membangun sintesis keduanya yang melahirkan paradigma plural. Paradigma plural memandang manusia sebagai sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas serta otonomi untuk melakukan pemaknaan dan menafsirkan realitas sosial yang ada disekitarnya. Untuk memahami pola pemikiran paradigma plural dapat dilihat skema berikut:

Elemen paradigmatis	Asumsi dasar	Type ideal
Imajinasi sifat dasar manusia	Manusia bertindak atas kesadaran subyektif, memiliki kebebasan menafsirkan realitas/aktif	Konsep kesadaran diri immanuel kant
Imajinasi tentang masyarakat	Struktur internal yang membentuk kesadaran manusia, kontrak sosial sebagai mekanisme control.	Konsep kontrak sosial J.J Rousseau
Imajinasi ilmu pengetahuan	Filsafat idealisme, tindakan manusia tidak dapat diprediksi	Metode verstehen Weber

Terbentuknya Paradigma Kritis

Ketiga paradigma di atas merupakan pijakan-pijakan untuk membangun paradigma baru. Dari optik pertumbuhan teori sosiologi telah lahir Paradigma kritis setelah dilakukan elaborasi antara paradigma pluralis dan paradigma konflik. Paradigma pluralis memberikan dasar pada paradigma kritis terkait dengan asumsinya bahwa manusia merupakan sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas untuk menafsirkan realitas. Sedangkan paradigma konflik mempertajam paradigma kritis dengan asumsinya tentang adanya pembongkaran atas dominasi satu kelompok pada kelompok yang lain.

Apabila disimpulkan apa yang disebut dengan paradigma kritis adalah paradigma yang dalam melakukan tafsir sosial atau pembacaan terhadap realitas masyarakat bertumpu pada:

1. Analisis struktural: membaca format politik, format ekonomi dan politik hukum suatu masyarakat, untuk menelusuri nalar dan mekanisme sosialnya untuk membongkar pola dan relasi sosial yang hegemonik, dominatif, dan eksploitatif.
2. Analisis ekonomi untuk menemukan fariabel ekonomi politik baik pada level nasional maupun internasional.

3. Analisis kritis yang membongkar “the dominant ideology” baik itu berakar pada agama, nilai-nilai adat, ilmu atau filsafat. Membongkar logika dan mekanisme formasi suatu wacana resmi dan pola-pola eksklusi antar wacana.
4. Psikoanalisis yang akan membongkar kesadaran palsu di masyarakat.
5. Analisis kesejarahan yang menelusuri dialektika antar tesis-tesis sejarah, ideologi, filsafat, actor-aktor sejarah baik dalam level individual maupun sosial, kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat.

Kritis dan Transformatif

Namun Paradigma kritis baru menjawab pertanyaan: struktur formasi sosial seperti apa yang sekarang sedang bekerja. Ini baru sampai pada logika dan mekanisme *working-sistem* yang menciptakan relasi tidak adil, hegemonik, dominatif, dan eksploitatif; namun belum mampu memberikan prespektif tentang jawaban terhadap formasi sosial tersebut; strategi mentransformasikannya; disinilah “Term Transformatif” melengkapi teori kritis. Dalam perspektif Transformatif dianut epistemologi perubahan non-esensialis. Perubahan yang tidak hanya menumpukan pada revolusi politik atau perubahan yang bertumpu pada agen tunggal sejarah; entah kaum miskin kota (KMK), buruh atau petani, tapi perubahan yang serentak yang dilakukan secara bersama-sama.

Disisi lain makna tranformatif harus mampu mentranformasikan gagasan dan gerakan sampai pada wilayah tindakan praksis ke masyarakat. Model-model transformasi yang bisa dimanifestasikan pada dataran praksis antara lain:

1. Transformasi dari Elitisme ke Populisme.

Dalam model tranformasi ini digunakan model pendekatan, bahwa mahasiswa dalam melakukan gerakan sosial harus setia dan konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan, semisal isu advokasi buruh, advokasi petani, pendampingan terhadap masyarakat yang digusur akibat adanya proyek pemerintah yang sering berselingkuh dengan kekuatan pasar (kaum kapitalis) dengan pembuatan mal-mal, yang kesemuanya itu menyentuh akan kebutuhan rakyat secara riil. Fenomena yang terjadi masih banyak mahasiswa yang lebih memprioritaskan isu elit, melangit dan jauh dari apa yang dikehendaki oleh rakyat, bahkan kadang sifatnya sangat *utopis*. Oleh karena itu, kita sebagai kaum intelektual terdidik, jangan sampai tercerabut dari akar sejarah kita sendiri. Karakter gerakan mahasiswa saat ini haruslah lebih condong pada gerakan yang bersifat horisontal.

2. Transformasi dari Negara ke Masyarakat.

Model tranformasi kedua adalah transformasi dari Negara ke masyarakat. Kalau kemudian kita lacak basis teoritiknya adalah kritik yang dilakukan oleh Karl Marx terhadap G.W.F. Hegel. Hegel memaknai Negara sebagai penjelmaan roh absolute yang harus ditaati kebenarannya dalam memberikan kebijakan terhadap rakyatnya. Disamping itu, Hegel mengatakan bahwa Negara adalah satu-satunya wadah yang paling efektif untuk meredam terjadinya konflik internal secara nasional dalam satu bangsa. Hal ini dibantah Marx. Marx mengatakan bahwa justru masyarakatlah yang mempunyai otoritas penuh dalam menentukan kebijakan tertinggi. Makna transformasi ini akan sesuai jika gerakan mahasiswa bersama-sama rakyat bahu-membahu untuk terlibat secara langsung atas perubahan yang terjadi disetiap bangsa atau Negara.

3. Transformasi dari Struktur ke Kultur.

Bentuk transformasi ketiga adalah transformasi dari struktur ke kultur, yang mana hal ini akan bisa terwujud jika dalam setiap mengambil keputusan berupa kebijakan-kebijakan ini tidak sepenuhnya bersifat sentralistik seperti yang dilakukan pada masa orde baru, akan tetapi seharusnya kebijakan ini bersifat desentralistik. Jadi, aspirasi dari bawah harus dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan, hal ini karena rakyatlah yang paling mengerti akan kebutuhan, dan yang paling bersinggungan langsung dengan kerasnya benturan sosial di lapangan.

4. Transformasi dari Individu ke Massa.

Model transformasi selanjutnya adalah transformasi dari individu ke massa. Dalam disiplin ilmu sosiologi disebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang sangat membutuhkan kehadiran makhluk yang lain. Bentuk-bentuk komunalitas ini sebenarnya sudah dicita-citakan oleh para *foundhing fathers* kita tentang adanya hidup bergotong royong. Rasa egoisme dan individualisme haruslah dibuang jauh-jauh dari sifat manusia. Salah satu jargon yang pernah dikatakan oleh Tan Malaka (*Sang Nasionalis Kiri*), adalah adanya aksi massa. Hal ini tentunya setiap perubahan meniscayakan adanya *power* atau kekuatan rakyat dalam menyatukan program perjuangan menuju perubahan sosial dalam bidang apapun (*ipoleksosbudhankam*).

Paradigma Kritis Transformatif (PKT) yang diterapkan di PMII?

Dari paparan diatas, terlihat bahwa PKT sepenuhnya merupakan proses pemikiran manusia, dengan demikian dia adalah sekuler. Kenyataan ini yang membuat PMII dilematis, karena akan mendapat tuduhan sekuler jika pola pikir tersebut diberlakukan. Untuk menghindari dari tuduhan tersebut, maka diperlukan adanya reformulasi penerapan PKT dalam tubuh warga pergerakan. Dalam hal ini, paradigma kritis diberlakukan hanya sebagai kerangka berpikir dan metode analisis dalam memandang persoalan. Dengan sendirinya dia tidak dilepaskan dari ketentuan ajaran agama, sebaliknya justru ingin mengembalikan dan memfungsikan ajaran agama sebagaimana mestinya.

PKT berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari belenggu, melawan segala bentuk dominasi dan penindasan, membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonik. Semua ini adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Islam. Oleh karenanya pokok-pokok pikiran inilah yang dapat diterima sebagai titik pijak penerapan PKT di kalangan warga PMII. Contoh yang paling kongkrit dalam hal ini bisa ditunjuk pola pemikiran yang menggunakan paradigma kritis dari beberapa intelektual Islam, diantaranya Hassan Hanafi dan Arkoun.

Mengapa PMII memilih Paradigma Kritis Transformatif?

"Berpikir Kritis & Bertindak Tansformatif" itulah Jargon PMII dalam setiap membaca tafsir sosial yang sedang terjadi dalam konteks apapun. Dan ada beberapa alasan yang menyebabkan PMII harus memiliki Paradigma Kritis Transformatif sebagai dasar untuk bertindak dan mengaplikasikan pemikiran serta menyusun cara pandang dalam melakukan analisa terhadap realitas sosial. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Masyarakat Indonesia saat ini sedang terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme modern, dimana kesadaran masyarakat dikekang dan diarahkan pada satu titik yaitu budaya massa kapitalisme dan pola berpikir positivistik modernisme.
2. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk/plural, beragam, baik secara etnis, tradisi, kultur maupun kepercayaan (adanya *pluralitas society*).
3. Pemerintahan yang menggunakan sistem yang represif dan otoriter dengan pola yang hegemonik (sistem pemerintahan menggunakan paradigma keteraturan yang anti perubahan dan pro *status quo*).
4. Kuatnya belenggu dogmatisme agama, akibatnya agama menjadi kering dan beku, bahkan tidak jarang agama justru menjadi penghalang bagi kemajuan dan upaya penegakan nilai kemanusiaan.

Beberapa alasan mengenai mengapa PMII memilih Paradigma Kritis Tansformatif untuk dijadikan pisau analisis dalam menafsirkan realitas sosial. Karena pada hakekatnya dengan analisis PKT mengidealkan sebuah bentuk perubahan dari semua level dimensi kehidupan masyarakat (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan dll) secara bersama-sama. Hal ini juga tercermin dalam *imagened community* (komunitas imajiner) PMII yang mengidealkan orientasi output kader PMII yang diantaranya adalah : *Intelektual Organik, Agamawan Kritis, Profesional Lobbyier, Ekonom Cerdas, Budayawan Kritis, Politisi Tangguh, dan Praktisi Pendidikan yang Transformatif.*[]



BAGIAN KELIMA

DISKURSUS IDEOLOGI GENDER, FEMINISME DAN SEJARAH GERAKAN PEREMPUAN



Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki
dan penindasan terhadap perempuan dihapus.
(Feminisme Marxis-Friedrich Engels)

*"Terdapat sebuah kebutuhan mendesak untuk menghapus mata rantai yang masih ada, dan paksaan-
paksaan yang dengan keras membatasi kebebasan wanita sehingga ia mampu berpartisipasi
secara dinamis dan efektif dalam membangun sebuah kehidupan baru"*
(Nawal El-Sadawi, Perempuan dalam Budaya Patriarki, 2001)

Hand-Out 15 IDEOLOGI GENDER

Prawacana

Konsep penting yang harus dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (*jenis kelamin*) dan konsep gender (*konstruksi sosial*). Pemahaman terhadap perbedaan antara konsep seks dengan gender sangat diperlukan untuk melakukan analisis dan memahami persoalan-persoalan mengenai ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya kaitan antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur keadilan masyarakat secara lebih luas.

Pemahaman atas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari konsep ini telah melahirkan suatu analisis gender. Analisis gender juga ikut mempertajam analisis kritis yang sudah ada. Misalnya analisis kelas yang dikembangkan oleh Karl Marx ketika melakukan kritik terhadap sistem kapitalisme. Demikian halnya dengan analisis kritis lain seperti analisis hegemoni ideologi dan kultural yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, merupakan kritik terhadap kelas yang dianggap sangat sempit. Dalam bidang epistemologi dan riset misalnya analisis kritis (*critical theory*) dan penganut mazhab Frankfurt yang memuatkan perhatian kepada perkembangan akhir masyarakat kapitalisme dan dominasi epistemologi positivisme terutama kurang mendasar justru karena tidak ada pertanyaan tentang gender dalam kritiknya. Lahirnya epistemologi feminis dan riset feminis adalah penyempumaan dari kritis mazhab Frankfurt dengan adanya pertanyaan gender. Demikian pula analisis diskursus (*discourse analysis*) yang berangkat dari pemikiran Foucault dan Althusser yaitu merupakan kritik atas semangat reduksionisme dan anti pluralisme dari keseluruhan analisis di bawah pengaruh zaman modernisme.

Perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan cukup jelas, akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan jenis kelamin inilah menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologi (*seks*) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap jenis kelamin inilah yang disebut gender. Sesungguhnya atribut dan beban gender tidak mesti ditentukan oleh analisis biologis. Jadi dapat dibedakan antara pemilikan penis dan vagina sebagai peristiwa sosial budaya dan pemilikan penis dan vagina sebagai peristiwa biologis. Yang pertama dapat disebut alat kelamin biologis (*physical genital*) dan yang kedua dapat disebut alat kelamin budaya (*cultural genital*). Secara biologis, alat kelamin adalah konstruksi biologis karena bagian anatomi tubuh seseorang, yang tidak langsung terkait dengan keadaan sosial budaya masyarakat (*gender less*). Akan tetapi secara budaya, alat jenis kelamin menjadi faktor paling penting dalam melegitimasi atribut gender seseorang. Begitu atribut jenis kelamin kelihatan, maka pada saat itu konstruksi budaya mulai terbentuk. Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan relasi gender, seperti pembagian fungsi, peran dan status dalam masyarakat.

Aksesoris yang membedakan antara bayi laki-laki dan perempuan adalah atribut gender (*gender attribute*). Jika atribut gender sudah jelas, misalnya seorang anak mempunyai penis, maka ia dikonsepsikan sebagai anak laki-laki. Ia diberikan pakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana layaknya anak laki-laki lain. Jika mempunyai vagina, maka ia dikonsepsikan sebagai anak perempuan. Ia diberikan pakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana layaknya anak perempuan lain. Kekhususan inilah yang melekat kepada diri anak tersebut yang kemudian disebut dengan identitas gender (*gender identity*). Begitu anak dilahirkan bukan saja dijemput dengan identitas budaya tetapi juga nilai budaya, antara laki-laki dan perempuan memiliki peran budaya yang berbeda dalam masyarakat. Perbedaan peran budaya ini biasanya diistilahkan dengan beban gender (*gender Assignment*). Pola pembenaran beban gender dalam lintasan budaya masyarakat (*cross cultural society*) lebih banyak mengacu pada jenis kelamin (*sex*).

Di dalam suatu negara yang masyarakatnya kental dengan nilai-nilai budaya dan terutama nilai-nilai ajaran agama Islam, merupakan suatu konsekuensi logis, apabila nilai-nilai tersebut menjadi sumber dari pembuatan berbagai produk hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku terhadap nilai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan (baca: suami dan istri). Di dalam hukum Indonesia, kita mengenal sebuah undang-undang yang sangat strategis mengantar masalah pembagian peran ini, yakni undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974,

yang dalam pasalnya, antara lain pasal 31 dan 34 disebutkan, pria adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kemampuannya, sementara istri wajib mengantar rumah tangga sebaik-baiknya. Jadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya bisa ditinjau dari aspek sosial budaya, agama, politik, hukum, dan aspek lain yang melingkupi sendi kehidupan manusia. Keberadaan budaya masyarakat inilah yang harus dinetralisir dari segala bentuk kekerasan, sub-ordinasi dan marginalisasi terhadap hak asasi dan kehendak perempuan. Sehingga nantinya dalam proses transformasi sosial out-putnya akan terwujud masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan.

Pengertian Gender

- Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris "gender" berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku".
- Di dalam *Women Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
- Hilany M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender, an Introduction* mengatakan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketentuan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*what A given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).
- HT. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.
- Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia menekankannya sebagai konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu.
- Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "gender". Gender diartikan sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian karya yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.

Konsep gender yakni suatu hal yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural sejarah perbedaan gender (*gender difference*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara.

Perbedaan Sex dan Gender

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sedangkan sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Istilah sex berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Secara fisik biologis, laki-laki dan perempuan tidak saja dibedakan oleh identitas jenis kelamin, bentuk dan anatomi biologi lainnya, melainkan juga komposisi kimia dalam tubuh. Perbedaan yang terakhir ini menimbulkan akibat-akibat fisik biologis seperti laki-laki yang mempunyai suara lebih besar, berkumis, berjenggot, pinggul lebih ramping dan dada yang datar.

Sementara perempuan mempunyai suara lebih bening, buah dada menonjol, pinggul umumnya lebih besar dan organ reproduksi yang amat berbeda dengan laki-laki.

Implikasi Perbedaan Biologis Terhadap Manusia

Anatomi biologis dan komposisi kimia tubuh manusia memiliki beberapa keunggulan sebagaimana dapat dilihat dalam perilaku manusia. Potensi keunggulan ini menjadikan manusia sebagai penguasa di kaumi (*khalifah fil Ard*).

Perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh oleh sejumlah ilmuwan dianggap berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual masing-masing urgen, misalnya, mengidentifikasi perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan yaitu:

Laki-laki (Masculine)	Perempuan (Feminine)
Sangat agresif	Tidak selalu agresif
Obyektif	Subyektif
Lebih logis	Kurang logis
Kompetitif	Kurang kompetitif
Mendunia	Konsentrasi dirumah

Kalangan feminis dan ilmuwan Marxis menolak anggapan diatas dan menyebutnya hanya sebagai bentuk stereotipe gender. Mereka membantah adanya skematisasi perilaku manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan anatomi tubuh dan genetika antara laki-laki dan perempuan didominasi dan dipolitisir terlalu jauh sehingga seolah-olah secara substansial perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

Anggapan bahwa laki-laki lebih kuat, lebih cerdas, dan emosional, lebih stabil, sementara perempuan lemah, kurang cerdas dan emosional, kurang stabil hanyalah stereotipe gender. Para feminis menunjuk beberapa faktor yang dianggap sebagai agen pemasyarakatan (*"agent of civilization"*) stereotip gender, antara lain penganut bahwa susana keluarga, kehidupan ekonomi dan susana sosial politik.

Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender (*gender inequalities*) bagi kaum laki-laki terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau dalam pelabelan negatif kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Uraian berikut membahas secara lebih rinci masing-masing ketidakadilan gender (*gender inequalities*), sbb:

Gender dan Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan. sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya; pengusuran, bencana alam atau proses eksploitasi, namun adalah satu bentuk pemiskinan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme protes marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan kaum perempuan. Misalnya program adanya pangan atau revolusi hijau (*green revolution*) secara otonomi telah menyingkirkan kaum perempuan dan pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang timbul lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan bibit tidak lagi memungkinkan pemanenan menggunakan ani-ani padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di dan termarginalkan yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan

disawah padi musim panen. Berarti program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi rugi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur atau bahkan bangsa. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat-istiadat maupun tafsir keagamaan misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.

Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga), dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga, masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusn untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka anak-anak laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktis/ perbuatan seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

Gender dan Stereotype

Secara umum stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya, stereotype aelalu merugikan dan menimbulkan kelidakadilan. Stereotype yang diberikan kepada suatu suku bangsa tertentu misalnya Yahudi di Barat, Cina dan Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tersebut. Salah satu garis stereotype itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan (*stereotype*) yang dilakukan pada mereka. Misalnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka tiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotype ini berakibat wajar sekali bila pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotype terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotype tersebut.

Gender dan Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berawal dari berbagai sumber, namun jelas satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh bias gender ini. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak maestrim dan bentuk kejahatan yang bila dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:

Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, terrnamk dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. *Kedua*, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di rumah tangga (*domestic violence*), termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*cild abuse*). *Ketiga*, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. *Keempat*, kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang

diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. *Kelima*, kekerasan dalam bentuk propaganda pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk jenis kekerasan non-fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan obyek demikian juga dengan seseorang. *Keenam*, kekerasan dalam bentuk sterilisasi dalam Keluarga berencana (*enforced sterilization*). Keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. *Ketujuh*, adalah jenis kekerasan terselubung (*molestion*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dari berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan seperti ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bus. *Kedelapan*, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harrasment*.

Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan pelecehan seksual, diantaranya adalah:

- Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara dirasakan dengan sangat sensitif.
- Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
- Menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya.
- Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya.
- Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa seizin dari yang bersangkutan.

Gender dan Beban Kerja (*Double Burden*)

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja tersebut terjadi di berbagai tingkatan. *Pertama*, manifestasi ketidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat negara. *Kedua*, manifestasi ketidakadilan gender terjadi di tempat kerja, organisasi, maupun dunia pendidikan. *Ketiga*, manifestasi ketidakadilan gender juga terjadi pada adapt-istiadat, masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku-suku atau dalam tradisi keagamaan.

Perpektif Teori Gender

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Psikoanalisa/ Identifikasi

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun dari tiga struktur. *Pertama*, id, sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis seseorang sejak lahir, termasuk nafsu seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. *Kedua*, ego, bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur antara keinginan subyektif individual dan tuntutan obyektif realitas sosial. *Ketiga*, super ego, berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar mencari kesenangan dan kepuasan.

2. Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini berangkat dariumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut didalam masyarakat. Sebenarnya teori strukturalis dan teori fungsionalis dibedakan oleh beberapa ahli, seperti Hilany M. Lips dan SA. Shield. Teori strukturalis lebih condong ke persoalan

sosiologis, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke persoalan psikoologi. R. Dahrendorf, salah seorang pendukung teori ini, meringkaskan prinsip-prinsip teori ini:

- Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian.
- Sistem-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat mekanisme kontrol.
- Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi tetapi bagian-bagian itu dapat dipelihara dengan sendirinya atau hal itu melembaga dalam waktu yang cukup lama.
- Perubahan terjadi secara berangsur-angsur.
- Integrasi sosial dicapai melalui kesepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Sistem nilai adalah bagian yang paling stabil di dalam suatu sistem masyarakat.

3. Teori Konflik

Dalam soal gender, teori konflik diidentikkan dengan teori Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya.

Marx yang kemudian dilengkapi oleh Friedrich Engels mengemukakan satu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan, tidak disebabkan oleh perbedaan sosiologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan, dari kelas yang berkumpul dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga (*family*). Hubungan suami dan istri tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, peneras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan gender dalam masyarakat bukan karena faktor biologis atau pemberian Tuhan (*divine creation*), tetapi karena konstruksi masyarakat (*social contribution*).

4. Teori-teori Feminis

Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok sebagai berikut:

a. Feminisme Liberal

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Angeline Grimké (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia laki-laki dan perempuan, diterapkan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya.

b. Feminisme Marxis-Sosialis

Aliran ini mulai berkembang di Jerman dan Rusia dengan menampilkan beberapa tokohnya, seperti Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin ini sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam.

c. Feminisme Radikal

Aliran ini mulai muncul di awal abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan, karena teori ini jelas-jelas menguntungkan laki-laki. Lebih dari itu, di antara kaum feminis radikal ada yang lebih ekstrim, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan seksual, dalam arti kepuasan seksual juga diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolelir praktek lesbian.

d. Teori Sosio-Biologis

Teori ini dikembangkan oleh Pierre Van Den Berghe, Lionel Tiger dan Robin Fox dan intinya bahwa semua pengamalan peran jenis kelamin tercermin dari "*biogram*" dasar yang diwarnai manusia modern dari nenek moyang *primat* dan *hominid* mereka. Integritas keunggulan laki-laki tidak saja ditentukan oleh faktor biologis tetapi juga elaborasi kebudayaan atau biogram manusia. Teori ini disebut "*bio-sosial*" karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan relasi gender.

Kodrat Perempuan dalam Islam

Kodrat berasal dari bahasa Arab *qadara/qadira*, - *yaqduru/yaqdiru* - *qudratan*, Dalam kamus *Munjid fi al-lughah Wal al-A'lam*, kata ini diartikan dengan *qawiiyyun 'ala as-syai* (kuasa mengerjakan sesuatu), *ja'alajhu 'ala miqdarih* (membagi sesuatu menurut porsinya), atau *qashshara* (memendekkan/membatasi). Dari akar kata *qadara/ qadira* ini juga lahir kata *taqdir (qaddra-yuqaddira - taqdir)*.

Bagaimana sesungguhnya pandangan Islam (a-Qur'an dan Hadits) dalam menempatkan perbedaan jenis kelamin dalam konsep pranata sosial. Catatan sejarah tentang kedudukan dalam struktur sosial, khususnya masyarakat Arab pra-Islam sangat memprihatinkan. Perempuan dipandang tidak lebih dari "obyek", perlakuan seks kaum laki-laki dan dianggap sebagai beban dalam strata sosial. Itulah sebabnya, dalam budaya masyarakat Arab ketika itu bukan sesuatu yang naif untuk "menyingkirkan" perempuan dalam kehidupan dan pergaulan mereka. Tidak segan-segan mereka membunuh, bahkan mengubur anak perempuan mereka. Al-Qur'an sendiri secara langsung menyinggung hal ini dan menyindir mereka yang berpikiran picik yang menganggap anak, khususnya perempuan, hanya sebagai beban sosial dan ekonomi.

QS. Al-An'am (16): 151: ... *Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak diataranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya*".

Islam mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, bukan pembedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki., namun perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.

Dalam Islam, kaum perempuan juga memperoleh berbagai hak sebagaimana halnya kawan laki-laki.

a. Hak-Hak Dalam Bidang Politik.

Tidak ditemukan ayat/hadits yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Hal ini terdapat dalam QS. &I-Taubah (9): 71, QS. al-Mumtahanah (160): 12.

b. Hak-hak dalam Memilih Pekerjaan.

Memilih pekerjaan bagi perempuan juga tak ada larangan baik itu di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri atau secara kolektif, baik di lembaga pemerintah atau swasta. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

c. Hak memperoleh pekerjaan.

Kalimat pertama yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah kalimat perintah, yaitu perintah untuk membaca (*iqra'*). Perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan tidak hanya bagi kaum laki-laki tetapi juga perempuan "menuntut ilmu pengetahuan difardlukan kepada kaum Muslim laki-laki dan perempuan".[]

Hand-Out 16 FEMINISME

Sejarah

Gelombang Pertama

Feminisme¹² sebagai filsafat dan gerakan dapat dilacak dalam sejarah kelahirannya dengan kelahiran era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh *Lady Mary Wortley Montagu* dan *Marquis de Condorcet*. Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai *universal sisterhood*.

Kata feminisme dikreasikan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan center Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, *The Subjection of Women* (1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme Gelombang Pertama.

Pada awalnya gerakan ini memang diperlukan pada masa itu, dimana ada masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarki sifatnya. Dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan lebih-lebih politik hak-hak kaum ini biasanya memang lebih inferior ketimbang apa yang dapat dinikmati oleh laki-laki, apalagi masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris cenderung menempatkan kaum laki-laki di depan, di luar rumah dan kaum perempuan di rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang gemanya kemudian melanda Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Suasana demikian diperparah dengan adanya fundamentalisme agama yang cenderung melakukan operasi terhadap kaum perempuan. Di lingkungan agama Kristen pun ada praktek-praktek dan kotbah-kotbah yang menunjang situasi demikian, ini terlihat dalam fakta bahwa banyak gereja menolak adanya pendeta perempuan bahkan tua-tua jemaat pun hanya dapat dijabat oleh pria. Banyak kotbah-kotbah mimbar menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus 'tunduk kepada suami!'

Dari latar belakang demikianlah di Eropa berkembang gerakan untuk 'menaikkan derajat kaum perempuan' tetapi gaungnya kurang keras, baru setelah di Amerika Serikat terjadi revolusi sosial dan politik, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Di tahun 1792 Mary Wollstonecraft membuat karya tulis berjudul *Vindication of the Right of Woman* yang isinya dapat dikata meletakkan dasar prinsip-prinsip feminisme dikemudian hari. Pada tahun-tahun 1830-1840 sejalan terhadap pemberantasan praktek perbudakan, hak-hak kaum perempuan mulai diperhatikan, jam kerja dan gaji kaum ini mulai diperbaiki dan mereka diberi kesempatan ikut dalam pendidikan dan diberi hak pilih, sesuatu yang selama ini hanya dinikmati oleh kaum laki-laki.

Secara umum pada gelombang pertama dan kedua hal-hal berikut ini yang menjadi momentum perjuangannya: *gender inequality*, hak-hak perempuan, hak reproduksi, hak berpolitik, peran gender, identitas gender dan seksualitas. Gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari: rasisme, stereotyping, seksisme, penindasan perempuan, dan phallogosentrisme.

Gelombang Kedua

Setelah berakhirnya perang dunia kedua, ditandai dengan lahirnya negara-negara baru yang terbebas dari penjajah Eropa, lahirlah Feminisme Gelombang Kedua pada tahun 1960. Dengan puncak diikutsertakannya perempuan dalam hak suara parlemen. Pada tahun ini merupakan awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut mendiami ranah politik kenegaraan.

Dalam gelombang kedua ini dipelopori oleh para feminis Perancis seperti Helene Cixous (seorang Yahudi kelahiran Aljazair yang kemudian menetap di Perancis) dan Julia Kristeva (seorang

¹² Feminisme (tokohnya disebut Feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria.

Bulgaria yang kemudian menetap di Perancis) bersamaan dengan kelahiran dekonstruksionis, Derrida. Dalam *the Laugh of the Medusa*, Cixous mengkritik logosentrisme yang banyak didominasi oleh nilai-nilai maskulin. Sebagai bukan white-Anglo-American-Feminist, dia menolak esensialisme yang sedang marak di Amerika pada waktu itu. Julia Kristeva memiliki pengaruh kuat dalam wacana pos-strukturalis yang sangat dipengaruhi oleh Foucault dan Derrida.

Secara lebih spesifik, banyak feminis-individualis kulit putih, meskipun tidak semua, mengarahkan obyek penelitiannya pada perempuan-perempuan dunia ketiga. Meliputi Afrika, Asia dan Amerika Selatan. Dalam berbagai penelitian tersebut, telah terjadi pretensi universalisme perempuan sebelum memasuki konteks relasi sosial, agama, ras dan budaya. Spivak membongkar tiga teks karya sastra Barat yang identik dengan tidak adanya kesadaran sejarah kolonialisme. Mohanty membongkar beberapa peneliti feminis barat yang menjebak perempuan sebagai obyek. Dan Bell Hooks mengkritik teori feminisme Amerika sebagai sekedar kebangkitan anglo-white-american-feminism karena tidak mampu mengakomodir kehadiran black-female dalam kelahirannya.

Banyak kasus menempatkan perempuan dunia ketiga dalam konteks "*all women*". Dengan apropriasi bahwa semua perempuan adalah sama. Dalam beberapa karya sastra novelis perempuan kulit putih yang ikut dalam perjuangan feminisme masih terdapat lubang hitam, yaitu: tidak adanya representasi perempuan budak dari tanah jajahan sebagai Subyek. Penggambaran pejuang feminisme adalah yang masih mempertahankan posisi budak sebagai yang mengasuh bayi dan budak pembantu di rumah-rumah kulit putih.

Perempuan dunia ketiga tenggelam sebagai *Subaltern* yang tidak memiliki politik agensi selama sebelum dan sesudah perang dunia kedua. Selama sebelum PD II, banyak pejuang tanah terjajah Eropa yang lebih mementingkan kemerdekaan bagi laki-laki saja. Terbukti kebangkitan semua Negara-negara terjajah dipimpin oleh elit nasionalis dari kalangan pendidikan, politik dan militer yang kesemuanya adalah laki-laki. Pada era itu kelahiran feminisme gelombang kedua mengalami puncaknya. Tetapi perempuan dunia ketiga masih dalam kelompok yang bisu.

Dengan keberhasilan gelombang kedua ini, perempuan dunia pertama melihat bahwa mereka perlu menyelamatkan perempuan-perempuan dunia ketiga, dengan asumsi bahwa semua perempuan adalah sama. Dengan asumsi ini, perempuan dunia ketiga menjadi obyek analisis yang dipisah dari sejarah kolonialisasi, rasisme, seksisme, dan relasi sosial.

Perkembangan di Amerika Serikat

Gelombang feminisme di Amerika Serikat mulai lebih keras bergaung pada era perubahan dengan terbitnya buku *The Feminine Mystique* yang ditulis oleh Betty Friedan di tahun 1963. Buku ini ternyata berdampak luas, lebih-lebih setelah Betty Friedan membentuk organisasi wanita bernama *National Organization for Woman* (NOW) di tahun 1966 gemanya kemudian merambat ke segala bidang kehidupan. Dalam bidang perundangan, tulisan Betty Fredman berhasil mendorong dikeluarkannya *Equal Pay Right* (1963) sehingga kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan *Equal Right Act* (1964) dimana kaum perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang

Gerakan feminisme yang mendapatkan momentum sejarah pada 1960-an menunjukkan bahwa sistem sosial masyarakat modern dimana memiliki struktur yang pincang akibat budaya patriarkal yang sangat kental. Marginalisasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan politik, merupakan bukti konkret yang diberikan kaum feminis.

Gerakan perempuan atau feminisme berjalan terus, sekalipun sudah ada perbaikan-perbaikan, kemajuan yang dicapai gerakan ini terlihat banyak mengalami halangan. Di tahun 1967 dibentuklah *Student for a Democratic Society* (SDS) yang mengadakan konvensi nasional di Ann Arbor kemudian dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama, dari sinilah mulai muncul kelompok "feminisme radikal" dengan membentuk *Women's Liberation Workshop* yang lebih dikenal dengan singkatan "Women's Lib". Women's Lib mengamati bahwa peran kaum perempuan dalam hubungannya dengan kaum laki-laki dalam masyarakat kapitalis terutama Amerika Serikat tidak lebih seperti hubungan yang dijajah dan penjajah. Di tahun 1968 kelompok ini secara terbuka memprotes diadakannya "Miss America Pageant" di Atlantic City yang mereka anggap sebagai "pelecehan terhadap kaum wanita dan komersialisasi tubuh perempuan". Gema "pembebasan kaum

perempuan ini kemudian mendapat sambutan di mana-mana di seluruh dunia. Pada 1975, "Gender, development, dan equality" sudah dicanangkan sejak Konferensi Perempuan Sedunia Pertama di Mexico City tahun 1975. Hasil penelitian kaum feminis sosialis telah membuka wawasan gender untuk dipertimbangkan dalam pembangunan bangsa. Sejak itu, arus pengutamaan gender atau gender mainstreaming melanda dunia.

Memasuki era 1990-an, kritik feminisme masuk dalam institusi *sains* yang merupakan salah satu struktur penting dalam masyarakat modern. Termarginalisasinya peran perempuan dalam institusi sains dianggap sebagai dampak dari karakteristik patriarkal yang menempel erat dalam institusi sains. Tetapi, kritik kaum feminis terhadap institusi sains tidak berhenti pada masalah termarginalisasinya peran perempuan. Kaum feminis telah berani masuk dalam wilayah epistemologi sains untuk membongkar ideologi sains yang sangat patriarkal. Dalam kacamata ekofeminisme, sains modern merupakan representasi kaum laki-laki yang dipenuhi nafsu eksploitasi terhadap alam. Alam merupakan representasi dari kaum perempuan yang lemah, pasif, dan tak berdaya. Dengan relasi patriarkal demikian, sains modern merupakan refleksi dari sifat maskulinitas dalam memproduksi pengetahuan yang cenderung eksploitatif dan destruktif. Berangkat dari kritik tersebut, tokoh feminis seperti Hilary Rose, Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, dan Donna Haraway menawarkan suatu kemungkinan terbentuknya genre sains yang berlandas pada nilai-nilai perempuan yang anti eksploitasi dan bersifat egaliter. Gagasan itu mereka sebut sebagai sains feminis (*feminist science*).

Aliran Feminisme

1. Feminisme liberal

Apa yang disebut sebagai Feminisme Liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia -demikian menurut mereka- punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, sebagai "Feminisme Kekuatan" yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki. Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistik, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprorspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

2. Feminisme Radikal

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan ideologi "perjuangan separatisme perempuan". Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap

perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang “radikal”.

Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. “The personal is political” menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (black propaganda) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang RI no. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

3. Feminisme Post-modern

Ide Posmo-menurut anggapan mereka-ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial.

4. Feminisme anarkis

Feminisme Anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriarki-dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.

5. Feminisme Marxis

Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini—status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (private property). Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (exchange). Laki-laki mengontrol produksi untuk exchange dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari property. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat—borjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dihapus.

6. Feminisme sosialis

Sebuah paham yang berpendapat “Tak Ada Sosialisme tanpa Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa Sosialisme”. Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem kepemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisasi kepemilikan pria atas harta dan kepemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Seperti dicontohkan oleh Nancy Fraser di Amerika Serikat keluarga inti dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. Agenda perjuangan untuk memerangnya adalah menghapuskan kapitalisme

dan sistem patriarki. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.

7. Feminisme postkolonial

Dasar pandangan ini berakar di penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme postkolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat. Beverley Lindsay dalam bukunya *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class* menyatakan, "hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan."[]



**Ibu-ibu di Penjara Bukit Duri
bergambar setelah tekanan berkurang (1972)**

Hand-Out 17 SEJARAH GERAKAN PEREMPUAN

Awal Gerakan Perempuan di Dunia

Kami tidak meminta untuk diistimewakan atau berusaha merebut kekuasaan tertentu. Yang sebenarnya kami inginkan adalah sederhana, bahwa, mereka mengangkat kaki mereka dari tubuh kami dan membiarkan kami berdiri tegap sama seperti manusia lainnya yang diciptakan Tuhan (Sarah Grimke, 1837). Awal gerakan perempuan di dunia tercatat di tahun 1800-an. Ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Karenanya gerakan perempuan awal ini lebih mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu. Tokoh-tokoh perempuan ketika itu antara lain Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollstonecraft. Bertahun-tahun mereka berjuang, turun jalan dan 200 aktivis perempuan sempat ditahan, ketika itu.

Seratus tahun kemudian, perempuan-perempuan kelas menengah abad industrialisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat. Mereka mulai keluar rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban para perempuan. Pada saat itu benih-benih feminisme mulai muncul, meski dibutuhkan seratus tahun lagi untuk menghadirkan seorang feminis yang dapat menulis secara teoritis tentang persoalan perempuan. Adalah Simone de Beauvoir, seorang filsuf Perancis yang menghasilkan karya pertama berjudul *The Second Sex*. Dua puluh tahun setelah kemunculan buku itu, pergerakan perempuan barat mengalami kemajuan yang pesat. Persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka. Pergerakan perempuan baik di tahun 1800-an maupun 1970-an telah membawa dampak luar biasa dalam kehidupan sehari-hari perempuan. Tetapi bukan berarti perjuangan perempuan berhenti sampai di situ. Wacana-wacana baru terus bermunculan hingga kini. Perjuangan perempuan adalah perjuangan tersulit dan terlama, berbeda dengan perjuangan kemerdekaan atau rasial. Musuh perempuan seringkali tidak berbentuk dan bersembunyi dalam kamar-kamar pribadi. Karena perjuangan kesetaraan perempuan tetap akan bergulir sampai kami berdiri tegap seperti manusia lainnya yang diciptakan Tuhan.

Aliran-Aliran Gerakan Perempuan

Gerakan perempuan tidak pernah mengalami keseragaman di muka bumi ini. Antara satu negara dan satu budaya dengan negara dan budaya lain, memiliki pola yang kadang berbeda, bahkan ambivalen. Feminisme sebagai sebuah isme dalam perjuangan gerakan perempuan juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat. Ide atau gagasan para feminis yang berbeda di tiap negara ini misalnya tampak pada para feminis Itali yang justru memutuskan diri untuk menjadi oposan dari pendefinisian kata feminisme yang berkembang di barat pada umumnya. Mereka tidak terlalu setuju dengan konsep yang mengatakan bahwa dengan membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan di ranah publik, akan berdampak timbulnya kesetaraan. Para feminis Itali lebih banyak menyupayakan pelayanan-pelayanan sosial dan hak-hak perempuan sebagai ibu, istri dan pekerja. Mereka memiliki UDI (Unione Donne Italiane) yang setara dan sebesar NOW (National Organization for Women) di Amerika Serikat. Pola penekanan perjuangan feminis Itali ini mengingatkan kita pada gaya perjuangan perempuan di banom-banom NU di Indonesia.

Hal yang sedikit berbeda terjadi di Perancis. Umumnya feminis di sana menolak dijuluki sebagai feminis. Para perempuan yang tergabung dalam *Mouvement de liberation des femmes* ini lebih berbasis pada psikoanalisa dan kritik sosial. Di Inggris pun tokoh-tokoh seperti Juliet Mitchell dan Ann Oakley termasuk menentang klaim-klaim biologis yang dilontarkan para feminis radikal dan liberal yang menjadi tren di tahun 60-an. Bagi mereka, yang bisa menjadi pemersatu kaum perempuan adalah konstruksi sosial bukan semata kodrat biologinya. Di dunia Arab, istilah feminisme dan feminis tertolak lebih karena faktor image barat yang melekat pada istilah tersebut. Pejuang feminis di sana menyiasati masalah ini dengan menggunakan istilah yang lebih Arab atau Islam seperti *Nisa'i* atau *Nisaism*.

Meski kemudian definisi feminisme banyak mengalami pergeseran, namun rata-rata feminis tetap melihat bahwa setiap konsep, entah itu dari kubu liberal, radikal maupun sosialis tetap

beraliansi secara subordinat terhadap ideologi politik tertentu. Dan konflik yang terjadi di antara feminis itu sendiri sering disebabkan diksi politik konvensional melawan yang moderat. Misalnya konsep otonomi dari kubu feminis radikal berkaitan dengan gerakan antikolonial, sementara kubu feminis liberal menekankan pada pentingnya memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan dalam kerangka bermasyarakat dan berpolitik yang plural. Inilah mengapa feminis selalu bercampur dengan tradisi politik yang dominan di suatu masa. Hingga bila dipilah-pilah berdasarkan tradisi politik yang berkembang, maka aliran-aliran dalam feminisme dapat dibedakan ke dalam kubu-kubu sebagai berikut:

1. Feminisme Radikal
2. Feminisme Liberal. (Keduanya lebih mengedepankan klaim-klaim biologis, dan dikenal sebagai kelompok feminis-ideologis).
3. Feminisme Sosialis atau Feminisme Marxis: perempuan lebih dipandang dari sudut teori kelas, sebagai kelas masyarakat yang tertindas.
4. Feminisme Ras atau Feminisme Etnis: yang lebih mengedepankan persoalan perbedaan perlakuan terhadap perempuan kulit berwarna. Di luar kecenderungan tradisi politik di atas, berkembang pula ragam feminisme karena pendekatan teori dan kecenderungan kelompok sosial tertentu, seperti:
5. Feminisme Psikoanalisis, dan Feminisme Lesbian.

Dari semua aliran yang ada di atas, masih berpotensi untuk berkembang menjadi beberapa beberapa sempalan aliran lain, dan seperti yang telah diungkapkan di atas, wacana feminisme dan gerakan perempuan akan terus berkembang seiring dengan ragam perkembangan kelas masyarakat yang memperjuangkannya, kecenderungan kondisi sosial politik, serta kepentingan yang membingkai perjuangan tersebut. Namun ada dua kategori kecenderungan besar yang dapat disebutkan dan cukup dikenal dan berpengaruh hingga sekarang, yakni: feminisme ortodoks dan post-feminisme.

Feminisme ortodoks

Atau dikenal sebagai feminisme gelombang kedua, berkarakter sangat fanatik dan ortodoks dengan penjelasan-penjelasan wacana patriarkhal. Kaum feminis garis keras ini begitu yakin bahwa segala sesuatu yang menyusahkan dan menindas perempuan berhubungan dengan patriarkhal, hingga segala argumen hanya bertumpu pada penjelasan patriarkhal. Camille Paglia seorang profesor studi kemanusiaan dari Universitas Philadelphia mengkritik sikap feminis ortodoks sebagai kelompok yang selalu menganggap perempuan sebagai korban. Bagi kalangan feminis ortodoks feminisme diartikan sebagai identifikasi dengan keinginan kesetaraan gender lewat perjuangan historis yang dicapai dengan advokasi melalui kegiatan politik. Feminisme memperlihatkan adanya perbedaan antara feminin dan maskulin yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Sedangkan jantan (male) dan betina (female) merupakan aspek biologis yang menentukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan linguistik ini bagi feminis ortodoks dianggap sebagai sesuatu yang ideologis. Sedangkan bagi kalangan postfeminisme dianggap sebagai masalah.

Contoh dalam penanganan kasus pemerkosaan atau kekerasan terhadap perempuan misalnya, mereka akan mengandalkan argumen-argumen kelemahan perempuan, korban yang harus selalu dilindungi dan selalu mengalami ketidakadilan dari masyarakat yang patriarkhal. Argumen semacam ini terkesan manipulatif dan tidak bertanggung jawab. Kalangan ini banyak diwakili oleh feminis revolusioner (FR) yang berdiri sejak tahun 1970 yang merupakan bagian dari *Movement de Libération des Femmes (MLF)* atau gerakan pembebasan perempuan. Kelompok FR ini tidak menggunakan pendekatan psikoanalisa dan sangat mengagungkan kesetaraan serta rata-rata didukung kalangan lesbian. Teori dasar kelompok FR adalah menentang determinisme biologis, yaitu perempuan ter subordinasi dengan norma-norma maskulin, karena haluan ini (determinisme biologis) menurut mereka merujuk pada pandangan tradisional esensialisme. Teori ini (tradisional esensial) menekankan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan adalah fixed atau kodrat yang tidak dapat berubah. Sementara menurut FR perbedaan terjadi karena masyarakat patriarkhi menganggap perempuan sebagai "the other" dalam tataran biologis dan psikis.

Post-Feminisme

Kecenderungan feminisme ortodoks yang selalu melihat perempuan sebagai makhluk lemah tak berdaya dan korban laki-laki ini, tidak dapat diterima oleh perempuan-perempuan muda tahun 1900-an dan 2000 di beberapa negara maju. Retorika feminisme yang melekat pada “ibu-ibu” mereka terutama di tahun 70-an di daratan Amerika dan Inggris telah membuat generasi muda “bosan” dengan feminisme. Feminisme sekan menjadi ukuran moralistik dan politik seseorang dan menjadi pergerakan kaum histeris, serta sangat mudah untuk menuduh dan melabeling seseorang dengan atribut “tidak feminis”. Kelompok inilah yang kemudian memperjuangkan post-feminisme. Bahkan embrio kelompok ini sudah mulai muncul di tahun 1968 di Paris, tepatnya ketika mereka (kelompok anggota *po et psych/ politique et psychoanalyse*) turun ke jalan pada Hari Perempuan tanggal 8 Maret 1968 dan meneriakkan: *Down with feminism*. Sejak tahun 1960 kelompok postfeminis ini telah berusaha mendekonstruksi wacana patriarkhal terutama wacana yang dikembangkan oleh feminis *revolutionnaires* (FR).

Bagi kelompok *po et psych*, posisi FR yang memakai semangat humanisme, jatuh lagi pada esensialisme yang mempunyai kategori *fixed*. Oleh karenanya *po et psych* mengadopsi teori psikoanalisa Freud yang mencoba menggunakan metode dekonstruksi dalam melihat teks-teks ketertindasan perempuan. Selain itu kelompok ini tidak menekankan pada kesetaraan (*equality*) seperti kelompok FR, yaitu identitas dan gender, tetapi lebih menekankan pada perbedaan (*diffrence*). Di sini dapat dipahami bila postfeminisme membawa paradigma baru dalam feminisme, dari perdebatan seputar kesetaraan ke perdebatan seputar perbedaan. Bagaimana perkembangan aliran feminisme di Indonesia? Dapat dikatakan Indonesia masih mengalami euforia feminisme. Dan seperti euforia lainnya, terkesan masih norak dengan situasi yang baru, Feminis di Indonesia reaktif seperti feminis di barat di era 60-an dan 70-an.

Gerakan Perempuan Di Indonesia

Ketika masa prakemerdekaan, gerakan perempuan di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang rata-rata berasal dari kalangan atas, seperti: Kartini, Dewi Sartika, Cut Nya’ Dien dan lain-lain. Mereka berjuang mereaksi kondisi perempuan di lingkungannya. Perlu dipahami bila model gerakan Dewi Sartika dan Kartini lebih ke pendidikan dan itu pun baru upaya melek huruf dan mempersiapkan perempuan sebagai calon ibu yang terampil, karena baru sebatas itulah yang memungkinkan untuk dilakukan di masa itu. Sementara Cut Nya’ Dien yang hidup di lingkungan yang tidak sepatriarkhi Jawa, telah menunjukkan kesetaraan dalam perjuangan fisik tanpa batasan gender. Apapun, mereka adalah peletak dasar perjuangan perempuan kini.

Di masa kemerdekaan dan masa Orde Lama, gerakan perempuan terbilang cukup dinamis dan memiliki bergaining cukup tinggi. Dan kondisi semacam ini mulai tumbang sejak Orde Baru berkuasa. Bahkan mungkin perlu dipertanyakan: adakah gerakan perempuan di masa rejim orde baru? Bila menggunakan definisi tradisional di mana gerakan perempuan diharuskan berbasis massa, maka sulit dikatakan ada gerakan perempuan ketika itu. Apalagi bila definisi tradisional ini dikaitkan dengan batasan ala Alvarez yang memandang gerakan perempuan sebagai sebagai sebuah gerakan sosial dan politik dengan anggota sebagian besar perempuan yang memperjuangkan keadilan gender. Dan Alvarez tidak mengikutkan organisasi perempuan milik pemerintah atau organisasi perempuan milik parpol serta organisasi perempuan di bawah payung organisasi lain dalam definisinya ini. Namun definisi baru gerakan perempuan tidak seketat ini, hingga dapat disimpulkan di masa Orba pun telah muncul gerakan perempuan. Salah satu buktinya adalah munculnya diskursus seputar penggunaan istilah perempuan untuk menggantikan istilah wanita. Gerakan perempuan di masa rejim otoriter Orba muncul sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor politik makro dan mikro. Faktor-faktor politik makro berhubungan dengan politik gender orba dan proses demokratisasi yang semakin menguat di akhir tahun 80-an. Sedangkan faktor politik mikro berkaitan dengan wacana tentang perempuan yang mengkerangkakan perspektif gerakan perempuan masa pemerintahan Orba. Wacana-wacana ini termasuk pendekatan *Women in Development* (WID) yang telah mendominasi politik gender Orba sejak tahun 70-an, juga wacana feminisme yang dikenal oleh kalangan terbatas (kampus/akademinis) dan ornop.

Politik Gender dari Rezim Orba

Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, pemerintahan Orba diidentikkan dengan peratutaran yang otoriter yang tersentralisasi dari militer dan tidak dikutsertakannya partisipasi efektif partai-partai politik dalam proses pembuatan keputusan. Anders Uhlén berpendapat bahwa selain dominasi negara atas masyarakat sipil, struktur ekonomi dan politik global, struktur kelas, pembelahan atas dasar etnis dan agama, maka hubungan gender juga mendukung kelanggengan kekuasaan rejim Orba. Untuk memahami politik gender ini sangat penting, menganalisis bagaimana rejim Orba ini berhubungan dengan hubungan-hubungan gender sejak ia berkuasa setelah peristiwa 1965. Rejim Orba dibangun di atas kemampuannya untuk memulihkan ketertaturan. Pembunuhan besar-besaran berskala luas yang muncul digunakan untuk memperkuat kesan di masyarakat Indonesia bahwa Orba adalah kacau balau dan tak beraturan. Rejim Orba secara terus-menerus dan sistematis mempropagandakan komunis adalah amoral dan anti agama serta penyebab kekacauan. Seterusnya Gerwani sebagai bagian dari PKI juga menjadi alat untuk menciptakan pondasi politik gender yang secara mendasar mendelegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik. Kampanye ini ternyata tidak hanya menghancurkan komunis, tetapi juga menghancurkan gerakan perempuan. Kodrat menjadi kata kunci, khususnya dalam mensubordinasi perempuan. Orba mengkonstruksikan sebuah ideologi gender yang mendasarkan diri pada ibusime, sebuah paham yang melihat kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari peranannya sebagai ibu dan partisipasi perempuan dalam politik sebagai tak layak. Politik gender ini termanifestasikan dalam dokumen-dokumen negara, seperti GBHN, UU Perkawinan No. 1/1974 dan Panca Dharma Wanita.

Dalam usaha untuk memperkuat politik gender tersebut, pemerintah Orba merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah pada tahun 1974. Organisasi-organisasi ini (Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK) membantu pemerintah menyebarkan ideologi gender ala Orba. Gender politik ini telah diwarnai pendekatan WID sejak tahun 70-an. Ini dapat dilihat pada Repelita kedua yang menekankan pada "partisipasi populer" dalam pembangunan, dan mengkonsentrasikan pada membawa perempuan supaya lebih terlibat pada proses pembangunan. Di bawah rejim otoriter, implikasi politik gender ini ternyata sangat jauh, tidak sekedar mendomestikasi perempuan, pemisahan dan depolitisasi perempuan, tetapi juga telah menggunakan tubuh perempuan sebagai instrumen-instrumen untuk tujuan ekonomi politik. Ini nampak pada program KB yang dipaksakan untuk "hanya" perempuan dengan ongkos yang tinggi, yang khususnya dirasakan oleh perempuan kalangan bawah di pedesaan. Ringkasnya politik gender Orba telah berhasil membawa perempuan Indonesia sebagai kelompok yang homogen apolitis dan mendukung peraturan otoritarian.

Gerakan Perempuan Masa Reformasi

Bila sistem pemerintahan yang semakin demokratis dianggap paling kondusif bagi pemberdayaan perempuan, maka di era reformasi ini semestinya pemberdayaan perempuan di Indonesia semakin menemukan bentuknya. Bila ukuran telah berdayanya perempuan di Indonesia dilihat dari kuantitas peran di sejumlah jabatan strategis, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, justru ada penurunan di bandingkan masa-masa akhir rejim Orba. Namun, secara kualitatif, peran perempuan itu semakin diperhitungkan juga di pos-pos strategis, seperti yang tampak pada komposisi kabinet kita sekarang. Ini dapat digunakan untuk menjustifikasi, bahwa mungkin saja kualitas perempuan Indonesia semakin diperbaiki. Hanya saja harus tetap diakui bahwa angka-angka peranan perempuan di sektor strategis tersebut tidak secara otomatis menggambarkan kondisi perempuan di seluruh tanah air. Bukti nyata adalah angka kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi. Bila pada jaman lampau kekerasan masih berbasis kepatuhan dan dominasi oleh pihak yang lebih berkuasa dalam struktur negara dan budaya (termasuk dalam rumah tangga), maka kini diperlengkap dengan basis industrialisasi yang mensupport perempuan menjadi semacam komoditas.[]

Hand-Out 18

SEJARAH GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA SEBELUM KEMERDEKAAN

Politik Etis Adalah Pedang Bermata Dua

Pada awalnya ia dimaksudkan untuk meninggikan daya beli rakyat Hindia Belanda, serta menghasilkan buruh-buruh murah dan birokrat rendahan yang cukup terdidik dari rakyat tanah jajahan. Ternyata, pembukaan sekolah-sekolah belanda untuk elite pribumi dan para ningrat kelas dua seperti Soekarno, menghasilkan sekumpulan orang-orang muda berpendidikan barat yang nantinya akan menjadi tulang punggung gerakan pembebasan nasional.

Perkebunan dan sawah-sawah lalu disirami dengan air dari bendungan irigasi yang dibangun oleh penjajah belanda. Para pemuda kitapun berbondong-bondong memasuki sekolah rakyat, HIS, MULO dan HBS, hingga sekolah dokter (STOVIA), dan sekolah guru (kweekschool). Pencerahan datang. Buku-buku berbahasa belanda dan Inggris membuka mata dan hati tentang perjuangan pembebasan nasional diseluruh negeri di bumi ini. Pencerahan menggugat orang-orang muda untuk berkumpul, bicara, berdiskusi dan menentukan. Lahirlah organisasi. Berdiri Budi Utomo, 1908.

Namun, jauh sebelum sejumlah priyayi terdidik jawa mengumumkan Budi Utomo, perjuangan melawan belanda telah dimulai dimana-mana. Bukan untuk pembebasan Indonesia, karena ia belum lahir sebagai sebuah realitas, tetapi untuk membebaskan tanah leluhur, gunung-gunung, bukit, sungai, pulau dan rakyatnya. Diakhir abad ke-19, perempuan-perempuan muda terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah. Sebatas membantu suami pada awalnya, tetapi kemudian sungguh-sungguh menjadi pemimpin pasukannya. Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia, Chistina Martha Tiahahu bersama Kapitan Pattimura, Emmy Saelan mendampingi Monginsidi, serta Roro Gusik bersama Surapati. Lalu ada Wolanda Maramis dan Nyi Ageng Serang. Gagasan kesetaraan gender belum ada, dan sama sekali belum menjadi kesadaran. Namun yang menarik adalah kebanyakan dari para perempuan ini adalah juga kaum bangsawan, para ningrat dengan status sosial lebih tinggi dibandingkan para "kawula" yang bertelanjang dada itu dan coklat hitam itu. Ini bisa dipahami, karena beberapa memilih angkat senjata sebab tanah-tanah keluarganya diserobot oleh kompeni. Terusik, karena pemilikannya terganggu. Tak perlu masuk sekolah belanda untuk membangun gerakan nasional, para perempuan ini angkat senjata dengan gigih, dan membayar nyawanya ditang gantungan seperti Tiahahu.

Kartini

Lalu, beberapa belas tahun sebelum Budi Utomo hadir, Kartini yang manis itu telah menulis surat-suratnya. Menyala-nyala dengan cita-cita dan keinginan untuk belajar dan bebas, kartini harus menerima kenyataan hanya disekolahkan hingga usia 12 tahun. Bahasa belanda telah dikuasai, maka energi, gairah, kekecewaan dan angan-angannya disalurkan lewat surat-suratnya—yang mengejutkan—begitu indah dan puitis. Berbagai literatur yang memuat tulisan tentang Kartini menyatakan bahwa, gagasan-gagasan utama Kartini adalah meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan, baik dari kalangan miskin maupun atas, serta reformasi sistem perkawinan, dalam hal ini menolak poligami yang dianggap merendahkan perempuan. Namun dalam *Panggil Aku Kartini Saja* yang ditulis oleh Pramoedya tergambar bahwa gagasan dan cita-cita Kartini lebih dalam. Lebih tinggi dan lebih luas daripada sekedar mencerdaskan kaum perempuan dan memperjuangkan monogami (meskipun hal ini sentral dari praktek perjuangan). Kartini, bagi Pram adalah feminis yang anti kolonialis dan anti feodalisme. Hingga ketulang sum-sumnya.

Surat-suratnya kepada Stella Zeehandelaar, seorang feminis sosialis dari belanda, banyak yang telah dihancurkan. Justru percakapan tertulis dengan Stella-lah yang banyak membuka mata dan hati kartini terhadap masalah perempuan dan pembebasannya. Juga memahat secara perlahan-lahan penolakan akan dominasi golongan feodal terhadap rakyat kecil. Surat kartini yang secara khusus membahas buku Auguste Bebel *de Vrouw en Socialisme* dihapus oleh Abendanon karena kepentingan kolonialnya. Kartini banyak menerima buku-buku progresif semacam ini dari sahabatnya H.H van kol, seorang sosialis demokrat anggota *Tweede Kamer*. Mungkin dari surat-surat itu, gambaran yang lebih utuh tentang pikiran-pikiran politik putri jepara yang tak ingin dipanggil dengan gelarnya itu, bisa lebih utuh. Pram mampu memberikan perimbangan kepada distorsi yang

telah merajalela selama ini terhadap sosok kartini—mulai dari mitosisasi Kartini, hingga reduksi terhadap gagasan-gagasannya.

Satu hal yang juga perlu dicatat adalah saat Kartini menulis suratnya, sentimen nasionalisme yang terorganisir belum muncul. Organisasi pertama kaum buruh SS Bond, baru hadir tahun 1905, setahun setelah kematian Kartini. Tradisi menggunakan media surat kabar dan terbitan untuk menyebarluaskan propaganda, belum timbul. Karya jurnalisme awal dari sang pemula (Tirto Adhi Suryo), Medan Prijaji, baru terbit tahun 1906. referensi dari gagasan-gagasan orisinil Kartini berasal dari berbagai literatur berbahasa belanda yang dibaca kartini dalam masa pingitannya, serta korespondensinya dengan khususnya Stella.. adalah satu hal luar biasa bahwa kartini yang sendirian, terisolasi dan merasa sunyi itu mampu membangun satu gagasan politik yang progresif untuk zamannya, baik menyangkut kaum perempuan maupun para kawula miskin tanah jajahan. Gagasan-gagasan ini lalu diikuti oleh beberapa tokoh perempuan lainnya, seperti dewi sartika dan Rohina Kudus. Namun, Kartini tetaplah Sang Pemula, yang mengawali seluruh tradisi intelektual Gerakan Perempuan Indonesia, berikut gagasan paling awal dalam melihat ketertindasan rakyat dibawah feodalisme dan kapitalisme. Nasib tragis Kartini menjadi salah satu petunjuk bahwa tak ada jalan baginya untuk membangun perjuangan dengan cara lain yang lebih kuat dan efektif. Zaman berorganisasi belum terbit.

Pembebasan Nasional

Alangkah besarnya sumbangan yang diberikan oleh Gerakan Pembebasan Nasional kepada perkembangan gerakan perempuan. Disatu sisi, berbagai oarganisasi nasional maupun partai politik saat itu berupaya membangun sayap perempuannya sendiri, ataupun mendukung dan didukung oleh perjuangan perempuan disatu sektor atau kelas tertentu. Disisi lain, perkembangan gerakan berbasis agama seperti muhammadiyah, turut pula membentuk polarisasi dalam gerakan perempuan. Berbagai jurnalisme pun bertebaran, bukan hanya dalam belanda, tetapi terutama dalam bahasa melayu. Gairah nasionalisme tengah mencari jalan memodernisasi dirinya. Saat Sarekat Dagang Islam mengubah namanya menjadi Sarekat Islam, bulan september 1912, maka watak organisasi pun berubah. Dari yang semula didominasi oleh kaum borjuis kecil pedagang batik kelontong Solo dan sekitarnya yang mengorganisir diri untuk menghadapi pedagang Cina, kini keanggotaanya menjadi lebih massif, lebih terbuka, dan konsekuensinya, lebih politis. Alasan-alasan komersial yang melandasi pendiriannya dulu telah memudar, karena muncul kebutuhan rakyat jajahan, khususnya di pedesaan, akan wadah untuk melakukan perlawanan. Meski arus perlawanan ini coba terus ditahan-tahan oleh para pemimpin SI yang kebanyakan berhaluan Islam modernis, agak mistik meski berpaham liberal.

Hingga Sneevliet mendarat tahun 1913, belum ada gerakan kiri di Indonesia seperti sebuah titik ditengah jutaan mil samudera, dimana puluhan negeri- negeri lainpun tengah memperjuangkan harga diri dan kemerdekaan. Cikal bakal Partai Komunis Indonesia, ISDV (Perempuan Sosial Demokrat Hindia Belanda) didirikan di tahun 1914. Semaoen yang masih sangat muda pada waktu itu, merupakan salah satu kadernya yang bersemangat dalam mengorganisir SI semarang, meski tak cukup punya uang untuk masuk sekolah Belanda. Desakan-desakan dan pengaruh kelompok kiri ditubuh SI terus membesar, dan para pimpinan moderatnya mulai kehilangan kontrol atas SI. Tahun 1921, banyak cabang SI yang membelot ke SI merah pimpinan Semaoen. SI Merah lalu menjadi SI Rakyat. Salah satu persoalan yang membuat pertikaian tajam dalam tubuh SI adalah desakan kelompok kiri untuk mengorganisir dan membela kaum buruh dan tani. Jajaran pimpinan SI menolak memberi dukungan bagi militansi perlawanan kaum buruh dan tani, yang sebagiannya adalah perempuan. Namun, aksi-aksi buruh, khususnya buruh transportasi dan perkebunan, serta aksi kaum tani terus bergolak. Sarekat rakyatpun mengorganisir berbagai demonstrasi politik buruh perempuan menuntut kenaikan upah, penghapusan buruh anak, perpanjangan kontrak maksimum, uang pensiun dan perlindungan kerja. Salah satu aksi buruh perempuan pada tahun 1926 yang diorganisir SR di semarang adalah aksi "caping kropak", dimana para buruh perkebunan perempuan berunjukrasa menuntut kesejahteraan dengan menggunakan topi bambu.

Gerakan perempuan kelas bawah yang diorganisir SI merah (kemudian SR) berada dalam posisi yang bertentangan dengan Aisyah, sayap perempuan muhammadiyah. Muhammadiyah dan aisyah yang kebanyakan anggotanya adalah tani kaya, istri tuan tanah dan borjuis kecil jogya dan

solo itu berada dalam kepentingan yang berseberangan dengan SR, yang kebanyakan anggotanya adalah buruh perempuan miskin dan tani papa. Ini merupakan awal dari pertentangan laten yang tak terdamaikan antara gerakan perempuan sayap kiri dengan kaum perempuan islam dimasa mendatang. Perbedaan tajamnya bukan hanya berdasarkan pada kepentingan kelas yang direpresentasikan oleh masing-masing kelompok, namun juga untuk isu-isu seperti poligami dan keterlibatan aktif perempuan sebagai pimpinan politik.

Pemberontakan 1926 membawa banyak korban dari para aktivis perempuan. Kali ini bukan karena sekedar membantu suami, namun disebabkan kegiatan mereka sendiri. Sukaesih dan Munasiah dari Jawa Barat, bersama dengan kawan-kawan mereka yang lain, dikirim ke kamp konsentrasi Belanda di digul Atas. Kebanyakan aktivis perempuan ini adalah anggota dari Sarekat Rakyat ataupun PKI yang berdiri tahun 1922. penjajah Belanda yang sudah lama menanti- nanti saat yang tepat untuk menghancurkan kaum radikal, melakukan pembersihan terhadap tokoh-tokoh SR dan PKI saat itu, termasuk para perempuannya. Tokoh-tokoh ini tidaklah populer seperti Kartini. Publikasi Kartini diperkenankan dan difasilitasi oleh pemerintah Belanda karena saat itu mereka membutuhkan bukti untuk menunjukkan sukses pelaksanaan politik etisnya di tanah jajahan, dengan mengusung pameran intelektualitas dan kehalusan tulisan si Putri Jepara. Meski demikian, perjuangan dkk., sangat konkrit dan revolusioner, karena bukan hanya berbicara tentang pembebasan kaum perempuan, tetapi juga perjuangan untuk sosialisme, dengan kemerdekaan sebagai jembatannya. Munasiah, misalnya dalam sebuah kongres perempuan di Semarang menyatakan bahwa: " Wanita itu mataharinya rumah tangga, itu dulu! Tapi sekarang perempuan jadi alatnya kapitalis. Padahal sejak zaman Mojopahit, wanita sudah berjuang. Sekarang adanya pelacur, itu bukan salahnya wanita. Tapi salahnya kapitalisme dan imperialisme!"

Terlepas dari perbedaan latar belakang ideologi yang dianutnya, beberapa hal penting patut jadi kesimpulan. Gagasan-gagasan feminis, berikut praktek hingga pembentukan organisasi-organisasi perempuan selama masa periode pertama gerakan perempuan Indonesia ini, ternyata pada umumnya muncul sebagai inisiatif dari kalangan perempuan menengah keatas. Mulai dari Kartini, Dewi Sartika, Putri Mardhika (yang dekat dengan budi utomo), hingga Aisyah. Hanya sayap perempuan dari Sarekat Rakyat-lah yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya dalam pengorganisasian dan membangun radikalisme perempuan miskin. Persoalan-persoalan yang diangkatpun, oleh karenanya lebih banyak menyangkut hal yang menguntungkan ataupun dapat diakses oleh perempuan menengah keatas, seperti permaduan, perdagangan anak dan kesetaraan pendidikan. Perempuan buruh dan tani telah jauh sebelumnya terlibat dalam carut marut proses produksi keji kaum kolonial semacam tanam paksa, mengalami ketertindasan dan terhina dirinya sebagai kelas proletar. Ini mirip dengan gerakan perempuan Amerika dan Eropa di abad ke-18, yang memfokuskan tuntutan pada hak untuk memilih dan dipilih (*universal suffrage*). Meski demikian, seminimal apapun pengaruhnya baik mayoritas kaum perempuan dikelas bawah, gerakan perempuan menengah ini telah mampu membuka jalan dan peluang bagi perjuangan kaum perempuan selanjutnya.

Periode Kedua Gerakan Perempuan

Saskia Wireringa, seorang feminis Indonesia yang berdiam di Belanda, menyebutnya sebagai periode kedua. Tidak dijelaskan apa yang melandasi timbulnya pembagian waktu demikian. Namun kelihatannya, pasca kehancuran PKI dan gerakan kiri 1926, ada upaya untuk mengorganisasi gerakan secara berbeda dari sebelumnya. Harus juga dilihat bahwa situasi gerakan pembebasan nasional saat itu, secara fisik dan terutama intelektual, mulai tumbuh dewasa. Perbedaan-perbedaan ideologis terumuskan dan terbaca jelas mulai strategi dan taktik yang dimunculkan, baik oleh PKI, PNI, PI, dan berbagai wadah lainnya. Tokoh-tokoh yang menjadi magnet dari gerakan ini mulai muncul dan mendapatkan tempatnya sendiri-sendiri dihati dan telinga rakyat. Namun kemajuan yang paling terang benderang adalah, dipergunakannya partai politik sebagai alat perjuangan untuk merebut kekuasaan dan membebaskan Indonesia. Zaman berpolitik ala Sarekat Islam, saat Tjokroaminoto meninabobokkan orang miskin tentang Ratu Adil dan menjebloskan agama semakin dalam kejurang mistik, telah lunglai cahayanya. Ini zaman baru. Zaman dimana teori-teori kiri, pemikiran sosial demokrat, nasionalisme dan gagasan-gagasan liberal, bahkan fasisme, menjadi bahan debat sengit dikalangan para inlander terdidik, berjas dan berdasi.

Otomatis, gerakan perempuan pun menyesuaikan dinamikanya dengan perkembangan ini. Nasionalisme menjadi gagasan yang diterima seluruh kekuatan politik yang ada, sehingga konsepsi persatuan menjadi lebih mudah untuk diwujudkan. Maka, Kongres Perempuan Indonesia nasional pertama diadakan di Yogyakarta pada bulan Desember 1928, setelah Sumpah Pemuda. Dihadiri oleh hampir 30 organisasi perempuan, kongres ini merupakan fondasi pertama gerakan perempuan, dan upaya konsolidasi dari berbagai perempuan yang ada.

Kongres pertama ini menghasilkan federasi organisasi perempuan bernama Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang setahun kemudian diubah menjadi PPII (Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia). PPII sangat giat di bidang pendidikan dan membentuk panitia penghapusan perdagangan perempuan. Perbedaan tajam dengan kelompok Islam poligami tetap timbul dan tak terdamaikan.

Mayoritas peserta Kongres datang dari perempuan kalangan atas, meskipun organisasi perempuan kiri mulai mewarnai. Kongres Perempuan II di Jakarta (1935) dan Kongres III di Bandung (1938) menunjukkan kecenderungan yang semakin populis dari gerakan perempuan. Orientasi kepada perempuan kelas bawah mulai menguat, meski dalam hal program tidak selalu konsisten. Yang memilukan adalah tidak ada satupun organisasi yang tergabung dalam Kongres Perempuan Indonesia (KPI) mengeluarkan pernyataan terbuka menolak dan melawan penjajahan kolonial, kecuali Sarekat Rakyat dan Istri Sedar. Kedua kelompok ini secara konsisten mendorong agar kaum perempuan terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Seperti yang diucapkan Soekarno pada 1932 : "Saat ini perjuangan kaum perempuan yang terpenting bukanlah demi kesetaraan, karena dibawah kolonialisme laki-laki juga tertindas. Maka, bersama-sama dengan laki-laki, memerdekakan Indonesia. Karena hanya dibawah Indonesia yang merdeka, kaum perempuan akan mendapatkan kesetaraannya". Ditengah-tengah ombak besar nasionalisme yang siang malam menyerbu mimpi-mimpi para pemuda, mayoritas kelompok lainnya memfokuskan diri semata pada pendidikan, pemberantasan buta huruf dan soal-soal keperempuanan. Meskipun hal ini juga amat penting, namun tanpa keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan, semua persoalan kesetaraan akan gagal menghasilkan pembebasan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun.

Nasionalisme vis-à-vis Feminisme?

Menurut sejumlah sejarawan feminis seperti Sakia Wieringa, sejak kongres 1928, telah terjadi tarik menarik antara kepentingan nasionalisme dan feminisme. "Persatuan Nasional" diatur diatas landasan berfikir patriarki yang masih kental, sehingga pandangan tentang konsepsi kesetaraan menjadi pragmatis, sama sekali tak mendalam. Patriarki "disembunyikan", menjadi sekunder dan samar dalam keteguhan praktek politik membebaskan barat dan laut Indonesia, karena ada prioritas-prioritas perjuangan yang lebih penting.

Disatu sisi, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Kongres Pemuda bulan Mei pada tahun yang sama (yang menelurkan Sumpah Pemuda), sesungguhnya telah memasukkan butir mengenai "pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan persatuan nasional", dari keseluruhan enam butir topik yang dibahas. Meski demikian, seluruh konsepsi tentang kesetaraan saat itu memang tersubordinasi dibawah kepentingan nasionalisme dan persatuan. Kemudian dalam Kongres Pemuda 1928, juga ada alokasi satu sesi khusus untuk membicarakan persoalan perempuan. Beberapa pembicara seperti M. Tabrani, Bahder Johan, Djaksodipoero dan Nona Adam pun memiliki pandangan yang cukup maju dalam mengkaitkan persoalan perempuan dan kemerdekaan. Meskipun dalam praktek, kesetaraan belum tentu dapat dilaksanakan.

Namun disisi lain kesenjangan memang terjadi karena masih lemahnya kemampuan gerakan perempuan saat itu untuk membangun suatu konsep perjuangan perempuan yang menyeluruh. Juga disebabkan basis massa yang masih kecil dan belum terpolitisasi dari kalangan perempuan, ditengah gerakan anti penjajahan yang menggelembung. Hanya Sarekat Rakyat dan Istri Sedar-lah kelompok perempuan yang pada waktu itu secara terbuka menolak kolonialisme dan kapitalisme. Mungkin "tarik-menarik" bukanlah istilah yang cepat, mengingat posisi gerakan perempuan memang belum semassif, sepolitik dan seefektif gerakan anti kolonial. Konsekuensinya, kesetaraan lebih dilihat sebagai tahap yang harus dibenahi demi konsolidasi persatuan nasional, ketimbang sebagai satu hak politik dan ekonomi kaum perempuan seutuhnya.

Jika melihat pengalaman gerakan perempuan Amerika Serikat dan Perancis, kedua-duanya pun timbul dan termotivasi dalam situasi revolusioner yang diciptakan oleh gerakan pembebasan nasional melawan Inggris dan Revolusi Borjuis Perancis 1789. harus dilihat bahwa gerakan perempuan tidak timbul dan berkembang sendirian, ia adalah reaksi terhadap perkembangan masyarakat dan relasi produksinya. Maka, dalam perjalanan feminisme tidak mungkin dikontradiksikan dengan arus besar nasionalisme anti kolonial, gerakan anti imperialisme dijamin Soekarno, ataupun gerakan demokrasi dan anti neoliberalisme dimasa sekarang.

Setelah Kongres Perempuan tahun 1928 itu, muncul organisasi-organisasi perempuan yang radikal dalam menentang poligini (perceraian sepihak oleh laki-laki), poligami, perkawinan anak perempuan, dan berpendirian nonkooperatif terhadap Pemerintah Kolonial, seperti Isteri Sedar. Muncul pula "sekolah-sekolah liar", yang menolak subsidi kolonial. Di sekolah-sekolah ini ditanamkan semangat cinta Tanah Air dan cita-cita kemerdekaan. Belakangan Istri Sedar menjelma menjadi Gerwis, yang merupakan cikal bakal Gerwani nantinya.

Tidak banyak tersedia data tentang para tokoh perempuan yang terlibat dalam gerakan bawah tanah melawan fasisme Jepang. Berbagai organisasi pemuda seperti Gerindo, AMI, Angkatan Muda Minyak, PRI dan terakhir Persindo (1945). Namun data tentang keterlibatan kaum perempuan dalam wadah dan laskar-laskar itu sering disebut hanya selintas saja dalam banyak literatur. Yang cukup menonjol adalah keberadaan GWS (Gerakan Wanita Sosialis), organisasi perempuan dari simpang kiri gerakan. Banyak anggota GWS saat itu yang ditangkap dan dibunuh Nippon karena berani terlibat dalam gerakan bawah tanah melawan fasisme Jepang.

SEKILAS PERJALANAN GERWANI (GERAKAN WANITA INDONESIA)¹³

Kontribusi perjuangan perempuan dimasa Rezim Soekarno telah terlihat dari sebelum kemerdekaan saja mereka sudah turut ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, namun setelah Indonesia diproklamasikan kaum pejuang dari kaum wanita ini memang ada namun tidak terlihat keberadaannya yang diakui. Sejak paruh kedua dasawarsa 1950-an panggung politik Indonesia semakin dikuasai oleh ketegangan antara tiga golongan terkemuka: Angkatan Darat, organisasi-organisasi Islam, dan golongan komunis.

Adapula sekitar tahun 1950an banyak Organisasi wanita juga yang tergabung dari wanita – wanita yang sadar akan sosial yaitu GERWIS (Gerakan Wanita Sedar) 1945 – 1950. Selain itu adapula Perwari, Wanita sosialis, Wanita Demokrat Aisyah, Muslimat NU, dan sebagainya. Namun terlihat gerakan – gerakan ini masih terlibat dirana sosial dan keperempuanan saja. Masih belum terlibat dalam rana perpolitikan Negara dan menegakkan hak – hak kaum tani, perempuan dan anak – anak. Adanya rasa kurang puas GERWIS disebabkan beberapa faktor. Pertama, kebanyakan organisasi perempuan terbatas pada soal kewanitaan, monoton saja. Kedua, banyak mereka mempunyai program pendidikan namun bila terjadi hal – hal yang perlu diperjuangkan secara politik mereka tidak mau. Ketiga, mengenai hak – hak perempuan, tidak bergerak untuk membela perempuan dalam kejadian sehari – hari seperti kasus pemerkosaan. Keempat, tidak pernah ada aksi yang bersifat nasional secara bersama – sama. Kelima, tidak mau membicarakan menentang ijon didesa – desa, lintah darat yang memiskinkan rakyat. Sehingga beberapa gabungan wanita sadar ini tergabung untuk mengubah arah tujuan gerakan wanita lainnya. Setelah pada tanggal 4 Juni 1950 tergabunglah 7 organisasi gerakan wanita di kota Semarang, yang mana anggotanya berasal dari kalangan wanita yang berintelektual, namun tidak menutup kemungkinan wanitadari kalangan lainnya, yang penting memiliki tujuan yang sama.

Pembentukan ini diawali dengan Kongres.

- Kongres I dilaksanakan pada tanggal 17 – 22 Desember 1951 di Surabaya yang dipimpin oleh Suharti, pada kongres ini membahas tentang perluasan basis massa perempuan dan sekaligus mendiskusikan untuk pergantian nama. Diajukan untuk mengganti nama dikarenakan banyak gabungan gerakan wanita yang ikut tergabung dalam organisasi ini dan yang tergabung ini bukan hanya dari perempuan yang strata tinggi saja tapi di banyak kalangan

¹³ Nikmah, Diniah, *Gerwani Bukan PKI*, Yogyakarta: Carasvati Books, 2007, <http://videlyaesmerella.blogspot.com/2011/03/gerwani-stigma-hitam-gerakan-perempuan.html>

yang ingin turut serta dalam perjuangan wanita. Sehingga ditetapkan nama GERWANI yaitu gerakan wanita Indonesia ,karena mencakup secara keseluruhan gerakan. Memang pada awalnya mereka masih ragu akan pergantian nama namun setelah di jelaskan arah dan atujuannya maka disepakati gerakan GERWIS berubah nama menjadi GERWANI yaitu Gerakan Wanita Indonesia.

- Kongres 2 dilaksanakan pada Maret 1954 yang di ketua oleh Umi Sarjono disini mereka membahas mengenai bahasan terkait sosialis dan feminisme dengan tujuan kemakmuran. Pada kongres kali ini GERWANI mengalami pertumbuhan yang pesat dari segi massa, pada saat itu yang menghadiri kongres di cabang pusat GERWANI ada 80.000 anggota
- Kongres 3, yang dilaksanakan pada 23 – 27 Desember 1957 yaitu beberapa bulan sebelum berakhir tahun 1957 anggota GERWANI mencapai 631.342 anggota. Kongres ini masih diketuai oleh Umi Sarjono yang membahas pelayanan sosial, adanya imperialisme, kolonialisme dan feodalisme yang meneyelimuti bangsa Indonesia. Terutama diskriminasi oleh kaum – kaum borjuis terhadap kaum tani dan kaum tertindas.
- Kongres 4 yang dilaksanakan pada Desember 1961, perkembangan dan pertumbuhan organisasi gerakan perempuan ini sangatlah pesat, ini dikarenakan anggota Gerwani sekarang 1.125.000 anggota. Pada kongres 4 berlangsung Presiden Soekarno dan Pimpinan PKI (Partai Komunis Indonesia) DN. Aidit memberikan sambutannya. Presiden disana memberikan pujian bahwasanya gerakan GERWANI dapat tumbuh dan berkembang dalam kepentingan social serta kesejahteraan rakyat.

Namun pada tahun 1965 GERWANI ingin melaksanakan kongres yang ke V namun pada rezim Soeharto GERWANI di katakan organisasi terlarang, organisasi yang anggotanya adalah pelacur, organisasi bangsat dan atheis yang tidak menseminkan wanita Indonesia yang lemah lembut, serta berbudi baik. Hal ini dikarenakan GERWANI diduga terlibat pada G30S yaitu pembunuhan 7 Jenderal di lubang Buaya, mereka di duga melakukan tarian seks, siksaan, pemotongan alat kelamin, padahal sebenarnya para GERWANI ini sedang melaksanakan latihan sukarelawan penggayangan Malaysia. Mereka melihat para tentara membawa tujuh jendral itu, menembaknya walau jendral itu sudah tak bernyawa mereka masih saja ditembaki dan dimasukkan kedalam lubang buaya. Dari cerita salah satu istri prajurit Cakrabirawa. GERWANI merupakan organisasi besar yang sangat berpengaruh pada sejarah bangsa Indonesia. Berani dan dianggap berbahaya oleh kaum penguasa rezim Soeharto. Sehingga diikatakanlah Organisasi Terlarang !! Tidak hanya kaum perempuan GERWAN ditiadakan tapi kaum tertindas lainnya.

Tujuan GERWANI

Perlu kita ketahui GERWANI memiliki tujuan yaitu anti imprealisme yaitu adanya investor asing, penayangan film AS yang akan merusak moral, dan kepentingan asing yang akan merugikan Indonesia. Tujuan ini sejalan dengan kaum komunis yaitu PKI, sehingga GERWANI dan PKI sama secara ideologisnya. Disetiap tahun Gerwani semakin mamiliki banyak anggotanya bahkan kader dari GERWANI ikut dalam Pemilihan Umumnya itu menjadi anggota MPRS dan DPRGR pada tahun 1959. Pada anggota DPRGR terdapat 12 orang, MPRS 15 orang, selain itu GERWANI banyak memberikan kontibusinya dalam kegiatan sosial, kemaslatan umat seperti membuat kursus ketiadaan buta huruf, TK, Penitipan anak, kursus kader dan tugas sukarelawan. GERWANI juga ikut terlibat dalam penyelamatan Irian Barat yang sekarang menjadi nama Irian Jaya (papua).

Kini GERWANI telah tersebar diberbagai daerah besar di Indonesia diantaranya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Bali, Jawa dan Irian Jaya. Dan pada tahun 1961 terjadi krisis ekonomi sehingga GERWANI pada saat itu programnya lebih terfokus pada ekonomi.

Latar Belakang Berdiringnya GERWANI

Pada awalnya gerakan ini menampung gerakan – gerakan revolusioner perempuan melawan koloni – koloni belanda, namun setelah merdeka Gerwani mengarahkan arah perjuangannya pada sosial, politik, ekonomi dan umat.

Beberapa program Perjuangan GERWANI

- Pendidikan: Banyak perempuan desa yang buta huruf, sehingga dikaderisasikan, kemudian dibuka kursus – kursus yang memadai dan diwajibkan belajar kondisi daerah dan kebudayaan penduduk di daerah.
- Sosial: Hak – hak wanita diperjuangkan, hak – hak anak, sehingga wanita dan anak tidak tertindas oleh keadaan.
- Ekonomi: GERWANI sangat berhubungan dengan kaum perempuan seperti anggaran belanja untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak agar diperbesar.
- Politik: Banyaknya kader GERWANI yang terlibat langsung pada pemilihan umum tahun 1959 menjadi DPRGR dan MPRS, selain itu GERWANI peduli akan perkembangan politik Indonesia baik itu kebijakan maupun situasi hubungan luar negeri.

Memang di bandingkan organisasi lainnya program – program organisasi GERWANI lebih progresif dan aktif terutama menangani hak buruh, para petani, dan menyangkut masalah yang tidak disentuh oleh organisasi wanita yang lain sehingga dianggap berbahaya dan perlu diawasi keberadaannya. Seperti adanya program simpan pinjam, taman kanak – kanak, adanya badan – badan penyuluhan tentang perkawinan, kursus – kursus kader di berbagai tingkat organisasi, dan bekerjasama dengan BTI (Barisan Tani Indonesia) membantu aksi-aksi sepihak pendudukan tanah yang dilancarkan oleh BTI dan menuntut agar hak atas tanah juga diberikan kepada kaum perempuan. Dalam hal ini GERWANI sangat berperan aktif dalam pemberantasan buta huruf terutama kepada kaum perempuan dan turut aktif dalam peningkatan kecerdasan sosial.

GERWANI adalah organisasi terbesar yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia yang perlu kita liat sebagai referensi generasi perempuan Indonesia sekarang. GERWANI menerbitkan dua (2) majalah, Api Kartini dan Berita Gerwani. Api Kartini terutama ditujukan bagi pembaca lapisan tengah yang sedang tumbuh tidak hanya memuat tulisan-tulisan tentang masak-memasak, pengasuhan anak, mode, dan sebagainya, selain itu tentang feminisme menegenai imperilaisme (Api Kartini adalah majalah pertama di Indonesia yang menunjukkan pengaruh buruk terhadap film-film Hollywood yang bermutu rendah, dan tidak mendidik yang pada saat itu banyak beredar dan baru belakangan PKI melontarkan masalah imperialisme kebudayaan Barat), poligami, dan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan serta masalah sekitar kaum perempuan yang bekerja. Sedangkan Berita Gerwani adalah majalah intern organisasi, dengan berita-berita tentang konferensi dan organisasi perempuan di negara-negara sosialis. Itulah perjuangan wanita Indonesia yang gigih untuk kemajuan bangsa tanpa adanya ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan pada rakyat miskin. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang rela mempertahankan keadilan walau itu harus mengorbankan nyawa.

Hubungan GERWANI dengan PKI

Pada awal organisasi GERWIS, terlihat aroma komunis yang kuat. Dikarena sebagian besar perempuan GERWIS memiliki hubungan keluarga dengan kaum komunis. Apalagi tujuan PKI dan GERWANI sejalan sama –sama menyangkut sosialis sehingga semakin kuat kedekatan antara keduanya.

Namun sebenarnya walaupun sejalan pada satu tujuan partai, masalah perempuan yang diperjuangkan PKI ada diurutan ke – 9 dari 19 janji – janji PKI. Gerwani belum resmi secara legal bergabung dengan PKI, rencananya pada kongres ke V. Namun kongres V tidak terlaksana karena propaganda rezim Soeharto.

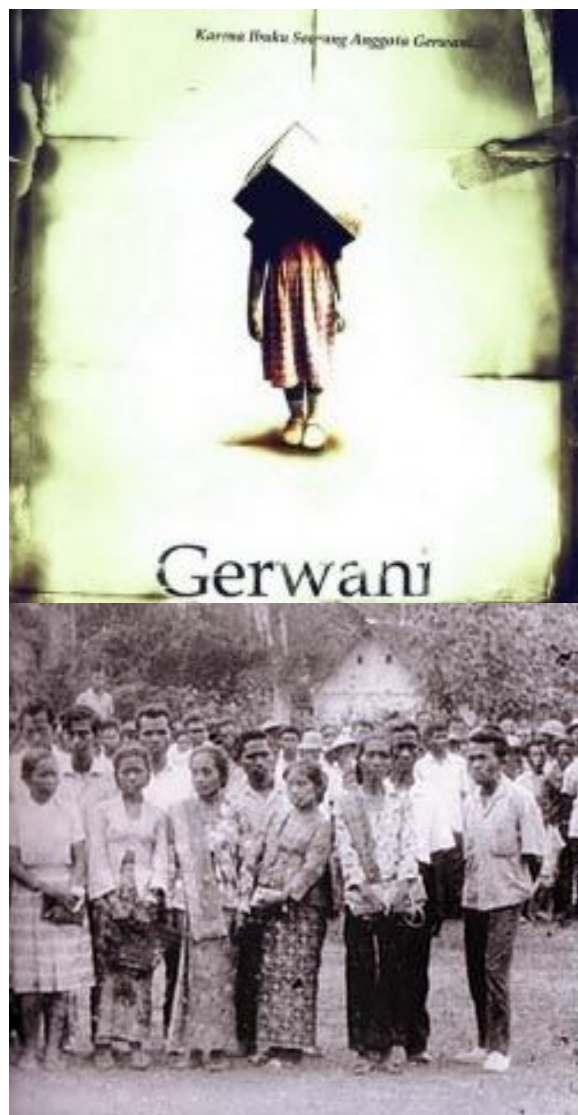
Keterlibatan GERWANI dengan peristiwa 1965

Pada saat kampanye ideologi setelah peristiwa 1965 yang berdarah – darah dilancarkan oleh rezim Soeharto dan propaganda – propaganda di media serta propaganda angkatan darat. Pada tanggal 30 September Suharti Suwarno wakil ketua DPP Gerwani (juga seorang anggota Central Komite PKI) datang dan mengatakan bahwa dibutuhkan beberapa orang untuk latihan Dwikora di Lubang Buaya. Mereka terheran karena tidak biasa dalam kegiatan GERWANI dan tidak diungkapkan dalam rapat sebelumnya. Dilokasi pun mereka bertugas menyiapkan konsumsi. Namun dipihak lain tidak terlalu aneh jika untuk kepentingan parai GERWANI akan mengutus anggotanya.

Pada kenyataannya pada latihan di Halim tidak hanya organisasi GERWANI yang ikut serta namun ada juga pemuda dan pemudi yang tergabung dalam front nasional seperti Perwari, Wanita Marhaen, Wanita Islam, Aisyah, dan Muslimat yang melaksanakan tarian – tarian untuk persiapan ASEAN GAMES. Sehingga disangkut pautkan dengan adanya gerakan pada 30 September yang menghilangkan nyawa 9 jenderal. Pertanyaannya mengapa PKI yang disangkut pautkan dengan gerakan itu? Dan mengapa GERWANI dikatakan perkumpulan wanita – wanita sadis dan tidak bpekemanusiaan? Padahal kita ketahui bahwasanya PKI adalah bagian dari Ir. Soekarno the first leader of Indonesia. Dan GERWANI adalah organisasi yang memperjuangkan kehidupan masyarakat Indonesia tentunya.

Keberadaan GERWANI dan PKI di manipulasi oleh rezim militer melalui propaganda media, mengubah sejarah pada buku sekolah, sehingga sangat melekat di memori masyarakat Indonesia saat ini bahwa GERWANI dan PKI adalah organisasi bejat. Hal ini perlu kita kritisi dan telusuri kebenaran yang sebenarnya.

Dari cerita salah seorang istri prajurit bahwasanya GERWANI yang ada pada lubang buaya yang melakukan tarian seks, pemotongan zakar dan melakukan penyiksaan itu semua **BOHONG** seperti yang di tuduhkan pada rezim soeharto.[]



**Noktah Merah Gerwani:
Hikayat Para Perempuan Perkasa!**

Hand-Out 19

ISLAM & KETERTINDASAN PEREMPUAN

Prawacana

Perjuangan menegakkan keadilan bagi hak-hak perempuan adalah perjuangan yang telah lama dimulai. Dalam Islam sendiri, banyak figur yang telah menjadi teladan dalam berkiprah dan bergerak untuk memperjuangkan hak tersebut. Siti Hajar (ibunda Nabi Ismail AS.) seorang pejuang hidup dan pengembara yang sangat tegar. Ratu Balqis pemimpin Negeri Saba' yang adil dan bijaksana serta senang bermusyawarah dengan rakyatnya. Istri Imran yang sangat peduli dengan regenerasi kepemimpinan umat. Siti Maryam (ibunda Nabi Isa AS), seorang perempuan pilihan Allah yang dijadikan sebagai bibit "Sang Penggerak" reformasi kehidupan melalui peran sejarah Nabi Isa, anak yang dikandung, diasuh, dan dikadernya. Tidak kalah hebatnya, kedua putri Nabi Syu'aib AS. yang berprofesi sebagai penggembala domba yang ulet. Menggembala domba adalah peran yang membutuhkan kekuatan, kecerdasan dan kesabaran yang menjadi wahana "diklat" para Nabi Allah. Siti Asyiah (istri Fir'aun) yang tegar menjaga iman dan moralitas dari pengaruh suami dan masyarakat di sekitarnya, serta berperan sebagai tokoh kunci penyiapan Musa kecil sebagai kader pembebasan Bani Israil. Siti Khadijah binti Khuwailid yang berjuang keras membela ajaran keadilan dan pembebasan perempuan yang dibawa suaminya, Muhammad SAW. dan menjadi perempuan agung yang mengawal Muhammad ketika berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Tidak lupa pula Siti 'Aisyah ummul mukminin yang dengan kemampuan intelektual dan ketangkasan fisiknya menjadi kader Nabi dalam meriwayatkan hadis dan pendidik ulama yang berhasil serta pernah menjadi panglima dalam perang Jamal.

Dalam sejarah Indonesia pra maupun pasca kemerdekaan pun banyak tokoh perempuan terlibat dalam perjuangan universal melawan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta penjajahan kolonial Belanda. Sekadar mengingatkan memori kita, sebut saja Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, RA. Kartini, Ratu Syajaratuddin, Nyai Walidah Dahlan, Nyai Ageng Serang, Nyai Sholihah Wahid Hasyim, dan lain-lain. Masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang secara pribadi maupun berjamaah berperan aktif memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, beradab, dan berwawasan masa depan, setidaknya telah menampik anggapan yang minor terhadap posisi dan kapasitas perempuan.

Jika dalam sejarah masa lalu begitu penting dan strategis peran tokoh-tokoh perempuan, maka bagaimana dengan sejarah masa kini dan masa depan, apakah perempuan juga masih memegang peran strategis itu? Ini adalah pertanyaan besar dan pertanyaan inilah yang mengilhami para tokoh kontemporer gerakan perempuan di seluruh dunia, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun keagamaan. Kalau dulu kaum perempuan telah banyak berprestasi dan dicatat dengan tinta emas sejarah, apakah pengalaman heroik dan menakjubkan itu akan terulang atau justru akan tergulung oleh kabut sejarah yang kelam? Ini salah satu PR gerakan perempuan.

Organisasi-organisasi pejuang anti-ketidakadilan harus terus dikembangkan di seluruh penjuru dunia dan berteriak lantang melawan ketidakadilan, penindasan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Namun harus tetap didasari oleh nilai-nilai luhur yang diajarkan agama. Tentu gerakan perempuan yang dimaksud bukan dilandasi kebencian kepada laki-laki. Diyakini bahwa untuk melawan diskriminasi tidak perlu bersikap diskriminatif. Menghapus kekerasan tidak dengan kekerasan serupa. Begitu pula melawan ketidakadilan tidak sepatutnya dengan ketidakadilan. Sudah pasti bahwa organisasi tersebut harus di-setting sedemikian rupa agar bergerak sistematis, terarah, dan berjejaring agar menuai hasil yang maksimal bagi berlangsungnya kehidupan yang penuh keadilan dan kedamaian.

Sejarah harem adalah sejarah kelam perempuan. Tradisi harem telah ada sejak ribuan tahun lalu, ketika manusia mempraktikkan sistem kerajaan dalam mengarungi hidup bersama. Tradisi opresif ini terlahir dari rahim sistem masyarakat yang patriarkis dengan eksistensi perempuan dipandang sebagai pelengkap belaka dari keberadaan laki-laki. Bahkan, secara teologis kaum perempuan dituding sebagai penyebab terusnya Adam dari surga sehingga mereka sudah sepantasnya dijatuhi hukuman setimpal.

Sistem sosial yang tidak memihak, ditambah asumsi teologis yang misoginis, semakin mempertegas bahwa perempuan harus 'dirumahkan', dalam arti dipersempit ruang geraknya atau (kalau perlu) dikebiri hak-hak keperempuanannya; sebuah langkah manis untuk melanggengkan sistem patriarkat. Untuk meratakan jalan bagi upaya 'perumahan' tersebut, dicetuskanlah gagasan hudud, yakni pemisahan laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan kelamin. Dan kehadiran agama ternyata malah turut memperkuat sendi-sendi hudud tersebut melalui sabda-sabda langitnya. Di jazirah Arab pra-Islam, hudud marak dipraktikkan oleh masyarakat Kristen Suriah, Bizantium, Mediterania, Mesopotamia, dan Persia. Karenanya, tidak mengherankan jika Islam yang turun di tanah Arab terkena pula 'getah' doktrin hudud ini. Ambil contoh QS Al-Ahzab ayat 33 yang memerintahkan perempuan berdiam diri di rumah atau QS Al-Nur ayat 32 mengenai pembatasan interaksi langsung antara perempuan dan laki-laki. Aturan moral yang berlandaskan perbedaan kelamin ini merupakan doktrin etis Islam yang dihasilkan dari persentuhannya dengan budaya lokal, yakni hudud.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, hudud lambat laun tidak lagi menjadi norma sosial yang abstrak, tapi mulai mengalami institusionalisasi. Hudud berubah menjadi upaya pengurungan (untuk tidak mengatakan pemenjaraan) perempuan dalam suatu tempat yang jauh dari hiruk pikuk aktivitas masyarakat. Biasanya perempuan-perempuan itu ditempatkan di dalam istana. Tugas mereka adalah melayani kehendak raja, mulai urusan mempersiapkan makanan dan mengambilkan minum sang raja sampai ke hal-hal yang berbau seksual. Berawal dari sinilah hudud mengalami institusionalisasi yang kelak dikenal dengan istilah harem.

John L Esposito dalam *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* mengatakan harem merupakan puncak dari usaha pemisahan laki-laki dan perempuan. Masih menurut Esposito, harem di dunia Islam terjadi di masa Kekhalifahan Abbasiyah, sebuah imperium yang berjaya di era keemasan Islam (*the Golden Age*). Kenyataan ini tidak terlalu mengherankan sebab wilayah kekuasaan Abbasiyah secara geografis berdampingan dengan Ctesipon, ibu kota Persia yang memang masyhur dengan tradisi harem. Baru pada 1909, ketika imperium Usmani berkuasa, institusi harem di dunia Islam mengalami kehancuran lewat campur tangan Barat. Kendati demikian, keruntuhan institusi harem tidak serta-merta menghentikan denyut nadi tradisi harem itu sendiri yang sudah mengakar ribuan tahun. Harem kerajaan memang telah mati, tapi harem domestik, politik, pendidikan, dan sektor publik masih bisa kita saksikan hingga detik ini.

Ranah Domestik

Rumah adalah tempat ikatan keluarga dibangun. Tapi, rumah dalam masyarakat patriarkat dijadikan tempat untuk menyubordinasi perempuan. Dinding-dinding rumah yang tebal telah menutup mata perempuan dari urusan publik. Tradisi kepatuhan, sakralisasi laki-laki (baca: suami), the second sex, kawin paksa, kutukan malaikat, dan kekerasan terhadap perempuan (baca: istri) diciptakan dan dilestarikan di dalamnya. Institusi keluarga itu seolah-olah menjadi *blue print* institusi harem kerajaan. Kondisi memilukan ini semakin tak tertolong dengan adanya klaim bahwa urusan domestik merupakan masalah privat. Konsekuensi logis dari pandangan semacam ini adalah ketidakberdayaan perempuan untuk membela diri manakala terjadi tindak kekerasan dan ketidakberhakan pihak luar untuk campur tangan di dalamnya, sekalipun oleh lembaga sekaliber negara. Tapi, perempuan-perempuan Indonesia kini setidaknya bisa tersenyum lebar dengan adanya UU Anti-KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang sekaligus menandai berakhirnya klaim 'urusan domestik adalah masalah privat'. Gebrakan baru itu hendaknya menjadi stimulus untuk menghancurkan 'harem-harem modern' dan lebih jauh ke arah penjungkirbalikkan sistem patriarkat demi pembebasan perempuan yang totalistik.

Jilbab

Daya jangkau 'haremisasi' ini merambah pula sampai kepada upaya pengurungan fisiologis; tubuh menjadi objek penguasaan laki-laki atas perempuan. Haremisasi fisiologis ini mengejawantah dalam bentuk pemberlakuan kewajiban memakai penutup kepala bagi perempuan, entah itu bernama jilbab, jubah, kerudung, purdah, burkak, ataupun lainnya. Lebih-lebih, kewajiban tersebut mendapat justifikasi dalam teks-teks suci agama.

Dalam Islam, jilbab baru diwajibkan pascahijrahnya Nabi ke Madinah dengan diturunkannya QS Al-Ahzab ayat 59. Ayat ini merupakan hasil interaksi Islam dengan budaya setempat tempat jilbab sudah mentradisi dalam masyarakat Arab pra-Islam. Jadi, ayat jilbab hendaknya dipahami sebagai respons kultural Islam semata, bukannya doktrin. Menurut Asghar Ali Engineer dalam *The Rights of Women in Islam*, jilbab tidak terlalu dipersoalkan pada masa Nabi. Namun, jilbab mulai mengalami proses pelembagaan ketika berdiri Dinasti Umayyah sebagai konsekuensi logis dari masuknya pengaruh budaya Romawi dan Sasanid Persia.

Fatima Mernissi dalam *The Veil and the Male Elite* menuding upaya 'jilbabisasi' yang digalakkan oleh Dinasti Umayyah telah menambah beban berat perempuan. Gerak perempuan semakin mengalami penyempitan, khususnya dalam hal kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keilmuan yang setara dengan laki-laki. Hal ini terbukti dengan minimnya nama perempuan dalam daftar tokoh intelektual muslim serta mandulnya kiprah perempuan dalam lembaran sejarah Islam.

Oleh karena itu, tidak terlampau salah jika kita katakan sejarah Islam adalah sejarah laki-laki. Fakta yang sama tentu dialami pula oleh perempuan di seantero dunia yang pernah mewarisi sejarah harem. Sebagai langkah awal untuk meratakan jalan bagi pendekonstruksian harem, jilbab atau apa pun yang setara dengannya harus dipandang sebagai sekadar 'pilihan', bukannya kewajiban.

'Public Sphere'

Wilayah publik yang merupakan ruang berjubelnya manusia dari pelbagai strata sosial dan aneka kepentingan merupakan lahan empuk haremisasi. Dengan diselimuti ideologi patriarkat, dunia publik telah berubah menjadi 'ladang pembantaian' (killing field) bagi eksistensi kaum hawa. Ambil contoh kecil, acara kongko-kongko anak muda di pinggiran jalan atau suatu tempat tertentu di malam hari akan dipandang sebagai hal yang lumrah oleh masyarakat jika dilakukan anak laki-laki. Tapi, penilaian pun akan berubah drastis manakala kegiatan itu dilakukan perempuan. Suara-suara sumbang dan konotasi negatif pun sontak bermunculan karena norma sosial kita masih belum mengizinkan hal itu.

Sejarah harem tidak hanya mengontaminasi akal sehat kita, tapi telah menyelinap ke dalam kesadaran kita hingga beberapa hal yang berlaku di masyarakat masih kita anggap sebagai sesuatu yang berada dalam ambang kewajaran. Haremisasi merupakan modus operandi penguasaan laki-laki atas perempuan dengan menggunakan tubuh sebagai mediasinya. Dengan demikian, gerakan pembebasan perempuan harus mampu menghentikan geliat haremisasi sampai ke 'titik nol'. Andai tidak, gerakan perempuan tidak akan pernah melahirkan pencerahan, dan kita terpaksa harus merayakan matinya tubuh perempuan.[]



**Andai tidak ada gerakan pembebasan perempuan,
gerakan perempuan tidak akan pernah melahirkan pencerahan,
dan kita terpaksa harus merayakan matinya tubuh perempuan!**



BAGIAN KEENAM

DISKURSUS PENDIDIKAN KAUM TERTINDAS



Pendidikan memiliki kekuatan politis dan ideologis dalam mengusung agenda perubahan sosial. Maka tak bisa dipungkiri bahwa institusi pendidikan selalu dijadikan medan dalam melanggengkan kekuasaan. Menjadi sebuah keniscayaan bahwa pendidikan mulal kehilangan fungsinya sebagai medan transformasi sosial dan mendidik masyarakat. Pendidikan revolusioner harus dipandu oleh filosofi pendidikan revolusioner. Sasaran pendidikan harus mengenali dan mengakui keterkaitan timbal balik antara kehidupan sosial dengan pendidikan. Pendidikan revolusioner harus menyikapi perkembangan masyarakat kapitalis. Pendidikan harus memposisikan dirinya sebagai alat kritik egalitarian dan anti-otoritarian kontemporer terhadap perkembangan wacana pendidikan dan masyarakat. *"Sistem Sekolah saat ini menjalankan tiga fungsi umum, yakni menjadi gudang mitos masyarakat, pelembagaan kontradiksi dalam mitos tersebut, dan lokus ritual yang*

mereproduksi serta melindungi perbedaan antara mitos dan realitas" (Ivan Illich). Dehumanisasi, meskipun sebuah fakta sejarah yang kongkret, bukanlah takdir yang turun dari langit, tetapi akibat dari tatanan yang tidak adil yang melahirkan kekerasan dari tangan-tangan para penindas, yang pada gilirannya mendehumanisasikan kaum tertindas (Paulo Freire, 1968). (Back Cover, Roem Topatimasang, *Sekolah Itu Candu*, 2001)

Hand-Out 20 GAGASAN PENDIDIKAN KRITIS PAULO FREIRE

Prawacana

Paulo Freire bagi banyak praktisi pendidikan adalah tokoh pendidikan yang penuh misteri. Banyak mitos yang menyelimuti pemikiran pendidikannya, sehingga banyak orang lebih menghafalkan jargon-jargon dan istilah yang dipergunakannya dalam bukunya yang terkenal, yakni *Pendidikan Kaum Tertindas (Pedagogy of The Opressed)* ketimbang memahami secara praktis kedalam proses belajar-mengajar yang membebaskan. Banyak tema pikiran pendidikan Freire yang tertuang dalam buku tersebut tidak mampu secara metodologis diterjemahkan ke dalam proses dan teknis belajar-mengajar oleh penganggunya yakni kalangan praktisi pendidikan.

Itulah makanya sebagian besar pendidik ataupun guru yang merasa jadi pengikutnya, hanya pandai menghafalkan mantra-mantra Freire yang terkenal, misalnya "*Pendidikan adalah Proses Pembebasan dan Pendidikan adalah Proses Membangkitkan Kesadaran Kritis*". Bahkan ironisnya banyak praktisi dengan menggunakan semboyan pendidikan pembebasan dan humanisasi, tanpa menyadari terjerumus dalam tindak praktik pendidikan penindasan dan dehumanisasi, yang justru menjadi agenda utama kritik Freire. Apa sesungguhnya yang dia maksud dengan '*pembebasan*' dan '*kesadaran kritis*,' lebih banyak dibicarakan dalam seminar dan diskusi mahasiswa maupun aktivis *ornop*, ketimbang dipraktikkan di lapangan. Namun demikian, ternyata terdapat banyak tafsiran mengenai apa yang dimaksud Freire dengan '*pendidikan pembebasan*' maupun '*pembangkitan kesadaran kritis*' yang menjadi tema pokok pendidikan Freire tersebut

Siapa Sebenarnya Paulo Freire?

Paulo Freire adalah seorang pendidik radikal berkebangsaan Brasil, yang lahir pada tanggal 19 September 1921, di kota Recife, Brasil, dan meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1997, di Sao Paulo, Brasil. Sejak bukunya terbit dalam bahasa Inggris pada tahun 1972 namanya menjadi terkenal sebagai tokoh pendidikan yang menemukan suatu model pendidikan untuk memberdayakan 'kaum tertindas' dan sistem penindasan di muka bumi ini. Ia mulai sebagai pendidikan radikal justru melalui kegiatan pemberantasan buta huruf (*literacy programs*), suatu pendidikan yang umumnya dianggap sebagai pendidikan apolitis dan tidak radikal sama sekali.

Freire berhasil mensubversikan kesadaran politik dalam proses pendidikan mengenal huruf dan belajar membaca tersebut. Dalam karyanya *Pedagogia do Oprimido* (1970; serta buku yang membuatnya termasyhur, *Pedagogy of the Oppressed*, yang terbit tahun 1972) Freire membongkar watak pasif dari praktik pendidikan tradisional yang melanda dunia pendidikan, Dia menganggap bahwa pendidikan pasif sebagaimana dipraktikkan pada umumnya pada dasarnya melanggengkan "*sistem relasi penindasan*". Freire mengejek sistem dan praktik pendidikan yang menindas tersebut, yang disebutnya sebagai pendidikan '*gaya bank*' dimana guru bertindak sebagai penabung yang menabung informasi sementara murid dijejali informasi untuk disimpan. Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan '*gaya bank*' itu sebagai berikut:

- Guru mengajar murid belajar.
- Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa.
- Guru berpikir, murid dipikirkan.
- Guru bicara, murid mendengarkan.
- Guru mengatur, murid diatur.
- Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti.
- Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya.
- Guru memilih apa yang akan diajarkan,
- murid menyesuaikan diri.
- Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid.
- Guru dalah subjek proses belajar, murid objeknya.

Sebagai antitesa, Freire mengajukan konsep tandingan terhadap pendidikan '*gaya bank*' tersebut dengan suatu '*pedagogy of liberation*' yakni proses pendidikan hadap masalah (*problem posing of education*) yang justru mendorong dialog antara guru dan murid, serta suatu proses pendidikan yang mampu mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menantang '*status quo*'. Paulo Freire mulai melancarkan model dan metode pendidikannya pada tahun 1950-an, ketika dia terlibat dalam pengajaran membaca dan menulis dalam suatu kegiatan pendidikan pemberantasan buta huruf untuk petani miskin. Pengalaman itu membuktikan bahwa dengan penggunaan kata-kata sehari-hari selain mempercepat proses belajar membaca, ternyata pendidikan itu juga telah melahirkan kesadaran politik ekonomi para petani miskin. Jadi pendidikan telah melahirkan kesadaran politik maupun kesadaran kritis petani miskin. Pada tahun 1963 dia ditunjuk sebagai direktur Program Nasional Pemberantasan Buta Huruf Brasil. Tetapi setelah kudeta militer tahun 1964, pemerintah Junta Militer Brasil menjebloskan Freire ke penjara atas tuduhan subversi. Selepas dari penjara, Freire menghabiskan waktunya hidup di pengasingan diluar Brasil, dan membunuh waktunya dalam berbagai program *literacy* serta mengajar di berbagai universitas.

Pada tahun 1979 Paulo Freire kembali ke Brasil, disana ia dan kawan-kawannya mendirikan partai buruh berhaluan kiri. Akhirnya Freire diangkat menjadi sekretaris pendidikan di kota Sao Paulo pada tahun 1988, tetapi ia mengundurkan diri beberapa tahun setelahnya. Sebagai birokrat rupanya Freire kurang berhasil, namun sebagai pemikir, Freire cukup berhasil. Pegaruh pikiran pendidikannya menembus batas bahasa dan wilayah benua. Freire menulis lebih dari 20 judul buku, dan beberapa karyanya dianggap sebagai bukuklasik dalam bidang pendidikan. Bahkan kini bukunya telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa.

Freirean, Pendidikan untuk Bebas dari Dominasi dan Penindasan!

Freirean, atau aliran pendidikan Paulo Freire pada dasarnya adalah suatu pendekatan dan pemikiran yang berangkat dari asumsi bahwa pendidikan adalah proses pembebasan dari sistem yang menindas. Penganut pendidikan Freirean berangkat dari suatu kepercayaan bahwa pendidikan tidak pernah terbebas dari kepentingan politik ataupun terbebas demi melanggengkan sistem sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Sebaliknya pandangan ini juga berasumsi bahwa pendidikan bagi kekuasaan, selalu digunakan untuk melanggengkan ataupun melegitimasi dominasi mereka. Oleh karena itu hakikat pendidikan umumnya bagi mereka tidak lebih dari sebagai sarana untuk mereproduksi sistematika dan struktur sosial yang tidak adil seperti sistem relasi kelas, relasi gender, relasi rasisme ataupun sistem relasi lainnya. Pandangan ini dikenal dengan '*teori reproduksi*' terhadap sistem yang tidak adil melalui pendidikan.

Berbeda dengan pandangan maupun teori '*reproduksi*' dalam pendidikan tersebut, ada pandangan maupun teori pendidikan yang juga datang dari kelompok pendidik radikal, yang justru berangkat dari asumsi dan keyakinan bahwa pendidikan adalah proses kesadaran kritis, seperti menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran gender, maupun kesadaran kritis lainnya. Pandangan kedua inilah yang dianut oleh aliran Freirean tersebut. Oleh karena itu pendidikan bagi kelompok Freirean merupakan proses pembebasan manusia. Pendirian Freirean berangkat dari asumsi bahwa manusia dalam sistem dan struktur sosial yang ada pada dasarnya mengalami proses dehumanisasi karena eksploitasi kelas, dominasi gender, maupun karena hegemoni dan dominasi budaya lainnya. Oleh karena itu pendidikan merupakan suatu sarana untuk '*memproduksi*' kesadaran untuk mengembalikan kemanusiaan, dan dalam kaitan ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasyarat upaya untuk pembebasan. Freire percaya bahwa tugas pendidikan adalah memproduksi kesadaran kritis untuk suatu proses pembebasan.

Bagaimana proses pembebasan, pembangkitan kesadaran kritis, dan pembebasan itu dilakukan? Para praktisi dalam menjawab pertanyaan ini umumnya lebih konsentrasi pada metode pendidikan belaka. Namun sesungguhnya, pendidikan tidak pernah berdiri bebas tanpa berkaitan secara dialektis dengan lingkungan dan sistem sosial dimana pendidikan diselenggarakan. Oleh karena itu proses pendidikan sebagai proses pembebasan tidak pernah terlepas dari sistem dan struktur sosial, yakni konteks sosial yang menjadi penyebab atau yang menyumbangkan proses dehumanisasi dan keterasingan pada waktu pendidikan diselenggarakan. Dalam era globalisasi kapitalisme seperti saat ini, pendidikan dihadapkan pada tantangan bagaimana mengkaitkan konteks dan analisis isinya untuk memahami globalisasi secara kritis. Strategi umumnya pendidik

lebih tertuju pada bagaimana membuat kelas mereka relevan terhadap formasi sosial yang dominan saat ini. Strategi seperti ini lebih berkesan menerima dan mensiasati dan yang paling penting melakukan penyesuaian terhadap ideologi dominan. Sementara itu jarang pendidikan yang mengintegrasikan analisis kritis dan bagaimana mereka berperan dengan proses kritik dan melakukan dekonstruksi, untuk menemukan solusi alternatif terhadap globalisasi, seperti misalnya menciptakan diskursus tandingan terhadap sistem dominan ataupun diskursus dominan dengan perspektif alternatif.

Untuk mendorong pendidikan menjadi peka terhadap persoalan ketidakadilan sosial, perlu setiap kelas secara otonom menentukan visi dan misi sesuai perkembangan formasi sosial, bagaimana mereka memperjelas keberpihakan terhadap proses ketidakadilan sosial, serta bagaimana mereka menterjemahkan semua itu dalam metodologi pendidikan. Oleh karena itu metode dan teknik pendidikan '*hadap masalah*' menjadi salah satu kegiatan strategis untuk merespon sistem dan diskursus yang dominan. Persoalannya, proses pendidikan kelemahannya dan sekaligus kekuatannya, seringkali menjadi arena yang paling tidak terkontrol dan tidak termonitor. Sehingga diperlukan mekanisme yang memungkinkan peserta didik menjadi subjek dan pusat kegiatan pendidikan. Oleh karena itu orientasi untuk setiap peserta pendidikan adalah menghayati visi dan misi pendidikan mereka. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran kritis peserta didik sangat diperlukan jika pendidikan hendak meletakkan peserta didik sebagai subjek dan pemonitor. Kesadaran kritis perlu agar proses dan metode pendidikan dapat menuju pada tujuan sesungguhnya yakni sebuah transformasi sosial.

Untuk itu perlu ditunjukkan bagaimana proses 'penyadaran kritis' itu beroperasi dalam metodologi pendidikan sehingga secara teknis metode tersebut dapat dilakukan. Secara konkret perlu dijabarkan bagaimana teori pendidikan 'konsientisasi' yang menjadi pemikiran dasar Paulo Freire dipraktikkan, dan disajikan dalam bentuk uraian yang mudah ditangkap. Dengan cara penyajian dan analisis seperti ini diharapkan memberi inspirasi bagi setiap kalangan yang ingin mengetahui lebih mendalam metode pendidikan Paulo Freire. Dasar terpenting dari metodologi Freire ini adalah meletakkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Secara lebih khusus melalui metodologi Freire akan ditunjukkan bagaimana ideologi di balik metode penyelenggaraan pendidikan dibongkar. Oleh karena itu pendirian teoretik dan paradigma pendidikan pembebasan Freirean memang akan memberikan inspirasi alternatif bagi semua, kalangan yang memerlukan perubahan pendidikan secara mendasar. Seperti, penting kiranya untuk dikupas secara lebih mendalam bagaimana operasionalisasi dari berbagai ideologi serta perspektif dunia pendidikan yang berkembang.

Dalam perspektif kritis, tugas pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap sistem dan 'ideologi yang dominan' yang tengah berlaku di masyarakat, serta menantang sistem tersebut untuk memikirkan sistem alternatif ke arah transformasi sosial menuju suatu masyarakat yang adi. Tugas ini dimanifestasikan dalam bentuk kemampuan menciptakan ruang agar muncul sikap kritis terhadap sistem dan sruktur ketidakadilan sosial, serta melakukan dekonstruksi terhadap diskursus yang dominan dan tidak adil menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa netral, objektif maupun dari kondisi masyarakat sekitar lembaga pendidikan.

Visi kritis pendidikan terhadap sistem dominan digunakan sebagai bagian pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas. Metode ini digunakan bagi muneulnya sistem sosial baru yang lebih adil dan yang selama ini menjadi cita-cita pendidikan Freirean. Dalam perspektif Freirean, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain tugas utama pendidikan adalah '*memanusiakan*' kembali manusia yang mengalami '*dehumanisasi*' karena sistem dan struktur yang tidak adil. Paham pendidikan Freirean ini cocok dengan paradigma transformatif. Pendidikan dalam perpektif ini juga menjadi arena kritik ideologi. Dalam pelatihan bagi para buruh misalnya, peserta pendidikan perlu ditantang untuk memahami proses eksploitasi yang mereka alami, serta memikirkan proses pembebasan dari alienasi dan eksploitasi buruh, disamping penekanan pada teori motivasi kerja demi efisiensi yang hanya menguntungkan akumulasi kapital. Demikian halnya dalam konteks pendidikan pertanian misalnya, para petani saat ini sering diarahkan hanya untuk memenuhi ambisi produktivitas dan efisiensi. Ambisi ini muncul karena pandangan peltanian yang didominasi oleh ideologi Revolusi Hijau dan rekayasa genetika. Dengan metodologi pendidikan

Freirean, petani difasilitasi untuk mempertanyakan relasi kekuasaan yang selama ini mengambil peranan besar dalam mempermainkan kehidupan mereka. Dalam konteks itulah pilihan paradigma pendidikan memainkan peran strategis untuk proses perubahan dan transformasi sosial.

Konsientisasi sebagai Tema Pokok Pendidikan Freire

Bagi penganut mazhab Freirean, hakikat pendidikan adalah demi membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasyarat proses humanisasi atau memanusiakan manusia. Kunci bagi proses pendidikan ini adalah 'konsientisasi' atau proses membangkitkan kesadaran kritis. Freire membagi ideologi pendidikan dalam tiga kerangka yang didasarkan pada kesadaran ideologi masyarakat. Dalam pandangan Freire pendidikan tak lain adalah 'proses memanusiakan manusia kembali. Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, membuat masyarakat mengalami proses 'dehumanisasi'. Pendidikan sebagai bagian dari sistem masyarakat justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi tersebut. Secara lebih rinci dapat kita saksikan bagaimana pendidikan telah membungkam kesadaran kritis dan sukses dalam mengalienasikan peserta didik. Secara jernih Freire membagi-bagi tingkat perubahan kesadaran manusia dari kesadaran magis (*magical consciousness*), ke kesadaran naif (*naïval consciousness*) dan bagaimana mencapai pada kesadaran kritis (*critical consciousness*), dengan piawai. Melalui penjelasan Freire akan terbuka kedok kepentingan yang selama ini menyelubungi sistem pendidikan.

Membongkar kesadaran naif dan magis untuk ditransformasikan menuju kesadaran kritis memang bukanlah urusan sederhana, mengingat kuatnya pengaruh positivisme dalam diri banyak pendidik. Demikian juga kuatnya pengaruh budaya fatalisme dan teologi kepasrahan akibat dominasi ideologi dominan. Dunia pendidikan diam-diam telah mewarisi pikiran positivisme seperti objektivitas, mendewakan empirisme, netral dan tidak memihak pada yang teraniaya dan tertindas, berjarak dengan objek pendidikan (*detachment*), rasional dan bebas nilai. Dengan kandungan ideologi seperti ini pendidikan menghambat proses pembebasan dan menghilangkan watak dan benih emansipatoris pada setiap proses pendidikan. Pendidikan dalam perspektif positivistik merupakan proses *fabrikasi* dan mekanisasi pendidikan untuk memproduksi keluaran pendidikan yang harus sesuai dengan pasar kerja. Pendidikan juga tidak toleran terhadap segala bentuk '*non positivistic ways of knowing*' yang disebut sebagai tidak ilmiah.

Pendidikan menjadi a-historis, yakni mengelaborasi model masyarakat dengan mengisolasi banyak variabel dalam model tersebut. Peserta pendidikan didik untuk tunduk pada struktur yang ada, mencari cara-cara dimana peran, norma, dan nilai-nilai dapat diintegrasikan dalam sistem tersebut. Asumsi yang mendasari pendidikan itu adalah bahwa tidak ada masalah dalam sistem yang ada, masalahnya terletak pada sikap mental, pengetahuan, dan ketrampilan peserta didik, termasuk kreativitas, motivasi, dan keahlian teknis peserta. Oleh karena itu dalam perspektif positivisme, pendidikan lebih dimaksud untuk mengembangkan kecerdasan, ketrampilan, dan keahlian peserta didik belaka, sementara komitmen, keyakinan, dan kepercayaan terhadap sistem yang lebih adil dan motivasi untuk menantang terhadap sistem sosial yang tidak adil, tidak disentuh, namun lebih sibuk memfokuskan pada bagaimana membuat sistem yang ada bekerja. Dengan metodologi Paulo Freire, proses pengajaran menjadi bagian dari proses transformasi sosial dalam keseluruhan sistem perubahan sosial. Untuk meletakkan pendidikan dalam peran transformasi sosial, pertama pendidikan perlu melakukan analisis struktural tentang lokasi pemihakan pendidikan terlebih dahulu. Tanpa visi dan pemihakan yang jelas terhadap siapa, pendidikan sulit diharapkan menjadi institusi kritis untuk pembebasan dan perubahan sosial. Pendidikan juga perlu melakukan identifikasi isu-isu strategis dan menetapkan visi dan mandat mereka sebagai pendidikan untuk pemberdayaan. Tanpa pemihakan, visi, analisis, dan mandate yang jelas, pendidikan tanpa disadari telah menjadi bagian dari '*status quo*' dan ikut melanggengkan ketidakadilan. Bahkan tanpa pemihakan yang jelas, pendidikan hanyalah menjadi *alat penjinakan* atau *alat hegemoni diri sistem* dan ideologi kelompok dominan. Ideologi dan pendirian pendidikan ini akan berimplikasi terhadap metodologi dan pendekatan, serta yang lebih penting dalam proses belajar mengajar.

Pendidikan yang Memanusiakan Guru dan Peserta Didik

Dalam pandangan Freire peranan guru sangat strategis dalam setiap proses pendidikan. Inti dari pembebasan guru justru dengan mentransformasikan hubungan guru dengan peserta didik. Itu sebabnya dalam proses pendidikan, mengikuti pendekatan Freire, harus memungkinkan terjadinya proses transformasi hubungan antara guru dan peserta didik, dari yang mendominasi menjadi hubungan yang membebaskan. Dalam perspektif pendidikan yang menindas, para guru berperan dan menempatkan diri mereka justru sebagai subjek pendidikan, sementara itu peserta didik diletakkan sebagai objek pendidikan. Dalam metodologi Freire proses hubungan itu perlu dijernihkan yakni bagaimana mentransformasikan hubungan antara guru dan peserta didik menjadi hubungan yang '*dialogis*'. Hubungan guru dan peserta didik di banyak pendidikan sering terjadi lebih bersifat hubungan atau relasi kekuasaan atau '*subjugation*' yakni proses penjinakan dan penundukan, terutama pada pendidikan dan yang menjadikan peserta didik sebagai objek. Bagi Freire, pendidikan yang meletakkan peserta didik sebagai objek pendidikan, adalah pendidikan penjinakan dan oleh karenanya yang berlangsung adalah proses dehumanisasi. Para guru Freirean menganut suatu paradigma pendidikan tidak saja membebaskan dan mentransformasikan pendidikan dengan struktur di luarnya, tapi juga bercita-cita mentransformasi relasi *knowledge/ power* dan dominasi hubungan yang 'guru-murid' terlebih dulu.

Sungguhpun banyak orang pesimis untuk menjadikan pendidikan menjadi alat independen untuk kesadaran kritis dan pembebasan, namun pendekatan Freire ini dapat membantu para guru optimis terhadap pendidikan yang membebaskan. Freire telah berjasa dalam memberikan landasan teoritik pendidikan sebagai proses transformasi dan pembebasan terutama relasi yang tidak demokratis di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Ini berarti menggugat watak otoriter dan penjinakan ideologis yang tersembunyi dalam setiap pendidikan. Dengan demikian diperlukan suatu usaha kolaborasi antara guru dan peserta didik untuk secara bersama-sama melakukan transformasi relasi mereka untuk terbebas dan sistem yang menindas. Tujuan utama pendidikan yang menggunakan ideologi Freire adalah pendidikan yang kritis, lebih egaliter, dan demokratis.

Sebuah Postulat: Freire Membela yang Tertindas

Pendekatan Paulo Freire dapat menjadi ilham bagi dunia pendidikan kita yang penuh dengan masalah. Memang pandangan pendidikan Freire telah lama diperbincangkan oleh kalangan pendidik, namun hampir tidak terjangkau oleh praktisi pendidik yang memproklamasikan diri sebagai pengikut Freire. Ketidak terjangkau ini mungkin karena masih sedikitnya buku-puku terjemahan Freire dan juga kecilnya dukungan dari pemerintah. Kini situasinya sudah banyak berubah, buku maupun kebijakan dapat didorong oleh kalangan pendidik untuk segera diubah. Karena pada dasarnya gagasan maupun pemikiran Freire akan menyumbang banyak bagi proses perwujudan pendidikan. Pikiran-pikiran Freire juga akan banyak membantu pemahamari dan menyibak secara terang kepentingan yang tersembunyi dalam praktik pendidikan sehari-hari. Untuk alasan-alasan itulah gagasan-gagasan Freire memiliki kemungkinan untuk dipraktikkan.

Lewat pendidikan gaya Freire, kaum tertindas, seperti kaum buruh yang tereksplorasi namun menerima eksploitasi mereka dengan sukarela, akan terbangun kesadarannya. Para buruh tani, kaum miskin kota, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok tertindas lainnya, melalui pendidikan Freire, didorong untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan. Dibebaskan untuk menjadi manusia kembali, manusia yang bebas dari penindasan. Dengan memanfaatkan metode Freire, pendidikan akan berlangsung dalam kesadaran yang membebaskan. Melalui metode Freire dominasi pada sistem pendidikan akan dienyahkan. Tentu ini adalah sebuah proses yang akan membawa negeri ini ke dalam masa depan yang lebih baik. Sebuah masa depan yang menjanjikan keberpihakan kepada kaum yang tertindas.[]

Hand-Out 21

PARADIGMA PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP METODE DAN PRAKTEK PENDIDIKAN POLITIK

Prawacana

Pendidikan politik dapat dan sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi ataupun melanggengkan sistem dan struktur sosial politik yang ada. Namun sebaliknya pendidikan politik juga dapat memainkan peran yang penting untuk suatu perubahan atau transformasi sosial politik menuju ke sistem yang lebih demokratis dan adil. Dengan demikian posisi peran pendidikan politik sangat bergantung pada paradigma atau pun ideologi pendidikan yang dianut dan mendasari suatu kegiatan pendidikan politik. Untuk mengantarkan bagaimana tulisan Pendidikan Politik untuk Rakyat ini, maka terlebih dahulu dalam tulisan ini diuraikan secara kritis berbagai paradigma pendidikan dan ideologi sosial yang mempengaruhi suatu paradigma pendidikan serta implikasinya terhadap suatu proses, teori dan metode pendidikan politik. Pendahuluan ini membahas berbagai paradigma, ideologi, teori dan implikasinya terhadap pilihan teknik proses belajar mengajar baik dalam pendidikan maupun pelatihan. Untuk itu pembahasan paradigmatis ini akan difokuskan ke dalam tiga aspek, yakni: (a) Paradigma teori-teori pendidikan, (b) Implikasi paradigma pendidikan terhadap metodologi pendidikan, dan (c) Implikasinya terhadap model pendekatan dan teknik pendidikan. Perlu dibahas terlebih dahulu berbagai aliran pendekatan pendidikan. Pemetaan aliran pendidikan yang dipergunakan di sini adalah mengikuti kategori Giroux and Aronowitz (1985) yang mengategorikan pendekatan pendidikan menjadi tiga aliran yakni pendekatan konservatif, liberal dan kritis serta mengupas bagaimana masing-masing paradigma pendidikan tersebut berimplikasi terhadap sub sistem pendidikan lainnya.

Paradigma Pendidikan Giroux and Aronowitz (1985)

1. Paradigma Pendidikan Konservatif

Bagi kaum konservatif, ketidaksederajatan masyarakat merupakan suatu hukum keharusan alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bagi mereka bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan, karena perubahan hanya akan membuat manusia lebih sengsara saja. Dalam bentuknya yang kalsik atau awal paradigma konservatif dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak bisa merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhanlah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya dia yang tahu makna di balik itu semua. Dengan pandangan seperti itu, kaum konservatif lama tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk merubah kondisi mereka.

Namun dalam perjalanan selanjutnya, paradigma konservatif cenderung lebih menyalahkan subjeknya. Bagi kaum konservatif, mereka yang menderita, yakni orang-orang miskin, buta huruf, kaum tertindas dan mereka yang dipenjara, menjadi demikian karena salah mereka sendiri. Karena toh banyak orang lain yang ternyata bisa bekerja keras dan berhasil meraih sesuatu. Banyak orang ke sekolah dan belajar untuk berperilaku baik dan oleh karenanya tidak dipenjara. Kaum miskin haruslah sabar dan belajar untuk menunggu sampai giliran mereka datang, karena pada akhirnya kelak semua orang akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Kaum konservatif sangat melihat pentingnya harmoni dalam masyarakat dalam mencairkan konflik dan kontradiksi.

2. Paradigma Pendidikan Liberal

Golongan kedua yakni kaum Liberal, berangkat dari keyakinan bahwa memang ada masalah dimasyarakat tetapi bagi mereka pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu, tugas pendidikan juga tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik dan ekonomi. Sungguh pun demikian, kaum liberal selalu berusaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan, dengan jalan memecahkan berbagai masalah yang ada dalam pendidikan dengan usaha reformasi "kosmetik". Umumnya yang dilakukan adalah seperti: perlunya membangun kelas dan fasilitas baru, memoderenkan peralatan sekolah dengan pengadaan komputer yang lebih canggih dan laboratorium, serta berbagai usaha untuk menyehatkan rasio murid-guru. Selain itu juga

berbagai investasi untuk meningkatkan metodologi pengajaran dan pelatihan yang lebih efisien dan partisipatif, seperti dinamika kelompok (*group dynamics*), "*learning by doing*", "*experimental learning*", ataupun bahkan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan sebagainya. Usaha peningkatan tersebut terisolasi dengan sistem dan struktur ketidakadilan kelas dan gender, dominasi budaya dan represi politik yang ada dalam masyarakat.

Kaum Liberal dan Konservatif sama-sama berpendirian bahwa pendidikan ialah a-politik, dan "*excellence*" haruslah merupakan target utama pendidikan. Kaum Liberal beranggapan bahwa masalah masyarakat dan pendidikan adalah dua masalah yang berbeda. Mereka tidak melihat kaitan pendidikan dalam struktur kelas dan dominasi politik dan budaya serta diskriminasi gender di masyarakat luas. Bahkan pendidikan bagi salah satu aliran liberal yakni "*structural functionalism*" justru dimaksud sebagai sarana untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat. Pendidikan justru dimaksudkan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik.

Pendekatan liberal inilah yang mendominasi segenap pemikiran tentang pendidikan baik pendidikan formal seperti sekolah, maupun pendidikan non-formal seperti berbagai macam pelatihan. Akar dari pendidikan ini adalah Liberalisme, yakni suatu pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak, dan kebebasan (*freedom*), serta mengidentifikasi problem dan upaya modernisasi dan pembangunan demi menjaga stabilitas jangka panjang. Konsep pendidikan dalam tradisi liberal berakar pada cita-cita Barat tentang individualisme. Sejarah ide politik liberalisme berkait erat dengan bangkitnya kelas menengah yang diuntungkan oleh kapitalisme. Pengaruh liberalisme dalam pendidikan dapat dianalisa dengan melihat komponen-komponennya. Komponen *pertama*, adalah komponen pengaruh filsafat barat tentang model manusia universal yakni model manusia Amerika dan Eropa. Model tipe ideal mereka adalah manusia "*rationalis liberal*", seperti pertama, bahwa semua manusia memiliki potensi sama dalam intelektualitas; *kedua*, baik tatanan alam maupun norma sosial dapat ditangkap oleh akal; *ketiga*, adalah "*individualis*" yakni adanya anggapan bahwa manusia adalah atomistik dan otonom (Bay, 1988). Menempatkan individu secara atomistik, membawa pada keyakinan bahwa hubungan sosial sebagai kebetulan, dan masyarakat dianggap tidak stabil karena kepentingan-kepentingan anggotanya yang tidak stabil.

Pengaruh liberal ini kelihatan dalam pendidikan yang mengutamakan prestasi melalui proses persaingan antar murid. Pembuatan ranking untuk menentukan murid terbaik, adalah implikasi dari paham pendidikan ini. Pengaruh pendidikan liberal juga dapat dilihat dalam berbagai pendekatan "*andragogy*" seperti dalam pelatihan manajemen kewiraswastaan dan manajemen lainnya. *Achievement Motivation Training* (AMT) yang diciptakan oleh David McClelland adalah contoh terbaik pendekatan liberal. McClelland berpendapat bahwa akar masalah keterbelakangan dunia ketiga karena mereka tidak memiliki apa yang dinamakannya "*N Ach*". Oleh karena syarat pembangunan bagi rakyat Dunia Ketiga adalah perlu virus "*N Ach*" yang membuat individu agresif dan rasional (McClelland, 1961). Berbagai pelatiba pengembangan masyarakat (*Community Development*) seperti usaha bersama, intensifikasi perlanian dan lain sebagainya, umunnya berpijak pada paradigma pendidikan liberal ini.

Positivisme juga berpengaruh dalam pendidikan liberal. Positivisme sebagai suatu paradigma ilmu sosial yang dominan dewasa ini juga menjadi dasar bagi model pendidikan Liberal. Positivisme pada dasarnya adalah ilmu sosial yang dipinjam dari pandangan, metode dan teknik ilmu alam memahami realitas. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat berakar pada tradisi ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan dengan mengambil cara ilmu alam menguasai benda, yakni dengan kepercayaan adanya universalisme dan generalisasi, melalui metode determinasi, "*fixed law*" atau kumpulan hukum teori (Schoyer, 1973). Positivisme berasumsi bahwa penjelasan tunggal dianggap "*appropriate*" semua fenomena. Oleh karena itu mereka percaya bahwa riset sosial ataupun pendidikan dan pelatihan harus didekati dengan metode ilmiah yakni objektif dan bebas nilai. Pengetahuan selalu menganut hukum ilmiah yang bersifat universal, prosedur harus dikuantifisir dan diverifikasi dengan metode "*scientific*". Dengan kata lain, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dan values dalam rangka menuju pada pemahaman objektif atas realitas sosial. Habermas, seorang penganut Teori Kritik melakukan kritik terhadap positivisme dengan menjelaskan berbagai kategori pengetahuan sebagai berikut. *Pertama*, adalah apa yang disebutnya sebagai "*instrumental*

knowledge" atau positivisme dimana tujuan pengetahuan adalah untuk mengontrol, memprediksi, memanipulasi dan eksploitasi terhadap objeknya. *Kedua* adalah "*hermeneutic knowledge*" atau "*interpretative knowledge*", dimana tugas ilmu pengetahuan hanyalah untuk memahami. *Ketiga* adalah "*critical knowledge*" atau "*emancipatory knowledge*" yakni suatu pendekatan yang dengan kedua pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini menempatkan ilmu pengetahuan sebagai katalis untuk membebaskan potensi manusia. Paradigma pendidikan liberal pada dasarnya sangatlah positivistik.

3. Paradigma Pendidikan Kritis

Pendidikan bagi mereka merupakan arena perjuangan politik. Jika bagi konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal untuk perubahan moderat, maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat di mana pendidikan berada. Bagi mereka kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Paham ini bertentangan dengan pandangan kaum liberal di mana pendidikan dianggap terlepas dari persoalan kelas dan gender yang ada dalam masyarakat.

Dalam perspektif kritis, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap "*the dominant ideology*" kearah transformasi sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa bersikap netral, bersikap objektif maupun berjarak dengan masyarakat (*detachment*) seperti anjuran positivisme. Visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk mencipta sistem sosial baru dan lebih adil. Dalam perspektif kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain tugas utama pendidikan adalah "*memanusiakan*" kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil

Tipologi Kesadaran Masyarakat Paulo Freire (1970) Implikasi Paradigma Pendidikan dalam Metodologi.

Bagaimana implikasi ketiga pandangan pendidikan tersebut terhadap metodologi pendekatan pendidikan. Untuk itu saya meminjam analisis Freire (1970) dalam membagi ideologi pendidikan dalam tiga kerangka yang didasarkan pada kesadaran ideologi masyarakat. Meskipun Freire lebih dikenal sebagai tokoh pendidikan, namun kerangka analisisnya banyak dipergunakan justru untuk melihat kaitan ideologi dalam perubahan sosial. Tema pokok gagasan Freire pada dasarnya mengacu pada pada suatu landasan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia kembali. Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, membuat masyarakat mengalami proses *dehumanisasi*. Pendidikan, sebagai bagian dari sistem masyarakat justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi tersebut. Secara lebih rinci Freire menjelaskan proses dehumanisasi tersebut dengan menganalisis tentang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi: Kesadaran Magis (*Magical Consciousness*), Kesadaran Naif (*Naïval Consciousness*) dan Kesadaran Kritis (*Critical Consciousness*). Bagaimana kesadaran tersebut dan kaitannya dengan sistem pendidikan dapat secara sederhana diuraikan sebagai berikut:

1. Kesadaran Magis (*Magical Consciousness*)

Kesadaran Magis yakni suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya saja masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih melihat faktor di luar manusia (*natural* maupun *supra-natural*) sebagai penyebab dan ketakberdayaan. Dalam dunia pendidikan, jika proses belajar mengajar tidak mampu melakukan analisis terhadap suatu masalah maka proses belajar mengajar tersebut dalam prespektif Freirean disebut sebagai pendidikan fatalistik. Proses pendidikan model ini tidak memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap satu permasalahan masyarakat. Murid secara

dogmatik menerima "*kebenaran*" dan guru, tanpa ada mekanisme untuk memahami "*makna*" ideologi dari setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

2. Kesadaran Naif (*Naïval Consciousness*)

Kesadaran Naif adalah keadaan yang dikategorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat "*aspek manusia*" menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini masalah etika, kreativitas, "*need for achievement*" dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena "*salah*" masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki kewiraswastaan, atau tidak memiliki budaya "*membangun*" dan seterusnya. Oleh karena itu "*man power development*" adalah sesuatu yang diharapkan akari menjadi pemicu perubahan. Pendidikan dalam konteks ini juga tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada sudah baik dan benar, merupakan faktor "*given*" dan oleh sebab itu tidak dipertanyakan. Tugas pendidikan adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar murid bisa masuk beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut.

3. Kesadaran Kritis (*Critical Consciousness*)

Kesadaran Kritis lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan structural menghindari "*blaming the victims*" dan lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan akibatnya pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam pendidikan, melatih murid untuk mampu mengidentifikasi 'ketidakadilan' dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas pendidikan dalam paradigma kritis adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar peserta pendidikan terlibat dalam suatu proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Implikasi Paradigma Pendidikan pada Pendekatan Pendidikan: Pedagogy v.s. Andragogy .

Knowles (1970) secara sederhana menguraikan perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa dalam belajar sebagai kerangka model pendekatannya. Model pendekatan pendidikan tersebut diklasifikasikan menjadi dua bentuk pendekatan yang kontradiktif yakni antara pedagogi dan andragogi. Perbedaan antara kedua pendekatan pendidikan tersebut, sesungguhnya tidak semata perbedaan "*objek*" nya atau Pedagogi sebagai "*seni mendidik anak*" mendapat pengertian lebih luas dimana suatu proses pendidikan yang "*menempatkan*" objek pendidikannya sebagai "*anak-anak*", meskipun usia biologis mereka sudah termasuk dewasa. Konsekuensi logis dari pendekatan ini adalah menempatkan peserta didik sebagai "*murid*" yang pasif. Murid sepenuhnya menjadi objek suatu proses belajar seperti misalnya: guru menggurui, murid digurui; guru membutuhkan apa yang harus dipelajari, murid tunduk pada pilihan tersebut; guru mengevaluasi, murid dievaluasi dan seterusnya. Kegiatan belajar mengajar model ini menempatkan guru sebagai inti terpenting sementara murid menjadi bagian pinggiran. Sebaliknya, *andragogy* atau pendekatan pendidikan "*orang dewasa*" merupakan pendekatan yang menempatkan peserta belajar sebagai orang dewasa. Dibalik pengertian ini Knowles ingin menempatkan "*murid*" sebagai subjek dalam sistem pendidikan. Murid sebagai orang dewasa diasumsikan memiliki kemampuan aktif untuk merencanakan arah, memilih bahan dan materi yang dianggap bermanfaat, memikirkan cara terbaik untuk belajar, menganalisis dan menyimpulkan serta mampu mengambil manfaat pendidikan. Fungsi guru adalah sebagai *fasilitator*, dan bukan menggurui. Oleh karena itu relasi antara guru-murid bersifat "*multicommunication*" dan seterusnya.

Sebagai pendekatan, *andragogy* dan *pedagogy* sering dipergunakan dalam ketiga paradigma magis, naif dan kritis tersebut. Banyak sekali dijumpai proses pendidikan yang magis atau naif, tetapi dilakukan dengan cara pendekatan *andragogy*. Perkawinan antara *andragogy* dan paradigma magis dan naif sesungguhnya adalah menghubungkan dua hal yang kontradiktif. Pendidikan kritis mensyaratkan penggunaan *andragogy* sebagai pendekatan ketimbang *pedagogy*. Secara prinsipil meletakkan "*anak didik*" sebagai "*objek*" pendidikan adalah problem dehumanisasi. Sebaliknya

pendidikan liberal yang bersifat naif (*blaming the victims*) meskipun digunakan pendekatan *andragogy*, namun yang terjadi pada dasarnya adalah menjadikan pendidikan sebagai proses “penjinakkan” untuk menyesuaikan ke dalam sistem dan struktur yang sudah mapan. “Penjinakkan” sendiri sebenarnya bukan karakter dari *andragogy*.

Sebaliknya banyak juga pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran kritis namun dilakukan dengan cara *pedagogi* ataupun *indoktrinasi*. Meskipun materi pendidikan sesungguhnya menyangkut persoalan-persoalan mendasar tentang sistem dan struktur masyarakat, maupun dalam proses pendidikannya lebih “*banking concept of education*” yang bersifat indoktrinatif dan menindas. Indoktrinasi sendiri adalah anti-pendidikan dan pembunuhan sikap kritis manusia sehingga bertentangan dengan hakikat pendidikan kritis. Sehingga dengan demikian pendidikan kritis yang dilakukan secara *pedagogy* pada dasarnya adalah, kontradikif dan anti-pendidikan.

Menuju Pendidikan untuk Transformasi Sosial

Tradisi liberal telah mendominasi konsep pendidikan hingga saat ini. Pendidikan liberal adalah menjadi bagian dari globalisasi ekonomi “liberal” kapitalisme. Dalam konteks lokal, paradigma pendidikan liberal telah menjadi bagian dari sistem developmentalisme, dimana sistem tersebut ditegakkan pada suatu asumsi bahwa akar “*underdevelopment*” karena rakyat tidak mampu terlibat dalam sistem kapitalisme. Pendidikan harus membantu peserta didik untuk masuk dalam sistem developmentalisme tersebut.

Dengan agenda liberal seperti itu, maka tidak memungkinkan bagi pendidikan untuk menciptakan ruang (*space*) bagi sistem pendidikan untuk secara kritis mempertanyakan tentang, pertama struktur ekonomi, politik, ideologi, gender, lingkungan serta hakasasi manusia dan kaitarnya dengan posisi pendidikan. Kedua pendidikan untuk menyadari relasi pengetahuan sebagai kekuasaan (*knowledge/ power relation*) menjadi bagian dari masalah demokratisasi. Tanpa mempertanyakan hal itu, tidak saja pendidikan gagal untuk menjawab akar permasalahan masyarakat tetapi justru melanggengkannya karena merupakan bagian pendukung dari kelas, penindasan dan dominasi. Pendidikan dalam konteks itu tidaklah mentransformasi struktur dan sistem dominasi, tetapi sekedar menciptakan agar sistem yang ada berjalan baik. Dengan kata lain pendidikan justru menjadi bagian dari masalah dan gagal menjadi solusi.

Kuatnya pengaruh filsafat positivisme dalam pendidikan, secara nyata mempengaruhi pandangan pendidikan terhadap masyarakat. Metode yang dikembangkan pendidikan mewarisi positivisme seperti obyektivitas, empiris, tidak memihak, *detachment*, rasional dan bebas nilai juga mempengaruhi pemikiran tentang pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dalam positivistik bersifat pabrikasi dan mekanisasi untuk memproduksi keluaran pendidikan yang harus, sesuai dengan “pasar kerja”. Pendidikan juga tidak toleran terhadap segala bentuk “*non positivistic way of knowing*” yang disebut sebagai ilmiah. Pendidikan menjadi *a-historis*, yakni mengelaborasi model masyarakat dengan mengisolasi banyak variabel dalam model tersebut. Murid didik untuk tunduk pada struktur dan mencari cara-cara di mana peran, norma, dan nilai-nilai serta lembaga yang dapat diintegrasikan dalam rangka melanggengkan sistem tersebut. Asumsinya adalah bahwa tidak ada masalah dalam sistem yang ada, masalahnya terletak pada mentalitas anak didik, kreatifitas, motivasi, ketrampilan teknis, serta kecerdasan anak didik.

Dari kerangka paradigma dan pendekatan pendidikan di atas, maka diperlukan suatu usaha yang selalu bertujuan meletakkan pendidikan dan latihan dalam proses transformasi dalam keseluruhan sistem perubahan sosial. Seharusnya pendidikan dan latihan perlu melakukan transformasi hubungan antar fasilitator dan peserta pendidikan. Untuk melakukan transformasi terhadap setiap usaha pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan analisis struktural dan menempatkan posisi dimana sesungguhnya lokasi pemihakan usaha pendidikan dan pelatihan dalam struktur tersebut. Tanpa visi dan pemihakan yang jelas, setiap usaha pendidikan dan pelatihan sesungguhnya sulit diharapkan menjadi institusi kritis menuju pada perubahan sosial sulit diharapkan menjadi institusi kritis menuju pada perubahan. Usaha pendidikan dan pelatihan juga perlu melakukan identifikasi isu-isu strategis dan menetapkan visi dan mandat mereka sebagai gerakan pendidika. Tanpa pemihakan, visi, analisis dan mandat yang jelas maka proses pendidikan dan pelatihan adalah bagian dari *status-quo*, dan melanggengkan ketidakadilan.

Selain itu, paradigma kritis juga berimplikasi terhadap metodologi dan pendekatan pendidikan dan pelatihan serta proses belajar mengajar yang diterapkan. Pandangan kritis termasuk melakukan transformasi hubungan guru-murid dalam perspektif yang didominasi dan yang mendominasi. Dimana Guru menjadi subjek pendidikan dan pelatihan sementara murid menjadi objeknya. Menjadikan murid sebagai objek pendidikan dalam perspektif kritis adalah bagian dari problem dehumanisasi. Dengan kata lain paradigma pendidikan dan pelatihan kritis tidak saja ingin membebaskan dan mentransformasikan pendidikan dengan struktur diluarnya, tapi juga bercita-cita mentransformasikan relasi *knowledge/ power* dan dominasi hubungan yang mendidik dan yang dididik di dalam diri pendidikan sendiri.

Usaha pendidikan dan pelatihan sesungguhnya secara struktural adalah bagian dari sistem sosial, ekonomi dan politik yang ada. Oleh karena itu banyak orang pesimis untuk berharap mereka sebagai badan independen untuk berdaya kritis. Penganut paham "reproduksi" dalam pendidikan umurnya percaya bahwa pendidikan sulit diharapkan untuk meulerankan perubahan, melainkan mereka justru yang mereproduksi sistem yang ada atau hukum yang berlaku. Dalam perspektif kritis, terutama aliran produksi dalam pendidikan dan pelatihan, setiap upaya pendidikan haruslah menciptakan peluang untuk senantiasa mengembalikan fungsinya sebagai proses independen untuk transformasi sosial. Hal ini berarti proses pendidikan harus memberi ruang untuk menyingkirkan segenap "tabu" untuk mempertanyakan secara kritis sistem dan struktur yang ada serta hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam rangka melakukan pendidikan kritis, dalam proses melakukan transformasi sosial yang juga perlu dilakukan adalah mentransformasi diri mereka sendiri dahulu, dengan membongkar struktur tidak adil di dalam dunia pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu, yakni antara peserta dan fasilitator.

Postulat: Sebuah Kesimpulan Reflektif Pendidikan Kritis

Dengan analisis kritis terhadap posisi pendidikan dan pelatihan dalam struktur sosial kapitalisme saat ini, pendidikan telah menjadi bagian yang mereproduksi sistem dan struktur yang ada, sehingga pendidikan dan pelatihan lebih menjadi masalah katimbang pemecahan. Posisi pendidikan dan pelatihan lebih pada menyiapkan "sumber daya manusia" untuk mereproduksi sistem tersebut. Dengan posisi seperti itu pada dasarnya setiap usaha pendidikan dan pelatihan ikut melanggengkan ketidakadilan dari sistem tersebut, serta tidak mampu memainkan peran dalam demokratisasi dan keadilan serta penegakkan HAM. Dengan kata lain pendidikan dan pelatihan telah gagal memerankan visi utamanya yakni "memanusiakan manusia" untuk menjadi subyek transformasi sosial. Transformasi yang dimaksud adalah suatu proses penciptaan hubungan yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Atas dasar itu diperlukan pertanyaan mendasar tentang fungsi dan peran setiap usaha pendidikan politik sebelum dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan proses demokratisasi setiap usaha pendidikan politik melahirkan kesadaran kritis bagi penghormatan atas hak asasi manusia termasuk hak perempuan, hak anak-anak, hak kultural dan politik kaum minoritas, hak-hak penyandang cacat dan hak asasi manusia lainnya. Memang mendapat korelasi dan saling ketergantungan antara sikap penghormatan atas HAM dan sistem politik yang demokratis yang akan melahirkan masyarakat yang menghargai HAM. Namun masyarakat yang demokratis sulit diwujudkan oleh pendidikan model pendidikan yang otoriter totaliter yang merendahkan HAM. Oleh karena itu membangun sistem sosial politik demokratis hanya bisa diwujudkan oleh suatu sistem pendidikan politik kritis. Dengan kata lain untuk menciptakan sistem sosial politik demokratis diperlukan pendidikan politik yang kritis.[]

Hand-Out 22

REFLEKSI KRITIS FREIRE; DARI TATANAN EKONOMI GLOBAL SAMPAI KAPITALISASI PENDIDIKAN

Hakikat Pendidikan Kritis Freire

Pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat bersosialisasi dan beradaptasi dalam budaya yang mereka anut. Pendidikan menjadi salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dan budaya manusia. Dengan kata lain pendidikan adalah salah satu strategi budaya manusia untuk mempertahankan eksistensi kehidupan mereka. Hubungan antara individu, masyarakat dan negara pada dasarnya merupakan hubungan yang tidak berimbang. Diantara hubungan ketiga komponen tersebut, individu memiliki posisi yang paling lemah. Negara mempunyai kekuasaan yang sah dan dijamin oleh hak monopolinya untuk menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun secara administratif. Masyarakat juga memiliki kedudukan yang unggul terhadap individu karena masyarakat dapat menguasai individu lewat kekuatan dominasi dalam ekonomi, maupun lewat kekuatan hegemoni dalam kebudayaan. Dipandang dari sisi epistemologis manusia merupakan makhluk berakal yang dapat menggunakan pikirannya dengan bebas untuk mencari kebenaran dalam pengetahuannya (*truth*). Dan dari sisi etis manusia adalah makhluk yang memiliki hati nurani yang memungkinkannya mencapai kebenaran dalam sikap, keputusan dan tindakan-tindakannya (*rightness*).

Menelaah posisi manusia menurut filsafat Freire bertolak dari kehidupan nyata, bahwa di dunia ini sebagian besar manusia menderita sedemikian rupa, sedangkan sebagian lainnya menikmati jerih payah orang lain dengan caracara yang tidak adil dan yang menikmati ini justru bagian minoritas ummat manusia. Dilihat dari segi jumlah saja ini menunjukkan bahwa keadaan tersebut memperlihatkan kondisi yang tidak berimbang dan tidak adil. Persoalan itu yang disebut Freire sebagai "situasi penindasan". Bagi Freire situasi penindasan apapun nama dan alasannya adalah tidak manusiawi dan menafikan harkat kemanusiaan (*dehumanisasi*). Dehumanisasi bersifat ganda, dalam pengertian, terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri minoritas kaum penindas. Keduanya menyalahi kodrat manusia sejati. Mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasi mereka dinistakan, karena mereka dibuat tak berdaya dan dibenamkan dalam "kebudayaan bisu" (*submerged in the culture of silence*). Adapun minoritas kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakekat keberadaan dan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi sesamanya.

Pendidikan Revolusioner: Melawan Kapitalisme

Pendidikan revolusioner harus dipandu oleh filosofi pendidikan revolusioner. Sasaran pendidikan harus mengenali dan mengakui keterkaitan timbal balik antara kehidupan sosial dengan pendidikan. Pendidikan revolusioner harus menyikapi perkembangan masyarakat kapitalis. Pendidikan harus memosisikan dirinya sebagai alat kritik egalitarian dan anti-otoritarian kontemporer terhadap perkembangan wacana pendidikan dan masyarakat. Zaman dimana sekolah murah tampaknya memang sudah usai. Bahkan keinginan untuk menjadi guru yang manusiawi kini menjadi suatu keinginan yang tidak realistis. Hanya beberapa gelintir sekolah yang memberikan imbalan "manusiawi" pada profesi guru. Jika diusut lebih jauh, komersialisasi pendidikan bersinggungan erat dengan tatanan serta pergeseran formasi kelas sosial yang berlangsung saat ini; formasi sosial yang meluluhlantakkan struktur dan sistem sosial yang lama. Termasuk didalamnya adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah lingkaran yang berisi aktor-aktor yang mengalami perubahan sosial besar. Dunia harus sujud sepenuhnya pada demokrasi liberal yang saat ini menguasai arena kehidupan sosial. Tatanan ekonomi global ini yang menyebabkan kapitalisasi pendidikan. Mengenai kapitalisme, kritik Karl Marx terhadap kapitalisme tidak hanya ditujukan kepada distribusi kekayaan, tetapi kapitalisme dipandang melanggengkan buruh menjadi terpaksa, teralienasi dan tidak bermakna, sehingga transformasi manusia menjadi "sebuah barang aneh yang timpang". Emansipasi keterasingan manusia dalam masyarakat kapitalisme adalah usaha bagaimana menemukan hakekat manusia yang terhegemoni ideologi kapitalisme yang mengasingkan manusia.

Menurut Franz Magnis Suseno ciri masyarakat modern adalah (1) Masyarakat berdasar industrialisasi dan perubahan total gaya hidup, (2) lahirnya masyarakat informasi yang tidak tergantung alam, (3) Terjadi pertarungan ideologi, politik, budaya dan ekonomi modernisasi atau globalisasi hakekatnya bukan hanya perubahan institusional-melainkan juga perubahan kesadaran manusia. Problem modernitas menimbulkan budaya materialisme, konsumerisme, kriminalitas, pelecehan seksual, permisif, hedonisme dan tindakan asusila lainnya. Globalisasi telah memunculkan-masyarakat mekanis-masyarakat global yang pluralistic dan kapitalistik. Menurut Samuel Huntington sebab utama dan paling berbahaya dari munculnya konflik politik global adalah adanya benturan antar peradaban.

Globalisasi dan modernisme mempunyai kaitan erat dengan kapitalisme pendidikan, dimana pendidikan dijadikan ajang akumulasi modal, dan menjadi ajang bisnis elit-elit pendidikan. Maka tidak heran kalau banyak muncul lembaga pendidikan yang berorientasi pasar (*market oriented*). Seiring berkembangnya pasar modal, maka semakin tinggi pula kebutuhan tenaga kerja. Dan yang paling efektif untuk menghasilkan tenaga kerja pasar adalah lembaga pendidikan. Pada titik inilah lembaga pendidikan telah kehilangan ruh dan mengalami disorientasi paradigmatis dimana pendidikan seharusnya berperan sebagai medan transformasi sosial bukan sebagai alat reproduksi sosial. Masyarakat pasar global dengan perangkat industri dan perdagangan bebas menantikan output pendidikan yang sesuai dengan ketrampilan dan kompetensi dalam berbagai bidang kerja.

Tantangan ekonomi liberal telah berdampak pada; *pertama*, semua negara terpacu untuk membuka pasar dan mencabut semua subsidi yang memiliki tujuan perlindungan. Pasar yang dibuka ini diharapkan akan memacu suatu negara untuk berkompetisi secara terus menerus. *Kedua*, melakukan privatisasi terhadap sektor publik. Pemerintah mulai dilucuti agar tidak melakukan kontrol, tetapi membiarkan sektor swasta untuk mengambil alih. Keyakinan *ketiga*, bahwa sistem ekonomi liberal menempatkan Negara sebagai penjamin bagi kelangsungan sistem ekonomi pasar. Terobosan ini bermula pada pencopotan semua layanan publik, namun lama kelamaan menjadi upaya untuk melakukan kapitalisasi atas semua bentuk layanan publik. Termasuk dalam hal ini pendidikan yang dulunya berorientasi pada pencerahan sekarang berorientasi pasar. Posisi pendidikan dalam masyarakat global seharusnya melakukan refleksi kritis terhadap *the dominant ideology* kearah transformasi sosial. Dan tujuan pendidikan adalah menciptakan "manusia ideologis" yaitu manusia yang mempunyai kesadaran kritis. Manusia saat ini telah diberangus oleh perkembangan teknologi yang menciptakan kesadaran semu. Manusia menjadi sangat tergantung terhadap kemudahan-kemudahan teknologi. Secara terus-menerus manusia menjadi budak kapitalisme. Masyarakat modern adalah masyarakat yang mekanis dan statis, dimana manusia telah manusia rakus mengkonsumsi produk-produk industri.

Refleksi dan Aksi

Maka sekarang sudah saatnya melakukan aktualisasi isu pendidikan sebagai alat perlawanan dan transformasi sosial. Alternatif gerakan sosial yang bisa dilakukan adalah *pertama*; mendorong kemandirian politik para pendidik. Artinya para pendidik harus tanggap secara kritis setiap kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah yang berdampak pada sektor pendidikan. *Kedua*, membentuk organ independent yang mengusung issue-issue pendidikan. Dalam konteks ini sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar tetapi juga berperan dalam kerja-kerja pengorganisasian. *Ketiga*, penentuan basis ideologi gerakan yang mengikat organ itu sendiri. Dalam konteks penguatan basis ideologi inilah serangkaian prinsip pedagogi yang demokratis, partisipatoris, anti diskriminasi pada semua struktur pendidikan. *Keempat*; Menghadirkan sekolah alternatif yang memungkinkan proses ideologisasi untuk mengusung gerakan sosial. Konteks pengalaman politik inilah yang menjadikan sekolah sebagai kawah pendidikan bagi seorang aktivis sosial. Sekolah seharusnya menjadi tempat mengenal realitas sosial. Realitas dalam konteks sosial adalah realitas yang harus selalu dipertanyakan. Realitas yang harus diubah dengan pikiran dan tindakan nyata. Pendidikan merupakan instrument yang laten untuk melawan sistem yang tidak adil dan menindas. Pendidikan harus dijadikan ruang mediasi transformasi sosial menuju formasi sosial yang menjamin tatanan sosial yang lebih adil. Maka, realitas sosial sesungguhnya memerlukan perlawanan besar dan panjang.[]

Hand-Out 23 EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN KRITIS

Prawacana

Pendidikan memiliki kekuatan politis dan ideologis dalam mengusung agenda perubahan sosial. Maka tak bisa dipungkiri bahwa institusi pendidikan selalu dijadikan medan dalam melanggengkan kekuasaan. Menjadi sebuah keniscayaan bahwa pendidikan mulai kehilangan fungsinya sebagai medan transformasi sosial dan mendidik masyarakat.

Epistemologi Islam & Hakikat Manusia

Fiisafat Islam dan sistem berfikir Islami secara umum berdasarkan aliran rasionalisme sementara aliran empirikal mendominasi beberapa paham dalam materialisme-antara lain Karl Heinrich Marx (Karl Marx).

Teori rasional adalah tear para filosof Eropa seperti Deskrates (1596-1550), Immanuel Kant (1724-1804), yang mengandakan penginderaan dan fitrah manusia. Sementara ailran empirikal pengalaman adalah sumber utama pengetahuan yang akan membuka tabir realitas. Hakikat manusia dalam pandangan kaum empirisisme adalah menyadari esistensi dan substansi dirinya dalam proses hubungan kesatuan yang produktif dengan manusia lain dan aiarn. Sementara daiarn pandangan rasionalisme hakikat manusia adalah ruh yang langsung berasal dari Tuhan. Epistemoplogi Islam dan pandangan hakikat manusia terseout akan sangat terkait dengan pemetaan paradigma pendidikan.

Paradigma Pendidikan

Sebagai bahan perbandingan dipaparkan paradigma pendidikan yang dipergunakan oleh Henry Giroux dan Aronowitz (1985) yaitu; Paradigma Konservatif, berpandangan bahwa perubahan adalah takdir Tuhan, masyarakat tidak berdaya untuk melakukan peru bahan, dan cenderung menyaiahkan subyeknya.

Paradigma Liberal, berpandangan bahwa masalah pendidikan tidak ada kaitannya dengan masalah politik dan ekonomi masyarakat. Kaum liberal dan konservatif sama-sama berpendirian bahwa pendidikan adalah a-politik, dan "*excellence*" haruslah merupakan target utama pendidikan. Akar pendidikan liberalisme adalan pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak dan kebebasan (*freedom*) serta mengidentifikasi problem dan upaya perubahan sosial secara instrumental demi menjaga stabilitas jangka panjang. Najar pendidikan liberal adalah *structural fungtionalisme*, menstabilkan nilai dan norma masyarakat. Aliran ini cenderung positivistik, artinya tujuan pengetahuan dalah untuk mengontrol, memprediksi memanipulasi dan mengeksploitasi terhadap obyeknya. Paradigma kritis, menghendaki perubahan struktur sosiai yang tidak adil secara fundamental. Berusana melakukan humanisasi untuk transformasi sosial. Paradigma tersebut erat kaitannya dengan penggolongan kesadaran masusia Freire, Kesadaran Magis (*Magical ConsCiousnees*), Kesadaran Naif (*Naival ConsCiousnees*) dan Kesadaran Kritis (*Critical ConsCiousnees*).

Habermas, Kririk Ideologi atas Kurikulum Emansipatoris

Karya awal Habermas berada pada tradisi kritik Mahzab Frankfurt yang didasarkan pada prinsip fundamental keadilan sosial, dukungan terhadap kesetaraan sosial, penciptaan dan pemeliharaan kepentingan umum, serta komitmen pada pencapaian masyarakat demokratis. Habermas mendefinisikan ideologi sebagai "penindasan terhadap kepentingan umum" dimana sistem atau kelompok yang berkuasa beroperasi dengan cara-cara yang rasional yang lemah. Kririk ideologi merupakan kritik terhadap cara kerja kekuasaan dan dominasi cara kerja yang tidak sah dalam masyarakat kapitalis.

Teori kritik Habermas mengusulkan agenda pendidikan dan memiliki metodologinya sendiri terutama kritik ideologi dan riset aksi. Habermas berpendapat kritik ideologi dijalankan pada empat tahap; *Pertama*, deskripsi dan interpretasi situasi yang ada penyelidikan hermeneutik (menggunakan pendekatan *vestehem* dari paradigma interpretatif dari Max Weber). *Kedua*, penerapan nalar, kritik dengan melibatkan individu dan kelompok atas pandangan dan praktik

mereka akibat distorsi ideologis. *Ketiga*, Penyusunan agenda untuk mengubah situasi-menuju masyarakat egaliter. *Keempat*, evaluasi terhadap pencapaian situasi baru dan egalitarian yang telah terwujud.

Tiga kepentingan pembentuk pengetahuan dapat menghasilkan tiga rancangan kurikulum; *Pertama*, pandangan *rasionalis* dan *behavioris*, yaitu kurikulum sebagai produk, menunjukkan kepentingan teknis, sehingga menghasilkan kurikulum birokratis. *Kedua*, Pandangan *humanistic*, *interpretative* dan *pragmatis*, yaitu kurikulum sebagai praktik, pendekatan proses dengan *hermenetik curriculum project* untuk mewujudkan kepentingan hermenetik. *Ketiga*, pandangan *eksistensial* dan *kritik ideology*, yaitu "kurikulum sebagai praksis", mewujudkan kepentingan emansipatoris. Kepentingan emansipatoris memerlukan kurikulum melalui riset aksi. Kurikulum merupakan wilayah pertarungan ideologi.

Epilog

Dari pemaparan tersebut jelaslah melacak epistemologi pendidikan menjadi diskursus penting dalam menggali dan merumuskan arah gerak perubahan kebijakan pendidikan yang berihak pada kaum lemah. Usaha strukturasi (*struturation*) yaitu penataan relasi-relasi sosial lintas ruang dan waktu harus menjadi agenda propaganda utama. Sebagaimana dikatakan oleh Antony Giddens, maka sangat perlu perlu diciptakan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) yaitu ekspresi verbal oleh aktor-aktor perubahan pemikiran dari gerakan sosial atas tindakan individu dan masyarakat.[]



Pendidikan memiliki kekuatan politis dan ideologis dalam mengusung agenda perubahan sosial. Menjadi sebuah keniscayaan bahwa pendidikan harus mengembalikan fungsinya sebagai medan transformasi sosial dan mendidik masyarakat!

Hand-Out 24

KOMODIFIKASI PENDIDIKAN SEBAGAI ANCAMAN KEMANUSIAAN

Prawacana

Tulisan ini merupakan atau refleksi atas dampak liberalisasi perdagangan global terhadap “komodifikasi (*commodification*) pendidikan”. Komodifikasi merupakan proses transformasi ideologi pendidikan sebagai suatu komoditi atau barang untuk diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan. Kasus bagaimana komodifikasi pendidikan terjadi sesungguhnya merupakan cermin dari kecenderungan ideologi global yang saat ini tengah mengancam umat manusia.

Kapitalisasi adalah ancaman terhadap dunia pendidikan. Pendidikan sebagai proses yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam rangka menyiapkan generasi penerusnya agar dapat bersosialisasi dan beradaptasi dalam budaya yang mereka anut, sesungguhnya merupakan salah satu tradisi umat manusia yang sudah hampir setua usia manusia. Pendidikan memang sudah sejak zaman dahulu kala menjadi salah satu bentuk usaha manusia dalam rangka mempertahankan keberlangsungan eksistensi kehidupan maupun budaya mereka.

Pendidikan sesungguhnya dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk strategi budaya tertua bagi manusia untuk mempertahankan keberlangsungan eksistensi mereka. Pendidikan, memang dari waktu ke waktu maupun dari tempat ketempat yang lain, atau dari teori ke teori yang lain, mengandung banyak gagasan, visi dan ideologi. Pendidikan memang muncul dalam berbagai bentuk dan paham.

Pendidikan banyak dipahami sebagai wahana untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, alat pembentukan watak, alat pelatihan ketrampilan, alat mengasah otak, serta media untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Sementara bagi paham lain, pendidikan lebih diyakini sebagai suatu media atau wahana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat pembentukan kesadaran bangsa, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status sosial, alat menguasai teknologi, serta media untuk menguak rahasia alam raya dan manusia. Namun banyak praktisi dan pemikir pendidikan yang menempatkan pendidikan justru sebagai wahana untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia, serta wahana untuk pembebasan manusia.

Berbagai kebudayaan dan keyakinan umat manusia, sesungguhnya terus menerus berusaha untuk menjaga dan mempertahankan penyelenggaraan pendidikan secara turun-menurun. Penyelenggaraan pendidikan selanjutnya menjadi kewajiban kemanusiaan maupun sebagai strategi budaya dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka. Itulah makanya, melihat begitu pentingnya pendidikan bagi umat manusia, banyak peradaban manusia yang “mewajibkan” masyarakatnya untuk tetap menjaga keberlangsungan pendidikan. Misalnya saja bagi kalangan Muslim ada tradisi keyakinan keagamaan yang berbunyi bahwa: “*menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kaum muslim lelaki maupun perempuan*”. Bahkan masih dilanjutkan dengan anjuran,untutlah ilmu sampai ke negeri China. Banyak tradisi dan keyakinan manusia menekankan akan pentingnya pendidikan dan mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Semua anjuran tersebut semata didasarkan karena keyakinan bahwa eksistensi umat manusia akan terancam jika pendidikan diabaikan. Dalam perjalanan peradaban manusia selanjutnya, mereka senantiasa menjaga dan melanjutkan tradisi pendidikan melalui berbagai bentuk dan institusi pendidikan. Masing-masing model dan bentuk pendidikan tersebut saling berlomba untuk mendidik manusia. Berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk melakukan pendidikan tersebut, lambat laun memunculkan berbagai model dan institusi pendidikan yang tercatat dalam sejarah pendidikan, sebagian bentuk dan institusi tersebut sebagian besar telah punah, namun beberapa masih tetap bertahan. Institusi pendidikan itu misalnya saja *Academia* di Yunani, Padepokan atau Pesantren di Jawa, *Monastery* di kalangan Gereja, Madrasah di kalangan masyarakat Muslim ataupun *Santiniketan* di India, dan masih banyak lagi. Salah satu institusi pendidikan yang sekarang menjadi model yang dominan adalah yang dikenal dengan “sekolah” ataupun “universitas”.

Selain itu, sejarah perjalanan perkembangan keyakinan dan pemikiran umat manusia tentang pendidikan juga telah melahirkan berbagai ideologi serta paradigma tentang, hakekat, tujuan dan metode pendidikan yang berbeda-beda. Bagi sekelompok masyarakat pendidik yang berangkat dari pendirian bahwa hakekat pendidikan adalah demi untuk menjaga nilai-nilai yang ada dan

mempertahankan nilai dan tradisi yang sudah mereka anut, adalah aliran pendidikan yang kemudian dikenal sebagai pendidikan aliran *Koservative* maupun *Intelektualisme*. Sementara itu berkembangnya peradaban *Liberalisme* abad modern juga telah melahirkan pemikiran dan teori pendidikan dengan perspektif Liberal, seperti aliran *Experimentalisme* dan juga *Behavionsme*. Mereka berpendirian bahwa pendidikan harus senantiasa membuat masing-masing individu manusia untuk memiliki personal behavior yang efektif, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem politik dan struktur ekonomi yang penuh dengan persaingan tersebut. Siapa kuat dan pandai akan menang dan mereka yang kalah akan tersingkir.

Sementara itu, manusia terus belajar dari pengalaman mereka tentang penyelenggaraan pendidikan. Mereka mulai merasakan bahwa pendidikan dalam perjalanannya semakin dirasakan tidak terbebas dari kepentingan sosial politik dan ekonomi. Bahkan pendidikan, lambat laun dirasakan telah digunakan oleh para penguasa demi melanggengkan atau melegitimasi dominasi mereka. Saat itulah muncul kritik bahwa pendidikan sudah tidak netral lagi, melainkan sebagai sarana untuk "*mereproduksi*" sistim dan struktur sosial yang tidak adil seperti relasi kelas, gender dan warna kulit ataupun sistim relasi lainnya. Meskipun begitu, ada pandangan lain yang masih percaya bahwa hakekatnya pendidikan sebagai strategi humanisasi. Mereka percaya bahwa pendidikan merupakan proses "*dekonstruksi*" yang memproduksi wacana tanding, untuk membangkitkan kesadaran kritis kemanusiaan. Pendidikan selanjutnya bagi mereka ini identik dengan "proses pembebasan manusia". Pendirian ini berangkat dari asumsi, bahwa manusia dalam sistim dan struktur sosial yang ada telah mengalami proses dehumanisasi.

Pendidikan sebagai Hak asasi Manusia

Setelah peradaban umat manusia memasuki abad yang ke-20, urusan pendidikan sudah menjadi semakin pelik. Banyak sudah filosof dan pemikir pendidikan dan "guru" yang telah dilahirkan. Deretan guru dan pendidik yang mengisi sejarah pendidikan umat manusia diantaranya Plato dan Aristoteles, Al Ghazali, Thomas Aquinas, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Edmund Burke dan banyak lagi "guru" pendidikan konservatif, baik yang religius maupun yang sekuler. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia juga telah melahirkan banyak pendidik yang dapat disebut sebagai tokoh "guru" penganut Aliran atau paham Liberal. Mereka muncul dimana-mana serta dari zaman ke zaman, dan diantaranya adalah B.F. Skinner, John Dewey, Montessori, R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Umat Manusia juga telah melahirkan para pendidik radikal dan anarkis seperti Mahatma Gandhi, Antonio Gramsci, Paulo Freire, sampai Ivan Illich. Berbagai bentuk dan teori serta metodologi pendidikan telah dicobakan. Namun, ada suatu hal yang tetap kokoh, bahwasanya seluruh umat manusia tetap menganggap seperti sedia kala bahwa pendidikan sangat penting bagi eksistensi umat manusia. Itulah makanya, dalam perjalanan peradaban umat manusia, akhirnya mereka secara tegas menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu Hak-Hak Asasi manusia. Deklarasi Universal tentang hak-hak Asasi Manusia. Dalam "Deklarasi Universal HAM" yang di proklamasikan pada akhir perang Dunia ke II tersebut, adalah merupakan komitmen umat manusia untuk menetapkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia. Artinya, negara-negara anggota PBB berkewajiban untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka tanpa memandang suku, warna kulit, keyakinan agama maupun jenis kelamin dan kelas sosial ekonominya. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak bahkan menetapkan bahwa negara peserta konvensi berkewajiban memberikan pendidikan secara gratis bagi anak hingga usia 18 tahun anak-anak mereka. Tugas negara dalam urusan Hak-Hak Asasi manusia adalah melindungi, dan mempromosikan dan mencegah pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia warga negaranya. Dengan demikian, "Iwajib belajar" dalam konteks Hak Asasi Manusia adalah kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan bagi warga negaranya. Sejak saat itulah peradaban umat manusia telah mencapai pada lahirnya suatu paham bahwa "pendidikan" pada dasarnya adalah hak asasi manusia. Perjalanan peradaban umat manusia akhirnya mencapai puncaknya, dimana manusia menegaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanggengkan eksistensi umat manusia dari kepunahan. Itulah sebabnya dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan politik, ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk menghalangi, ataupun yang akan menyebabkan anggota masyarakat tidak mendapatkan pendidikan, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Komoditisasi Pendidikan sebagai ancaman Kemanusiaan.

Dewasa ini umat manusia tengah memasuki suatu zaman baru yang ditandai dengan menguatnya paham Pasar bebas, yang dikenal sebagai zaman Globalisasi. Tradisi umat manusia untuk mempertahankan eksistensi mereka melalui pendidikan mendapat tantangan, karena pendidikan ternyata bagi sebagian manusia dapat digunakan untuk mengakumulasi kapital dan mendapatkan keuntungan. Bagaimana mungkin tradisi manusia tentang visi pendidikan sebagai strategi untuk eksistensi manusia yang telah di reproduksi berabad-abad selama ini, diganti oleh suatu visi yang meletakkan pendidikan sebagai komoditi. Tapi apa sesungguhnya yang mendorong terjadinya komoditisasi pendidikan ini?

Pendidikan diperlakukan sebagai komoditi diperkuat sejak dikembangkannya ditandatangani kesepakatan GATT, di mana dunia secara global telah memihak pada kepentingan pasar. Hal itu dilakukan demi membuka peluang bagi Trans National Corporations (TNCs) untuk ekspansi. Salah satu usaha strategis mereka adalah mempengaruhi kebijakan negara negara Selatan untuk melicinkan "jalan" bagi TNCs untuk beroperasi. Mekanisme dan proses Globalisasi yang diperjuangkan oleh para aktor utama, Globalisasi yakni TNCs, Bank Dunia IMF melalui kesepakatan yang dibuat di WTO, sesungguhnya dilandaskan pada suatu ideologi yang berangkat dari kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai sebagai hasil normal dari "kompetisi bebas". Kompetisi Pasar Bebas merupakan suatu kompetisi yang agresif akibat dari terjaganya mekanisme pasar bebas. Kesemua keyakinan ini berangkat dari suatu pendirian bahwa "pasar Bebas" itu efisien. Pasar bebas diyakini sebagai cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam yang langka, demi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah sumber daya telah habis atau masih banyak. Kalau harga murah itu berarti persediaan memadai. Harga mahal artinya produknya mulai langka. Harga tinggi maka orang akan menanam modal ke sana. Oleh sebab itu harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi. Itulah alasan mengapa Neo-Liberal ekonomi tidak ingin pemerintah ikut campur, serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar untuk bekerja. Keputusan individual atas *interest* pribadi diharapkan mendapat bimbingan dari *invisible* hand sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari ribuan keputusan individual tersebut. Dan pada akhirnya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut akan *trickle down* kepada anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu sedikit orang tersebut perlu difasilitasi dan dilindungi. Kalau perlu jang dipajaki. Pendirian ini pada prinsipnya tidak bergeser dari paham Liberalisme yang dipikirkan Adam Smith dahulu kala dalam karyanya *The Wealth of Nations* (1776).

Paham inilah yang sejak lama berusaha untuk membatasi peran pemerintah dan lebih memberi kesempatan pada perusahaan perusahaan swasta untuk menjadi aktor dalam bidang ekonomi di bawah situasi persaingan bebas yang diciptakan oleh gagasan "Pasar Bebas". 'Biarkan pasar menentukan harga'. Akibat dari pendirian pasar bebas tersebut ada sejumlah akibat yang nantinya akan berpengaruh terhadap visi pendidikan dan akan memaksa komodifikasi pendidikan terjadi.

Pertama, mereka menuntut untuk membebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang perburuan, investasi, harga serta biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur diri sendiri, untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan. Di bidang pendidikan, implikasi pendirian ini adalah, pemerintah juga harus melepaskan semua sekolahnya, dan serahkan urusan pendidikan kepada perusahaan swasta. *Kedua*, mereka juga menuntut agar negara menghentikan subsidi kepada rakyat karena hal itu selain bertentangan dengan prinsip Neoliberal tentang jauhkan campur tangan pemerintah juga bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan privatisasi semua perusahaan milik negara termasuk lembaga pendidikan negara maupun semua bentuk "subsidi pendidikan" kepada rakyat harus dihentikan dan biarkan mekanisme pasar dalam sektor pendidikan yang menentukan. Gagasan untuk menghapuskan subsidi terhadap universitas negara maupun penghapusan segala bentuk subsidi pendidikan ini berangkat dari asumsi bahwa perusahaan negara pada dasarnya dibuat untuk melaksanakan subsidi negara pada rakyat. Oleh karena subsidi pendidikan akan menghambat persaingan bebas dalam bidang pendidikan, maka subsidi pendidikan harus dihapus. Mereka juga percaya bahwa pasar bebas dalam pendidikan akan sulit diwujudkan jika masyarakat masih

mempertahankan semangat dan ideologi 'pendidikan sebagai hak semua manusia' karena hal itu akan menghalangi pertumbuhan ekonomi disektor pendidikan.

Akibat Liberalisasi pendidikan ini, pendidikan akan hanya mampu dijangkau oleh mereka yang secara ekonomi diuntungkan oleh struktur dan sistem sosial yang ada. Sementara itu bagi mereka yang datang dari kelas yang dieksploitasi secara ekonomi tidak akan mampu menjangkau pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan telah menjadi suatu komoditi, bagi mereka yang memiliki uang dan mampu untuk membayarnya, akan menikmati pelayanan dan mutu pendidikan, sementara bagi mereka yang tidak mampu membayar pendidikan tidak akan mendapat akses dan pelayanan pendidikan. Pendidikan yang sejak lama menjadi usaha untuk mempertahankan eksistensi dan budaya manusia, saat ini tengah mengalami pergeseran orientasi, visi maupun ideologi yang berakibat ancaman bagi eksistensi manusia sendiri.

Refleksi Pendidikan

Tulisan ini sekali lagi merupakan refleksi dan perenungan yang mendalam dan kritis dari seorang praktisi pendidik Humanis Radikal yang memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap proses humanisasi. Apa yang digelisahkan oleh penulisnya adalah, bahwa pendidikan, setelah dikaji secara politik ekonomi, ternyata telah menjadi alat dari kepentingan yang mengingkari hakekat pendidikan, yakni sebagai strategi budaya kemanusiaan untuk memanusiakan manusia. Apa yang menjadi visi dan misi kemanusiaan dari pendidikan, yakni pendidikan sebagai suatu strategi kebudayaan manusia, dalam pengalaman empirik tulisan ini, saat ini tengah menghadapi tantangan besar. Secara tajam, tulisan ini mengantarkan pembaca untuk tumbuhnya kesadaran kritis tentang hakekat pendidikan. Dari refleksi ini dapat dimengerti bahwa pendidikan dalam kenyataannya tengah mengingkari visi dan misi utamanya: memanusiakan manusia semua sistem dan struktur. Ekonomi Kapitalistik telah membuat praktek pendidikan justru melanggengkan kelas sosial dan ketidakadilan sosial. Secara tajam tulisan ini melihat bahwa pendidikan, dari kacamata analisis politik ekonomi, tengah mengalami dekadensi dan degradasi. Oleh karena itu pesan utama dari tulisan ini ajakan untuk mengembalikan pendidikan pada semangat awalnya.

Seluruh manusia pada dasarnya mewakili kegelisahan praktisi pendidikan dan para pendidik yang beraliran pencinta manusia, untuk selalu bercita-cita mengembalikan visi dan misi pendidikan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam semangat kerakyatan. Kita beruntung karena dapat membaca refleksi pendidikan ini, karena usaha untuk melakukan refleksi terhadap pendidikan. Pokok pikiran dasar tulisan ini merupakan peringatan bahwa kita harus mencegah pendidikan berakibat menjadikan manusia terdidik menjadi eksklusivistik, elitis karena kedudukannya sebagai kelas kaum terpelajar. Baginya, pendidikan harus dikembalikan pada semangat dan komitmennya untuk pemberdayaan terhadap rakyat yang termarginalkan dan tersingkirkan. Akhirnya, semogatulisan ini akan menjadi inspirasi baru bagi ribuan pendidik yang masih setia pada hati nurani seorang pendidik sejati yang humanis dan populis, untuk melahirkan aksi dan refleksi untuk mengembalikan pendidikan sebagai bagian dari strategi manusia untuk eksistensi kemanusiaan dari ancaman yang disebut sebagai komodifikasi pendidikan.[]



Pendidikan; bukan *banking concept of education*!

Hand-Out 25

RELASI PENDIDIKAN, KEKUASAAN NEGARA DALAM JERATAN ARUS GLOBALISASI

Pra wacana

Pendidikan dimaknai oleh banyak pakar sebagai institusi untuk mendidikan generasi manusia dengan berbagai disiplin ilmu. Peradaban manusia juga tidak terlepas dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia akan berubah menjadi maju atau bahkan mengalami kemunduran tergantung pada penguasaan pengetahuan. Dilihat dari aspek historis pendidikan di Indonesia adalah warisan kolonial belanda yang sampai sekarang watak pendidikan Indonesia masih tercerabut dari akar tradisi.

Untuk menata kembali butuh sistem pendidikan yang jelas, dan yang paling vital adalah bagaimana merumuskan paradigma. Belum lagi terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini, kebijakan belum berpihak kepada masyarakat yang belum mampu. Hegemoni negara tentu sangat bersinggungan dengan kebijakan pendidikan, sehingga kekuasaan dan pendidikan harus dipisahkan dari mata rantai kepentingan politik sesaat.

Kemajuan peradaban yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi berimplikasi pada moralitas manusia. Efek globalisasi misalnya telah merambah berbagai sektor kehidupan manusia, mulai dari alat komunikasi, transportasi, dunia maya, dan kecanggihan teknologi lainnya. Globalisasi telah berdampak pada mainstream bahwa manusia harus bisa mengendalikan teknologi.

Globalisasi ditandai dengan ketersinggungan antara negara, pasar atau sistem ekonomi global dan masyarakat sipil. Kalau diurai maka persoalan pendidikan Indonesia tidak hanya masalah penataan kurikulum, profesionalitas guru, out-put lembaga pendidikan, paradigma pendidikan, dan persoalan internal penyelenggaraan lembaga pendidikan lainnya. Tapi lebih dari itu ada faktor eksternal yang juga sangat berpengaruh pada pendidikan Indonesia yaitu persoalan rakyat miskin sehingga tidak mampu sekolah, disorientasi kebijakan pemerintah, pendidikan *market oriented*, relasi kekuasaan negara, dan pusaran arus globalisasi.

Rumusan paradigma pendidikan tentu jangan sampai lemah karena terseret arus globalisasi. Sehingga tidak mengorbankan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan dengan memaksa out-put untuk diterjunkan ke dunia pasar kerja. Karena globalisasi tidak bisa dibendung maka sikap kita adalah harus beradaptasi secara arif tanpa harus menolaknya. Kekuasaan negara yang berkolaborasi dengan kekuatan ekonomi global inilah yang menimbulkan dampak negatif dalam segala sektor negara termasuk dalam hal ini adalah dunia pendidikan.

Diskursus Pendidikan dan Kekuasaan

Akar tradisi kehidupan bangsa Indonesia adalah negara maritim dan negara agraris. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya sehingga banyak negara yang sudah maju berusaha untuk mengeksploitasi kekayaan. Kolonialisme dan imperialisme dengan dalih akumulasi kapital telah membawa dampak keterbelakangan masyarakat Indonesia. Setelah mengalami trauma yang berkepanjangan Indonesia berusaha bangkit merekonstruksi seluruh sistem tata negara dalam berbagai sektor. Yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah masyarakat sipil dilibatkan menjadi penentu kebijakan. Sehingga formulasi kebijakan negara yang diimplementasikan dalam kehidupan publik merepresentasikan kepentingan komunitas sipil. Hal ini menjadi persoalan serius untuk diapresiasi karena seringkali watak hegemonik dan represif negara masih menjadi karakter.

Jelasnya bahwa masyarakat sipil yang selalu dijadikan objek pemerintah, masyarakat Indonesia tidak ditempatkan dalam diskursus liberal kebebasan—berkumpul, berpendapat, berorganisasi, berekspresi terutama pada rezim Orde Baru. Proses depolitisasi sebagai praktek hegemonik rezim yang berwatak *otoritarian-birokratik* telah efektif melemahkan kritisisme dan progressifitas masyarakat sipil. *Governmentality* tidak memahami negara dan masyarakat sipil dalam pengertian oposisi biner, yang selalu bertentangan satu sama lain dan berusaha saling melemahkan pengaruh pihak lain.

Kekuasaan bukanlah persoalan menerangkan belenggu pada warga negara dengan tujuan 'membuat' mereka mampu mengemban bentuk kebebasan yang terkontrol. Otonomi personal bukanlah antitesis dari kekuasaan politik, melainkan merupakan istilah kunci dari praktik kekuasaan

politik, karena sebagian besar individu hanya menjadi subyek kekuasaan tetapi juga berperan menjalankan operasi kekuasaan itu.

Ketika praktik kekuasaan berimplikasi pada pendidikan maka akan berdampak pada pemanfaatan institusi pendidikan sebagai alat untuk melanggar status penguasa. Hal ini pernah terjadi ketika rezim Orde Baru berkuasa. Maka ada empat persoalan yang muncul antara lain; 1) domestifikasi dan stupidifikasi pendidikan, 2) Indoktrinasi, 3) demokrasi dalam pendidikan, 4) integrasi sosial.

Selain telikungan kekuasaan negara pendidikan di Indonesia juga dihadapkan pada krisis multidimensi. Multi krisis yang ditandai dengan timbulnya konflik, ketegangan, dan aksi kekerasan antar kelompok sosial, etnis, suku dan agama dan antar partai politik seperti yang terjadi berbagai belahan nusantara telah membawa kerugian yang terhitung terhadap pendidikan nasional.

Dehumanisasi Rasionalitas Globalisasi

Manusia akan menjadi mekanistik karena harus menjalankan seluruh alat teknologi. Teknologi tentu memudahkan kehidupan manusia tetapi dampak negatif yang timbul seringkali tidak sebanding dengan manfaatnya. Pusaran arus kapitalisme global yang bersumbu pada kekuatan pasar eropa tentu akan semakin mengendorkan kekuatan ekonomi negara-negara miskin dan berkembang. Berangkat dari refleksi tersebut kebijakan pendidikan harus kembali pada norma etik dengan beradaptasi atas fenomena global kekinian. Out put pendidikan harus memiliki moralitas tinggi, kepekaan sosial, menjunjung harkat dan martabat negara, dan ikut menentukan arah peradaban manusia.

Globalisasi merupakan suatu proses yang dinamis dari berbagai sektor dalam sejarah manusia. Aktor penting dalam proses ini terjadi pada akhir Perang Dunia II dengan lahirnya *Brettonwood System*, demikian pula muncul kerjasama bantuan internasional dalam bantuan sesudah perang dalam membangun kembali negara-negara yang hancur seperti eropa. Di Eropa dikenal rancangan kembali dalam bentuk Marshal Plan oleh Amerika Serikat. Di negara-negara Asia terjadi perubahan dalam integrasi tata ekonomi kolonial ke tata sistem ekonomi industri. Keseluruhannya telah menimbulkan munculnya perdagangan global yang kemudian terikat dalam perjanjian-perjanjian multilateral, maka munculah lembaga-lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF). Demikian juga Bank Dunia yang merupakan sumber dana dari pembangunan internasional. Dengan demikian proses globalisasi terus merasuk dalam pelbagai bentuk kehidupan manusia, politik, ekonomi, sosial budaya dan pembangunan manusia (*human development*).

Tinjauan perspektif Kellner dari sudut pandang teori sosial kritis bahwa; globalisasi melibatkan pasar kapitalis dan seperangkat relasi sosial dan aliran komoditas, kapital, teknologi, ide-ide, bentuk-bentuk kultur dan penduduk yang melewati batas nasional via jaringan masyarakat global, transmigrasi teknologi dan kapital bekerjasama menciptakan dunia baru yang mengglobal dan saling menghubungkan. Revolusi teknologi yang menghasilkan jaringan komunikasi komputer, transportasi dan pertukaran merupakan pra-anggapan (*presupposition*) dari ekonomi global, bersama dengan perluasan sistem pasar kapitalis dunia yang menarik lebih banyak area dunia dan ruang produksi, perdagangan dan konsumsi kedalam orbitnya.

Ketersinggungan globalisasi dengan sektor pendidikan telah mengakibatkan pergeseran paradigma. Ini terlihat dari mayoritas lembaga pendidikan berkompetisi menghasilkan out-put yang siap kerja (baca: berorientasi pasar) tentu cara pandang ini telah keluar dari nilai-nilai pendidikan. Kebutuhan pasar adalah tenaga kerja yang ahli atau mempunyai skill untuk mengoperasikan teknologi industri. Manusia menjadi mekanistik dan telah tercerabut dari harkat kemanusiaannya karena telah teralienasi, tereksplorasi dan terasing dari nilai-nilai humanisme.

Visi Pendidikan di Era Globalisasi

Dalam sebuah penelitian ilmiah *Human Recourse Development in the Globalization Era, Vision, Mission, and Programs of Action for Education and Training Toward 2020* H.A.R Tilaar, menjelaskan tentang program aksi menyeluruh dalam menghadapi gelombang globalisasi. Empat kekuatan yang perlu dicermati pendidikan nasional; 1) kerjasama regional dan internasional, 2)

demokrasi dan peningkatan kesadaran HAM serta pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*), 3) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 4) identitas bangsa dan internasionalisme.

Orientasi kebijakan negara yang mengendepankan ideologi developmentalisme telah menyeret masyarakat ke jurang kemiskinan, betapa tidak infrastruktur yang dibangun tentu hanya diperuntukkan bagi mereka yang kaya. Jarak (*detachment*) kelas sosial si kaya dan si miskin semakin jelas terlihat dari akses masyarakat kecil terhadap perlindungan hukum. Produk hukum hanya untuk melindungi pada pemegang modal. Implikasi pada dunia pendidikan adalah bahwa sekolah juga dijadikan ajang bisnis. Pendidikan semakin mahal dengan dalih fasilitas teknologi canggih yang butuh modal hanya sebagai servis pendidikan.

Epilog

Ignas Kleden memberikan analisa kritis bahwa pendidikan nasional. *Pertama*, harus menciptakan masyarakat yang mempunyai kemampuan berfikir logis dan bertindak logis. *Kedua*, pendidikan humaniora harus dibedakan dari ilmu-ilmu humaniora dalam pengertian epistemologis, sehingga pendidikan humaniora menekankan kualitas-kualitas manusiawi dari peserta didik. *Ketiga*, pendidikan bukan hanya menciptakan orang dengan keahlian, tetapi orang-orang dengan kemampuan belajar tinggi.

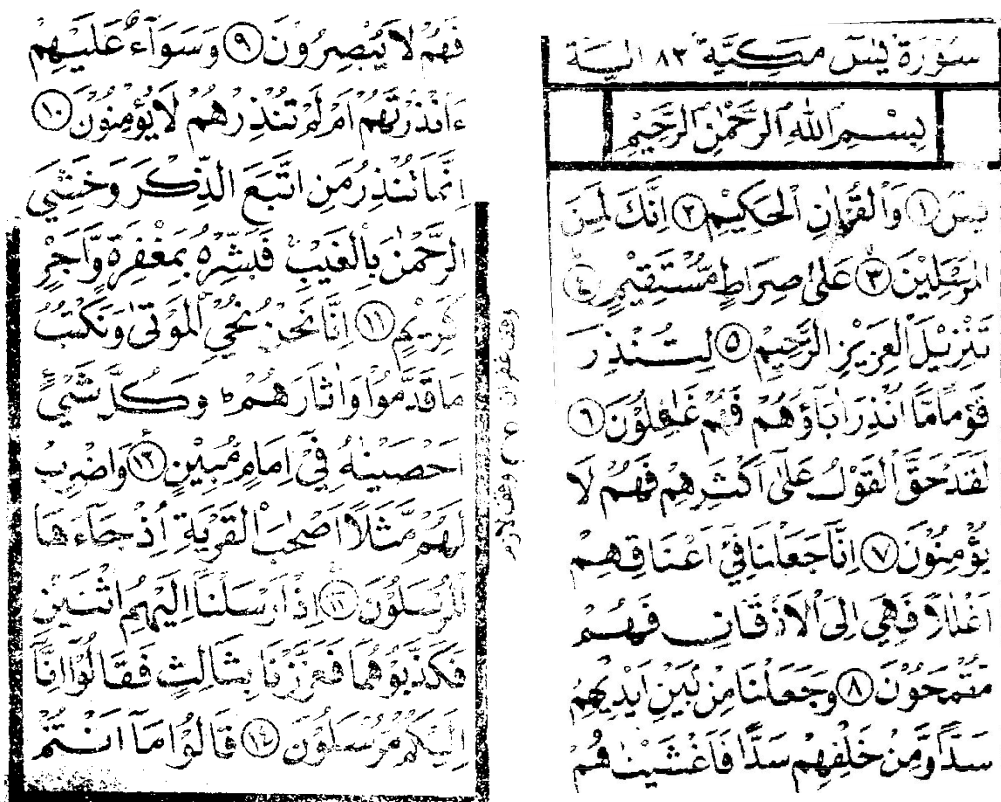
Tanpa mengabaikan otoritas negara dan arus globalisasi yang terus menggerus kekuatan masyarakat sipil, sistem pendidikan Indonesia harus merobah fundamen paradigma pendidikan. *Pertama*, perlu penataan sistem pendidikan yang beradaptasi dengan kekuatan global. *Kedua*, penegakan supremasi hukum dan kedaulatan politik nasional demi menciptakan kondusifitas segala sektor kehidupan, demokrasi, agama, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, budaya, hankam. *Ketiga*, paradigma pendidikan untuk semua kalangan—*education for all*—dan pendidikan sepanjang hidup—*long life education*—harus menjadi *mainstream* kebijakan pendidikan nasional.[]



Proses globalisasi terus merasuk dalam pelbagai bentuk kehidupan manusia, politik, ekonomi, sosial budaya dan pembangunan manusia (*human development*) dan *mainstream* kebijakan pendidikan nasional. Orientasi kebijakan negara yang mengendepankan ideologi developmentalisme telah menyeret masyarakat ke jurang kemiskinan!



BAGIAN KETUJUH DISKURSUS ISLAM DAN TEOLOGI PEMBEBASAN PROGRESIF



(Al-Qur'an Al-Karim, Surat Yaa Siin: 1-14)

Orang-orang kafir dalam arah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menumpuk kekayaan dan terus membiarkan kezaliman dalam masyarakat serta merintangi upaya-upaya menegakkan keadilan. seorang mukmin sejati bukanlah sekedar orang yang percaya kepada Allah akan tetapi juga ia harus seorang mujahid yang berjuang menegakkan keadilan, melawan kezaliman dan penindasan.
(Asghar Ali Engineer)

Islam harus memberikan harapan untuk menjadi mitra bagi peradaban-peradaban lain dalam penciptaan peradaban dunia baru dan universal.
(Hassan Hanafi)

Prinsip-prinsip fundamental Islam bersifat revolusioner. Ia adalah revolusi melawan pendewasaan manusia, melawan ketidakadilan, melawan prasangka ras, politik, ekonomi dan agama.
(Sayyid Qutb)

Hand-Out 26 SEJARAH TEOLOGI PEMBEBASAN AMERIKA LATIN (TAHUN 60-AN)

Prawacana

Berbicara tentang teologi pembebasan dalam diskusi-diskusi resmi atau tak resmi memang terasa problematik. Seringkali diskusi seperti ini dicurigai sebagai gerakan pemikiran kekiri-kirian yang diasosiasikan dengan pendukung komunisme atau dianggap menyebarkan pemikiran subversif. (khususnya pada era Orde Baru lalu). Setelah Orba jatuh dan kebebasan berpikir mulai terbuka diskusi semacam ini juga dianggap tabu dan dipandang dengan mata sinis oleh sebagian kalangan.

Rupanya persepsi itu disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, adanya kesalahpahaman mengenai term teologi pembebasan (*liberation theology*) itu sendiri. *Kedua*, karena teologi pembebasan adalah terminologi yang lahir dari tradisi Kristiani, khususnya di Amerika Latin, dan tidak pernah dikenal secara eksplisit dalam khazanah pemikiran Islam. Dan *ketiga*, karena teologi pembebasan sedikit banyak diinspirasi oleh ideologi kiri dari pemikiran Marxisme yang dalam sejarah perpolitikan Indonesia dianggap memiliki cacat yang tak termaafkan setelah peristiwa G 30 S. Tulisan reflektif ini dimaksudkan untuk sedikitnya mengklarifikasikan asumsi-asumsi yang menjadi keberatan berbagai kalangan terhadap wacana teologi pembebasan. Dan untuk tujuan ini saya berusaha menyelami sejarah sekaligus menemukan makna dan signifikansi teologi pembebasan bagi pemahaman keagamaan kita ke arah pengertian yang lebih transformatif, rasional dan fungsional.

Termonologi Teologi Pembebasan

Pada mulanya istilah teologi pembebasan atau liberation theology diperkenalkan oleh para teolog Katolik di Amerika Latin pada pertengahan abad lalu. Para teolog ini mau membedakan antara metode teologi pembebasan dengan teologi tradisional. Teologi tradisional adalah teologi yang membahas tentang Tuhan semata-mata, sementara teologi pembebasan adalah cara berteologi yang berasal dari refleksi iman di tengah realitas konkrit yang menyejarah. Yakni teologi yang memprihatini nasib dan solidaritas kepada mereka yang menderita ketidakadilan, kalah, miskin, ditindas dan menjadi korban sejarah; teologi yang mau mentransformasikan dunia.

Atau dalam ungkapan Gustavo Gutierrez: *This is a theology which does not stop with reflecting on the world, but rather tries to be part of the process through which the world is transformed. It is theology which is open in the protest against trampled human dignity, in the struggle against the plunder of the vast majority of humankind, in liberating love, and in the building of a new, just, and comradely society to the gift of the Kingdom of God.* (Ini teologi pembebasan] adalah sebuah teologi yang tidak hanya merefleksikan dunia, melainkan juga mencoba melakukan proses transformasi terhadapnya. Ia [teologi pembebasan] adalah teologi yang berupaya untuk melawan pelecehan terhadap martabat manusia, melawan perampasan oleh mayoritas, berupaya untuk membebaskan cinta dan membangun suatu masyarakat baru yang adil dan penuh persaudaraan untuk meraih rahmat dari Kerajaan Tuhan)(Alfred T. Hennelly, SJ, 1995: 16)

Ada banyak macam penamaan yang secara substansial amat dekat dengan gagasan teologi pembebasan ini, diantaranya: teologi pemerdekaan (Romo Mangun), teologi Kiri (Kiri Islam ala Hassan Hanafi), teologi kaum mustadh'afin, teologi kaum tertindas, dan lain-lainnya. Masing-masing penamaan ini hendak mengartikulasikan suatu cara beragama yang otentik, yang lahir dari situasi, sejarah dan keprihatinan atas penderitaan kaum miskin dan tertindas. Oleh karena itu dengan pengertian tersebut jelas sekali teologi pembebasan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan bebas semau gue atau sikap permisif sebagaimana yang sudah disalahpahami. Anggapan seperti itu tentu saja salah alamat dan menunjukkan kebodohan saja. Untuk lebih jelas mengenai karakter dan jalan yang ditempuh teologi pembebasan, mari sejenak melihat teologi pembebasan Amerika Latin.

Belajar dari Teologi Pembebasan Amerika Latin

Teologi pembebasan di Amerika Latin merupakan sebuah entitas gerakan sekaligus juga doktrin. Gerakan ini muncul karena perpaduan dari perubahan-perubahan internal dan eksternal. Secara internal gerakan ini muncul berbarengan dengan perkembangan aliran-aliran teologis dan keterbukaan terhadap perkembangan sains sosial modern. Sementara secara eksternal ia didorong oleh dua situasi: pertama adalah keterbelakangan, ketergantungan, keterpinggiran dan ketertindasan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh proses industrialisasi sejak tahun 1950-an di seluruh benua di bawah arahan modal multinasional; dan kedua meningkatnya perjuangan sosial, gerakan-gerakan gerilya, pergantian pemerintah melalui kudeta militer dan krisis keabsahan sistem politik, sejak meletusnya revolusi Kuba tahun 1959.

Gerakan teologi pembebasan ini melibatkan sektor-sektor penting gereja (para romo, pengamal tarekat atau ordo-ordo, para uskup), gerakan keagamaan orang awam, keterlibatan pastoral yang merakyat serta kelompok-kelompok basis masyarakat gereja yang menghimpun diri menentang sebab-sebab penghisapan dan penindasan, atas dasar nalar moral dan kerohanian yang diilhami oleh budaya keagamaan mereka. Dorongan moral dan keagamaan inilah yang merupakan faktor hakiki yang menggerakkan semangat ribuan aktifis dalam serikat-serikat buruh, kerukunan-kerukunan tetangga, dan front-front kerakyatan untuk melawan penindasan dan kemiskinan.

Adapun doktrin atau ajaran-ajaran penting yang menggerakkan mereka di antaranya adalah: *pertama*, gugatan moral dan sosial yang amat keras terhadap ketergantungan pada kapitalisme sebagai suatu sistem yang tidak adil dan tidak beradab, sebagai suatu bentuk dosa struktural. *Kedua*, penggunaan alat analisis Marxisme dalam rangka memahami sebab musabab kemiskinan, pertentangan-pertentangan dalam tubuh kapitalisme dan bentuk-bentuk perjuangan kelas. *Ketiga*, pilihan khusus bagi kaum miskin dan kesetiakawanan terhadap perjuangan mereka menuntut kebebasan. *Keempat*, pengembangan basis kelompok-kelompok masyarakat agama di kalangan orang-orang miskin sebagai suatu bentuk baru keagamaan dan alternatif terhadap cara hidup individualis yang dipaksakan oleh sistem kapitalis. *Kelima*, suatu penafsiran baru Kitab Suci yang memberikan perhatian penting pada bagian-bagian yang mengusung paradigma perjuangan pembebasan rakyat yang diperbudak. *Keenam*, perlawanan terhadap permerkahan sebagai musuh utama agama, yakni berhalal-berhalal baru: uang, kekayaan, kekuasaan, keamanan nasional, negara, militerisme, peradaban Barat. *Ketujuh*, sejarah pembebasan manusia adalah antisipasi akhir dari Keselamatan. Dan *kedelapan*, kecaman terhadap teologi tradisional yang bercorak platonik yang memisahkan antara sejarah kemanusiaan dan ketuhanan (Michel Lowy, 1999: 25-30).

Dari susunan doktrin teologi pembebasan di atas nampak jelas sekali bahwa gerakan tersebut tidak semata-mata diilhami oleh spirit moral dan keagamaan, melainkan juga oleh keterbukaan para pemrakarsa dan aktivisnya terhadap pemikiran-pemikiran filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern, khususnya Marxisme. Rupanya karena itulah dalam perjalanannya model teologi pembebasan ini juga banyak menerima kritik bahkan cemoohan dan tentangan dari berbagai kalangan. Di antara para pengkritik sendiri adalah para agamawan konservatif yang masih mempertahankan ortodoksi.

Mereka pada umumnya berada, berlindung dan mengambil untung dari kekuasaan yang ada yang justru lalim dan menindas, dan untuk itu mereka menggunakan dalil-dalil keagamaan untuk mempertahankan status quo. Para pengkritik lain menganggap teologi pembebasan cenderung menggunakan jalan kekerasan sebagai alat perlawanan. Hal ini dipandang berkebalikan dengan nilai agama yang membawa pesan cinta kasih dan perdamaian. Teologi pembebasan tentu sangat berbeda dengan pandangan teologis kaum konservatif di atas yang menggunakan agama sebagai instrumen status quo. Kaum konservatif telah memperlakukan agama sebagai candu untuk mencapai kenikmatan sesaat, seraya mengabaikan panggilan profetik kenabian yang bersolidaritas terhadap kaum miskin dan tertindas. Di tangan kaum konservatif ini pulalah energi agama yang sesungguhnya menjadi kekuatan untuk melawan kezaliman, ketidakadilan dan penindasan menjadi susut dan akhirnya musnah. Konservatisme biasanya juga selalu berkarakter sempit dalam cara berpikir dan tertutup dalam wawasan.

Mereka menolak keterbukaan karena dianggap mengurangi kadar keimanannya. Sehingga dalam beberapa kesempatan mereka menolak teologi pembebasan yang telah memakai analisis kelas yang dikembangkan Marxisme. Bagi mereka konflik kelas dalam Marxisme telah menyebabkan

agama telah kehilangan watak spiritualitasnya sekaligus menjadi sekadar gerakan sosial yang kerap diperjuangkan dengan cara-cara kekerasan. Oleh pandangan-pandangan yang sempit inilah, lalu dalam setiap wacana dan gerakannya teologi pembebasan banyak disalahpahami dan dicibir. Bukannya menjadi sarana belajar dan refleksi kritis atas praksis untuk memperkaya pemahaman keagamaan yang sudah usang.

Ada beberapa tokoh atau teolog di Amerika Latin yang mulai membangun dan merumuskan teologi pembebasan. Di antara mereka yang berpengaruh dan sedikit disinggung di sini adalah Gustavo Gutierrez dan Joan Luis Segundo. Gutierrez dalam bukunya berjudul *A Theology of Liberation* menyatakan: *If faith is a commitment to God and to human beings, it is not possible to believe in today world without a commitment to the process of liberation.* (Bila iman adalah suatu komitmen kepada Allah dan umat manusia, maka mustahil keberimanan kita pada hari ini mengabaikan komitmen kepada proses pembebasan umat manusia (dari segala kemiskinan dan penindasan) (Alfred T. Hannelly, 1995: 11).

Di sini jelas bagi Gutierrez bahwa pembelaan terhadap kaum miskin dan perlawanan terhadap para penindas sesungguhnya adalah konsekuensi dari iman seseorang kepada Allah. Iman seseorang tidak bermakna apapun tanpa keterlibatan dirinya dalam praksis sosial dan sejarah. Karena bagi Gutierrez, makna teologi itu sendiri sebenarnya adalah suatu refleksi kritis terhadap praksis dalam terang Kitab Suci. Oleh karena itu pula makna spiritualitas selalu terkait langsung dengan tindakan.

Gutierrez menunjukkan tiga karakteristik teologi pembebasan (Alfred T. Hannelly, 1995: 12). *Pertama*, teologi pembebasan adalah pemahaman yang progresif dan terus menerus atas dasar komitmen kemanusiaan dan keberimanan yang selalu hidup. Oleh karena itu teologi sesungguhnya adalah praksis pembebasan dari belenggu ekonomi, sosial, politik, dan dari sistem masyarakat yang mengingkari kemanusiaan dan dari kedosaan yang merusak hubungan manusia dengan Allah. *Kedua*, teologi adalah sebuah refleksi yang lahir dari tindakan. Gutierrez menulis dalam sebuah paragraf yang cantik: *Theology is a reflection that is, a second act, a turning back, a reflecting, that comes after action. Theology is not first; the commitment is first. Theology is the understanding of commitment, and the commitment is action. The central action is charity, which involves commitment, while theology arrives later on.* (Teologi adalah sebuah refleksi, yakni suatu tindakan kedua, suatu gerak balik, sebuah perefleksian yang dilakukan setelah bertindak. Jadi bukan teologi, melainkan komitmenlah yang pertama. Teologi adalah hasil pemahaman dari komitmen, dan komitmen itu adalah kesediaan untuk bertindak. Inti tindakan adalah kemurahan hati yang disertai komitmen, setelah itu baru teologi hadir).

Oleh karena itu teologi harus menjadi kritis ketika berhadapan dengan masyarakat maupun terhadap institusi keagamaan. Ia harus menjadi pembebas bagi kedua institusi sosial itu dari berbagai macam ideologi, keberhalaan dan alienasi. Sehingga teologi itu sendiri pada akhirnya akan memberikan orientasi dan inspirasi bagi aksi tindakan selanjutnya. Inilah yang disebut dengan keberimanan dalam praksis sejarah, keberimanan yang transformatif. Dan ketiga, setiap tindakan kita harus disertai dengan refleksi untuk memberi orientasi masa depan yang diyakini dan diharapkan dan koherensi agar ia tidak jatuh pada aktivisme.

Meskipun Gutierrez telah memberikan ancangan rumusan metode teologi pembebasan, baru kemudian Juan Luis Segundo yang berhasil mensistematisasi rumusan metodologi teologi pembebasan. Sistematisasi inilah yang nantinya menjadi acuan berbagai metode teologi-teologi pembebasan (*liberation theologies*) lainnya di dunia. Dalam salah satu tulisannya *Two Theologies of Liberations*, ada pernyataan menarik dari Segundo yang dikutip oleh Michel Lowy (Michel Lowy, 1999). Ia menyatakan, Jangan lupa kita hidup di tanah-tanah yang paling agamis dan di tanah-tanah yang paling tidak berprikemanusiaan. Pernyataan ini tampaknya menyembunyikan tapi sekaligus menyingkap suatu ironi. Bagaimana mungkin penindasan justru terjadi dalam masyarakat yang mayoritas beragama yang meyakini bahwa ajaran agamanya melawan ketidakadilan dan penindasan.

Mengapa tidak ada protes atau perlawanan atas kondisi ini dari pihak kaum agamawan? Apakah kaum agamawan buta atau membutakan diri terhadap situasi yang ada? Segundo menyadari bahwa ketidakmampuan mengambil sikap yang diperlihatkan para agamawan itu disebabkan ketidakmampuannya melihat persoalan sosial dan menganalisis struktur-struktur penindasan yang ada. Bukan hanya itu, berlanjutnya penindasan karena agama mengalami impotensi karena

pemahaman terhadap teologi dan kitab suci didominasi oleh tafsir yang justeru tidak sensitif terhadap persoalan masyarakat tertindas. Oleh karena itu menurutnya perlu dilakukan deideologisasi terhadap realitas sosial dan superstruktur serta deideologisasi terhadap interpretasi kitab suci, agar iman kita bisa merespon situasi konkrit penindasan dan ikut berjuang bersama-sama kaum tertindas melawan para penindas. Kebekuan agamawan dalam merespon situasi konkrit ini mendorong Segundo untuk menawarkan metode berteologi yang bukan hanya sebagai usaha ortodoksi tapi juga suatu ortopraksis. Yang dimaksud adalah bahwa berteologi bukan hanya untuk memperteguh dan memantapkan ajaran, tapi juga menjadikan pengalaman konkrit sebagai basis menerapkan sebuah rumusan ajaran. Segundo merumuskan hal ini dalam suatu bentuk lingkaran hermeneutik.

Apakah yang Dimaksud dengan Lingkaran Hermeneutik?

Hermeneutika adalah proses interpretasi untuk membuat pesan kitab suci relevan dengan zamannya, sedangkan lingkaran menunjukkan bahwa usaha interpretasi itu bertitik tolak pada realitas baru yang lalu menuntut kita menginterpretasikan ajaran kitab suci secara baru pula dalam rangka mengubah realitas sebagaimana dituntutkan, dan akhirnya kembali kepada usaha menginterpretasikan kembali firman Allah, dan seterusnya. Menurut Segundo, lingkaran hermeneutik bisa berlangsung dengan dua syarat: pertama, kesangsian-kesangsian atas situasi nyata sungguh-sungguh dalam memperkaya, dan kedua, interpretasi atas kitab suci juga bersifat sungguh-sungguh dalam dan memperkaya (Fr. Wahono Nitiprawiro, 2000: 36-37).

Dalam lingkaran hermeneutik ini sang penafsir dituntut untuk terus menerus melakukan kritik terhadap realitas yang ada sekaligus mengkritik pula pemahaman teologis terhadap realitas tersebut, dan lalu menafsirkannya kembali demi perubahan realitas tersebut. Dengan kata lain, di belakang kritik tersebut sesungguhnya kita selalu dituntut untuk selalu mencurigai suatu tafsir. Atau mencurigai status iman seseorang kepada siapa dia mengabdikan imannya. Pengandaianya adalah bahwa iman itu sendiri bersifat ideologis karena ia lahir dari tanggapan yang menyejarah dan subjektif terhadap wahyu Allah. Oleh karena itu praksis iman seseorang harus senantiasa diberi kritik dengan selalu membenturkannya dengan realitas konkrit. Baru dengan begitu, makna keberimanan seseorang akan membawa transformasi bagi kehidupan ke arah yang lebih baik.

Dari model lingkaran hermeneutika tampak ada 4 langkah penafsiran yang diajukan Segundo (Fr. Wahono Nitiprawiro, 2000: 36-37; Alfred T. Hannelly, 1999: 28). Langkah itu bisa diuraikan sebagai berikut:

Langkah *pertama*: cara kita mengalami realitas yang terumuskan mendorong kita pada posisi kecurigaan ideologis. Pada tahap ini, dalam pengamatan Segundo, Harvey Cox dalam bukunya *The Secular City* (1966) gagal memasuki kesangsian ideologis karena ia bersikap anti pragmatisme sosial. Cox terlalu sibuk pada langkah pertama yakni cara yang kaya dan mendalam mengalami realitas, dia hanya menyangsikan cara lama mengalami realitas yang bertumpu pada kaidah-kaidah nilai kemanusiaan tertinggi, dan mengajukan alternatif cara baru mengalami realitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai efisiensi teknologis tanpa menelisik kepentingan ideologis di balik realitas itu.

Langkah *kedua*: menerapkan kecurigaan ideologis pada seluruh superstruktur ideologis dan khususnya pada teologi. Dalam konteks ini, menurut Segundo, Marx sukses membongkar ideologi dalam masyarakat, tapi gagal membangun transformasi dalam agama, bahkan tidak menyentuh sedikitpun. Marx sukses pada langkah pertama mengalami realitas sejarah sebagai perjuangan kelas. Ia juga memiliki komitmen mentransformasikan dunia dalam konsepnya tentang materialisme sejarah, yakni sebuah patokan bahwa basis hubungan sosial ekonomi menentukan superstruktur ideologi, budaya dan agama. Oleh karena itu dalam rangka menghilangkan cengkeraman penguasa borjuis, hubungan sosial ekonomi itu harus diubah dari feodalisme ke kapitalisme, dari kapitalisme ke sosialisme yang akhirnya ke komunisme. Letak kesangsian ideologis Marx adalah keyakinannya bahwa ideologi yang berkuasa selalu merupakan ideologi dari kelas yang sedang berkuasa. Namun sayangnya komitmen transformasi masyarakat Marx berhenti, ia tidak melanjutkan logikanya mengubah superstruktur untuk pula mengubah agama (sebagai salah satu unsur superstruktur).

Langkah *ketiga*: Dari cara baru mengalami realitas teologis mendorong kita pada kecurigaan eksegesis. Kita mulai mengangskan interpretasi Kitab Suci yang ada karena tidak mengikutsertakan data yang penting. Menurut Segundo, Max Weber dalam *The Protestant Ethic and the spirit of Capitalism* (1904-1905) sukses melihat peranan agama. Weber secara sosio-psiko-historis berhasil mencari peranan superstruktur (agama, etika protestan) terhadap hubungan sosial ekonomi (gairah usaha untuk memperoleh untung, kerja keras, berhemat, menabung dan menumpuk harta spirit kapitalisme). Tapi sebagai seorang Calvinis ia tidak memiliki komitmen terhadap transformasi masyarakat.

Langkah *keempat*: kita mencapai hermeneutika baru dengan menginterpretasikan Kitab Suci secara baru, lebih kaya dan mendalam. Dengan demikian kita juga mengalami realitas secara baru pula.

Menurut Segundo, James H. Cone adalah seorang teolog asal Arkansas, negara bagian Amerika Serikat yang dengan komitmennya terhadap transformasi pembebasan manusia berhasil melalui tahap-tahap penafsiran teologi pembebasan dalam praksis sosial melalui karyanya *A Black Theology of Liberation* (1970). Cone merumuskan teologi pembebasan kulit hitam dalam rangka memberikan acuan teologis dan praktis untuk pembebasan warga kulit hitam yang miskin, tertindas, dan terdiskriminasi. Ia bertolak dari praksis iman yang dialaminya yakni pembebasan kelas kulit hitam di Amerika Utara, yang ditindas oleh kelas kulit putih lengkap dengan ideologi dan teologi membenaran status quo-nya yang menindas.

Cone mepresentasikan Black Theology-nya ke dalam 4 langkah. Langkah *pertama* Cone mengalami realitas di Amerika Utara sebagai perjuangan pembebasan kelas kulit hitam dan makna ketuhanannya dihubungkan dengan solidaritas dengan mereka yang dibelenggu penindasan.

Langkah *kedua* setelah melakukan analisis sosial untuk membongkar sistem-sistem dominasi, seperti rasisme, seksisme, kolonialisme, kapitalisme dan militerisme, Cone sampai pada kecurigaan ideologis terhadap pendapat kelas kulit putih bahwa warna kulit jangan dijadikan titik perbedaan demi kesatuan dan universalitas manusia.

Langkah *ketiga* Cone mengalami kecurigaan eksegesis terhadap cara berteologi kelas kulit putih yang berpusat pada universalitas konteks, yang menutup kemungkinan mendekati Kristus yang terikat dengan kebudayaan tertentu. Dalam hal ini Cone berupaya menafsirkan kembali pesan-pesan Kitab Suci yang sudah didistorsi dan menjadikan Allah menjadi spirit pemberdayaan masyarakat agar lebih manusiawi. Terakhir Cone menekankan cara baru yang kaya dan mendalam mengalami Kitab Suci sebagai wahyu yang relevan bagi perjuangan kelas kulit hitam untuk pembebasan zaman kita sekarang. Termasuk juga disini kebutuhan terhadap bahasa teologi baru yang hadir di dalam cerita-cerita, dongeng-dongeng, nyanyian, kotbah, dan ajaran-ajaran yang lebih bernada membebaskan. Dari uraian di atas, tampak sekali bahwa Cone benar-benar merumuskan model cara beragama sekaligus penghayatan iman secara baru. Yakni iman yang diterangi oleh Kitab Suci yang senantiasa berdialog dengan realitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa teologi pembebasan bukanlah semacam teologi yang sempit, kolot, dan tertutup yang hanya terkesima oleh warisan masa lalu. Melainkan teologi yang selalu berdialog dengan realitas yang membuatnya selalu relevan bagi pemeluknya.

Cara berteologi yang demikian itu menyadari betul bahwa iman sendiri sesungguhnya adalah refleksi individual atau penghayatan terhadap Firman Allah dalam situasi konkrit dan menyejarah. Dengan demikian, berteologi semacam ini sungguh-sungguh akan mendorong untuk lebih bersikap dewasa dan terbuka kepada realitas dan perkembangan pengetahuan yang bisa menjadi bahan untuk memperkaya keberagamaan kita, terutama dalam mengambil sikap terhadap realitas sejarah yang selalu bergerak dinamis.

Teologi Pembebasan Islam, Adakah?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama kita perlu mengetahui kenyataan bahwa gema teologi pembebasan sejak lahirnya pada tahun 50-an dan 60-an abad lalu telah menjadi inspirasi berharga bagi perkembangan teologi-teologi pembebasan lainnya. Di Amerika Utara misalnya ada teologi pembebasan feminis yang digerakkan oleh beberapa tokoh berpengaruh, misalnya: Elizabeth Schussler Fiorenza, Rosemary Radford Ruether, Elizabeth Johnson, Jacquelyn Grant, dan lain-lain; lalu teologi kulit hitam dengan tokoh-tokohnya, seperti James H. Cone, Martin

Luther King, Jr, Malcolm X., dan Delores S. Williams; ada teologi pembebasan Hispanik dengan tokoh-tokohnya Allan Figueroa Deck, dan Mujesrista Theology; ada teologi pembebasan Afrika dengan tokoh-tokohnya Benezit Bujo, Mercy Amba Oduyoye; dan tak ketinggalan teologi pembebasan Asia dengan beberapa tokohnya Aloysius Pieris, Raimundo Panikkar, dan Chung Hyun Kyung.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa semangat dan prinsip teologi pembebasan bisa tumbuh di manapun dan dalam kebudayaan apapun ketika sistem dan struktur sosial dalam masyarakat berjalan timpang, diwarnai dengan kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, serta adegan penindasan kelompok satu atas kelompok lainnya. Munculnya spirit pembebasan ini didorong oleh dua kecenderungan. *Pertama*, dalam diri manusia sebenarnya menyimpan potensi fitrah, yakni kesadaran akan kemerdekaan diri. Potensi itu akan dirasakan dan tampak manakala manusia merealisasikan kebebasan dirinya dalam tindakan-tindakan konkrit. Ketika manusia merasakan dirinya tertekan oleh beban penindasan maka dalam dirinya muncul resistensi dan kehendak untuk membebaskan diri. *Kedua*, dalam sebuah komunitas tertentu kesadaran pembebasan itu sudah ada dan tumbuh (minimal secara potensial) dalam tradisi budaya atau dalam dunia simbolik yang diyakini kebenarannya secara kolektif.

Misalnya dalam dongeng, cerita sejarah, mitos, atau dalam teks-teks Kitab Suci. Fakta mengenai tumbuh suburnya ragam gerakan pembebasan di Asia dan Afrika di atas menunjukkan sekali lagi bahwa ia tidak sekadar dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga faktor internal dalam budaya itu sendiri. Oleh karena itu jika teologi pembebasan bisa tumbuh di berbagai kebudayaan, maka berdasarkan kedua hal tersebut di atas jawaban mengenai ada-tidaknya teologi pembebasan dalam Islam tampaknya bisa diperoleh pula. Pertama berdasarkan kesadaran internal umat Islam yang berkehendak mencari pembebasan dan melakukan transformasi sosial, dan kedua itu dilakukan melalui reinterpretasi terhadap sejarah dan kebudayaan umat Islam atau dengan melakukan rekonstruksi atas pesan-pesan normatif pembebasan dalam Islam sendiri.

Michael Amaladoss membuat penelitian yang sangat menarik mengenai berbagai bentuk teologi pembebasan, khususnya di Asia. Setelah mengkaji berbagai potensi dan watak pembebasan dalam agama-agama di Asia yang meliputi: agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristiani, Islam dan agama-agama Kosmis, Amaladoss menyimpulkan bahwa berbagai teologi tersebut menunjukkan bahwa semua agama memiliki segi-segi yang membebaskan, dan para nabi telah berusaha menyoroti unsur-unsur yang membebaskan itu dalam menafsirkan kembali tradisi agama mereka secara kreatif dan relevan (Michael Amaladoss, 2000: 270). Adapun untuk mengetahui lebih lanjut secara diskursif wacana pembebasan dalam Islam, dalam bagian berikutnya kita akan melihat sekilas beberapa sarjana muslim seperti Ali Syariati, Asghar Ali Engeneer dan tentu saja Hasan Hanafi, yang telah mengangkat elemen-elemen pembebasan dalam Islam baik melalui pendekatan tekstual maupun pendekatan rekonstruksi simbolis dalam sejarah Islam.

Ali Syariati dan Humanisme Islam

Ali Syariati adalah seorang sarjana muslim yang disebut-sebut sebagai seorang ideolog revolusi Islam di Iran. Ia melahap habis pemikiran filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern, dan secara cerdas menggunakan hazanah tersebut secara kritis untuk menganalisis kondisi sosial politik umat Islam. Usaha besar Syariati terletak pada upayanya untuk membeberkan kekhususan ideologi dan kebudayaan Islam, yang dengan demikian menunjukkan terdapat beberapa asas pokok pembebasan dalam agama Islam.

Ali Syariati menganalisis bahwa sesungguhnya dalam diri manusia terdapat nilai-nilai humanisme sejati yang bersifat ilahiyah sebagai warisan budaya moral dan keagamaan. Manusia adalah makhluk yang sadar-diri, dapat membuat pilihan-pilihan dan dapat menciptakan, sehingga di sepanjang sejarah umat manusia berusaha merealisasikan nilai-nilai humanisme tersebut meski yang didapatinya adalah kegetiran dan petaka saat melawan kekuasaan jahat dan penindas. Mengenai hal ini Syariati menyajikan tokoh-tokoh simbolik Kain dan Habel untuk menjelaskan dan menganalisis sejarah kekuasaan.

Menurut Qur'an Kain dan Habel mempersembahkan kurban kepada Allah. Hanyak kurban Habel yang diterima, sementara Kain, karena iri hati, membunuh Habel. Kain adalah petani dan Habel adalah gembala. Syariati melihat hal ini sebagai munculnya monopoli produksi pertanian dan

hak milik pribadi yang menyebabkan munculnya ketidaksamaan ekonomis dan adanya dominasi kekuasaan. Dalam pandangan Syariaty figur simbolis Kain dan Habel ini hadir di tengah sejarah kita dalam tiga bidang: uang, kekuasaan dan agama. Fir'aun adalah tokoh simbolis yang melambangkan kekuasaan, Croesus melambangkan kekayaan, dan Balaam memerankan kaum rohaniawan dan agamawan yang memonopoli agama sebagai sistem upacara ritual. Ketiganya tak henti-hentinya berkolaborasi satu sama lain dalam membangun dan melestarikan kecenderungan sejarah. Di abad Pertengahan, manusia dikurung oleh Gereja Abad Pertengahan dan sistem teokrasi yang menindas, lalu di abad Modern yang menjunjung tinggi asas liberalisme manusia dijanjikan demokrasi sebagai kunci pembebasan namun yang didapatinya adalah teokrasi baru di tangan kapitalisme. Demikian juga komunisme yang menjanjikan persamaan dan kesetaraan ternyata menghasilkan fanatisme kekuasaan yang sama mengerikannya dengan Gereja Pertengahan. Di sisi lain kapitalisme telah menjadi imperialisme dan terus berkembang menjadi sebuah sistem yang mendominasi ekonomi dan kebudayaan negara-negara dunia ketiga.

Kapitalisme telah menciptakan kebudayaan materialis yang seragam dan dalam proses melucuti akar-akar kebudayaan dan keagamaan rakyat, melucuti jati diri dan kemanusiaan mereka sehingga menjadi objek-objek yang mudah dieksploitasi. Dan celaknya dominasi budaya Barat ini dilestarikan secara sukarela oleh para intelektual setempat tanpa memahami hakikat baru penjajahan atas negara-negara dunia ketiga ini. Dalam pandangan Ali Syariaty semua ideologi dunia ini telah gagal membebaskan manusia dan sebaliknya menciptakan bentuk-bentuk ketidakadilan baru dan penindasan baru pula dalam ungkapan dan sarana yang berbeda. Karenanya untuk mengatasi problem sosial ini harus dicari jalan baru, sebuah jalan ketiga yang menurut Ali Syariaty bisa diperankan oleh Islam. Dalam konteks ini Ali Syariaty nampaknya memimpikan lahirnya nabi-nabi baru. Nabi-nabi baru yang diperankan oleh para pemimpin spiritual atau intelektual sebagai para pemikir bebas yang telah memperoleh pencerahan.

Menurut hemat penulis, gagasan Ali Syariaty ini sangat dekat dengan gagasan Gramsci yang memberi arti penting bagi keberadaan intelektual organik. Sebagaimana Gramsci, Ali Syariaty menggambarkan nabi-nabi baru atau para pemikir bebas ini sebagai pemimpin spiritual atau intelektual yang mampu berbahasa selaras dengan bahasa rakyat pada zamannya, juga mampu merumuskan pemecahan-pemecahan masalah sesuai dengan suara-suara dan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Mereka membimbing dan bekerja demi keadilan, serta berjuang demi pembebasan umat manusia dari ketidakadilan, penindasan, pemiskinan dan penjajahan. Inilah makna kesyahidan menurut Ali Syariaty, yang harus dijalani oleh para Nabi yang dalam tradisi Syiah pernah dihadapi oleh Imam Husayn (Michael Amaladoss, 2000: 238-240).

Ali Syariaty membubuhkan spirit pembebasan Islam dalam sebuah bait doa dalam Martyrdom berikut ini:

*Ya Allah, Tuhan orang-orang yang terampas!
Engkau hendak merahmati
Orang-orang yang terampas di dunia ini,
Orang kebanyak yang bernasib tak berdaya
Dan kehilangan hidup,
Orang yang diperbudak sejarah,
Korban-korban penindasan
Dan penjarahan waktu,
Orang-orang celaka di atas bumi ini,
Menjadi pemimpin-pemimpin umat manusia
Dan pewaris-pewaris bumi.
Sekarang sudah tiba waktunya
Dan orang-orang terampas di atas bumi ini
Merupakan pengharapan akan janji-Mu*

Asghar Ali Engineer dan Elemen Pembebasan dalam Qur'an

Jika Ali Syariaty menggali spirit pembebasan melalui pemaknaan atas tokoh-tokoh simbolis dalam hazanah kebudayaan Islam, maka Asghar Ali Engineer, seorang ahli teologi dan aktivis HAM ini, cenderung menggunakan pendekatan tekstual untuk menggali elemen-elemen dan prinsip-

prinsip pembebasan dalam Islam yang terangkum dalam penegasannya mengenai persamaan dan keadilan (Michael Amaladoss, 2000: 240-249). Namun demikian rupanya keduanya juga memiliki kedekatan konseptual. Sebagaimana Ali Syariati, Asghar Ali juga menganggap penting peran kenabian, terutama keberadaan Nabi Muhammad SAW dalam pembaruan sosial. Nabi Muhammad bukan sekadar guru, melainkan juga seorang pejuang dan aktivis yang diutus untuk membebaskan rakyat dari kebodohan dan penindasan. Ia membebaskan rakyat Mekkah dari ketidakadilan sosial dan ekonomi serta memberikan inspirasi pengikutnya untuk membebaskan dirinya dan masyarakat lain dari penindasan oleh kerajaan Romawi dan Sassanid.

Lebih jauh secara doktriner, menurut Asghar Ali, ajaran tawhid yang disampaikan Nabi tidak hanya mengandung makna teologis tentang konsep monoteisme Tuhan, tetapi juga memuat makna sosiologis sebagai kesatuan sosial. Argumentasi ini didasarkan pada firman Allah berbunyi: Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu semua dari seorang laki-laki dan perempuan, dan telah membuat kamu menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang termulia dari antara kamu semua di mata Allah adalah orang yang paling jujur (dan adil). Lebih lanjut kesatuan sosial yang diajukan Qur'an ini bukan hanya bermatra rasial dan etnis, tetapi juga meliputi penghapusan ketidakadilan akibat dari perbedaan ekonomis. Argumentasi ini didasarkan pada dua kata yang digunakan dalam Qur'an yang menyatakan keadilan, yakni *adl* dan *qist*. *Adl* bermakna ganda, bisa berarti keadilan juga bisa berarti menyamakan atau meratakan. Lawannya adalah *zulm* yang berarti penindasan. Sedangkan *qist* bermakna distribusi yang sama, yang adil, yang wajar, atau pemerataan. Distribusi yang sama ini juga merujuk pada sumber-sumber daya jasmani, yang juga meliputi distribusi kekayaan sebagaimana dikukuhkan dalam Qur'an. Kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan kamu orang-orang kaya (Qur'an, 59: 7).

Dari ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap orang tidak boleh menyimpan lebih banyak dari yang perlu, apalagi ditujukan untuk hidup berlebihan, bermewah-mewah dan berpamer ria. Karena cara hidup yang demikian itu akan mengantarkan pada kehancuran. Dan bila kami akan menghancurkan sebuah kota, kami mengirimkan perintah kepada penghuninya yang hidup bermewah-mewah, dan kemudian mereka melakukan hal yang menjijikkan di dalamnya, dan dengan demikian dunia (terkutuk) terjadi padanya, dan kami membinasakannya sampai musnah sama sekali. (Qur'an, 17: 16). Selain teks-teks di atas, Qur'an juga secara eksplisit menunjukkan pembelaannya terhadap orang-orang miskin dan tertindas (kaum *mustadh'afin*). Berikut ini petikan ayat tersebut: Mengapa kamu tidak mau berjuang demi kepentingan Allah dan orang-orang lemah di tengah-tengah rakyat, dan demi kepentingan kaum perempuan dan anak-anak yang berkata: Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kota yang orang-orangnya penindas ini (Qur'an, 4: 75). Juga: Dan kami ingin menunjukkan perkenan kepada orang-orang yang tertindas di atas bumi, dan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris (Qur'an, 28: 5). Demikian sentralnya konsep keadilan ini di dalam agama Islam, Qur'an berulang kali menegaskan perintah dan ajakan untuk bersikap adil dalam segala urusan ketika berhubungan dengan semua orang dengan latar belakang apapun dan dalam situasi bagaimanapun. Allah berfirman: Hai orang-orang yang beriman jadilah saksi-saksi teguh akan Allah dalam keadilan, dan jangan kamu biarkan kebencian akan orang-orang manapun membujuk kamu sehingga kamu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, itu lebih dekat dengan kesalehan (Qur'an, 5: 8) Allah juga memberikan penegasan mengenai larangan berbuat royal dan boros yang menunjukkan hidup bermewah-mewahan: Perhatikan perhiasanmu di setiap tempat ibadah dan makan serta minumlah, tetapi jangan menjadi orang pemboros (peroyal) (Qur'an, 7: 31). Selain berbagai seruan untuk berbuat adil di atas, Islam juga mencontohkan bagaimana mempraktekkan tindakan yang adil itu dalam kehidupan. Melalui konsep zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam, setiap individu umat Islam diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaannya kepada kaum miskin yang tidak bisa terlibat dalam proses-proses produksi. Allah berfirman: Dan dalam kekayaan mereka orang-orang yang berkekurangan dan melarat (fakir miskin) mempunyai bagian semestinya (Qur'an, 51: 19)

Dalam bagian lain Allah berkata: Apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Dialah yang menyingkirkan yatim piatu dan tidak mendesak orang-orang lain untuk memberikan makan orang-orang yang berkekurangan. Celakalah orang-orang yang menjalankan shalat tapi tidak peduli dengan shalat mereka: yang pamer kesalehan tetapi tidak memberikan sedekah kepada

orang-orang yang melarat (Qur'an, 107: 1-7). Demikianlah prinsip-prinsip dan semangat pembebasan dalam Islam yang dipantulkan melalui berbagai ayat dalam Kitab Suci Qur'an. Kenyataan itu semakin menegaskan bahwa dalam tradisi Islam sendiri sesungguhnya memuat spirit pembebasan yang potensial menjadi suatu gerakan masif. Yakni suatu gerakan untuk melawan segala bentuk penindasan dan penjajahan yang membuat rakyat miskin dan terpinggirkan. Bahkan di bawah panji-panji keadilan dan kesamaan, teologi pembebasan dalam Islam melampaui berbagai ranah, mulai dari bersikap adil terhadap kaum perempuan sampai penghormatan dan sikap terbuka serta toleran terhadap agama-agama dan keyakinan lain yang dianut oleh umat manusia.

Hassan Hanafi dan Kiri Islam

Hassan Hanafi adalah seorang pemikir revolusioner, reformis tradisi intelektual Islam klasik, dan sekaligus penerus gerakan Al-Afghani. Ia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Sorbonne, Paris, pada 1966, dan menjadi guru besar pada fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia menjadi terkenal setelah meluncurkan proyek pemikiran revolusionernya dalam sebuah jurnal *Al-Yasar al-Islami: Kitabat fi Al-Nahdla Al-Islamiyah* (Kiri Islam: Beberapa Esei tentang Kebangkitan Islam) yang terbit pada 1981 segera setelah kemenangan revolusi Islam di Iran.

Sejak saat itulah pemikiran Hassan Hanafi akrab diidentikkan dengan Kiri Islam yang merupakan manifesto ideologi pembebasan dalam Islam. Seperti apakah konsep Kiri Islam itu? Dalam sebuah artikel panjang berjudul *Madza yakni al-yasar al-islami* (Apakah Kiri Islam itu?) yang dimuat dalam jurnal *Al-Yasar al-Islami*, Hassan Hanafi menegaskan bahwa Kiri Islam adalah nama ilmiah atau istilah akademik yang menunjuk pada gagasan yang berpihak kepada orang-orang yang dikuasai, kaum tertindas, dan orang miskin. Kiri Islam adalah gerakan transformasi sosial untuk mengubah kesadaran individual menjadi kesadaran kolektif dalam rangka menyuarakan mayoritas yang diam di antara umat Islam, membela kepentingan seluruh umat manusia, mengambil hak-hak kaum miskin dari tangan orang-orang kaya, memperkuat orang-orang yang lemah dan menjadikan manusia sama dan setara. Salah satu elemen revolusionernya bisa ditemukan dalam Qur'an berbunyi: Dan Aku menghendaki kemenangan orang-orang yang tertindas di bumi, dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dan pewaris-pewaris (Qur'an, 28: 5) (Kazuo Shimogaki, 1993: 85-90).

Sebagaimana Ali Syariati, Hassan Hanafi yang memperoleh pendidikan Barat di Paris memanfaatkan hazanah filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern untuk menganalisis kondisi sejarah dan realitas umat Islam di Arab dan di bagian dunia lain yang terpuruk dalam kemiskinan dan penjajahan. Melalui analisisnya yang tajam terhadap imperialisme Barat dan kondisi internal umat Islam inilah Hassan Hanafi akhirnya sampai pada gagasannya mengenai Kiri Islam. Hassan Hanafi memperingatkan pembacanya akan bahaya imperialisme kultural Barat yang bisa menghapus kekayaan budaya bangsa-bangsa serta menciptakan keterbelakangan. Liberalisme dan kapitalisme yang telah bermetamorfosis menjadi imperialisme budaya (pengetahuan) dan kapitalisme multinasional ternyata didikte oleh kebudayaan Barat yang berperilaku seperti kolonial yang hanya melayani kelas-kelas elit yang menguasai aset negara.

Sementara di sisi lain mayoritas rakyat tetap tertindas, miskin dan terpinggirkan dari proses-proses sejarah yang menentukan ini. Celaknya, menurut Hassan Hanafi, pengaruh eksternal tersebut memperoleh dukungannya dari kondisi internal umat Islam sendiri. Tendensi keagamaan umat Islam telah terkooptasi kekuasaan yang hanya meletakkan Islam sebagai ritus dan kepercayaan ukhrawi. Tekstualisme dalam penafsiran Kitab Suci secara dramatis telah menjauhkan umat Islam dari kondisi eksistensi realnya, berupa keterbelakangan, kemiskinan dan ketertindasan. Alih-alih bisa membebaskan dari kondisi-kondisi ini, fenomena ritualisme itu telah menjadi topeng yang menyembunyikan dominasi Barat dan kapitalisme nepotis. Selain kedua hal di atas, bahaya lain juga datang dari Marxisme yang berpretensi mewujudkan keadilan dan menentang kolonialisme ternyata tidak diikuti dengan pembebasan rakyat dan pengembangan khazanah mereka (yakni khazanah agama-agama) sebagai energi untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemerdekaan nasional. Sementara nasionalisme revolusioner sendiri yang tampak berhasil membuat perubahan-perubahan radikal dalam sistem politik dan ekonomi ternyata tidak berumur lama. Karena ia berhenti hanya sebatas slogan sehingga tidak mampu mempengaruhi kesadaran mayoritas rakyat (Kazuo Shimogaki, 1993: 91-92).

Akhirnya berlandaskan analisis sosial politik inilah Hassan Hanafi menganggap penting upaya untuk memperkuat jati diri umat Islam, yakni dengan memasuki medan percaturan yang paling mendasar dalam kebudayaan dan kesadaran historis masyarakat. Dan Kiri Islam ditujukan untuk kepentingan ini. Yakni membekali pribadi dan menggugah kesadaran untuk menyongsong kebangkitan rakyat melalui upaya revitalisasi pemikiran keislaman dengan memantapkan posisi rakyat dalam sejarah (Shimogaki, 1993: 140).

Proyek Kiri Islam Hassan Hanafi setidaknya meliputi dua aspek penting. Pertama, merevitalisasi dimensi revolusioner dalam khazanah intelektual Islam klasik. Kedua menantang peradaban Barat yang hegemonik. Pada aspek pertama, Kiri Islam telah menggali paradigma independen pemikiran keagamaan yang menekankan arti penting gerakan rasionalisme, naturalisme dan kebebasan manusia. Dalam hal ini Hassan Hanafi menilai mu'tazilah telah mewariskan tradisi yang berharga mengenai kebebasan dan tanggung jawab manusia atas perbuatannya, sehingga manusia menyadari perannya untuk selalu berusaha mewujudkan kebaikan melalui perbuatannya yang disertai dengan keyakinan iman. Dalam hal ini kepemimpinan umat Islam harus berdasarkan pemilihan demokratis dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap muslim. Demikian juga sesuai dengan tanggung jawabnya, manusia dituntut teguh untuk merebut hak-haknya dan mengembalikan martabatnya yang dirampas. Kiri Islam juga memperhitungkan semangat kaum Syi'ah yang menancapkan harga diri Islam melawan kolonialisme dan westernisme.

Dalam kehidupan sosial dan politik, Kiri Islam menggunakan pendekatan kemaslahatan serta membela kepentingan rakyat dalam penetapan hukum. Ini dianut berdasarkan paradigma fiqh dan usul-fiqh Malikiyah yang berasal dari tradisi Abdullah ibn Mas'ud yang dikembangkan dari Umar ibn al-Khattab yang membela kemaslahatan umat secara realistis dan mengetahuinya meskipun belum ada petunjuk wahyu hingga datang wahyu yang membenarkan pendapatnya. Oleh karena itulah dalam menafsirkan teks, Kiri Islam senantiasa menggunakan akal seoptimal mungkin sebagaimana yang dilakukan Hanafiyah dan memadukannya dengan cermin realitas sebagaimana Syafi'iyah, dengan tanpa meninggalkan komitmen pada teks itu sendiri sebagaimana dilakukan Hambaliyah. Ini karena bagi Kiri Islam, teks adalah refleksi atas realitas itu sendiri. Kiri Islam memperoleh akarnya dari filsafat rasional yang sudah dibangun oleh Al-Kindi dan Ibnu Rusyd, juga pada ilmu-ilmu rasional murni dalam khazanah klasik. Kiri Islam berpretensi untuk mengangkat kembali ilmu-ilmu klasik seperti matematika, fisika, arsitektur, kimia, kedokteran, biologi, farmasi, dan sebagainya dalam pangkuan Islam. Kiri Islam juga berakar pada ilmu-ilmu kemanusiaan yang sudah diletakkan dasarnya oleh pendahulu kita, seperti ilmu bahasa, sastra, geografi, sejarah, psikologi dan sosiologi. Selain itu Kiri Islam juga memiliki akar pada ilmu-ilmu normatif tradisional murni (al-ulum al-naqliyah al-khalizhah), yakni ilmu yang pertama kali berkembang di sekitar wahyu seperti: ilmu-ilmu Qur'an, Hadist, Tafsir dan Fiqh.

Beberapa cabang itu bisa dikembangkan secara kontemporer. Misalnya asbab al-nuzuli dalam ilmu-ilmu Qur'an dimaksudkan untuk mengutamakan realitas, ilmu nasikh wa al-mansukh untuk melihat aspek gradualisme dalam penerapan syariah, dan lainnya. Semua ini bisa dikembangkan menjadi ilmu eksperimental, seperti statistik, sosiologi, historiografi, ideologi, sistem politik dan ekonomi. Kiri Islam juga mengkaji kembali ajaran tentang ibadah yang selama ini menjadi seolah-olah tujuan padahal sesungguhnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Menurut Hanafi, orang yang berhenti pada sarana tanpa pernah sampai tujuan maka ia sesungguhnya tak pernah shalat, puasa, haji dan syahadat. Syahadat tidak semata-mata mengucapkan Asyhadu an-la Ilaha Illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Melainkan sebuah persaksian yang aktif, yang dimulai dengan bentuk negatif la Ilaha yang bermakna negasi atas kekuatan penindas dan tuhan-tuhan palsu di sekitar kita, baik dalam bentuk uang maupun kekuasaan; lalu penetapan Illa Allah berarti hanya Allah yang Maha Perkasa (Kazuo Shimogaki, 1993: 95-106). Demikianlah dengan merevitalisasi seluruh khazanah intelektual klasik ini hendak ditunjukkan bahwa kebangkitan masyarakat Islam akan datang dari dalam, yakni melalui pengembangan dimensi internal umat Islam sendiri. Adapun aspek kedua dari proyek Kiri Islam adalah melawan hegemoni kebudayaan Barat. Dalam konteks ini tugas Kiri Islam adalah menghadapi ancaman imperialisme ekonomi korporasi multinasional dan imperialisme kebudayaan yang menggerogoti jati diri dan kemandirian umat. Tugas Kiri Islam adalah melokalisasi Barat, yakni mengembalikan Barat kepada batas-batas alamiahnya dan menepis mitos bahwa Barat adalah pusat peradaban dunia yang berambisi menjadi

paradigma kemajuan bagi bangsa-bangsa lain. Dengan penolakan ini berarti bangsa-bangsa non-Barat berusaha melawan dominasi dan hegemoni yang telah merenggut kemerdekaan dan kepribadian bangsa-bangsa lain, sehingga bisa menentukan nasib dan kesejahteraannya sendiri (Kazuo Shimogaki, 1999: 106-108).

Penutup

Dari paparan di atas, maka setidaknya dapat disimpulkan dalam catatan penutup ini bahwa teologi pembebasan adalah teori ketuhanan yang berorientasi pada kemanusiaan dan pembebasan kaum tertindas baik secara kultural maupun secara struktural. *Pertama*, teologi pembebasan lahir dari pembacaan yang kaya terhadap khazanah pemikiran maupun kebudayaan internal masing-masing agama atau tradisi komunitas tertentu. Dengan menyadari ini kita akan memperoleh kesimpulan bahwa sesungguhnya spirit pembebasan sudah ada dalam pengalaman dalam tiap-tiap agama dan kebudayaan, termasuk dalam agama Islam. *Kedua*, semangat pembebasan hanya mungkin manifes jika perumusan teologi diorientasikan pada solidaritas dan pembebasan terhadap umat manusia yang lemah. Oleh karena itu dibutuhkan kehendak, kesadaran diri, kebebasan dan tanggung jawab setiap individu untuk bersama-sama melakukan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih adil, setara dan manusiawi. Inilah makna teologi pembebasan dalam masyarakat Islam. Praktek ritual adalah penting namun ia memerlukan indikator sosial. Indikator material ibadah yang diterima Tuhan adalah keberhasilannya menegakkan kebenaran dan keadilan (QS. Al Maidah; 8). Sedangkan indikator sosial ibadah yang tidak diterima adalah membiarkan ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertindasan di sekitar kita. (QS. Al Maa'un). Akhirnya, hadirnya teologi pembebasan dalam agama-agama sesungguhnya adalah cermin bagi diri umat beragama untuk selalu terbuka terhadap pengetahuan dan realitas alam yang diwahyukan Tuhan. Karena realitas inilah yang ikut memperkaya wawasan kita tentang iman dan cara berteologi yang relevan dengan konteks zaman. [Catatan tambahan: Dalam tulisannya berjudul *Al-din wa al-tsa'urah* (Agama dan Pembebasan), Hassan Hanafi tidak saja mengakui bahwa Kiri Islam diilhami oleh momentum kesuksesan Revolusi Islam Iran dan mengklaim sebagai kelanjutan dari jurnal *Al-Urwatul Wutsqa*-nya Jamaluddin Al-Afghani yang gigih melawan imperialisme Barat dan berobsesi mempersatukan umat islam. Kiri Islam juga diinspirasi oleh revolusi agama-agama lain. Seperti revolusi yang terjadi dalam sejarah Yudaisme dan Kristiani, perlawanan Ibnu Uqaiyah melawan Romawi, pemberontakan petani di Jerman abad XVI, teologi pembebasan di Amerika Latin dan revolusi Gereja Hitam di Amerika Utara. Selain itu juga revolusi di luar agama-agama monoteis seperti revolusi Budhis di Vietnam, revolusi Konfusianisme di Cina dan revolusi agama-agama Afrika melawan penjajah Kulit Putih di Afrika Utara.[]



Berlandaskan analisis sosial politik inilah Hassan Hanafi menganggap penting upaya untuk memperkuat jati diri umat Islam, yakni dengan memasuki medan percaturan yang paling mendasar dalam kebudayaan dan kesadaran historis masyarakat. Dan Kiri Islam ditujukan untuk kepentingan ini. Yakni membekali pribadi dan menggugah kesadaran untuk menyongsong kebangkitan rakyat melalui upaya revitalisasi pemikiran keislaman dengan memantapkan posisi rakyat dalam sejarah (Shimogaki, 1993: 140).

Hand-Out 27 ISLAM & TEOLOGI TRANSFORMATIF

Prawacana

Pemikiran ke-Islaman di Indonesia semakin ramai dan hiruk-pikuk. Lihat saja, di sana-sini muncul sekian istilah yang seolah-olah menjadi icon bagi suatu mazhab atau bangunan konseptual pemikiran keislaman yang komprehensif. Di sini dapat dituliskan, mulai dari Islam Tradisional, Modernis, Neomodernis, Fundamentalis, Alternatif, Rasional, Transformatif, Inklusif, Pluralis, hingga Islam Kiri, Liberal, Post-Puritan, dan Post-Tradisional. Bagi yang tidak memahami aspek kesejarahan dialektika Islam di Indonesia niscaya akan kebingungan memetakan, apalagi, menangkap tesis-tesis penting setiap pemikiran di atas.

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, bagaimana membaca fenomena di atas, atau apa arti penting dari fenomena di atas? Tulisan ini, sebagai selingan atas formulasi pemikiran Islam Progresif-Transformatif, akan mencoba membaca secara singkat dengan (atau justru tidak) sikap kritis terhadap berbagai diskursus keislaman di atas. Ukuran yang dipakai di sini, dengan meminjam istilah Ignas Kleden, adalah relevansi intelektual dan sosial. Artinya, setiap pemikiran akan diuji apakah memiliki relevansi intelektual dan relevansi sosial, atau tidak. Yang dimaksud dengan relevansi intelektual adalah sejauh mana sebuah gagasan memiliki koherensi internal (tidak *ta'arudh*) dan sejauh mana mampu mempertahankan asumsi-asumsi dasarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan relevansi sosial adalah sejauh mana sebuah gagasan mampu menjawab kebutuhan objektif problematik sosial yang dihadapi oleh Indonesia. Mengapa Indonesia? Sebab kita hidup di Indonesia, bukan di Amerika, Eropa, Arab, Afrika, atau di alam malakut dan jabarut.

Islam Tradisional

Istilah ini biasanya dilekatkan ke bangunan keislaman komunitas tradisional, yang sering diasosiasikan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Istilah ini sendiri sesungguhnya bukan label yang diciptakan sendiri oleh mereka, namun dilekatkan oleh aktor di luar diri mereka, entah peneliti, atau organisasi keagamaan lain. Secara sederhana kata tradisional mengacu ke suatu adat kebiasaan. Tradisi bermakna kebiasaan yang terus menerus direproduksi dan dilembagakan oleh masyarakat. Tradisional adalah kata sifat dari sesuatu, sehingga tradisional berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi kebiasaan tadi. Dalam teori politik, paham yang memegang teguh tradisi disebut dengan tradisionalisme. Dalam dataran itu, tradisionalisme memiliki makna pejoratif sebab dikarakterisasikan sebagai komunitas yang konservatif.

Dalam konteks pemikiran keislaman, Islam tradisional, jika itu mengacu ke NU-tempo dulu, mendefinisikan dirinya sebagai pemikiran keislaman yang dari sisi pemikiran kalam mengacu ke kalam Asy'ari dan Al-Maturidi, dari sisi hukum Islam membatasi diri pada *nzazahibul ar-ba'ah*, dan dari sisi tasawuf mistik, mengacu ke Al-Ghozali dan Al-Junaidi. Kalangan Luar mendefinisikan sebagai corak ke-Islaman yang bercampur baur dengan budaya masyarakat setempat seperti Jawa. Ciri khas pemikiran tradisional adalah menundukkan realitas di bawah teks dan manifestasi sosialnya nampak dalam berbagai kegiatan ritual keagamaan seperti ziarah, *khaul*, dan lainnya. Namun teks yang dimaksud lebih mengacu, meski tidak secara mutlak, ke kitab-kitab yang sering disebut dengan *kutubul mu'tabarah*. Kitab kitab Taqrib, Mu'in, I'alah, Wahhab, al-Mahalli, Mughnil Muhtaj, Bughyah, Asybah, Syarqowi, Jami'ul Jawami', Majmu', Jalalain, Ummul Barahin, Ihya', Hikam, untuk sekedar menyebut contoh, adalah referensi kuncinya.

Islam Modernis

Sama dengan istilah tradisional, Islam Modernis juga terkait erat dengan pengertian sosiologis dan epistemologis. Secara sosiologis, lahir dari kalangan masyarakat perkotaan, atau katakanlah kelas menengah ke atas. Secara historis, dapat dipandang sebagai antitesa terhadap praktek keberagamaan kaum tradisional yang dipandang menyimpang. Secara kelembagaan sering diasosiasikan dengan Muhammadiyah dan Persis. Istilah ini mengacu pada makna dasar kata modern itu sendiri. Yang sering diidentikkan dengan pembaharuan (modernisasi) alias rasionalisasi. Di Barat istilah Kiri dapat dilacak sejak *renaissance* yang mendeklarasikan kedaulatan manusia sebagai subjek yang otonom, menolak dominasi rezim kebenaran gereja, dan menumpukan akal

sebagai basis paling otoritatif. Modernisasi di Barat berjalan seiring dengan industrialisasi atau perkembangan kapitalisme.

Qalam konteks keislaman, makna modern setidaknya-tidaknya mengacu ke dua hal. *Pertama*, pada teknologisasi infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas termasuk sistem pembelajaran model kelas. *Kedua*, berbeda dengan *renaissance* yang meneraikan agama, maka di sini yang dieraikan adalah epistemologi model kitab kuning. Sebagai gantinya, langsung kembali ke teks otentik Islam: Al Qur' an dan Hadits. Menolak kewajiban bermazhab, dan lumayan anti terhadap berbagai budaya lokal secara antropologis-sosiologis tidak bertolak dari teks.

Islam Neomodernis

Istilah ini dilekatkan pada pemikir Islam asal Pakistan, Fazlur Rahman. Kata *neo* di sini rnengacu ke seruan untuk menengok kembali ke warisan Islam klasik. Menurut aliran ini, pembaharuan pemikiran Islam harus berbasiskan pada warisan Islam klasik yang dipandang sangat kaya. Pembasisan ini akan memperkokoh bangunan pemikiran keislaman modern sebab berakar secara kukuh pada khazanah keislaman itu sendiri. Jika dilihat dalam optik Kuhnian, epistemologi yang dibangun merupakan epistemologi yang bukan diskontinuitas dengan epsiteme masa lalu. Di Indonesia aliran ini dibawa oleh pentolan Paramadina, Nurcholish Madjid. Intinya adalah apresiasi terhadap masa lalu bukanlah apresiasi terhadap kebudayaan atau tradisi, namun mengacu ke sejarah pemikiran Islam global (dunia) seperti Ibn Shina, Ibn Thufail, Ibn Rusyd, dan lainnya.

Islam Fundamentalis

Istilah ini memiliki kesamaan dengan istilah tradisional, dalam arti tidak diciptakan oleh komunitas rnereka, namun diciptakan oleh entitas di luar dirinya sendiri. Dalam sosiologi agama, istilah ini berasal dari sejarah pemikiran Kristen. Dalam kalangan Kristen istilah ini berarti penolakan terhadap penafsiran bible yang tidak *lafdhiyyah*. Introduksi perangkat hermeneutik atau interpretasi non-tekstual ditolak sebab dipandang akan mengancam kemurnian ajaran. Di kemudian hari istilah ini menggloabal namun dengan pemaknaan negatif. Fundamentalisme diidentikkan dengan radikalisme, keras, galak, dan lainnya.

Islam Liberal

Istilah Liberal merupakan istilah yang sudah mapan dalam teori dan filsafat politik. Dalam literatur filsafat politik, liberalisme merupakan salah satu varian dari libertarianisme, yang merupakan teori politik sayap kanan. Liberalisme merupakan teori politik sayap kanan yang menerima kebebasan pasar, yang berbeda, misalnya, dengan sayap lainnya, anarkisme. Sargent mendefinisikan libertarianisme sebagai "an ideology that wants radically reduced role for government. Kaum libertarian, menurut Will Kymlicka, berjuang untuk mempertahankan kebebasan pasar, dan menuntut pembatasan penggunaan negara dalam kebijakan sosial. Mereka percaya bahwa kebebasan pasar merupakan instrumen yang mendorong tercapainya faidah maksimal dan yang mampu melindungi kebebasan-kebebasaan politik dan sipil. Pada tingkatan yang radikal, misalnya, mereka menolak mekanisme kebijakan pajak untuk mewujudkan keadilan distribusi.

Dalam filsafat politik dikenal dua liberalisme: liberalisme klasik dan liberalisme modern. Liberalisme klasik pada awalnya merupakan suatu ideologi kelas menengah Eropa yang menuntut reformasi sosial pada awal abad ke-19. Tokoh-tokohnya adalah Thomas Hobbes, John Locke, Montesquie Rousseou, dan Adam Smith dengan konsep kund tentang *Social con track*. Kemudian Jeremy Bentham, James Mill, dengan konsep kunci utilitarianisme. Sedangkan liberalisme modern, sambil mempertahankan berbagai pandangan liberalisme klasik tentang manusia, ekonomi, dan negara, juga mendorong demokratisasi negara, yang mucnul pada akhir abad 19, dan awal abad 21. Tokoh utamanya di antaranya adalah John Stuart Mill (1806-1873), T. H. Green (1836-1882), L. T. Hobhouse (1864-1929), John Maynard Keynes (1883-1946), William Beveridge (1879-1963).

Sedangkan liberalisme merupakan suatu pandangan filsafat yang mempercayai kernampuan manusia untuk rnenggunakan rasionya untuk menggerakkan reformasi sosial, cenderung menerima perubahan, bahkan tak dapat ditawar-tawar, walaupun dapat dikendalikan, dan memperjuangkan kebebasan berkehendak manusia.

Tinjauan singkat di atas menunjukkan bahwa pandangan-pandangan liberal menyangkut setidaknya manusia, ekonomi, dan politik (negara). Manusia dipercaya sebagai makhluk rasional, dan menumpukan keputusan manusia pada rasionalitasnya. Secara ekonomi mengambil posisi pada pasar bebas, dan secara politik mendukung negara demokratis prosedural. Apa yang dirumuskan oleh intelektual liberal merupakan jawaban terhadap persoalan sosial yang ada. Persoalan itu di antaranya adalah nalar manusia yang ditundukkan oleh otoritas di luar akal seperti budaya, agama, mitos, dan lainnya, kondisi politik yang otoritarian karena bertumpu pada kekuasaan yang absolut, dan kondisi ekonomi yang penuh dengan penyelewengan seperti KKN yang menggejala secara masif. Dengan kata lain, pemikiran bercorak liberal adakah pemikiran yang pro-akal budi (akal bebas), pasar bebas, pemisahan agama dan negara (sekularisasi), perlindungan individu (kebebasan individu), dan lainnya.

Pemahaman akan konteks liberal dalam teori politik di atas akan mempermudah dalam memahami makna Islam liberal. Secara sederhana hanya akan diuraikan dua islamolog yang sama-sama menggunakan istilah liberal, yaitu Leonard Binder dan Kurzman. *Binder* mere-examine paralelisme antara liberalisme Barat dan liberalisme Islam. Dalam penelitiannya, dia menyimpulkan liberalisme memiliki akar-akar otentis dalam Islam, bahkan dalam diri tokoh yang dianggap fundamentalis seperti Sayyid Quthb. Dalam pemikiran politik (siyasi) liberalisme Islam ini merujuk pada pemikiran politik Al Abdurraziq, Tariq Al Bishri, yang berkesimpulan tentang tiadanya konsep negara dalam Islam.

Selain konsep itu, yang dijadikan unit analisis lainnya adalah tentang toleransi, dan rasionalisme. Toleransi ini dikaitkan dengan toleransi beragama, dalam arti kebebasan memeluk agama, suatu doktrin yang juga diakui kalangan fundamentalis. Toleransi ini membuka peluang untuk terbentuknya suatu komunitas politik yang lebih luas, terciptanya suatu koeksistensi. Hanya saja toleransi ini terbatas dalam agama itu sendiri, dan tidak dalam kaitan dengan politik. Filsafat liberal mengakui keberadaan pluralisme keagamaan, bahkan ateisme, namun tidak menjadikan salah satu nilai atau aliran agama sebagai basis nilai. Seluruh kebijakan publik ditentukan keabsahannya bukan oleh legitimasi teks, namun oleh rasionalitas kebijakan.

Sedangkan rasionalisme dalam liberalisme Islam dikaitkan dengan cara pandang terhadap teks. Kitab suci dianggap sebagai teks yang bebas ditafsirkan sesuai dengan rasionalitas manusia. Akal tidak secara hitam putih ditundukkan oleh teks. Namun teks secara dialektik memiliki relasi dengan entitas di luar dirinya. Ini dikontraskan dengan pandangan tradisional yang melihat teks secara harfiah-verbal, menganggap *pemallaman* agama sebagai suatu kebenaran mutlak, melihat agama bukan sebagai suatu tafsiran atau pendapat.

Ketiga wacana ini sebangun dengan liberalisme. Liberalisme dengan tegas memisahkan agama dengan politik dan membangun budaya toleransi dalam heterogenitas masyarakat. Agama dipandang sebagai urusan pribadi, dan selama tidak mengancam kebebasan-kebebasan politik masyarakat, negara tidak boleh mencampuri urusan tersebut.

Sedangkan Charles Kurzman *meng-examine* liberalisme Islam dengan tradisi Islam sendiri. Dengan konteks intelektual seperti ini, Kurzman memetakan tiga varian utama Islam Liberal. *Pertama*, Syariah Liberal, yakni suatu varian yang meyakini bahwa sikap liberal sebagai suatu wacana yang didukung secara eksplisit oleh syariah. *Kedua*, Islam Liberal dalam pengertian kaum muslim bebas mengadaptasi nilai-nilai liberal dalam hal-hal yang oleh syariah diberikan kepada wewenang akal budi manusia. *Ketiga*, syariah yang bersifat ilahiah ditujukan bagi berbagai penafsiran Islam yang beragam.

Dengan kerangka itu, ia mengkarakterisasikan Islam liberal dengan enam tesis dasar, yaitu: penentangan terhadap teokrasi (*against theocracy*) yang diwakili oleh Ali Abd al-Raziq, Muhammad Khalafullah, Taleqani, dan Al-Asmawi; prodemokrasi (*democracy*) yang diwakili oleh Muhammad Natsir, SM Zafar, Mehdi Bazargan, Dimasangeay A. Pundato, Ghannouchi, dan Sadek Jawad Sulaiman); pro hak-hak perempuan (*rights for women*) yang diwakili oleh Nazera Zein-ed-Din, Benazir Bhutto, Fatima Memisi, Amina Wadud-Muhsin, dan M. Syahrur; pro hak-hak non-muslim (*rights of non-Muslim*) yang diwakili oleh Humayun Kabir, Chandra Muzaffar, Mohammed Talbi, Ali Hulae, dan Rasmir Mahmuttehajic); kebebasan berpikir (*freedom of thought*), yang diwakili oleh Syariat, Qaradhwai, Arkoun, Soroush, An-Nairn, Ajijola, dan Abdul Karim Soroush); dan gagasan

tentang kemajuan (*progress*) yang diwakili oleh Iqbal, Mahmud Thaha, Nureholish madjid, Mamadiou Dia, Fazlur Raman, dan Shabbir Akhtar).

Islam Kiri/ Kiri Islam

Sebagaimana liberal, istilah kiri juga sudah baku dalam teori politik. Implikasinya terjadi tarik menarik apakah yang dimaksud dengan Islam kiri adalah aspek-aspek kiri dalam Islam, ataukah kiri/sosialisme yang diramu dengan religiusitas, atau tesis-tesis kiri yang paralel dengan Islam. Hassan Hanafie, deklarator manifesto *Al-Yasar Al-Islamy*, menolak kiri Islam sebagai Islam yang ditafsirkan dalam konteks marxisme, marxisme yang ditafsirkan dalam konteks Islam. Dengan kata lain, Islam dalam dirinya memiliki aspek-aspek sosialistik yang bahkan sangat revolusioner.

Dalam wacana sosial istilah kiri atau sosialis dikarakterisasikan oleh Tony Fizgeraald: *rationalist, scientific, optimistic; promotes and criticises industrial modernity; benefits of modernity to be Shared by all; to be built upon the most advanced forms of capitalism; assumes that the social conditions that determine character are alterable, dan; historicises the self-interested liberal individual*

Dalam wilayah pemikiran politik kontemporer Islam baik di dunia Arab maupun non-Arab, cukup banyak para aktifis dan pemikir yang dapat dikelompokkan dalam sayap ini, atau setidaknya tidaknya dekat dengan kelompok ini. Misalnya, Salamah Musa, Tahtawi, Shamayyij, Fuad Mursi (Mesir), Abdallah Laroui (Maroko), Abdul Khaleq Mahgoub (Sudan), (Mesir), Aziz Al-haji (Iraq), Ben Bella, Ahmad ben Saleh (Tunisia), Qathafi, Syari'ati (Iran), Cokro (Indonesia), Farid Farid (Afrika Selatan), dan lainnya.

Untuk memahami secara agak utuh gagasan Kiri Islam harus mengacu setidaknya ke Hassan Hanafie, atau Farid Essack. Pemikiran Kiri Islam Hanafie, menurut Isa Boullata, bertumpu pada telaah kritis sejarah sosial Islam, hermeneutika teks, dan tafsir sosial kontemporer dalam optik neomarxian, meskipun Hanafie sendiri menolak analisis ini. Dengan kerangka itu, Hanafie menyodorkan rekonstruksi Tasawwuf, rethiriking tauhid, dan revitalisasi turats. Intinya adalah bagaimana memaknai Islam sebagai kekuatan pembebas atau Islam revolusioner.

Sedangkan Esack mendefinisikan teologi pembebasan *Al Qur'* an sebagai "sesuatu yang bekerja ke arah pembebasan agama dari struktur serta ide sosial, politik, dan religius yang berdasarkan pada ketundukkan yang tidak kritis dan pembebasan seluruh masyarakat dari semua bentuk ketidakadilan dan eksploitasi ras, gender, kelas, dan agama". Dengan perspektif hermeneutika *Al Qur'* an, Esack menggunakan takwa dan tauhid, manusia dan kaum tertindas, keadilan dan perjuangan (jihad), sebagai kunci-kunci dalam memahami pesan inti dari *Al Qur'* an.

Al-Qur'an selalu mengaitkan taqwa dengan iman kepada Tuhan (QS Yunus:10: 63; *Al-naml*, 27:53; Fushshilat,41:18, pencapaiannya sebagai tujuan ibadah kepada-Nya (*Al Baqarah*,2: 21), dan secara signifikan mengaitkan taqwa dengan interaksi sosial dan perhatian pada sesama yang lain seperti saling berbagai (QS *Al-laij*,92: 5; *Al-A'raf*,7: 152-3) menepati janji (QS *Ali 'imran*, 3: 76; *Al-A'raf*, 7: 52, dan amal baik (QS *Ali Imran*, 32: 172; *Al Nisa*, 4:126; *Al Maidah*, 5:93; *Al Nahl*, 16:127, dan melawankan orang bertaqwa dengan orang yang selalu mengejar keuntungan sesaat di dunia (QS *An-Nisa*, 4:77; *Al-An'am*,6:32: Yusuf, 12:57), Esack mengatakan bahwa taqwa memiliki tiga konsekuensi: pembebasan penafsiran dari nafsu pribadi dan prasangka (sekali-gus tidak menggunakan tuduhan nafsu dan dzan untuk menutupi kecenderungan ideologis dan upaya menyingkirkan opini orang lain); terjadinya keseimbangan estetik dan spiritual penafsir; dan membawa penafsir dalam wilayah dialektika personal dan transformasi sosial politik.

Taqwa adalah antitesis penipuan diri, yang mendorong seseorang, suatu pergerakan, atau pemerintah yakin bahwa ia masa berjuang untuk rakyat. Pamaknaan ini, dengan mengaitkan taqwa dengan prinsip keadilan, kebebasan, kejujuran, dan integritas, akan meminimalkan jumlah teks yang dapat dimanipulasi demi kepentingan pribadi maupun ideologi sempit. Tauhid dengan demikian tidak dimaknai dalam konteks teologis yang ahistoris, namun selalu dikaitkan dengan realitas sosial. Dengan pijakan seperti ini, baginya, juga adalah *syirk*, memisahkan teologi dengan analisis sosial.

Konsep lain dari pemikiran Esack yang penting adalah tentang "mustadh'afien", istilah yang hampir sejajar dengan kaum tertindas dalam tradisi marxis. Mustadh'afien dikontraskan dengan kaum mustakbirun (QS *Al-Nahl*, 16: 22; *Al Mu'minun*, 23: 67; *Luqman*, 31: 7), mala (aristokrasi atau penguasa) (QS *Hud*, 11:27,28; *Al Mu'minun*, 23:24-33); *Al Syu'ara*, 26: 34; kaum mutrofun-orang yang hidup mewah-; QS *Saba'*, 34:34; *Al-Zukhruf*, 43: 23). Istilah itu menunjukkan bahwa kondisi

ketertindasan bukanlah sesuatu yang alamiah, namun terdapat sebab struktural yang melibatkan tangan-tangan manusia, atau dengan kata lain terdapat sekelompok manusia yang harus bertanggung jawab atas kondisi ketertindasan tersebut.

Islam Alternatif, Rasional, Inklusif.

Selain yang di atas, juga dikenal istilah Islam alternatif, Islam rasional, Islam inklusif, Islam pluralis, Islam post-tradisional, dan Islam post-puritan, dan Islam progresif-transformatif. Keterbatasan tempat memaksa tulisan ini untuk tidak mereview secara agak panjang, namun singkat. Islam alternatif mengacu pada sebuah tulisan karya Jalaluddin Rakhmat, terbitan Mizan, Islam rasional mengacu ke seorang rasionalis dari IAIN Jakarta, Harun Nasution, yang menulis tulisan dengan judul Islam rasional. Islam inklusif merupakan gagasan yang juga belum lama lahir di Indonesia, intinya suatu pemikiran yang tidak melakukan *truth-claim*, mengapresiasi pemikiran keislaman di luar dirinya, dan bersedia berdialog dengan mereka. Biasanya dilawankan dengan Islam "garis keras" yang memahami Islam secara amat ketat. Tulisan yang mengusung wacana ini, salah satunya, adalah *Islam Inklusi!* karya Alwi Shihab.

Berbeda dengan Islam inklusif, Islam pluralis, sebagaimana dikatakan deklaratornya, Budi Munawar-Rahman, dalam tulisannya Islam Pluralis (Paramadina), lebih maju daripada Islam Inklusif. Islam ini, katanya, hanya sebatas apresiatif, namun secara diam-diam masih menganggap kebenaran hanya ada dalam Islam. Berbeda dengan itu, Islam Pluralis sampai pada suatu kesimpulan teologis bahwa kebenaran bukan hanya mereka dalam teks-teks otentik Islam, namun dalam tradisi agama lain pun terdapat kebenaran. Mengakui jalan keselamatan di luar syarat-syarat formal keislaman. Mirip filsafat perenial.

Islam post-trad, yang digagas kalangan muda NU, mencoba untuk menjawab kebuntuan-kebuntuan Islam tradisional, modernis, maupun neomodernis. Padaintinya tidak lagi memegang tradisi secara membabi buta, namun dengan kritis. Dengan kata lain, tradisi pun terbuka untuk dieksklusikan. Post-trad mencoba memaknai postmodernisme (fakta sosial kapitalisme *advance*) maupun poststrukturalis (perkembangan mutakhir filsafat bahasa), dari optik tradisi. Dalam gerakan sosial, tradisi dijadikan landasan atau pijakan gerakan ideologis. Berbeda dengan neomodernisme, tradisi yang dimaksud di sini bukan hanya warisan pemikiran Islam klasik, namun juga tradisi budaya lokal suatu daerah. Di sinilah titik penting bedanya.

Istilah post-puritan pertama kali dicetuskan oleh intelektual Muhammadiyah, Dr. Abdul Munir Mulkan. Iswah ini paralel dengan post-dogmatik. Pada intinya mencoba untuk keluar dari belenggu ketetapan dalam memahami teks. Dalam bidang kebudayaan digagas ikhtiyar untuk "rujuk" terhadap budaya lokal. Latar belakangnya adalah bahwa kesenian adalah ekspresi estetik alias keindahan, dan keindahan dalam Islam merupakan salah satu term sentral. Karena itu berkesenian adalah bagian dari ibadah. Selain itu, disadari bahwa pola puritanisme yang selama ini dipegang ikut bertanggung jawab atas musnahnya sekian budaya atau kesenian rakyat lokal. Atas nama teks, berbagai kesenian rakyat itu dihancurkan, sehingga, setelah menyadari sebagai kekeliruan sejarah, melakukan rujuk kebudayaan.

Catatan Tambahan

Menurut Hassan Hanafi, dalam otobiografinya, *al-ushuliyyah alislamiyyah*, kemunculan sekian istilah di atas bukan ahistoris. Hal yang sama juga terjadi di Barat. Para teolog, dalam pergulatannya antara teks dan konstruksi sosial, melahirkan sekian formula teologi. Disebutnya, antara lain, *lahut al-tsaury* (teologi pembebasan), *lalmt al-taqoddumy* (teologi progresif) *lalmt at-tahrier* (teologi pembebasan), *harakah nthban as-syabab* (gerakan pendeta muda), bahkan hingga yang amat kontroversial *lahut mautil ilah* (teologi kematian tuhan). Epistemologi kesemuanya, dalam bahasa Guterrez, adalah "critical reflection on the reality in the light of christianity."

Itibar seperti apa yang bisa diambil dari narasi Hanafie di atas? Sarna dengan mukaddimah di atas, untuk menguji atau mengkaitkan setiap pemikiran dengan relevansi sosial dan intelektual. Dengan optik ini, kita menjadi tahu bahwa aliran pemikiran Islam yang cukup memiliki fondasi lengkap hanyalah Islam tradisional, modernis, neomodernis, Islam liberal, dan Islam Kiri di luar itu masih kabur dan belum jelas struktur pemikirannya.

Persoalan mendasar kedua adalah apakah bangunan pemikiran keislaman di atas mampu

menjawab kebutuhan objektif masyarakat Indonesia alias memiliki relevansi sosial, atau sebaliknya? Alhasil ternyata tidak cukup memadai. Persoalan kontemporer sekarang adalah ketertinggalan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kesadaran, dan neoimperialisme dalam wujud eksploitasi kapitalisme global. Problematik ini menghadirkan penindasan struktural yang kejam dan tak berperikemanusiaan, merusak lingkungan, dan menciptakan kesenjangan yang kian lebar baik dalam level lokal, nasional, maupun global.

Islam tradisional sibuk dengan bahtsul masailnya (hakim pengetuk palu yang hanya bicara hitam-putih), Islam modernis, noe-modernis, dan juga Islam liberal terperangkap agenda kapitalisme global. Tesis-tesis besar dalam Islam liberal adalah tesis yang paralel dengan pemikiran dan praktik sosial dari neoliberalisme. Kelemahan paling mendasar dari Islam liberal adalah mengkontradiksikan ketidakadilan sosial atau keterbelakangan semata-mata pada kontradiksi internal suatu masyarakat. Artinya, gagal melihat struktur global sebagai bagian penting akar permasalahan sosial objektif. Bagaimana dengan Kiri Islam? Kiri Islam memang revolusioner, memiliki relevansi intelektual dan sosial yang kuat, hanya saja diragukan praksisnya dalam konteks gerakan sosial di Indonesia. Kiri Islam belum tuntas bicara soal stratak, atau tahapan-tahapan kerjanya, sehingga melahirkan kekosongan-kekosongan praktik revolusioner. Dengan kata lain, lahirnya berbagai istilah di atas lebih merupakan "kegenitan intelektual," atau bahkan justru "fashion" intelektual yang menjadi bagian dari subsistem produksi dan konsumsi ekonomi, ketimbang jihad, ijtihad, dan mujahadah, serius untuk menjawab tantangan sejarah.[]



Esack mengatakan bahwa taqwa memiliki tiga konsekuensi: pembebasan penafsiran dari nafsu pribadi dan prasangka (sekali-gus tidak menggunakan tuduhan nafsu dan dzan untuk menutupi kecenderungan ideologis dan upaya menyingkirkan opini orang lain); terjadinya keseimbangan estetik dan spiritual penafsir; dan membawa penfasir dalam wilayah dialektika personal dan transformasi sosial politik.

Konsep lain dari pemikiran Esack yang penting adalah tentang "mustadh'afien", istilah yang hampir sejajar dengan kaum tertindas dalam tradisi marxis. Mustadh'afien dikontraskan dengan kaum mustakbirun (QS Al-Nahl, 16: 22; Al Mu'minun, 23: 67; Luqman, 31: 7),

Hand-Out 28 CIVIL SOCIETY: MENUJU PERADABAN BARU INDONESIA

Rekonstruksi Paradigma Politik Islam dalam Perspektif Hubungan Negara dan Masyarakat

Saat ini, umat Islam di seluruh dunia patut bergembira dan bersarnasarna merayakan Tahun Baru Islam. Di hampir setiap sudut kota-kota besar Islam, luapan kegembiraan itu akan dengan mudah kita saksikan dalam jargon-jargon dan semboyan-semboyan luhur yang terpampang indah menghiasi sudut-sudut kota. Sayangnya, akibat rutinitas tahunan kita memperingatinya, banyak yang tidak menyadari bahwa kalender Islam telah memasuki usianya yang ke 1421.

Maka dorongan untuk merefleksi kembali peristiwa yang terjadi pada 1421 tahun yang lalu, yaitu peristiwa sekitar hijrah, tidak saja merupakan sebuah keniscayaan bagi umat Islam, tetapi justru karena desakan untuk menggali dan mengangkat khazanah agama kita yang telah terpendam sekian lama itu dimaksudkan untuk suatu keperluan mengapresiasi doktrin agama guna dicarikan kemungkinan pengembangannya pada level praksis dalam konteks kehidupan kekinian.

Dalam konteks wacana keindonesiaan kontemporer, upaya seperti itu diperlukan untuk mendukung proses pengembangan peradaban baru Indonesia sebagaimana yang sedang diusahakan. Seperti halnya akibat desakan reformasi yang menuntut perubahan pada hampir seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia saat ini bagaikan berada di persimpangan jalan. Sebagai suatu gerak dinamis, gerakan reformasi itu meniscayakan adanya kesinambungan dalam pengembangan dan proses yang sedang diupayakan bangsa Indonesia guna menemukan kembali jati dirinya.

Tetapi, seperti kemudian disadari banyak kalangan, justru dalam upaya itulah muncul banyak persoalan untuk tidak mengatakan hambatan terutama persoalan-persoalan yang menyangkut visi, paradigma dan ideologi yang akan digunakan sebagai acuannya. Maka tidak terlalu mengherankan jika kemudian didapati dalam masyarakat munculnya suatu euforia merekonstruksi sistem dan pranata sosial, politik, ekonorni maupun budaya yang selama ini dikembangkan.

Sejauh hal ini dilakukan atas dasar kesadaran yang telah tumbuh secara luas dalam masyarakat untuk tidak mengulangi kesalahan akibat sistem dan pranata sosial yang dibangun di masa lalu, kemudian meletakkannya dalam suatu semangat untuk mengembangkan kehidupan masa depan yang lebih baik, maka hal seperti ini layak mendapat dukungan dan apresiasi yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Bahkan tiap individu dalam negeri diharapkan dapat merealisasikan seluruh potensinya sambil memberikan sumbangan bagi kesejahteraan semua; menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara.

Civil Society: Rekonstruksi Gagasan Negara

Gagasan masyarakat madani atau civil society seperti yang sedang dikembangkan di tanah air dipelopori oleh Cak Nur dkk- merupakan suatu model menmembangkan kembali khazanah doktrin agama seperti telah disebutkan di atas. Tetapi, tidak sebagaimana gagasan civil society, Civil Society diorientasikan kepada model eksperimen masyarakat Madinah pasca hijrah Nabi SAW. Dengan demikian Civil Society tidak harus dipahami seperti civil society atau al-Mujtama' al-Madanisebagairnana dikembangkan di Dunia Arab yang merupakan translasi dari konsep civil society seperti dikembangkan di Barat, Amerika Latin, Eropa Selatan dan Eropa Timur, yaitu sekedar sebagai masyarakat di luar negara, melainkan lebih merupakan suatu sistem yang meliputi dimensi sosial, politik, budaya, hatta pun ekonomi.

Dari sudut pandang ini, maka tugas Civil Society tidak terbatas pada bagaimana memperkuat masyarakat di depan negara, tetapi juga bagaimana membangun negara yang kuat, yaitu negara yang mendasarkan dirinya kepada kepentingan masyarakat melalui institusi hukum yang berwawasan keadilan, rnisalnya.Maka, kita sepertinya berkepentingan mengembangkan Civil Society, sebagai bentuk dari transformasi ideologis dari civil society.

Pertama, karena alasan historis. Banyak sekali indikasi yang menunjukkan bahwa Islam telah membawa gagasan civil society ke Barat, salah satunya melalui Falsafah Pencerahan ala Giovanni Pico della Mirandola, seorang pernikir humanisme zaman Renaissance, yang mengaku belajar menghormati manusia dari sumber-sumber ajaran agama Islam. Walaupun akhimya Mirandola harus dikucilkan dari komunitasnya akibat gagasan-gagasan humanismenya, namun

semangat dan pikiran rintisaunya itu telah menyebar ke seluruh Eropa dan menjadi wacana umum yang hangat. Selain Miranda, adalah juga Thomas Jefferson, melalui prinsip-prinsip "life, liberty and pursuit of happiness" yang menjadi inspirasi bangsa Amerika; atau John Locke melalui triloginya, "life, liberty and property". Namun jauh sebelum itu umat Islam telah lama berpegang teguh dan melaksanakan ajaran agama Islam tentang "al-dinn", al-amwal wa al-a'radl"; kehidupan, harta dan kehormatan, yang dengan jelas dapat ditelusuri dari kandungan ajaran yang dibawa Nabi dalam Khutbah Perpisahannya (khutbat al-wadil') di Arafat. Sangat mungkin sekali, trilogi dari Nabi tersebut—al-dinn, al-amwal wa al-a'radl—telah menetes kepada tokoh kemanusiaan semacam Miranda, John Locke, maupun Jefferson, meskipun dengan sedikit distorsi.

Kedua, alasan sosiologis dan demografis. Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk dan masyarakat di tanah air. Sehingga suatu percobaan membicarakan tentang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari membicarakan Islam di Indonesia.

Maka, *ketiga*, gagasan untuk mengangkat kembali khazanah dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam doktrin agama sambil melihat kemungkinan apresiasi dan kontekstualisasinya dengan kerangka kehidupan modern saat ini, tidak saja menjadi hal yang sepatutnya diketengahkan, tetapi lebih dari itu layak pula mendapatkan dukungan penuh, justru dari kalangan umat Islam sendiri. Acuan kepada model masyarakat Madinah tersebut saat ini memang masih dianggap relevan, paling tidak jika dipandang dari segi-segi modernitasnya, yang menurut seorang sosiolog terkemuka saat ini, Robert N. Bellah, dapat memberikan tingkat yang tinggi dalam komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh jajaran anggota masyarakat. Secara konseptual, hal ini meniscayakan adanya suatu rumusan tentang sejauhmana bentuk komitmen, keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat tersebut dapat dibenarkan, terutama pada saat berhadapan dengan negara sebagai institusi politik yang mewadahi semua aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Maka sekali lagi tugas Civil Society dengan demikian tidak terbatas pada bagaimana memperkuat masyarakat di depan negara, tetapi juga bagaimana membangun negara yang kuat, yaitu negara yang mendasarkan dirinya kepada kepentingan masyarakat melalui institusi hukum yang berwibawa dan berwawasan keadilan, misalnya. Pada titik ini, dalam suatu percobaan menentukan tingkat perbedaan Civil Society dengan civil society, akan dengan mudah didapati suatu pengertian, bahwa dalam banyak hal, gagasan civil society sering diterjemahkan dalam bentuk gerakan memperkuat dirinya vis a vis negara. Dalam batas tertentu, gagasan seperti ini sering menghantui kita, sehingga tidak perlu disambut hangat.

Mengutip kekhawatiran Hegel--seperti yang sering diadvokasikan Dawam Rahardjo--bahwa civil society memiliki kecenderungan untuk menghancurkan dirinya sendiri (self-destruction) disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan-kepentingan sempit yang saling bertentangan dan memecah belah masyarakat. Teori Hegel ini, terkadang seperti membenarkan kenyataan sejarah seperti yang kita saksikan di depan mata saat ini bahwa akibat kepentingan-kepentingan sempit yang saling bertentangan yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini, sudah mencapai titik kulminasi dari suatu ancaman yang sangat mengerikan disintegrasi, yang pada gilirannya akan menghancurkan civil society itu sendiri. Menurut Hegel, bahwa satu-satunya jalan untuk menghindarkan agar hal itu tidak terjadi adalah bahwa kepentingan-kepentingan sempit seperti itu harus diserahkan kepada negara untuk mengelolanya. Maka, negara diharapkan tampil menjadi lembaga yang memelihara dan melestarikan kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat universal.

Dalam suatu contoh, munculnya partai-partai baru sebagai representasi dari civil society sering secara tidak langsung dan tanpa disadari membawa ego dan warna masing-masing. Bahkan tidak jarang terjadi, masing-masing membawakan klaim kebenaran (*claim of truth*) sendiri-sendiri. Ironisnya, klaim kebenaran ini tidak saja terjadi dalam kerangka pola dan metodologi serta strategi perjuangannya dalam konteks politik saja, tetapi telah sangat jauh menyentuh aspek-aspek yang sangat mendasar, yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dasar ajaran agama seperti tuduhan kelompok lain sebagai Sekuler. Kecenderungan melakukan "transendensi" seperti ini terhadap aktivitas politik seperti tuduhan Sekuler, yang dipandang sebagai lawan dari agama akan mempersempit ruang bagi kemungkinan adanya dialog. Maka tidaklah mengherankan, jika dalam realitas empirik, ekspresi politik umat Islam selalu menyandarkan pada apa yang dipandang sebagai otoritas sud seperti penggunaan simbol-simbol agama. Namun penggunaan simbol-simbol agama ini

tetap perlu dikritisi, sebab bisa jadi tak lebih sebagai proses manipulasi dalam rangka memperluas basis konstituen parpol tertentu, terlepas apakah partai itu secara legal-formal berasaskan Islam atau tidak.

Maka, jika demikian kenyataannya, kita dengan begitu membutuhkan ketentuan-ketentuan yang kita tetapkan sendiri demi menjamin tetap berlangsungnya wacana pluralisme, yaitu ketentuan-ketentuan yang mampu memaksa mereka yang disebut-misalnya-sebagai partai Sekuler, Partai Islam, Partai Liberal atau Partai Nasionalis-atau apapun namanya, agar memungkinkan terjadinya persaingan yang manusiawi dan adil. Jika tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah konflik yang berkepanjangan, melelahkan dan pada akhirnya justru akan menghancurkan sendi-sendi bermasyarakat serta pranata sosial yang telah dengan susah payah dibangun. Dalam konteks ini, kiprah civil society yang bebas dan tanpa kendali, yaitu tanpa ketentuan yang disepakati bersama dan tanpa persetujuan tidak langsung tentang garis-garis besar batas-batas pranata politik, bukanlah gagasan yang perlu disambut hangat, melainkan suatu pikiran yang mengerikan. Sebab pada saatnya, model peran civil society seperti ini justru akan menghancurkan dirinya dan menciptakan lawannya sendiri, yaitu suatu bentuk otoritarianisme yang kuat. Untuk itu civil society mengisyaratkan identitas yang dipunyai bersama setidaknya mengenai persetujuan tidak langsung tentang pranata-pranata sosial politik.

Logikanya adalah setiap chaos akan mudah menjadi dasar pembenaran tampilnya orang kuat yang hendak mengatasinya, sehingga civil society dengan kiprah yang luas dan tanpa kendali akan justru menciptakan lawannya sendiri, yaitu otoritarianisme orang kuat. Begitu halnya yang terjadi di belahan Timur Tengah. Dalam suatu pengamatan sepintas saja mengenai trend kekuasaan seperti yang umumnya terjadi dalam konstalasi politik Timur Tengah dan Arab, kita akan dengan mudah mendapatkan suatu kenyataan tersebut yaitu munculnya otoritarianisme baru selalu didahului oleh kemelut dan konflik yang melelahkan dalam civil society. Hal ini berlaku tidak saja dalam konteks konflik horisontal antar warga dalam suatu negara, atau antar kekuatan-kekuatan besar di Dunia Arab, tetapi juga secara vertikal, yang sering secara tidak seimbang antar penguasa (militer) dengan civil society. Ketegangan dan konfrontasi yang ada di permukaan, baik yang diciptakan sendiri maupun akibat dari desakan faktor eksternal (Barat) dengan demikian menjadi latar belakang yang absah bagi tampilnya otoritarianisme baru. Untuk sekedar menyebut contoh adalah Krisis Teluk yang mengerikan, perang Iran-Iraq yang melelahkan, dan terakhir di Jibuti, Mauritania dan Somalia, yang dihadapkan pada konflik-konflik antar suku dan ras dibawah suatu hegemoni yang kuat.

Sementara dalam konteks perkembangan kehidupan di tanah air saat ini, civil society kelihatan semakin menguat dengan indikasi menjamurnya institusi-institusi publik yang independen, kebebasan, keterbukaan, pluralisme dan lain-lain. Tetapi pada saat yang bersamaan, institusi negara, karena masih dalam masa transisi, masih belum begitu kokoh akibat desakan reformasi yang meniscayakan perubahan struktur, sarana maupun prasarana sosial, politik, budaya kita pun ekonomi. Ini memerlukan waktu. Untuk itu, kekuatan civil society yang kita miliki sekarang ini, hendaknya dapat diorientasikan untuk mengawal proses transformasi politik dan kekuasaan negara yang sedang berlangsung saat ini, menuju peradaban baru Indonesia. Di sisi lain, kita sepatutnya mempertanyakan bagaimanakah mungkin negara yang belum begitu kuat karena masih dalam masa transisi akan tampil mengelola, memelihara apalagi melestarikan kepentingan-kepentingan universal dalam masyarakat? Jadi, nampaknya kita sekarang sedang dalam dilema; disatu sisi kita masih berharap memanfaatkan kekuatan civil society untuk "mengasuh" negara, tetapi pada saat yang sama, negara yang masih dalam "asuhan" civil society dituntut untuk mampu "menjinakkan" civil society.

Barangkali inilah tugas terberat yang harus diemban oleh pemerintah Gus Dur. Dan nampaknya pemerintah Gus Dur juga kebingungan memposisikan diri dalam kondisi dilematis itu. Gus Dur nampaknya lebih suka memposisikan diri untuk memanfaatkan kekuatan civil society guna "mengasuh" negara. Salah satu penjelasannya adalah kesan kelambanan dan tidak eektif pemerintahan Gus Dur dalam menangani konflik-konflik internal dalam masyarakat. Gus Dur terkesan seperti menahan laju negara menangani konflik dan pertentangan kepentingan-kepentingan sempit yang tarik menarik dalam masyarakat. Ia menyadari, bahwa karena negara masih "jabang bayi" dan masih memerlukan asuhan-maka civil society-lah yang seharusnya dituntut

mampu menyelesaikan permasalahan dalam dirinya. Pertentangan kepentingan-kepentingan sempit yang terjadi di Maluku, misalnya juga yang terjadi di Aceh, Papua, dan lain-lain menurut Gus Dur harus dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat setempat. Sekedar membuka wacana publik, melakukan pendidikan politik dan mengintrodusir gagasan civil society, pernyataan dan sikap politik Gus Dur tersebut, sampai batas-batas tertentu, layak mendapatkan perhatian secukupnya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pereobaan membicarakan civil society tanpa negara yang tangguh, tidak akan mempunyai makna apa-apa. Sebab ketika legitimasi pemerintahan runtuh, civil society juga terancam mengalaminya fragmentasi. Maka suatu ungkapan bahwa manakala civil society melemah, negara menjadi kuat, atau sebaliknya, manakala negara melemah, civil society menguat, sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Jadi, jika selama ini kita mempersepsikan civil society sebagai 'kekuatan' menghadapi negara, kita akan terjebak pada asumsi bahwa civil society memiliki kecenderungan untuk 'menghancurkan' negara. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu gagasan utama civil society adalah perlawanannya terhadap bentuk-bentuk otoritarianisme, diktatorisme dan pola-pola pemerintahan teokratis, namun sebagaimana Cak Nur-civil society tidaklah menumbangkan pemerintahan. Sebab pemerintahan yang jika dilanda korupsi merajalela dalam kalangannya sendiri dan kehilangan legitimasi, dengan sendirinya biasanya akan tumbang dari dalam. Oleh karenanya civil society lebih merupakan penerima manfaat (beneficiary) ketimbang sebuah kekuatan penghancur. Gagasan civil society ini, sayangnya, ketika diadopsi dan dilakukan upaya rekonstruksi terhadapnya oleh dunia ketiga (the third worlds), termasuk dunia Islam, sering dipandang sebelah mata, dan parahnya, hampir selalu tanpa reserve. Dalam suatu pengamatan dan penelitian yang agak mendalam tentang bagaimana gagasan civil society ini diterima di dunia Islam, akan dengan mudah didapati suatu kenyataan bahwa hampir tidak terdapat cukup perhatian dari para politisi dan cendekiawan muslim di dunia Islam yang mengkritisi gagasan civil society ini berkembang. Namun, pengecualian bahwa tokoh-tokoh Islam yang memerankan diri sebagai kritikus terhadap Barat, sedikit dapat merespon kenyataan di atas.

Untuk sekedar menyebut contoh sikap kritis itu, relevan untuk sekedar menyetengahkan sepias sikap dan pandangan dua cendekiawan muslim terkemuka, dengan setting sosial dan kultur intelektual yang berbedai Hasan Hanafi di Mesir dan Nurcholish Madjid di Indonesia. Walaupun, seperti diketahui, Hanafi berbeda dengan Cak Nur hampir dapat dipastikan tidak pernah menulis tentang civil society. Namun dernikian, tidak ada suatu alasan pun yang dapat menghalangi kemungkinan menyetengahkan pandangan-pandangannya tentang civil society.

Hanafi menolak civil society karena ia merupakan produk Barat, "Kalimatu haqq yurodu biha batil". Tidak sebagaimana idealisme yang dibawakannya, dengan civil society Barat menginginkan negara menjadi lemah dan kehilangan wibawa serta legitimasinya. Dalam perspektif Hanafi, civil society adalah kekuatan masyarakat di luar negara, seperti nampak dari tumbuhnya institusi-institusi non governmental (NGO's, Non Governmental Organizations). Jadi, menguatnya civil society melalui institusi-institusi di luar negara, adalah untuk mengukuhkan dirinya sendiri (civil society) di hadapan negara, alih-alih ikut memperkuat negara. Proposisi seperti ini, sering didukung oleh data-data empirik tentang apa yang terjadi di banyak kawasan. Di Timur Tengah, misalnya, yang wacana politiknya. Dipenuhi dengan konflik dan peperangan, tumbuh dan berkembangnya civil society selalu mengambil kesempatan pada saat negara sedang melemah dan legitimasi serta kredibilitasnya menurun, atau bahkan hilang sarna sekali. Sama halnya yang terjadi di tanah air, civil society mengambil kesempatan mengembangkan diri secara leluasa pada saat negara sedang dalam 'koma'.

Agak mengejutkan memang, ketika kemudian Hanafi mengatakan bahwa civil society yang dikembangkan Barat, landasan epistemologisnya adalah cara pandang yang sekuleristik. Tentu hal ini sulit diterima, karena dalam persepsi keagamaan kita, cara pandang sekuleristik, yaitu cara pandang yang memisahkan antara negara dan agama, tidak memiliki landasan kebenarannya secara absah. Jika kita terpaksa setuju dengan civil society—kata Hanafi—maka ia harus tetap tunduk kepada supremasi syari'at seperti yang telah digariskan Tuhan. Dalam suatu percobaan menjelaskannya, kita dapat mengajukan suatu asumsi bahwa Hanafi mendasarkan paradigmanya itu kepada perspektif khazanah intelektual Islam klasik, misalnya seperti yang pernah diadvokasikan oleh Ibnu Taimiyah. Dalam pandangan politik Ibnu Taimiyah, untuk menegakkan supremasi syari'at

dalam realitas kehidupan masyarakat, tidak serta merta begitu saja bisa dipercayakan kepada kehendak publik (Civil Society) tetapi juga memerlukan dukungan politik misalnya dalam bentuk pelembagaan sistem dan hukum dari negara.

Yaitu bahwa agama yang benar disamping wajib punya tulisan petunjuk juga harus memiliki pedang penolong. Hal ini berarti bahwa kekuasaan politik yang disimbolkan dengan pedang menjadi sesuatu yang sangat esensial. Dengan demikian politik atau negara hanyalah sebagai alat bagi (kepentingan) agama itu sendiri. Atau seperti ditunjukkan oleh Fazlur Rahman bahwa tujuan penciptaan suatu negara (Islam) adalah untuk memelihara keamanan dan integritas nasional, menjaga hukum dan ketertiban dan untuk memajukan negeri hingga tiap individu dalam negeri itu dapat merealisasikan seluruh potensinya sambil memberikan sumbangan bagi kesejahteraan semua. Pandangan seperti ini sejalan dengan penegasan Al-Qur'an. Dalam suatu kesimpulan umum, sikap dan pandangan Hanafi dalam batas-batas tertentu sejalan dengan gagasan Civil Society seperti yang dikembangkan Cak Nur dan kawan-kawannya. Tetapi berbeda dengan Hanafi, masyarakat madani dimaksudkan Cak Nur sebagai katakanlah suatu bentuk 'antitesa' dari gagasan civil society seperti yang dikembangkan Barat. Catatan Hanafi terhadap civil society maupun Civil Society, sarna-sarna bertemu dalam suatu noktah penting; bahwa keduanya sama-sama menginginkan, tidak saja masyarakat yang kuat, tetapi juga berdirinya negara yang kokoh. Berbeda dengan Hanafi, melalui gagasan Civil Society-nya, dalam berhadapan dengan gagasan-gagasan yang dikembangkan Barat, Cak Nur tampil dengan suatu performa yang lebih 'lunak'. Cak Nur tidak mengambil posisi berkonfrontasi langsung dengan ide-ide dari Barat, melainkan dengan suatu upaya merebut inisiatif, yaitu dengan melakukan hegemoni makna atas ide, jargon dan gagasan dari Barat, dengan bersumberkan pada tradisi dan khazanah doktrin agama yang kuat mengakar.

Di tangan Cak Nur, civil society mengalami transformasi makna hasil dari suatu hegemoni makna atas civil society-menjadi Civil Society. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Civil Society bukanlah civil society atau Al-Mujtama' Al-Madani. Civil Society adalah Civil Society. Civil society adalah civil society. Penting diperhatikan juga bahwa dalam Civil Society tidak ada pemisahan antara agama dan negara, tidak sebagaimana yang terjadi dalam lingkungan dan tradisi keagamaan Kristen, dimana civil society lahir dan berkembang di sana. Selain Islam adalah agama yang meliputi seluruh dimensi dan aspek-aspek hukum, ia juga tidak mengenal sistem hirarki keagamaan seperti sistem kerahiban dalam agama Kristen. Dalam Islam memang ada ulama, tetapi ulama tidak mempunyai tingkat kesucian dan terbebas dari kesalahan, sebagaimana yang biasa diyakini dalam Kristen. Konteks hubungan agama dan negara dalam diskursus politik Islam akan dapat dijumpai dalam pembicaraan bab tentang sumber-sumber agama mengenai keterkaitan dan hubungan antara agama dan politik. Misalnya, jika kita setuju untuk mengasumsikan politik sebagai negara -karena memang salah satu icon politik adalah negara maka hubungan mutualistik yaitu saling membutuhkan di antara keduanya dengan sendirinya tidak dapat dihindarkan. Dalam Civil Society, agama membutuhkan negara, karena dengannya agama dapat berkembang dengan baik. Dan sebaliknya, negara membutuhkan agama, karena diharapkan dengan agama negara dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pula, dalam pengertian tidak menyimpang dari kaidah dan prinsip-prinsip etik yang dituntunkan agama. Dengan demikian, agama dalam Civil Society berperan menyediakan suatu aturan dan sistem nilai yang diperlukan bagi penyelenggaraan negara dan penggunaan kekuasaan. Agama dengan demikian menjadi sumber etik moral bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Civil Society: Mencari Bentuk Peran Negara dan Masyarakat

Discourse mengenai hubungan negara dengan masyarakat atau hubungan rakyat dengan penguasa dengan sendirinya selalu menarik perhatian para ahli, terlebih jika dikaitkan dalam konteks hubungan keduanya secara struktural. Kajian tersebut sarna menariknya dengan discourse mengenai hubungan agama dan negara dalam banyak literatur tentang pemikiran politik Islam. Namun, discourse mengenai hubungan negara dengan masyarakat, secara substantif meniscayakan suatu jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan seputar; apakah dasar yang melandasi hubungan keduanya; bagaimanakah mekanisme politik bagi pengaturan hubungan keduanya; apakah batasan yang boleh ditetapkan bagi segala bentuk oposisi masyarakat kepada negara; bagaimanakah ciri

peran politik masing-masing untuk menentukan sampai pada tingkatan mana bentuk keterkaitan antara peran yang dimainkan oleh negara maupun masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam Civil Society salah satu prinsip yang mendasari hubungan antara penguasa dan rakyat adalah prinsip tidak memberikan sanksi hukum kepada anggota masyarakat kecuali yang nampak dalam perilaku nyata yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat.

Dan seperti diyakini banyak kalangan, prinsip ini untuk pertama kalinya diintroduksi oleh Umar bin Khattab ra, yang mengatakan bahwa pada zaman Nabi saw, manusia diambil persaksiannya dengan wahyu, tetapi sekarang wahyu telah terputus, maka dari itu, manusia diambil persaksiannya dari apa yang nampak dalam perilaku sehari-harinya. Imam Ghazali, dalam hal ini, malah menegaskan tentang keterbatasan wewenang seorang faqih, sampai dalam urusan menghukumi keislaman seseorang pun, terbatas hanya menghukuminya dari apa yang tampak dari perilaku dan perkataannya saja. Sebab -seperti juga sering ditegaskan Cak Nur-di luar wilayah itu, menjadi urusan Tuhan dengan yang bersangkutan.

Prinsip seperti ini dapat ditelusuri dalam teori Hukum dan perundangundangan modern tentang watak dan karakteristik hukum modern. Dalam teori hukum modern disebutkan bahwa di antara beberapa ciri dan karakteristik hukum dan perundangan-undangan modern adalah sifatnya yang general (Amanah-Mujarradah), dalam arti tidak mengenal kata "siapa"; juga watak sosialnya dimana hukum kemudian menjadi suatu kaidah sosial (*qowaid ijtima'iyah*), yaitu keberadaannya yang selalu terkait dengan aspek sosial serta sifat keniscayaannya (*mulzimah*), yang menjadikannya harus tetap diberlakukan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, tanpa pandang bulu. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan persamaan bagi seluruh warga yang menjadi salah satu tujuan dari tujuan-tujuan kemanusiaan itu sendiri. Persamaan ini meliputi; persamaan di depan hukum dan undang-undang.

Persamaan di depan pengadilan, yaitu bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan sama di depan pengadilan dengan cara mengikuti prosedur hukum (judicial proceedings) yang berlaku. Dengan kata lain, seseorang ketika dihadapkan pada pengadilan, sebelum didapatkan pembuktian bahwa dirinya telah melanggar hukum dan melakukan kesalahan, pengadilan harus tetap menghormatinya melalui "asas praduga tak bersalah" sampai suatu saat dapat dinyatakan sebagai bersalah atau tidak.

Kemudian persamaan dalam pemerataan kesejahteraan yang merupakan implementasi dari persamaan dalam hak-hak materi. Harta yang menjadi kekayaan negara adalah milik warga seluruhnya. Dan lembaga yang menangani sektor ini dituntut agar mampu pemeratakan hasil-hasil kekayaan negara tersebut. Inilah yang disebut keadilan sosial. Keniscayaan pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan politik oleh negara atau pemerintah dan pemeliharaan supremasi hukum serta ketentuan-ketentuan etik moral Al-Qur'an juga menjadi ciri -sekaligus merupakan prinsip dalam masyarakat madani. Karena dalam Civil Society, ketundukan negara kepada ketentuan-ketentuan etik moral yang telah ditetapkan Tuhan melalui syari'at-Nya merupakan keniscayaan. Jika perundang-undangan modern mensyaratkan prinsip kedaulatan negara dan menjadikannya sebagai salah satu karakteristik terpenting dari negara, maka Islam sesungguhnya tidak mengikatkan prinsip kedaulatan ini kepada seseorang atau golongan tertentu, tetapi mengikatkannya dengan prinsip kedaulatan syari'at yaitu kedaulatan hukum. Adapun yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat (people's sovereignty) adalah kedaulatan yang menjelma menjadi hak rakyat untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan dan pemerintahan, agar dapat memerintah sesuai dengan bimbingan etik moral yang dituntun Tuhan. Ini diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan dapat setiap saat dikontrol sehingga senafas dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Ketentuan seperti ini harus tercermin dalam kehidupan umum dan dijamin secara hukum agar dapat diciptakan suatu sistem pengaturan politik yang perlu bagi realisasi cita-cita syari'at. Civil Society adalah masyarakat demokratis, oleh karenanya selalu mencerminkan adanya kolektifitas pendapat, derny menghindari munculnya pendapat tunggal, utamanya dalam merespon problem-problem sosial dan dinamika masyarakat. Syari'at yang merupakan gagasan politik utama dalam Al-Qur'an relevan dengan semangat ini. Sebab kolektifitas pendapat dan pandangan seperti ini, hanya mungkin terwadahi dalam institusi syari'at yang jika ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang dikenal dengan sistem politik demokrasi. Dengan demikian, demokrasi merupakan aspek terpenting dari cita-cita politik Civil Society. Kohesi antara Islam dan demokrasi seperti

diadvokasikan oleh Filasuf Pujangga Muhammad Iqbal, sebagaimana sering ditirukan oleh Syafi'i Ma'arif terletak pada prinsip persamaan (equality) yang di dalam Islam dirnifestasikan oleh tauhid sebagai satu gagasan kerja (a working idea) dalam kehidupan sosio-politik umat Islam. Sebab hakekat tauhid sebagai gagasan kerja ialah persamaan, solidaritas dan kebebasan.

Pengertian seperti ini, menurut Nurcholish Madjid, akan mengacu kepada kualitas civility, yang mengandung makna toleransi dan kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima beragam pandangan politik yang berbeda; juga kesediaan untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa tidak ada jawaban yang paling benar terhadap suatu masalah. Sebab jika tidak demikian, Civil Society, civil society dan lingkungan sosial akan hanya terdiri dari fraksi-fraksi, klik-klik, dan serikat-serikat rahasia yang saling menyerang.

Mengenai bentuk peran negara, tercermin dalam perannya menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dalam banyak sekali dimensi, diantaranya pada dimensi atau sektor yang menyangkut kekayaan umum (kekayaan negara), pengembangan solidaritas dan persaudaraan dalam diri masyarakat serta menegakkan keadilan. Pemerintah sebagai representasi dari negara harus mampu mengemban tugas-tugas yang diartikan kepadanya, utamanya tugas dalam distribusi ekonomi dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum. Distribusi tersebut harus merata dan bersemangat keadilan, agar kekayaan dan sumber-sumber ekonomi negara tidak hanya berputar pada segolongan tertentu dalam masyarakat.

Salah satu upaya mengatur distribusi ekonomi adalah melalui pemberdayaan pelaksanaan zakat dan shodaqah sebagai sumber-sumber ekonomi rakyat, terutarna bagi masyarakat lapisan bawah. Sebab, salah satu pandangan yang melatar belakangi mengapa agama memerintahkan menunaikan zakat dan shodaqah adalah agar harta kekayaan tidak dimonopoli oleh segolongan tertentu, maka harus didistribusikan. Tugas seperti ini harus dapat diemban oleh negara atau pemerintah, justru dalam rangka menjaga stabilitas masyarakat. Sebab tidak jarang instabilitas masyarakat disebabkan oleh faktor kesenjangan sosial yang bermula dari tidak adanya pemerataan dalam distribusi ekonomi. Maraknya tuntutan memisahkan diri dari Republik ini pun, jika ditelusuri akar-akarnya, bukan saja karena faktor "provinsialisme", tetapi lebih disebabkan karena tidak adanya pemerataan dalam distribusi ekonomi yang dilakukan pemerintah pusat. Peran negara seperti ini sesungguhnya adalah dalam rangka menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat itu sendiri.

Diktum peran politik negara yang paling jelas dalam masyarakat madani adalah maujudnya hubungan yang sejajar antara masyarakat dan negara. Hubungan sejajar ini menganjurkan terciptanya hubungan yang mutualistik, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Negara, misalnya, berperan dalam menegakkan pemerintahan yang adil melalui proyek-proyek amal kebajikannya. Sementara masyarakat dapat mengambil peran dalam menumbuhkan etos amar ma'ruf yaitu menumbuhkan semangat kebaikan dan kemaslahatan bersama (public good). Atau singkatnya, peran negara adalah memberikan pelayanan, petunjuk dan bimbingan kepada publik disamping menegakkan hukum yang berkeadilan. Sedangkan sumber dan aset produksi bagi proyek-proyek sosial kemasyarakatan adalah masyarakat itu sendiri.[]

Tugas Civil Society tidak terbatas pada bagaimana memperkuat masyarakat di depan negara, tetapi juga bagaimana membangun negara yang kuat, yaitu negara yang mendasarkan dirinya kepada kepentingan masyarakat melalui institusi hukum yang berwibawa dan berwawasan keadilan.

Hand-Out 29 TEOLOGI PEMEBEBASAN RASIONAL

Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita: Tentang Teologi Pembebasan Rasional

Sejak lebih dari dua dekade yang lalu di kalangan umat Islam Indonesia dihadapkan pada gagasan tentang betapa perlu menghidupkan kembali "teologi rasional". Usaha menghidupkan kembali "teologi rasional" itu dianggap perlu untuk mengejar keterbelakangan umat Islam yang diakibatkan, menurut penganjur gagasan tersebut, antara lain karena mereka terbelenggu oleh "teologi tradisional" yang mereka anut. Teologi ini terutama dikaitkan dengan paham jabariah atau fatalisme, yang dianggap melahirkan sikap pasif, pasrah dan menyerah pada suratan takdir.

Prof. Dr. Harun Nasution adalah salah seorang penganjur utama "teologi rasional" itu. Karena itu beliau dianggap sebagai pelopor kebangkitan apa yang disebut sebagai "Neo-Mu'tazilah". Tentu saja kita bisa mempertanyakan validitas konstataasi tersebut dilihat dari segi faktual. Bersamaan dengan itu menyembul pula gagasan tentang keperluan usaha pembaharuan dalam pemikiran umat Islam. Salah seorang penganjur utamanya adalah Cak Nur (Dr. Nurcholish Madjid) yang mencanangkan ide "liberalisasi" dan "sekularisasi". Gagasan pembaharuan itu makin menggema dengan lontaran-lontaran ide Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid).

Ia menganggap gerakan "kultural" yang sibuk dalam tataran ide saja belum cukup, akan tetapi ia juga menentang gerakan "politik" yang cenderung memanipulasi agar untuk memperoleh kekuasaan. Gus Dur lebih menekankan perhatian dan pemikirannya pada gerakan "sosio-kultural" yang bermuara pada transformasi sosial umat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam perspektif ini terasa "teologi rasional" saja tidak memadai dan tidak menjawab tantangan nyata yang dihadapi umat Islam. Kontroversi antara "teologi rasional" versus "teologi tradisional" bagi kalangan aktivis yang concern pada berbagai fenomena ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat tidaklah relevan.

Dirasakan keperluan untuk merumuskan sejenis teologi yang lain, "teologi transformatif". Beberapa pemikir muslim mencoba menggali dan merumuskan "teologi transformatif" itu. Kesadaran tentang keperluan "teologi transformatif" itu rupanya tidak hanya muncul di Indonesia, akan tetapi juga di negeri-negeri muslim lainnya. Kita bisa menyebut Dr. Hassan Hanafi (Mesir) yang terkenal dengan gagasan Al-Yasari 'l-Islami (Kiri Islam) dan menulis karya monumental "Mina 'l-Aqidah ila 'l-Thawrah" (Dari Teologi ke Revolusi) sebanyak 5 jilid. Juga Ziaul Haque (Pakistan, bukan Zia ul Haq yang mantan Presiden) yang menulis tulisan yang cukup provokatif, "Revelation and Revolution in Islam" (Wahyu dan Revolusi dalam Islam).

Selain itu harus pula disebut nama Asghar Ali Engineer (India), yang terjemahan tulisannya "Islam and Its Relevance to Our Age" ada di tangan pembaca sekarang ini. Berbeda dengan kedua nama yang disebutkan di atas, Asghar Ali Engineer bukan hanya seorang pemikir, tetapi juga seorang aktifis. Kebetulan, ia merupakan pemimpin salah satu kelompok Syi'ah Isma'iliyah, Daudi Bohras (Guzare Daudi) yang berpusat di Bombay India. Melalui wewenang keagamaan yang ia miliki, Asghar Ali berusaha menerapkan gagasan-gagasannya. Untuk itu ia harus menghadapi reaksi generasi tua yang cenderung bersikap konservatif, mempertahankan kemapanan.

Untuk memahami latar belakang keagamaan Asghar Ali, ada baiknya diketahui sepintas lalu kelompok Daudi Bohras ini. Para pengikut Daudi Bohras dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki Amirul Mukminin. Mereka mengenal 21 orang Imam. Imam mereka yang terakhir Mawlana Abul-Qasim al-Thayyib yang menghilang pada tahun 526 H. Akan tetapi mereka masih percaya bahwa ia masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh para Da'i (dari perkataan itu berasal ungkapan Daudi) yang selalu berhubungan dengan Imam terakhir itu. Untuk diakui sebagai seorang Da'i tidaklah mudah. Ia harus mempunyai 94 kualifikasi yang diringkas dalam 4 kelompok: (1) kualifikasi-kualifikasi pendidikan; (2) kualifikasi-kualifikasi administratif; (3) kualifikasi-kualifikasi moral dan teoritikal, dan (4) kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kepribadian.

Yang menarik adalah bahwa di antara kualifikasi itu seorang Da'i harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Asghar Ali adalah seorang Da'i. Dengan memahami posisi Asghar di atas kita tidak heran mengapa Asghar Ali Engineer sangat vokal

dalam menyoroti kezaliman dan penindasan. Ia menganjurkan bukan sekedar merumuskan “teologi transformatif” akan tetapi lebih dari itu. Asghar Ali menghimbau generasi muda Islam untuk merekonstruksi “teologi radikal transformatif”. Ketika gagasan Teologi Pembebasan muncul di kalangan gereja Katolik di Amerika Latin, yang ternyata tidak direstui Vatikan, ia menulis artikel “Teologi Pembebasan dalam Islam”.

Tulisan-tulisan dalam tulisan ini sarat dengan analisa filosofikal dan historikal untuk merumuskan “Teologi Pembebasan dalam konteks modern” seperti diinginkan oleh Asghar Ali Berdasarkan telaah kesejarahan terhadap dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW di masa-masa permulaan, misalnya, Asghar Ali sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang revolusioner, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan, dan beliau berjuang untuk melakukan perubahan-perubahan secara radikal dalam struktur masyarakat di zamannya. Bertolak dari situ, agaknya, lalu Asghar Ali Engineer merevisi konsep dan pengertian mukmin dan kafir, yang berbeda dengan apa yang umum dipahami oleh umat Islam sekarang.

Ia menulis: “ ... orang-orang kafir dalam arah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menumpuk kekayaan dan terus membiarkan kezaliman dalam masyarakat serta merintangi upaya-upaya menegakkan keadilan”. Dengan demikian bagi Asghar Ali, seorang mukmin sejati bukanlah sekedar orang yang percaya kepada Allah akan tetapi juga ia harus seorang mujahid yang berjuang menegakkan keadilan, melawan kezaliman dan penindasan.

Jadi, kalau ia tidak berjuang menegakkan keadilan dan melawan kezaliman serta penindasan, apalagi kalau ia justru mendukung sistem dan struktur masyarakat yang tidak adil, walaupun ia pelaya kepada Tuhan, orang itu, dalam pandangan Asghar, masih dianggap tergolong kafir. Pemahaman dan penafsiran konsep mukmin dan kafir ini, saya rasa, adalah kunci untuk memahami pemikiran Asghar Ali yang pasti, untuk banyak orang akan mengagetkan.

Dari situ ia menyodorkan reinterpretasi dan rekonseptualisasi tentang berbagai terma-terma keagamaan, dan menawarkan reevaluasi terhadap berbagai gerakan-gerakan umat Islam di masa lalu dalam perspektif Teologi Pembebasan yang menuntut perubahan struktur sosial yang tidak adil dan menindas. Asghar bahkan memaksa kita untuk memikirkan kembali asumsi-asumsi kepercayaan, pemikiran dan sikap keberagamaan kita secara radikal. Tulisan Asghar disini membantu kita untuk melakukan pemikiran kembali itu.[]



Gerakan “kultural” yang sibuk dalam tataran ide saja belum cukup, akan tetapi ia juga menentang gerakan “politik” yang cenderung mernanipulasi agama untuk memperoleh kekuasaan. Diantara kualifikasi itu seorang Da’i harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman.

Hand-Out 30 TRADISI VERSUS MODERNISASI ISLAM

Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer

Tradisi bukanlah sehimpun norma yang dapat dengan mudah ditunjuk. Ibarat rambu, tradisi adalah tanda yang aeuannya tidak tentu, remang dan kabur. Makna dari tanda itu tergantung dari siapa yang menafsirkannya. Wahana pemikiran keagamaan yang beredar dan berkembang dalam masyarakat sering menempatkan warisan intelektual Muslim masa lampau itu sebagai "warisan yang baku" dan "tradisi yang mapan" untuk tidak diungkit dan diutak-atik kembali, kecuali hanya sebatas dibaca dan diikuti. Dalam perjalanan panjang sejarah pemikiran keislaman, dapat kita eermati bahwa apabila "tradisi" sebagai warisan intelektual masa silam dalam bentuk teks-teks keagamaan itu dijadikan perspektif untuk menilai modrnitas, yang muncul adalah sikap keberagamaan yang cenderung "fundamentalis", radikal-fanatik dan menafikan arti modernitas itu sendiri sebagai sebuah proses perkembangan sejarah yang harus disikapi dengan menimbang aspek kemaslahatannya. Sebaliknya, apabila yang digunakan itu terbatas pada modernitas dan rasionalitas semata sebagai perspektif dan menilai tradisi, yang muncul adalah sikap apatis terhadap fenomena keagamaan, bahkan cenderung mengeringkan ruang-ruang religiusitas kemanusiaan. Pada era globalisasi ilmu dan budaya, hampir semua sendi kehidupan manusia mengalami perubahan. Pada saat yang sama, pengetahuan manusia tentang realitas jagat raya, juga berkembang pesat sesuai dengan tingkat laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi modern, yakni tingkatan historisitas manusia modern, mengantarkan kita pada era globalisasi, secara otomatis mempengaruhi dan mengubah pola pikir keberagamaan yang lama.

Warisan intelektual atau tradisi keagamaan bukanlah sesuatu yang otoritatif dalam menilai fenomena modernitas dan posmodernitas. Sebaliknya, modernitas sebagai sejarah pun tidak merniliki kekuatan yang absolut untuk menafikan tradisi keagamaan. Keduanya perlu didialogkan secara adil dalam konteks keberagamaan masyarakat kontemporer dalam berbagai aspeknya yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lainlain. Merefleksikan pembangunan teoretisasi atas fenornena gerakan pembaruan pemikiran keislaman yang di dalamnya terjadi tarik-menarik antara dua kutub: modern versus tradisi. Di dalam pembahasannya, tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian. Secara telegrafis dalam gerakan pembaruan pemikiran keislaman, semenjak umat dihadapkan pada realitas tekstual tradisi keagamaan hingga metode pembacaan produktif yang perlu dilakukan terhadap teks-teks keagamaan. Sedangkan pada bagian kedua, mulai menyentuh analisis terhadap aspek-aspek praktis yang telah dipetakan dalam wawancara gerakan pembaruan pernik iran Islam. Karakter gerakan yang mengetengahkan *faith* ini/ *action* ini sebagai satu-satunya gerakan pembaruan yang berbeda dengan yang lain, baik dalam negeri, yakni memahami teks dalam bentuk artikulasi gerakan sosial. Paradigma keagarnaan dari gerakan-gerakan pembaruan yang cenderung banyak menafikan isu-isu strategik untuk menempatkan nilainilai universal dari norma Islam. Di tengah kesimpang-siuran berbagai "identitas" Islam yang diajakan oleh banyak cendekiawan Muslim Indonesia akhir-akhir ini, tulisan ini seperti memberikan arah yang jelas.

Gerakan Islam dan Kapitalisme Global: Membela Pembela Agama Tuhan

Terdapat banyak penjelasan sosial mengapa gerakan keagamaan yang berkarakteristik seperti itu muncul. Ada 'jalan panjang' kelahiran gerakan is untuk mengidentifikasi berbagai aspek ajaran, situasi politik, maupun kekuatan sosial yang hendak dibangun. Sejumlah tokoh-yang hingga kini berpengaruh memberikan landasan mendalam akan kehadiran kekuatankekuatan Islam di kemudian hari. Paling tidak ada sejumlah tesis yang bisa dijadikan faktor penyebab utama. Tesis pertama menyatakan kebangkitan gerakan ini karena bangkitnya kesadaran keagamaan di kalangan umat Islam. Biasanya karakteristik gerakan ini ditandai dengan suburnya praktek-praktek ritual Islam dan ketaatan yang menyolok pada berbagai bentuk peribadatan. Gerakan yang dimotivasi oleh situasi demikian cenderung akan pasif secara politik, kecuali jika ada dorongan kuat pemerintah atau pihak-pihak musuh dari luar. Gerakan ini biasanya selalu bermula dari ajakan 'untuk menyeru kembali ke asas-asas agama'. Tesis kedua menyatakan kemunculan gerakan keagamaan ini karena situasi krisis dimana gerakan ini biasanya berkeinginan untuk menegakkan tatanan politik Islami

yang berbeda tegas dengan tatanan yang ada. Dalam konteks ini memang irisannya sangat tipis mengingat antara kesadaran keagamaan dengan perumusan tatanan politik sering bersinggungan erat. Ungkapan yang biasa dinyatakan adalah al-ba'ts al-islami (kebangkitan kembali Islam), al-syahwa al-islamiyyah (kebangkitan Islam), ihya ai-din (kebangkitan agama), dan al-ushuliyya al-islamiyyah (fundamentalisme Islam). Artinya mereka berkeinginan mencari keyakinan yang fundamental, baik dasar-dasar komunitasnya, pemerintahan, maupun dasar-dasar hukum syari'ah. Politik yang berasas pada ideologi Islam ini hadir di tengah pergumulan yang keras dengan ideologi-ideologi lain. Pertama adalah nasionalisme kultural Jawa yang dimotori oleh para bangsawan tinggi dan para filosof Belanda. Kedua, adalah para sosialisme Marxis yang kemudian menjelma menjadi paham komunisme. Dan yang ketiga adalah nasionalisme sekuler yang mulai menciptakan batas dan definisi mengenai Indonesia. Jika merujuk pada sosiolog Shils, yang merumuskan bahwa ideologi adalah hasil perumusan yang strategis dari pandangan hidup, maka ideologi politik Islam merupakan hasil 'subyektif' dari pandangan komunitas terhadap keagamaan, sembari membuka kemungkinan baru yang bisa diwujudkan. Ideologi yang bersandarkan pada agama akan memberi makna tentang keberadaan manusia terutama atas konsep hidup, mati, kosmos, dan hukum alam. Dalam kaitan itu Partai Syarikat Islam mengawali proses pembentukannya.

Dalam era transisi politik seperti sekarang kemunculan pasukan Tuhan memang memiliki akar sejarah yang panjang. Jika pada era Orde baru pendekatan represif telah mampu mengembangkan model semangat keagamaan yang bergeliat di bawah permukaan dan secara tak terelakkan sulit untuk terpantau, maka pada masa sekarang situasinya sangat jauh berbeda. Berkombinasi dengan berbagai faktor global maka pasukan Tuhan ini memiliki sejumlah karakteristik yang unik. *Pertama*, keaktifan dalam membentuk tatanan kehidupan yang sepenuhnya mengikuti bunyi literer dari teks suci. Diterapkan dalam kerangka politik praktis keinginan untuk menegakkan syariat Islam merupakan artikulasi politik yang masih diperjuangkan hingga kini. Berhadapan dapat masuk dalam konstitusi, maka isu penegakan syariat Islam terus-menerus diperjuangkan dan konsolidasi berbagai kepentingan politik terus terjalin. *Kedua*, terdapat banyak bukti tentang keterlibatan militer dalam berbagai pembentukan sejumlah pasukan sipil sehingga dalam aksinya mereka terlatih untuk menggunakan dan memanfaatkan cara-cara kekerasan. Kenyataan ini membuat pasukan Tuhan banyak terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM. *Ketiga*, potensi untuk berbenturan dengan berbagai kelompok prodemokrasi semakin terbuka bukan saja karena berbeda sudut pandang melainkan juga kepentingan praktis yang bertolak belakang.

Di samping itu sejumlah faktor eksternal yang sangat mempengaruhi dinamika yang ada dalam pasukan Tuhan. *Pertama*, arus yang cukup deras dari globalisasi yang telah menciptakan risiko terutama dalam kerangka pengukuhan identitas. Konsep-konsep globalisasi sedikit banyak mengguncang keyakinan terdapat tentang keberadaan Tuhan dan rencana-Nya pada masa depan. Meskipun pada sisi lain format globalisasi yang mengandalkan pada teknologi informasi turut berjasa dalam memperluas dukungan beberapa program pasukan Tuhan. *Kedua*, adalah pandangan bahwa sistem politik internasional masih gagal untuk menciptakan tatanan yang lebih adil bahkan berlaku diskriminatif pada kalangan Muslim. Krisis Palestina menjadi lambang kesewenang-wenangan pemerintah Amerika bahkan lebih jauh dari itu merupakan simbol dari kejahatan zionisme. Itu sebabnya pasukan Tuhan merasa berhak bahkan berkewajiban untuk melakukan berbagai bentuk jihad guna membebaskan tanah Palestina dari cengkraman pemerintah Barat. *Ketiga*, kejahatan terorisme yang diidentikkan dengan kalangan Muslim telah menggerakkan keyakinan bahwa masyarakat internasional mengalaminya semacam sindrom paranoid terhadap Islam. Perburuan terhadap kaum yang disebut-sebut sebagai teroris tanpa prosedur hukum yang normal makin menguatkan kecurigaan bahwa sebagai ajaran, Islam hendak dibasmi keyakinan-keyakinan politiknya. Kombinasi antara faktor internal dan eksternal ini makin diperkeruh oleh kondisi stabilitas politik yang terus bergolak di berbagai daerah. Yang menarik, melalui kerusuhan itulah kemudian konsep jihad, yang selama ini menjadi lambang dan simbol utama pasukan Tuhan mendapat penekanan. Jihad bukan semata-mata mengartikulasikan kepentingan agama, melainkan juga mewakili sederet keinginan politik pragmatis.[]

Hand-Out 31

TELAAH KRITIS PEMIKIRAN HASSAN HANAFI

Riwayat Hidup dan Kondisi Sosio-Kultural Mesir

Hassan Hanafi adalah Guru Besar pada fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo, di dekat Benteng Salahuddin, daerah perkampungan Al-Azhar. Kota ini merupakan tempat bertemunya para mahasiswa muslim dari seluruh dunia yang ingin belajar, terutama di Universitas Al-Azhar. Meskipun lingkungansosialnya dapat dikatakan tidak terlalu mendukung, tradisi keilmuan berkembang di sana sejak lama. Secara historis dan kultural, kota Mesir memang telah dipengaruhi peradaban-peradaban besar sejak masa Fir'aun, Romawi, Bizantium, Arab, Mamluk dan Turki, bahkan sampai dengan Eropa modern. Hal ini menunjukkan bahwa Mesir, terutama kota Kairo, mempunyai arti penting bagi perkembangan awal tradisi keilmuan.

Hassan Hanafi Masa kecil

Hanafi berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup di bawah penjajahan dan dominasi pengaruh bangsa asing. Kenyataan itu membangkitkan sikap patriotik dan nasionalismenya, sehingga tidak heran meskipun masih berusia 13 tahun ia telah mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan perang melawan Israel pada tahun 1948. Ia ditolak oleh Pemuda Muslimin karena dianggap usianya masih terlalu muda. Di samping itu ia juga dianggap bukan berasal dari kelompok Pemuda Muslimin. Ia kecewa dan segera menyadari bahwa di Mesir saat itu telah terjadi problem persatuan dan perpecahan. Ketika masih duduk di bangku SMA, tepatnya pada tahun 1951, Hanafi menyaksikan sendiri bagaimana tentara Inggris membantai para syuhada di Terusan Suez. Bersama-sama dengan para mahasiswa ia mengabdikan diri untuk membantu gerakan revolusi yang telah dimulai pada akhir tahun 1940-an hingga revolusi itu meletus padatahun 1952.

Atas saran anggota-anggota Pemuda Muslimin, pada tahun ini ini pula ia tertarik untuk memasuki organisasi Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi, di tubuhIkhwan; pun terjadi perdebatan yang sama dengan apa yang terjadi di Pemuda Muslimin. Kemudian Hanaafi kembali disarankan oleh para anggota Ikhwanul Muslimin untuk bergabung dalam organisasi Mesir Muda. Ternyata keadaan di dalam tubuh Mesir Muda sama dengan kedua organisasi sebelumnya. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan Hanafi atas cara berpikir kalangan muda Islam yang terkotak-kotak. Kekecewaan ini menyebabkan ia memutuskan beralih konsentrasi untuk mendalami pemikiran-pemikiran keagamaan, revolusi, dan perubahan sosial. Ini juga yang menyebabkan ia lebih tertarik pada pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb, seperti tentang prinsip-prinsip Keadilan Sosial dalam Islam.

Sejak tahun 1952 sampai dengan 1956 Hanafi belajar di Universitas Cairo untuk mendalami bidang filsafat. Didalam periode ini ia merasakan situasi yang paling buruk di Mesir. Pada tahun 1954 misalnya, terjadi pertentangan keras antara Ikhwan dengan gerakan revolusi. Hanafi berada pada pihak Muhammad Najib yang berhadapan dengan Nasser, karena baginya Najib memiliki komitmen dan visi keislaman yang jelas. Kejadian-kejadian yang ia alami pada masa ini, terutama yang ia hadapi di kampus, membuatnya bangkit menjadi seorang pemikir, pembaharu, dan reformis. Keprihatinan yang muncul saat itu adalah mengapa umat Islam selalu dapat dikalahkan dan konflik internal terus terjadi. Tahun-tahun berikutnya, Hanafi berkesempatan untuk belajar di Universitas Sorborne; Perancis, pada tahun 1956 sampai 1966.

Di sini ia memperoleh lingkungan yang kondusif untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan mendasar yang sedang dihadapi oleh negerinya dan sekaligus merumuskan jawaban-jawabannya. Di Perancis inilah ia dilatih untuk berpikir secara metodologis melalui kuliah-kuliah maupun bacaan-bacaan atau karya-karya orientalis. Ia sempat belajar pada seorang reformis Katolik, Jean Gitton; tentang metodologi berpikir, pembaharuan, dan sejarah filsafat. Ia belajar fenomenologi dari Paul Ricouer, analisis kesadaran dari Husserl, dan bibingan penulisan tentang pembaharuan Ushul Fikih dari Profesor Masnion. Semangat Hanafi untuk mengembangkan tulisan-tulisannya tentang pembaharuan pemikiran Islam semakin tinggi sejak ia pulang dari Perancis pada tahun 1966. Akan tetapi, kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel tahun 1967 telah mengubah niatnya itu. Ia kemudian ikut serta dengan rakyat berjuang dan membangun kembali semangat nasionalisme mereka. Pada sisi lain, untuk menunjang perjuangannya itu, Hanafi juga mulai memanfaatkan

pengetahuan-pengetahuan akademis yang telahis peroleh dengan memanfaatkan media massa sebagai corong perjuangannya. Ia menulis banyak artikel untuk menanggapi masalah-masalah aktual dan melacak faktor kelemahan umat Islam.

Di waktu-waktu luangnya, Hanafi mengajar di UniversitasKairo dan beberapa universitas di luar negeri. Ia sempat menjadi profesor tamu di Perancis (1969) dan Belgia (1970). Kemudian antara tahun 1971 sampai 1975 iamengajar di Universitas Temple, Amerika Serikat. Kepergiannya ke Amerika, sesungguhnya berawal dari adanya keberatan pemerintah terhadap aktivitasnya di Mesir, sehingga ia diberikan dua pilihan apakah ia akan tetap meneruskan aktivitasnya itu atau pergi ke Amerika Serikat. Pada kenyataannya, aktivitasnya yang baru di Amerika memberinya kesempatan untuk banyak menulis tentang dialog antar agama dengan revolusi.

Baru setelah kembali dari Amerika ia mulai menulis tentang pembaruan pemikiran Islam. Ia kemudian memulai penulisan buku *Al-Turats wa al-Tajdid*. Karya ini, saat itu, belum sempat ia selesaikan karena ia dihadapkan pada gerakananti-pemerintah Anwar Sadat yang pro-Barat dan"berkolaborasi" dengan Israel. Ia terpaksa harus terlibat untuk membantu menjernihkan situasi melalui tulisan-tulisannya yang berlangsung antara tahun 1976 hingga 1981. Tulisan-tulisannya itulah yang kemudian tersusun menjadi buku *Al Din wa Al-Tsaurah*. Sementara itu, dari tahun 1980 sampai 1983 ia menjadi profesortamu di Univer-sitas Tokyo, tahun 1985 di Emirat Arab. Ia pun diminta untuk merancang berdirinya Universitas Fes ketika ia mengajar di sana pada tahun-tahun1983-1984.

Hanafi berkali-kali mengunjungi negara-negara Belanda, Swedia, Portugal, Spanyol, Perancis, Jepang, India, Indonesia, Sudan, Saudi Arabia dan sebagainya antara tahun 1980-1987. Pengalaman pertemuannya dengan para pemikir besar di negara-negara tersebut telah menambah wawasannya untuk semakin tajam memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia Islam.Maka, dari pengalaman hidup yang ia peroleh sejak masih remaja membuat ia memiliki perhatian yang begitu besar terhadap persoalan umat Islam.

Karena itu, meskipun tidak secara sepenuhnya mengabdikan diri untuk sebuah pergerakan tertentu, ia pun banyak terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pergerakan-pergerakan yang adadi Mesir. Sedangkan pengalamannya dalam bidang akademis dan intelektual, baik secara formal maupun tidak, dan pertemuannya dengan para pemikir besar dunia semakin mempertajam analisis dan pemikirannya sehingga mendorong hasratnya untuk terus menulis dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru untuk membantu menyelesaikan persoalan-persolan besar umat Islam.

Perkembangan Pemikiran dan Karya-karyanya. Untuk memudahkan uraian pada bagian ini, kita dapat mengklasifikasikan karya-karya Hanafi dalam tiga periodeseperti halnya yang dilakukan oleh beberapa penulis yang telah lebih dulu mengkaji pemikiran tokoh ini: Periode pertama berlangsung pada tahun-tahun 1960-an; periode kedua pada tahun-tahun 1970-an, dan periode ketiga dari tahun-tahun 1980-an sampai dengan 1990-an.

Pada awal dasawarsa 1960-an pemikiran Hanafi dipengaruhi oleh faham-faham dominan yang ber-kembang di Mesir, yaitu *nasionalistik-sosialistik populistik* yang juga dirumuskan sebagai *ideologi Pan Arabisme*, dan oleh situasi nasional yang kurang menguntungkan setelah kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel pada tahun1967. Pada awal dasawarsa ini pula (1956-1966), sebagaimana telah dikemukakan, Hanafi sedang beradadalam masa-masa belajar di Perancis.

Di Perancis inilah, Hanafi lebih banyak lagi menekuni bidang-bidang filsafat dan ilmu sosial dalam kaitannya dengan hasrat dan usahanya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Islam. Untuk tujuan rekonstruksi itu, selama berada di Perancis ia mengadakan penelitian tentang, terutama, metode interpretasi sebagai upaya pembaharuan bidang ushul fikih (teori hukum Islam, *Islamic legal theory*) dan tentang fenomenologi sebagai metode untuk memahami agama dalam konteks realitas kontemporer. Penelitian itu sekaligus merupakan upayanya untuk meraih gelar doktor pada Universitas Sorbonne (Perancis), dan ia berhasil menulis disertasi yang berjudul *Essai sur la Methode d'Exegese* (Esai tentang Metode Penafsiran). Karya setebal 900 halaman itu memperoleh penghargaan sebagai karya ilmiah terbaik di Mesir pada tahun 1961. Dalam karyanya yaitu jelas Hanafi berupaya menghadapkan ilmu ushul fikih pada mazhab filsafat fenomenologi Edmund Husserl.

Pada fase awal pemikirannya iru, tulisan-tulisan Hanafi masih bersifat ilmiah murni. Baru pada akhir dasawarsa itu ia mulai berbicara tentang keharusan Islam untuk mengembangkan wawasan kehidupan yang progresif dan berdimensi pembebasan (taharrur, liberation). Ia

mensyaratkan fungsi pembebasan jika memang itu yang diinginkan Islam agar dapat membawa masyarakat pada kebebasan dan keadilan, khususnya keadilan sosial, sebagai ukuran utamanya. Struktur yang populistik adalah manifestasi kehidupannya dan kebulatan kerangka pemikiran sebagai resep utamanya. Hanafi sampai pada kesimpulan bahwa Islam sebaiknya berfungsi orientatif bagi ideologi populistik yang ada. Pada akhir periode ini, dan berlanjut hingga awal periode 1970-an, Hanafi juga memberikan perhatian utamanya untuk mencari penyebab kekalahan umat Islam dalam perang melawan Israel tahun 1967. Oleh karena itu, tulisan-tulisannya lebih bersifat populis. Di awal periode 1970-an, ia banyak menulis artikel di berbagai media massa, seperti *Al Katib*, *Al-Adab*, *Al-Fikral-Mu'ashir*, dan *Mimbar Al-Islam*.

Pada tahun 1976, tulisan-tulisan itu diterbitkan sebagai sebuah buku dengan judul *Qadhaya Mu'ashirat fi Fikrina al-Mu'ashir*. Buku ini memberikan deskripsi tentang realitas dunia Arab saat itu, analisis tentang tugas para pemikir dalam menanggapi problema umat, dan tentang pentingnya pembaruan pemikiran Islam untuk menghidupkan kembali khazanah tradisional Islam. Kemudian, pada tahun 1977, kembali ia menerbitkan *Qadhaya Mu'ashirat fi al-Fikral-Gharib*. Buku kedua ini mendiskusikan pemikiran parasarjana Barat untuk melihat bagaimana mereka memahami persoalan masyarakatnya dan kemudian mengadakan pembaruan. Beberapa pemikir Barat yang ia singgung itu antara lain Spinoza, Voltaire, Kant, Hegel, Unamuno, Karl Jaspers, Karl Marx, Marx Weber, Edmund Husserl, dan Herbert Marcuse.

Kedua buku itu secara keseluruhan merangkum dua pokok pendekatan analisis yang berkaitan dengan sebab-sebab kekalahan umat Islam; memahami posisi umat Islam sendiri yang lemah, dan memahami posisi Barat yang superior. Untuk yang pertama penekanan diberikan pada upaya pemberdayaan umat, terutama dari segi pola pikirnya, danyang kedua ia berusaha untuk menunjukkan bagaimana menekan superioritas Barat dalam segala aspek kehidupan. Kedua pendekatan inilah yang nantinya melahirkan dua pokok pemikiran baru yang tertuang dalam dua buah karyanya, yaitu *Al-Turats wa al-Tajdid* (Tradisi dan Pembaruan), dan *Al-Istighrab* (Oksidentalisme).

Pada periode ini, yaitu antara tahun-tahun 1971-1975, Hanafi juga menganalisis sebab-sebab ketegangan antara berbagai kelompok kepentingan di Mesir, terutama antara kekuatan Islam radikal dengan pemerintah. Pada saat yang sama situasi politik Mesir mengalami ketidakstabilan yang ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan sikap Anwar Sadat yang pro-Barat dan memberikan kelonggaran pada Israel, hingga ia terbunuh pada Oktober 1981. Keadaan itu membawa Hanafi pada pemikiran bahwa seorang ilmuwan juga harus mempunyai tanggung jawab politik terhadap nasib bangsanya. Untuk itulah kemudian ia menulis *Al-Din wa al-Tsaurah fi Mishr* 1952-1981. Karya ini terdiri dari 8 jilid yang merupakan himpunan berbagai artikel yang ditulis antara tahun 1976 sampai 1981 dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1987. Karya itu berisi pembicaraan dan analisis tentang kebudayaan nasional dan hubungannya dengan agama, hubungan antara agama dengan perkembangan nasionalisme, tentang gagasan mengenai gerakan "Kiri Keagamaan" yang membahas gerakan-gerakan keagamaan kontemporer, fundamentalisme Islam, serta "Kiri Islam dan Integritas Nasional". Dalam analisisnya Hanafi menemukan bahwa salah satu penyebab utama konflik berkepanjangan di Mesir adalah tarik-menarik antara ideologi Islam dan Barat dan ideologi sosialisme.

Ia juga memberikan bukti-bukti penyebab munculnya berbagai tragedi politik dan, terakhir, menganalisis penyebab munculnya radikalisme Islam. Karya-karya lain yang ia tulis pada periode ini adalah *Religious Dialogue and Revolution* dan *Dirasat al-Islamiyyah*. Buku pertama berisi pikiran-pikiran yang ditulisnya antara tahun 1972-1976 ketika ia berada di Amerika Serikat, dan terbit pertama kali pada tahun 1977. Pada bagian pertama buku ini ia merekomendasikan metode hermeneutika sebagai metode dialog antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Sedangkan bagian kedua secara khusus membicarakan hubungan antara agama dengan revolusi, dan lagi-lagi ia menawarkan fenomenologi sebagai metode untuk menyikapi dan menafsirkan realitas umat Islam.

Sementara itu *Dirasat Islamiyyah*, yang ditulis sejak tahun 1978 dan terbit tahun 1981, memuat deskripsi dan analisis pembaruan terhadap ilmu-ilmu keislaman klasik, seperti ushul fikih, ilmu-ilmu ushuluddin, dan filsafat. Dimulai dengan pendekatan historis untuk melihat perkembangannya, Hanafi berbicara tentang upaya rekonstruksi atas ilmu-ilmu tersebut untuk disesuaikan dengan realitas kontemporer. Periode selanjutnya, yaitu dasawarsa 1980-an sampai

dengan awal 1990-an, dilatarbelakangi oleh kondisipolitik yang relatif lebih stabil ketimbang masa-masa sebelumnya.

Dalam periode ini, Hanafi mulai menulis *Al-Turats wa al-Tajdid* yang terbit pertama kali tahun 1980. Buku ini merupakan landasan teoretis yang memuat dasar-dasar ide pembaharuan dan langkah-langkahnya. Kemudian, ia menulis *Al-Yasar Al-Islamiy* (Kiri Islam), sebuah tulisan yang lebih merupakan sebuah “manifesto politik” yang berbau ideologis, sebagaimana telah saya kemukakan secara singkat di atas. Jika Kiri Islam baru merupakan pokok-pokok pikiran yang belum memberikan rincian dari program pembaruannya, buku *Min Al-Aqidah ila Al-Tsaurah* (5 jilid), yang ditulisnya selama hampir sepuluh tahun dan baru terbit pada tahun 1988. Buku ini memuat uraian terperinci tentang pokok-pokok pembaruan yang ia canangkan dan termuat dalam kedua karyanya yang terdahulu. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan jika buku ini dikatakan sebagai karya Hanafi yang paling monumental. Satu bagian pokok bahasan yang sangat penting dari buku ini adalah gagasan rekonstruksi ilmu kalam.

Pertama-tama ia mencoba menjelaskan seluruh karya dan aliran ilmu kalam, baik dari sisi kemunculannya, aspek isi dan metodologi maupun perkembangannya. Lalu ia melakukan analisis untuk melihat kelebihan dan kekurangannya, terutama relevansinya dengan konteks modernitas. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa pemikiran kalam klasik masih sangat teoretis, elitis dan statis secara konsepsional. Ia merekomendasikan sebuah teologi atau ilmu kalam yang antroposentris, populis, dan transformatif.

Selanjutnya, pada tahun-tahun 1985-1987, Hanafi menulis banyak artikel yang ia presentasikan dalam berbagai seminar di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Timor Tengah, Jepang, termasuk Indonesia. Kumpulan tulisan itu kemudian disusun menjadi sebuah buku yang berjudul *Religion, Ideology, and Development* yang terbit pada tahun 1993. Beberapa artikel lainnya juga tersusun menjadi buku dan diberi judul *Islam in the Modern World* (2 jilid). Selain berisi kajian-kajian agama dan filsafat, dalam karya-karyanya yang terakhir pemikiran Hanafi juga berisi kajian-kajian ilmu sosial, seperti ekonomi dan teknologi. Fokus pemikiran Hanafi pada karya-karya terakhir ini lebih tertuju pada upaya untuk meletakkan posisi agama serta fungsinya dalam pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Pada perkembangan selanjutnya, Hanafi tidak lagi berbicara tentang ideologi tertentu melainkan tentang paradigma baru yang sesuai dengan ajaran Islam sendiri maupun kebutuhan hakiki kaum muslimin. Sublimasi pemikiran dalam diri Hanafi ini antara lain didorong oleh maraknya wacana nasionalisme-pragmatik Anwar Sadat yang menggeser popularitas paham sosialisme Nasser di Mesir pada dasawarsa 1970-an. Paradigma baru ini ia kembangkan sejak paroh kedua dasawarsa 1980-an hingga sekarang.

Pandangan universalistik ini di satu sisi ditopang oleh upaya pengintegrasian wawasan keislaman dari kehidupan kaum muslimin ke dalam upaya penegakan martabat manusia melalui pencapaian otonomi individual bagi warga masyarakat; penegakan kedaulatan hukum, penghargaan pada HAM, dan penguatan (*empowerment*) bagi kekuatan massa rakyat jelata. Pada sisi lain, paradigma universalistik yang diinginkan Hanafi harus dimulai dari pengembangan epistemologi ilmu pengetahuan baru. Orang Islam, menurut Hanafi, tidak butuh hanya sekadar menerima dan mengambil alih paradigma ilmu pengetahuan modern Barat yang bertumpu pada materialisme, melainkan juga harus mengikis habis penolakan mereka terhadap peradaban ilmu pengetahuan Arab. Seleksi dan dialog konstruktif dengan peradaban Barat itu dibutuhkan untuk mengenal dunia Barat dengan setepat-tepatnya. Dan upaya pengenalan itu sebagai unitkajian ilmiah, berbentuk ajakan kepada ilmu-ilmu kebaratan (*al-Istighrab*, Oksidentalisme) sebagai imbalan bagi ilmu-ilmu ketimuran (*al-Istisyraq*, Orientalisme). Oksidentalisme dimaksudkan untuk mengetahui peradaban Barat sebagaimana adanya, sehingga dari pendekatan ini akan muncul kemampuan mengembangkan kebijakan yang diperlukan kaum muslimin dalam ukuran jangka panjang.

Dengan pandangan ini Hassan Hanafi memberikan harapan Islam untuk menjadi mitra bagi peradaban-peradaban lain dalam penciptaan peradaban dunia baru dan universal. Sekitar Pandangan Hassan Hanafi tentang *Teologi Tradisional Islam* di muka telah kita lihat, meskipun dalam beberapa hal menolak dan mengkritik Barat, Hanafi banyak menyerap dan mengonsentrasikan diri pada kajian pemikir Barat pra-modern dan modern. Oleh karena itu, Shimogaki mengkatagorikan Hanafi sebagai seorang modernis-liberal, karena ide-ide liberalisme Barat, demokrasi, rasionalisme dan pencerahan telah banyak mempengaruhinya.

Pemikiran Hanafi sendiri, menurut Isaa J. Boulatta dalam *Trends and Issues in Contemporary Arabs Thought* bertumpu pada tiga landasan: 1) tradisi atau sejarah Islam; 2) metode fenomenologi, dan; 3) analisis sosial Marxian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa gagasan semacam Kiri Islam dapat disebut sebagai pengetahuan yang terbentuk atas dasar watak sosial masyarakat (*socially contructed*) berkelas yang merupakan ciri khas tradisi Marxian. Dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual sistem kepercayaan (teologi) sesuai dengan perubahan konteks sosial-politik yang terjadi. Teologi tradisional, kata Hanafi, lahir dalam konteks sejarah ketika inti keislaman sistem kepercayaan, yakni transendensi Tuhan, diserang oleh wakil-wakil dari sekte-sekte dan budaya lama. Teologi itu dimaksudkan untuk mempertahankan doktrin utama dan untuk memelihara kemurniannya.

Dialektika berasal dari dialog dan mengandung pengertian saling menolak; hanya merupakan dialektika kata-kata, bukan dialektika konsep-konsep tentang sifat masyarakat atau tentang sejarah. Sementara itu konteks sosio-politik sekarang sudah berubah. Islam mengalami berbagai kekalahan di berbagai medan pertempuran sepanjang periode kolonisasi. Karenaitu, lanjut Hanafi, kerangka konseptual lama masa-masa permulaan, yang berasal dari kebudayaan klasik harus diubah menjadi kerangka konseptual baru, yang berasal dari kebudayaan modern. Teologi merupakan refleksi dari wahyu yang memanfaatkan kosa kata zamannya dan didorong oleh kebutuhan dan tujuan masyarakat; apakah kebutuhan dan tujuan itu merupakan keinginan obyektif atau semata-mata manusiawi, atau barangkali hanya merupakan cita-cita dan nilai atau pernyataan egoisme murni.

Dalam konteks ini, teologi merupakan hasil proyeksi kebutuhan dan tujuan masyarakat manusia ke dalam teks-teks kitab suci. Ia menegaskan, tidak ada arti-arti yang betul-betul berdiri sendiri untuk setiap ayat Kitab Suci. Sejarah teologi, kata Hanafi, adalah sejarah proyeksi keinginan manusia kedalam Kitab Suci itu. Setiap ahli teologi atau penafsir melihat dalam Kitab Suci itu sesuatu yang ingin mereka lihat. Ini menunjukkan bagaimana manusia menggantungkan kebutuhan dan tujuannya pada naskah-naskah itu. Teologi dapat berperan sebagai suatu ideologi pembebasan bagi yang tertindas atau sebagai suatu pembenaran penjajahan oleh para penindas. Teologi memberikan fungsi legitimatif bagi setiap perjuangan kepentingan dari masing-masing lapisan masyarakat yang berbeda. Karena itu, Hanafi menyimpulkan bahwa tidak ada kebenaran obyektif atau arti yang berdiri sendiri, terlepas dari keinginan manusiawi.

Kebenaran teologi, dengan demikian, adalah kebenaran korelasional atau, dalam bahasa Hanafi, persesuaian antara arti naskah asli yang berdiri sendiri dengan kenyataan obyektif yang selalu berupa nilai-nilai manusiawi yang universal. Sehingga suatu penafsiran bisa bersifat obyektif, bisa membaca kebenaran obyektif yang sama pada setiap ruang dan waktu. Hanafi menegaskan bahwa rekonstruksi teologi tidak harus membawa implikasi hilangnya tradisi-tradisi lama. Rekonstruksi teologi untuk mengkonfrontasikan ancaman-ancaman baru yang datang ke dunia dengan menggunakan konsep yang terpelihara murni dalam sejarah. Tradisi yang terpelihara itu menentukan lebih banyak lagi pengaktifan untuk dituangkan dalam realitas duniawi yang sekarang. Dialektika harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, bukan hanya terdiri atas konsep-konsep dan argumen-argumen antara individu-individu, melainkan dialektika berbagai masyarakat dan bangsa di antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Rekonstruksi itu bertujuan untuk mendapatkan keberhasilan duniawi dengan memenuhi harapan-harapan dunia muslim terhadap kemendekaan, kebebasan, kesamaan sosial, penyatuan kembali identitas, kemajuan dan mobilisasi massa. Teologi baru itu harus mengarahkan sasarannya pada manusia sebagai tujuan perkataan (kalam) dan sebagai analisis percakapan. Karena itu pula harus tersusun secara kemanusiaan.

Asumsi dasar dari pandangan teologi semacam ini adalah bahwa Islam, dalam pandangan Hanafi, adalah protes, oposisi dan revolusi. Baginya, Islam memiliki makna ganda. *Pertama*, Islam sebagai ketundukan; yang diberlakukan oleh kekuatan politik kelas atas. *Kedua*, Islam sebagai revolusi, yang diberlakukan oleh mayoritas yang tidak berkuasa dan kelas orang miskin. Jika untuk mempertahankan status-quo suatu re-zim politik, Islam ditafsirkan sebagai tunduk. Sedang jika untuk memulai suatu perubahan sosial politik melawan status-quo, maka harus menafsirkan Islam sebagai pergolakan.

Secara generik, istilah *aslama* adalah menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan kepada apa pun yang lain. Pengertian ini secara langsung menyatakan sebuah tindakan ganda; Yaitu menolak segala kekuasaan yang tidak transendental dan menerima kekuasaan transendental. Makna ganda dari kata kerja *aslama* dan kata benda Islam ini, menurut Hanafi, dengan sengaja disalahgunakan untuk mendorong Islam cenderung pada salah satu sisinya, yakni tunduk. Maka rekonstruksi teologi tradisional itu berarti pula untuk menunjukkan aspek lain dari Islam yang, menurutnya, sengaja disembunyikan, yakni penolakan, oposisi dan pergolakan yang merupakan kebutuhan aktual masyarakat muslim. Di dalam hal ini, karena selalu terkait dengan masyarakat, refleksi atas nilai-nilai universal agama pun mengikuti bentuk dan struktur kemasyarakatan, struktur sosial dan kekuatan politik.

Hermeneutika Pembebasan Hassan Hanafi Serta Sikap "LA" (Tidak) Terhadap Tradisi Barat

Jika tidak dianggap berlebihan, Hanafi dapat disebut sebagai salah seorang yang pertama mempromosikan hermeneutika dalam mempelajari bahasa agama. Selain menulis dan mempublikasikan disertasi doktoralnya yang sarat eksperimentasi hermeneutika, *Lés Methodes d'Exégèse, essai sur La science des Fondaments de la Compréhension*, 'ilm Ushūl al-Fiqh (1965), ia juga telah meletakkan dasar-dasar apa yang ia sebut sebagai "Hermeneutics as Axiomatics" (1977). Pada perumusan awal tersebut, Hanafi masih berbicara dalam kerangka objektivisme dan berusaha sekomprensif mungkin. Ia, antara lain, merekomendasikan perlunya hermeneutika menjadi sebuah aksiomatika, suatu pendasaran ilmiah yang dengannya teologi dan iman tidak dapat dibantah. Di samping itu, hermeneutika ia maksudkan untuk menciptakan sebuah disiplin penafsiran yang objektif, rigorus, dan universal. Seperti halnya fenomenologi yang dirintis Edmund Husserl, pendekatan ini memang dimaksudkan sebagai disiplin yang apodiktis, yang tidak menginginkan keragu-raguan apa pun. Belakangan, Hassan Hanafi merevisi sebagian asumsinya tentang hermeneutika sebagai disiplin yang rigorus dan positivistik tersebut. Kesadarannya tentang proses kesejarahan manusia membawa kepada kesimpulan bahwa "tidak ada hermeneutika, absolut, dan universal". Hermeneutika selalu merupakan "hermeneutika terapan" yang merupakan bagian dari perjuangan sosial".

Bagi Hanafi, pluralitas penafsiran itu sendiri merupakan mencerminkan konstruksi masyarakat, merupakan refleksi konflik sosial yang menjadi dasar pemikiran manusia. Dalam hal ini, Hanafi tidak lagi berbicara tentang hermeneutika dalam pengertian teoretiknya, tapi lebih mengarah pada historisitas hermeneutika tersebut, yakni dipahami sebagai suatu produk pemikiran yang tidak mungkin dicabut dari konteks di mana ia muncul dan untuk apa ia dibangun. Hermeneutika yang cenderung bersifat historis dalam gagasan Hanafi tersebut hampir serupa dengan pendirian hermeneutika filosofis dalam diskursus pemikiran Barat. Dalam hermeneutika jenis ini, utamanya yang dikemukakan oleh Hans-Georg Gadamer, hermeneutika tidak lain merupakan diskursus tentang fenomena pemahaman manusia itu sendiri, yakni merefleksikan makna dan hakikat pemahaman dan proses memahami pada diri manusia. Oleh sebab itu, bagi Gadamer, sebuah penafsiran tidak pernah lepas dari tradisi yang dilestarikan lewat bahasa. Artinya, manusia tidak mungkin memahami teks terlepas dari aspek linguistik yang bersifat historis. Suatu penafsiran senantiasa didahului oleh "prapaham" tertentu yang mencerminkan historisitas yang melingkupi manusia. Dengan sendirinya, suatu pencarian makna objektif akan sia-sia belaka. Sebaliknya, suatu penafsiran merupakan "kegiatan produktif" dan bukanlah proses "reproduksi" makna untuk menghadirkan makna asali dalam kehidupan kekinian. Pandangan semacam ini diterima sepenuhnya oleh Hanafi. Menurutnya, suatu pemahaman terhadap teks tidak dapat mengabaikan historisitas penafsiran. "Setiap teks berangkat dari pemahaman tertentu, pemahaman akan kebutuhan dan kepentingan penafsir dalam teks". Penafsiran adalah kegiatan produktif dan bukan reproduksi makna. Bukan hanya karena makna awal sulit ditemukan, tapi juga karena makna awal tersebut tidak akan relevan lagi karena telah kehilangan konteks eksistensialnya. Dengan kata lain, walaupun makna awal berhasil ditemukan, ia bukanlah pendasaran makna, namun hanya merefleksikan adanya kaitan antara teks dan realitas, bahwa teks ataupun penafsiran selalu memiliki nilai historisnya sendiri-sendiri. Rekognisi atas hubungan interpretasi dengan realitas memang

demikian signifikan dalam hermeneutika pembebasan Al-Qur'an, meskipun tidak pada hermeneutika sebagai aksiomatika.

Hanafi senantiasa mengaitkan hermeneutika pada "praksis". Hal ini tidak lepas dari kuatnya pengaruh Marxisme dalam pikirannya. Hanafi, misalnya, dapat melihat kesejajaran antara teks dan realitas. Jika teks memiliki struktur ganda: kaya-miskin, penindas-tertindas, kekuasaan-oposisi, demikian pula halnya dengan sifat dasar teks. Struktur teks yang bersifat ganda tersebut kemudian melahirkan hermeneutika "progresif" dan "konservatif". Melalui Marxisme, Hanafi mengajak interpreter berangkat dari dan menuju pada praksis. Hanafi mengklaim jika hermeneutika semacam ini sejalan dengan "fenomenologi dinamis" yang dibedakan dari fenomenologi statis. Hanafi berharap dapat menciptakan perubahan, mentransformasikan penafsiran dari sekedar mendukung dogma (agama) menuju kepada gerakan revolusi (massa), dari tradisi ke modernisasi. Menurut Hanafi, inilah metode transformasi sebagai tindakan "regresif-progresif". Pada saat yang sama, penggunaan Marxisme dan fenomenologi memberikan kemungkinan akan penemuan Ego (the self) dan cogito sosio-politik yang baru, afirmasi individu, hak-hak kelompok, rakyat dan bangsa. Hassan Hanafi mengembangkan gagasan hermeneutika Al-Qur'annya berada pada tiga domain analisis: {kritik sejarah, eidetik, dan praksis}. Kritik historis berfungsi menjamin keaslian teks dalam sejarah, kritik eidetik menggambarkan kerja teori penafsiran, dan kritik praksis adalah penerapan hasil interpretasi tersebut dalam bentuk formulasi pemikiran tentang aksi: rencana, pembuatan hukum, penyusunan sistem, dan sebagainya.

Pada tahap kritik sejarah, hermeneutika pembebasan dalam pengertian kegiatan interpretasi belum dilakukan kecuali sebagai sarana membangun keyakinan akan sifat otoritatif dari teks. Interpretasi baru dimulai pada tahap eidetik di mana Hanafi merumuskan banyak teori penafsiran yang terangkum dalam apa yang lazim sebut sebagai "metode tafsir tematik". Sejauh menyangkut kegiatan interpretasi teks, Hanafi menawarkan di dalamnya metode analisa pengalaman (manhaj tahlil al-khubrāt) dan metode interpretasi teks yang berhubungan secara kronologis dan dialektis sekaligus. Pertama-tama, penafsir menganalisa pengalamannya, yakni apa yang dipresentasikan oleh realitas sebagaimana yang dipahami oleh kesadaran penafsir. Fungsinya adalah untuk memastikan kebutuhan, problematika, kepentingan dan orientasi penafsir terhadap teks. Setelah itu penafsir baru beranjak pada interpretasi teks sebagaimana yang dituntut oleh kepentingan dan kebutuhannya. Proses ganda inilah yang dapat kita sebut sebagai kritik eidetik. Proses selanjutnya adalah interpretasi teks. Tahap ini, sejauh menelusuri pemikiran Hanafi, dilakukan melalui dua aspek tekstualitasnya, yakni bahasa dan konteks sejarahnya. Yang pertama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kebahasaan, sedang yang kedua melalui penelitian dan pemahaman yang memadai atas asbāb an-nuzūl. Setelah makna-makna linguistik dan keadaan sejarah ditentukan, selanjutnya penafsiran dilakukan melalui generalisasi makna dari situasi saat dan situasi sejarah agar dapat menimbulkan situasi-situasi lain. Pada tahap terakhir ini Hassan Hanafi menginginkan diperolehnya makna baru dari kegiatan interpretasi untuk menyikapi kasus-kasus tertentu dalam masyarakat kontemporer.

Generalisasi yang merupakan langkah kedua dari kegiatan interpretasi pada akhirnya membuka peluang bagi munculnya kritik praksis. Sebagaimana disebutkan tadi, makna baru dapat diperoleh dari interpretasi dan berfungsi untuk memformulasi sikap seorang penafsir terhadap problem atau realitas tertentu. Secara teoretik, praksis dilakukan dengan membandingkan antara struktur ideal yang terefleksi dalam formulasi makna baru dari kegiatan interpretasi dan struktur sosial yang diperoleh dari analisa situasi faktual. Sekali kesenjangan ditemukan, hermeneutika pembebasan Al-Quran lantas bertugas model-model aksi yang dapat memfasilitasi transformasi Logos menuju teori, dan teori ke praksis. Ruang terbatas ini tidak memungkinkan kita menyajikan metode sistematis, dalam pengertian teknik-teknik penafsiran dari hermeneutika Al-Quran Hanafi. Kita dapat melihatnya, paling tidak, dalam *Method of Thematic Interpretation* dan *Manāhij at-Tafsir wa Mashāliḥ al-'Ummah*, dan lebih baik kita memberi beberapa catatan ringkas berikut. Ada yang menarik dalam Hermeneutika Pembebasan Hanafi, salah satunya adalah ia menarik dari kesimpulan mengenai orang Islam mengkaji barat, mengenai ini Hanafi mulai membuat proyek besar, yakni mengenai Oksidentalisme, yang diperkenalkan oleh intelektual Mesir, Hassan Hanafi. Kebalikan dari Orientalisme, Oksidentalisme adalah kesadaran tentang perlunya menjadikan barat sebagai kajian. Saya akan mengenalkan buku *Muqaddimah Fi 'Ilm Al-Istighrāb* karya Hassan Hanafi

dengan terjemahan-nya "Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat" terbitan Paramadina Jakarta, bahwa buku Oksidentalisme karya Hassan Hanafi ini, ada beberapa gagasan besarnya yang dapat diringkas dalam 3 (tiga) poin. Pertama, kritik terhadap Barat; bahwa kita perlu melakukan kritik terhadap Barat, karena ia tidak lepas dari dominasi budaya dan peradabannya terhadap dunia Timur yang tentu tidak terhindar dari aspek superioritas dan imperialismenya; aspek kekurangan dan kekeliruannya; mengkerdikan Timur. kedua, menjadikan Barat sebagai obyek kajian (mempelajari Barat), karena selama ini hanya Timurlah yang menjadi obyek kajian. Ketiga, mengajari Barat, bahwa Timur bisa menunjukkan Barat kepada relnya, bagaimana menempatkan dirinya di tengah-tengah dunia global. Oksidentalisme merupakan satu bagian terpenting dari realisasi tiga agenda besar dari proyek Hassan Hanafi, *al-turāts wa tajdīd* (tradisi dan pembaruan). Ketiga agenda ini: pertama, sikap kita terhadap tradisi lama; kedua, kritisisme terhadap peradaban Barat; dan ketiga, sikap kita terhadap realitas. Bagi Hanafi, ketiga agenda di atas ini merupakan dinamika dan produk proses dialektika antara 'ego' (*al-anā*) dan 'the other' (*al-ākhar*) Dalam ketiga agendanya ini, ia mengembangkan teori dan paradigma interpretasi. Ia mengakui bahwa Barat yang dalam buku edisi berbahasa Arabnya, dibahasakan dengan istilah *al-akhar* ("the other") adalah pendatang utama dan juga sumber pengetahuan ilmiah dalam kesadaran kita. Sebagai pendatang utama dan juga sumber pengetahuan, Barat menduduki posisi sangat penting. Kedudukan yang demikian pentingnya ini, menurut Hanafi, tidak pernah dikritisi secara serius oleh kalangan intelektual Islam. Memang selama ini ada kritik, namun kritik yang dilakukan masih dalam batas-batas yang amat sempit. Salah satu kelemahan kritik dunia Islam terhadap Barat terletak pada gaya dan metodenya yang sangat bersifat retorik dan dialektik. "Seharusnya kritik melibatkan pendekatan kritis dan memakai logika demonstratif serta empiris-induktif," saran Hanafi.[]



Kebenaran teologi, dengan demikian, adalah kebenaran korelasional atau, dalam bahasa Hanafi, persesuaian antara arti naskah asli yang berdiri sendiri dengan kenyataan obyektif yang selalu berupa nilai-nilai manusiawi yang universal. Sehingga suatu penafsiran bisa bersifat obyektif, bisa membaca kebenaran obyektif yang sama pada setiap ruang dan waktu. Hanafi menegaskan bahwa rekonstruksi teologi tidak harus membawa implikasi hilangnya tradisi-tradisi lama. Bagi Hanafi, pluralitas penafsiran itu sendiri merupakan mencerminkan konstruksi masyarakat, merupakan refleksi konflik sosial yang menjadi dasar pemikiran manusia.



BAGIAN KEDELAPAN

DISKURSUS PEMIKIRAN HEGEL, MARX, GRAMSCI DAN HABERMAS

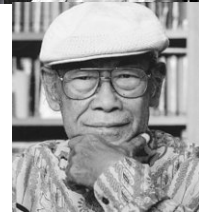
"Pada dasarnya, semua orang punya potensi menjadi intelektual sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya, dan dalam cara menggunakannya. Tetapi tidak semua orang adalah intelektual dalam fungsi sosial" (Antonio Gramsci). Karl Marx (1818-1883) sangat dijunjung tinggi dan dihormati di kalangan komunis sebagai salah seorang pemikir terbesar di dunia: ia ditakuti dan dianggap sebagai

pemberontak yang berbahaya oleh pemimpin-pemimpin di negara-negara kapitalis. Marx dilahirkan di Jerman, belajar hukum di universitas di Bonn, belajar filsafat dan sejarah di Berlin, dan mendapat gelar Doktor dari Universitas Jena berdasarkan tesisnya tentang *Epicurus*, dan *Democritus*. Setelah bekerja sebentar sebagai wartawan, surat kabar tempat ia bekerja dilarang terbit dan ia sendiri diusir dari Jerman. Kemudian ia pergi ke Paris, lalu ke Brusel dan akhirnya tiba di London. Di sanalah ia menemukan kemerdekaan untuk menulis dan menyatakan pendapat-pendapatnya. Waktu di Paris ia bertemu dan berteman dengan Friedrich Engels, seorang industrialis

Inggris yang kemudian bersama dengan Marx menulis *Communist Manifesto* (1848). Engels membantu Marx pada bagian akhir dari hidupnya baik dengan uang maupun dengan pikiran-pikirannya. Marx menghabiskan sebagian besar dari hidupnya (1849-1883) sebagai orang buangan di London, menulis

bukunya *Das Kapital*, karya utamanya, di perpustakaan British Museum. Dalam karangannya yang terdiri dari tiga jilid itu, Marx membicarakan kekuatan dan kelemahan sistem "free enter prise", tempatnya dalam sejarah dan keruntuban sistem itu pada saat yang akan datang. Tulisan-tulisan Marx telah dicetak di kebanyakan negara-

negara di seluruh dunia dan telah mempengaruhi gerakan-gerakan massa, termasuk di dalamnya bentuk-bentuk sosialisme yang demokratis serta komunisme yang revolusioner. G.W.F. Hegel (1770-1831) adalah seorang filosof Jerman yang idealis, Masa remajanya dipergunakan untuk belajar di kalangan akademis. Sesudah belajar dalam suatu seminari teologi, ia menjadi tutor pribadi selama beberapa tahun, kemudian mengajar berturut-turut pada universitas-universitas di Jena, Heidelberg dan Berlin. Di Berlin, di mana ia mengajar sampai akhir hayatnya, ia mempunyai pengaruh yang luas. Terlepas dari pandangannya tentang sejarah dan idealisme, Hegel menjadi terkenal karena metoda dialektik dalam berfikir atau logika. Metoda tersebut kemudian diterima oleh Karl Marx dan kaum komunis walaupun mereka itu menolak metafisikanya. Karangan-karangan Hegel semasa hidupnya mencakup: *Phenomenology of Mind*, *The Science of Logic*, *The Encyclopedia of the Philosophical Sciences*, dan *The Philosophy of Right*. Setelah meninggal karena sakit kolera, para mahasiswanya mempergunakan catatan-catatan kuliah-kuliahnya untuk menerbitkan empat buku kuliahnya tentang, sejarah filsafat, filsafat sejarah, filsafat agama dan filsafat seni.



Hand-Out 32

LATAR HISTORIS PEMIKIRAN GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

Prawacana

Hegel merupakan tokoh filsafat barat, filsafat abad ke-19, memiliki nama lengkap Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Lahir 27 Agustus 1770 (Stuttgart, Jerman) dan meninggal 14 November 1831 (Berlin, Jerman). Aliran atau tradisi yang dianut adalah pendiri Hegelianisme. Minat utama Hegel meliputi Logika, Filsafat sejarah, Estetika, Agama, Metafisika, Epistemologi, Ilmu Politik. Gagasan penting Hegel antara lain Idealisme mutlak, Dialektika. Pemikiran Hegel dipengaruhi oleh: Aristoteles, Anselmus, Descartes, Goethe, Spinoza, Rousseau, Boehme, Kant, Fichte, Schelling. Sedangkan pemikiran Hegel mempengaruhi banyak pemikir antara lain: Feuerbach, Croce, Marx, Engels, Max Stirner, Bauer, Bradley, Lenin, Trotsky, Lukacs, Heidegger, Sartre, Barth, Kung, Habermas, Gadamer, Moltmann, Kierkegaard. Georg Wilhelm Friedrich Hegel adalah seorang filsuf idealis Jerman yang lahir di Stuttgart, Wurttemberg, kini di Jerman barat daya. Pengaruhnya sangat luas terhadap para penulis dari berbagai posisi, termasuk para pengagumnya (F. H. Bradley, Sartre, Hans Kung, Bruno Bauer, Max Stirner, Karl Marx), dan mereka yang menentangnya (Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Schelling). Dapat dikatakan bahwa dialah yang pertama kali memperkenalkan dalam filsafat, gagasan bahwa Sejarah dan hal yang konkret adalah penting untuk bisa keluar dari lingkaran *philosophia perennis*, yakni, masalah-masalah abadi dalam filsafat. Ia juga menekankan pentingnya Yang Lain dalam proses pencapaian kesadaran diri (lihat dialektika tuan-hamba).

Kehidupan Dan Karya¹⁴

Hegel dilahirkan di Stuttgart pada 27 Agustus 1770. Di masa kecilnya, ia lahap membaca literatur, surat kabar, esai filsafat, dan tulisan-tulisan tentang berbagai topik lainnya. Masa kanak-kanaknya yang rajin membaca sebagian disebabkan oleh ibunya yang luar biasa progresif yang aktif mengasuh perkembangan intelektual anak-anaknya. Keluarga Hegel adalah sebuah keluarga kelas menengah yang mapan di Stuttgart. Ayahnya seorang pegawai negeri dalam administrasi pemerintahan di Wurttemberg. Hegel adalah seorang anak yang sakit-sakitan dan hampir meninggal dunia karena cacar sebelum mencapai usia enam tahun. Hubungannya dengan kakak perempuannya, Christiane, sangat erat, dan tetap akrab sepanjang hidupnya.

Metode Dialektika

Hegel dikenal sebagai filsuf yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dialektika menurut Hegel adalah dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan tesis (pengiyaan), antitesis (pengingkaran) dan sintesis (kesatuan kontradiksi). Pengiyaan harus berupa konsep pengertian yang empiris indrawi. Pengertian yang terkandung didalamnya berasal dari kata-kata sehari-hari, spontan, bukan reflektif, sehingga terkesan abstrak, umum, statis, dan konseptual. Pengertian tersebut diterangkan secara radikal agar dalam proses pemikirannya kehilangan ketegasan dan mencair. Pengingkaran adalah konsep pengertian pertama (pengiyaan) dilawanartikan, sehingga muncul konsep pengertian kedua yang kosong, formal, tak tentu, dan tak terbatas. Menurut Hegel, dalam konsep kedua sesungguhnya tersimpan pengertian dari onsep yang pertama. Konsep pemikiran kedua ini juga diterangkan secara radikal agar kehilangan ketegasan dan mencair. Kontradiksi merupakan motor dialektika (jalan menuju kebenaran) maka kontradiksi harus mampu membuat konsep yang bertahan dan saling mengevaluasi. Kesatuan kontradiksi menjadi alat untuk melengkapi dua konsep pengertian yang saling berlawanan agar tercipta konsep baru yang lebih ideal.[]

¹⁴ Karya Utama Hegel: *Phenomenology of Spirit* (*Phenomenologie des Geistes* Kadang-kadang diterjemahkan sebagai *Phenomenology of Mind*) 1807 (Ini adalah contoh masalahnya: Para penerjemah Inggris dari buku *Phenomenologie des Geistes* tidak pasti apakah mereka harus menerjemahkan "Geist" dengan "Roh" atau "Pikiran", meskipun istilah "Roh" dan "Pikiran" sangat berbeda dalam bahasa Inggris). *Science of Logic* (*Wissenschaft der Logik*) 1812-1816 (edisi terakhir dari bagian pertama 1831). *Encyclopedia of the Philosophical Sciences* (*Enzyklopaedie der philosophischen Wissenschaften*) 1817-1830. *Elements of the Philosophy of Right* (*Grundlinien der Philosophie des Rechts*) 1821. Kuliah tentang Estetika, Kuliah tentang Filsafat Sejarah (juga diterjemahkan menjadi Kuliah tentang Filsafat Sejarah Dunia) 1830 Kuliah tentang Filsafat Agama Kuliah tentang Sejarah Filsafat.

Hand-Out 33

IDE DASAR DAN DIALEKTIKA FILSAFAT GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

Dialektika Hegel¹⁵

Hegel beranggapan bahwa Kant telah berhasil menemukan otonomi akal budi manusia. Dan kini nampaknya otonomi akal budi itu harus direalisasikan. Pada Kant, realisasi itu tak mungkin terjadi, karena ajran Kant membatasi otonomi akal budi menjadi semata-mata subyektif. Artinya akal budi sungguh tidak mungkin menjadi obyektif, karena hal diluar dirinya tetap *das Ding an sich* (benda atau hal pada dirinya sendiri). *Das Ding an sich* itu tidak mungkin diketahui atau dipengaruhi oleh akal budi manusia. Akibatnya, meskipun mengakui otonomi akal budi manusia, otonomi itu tidak berarti apa-apa terhadap hal diluar dirinya ia tidak dapat menjadi obyektif.¹⁶

Hegel "mencoret" *Das Ding an sich* tersebut. Dan ia mengajarkan bahwa akal budi harus dan dapat merealisasikan dirinya tanpa halangan apapun. Akal budi tidak perlu lagi "kritis" terhadap dirinya, ia harus menjadi "affirmatif" (membenarkan dan menyatakan dirinya), karena pada hakekatnya akal budi tih mencapai kesempurnaan pada dirinya sendiri, yakni kesempurnaan dalam roh. Kira-kira Hegel menganggap roh tersebut sebagai ancaman *Akal Budi Absolut* yang menjelma dalam akal budi manusia. Dengan demikian akal budi manusia juga menjadi sempurna dalam roh.

Dengan dialektikanya, Hegel hendak mengetengahkan bahwa akal budi dalam usahanya untuk menjadi kesadaran diri yang sempurna ternyata mengalami proses yang tidak terlalu sederhana. Ia mengalami pelbagai halangan dan pembatasan untuk menjadi dirinya. Meski demikian justru semuanya itu yang makin menjadikan dan menetapkan kesadaran diri manusia. Menurut Hegel, malahan halangan dan pembatasan itulah merupakan tempat dimana potensi manusia yang tersembunyi seharusnya menyatakan diri.

Hegel misalnya mengutarakan bagaimana seorang budak akan mempunyai kesadaran diri yang lengkap justru karena tekanan tuannya.¹⁷ Maka seluruh proses itu harus digali dengan teliti, kalau tidak kita hanya akan mendapat kesadaran diri yang tidak lengkap. Itulah tujuan dialektika Hegel.¹⁸ Berikut ini jelaskan bagaimana dialektika Hegel tersebut. Dan dialektika Hegel meliputi;

Pertama, berfikir secara dialektik berarti berfikir dalam *totalitas*. Totalitas ini bukan berarti semata-mata keseluruhan, dimana unsur-unsurnya yang bertentangan berdiri sejajar. Tetapi totalitas itu berarti keseluruhan yang mempunyai unsur-unsur yang *saling bernegasi* (mencingkari dan diingkari) *saling berkontradiksi* (melawan dan dilawan) dan *saling bermediasi* (memperantarai dan diperantarai). Pemikiran dialektis menekankan bahwa dalam kehidupan yang nyata pasti unsur-unsurnya saling berkontradiksi, bernegasi dan bermediasi. Tidak mungkin unsur-unsur itu hanya berdiri sejajar atau bergabung tanpa kontradiksi, negasi dan mediasi. Yang terakhir ini hanya dapat dibayangkan secara abstrak, sehingga hanya merupakan kesadaran yang kosong belaka. Pemikiran dialektis menolak kesadaran yang abstrak itu. Misalnya antara individu dan masyarakat. Menurut pemikiran dialektis, individu selalu saling berkontradiksi, bermediasi dan bernegasi terhadap masyarakatnya.

Kalau individu tidak saling berkontradiksi, bernegasi dan bermediasi dengan masyarakatnya, maka individu tidak jadi menemukan dirinya yang sesungguhnya; sebaliknya masyarakat juga tidak dapat menjadi makin sempurna, tinggal seperti semula, tanpa perubahan apa-apa. Dalam hubungan ini mesti dicatat bahwa pemikiran dialektis mempunyai kontradiksi, negasi dan mediasi sebagai ciri dan sifatnya. Kompromi dengan gampang dicapai dengan persetujuan, dimana unsur-unsurnya yang bertentangan dengan mudah pula diabaikan. Kompromi dengan

¹⁵ Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional; Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt* (Jakarta: Gramedia, 1982) h. 32-40.

¹⁶ Lih. Nicholas Lobkowicz, *Theory and Practice: History of a Concept from Aristotle to Marx* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1967) h. 144-145.

¹⁷ Lih. G.W.F. Hegel, *The Phenomenology of Mind*, translate, with an introduction and notes by J.B. Baillie (London: George Allen and Unwin Ltd., 1966) h. 234-240.

¹⁸ Sebagai garis umum penjelasan tentang dialektika Hegel dalam hubungan dengan Sekolah Frankfurt kami ambil dari Andrew Arato dan Eike Gebhardt (ed.), *The Essential Frankfurt School Reader* (New York: Urizen Book, 1978) h. 396-404.

demikian menjadi sekedar perpaduan. Malahan dalam arti tertentu kompromi bisa berarti saling meniadakan unsur-unsur yang saling bertentangan. Lain dengan pemikian dialektis. Pemikian dialektis justru mengharuskan unsur-unsur tersebut saling bertarung; semua unsur dianggap mempunyai potensi kebenaran, jadi tidak boleh ditiadakan. Juga unsur-unsur tersebut dibiarkan saling bernegasi; dengan saling mengingkari dan diingkari, setiap unsur berhak mempertahankan dirinya serentak juga makin memahami kebenaran dirinya, sementara ia juga melihat bahwa unsur lain tidak boleh dikorbankan demikian saja, justru karena unsur lain tersebut mati-matian mempertahankan dirinya dengan cara mengingkari kebenaran lawannya. Lalu unsur-unsur tersebut saling bermediasi: tiap pihak merasa diperkaya jika ia diperantarai oleh lawannya, lawannya ternyata memberikan sesuatu yang tidak dipunyainya, demikian pula sebaliknya. Jelaslah bahwa proses dialektis tidak dapat sekedar dirumuskan sebagai “thesis”—“antithesis”—“synthesis”. Rumusan sederhana ini bisa menggabungkan proses dialektis yang sesungguhnya menjadi semata-mata kompromi yang berarti perpaduan dan malah bisa berarti saling meniadakan.¹⁹ Proses dialektis tidak mengarah pada sintesis dalam arti perpaduan, melainkan mengarah pada tujuan baru sama sekali, yakni “rekonsiliasi” (*aufhebung*), dimana tercakup pengertian “pembaharuan”, “penguatan” dan “perdamaian”.

Kedua, seluruh proses dialektis itu sebenarnya merupakan “realitas yang sedang bekerja” (*working reality*).²⁰ Disini akan menjadi jelas bahwa proses dialektis yang meliputi kontradiksi, negasi dan mediasi itu bukan semata-mata abstrak, melainkan terjadi dalam realitas.

Makin akan jelas pula bahwa “rekonsiliasi” itu bukan sekedar perpaduan yang statis, melainkan suatu realitas yang senantiasa bekerja. Realitas yang sedang bekerja itu merupakan proses dari pernyataan diri akal budi manusia yang telah mencapai kesempurnaannya dalam Roh Absolut:

Buat Hegel, realitas bukan sesuatu yang statis, jadi bulat, sesuatu “substansi”, melainkan berkembang, mengasingkan diri, menemukan diri kembali, menyadari diri melalui *taraf-taraf dialektis yang semakin mendalam*; realitas itu “subyek”. Dibelakang realitas alam dan manusia dengan masyarakat dan pemikirannya berlangsunglah “proses” pernyataan diri roh alam semesta.²¹

Kalau proses dialektis itu dimengerti, sebagai realitas yang sedang bekerja, jadi bukan kesadaran semata-mata, maka proses dialektis itu juga merupakan sesuatu yang obyektif. Bahwa proses dialektis itu sungguh sesuatu yang obyektif, ini menjadi amat jelas dalam pandangan Hegel tentang pekerjaan manusia. Manusia yang akal budinya telah mencapai kesempurnaan dalam Roh, harus berkembang, harus menemukan diri, dan makin menjadi dirinya sendiri. Itu semuanya harus terjadi dalam dunia obyektif. Caranya, yakni lewat pekerjaannya. Bagaimana ini diterangkan? Secara singkat dapat dikatakan demikian: manusia dalam proses menyatakan dirinya ternyata menghadapi suatu dunia obyektif yang berada diluar dirinya, asing dan mengancam kediriannya, tetapi dunia itu ternyata dibutuhkannya, tanpa dunia obyektif itu, manusia tak mungkin berhasil menyatakan dirinya. Manusia tiba-tiba merasa bahwa dunia obyektif itu merupakan bagian dari dirinya, jadi meski dunia itu mengancam kediriannya, ia tidak boleh ditiadakan, karena meniadakannya sama dengan menghancurkan kedirian manusia sendiri. Maka masalahnya, bukan bagaimana menghancurkan dunia obyektif itu, tetapi bagaimana manusia dapat “berekonsiliasi” dengan dunia obyektif itu. Rekonsiliasi itu terwujud bila dunia obyektif merupakan obyektifitas, dari kedirian manusia. Disinilah letak pekerjaan manusia “memanusiakan” obyek-obyek diluar dirinya, sehingga obyek itu tidak tinggal alamiah dan terasing dari manusia melainkan merupakan pernyataan diri manusia. Proses “mamanusiakan” itu tidak terjadi dengan begitu mudah dan sederhana, sebab dunia obyektif itu sungguh merupakan hal asing bagi manusia. Malahan Hegel menggambarkan manusia pertama-tama sebagai keterasingan manusia dari dirinya sendiri, karena dengan pekerjaan manusia dipaksa meninggalkan kediriannya, masuk kedalam dunia obyektif, yang ternyata membelenggu

¹⁹ *Ibid.*, h. 398.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Franz Magnis-Suseno, *Manusia dan Pekerjaannya, Berfilsafat bersama Hegel dan Marx* dalam Soejanto Poespowardojo dan K. Bertens (ed.), *Sekitar Manusia, Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia* (Jakarta: Gramedia, 1979) h. 76.

dirinya dan memisahkannya dari kesadarannya. Tapi justru dalam keadaan inilah manusia dipaksa untuk makin menyadari kediriannya: lingkungannya yang asing itumakin memaksa manusia untuk “memanusiakannya”, sementara manusia juga menyadari makin ia berhasil “memanusiakan” lingkungannya lewat pekerjaannya, makin ia menjadi manusia.²² Bukan kesempatannya disini untuk membicarakan filsafat pekerjaan Hegel. Maksudnya hanyalah untuk menunjukkan bahwa proses dialektis sebagai “realitas yang sedang bekerja” itu terlihat dalam pekerjaan manusia: kontradiksi dan negasi antara manusia dan dunia obyektif, juga mediasi antara manusia terhadap lingkungannya, ini semua akhirnya mengarah kepada “rekonsiliasi” antara manusia dan lingkungannya, dan dengan demikian manusia juga makin memahami kediriannya, serentak lingkungannya juga diangkat ke derajat lebih tinggi, karena telah “dimanusiakan” oleh manusia.

Ketiga, berfikir dialektis berarti berfikir dalam perspektif empiris-historis.²³ Disini perlu dibedakan antara kontradiksi dialektis dan kontradiksi logis. Menurut logika tradisional, dua proposisi (tesis dan antitesis) tidak pernah benar kedua, duanya. Menurut pemikiran dialektis, anggapan tersebut sangat tidak memadai dengan kenyataan empiris historis. Dalam kenyataan empiris, setiap proposisi mempunyai hak untuk berada dan dianggap benar, sehingga tidak begitu saja ditiadakan atau dianggap tidak benar oleh proposisi lawannya. Jelaslah bahwa pemikiran dialektis menolak pemikiran yang sama sekali formal. Pemikiran formal dapat membayangkan secara abstrak adanya satu kebenaran yang dapat meniadakan kebenaran-kebenaran lainnya. Sedangkan pemikiran dialektis menekankan isi atau substansi dari masing-masing kenyataan empiris yang tidak boleh saling mengecualikan. Pemikiran dialektis dengan demikian mengarah pada pendekatannya lebih kaya dan dalam.

Misalnya ia tidak berfikir tentang “lurus” sebagai lawan “tidak lurus” melainkan sebagai berlawanan dengan “bengkok”, “melengkung”, “zig-zag” dan sebagainya. Sehubungan dengan pengertian dialektis yang menekankan perspektif empiris historis ini, patut dikemukakan pula bahwa pemikiran dialektis menolak teori identitas subyek-obyek. Teori identitas subyek-obyek menekankan bahwa kesadaran (subyek) sudah mencapai kesatuannya dengan hal-hal diluar kesadaran (obyek), sehingga hal-hal diluar kesadaran sudah merupakan obyektifikasi paripurna dari kesadaran, dan dengan demikian tercapai pula identitas antara apa yang memahami (subyek) dan apa yang dipahami (obyek). Paham identitas obyek-obyek ini akhirnya yakin bahwa kesadaran (subyek) mampu mengadakan realitas. Teori identitas ini sama sekali bertentangan dengan pemikiran dialektis yang empiris-historis. Dilihat dari perspektif historis-empiris, kesadaran dan realitas selalu mengasingkan: realitas selalu menjadi hambatan bagi kesadaran untuk merealisasikan dirinya secara penuh dan sebaliknya kesadaran terlalu miskin untuk menuntut dirinya sebagai “sama kaya” dengan realitas. Dalam kehidupan ini selalu terjadi konflik antara keduanya, sebab kehidupan ini *bukan suatu realitas melainkan realisasi*: realisasi yang mengarah pada kesatuan subyek-subyek secara makin sempurna. Teori identitas subyek-obyek menyempitkan kehidupan ini semata-mata sebagai realitas. Ini hanya bisa digambarkan sebagai angan-angan naif, yang menyingkirkan sama-sekali ciri kehidupan yang empiris dan historis, dimana terjadi banyak konflik. Hegel sendiri menyebut periode tanpa konflik karenanya juga periode kebahagiaan sebagai “periode mati” dari sejarah.²⁴ Jadi menurut paham dialektis, kontradiksi antara subyek dan obyek tidak bakal diselesaikan, justru dalam kontradiksinya itu keduanya diangkat kedalam derajat lebih tinggi lewat proses dialektis sehingga terjadi “rekonsiliasi” (penguatan, pembaharuan, dan perdamaian) yang sungguh baru.

Keempat, berfikir dialektis berarti berfikir dalam kerangka kesatuan teori dan praxis.²⁵ Sering terjadi kesalah-pahaman bahwa persoalan kesatuan teori dan praxis dianggap sebagai persoalan bagaimana suatu teori itu *applicable* (dapat diaplikasikan atau diterapkan) untuk suatu kehidupan praktis. Kesalah-pahaman ini muncul karena kurangnya pengertian akan asal-usul persoalan kesatuan teori dan praxis. Aristoteles yang pertama memunculkan persoalan itu.²⁶ Menurut Aristoteles, masalah kesatuan teori dan praxis muncul bukan disebabkan oleh pertanyaan

²² Tentang Filsafat Pekerjaan Hegel, lih. *Ibid.*, h. 73-83.

²³ Andrew Arato dan Eike Gebhardt (ed.), *Op. Cit.*, h. 398-399.

²⁴ *Ibid.*, h. 401

²⁵ *Ibid.*, h. 403-404.

²⁶ Penjelasan tentang teori dan praxis, lih. Nicholas Lobkowich, *Op. Cit.*, h. 3-33.

bagaimana suatu teori itu *applicable* melainkan disebabkan oleh pertanyaan orang Yunani terhadap dua dimensi kehidupan: manakah yang lebih luhur, teori (bidang kontemplatif atau teoretis) atau praxis (bidang kegiatan praktis). Bidang teori memang luhur, karena disinilah manusia berhubungan dengan “yang ilahi”. Aristoteles sendiri memuji kontemplasi sebagai *athanatizien* (imortalitas). Tapi praxis, yang pada zaman Aristoteles dimengerti sebagai kegiatan hidup berpolitik, tidak boleh diabaikan, karena justru kalau manusia aktif dalam bidang inilah maka ia disebut sebagai manusia. Aristoteles menyebut bidang kegiatan politik itu sebagai *antropoquesthai* (berada sebagai manusia). Orang memang harus mengejar lebih jauh daripada sekedar menjadi manusia, jadi ia harus berteori. Tapi kalau melulu berteori, ia tidak dapat menjadi warga negara yang baik, akibatnya ia akan terasing dari sesama manusia (*bios xenikos*) dan tidak dapat ikut dalam *koinomia* (persaudaraan). Disinilah awal mula munculnya ketegangan teori dan praxis. Jadi orang Yunani menganggap teori sebagai dua dimensi hidup dari manusia yang satu dan sama, dan keduanya harus dijalankannya tanpa saling mengecualikannya. Ini jelas berbeda dengan pengertian orang yang salah paham bahwa persoalan teori dan praxis mesti dipikirkan sebagai persoalan bagaimana agar suatu teori itu dapat diaplikasikan pada kehidupan praktis, sebab pengertian ini seakan menganggap bahwa teori dan praxis sebagai dua bidang yang berbeda (padahal teori dan praxis hanyalah dua dimensi dari manusia yang satu dan sama) sehingga satu sama lain memang dapat saling dipisahkan dan saling mengecualikan. Berfikir dialektis adalah sama dengan berfikir dalam kesatuan teori dan praxis seperti dalam pengertian Aristoteles.²⁷ Pemikiran dialektis tidak mengandaikan adanya kesenjangan antara teori dan praxis yang harus dijumpai, melainkan bagaimana suatu teori *dapat membuahkan* praxis. Menurut Hegel teori semacam itu berpangkal pada realitas, dan harus meliputi kesadaran kita tentang realitas, termasuk kemampuan kita untuk mengubah realitas. Teori macam ini tidak lagi membutuhkan aplikasi terhadap realitas, sebab realitas sudah termasuk didalamnya. Teori macam ini sifatnya “afirmatif”, artinya mau menyatakan diri menjadi realitas. Hegel yakin hal tersebut bisa dilaksanakan karena pada hakekatnya kesadaran (teori) sudah mencapai kesempurnaan dalam roh, didalamnya terkandung realitas yang sudah saatnya “diafirmasikan” (dinyatakan keluar), kelak murid-murid Hegel, lebih-lebih golongan kiri, tidak setuju dengan anggapan Hegel itu, tetapi pada hakekatnya mereka semua sepakat bahwa sudah saatnya teori melahirkan diri ke dunia, menumbuhkan praxis.²⁸ Mereka berusaha untuk menemukan teori yang benar-benar tepat dalam hubungannya dengan praxis. Filsafat mereka tidak lagi bersifat kontemplatif, tetapi filsafat praxis, filsafat yang ingin aktif “mengubah dunia”. Sekolah Frankfurt sendiri mempunyai keprihatinan mendalam terhadap praxis. Kata Martin Jay dalam bukunya *Dialectical Imagination*:

Untuk sebagian dapat dikatakan bahwa Sekolah Frankfurt kembali kepada keprihatinan kaum Hegelian Kiri pada tahun 1840. seperti generasi pertama pemikir kritis (kaum Hegelian Kiri), Sekolah Frankfurt menaruh minat pada integrasi filsafat dan analisa sosial. Mereka memakai metode dialektika warisan Hegel, dan seperti pendahulunya, mereka meletakkan metode tersebut pada arah yang sifatnya materialis. Dan akhirnya, seperti beberapa dari kaum Hegelian Kiri, mereka terutama tertarik untuk memeriksa kemungkinan untuk merubah tatanan sosial lewat praxis manusiawi.²⁹

Jay juga menyebut Sekolah Frankfurt sebagai “kebangunan kembali kaum Hegelian Kiri di abad ini”.³⁰ Meskipun sekolah Frankfurt sangat mengagumi filsafat Hegel, dan malah menurunkan arti kritis dari pengertian dialektis dari Hegel, mereka juga mengkritik idealisme Hegel sebagai kurang memadai untuk suatu teori kritis. Hegel memang sudah menentang tentang “rekonsiliasi” antara realitas dan kesadaran, tapi “rekonsiliasi” tersebut hanya terdapat dalam pemikiran, hanya difahami saja, sedangkan pada kenyataannya, kesesuaian itu belum terjadi, pemahaman Hegel benar-benar suatu pemahaman belaka, artinya Hegel belum mengeluarkan pemahaman itu sebagai suatu kenyataan. Disini dialektika Hegel lalu menjadi semata-mata

²⁷ Bedakan dengan Andrew Arato dan Eike Gebhardt (ed.), *Op. Cit.*, h. 403.

²⁸ Lih. Nicholas Lobkowitz, *Op. Cit.*, h. 193-214.

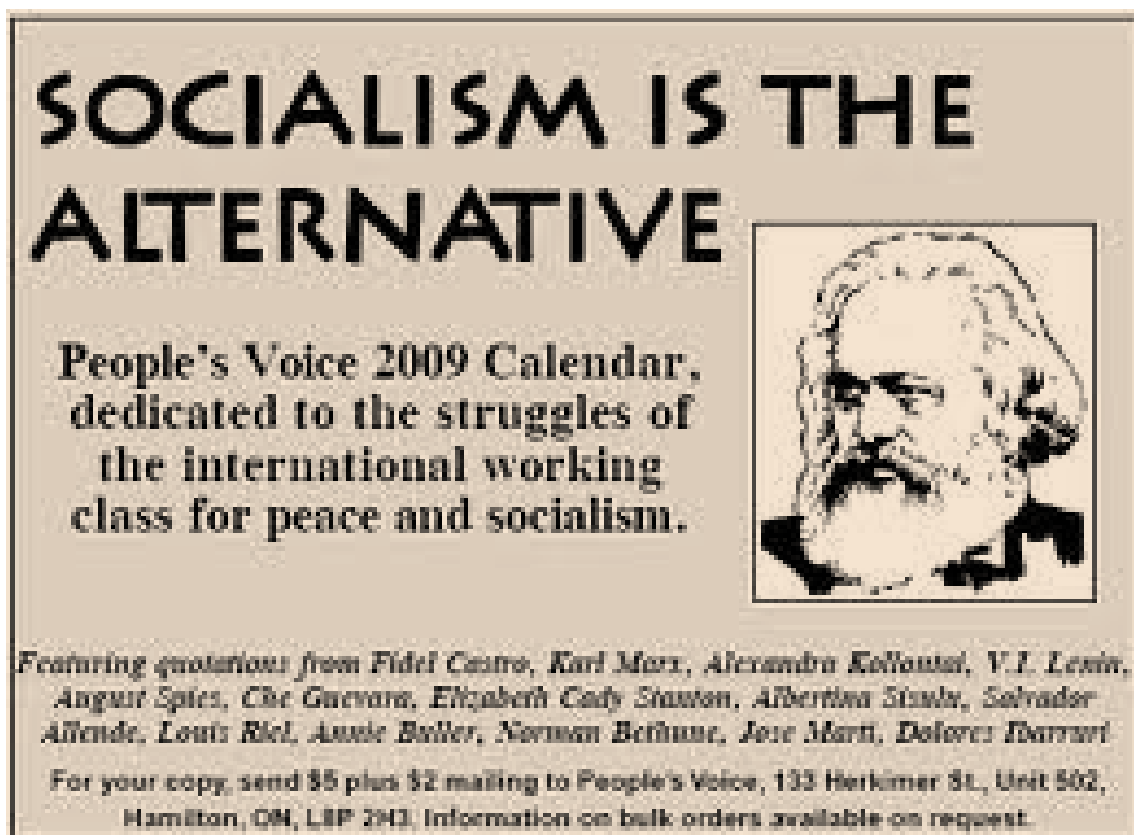
²⁹ Martin Jay, *The Dialectical Imagination, A History of The Frankfurt School and The Institute of Social Research 1923-50* (London: Heinemann Educational Books, 1973) h. 42.

³⁰ *Ibid.*, h. 43.

"transfiguratif" (mengatasi kenyataan tapi hanya dalam angan-angan belaka). Max Horkheimer mengatakan tuduhan itu dalam karyanya *Concerning the Problem of Truth*:

Hegel percaya bahwa pemikirannya telah merangkul esensi dari semua yang ada, dan dalam sistemnya telah menyatukan semua esensi itu kedalam suatu hirarki yang sempurna dan mencukupi dirinya sendiri, tak terpegaruh oleh perkembangan dan perilaku individu-individu. Itu semuanya semata-mata berarti pengabdian kondisi-kondisi dasar manusiawi dalam pemikiran. Dialektika Hegel dengan demikian mengandaikan suatu fungsi "transfiguratif". Tatanan sosial dimana menurut Hegel masih terdapat penjajahan dan perbudakan, kekayaan dan kemiskinan, dibenarkan dalam suatu pemikiran konseptual dalam mana mereka diserap. Semuanya itu dihadirkan sebagai bernilai lebih tinggi, sebagai "Ilahi" dan "Absolut".³¹

Jelaslah bahwa menurut pemahaman Hegel, penindasan, kemiskinan itu sudah tidak ada lagi, malah sudah diangkat untuk mendapat nilainya yang lebih tinggi, padahal kenyataannya semuanya itu masih ada. Hegel dengan mudah juga menyebut sudah tercapa identitas antara kesadaran dan realitas, tapi itupun hanya terjadi dalam pemahamannya saja, yakni pemahama oleh akal budi yang telah mencapai kesempurnaannya dalam Roh Absolut. Pada Hegel, kebahagiaan dan kebebasan hanya ada dalam kontemplasi, sedangkan yang terjadi dalam kenyataan adalah ketidakbahagiaan dan penindasan.[]



³¹ Max Horkheimer, "One The Problem of Truth" dalam Andrew Arato dan Eike Gebhardt (ed.), *op. cit.*, h. 417.

Hand-Out 34 LATAR HISTORIS PEMIKIRAN KARL MARX

Riwayat Hidup Karl Marx

Karl Marx, lahir di bulan Mei 1818 di Trier, Jerman. Ayahnya seorang pengacara yang beberapa tahun sebelumnya pindah agama Yahudi menjadi Kristen Protestan. Pada masa-masa kuliahnya di Universitas Bonn, ia berada dibawah pengaruh Hegel, dan mempelajari filsafat bukannya hukum yang lebih diinginkan ayahnya. Selama hampir setahun ia menjadi pimpinan redaksi sebuah harian radikal 1843, sesudah harian itu dilarang oleh pemerintah Prussia, ia kawin dengan Jenny Von Westphalen, putri seorang bangsawan, dan pindah ke Paris. Di sana ia tidak hanya berkenalan dengan Friedrich Engels (1820-1895) yang akan menjadi teman akrab dan "penerjemah" teori-teorinya melainkan juga dengan tokoh-tokoh sosialis Perancis. Dari seorang liberal radikal ia menjadi seorang sosialis. Beberapa tulisan penting berasal waktu 1845, atas permintaan pemerintah Prussia, ia diusir oleh pemerintah Perancis dan pindah ke Brussel di Belgia. Dalam tahun-tahun ini ia mengembangkan teorinya yang definitif. Ia dan Engels terlibat dalam macam-macam kegiatan kelompok-kelompok sosialis. Bersama dengan Engels ia menulis Manifesto Komunis yang terbit bulan Januari 1848. Sebelum kemudian pecahlah apa yang disebut revolusi '48, semula di Perancis, kemudian juga di Prussia dan Austria. Marx kembali ke Jerman secara ilegal.

Tetapi revolusi itu akhirnya gagal. Karena diusir dari Belgia, Marx akhirnya pindah ke London dimana ia akan menetap untuk sisa hidupnya. Di London mulai tahap baru dalam hidup Marx. Aksi-aksi praktis dan revolusioner ditinggalkan dan perhatian dipusatkannya pada pekerjaan terories, terutama pada studi ilmu ekonomi. Tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun paling gelap dalam kehidupannya. Ia tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap dan hidup dari kiriman uang sewaktu-waktu dari Engels. Keluarganya miskin dan sering kelaparan. Karena sikapnya yang sombong dan otoriter, hampir semua bekas kawan terasing daripadanya. Akhirnya, baru 1867, terbit jilid pertama *Das Kapital*, karya utama Marx yang memuat kritiknya terhadap kapitalisme (jilid kedua dan ketiga baru diterbitkan oleh Engels sesudah Marx meninggal). Tahun-tahun terakhir hidupnya amat sepi dan tahun 1883 ia meninggal dunia. Hanya delapan orang yang menghadiri pemakamannya.

Manifesto Komunis

Masyarakat borjuis modern yang muncul dari keruntuhan masyarakat feodal tidak menyingkirkan antagonisme kelas itu. Malah ia memunculkan kelas-kelas baru, kondisi baru untuk melakukan tekanan, bentuk-bentuk baru persaingan dengan menggantikan yang lama. Borjuis menempatkan negeri di tangan penguasa kota. Ia telah menciptakan kota-kota besar, telah banyak menambah penduduk kota dibanding penduduk pedesaan dan dengan demikian menyelamatkan sebagian besar penduduk dari kehidupan desa yang bodoh. Persis seperti yang berlaku bagi sesuatu negeri dengan ketergantungan pada kota, borjuis itu telah pula membuat negeri-negeri barbar dan semi barbar bergantung pada negeri beradab, bangsa petani (bergantung pada) bangsa borjuis, timur pada barat. Senjata yang dipergunakan borjuis untuk merobohkan feodalisme, ini dipergunakan untuk borjuis itu sendiri. Akan tetapi bukan saja borjuis itu mengumpulkan senjata untuk membunuh dirinya sendiri, ia juga membunuh orang-orang yang mengadakan senjata tersebut yaitu kelas pekerja modern dikalangan proletar. Dengan perkembangan industri, proletar bukan saja bertambah jumlahnya, ia berkumpul dalam kumpulan yang tambah besar, kekuatannya berkembang dan ia merasakan kekuatannya yang bertambah itupun mulai membentuk kombinasi (organisasi buruh) melawan borjuis. Di sana-sini pertentangan berkobar dan berkembang menjadi kerusuhan.

Sejarah Materialisme dan Dialektika

Pandangan materialis sejarah adalah teori Karl Marx tentang hukum perkembangan masyarakat. Inti pandangan ini ialah bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Bidang ekonomi adalah basis, sedangkan dua dimensi kehidupan masyarakat lainnya, institusi-institusi sosial, terutama negara, dan bentuk-bentuk kesadaran sosial merupakan bangunan atas. Oleh karena faktor penentu adalah basis, maka harus memperhatikan dahulu bidang ekonomi. Ciri yang menurut Marx paling menentukan bagi semua bentuk ekonomi sampai sekarang adalah

pemisahan antara para pemilik dan pekerja. Masyarakat terdiri dari kelas-kelas sosial yang membedakan diri satu sama lain berdasarkan kedudukan dan fungsi masing-masing dalam proses produksi. Pada garis besarnya (terutama semakin produksi masyarakat mendekati pola kapitalis) kelas-kelas sosial termasuk salah satu dari dua kelompok kelas. Yaitu kelas-kelas pemilik dan kelas-kelas pekerja. Yang pertama memiliki sarana-sarana kerja, sedangkan yang kedua hanya memiliki tenaga kerja mereka sendiri. Oleh karena kelas-kelas pemilik begitu berkuasa. Misalnya para pemilik tanah mengontrol para buruh tani. Itu berarti bahwa para pemilik dapat menghisap tenaga kerja para pekerja, jadi mereka hidup dari penghisapan tenaga mereka yang harus bekerja. Kelas-kelas pemilik merupakan kelas-kelas atas dan kelas-kelas pekerja merupakan kelas-kelas bawah dalam masyarakat. Jadi menurut Marx ciri khas semua pola masyarakat sampai sekarang ialah, bahwa masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas atas dan bawah. Struktur ekonomi tersusun sedemikian rupa hingga yang pertama dapat hidup dari penghisapan tenaga kerja yang kedua.

Bangunan atas mencerminkan keadaan itu. Negara adalah alat kelas-kelas atas untuk menjamin kedudukan mereka, jadi untuk seperlunya menindas usaha kelas-kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan oleh kelas-kelas atas sedangkan "bangunan atas idealis" istilah Marxis bagi agama, filsafat, pandangan-pandangan moral, hukum, estetis dan lain sebagainya berfungsi untuk memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu. Jadi Marx menolak paham bahwa negara mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Negara dikuasai oleh dan berpihak pada kelas-kelas atas, meskipun kadang-kadang juga menguntungkan kelas-kelas bawah. Walaupun negara mengatakan ia adalah milik semua golongan dan bahwa kebijaksanaannya demi kepentingan seluruh masyarakat namun sebenarnya negara melindungi kepentingan kelas atas ekonomis. Maka negara menurut Marx termasuk lawan kelas-kelas bawah. Negara bukan milik dan bukan kepentingan mereka. Dari negara mereka tidak dapat mengharapkan sesuatu yang baik. Seperti halnya negara, begitu pula agama, filsafat, pandangan tentang norma-norma moral dan hukum dan sebagainya menurut Marx tidak mempunyai kebenaran pada dirinya sendiri, melainkan hanya berfungsi untuk melegitimasi kepentingan kedudukan kelas atas.

Seperti halnya negara, begitu pula agama, filsafat, pandangan tentang norma-norma moral, serta hukum dan sebagainya menurut Marx tidak mempunyai kebenaran pada dirinya sendiri, melainkan hanya berfungsi untuk melegitimasi kepentingan kedudukan kelas atas. Cara suatu masyarakat berfikir, apa yang dianggapnya sebagai baik, bernilai, dan masuk akal, menurut Marx ditentukan oleh kelas-kelas yang menguasai masyarakat. Maka bentuk-bentuk kesadaran sosial itu menurut kekhasan masing-masing, mengemukakan sebagai baik bagi seluruh masyarakat apa yang sebenarnya hanya baik bagi kelas-kelas atas. "Bangunan atas ideologis" itu menciptakan kesan bahwa kesediaan masing-masing kelas untuk menerima kedudukannya dalam masyarakat adalah sesuatu yang baik dan rasional. Jadi fungsinya ialah membuat kelas-kelas bawah bersedia untuk menerima kedudukan mereka sebagai kelas-kelas bawah.

Bila tingkat produksi tadi yang diambil sebagai tesis, dan mulai dengan tingkat feodalisme (jadi ini merupakan tesis). Anti tesisnya adalah tingkat produksi borjuis atau kapitalisme, sintesisnya nanti adalah tingkat produksi sosialisme. Teori dialektika dengan tesis, antitesis, dan sintesis dapat diharapkan baik dalam hubungan dengan kelas-kelas itu, maupun pada tingkat-tingkat produksi itu sendiri. Demikian tesis golongan bangsawan (di Abad Tengah) menimbulkan antitesis golongan peminjam tanah, tetapi keduanya ini menumbuhkan sintesis golongan borjuis. Ini merupakan tesis kembali dan antitesisnya ialah golongan pekerja, sintesisnya ialah manusia komunis yang terdapat dalam masyarakat komunisme. Dengan demikian maka Marx melihat negara sebagai alat belaka dari kelas penguasa (berpunya) untuk menindas kelas yang dikuasa (tidak berpunya). Negara dan pemerintahan identik dengan kelas penguasa, artinya dengan kelas berpunya, berturut-turut dalam sejarah umat manusia dikenal kelas pemilik budak, kelas bangsawan (atau tuan tanah), kelas borjuasi. Soal hak dan keadilan, oleh sebab itu adalah sekedar ucapan penghias bibir dari pihak yang berkuasa.

Dialektika Marx sebenarnya mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat feodalisme ke masyarakat borjuasi atau kapitalisme dan seterusnya ke masyarakat sosialisme merupakan suatu kelanjutan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi ini tidak berarti bahwa manusia berdiam diri saja dengan menanti perkembangan itu berjalan sebagaimana maunya. Kelas-kelas itu sendiri adalah kelas-kelas yang berjuang untuk kelasnya, jadi manusia yang dilihat Marx adalah manusia yang

berbuat. Bagi Marx masalah pokok bukanlah memahami sejarah atau dunia ini, melainkan bagaimana mengubahnya. "manusia membuat sejarahnya sendiri".

Oleh sebab itu, maka revolusi yang digambarkan oleh Marx itu terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah revolusi yang dipelopori oleh golongan Borjuis yang hendak menghancurkan feodal. Tahap kedua adalah revolusi yang dilakukan oleh kelas pekerja dalam menghancurkan golongan borjuis. Dengan lenyapnya kelas borjuis, fungsi pemerintahan tidak lagi mempunyai sifat politik. Kelas pekerja yang memegang kekuasaan itu pun tidak lagi merupakan kelas, sehingga tidak ada kelas yang ditindas dan negara akan lenyap. Masing-masing orang akan melakukan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Orang bekerja bukan karena ingin mencukupi nafkah tapi karena panggilan hati. Oleh karena itu tiap orang memberikan sumbangan sesuai dengan kesanggupannya. Pada saat ini tingkat produksi menjadi berlimpah, dan pendapatan tidak lagi berupa upah, melainkan bergantung pada keperluan manusia yang bersangkutan.

Teori Nilai Lebih

Dalam memahami teori Marx tentang masyarakat dan negara tidak boleh dilupakan sama sekali teorinya di bidang ekonomi. Teori ekonominya itu berupa teori nilai berdasar pada tenaga, teori nilai lebih, teori akumulasi kapital, teori konsentrasi kapital dan teori pemiskinan semuanya pada pokoknya merupakan teori eksploitasi untuk memperlihatkan bahwa golongan berpunya hidup dari tenaga golongan tidak berpunya. Tentu saja teori demikian ini timbul dalam pemikiran Marx setelah melihat masyarakat yang dihadapinya, sekurang-kurangnya mengingat masyarakat yang telah berupa negara. Marx berpendapat bahwa pada mulanya, dalam kehidupan primitif komunal dimana alat-alat produksi dimiliki bersama, pengisapan manusia oleh manusia tidak didapati. Kelas masyarakat tidak ada, penindasan pun tidak pula. Masyarakat pun tidak mengenal kekuasaan, dan oleh karena itu tidak mengenal negara. Marx berpendapat bahwa bentuk negara itu tidak selamanya ada. Menurut pendiri komunisme ini, maka sejarah manusia sesudah terbentuknya negara memperlihatkan empat tingkatan produksi. Produksi berdasar perhambaan, feodalisme, produksi kapitalis atau borjuasi dan produksi sosialisme. Sesuai pendapatnya tentang unerbau dan oberbau diatas, maka dalam tingkat-tingkat produksi kapitalisme atau borjuasi pembagian kelas itu lebih sederhana, yang terpenting ialah kelas-kelas yang bertentangan: kelas borjuasi atau kapitalis dan kelas pekerja. Teori dialektika dengan tesis, anti tesis, dan sintesis dapat diterapkan baik dalam hubungan dengan kelas-kelas itu, maupun pada tingkat-tingkat produksi itu sendiri. Demikianlah tesis golongan bangsawan (di abad tengah) menimbulkan anti tesis golongan peminjam tanah, tetapi keduanya ini menumbuhkan sintesis golongan borjuis. Hal itu merupakan tesis kembali dan anti tesis ialah golongan pekerja, sintesisnya ialah manusia komunis yang terdapat dalam masyarakat komunisme.

Bila tingkat produksi diambil sebagai tesis, dan kita mulai dengan tingkat feodalisme (merupakan tesis), maka anti tesisnya ialah tingkat produksi borjuis atau kapitalisme, sintesisnya adalah tingkat produksi sosialisme. Dengan demikian, maka Marx melihat negara sebagai alat belaka dari kelas penguasa (berpunya) untuk menindas kelas yang dikuasai (yang tidak berpunya). Negara dan pemerintahan identik dengan kelas penguasa, artinya dengan kelas berpunya, berturut-turut dalam sejarah umat manusia dikenal kelas pemilik budak, kelas bangsawan (atau tuan tanah), kelas borjuis. Soal hak dan keadilan, oleh karena itu adalah sekedar ucapan penghias bibir.

Komunisme dan Masyarakat Tanpa Kelas

Yang dimaksud Marx dengan komunisme bukanlah sebuah kapitalisme negara, jadi dimana hak milik diadministrasikan oleh negara. Marx mengatakan bahwa hanya pada permulaan, sosialisasi berarti nasionalisasi- jadi negara mengambil alih hak milik pribadi. Ciri-ciri masyarakat komunis adalah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi penghapus adanya kelas-kelas sosial, menghilangnya negara, penghapusan pembagian kerja. Kelas-kelas tidak perlu dihapus secara khusus sesudah kelas kapitalis ditiadakan karena kapitalis sendiri sudah menghapus semua kelas, sehingga hanya tinggal proletariat. Itulah sebabnya revolusi sosialis tidak akan menghasilkan mesyarakat dengan kelas atas dan kelas bawah. Marx tidak pernah menguraikan bagaimana ia membayangkan organisasi masyarakat sesudah penghapusan hak milik pribadi. Ia hanya berbicara secara umum dan abstrak. Satu-satunya tempat ia berbicara banyak dengan agak romantis (dan

bertolak dari sebuah teks Feuerbach) adalah dalam German Ideology: "Dalam masyarakat komunis masing-masing orang tidak terbatas pada bidang kegiatan eksklusif, melainkan dapat mencapai kecakapan dalam bidang apapun, masyarakat mengatur produksi umum, dengan memungkinkan hal ini saya kerjakan hari ini, hal itu besok, pagi hari berburu, siang hari memancing ikan, sore hari memelihara ternak, sesudah makan mengkritik...." (MEW 3,33). Marx mempergunakan istilah sosialisme dan komunisme dalam arti yang sama, yaitu keadaan masyarakat sesudah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Langkah pertama adalah kediktatoran proletariat dan sosialisme negara, lalu sesudah kapitalisme dihancurkan, negara semakin kehilangan fungsinya. Sosialisme tercapai apabila tidak ada lagi sedangkan negara komunis yang dimaksud Marx adalah bahwa negara bukan hanya menghilang bahkan menjadi maha kuasa.

Analisis

Salah satu alasan mengapa Marx menjadi tokoh yang begitu penting ialah karena ia mewakili suatu campuran intelektual yang berhasil dalam politik, yang memandang dunia dengan perasaan dingin dan mencari suatu masa depan yang lebih bermoral dan lebih bebas bagi manusia; politisi praktis yang terlibat dalam konflik-konflik dengan musuh-musuh politiknya, kanan dan kiri; serta profesional yang mengembangkan suatu teori perubahan ilmiah seperti materialisme dialektika. Serangan utama Marx difokuskan pada kapitalisme dan liberalisme politik, terutama karena dalam permulaan abad ke-19, telah nyata bahwa sistem liberal dapat berjalan. Secara fundamental, pengandaian-pengandaian abad ke-19 timbul dari kontradiksi-kontradiksi luar biasa dalam kapitalisme industri, yang tidak cukup dipahami oleh para teoritis. Kontrak sosial terdahulu dan yang menimbulkan hal-hal yang tidak mampu ditangani baik oleh teori hak alamiah, maupun oleh penegasan kembali secara sederhana asas-asas moral publik (Apter, 1996: 104).

Bila paradigma sosialis ingin berhasil dalam menentang paradigma liberal, maka secara intelektual ia harus kuat. Memang, ia harus menangani secara teoritis apa yang tidak mampu ditangani oleh paradigma liberal, yaitu masalah konflik dan polarisasi kelas. Marx mengakui bahwa evolusi mengikuti suatu garis lengkung tertentu, tetapi bukan dalam cara-cara mudah atau segera. Rakyat perlu berusaha mewujudkan hasil revolusioner dengan menyadari peranan mereka dalam sejarah sebagai satu kelas. Jadi alam, kebebasan, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan hukum dinamis dari perkembangan industri dipadukan oleh Marx dalam sebuah sintesa revolusioner (Apter, 1966:123). Pandangan Marx mengenai Materialisme Dialektika, ia memadukan suatu yang empiris dengan yang deduktif dalam rumusan sejarah yang dinamakan materialisme dialektika. Materialisme dalam masalah manusia mengacu pada proses ekonomi dan cara produksinya. Hipotesa Marx adalah bahwa ketimpangan akan tumbuh bersama dengan produktivitasnya, ketika suatu lompatan besar pada karakter teknologi akan memungkinkan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, suatu keadaan yang berlebihan, bukan kelangkaan. Tetapi apa yang paling ditekankan oleh Marx, bukanlah aspek moral kondisi-kondisi sosial pada kekejaman kapitalisme melainkan ia berusaha menjelaskan bagaimana dialektika, jika diterapkan pada cara produksi, akan mengungkapkan cara kerja dinamika pertukaran, yang di bawah kapitalisme menghasilkan nilai-lebih atau keuntungan, dalam menggerogoti kapitalisme itu sendiri.

Marx dan Engels menggabungkan sejumlah unsur intelektual yang berlainan sebagai garis pemisah radikalisme. Marx berusaha menjadikan radikalisme kuarng sebagai visi, dan lebih merupakan ilmu pengetahuan tentang sosialisme dengan menerapkan suatu interpretasi sejarah yang khusus. Kini, tekanan perhatian dari pra-Marxis menjadi bagian diskusi atau perdebatan seksama mengenai bagaimana mendorong bentuk-bentuk politik baru. Rancangan-rancangan masa kini meliputi usaha mencari ide-ide generatif baru, yang telah timbul bukan hanya dari penolakan-penolakan terhadap teori-teori yang lebih utilitarian, tetapi juga dari pengalaman-pengalaman dengan sosialisme otokratis dan ekseseks stalinisme. Marx telah menjadi seorang monopolis yang berhasil dalam lingkungan ide-ide sosialis (Apter, 1996: 106 dan 111). Bagi Marx perhatian pada kebebasan manusia menjadi masalah bagaimana orang menjadi tidak teralienasi secara sosial. Hal ini merupakan proses yang membutuhkan bentuk ekonomi khusus yakni sosialisme; suatu kondisi perkembangan khusus-suatu pemahaman bahwa rantai yang membelenggu rakyat adalah politik dan bahwa hal itu diakibatkan oleh dominasi kelas. Marx mengemukakan (1) metode penafsiran sejarah, dan (2) penerapan metode itu tujuan khusus.[]

Hand-Out 35
PETA PEMIKIRAN KARL MARX (1818-1883):
MATERIALISME DIALEKTIKA & MATERIALISME HISTORIS

Karl Marx dalam Lintasan Sejarah

Karl Marx, pelopor utama gagasan “*sosialisme ilmiah*” dilahirkan tahun 1818 di kota Trier, ayahnya ahli hukum dan diumur tujuh belas tahun Karl Marx masuk Universitas Bonn, juga belajar hukum. Belakangan dia pindah ke Universitas Berlin dan kemudian dapat gelar doktor dalam ilmu filsafat dari Universitas Jena. Entah karena lebih tertarik, Marx menceburkan diri ke dunia jurnalistik dan sebentar menjadi redaktur *Rheinische Zeitung* di Cologne. Tapi pandangan politiknya yang radikal menyeretnya kedalam kesulitan dan memaksanya pindah ke Paris. Disitulah dia mula pertama bertemu dengan Friedrich Engels. Tali persahabatan dan persamaan pandangan politiknya mengikat kedua orang ini selalu dwi tunggal hingga akhir hayatnya. Karl Marx tak bisa lama tinggal di Paris dan segera ditendang dari sana dan pindah ke Brussel.

Di kota inilah, tahun 1847, dia pertama kali menerbitkan buah pikirannya yang penting dan besar *The Poverty of Philosophy* (Kemiskinan Filsafat). Tahun berikutnya bersama dengan Friedrich Engels mereka menerbitkan *Communist Manifesto*, buku yang akhinya menjadi bacaan dunia. Pada tahun itu juga Karl Marx kembali ke Cologne untuk kemudian diusir lagi dari sana hanya selang beberapa bulan. Sehabis terusir dari sana-sini, akhinya Marx menyeberang selat Canal dan menetap di London hingga akhir hayatnya.

Meskipun hanya sedikit uang dikoceknnya berkat pekerjaan jurnalistik, Marx menghabiskan sejumlah besar waktunya di London melakukan penyelidikan dan menulis buku-buku tentang politik dan ekonomi. (di tahun-tahun itu Marx dan familinya mendapat bantuan dari Friedrich Engels kawan karibnya). Jilid pertama *Das Kapital*, karya ilmiah Marx terpenting terbit tahun 1867. Tatkala Marx meninggal di tahun 1883, kedua jilid sambungannya belum sepenuhnya rampung. Kedua jilid sambungannya itu disusun dan diterbitkan oleh Engels berpegang pada catatan-catatan dan naskah yang ditinggalkan Marx. Karya tulisan Marx merumuskan dasar teoretis komunisme. Ditilik dari perkembangan luar biasa gerakan ini di abad ke-20. Komunisme mempunyai am penting jangka panjang dalam sejarah. Sejak timbulnya komunisme sebagai bagian tak terpisahkan dari masa kini, terasa sedikit sulit menentukan dengan cermat perspektif masa depannya. Kendati tak seorangpun sanggup memastikan seberapa jauh Komunisme bisa berkembang dan seberapa lama ideologi ini bisa bertahan, yang sudah pasti dia merupakan ideologi kuat dan tangguh serta berakar kuat menghujam ke Bumi, dan sudah bisa dipastikan punya pengaruh besar di dunia untuk paling sedikit beberapa abad mendatang.

Pada saat ini sekitar seabad sesudah kematian Marx jumlah manusia yang sedikitnya terpengaruh oleh Marxisme mendekati angka 1,3 Milyar banyaknya. Jumlah penganut ini lebih besar dari penganut ideologi manapun sepanjang sejarah manusia. Bukan sekedar jumlahnya yang mutlak, melainkan sebagai kelompok dari keseluruhan penduduk dunia. Ini mengakibatkan kaum komunis dan juga sebagian yang bukan komunis percaya bahwa, di masa depan tidak bisa tidak Marxisme akan merebut kemenangan diseluruh dunia. Namun, adalah sukar untuk memantapkan kebenarannya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Telah banyak contoh-contoh ideologi yang tampaknya sangat punya pengaruh penting pada jamannya tapi akhinya melayu dan sirna. (Agama yang didirikan oleh Mani bisa dijadikan misal yang menarik). Jika kita surut ke tahun 1900, akan tampak jelas bahwa demokrasi konstitusional merupakan arus yang akan menjadi anutan masa depan.

Komunisme

Menyangkut komunisme, seseorang sangat percaya dan tahu persis betapa hebatnya pengaruh komunisme di dunia saat ini dan dunia masa depan, Orang pasti masih mempertanyakan arti penting Karl Marx di dalam gerakan komunis. Pemerintah Uni Soviet sekarang tidak terawasi oleh karya karya Mark yang menulis dasar dasar pikiran sepem dialektika gaya Hegel dan tentang teori “nilai lebih”, Teori teori itu kelihatan kecil pengaruhnya dalam praktek perputaran roda politik pemerintah Uni Soviet, baik politik dalam maupun luar negeri.

Komunisme masa kini menitik beratkan empat ide: (1) Sekelumit kecil orang hidup dalam kemewahan yang berlimpah, sedangkan kaum pekerja yang teramat banyak jumlahnya bergelimpang papa sengsara, (2) Cara untuk merombak ketidakadilan ini adalah dengan jalan melaksanakan sistem sosialis, yaitu sistem dimana alat produksi dikuasai negara dan bukannya oleh pribadi swasta, (3) Pada umumnya, satu-satunya jalan paling praktis untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revolusi kekerasan, (4) Untuk menjaga kelanggengan sistem sosialis harus diatur oleh kediktatoran partai Komunis dalam jangka waktu yang memadai.

Tiga dari ide pertama sudah dicetuskan dengan jelas sebelum Marx, sedangkan ide yang keempat berasal dari gagasan Marx mengenai "diktatur proletariat", sementara itu lamanya berlaku kediktatoran Soviet sekarang lebih merupakan langkah-langkah Lenin dan Stalin daripada gagasan tulisan Marx. Hal ini nampaknya menimbulkan anggapan bahwa pengaruh Marx dalam Komunisme lebih kecil dari kenyataan sebenarnya, dan penghinaan orang-orang terhadap tulisan tulisannya lebih menyerupai etalase untuk membenarkan sifat "keilmiahan" dari pada ide dan politik yang sudah terlaksana dan diterima.

Sering dituding bahwa teori Marxis dibidang ekonomi sangatlah buruk dan banyak keliru. Tentu saja banyak dugaan-dugaan tertentu Marx terbukti meleset Misalnya Marx meramalkan bahwa dalam negeri-negeri kapitalis kaum buruh akan semakin melarat dalam pengalangan sang waktu. Jelaslah bahwa ramalan ini tidak terbukti. Marx juga meramalkan bahwa kaum menengah akan disapu dan sebagian besar orangnya akan masuk kedalam golongan proletar dan hanya sedikit yang bisa bangkit dan masuk dalam kelas kapitalis. Ini pun jelas tak terbukti. Marx tampaknya juga percaya, meningkatnya mekanisasi akan mengurangi keuntungan kapitalis, kepercayaan yang bukan saja salah tetapi juga tampak tolol. Tapi lepas apakah teori ekonomi benar atau salah, semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan pengaruh Marx. Arti penting filosof bukan terletak pada kebenaran pendapatnya tetapi terletak pada masalah apakah buah pikirannya telah menggerakkan orang untuk bertindak atau tidak. Diukur dari sudut ini, tak perlu diragukan lagi bahwa Marx punya arti penting dalam perkembangan sejarah masyarakat.

Hakekat Manusia Menurut Karl Marx

Pendirian Marx tentang hakekat manusia sangat menentukan jawaban yang diberikannya terhadap masalah, seperti, "Apakah negara itu? Dan "Apakah sejarah itu? Dipaparkan oleh Louis O. Kattsoff tentang hakekat manusia dalam penyelesaian materialisme historis, yaitu: (1) hakekat manusia adalah berubah-ubah, manusia selalu berubah secara dialektis dan historis, (2) hakekat manusia adalah tingkah laku, manusia ialah apa yang mereka kerjakan, (3) hakekat manusia adalah menguasai dan merencanakan, manusia mengubah sejarah dengan teknologinya dan ia juga mengubah dirinya sendiri, (4) hakekat manusia ditentukan oleh alat-alat produksi, orang dapat membayangkan betapa pentingnya menguasai alat produksi bagi penganut Marxisme. Sebab, manusia ialah apa yang mereka kerjakan, dan yang mereka kerjakan ditentukan oleh cara-cara produksi, maka menguasai alat-alat produksi berarti menguasai hakikat manusia.

Keterasingan & Emansipasi Manusia

Marx meletakkan dasar emansipasi atas keterasingan manusia pada tiga hal: *Pertama*, emansipasi atas keterasingan manusia Karl Marx berangkat dari kritik terhadap hukum negara Hegel. Hegel melukiskan masyarakat sebagai kacau balau, sebagai *bellum omnium contra omnes* (perang semua lawan semua) karena satu-satunya hukum batinnya adalah pemuasan kebutuhan individu-individu. Masyarakat semacam itu mesti menghancurkan diri sendiri karena semua anggota hanya mencari kepentingan egois mereka masing-masing. Oleh karena itu masyarakat tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi harus ditampung oleh negara. Maka, Hegel menganggap negara sebagai realitas dan tujuan masyarakat yang sebenarnya sedangkan keluarga dan masyarakat luas ini merupakan unsur-unsurnya. Anggapan itu dikritik oleh Marx, pertama, Hegel memutar balikkan tatanan yang sebenarnya. Bukan negara sebagai subyek yang unsur-unsurnya adalah keluarga dan masyarakat luas, melainkan keluarga dan masyarakat luas adalah pengandaian-pengandaian negara. Dengan sarkasme tajam Marx menulis: "*Logika ini bukan untuk membuktikan negara, melainkan negara dipakai sebagai bukti logika*". Marx mengkritik bahwa masyarakat luas merupakan realitas yang terpisah dari negara. Masyarakat hidup dalam dunia *skizofren*. Dalam masyarakat luas ia hidup

sebagai individu egois terisolasi, sedangkan hakikat sosialnya terpisah daripadanya dijadikan negara yang menghadapinya sebagai kekuatan represif. Manusia harus memecahkan hakikatnya, eksistensi negara sebagai pemerintah selesai tanpa anggota masyarakat, dan eksistensinya dalam masyarakat luas selesai tanpa negara". Marx mengkritik Hegel pada dua hal; (1) Bahwa ia memutar membalikkan subyek dan obyek: Hegel menyatakan negara sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, padahal kenyataan adalah kebalikannya, (2) Hegel hendak mengatasi egoisme masyarakat melalui negara sebagai penertib, hal ini berarti bahwa kesosialan (anti-egoisme) tidak masuk kembali kedalam masyarakat, melainkan hanya dipaksakan dari luar kepadanya oleh negara; padahal yang perlu adalah mengembalikan kesosialan manusia sendiri.

Kedua, emansipasi atas keterasingan manusia Karl Marx berangkat dari kritik terhadap agama. Gagasan Karl Marx tentang kritik terhadap agama bertolak dari pemikiran Feurbach (1804-1872). Feurbach memandang Hegel sebagai puncak rasionalisme modern, tetapi dalam suasana semacam ini dominasi agama tetap mewarnai kehidupan sehingga dunia materi khususnya "manusia" tidak ditempatkan pada martabat semestinya. Feurbach menggariskan filsafatnya dengan corak materialistis, tetapi nama yang lebih disukainya adalah filsafat organisme. Kecenderungan ini timbul karena Feurbach pun tidak setuju dengan paham materialisme kasar yang dikembangkan oleh penganut materialisme mekanis-menurut Marx materialisme Feurbach tetap vulgar karena manusia sehakikat dengan mesin. Pada bagian ini Marx menentang paham Feurbach, karena manusia tidak semata tergantung pada kondisi materi, tetapi pada kondisi sosial, yaitu hidup dalam masyarakat '*social being that it, the live of community*'. Disini Feurbach telah mengabaikan corak historis serta hubungan sosial manusia. Bagi Marx agama hanyalah pernyataan radikal manusia yang menjadi korban sistem ekonomi yang tidak manusiawi, manusia terasing secara sosial. Kritik agama bagi Marx, adalah sekunder. Yang seharusnya dikritik adalah keterasingan nyata manusia dalam masyarakat modern. "Kritik surga menjadi kritik bumi, kritik agama menjadi kritik hukum, kritik teologi menjadi kritik politik". Tuntutan emansipasi manusia berubah membawa Marx secara konsekuensi ke kritik masyarakat

Ketiga, emansipasi dari keterasingan manusia Karl Marx berangkat dari kritik terhadap masyarakat kapitalisme. Terjadinya masyarakat borjuis erat kaitannya dengan kapitalisme. Hakekat masyarakat borjuis adalah uang, "pelacur umum, makcomblangnya orang-orang dan bangsa-bangsa". Uang menjadikan manusia menjadi budak, yang tergantung, yang ditentukan dari luar. Ia menjadi komoditi. Emansipasi berarti penghapusan masyarakat seperti itu. Oleh karena itu masyarakat kapitalis berdasarkan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, emansipasi menurut Karl Marx hanya dapat tercapai kalau hak milik pribadi itu dihapus. Marx menggambarkan dehumanisasi ini terjadi dibawah sistem produksi kapitalis dengan sebutan "keterasingan" (*Etfremdung*). Bahwa emansipasi manusia itu perlu diusahakan dan tercapai apabila manusia dapat mewujudkan diri secara bebas dari heteronomi, secara sosial, bebas dari kepentingan, secara produktif. Hubungan masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalistik bersifat eksploitatif.

Tendensi Akar Materialisme

Materialisme dalam konteks pembahasan filsafat sering dilawankan dengan idealisme, sebab kedua aliran (*school*) ini memiliki kawasan yang bertitik pisah dan masing-masing mempunyai ciri atau penganut dalam sejarah kemanusiaan. Materialisme yang juga lazim disebut serba zat merupakan bagian dari filsafat metafisika dan terutama ontologi. Zatnya yang menjadi sifat dan keadaan terakhir kenyataan. Segala keadaan dan kejadian berasal dari materi. Unsur dasar seluruh kenyataan adalah zat. Tendensi akar materialisme terlihat pada filosof Ionian, dan filsafat Yunani Kuno.

Materialisme Dialektis

Materialisme dialektika timbul dari perjuangan sosial yang hebat, yang muncul sebagai akibat dari Revolusi Industri. Ide tersebut banyak kaitannya dengan Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895), dan telah menjadi filsafat resmi dari Rusia dan RRC; doktrin Marx dan Engels telah diberi tafsiran dan diperluas oleh *Lenin, Stalin, Mao Tse Tung* dan lain-lainnya.

Materialisme dialektik walaupun sangat menghormati sains dan menyatakan bahwa persepsi indrawi sains memberi kita pengetahuan yang riil, adalah suatu pendekatan dari segi politik

dan sejarah dan bukan dari segi sains alam. Disitu ditekankan pandangan bahwa perkembangan sejarah dimana materi dalam bentuk organisasi ekonomi dalam masyarakat dianggap sebagai dasar. Dengan begitu maka dipakai istilah: materialisme sejarah dan determinisme ekonomi.

Untuk memahami materialisme dialektik, kita harus memahami dan menelusuri kembali ide-ide George Hegel (1770-1831). Hegel, seorang idealis yang pikirannya banyak mempengaruhi Marx, berpendapat bahwa alam ini adalah proses menggelarnya fikiran-fikiran. Disitu timbullah proses alam, sejarah manusia, organisme dan kelembagaan masyarakat. Bagi Hegel, materi adalah kurang riil dari pada jiwa, karena jiwa atau pikiran adalah esensi dari alam. Marx menolak idealisme Hegel ia membalikkan filsafat Hegel dan mengatakan bahwa materilah (dan bukan jiwa atau ide) yang pokok. Materi, yang khususnya diperlihatkan oleh organisasi ekonomi dari masyarakat serta cara-cara produksi, menentukan kelembagaan politik dan sosial dari masyarakat. Kemudian hal-hal tersebut mempengaruhi pemikiran, filsafat, etika dan agama.

Walaupun Karl Marx dan Freidrich Engels menolak idealisme Hegel, tetapi mereka menerima metodologi filsafatnya, hampir seluruhnya. Dunia menurut Hegel adalah selalu dalam proses perkembangan. Proses-proses perubahan tersebut bersifat dialektik, artinya, perubahan-perubahan itu berlangsung dengan melalui tahap afirmasi atau tesis, pengingkaran atau antitesis dan akhimya sampai pada integrasi atau Sintesa.

Salah satu contoh proses dialektika yang berasal dari Hegel misalnya, menyangkut tiga bentuk negara. Bentuk negara yang pertama ialah diktatur. disini masyarakat diatur dengan baik, tetapi warga negara tidak mempunyai kebebasan apapun juga (tesis). Keadaan ini menampilkan lawannya: anarki (antitesis). Dengan bentuk negara seperti ini para warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas, tetapi hid up kemasyarakatan menjadi kacau. Tesis dan antitesis ini diperdamaikan dalam suatu sintesis, yaitu demokrasi konstitusional. Dalam bentuk negara yang ketiga ini dijamin dan dibatasi oleh undang-undang dan kehidupan masyarakat berjalan dengan memuaskan.

Seperti semua Hegelian haluan kiri, Marx pun sangat mengagumi metode dialektika yang diintroduksikan Hegel kedalam filsafat Tetapi dialektika Hegel-katanya-berjalan pada kepalanya dan ia mau meletakkannya diatas kakinya. Maksudnya ialah bahwa pada Hegel dialektika ialah dialektika pada ide, dan ia mau menjadikannya dialektika materi. Untuk hegel dan dialektika pada umumnya, alam merupakan buah dari roh, tetapi bagi Marx dan Engels segala sesuatu yang bersifat rohani merupakan buah hasil materi dan bukan sebaliknya.

Dengan demikian Marx dan Engels memihak pada usaha Feuerbach untuk mengganti idealisme dengan materialisme. Dengan menganut suatu materialisme yang bersifat dialektis, Marx dan Engels menolak materialisme abad ke-18 dan juga materialisme abad ke-19 yang kedua-duanya bersifat mekanistik. Menurut materialisme abad ke-18 tidak ada perbedaan prinsipil antara sebuah mesin dan makhluk hidup (termasuk manusia). Hanya dalam hal terakhir ini mekanisme adalah lebih pelik. Salah satu prinsip materialisme dialektik adalah perubahan dalam hal kualitas. Itu berarti bahwa kejadian pada taraf kuantitatif (misalnya pengintegrasian lebih rapat dari bagian-bagian materi) dapat menghasilkan sesuatu yang sama sekali baru. Dengan cara itulah kehidupanm berasal dari materi mati dan kesadaran manusiawi berasal dari kehidupan organis.

Materialisme Historis

Produksi ditentukan oleh alat Alat-alat itu adalah materi, yang dihasilkannya juga materi. Perkembangan sejarah adalah history (sejarah). History ditentukan oleh materi. Oleh karena itulah filsafat Marx disebut sebagai *historis materialime*. Manusia dapat menggunakan yang lain dari alam untuk keperluan-keperluannya. Ialah satu-satunya makhluk yang dapat mengganti kehidupannya, dan ikut mengganti sejarahnya. Tetapi pendorong untuk tindakan tidak terdapat dalam ide atau dalam keinginan seseorang atau dalam otaknya, akan tetapi pada pokoknya dalam proses produksi dan hubungan kelas masyarakat. Pada tahun 1848 Karl Marx dan Freidrich Engels menerbitkan *Manifesto Komunis*, suatu dokumen yang banyak mempengaruhi gerakan revolusioner. Akhimya Karl Marx menerbitkan karyanya yang besar, *Das Kapital*, Jilid pertama terbit pada tahun 1867. Marx membentuk interpretasi ekonomi tentang sejarah, dan interpretasi tersebut telah berpengaruh kuat selama seratus tahun terakhir ini. Bagi Marx faktor ekonomi adalah faktor yang menentukan dalam perkembangan sejarah manusia. sejarah digambarkan sebagai pertempuran kelas, dimana alat-alat

produksi, didistribusi dan pertukaran barang dalam struktur ekonomi dari masyarakat menyebabkan perubahan dalam hubungan kelas, dan ini semua mempengaruhi kebiasaan dalam tradisi politik, sosial, moral dan agama.

Terdapat lima macam sistem produksi, empat macam telah muncul bergantian dalam masyarakat manusia. Sistem kelima diramalkan akan muncul pada hari esok yang dekat, dan sekarang sudah mulai terbentuk; (1) Sistem komunisme primitif, (2) Sistem produksi kuno yang didasarkan atas perbudakan, (3) Tingkatan dimana kelompok-kelompok feodal menguasai penduduk-penduduk, (4) Timbullah sistem borjuis atau kapitalis dengan meningkatnya perdagangan, penciptaan dan pembagian pekerjaan, sistem pabrik menimbulkan industrialis kapitalis, yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi, (5) Masyarakat tanpa kelas atau komunisme murni.

Pikiran dasar materialisme historis adalah arah yang ditempuh sejarah sama sekali ditentukan atau dideterminasi oleh perkembangan sarana-sarana produksi yang materiil. Jika sebagai contoh kita memilih pengolahan tanah, maka perkembangan sarana produksi adalah; tugal, pacul, bajak, mesin. Biarpun sarana-sarana produksi merupakan buah hasil pekerjaan manusia, tetapi sejarah tidak tergantung pada kehendak manusia. Menurut pendapat Marx manusia memang mengadakan sejarahnya, tetapi ia tidak bebas dalam mengadakan sejarahnya. sebagaimana juga materi sendiri, sejarahnya pun dideterminasi secara dialektis bukan secara mekanistik.

Kemanakan arah perkembangan sejarah? Apakah titik akhir dari sejarah? Marx berkeyakinan bahwa sejarah manusia menuju ke suatu keadaan ekonomis tertentu, yaitu komunisme, dimana hak milik pribadi akan diganti dengan milik bersama. Perkembangan menuju fase sejarah ini bertanggung secara mutlak dan tidak mungkin dihindarkan. Tetapi manusia dapat mempercepat proses ini dengan menjadi lebih sadar dan dengan aksi-aksi revolusioner yang berdasar atas penyadaran itu.

Epilog

Dari uraian yang dipaparkan diatas, penulis setidaknya memiliki harapan kepada segenap insan pergerakan untuk selalu menyadarkan diri sendiri akan realitas disekeliling kita yang timpang, tidak adil, dan menindas. Akan menjadi suatu hat yang sangat fatal dan busuk jika manusia selu diam melihat dan merasakan penindasan tetapi diam dan acuh. Pemikiran Karl Marx memberikan inspirasi bagi gerakan buruh di seluruh dunia untuk bergerak melawan sistem ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi, menghisap dan menindas hakekat kesosialan manusia. Pemikiran Karl Marx bisa dijadikan alat atau kaca mata analisa atas sekian ketidakadilan yang disebabkan oleh negara yang repressif dan instrumen kapitalistik internasional yang memiskinkan dan mengasingkan manusia dari fitrahnya. Maka, revolusi sosial menjadi penting untuk segera praxiskan.[]



Bagi Marx faktor ekonomi adalah faktor yang menentukan dalam perkembangan sejarah manusia. sejarah digambarkan sebagai pertempuran kelas, dimana alat-alat produksi, didistribusi dan pertukaran barang dalam struktur ekonomi dari masyarakat menyebabkan perubahan dalam hubungan kelas, dan ini semua mempengaruhi kebiasaan dalam tradisi politik, sosial, moral dan agama.

Hand-Out 36 PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG KRITIK EKONOMI-POLITIK

Prawacana: Tentang Das Kapital

Proses Produksi Kapital³², adalah suatu pembahasan yang mendalam tentang ekonomi politik yang ditulis oleh Karl Marx. Marx melakukan suatu analisis kritis terhadap kapitalisme dan aplikasi praktisnya dalam ekonomi serta dalam bagian tertentu, merupakan kritik terhadap teori-teori terkait lainnya. Kekuatan pendorong utama kapitalisme, menurut Marx, terdapat dalam eksploitasi dan alienasi tenaga kerja. Sumber utama dari keuntungan baru dan nilai tambahnya adalah bahwa majikan membayar buruh-buruhnya untuk kapasitas kerja mereka menurut nilai pasar, namun nilai komoditi yang dihasilkan oleh para buruh itu melampaui nilai pasar. Para majikan berhak memiliki nilai keluaran (*output*) yang baru karena mereka memiliki alat-alat produksi (*kapital*) yang produktif. Dengan menghasilkan keluaran sebagai modal bagi majikan, para buruh terus-menerus mereproduksi kondisi kapitalisme melalui pekerjaan mereka.

Namun, meskipun Marx sangat prihatin dengan aspek-aspek sosial dari perdagangan, bukunya bukanlah sebuah pembahasan etis, melainkan sebuah upaya (yang tidak selesai) untuk menjelaskan tujuan dari "hukum gerak" (*"laws of motion"*) dari sistem kapitalis secara keseluruhan, asal-usulnya dan masa depannya. Ia bermaksud mengungkapkan sebab-sebab dan dinamika dari akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja bayaran, transformasi tempat kerja, konsentrasi modal, persaingan, sistem bank dan kredit, kecenderungan tingkat keuntungan untuk menurun, sewa tanah, dan banyak hal lainnya. Marx memandang komoditi sebagai "bentuk sel" atau satuan bangunan dari masyarakat kapitalis—ini adalah obyek yang berguna bagi orang lain, tetapi dengan nilai jual bagi si pemilik. Karena transaksi komersial tidak menyiratkan moralitas tertentu di luar apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksinya, pertumbuhan pasar menyebabkan dunia ekonomi dan dunia moral-legal menjadi terpisah dalam masyarakat: nilai subyektif moral menjadi terpisah dari nilai obyektif ekonomi.

Ekonomi politik, yang mulanya dianggap sebagai "ilmu moral" yang berkaitan hanya dengan distribusi kekayaan yang adil, atau sebagai suatu "aritmetika politik" untuk pengumpulan pajak, dikalahkan oleh disiplin ilmu ekonomi, hukum dan etika yang terpisah. Marx percaya bahwa para ekonom politik dapat mempelajari hukum-hukum kapitalisme dalam cara yang "obyektif", karena perluasan pasar pada kenyataannya telah mengobyektifikasikan sebagian besar hubungan ekonomi: cash nexus membuang semua ilusi keagamaan dan politik sebelumnya (namun kemudian menggantikannya dengan ilusi jenis lain—fetishisme komoditi). Marx juga mengatakan bahwa ia memandang "formasi ekonomi masyarakat sebagai suatu proses sejarah alam". Pertumbuhan perdagangan terjadi sebagai suatu proses di mana tak seorangpun dapat menguasai atau mengarahkan, menciptakan suatu kompleks jaringan kesalingterkaitan sosial yang sangat besar secara global. Dengan demikian, suatu "masyarakat" terbentuk "secara ekonomi" sebelum orang benar-benar secara sadar menguasai kapasitas produktif yang sangat besar dan kesalingterkaitan yang telah mereka ciptakan, untuk membangunnya secara kolektif untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Jadi, analisis Marx dalam Das Kapital, difokuskan terutama pada kontradiksi-kontradiksi struktural, daripada antagonisme kelas, yang mencirikan masyarakat kapitalis—"gerakan kontradiktif" (*gegensätzliche Bewegung*) yang berasal pada sifat ganda pekerjaan," bukannya dalam perjuangan antara tenaga buruh dan modal, atau antara kelas pemilik dan kelas pekerja. Lebih jauh, kontradiksi-kontradiksi ini beroperasi (seperti yang digambarkan oleh Marx dengan menggunakan suatu ungkapan yang dipinjam dari Hegel) "di belakang punggung" kaum kapitalis maupun buruh, artinya, sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas mereka, namun demikian tidak dapat diminimalkan ke dalam kesadaran mereka baik sebagai individu maupun sebagai kelas. Oleh karena itu, Das Kapital, tidak mengusulkan suatu teori revolusi (yang dipimpin oleh kelas buruh dan wakil-wakilnya)

³² Marx menerbitkan jilid pertama dari Das Kapital pada 1867, tetapi ia meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan jilid kedua dan ketiganya yang sudah dibuat naskahnya. Buku-buku ini kemudian disunting oleh teman dan rekan kerjanya Friedrich Engels dan diterbitkan 1885 dan 1894; jilid keempat, yang berjudul, yang disebut *Theories of Surplus-Value*, pertama-tama disunting dan diterbitkan oleh Karl Kautsky pada 1905-1910. Naskah-naskah persiapan lainnya diterbitkan baru beberapa dasawarsa kemudian.

melainkan teori tentang krisis sebagai kondisi untuk potensi revolusi, atau apa yang dirujuk oleh Marx dalam Manifesto Komunis sebagai “senjata” potensial, “ditempa” oleh para pemilik modal, “berbalik memukul kaum borjuis sendiri” oleh kelas pekerja. Krisis seperti itu, menurut Marx, berakar dalam sifat komoditi yang kontradiktif, bentuk sosial yang paling dasar dari masyarakat kapitalis. Dalam kapitalisme, perbaikan-perbaikan dalam teknologi dan meningkatnya tingkat produktivitas menambah jumlah kekayaan materi (atau nilai pakai) dalam masyarakat sementara pada saat yang bersamaan mengurangi Nilai (ekonomi) dari kekayaan ini, dan dengan demikian merendahkan tingkat keuntungan—suatu kecenderungan yang membawa kepada situasi tertentu, yaitu ciri khas dalam kapitalisme, yakni “kemiskinan di tengah kelimpahan,” atau lebih tepatnya, krisis produksi yang berlebihan di tengah konsumsi yang terlalu rendah.

Marx mendasarkan karyanya pada para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan bahkan Benjamin Franklin. Namun, ia mengolah kembali gagasan-gagasan para pengarang ini, sehingga bukunya merupakan sintesis yang tidak mengikuti gagasan pemikir manapun. Buku ini juga mencerminkan metodologi dialektis yang diterapkan oleh G.W.F. Hegel dalam bukunya *The Science of Logic* dan *The Phenomenology of Mind*, dan pengaruh para sosialis Perancis seperti Charles Fourier, Comte de Saint-Simon, dan Pierre-Joseph Proudhon. Marx sendiri mengatakan bahwa tujuannya adalah “membawa suatu ilmu [artinya, ekonomi politik] melalui kritik kepada suatu titik di mana ia dapat secara dialektis digambarkan”, dan dalam cara ini “mengungkapkan hukum gerak masyarakat modern”. Dengan memperlihatkan bagaimana perkembangan kapitalis itu adalah pendahulu dari suatu cara produksi sosialis yang baru, ia berusaha memberikan dasar ilmiah bagi gerakan buruh modern. Dalam mempersiapkan bukunya ini, ia mempelajari literatur ekonomi yang tersedia pada masanya selama dua belas tahun, terutama di British Museum di London. Aristoteles, dan filsafat Yunani pada umumnya, merupakan pengaruh penting lainnya (meskipun seringkali diabaikan) dalam analisis Marx terhadap kapitalisme. Pendidikan Marx di Bonn terpusat pada para penyair Yunani dan Romawi. Disertasi yang diselesaikannya di universitas adalah tentang perbandingan antara filsafat alam dalam karya Demokritus dan Epikurus. Lebih dari itu, sejumlah pakar telah mengajukan pendapatnya bahwa rancangan dasar *Das Kapital*—termasuk kategori-kategori penggunaan dan nilai tukar, serta “silogisme” untuk sirkulasi sederhana dan diperluas (M-C-M dan M-C-M’)—diambil dari Politik (Aristoteles) dan Etika Nikomakea. Lebih dari itu, gambaran Marx tentang mesin di bawah hubungan-hubungan produksi kapitalis sebagai “otomat” yang bertindak sendiri, adalah sebuah rujukan langsung kepada spekulasi Aristoteles kepada alat-alat yang tidak bernyawa yang mampu mengikuti perintah sebagai kondisi untuk penghapusan perbudakan.

Dasar Kritik Ekonomi-Politik

Dalam studi kritik ekonomi-politik pandangan Karl Heinrich Marx (1818-1883) dianggap paling berpengaruh. Dari segi teoritis, banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ekonomi saja, tetapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah dan sebagainya. Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Untuk menunjukkan kebenciannya Marx menggunakan berbagai argumen untuk “membuktikan” bahwa sistem liberal atau kapitalis itu buruk. Argumen-argumen yang disusun Marx dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari sisi moral, sosiologi maupun ekonomi.³³

³³ Dari segi *moral* Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Walau ada pengakuan bahwa sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar ini lebih efisien, akan tetapi sistem ini tetap dikecam sebab sistem liberal tersebut tidak peduli tentang masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Dengan menerapkan sistem “upah besi” kaum buruh dalam sistem perekonomian liberal tidak akan pernah mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi karena—sebagaimana diucapkan Marx—“pasar bebas memang telah mentakdirkannya demikian”. Untuk mengangkat harkat para buruh yang sangat menderita dalam sistem liberal tersebut Marx mengajak kaum buruh untuk bersatu, dan sistem perekonomian liberal-kapitalis harus digantikan dengan sistem lain yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi semua untuk semua, yaitu sistem perekonomian sosialis-komunis. Dari segi *sosiologi*, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. Dalam sistem liberal-kapitalis yang diamati Marx ada sekelompok orang (yaitu para pemilik modal) yang menguasai kapital, dan ada sekelompok orang lainnya (yaitu kaum buruh) sebagai kelas proletar yang seperti sudah ditakdirkan untuk selalu menduduki posisi kelas bawah. Jika tidak dilakukan sesuatu, demikian

Menurut ramalan Marx sistem kapitalis hancur bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain, melainkan karena keberhasilannya sendiri. Sistem kapitalis dinilai Marx mewarisi daya self destruction, suatu daya dari dalam yang akan membawa kehancuran bagi sistem perekonomian liberal itu sendiri. Bagi Marx sistem kapitalis adalah suatu sistem yang “sudah busuk dari dalam” dan tidak mungkin diperbaiki. Untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik, tidak ada jalan lain, sistem liberal atau kapitalis tersebut harus dihancurkan dan diganti dengan sistem yang lain yang lebih manusiawi, yaitu sistem sosialis atau komunis.

Dalam buku Manifesto Komunis dapat diikuti bagaimana teori Marx tentang pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Di zaman kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertengahan ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang menggarap tanah bukan kepunyaannya. Bahkan di zaman modern ini juga ada majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja untuk dijual kepada majikan.

Disamping itu juga ada masyarakat kelas kaya (*the haves*) dan kelas masyarakat tak berpunya (*the have not*). Semua kelas-kelas masyarakat ini dianggap Marx timbul sebagai hasil dari kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut pengamatan Marx, di seluruh dunia ini di sepanjang sejarah, kelas yang lebih bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Sekarangpun (maksudnya di masa Marx) tak terkecuali, tetap ada perjuangan kelas. Dengan anggapan seperti ini Marx meramal bahwa kaum proletar yang terdiri dari para buruh akan bangkit melawan kesewenang-wenangan kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa. Bagaimana Marx menganggap bahwa kaum proletar dihisap dan diproses oleh para pemilik modal? Teori yang digunakan untuk menjelaskan penindasan tersebut adalah teori lebih (*theory of surplus value*), yang sebenarnya berasal dari kaum klasik sendiri.

Menurut pandangan kaum klasik (Ricardo), nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang tersebut, yang di dalamnya sudah termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami (*natural wages*). Upah alami yang diterima oleh para buruh hanya cukup sekedar penyanggah hidup secara subsistem, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok-pokok saja. Padahal nilai dari hasil kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih (*surplus value*)³⁴, dinikmati oleh para pemilik modal. Makin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal, yang bagi Marx berarti makin besar penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atau kaum buruh.

Di sini tampak perbedaan yang sangat nyata antara Marx dan Smith dalam memandang persaingan. Kalau Smith menganggap persaingan bebas sebagai prasyarat bagi terbentuknya masyarakat sejahtera, sebaliknya Marx memandangnya sebagai penyebab terjadinya konsentrasi-konsentrasi ekonomi atau monopoli. Kompetisi dinilai Marx mengandung sesuatu daya yang kalau tidak diawasi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perusahaan-perusahaan

argumentasi Marx, jumlah kaum nestapa ini akan semakin besar. Sebagai langkah antisipasi, Marx menganjurkan agar sistem liberal yang menyebabkan kaum buruh menderita tersebut harus diperbaiki, atau lebih tepat lagi, diganti dengan sistem sosialis yang lebih “berpihak” pada golongan kaum buruh. Dari segi *ekonomi*, Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pembangunan dalam sistem kapitalis sangat bias terhadap pemilik modal. Untuk bisa membangun secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan perombakan struktur melalui revolusi sosial. Jika langkah ini berhasil, maka langkah berikutnya yang harus diambil ialah penataan kembali hubungan produksi (khususnya dalam sistem pemilikan tanah, alat-alat produksi dan modal). Menurut Marx, hanya atas dasar hubungan yang lebih manusiawi ini pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan rakyat. Atas pandangan yang sangat skeptis di atas, tidak heran jika Marx meramal bahwa suatu masa sistem kapitalis akan hancur.

³⁴ Sebagaimana yang tertulis oleh Marx dalam *Das Capital* (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Samuel Moore dan Edward Aveling menjadi: *Capital: A Critique of Political Economy* (1984): *The Rate of surplus-value is therefore an expression for the degree of exploitation of labour-power by capital, or of the labourer by capitalist*. Menurut Marx, sebagian dari nilai surplus itu merupakan hak para pekerja, tetapi semuanya dikangangi oleh para pemilik modal. Mereka (para pemilik modal tersebut) telah memakan yang bukan hak mereka. Sebagian dari nilai lebih tersebut kembali ditanamkan untuk investasi, apakah perluasan usaha yang ada atau membuka lapangan usaha baru. Dari hasil investasi ini para pemilik modal akan menerima hasil yang lebih besar. Kekayaan mereka terus menumpuk, sehingga makin lama semakin besar. Akumulasi kapital akan semakin berhasil jika para kapitalis bisa menindas kaum buruh sekeras-kerasnya, yaitu dengan memberikan tingkat upah yang sangat rendah.

besar akan mencaplok yang kecil. Yang lemah akan tergusur dari pasar. Akibatnya jumlah golongan menengah menciut, jumlah kaum proletar akan semakin banyak. Sebagai eksekusi dari persaingan yang tidak sehat tersebut maka sebagian yang kalah tercampak dari pasar. Mereka yang tergusur dari pekerjaan semula akan berkumpul di pusat-pusat industri, membentuk perkampungan-perkampungan kumuh. Tetapi adanya pemusatan para penganggur ini justru menguntungkan kaum kapitalis, sebab mereka bisa dijadikan sebagai cadangan tenaga kerja murah. Dengan banyaknya orang yang antri mencari pekerjaan, maka kaum buruh yang "cukup beruntung memperoleh pekerjaan" walau dengan upah sangat rendah tersebut tidak akan bisa macam-macam. Kalau mereka membuat ulah, dengan segera mereka bisa dipecat (PHK) dan seribu orang siap menggantikannya. Akibat yang lebih nyata dari keadaan ini: kehidupan buruh kian lama semakin tergenteng. Tetapi dengan praktek "gencet menggencet" seperti ini siapa sesungguhnya yang rugi? Kaum buruh jelas rugi, sebab mereka hanya bisa memperoleh nafkah sekedar penyambung hidup belaka. Bagaimana dengan pemilik modal? Pada mulanya dengan menekan upah buruh mereka memang untung. Tetapi dengan jumlah buruh yang sangat banyak, sedang pendapatan mereka sangat rendah, siapa yang akan membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik? Karena daya beli masyarakat rendah, barang-barang yang dihasilkan menjadi tidak laku. Pabrik-pabrik terpaksa tutup. Semua ini bukan karena salah siapa-siapa, melainkan karena tingkah kaum kapitalis sendiri. Lebih lanjut Marx menganalisis: jika pabrik-pabrik pada tutup, pengangguran akan semakin merajalela, yang akan membawa kekalutan pada masyarakat. Marx meramal akan datang suatu masa, di mana terjadi krisis besar-besaran, yang akan mengakhiri riwayat sistem kapitalis.

Dari setiap argumen yang dilontarkan Marx di atas jelas sekali bahwa ide tentang konflik selalu ditekankan: konflik antara ideal dan realitas; antara kapital dan labor; juga antara pertumbuhan dan stagnasi. Dari setiap konflik akan muncul perubahan, dan untuk alasan ini Marx berpendapat bahwa sistem kapitalisme mesti diganti dengan sistem lain di mana konflik diganti dengan harmoni atau keselarasan etis, sosial dan ekonomi. Proses pembangunan melalui konflik merupakan proses dialektik.³⁵ Proses ini mempunyai basis dalam pembagian masyarakat atas kaum pekerja dan kapitalis. Bagi Marx, pangkal dari semua perubahan adalah karena dilakukannya penghisapan atau eksploitasi dari para kapitalis terhadap kaum buruh. Eksploitasi terhadap buruh tersebut telah memungkinkan terjadinya akumulasi kapital di pihak pemilik modal, tetapi menyebabkan pemiskinan di kalangan buruh. Perbedaan yang sangat menyolok antara pemilik kapital dan kaum proletariat sebagaimana dijelaskan di atas akan membawa ke arah revolusi sosial. Bagaimana revolusi sosial tersebut terjadi sebagai akibat dilakukannya eksploitasi terhadap labor. Uraian tentang dasar kritik-ekonomi politik di atas dapat dijadikan kerangka teoretik dan kemudian membatasi sekaligus sebagai alat analisa dan verifikasi terhadap logika perkembangan masyarakat dalam menyusun teori negara menurut Marx.

Sejarah Kapitalisme Eropa dan Asia³⁶

Kalau kita melihat perkembangan kapitalisme sepanjang sejarah, ternyata kapitalisme dizaman yang satu berbeda dengan kapitalisme dizaman lainnya. Inggris misalnya, sebagai negara kapitalisme pertama mengembangkan diri bedasar prinsip kapitalisme liberal. Prinsip liberal ini diperjuangkan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Di dalam negeri, para pengusaha Inggris ketika itu mati-matian membela prinsip persaingan bebas. Mereka menolak campur tangan

³⁵ Bagi Marx, dialektika sejarah merupakan suatu keniscayaan: sesuatu yang pasti bakal terjadi. Yang jelas, jika kaum proletar sudah tidak tahan lagi, mereka akan melancarkan revolusi. Para pekerja akan menghancurkan pabrik-pabrik dan merusak segala milik kaum kapitalis. Tetapi jika ini terjadi, semua pihak akan rugi; baik kaum kapitalis maupun mereka sendiri. Sebab, jika pabrik-pabrik hancur, berarti mereka akan tergusur dari lapangan kerja. Untuk menghindari tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak, di sinilah peran kaum komunis diharapkan. Menurut Marx, kaum komunis yang memperjuangkan nasib kaum proletar harus menuntun revolusi yang dilancarkan kaum proletar ke arah yang benar, dan revolusi harus dilancarkan sebaik-baiknya.

Agar revolusi berjalan sukses, Marx menganjurkan agar kaum komunis mendukung setiap gerakan melawan tatanan sosial politik sistem kapitalis. Kaum proletar yang sudah sangat menderita dan tidak memiliki apa-apa di bawah sistem kapitalis tidak akan kehilangan apa-apa dalam memperjuangkan revolusi. Bagi Marx, untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri kaum buruh di seluruh negeri harus bersatu memperjuangkan sebuah sistem baru yang lebih berpihak kepada kaum buruh, yaitu sistem sosialis atau komunis.

³⁶ Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1991) h. xvi-xx.

negara. Pemerintah ikut campur hanya sebagai wasit dan menjaga supaya prinsip persaingan bebas ini tidak dilanggar. Dengan demikian, borjuasi Inggris ketika itu memang menjadi pejuang-pejuang bagi tegaknya sistem politik yang demokratis. Inilah yang dianggap oleh Yoshihara sebagai semangat kapitalis yang tulen yang tidak ersatz.

Di dunia internasional, Inggris adalah negara pertama yang melaksanakan revolusi industri. Dengan demikian posisinya sebagai negara industri sangat unggul dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Dalam keadaan seperti ini, tidak mengherankan kalau Inggris menjadi pembela yang gigih bagi sistem perdagangan bebas internasional, karena sistem ini menguntungkan baginya. Dalam bahasa penganut teori ketergantungan, Inggris menjadi negara pusat, sedang negara-negara Eropa lainnya menjadi negara periferi atau negara pinggiran. Keadaan ini membuat negara-negara Eropa lainnya terancam proses periferisasi, seperti yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga sekarang dalam menghadapi negara-negara industri maju. Karena, sesuai dengan hukum besi persaingan bebas, bila negara kuat bersinggungan dengan negara lainnya yang lebih lemah di sebuah pasar yang bersaing, maka negara yang lebih lemah tersebut hampir dapat dipastikan akan menjadi negara satelit dari negara yang kuat tadi. Karena itu, negara-negara Eropa yang terlambat melakukan industrialisasi jelas harus menyusun sebuah strategi pembangunan lain, yang tidak sama dengan Inggris, untuk menghindari diri dari proses periferisasi. Jerman, Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya merupakan negara generasi kedua yang melakukan industrialisasi. Mereka adalah *the late industrializing countries* dibandingkan dengan Inggris.

Diagram 1

Indeks Potensi Kekuatan Industri
pada Beberapa Negara Eropa, 1980 (Nilai Absolut).³⁷

Inggris	100
Perancis	22 - 27
Jerman	13 - 16
Austria/ Hongaria	8 - 10
Belgia	7 - 9
Swiss	4 - 6
Spanyol	3 - 5
Swedia	3 - 5
Italia	2 - 3
Belanda	1 - 3
Norwegia	1 - 2
Denmark	0,5 - 1
Polandia	0,5-1
Yunani	< 0,5

Tiga Fase Imperialisme³⁸

Sepanjang beberapa dekade imperialisme telah menjadi bahan perdebatan serius diantara kalangan pemikir dan para pegiat gerakan revolusioner. Beberapa pemikir seperti Hannah Arendt, Eric J. Hobsbawm dan Vladimir Lenin adalah diantara orang-orang yang tercatat sebagai pemikir-pemikir yang meneorisasikan imperialisme. Seorang penggerak revolusi Rusia, Vladimir Ilyich mengaitkan antara imperialisme dengan perkembangan kapitalisme. Bagi Lenin, imperialisme adalah tahapan terkini yang tak terelakkan dalam logika perkembangan kapitalisme. Imperialisme lahir dari suatu krisis kapitalisme dari suatu negeri. Agar keluar dari krisis periodiknya, kapitalisme harus keluar untuk mencari pasar baru, mengekspansi batas-batas negara-bangsa untuk mencari lahan, tenaga kerja, dan bahan-bahan mentah untuk produksi kapitalis yang lebih murah. Dalam pandangan Lenin, imperialisme dicikan oleh lima hal, *pertama*, konsentrasi kapital, baik dalam bentuk konglomerasi maupun monopoli; *kedua*, meleburnya kekuasaan kapital finans, industri dan birokrasi; *ketiga*, ekspor kapital dalam bentuk investasi-investasi industrial, *keempat*, pembagian

³⁷ Sumber Paul Bairoch, *Commerce extérieur et développement économique de l'Europe au XIXe siècle*, Paris, 1976, h. 172. (Dikutip dari Dieter Senghaas, *The European Experience, A Historical Critique of Development Theory*. Leamington Spa/ Dover, New Hamshire, 1985, h. 18)

³⁸ Noam Chomsky, *Neo Imperialisme Amerika Serikat* (Yogyakarta: Resist, 2008) h. vii-x.

ekonomi dunia oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan korporasi transnasional melalui kartel internasional; *kelima*, pembagian politik dunia oleh negara-negara maju. Meskipun teori Lenin banyak dikritik, tetapi ia telah meletakkan bangunan teori imperialisme yang penting dalam perdebatan selanjutnya, utamanya pengaitannya dengan kapitalisme dan perkembangan kapital finans.

Pendekatan Lenin atas imperialisme ini salah satunya dikritik oleh Samir Amin, seorang Marxis berkebangsaan Mesir. Bagi Samir Amin, imperialisme bukan merupakan *tahap*, melainkan *inheren* dalam setiap ekspansi kapitalisme. Sepanjang sejarahnya imperialisme telah memasuki dua fase dan sedang memasuki fase yang ketiga.

Fase pertama terjadi pada masa ekspansi kapital Eropa Atlantis yang menghancurkan benua Amerika. Dua aktor utamanya adalah Spanyol dan Inggris. Hasil yang terjadi akibat dari penaklukan kolonialis ini adalah hancurnya peradaban Indian, terjadinya Hispano-Kristenisasi, dan genosida total atas masyarakat Indian, dimana negara Amerika Serikat berdiri diatasnya. Penaklukan ini masih dibumbui oleh kehendak untuk memperadabkan 'dunia lain' dengan dalih agama. Imperialisasi tahap pertama ini pada akhirnya melahirkan sejumlah perlawanan seperti pemberontakan kaum budak di Haiti, serta revolusi Meksiko dan Kuba.

Fase kedua terjadi pada masa revolusi industri Inggris yang berujung pada penaklukan Asia dan Afrika. Penundukan kolonial ini berupaya untuk mencari dan membuka 'pasar baru' bagi perdagangan Eropa. Cecil Jhon Rhodes adalah salah satu figur pendukung gagasan kolonialisme ini, dengan menyatakan bahwa kolonialisme Inggris di Afrika akan menyebabkan ekonomi Inggris bangkit kembali dan menghindarkan revolusi sosial di dalam negeri. Imperialisme fase kedua ini berakibat pada membesarnya jurang ketidakadilan sosio-ekonomi yang terus dihadapi oleh dunia hingga kini. Jika pada tahun 1800-an rasio ketidaksetaraan adalah dua berbanding satu, maka sejak terjadinya kolonialisme hingga saat ini rasio ketidaksetaraan ini menjadi enam puluh berbanding satu, dengan sekitar 20 % dari penduduk dunia yang bisa mengambil keuntungan dari sistem yang terjadi saat ini. Sementara 80 % lainnya hidup dalam ketidakpastian dan ketidaksamaan sosio-ekonomi secara persisten. Imperialisme fase kedua ini menghasilkan perang-perang dunia besar antar kekuatan imperialis untuk mempertahankan koloninya. Namun juga menghasilkan berbagai perlawanan yang terus menentang proyek-proyek imperialis, seperti lahirnya revolusi sosialis di Rusia dan China, dan tumbuhnya berbagai revolusi pembebasan nasional di negara-negara Asia dan Afrika.

Kemerdekaan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika tersebut tidak lantas menghancurkan sistem imperialis itu sendiri. Kekuatan-kekuatan imperialis, yang diantaranya merupakan kekuatan kolonialis lama seperti Belanda, Inggris dan Perancis serta negara kapitalis baru yang muncul pada Abad ke-19 seperti Jerman, Amerika Serikat dan Jepang, tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan 'situasi baru' ini. Kaum imperealisme ini segera mengubah pandangan tradisionalnya bahwa pertumbuhan kapitalis mereka sangat tergantung dari berapa besar wilayah koloni yang mereka ekspansi. Dengan keunggulan yang dimiliki sebagai negara yang maju, kaya raya dan memiliki sumber daya manusia serta teknologi yang tinggi, mereka segera mengubah modus dominasinya menjadi imperialisme baru, imperialisme tanpa koloni.

Saat ini sedang memasuki fase imperialisme ketiga yang ditandai oleh runtuhnya sistem Soviet dan rezim-rezim nasionalis-populis di Dunia Ketiga. Pada dasarnya, tujuan dari imperealisme fase ini masih sama dengan fase-fase sebelumnya, yaitu untuk mengukuhkan dominasi kapital, memperluas dan mengekspansi pasar baru, menjarah sumber daya agraria, dan melakukan supereksplotasi pada tenaga kerja di negara-negara pinggiran. Berbagai wacana ideologis disiapkan untuk mengukuhkan hegemoni imperialisme tahap ketiga ini, diantaranya dengan menggembargemborkan demokrasi, humanitarianisme, hak asasi manusia, pasar bebas dan kesejahteraan, pemerintahan yang bersih dan baik. Tetapi wacana-wacana ini dikerjakan oleh model standar gandum dan hanya dilakukan demi memperlulus akumulasi kapital oleh negara-negara maju pada negara-negara pinggiran.

Fase ketiga ini juga berhadapan dengan suatu zaman yang dicirikan oleh terjadinya persenyawaan yang halus antara menguatnya kekuasaan ekonomi korporasi dengan globalisasi teknologim informasi dan pengetahuan. Berbagai fenomena globalisasi seperti: meningkatnya kekuasaan perusahaan-perusahaan multinasional dan perdagangan global, revolusi informasi dan

ilmu pengetahuan, serta munculnya masyarakat yang berbasis jaringan (*network society*), menguatnya peranan-peranan lembaga keuangan internasional, serta zona-zona perdagangan bebas yang melampaui negara-bangsa, membuat para teoretisi tidak bersepaham satu sama lain dalam memandang tatanan global pada zaman ini. Sebagian mendefinisikan tatanan global ini dengan cara pandang baru, sembari mendeklarasikan suatu zaman 'pos-imperealisme'. Sementara yang lain berpendapat bahwa imperialisme tak pernah berakhir, hanya memakai modus baru dengan motif lama yang tetap sama. Seperti anggur lama yang dituangkan dalam botol baru.

Kelas dan Kapitalisme³⁹

Kritik Marx terhadap konsep negara liberal dan Hegelian perlu dipahami dalam kerangka pemikiran Marx yang lebih luas tentang posisi Indonesia dalam masyarakat, hubungan-hubungan produksi, dan sistem produksi modern yang ia sebut kapitalisme. Pada dasarnya Marx bisa menerima keberadaan individu sebagai organisme yang memiliki kapasitas unik, hasrat dan kepentingan untuk memilih secara bebas. Namun, ia menolak pandangan liberal yang melihat individu sebagai organisme yang abstrak tanpa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang bersifat riil. Ia juga mengkritik kecenderungan menempatkan individu sebagai entitas sosial yang paling utama untuk memahami kehidupan politik dan perilaku negara. (Giddens and Held, 1982). Dalam *Critique Hegel's Philosophy of Right* (1843a). Marx menegaskan, "*man is not an abstract being squatting outside the world. Man is the human world, the state, society*" (h. 131). Keberadaan individu karenanya hanya bisa diterima dalam kaitannya dengan sesama individu lainnya. Individu bukanlah sekumpulan organisme yang bertindak secara otonom yang terlibat aktif dalam produksi dan kehidupan politik, melainkan *human beings* yang hidup dalam jaring-jaring interaksi dan relasi sosial dengan sesama manusia lainnya. Sifat-sifat dasar dan perilaku setiap individu merupakan produk sejarah yang bersumber dari berbagai bentuk interaksi sosial antara manusia. Bagi pemikir liberal, perbedaan antara seorang budak dan majikan menjadi tidak penting karena kedua-duanya merupakan individu yang berdaulat. Akan tetapi bagi Marx perbedaan itu sangat nyata karena merupakan produk interaksi antar manusia yang membawa efek ekonomi dan sosial yang bertolak belakang (Marx, 1858).

Kunci untuk memahami perilaku individu adalah struktur kelas. Akan tetapi tidak semua masyarakat mengalami proses pemilahan berdasarkan kelas. Masyarakat tribal, diantaranya, tidak mengenal kelas karena masyarakat tidak mengenal *surplus* dan tidak mengakui pemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Sistem produksi dijalankan secara gotong royong dan dibagikan secara merata kepada setiap anggota masyarakat. Sebaliknya, pemilahan kelas hanya berkembang dalam sistem produksi yang mengejar *surplus* dan mengakui hak-hak pemilikan pribadi. *Surplus* tersebut dicapai setelah kelas sosial non-produktif berhasil menguasai alat-alat produksi dan memaksakan eksploitasi atas kelas sosial produktif (Marx, 1867). Kelas sosial yang menguasai alat-alat produksi menjadi kelas dominan, sementara kelas sosial produktif yang ditindas atas nama keuntungan menjadi kelas sub-ordinan. Pada gilirannya, ketika sistem produksi yang mengejar *surplus* dan mengakui hak-hak properti ini berkembang menjadi sistem produksi yang utama, kelas dominan dan subordinan akan menjadi dua kelas utama yang membelah masyarakat. Hubungan antara kedua kelas ini selalu ditandai oleh eksploitasi dan konflik, yang berpengaruh besar terhadap dinamika sebuah masyarakat. (Marx dan Engels, 1848). Sayangnya tulisan Marx tidak memberikan perhatian cukup serius pada kemungkinan hubungan yang saling tumpang tindih antar penindasan berdasarkan kelas dan penindasan berbasiskan gender. Topik ini baru menjadi perhatian yang cukup serius dalam tulisan Engels, *On Origins of The Family, Private Property and The State*. Menurut Engels (1881), dalam masyarakat kuno yang bersifat *matriarchal* posisi perempuan sedikit lebih dominan dibanding laki-laki. Namun hubungan antara keduanya berubah total setelah pengakuan atas hak-hak pemilikan pribadi. Laki-laki menjadi lebih beruntung karena hak atas warisan memungkinkan laki-laki menguasai hak-hak pemikiran tersebut.

Dalam masyarakat modern struktur kelas merupakan produksi sistem kapitalisme. Sistem ini dibangun berdasarkan hak pemilikan pribadi atas faktor produksi, kebebasan mempertukarkan

³⁹ Lih. Eric Hiarij, *Teori Negara Marxis*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas ISIPOL UGM, Volume 7, Nomor 2, November 2003 (261-282) h. 268-272.

barang dan jasa, dan relasi yang tidak seimbang antara modal dan tenaga kerja. Produksi ditujukan untuk menghasilkan *profit* dan *surplus value* dan bukan untuk kepentingan jangka panjang memuaskan kebutuhan manusia. (Held, 1996; Brown, 1995; MacEwan, 1999). Menurut Marx, sistem ini pada dasarnya mengandung ketegangan-ketegangan yang melekat secara inheren dalam keseluruhan proses menghasilkan *profit* dan *surplus value*. Perkembangan sejarah dalam banyak hal ditentukan oleh hasil ketegangan-ketegangan ini, di antaranya ketegangan hubungan produksi dan teknik produksi dan konflik kelas. Menurut Marx, sistem produksi kapitalisme terdiri dari, setidaknya, dua macam struktur dasar yang disebut Marx dengan *social formation* dan *mode of production* (Marx, 1859). Formasi sosial merupakan sekumpulan kumpulan interaksi dan lembaga-lembaga sosial yang membentuk sebuah masyarakat. Struktur ini meliputi seluruh aspek kehidupan sosial termasuk sistem ekonomi, sistem kekuasaan dan kehidupan budaya yang saling berhubungan satu sama lain. Formasi sosial dibentuk oleh determinasi *mode of production* atau infrastruktur ekonomi atas kesadaran sosial, kehidupan budaya dan sistem politik.

Di lain pihak, infrastruktur ekonomi—atau sering juga disebut *economic base*—merupakan kombinasi dari *relation of production* menyangkut tiga jenis relasi sosial: *pertama*, hubungan-hubungan produksi yang bersifat primer seperti hubungan butuh dan majikan, *kedua*, hubungan-hubungan produktif yang bersifat sekunder seperti serikat buruh, asosiasi pemilik modal dan pola-pola dasar kehidupan keluarga yang berkaitan erat dengan sistem produksi kapitalistik; dan *ketiga* hubungan-hubungan politik dan sosial yang bersumber dari hubungan produksi primer dan sekunder seperti negara, lembaga-lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang mencerminkan hubungan buruh-majikan. Sementara itu, *forces of productions* meliputi alat-alat produksi, teknik produksi, sumber daya alam dan manusia dan pengorganisasian produksi berdasarkan alat, teknik dan sumber daya yang dimiliki. Menurut Marx, infrastruktur ekonomi berpengaruh besar terhadap bentuk dasar masyarakat. Hubungan produksi, diantaranya, menentukan proses menghasilkan *surplus*. Sebuah formasi sosial dapat dikategorikan kapitalistik jika hubungan produksi ini ditujukan untuk merebut *use value* yang dihasilkan pekerja dan mengubahnya menjadi *exchange value* yang dilekatkan pada komoditi tertentu sebelum menghasilkan *profit*. Pemisahan antara kelompok sosial yang menghasilkan *profit*—dan karenanya menguasai kapital—dan kelompok sosial yang hanya mampu menjual tenaga kerjanya bukan saja menentukan hubungan kelas, tetapi juga menjadi basis eksploitasi dan konflik sosial dalam masyarakat modern.

Pemahaman tentang kelas dan kapitalisme membawa implikasi luas terhadap pemahaman Marx dan Engels tentang negara. Bertolak belakang dengan Hegel yang memisahkan negara dari masyarakat (sipil) sembari menempatkan negara sebagai aktor yang otonom dan menentukan. Marx memahami kehadiran negara sebagai bagian dari dinamika yang terjadi dalam masyarakat, terutama hubungan antar kelas sosial yang konfliktual. Marx dan Engels juga berbeda dengan para pemikir liberal yang memusatkan perhatiannya pada ketegangan antara hak-hak individu dan netralitas negara karena ia melihat keberadaan otoritas politik dalam konteks sistem produksi untuk menghasilkan *surplus value* yang menjadi basis material hubungan tidak seimbang antara kelas dominan dan subordinan. Bagi Marx, gagasan tentang negara harus selalu dikaitkan dengan dua faktor: *pertama*, negara merupakan orde politik yang merepresentasikan kepentingan kelas sosial dominan, termasuk didalamnya menjamin keberlangsungan dominasi modal atas tenaga kerja. *Kedua*, negara juga merupakan orde politik yang menjamin keberlangsungan akumulasi kapital tanpa gangguan perjuangan kelas.[]

Hand-Out 37

PEMIKIRAN POLITIK ANTONIO GRAMSCI (1891-1937)

Prawacana

Delapan tahun pasca kelahiran Benito Amilcare Andrea Musollini (1883), tepatnya tanggal 22 Januari 1891 disebuah kota kecil Ales, propinsi Cagliari Sardinia, telah lahir seorang Antonio Gramsci. Ia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, ayahnya (Francesco Gramsci) hanyalah seorang pegawai disebuah kantor panitera daerah di Ghilarza dan Giuseppina Marcias. Pada tahun 1897, tepat di usianya yang keenam tahun, ayahnya diskors dari pekerjaannya tanpa dibayar, atas tuduhan penyimpangan administrasi. Setahun kemudian dia didakwa bersalah atas korupsi, namun motivasi sebenarnya adalah oposisinya terhadap partai politik yang berkuasa di daerahnya, sebab korupsi sudah menjadi wabah yang menjalar dan merupakan tipe umum masyarakat Italia saat itu.

Ditengah himpitan ekonomi keluarganya, gangguan kesehatan yang diderita Gramsci kecil makin menambah pemlasalahan. Ia menderita cacat tulang belakang yang memaksanya untuk berada ditempat tidur dalam waktu yang lumayan lama. Saat beranjak dewasa tubuhnya bungkuk dan sulit berjalan tegak. Ia tumbuh dengan tekanan psikologis, introvert dan paranoid pada penyangga tubuhnya. Diusianya yang ketujuh (1898), Gramsci kecil mulai memasuki masa pendidikan dasarnya di Ghilarza, namun ditahun 1903 ia terpaksa meninggalkan sekolahnya dan bekerja selama dua tahun pada kantor panitera setempat setempat guna menopang ekonomi keluarganya. Kebebasan ayahnya memungkinkan gramsci kecil untuk menyambung kembali studinya yang sempat terputus di kota tetangga Santulussurgiu, hingga pada tahun 1908 ia berhasil menyelesaikan studinya dan meneruskan studi pada liceo senior di Cagliari. Adalah Genarro, seorang sosialis militan yang juga kakaknya yang memperkenalkan Gramsci pada dunia politik. Sejak 1906, Genarro mulai mengirim brosur tentang sosialisme pada adiknya. Ketertarikan Gramsci pada bacaan dan aktivitas kelompok sosialisme bahkan berlanjut hingga ia masuk dunia perkuliahan lewat beasiswa yang didapatnya (1911). Ketertarikan tersebut mendorongnya untuk bergabung dengan Partai Sosialis Italia di tahun 1913. Pada tahun 1914 Gramsci menulis artikel pertamanya bagi surat kabar sosialis *Il Grido del Popolo*, dua tahun kemudian ia mulai bekerja sebagai jurnalis bagi surat kabar Partai Sosialis *Avanti*, serta menulis untuk *Il Grido del Popolo*. Saat terjadi perpecahan di tubuh partai Sosialis Italia, yang kemudian disusul dengan berdirinya Partai Komunis Italia, Gramsci terpilih sebagai pengurus pusat. Seiring dengan berjalannya waktu, perjalanan kehidupan Gramsci sebagai aktivis semakin menunjukkan arah pembentukan kepribadian sebagai aktifis dan minatnya untuk menekuni bidang media massa, kebudayaan, dan kritik ideologi semakin kokoh. Gramsci semakin tertarik mendalami bidang pengembangan pemikiran dan konsepsi ideologi kritik dan counter terhadap ideologi dominan yang dikembangkan oleh negara. Perjalanannya ini mengantarkannya menjadi pemimpin mingguan terbitan kaum sosialis yang sangat disegani di Turin *ordine Nuovo* (1919).

Pada tahun 1922-1924, Gramsci mendarat di Rusia, ia datang sebagai anggota eksekutif komintern internasional komunis. Di sana ia menghabiskan waktu beberapa bulan, ia juga terlibat aktif dalam berbagai macam perdebatan, diskusi, serta menelorkan pemikiran-pemikiran kritisnya tentang sosialisme. Gramsci akhirnya kembali ke Italia dan kemudian terpilih sebagai anggota parlemen Italia dari Partai Komunis (1924). Tahun 1926 adalah tahun yang paling memilukan dalam perjalanan kehidupan Gramsci sebagai aktifis, namun tahun itu juga yang merupakan awal tahun yang membuatnya menjadi pemikir kritis yang besar hingga sekarang. Ia ditahan dan dijatuhi hukuman 20 tahun oleh rezim fasis Mussolini karena dituduh sebagai provokator. Dalam kehidupannya di penjara, berbekal sisa tenaga yang terus digerogeti oleh penyakit yang dideritanya, Gramsci memulai aktifitas penulisan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan cemerlangnya, ia juga banyak berdiskusi dengan para tahanan yang juga tokoh-tokoh komunis. Gramsci akhirnya meninggal di kamar penjaranya karena mengalami pendarahan otak (27 April 1937), namun gagasan revolusioner Gramsci berhasil diselundupkan oleh Tatiana yang kemudian dikirimkan ke Moskow, dan sampai saat ini gagasan cemerlang Gramsci telah memberikan sumbangsih yang begitu berarti bagi perkembangan pemikiran dan teori perubahan sosial.

Konsep Hegemoni Gramsci

"Mengapa dan bagaimana negara modern bisa mendapatkan konsensus atas kekuasaannya terhadap masyarakat". Salah satu pandangan Gramsci yang cukup dominan adalah pandangannya tentang hegemoni yang merupakan ide sentral, orisinal dalam teori sosial dan filsafatnya. Gramsci pernah mengatakan bahwa 'filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia'. (Gramsci, "Selections from Prison Notebooks", 1933) Dasar epistemologi Gramsci tentang hegemoni didasarkan pada kesadaran. Suatu keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembiasaan maupun dengan doktrinasi kedalam atmosfer kesadaran kolektif-massif, yang kemudian memunculkan kesadaran yang relatif baru⁴. Hegemoni merupakan kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas tertentu, hal yang demikian ini telah terkonstruksi dengan sendirinya pada kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Pandangan Gramsci tentang hegemoni berangkat dari pandangannya bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni menegaskan hubungan dominasi dengan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Jika memang demikian halnya, maka hegemoni adalah suatu organisasi konsensus yang standar keberhasilannya ditentukan oleh kesepakatan yang diciptakan.

Konsep hegemoni Gramsci ini diambil secara dialektis melalui dikotomi tradisional yang berkarakteristik pemikiran Italia, yakni dari Machiavelli (force), Pareto (Consent), serta Lenin (Strategy). Hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial-politik yang dalam terminologi Gramsci disebut 'moment', dimana filsafat dan praktik sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari relitas yang menyebar dalam masyarakat melalui lembaga dan manifestasi perorangan, hal tersebut dapat berbentuk moralitas, adat, budaya, religi, prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari kalangan intelektual. Dalam hal ini Gramsci mencoba memperluas pengertian hegemoni sehingga tidak hanya menjelaskan relasi antar kelas-kelas politik (ruling class/ ruled class), akan tetapi relasi-relasi sosial yang lebih luas, seperti relasi gender, ras, agama bahkan gaya hidup.

Konsep 'hegemoni' tidak hanya berkaitan dengan dominasi politik, berupa 'kekuatan' (force), tetapi juga dengan dominasi lewat budaya, termasuk dominasi bahasa. Di dalam sebuah sistem kekuasaan tidak hanya diperlukan 'kekuatan' (senjata, militer), tetapi diperlukan juga 'penerimaan publik' (public consent) yang diperoleh lewat mekanisme kepemimpinan kultural

Antonio Gramsci juga membedakan antara dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan moral dan intelektual "suatu kelompok sosial, bisa, bahkan harus, menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut); kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaan tetap berada ditangan kelompok, mereka harus tetap memimpin". Makna strategi (sebagaimana menurut Lenin) diubah oleh Gramsci menjadi sebuah konsep hegemoni yang, seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara, menjadi sarana dalam memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya.

Teori hegemoni Gramsci pada dasarnya merupakan kritik terselubung terhadap reduksionisme dan essentialism yang melekat pada penganut Marxisme maupun pemikiran non-Marxisme, yakni konsep yang mereduksi dan menganggap esensi terhadap suatu entiti tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. ex; perselisihan tafsiran konsep seputar basic (ekonomi) dan super struktur (ideologi, politik, pendidikan, budaya), dimana tafsiran ortodoks Marxisme percaya bahwa basic ekonomi menentukan superstructure. Akibatnya sosialisme direduksi menjadi gerakan ekonomisme, dan bahkan perjuangan kelas direduksi menjadi hanya kelas ekonomi, sehingga gerakan itu hanya gerakan buruh, dan mengabaikan gerakan lainnya.

Salah satu prinsip lain hegemoni adalah kemampuan sebuah kelas untuk menyuarakan kepentingan kelompok sosial lainnya atas nama dirinya sendiri. Ada dua cara penyuaran ini yang sangat berbeda: pertama, kepentingan-kepentingan kelompok ini diserap untuk menetralsimya agar

tidak berkembang lebih jauh serta dapat diterima kalangan publik. Salah satu kunci memenangkan penerimaan publik adalah melalui penciptaan mekanisme commonsense. Yakni, pandangan umum bahwa sebuah gagasan dari kelompok hegemonis itu alamiah sifatnya, bukan ideologis.

Hubungan kekuasaan

Menurut Herbert Rosinski, kekuasaan merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan esensi manusia, yakni sebagai karakteristik yang khas dalam posisinya terhadap alam. Keberadaan manusia merupakan suatu makhluk yang spesifik karena meskipun dia diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan biologis, tetapi Lenin tidak sepakat dengan Marx bahwa untuk menuju sosialisme harus menunggu matangnya kapitalisme yang akan memunculkan revolusi proletar secara alamiah. Bagi Lenin, revolusi tidak harus ditunggu, tapi harus diusahakan dan direayasa. Untuk itulah maka Lenin tidak segan menggunakan kekuatan bersenjata guna mewujudkan revolusi.

Dengan demikian, Lenin mengugurkan pemikiran Marx, bahwa revolusi tergantung dari proses ekonomi. Bagi Lenin, revolusi hanya tergantung dari proses politik yang akan dilakukan (Sosialisme Marx dimata revisionis). Kehidupan manusia tidak sepenuhnya diprogram oleh keberadaan biologisnya. Dalam hal ini manusia mempunyai kemampuan untuk bertindak (action). Rosinski juga menyebut manusia sebagai Homo Agent, yaitu makhluk yang mempunyai self programming. Dengan pengertian yang luas, kekuasaan merupakan kemampuan manusia untuk berbuat sesuatu yang lain dan yang lain. Inilah yang menurut Giafranco Poggi disebut sebagai homo Potens. Bagi Poggi, kekuasaan merupakan sifat kritis dalam hubungan antara manusia dengan alam. Dalam hal kekuasaan sosial, Poggi juga sependapat dengan Max Weber yang mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu kemungkinan dalam rangka hubungan-hubungan sosial untuk melaksanakan keinginan seseorang, sungguhpun terdapat tantangan, dan tidak tergantung kepada dasar-dasar dari kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Catatan penting Gramsci mengenai kekuasaan berangkat dari pernyataan bahwa tingkat perkembangan suatu kekuatan material produksi menjadi dasar bagi munculnya berbagai kelas sosial, yang masing-masing mempunyai kelas khusus dalam produksi. Dalam hal ini Gramsci mencoba menganalisa mengenai hubungan berbagai kekuatan politik. Disini Gramsci membaginya pada tiga fase perkembangan kesadaran politik kolektif dan organisasi. Dua fase pertama adalah fase ekonomi-korporasi, sedang yang ketiga adalah fase hegemonik. Fase ekonomi-korporasi lebih didasari oleh adanya tuntutan persamaan hak, kepentingan bersama semua kelas, akan tetapi masih dalam batasan bidang ekonomi. Sedangkan fase ketiga adalah tahapan pertarungan ideologi-ideologi yang ada hingga salah satunya, ataupun persekutuan ideologi tersebut dapat memenangi dan menyatukan tujuan ekonomi, politik, moral, intelektual, sehingga perjuangan berlangsung pada aras universal, bukan lagi sekedar korporasi. Hal yang demikian ini, pada akhirnya dapat menciptakan hegemoni kelompok sosial yang kuat atas kelompok lain yang ada dibawahnya. Bagi Gramsci, suatu kelas akan menjadi hegemoni jika mampu melewati fase korporasinya, dan berhasil menyatukan kepentingan kelas dan kelas sosial lain dengan kepentingan sendiri, serta berhasil menjadi representasi penuh dari kekuatan sosial yang ada.

Nasional-kerakyatan

Bagi Gramsci, suatu kelas tidak akan mampu mencapai kepemimpinan nasional, dan menjadi kelas yang hegemonik, jika mereka masih bersifat eksklusif, membatasi diri pada kepentingan kelasnya. Disini, mereka dituntut untuk menampung dan mempertimbangkan aspirasi dan perjuangan dari kelas-kelas dibawahnya, ataupun dari orang-orang yang tidak mempunyai karakter kelas. Dalam hal ini, Gramsci menjelaskan peran yang menentukan yang dimainkan oleh Jacobin dalam menciptakan bangsa Prancis, ia menekankan watak kerakyatan dari hegemoni yang mereka bangun, mengorganisir kehendak kolektif nasional-rakyat, dan mendirikan negara-negara modern. Dalam situasi yang demikian ini, hegemoni tak lagi hanya mempunyai dimensi kelas, tetapi juga mempunyai dimensi nasional-kerakyatan. Penyatuan berbagai perjuangan dan gerakan dalam prosesnya tidak terlepas dari perubahan pandangan dan kesadaran masyarakat yang terlibat, yang menurut Gramsci, terlibat dalam reformasi moral dan intelektual. Gagasan nasional-kerakyatan mungkin paling tepat dan akan mudah dipahami sebagai penjelasan akan suatu bentuk dari 'blok

historis, antara aspirasi nasional dengan aspirasi rakyat dalam sebuah formasi dimana kaum intelektual memainkan peran perantara penting didalamnya.

Revolusi Pasif

Perbedaan yang mencolok antara revolusi Prancis dan Risorgimento Italia mendorong Gramsci untuk mengembangkan konsep revolusi pasif (Passive revolution). Dalam revolusi Prancis, Jacobin mampu memobilisir rakyat untuk melakukan perjuangan revolusioner dengan cara mendukung tuntutan kaum tani dan membangun aliansi dengan mereka. Apa yang dilakukan oleh Jacobin sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Cavour dan Partai Moderat dalam penyatuan Italia dan naiknya kaum borjuis pada puncak kekuasaan yang sama sekali tidak melibatkan perjuangan rakyat. Mereka hanya menggunakan negara Piedmont dengan tentara, serta kerajaan dengan birokrasinya. Tidak ada upaya untuk mengkoordinasikan tuntutan ataupun kepentingan-kepentingan kaum buruh, tani ataupun kelas-kelas dibawahnya.

Risorgimento mengambil bentuk 'revolusi dari atas', yang digerakkan melalui agen negara Piedmont. Strategi kaum borjuis Italia ini mempunyai karakter revolusi pasif, dimana kelompok moderat hanya membangun hegemoni mereka melalui partai aksi, tidak mencoba membangun hegemoni atas kaum tani, buruh, dan mayoritas penduduk. Dalam revolusi pasif, negara mempunyai peran yang sangat signifikan, dimana negara menggantikan peran kelompok sosial dalam memimpin perjuangan pembaruan. Hal ini berarti negara telah menggantikan, bahkan telah merebut hegemoni kelas ataupun kelompok tertentu. Upaya penjinakan rakyat pada masa Risorgimento juga tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan rakyat cenderung herois, seperti yang terjadi di kota Milan dan Roma tahun 1848-1849 dan ekspedisi Garibaldi ke Sisilia tahun 1860. Menurut Gramsci, revolusi pasif dalam Risorgimento tidak mempunyai kualitas nasional-kerakyatan. Dalam hal ini, kaum borjuis Italia hanya mampu mencapai tingkat hegemoni yang terbatas. Bagi Gramsci, munculnya fasisme pada tahun 1920-an di Italia juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah Risorgimento.

Konsep revolusi pasif masih dapat diperluas sehingga mencakup revolusi sosialis disamping revolusi borjuis. Dalam transisi menuju sosialisme ini, strategi kelas pekerja harus mempunyai karakter revolusi anti-pasif (anti-passive revolution), yang dibangun dengan memperluas jaringan perjuangan kelas dan demokrasi kerakyatan dengan tujuan memobilisasi seluruh lapisan masyarakat dalam memperjuangkan reformasi demokrasi. Tentunya strategi anti-pasif ini masih membutuhkan analisa yang mendalam terhadap masyarakat sipil, pembagian wilayah perjuangan kelas, dan demokrasi kerakyatan. Masyarakat Sipil, Negara, dan Watak Kekuasaan

Masyarakat sipil adalah suatu wadah perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi kerakyatan, dengan kata lain, masyarakat sipil juga memberikan kesempatan bagi kelompok sosial yang dominan untuk mengatur konsensus dan hegemoni. Bagi kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah (subordinate), masyarakat sipil juga merupakan wadah bagi mereka dalam menyusun perlawanan dan membangun hegemoni alternatif-hegemoni tandingan (Counter hegemony).

Gramsci juga membedakan masyarakat sipil dengan masyarakat politik: "apa yang bisa kita lakukan, untuk saat ini, adalah menyatukan dua 'tingkat' suprastruktur utama; yang pertama bisa disebut 'masyarakat sipil', yaitu bagian dari kelompok yang disebut 'private', dan kedua 'masyarakat politik' atau 'negara'. Keduanya disatu sisi, memiliki fungsi-fungsi 'hegemoni' yang dilakukan oleh kelompok dominan dalam masyarakat, dan, disisi lain, juga mempunyai fungsi-fungsi 'dominasi langsung' yang dilakukan oleh negara dan pemerintahan 'hukum'. Masyarakat sipil disini mencakup semua apa yang disebut dengan organisasi swasta (private) seperti gereja, serikat dagang, partai politik, dan asosiasi budaya yang berbeda dari proses produksi dan aparat negara. Namun Gramsci memisahkan salah satu perangkat lembaga-lembaga tersebut dari organisasi masyarakat sipil, yakni aparat yang membentuk negara, hal ini karena mereka dinilai mempunyai monopoli yang bersifat koersif.

Dalam beberapa paragraf dalam Prison Notebooks Gramsci juga mengatakan bahwa masyarakat sipil adalah masyarakat etika atau moral, karena dalam masyarakat sipil-lah hegemoni kelas dominan dibangun melalui mekanisme perjuangan politik dan ideologis. Istilah masyarakat politik dipakai Gramsci bagi hubungan-hubungan koersif yang terwujud dalam berbagai lembaga Negara - angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum, dan penjara, semua departemen yang mengurus pajak, keuangan, perdagangan, industri, keamanan, sosial, dll, yang tergantung pada

upaya akhir dari efektifitas monopoli negara dalam melakukan tindakan koersif. Dalam konteks yang demikian ini, aparat negara memegang peranan yang begitu dominan dalam menciptakan kesepakatan.

Gramsci juga menilai bahwa negara merupakan suatu kompleks dari aktifitas praktis dan teoritis dimana kelas penguasa tidak hanya mempertahankan dominasinya namun juga memperoleh persetujuan dari kelompok lain yang berada dibawah kekuasaannya. Hal ini sejalan dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa negara adalah masyarakat sipil ditambah dengan masyarakat politik. Dengan kata lain, hegemoni yang dilindungi tameng koersif. Gramsci menyebutnya negara integral yang dipertentangkan dengan negara dalam arti umum, yang kadang disebut juga 'negara sebagai pemerintahan' (stato-governo) disamping istilah 'masyarakat politik'. Gramsci mencoba membedakan antara masyarakat sipil (wilayah hegemoni) dan Negara (wilayah koersif), Gramsci juga menggunakan negara dalam arti umum dan negara dalam arti kekuasaan.

Hubungan sosial dari masyarakat sipil adalah hubungan kekuasaan seperti halnya hubungan koersif negara, walaupun dengan cara yang berbeda. Kekuasaan dijalankan oleh kelas hegemoni atas kelas-kelas yang dikuasainya disamping kekuasaan negara yang menjalankan dominasinya dalam negara. Kekuasaannya menjelma dalam aparat koersif negara yang tersebar dalam masyarakat sipil. Marxisme klasik, termasuk Leninisme, memandang bahwa kekuasaan itu terpusat pada negara dan berada dibawah control penuh kelas pemilik modal. Watak kekuasaan pun masih sarna dengan sebelumnya ; kekuasaan masih berada dalam genggamannya negara. Namun, konsep Gramsci tentang negara integral menunjukkan arah yang berbeda dalam menjelaskan watak kekuasaan yang dianggapnya sebagai 'hegemoni yang dilapisi kekerasan,. Baginya, kekuasaan harus dipahami sebagai suatu hubungan. Termasuk hubungan sosial dalam masyarakat sipil dalam membentuk masyarakat sipil, demikian juga aparat negara yang bersifat koersif. Gramsci menginginkan kekuasaan ini merata kedalam sejumlah lapisan masyarakat sipil agar tercapai tingkat hegemoni yang kuat dalam masyarakat sipil.[]



Antonio Gramsci (22 January 1891 – 27 April 1937) was an Italian writer, politician, political theorist, sociologist, and linguist. He was a founding member and onetime leader of the Communist Party of Italy and was imprisoned by Benito Mussolini's Fascist regime. Gramsci was one of the most important Marxist thinkers in the 20th century. His writings are heavily concerned with the analysis of culture and political leadership and he is notable as a highly original thinker within modern European thought. He is renowned for his concept of cultural hegemony as a means of maintaining the state in a capitalist society.

Hand-Out 38

TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI; MENGENAL HEGEMONI DARI KACAMATA ANTONIO GRAMSCI

Antonio Gramsci lahir di Sardinia, Italia, pada 22 Januari 1881. Ia menyelesaikan studinya di Universitas Turin di fakultas sastra dan buku-buku seperti; *Letters from prison*, *The modern prince and other political writings* dan *New Edinburg review*, *three special Gramsci issues* merupakan karya-karya yang telah di lahirkan oleh tokoh yang terfokus pada "dialektika" Marxis.

Memahami pentingnya studi Gramsci mengenai hegemoni

Tulisan-tulisan Gramsci mengenai hegemoni menjadi menarik karena sebelum Gramsci, konsep hegemoni belum menjadi konsep yang sentral dalam teori sosial marxis (Konsep yang menjadi fokus perhatian serius gramsci). Saya mengutip bahwa ada beberapa hal yang menarik dan mempengaruhi Gramsci dalam pandangannya mengenai hegemoni, diantaranya: 1) Konsep Gramsci mengenai negara dan hegemoni, 2) Pengaruh historis Italia pada masa itu terhadap pandangan Gramsci mengenai hegemoni, 3) Penafsiran Gramsci mengenai metode Marx terhadap negara dan hegemoni, 4) Pandangan Gramsci yang memiliki perbedaan dengan pandangan Marxist lainnya mengenai hegemoni.

Dalam perjalanannya, Gramsci dimunculkan sebagai pemikir kuat mengenai hegemoni karena pada metode marxisme, negara dan hegemoni belum tersistematiskan. Konsepsi Marxis tentang kontrol negara sering diambil dari kritik Marx terhadap Hegel, namun ada beberapa dasar teoritis dari Marx yang dapat dijadikan basis argumentasinya terhadap kontrol negara. Marx memandang kondisi material dari masyarakat sebagai basis dari struktur sosial dan kesadaran manusia. Maka, bentuk negara pun muncul dari hubungan produksi, dan bukan dari keinginan manusia untuk berkollektif. Sebuah formulasi yang kontras dari apa yang di sebutkan Hegel, suatu bentuk negara "rasional" yang di bangun atas dasar hubungan etis dan harmoni yang ada dalam elemen-elemen masyarakat.

Marx yang menolak pernyataan bahwa negara merupakan kesepakatan dari seluruh masyarakat menyebutkan identifikasinya terhadap negara kapitalis sebagai suatu masyarakat kelas, yang didominasi oleh borjuis, karenanya negara pada keadaan itu merupakan ekspresi politik dari kelas dominan. Dan seperti apa yang di terjemahkan Lenin dari metode Marx tersebut, negara merupakan kekuatan pengatur kelas. Gramsci memaparkan bagaimana konsep Marx tentang kontrol negara tidak berjalan baik di Eropa Barat. Gramsci memakai konsep hegemoni untuk menjabarkan dan menganalisa bagaimana masyarakat kapitalis modern diorganisir. Menurutnya, kaum borjuis Inggris telah relatif sukses memimpin hegemoni pada masyarakat sipil, pada negara dan ekonomi. Walaupun secara kontras, para borjuis Italia selatan tidak dapat menjalankan konsep hegemoni di Italia.

Oleh karena itu hegemoni negara haruslah dipahami dari analisis terhadap kelas dominan dalam suatu negara. Seluruh aspeknya haruslah diperhatikan, sebagai kekuatan (force) lalu ditambah persetujuan (consent). Lebih lanjut, hegemoni menurut Gramsci merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik, dalam terminologinya disebut 'momen' dimana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang: dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh dari 'spirit' ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator.

Negara dan Hegemoni menurut Gramsci

Perlu ditegaskan kembali bahwa upaya teoritis yang dilakukan oleh Gramsci merupakan produk dari pencarian hubungan antara teori dan praktek dalam Marxisme. Konsep Gramsci sebagai seorang Marxis tentang negara dan hegemoni merupakan bagian dari praktek revolusioner yang dilakukannya. Ia mengadopsi dikotomi tradisional secara dialektis dari Niccolò Machiavelli hingga Pareto dan sebagian lagi ia ambil dari Lenin. Pada kenyataannya Gramsci "menggodok" konsep hegemoni guna menjawab pertanyaan-pertanyaannya pada masa itu. Tentang kegagalan kaum

proletariat barat yang gagal menciptakan “revolusi bolshevik II” sehingga di perlukannya negara integral atau di perluas dan kondisi politik italia yang “menurutnya” memerlukan revolusi. Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut “eugemonia”, sebagaimana di kemukakan encyclopedia britanica. dalam prakteknya di Yunani, “eugemonia” di terapkan untuk menunjukan dominasi posisi yang di klaim oleh negara-negara kota. Hegemoni menebalkan makna sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota dengan negara yang lain yang berhubungan secara longgar maupun ketat terintegreasi dalam negara pemimpin. Dalam konteks politik internasional, perang dingin antara amerika serikat dan Uni Sovyet merupakan perjuangan untuk menjadi kekuatan hegemonik dunia.

Konsep hegemoni Gramsci dapat di elaborasikan dari argumennya tetang basis da supremasi kelas:

Supremasi sebuah *kelompok* mewujudkan diri dalam dua hal cara, sebagai “dominasi” dan sebagai “kepemimpinan intelektual dan moral”, dan di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk menghancurkan atau menundukan mereka, bahkan mungkin menggunakan kekuatan bersenjata; di lain pihak, kelompok-kelompok memimpin kelompok kerabat atau sekutu mereka. Sebuah kelompok sosial dapat dan bahkan harus sudah menerapkan “kepemimpinan” sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan syarat-syarat utama untuk mendapatkan kekuasaan semacam itu). Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekan kekuasaan, tapi bahkan bila ia sudah memegang kekuasaan penuh di tangannya, dia masih harus “memimpin” juga. (Gramsci, 1976; 57-58)

Kutipan diatas jelas menunjukan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep: *kepemimpinan* (direction) dan dominasi (dominance). Hubungan kedua konsep ini menyiratkan tiga hal:

1. Dominasi dijalankan atas seluruh musuh dan kepemimpinan dilakukan atas segenap sekutu-sekutu
2. Kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menaklukan aparatur negara, atau dalam artian sempit adalah kekuasaan pemerintahan.
3. Sekali kekuasaan negara dapat dicapai maka dua aspek supremasi klas ini, baik pengarahannya atau dominasi tetap berlanjut.

Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kapitalisme bertahan karena kaum buruh menerima keadaan umum ini, dominasi budaya borjuis membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan kekuasaan. Sehingga massa harus di bebaskan dari keterpesonaan pada hegemoni budaya kelas kapitalis sebelum perlawanan yang berhasil terhadap negara bisa terjadi.

Lebih lanjut, ada hal-hal yang di simpulkan oleh gramsci sekitar masalah hegemoni:

1. Hegemoni kelas yang berkuasa terhadap ekls yang dikuasai, sesungguhnya di bangun oleh konsensus bersama, yaitu tentang penerimaan spontan psikologis tantang penerimaan sosiopolitis atau aspek-aspek aturan yang lain.
2. Taylorisme: hegemoni terhadap kaum pekerja, dimana pekerja di jadikan “mesin” yang ber-sistem otomatis dengan segala keistimewaannya. Maka manusia di hubungkan dengan faktor produksi dan efisiensi, yang nantinya akan mengurangi “solidaritas buruh”.
3. Negara Integral: perpaduan dari negara yang di pimpin oleh sekelompok masyarakat politik dan dan kedaulatan civil society, dengan solusi penyatuan alat-alat kekerasan (*means of coercion*) dan alat pendirian kepemimpinan hegemonis (*means of establishing hegemonic leadership*), seperti agama, pendidikan, media dan lain-lain.

Negara (masyarakat politik)	Masyarakat sipil
Kediktatoran	Hegemoni
Aparat pemaksaan (polisi, administrasi, birokrasi dll)	Aparat hegemoni (kebudayaan, politik, ekonomi)
Pemerintahan (negara dalam arti sempit)	Negara dalam arti integral
Negara sebagai aparat kekuasaan	Negara sebagai organisir persetujuan
Dominasi	Kepemimpinan

Akan Selalu Ada Hegemoni

Changes in the international economic structure are two kinds; changes within a structure and changes of structure. Changes within a structure occur within specific categories. A hegemonic leaders willingness and ability to stabilize the international economy, for exemple, is affected as its relative size increase or decrease, even though it may remain in a position of hegemony. More important, changes of structure occur where any middle-or large sized nation changed category. The decline of hegemonic leader into a opportunist, the rise of protectionist free into a spoiler, etc. like two hegemony: united kingdom until 1912 and united states, 1945-1965.

Pernyataan Gilpin diatas menggambarkan adanya pergeseran lempeng politik dalam politik inter nasional yang selalu bergerak, seperti pergeseran hegemoni antara inggris dan Amerika. Hegemoni merupakan sesuatu hal yang tidak dapat di hindari oleh politik internasional, konflik internasional selalu melahirkan kekuatan besar yang akan menjadi "hegemonic power". Hanya saja hegemoni seperti apa yang lebih sedikit merugikan atau bahkan menguntungkan.

Hegemoni yang terjadi pada masa perang dingin merupakan contoh dari hegemoni bipolar yang terjadi lebih dari satu kekuatan hegemon. Penyebaran kekuatan dan pengaruh, menyentuh titik intensitas tertinggi diantara negara Amerika dan Uni Sovyet. Yang jika di biarkan maka akan mencapai titik klimaks berupa perang besar antara kedua negara dan blok sekutunya.

Kekurangan hegemoni ini ialah negara-negara kecil menjadi pion simbol-simbol unjuk pengaruh antara negara yang sedang memperebutkan kekuatan hegemoni. Seperti apa yang terjadi di Vietnam, selain negara tersebut terbelah menjadi dua. Bencana kemanusiaan pun terjadi karena kedua senjata berusaha unjuk kekuatan senjata melalui perang ini.

Namun jika hanya ada satu kekuatan negara hegemoni, maka hal yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. Saat kekuatan hegemon tak memiliki lagi rival seimbang maka kekuatan hegemon ini semakin sewenang-wenang. Kebijakan luar negeri yang destruktif dengan menggunakan dua kekuatan hegemon, seperti yang di sebutkan Gramsci:

1. Means of Coercion: senjata
2. Means of Establishing hegemonic leadership: media

Bahkan kebijakan yang nyata-nyata sewenang-wenang tidak lagi dapat di kontrol dan di gugat karena tidak adanya pihak opositor yang berani bertindak nyata. Seperti yang terjadi pada Amerika serikat yang melakukan Agresi militer ke negara Irak tanpa alasan yang dapat di buktikan, Menduduki afganistan dan mendukung kekejaman negara tidak beradab "Israel" dalam penyerangannya ke Libanon.[]

Hand-Out 39

SEJARAH MAZHAB FRANKFURT; IMAJINASI DIALEKTIS DALAM PERKEMBANGAN TEORI KRITIS

Mazhab Frankfurt⁴⁰

Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Jurgen Habermas, pada 1965 di Heidelberg Mazhab Frankfurt ialah sebuah nama yang diberikan kepada kelompok filsuf yang memiliki afiliasi dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman, dan pemikir-pemikir lainnya yang dipengaruhi oleh mereka. Tahun yang dianggap sebagai tahun kemulaian Mazhab Frankfurt ini adalah tahun 1930, ketika Max Horkheimer diangkat sebagai direktur lembaga riset sosial tersebut. Beberapa filsuf terkenal yang dianggap sebagai anggota Mazhab Frankfurt ini antara lain Theodor Adorno, Walter Benjamin, dan Jurgen Habermas. Perlu diingat bahwa para pemikir ini tidak pernah mendefinisikan diri mereka sendiri di dalam sebuah kelompok atau 'mazhab', dan bahwa penamaan ini diberikan secara retrospektif.

Walaupun kebanyakan dari mereka memiliki sebuah ketertarikan intelektual dengan pemikiran neo-Marxisme dan kritik terhadap budaya (yang di kemudian hari memengaruhi munculnya bidang ilmu Studi Budaya), masing-masing pemikir mengaplikasikan kedua hal ini dengan cara-cara dan terhadap subyek kajian yang berbeda.

Ketertarikan Mazhab Frankfurt terhadap pemikiran Karl Marx disebabkan antara lain oleh ketidakpuasan mereka terhadap penggunaan teori-teori Marxisme oleh kebanyakan orang lain, yang mereka anggap merupakan pandangan sempit terhadap pandangan asli Karl Marx. Menurut mereka, pandangan sempit ini tidak mampu memberikan 'jawaban' terhadap situasi mereka pada saat itu di Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama dan meningkatnya kekuatan politik Nazi, Jerman yang ada pada saat itu sangatlah berbeda dengan Jerman yang dialami Karl Marx. Sehingga jelaslah bagi para pemikir Mazhab Frankfurt bahwa Marxisme harus dimodifikasi untuk bisa menjawab tantangan jaman.

Patut dicatat bahwa beberapa pemikir utama Mazhab Frankfurt beragama Yahudi, dan terutama di perioda awal secara langsung menjadi korban Fasisme Nazi. Yang paling tragis ialah kematian Walter Benjamin, yang dicurigai melakukan bunuh diri setelah isi perpustakaanya disita oleh tentara Nazi. Beberapa yang lainnya, seperti Theodor Adorno dan Max Horkheimer terpaksa melarikan diri ke negara lain, terutama Amerika Serikat. Contoh karya-karya terkenal yang dihasilkan para pemikir Mazhab Frankfurt antara lain *Dialectic of Enlightenment*, *Minima Moralia*, *Illuminations*.

Sejarah Mazhab Frankfurt

Mazhab Frankfurt mengumpulkan para pembangkang Marxis, para kritikus keras kapitalisme yang percaya bahwa beberapa orang yang dianggap sebagai pengikut Marx telah membeo, menirukan beberapa cuplikan sempit dari gagasan-gagasan Marx, biasanya dalam membela partai-partai komunis atau Sosial-Demokrat ortodoks. Mereka khususnya dipengaruhi oleh kegagalan revolusi kaum pekerja di Eropa Barat setelah Perang Dunia I dan oleh bangkitnya Nazisme di negara yang secara ekonomi, teknologi, dan budaya maju (Jerman). Karena itu mereka merasa harus memilih bagian-bagian mana dari pemikiran-pemikiran Marx yang dapat menolong untuk memperjelas kondisi-kondisi yang Marx sendiri tidak pernah lihat. Mereka meminjam dari mazhab-mazhab pemikiran lain yang mengisi apa yang dianggap kurang dari Marx. Max Weber memberikan pengaruh yang besar, seperti halnya juga Sigmund Freud (seperti dalam kasus sintesis Freudo-Marxis oleh Herbert Marcuse dalam karyanya tahun 1954, *Eros and Civilization*). Penekanan mereka terhadap komponen "Kritis" dari teori sangat banyak meminjam dari upaya mereka untuk mengatasi batas-batas dari positivisme, materialisme yang kasar, dan fenomenologi dengan kembali kepada filsafat kritis Kant dan penerus-penerusnya dalam idealisme Jerman, khususnya filsafat Hegel,

⁴⁰ Tulisan ini diambil dari Martin Jay, *The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute for Social Research 1923-1950*. Berkeley, University of California Press, 1996. Rolf Wiggershaus. *The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significance*. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1995. Jeremy J. Shapiro, "The Critical Theory of Frankfurt", *Times Literary Supplement*, Oct. 4, 1974, No. 3, 787.

dengan penekanannya pada negasi dan kontradiksi sebagai bagian yang inheren dari realitas. Sebuah pengaruh penting juga datang dari penerbitan Manuskrip Ekonomi-Filsafat dan Ideologi Jerman karya Marx tahun 1930-an yang memperlihatkan kesinambungan dengan Hegelianisme yang mendasari pemikiran-pemikiran Marx: Marcuse adalah salah satu orang yang pertama mengartikulasikan signifikansi teoretis dari teks-teks ini.

Fase Pertama

Pengaruh intelektual dan fokus teoretis dari generasi pertama dari para teoretikus Kritis Mazhab Frankfurt: Institut ini membuat sumbangan-sumbangan penting dalam dua bidang yang terkait dengan kemungkinan-kemungkinan subyek manusia yang rasional, yaitu individu-individu yang dapat bertindak secara rasional untuk bertanggung jawab atas masyarakat dan sejarah mereka sendiri. Yang pertama terdiri atas fenomena sosial yang sebelumnya dianggap dalam Marxisme sebagai bagian dari "superstruktur" atau sebagai ideologi: struktur-struktur kepribadian, keluarga dan otoritas (penerbitan bukunya yang pertama diberi judul Studi tentang Otoritas dan Keluarga), dan ranah estetika dan budaya massa. Studi-studi ini juga melihat kepedulian bersama di sini dalam kemampuan kapitalisme untuk menghancurkan prakondisi-prakondisi Kritis, kesadaran revolusioner. Ini berarti tiba pada kesadaran canggi tentang dimensi kedalaman di mana penindasan sosial mempertahankan dirinya sendiri. Ini juga merupakan awal dari pengakuan teori Kritis terhadap ideologi sebagai bagian dari dasar-dasar struktur sosial. Institut ini dan berbagai pihak yang ikut bekerja sama dengannya mempunyai dampak yang hebat terhadap ilmu sosial (khususnya Amerika) melalui karya mereka *The Authoritarian Personality* (Kepribadian yang Otoriter), which melakukan penelitian empirik yang luas, dengan menggunakan kategori-kategori sosiologis dan psikoanalisis, untuk menggambarkan kekuatan-kekuatan yang mendorong individu untuk berafiliasi dengan atau mendukung gerakan-gerakan atau partai-partai fasis.

Teori Kritis dan Sejarah

Mazhab Frankfurt atau Mazhab Teori Kritis yang sudah mulai lazim dikenal di kalangan akademis, sesungguhnya adalah mazhab pemikiran di Jerman yang muncul sekitar 1923. Disebut Mazhab Frankfurt, karena pada awalnya mazhab ini berasal dari Universitas Frankfurt/*Institut für Sozialforschung* (Institut Penelitian Sosial) yang merupakan jurusan resmi di universitas tersebut.oleh sebuah lembaga yang bernama

Mark Horkheimer adalah filsuf generasi pertama dari Mazhab Frankfurt. Ia bahkan sempat menjabat sebagai Direktur *Institut für Sozialforschung*. Walaupun Horkheimer bukan pemikir paling cemerlang dari mazhab ini, tapi lewat Horkheimerlah, Mazhab Frankfurt memiliki justifikasi untuk menjadi mazhab tersendiri dalam ilmu pengetahuan.

Generasi pertama Mazhab Frankfurt adalah Mark Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin dan Herbert Marcuse. Sedangkan generasi kedua dari Mazhab Frankfurt adalah Jurgen Habermas yang merupakan filsuf paling cemerlang dari mazhab ini.

Kritik Terhadap Positivisme

Masuknya Mazhab Frankfurt ke dalam aliran pemikiran, memiliki arti terjadinya suatu pembalikan tradisi pemikiran sebelumnya, yaitu: positivisme. Pemikiran Mazhab Frankfurt berusaha memperjelas secara rasional kehidupan manusia moderen dan melihat akibat-akibatnya dalam kemanusiaan dan dalam kebudayaan, serta mengkritisi pemikiran-pemikiran abad ke-18 berkaitan dengan penerapan positivisme, masa pencerahan (*aufklärung*) yang menjadikan manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri, tapi diperbudak oleh mesin, sehingga tidak bebas dan merdeka.

Positivisme sebagai paham keilmuan meyakini puncak ilmu pengetahuan manusia adalah ilmu berdasarkan fakta-fakta keras (terukur dan teramati), dan ciri-cirinya antara lain: *pertama*, ilmu adalah bebas nilai; *kedua*, pengetahuan yang absah hanya pada fenomena semesta. Metafisika yang mengandaikan sesuatu di belakang fenomena ditolak mentah-mentah; *ketiga*, semesta direduksi menjadi fakta yang dapat dipersepsi; *keempat*, paham tentang keteraturan peristiwa di alam semesta yang menisbikan penjelasan di luar ketentuan tersebut; *kelima*, semua gejala alam dapat dijelaskan secara mekanikal-determinisme seperti layaknya mesin.

Mazhab Frankfurt tidak bersepeham dengan pandangan ini. Mazhab Frankfurt memandang ilmu pengetahuan moderen yang dilatar-belakangi saintisme atau positivisme sudah menghasilkan masyarakat yang irrasional, ideologis dan terasing.

Bencana Modernitas

Kecuali itu, sebagaimana yang sudah disebut di atas, berkembangnya positivisme dan proyek pencerahan mengubah fungsi tenaga manusia dengan mesin. Hal ini agaknya disadari betul oleh Horkheimer dan Adorno – sebagai dua pemikir Mazhab Frankfurt generasi pertama – di mana dirasakan kemenangan yang diperoleh merupakan kemenangan yang penuh bencana.

Hal yang juga mengerikan dari proyek pencerahan dan akibat positivisme adalah menggunakan alam sebagai instrumen untuk menindas sesama manusia. Krisis lingkungan juga adalah akibat buruk dari kecenderungan demikian. Penemuan bom, senjata nuklir dan sebagainya yang harusnya dipakai untuk mewujudkan perdamaian, justru dipandang sebagai bentuk persenjataan yang lebih efektif, sehingga apa yang dimau manusia untuk dipelajari dari alam adalah bagaimana menguasai alam, mengeksploitasinya dan pada akhirnya menjajah sesamanya.

Saat ini manusia moderen yang mengandaikan pencerahan nyatanya sudah kehilangan kekritisannya dan seolah-olah hanya berpijak pada satu nilai dimensi kebenaran. Kebenaran itupun adalah kebenaran positivisme yang absurd, karena mengagungkan aspek fungsional belaka dan tak melihat substansi yang ada di dalamnya.

Akibatnya, manusia dalam aspek ilmu pengetahuan, seni dan filsafat, pemikiran dan laku sehari-hari, sistim politik, ekonomi dan penerapan teknologi hanya berjalan di permukaan belaka, sehingga tidak pernah merasakan ada yang tidak beres dengan kehidupan yang mereka jalani. Mereka seolah-olah sudah merasa nyaman dengan satu dimensi dari kehidupan moderen mereka, yang sejatinya tidak dipungkiri adalah bibit-bibit bencana baginya, lingkungan dan sesamanya itu, juga ancaman bagi generasi-generasi mereka selanjutnya.[]



Para pemikir dan pakar utama Mazhab Frankfurt: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Alfred Sohn-Rethel, Leo Lawenthal, Franz Neumann, Franz Oppenheimer, Friedrich Pollock, Erich Fromm, Alfred Schmidt, Jurgen Habermas, Oskar Negt, Karl A. Wittfogel, Susan Buck-Morss, Axel Honneth. Kritikus terkemuka terhadap Mazhab Frankfurt: Henryk Grossman, Georg Lukacs, Umberto Eco.

Hand-Out 40 TEORI KRITIK SOSIAL MENURUT JURGEN HABERMAS

Sejarah dan Prawacana Jurgen Habermas

Habermas belajar di bawah Ardono selama beberapa tahun dan umumnya dikenal sebagai pewaris kontemporer utama dari warisan Frankfurt. Walaupun terdapat tema-tema umum yang berbeda antara karyanya dengan karya dari para pendahulunya, namun, demikian dia mengambil hal itu dalam arah yang berbeda sama sekali. Kita membandingkan Lukes dengan Ardono, Marcuse dan Horkheimer sebagai wakil-wakil pesimistik dan optimistik dari kerangka kerja teoritis yang se-cara mendasar sama; apa yang menyatukan mereka adalah minat yang sangat besar terhadap kebebasan manusia, betapapun tipisnya kemungkinan dari adanya kebebasan itu dalam dunia riil.

Begitu juga Habermas juga mengekspresikan perhatian yang sama tetapi nampaknya dia kurang sedemikian melibatkan diri. Dia keluar dari sayap optimisme ke pesimisme dan sebagai gantinya dia memberikan perhatian yang besar terhadap analisa mengenai struktur-struktur dan tindakan sosial di bandingkan para penulis yang terdahulu. Habermas bukanlah seorang yang bersifat radikal dalam seumur hidupnya, nampaknya setelah pertumbuhan dalam Nazi. Jerman, dia hanya mulai bergerak ke kiri di bawah pengaruh dari Ardono.⁴¹

Untuk sementara pada pertengahan tahun 1960-an, dia adalah seorang pendukung yang kuat dari mahasiswa sayap kiri, tetapi kemudian menjauhkan dirinya dari mereka, sambil mengatakan bahwa mereka hanya membangun bentuk-bentuk dominasi baru. Karyanya sering diambil oleh golongan kiri, tetapi hal itu termasuk suatu per-pindahan yang radikal dari bentuk-bentuk Marxisme. Kami akan mencoba membuat out line dari ciri-ciri utamanya dengan memakai suatu pertentangan antara dia dan karyanya dari anggota-anggota madzhab Frankfurt dengan memperhatikan pandangannya mengenai teori. Kemudian pada kritiknya terhadap Marxisme dan akhirnya pada pokok analisisnya mengenai masyarakat kapitalis modern.

Pemikiran Jurgen Habermas

Jurgen Habermas adalah tokoh terkemuka dewasa ini, sebuah aliran filsafat yang sejak 60 tahun semakin berpengaruh dalam dunia filsafat maupun ilmu-ilmu sosial, yaitu filsafat kritis. Filsafat kritis berdiri dalam tradisi besar pemikirannya yang mengambil inspi-rasinya dalam karya intelektual Karl Marx. Ciri khas filsafat kritis adalah ia selalu, berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan-hubungan sosial yang nyata, Pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika struktur-struktur penindasan dan emansipasi. Pemikiran kritis merasa diri bertanggungjawab terhadap keadaan sosial yang nyata. Dengan demikian berpikir kritis berarti bahwa di suatu pihak perdebatan tetap berlangsung ditingkat filosofis-teoritis, jadi filsafat kritis tidak mau menjadi ideologi perjuangan. Tetapi di lain pihak filsafat kritis berdasarkan anggapan-anggapan yang mana masuk sampai ke dalam inti metodologinya bahwa justru sebagai kegiatan teoritis yang tetap tinggal dalam medium pikiran.⁴²

Jurgen Habermas sesudah menjadi profesor di Frankfurt sebagai pengganti Adorno, mengalami begitu banyak gangguan dan demonstrasi dari pihak mahasiswa sehingga ia pada tahun 1971, hanya enam tahun kemudi-an berhenti sebagai profesor dan menjadi peneliti pada *Institute Max Plank* di Stranberg (sejak tahun 1983 dalam alam akademis yang lain sama sekali, dimana zaman "Kiri Baru" sudah terlupa ia kembali sebagai Profesor di Universitas Frankfurt).

Teori Epistemologi kaitannya dengan Karl Marx

Filsafat ilmu pengetahuan sosial melibatkan dirinya dalam dua isu: *pertama*; hakekat dunia, apa hakekat dari hal yang ada (di dunia), ini dan adakah perbedaan dari keberadaannya. *Kedua*; filsafat ilmu tertuju pada hakekat suatu penjelasan, mengenai cara mengetahui pengetahuan sebagai pengetahuan Marx mengatakan semua ilmu pengetahuan akan menjadi berlebihan. kalau penampilan luar dan esensinya, persis sama. Tidak satupun penampilan luar dari meja saya yang memberitahukan kepada saya, bahwa ia terbuat dari jutaan, molekul yang bergabung satu sama lain.

⁴¹ Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, h. 308.

⁴² Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, h.175.

Menurut Marx terdapat dua pengertian yang jelas di mana suatu proses sebab akibat berlangsung dalam masyarakat.

Pertama, seperangkat hubungan-hubungan sosial yang pokok, struktur sosial, bisa di lihat sebagai penyebab hubungan-hubungan sosial tertentu di permukaan misalnya seorang Marxis, bisa berdalih bahwa argumen-argumen politik yang di laporkan dalam berita-berita setiap hari di sebabkan oleh hubungan hubungan ekonomi yang penting, kendati argumen-argumen itu tidak menyangkut ekonomi.

Kedua, suatu struktur pokok yang sedemikian rupa, sehingga ia memiliki hukum-hukum tertentu atau kecenderungan-kecenderungan perkembangan tertentu; misalnya mungkin ada mekanisme tertentu didalam hubungan-hubungan pokok masyarakat kapitalis yang membawa akibat krisis-krisis ekonomi yang berkelanjutan atau menyebabkan meningkatnya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi.⁴³ Pengetahuan menurut Marx yaitu pekerjaan dan akal budi dengan manusia alami. Dengan demikian bagi Marx pun tak ada artinya melawankan subyek dan objek. Manusia dan dunia, dua-duanya hanya mungkin dalam saling pengantaran. Manusia tidak mungkin tanpa alam dari padanya ia hidup dan yang dikerjakannya. Tetapi alampun sebagai mana manusia menghadapinya hanyalah alam, melalui manusia. Ia adalah alam yang diberi bentuk oleh manusia. Baru pekerjaan manusia membuat alam seada sekarang, sebagaimana ia menjadi obyek manusia.

Dengan demikian alam pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang abstrak, yang harus kita pikirkan, akan tetapi kita bertemu alam selalu hanya dalam cakrawala proses sejarah universal pembentukan umat, manusia". Oleh karena itu Marx menyatakan "bahwa kesatuan termashur manusia dengan alam dalam industri sejak dulu selalu sudah terdapat dan dalam setiap tahap atau sejarah terdapat secara berlainan, tergantung dari tingkat perkembangan industri yang kurang atau lebih besar, seperti juga pergulatan manusia dengan alam, sampai perkembangan alat-alat produktifnya di dasar yang sesuai". Pertanyaan tentang bagaimana dunia dapat dimengerti (masalah *epistemologis*) di pecahkan, dengan manusia membuat dunia itu.

Analisa Habermas tentang Kapitalis Modern

Habermas tentang kapitalisme modern kurang menaruh perhatian yang besar terhadap yang telah dikemukakan oleh para madzhab Frankfurt yang lebih awal. Hal itu dilihat pertama-tama sebagai suatu tahap da-lam perkembangan yang bersifat evolusioner-suatu tingkat yang mungkin berlangsung salah dan membawa bencana, tetapi bagi Habermas bagaimanapun hal itu lebih merupakan suatu sistem sosial daripada suatu yang jahat. Seperti para pemikir yang lebih dahulu, dia menekankan dominasi teknologi dan nalar instrumental dan kritis juga bisa lihat suatu pengalihan pandangan kebelangan yang lebih *nostaigik-pads* periode kapitalisme awal.⁴⁴

Habermas melihat kapitalisme modern seperti yang dikarakterkan oleh dominasi negara atas ekonomi dan bidang-bidang lain dari kehidupan sosial. Bagi Habermas intervensi negara dan akibat pertumbuhan dari nalar instrumental telah menjangkau suatu titik berbahaya yang disebutnya sebagai suatu "utopia negatif" adalah mungkin. Rasionalitas progresif dan putusan-putusan publik lebih menjangkau titik dimana organisasi sosial dan perbuatan putusan mungkin bisa di delegasikan kepada para penghitung mengeluarkannya dari arena perdebatan publik secara bersama-sama. Analisa mengenai kapitalisme awal serupa dengan analisisnya Marx dengan krisis ekonomi sebagai hal yang paling penting.

Bagaimanapun juga kapitalisme bisa di-lihat sebagai suatu kombinasi dari tebak berapa banyak subsistem-subsistem: ekonomi, politik dan sosial budaya dan tempat krisis yang berpindah dari satu ke yang lainnya, ketika sistem berkembang krisis ekonomi dan konflik yang di hasilkan antara pekerjaan dan model di lihat semata-mata sebagai krisis sistem. Pertumbuhan integrasi dan kekuasaan dari negara merupakan suatu respons dan suatu usaha yang berhasil, walaupun Habermas tidak menyatakan bahwa krisis-krisis ekonomi telah, menghilang; memang untuk sementara akan sulit untuk bersikap keras terhadap pernyataan separti ini.

⁴³ Ian Craib, *Op. Cit.*, h. 33

⁴⁴ Ian Craib, *Op. Cit.*, h.317

Jurgen Habermas untuk Menuju Teori Praktis

Teori kritis menurut Habermas di sebut dengan “teori dengan maksud praktis” berarti tindakan yang membebaskan model teori kritis dengan maksud praktis ditemukan Habermas. Dalam masalah teori-teori Habermas mempunyai beberapa kepentingan; kepentingan pengetahuan dan kepentingan praktis ide itu bukanlah tidak serupa dengan mengatakan bahwa seorang mahasiswa mengembangkan suatu “kepentingan” dengan maksud untuk memperoleh suatu tingkat dari tujuannya. Kepentingan yang dibicarakan Habermas ini, bagaimanapun juga dimiliki oleh kita semua dalam keanggotaan masyarakat manusia. Argumentasinya berakar di dalam karya Marx, dan kita temukan kritikan utamanya tentang teori Marx.

Kepentingan selanjutnya yaitu kepentingan praktis, yang pada gilirannya memunculkan ilmu pengetahuan Hermeneutik yang dengan caranya menginterpretasikan tindakan satu sama lain. Baik secara individu, sosial masyarakat maupun secara organisatoris secara kritis menurut Habermas.⁴⁵ Kepentingan praktis, kata Habermas memunculkan suatu kepentingan ketiga, “kepentingan emansipatoris”. Dia membangkitkan pengetahuan teoritis, untuk itu Habermas mengambil psikoanalisa sebagai model untuk mengkaitkan antara kemampuan berfikir dan bertindak dengan kesadaran sendiri. Maka, teori bagi Habermas merupakan suatu produk dan memenuhi maksud dari tindakan manusia. Secara esensial itu adalah alat untuk kebebasan manusia yang besar.

Rumusan Strategi Teori Epistemologi

Penelitian terhadap hubungan antara ilmu pengetahuan dan kepentingan menjadi salah satu usaha pokok Habermas. Penegasan kunci Habermas adalah bahwa tidak masuk akal kita bicara umum tentang kepentingan di be-lakang ilmu-ilmu sebagaimana dilakukan oleh Horkheimer, Adorno dan Marcuse. Habermas menegaskan (sesuai dengan pendekatan teori kritis sejak semula) bahwa ilmu pengetahuan malah hanya mungkin sebagai perwujudan kebutuhan manusia, yang terungkap dalam suatu kepentingan fundamental. Pekerjaan merupakan “bentuk sintesis manusia dan alam yang di satu pihak mengikatkan objektivitas alam pada pekerjaan objektif subjek-subjek (manusia-manusia), tetapi di lain pihak tidak meniadakan independensi eksistensinya”. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pekerjaan merupakan kategori epistemologi, istilah filsafat ilmu pengetahuan.

Dogma Marxisme dan Kaitannya dengan Struktur Sosial

Pada kenyataannya Habermas menyarankan bahwa tingkat ekonomi dari formasi sosial hanya dominan dalam masyarakat kapitalis, barangkali hanya dalam kapitalisme awal, dia mengatakan setiap tipe masyarakat diatur oleh suatu kompleks institusional tertentu mungkin hal itu adalah institusi ekonomi untuk kapi-talisme awal, negara untuk kapitalisme akhir dan sistem kekerabatan dalam masyarakat suku terasing. Namun demikian institusi-institusi itu sendiri bisa dilihat sebagai penjelmaan-penjelmaan dari nilai-nilai budaya dan norma-norma yang dia lihat sebagai hal yang ber-kembang kearah tingkat-tingkat universalitas yang semakin tinggi. Menurut Habermas bahwa institusi sosial ada tidak hanya untuk membantu dan mempertahankan produksi ekonomi tetapi juga menekan kembali keinginan yang mau membuat kehidupan sosial menjadi tidak mung-kin. Habermas memperhatikan evolusi masyarakat manusia dari jumlah sudut pandangan yang lain, biasanya menghasilkan klasifikasi yang tiga kali lipat.⁴⁶

Masyarakat dilihat sebagai hasil dari tindakan manusia pada gilirannya distruktur oleh norma-norma dan nilai-nilai. Dan terhadap perkembangan-perkembangan dari nilai-nilai dan norma-norma inilah kita harus perhatikan kalau kita mau memahami perubahan so-sial. Dasar-dasar untuk kritik sosial terletak dalam tujuan yang terhadapnya perkembangan sosial itu beru-bah, suatu rasional universal yang di dalamnya setiap orang berpartisipasi secara sama. Suatu situasi dimana komunikasi tidak mengalami distorsi-suatu situasi per-cakapan yang ideal, yang ingin dibuatkan *out line*-nya oleh Habermas. Seperti dengan karya persons kita bera-hir dengan konsepsi kecil atau sederhana tentang tingkat-tingkat dari organisasi sosial, di luar yang diberikan oleh pemberian

⁴⁵ *Ibid.*, h. 310

⁴⁶ Ian Craig, *Op. Cit.*, h. 316

prioritas kepada kebudayaan, tak ada pengaruh mengenai mekanisme sebab akibat dan lebih merupakan suatu pengklasifikasian umum daripada suatu sistem yang bersifat menjelaskan.

Pendekatan Historis Menurut Habermas

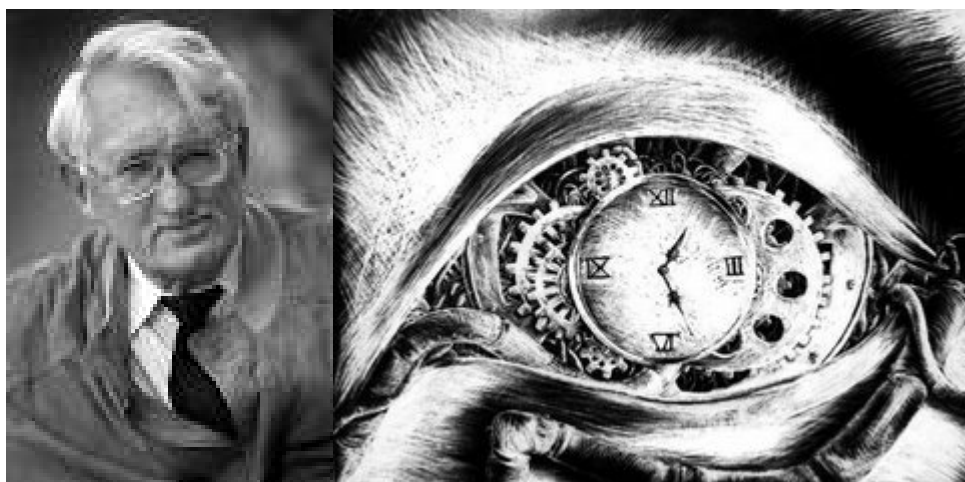
Paradigma Teori Kritis masyarakat “klasik” ditentukan oleh dua paham fundamental: gaya pemikiran historis dan gaya pemikiran materialis. Dengan pola berpikir historis dimaksud bahwa realitas sosial yang ada sekarang hanya dapat di pahami betul kalau dilihat sebagai hasil sebuah sejarah. Ilmu-ilmu positif menyelubungi secara ideologis fakta yang paling fundamental bahwa sejarah itu di buat oleh manusia sendiri (dalam bahasa Marx: manusia sebagai *Gattungswesen* atau makhluk jenis membuat sejarahnya sendiri), bahwa sejarah itu merupakan sejarah penindasan, bahwa penindasan itu justru ditutup-tutupi sehingga realitas sekarang tampak sebagai objektivitas yang wajar.

Teori kritis bertugas membuka selubung ideologis itu, jadi membuka penghisapan dan penindasan itu sebagai karya manusia dan dengan demikian membuka kemungkinan pembebasan. Maka Habermas bicara tentang “*teori kritis sejarah dengan maksud praktis*”. Dengan meminjam pola pendekatan psikoanalisa Sigmund Freud, ia mengharapkan agar ingatan kembali terhadap sejarah penderitaan dan penindasan (yang di tutup oleh “*teori positif*”) melepaskan kekuatan-kekuatan emansipatoris: menyadari diri sebagai kurban penindasan terselubung memberikan tekad untuk membebaskan diri dari sebuah situasi yang sekarang tidak lagi dipandang “objektif perlu”, melainkan sebagai hasil proses sejarah.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal:

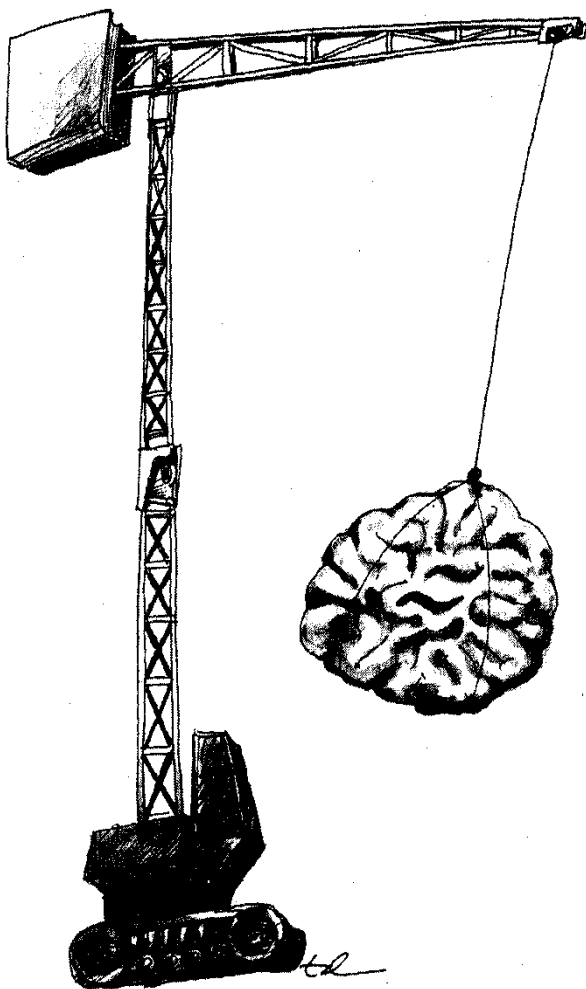
1. Bahwa Jürgen Habermas adalah filosof dari Jerman yang menggunakan sifat kritis terhadap berbagai macam per-soalan termasuk teori tradisional. Tentu hal itu ti-dak sendirian, melainkan bersama temannya Adorno dan Horkheimer. Mereka semua itu berasal dari madzhab Frankfurt, namun dengan itu dia termasuk taruhannya, dan selalu dikritik orang-orang sekitarnya.
2. Habermas mempunyai kesadaran mengkritisi segala tin-dakan yang merugikan sosial, baik itu secara individu kelompok, masyarakat, ataupun organisasi.
3. Habermas menggunakan dua pendekatan dalam mengkritisi sesuatu; gaya pemikiran historis dan pemikiran materialis. Dengan demikian ia tidak selalu menggunakan gaya filsafat kritis. Karena dia melihat adanya perubahan dalam sosial. Namun perubahan tersebut tetap dalam kerangka sosial yang nyata.[]



**Teori kritis menurut Habermas di sebut dengan “teori dengan maksud praktis”
berarti tindakan yang membebaskan model teori kritis
dengan maksud praktis ditemukan Habermas.**



BAGIAN KESEMBILAN DISKURSUS TEORI PEMBANGUNAN DUNIA KETIGA



**MAYDAY
Revolution**

Kolonialisme
bukan
kecelakaan
sejarah...
melainkan
suatu
ungkapan
dari

akumulasi kapital dalam skala yang berlebihan. Asal mula yang kini dikenal sebagai keterbelakangan dapat ditemukan pada keterlibatan (*in corporation*) wilayah ini kedalam ekonomi dunia (kapitalis). Rhys Jenkins, "Underdevelopment" dalam F. Green, P. Nove, eds., *Economic: An anti-Text* (London: Mcmillan, 1977). Partai-partai sosialis yang memegang kekuasaan atas institusi negara masih harus menentukan bagaimana menyediakan kesempatan kerja, infrastruktur, dan menentukan cara-cara dan sarana mencapai pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, tanpa menyebutkan pencarian cara-cara dan sarana untuk membuat rakyat turut serta dalam pembuatan keputusan. Oleh karenanya, suatu partai sosialis yang berkeinginan menerapkan program atau serangkaian kebijaksanaan yang bersumber pada analisis Marxis dan Neo-Marxis tentang sistem kapitalis dunia masih harus memutuskan lagi apakah harus

menerapkan solusi yang ultraradikal atau semiradikal. (Cevin P. Clemens, Teori Pembangunan dan Keterbelakangan Marxis dan Neo-marxis). Atas nama pembangunan, pemerintah memberangus kritik yang muncul dari masyarakat. Karena kritik tersebut dinilai dapat mengganggu stabilitas politik (Dr. Arif Budiman).

Hand-Out 41

TEORI PEMBANGUNAN DAN KETERBELAKANGAN MARXIS DAN NEO-MARXIS

Terdapat kontroversi di dalam kubu teori radikal, antara mereka yang menamakan diri sebagai Marxis "ortodoks" seperti Colin Leys⁴⁷ dan H. Baerstein⁴⁸ dan lawan mereka yang "revisionis" yakni Paul Baran⁴⁹, Andre Gunder Frank⁵⁰, dan I. Wallerstein⁵¹, terdapat kesepakatan pada masing-masing kubu mengenai sebab-sebab utama dari pembangunan dan keterbelakangan yang membenarkan keterikatan mereka bersama dalam pendekatan Marxis dan Neo-Marxis. Dengan mengabaikan pendekatan-pendekatan ini, perspektif teoretis Marxis dan Neo-Marxis ini jelas sekali berbeda dari pandangan pembangunan Struktural dan Neo-Klasik.

Perspektif Marxis dan Neo-Marxis mewakili pemutusan hubungan yang radikal dengan apa yang oleh Foster-Carter⁵² disebut "Teori Pembangunan Borjuis". Implikasi politik dan sosial perspektif Marxis dan Neo-Marxis ini jauh lebih luas jangkauannya daripada implikasi politik dan sosial perspektif Strukturalis dan Neo-Klasik, karena perspektif Marxis dan Neo-Marxis juga secara radikal menantang kelompok elit penguasa ekonomi dan politik baik di Negara Berkembang maupun di negara-negara pusat sendiri.

Teori Pembangunan dan Keterbelakangan Marxis dan Neo-Marxis memiliki akar historis yang sangat kuat, yang pokok, preposisi pendekatan ini dibuat secara induktif dari analisis berbagai pendekatan historis yang kongkret. Analisis situasi yang historis ini berarti bahwa sejumlah besar perhatian telah dipusatkan pada dampak khusus dan nyata dari imperealisme dan kolonialisme di negara-negara berkembang di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Berbeda dengan teori strukturalis yang melihat hambatan eksternal pembangunan sebagai masalah perdagangan luar negeri yang relatif ringan dan bisa diatasi dengan persetujuan perdagangan yang sederajat, teori Marxis dan Neo-Marxis menilai keterbelakangan berangkat dari imperealisme, dengan menegaskan:

Kolonialisme bukan kecelakaan sejarah... melainkan suatu ungkapan dari akumulasi kapital dalam skala yang berlebihan. Asal mula yang kini dikenal sebagai keterbelakangan dapat ditemukan pada keterlibatan (*in corporation*) wilayah ini kedalam ekonomi dunia (kapitalis).⁵³

Teori Pembangunan Marxis dan Neo-Marxis mendasarkan analisis mereka pada situasi historis tertentu pada tingkat nasional dengan menjelaskan sejarah nasional tersebut dengan konteks ekonomi dunia kapital. Berbeda dengan faham Strukturalisme dan Neo-Klasikisme, teori pembangunan Marxis dan Neo-Marxis menjadikan sistem ekonomi dunia atau sistem kapitalis global sebagai unit analisis utama. Para penganut Marxis dan Neo-Marxis menggunakan analisis ini:

1. Untuk menentukan bagaimana cara produksi kapitalis mengubah formasi-formasi sosial dan ekonomi pra-kapitalis;
2. Untuk menerangkan mengapa keterbelakangan dan bukan pembangunan yang lebih mewarnai perekonomian Dunia Ketiga;
3. Untuk memahami peran apa yang dimainkan ekonomi dunia ketiga dalam sistem pembangunan kerja internasional;

⁴⁷ Lihat Colin Leys, "Underdevelopment and Dependency: Critical Notes", *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 7, No. 1, 1977, p. 92-107.

⁴⁸ H. Berstein, "Sociology of Underdevelopment Versus Sociology of Development", Makalah mengenai Dar Es Salaam dalam H. Berstein, D.C. O'Brien dan W. Nagziger, *Development Theory: Three Critical Essays* (London: Cass, 1975).

⁴⁹ Lihat Paul Baran, *The Political of Growth* (New York: Monthly Review Press, 1957)

⁵⁰ Andre Gunder Frank, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America* (London: Penguin, 1969); *Dependent Accumulation and Underdevelopment* (London: Mcmillan, 1978).

⁵¹ I. Wallerstein, *The Modern World System*, Vol. 1 (London: Academic Press, 1994) dan *The Capitalist World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).

⁵² A. Foster-Carter, "From Rostow to Gunder Frank: Conflicting Paradigm in The Analysis of Underdevelopment", *World Development*, Vol. 4, No. 3, 1976.

⁵³ Rhys Jenkins, "Underdevelopment" dalam F. Green, P. Nove, eds., *Economic: An anti-Text* (London: Mcmillan, 1977) p. 145.

4. Untuk menunjukkan kepentingan yang bertentangan antara negara-negara industri yang melawan negara pinggiran dari semi pinggiran belum maju;
5. Untuk menjelaskan perpindahan sumber daya produksi dalam ekonomi dunia kapitalis, dan negara-negara mana saja yang mendapatkan apa, kapan, mengapa dan bagaimana, dan;
6. Untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi di dalam sistem ekonomi kapitalis tidak memperkecil ketimpangan, malah sebaliknya.

Mulai dengan Paul Baran⁵⁴ para penulis yang menulis pembangunan atau keterbelakangan menekankan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan dari negara-negara pusat yang impereal dengan negara-negara pinggiran yang dijajah.

Yang jelas adalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang sangat bertentangan dengan kepentingan dominan negara-negara kapitalis yang sudah maju.⁵⁵

Dengan mengambil pernyataan ini sebagai titik tolak, para penulis seperti A.G. Frank,⁵⁶ dan O Sunkel,⁵⁷ dengan jelas menunjukkan bagaimana pada kenyataan pembangunan dan keterbelakangan mempunyai dua sisi dari satu mata uang. Frank, misalnya, memperlihatkan bagaimana persediaan sumber alam diambil dari negara-negara Metropolitan atau pusat untuk menunjang pembangunan mereka sementara negara-negara Satelit atau Pinggiran dibiarkan kehabisan bahan mentah yang mereka butuhkan sendiri untuk pembangunan. Dengan nada yang hampir sama, Osvaldo Sungkel memperlihatkan bagaimana terpusatkannya modal secara internasional pada perusahaan-perusahaan multinasional menyebabkan percepatan disintegrasi "nasional" dan ketidakmampuan negara-negara berkembang mengembangkan diri dalam cara yang dianjurkan oleh teori-teori pertumbuhan Neo-Klasik atau Strukturalis. Walaupun A.G. Frank, O. Sungkel, I. Wallerstein dan penulis lain mendapatkan kritik dari penulis seperti E. Laclau⁵⁸ dan R. Brenner,⁵⁹ karena terlalu memusatkan pada faktor eksternal, lebih daripada faktor internal, sebagai faktor-faktor penyebab ketergantungan, semua kritik ini tidak mempertanyakan asumsi dasar bahwa pembangunan dan keterbelakangan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Semua teoretisi ini memusatkan perhatian pada istilah-istilah penting penting untuk melukiskan proses semacam itu dan mempertanyakan apakah prioritas harus ditujukan pada cara-cara produksi atau hubungan pasar. Bagaimanapun, semua teoretisi Marxis dan Neo-Marxis ini setuju bahwa apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi di tingkat internasional negara-negara bangsa tertentu ditentukan oleh apa yang terjadi dipusat-pusat keuangan dan industri ekonomi dunia kapitalis.

Kapitalisme sebagai sistem produksi yang dijual dipasar untuk mendapatkan keuntungan dan penggandaan keuntungan tersenut berdasarkan pemilikan individu dan kolektif hanya terdapat, dan didapatkan, pada suatu sistem dunia yang unit-unit politiknya tidak koektensif dengan batas-batas ekonomi pasar. Sistem ini membolehkan para penjual mengambil keuntungan dari adu kekuatan dipasar kapan saja ada kesempatan dan membuat mereka pada saat yang bersamaan berusaha mencari, kapan saja dibutuhkan, campur tangan entitasentitas politik untuk mengubah pasar demi kepentingan mereka.⁶⁰

⁵⁴ Paul Baran, *op. cit.*

⁵⁵ Paul Baran, *The Political of Growth*, p. 27, dikutip oleh G. Palma, *op.cit.*, p.24

⁵⁶ Andre Gunder Frank, *op. cit.*, 1969 dan 1978.

⁵⁷ Osvaldo Sungkel, "Transnasional Capitalism and National Disintegration in Latin America", *Social and Economic Studies*, Vol. 22, No. 1, 1973, p. 132-176.

⁵⁸ E. Laclau, "Feodalism and Capitalism in Latin America, *New Left Review*, May/ June 1971. p. 19-38.

⁵⁹ R. Brenner, "The Origins of Capitalist Development: A Criticue of Neo-Smithian Marxism", *New Left Review*, No. 104, July/ August 1977, p. 25-93.

⁶⁰ I. Wellerstein, *op. cit.*, 1979, p. 66.

Semua studi teoritis diatas memiliki persamaan pendirian bahwa pembangunan kapitalis di negara-negara pinggiran tidak berkembang secara cepat seperti yang terjadi di Eropa Barat, Amerika Utara dan Jepang. Pada kenyataannya, mereka menegaskan bahwa kapitalisme negara Dunia Ketiga, yang terutama muncul karena didikte oleh negara-negara industri besar dan bisnis internasional, menumbuhkan ketimpangan regional dan sektoral, berakibat pada meningkatnya ketimpangan pendapatan dan kekayaan, menciptakan pengangguran dan berkurangnya kesempatan kerja yang kronis, serta hanya memberikan keuntungan kepada sekelompok kecil elit ekonomi dan politik.

Proposisi Marxis dan Neo-Marxis yang pertama menyatakan, bahwa motor utama pembangunan (tehnologi dan industri) terpusat di luar negara-negara pinggiran yaitu di dalam pusat-pusat negara-negara industri kapitalis. Tidaklah mungkin memahami mengapa pembangunan bisa atau tidak bisa terjadi di negara-negara bangsa tertentu kecuali seseorang sebelumnya harus memahami karakteristik dasar sistem kapitalis dunia.⁶¹ Dengan pandangan seperti ini jelas bahwa bisnis multinasional telah dan akan terus mentransformasikan sifat hubungan yang ada antara ekonomi negara maju dan ekonomi negara berkembang dalam sistem kapitalis dunia. Oleh karena itu penting, bahwa teori dan riset harus selalu mengikuti berbagai cara perubahan yang dialami pembagian kerja internasional sehingga akan lebih mengetahui peran khusus yang dijalankan negara-negara tertentu dalam pembagian kerja internasional tersebut.⁶² Sama pentingnya dengan riset dan teoritisasi tersebut adalah perhatian yang harus diberikan pada cara-cara bagaimana pola-pola internasional organisasi sosial dan politik yang berbeda menentukan tanggapan-tanggapan pada skala nasional terhadap tuntutan-tuntutan sistem internasional. Bagaimana elit-elit nasional yang beragam tersebut mengambil keuntungan dari penetrasi kepentingan ekonomi dan politik dari luar? Pada analisis terakhir, persoalan-persoalan semacam ini hanya dapat dipecahkan melalui analisis historis atau menurut situasi-situasi khusus yang kongkrit.

Proposisi Marxis dan Neo-Marxis yang kedua menyatakan, dorongan akumulasi kapitalis dipusat berakibat pada tidak berimbangnya serangkaian pertukaran, terus menerus menguntungkan negara-negara industri dan merugikan mayoritas negara-negara pinggiran yang masih agraris. (Fakta ini bukan hanya hambatan pembangunan seperti anggapan teori strukturalis, melainkan juga menjadi prasyarat bagi pembangunan di negara pusat yang menghendaki terdapatnya keterbelakangan di negara-negara pinggiran). Bahkan kalau pun terjadi industrialisasi di negara-negara pinggiran, industrialisasi ini cenderung menjadi industrialisasi yang tergantung (*dependent industrialization*) yang lebih menguntungkan modal internasional daripada modal setempat. Hubungan ketergantungan ini bisa berupa ketergantungan ekonomi, politik, militer, pendidikan, kebudayaan dan sosial,⁶³ dan akan selalu memberikan ketergantungan bagi negara-negara kaya dan kuat dan merugikan negara-negara yang lemah. Hubungan yang eksploitatif ini bertahan karena tidak adanya jalan yang bisa ditempuh oleh negara-negara yang lemah untuk melepaskan diri.

Proposisi Marxis dan Neo-Marxis yang ketiga tentang pembangunan yang ketiga adalah, bahwa kelas-kelas dominan dan pusat-pusat metropolitan didalam suatu negara tumbuh dengan mengorbankan kelas-kelas di bawahnya yang lemah, kota-kota kecil dan wilayah dibawahnya dengan cara yang sama seperti negara-negara yang dominan secara internasional tumbuh dengan mengorbankan negara-negara yang lemah. Proposisi ini menjadi pandangan yang sangat berharga dan memusatkan riset pada berbagai cara bagaimana pusat-pusat urban mengambil sumberdaya dari wilayah-wilayah lain yang kurang dinamis yang menjadikan pusat-pusat urban yang maju berindustri dan mengambil keuntungan dari inovasi tehnologi modern.

⁶¹ Lihat K.P. Clements, "The Limitations of a National Perspective", dalam *Australian and New Zealand Journal of Sociology*, Vol. 15, No. 1, March 1979, p. 73-76, juga I. Wallerstein, *op. cit.*, 1979, untuk pembahasan lebih lanjut persoalan ini.

⁶² Lihat F. Frobel, J. Heinrichs, and O. Kreye, "Tendency Towards a New International Division of Labour", *Economic and Political Weekly*, February 1976, p. 159-170.

⁶³ Lihat J. Galtung, "A Structural Theory of Imperialism", *Journal of Peace Research* 1971, untuk perincian topik ini selanjutnya.

Terus berlangsungnya hubungan eksploitatif yang tidak adil ini oleh teoretisi Marxis dan Neo-Marxis diterangkan sebagai berikut:

1. Aksioma dasar teori Marxis menyatakan bahwa ada kesamaan kepentingan (baik tersembunyi maupun nyata) antara kelas-kelas dominan (borjuis) di negara-negara pusat dan negara-negara pinggiran. Elit politik dan elit ekonomi, baik di negara maju maupun di negara-negara pinggiran, memiliki kepentingan (perdagangan, industri dan politik) yang kan berjalan dengan baik melalui kerjasama daripada tindakan bermusuhan. Bank sentral disemua negara memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga kelancaran perbankan internasional dan sistem moneter internasional. Sama dengan hal ini. Kaum politisi, didorong oleh keinginan untuk tetap berkuasa, berkepentingan untuk bekerjasama dengan rekan sejawat di negara-negara lain untuk mencapai keinginan tersebut dan saling memberi legitimasi rezim satu-sama lain. Intinya adalah, bahwa kelompok-kelompok elit dinegara berkembang dan di negara-negara maju memiliki kesempatan untuk satu sama lain saling bertemu di konferensi-konferensi internasional, mengembangkan cara pandang yang sama, dan tiba pada kesamaan posisi ideologi (misalnya seperti pada pemilihan teori pembangunan yang mereka anggap paling tepat dan paling berguna) dan mereka juga memiliki kekuasaan untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut sepulangnya ke negara masing-masing.⁶⁴ Kelompok non-elit, buruh, petani, sopir, tidak memiliki kesempatan yang sama oleh karenanya, tidak berkesempatan mengembangkan cara pandang yang sama, dan walaupun seandainya mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dalam pertemuan serikat buruh dan petani internasional, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mewujudkan pendapat dan gagasan-gagasan yang mereka hasilkan. Pada tingkat internasional, negara-negara industri dominan menyelenggarakan pertemuan tingkat negara secara teratur di dalam organisasi-organisasi seperti Organisasi bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) serta pada pertemuan-pertemuan puncak yang terjadi antara negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman Barat, Perancis, Inggris, dan Jepang. Terlepas dari pengelompokan seperti Kelompok-77 di UNCTAD dan Negara-negara Non-Blok yang bertemu di Havana pada bulan September 1979 dan di PBB, tidak terdapat bentuk negosiasi tingkat tinggi antara negara-negara maju, walaupun PBB telah berusaha mendorong kontak-kontak yang lebih sering melalui program-program seperti kerjasama Teknik antara Negara Berkembang (TCDC). Singkatnya, bagaimanapun, negara-negara industri yang dominan yang juga cenderung menjadi kekuatan impereal di masa lalu, menjadikan pertemuan-pertemuan tersebut sebagai sebuah *front* persatuan yang rasional untuk menanggapi isu-isu yang merugikan kepentingan kelompok mereka.
2. Teoretisi Marxis dan Neo-Marxis menyatakan, bahwa negara dalam masyarakat kapitalis lebih berperan demi kepentingan modal (kapital) daripada demi mayoritas penduduk. Hal ini terjadi karena dalam mayoritas penduduk. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat kapitalis (baik maju atau tidak) harus menjamin laju akumulasi modal swasta untuk meningkatkan pajak (pendapatan negara) yang mencukupi demi kelangsungan negara itu sendiri.⁶⁵ Institusi negara tidak akan mampu menjaga akumulasi modal swasta tersebut jika negara tidak mendapatkan legitimasi dari penduduknya. Untuk mendapatkan legitimasi. Untuk mendapatkan legitimasi, negara harus menyediakan sarana umum seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Untuk tetap bisa menyediakan sarana umum ini, negara membutuhkan peningkatan pendapatan negara—inilah yang disebut sebagai “Krisis

⁶⁴ Contoh untuk kasus ini adalah suatu konferensi tentang “Perdagangan, Keuangan dan Politik tahun 1980-an” yang disponsori oleh Financial Times. Ini adalah simposium Eropa-Jepang yang diperuntukan bagi usahawan dan politisi yang melibatkan pembicara seperti Roy Jenkins dari Komisi Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC Commission), dan Toshio Kohmuth dari Partai Liberal Jepang. Simposium ini akan memberikan kesempatan bagi kalangan usahawan dan politisi untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan dan pandangan-pandangan mengenai dunia sehingga mereka akan mampu merencanakan masa yang akan datang dengan tingkat informasi yang memadai mengenai apa yang dipikirkan dan sedang dikerjakan oleh orang lain. Tidak diragukan lagi bahwa simposium ini akan mengakibatkan tumbuhnya pandangan yang sama terhadap dunia dan kesamaan kepentingan tentang masalah-masalah yang sama yang sedang dihadapi oleh negara-negara industri di era 1980-an.

⁶⁵ Mengenai penjelasan topik ini lebih terperinci, lihat J. O'Connor, *The Fiscal Crisis of The State* (New York: St. Martin's Press, 1976) dan R. Milliband, *The State in Capitalist Society* (London: Quartet Books, 1978).

Keuangan” dalam terminologi O'Connor. Negara yang berkembang yang memilih jalan pembangunan yang kapitalis terjebak dalam suatu lilitan lagi bahwa umumnya negara-negara tersebut tidak mampu berindustri untuk meningkatkan produktifitas dan dipaksa memilih pembangunan yang tergantung pada ekspor dengan penjualan komoditi-komoditi bahan mentah atau bahan produksi kepada negara-negara pusat yang maju.⁶⁶ Oleh karenanya, negara-negara berkembang dipaksa berperilaku sama karena mengikuti kemauan modal internasional. Hal ini berarti bahwa, kendati negara-negara berkembang bermaksud dan cenderung untuk memilih pembangunan sosialis yang independen, selama masih melibatkan diri dalam ekonomi dunia kapitalis, tidak ada kesempatan bagi negara-negara berkembang tersebut untuk melepaskan diri karena konsekuensi ekonomi dan politik yang harus dibayarnya terlalu tinggi.

3. Salah satu alasan utama mengapa negara berkembang harus membayar pengorbanan yang mahal bila menarik diri dari ekonomi dunia kapitalis adalah, karena negara-negara industri yang dominan mengembangkan, memiliki dan mengontrol teknologi yang diinginkan oleh setiap negara yang ingin maju atau, ingin menyebut dirinya lebih maju. Peguasaan teknologi ini memperkuat hubungan ketergantungan yang menempatkan negara berkembang pada tingkat lebih rendah dan menyulitkan setiap negara berkembang mengambil jalan pembangunan yang autosentris (kecuali mereka memutar balik arah jarum jam seperti yang coba dipraktikkan rezim Pol Pot di Kamboja). Cina misalnya, yang pernah menjadi contoh terbaik dari negara yang menerapkan kebijaksanaan pembangunan mandiri telah dipaksa oleh gerak pertumbuhan sendiri untuk membeli teknologi maju dibidang kedirgantaraan, elektronika dan industri di pasar internasional. Ini berarti bahwa pemerintah Cina harus menanamkan modal, berusaha keras menaikkan ekspor untuk membayar barang-barang canggih tersebut jika terus mengambil kebijaksanaan pembangunan yang lebih independen. Jelas, kebanyakan negara tidak bisa berharap mencapai tingkat kemandirian seperti yang pernah dicapai oleh Cina pada periode 1949-1976. Hal ini menguatkan fakta bahwa hampir semua negara pinggiran dan semi pinggiran berkemungkinan menjadi tergantung secara teknologis pada negara-negara industri maju demi masa depan yang bisa diramalkan.
4. Faktor keempat yang menjelaskan adanya jurang pemisah antara negara-negara berkembang dan pusat-pusat kapitalis adalah konsentrasi modal, baik keuangan maupun modal industri, di negara-negara pusat. Sampai terjadinya pelonjakan harga minyak oleh OPEC tahun 1973, bahkan sejak itu, pusat-pusat keuangan di London, New York, Ganeva, Tokyo dan Frankfurt, mulai mampu menentukan dimana dan dalam kondisi bagaimana kredit (pinjaman) akan tersedia dan selanjutnya menekankan negara-negara mana saja yang mampu dan tidak mampu mengembangkan sumberdaya masing-masing. Badan-badan pemberi bantuan pada tingkat nasional dan internasional menyusun rangking negara menurut kepalayakan mereka menerima kredit, umumnya berarti memberikan dukungan pada kelompok yang kuat dengan merugikan mereka yang lemah. Hal ini juga berarti bahwa perekonomian nasional yang beragam harus mengubah kebijaksanaan ekonomi internal masing-masing agar layak mendapatkan pinjaman atau bantuan.⁶⁷
5. Teoretisi Marxis dan Neo-Marxis telah mengidentifikasi perusahaan multinasional sebagai sarana utama untuk mengorganisasi dan memusatkan modal di tingkat internasional. O. Sungkel,⁶⁸ H. Radice⁶⁹ serta sekelompok ilmuwan lain telah memperlihatkan secara empiris bagaimana koordinasi dan integrasi secara internasional terhadap pengolahan dan pemasaran mengakibatkan disintegrasi nasional dan ketidakmampuan badan-badan usaha dan pemerintah-pemerintah di negara-negara merdeka menentukan masa depan mereka sendiri. Zona industrialisasi dan Perdagangan Bebas, misalnya, terbukti memiliki

⁶⁶ Lihat A. Emmanuel, *Unequal Exchange* (New York Monthly Review Press, 1972), untuk analisis mengenai masalah ini.

⁶⁷ Tentang pandangan ini, lihat T. Hayter, *Aid as Imperealism* (London: Penguin, 1974) dan W. Rosenberg, "New Zealand Foreign Debt and Some Aspects of The Relation between Foreign Debt and Internal Economic Policies", Christchurch, 21 March 1979.

⁶⁸ O. Sungkel, *op. cit.*

⁶⁹ H. Radice, ed., *The International Firm and Modern Imperealism* (London: Penguin, 1975.)

konsekuensi negatif terhadap organisasi ekonomi dan sosial di banyak tempat di Asia Tenggara. Namun zona semacam ini terus meluas karena kepentingan ekonomi jangka pendek dan fakta bahwa keberadaan zona tersebut cocok dengan kepentingan perusahaan-perusahaan besar Jepang, Amerika dan Inggris yang berinvestasi di wilayah tersebut.⁷⁰

6. Faktor penting lainnya yang menjamin bertahannya keberlangsungan pertukaran internasional yang sangat tidak seimbang itu adalah ketergantungan kultural dan ideologi yang menyertai ketergantungan ekonomi. Karena teknologi Barat merupakan kesatuan dalam ide-ide dan nilai-nilai barat, maka akan menjadi sangat sulit—jika tidak dikatakan tidak mungkin—bagi negara berkembang untuk bertahan terhadap godaan untuk meniru pemikiran Barat mengenai keseluruhan isu. Pilihan terhadap ideologi pembangunan juga merupakan pilihan terhadap cara berfikir tertentu. Sebagai misal, teori-teori Neo-Klasik dan Strukturalis didasarkan pada asumsi-asumsi “kepemilikan individual” yang melekat pada sifat manusia dan masyarakat, hal yang demikian itu mencerminkan suatu pandangan yang etnosentris baik individual maupun kolektif. Pemikiran tiruan juga diciptakan dengan sarana-sarana yang lebih kasar. Sebuah analisis mengenai sumber dan isi berita, film, program televisi, siaran radio dan media massa internasional lainnya dengan jelas memperlihatkan bahwa barang-barang tersebut (film, berita, dan lain-lain—penulis) dibuat di pusat-pusat metropolitan dan mencerminkan norma dan nilai-nilai dominan mereka yang tinggal di negara-negara pusat. Seringkali lebih mudah bagi warga yang tinggal di India selatan untuk mendengarkan siaran BBC Word Service untuk mendengarkan berita tentang kejadian-kejadian di India Utara daripada mendengarkan stasiun radio lokal. Paket-paket program televisi yang diproduksi di Amerika Serikat dan disebarkan keseluruh dunia juga merupakan menu utama bagi sejumlah besar bangsa di Dunia Ketiga. Ketika suatu kebudayaan asing mendominasi suatu pandangan hidup bangsa yang tradisional—seringkali akibat penetrasi tradisional—hal ini akan menyulitkan negara-negara yang didominasi tersebut untuk memilih pertumbuhan yang secara murni ditentukan oleh dirinya sendiri karena terus-menerus dihantui perasaan inferioritas kultural dan teknologi yang tumbuh akibat penetrasi bangsa yang lebih kuat.
7. Hampir semua teoretisi Marxis mengakui bahwa imperealisme dan pertukaran tidak seimbang yang diakibatkannya (baik pada tahap Kolonialisme maupun Neo-Kolonialisme) adalah fenomena multidimensional. Sebenarnya sangat sulit untuk mengidentifikasi satu faktor tunggal penyebab semua hubungan ketergantungan; sehingga kebanyakan penulis memilih sekumpulan penyebab sebagai deskripsi yang lebih tepat dari proses imperealisme yang sesungguhnya.⁷¹

Walaupun terdapat sejumlah isu yang bisa dibahas dalam pembicaraan mengenai teori Marxis dan Neo-Marxis ini, misalnya pertentangan mengenai apakah pembangunan dan keterbelakangan ditentukan secara internal atau eksternal,⁷² atau peran pasti dari hubungan produksi dan perdagangan internal dan internasional,⁷³ beberapa hal yang dinyatakan diatas sudah cukup untuk mengidentifikasi beberapa konsekuensi politik umum dari perpektif Marxis atau Neo-Marxis.

Konsekuensi Politik Teori Pembangunan dan Keterbelakangan Marxis dan Neo-Marxis

Konsekuensi politik teori pembangunan dan keterbelakangan Marxis dan Neo-Marxis jauh lebih radikal daripada daripada akibat politik teori Neo-Klasik atau teori Strukturalis, dan hanya dipraktikkan disebagian kecil negara. Karena diagnosis Marxis dan Neo-Marxis mengenai sebab-sebab pembangunan dan keterbelakangan menekankan pada hubungan ekonomi dan politik yang

⁷⁰ Lihat *Free Trade Zones and Industrialization of Asia* (Tokyo: Pasific Asia Resources Centre, 1977), mengenai beberapa studi kasus tentang fenomena ini di Malaysia, Indonesia dan Filipina.

⁷¹ Lihat, S. Amin, *Accumulation on A World Scale: A Critique of The Theory of Underdevelopment* (New York: Monthly Review Press, 1974), khususnya p. 44-64 dan p. 170-223, untuk diskusi yang terperinci mengenai topik ini dilihat dari perpektif ekonomi.

⁷² Lihat A.G. Frank, *op. cit.*, 1978, p. 2-7.

⁷³ Lagi, Lihat, A.G. Frank, *ibid.*, p. 10-13, dan p. 92-134.

eksploitatif baik pada tingkat nasional maupun internasional, jelas bahwa hanya beberapa pemerintah non-sosialis yang menerapkan teori ini dalam formulasi kebijaksanaan dan rencana pembangunan tertentu. Sebaliknya, kebanyakan pemerintah yang menentang upaya penerapan teori Marxis dan Neo-Marxis. Karena hampir semua institusi negara dalam masyarakat kapitalis memihak pemilik modal, institusi-institusi ini menjadi bagian dari masalah keterbelakangan yang harus ditransformasikan secara mendasar agar terjadi perubahan atau pembangunan yang sebenarnya. Maka, teori Strukturalis tidak diterapkan secara sungguh-sungguh di Amerika Latin, karena tidak adanya kemauan politik, negara-negara unia ketiga yang menerapkan pemecahan Marxis atau Neo-Marxis dalam memperjuangkan pembangunan jumlahnya bahkan lebih sedikit lagi. (Ironisnya, kebanyakan dari diagnosis ketergantungan dan keterbelakangan mengenai sebab-sebab pembangunan dan keterbelakangan diakui oleh pembuat keputusan dan akademisi "borjuis". Mereka cenderung menerima penjelasan Marxis atau Neo-Marxis dalam konteks umum, namun menyatakan bahwa diagnosis Marxis atau Neo-Marxis tersebut tidak membantu penyusunan usulan-usulan kebijaksanaan praktis. Salah satu keluhan terhadap teori keterbelakangan yang dilontarkan oleh teoretisi kiri,⁷⁴ adalah bahwa retorika teori ini terkooptasi oleh kemapanan yang tidak berkeinginan mengakhiri hubungan-hubungan yang eksploitatif. Leys dan Bernstein menyatakan bahwa penerimaan kalangan borjuis terhadap retorika Marxis dan Neo-Marxis telah melunturkan sikap analisisnya yang radikal dan telah membingungkan merak yang sedang mencari pemecahan yang radikal. Namun semua ini sebenarnya tidak perlu, selama ada beberapa komitmen bagi perubahan radikal dan revolusi yang murni). Beberapa konsekuensi politik teori Marxis dan Neo-Marxis adalah:

1. Karena Marxis dan Neo-Marxis mengenai sebab-sebab pembangunan dan keterbelakangan didasarkan pada upaya pengakumulasian tanpa henti, maka alternatif setiap transformasi harus mulai dengan buruh di desa dan urban. Karena buruh pedesaan dan buruh urban disebagian besar negara berkembang miskin dan tidak memiliki kekuatan, akibat politik pertama dan paling penting adalah pembentukan sebuah atau beberapa partai politik untuk mengekspresikan kepentingan mereka secara konkrit. (Tindakan itu sendiri seringkali merupakan tindakan revolusioner di Dunia Ketiga karena pelarangan partai politik di banyak Negara Dunia Ketiga, khususnya partai-partai kiri)
2. Tindakan politik mutlak didasarkan pada informasi paling akurat; sehingga akibat politik yang penting dari perspektif Marxis dan Neo-Marxis yang kedua adalah bahwa kaum intelektual dan kaum buruh terlibat bersama dalam studi yang mendalam mengenai situasi sosial, ekonomi dan politik lokal yang mereka alami. Kedua kelompok ini menaruh perhatian khusus terhadap cara-cara bagaimana situasi "lokal" ini dipengaruhi oleh sistem ekonomi dan politik dunia. Menjadi suatu keharusan, bahwa segala bentuk informasi yang tersedia bagi kelompok-kelompok non-elit, sehingga kelompok-kelompok non-elit bisa turut serta dalam pembuatan keputusan yang menyangkut masa depan mereka dan akhirnya menghapuskan beberapa kelemahan yang mereka alami.
3. Setelah mempelajari situasi politik dan ekonomi lokal, partai politik yang radikal harus memperdebatkan taktik dan strategi yang tepat untuk mendapatkan pengakuan kebutuhan buruh internal dan kebutuhan buruh seluruh negara berkembang di tingkat internasional. Secara khusus, partai politik radikal harus membuat keputusan yang strategis tentang apakah akan menjalankan kebijaksanaan reformis dibawah institusi pemerintah dan institusi ekonomi yang ada atau akan menjalankan strategi revolusioner menentang institusi-institusi yang mapan. Jelasnya, bentuk keputusan tersebut bukanlah keputusan yang bisa dibuat secara gampang, karena pemilihan suatu aksi revolusioner akan menjadi bencana besar ketika sebenarnya hasil-hasil nyata bisa didapatkan dengan suatu strategi reformis, seperti yang dijalankan oleh kelompok-kelompok Marxis di Amerika Latin, Asia dan Afrika. Bagaimanapun, hal ini merupakan keputusan yang tidak bisa dihindarkan oleh Partai-partai Kiri, dan harus menjadi perhatian sungguh-sungguh pada waktu terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan ditingkat internal dan internasional.

⁷⁴ Misalnya, Leys, *op. cit.*, dan Bernstein, *op. cit.*

4. Campur tangan negara dalam perekonomian menjadi tema sentral bagi setiap partai sosialis, apakah itu sosial demokrat atau Marxis-Leninis. Penguasaan terhadap institusi-institusi negara mendapatkan prioritas utama dalam semua program sosialis. Penentuan tentang jalan yang tepat dalam mencapai penguasaan terhadap eksekutif, legislatif, administrasi, institusi pemaksa dan pengadilan akan tergantung pada apakah strategi yang dipilih tersebut evolusioner atau revolusioner. Satu hal yang pasti, tanpa penguasaan terhadap perangkat negara, tidaklah mungkin mengekspresikan teori atau ideologi Marxis atau Neo-Marxis secara konkrit.
5. Partai-partai sosialis yang memegang kekuasaan atas institusi negara masih harus menentukan bagaimana menyediakan kesempatan kerja, infrastruktur, dan menentukan cara-cara dan sarana mencapai pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, tanpa menyebutkan pencarian cara-cara dan sarana untuk membuat rakyat turut serta dalam pembuatan keputusan. Oleh karenanya, suatu partai sosialis yang berkeinginan menerapkan program atau serangkaian kebijaksanaan yang bersumber pada analisis Marxis dan Neo-Marxis tentang sistem kapitalis dunia masih harus memutuskan lagi apakah harus menerapkan solusi yang ultraradikal atau semiradikal.

Yang jelas adalah bahwa ekonomi dunia kapitalis dewasa ini berada dalam krisis, dan pembangunan keterbelakangan semakin menguat setiap harinya. Negara-negara industri maju tampaknya memutuskan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi mereka dengan mengintensifkan eksploitasi terhadap Dunia Ketiga.⁷⁵ Kebanyakan pengamat dengan tegas mengakui bahwa eksploitasi dan super eksploitasi membutuhkan reaksi yang radikal. Para pengamat juga dengan jelas mengetahui bahwa kaum kiri di dunia ketiga tidak terorganisasi dan tidak mampu memberikan reaksi semacam ini. Kita selalu mendapati suatu pengakuan yang meluas terhadap diagnosis radikal atas sifat mendua pembangunan atau keterbelakangan, namun hanya beberapa prasarana politik yang mampu memberikan ungkapan organisasional dari ideologi radikal ini. Dalam ketiadaan prasarana tersebut, gerakan keagamaan dan nasionalisme populis mengalami kebangkitan yang dramatis di Iran, Malaysia, Indonesia,⁷⁶ dan ditempat-tempat lain. Apakah gerakan-gerakan ini mampu mencapai bentuk pembangunan yang sesungguhnya, akan tergantung pada kemampuan gerakan-gerakan tersebut memberikan ungkapan konkret terhadap akibat-akibat politik teori pembangunan Marxis dan Neo-Marxis yang radikal.[]

⁷⁵ A.G. Frank, menyebutkan proses ini sebagai "Super Eksploitasi di Dunia Ketiga". Lihat *Two Thirds*, Nol. 1, No. 2, fall 1978, p. 15-28.

⁷⁶ Untuk memperjelas pandangan tersebut, secara kronologis kita bisa melihat sejarah perkembangan partai politik di Indonesia, mulai dari fusi partai-partai untuk mengendalikan politik kepartaian di Indonesia. Pada tahun 1960 Presiden Sukarno mengurangi jumlah partai dari kira-kira 25 menjadi 10, yang mewakili ideologi nasionalisme (PNI, PARTINDO, IPKI), Islam (NU, PSII, Perti), Kristen (PARKINDO, Partai Katholik) serta Marxisme (PKI, Murba). Setelah peralihan kekuasaan pada 19 Maret 1960, PKI dibubarkan dan PARTINDO ditindas, dan sebuah partai Islam baru dibentuk (PARMUSI) pada tahun 1968. Kesembilan partai ini menjadi kontestan dalam Pemilihan Umum 1971. Pada 27 Februari 1970, era residen Soeharto, terjadi pembenukan dua koalisi di dalam DPR pada maret 1970. Mereka adalah Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, IPKI, Murba, PARKINDO, dan Partai Katholik, dan Kelompok Persatuan Pembangunan, yang terdiri dari NU, PARMUSI, PSII, dan Perti. Pada Januari 1973 Kelompok Persatuan Pembangunan menjadi PPP dan Kelompok Demokrasi Pembangunan menjadi PDI. Sejak itu Indonesia memiliki sistem tiga partai: Golkar, PDI, PPP. Dan setelah Rezim Orde Baru runtuh yang menjadi cikal-bakal gerakan reformasi birokrasi juga diikuti oleh konsekuensi sistem multipartai dalam kontestasi politik untuk mencapai kekuasaan pemerintahan. Untuk penjelasan lebih lengkap baca, Dr. Mohtar Mas'ud, *Negara, Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), khususnya baca pada BAB. III., "Kebijakan Pembangunan Sebagai Kendala Demokrasi", p. 63-135.

Hand-Out 42

TEORI-TEORI PEMBANGUNAN; SEBUAH ANALISIS KOMPARATIF

Teori-teori Utama Pembangunan Ekonomi: Lima Pendekatan

- Teori Tahapan Linier (linear-stages-of-growth models);
- Model Perubahan Struktural (the structural change theories and patterns);
- Revolusi Ketergantungan Internasional (international dependence revolution);
- Kontrarevolusi Pasar Bebas Neo-klasik (neoclassical free-market counterrevolution);
- Teori Pertumbuhan yang Baru (new or endogenous theory of economic growth).

Dekade 1950-an dan 1960-an

- Para teorisi cenderung memandang proses pembangunan sebagai serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, yang pasti akan dialami oleh setiap negara yang menjalankan pembangunan.
- Pandangan ini merupakan suatu bentuk teori ekonomi yang menyoroti pembangunan sebagai paduan dan kuantitas tabungan nasional, penanaman modal, dan bantuan asing dalam jumlah yang tepat.
- Kesemuanya itu harus sedapat mungkin diupayakan serta diadakan oleh negara-negara Dunia Ketiga agar mereka juga dapat menapaki jalur-jalur pertumbuhan ekonomi modern yang menurut sejarahnya telah dilalui dengan sukses oleh negara-negara yang sekarang maju.
- Dengan demikian, pembangunan itu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi agregat secara cepat.

Dekade 1970-an

- Pendekatan tahapan-linier tergusur oleh dua aliran pemikiran ekonomi, yang sesungguhnya lebih berbau ideologis daripada akademis.
- Aliran pemikiran yang pertama menitikberatkan pada teori dan pola perubahan.
- Aliran pemikiran yang kedua adalah revolusi ketergantungan internasional.

Aliran Pemikiran yang Pertama

- Menggunakan teori-teori ekonomi modern dan analisis statistik guna melukiskan proses struktural internal yang harus dialami oleh negara-negara berkembang agar mampu dan berhasil menciptakan serta sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonominya yang cepat.

Aliran Pemikiran yang Kedua

- Bersifat radikal dan lebih berorientasi politik.
- Memandang keterbelakangan negara-negara berkembang sebagai akibat pola hubungan kekuasaan internasional yang tidak adil.
- Perhatian utama teori ini ditujukan pada pentingnya menyusun kebijakan baru untuk menghapuskan kemiskinan secara total, menyediakan kesempatan kerja yang lebih bervariasi, dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.
- Teori ini cenderung menyangsikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi akan dapat diraih melalui cara-cara yang dianjurkan secara gencar oleh model-model pertumbuhan bertahap linier maupun teori-teori perubahan struktural.

Dekade 1980-an

- Kontra-revolusi neoklasik (seringkali disebut neoliberal)
- menekankan pada peranan menguntungkan yang dimainkan oleh pasarpasar bebas, perekonomian terbuka, dan swastanisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau negara yang kebanyakan memang tidak efisien dan boros.
- Menurut teori ini, kegagalan pembangunan tidak disebabkan oleh kekuatan-kekuatan eksternal maupun internal sebagaimana diyakini oleh para tokoh teorisi ketergantungan,

melainkan diakibatkan oleh terlalu banyaknya campur tangan dan regulasi pemerintah dalam kehidupan perekonomian nasional.

Akhir 1980-an dan Awal 1990-an

- Teori baru pertumbuhan ekonomi.
- Teori ini mencoba memodifikasikan dan mengembangkan teori pertumbuhan tradisional sedemikian rupa sehingga ia dapat menjelaskan mengapa ada sebagian negara yang mampu berkembang begitu cepat sedangkan yang lain begitu sulit atau bahkan mengalami stagnasi (kemacetan).
- Teori baru ini juga bermaksud menjelaskan mengapa meskipun konsep-konsep neoklasik seperti pasar bebas dan otonomi sektor swasta begitu gencar didengungkan, tetapi peranan pemerintah dalam keseluruhan proses pembangunan masih tetap sangat besar.

Teori Tahapan Linier

- Tahap-tahap Pertumbuhan Rostow.
- Model Pertumbuhan Harrod-Domar.
- Syarat-syarat yang Diperlukan dan yang Harus Ada : Beberapa Kritik Terhadap Model Pembangunan Bertahap.

Rostow: Stages of Growth Models of Development

(Model-model Pembangunan Pertumbuhan Bertahap)

- Menurut Rostow, dalam proses pembangunannya , suatu negara akan melalui beberapa tahapan yang utama sebagai berikut:
- Tahapan tradisional, dengan pendapatan per kapita yang rendah dan kegiatan ekonomi yang stagnan;
- Tahapan transisional, di mana tahap prakondisi bagi pertumbuhan dipersiapkan;
- Tahapan lepas landas (ini merupakan permulaan bagi adanya proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan);
- Tahapan awal menuju ke kematangan ekonomi ; serta
- Tahapan produksi dan konsumsi massal yang bersifat industri (inilah tahapan pembangunan atau development stage).

Harrod-Domar Growth Model (Model Pertumbuhan Harrod-Domar)

- Sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan fungsional secara ekonomis antara berbagai variabel pokok ekonomi.
- Pada intinya model ini menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP (g) secara langsung tergantung pada tingkat tabungan nasional (s) dan sebaliknya akan menentukan rasio modal-output (k), sehingga persamaannya adalah $g = s/k$.
- Persamaan tersebut mengambil nama dari dua orang ekonom terkemuka, yakni Sir Roy Harrod dari Inggris dan E. V. Domar dari Amerika Serikat.

Syarat-syarat yang Diperlukan dan yang Harus Ada:

Beberapa Kritik Terhadap Model Pembangunan Bertahap

- Gagasan dasar tentang pembangunan yang terkandung dalam teori-teori pertumbuhan bertahap tersebut di atas tidak selalu berlaku.
- Alasan utama tidak berlakunya teori tersebut bukan karena tabungan dan investasi tidak lagi merupakan syarat penting (necessary condition) bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi,
- Akan tetapi karena dalam kenyataannya telah terbukti bahwa pengadaan tabungan dan investasi itu saja belumlah syarat cukup (sufficient condition) untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Necessary Condition (Syarat Perlu)

- Syarat yang diperlukan demi terjadinya suatu peristiwa meskipun mungkin jika syarat itu tidak disertai oleh yang lain, maka peristiwa tersebut bisa tidak terjadi.

- Sebagai contoh, pembentukan modal (capital) merupakan syarat perlu guna menunjang pertumbuhan ekonomi (sebelum pertumbuhan output terjadi, harus ada alatnya dahulu untuk menghasilkan output tersebut).
- Akan tetapi, agar pertumbuhan tersebut bisa berlangsung secara berkesinambungan, maka harus ada pula perubahan sosial, kelembagaan dan sikap yang bersifat menunjang.

Sufficient Condition (Syarat Cukup)

- Suatu kondisi atau syarat yang harus dipenuhi guna memungkinkan sesuatu hal bisa terjadi.
- Sebagai contoh, menjadi mahasiswa dari sebuah universitas tertentu merupakan syarat cukup untuk menerima pinjaman dana dari Program Kredit Mahasiswa.
- Model pembangunan Rostow dan Harrod-Domar secara implisit ternyata mengasumsikan adanya sikap-sikap dan pengaturan yang sama di negara-negara terbelakang.
- Akan tetapi, asumsi itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di negara-negara Dunia Ketiga.
- Negara-negara tersebut masih sangat kekurangan faktor-faktor komplementer yang paling penting seperti halnya kecakapan manajerial, tenaga kerja yang terlatih, kemampuan perencanaan dan pengelolaan berbagai proyek pembangunan, dsb .
- Teori-teori pertumbuhan bertahap boleh dikatakan telah gagal total dalam memperhitungkan pelbagai kenyataan penting lainnya.
- Negara-negara Dunia Ketiga sekarang ini merupakan bagian integral dari suatu sistem internasional yang sedemikian rumit dan integratif, sehingga strategi-strategi pembangunan yang paling hebat dan terencana secara matang sekalipun dapat dimentahkan begitu saja oleh kekuatan-kekuatan asing yang keberadaan dan sepak-terjangnya sama sekali di luar kendali negara-negara yang bersangkutan.
- Maka muncullah pendekatan yang lebih baru dan radikal yang mencoba mengkombinasikan faktor-faktor ekonomi dan institusional ke dalam suatu model sistem baru mengenai kemajuan dan keterbelakangan internasional.
- Pendekatan itu selanjutnya disebut sebagai paradigma ketergantungan internasional.

Model Perubahan Struktural

- Mekanisme yang memungkinkan negara-negara terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan, dan lebih bervariasi, serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa yang tangguh.
- Model perubahan struktural tersebut dalam analisisnya menggunakan perangkat-perangkat neoklasik berupa konsep-konsep harga dan alokasi sumber daya, serta metode-metode ekonometri untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi.
- Aliran pendekatan perubahan struktural ini didukung oleh ekonom-ekonom yang sangat terkemuka seperti W. Arthur Lewis yang termasyur dengan model teoretisnya tentang " surplus tenaga kerja dua sektor " (two sector surplus labor) dan Hollis B. Chenery yang sangat terkenal dengan analisis empirisnya tentang " pola-pola pembangunan " (patterns of development).

Model Perubahan Struktural

- Teori Pembangunan Lewis: 1) Transformasi struktural (structural transformation). 2) Model dua-sektor Lewis (Lewis two-sector model).
- Perubahan Struktural dan Pola-pola Pembangunan.
- Kesimpulan-kesimpulan dan Implikasinya.

Structural Transformation (Transformasi Struktural)

- Proses pengubahan struktur industri dari suatu perekonomian agar kontribusi sektor manufaktur terhadap pendapatan nasional (national income) lebih tinggi daripada sektor pertanian.

- Dapat juga diartikan sebagai perubahan komposisi industri dalam perekonomian.
- Misalnya: primary sector, secondary sector, dan tertiary industrial sector.

Lewis Two- Sector Model (Model Dua-sektor Lewis)

- Teori pembangunan yang menyatakan bahwa jika surplus tenaga kerja (surplus labor) dari sektor pertanian tradisional bisa dialihkan ke sektor industri modern yang daya serap tenaga kerjanya semakin tinggi, maka hal itu akan mempromosikan industrialisasi dan dengan sendirinya akan memacu adanya pembangunan secara berkesinambungan.

Revolusi Ketergantungan Internasional (International Dependence Revolution)

- Model Ketergantungan Neokolonial
- Model Paradigma Palsu
- Tesis Pembangunan Dualistik

Model Ketergantungan Neokolonial (Neocolonial Dependence Model)

- Suatu model yang dalil utamanya menyatakan bahwa terjadi dan berlarut-larutnya keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga disebabkan oleh aneka kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan bahkan budaya eksploitatif yang dimainkan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, sehingga tidak ubahnya ketika mereka memperlakukan wilayah jajahannya di masa sebelumnya.

Model Paradigma Palsu (False-paradigm Model of Underemployment)

- Bahwa negara-negara Dunia Ketiga telah gagal mencapai kemajuan yang cukup berarti karena strategi pembangunan mereka (biasanya disarankan oleh pakar ekonomi Barat) didasarkan pada model-model pembangunan "yang keliru " yang jelas tidak cocok dengan kebutuhan mereka yang mendasar.
- Model pembangunan yang selama ini telah mereka terapkan terlalu menekankan pada akumulasi kapital (capital accumulation) tanpa memberi perhatian secukupnya pada perlunya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial dan kelembagaan.

Tesis Pembangunan Dualistik

- Pandangan ini melihat dunia terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni negara-negara kaya dan miskin.
- Di negara-negara kaya memang masih ada sebagian penduduknya yang miskin, dan sebaliknya di negara-negara miskin pun ada segelintir penduduknya yang makmur sejahtera.
- Dualisme (dualism) adalah sebuah konsep yang dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi pembangunan.
- Konsep ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus melebar antara negara-negara kaya dan miskin, serta di antara orang-orang kaya dan miskin pada berbagai tingkatan di setiap negara.
- Pada dasarnya, konsep dualisme ini terdiri dari empat elemen kunci sebagai berikut:
 1. Di setiap tempat dan konteks, selalu saja ada sejumlah elemen "superior " dan sekaligus elemen "inferior ";
 2. Koeksistensi tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat sementara atau transisional, melainkan sesuatu yang bersifat baku, permanen atau kronis.
 3. Kadar superioritas serta inferioritas dari masing-masing elemen tersebut bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, melainkan bahkan cenderung meningkat.
 4. Hubungan saling-keterkaitan antara elemen-elemen yang superior dengan elemenelemen lainnya yang inferior tersebut terbentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keberadaan elemen-elemen superior sangat sedikit atau sama sekali tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemen-elemen yang inferior.
- Dengan demikian, apa yang disebut sebagai prinsip "penetesan kemakmuran ke bawah " (trickle down effect) itu sesungguhnya sulit diterima.

- Bahkan di dalam kenyataannya, elemen-elemen superior tersebut justru tidak jarang memanfaatkan, memanipulasi, mengeksploitasi ataupun menggencet elemen-elemen yang inferior.
- Jadi, yang mereka kembangkan justru keterbelakangannya.

Kontrarevolusi Pasar Bebas Neoklasik (Neoclassical Free-market Counterrevolution);

- Tantangan bagi Pendekatan Statis: 1) Pasar Bebas, 2) Pilihan Rasional, 3) Ramah Terhadap Pasar
- Teori Pertumbuhan Neoklasik Tradisional ('Lama')

Pasar Bebas

- Kondisi keterbelakangan negara-negara berkembang bersumber dari buruknya keseluruhan alokasi sumber daya yang selama ini bertumpu pada kebijakan-kebijakan pengaturan harga yang tidak tepat dan adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan.
- Oleh karena itu, dengan membiarkan pasar bebas (free markets) hadir dan beroperasi secara penuh, pelaksanaan swastanisasi perusahaan milik pemerintah, promosi perdagangan bebas dan pengembangan ekspor, menarik para investasi asing (misalnya, investor dari negara-negara maju), serta pembatasan regulasi dan distorsi harga pada pasar input, pasar output maupun pasar keuangan, maka, efisiensi serta pertumbuhan ekonomi akan terpacu secara lebih optimal.

Pilihan Rasional

- Bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam urusan-urusan ekonomi selalu salah, sehingga setiap bentuk intervensi pemerintah harus dijauihi.
- Pandangan pedas ini bertolak dari asumsi dasar yang meyakini bahwa sikap, tindakan, dan keputusan para politisi, birokrat, warga negara biasa, apalagi pejabat pemerintah, senantiasa bertolak dari kepentingan-kepentingan mereka sendiri, tidak peduli apa konsekuensinya terhadap pihak lain.

Ramah Terhadap Pasar

- Pendekatan ini mengakui adanya berbagai kelemahan atau ketidaksempurnaan pasar, baik itu pasar produk maupun pasar faktor, di negara-negara Dunia Ketiga, dan bahwa pemerintah memang perlu menjalankan peran aktif dalam perekonomian, khususnya untuk mengoreksi pelbagai ketidaksempurnaan pasar itu.
- Yang ditekankan oleh pendekatan ini adalah, intervensi pemerintah itu haruslah bersifat & quot; nonselektif & quot; atau ramah terhadap (disesuaikan dengan) mekanisme pasar.

Teori Pertumbuhan Neoklasik Tradisional ('Lama')

Traditional (Old) Neoclassical Growth Theory

- Model pertumbuhan Robert Solow yang menyatakan bahwasanya ekuilibrium pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang itu sama dengan nol, dan pendapatan per kapita dari semua negara cenderung merasa atau menjadi sama besarnya.
- Teori ini sendiri bertolak dari konsep persaingan sempurna (perfect competition) dan prinsip skala hasil (returns to scale) yang konstan.

Teori Pertumbuhan yang Baru

(New or Endogenous Theory of Economic growth)

- Merupakan pengembangan dan modifikasi dari teori pertumbuhan tradisional (traditional growth theory) yang khusus dirancang untuk menjelaskan alasan mengapa ekuilibrium pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang bisa positif dan bervariasi di kalangan negara-negara, dan mengapa pula arus modal justru cenderung mengalir dari negara-negara miskin ke negara-negara maju yang tentunya lebih kaya, meskipun rasio modal-tenaga kerja (capital-labor ratio) di negara-negara miskin tersebut masih rendah.[]

Hand-Out 43 PERSPEKTIF TEORI MODERNISASI DAN TEORI DEPENDENSI

Prawacana

Menarik untuk dikritisi dan dianalisis pendapat R. Kristiawan dalam artikel yang berjudul '*Mediasi: Fakta Pascahegemoni*' mengkritik konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, karena wacana Gramsci ternyata tidak membantu untuk mengerti interdependensi (bukan dependensi) kultural antara dunia Barat dan dunia Timur maupun antara dunia Utara dan Selatan. Dalam konteks hubungan antar negara, menurut penulis, konsep Gramsci mempengaruhi munculnya teori imperialisme budaya seperti yang pernah dilontarkan ahli komunikasi Belanda Cees Hamelink. Melalui jembatan pembangunanisme, Barat juga telah melakukan penetrasi besar-besaran dalam kehidupan ekonomi negara dunia berkembang hingga berujung pada globalisasi saat ini. Relasi dalam globalisasi adalah manifestasi ekspansi ekonomi transnasional dalam semangat dasar kapitalisme. Kepentingannya beragam mulai dari penaklukan ekonomi sampai ekspansi pasar. Karena ekspansi ekonomi dan politik inheren dengan ekspansi kebudayaan, maka kebudayaan akan cenderung mendukung kebijakan ekonomi dan politik itu.

Gramsci menyimpulkan bahwa budaya Barat sangat dominan terhadap budaya di negara-negara berkembang, sehingga negara berkembang terpaksa mengadopsi budaya Barat. Namun kenyataannya, dalam dunia kebudayaan populer dapat diambil asumsi bahwa globalisasi "wajah lain dari kapitalisme internasional" telah melakukan penetrasi kultural ke segala mata angin dunia, maka seharusnya ekspresi kebudayaan dunia akan bermuka tunggal dalam satu kontrol. Seluruh ekspresi kebudayaan termasuk ekspresi simboliknya akan mengacu pada ekspresi dominan dalam nama pasar. Tidak ada celah lagi untuk menjadi independen secara simbolik karena rekayasa elitis yang terlanjur disepakati oleh moralitas, kognisi, dan afeksi masyarakat bawah. Namun, berdasarkan fakta, penulis melihat rumus hegemonian itu tidak sepenuhnya bekerja dengan baik. Cara pandang ofensi versus resistensi terasa terlalu sederhana apabila dilihat dinamika budaya yang tidak sefrontal itu. Publik dengan mudah memadukan segala unsur dengan tetap menampilkan identitasnya, dan itulah realitas politik kebudayaan pada umumnya, karena kadang ekspresi tidak butuh ideologi. Estetika bisa saja menjadi determinan. Proses globalisasi itu memang jauh lebih kompleks. Posisi media massa seperti halnya lembaga sosial lain dengan kenyataan tersebut dapat berfungsi sebagai sarana ampuh dalam mereproduksi dan merawat ketaatan publik. Media massa lebih tepat disebut sebagai mediasi, karena di sanalah segala macam simbol dari berbagai latar identitas budaya bisa saling bertemu. Hasil interaksi antar simbol itu akan bersintesis dan menemukan bentuk ekspresi baru. Bentuk baru itu ada dalam spektrum yang amat luas dan tidak melulu hegemonik.

Gambaran Teori Modernisasi

Perspektif teori Modernisasi Klasik menyoroti bahwa negara Dunia Ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya. Sementara negara-negara Barat dilihat sebagai negara modern. McClelland menyarankan agar Dunia Ketiga mengembangkan dirinya untuk memiliki nilai-nilai kebutuhan berprestasi yang dimiliki Barat untuk menumbuhkan dan mengembangkan kaum wiraswasta modernnya. Artikel diatas, menggambarkan keinginan kuat masyarakat untuk mengadaptasi nilai-nilai 'gaya hidup'. Barat sebagai identitas modernnya. Secara kasat mata dapat dikatakan telah terjadi proses homogenisasi budaya dunia. (fastfood) dengan hanya mencontoh (akulturasi) atau melakukan '*cultural borrowing*' (westernisasi). Hal ini sejalan dengan aliran pemikiran yang berakar pada perspektif fungsionalisme maka aliran modernisasi memiliki ciri-ciri dasar antara lain: 'Sumber perubahan adalah dari dalam atau dari budaya masyarakat itu sendiri (internal resources) bukan ditentukan unsur luar'. Modernisasi pada artikel diatas digambarkan tidak hanya menyentuh wilayah teknis, tetapi juga menyentuh nilai-nilai, adanya karakteristik ditemukan sebagian dari ciri-ciri manusia modern sebagaimana menurut Alex Inkeles (1969-1983) dalam teorinya 'Manusia Modern', yaitu : 1] Sikap membuka diri pada hal-hal yang baru. 2] Tidak terikat (bebas) terhadap ikatan institusi maupun penguasa tradisional. 3] Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan. 4] Menghargai ketepatan waktu. 4] Melakukan segala sesuatu secara terencana.

Bila dalam teori Modernisasi Klasik, tradisi dianggap sebagai penghalang pembangunan, dalam teori Modernisasi Baru, tradisi dipandang sebagai faktor positif pembangunan. Sebagaimana digambarkan pada artikel tersebut, masyarakat tradisional Indonesia pada dasarnya memiliki ciri yang dinamis, mengolah 'resistensi' serbuan budaya Barat sesuai dengan tantangan internal dan kekuatan eksternal yang mempengaruhinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Michael R. Dove dalam kajiannya tentang Indonesia, bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang dinamis dan selalu mengalami perubahan, mampu melakukan penyesuaian dengan baik terhadap kondisi lokal. Teori ini merumuskan implikasi kebijakan pembangunan yang diperlukan untuk membangun Dunia Ketiga sebagai keterkaitan antara negara berkembang dengan negara maju akan saling memberikan manfaat timbal balik, khususnya bagi negara berkembang. Teori Modernisasi, klasik maupun baru, melihat permasalahan pembangunan lebih banyak dari sudut kepentingan Amerika Serikat dan negara maju lainnya.

Gambaran Teori Dependensi

Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili 'suara negara-negara pinggiran' untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya dan intelektual dari negara maju. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori ini mencermati hubungan dan keterkaitan negara Dunia Ketiga dengan negara sentral di Barat sebagai hubungan yang tak berimbang dan karenanya hanya menghasilkan akibat yang akan merugikan Dunia Ketiga. Negara sentral di Barat selalu dan akan menindas negara Dunia Ketiga dengan selalu berusaha menjaga aliran surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara sentral.

Bila teori Dependensi Klasik melihat situasi ketergantungan sebagai suatu fenomena global dan memiliki karakteristik serupa tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Teori Dependensi Baru melihat situasi ketergantungan tidak lagi semata disebabkan faktor eksternal, atau sebagai persoalan ekonomi yang akan mengakibatkan adanya polarisasi regional dan keterbelakangan. Ketergantungan merupakan situasi yang memiliki kesejarahan spesifik dan juga merupakan persoalan sosial politik.

Pada artikel diatas, dalam konteks pembangunanisme, konsep Gramsci memang sangat dekat dengan dasar pemikiran teori dependensi (Cardoso), termasuk imperialisme struktural (Johan Galtung) dan imperialisme kultural (Herbert Schiller). Menurut Cardoso sebagai tokoh utama teori Dependensi Baru, negara Dunia Ketiga tidak lagi hanya semata bergantung pada asing, tetapi sebagai aktor yang aktif yang secara cerdas berusaha untuk bekerja sama dengan modal domestik dan modal internasional. Konsep ini dapat menjelaskan sekalipun dalam era globalisasi "wajah lain dari kapitalisme internasional" telah melakukan penetrasi kultural ke segala mata angin dunia, maka seharusnya ekspresi kebudayaan dunia akan bermuka tunggal dalam satu kontrol. Seluruh ekspresi kebudayaan termasuk ekspresi simboliknya akan mengacu pada ekspresi dominan dalam nama pasar. Tidak ada celah lagi untuk menjadi independen. Namun kenyataannya masyarakat secara cerdas memanfaatkan intrusi pasar itu menjadi terobosan identitas.

Analisa

R. Kristiawan sangat benar ketika mengkritik konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, karena wacana Gramsci ternyata tidak membantu untuk mengerti interdependensi (bukan dependensi!) kultural antara dunia Barat dan dunia Timur maupun antara dunia Utara dan Selatan. Proses globalisasi itu memang jauh lebih kompleks. Gramsci menyimpulkan bahwa budaya Barat sangat dominan terhadap budaya di negara-negara berkembang, sehingga negara berkembang terpaksa mengadopsi budaya Barat. Dalam konteks pembangunanisme, konsep Gramsci memang sangat dekat dengan dasar pemikiran teori dependensi (Cardoso), termasuk imperialisme struktural (Johan Galtung) dan imperialisme kultural (Herbert Schiller). Model-model pembangunan tersebut gagal karena empat faktor:

1. Proses diferensiasi di dunia ketiga sendiri, terutama kesuksesan ekonomi beberapa negara berkembang dengan menggunakan strategi yang berorientasi pada pasar dunia, justru menentang kesimpulan-kesimpulan utama teori hegemoni dan dependensi (Rullmann 1996).

2. Teori-teori tersebut memanfaatkan sebuah perspektif global dan dengan demikian tidak menyadari adanya ketidakseimbangan sosial, struktur patrimonial dan eksploitasi di negara-negara berkembang sendiri (Servaes, 1995).
3. Teori hegemoni dan dependensi ternyata gagal dalam mengusulkan solusi-solusi yang bermanfaat dalam konteks global (ibid).
4. Referensi historis yang mengarah kepada masa penjajahan dan hegemoni ekonomi global sebagai sebab kemacetan perkembangan di sebagian Dunia Ketiga harus dilihat sebagai hal yang sangat problematis. Perlu kita ingat bahwa Afghanistan misalnya, yang tidak pernah dijajah oleh negara Barat, sampai sekarang tetap tidak mampu berkembang, dilihat tidak hanya dari perspektif model demokrasi Barat.

Bahkan James D. Halloran, salah seorang penasehat komisi MacBride 20 tahun yang lalu, berpendapat bahwa riset terhadap perkembangan di Dunia Ketiga cenderung justru mempertajam ketergantungan negara-negara berkembang pada Barat. Persepsi tentang Antonio Gramsci oleh pakar sosiologi di dunia ketiga yang sangat positif itu barangkali terjadi karena mereka sering dengan mudah dan tidak kritis mengadopsi model dan teori sosiologi Barat yang sudah ketinggalan jaman seperti modernisme, dependensi dan hegemoni. Dengan demikian, tanggung jawab atas segala kegagalan di Dunia Ketiga bisa dilempar ke negara-negara maju.

Gramsci menyoroiti hubungan media massa, kelompok dominan, dan masyarakat menyiratkan hubungan yang hegemonik. 'Hegemoni' berupaya untuk menumbuhkan kepatuhan dengan menggunakan kepemimpinan politis dan ideologis. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dan konsensus. Dengan demikian media massa dapat ditafsirkan: 1) Sebagai medium tempat dimana wacana dari kepemimpinan politik dan ideologis disebarkan. 2) Sebagai arena tempat dimana keragaman praktek wacana dilakukan, dengan tujuan akhir adalah membangun konsensus dengan pihak yang lemah. Hasil konsensus ini digunakan kelas yang lemah untuk menafsirkan pengalamannya yang sebelumnya telah diintrodusir oleh pihak yang berkuasa atau kelompok dominan.

Sekalipun cukup banyak alasan untuk menjelaskan bagaimana media massa memiliki keterkaitan erat dengan cara-cara bagaimana kekuasaan dijalankan. Rezim-rezim yang memerintah di dunia, baik liberal maupun komunis, senantiasa memaknai media massa sebagai salah satu hal penting dalam konstruksi kekuasaannya. Sulit rasanya untuk menafsirkan media massa tanpa mengidentifikasi sederet karakteristiknya yang seringkali dipakai untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Media massa dalam beberapa hal berkaitan dengan struktur politik dan ekonomi yang ada. Disini inilah dapat ditelusuri potensi media berhubungan dengan kekuasaan, disaat media dianggap memiliki konsekuensi ekonomis tempat diperebutkannya kontrol dan akses. Dalam bentuknya yang paling sering dikenali, media kerap kali dianggap sebagai alat kekuasaan yang ampuh dikarenakan kemampuannya mempengaruhi orang lain, baik persepsi maupun tingkah laku. Menurut R. Kristiawan, media massa tidak merupakan 'alat penguasa untuk menciptakan reproduksi ketaatan. Media massa sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari masyarakat. Dalam bahasa teori sistem sosial yang terus menerus dikembangkan di Jerman, fungsi media massa adalah memungkinkan pengamatan diri masyarakat. Fungsi media massa sebenarnya bukan 'merekonstruksikan realitas sosial', sebagaimana ditulis oleh Ana Nadhya Abrar, pakar jurnalistik di Universitas Gadjah Mada (Abrar 1997). Dengan kata lain, media massa merupakan cermin kebaikan dan keburukan masyarakat, bukan mencerminkan (dalam arti meng-copy) keadaan masyarakat. Media di Indonesia maupun di negara lain sama parahnya dengan keadaan masyarakat.

Sebagian besar pakar cultural studies selama ini masih melihat konsumsi media massa sebagai proses penciptaan budaya yang berkaitan dengan kuasa dan mengandung bahaya hegemoni Barat. Demikian juga pakar-pakar sosiologi yang memanfaatkan potensi teori sistem sosial pasca-Talcott Parsons. Proses penyampaian pesan dalam ilmu komunikasi kini dipandang sebagai proses yang dinamis dan transaksional. Artinya, khalayak juga aktif dalam proses tersebut. Publik tidak tinggal diam dan menerima pesan-pesan media massa begitu saja, melainkan paling tidak memilih pesan yang layak diterima. Sebaliknya, media juga sangat tergantung pada nilai-nilai kultural masyarakat pada umumnya. Seorang wartawan mengamati realitas dengan maksud membuat berita

yang relevan dan informatif buat pembacanya. Menurut Mc Quail, teori Dependensi Media dari De Fleur & Ball Rokeach, bisa dikatakan 'beraroma' fungsionalis. Teori ini mengatakan tentang ketergantungan relatif khalayak terhadap media sebagai sumber informasi (dibandingkan dengan sumber informasi lainnya). Dengan kata lain semakin tinggi ketergantungan masyarakat terhadap media bagi perolehan informasi dan semakin tinggi ketidakstabilan masyarakat, maka semakin tinggi pula kekuasaan yang dimiliki media dari perannya tersebut.

Kesimpulan

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa imperialisme dan globalisasi sesungguhnya dua fenomena dengan pesan yang sama, 'perluasan daerah kekuasaan modernisasi'. Dampak aliran ini dalam suatu sisi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, dimana dominasi barat dalam segala bidang menjadi suatu bentuk penjajahan baru terutama dalam bidang budaya dan ekonomi (neo kolonialisme dan imperialisme). Kita memang tidak sedang dihadapkan pada persoalan simpel apakah mau memilih menjadi tradisional atau modern. Sebab produk modernitas *de facto*, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup keseharian kita. Fastfood, Televisi, mobil, pesawat telepon, mesin cuci, parabola, komputer hingga mainan anak-anak, telah menjadi kebutuhan masyarakat yang tak terelakkan. Inilah yang menjadikan masalah bertambah rumit. Di satu sisi, masyarakat tidak bisa mengelak dari serbuan modernitas, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa melepaskan diri dari pelukan tradisi. Disinilah keterbelahan terjadi. Dan sepanjang tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk menuntaskan dan mencari format baru yang merupakan sintesa tuntas dari keduanya, tidak bakal ada sebuah bangunan masyarakat kokoh yang bisa menjadi landasan bagi pembangunan bersprespektif jangka panjang. Pencarian format ini sungguh sebuah proyek sosial yang akan amat menentukan perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

Media masa sebagai bagian dari suatu sistem, sesungguhnya merupakan sarana yang memungkinkan institusi-institusi lain berjalan. Institusi sosial, dalam hal ini, pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga (3) entitas besar: politik, ekonomi, budaya. Institusi politik mengambil fungsi dalam proses pengambilan keputusan yang ditandai dengan keikutsertaan dalam kekuasaan politik. Institusi ekonomi mengambil fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan material, sementara institusi sosial budaya berfungsi meningkatkan kehidupan masyarakat untuk lebih bermakna (immaterial), sedangkan media massa membantu memberikan ruang yang memungkinkan institusi politik, ekonomi, dan budaya berjalan. Untuk itu media massa, karena terkait dengan informasi sebagai poros aktifitasnya, dapat menjalankan fungsi politik, ekonomi ataupun sosial budaya. Namun demikian pandangan yang menganut peran media massa yang fungsional semacam itu tidaklah cukup memadai untuk memahami realitas media massa dengan ciri kuatnya perangkat politik dan ideologisnya. Kentalnya dimensi ideologis dalam wacana media tentu saja tidak muncul dalam wajahnya yang historis tetapi simbolik. Wajah simbolik ini muncul salah satunya dalam 'politik bahasa' yang akan merujuk pada pengertian penggunaan bahasa dalam proses-proses sosial. Bahasa dalam hal ini merupakan medium hegemonik yang digunakan kelompok dominan terhadap masyarakat lain.[]

James D. Halloran, salah seorang penasehat komisi MacBride 20 tahun yang lalu, berpendapat bahwa riset terhadap perkembangan di Dunia Ketiga cenderung justru mempertajam ketergantungan negara-negara berkembang pada Barat. Persepsi tentang Antonio Gramsci oleh pakar sosiologi di dunia ketiga yang sangat positif itu barangkali terjadi karena mereka sering dengan mudah dan tidak kritis mengadopsi model dan teori sosiologi Barat yang sudah ketinggalan jaman seperti modernisme, dependensi dan hegemoni. Dengan demikian, tanggung jawab atas segala kegagalan di Dunia Ketiga bisa dilempar ke negara-negara maju.

Hand-Out 44

PEMBANGUNAN, MODERNISASI, DAN PERMASALAHANNYA

Teori pembangunan dikembangkan sebagai upaya untuk mencegah gerakan-gerakan yang menentang kapitalisme (anti kapitalisme) dan juga sebagai strategi baru untuk mengganti tatanan sosial kolonialisme yang mulai runtuh. Wacana tentang pembangunan itu sendiri muncul pada tahun 1949 saat Presiden Harry S. Truman mengumumkan kebijakan pemerintahannya dan kemudian menjadi doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan *developmentalism* sesungguhnya dilontarkan dalam rangka membendung sosialisme sehingga merupakan bungkus baru dari kapitalisme (Irene Geindzeir: 1985).

Wacana tentang pembangunan pun mendapat dukungan dari para akademisi dengan jalan menyumbangkan pikiran-pikiran mereka dalam wujud teori-teori tentang *development* dan modernisasi. Teori-teori tersebut diantaranya dari W.W. Rostow (1960) yang melihat bahwa pembangunan sebagai proses evolusi dari masyarakat yang tradisional ke modern melalui 5 tahapan atau *five-stage scheme*. Lima tahap ini menurut Rostow dimulai dari tahap masyarakat tradisional, kemudian pra-kondisi tinggal landas, diikuti dengan tahapan tinggal landas, kemudian mencapai tahap kematangan pertumbuhan, hingga berakhir pada tahap masyarakat konsumsi tinggi. Berdasarkan pada kerangka tahapan-tahapan tersebut maka Rostow menyatakan pentingnya untuk negara-negara Dunia Ketiga melakukan pembangunan sebagai upaya mencapai tahap akhir dari pertumbuhan ekonomi.

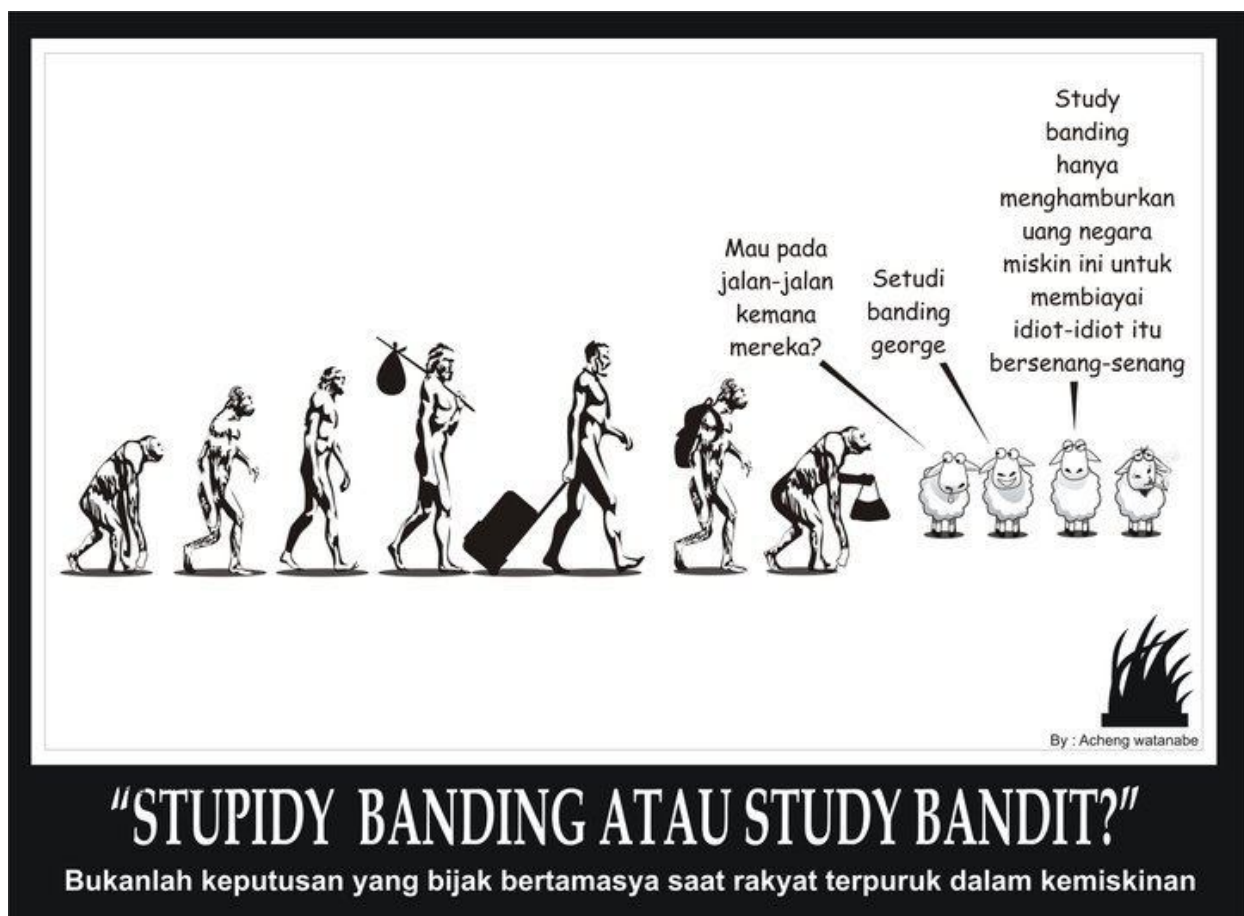
Pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang secara otomatis melalui akumulasi modal (tabungan dan investasi). Namun upaya ini tentu mengalami kendala yaitu ketersediaan dana investasi yang produktif di negara Dunia Ketiga tersebut. Sebuah alternatif untuk menanggulangi hal ini adalah dengan penyediaan bantuan asing berupa modal, teknologi, dan skill atau tenaga ahli bagi negara Dunia Ketiga. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa memberi bantuan adalah jalan terbaik dalam membantu negara Dunia Ketiga menjalankan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang modern. Maka, Amerika Serikat memberikan dana yang besar jumlahnya untuk mendukung negara Dunia Ketiga membangun infrastruktur dan industri bahkan mereka juga mengirimkan ribuan tenaga ahlinya. Semua itu dilakukan dalam rangka membantu negara Dunia Ketiga mencapai tahap tinggal landas.

Teori dan konsep tentang pembangunan dan modernisasi yang ditawarkan kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara Dunia Ketiga, seperti negara-negara di Amerika Latin dan Asia Tenggara—termasuk Indonesia. Asumsinya adalah bahwa negara-negara tersebut akan mampu menuju tahap seperti negara-negara Dunia Pertama yang telah jauh lebih maju dan mencapai tahap tinggal landas hingga pada tahap masyarakat konsumsi tinggi. Bagaimanapun, asumsi ini dibangun dengan paradigma evolusi yang menganggap bahwa perkembangan atau perubahan masyarakat seperti garis lurus atau bersifat linear dan melalui rentang waktu yang panjang. Efek yang tidak dapat dihindari dari paradigma ini adalah adanya pandangan bahwa bentuk negara maju merupakan bentuk yang baik dan sempurna serta 'beradab'. Hal ini menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan bagi negara-negara Dunia Ketiga disamping karena pengaruh dari ahli-ahli ekonomi dari Barat yang melakukan pendekatan dan menawarkan 'resep' kepada para penguasa negara Dunia Ketiga tersebut.

Namun ternyata yang terjadi setelah proses pembangunan dan modernisasi tersebut dilaksanakan di negara-negara Dunia Ketiga tidak sesuai harapan dan keinginan pihak-pihak yang menghendaki masyarakatnya Dunia Ketiga maju seperti negara-negara Dunia Pertama. Ibarat seorang dokter yang salah memberikan resep kepada pasiennya maka para pakar-pakar pembangunan gagal membuktikan teori pertumbuhan ekonomi. Negara-negara Dunia Ketiga menjadi mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran seperti yang terjadi pada negara-negara di Amerika Latin. Kondisi ini menyebabkan munculnya teori-teori ketergantungan yang merupakan reaksi atas kegagalan *developmentalism* di negara-negara Amerika Latin. *Trickle down effect* atau teori peneteskan ke bawah yaitu keuntungan negara-negara pemilik modal (Dunia Pertama) atau metropolis akan diteteskan kepada negara-negara tempat investasi asing (Dunia Ketiga) atau satelit ternyata tidak terjadi.

Justru, keuntungan tersebut hanya menambah akumulasi modal yang ada di negara-negara metropolis sementara negara satelit tetap saja terbelakang dan tergantung pada negara metropolis (A.G.Frank:1973). Pada kasus Meksiko terjadi hal yang sangat tragis yaitu bagaimana Chiapas yang merupakan wilayah kaya potensi alam tetapi ternyata wilayah tersebut merupakan bagian yang termiskin di Meksiko. Yang lebih mencengangkan adalah ketika pembangunan yang terjadi telah mengubah struktur dan kehidupan masyarakat secara revolusioner bahkan radikal. Artinya, kenyataan yang ada sangat kontradiktif dengan teori pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berlandaskan kerangka evolusionis yaitu perubahan masyarakat terjadi secara perlahan. Bagaimanapun, pembangunan termasuk juga di dalamnya modernisasi adalah proses transformasi masyarakat di segala aspek kehidupan. Contohnya seperti yang terjadi pada negara Meksiko yang diharuskan mengubah sistem kepemilikan tanahnya agar lebih kondusif bagi pasar (investasi asing). Presiden Salinas pun secara sewenang-wenang mengamandemen pasal 27 UUD 1917 yang menjamin kepemilikan tanah komunal. Dampaknya adalah masyarakat adat dapat dengan mudah digusur karena tanah mereka dapat diperjualbelikan.

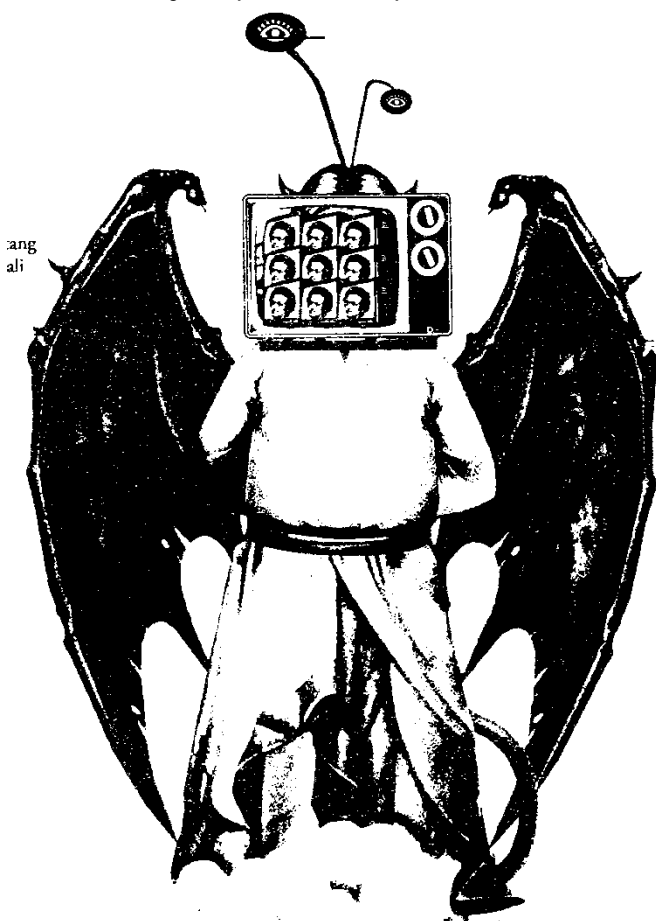
Implikasi selanjutnya adalah mereka secara tiba-tiba diharuskan memasuki dunia yang serba materialis dan sistem modern yang sama sekali berbeda dengan mereka. Hal yang sama terjadi dengan masyarakat suku terasing di Papua seperti suku Amungme, Kamoro, Dani, dan sebagainya. Dengan kehidupan mereka yang masih tergolong dalam stone age mereka dipaksa menerima kehidupan yang serba canggih dan modern karena hadirnya P.T. Freeport Indonesia di tengah wilayah adat mereka. Secara otomatis para anggota komunitas-komunitas tersebut mengalami kondisi yang disebut sebagai shock culture.[]





BAGIAN KESEPULUH DISKURSUS IDEOLOGI KAPITALISME DAN DEVELOPMENTALISME

Sistem ekonomi liberal yang dianut suatu negara untuk mengintegrasikan diri dalam sistem ekonomi pasar, telah menyebabkan makin meningkatnya angka kesenjangan dan kemiskinan di mana lebih dari 1,2 milyar penduduk bumi ini hidup dalam kemiskinan yang ekstrem—kurang dari satu dollar AS/ hari karena repatriasi keuntungan investasi dan utang yang ditanamkan di negara-negara miskin—sementara pemilik perusahaan Microsoft Bill Gates, berpendapatan US\$95 per detik. Bahkan kekayaan perusahaan-perusahaan multinasional—General Motors pada tahun 1997 telah



mencapai US\$ 164 milyar—sementara GDP Norwegia mencapai US\$ 153 milyar, dan GDP Indonesia US\$ 52,3 milyar. Makna kapitalisme untuk kepentingan publik tersebut, oleh Adam Smith diilustrasikan dengan sangat jelas: “Apa yang kita harapkan untuk makan malam kita tidaklah datang dari keajaiban dari si tukang daging, si pemasak bir atau si tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Malah seseorang umumnya tidak berkeinginan untuk memajukan kepentingan publik dan ia juga tidak tahu sejauh mana ia memiliki andil untuk memajukannya. Yang ia hormati dan ia kejar adalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Di sini ia dituntun oleh tangan-tangan yang tak terlihat (*the invisible hands*) untuk mengejar yang bukan bagian dari kehendak sendiri. Bahwa itu juga bukan merupakan bagian dari masyarakat, itu tidak lantas berarti suatu yang lebih buruk dari masyarakat. Dengan mengejar kepentingan sendiri, ia kerap kali memajukan kepentingan masyarakat lebih efektif dibandingkan dengan jika ia sungguh-sungguh bermaksud memajukannya. Saya tidak pernah

menemukan kebaikan yang dilakukan mereka yang sok berdagang demi kepentingan publik”. Premis ini di kemukakan Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* pendahuluan dan catatan pinggir oleh Edwin Cannan, New York: The Modern Library, 1973. Menurut Ayn Rand (1970), kapitalisme adalah “a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned”. (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat). Jorge Larraín memahami kapitalisme dengan menghadirkan paham komunisme. Ia mengemukakan “kapitalisme dicirikan oleh dominasi obyek atas subyek, modal atas pekerja, kondisi produksi atas produsen, buruh mati atas buruh hidup”. Bahkan menurut Karl Marx kapitalisme adalah hasil dari praktek reproduksi manusia.

Hand-Out 45 PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN KAPITALISME

Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya (Bagus, 1996). Ebenstein (1990) menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek (1978) memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi.

Menurut Ayn Rand (1970), kapitalisme adalah *"a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned"*. (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat). Heilbroner (1991) secara dinamis menyebut kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi sosial yang dimaksud mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat. Istilah "formasi sosial" yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam *Legitimation Crisis* (1988), Habermas menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial (primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme).

Sejarah Perkembangan Kapitalisme

Robert E. Lerner dalam *Western Civilization* (1988) menyebutkan bahwa revolusi komersial dan industri pada dunia modern awal dipengaruhi oleh asumsi-asumsi kapitalisme dan merkantilisme. Direduksi kepada pengertian yang sederhana, kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang didisain untuk mendorong ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju skala nasional dan internasional. Pengusaha kapitalis mempelajari pola-pola perdagangan internasional, di mana pasar berada dan bagaimana memanipulasi pasar untuk keuntungan mereka. Penjelasan Robert Lerner ini paralel dengan tuduhan Karl Marx bahwa imperialisme adalah kepanjangan tangan dari kapitalisme.

Sistem kapitalisme, menurut Ebenstein (1990), mulai berkembang di Inggris pada abad 18 M dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat laut dan Amerika Utara. Risalah terkenal Adam Smith, yaitu *The Wealth of Nations* (1776), diakui sebagai tonggak utama kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan *"laissez faire"*¹⁾ dalam ekonomi. Bertentangan sekali dengan merkantilisme yaitu adanya intervensi pemerintah dalam urusan negara. Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara (Robert Lerner, 1988).

Awal abad 20 kapitalisme harus menghadapi berbagai tekanan dan ketegangan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Munculnya kerajaan-kerajaan industri yang cenderung menjadi birokratis uniform dan terjadinya konsentrasinya pemilikan saham oleh segelintir individu kapitalis memaksa pemerintah (Barat) mengintervensi mekanisme pasar melalui kebijakan-kebijakan seperti undang-undang anti-monopoli, sistem perpajakan, dan jaminan kesejahteraan. Fenomena intervensi negara terhadap sistem pasar dan meningkatnya tanggungjawab pemerintah dalam masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan indikasi terjadinya transformasi kapitalisme. Transformasi ini, menurut Ebenstein, dilakukan agar kapitalisme dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan ekonomi dan sosial. Lahirlah konsep negara kemakmuran (*welfare state*) yang oleh Ebenstein disebut sebagai "perekonomian campuran" (*mixed economy*) yang mengkombinasikan inisiatif dan milik swasta dengan tanggungjawab negara untuk kemakmuran sosial.

Habermas memandang transformasi itu sebagai peralihan dari kapitalisme liberal kepada kapitalisme lanjut (*late capitalism*, *organized capitalism*, *advanced capitalism*). Dalam *Legitimation Crisis* (1988), Habermas menyebutkan bahwa *state regulated capitalism* (nama lain kapitalisme lanjut) mengacu kepada dua fenomena: (a) terjadinya proses konsentrasi ekonomi seperti korporasi-

korporasi nasional dan internasional yang menciptakan struktur pasar oligopolistik, dan (b) intervensi negara dalam pasar. Untuk melegitimasi intervensi negara yang secara esensial kontradiktif dengan kapitalisme liberal, maka menurut Habermas, dilakukan repolitisasi massa, sebagai kebalikan dari depolitisasi massa dalam masyarakat kapitalis liberal. Upaya ini terwujud dalam sistem demokrasi formal.

Prinsip-Prinsip Dasar Kapitalisme

1. Tiga Asumsi Kapitalisme Menurut Ayn Rand

Ayn Rand dalam *Capitalism* (1970) menyebutkan tiga asumsi dasar kapitalisme, yaitu: (a) kebebasan individu, (b) kepentingan diri (selfishness), dan (c) pasar bebas. Menurut Rand, kebebasan individu merupakan tiang pokok kapitalisme, karena dengan pengakuan hak alami tersebut individu bebas berpikir, berkarya dan memproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. Pada gilirannya, pengakuan institusi hak individu memungkinkan individu untuk memenuhi kepentingan dirinya.

Menurut Rand, manusia hidup pertama-tama untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang lain. Rand menolak keras kolektivisme, altruisme, mistisisme. Konsep dasar bebas Rand merupakan aplikasi sosial dan pandangan epistemologisnya yang natural mekanistik. Terpengaruh oleh gagasan "the invisible hand" dari Smith, pasar bebas dilihat oleh Rand sebagai proses yang senantiasa berkembang dan selalu menuntut yang terbaik atau paling rasional. Smith pernah berkata: "...free market forces is allowed to balance equitably the distribution of wealth". (Robert Lerner, 1988).

2. Akumulasi Kapital

Heilbroner (1991) menelaah secara mendalam pengertian hakiki dari kapital. Apa yang dimaksud dengan kapital sehingga dapat menjelaskan formasi sosial tempat kita hidup sekarang adalah kapitalisme? Heilbroner menolak memperlakukan kapital hanya dalam kategori hal-hal yang material berupa barang atau uang. Menurutny, jika kapital hanya berupa barang-barang produksi atau uang yang diperlukan guna membeli material dan kerja, maka kapital akan sama tuanya dengan peradaban.

Menurut Heilbroner, kapital adalah faktor yang menggerakkan suatu proses transformasi berlanjut atas kapital-sebagai-uang menjadi kapital-sebagai-komoditi, diikuti oleh suatu transformasi dari kapital-sebagai-komoditi menjadi kapital-sebagai uang yang bertambah. Inilah rumusan M-C-M yang diperkenalkan Marx. Proses yang berulang dan ekspansif ini memang diarahkan untuk membuat barang-barang dan jasa-jasa dengan pengorganisasian niaga dan produksi. Eksistensi fisik benda dan jasa itu merupakan suatu rintangan yang harus diatasi dengan mengubah komoditi menjadi uang kembali. Bahkan kalau hal itu terjadi, bila sudah terjual, maka uang itu pada gilirannya tidak dianggap sebagai produk akhir dari pencarian tetapi hanya sebagai suatu tahap dalam lingkaran yang tak berakhir.

Karena itu, menurut Heilbroner, kapital bukanlah suatu benda material melainkan suatu proses yang memakai benda-benda material sebagai tahap-tahap dalam eksistensi dinamikanya yang berkelanjutan. Kapital adalah suatu proses sosial, bukan proses fisik. Kapital memang mengambil bentuk fisik, tetapi maknanya hanya bisa dipahami jika kita memandang bahwa benda-benda material ini mewujudkan dan menyimbolkan suatu totalitas yang meluas. Rumusan M-C-M (Money-Commodity-Money) yang diskemakan Marx atas metamorfosis yang berulang dan meluas yang dijalani kapital merupakan penemuan Marx terhadap esensi kapitalisme, yaitu akumulasi modal. Dalam pertukaran M-C-M tersebut uang bukan lagi alat tukar, tetapi sebagai komoditas itu sendiri dan menjadi tujuan pertukaran.

3. Dorongan Untuk Mengakumulasi Kapital (Heilbroner)

Analisis kapital sebagai suatu proses ekspansif seperti yang diuraikan di muka, ditelaah lebih dalam lagi oleh Heilbroner melalui pendekatan psikoanalisis, antropologis, dan sosiologis. Menurut Heilbroner, gagasan kapital sebagai suatu hubungan sosial menyingkapkan inti hubungan itu, yaitu dominasi. Hubungan dominasi memiliki dua kutub. *Pertama*, ketergantungan sosial kaum yang tak mempunyai kepada pemilik kapital di mana tanpa ketergantungan itu kapital tidak memiliki

pengaruh apa-apa. *Kedua*, dorongan tanpa henti dan tanpa puas untuk mengakumulasi kapital. Heilbroner melontarkan pertanyaan: Apakah alasan pembenaran dari proses tanpa henti ini? Ia menyebutkan bahwa dorongan ini digerakkan oleh keinginan untuk prestise dan kemenonjolan (realisasi diri).

Dalam bahasa Abraham Maslow, dorongan mengakumulasi kekayaan yang tidak puas-puas ini merupakan manifestasi aktualisasi diri. Namun, Heilbroner mengingatkan bahwa kebutuhan afektif ini hanyalah suatu kondisi yang perlu (necessary condition) namun belum menjadi syarat cukup (sufficient condition) untuk dorongan mengejar kekayaan. Lalu Heilbroner menemukan bahwa kekayaan memberikan pemiliknya kemampuan untuk mengarahkan dan memobilisasikan kegiatan-kegiatan masyarakat. Ini adalah kekuasaan. Kekayaan adalah suatu kategori sosial yang tidak terpisahkan dari kekuasaan.

Dengan demikian, hakekat kapitalisme menurut Heilbroner, adalah dorongan tiada henti dan tanpa puas untuk mengakumulasi kapital sebagai sublimasi dorongan bawah sadar manusia untuk merealisasi diri, mendominasi, berkuasa. Karena dorongan ini berakar pada jati diri manusia, maka kapitalisme lebih merupakan salah satu modus eksistensi manusia. Mungkin inilah sebabnya mengapa kapitalisme mampu bertahan dan malah menjadi hegemoni peradaban global.

Tinjauan Kritis Kapitalisme

Tinjauan kritis ini dibuat dengan asumsi bahwa analisis sosial memiliki keterbatasan-keterbatasan skematisasi dinamika kehidupan sosial. Tinjauan tentang kekuatan dan kelemahan kapitalisme lebih merupakan hipotesa.

1. Kekuatan Kapitalisme

Unsur-unsur apa yang dikandung kapitalisme sehingga ia saat ini tetap tangguh? Terdapat beberapa kekuatan yang memungkinkan kapitalisme masih bertahan hingga kini melalui berbagai kritikan tajam dan rintangan. *Pertama*, daya adaptasi dan transformasi kapitalisme yang sangat tinggi, sehingga ia mampu menyerap dan memodifikasi setiap kritik dan rintangan untuk memperkuat eksistensinya. Sebagai contoh, bagaimana ancaman pemberontakan kaum buruh yang diramalkan Marx tidak terwujud, karena di satu sisi, kaum buruh mengalami pembekuan kesadaran kritis (reifikasi), dan di lain sisi, kelas borjuasi kapital melalui negara memberikan "kebaikan hati" kepada kaum buruh dengan konsep "welfare state". Pada gilirannya, kaum kapitalis memperoleh persetujuan (consent) untuk mendominasi masyarakat melalui apa yang disebut Gramsci sebagai hegemoni ekonomi, politik, budaya; atau seperti yang disebutkan Heilbroner bahwa rezim kapital memiliki kemampuan untuk memperoleh kepatuhan massa dengan memunculkan "patriotisme" ekonomik.

Kedua, berkaitan dengan yang pertama, tingginya kemampuan adaptasi kapitalisme dapat dilacak kepada waktu inheren pada hakekat kapitalisme, yaitu dorongan untuk berkuasa dan perwujudan diri melalui kekayaan. Atas dasar itulah diantaranya, maka Peter Berger dalam Revolusi Kapitalis (1990) berani bertaruh bahwa masa depan ekonomi dunia berada dalam genggamannya kapitalisme.

Ketiga, kreativitas budaya kapitalisme dan kapasitasnya menyerap ide-ide serta toleransi terhadap berbagai pemikiran. Menurut Rand, kebebasan dan hak individu memberi ruang gerak manusia dalam berinovasi dan berkarya demi tercapainya keberlangsungan hidup dan kebahagiaan. Dengan dasar pemikiran ini, Bernard Murchland dalam Humanisme dan Kapitalisme (1992) dengan penuh keyakinan menaruh harapan bahwa kapitalisme demokratis adalah humanisme yang dapat menyelamatkan peradaban manusia di masa depan.

2. Kelemahan Kapitalisme

Mengacu kepada asumsi-asumsi dasar kapitalisme, klaim-klaim pendukung kapitalisme dan praktek kapitalisme, terdapat beberapa kelemahan mendasar kapitalisme. *Pertama*, pandangan epistemologinya yang positivistik mekanistik. Positivisme yang memisahkan fakta dan nilai, bahkan hanya terpaku pada apa yang disebut fenomena fakta dan mengabaikan nilai, terbukti sudah ketidakmampuannya menjelaskan perkembangan sains modern dan kritikan dari fenomenologi hermeneutik (human sciences). Pola pikir positivistik hanya satu dimensi, yaitu dialektika positif,

yang pada gilirannya mereduksi kemampuan refleksi kritis manusia untuk menari makna-makna tersembunyi di balik fenomena-fenomena. Herbert Marcuse dalam *One Dimensional Man* (1991) berkata: "... Kapitalisme, yang didorong oleh teknologi, telah mengembangkan untuk mengisi semua ruang sosial kita; telah menjadi suatu semesta politis selain psikologis. Kekuasaan totalitarian ini mempertahankan hegemoninya dengan merampas fungsi kritisnya dari semua oposisi, yaitu kemampuannya berpikir negatif mengenai sistem, dan dengan memaksakan kebutuhan-kebutuhan palsu melalui iklan, kendali pasar, dan media. Maka, kebebasan itu sendiri menjadi alat dominasi, dan akal menyembunyikan sisi gelap irasionalitas..."

Kedua, berkaitan dengan yang pertama, asumsi antropologis yang dianut kapitalisme adalah pandangan reduksionis satu dimensi manusia yang berasal dari rasionalisme Aufklarung. Temuan alam bawa sadar psikoanalisis menunjukkan bahwa banyak perilaku manusia tidak didorong oleh kesadaran atau rasionalitas, melainkan oleh ketidaksadaran dan irasionalitas. Asumsi kapitalisme yang mengandaikan bahwa distribusi kekayaan akan terjadi dengan sendirinya bila masyarakat telah makmur (contoh: konsep *trickle down effect*) melupakan aspek irasionalitas manusia yang serakah dan keji. Dorongan yang tidak pernah puas menumpukkan kapital sebagai watak khas kapitalisme merupakan bentuk patologis megalomania dan narsisme.

Ketiga, keserakahan mengakumulasi kapital berakibat pada eksploitasi yang melampaui batas terhadap alam dan sesama manusia, yang pada gilirannya masing-masing menimbulkan krisis ekologis dan dehumanisasi. Habermas (1988) menyebutkan kapitalisme lanjut menimbulkan ketidakseimbangan ekologis, ketidakseimbangan antropologis (gangguan sistem personaliti), dan ketidakseimbangan internasional.

Keempat, problem moral. Bernard Murchland (1992), seorang pembela gigih kapitalisme, mengakui bahwa masalah yang paling serius yang dihadapi kapitalisme demokratis adalah pengikisan basis moral. Ia lalu menoleh ke negara-negara Timur yang kaya dengan komponen moral kultural. Atas dasar problem etis inilah, maka Mangunwijaya (1998) dengan lantang berkata: "... ternyata, bahwa sistem liberal kapitalis, biar sudah direvisi, diadaptasi baru dan diperlunak sekalipun, dibolak-balik diargumentasi dengan fasih ilmiah seribu kepala botak, ternyata hanya dapat berfungsi dengan tumbal-tumbal sekian milyar rakyat dina lemah miskin di seluruh dunia, termasuk dan istimewa Indonesia..."

Kelima, implikasi dari praktek mengkomoditikan segenap ide-ide dan kegiatan-kegiatan sosial budaya, maka terjadilah krisis makna yang pada gilirannya menimbulkan krisis motivasi. Habermas (1988) mengatakan bahwa pada tataran sistem politik, krisis motivasi ini menimbulkan krisis legitimasi, atau menurut istilah Heilbroner (1991) dengan krisis intervensi.

Epilog: Sebuah Catatan Kritis

Analisis Heilbroner di muka, jika dikembangkan lebih lanjut secara filosofis, akan membawa kita untuk berkesimpulan bahwa kapitalisme lebih daripada sekedar sistem ekonomi atau sistem sosial. Sebagai peradaban, kapitalisme dapat kita katakan sebagai suatu cara berada manusia, suatu modus eksistensi. Seorang kapitalis adalah orang yang melalui harta kekayaannya ia mewujudkan diri, menyingkap eksistensi diri. Ia mengaktualkan dirinya dengan dan untuk kapital. Dengan kapital, ia berharap memperoleh kekuasaan dan dominasi. Memiliki kapital berarti menguasai dunia. Sains, teknologi, seni, dan agama menjadi subordinasi dan pelayan atau pelegitimasi kapital. Itulah modus eksistensi kapitalisme.

Atas dasar pemikiran di atas, kita dapat memahami mengapa ideologi-ideologi seperti sosialisme, Marxisme, komunisme, humanisme, dan bahkan eksistensialisme-sekuler gagal menghadapi kapitalisme. Kaum sosialis telah gagal memahami kapitalisme sebagai modus eksistensi. Ini dimulai dari Karl Marx sendiri yang melihat kapital hanya sebagai "cara produksi" (modus produksi), konsep sentral yang digunakannya dalam *Das Kapital*. Akibatnya, banyak analisis dan ramalan Marx yang melenceng. Bahkan sosialisme akhirnya terkooptasi oleh kapitalisme. Konsep "welfare state" yang diterapkan di negara kapitalis adalah salah satu contoh upaya adaptasi kapitalisme merangkul semangat sosialisme ke dalam pangkuannya. Ideologi-ideologi sekuler dunia lainnya sekarang ini hanyalah ibarat anak-anak kapitalisme atau subordinasi kapitalisme global, kapitalisme konsumeris.

Kaum Mazhab Frankfurt sebagai pewaris semangat kritisi sosial Marx yang pada mulanya mencanangkan proyek pembebasan masyarakat dari hegemoni kapitalisme akhirnya juga jatuh kepada pesimisme. Mereka seakan-akan tidak melihat lagi adanya peluang untuk menciptakan dunia alternatif selain dunia ciptaan kapital. Mereka menganggap manusia modern telah kehilangan rasionalitas dan kesadaran kritis. Kini mereka seakan tak mampu lagi bersuara lantang menentang kapitalisme sebagaimana pendahulu mereka, katakanlah misalnya Herbert Marcuse yang menulis *One Dimensional Man*. Para pendukung teori kritis inipun seakan tidak bereaksi ketika Perter Berger, seorang pembela kapitalisme, dengan arogan mengatakan sosialisme adalah mitos, sedang kapitalisme adalah masa depan manusia.

Sementara itu, analisis Max Weber yang mengaitkan perkembangan kapitalisme dengan etos kerja Protestan kini juga bermuara kepada proses sekulerisasi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada mulanya, motif religius menggerakkan orang untuk kerja keras, tekun, efisien, dan berprestasi karena perolehan kesuksesan duniawi diartikan sebagai tanda keselamatan ilahi. Namun, proses sekulerisasi terjadi sedemikian rupa sehingga Tuhan dan akhirat perlahan-lahan hilang dari kesadaran manusia. Aktivitas duniawi sama sekali tidak lagi digerakkan oleh motivasi agama, namun semata-mata oleh motif materialistik. Berger menyebutkan Protestanisme sebagai manifestasi yang paling sempurna dari proses dialektik di mana orientasi agama yang bersifat inner-worldly itu "menggali kubur" untuk dirinya sendiri. Luar biasa memang pesona materi itu sehingga motivasi agama pun akhirnya juga terkooptasi oleh motivasi materialistik.

Dengan menelaah secara tajam hakekat kapitalisme, kita dapat melihat kekuatan dan kelemahannya secara obyektif. Ini diperlukan agar proyek besar pembebasan manusia dari hegemoni kapitalisme-tentu saja yang berminat-dapat mengkonstruksi ideologi atau peradaban alternatif yang sungguh-sungguh antitesis kapitalisme secara mendasar, radikal dan menyeluruh. Persoalannya, bagaimana kita merancang antitesis itu? Adakah modus eksistensi alternatif yang dapat menaklukkan kapitalisme menjadi sekedar metode atau manajemen bisnis? Perlukah lebih dahulu kita merombak secara revolusioner pandangan dunia (*worldview*) kita tentang antropologi, kosmologi, teologi?[]



Awal abad 20 kapitalisme harus menghadapi berbagai tekanan dan ketegangan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Munculnya kerajaan-kerajaan industri yang cenderung menjadi birokratis uniform dan terjadinya konsentrasinya pemilikan saham oleh segelintir individu kapitalis memaksa pemerintah (Barat) mengintervensi mekanisme pasar melalui kebijakan-kebijakan seperti undang-undang anti-monopoli, sistem perpajakan, dan jaminan kesejahteraan.

Hand-Out 46 GAGASAN DASAR KAPITALISME

Teori Dasar Ekonomi-Kapitalisme

Membicarakan dasar teori ekonomi kapitalisme, sosok Adam Smith dengan buku termasyhurnya, *The Wealth of Nations*, dapat di sebut sebagai Bapak Kapitalisme. Dalam membahas teori dasar kapitalisme adalah dengan mengetahui ciri dasar sistem tersebut, yaitu pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan publik.

Makna kapitalisme untuk kepentingan publik tersebut, oleh Adam Smith diilustrasikan dengan sangat jelas: "Apa yang kita harapkan untuk makan malam kita tidaklah datang dari keajaiban dari si tukang daging, si pemasak bir atau si tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Malah seseorang umumnya tidak berkeinginan untuk memajukan kepentingan publik dan ia juga tidak tahu sejauh mana ia memiliki andil untuk memajukannya. Yang ia hormati dan ia kejar adalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Di sini ia dituntun oleh tangan-tangan yang tak terlihat (*the invisible hands*) untuk mengejar yang bukan bagian dari kehendak sendiri. Bahwa itu juga bukan merupakan bagian dari masyarakat, itu tidak lantas berarti suatu yang lebih buruk dari masyarakat. Dengan mengejar kepentingan sendiri, ia kerap kali memajukan kepentingan masyarakat lebih efektif dibandingkan dengan jika ia sungguh-sungguh bermaksud memajukannya. Saya tidak pernah menemukan kebaikan yang dilakukan mereka yang sok berdagang demi kepentingan publik".⁷⁷

Penjelasan ilustratif tersebut sebenarnya tidak bermaksud lain kecuali kehendak untuk memaknai kapitalisme dengan memadukan kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan publik di pihak yang lain. Dari premis itu ialah bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi secara individu. Meskipun demikian, orientasi individu tetap merupakan tahapan awal bagi kepentingan publik atau sosial. Motif sosial yang tersembunyi (*hidden social motive*) yang disebut Smith sebagai *the invisible hands*.

Kehendak untuk memadukan kepentingan privat dan publik ini selanjutnya dijelaskan bahwa setiap manusia, dengan demikian, dipimpin langsung oleh kepentingan dan tindak tanduk ekonominya. Manusia yang bersangkutanlah yang mengetahui apa kepentingan mereka sesungguhnya. Oleh sebab itu, dialah yang dapat memenuhi kepentingan dengan sebaik-baiknya. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan kepentingan bersama, tetapi mereka berfikir bahwa kepentingan bersama ini akan dapat diperhatikan dengan sebaik-baiknya pula apabila setiap individu mendapat kesempatan untuk memenuhi, memuaskan, dan mengekspresikan kepentingannya masing-masing tanpa restriksi.

Setelah ia menulis *The Wealth of Nations*, Smith sudah mengemukakan dalam *Theory of Moral Sentiments* sebagai dasar filsafat teori ekonominya. Ia menentang dengan tegas pendapat de Mandeville bahwa *privet vice makes public benevit*. De Mandeville memandang bahwa kemewahan atau pengejaran keuntungan ekonomi itu dosa, meski dosa itu sendiri diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Smith justru melihat sebaliknya, dengan meniru gurunya Francis Hutcheson, ia mengatakan bahwa kebajikan adalah pengendali nafsu dan bukan sebuah antipati yang mutlak. Dalam *The Wealth of Nations* sendiri, Smith pernah mengatakan bahwa: "*The nature and causes of the wealth of nations is what is properly called political economy*". Ini menunjukkan bahwa nama bukunya saja sudah cukup untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari aktifitas ekonomi.⁷⁸

Mempelajari paradigma dan ide dasar kapitalisme juga bisa dilakukan dengan membuat interpretasi-interpretasi karya Smith seperti yang banyak dilakukan. Kita memahami bahwa *masterpiece* Smith tersebut sesungguhnya hanya meletakkan gagasan-gagasan cemerlangnya secara umum saja. Sjahrir (1995) menerjemahkan *The Wealth of Nations* yang membidani lahirnya teori

⁷⁷ Premis ini di kemukakan Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* pendahuluan dan catatan pinggir oleh Edwin Cannan, New York: The Modern Library, 1973, hlm. 14, 423.

⁷⁸ L. J. Zimmerman, *Sejarah Pendapat-pendapat tentang Ekonomi*, Bandung: N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, 'S-Gravenhage, 1995, hlm. 42-43. Edisi Indonesia dikerjakan oleh K. Siagian. Periksa buku aslinya yang berjudul *Geschiedenis Van Het Economisch Denken*.

kapitalisme itu dengan membuat rincian sederhana seperti, apa yang harus diproduksi dan dialokasikan, bagaimana cara memproduksi dan mengalokasikan sumber daya, serta bagaimana cara mendistribusikan sumber daya dan hasil produksi.⁷⁹

Pemahaman lain tentang ide dasar kapitalisme juga diberikan oleh Max Weber⁸⁰. Ia mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem produksi komoditi berdasarkan kerja berupah untuk dijual dan diperdagangkan guna mencari keuntungan. Ciri produksi berdasarkan upah buruh itu merupakan karakter mendasar bagi kapitalisme. Bagi Weber, ciri kapitalisme yang lebih mendasar lagi adalah pada sistem pertukaran di pasar. Sistem di pasar ini menimbulkan konsekuensi logis berupa rasionalisasi yang mengacu pada bagaimana cara meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, bagaimana melakukan akumulasi kapital secara terus menerus. Akumulasi kapital itu dimaksudkan untuk melakukan produksi barang atau jasa yang lebih menguntungkan (*more profitable*). Keuntungan inilah yang secara dominan bagi rasionalitas teknologi.

Sedangkan bagi Marx, kapitalisme tidak didefinisikan oleh motif atau orientasi kaum kapitalis. Apapun motif yang mereka sadari, mereka sebenarnya didorong oleh logika sistem ekonomi untuk memupuk modal. Kapitalisme bagi Marx suatu bentuk masyarakat kelas yang distrukturasikan dengan cara khusus di mana manusia diorganisasikan untuk produksi kebutuhan hidup.⁸¹

Sejalan dengan zaman, kapitalisme terus berkembang, bergerak dan beradaptasi dengan sejarah. Jorge Larrain mengemukakan, "Kapitalisme dicirikan oleh dominasi obyek atas subyek, modal atas pekerja, kondisi produksi atas produsen, buruh mati atas buruh hidup. Bahkan menurut Marx, kapitalisme adalah hasil dari praktek reproduksi manusia. Marx menganalisa hal tersebut tidak hanya untuk mengetahui bagaimana sistem itu bekerja dan memproduksi diri sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan kondisi yang mampu menggantikannya".⁸²

Kapitalisme yang dibuat oleh Lorens Bagus, berasal dari bahasa Inggris, *capitalism* atau kata latin, *caput* yang berarti kepala. Kapitalisme itu sendiri adalah sistem perekonomian yang menekankan peranan kapital atau modal.⁸³ Poin-poin penting yang bisa dilihat dan biasa digunakan untuk mengartikan kapitalisme adalah: *Pertama*, kapitalisme adalah ungkapan kapitalisme klasik yang dikaitkan dengan apa yang dimaksud oleh Adam Smith sebagai permainan pasar yang memiliki aturan sendiri. Ia yakin bahwa dengan kompetisi, pekerjaan dari tangan yang tidak kelihatan akan menaikkan harga pada tingkat alamiah dan mendorong tenaga kerja atau modal mengalami pergeseran dari perusahaan yang kurang menguntungkan. Ini berarti kapitalisme merupakan usaha-usaha kompetitif manusia yang akan dengan sendirinya berubah menjadi kepentingan bersama atau kesejahteraan sosial (*social welfare*). *Kedua*, kapitalisme merupakan ungkapan Prancis *laissez-faire*, *laissez-passer*, yang berarti 'semaunya', yang dilekatkan sebagai ungkapan penyifat. Ungkapan *laissez-faire* menekankan sebuah pandangan bahwa dalam sistem ini, kepentingan ekonomi dibiarkan berjalan sendiri agar perkembangan berlangsung tanpa pengendalian Negara dan dengan regulasi seminimal mungkin. *Ketiga*, kapitalisme adalah ungkapan Max Weber bahwa ada keterkaitan antara bangkitnya kapitalisme dengan protestanisme. Kapitalisme merupakan bentuk sekuler dari penekanan protestanisme pada Individualisme dan keharusan mengusahakan keselamatan sendiri.

⁷⁹ Sjahrir, *Formasi Mikro-Makro ekonomi Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 113-114.

⁸⁰ Max Weber, *The Protestant ethic of Spirit Capitalism*, New York, Scribner, 1958, Edisi Inggrisnya dikerjakan oleh Talcot Parson dengan Pengantar RH Tawney.

⁸¹ Pada tahun 1887, muncullah *Das Capital*-nya Marx yang amat termashur itu. Marx mengatakan bahwa kapitalisme itu mempunyai ciri mutlak, yakni borjuis dan eksploitasi. Oleh karenanya, begitu Marx, dengan revolusi kekerasanlah pemerintah sosialis harus didirikan. Demi terjaminnya stabilitas sistem ini, maka ia harus dijaga oleh sistem kepemimpinan yang diktator proletariat.

⁸² Lihat Jorge Larrain, *The Concept of Ideology*, Forteword by Tom Bottomore, First Published, Australia: Hotchinson Publishing Group, 1979, versi Indonesia oleh Ngatawi al Zastrouw (editor) dan Ryadi Gunawan (penerjemah), Yogyakarta: LKPSM, 1997, hlm. 55.

⁸³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia, 1996, hlm.391.

Akar Historis Kapitalisme

Sistem perekonomian kapitalisme muncul dan semakin dominan sejak peralihan zaman feodal ke zaman modern. Kapitalisme seperti temuan Karl Marx menjadi sistem yang dipraktekkan di dunia bermula di penghujung abad XIV dan awal abad XV. Kapitalisme sebagai sistem perekonomian dunia terkait erat dengan kolonialisme. Pada zaman kolonialisme ini akumulasi modal yang terkonsentrasi di Eropa (Inggris) didistribusikan ke penjuru dunia, yang menghadirkan segenap kemiskinan di wilayah jajahannya.

Kelahiran kapitalisme ini dibidani oleh tiga tokoh besar, yaitu Martin Luther yang memberi dasar-dasar teosofik, Benjamin Franklin yang memberi dasar-dasar filosofik dan Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonominya. Martin Luther yang memberi dasar-dasar teosofik adalah seorang Jerman yang melakukan gerakan monumentalnya, 31 Oktober 1571 dengan menempelkan tulisan protesnya di seluruh penjuru Roma. Ia tidak menerima kenyataan praktik pengampunan dosa yang diberlakukan gereja Roma. Kemudian ia meletakkan ajaran dasarnya, yaitu: "Manusia menurut kodratnya menjadi suram karena dosa-dosanya dan semata-mata lewat perbuatan dan karya yang lebih baik saja mereka dapat menyelamatkan dirinya dari kutukan abadi". Sedangkan bagi Benjamin Franklin yang memberi dasar-dasar filosofik, mengajak orang untuk bekerja keras mengakumulasi modal atas usahanya sendiri. Kemudian Franklin mengamanatkan: "Waktu adalah Uang". Bagi Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonominya dan tarcantum dalam buku *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations*, Adam Smith lebih mengkongkretkan spirit kapitalismenya dalam sebuah konsep sebagai mekanisme pasar. Basis folologisnya adalah *laissez-faire, laissez-passer*. Ia mengatakan bahwa barang langka akan menyebabkan harga barang tersebut menjadi mahal sehingga menjadi sulit didapatkan terutama oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Tetapi menurut Smith bahwa yang harus dilihat adalah perilaku produsen. Ketika harga barang mahal, maka keuntungan akan meningkat. Ketika keuntungan yang dijanjikan atas barang tersebut tinggi, maka banyak produsen yang memproduksinya. Sehingga dengan demikian kelangkaan barang tersebut akan terpenuhi dan menjadi murah dan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Sehingga masalah yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan oleh *the invisible hands*.

Banyak pakar memberikan penjelasan bahwa kapitalisme sebagai sistem perekonomian dunia baru dimulai sejak abad XVI. Menurut Dudley Dillard pada zaman kuno sebenarnya sudah terdapat model-model ekonomi yang merupakan cikal-bakal kapitalisme. Bagi Dillard, kapitalisme tidak saja dipahami sebagai sistem ekonomi pasca abad XVI. Kantong-kantong kapitalisme sebagai cikal-bakal dan ruh kapitalisme justru mulai berkembang diakhir abad pertengahan. Dillard membagi urutan perkembangan kapitalisme menjadi tiga tahapan.⁸⁴ Secara kronologis dalam tahapan sejarah perkembangannya: Kapitalisme Awal, Kapitalisme Klasik dan Kapitalisme Lanjut.

1. Kapitalisme Awal (1500-1750)

Kapitalisme untuk periode ini masih mendasarkan pada pemenuhan kebutuhan pokok yang ditandai dengan kehadiran industri sandang di Inggris sejak abad XIV sampai abad XVIII. Meski industri sandang tersebut masih menggunakan mesin pemintal yang sangat sederhana, pada gilirannya mampu meningkatkan apa yang disebut sebagai surplus sosial. Seperti dijelaskan Dillar, dalam prakteknya industri sandang menghadapi banyak problem dan kesulitan. Namun demikian, berbagai kendala tersebut tak mampu menjadi penghalang bagi kesuksesan industri tersebut. Bahkan di beberapa wilayah pelosok Inggris, industri tersebut terus berkembang pesat selama kurun waktu abad XVI sampai XVII. Surplus sosial yang didapatkan terus menerus secara produktif ternyata mampu menjadikan kapitalisme mampu bersaing dengan sistem ekonomi sebelumnya. Kelebihan itu didayagunakan untuk usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi dan variasi untuk kekayaan yang lain.

Perluasan demi perluasan dengan argumentasi produktifitas yang dilakukan selanjutnya menghadirkan fenomena dramatis dengan munculnya kolonisasi atau imperealisme ke daerah-daerah lain yang tak memiliki keseimbangan produksi. Lebih lanjut pada informasi yang sama, Dillar juga pernah menguraikan bahwa perkembangan kapitalisme pada tahapan ini didukung oleh tiga

⁸⁴ Sudono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Makalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1985, hlm. 10.

faktor yang sangat penting yaitu: (1) dukungan agama dengan menanamkan sikap dan karakter kerja keras dan ajuran untuk hidup hemat, (2) hadirnya logam mulia terhadap distribusi pendapatan atas upah, laba dan sewa, serta (3) keikutsertaan Negara dalam membantu membentuk modal untuk berusaha.

Studi Russel, *Modes of Productions individu Wolrd History* London and New York, Routledge, 1988, menjelaskan bahwa kapitalisme pada fase ini tidak bisa tidak menyebut bahwa Eropa dan Inggris abad ke-12 adalah sebagai lokasi awal perkembangan kapitalisme. Russel menunjuk wilayah perkotaan untuk mencontohkan bahwa saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi mereka dalam suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mula-mula mereka hanya menjual barang kepada teman sesama saudagar perjalanan. Kegiatan ini kemudian berkembang menjadi perdagangan publik.

2. Kapitalisme Klasik (1750-1914)

Pada fase ini terjadi pergeseran perilaku para kapitalis yang semula hanya perdagangan publik, ke wilayah yang mempunyai jangkauan lebih luas yaitu industri. Transformasi dari dominasi modal perdagangan ke dominasi modal industri yang seperti itu merupakan ciri Revolusi Industri di Inggris. Perubahan dalam cara menentukan pilihan teknologi dan cara berorganisasi berhasil memindahkan industri dari pedesaan ke sentra-sentra perdagangan lama di perkotaan selama Revolusi Industri. Akumulasi kapital yang terus menerus membengkak selama dua atau tiga abad mulai menunjukkan hasil yang baik pada abad XVIII. Penerapan praktis dari ilmu pengetahuan teknis yang tumbuh selama berabad-abad dapat sedikit demi sedikit dilakukan. Kapitalisme mulai menjadi penggerak bagi perubahan teknologi karena akumulasi modal memungkinkan penggunaan berbagai inovasi.

Tepat pada fase ini kapitalisme mulai meletakkan dasarnya yaitu *laissez-faire*, *laissez-passer* sebagai doktrin mutlak Adam Smith. Dillar menerangkan bahwa perkembangan kapitalisme pada fase kedua ini semata-mata menggunakan argumentasi ekonomis. Perkembangan ini tentu saja menjadi parameter keberhasilan bagi kaum borjuis dalam struktur sosial masyarakat. Kesuksesan ekonomis berimbas pada kesuksesan di bidang politik, yaitu hubungan antara kapitalis dan Negara. Proses ini menguntungkan kapitalisme terutama dalam penentuan gaya eksplorasi, eksploitasi dan perluasan daerah kekuasaan sebagai lahan distribusi produksi. Periode kapitalisme klasik erat kaitannya dengan karya Adam Smith *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations* (1776) melalui karya ini terdapat analisa bahwa kapitalisme kuno sudah berakhir dan bergeser menjadi kapitalisme klasik.

3. Kapitalisme Lanjut (Pasca 1914)

Kapitalisme lanjut dijelaskan mulai berkembang sejak abad XIX, tepatnya tahun 1914, Perang Dunia I sebagai momentum utama. Abad XX ditandai oleh perkembangan kapitalisme yang sudah tidak lagi bisa disebut sebagai kapitalisme tradisional. Kapitalisme fase lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak oleh tiga momentum. *Pertama*, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. *Kedua*, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap kolonialisme Eropa sebagai akses dari kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan. *Ketiga*, Revolusi Bolzhevik Rusia yang berhasrat meluluhlantakkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan kapital secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan keamanan agama. Dari sana kemudian muncul ideologi tandingan, yaitu komunisme.

Kapitalisme abad XX berhasil tampil meliuk-liuk dengan *performance* yang selalu bergerak mengadaptasikan kebutuhan umat manusia pada zaman dan situasi lingkungannya. Bagi Daniel Bell,⁸⁵ fleksibilitas ini sukses membawa kapitalisme sebagai akhir ideologi (*The End of Ideology*) yang

⁸⁵ Penjelasan ini sekaligus mengawali kajian tentang Kapitalisme fase lanjut atau kapitalisme mutakhir seperti yang diratapi oleh Daniel Bell. Beberapa kajian dalam poin ini sepenuhnya mengacu ke sana. Untuk memperjelas keterangan ini periksa karya Bell seperti (1) *The End of Ideology*, New York: Free Press, 1960; (2) *The Coming of Post Industrial Society*, New York: Penguin Books Edition, 1973; (3) *The Cultural Contradictions of Capitalism*, New York: Basic Books, 1976. Sedangkan untuk edisi Indonesia, karya Bell ini dapat diperhatikan di Y.B. Mangunwijaya (ed.), *Teknologi dan Dampak*

mengantarkan umat manusia tidak hanya menuju gerbang yang penuh pesona ekstasi melainkan juga pada gerbang yang berpeluang besar untuk kehancuran umat manusia.

Budiman (1997; 86) menyebut bahwa kapitalisme seolah menjadi pesolek tanpa tanding dalam merebut perhatian para teoritis sosial dunia. Salah satu hal yang membuat kapitalisme bertahan adalah kelenturan produk yang ditawarkan. Produk-produk yang disediakan bersifat adaptif dengan zamannya. Citra-citra yang disodorkan tidak pernah dibiarkan begitu saja dan menjadi sebetuk kesombongan ideologis yang menjenuhkan, melainkan disesuaikan dengan berbagai desakan pluralisasi wacana kehidupan. Kapitalisme berhasil tetap bertahan karena ia mampu menghadirkan demokrasi ekonomi dan politik sebagai bentuk keinginan umat manusia yang paling mutakhir, tapi sebatas citra, demokrasi yang semu. Produk kapitalisme yang menggairahkan tersebut dipandang Guy Debord sebagai *trap*, bahwa saat ini kapitalisme sedang menyiapkan perangkat kebudayaan yang mengantarkan umat manusia pada kondisi komoditi yang final dan melelahkan.⁸⁶

Produk lain yang ditunjukkan oleh kapitalisme lanjut adalah sedemikian menjamurnya korporasi-korporasi modern. Korporasi sudah tidak lagi bergerak di bidang industri manufaktur, melainkan jasa dan informasi. Ia berusaha mendominasi dunia dengan kecanggihan teknologi serta orientasi menghadapi ekonomi global. Ia lazim berbentuk MNC/TNC (*MultiNational Corporation/Trans National Corporation*). Kehadirannya semakin mempertegas bahwa pelaku aktifitas ekonomi sesungguhnya bukanlah institusi Negara, melainkan para pengusaha bermodal besar. Sebab hanya dengan modal mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi apa dan di mana saja.

Dengan semakin pentingnya modal, peranan Negara menjadi tereduksi, tapi juga hilang sama sekali. Negara hanya sekedar menjadi aktor pelengkap (*Complement Actor*) saja dalam percaturan ekonomi dunia, meski dalam beberapa kasus peran Negara tetap dibutuhkan sebagai fasilitator untuk mendukung roda ekonomi yang sedang diputar kapitalis. Inilah yang dinubuat Galbraith dengan mengatakan bahwa korporasi modern menerapkan kekuasaan melalui pemerintahan. Para kapitalis ini tetap membutuhkan keterlibatan Negara untuk memfasilitasi setiap produk yang dipasarkan. Hubungan simbiosis mutualisme ini selanjutnya menjadi karakter dasar dari kapitalisme lanjut. Peristiwa ini menyebabkan para pakar menyebut bahwa kapitalisme lanjut adalah kapitalisme monopoli (*monopoly capitalism*) atau kapitalisme kroni (*crony capitalism*).⁸⁷

Korporasi modern dan Negara menjalin hubungan yang didasarkan pada distribusi kekuasaan dan profit. Hubungan yang berkembang antara korporasi modern dan birokrasi publik, seperti kapitalis yang membuat mobil dan Negara yang membangun jalan raya, kapitalis yang membuat pesawat tempur dengan Negara yang mengendalikan Departemen Udara dan sebagainya.⁸⁸ Selain hal itu, apa yang diungkap Galbraith sebagai kapitalisme lanjut adalah pemfungsian institusi Negara sebagai jaminan kontrol dari doktrin mekanisme pasar. Bahkan para kapitalis dengan sengaja berani membiayai dan merekayasa Negara. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi sistem sosial dalam struktur masyarakat yang diakibatkan oleh kontradiksi-kontradiksi dalam tubuh kapitalisme itu sendiri. Asumsi ini diperkuat oleh fakta pertumbuhan industri-industri kapitalisme hingga menciptakan sindroma korporasi-korporasi modern ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kekuasaan politik. Dalam hal ini Galbraith memperkuat argumentasinya dengan uraian yang mendalam tentang keterkaitan Negara dalam dimensi politis dan kapitalis dalam dimensi ekonomis. Semakin menguatnya campur tangan institusi Negara ke dalam aktifitas-aktifitas ekonomi acap mendisfungsionalisasikan fungsi dari Negara itu sendiri. Hal itu bisa ditunjukkan dengan merosotnya atensi Negara yang bersangkutan terhadap persoalan-persoalan lain di luar masalah teknis administratif. Sementara menurut pandangan Clauss

Lingkungannya, Volume II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985; atau Daniel Bell dan Irving Kristol (ed.), *Model dan Realita di Dalam Wacana Ekonomi, Dalam Krisis Teori Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1988.

⁸⁶ Guy Debord, *The Society of The Spectacle*, seperti dikutip oleh Fredric Jameson, *Postmodernism or The Cultural of The Late Capitalism*, London, Verso, 1990, hlm. 8.

⁸⁷ Kapitalisme monopoli sebagai bentuk dari kapitalisme fase lanjut seringkali diberi pengertian yang merujuk pada peran penting dari kolaborasi di tingkat birokrat Negara dan pengusaha kapitalis untuk menguasai lahan produksi yang ditujukan pada kepentingan-kepentingan publik.

⁸⁸ Lihat John Kenneth Galbraith, *The New Industrial State*, New York: Mentor Book Paperback Edition, 1972, hlm. 258. Periksa juga Budiman, *Op. Cit.*

Offe dalam Habermas, sejauh kegiatan Negara diarahkan pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, politik selalu menampilkan sifat negatif yang khas. Politik diarahkan untuk mengatasi disfungsi-fungsionalitas dan menghindari resiko-resiko yang membahayakan sistem. Politik tidak diupayakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan, melainkan pada pemecahan masalah-masalah teknis. Kegiatan Negara dibatasi hanya pada persoalan-persoalan teknis yang bisa dipecahkan secara administratif sehingga dimensi praksisnya hilang.⁸⁹ Hubungan faktor politik-kapitalis dengan melakukan kolaborasi adalah cara pandang Keynes, dan persoalan itu susah untuk dihindarkan. Keynes sangat tertarik pada keseluruhan adegan sosial dan politik yang diproduksi secara bersamaan. Ia memandang teori ekonomi sebagai suatu alat kebijakan politik. Ia membelokkan apa yang disebut metode ilmu ekonomi klasik yang bebas nilai untuk melayani tujuan dan target mental, dan untuk itu ia membuat ilmu ekonomi menjadi persoalan politik dengan cara yang berbeda.

Keterkaitan Negara-kapitalis yang ditunjukkan dengan bergesernya mekanisme kapitalisme bisa dipahami dari Negara Amerika. Yang terjadi di Amerika dewasa ini bukanlah paham kapitalisme yang asli yang menganut paham *laissez-faire*, *laissez-passer*, melainkan suatu sistem ekonomi yang tetap menggunakan prinsip dasar kapitalisme yang disesuaikan dengan berbagai rambu hukum yang membatasi penguasaan *resources* dan konsumsi yang berlebihan, baik secara individual maupun pada tingkat perusahaan.⁹⁰ Nilai-nilai yang berlaku pada sistem kapitalisme Amerika selalu mempertimbangkan beberapa aspek.

Pertama, asas kebebasan (*freedom*), dengan pengertian, bebas berkonsumsi dan berinvestasi (*free entry individu consumption and investment*) serta pembatasan investasi pemerintah sekaligus mengikhtikarkan model politik yang demokratis. *Kedua*, asas keseimbangan (*equality*), dengan pengertian, adanya difusi antara kekuatan politik dan ekonomi; adanya *bargaining power* yang sama untuk produsen dan konsumen serta adanya kesempatan yang sama sekaligus upaya untuk menciptakan pemerataan. *Ketiga*, asas keadilan (*fairness*), dengan pengertian, sebuah upaya untuk menghindari praktik yang tidak adil seperti adanya upah buruh yang tidak memenuhi standar; hubungan tuan dan majikan yang eksploitatif dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap praktek ekonomi harus dilandasi dengan sikap yang penuh dengan kejujuran dan keterbukaan (*full honesty and disclosure*). *Keempat*, asas kesejahteraan (*welfare*), dengan pengertian, adanya pertimbangan efisiensi alokasi dan produksi. Parameter kesejahteraan bisa diketahui melalui pengawasan pemerintah terhadap stabilitas harga serta upaya untuk menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang bersifat *full employment*. Kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup juga mendapat perhatian yang besar. *Kelima*, asas pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth*) yang indikasinya adalah pertumbuhan pendapatan riil dan kemajuan teknologi. Ada beberapa kebijaksanaan pemerintah Amerika yang menjadi prioritas dalam menjamin kebesaran kapitalisme. Di antaranya adalah kebijaksanaan yang menjamin terciptanya kompetisi seperti terciptanya UU *Anti Trust* (*Sherman Act and Clayton Act*). Tujuannya untuk mencegah persaingan yang tidak sehat diantara pihak yang bersaing. Peraturan ini secara teknis bertujuan untuk menjamin kebebasan dan keamanan dalam berinvestasi (*free exit and entry*). Kemudian kebijaksanaan yang mengatur ke mana arah kompetisi digerakkan. Pengaturan-pengaturan ini berfungsi untuk melindungi konsumen dan produsen. Hal itu bisa dilakukan dengan menetapkan etika periklanan dan standarisasi barang-barang dari segi kualitas maupun kuantitas. Perlindungan merk dagang dan hak cipta juga mendapatkan perhatian yang cukup serius. Selain itu, adanya kebijaksanaan yang menjadi jaminan bagi distribusi pendapatan, yakni melalui pajak. Pajak bisa difungsikan sebagai sarana pemerataan, insentif serta regulator untuk mempengaruhi alokasi produksi maupun konsumsi. Yang penting lagi adalah adanya kebijaksanaan yang mengatur *public utility*. Ide dasar kapitalisme klasik *laissez-faire*, *laissez passer* dan jargon *the invisible hand* merupakan asas fundamental yang terus-menerus diperbaiki dan digunakan untuk mencirikan kapitalisme. Mereka berpandangan bahwa teori ekonomi secara jelas menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak akan mampu menyelesaikan

⁸⁹ Jurgen Habermas, *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 76-77.

⁹⁰ Dalam banyak hal, pembahasan kapitalisme fase lanjut tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pembahasan tentang sistem ekonomi kapitalisme yang ada di Amerika. Sebab seperti yang sudah dijelaskan terdahulu bahwa salah satu ciri pokok yang mendasari kapitalisme fase lanjut adalah pergeseran modal dari kapitalisme klasik yang didominasi oleh Negara-negara Eropa menuju kapitalisme Amerika. Posisi Amerika sebagai pusat perdagangan dunia (*world trade center*), dengan demikian, bisa dijadikan referensi dan parameter perkembangan kapitalisme global selanjutnya.

proses alokasi barang-barang publik seperti hukum, pertahanan dan lingkungan. Padahal barang-barang ini merupakan sesuatu yang vital bagi terjaminnya hidup manusia. Jika mekanisme pasar dibiarkan dengan sendirinya untuk menentukan alokasi barang-barang publiknya, maka penyediaannya akan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan permintaan masyarakat (*socially desirable*). Karenanya diperlukan peranan pemerintah untuk menyediakannya. Tindakan ini menjamin produksi barang-barang kebutuhan dasar (*merit goods*) diproduksi pada tingkat optimal secara sosial.⁹¹

Suasana lain dari kapitalisme lanjut adalah kompetisi (*competition*), dan kompetisi dalam kapitalisme Amerika merupakan poin penting dari buku *The New Industrial State* (1971) yang ditulis Galbraith. Menurutnya, dalam ilmu ekonomi klasik persaingan adalah banyaknya penjual yang memperoleh bagian yang kecil dari pasaran. Galbraith kemudian mengatakan bahwa model persaingan klasik ini sebagian besar sudah lenyap karena banyak pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Galbraith juga mengatakan bahwa dalam perkembangan kapitalisme, timbul institusi yang berusaha mengimbangi kelas kapitalis, yang disebutnya sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*). Kekuatan tersebut bisa berupa lembaga konsumen yang mengontrol perilaku dan pengaruh produsen, himpunan buruh yang mengimbangi kekuatan kelas pemilik modal dan kelas manajer. Lembaga pelindung konsumen, pelindung alam serta organisasi-organisasi *volunteer* lain yang berusaha untuk mempertahankan sekaligus memperjuangkan kepentingan golongan lemah (*marginal*) dalam masyarakat, yang tentunya mayoritas. Deskripsi awal dengan menyebut Amerika sebagai pusat segala sesuatu untuk mengkaji kapitalisme lanjut harap dimaklumkan mengingat kita tidak bisa menolak bahwa Amerika adalah sentral kapitalisme dunia dari pasca perang dingin atau awal abad XIX sampai detik ini. Namun *sample* ini bukan serta merta ingin menunjukkan bahwa kapitalisme lanjut hanya terbatas (*limited*) seperti yang tercermin di Amerika.

Seorang sejarawan peranakan Jepang, Francis Fukuyama, yang kemudian tenar dengan karyanya, *The End of History and Last Man*, menyatakan bahwa demokrasi liberal dan kapitalisme Amerika merupakan titik akhir dari perkembangan ideologi manusia.⁹² Fukuyama menjelaskan bahwa sejarah manusia ini sudah berhenti pada satu titik yang ekstrim, yakni kapitalisme. Karenanya akhir sejarah akan merupakan saat yang menyedihkan. Tatkala keberanian, semangat, imajinasi, idealisme dan humanisme mulai digantikan dengan perhitungan-perhitungan ekonomi yang rasional. Pada saat itu pula manusia akan terjebak pada pemecahan masalah teknis yang tidak ada habis-habisnya. Kapitalisme sibuk merancang kebutuhan konsumen yang bercita rasa melangit. Sehingga Galbraith dalam karya yang sama juga menuturkan bahwa selama paruh terakhir abad ini hampir tidak ada topik lain yang dibahas secara serius dan mendalam kecuali tentang masa depan kapitalisme (*The Future of Capitalism*).⁹³

Akumulasi modal sekarang tidak sekedar menjadi kebiasaan. Ia telah menjadi sebuah hukum, di balik nuansa ini, tersimpan keniscayaan akan adanya alienasi bagi mereka, para kelompok mayoritas seperti buruh, petani dan perempuan. Kita menyadari bahwa kapitalisme model baru menyimpan keniscayaan atas penindasan kelompok mayoritas. Segitiga konspirasi ala O'Donnel sampai hari ini masih relevan dalam menjelaskan mekanisme ketertindasan struktural rakyat. Secara empiris konspirasi itu dapat dilihat dari bagaimana kebijakan-kebijakan Negara terbentuk atas pengaruh kepentingan TNC.

Tiga pilar neo klasik, TNC/MNC, World Bank/IMF, dan WTO berjalan linier, sevisi, setujuan menuju kepentingan yang sama, yakni liberalisasi pasar. Di samping itu ketiga institusi itu adalah kekuatan terbesar dunia abad ini. Sehingga kita tidak pernah menemukan kebijakan internasional yang tanpa memuat kepentingan ketiganya.

⁹¹ Ini semakin memperjelas bahwa teori mekanisme pasar tidak bisa dibiarkan se bebas apa yang sudah didoktrinkan dalam teori ekonomi kapitalisme klasik. Pemerintah atau Negara dibutuhkan kehadirannya dalam mengurusai bidang-bidang yang bersangkutan-paut dengan kebutuhan publik seperti penjelasan di atas. Dengan demikian, hadirnya Negara sebagai wasit untuk mengatur pasar.

⁹² Lihat Francis Fukuyama, *The End of History and Last Man*, London: Hamish Hamilton, 1992. bandingkan dengan pandangan-pandangan dalam literatur abad ke-19 yang dikenal sebagai abad ideologi (*the age of ideology*). Bandingkan juga dengan literatur abad ke-20 yang dianggap sebagai abad: (1) Akhir Ideologi (*The End of Ideology*) karya sosiolog Daniel Bell, (2) Akhir Alam Semesta (*The End of Nature*) karya Paul MacKiben.

⁹³ Lihat Galbraith, *Op. Cit.*

Kita memang bisa menyadari bahwa kapitalisme lanjut tidak hanya dipahami sesederhana itu. Jika hujan terpedas hari ini pada kapitalisme diserang oleh kelompok Marx dengan asumsi konflik kelas, sesungguhnya saat ini kita juga menyaksikan bagaimana kapitalisme menghadapinya dengan dada terbuka. Cita-cita Marx yang tertuang dalam kata-kata masyarakat tanpa kelas, justru secara mengejutkan, bukan terjadi dalam masyarakat komunisme, melainkan dalam masyarakat kapitalisme. Konsep pilihan publik (*public choice*) yang mencoba mengagregasikan kebutuhan-kebutuhan individu berhadapan dengan Negara, justru pada akhirnya mampu menciptakan masyarakat tanpa kelas. Maka pada saat kapitalisme, dalam kaitannya dengan Negara, mampu memelihara Negara dengan mengupayakan *reinventing government*, bukan barang mustahil apabila masyarakat tanpa kelas adalah milik kapitalisme, bukan komunisme. Masyarakat tanpa kelas ternyata gagal dipraktikkan oleh komunisme. Barangkali inilah yang disebut sebagai akhir sejarah itu, *threshold capitalism*.[]



Globalization / The Wall Street Journal

Seorang sejarawan peranakan Jepang, Francis Fukuyama, yang kemudian tenar dengan karyanya, *The End of History and Last Man*, menyatakan bahwa demokrasi liberal dan kapitalisme Amerika merupakan titik akhir dari perkembangan ideologi manusia. Fukuyama menjelaskan bahwa sejarah manusia ini sudah berhenti pada satu titik yang ekstrim, yakni kapitalisme. Karenanya akhir sejarah akan merupakan saat yang menyedihkan. Tatkala keberanian, semangat, imajinasi, idealisme dan humanisme mulai digantikan dengan perhitungan-perhitungan ekonomi yang rasional. Pada saat itu pula manusia akan terjebak pada pemecahan masalah teknis yang tidak ada habis-habisnya. Kapitalisme sibuk merancang kebutuhan konsumen yang bercita rasa melangit. Sehingga Galbraith dalam karya yang sama juga menuturkan bahwa selama paruh terakhir abad ini hampir tidak ada topik lain yang dibahas secara serius dan mendalam kecuali tentang masa depan kapitalisme (*The Future of Capitalism*).

Hand-Out 47

DEVELOPMENTALISME DAN DAMPAK INDUSTRIALISASI DI NEGARA DUNIA KETIGA (PERSPEKTIF EKONOMI-POLITIK)

Perspektif Diakronis Developmentalisme

Dalam dua dasawarsa terakhir, pembangunan dalam bahasanya Fakih (1996), telah menjadi semacam “agama baru” atau pun ideologi baru bagi berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga. Pembangunan menjanjikan harapan baru bagi perubahan dan perbaikan dalam nasib kehidupan mereka. Dari sekian banyak pembahasan tentang teori-teori pembangunan, lazimnya selalu berangkat dari dua urutan historisitas pemikiran ekonomi, yaitu dari paradigma ekonomi klasik dan neoklasik (Keynesian). Pada gerbong ekonomi klasik dimotori Adam Smith, David Richardo dan Thomas Malthus. Sementara itu, dalam paradigma yang berbeda dan bahkan bermusuhan, Karl Marx dan Lenin dengan sosialismenya memberikan kontribusi penting bagi perkembangan pemikiran ekonomi klasik.

Sementara pada gerbong lain, ekonomi neo-klasik dikomandani J.M. Keynes, R. Horrad dan E. Domar, serta WW. Rostow dkk. Pada periode inilah pemikiran ekonomi mulai diletakkan pada posisi penting konsep pertumbuhan ekonomi dalam skala makro. Secara sederhana bisa dilukiskan bahwa pandangan tersebut menyebutkan adanya hubungan antara agregat konsumsi dan investasi. Pada periode ini pula pendapat-pendapat ekonomi mulai diletakkan pada pemikiran tentang perekonomian nasional serta dampaknya dalam rangka menurunkan angka pengangguran (*unemployment*), serta mulai memperkenalkan konsep stabilitas ekonomi dan politik secara nasional.

Berbeda dengan pandangan di atas, Peter Berger tampaknya cenderung lebih simpel dan tegas dalam membuat kategorisasi model teori pembangunan. Dia membagi teori pembangunan dalam dua perspektif besar yang saling kontradiktif, yaitu pembangunan yang berciri kapitalistik dan pembangunan yang berciri sosialistik. Tapi sayang, Berger terlalu terburu-buru mengatakan bahwa jika dalam sebuah negara terdapat ciri kepemilikan aset produktif ditangan individu maka disebutnya kapitalisme. Pengklasifikasian sistem ekonomi semacam itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi perbincangan umum, meskipun sebenarnya sulit diterima apalagi oleh negara-negara Dunia Ketiga yang jelas tidak mengalami kronologi historis kapitalisme-komunisme ala Barat.⁹⁴

Arief Budiman (1995) mencoba membagi teori pembangunan menjadi tiga kategori besar, yaitu teori modernisasi, dependensi dan pascadependensi. Teori modernisasi menekankan pada faktor manusia dan budayanya yang dinilai sebagai elemen fundamental dalam proses pembangunan. Kategori ini dipelopori oleh orang-orang seperti 1) Horrad Domar dengan konsep tabungan dan investasi, 2) Weber dengan tesis Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, 3) David McClelland dengan konsep kebutuhan berprestasi (N-ach), 4) W.W. Rostow dengan lima tahap pertumbuhan ekonomi, 5) Alex Inkeles dan Adam Smith dengan konsep manusia modern, serta 6) Bert Hoselitz dengan konsep faktor-faktor non-ekonomi.⁹⁵

Sementara itu perspektif lain yang lebih rumit karena membagi teori pembangunan menjadi dua kategori besar yaitu perspektif diakronis yang berdasarkan urutan terbentuknya atau historis paradigma pembangunan dan perspektif taksonomis yang berusaha membuat kategori dengan tolok ukur tertentu. Secara diakronis, teori pembangunan yang masuk dalam kategori ini adalah teori pertumbuhan (*growth*), teori kesejahteraan (*welfare*), teori neo-ekonomi, teori strukturalis yang terdiri dari teori dependensia dan teori pascadependensia, serta teori humanis. Sedangkan teori *equilibrium* yang meliputi teori psiko-dinamika, *behavioralisme*, *diffusionisme*, dualisme, fungsionalisme struktural serta teori konflik yang meliputi teori struktural marxis, teori struktural non-marxis dikategorisasikan dalam model *taksonomis*.⁹⁶

⁹⁴ Dalam Saiful Arief, 2000, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 97-99.

⁹⁵ Lihat Arief Budiman 1995 dalam *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia.

⁹⁶ Lihat Moeljarto Tjokrowinoto, *Konsep dan Isu Pembangunan Nasional*, Diktat Kuliah MAP UGM, tanpa tahun, hlm. 9-10.

Secara teoretis, diskursus pembangunan memang acap kali dilandasi perspektif yang berbeda dan kadang menimbulkan perdebatan sengit. Perbedaan teoretik ini dianggap wajar karena bermula dari perbedaan paradigma atau sudut pandang yang berupa ruang, waktu, sekaligus kepentingan yang berbeda pula. Tetapi meskipun paradigma yang dipergunakan untuk menjelaskan pembangunan tersebut berbeda, hal ini tetap tidak menghalangi penyimpulan yang menyatakan bahwa kajian pembangunan adalah kajian tentang perubahan sosial (*social change*). Hampir keseluruhan pembahasan pembangunan selalu menyinggung tentang proses perubahan dalam suatu masyarakat dari kondisi tertentu ke kondisi lain. Dengan bahasa lain, pembangunan bisa diartikan sebagai proses perubahan dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat industrial-modern. Oleh karena itu pembangunan acap diberi pengertian sebagai proses perubahan tatanan hidup masyarakat yang sengaja direncanakan (*planned social change*).

Pembangunan Sebagai Konsep Perubahan Masyarakat

Sebagai konsep perubahan masyarakat yang direncanakan, pembangunan jelas bukan merupakan konsep yang netral dan bebas nilai (*value free*). Pembangunan adalah konsep yang sarat dengan muatan nilai atau *value loaded*⁹⁷ dan juga sarat dengan kepentingan. Hal ini tidak lepas dari konteks kegalauan dan kegelisahan negara-negara Dunia Ketiga dalam mewujudkan masyarakat dan negara yang dicita-citakan setelah memperoleh kemerdekaan. Dalam pikiran mereka, tidak mungkin mewujudkan cita-cita nasional dengan menyerahkannya pada proses evolusioner, spontan dan alami sebagaimana proses sejarah yang telah dilalui oleh negara-negara maju. Negara-negara Dunia Ketiga dituntut untuk mewujudkan cita-citanya dalam kurun waktu yang jauh lebih singkat dari proses sejarah yang dilalui negara-negara maju untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Tuntutan inilah yang mendorong negara Dunia Ketiga untuk melakukan proses perubahan sosial yang terencana (*a planned social change*), yang kemudian terkenal dengan sebutan "pembangunan."⁹⁸

Secara normatif, konsep pembangunan didefinisikan sebagai proses transformasi segala bidang dari kondisi tertentu menuju kondisi lain yang lebih baik. Pembangunan adalah sebuah jalan untuk mencapai suatu masyarakat yang beradab dan sejahtera. Hal itu senada dengan pendapat Saul M. Katz, yang memberi penjelasan bahwa pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional tertentu menuju kondisi nasional lain yang dianggap lebih baik. Pembangunan terkait dengan apa yang dianggap baik dan buruk menurut pengalaman historis sebuah bangsa. Katz membagi pengertian pembangunan dalam dua model, yaitu 1) *culture spesific*, sebuah konsep pembangunan didasarkan pada negara mana yang melaksanakannya, dan 2) *time spesific*, didasarkan pada waktu pelaksanaannya.

Pembangunan menurut Michael P. Todaro dalam *Economic Development in the Third World*, adalah proses multidimensional yang meliputi reorganisasi dan reorientasi sistem sosial dan ekonomi. Sementara itu, Emmanuel Subangun (1994) memberikan definisi sekaligus interpretasi bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang bisa menjamin adanya konsolidasi sistem dan membuka peluang baru. Dalam artian seperti ini maka pembangunan harus ditafsirkan sebagai perbaikan tata pergaulan secara terus menerus yang melingkupi seluruh sistem pergaulan.

Untuk memahami model-model pembangunan yang diterapkan oleh sebuah negara, Martin Staniland (1985) membuat kategorisasi kedalam empat orientasi, yang selanjutnya menjadi fokus utama ke arah mana pembangunan itu dijalankan oleh negara tersebut. Pertama, *Orthodox Liberalism* adalah bentuk yang diterapkan oleh negara yang dalam proses pembangunannya sangat mengagungkan konsep individualisme. Konsep ini menganggap bahwa, masyarakat hanya bisa sekedar agregasi dari sintesa seluruh kepentingan individu. Model ini biasa dipakai negara-negara dengan sistem ekonomi kapitalis. Kedua, *Social Critique of Liberalism* adalah respon dari model yang pertama. Pandangan ini menghujat keras pandangan liberal ortodoks yang seolah-olah menegasikan kepentingan sosial dalam pembangunan ekonomi. Menurut pandangan ini, model pembangunan yang pertama mengesankan bahwa kehidupan individu berada dalam isolasi dan ruang kosong. Karenanya kepentingan sosial harus disertakan dalam pembangunan ekonomi. Termasuk dalam

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 7.

⁹⁸ Lihat Moeljarto Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89-90.

kategori model ini adalah *welfare theory*, *humanizing theory*, teori kritik. Ketiga, *Economism Perspective*. Sepintas model ini mirip dengan liberal-ortodoks. Perbedaannya adalah bahwa posisi kebijakan-kebijakan ekonomi dianggap sebagai segala-galanya. Kebijakan politik dan aktivitas kenegaraan atau non-ekonomi lainnya harus ditentukan oleh tindakan-tindakan ekonomi. Indonesia pada masa rezim Orde Baru dapat dikategorikan penganut model pembangunan ini. Keempat, *Politicism Perspective* merupakan kebalikan dari model *economism*. Menurutny, justru faktor politiklah yang mesti dominan dalam seluruh rangkaian kebijakan ekonomi. Model ini dianut pemerintah Indonesia pada masa demokrasi terpimpinnya Soekarno.

Berikut beberapa definisi teori pembangunan dari beberapa tokoh dunia yang berhasil terangkum dalam tulisan ini. Harrod Domar dalam teori pertumbuhannya yang menginterpretasikan pembangunan sebagai identik dengan pembangunan ekonomi merumuskan bahwa "pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan *directly* atau *positively* oleh *saving ratio* dan *negatively* oleh *Capital Output Ratio* (COR)." Makin besar *saving* dan makin kecil COR, maka makin besar pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁹⁹ Penganut teori pertumbuhan lainnya, Simon Kuznetz berpendapat bahwa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan yang baik baru akan tercapai setelah melewati periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ketimpangan. Selama pertumbuhan agregat tumbuh *sustainable*, maka walau pada awal pertumbuhan terjadi *diverhensi* (ketimpangan yang naik), tapi pada saatnya akan terjadi *konverhensi* yang untuk mencapainya harus diciptakan pusat-pusat pertumbuhan. Pendapat di atas dikemukakan oleh Williamson dalam teori *diverhensi* dan *konverhensi*.¹⁰⁰

Rostow dengan teori pentahapannya (*linear theory*), melihat bahwa proses transisi dari *underdevelopment* menuju *development* dapat digambarkan sebagai serangkaian tahap-tahap yang juga akan dilalui oleh semua negara.¹⁰¹ Rosenstein Rodan dan Ragnar Nurkse dengan paradigma pertumbuhan yang berimbang (*balance growth*) menentang upaya pembangunan yang bersifat gradual dan incremental, Karena proses pembangunan ini tidak akan membawa suatu bangsa ke tataran hidup yang lebih baik. Untuk mengatasi diskontinuitas pembangunan perlu dorongan besar (*big push*) melalui investasi simultan di pelbagai sektor kegiatan ekonomi. Investasi kapital sinkronis pada aneka ragam industri merupakan tindakan tepat untuk mengatasi kegagalan pembangunan (*balance growth*).¹⁰²

Albert O'Hirschman tidak menolak pandangan di atas, tetapi ia mengusulkan adanya "*big push*" tidak secara simultan di sejumlah besar industri,¹⁰³ akan tetapi di beberapa industri yang dipilih secara strategis dengan asumsi bahwa pembangunan berproses melalui difusi pertumbuhan dari *leading sector* dalam ekonomi suatu negara menuju ke *lagging sector*. Industri yang bersifat

⁹⁹ Rumus yang buat Domar dalam menjelaskan teori pertumbuhan adalah $\Delta \frac{Y}{Y} \approx \frac{s}{K}$ dimana makin besar *saving* yang diinvestasikan dan makin kecil COR, maka makin besar pertumbuhan ekonomi. Domar juga menganggap bahwa ketimpangan adalah *social necessity* karena akan menjadi *productive base* karena dengan ketimpangan, golongan kaya akan dapat melakukan *saving* untuk investasi, lihat Moeljarto Tjokrowinoto dalam *Konsep dan Isu Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: Diklat MAP-UGM.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰¹ Dalam gambaran Rostow, masyarakat di dunia ini akan mengalami tahapan-tahapan yang sama dalam mencapai kemakmuran. Tahapan yang harus dilalui itu adalah: 1) masyarakat tradisional, 2) pra kondisi untuk tinggal landas, 3) tinggal landas, 4) *self sustaining growth*, 5) bergerak ke kedewasaan, dan 6) *high mass consumption*. *Ibid*, hlm. 17.

¹⁰² Rosenstein Rodan (1943) melihat adanya kendala dan hambatan pembangunan yang diakibatkan oleh adanya mekanisme pasar. Untuk mengatasinya, diperlukan konsep *externalities* yang meliputi, pertama tidak dipisah-pisahkannya suplai *social overhead capital/infrastructure* (*lumpiness capital*); kedua tidak dipisah-pisahkannya permintaan (*indivisibility of demand*). Sementara itu, Ragnar Nurkse melihat bahwa kebanyakan negara Dunia Ketiga terperangkap dalam lingkaran setan keterbelakangan (*vicious circle of underdevelopment*) yaitu pendapatan yang rendah merefleksikan produktivitas yang rendah yang disebabkan kurangnya modal. Kurangnya modal disebabkan kemampuan menabung yang rendah. Karena itu untuk mengatasinya diperlukan suatu serangan frontal...gelombang investasi dalam sejumlah industri yang beraneka ragam. Untuk lebih jelasnya lihat Tjokrowinoto, *ibid*, hlm. 25-26.

¹⁰³ Konsep O'Hirschman ini lebih dikenal dengan paradigma pertumbuhan tidak berimbang (*unbalance growth*) yang mengamini adanya *big push* untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan investasi kapital secara simultan diberbagai industri. Tapi faktor modal menjadi kendala utama dalam pembangunan di negara berkembang untuk investasi simultan tersebut.

strategis menurutnya adalah industri yang mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang optimal.

Ketidakpuasan para pakar terhadap konsep paradigma pertumbuhan yang fokus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukur yang bersifat agregat seperti angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dipandang tidak dapat mengungkap apa yang dialami sebagian besar penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Karenanya muncul paradigma kesejahteraan yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Overseas development Council menggunakan ukuran kesejahteraan PQLI (*physical quality of live index*) yang mencakup angka kematian bayi, harapan hidup bayi umur satu tahun, dan tingkat literasi sebagai standar untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan.¹⁰⁴

Sementara dalam buku *The Asian Drama* (1968), Gunnar Myrdal menegaskan bahwa, agar sasaran pembangunan yang berupa realisasi potensi kepribadian manusia dapat tercapai, maka syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok¹⁰⁵ harus terlebih dulu terpenuhi. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan mutlak (*absolute necessity*) yang harus dipenuhi.

Kemudian dalam konsep *redistribution with growth*, Hollis Chenery menyadari arti pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang pada khususnya dan negara-negara pada umumnya, akan tetapi di lain pihak dia juga melihat kecenderungan munculnya ketimpangan sosial akibat pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan terkonsentrasinya kekayaan dan kekuasaan pada beberapa negara maju dan pada golongan masyarakat lapisan atas, serta marginalisasi negara-negara berkembang dan golongan miskin dalam masyarakat. Untuk mengatasinya, ia mengusulkan penekanan pada pertumbuhan dengan redistribusi hasil pembangunan melalui paradigma *redistribution with growth*, dengan merekomendasikan agar supaya negara-negara kaya mentransfer 2% dari GNP-nya per tahun kepada negara miskin. Ia juga mengusulkan *transfer of resources* dari pelapisan atas ke pelapisan bawah, misalnya melalui sistem perpajakan progresif (*progressive tax system*).¹⁰⁶

Penganut teori akumulasi kapital Arthur Lewis memahami pembangunan sebagai upaya pembentukan modal dengan dukungan buruh dalam jumlah tak terbatas. Sementara definisi yang bertentangan dengan pendapat di atas dikemukakan oleh T.W. Shultz yang menyarankan agar kebijakan pembangunan mencakup juga sasaran-sasaran sosial dan ekonomi, dimana perlu tindakan nyata untuk membatasi konsentrasi kekayaan melalui pendidikan dan pajak redistribusi.

Para tokoh paradigma neo-ekonomi berpendapat bahwa pengalaman pembangunan tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa, meskipun banyak negara-negara berkembang yang berhasil mencapai target pertumbuhan ekonominya sebesar lebih dari 5 persen rata-rata pertahun—sebagaimana yang ditargetkan oleh PBB—akan tetapi nasib sebagian terbesar rakyat miskin tidak mengalami perbaikan. Karena itu mereka menghendaki *dethronement of GNP* sebagai tolok ukur pembangunan dan meredefinisikan kembali paradigma pertumbuhan (Todaro, 1997: 61). Dudley Seers yang juga Rektor Universitas Sussex mengatakan, “Dengan singkat, pembangunan ekonomi didefinisikan kembali ke dalam pengertian pemberantasan atau penurunan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran di dalam konteks pertumbuhan ekonomi.”

Tokoh pembangunan asal Pakistan Mahbub Ul Haq mengkritik pembangunan yang dilakukan negara ketiga tahun 1960-an. Ada efek-efek buruk yang ditimbulkan oleh pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan yaitu pencitraan masyarakat Barat (*demonstration effect*) sebagai model masyarakat ideal yang ingin mereka wujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya (*compression effect*), pencampuradukkan sistem kapitalisme liberal dan sistem sosialisme dalam mengejar angka GNP setinggi-tingginya (*fusion effect*), dan kepercayaan bahwa kemiskinan dapat dihapuskan melalui mekanisme *trickle down effect* setelah terwujud pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena itu Mahbub Ul Haq mengusulkan agar negara-negara berkembang menerapkan gaya pembangunan (*style of development*) yang lain, yang tidak semata-mata mengejar pertumbuhan

¹⁰⁴ Tjokrowinoto, *ibid*, hlm. 20-21.

¹⁰⁵ Tahun 1976, Dirjen ILO menjelaskan empat kategori kebutuhan pokok, yaitu Pertama, persyaratan minimum untuk keluarga, meliputi kecukupan pangan, rumah dan pakaian; kedua, akses masyarakat pada pelayanan publik; ketiga, peluang kerja bagi yang mau dan mampu; keempat, pemuasan kebutuhan yang bersifat kualitatif.

¹⁰⁶ Tjokrowinoto, *loc.cit.*, hlm. 37-38.

ekonomi yang setinggi-tingginya. Gaya pembangunan tadi harus lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dan tidak meniru gaya pembangunan negara-negara barat.¹⁰⁷

Tokoh teori pembangunan manusia (*humanizing theory*) Misra menegaskan, "Pembangunan yang berkemanusiaan tidak berarti de-industrialisasi, tidak pula berarti penolakan terhadap teknologi modern. Hal itu tidak berarti ruralisasi masyarakat manusia, bukan pula berarti cara hidup sosio-teknologis penghuni gua-gua. Pembangunan berkemanusiaan bukan membenaran *zero-growth economy*; bukan pula membenaran pertumbuhan ekonomi yang amat tinggi demi pertumbuhan itu sendiri. Kesemuanya valid, selama hal itu memungkinkan manusia hidup lebih baik dan selama tidak memperbudak manusia, membawa kepada kekerasan, menyebabkan rakyat kehilangan keseimbangan mental dan kesehatan fisik dan mengakibatkan ketidakseimbangan masyarakat manusia."¹⁰⁸

Pelopop teori pembangunan yang lebih manusiawi Ivan Illich ingin mengakhiri dominasi teknologi atas manusia dengan mewujudkan suatu bentuk masyarakat yang disebut "*masyarakat convivial*." Dalam masyarakat tersebut akan berlangsung hubungan (*intercourse*) yang otonom dan kreatif antara orang yang satu dengan yang lain dan antara manusia dengan lingkungannya. Masyarakat ini merupakan kebalikan dari "*produktivitas industrial*" dimana respon manusia terhadap tuntutan sesama manusia dan terhadap lingkungan merupakan respon yang dipaksakan (*conditioned response*). Masyarakat *convivial* merefleksikan kebebasan individual yang diwujudkan dalam bentuk interdependensi pribadi antara sesama manusia dan karenanya mempunyai nilai etis yang intrinsik. Masyarakat ini terwujud jika pengaturan sosial (*social arrangement*) menjamin akses yang luas dan bebas bagi setiap anggotanya kepada alat atau teknologi yang ada dalam masyarakat.

Hal senada juga dikemukakan Paulo Freire, pakar pendidikan asal Brazil yang melihat bahwa proses pembangunan dapat menumbuhkan sistem politik opresif yang cenderung mendegradasikan hakekat manusia, mendehumanisasikan manusia. Dan ini berakibat buruk pada: a) manusia mengalami proses konversi menjadi penonton pasif (*passive spectator*), dikuasai oleh mitos-mitos yang diciptakan oleh kekuatan sosial yang berkuasa; b) manusia mengalami keterasingan kultural (*cultural alienation*) karena hidup terpisah dari realita yang ada karena tidak mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya; c) manusia juga menjadi objek masifikasi (*massification*), di mana rakyat telah dimanipulir oleh elit menjadi "*unthinking manageable agglomeration*"; d) manusia mengalami *assistensialisme*, selalu menggantungkan diri pada bantuan orang lain; e) terjadi 'budaya bisu' (*the silence culture*) atau *mutism* di mana masyarakat tidak berani lagi mengemukakan pendapatnya. Untuk mengakhiri itu, perlu dilakukan dengan pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis atau *conscientizacao* melalui pendidikan yang bersifat dialogis. Kesadaran transitif yang kritis itu ditandai dengan mendalamnya interpretasi terhadap masalah; oleh digantinya penjelasan yang magistis dengan azas-azas sebab akibat; oleh pembuktian dari temuan seseorang dan keterbukaan terhadap revisi; oleh upaya menghindari distrorsi dalam melihat persoalan dan menghindari praduga dalam menganalisisnya; oleh penolakan menghindari tanggung jawab; oleh penolakan posisi yang pasif; oleh sukarnya argumentasi; oleh praktek dialogis dan polemik; oleh pembinaan idea baru bukan semata-mata karena baru dan akal sehat tidak menolak yang lain hanya semata-mata karena hal tadi lama semata-mata oleh penerimaan apa yang valid, baik dari yang lama maupun yang baru.

Denis Goulet dalam bukunya *The Cruel Choice* (1973) melihat keterbelakangan (*underdevelopment*) tidak semata-mata sebagai kemelaratan dan pendapatan yang rendah. *Underdevelopment* merupakan bentuk dehumanisasi, karenanya untuk dapat menghayatinya, orang harus memahami alam pikiran keterbelakangan tadi. Bagi Goulet, pembangunan tidak hanya masalah ekonomi, tetapi masalah kemanusiaan. Karenanya tolok ukur keberhasilan pembangunan menurutnya adalah, *life sustenance*, *self esteem*, dan *liberation*. Alberto Guerreiro Ramos (1976) melihat terjadinya kecenderungan pembangunan nasional untuk menumbuhkan dominasi manusia oleh *enclave* pasar, pada hakekatnya telah menumbuhkan proses uni-dimensionalisasi kehidupan manusia menjadi makhluk yang hanya peka terhadap rangsangan-rangsangan yang ditumbuhkan oleh mekanisme pasar. Oleh Karena itu upaya untuk membebaskan manusia dari dominasi pasar,

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.44-48.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.50.

Ramos mengidealkan sebuah masyarakat yang ia sebut sebagai masyarakat isonomi, dimana pasar hanya merupakan salah satu *enclave* dalam realita sosial yang bersifat multi-sentrik; sedangkan individu hanyalah secara kebetulan bersifat sebagai pemaksimum manfaat.

David Mc Clelland dalam bukunya *The Achieving Society* (1963) menunjuk faktor mikro individual dalam mencari penyebab keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Faktor mikro individual tadi adalah faktor internal psikologis yang disebutnya sebagai "*achievement motivation*" atau N-ach. Alex Inkeles menyatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan pembangunan diakibatkan oleh faktor mikro atau psikologi individual yang berproses ke arah modernitas melalui transformasi karakteristik dari pribadi tradisional ke pribadi modern sebagai akibat proses belajar dari lingkungan eksistensi dan pengalaman hidup.

Daniel Lerner dalam hasil laporan penelitian yang ditulis dalam buku *The Passing of Traditional Society* (1968) melihat bahwa proses modernisasi sebagai problem kemanusiaan yang memerlukan transformasi yang sistematis terhadap gaya hidup seseorang. Modernisasi dipandang sebagai pergerakan atau pergeseran dari masyarakat *non-participant* yang ditandai dengan sempitnya cakrawala masyarakat dan ideologi nasional, menuju masyarakat partisipan dimana *public affairs* yang melintasi batas lokal dibuat oleh anggota masyarakat.

Arief Budiman menjelaskan bahwa pembangunan pada akhirnya mesti ditujukan pada manusianya lagi. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif. Untuk bisa kreatif, mereka harus merasa bahagia, aman dan bebas dari rasa takut. Karenanya mesti diciptakan lingkungan politik dan budaya yang kondusif, sehat dan dinamis. Dari berbagai macam konsep pembangunan di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak sepadan dengan pertumbuhan ekonomi, di mana pada saat bersamaan tidak ada pembangunan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan, dapat dikurangi dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan ekonomi. Karenanya, pembangunan merupakan proses perbaikan dan perubahan yang lama, *indigenous*, dan tiap negara punya konsep sendiri dalam pembangunan. Tetapi pembangunan juga bersifat global, karena segala sesuatu saling berkaitan. Tapi satu point yang harus tetap dipegang, sebagaimana yang diucapkan Johan Galtung, "Pembangunan adalah membangun manusia, bukan benda."¹⁰⁹

Secara keseluruhan, pemahaman tentang konsep pembangunan yang dikemukakan di atas lebih bersifat teoretik dan terkesan imajinatif. Pandangan-pandangan tersebut bisa dipahami sebagai sebuah harapan dari diselenggarakannya pembangunan oleh negara Dunia Ketiga, yakni untuk mewujudkan cita-cita nasional mensejahterakan kehidupan rakyat. Secara normatif, konsep pembangunan bertujuan sangat mulia, yakni untuk mencapai *progress* dan menuju peradaban yang lebih tinggi (Stan Burkley, 1993: 27). Hal ini bisa dilihat dari parameter standar yang disepakati dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Arief Budiman (1995) dan Subarsono (1997) menggunakan parameter kekayaan rata-rata, tingkat pemerataan, tingkat kualitas kehidupan, kerusakan lingkungan, dan keadilan sosial dan kesinambungan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana sesungguhnya realita yang sedang terjadi? Bagaimana ihwal pembangunan bisa bergeser menjadi sebuah ideologi yang teramat mempesona yang bernama developmentalisme bagi Dunia Ketiga?

Relasi Pembangunan, Negara dan Masyarakat Dunia Ketiga

Developmentalisme, seperti yang sudah disinggung di awal tulisan ini, dalam praktiknya dianggap sebagai satu-satunya tujuan bagi kebanyakan masyarakat Dunia Ketiga dan dijadikan sebagai alternatif yang harus dilakukan. Pembangunan menjadi hal yang harus dilakukan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera secara ekonomis. Sebagaimana dikatakan oleh Fakih (1996), bahwa realitas pembangunan terkait erat dengan peran penting pemerintah sebagai penyelenggara negara. Di sebagian besar bangsa Dunia Ketiga, penafsiran konsep

¹⁰⁹ Setidaknya Vivekananda melihat fenomena peningkatan penderitaan dan kemiskinan mayoritas orang miskin disebabkan oleh ketergantungan pembangunan dan *maldevelopment*. Dampak negatif pembangunan berakibat pada pemusatan kekayaan, ketimpangan distribusi pendapatan, terkonsentrasi kekuasaan pada militer dan tuan tanah. Ini membuka jalan bagi pengeluaran tak terencana, ketidaktepatan penggunaan bantuan asing dan proyek yang cacat, meningkatkan korupsi dan akhirnya kekerasan politik. Untuk lebih jelasnya lihat Franklin Vivekananda (ed.), 1987, *Promises and Process of Maldevelopment*, Stockholm: Bethany Books.

pembangunan dipahami sebagai perbaikan umum dalam standar hidup. Pembangunan juga dipahami sebagai sarana memperkuat negara, terutama melalui proses industrialisasi yang mengikuti pola yang seragam dari satu negara dengan negara lainnya. Dari perspektif seperti ini, peran pemerintah menjadi subjek pembangunan yakni memperlakukan rakyat sebagai objek, resipien atau penerima, klien bahkan partisipan pembangunan.¹¹⁰ Ini yang kemudian membuat pembangunan diterima begitu saja oleh birokrat, akademisi dan aktivis Ornop tanpa mempertanyakan landasan ideologis dan diskursusnya. Pertanyaan terhadap pembangunan semata-mata hanya mengenai metodologi atau pendekatan dan bagaimana teknik pelaksanaan pembangunan. Padahal yang seharusnya perlu dipertanyakan secara teoretis adalah justru pembangunan itu sendiri dianggap merupakan gagasan yang kontroversial atau bahkan kontra-produktif. Benarkan pembangunan benar-benar merupakan jawaban untuk memecahkan masalah bagi berjuta-juta rakyat Dunia Ketiga,¹¹¹ atau semata-mata merupakan alat untuk menyembunyikan penyakit yang lebih mendasar?

Pemahaman yang lebih mendalam, sebenarnya konsep pembangunan Dunia Ketiga adalah konsep yang diberikan secara sepihak oleh kapitalisme Dunia Pertama. Seperti yang dikatakan oleh Mueller (1987), *Peasant and Professionals: The Production of Knowledge in the Third World*, bahwa pembangunan adalah seperangkat praktik yang dikendalikan oleh pranata-pranata Dunia Pertama. Hubungan antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga memang sengaja diciptakan. Dunia Ketiga diberi pengertian sebagai negara miskin dan terbelakang, sementara negara Dunia Pertama diberi label sebagai negara industri maju dan modern. Pendapat di atas didukung oleh Fakih yang menyatakan bahwa, penciptaan dan globalisasi diskursus pembangunan dapat dipahami dengan sangat baik bila melihat sejarahnya yang dimulai pada akhir perang dunia kedua, yakni ketika presiden Harry S. Trumen untuk pertama kalinya memperkenalkan kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat yakni dengan melontarkan istilah "keterbelakangan" (*underdevelopment*) untuk menyebut negara-negara Amerika Selatan, Sub Sahara dan negara-negara continental yang baru merdeka dari penjajahan negara kolonial. Inilah saat pertama diskursus pembangunan secara resmi diluncurkan, yakni dalam kaitan dan konteks "perang dingin."¹¹² Maksud kebijakan ini adalah dalam rangka membendung pengaruh komunisme dan sosialisme di negara-negara Ketiga (Lummis dalam Fakih, 1996: 71). Setelah lebih dua dasawarsa developmentalisme dilaksanakan, mereka baru menyadari bahwa developmentalisme bukanlah merupakan solusi, melainkan bagian dari masalah itu sendiri. Meskipun pembangunan telah dilakukan, tapi jumlah kemiskinan absolut dan persentase pengangguran di Negara Dunia Ketiga terus meningkat, terjadi deteriorasi ekologis, penyusutan sumber alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi (Tjokrowinoto, 1996: 9). Hal ini disebabkan konsep pembangunan yang dominan yang diterapkan di kebanyakan negara Dunia Ketiga mencerminkan paradigma pembangunan model Barat. Dalam konsep ini pembangunan dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju "modernitas." Modernitas tersebut tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dilalui oleh bangsa-bangsa industri maju. Hal ini kemudian mendorong munculnya teori dan analisa yang mengkritik diskursus

¹¹⁰ Lihat Mansour Fakih, 1996, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 71.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 7.

¹¹² Dengan dalih membendung paham sosialisme dan komunisme, Amerika Serikat dan negara Sekutu melancarkan serangan atas kekuatan, pemerintahan dan pemimpin yang berusaha menempuh jalan lain untuk membangun negerinya, dengan menggulingkan pemerintahan—seperti Soekarno di Indonesia, pembunuhan Patrice Lumumba di Kongo, penggulingan Salvador Allende di Chile, dan perang Vietnam—menculik dan membunuh pemimpin, bahkan dengan mendirikan pemerintahan tandingan atau oposisi bersenjata seperti di Mozambique, Angola dan Nikaragua. Kenyataan ini terjadi bukan tanpa rencana karena dalam Pedoman Perencanaan Pertahanan yang dikeluarkan Pentagon tahun 1994-99, menyatakan bahwa, "Amerika Serikat terus menghalangi negara lain yang ingin menyaingi kepemimpinannya atau ingin mengubah tatanan politik dan ekonomi sekarang....Kita harus memelihara mekanisme untuk menghambat para pesaing. Sekalipun mereka hanya ingin berperan lebih besar secara regional maupun global." Hal ini didukung dengan pengakuan John Stockwell—mantan pejabat CIA yang kemudian menulis buku tentang pengalamannya—dinas intelijen itu melancarkan sekitar 3.000 operasi rahasia besar dan 10.000 operasi kecil, yang dirancang untuk merusak, menciptakan destabilisasi di negara lain, dan memaksa pemerintahnya untuk mengikuti kehendak Amerika Serikat (menegakkan perekonomian bebas dan terbuka). Hampir semuanya diarahkan kepada negara, pemerintahan, dan pemimpin yang kebijakannya bertentangan dengan kepentingan AS. Menurut perkiraannya sekitar 6 juta orang tewas akibat operasi operasi tersebut. Lihat *Neoliberalisme*, Media Kerja Budaya No. 07-2001.

pembangunan sebagai penyebab utama keterbelakangan dan kesengsaraan berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga. Kritik pertama datang dari kelompok ahli ekonomi dan pakar ilmu sosial Amerika Latin yang mengajukan teori ketergantungan tentang keterbelakangan (*dependency theory of underdevelopment*). Teori ketergantungan mempersoalkan keuntungan bersama dari perdagangan internasional dan pembangunan yang dinyatakan oleh penganjur modernisasi dan teori pertumbuhan (*growth theory*) dari Amerika. Argumen utama teori ketergantungan adalah ketergantungan sosio-ekonomi (neokolonialisme) meningkatkan keterbelakangan, yakni perkembangan keterbelakangan (*the development of underdevelopment*).

Kritik kedua datang dari sejumlah pemikir di Massachusetts Institute of Technology dan Club Rome, yang memperingatkan akan adanya ambang batas (*threshold*) pertumbuhan, dan akan terjadi kehancuran planet bumi ini sebagai suatu sistem kalau laju pembangunan dunia dan pertumbuhan penduduk terus meningkat. Mereka menyadari adanya batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan batas kemampuan biosphere untuk dapat menyerap kegiatan manusia, meskipun melalui penguasaan teknologi batas bisa menjadi bersifat relatif. Kritik inilah yang kemudian memunculkan landasan bagi pemikiran ekologis yang kemudian dikenal dengan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan,¹¹³ di mana pembangunan bukanlah suatu proses harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan di mana eksploitasi, sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan dasar saat ini dan di masa datang.¹¹⁴

Kritik lain terhadap pembangunan juga muncul dari kalangan intelektual di Barat. Sekelompok pemikir yang bergabung dengan *Dag Hammarskjold Foundation* (Swedia) mengajukan apa yang disebutnya "pembangunan yang lain" (*another development*). Mereka percaya bahwa pembangunan harus: berorientasi kebutuhan, sanggup mempertemukan kebutuhan materi dan non-materi manusia; *indigenous*, berasal dari "hati" setiap masyarakat; percaya pada diri sendiri, yang secara tidak langsung menyatakan bahwa setiap masyarakat intinya mengandalkan kekuatan dan sumber dayanya sendiri; mempunyai pertimbangan ekologis, pemanfaatan secara rasional sumber daya *biosphere*; dan didasarkan transformasi struktural secara keseluruhan yang terpadu. Dalam satu hal, kelompok ini menolak gagasan jalan pembangunan yang universal dan menganjurkan bahwa setiap masyarakat harus menemukan strateginya sendiri.¹¹⁵ Ada banyak kajian ekstensif yang menunjukkan bahwa developmentalisme adalah "bungkus baru dari kua lama" kapitalisme. Dengan demikian pembangunan juga dilihat sebagai ideologi dominan baru yang tidak memungkinkan bagi Dunia Ketiga mencapai demokratisasi dan transformasi di bidang apa pun meliputi bidang ekonomi, politik, kultur, gender dan lingkungan, termasuk hubungan pengetahuan atau kekuasaan (*knowledge/power relationship*). Dari perspektif ini, perlawanan bukan pada aras metodologi dan pendekatan tetapi juga terhadap konsep dan diskursus pembangunan secara menyeluruh. Wolfgang Sach (1993) secara sarkastis memperingatkan kita bahwa, "Sebenarnya, bukan kegagalan pembangunan yang harus ditakuti, tetapi justru keberhasilannya."

Akar Sejarah Developmentalisme

Penciptaan dan globalisasi diskursus pembangunan dapat dipahami dengan sangat baik bila melihat sejarahnya yang dimulai pada akhir perang dunia kedua. Sebagaimana yang dikatakan Mansour Fakih (1996) bahwa, "Gagasan pembangunan dilontarkan sekitar tanggal 20 Januari 1949, yakni ketika presiden Harry S. Truman untuk pertama kalinya memperkenalkan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yakni dengan melontarkan istilah yang baru diciptakan yaitu "keterbelakangan" (*underdevelopment*)."

¹¹³ Lihat Moeljarto Tjokrowinoto, 1996, *loc.cit.*, hlm. 9-12.

¹¹⁴ Definisi pembangunan berkelanjutan yang istilahnya diperkenalkan World Conservation Union—NGO internasional yang berbasis di Swiss—namun kemudian dipopulerkan Komisi Brundtland dalam laporan khusus *Our Common Future* tahun 1987, adalah usaha untuk memberantas kemiskinan global pada tahun 2015, membebaskan generasi mendatang dari ancaman akibat eksploitasi sumber daya alam secara habis-habisan oleh kegiatan manusia. Lihat liputan khusus KTT Bumi 2002, 'Menuju Istana Kristal "Pembangunan Berkelanjutan,"' Kompas, 26 Agustus 2002.

¹¹⁵ Fakih, 1996, *loc.cit.*, hlm. 8-9.

diluncurkan, yakni dalam kaitan dan konteks “perang dingin.” Maksud kebijakan ini adalah dalam rangka membendung pengaruh komunisme dan sosialisme di negara-negara Ketiga.¹¹⁶

Untuk menyebarkan gagasan pembangunan ke Dunia Ketiga, pada tahun 1950 dan 1960-an para ahli ilmu sosial terutama pakar ilmu sosial yang tergabung dalam Centre for International Studies di Massachusetts Institute of Technology (MIT), berperan dalam membantu menyelenggarakan lokakarya yang berhasil menciptakan diskursus resmi dan akademis tentang pembangunan (Gendzier, 1985 dalam Fakihi, 1996). Sepanjang periode itu para ahli ilmu sosial sangat produktif menciptakan pengetahuan dan teori tentang pembangunan dan modernisasi. Dalam masa itulah, pakar ekonomi seperti W.W. Rostow menciptakan teori pertumbuhan dan ahli ilmu sosial lainnya seperti McClelland dan Inkeles mulai mengembangkan teorinya mengenai modernisasi. Pada tahun 1968, para ahli ilmu sosial Amerika Serikat terlibat semakin jauh dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menggloalkan pembangunan. Para ahli ilmu sosial tersebut menyelenggarakan “Konferensi tentang pelaksanaan pasal IX UU Bantuan luar negeri 1961.” Tugas utama mereka adalah mengkaji ketentuan mengenai Undang-undang Bantuan Luar Negeri tahun 1966 yang merupakan tafsiran kaum liberal atas konsep pembangunan. Kesimpulan pengkajian tersebut adalah “partisipasi rakyat”—yang merupakan sasaran pasal IX—harus diletakkan seiring dengan bantuan pembangunan ekonomi untuk menjadi dua pilar utama kebijakan bantuan luar negeri Amerika Serikat. Sejak saat itulah diskursus mengenai partisipasi menjadi bahasa resmi di dalam developmentalisme.

Teori pembangunan kemudian didominasi oleh teori dan model yang diturunkan dari pengalaman sejarah ekonomi negara Barat yang meletakkan modernisasi sebagai landasan developmentalisme. Modernisasi dan pembangunan selanjutnya menjadi padanan kata (sinonim) jika dipandang dari segi asumsi dasar dan teorinya, karena berasal dari paradigma yang sama yaitu paradigma fungsionalisme dan positivisme (Fakihi, 1996: 72). Sebagai bagian dari modernisasi, pembangunan menggunakan kerangka teoretis dan asumsi ideologis yang sama sebagaimana digunakan oleh modernisasi. Asumsi dasar modernisasi dikaitkan dengan proses perubahan dari struktur yang disebut tradisional menuju struktur yang dikenal sebagai modern, seperti perkembangan yang pernah terjadi pada masa awal Eropa.

Salah satu aliran dalam teori modernisasi adalah paham yang menggunakan metafora pertumbuhan (seperti dalam organisme). Bagi penganut paham ini, pembangunan dilihat dari perspektif evolusioner, yakni merupakan perjalanan panjang dari keadaan “tradisional” ke “modern,” di mana semua masyarakat pernah mengalami keadaan yang sama (tradisional). Maka masyarakat Dunia Ketiga juga akan melewati perjalanan perubahan yang sama, sebagaimana terjadi di Barat. Paham modernisasi organisme ini yang sangat terkenal dengan teori skema lima tahap (*five stage scheme*) yang dikembangkan W.W. Rostow (1960), yang membayangkan perubahan masyarakat dari tradisi ke modernitas melalui proses pembangunan seperti yang pernah dijalani negara-negara industri. Dalam pemikirannya, Rostow menekankan perlunya kewiraswastaan dan akumulasi modal yang dijalankan swasta sebagai tema utama dalam literatur tentang pertumbuhan ekonomi yang akan merangsang proses pembangunan. Aliran kedua yang menjelaskan tentang paham modernisasi adalah paham yang dikembangkan oleh mereka yang menggunakan penjelasan sosiologis dan psikologis. Teori ini didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh David McClelland yang mendasarkan pada penafsiran Max Weber yang mengatakan bahwa, jika Etika Protestan—secara

¹¹⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa, awal mula dari konsep developmentalisme adalah ketika para pejabat pemerintah, bankir, pemilik industri, dan pedagang dari Amerika Serikat dan Inggris berkumpul di Bretton Woods, New Hampshire untuk membentuk lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. IMF menggunakan tabungannya untuk menalangi kerugian yang dilanda sebuah negara agar dapat melanjutkan perdagangan, Bank Dunia bertugas memberi pinjaman kepada pemerintah-pemerintah di dunia untuk membangun jalan raya, rel kereta api, jembatan, pelabuhan, dan semua infrastruktur yang tidak menghasilkan keuntungan dengan maksud agar pemerintah bersangkutan punya cukup uang sehingga tidak perlu menarik pajak terlalu besar dari pihak swasta. Tapi sebelum menerima pinjaman, negara yang bersangkutan harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti pedoman pembangunan ekonomi yang dikenal dengan “program penyesuaian struktural” (*structural adjustment program*—SAP). Program ini berarti mendobrak dan menghancurkan hambatan-hambatan di tingkat domestik, sehingga modal internasional bisa masuk dengan leluasa. Kajian dan tulisan yang mengulas tentang globalisasi dan pembangunan bisa dilihat dalam liputan pokok Tim Media Kerja Budaya, ‘Merayakan Kesengsaraan,’ *Neoliberalisme*, Media Kerja Budaya No. 07 hlm. 7, dan Bonnie Setiawan, 2001, *Mengugat Globalisasi*, Jakarta: Infid dan IGJ.

tidak sengaja—menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi di Barat, maka fenomena analog yang sama mestinya dapat di coba di tempat lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Menurut McClelland, apa yang ada di balik Etika Protestan Weber tersebut kuncinya adalah sifat personalitas yang disebut sebagai “kebutuhan berprestasi” (N-Ach). Penjelasan mengapa rakyat di negara-negara Dunia Ketiga terbelakang, menurutnya karena mereka tidak mempunyai dorongan dan motivasi untuk meraih kebutuhan berprestasi—yang dia maksud sebagai *prototype* “masyarakat berprestasi” sebenarnya adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri perilaku seperti yang ada dalam masyarakat kapitalis.

Dengan demikian, modernisasi sesungguhnya serupa dengan westernisasi yang didasarkan pada paham kapitalisme. Hasil studi tentang modernisasi ini secara cepat diubah menjadi bidang kajian—yang disebut *Development Studies*—yang mengelompokkan berbagai bahasan interdisipliner yang memusatkan perhatian pada analisis dan solusi masalah-masalah pembangunan, khususnya masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin, yang kemudian disebut sebagai negara berkembang. Melalui *Development Studies* yang diselenggarakan diberbagai universitas di negara Barat, kapitalisme dapat secara lancar disebarluaskan ke Dunia Ketiga dengan menggunakan label baru yang disebut sebagai pembangunan melalui para teknokrat, kalangan akademisi universitas, bahkan aktivis LSM dari Dunia Ketiga sendiri.¹¹⁷

Developmentalisme dan Gagasan Dasar Kapitalisme

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, pembangunan adalah “bungkus baru dari kua lama” kapitalisme, maka pemahaman tentang developmentalisme tidak akan pernah bisa lepas dari gagasan kapitalisme. Dan kalau kita membicarakan tentang kapitalisme, maka kita tidak akan lupa pada peletak dasar dan orang yang dijuluki sebagai bapak kapitalisme, Adam Smith dengan bukunya yang mashur *An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nation* yang terbit pertama kali tahun 1776. Ia yang pertama-tama menyusun sistem yang konseptual padu, tentang komoditi, pembagian kerja, nilai, modal serta kerja sederhana dan kompleks. Ia mensistematisir pertama kali semua hal itu menjadi teori nilai kerja (*Theory of Labour Value*). Ia juga menjelaskan hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi. Salah satu hal penting dalam membahas dasar kapitalisme adalah dengan mengetahui ciri mendasar sistem tersebut, yaitu pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan publik. Makna kapitalisme tersebut diilustrasikan sangat jelas:

“Apa yang kita harapkan untuk makan malam kita, tidaklah datang dari keajaiban dari si tukang daging, si pemasak bir atau tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Malah seseorang umumnya tidak berkeinginan untuk memajukan kepentingan publik dan ia juga tidak tahu sejauh mana ia memiliki andil untuk memajukannya. Yang ia hormati dan kejar hanyalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Di sini ia dituntun oleh tangan-tangan tak terlihat (*the invisible hands*) untuk mengejar tujuan yang bukan merupakan bagian dari kehendak sendiri. Bahwa itu juga bukan merupakan bagian dari masyarakat, itu tidak lantas berarti sesuatu yang lebih buruk bagi masyarakat. Dengan mengejar kepentingan sendiri, ia kerap kali memajukan kepentingan masyarakat lebih efektif dibandingkan dengan jika ia sungguh-sungguh bermaksud memajukannya. Saya tidak pernah menemukan kebaikan yang dilakukan mereka yang sok berdagang demi kebaikan publik.”¹¹⁸

Inilah ungkapan yang sangat objektif yang dilukiskan oleh Adam Smith dalam menyongsong jaman baru. Adam Smith adalah seorang teoretisi yang mampu memberikan penjelasan secara teoretik tentang proses peralihan ke kapitalisme. Pengenalan inilah yang membedakan Adam Smith dari kaum *Physiokrat* yang melulu melihatnya dari kerja pertanian. Metode Smith adalah dengan

¹¹⁷ Mansour Fakih, 1996, *loc.cit.*, hlm. 72-74.

¹¹⁸ Premis ini dikemukakan oleh Adam Smith, 1937, *The Wealth Of Nation*, New York: The Modern Library, hlm. 14, 423.

mulai melihat hubungan-hubungan sederhana yang ada diantara orang-orang sebagai para produsen komoditi yang terpisah-pisah, tetapi saling tergantung satu sama lainnya. Menurut Smith, dalam setiap masyarakat beradab terdapat "tiga tatanan yang besar, orisinil dan terpilih," yaitu, tuan tanah, kelas pekerja, dan kapitalis yang masing-masing pendapatannya adalah berupa sewa tanah, upah, dan laba modal yang secara keseluruhan menciptakan apa yang disebut pendapatan nasional. Dorongan nyata bagi perkembangan ekonomi dalam masyarakat semacam ini adalah gerak dari ketiga tatanan tersebut untuk memaksimalkan laba mereka dan mengakumulasi modal.¹¹⁹

Proses ini hanya dapat terjadi bila kapitalis mempekerjakan tenaga upahan "produktif" selama masa-masa berlangsungnya produksi. Dengan mempekerjakan pekerja, maka dihasilkan komoditi yang kemudian akan dijual ke pasar. Melalui perbedaan harga jual, maka hasil jual tersebut telah cukup bukan saja untuk memberi upah dan mengganti bahan mentah, tetapi juga cukup untuk menghasilkan laba dan sewa pada tingkat yang "alamiah." Dengan tingkat upah yang sama pada periode berikutnya, kapitalis dapat menambah pekerja "produktif." Penambahan dari tenaga kerja inilah yang dapat dianggap sebagai ukuran akumulasi. Tapi dari manakah datangnya laba? Menurut Smith, makin besar kuantitas tenaga upahan yang akan menghasilkan komoditi, semakin besar pula kemampuannya untuk menambah tenaga kerja dan semakin besar pula jumlah yang dapat diakumulasi. Dapat dikatakan bahwa kuantitas kerja dari produk tersebut (yaitu dari nilai produk tersebut) secara umum akan lebih besar dibanding kuantitas kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi (yaitu biaya produk tersebut); dan perbedaan antara dua kuantitas kerja tersebut merupakan ukuran bagi jumlah akumulasi.¹²⁰

Perkembangan kapitalisme juga tidak bisa lepas dari pemikiran seorang pedagang surat-surat berharga dan anggota parlemen Inggris, David Ricardo, yang dalam bukunya, *Principles of Political Economy and Taxation* menyatakan:

"Bahwa prinsip ekonomi dan pajak adalah suatu upaya untuk memilah-milah kerangka dasar pemikiran Adam Smith dari kekuasaan. Nilai sebuah komoditi, atau kuantitas dari setiap komoditi yang akan dipertukarkan tergantung pada kuantitas kerja relatif yang diperlukan untuk memproduksi dan bukan pada sedikit atau banyaknya penggantian yang dibayarkan kepada kerja tersebut."¹²¹

Dengan demikian Ricardo telah melakukan kritik terhadap masalah yang diajukan oleh Smith yang justru mempertajam pengertian tentang teori nilai kerja. Seperti dikatakan Engels, yang menyimpulkan apa yang telah dilakukan oleh Ricardo:

"Sosialisme modern, dengan berbagai macam kecenderungannya, selalu berawal dari ekonomi borjuis dan akan selalu mengaitkan dirinya dengan teori Ricardian, yaitu dengan dua proporsi yang diajukan oleh Ricardo pada bagian awal dari bukunya *Principles* yaitu: 1) bahwa nilai dari setiap komoditi ditentukan sepenuhnya dan satu-satunya oleh kuantitas kerja yang dibutuhkan dalam produksi; dan 2) bahwa produksi dari keseluruhan kerja sosial dibagi di antara tiga kelas: kelas tuan tanah (sewa), kelas kapitalis (laba), dan kelas pekerja (upah)."¹²²

Dalam kritiknya terhadap Adam Smith, Ricardo membedakan antara apa yang disebutnya kerja (*labour*) dan tenaga kerja (*labour power*). Smith menganggap teori nilai, yaitu nilai sebuah komoditi dalam pengertian biaya kerja (*cost of labour*), sementara Ricardo beranggapan bahwa nilai komoditi terdapat kerja manusia berikut bahan-bahan mentah dan alat kerja. Bila Smith membedakan antara "produk kerja" dan produk untuk "akumulasi modal," maka Ricardo beranggapan bahwa yang disebut modal adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Nilai itu didasarkan atas jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dengan demikian Ricardo memperbaiki

¹¹⁹ Bonnie Setiawan, 1999, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga: Teori-teori Radikal dari Klasik sampai Kontemporer*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, hlm. 19-21

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

¹²¹ David Ricardo, *Principles of Political Economy*, seperti dikutip Setiawan, *loc.cit.*, hlm. 25.

¹²² Friedrich Engels, 'Preface' dalam buku Marx, *The Poverty of Philosophy*, dalam Setiawan, *loc.cit.*, hlm. 26.

apa yang dinyatakan Smith secara sepotong-potong menjadi suatu teori nilai kerja yang bulat, yaitu bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi (yang diukur dalam jam kerja) satu-satunya ukuran untuk nilai tukar.

Franz Seda (1996) membuat interpretasi yang cukup lengkap dalam memahami *The Wealth of Nations* dengan menunjukkan lima prinsip fundamental dari kapitalisme murni. Pertama, bahwa kapitalisme adalah pengakuan penuh pada hak milik perorangan atau individu tanpa batas-batas tertentu. Hak milik pribadi adalah jaminan bagi individu yang bersangkutan untuk menegakkan kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan individu akan menjadi suatu kenyataan bila ia dibenarkan untuk mempunyai miliknya sendiri secara terjamin tanpa digugat pihak atau individu lain. Kedua, kapitalisme merupakan pengakuan akan hak individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Ketiga, kapitalisme mengisyaratkan pengakuan akan adanya dorongan atau motivasi ekonomi dalam bentuk semangat untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin (*profit motive*). Keempat, kapitalisme juga memuat pengakuan akan adanya kebebasan melakukan kompetisi dengan individu lain (*freedom for competition*). Kelima, kapitalisme mengakui berlakunya hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar.¹²³ Pengakuan inilah yang disebut sebagai bentuk manifestasi dari konsep *laissez-faire, laissez passer*.

Lenin memberikan pengertian baru yang lebih pasti terhadap istilah *finance capital*, sebagai gejala kapitalisme dengan ciri-ciri: a) konsentrasi produksi dan kapital yang telah berkembang dalam tingkat yang demikian tinggi sehingga menciptakan monopoli yang memainkan peranan menentukan dalam kehidupan ekonomi, b) penggabungan kapital bank dan kapital industri serta penciptaan "oligarkhi finansial" diatas basis *finance capital*. Selanjutnya perkembangan *finance capital* yang telah melampaui batas-batas suatu negara kapitalis akan menjelma menjadi *capitalism imperialism* yang merupakan gejala dengan ciri-ciri: a) ekspor kapital sebagai gejala yang berbeda dari ekspor komoditi, menjadi teramat penting peranannya, b) monopoli internasional yang merupakan gabungan kekuatan kapitalis yang memecah dunia, c) pembagian dunia ke dalam wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kapitalis terbesar. Perkembangan dari "kapitalisme persaingan bebas" menuju ke tahap *finance capital* dan akhirnya mencapai kesempurnaan dalam tahap *capitalistic imperialism*, menurut Lenin akan berlangsung dalam proses seperti yang digambarkan dalam ciri-ciri di atas.¹²⁴

Bagi Marx, kapitalisme hanyalah suatu fase peralihan dalam perkembangan sejarah. Kapitalisme adalah merupakan "sistem eksploitasi yang brutal, langsung, tak bermula dan telanjang." Dari nilai lebih akan terjadi suatu proses 'akumulasi,' yaitu: "penghasilan-penghasilan besar semakin lama semakin bertumpuk pada beberapa orang saja." Persaingan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya melalui mekanisasi industri akan menimbulkan proses 'konsentrasi' yaitu: perusahaan-perusahaan tertentu akan menjadi semakin besar, tapi jumlahnya akan makin berkurang, sedangkan perusahaan-perusahaan kecil akan kalah bersaing dan kemudian lenyap sehingga pada akhirnya produksi akan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Sementara itu, disamping upah yang semakin turun, akan terjadi pula 'pengangguran teknologis' (*technological unemployment*). Ini makin lama makin membentuk apa yang disebut cadangan industri yang menganggur (*industrial reserve army of unemployed*) yang pada akhirnya juga akan menekan upah untuk makin turun. Dengan cara itulah akan terjadi suatu proses pemiskinan yang sering disebut dengan istilah-istilah, *immiserization, peuperization* atau *verelendung* pada kelas pekerja. Mereka itu juga mengalami suatu pengasingan (*alienation*), yaitu karena terpaksa harus menjual satu-satunya yang mereka miliki: tenaga kerja. Kaum buruh telah dipisahkan dari alat-alat produksi sehingga tidak bisa memilih pekerjaan yang disukai. Dalam makna seperti tersebut di ataslah Marx berbicara tentang kemiskinan, yaitu kemiskinan yang disebabkan eksploitasi yang berlangsung dalam suatu proses industrialisasi di kota-kota.¹²⁵

¹²³ Lihat Frans Seda, 1996, *Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Indonesia, hlm. 272.

¹²⁴ Baca ringkasan 'Loucks Of Whitney,' dalam Dawam Raharjo, 1983, *Esai-Esai Ekonomi Politik*, Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm. 111.

¹²⁵ Rahardjo, 1983, *Ibid*, hlm. 112.

Dari uraian diatas, dapat kita tarik suatu unsur yang paling penting dalam kapitalisme—suatu unsur yang tampak dalam logika yang dipakai dalam dunia bisnis, namun berasal jauh di dalam sistem tersebut sebagai suatu aspek pokok dan bahkan primer dari orientasi perilakunya (*behavioral*). Ini adalah dorongan kebutuhan untuk menarik kekayaan dari kegiatan produktif masyarakat dalam bentuk kapital. Ada surplus dalam setiap masyarakat yang berasal dari selisih antara volume produksi yang diperlukan untuk memelihara kekuatan kerja dan volume produksi yang dihasilkan kekuatan kerja itu. Tidak mudah untuk mengukur selisih ini, tapi gagasan umum mengenai adanya batas minimum kebutuhan yang diperlukan guna mempertahankan “reproduksi” masyarakat adalah suatu konsep dasar dari perekonomian politis klasik yang tidak bisa dibantah.¹²⁶

Kapital adalah salah satu dari hal-hal yang dipakai untuk menggerakkan suatu proses transformasi berlanjut atas kapital-sebagai-uang menjadi kapital-sebagai-komoditi, diikuti oleh suatu retransformasi dari kapital-sebagai-komoditi menjadi kapital-sebagai-uang yang bertambah. Inilah rumusan M-C-M yang merupakan pen-skema-an Marx atas metamorfosis yang berulang dan meluas yang dijalani oleh “capital.” Proses yang berulang dan ekspansif ini memang diarahkan untuk membuat barang dan jasa dengan pengorganisasian niaga dan produksi. Tetapi kenyataan-fisik adanya komoditi-komoditi itu tidak dihargai sebagai bukti dari keberhasilan pencarian kekayaan, selama benda dan jasa itu berada di tangan kapitalis. Sebaliknya eksistensi fisik benda dan jasa itu merupakan suatu rintangan yang harus diatasi dengan mengubah komoditi menjadi uang kembali. Bahkan kalau hal itu terjadi, bila sudah terjual, maka uang itu pada gilirannya tidak dianggap sebagai produk akhir dari pencarian, tetapi hanya sebagai suatu tahap dalam lingkaran yang tak berakhir. Karena itu kapital bukanlah suatu benda material melainkan suatu proses yang memakai benda-benda material sebagai tahap-tahap dalam eksistensi dinamikanya yang berkelanjutan.¹²⁷

Kritik Marx pada masyarakat kapitalis adalah justru masyarakat ini menurut pandangannya telah menjadikan hasrat untuk “memiliki” (*to have*) dan mempergunakan (*to use*) sebagai keinginan utama manusia. Padahal Marx percaya bahwa, manusia yang didominasi oleh hasrat untuk memiliki dan mempergunakan adalah “manusia tuna” yang tidak sempurna. Tujuan Marx adalah suatu masyarakat yang disusun sedemikian rupa sehingga bukan laba dan harta kekayaan pribadi, melainkan perkembangan potensi manusiawi secara bebaslah yang merupakan tujuan utama. Karena itu menurut Fromm, baik masyarakat kapitalis maupun masyarakat sosialis Rusia dewasa ini, bertentangan dengan tujuan maupun teori Marx, Karena sama-sama didasarkan pada pandangan manusia yang sama, yaitu manusia yang digerakkan oleh motif untuk “memiliki sebanyak-banyaknya.”¹²⁸

Marx mempergunakan teori nilai lebih sebagai basis ekonomi dan memperjuangkan kelas dibawah sistem kapitalis. Nilai lebih yang diambil oleh pemilik modal atau kapitalis yang menguasai alat-alat produksi ini merupakan dasar dari terjadinya akumulasi kapital. Kaum kapitalis yang didorong untuk memperoleh laba itu akan terus berusaha untuk meningkatkan nilai lebih. Cara untuk memperoleh laba yang makin besar dari nilai lebih dilakukan dengan tiga cara utama yaitu: memperpanjang jam kerja, mengurangi jam kerja yang dibutuhkan oleh buruh guna mendapatkan upah dan mempercepat proses pembuatan barang melalui perbaikan teknologi. Dari tiga cara itu yang paling dipilih oleh kapitalis adalah dengan meningkatkan produktivitas. Penggunaan mesin-mesin baru berakibat meningkatkan nilai lebih tapi di pihak lain mengurangi tenaga kerja. Yang terakhir ini akan menambah penawaran tenaga kerja sehingga terjadi persaingan dalam penawaran tenaga kerja yang berakibat menurunkan tingkat upah.¹²⁹

¹²⁶ Misalnya, Adam Smith, dalam *The Wealth of Nation*, menyebut surplus sebagai selisih dari produk tahunan dan konsumsinya.

¹²⁷ Robert L. Heilbroner, 1991, *Hakekat dan Logika Kapitalisme*, Penerjemah: Hartono Hadikusumo, Jakarta: LP3ES, hlm. 19-21.

¹²⁸ Rahardjo, 1983, *loc.cit.*, hlm. 102.

¹²⁹ Baca ringkasan teori pokok Marx dalam William N. Louck dan William G. Whitney, *Comparative Economic System*, New York: Harper & Row Publishers, hlm 73-92, dan juga tentang hubungan antara teori nilai lebih dan proses akumulasi kapital dan penciptaan tenaga industri cadangan baca M.L. Jhingan, *The Economics Development and Planning*, Vikas Publishing House Ltd., 1976 dalam Rahardjo, *ibid.*, hlm. 104.

Dalam sistem kapitalis, menurut Marx akan terjadi persaingan hebat di antara perusahaan untuk bisa memproduksi barang dengan harga termurah. Caranya adalah dengan memperkecil pemakaian tenaga kerja dengan meningkatkan penggunaan mesin-mesin. Mereka yang kalah dalam persaingan, akan gulung tikar atau dicaplok oleh industri yang bisa bertahan. Dari sinilah terjadi proses konsentrasi dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan raksasa. Namun terjadi sesuatu yang aneh dari sistem kapitalis yaitu, walaupun persentase nilai lebih meningkat (*rasio antara nilai lebih dengan modal kerja plus modal permanen*) bisa turun. Malahan menurut Marx, kecenderungan dari kemajuan industri justru menurunkan tingkat laba, sebab perusahaan-perusahaan akan selalu berusaha untuk mempergunakan mesin-mesin sehingga memperbesar nilai modal permanen. Karena itu menurut analisis Marx, dalam sistem kapitalis akan terjadi di satu pihak, proses peningkatan nilai lebih yang berlanjut dengan proses akumulasi kapital, monopoli dan konsentrasi industri, dipihak lain terjadi proses peningkatan nilai lebih yang berlanjut dengan proses penurunan tingkat upah, makin kecilnya tingkat laba yang selanjutnya mengakibatkan proses pemiskinan, pengangguran dan runtuhnya perusahaan-perusahaan kecil ditelan oleh organisasi industri raksasa.¹³⁰

Sistem tersebut di atas menurut Marx, dalam jangka panjang, tidak akan bisa bertahan. Proses pemiskinan (*peuperization*) dan kesengsaraan (*immiserization*) dan makin berkembangnya "cadangan tentara industri" (*industrial reserve army*) akan menimbulkan kesadaran kelas *proletariat* untuk menentang sistem yang berlaku. Tapi dipihak lain, rendahnya tingkat upah pada perkembangan dunia usaha, yaitu terjadinya kemerosotan daya beli yang menyebabkan menurunnya tingkat konsumsi. Dengan kata lain, kekuatan permintaan pasar akan menurun hingga mengakibatkan perusahaan-perusahaan akan menurunkan produksinya. Inilah sumber terjadinya gerak fluktuasi yang bersifat siklis dalam perkembangan dunia usaha yang akan berakhir pada suatu krisis. Krisis ini menyediakan kondisi bagi kelas pekerja untuk mengambil alih pemilikan alat-alat produksi dalam suatu revolusi sosial.¹³¹

Marx juga bicara mengenai peranan negara dalam proses akumulasi kapital tersebut. Ia mengatakan bahwa, negara pada hakekatnya adalah "kekuatan pemaksa" (*coersive power*) dan merupakan alat dari kelas borjuasi untuk melindungi dan memajukan kepentingannya. Kekuasaan politik dalam sistem kapitalis adalah kekuatan yang terorganisasi dari suatu kelas untuk menindas yang lain. Ia merupakan produk dari antagonisme kelas yang tak ditemukan. Negara modern berdasarkan demokrasi representasi sebenarnya merupakan instrumen eksploitasi buruh upahan oleh pemilik kapital. Dengan cara itu kontrol dari penguasa dapat dilakukan secara langsung namun jauh lebih efektif dari penguasaan langsung. Di sini terjadi aliansi antara mereka yang duduk dalam pemerintahan dengan pemilik modal melalui teknik dukungan suara yang dapat diperoleh secara mudah dengan "pembelian suara" tak langsung.

Dari sketsa teori Marx tersebut di atas tampak bahwa, Marx dan Engels cukup konsisten dalam mengkombinasikan filsafat alienasi, pendekatan materialisme historis dan analisa ekonomi politik dalam alur gagasan untuk membangun suatu teori monistis tentang sosialisme, melalui kritiknya terhadap sistem ekonomi kapitalis modern yang tumbuh dengan hebatnya pada abad ke-19. Oleh para pengritiknya sering dikatakan bahwa Marx sebenarnya mengkombinasikan antara filsafat Jerman (terutama mensintesisakan filsafat Hegel dan Feurbach), cita-cita sosialisme Perancis (menyempurnakan gagasan Proudhon, Saint-Simon, Guizot, Sismondi dan Fourier) dan teori politik ekonomi Inggris (terutama teori Ricardo mengenai nilai dan upah kerja dan akumulasi kapital yang dianjurkannya).

Gagasan Marx tentang sosialisme dan kritikan terhadap kapitalisme mendapat serangan melalui berbagai jurusan. Pertama, dari jurusan teori murni, yaitu apakah dibangun di atas dasar logika yang sehat dan benar. Di sini sasaran kritik terutama ditujukan pada teori nilai kerja dan teori upahnya dilihat dari analisa ekonomi mikro. Kritik kedua ditujukan kepada ketepatan teorinya berdasarkan data empiris serta kemampuannya untuk meramalkan keadaan di masa mendatang (sesudah teori itu dikemukakan) berdasarkan data historis. Dan ketiga, kritik diarahkan kepada

¹³⁰ Dr. L.J. Zimmermen, 1962, *Sejarah Pendapat-pendapat tentang Ekonomi*, Terjemahan K. Siagian, Bandung: Penerbit Sinar, hlm. 77.

¹³¹ Di dari kutip louck & Whitney, *loc.cit.*, hlm. 117.

originalitas teori Marx yaitu apakah Marx mengemukakan satu teori baru ataukah hanya mengambil dan meramu gagasan orang lain sebelum atau pada masa hidupnya.¹³² Pada tahun 1870 hingga 1900, empat ekonom besar (yang bekerja secara terpisah tapi mengemukakan hal yang sama dan sampai pada kesimpulan yang sama pula), yaitu Karl Menger (1840-1921), William Stanley Jevons (1835-1882), Leon Walras (1837-1910) dan Alfred Marshal (1842-1924) mengkritik teori nilai kerja dan kegunaan marginal. Dengan menempatkan teori nilai kerja dan upah buruh Marx dalam kerangka teori kegunaan marginal, maka teori Marx itu tidak saja dikatakan “Tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai nyata komoditi yang menjadi dasar pertukaran dalam perekonomian kapitalis.”¹³³ Tapi juga tidak memberi sumbangan apa-apa dalam perkembangan teori ekonomi dan karena itu dapat diabaikan.” Kritik ini tentu saja seolah-olah “meruntuhkan” seluruh bangunan teori ekonomi Marx mengenai perkembangan sistem kapitalis, lebih dari itu teori marginal, yang dinilai sebagai “revolusi kedua” yang menciptakan paradigma baru ekonomi dengan lahirnya teori neo-klasik, ternyata telah mampu menyediakan alat analisa yang ampuh bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensi ekonominya dan dengan begitu telah “menyelamatkan” sistem kapitalis dari kemungkinan krisis seperti yang diramalkan oleh Marx. Teori ekonomi neo-klasik seolah-olah membuktikan bahwa “gagasan Marx adalah salah.”

Timbulnya teori-teori tentang “persaingan monopolistik” teori “persaingan tidak sempurna” yang dikembangkan Piero Sraffa (1926), Edward H. Chamberlein (1933) dan juga Joan Robinson (1933) yang merupakan “revolusi ketiga” karena menciptakan paradigma baru, telah ikut menyempurnakan teori marginal dalam membantu bekerjanya sistem ekonomi kapitalis yang sedang memasuki tahap baru, yaitu tahap perkembangan ekonomi atomistik masa Adam Smith yang terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil yang saling bersaing secara “sempurna bebas”—tahap persaingan diantara perusahaan—perusahaan besar yang masing-masing memiliki kedudukan monopolistik, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat. Teori-teori itu seolah-olah memperingatkan dunia kapitalis agar lebih bersifat realistis dalam menempatkan diri ditengah-tengah situasi baru sehingga tidak mengalami perkembangan menuju situasi krisis seperti yang diramalkan Marx.¹³⁴

Kejadian depresi besar tahun 1929-1933, hampir-hampir saja membenarkan ramalan Marx mengenai krisis kapitalisme yang berpangkal pada teori siklus dunia usaha. Keadaan ini mengingatkan orang pada teori Marx, walaupun tidak secara persis tentang, “merosotnya daya beli masyarakat” dalam sistem kapitalis. Tapi JM Keynes pada waktu terjadinya krisis mampu menjelaskan masalahnya yaitu, disekitar keseimbangan antara tabungan masyarakat dan investasi. Berdasar paradigma lama orang berpendapat, sebagaimana dinyatakan dalam hukum Say bahwa, jumlah investasi cenderung untuk selalu sama dengan jumlah tabungan masyarakat. Keynes mengatakan bahwa jumlah keduanya bisa tidak sama. Apabila tabungan lebih besar dari investasi, maka kegiatan ekonomi akan menurun, dan jika sebaliknya yang terjadi, maka kegiatan ekonomi akan meningkat. Apabila tabungan lebih besar, maka daya beli masyarakat berkurang dan permintaan masyarakat pun juga berkurang; ini bisa diatasi dengan menurunkan produksi untuk mencapai keseimbangan. Tapi tindakan ini akan menimbulkan pengangguran. Sebagai akibat menurunnya kegiatan produksi, tabungan masyarakat pun bisa menurun. Berdasar analisa ini, yang dikemukakan pada tahun 1930 dan disempurnakan dalam bukunya yang menciptakan “revolusi keempat,” yaitu *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), Keynes mengusulkan resep penyembuh depresi, yaitu untuk meningkatkan peran pemerintah dalam mengelola sistem uang untuk selalu menyeimbangkan tingkat investasi dan tabungan masyarakat, antara lain dengan melakukan investasi besar-besaran dalam proyek-proyek pekerjaan umum guna menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli serta permintaan umum masyarakat terhadap barang-barang yang selanjutnya akan mendorong industri meningkatkan kegiatan produksinya.¹³⁵

¹³² Louck & Whitney, *loc.cit.*, hlm. 142.

¹³³ Rahardjo, 1983, *loc.cit.*, hlm. 114.

¹³⁴ Richard T. Gill, *Evolution of Modern Economics*, New Delhi: Prentice-Hall of India Private Ltd., 1972, hlm. 82.

¹³⁵ J.K. Galbraith & Nicole Solinger, 1979, *Almost Everyone Guide to Economics*, Chicago: Bantam Books, hlm. 18-19.

Teori Keynes ini berarti penyelamatan terhadap sistem pasar dan persaingan bebas. Dengan demikian juga menghindarkan sistem kapitalis dari keadaan sebagaimana diramalkan Marx. Tidak jadi runtuhnya kapitalisme ini juga melemahkan validitas teori Marx yang daya ramalnya tidak terbukti. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan berkembangnya dunia usaha dan meningkatnya standar hidup kelas buruh di negara kapitalis, merupakan data empiris yang menyangkal kebenaran teori Marx. Tumbuhnya organisasi buruh yang cukup kuat tapi tidak revolusioner dan berkembangnya sistem negara kesejahteraan (*welfare state system*) yang paling tidak mengurangi tingkat “kesengsaraan” dan “kemiskinan” masyarakat tampaknya seperti membuktikan tidak relevannya teori Marx untuk memahami bekerjanya sistem kapitalisme. Dengan meningkatnya peranan pemerintah dalam mengatasi masalah depresi, resesi, inflasi dan pengangguran, juga membuktikan bahwa sistem kapitalis tidak saja mampu menyelamatkan dirinya dari krisis, malahan telah mampu tumbuh secara mandiri dalam jangka panjang.¹³⁶

Industrialisasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Di Negara Dunia Ketiga

Dewasa ini, Dunia Ketiga mengalami krisis yang sangat hebat akibat gagalnya proyek yang dinamakan pembangunan. Sebagai suatu model kapitalisme Dunia Ketiga peninggalan ‘perang dingin,’ gagasan tentang pembangunan boleh dikata mengalami kegagalan. Kegagalan ini justru terjadi karena negara yang dijadikan ‘model’ contoh keberhasilannya adalah negara-negara yang dijuluki sebagai ‘negara-negara industri baru’ NICs (*Newly Industrial Countries*) seperti Korea Selatan, Taiwan, termasuk Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Lalu, terbukti bahwa prestasi ekonomi negara-negara tersebut tak bertahan lama, dihantam badai krisis ekonomi yang akar penyebabnya masih diselidiki hingga sekarang. Beberapa penjelasan umumnya lebih menyalahkan faktor *moral hazard*, seperti korupsi dan *bad governance* dari rezim negara-negara tersebut sebagai akar penyebabnya.¹³⁷

Pembangunan sebagai suatu bentuk manifestasi dari jaringan kapitalisme global, maka akan sulit menganalisa suatu masalah yang ditimbulkannya hanya dari satu perspektif. Persoalan pembangunan akan lebih objektif jika dianalisa dengan menggunakan perspektif dialektis, yaitu saling keterkaitan antara persoalan eksploitasi, dominasi dan penindasan politik. Dengan demikian konsep pembangunan akan dilihat dari berbagai aspek menyeluruh dan saling keterkaitan, termasuk kaitan antara proses kelas dengan proses hegemoni kultural. Demikian halnya kaitan antara hegemoni kultural dengan proses kelas utama (*fundamental class process*) dan kaitan politik antara proses kelas utama dan proses kelas menengah perantara (*subsumed class process*).¹³⁸ Dengan demikian, memahami masalah pembangunan seseorang tidak dapat hanya melihat melalui satu aspek atau menganggap hanya satu entitas yang menjadi penyebab masalah terpenting.

Teori-teori Marx seolah-olah memperingatkan dunia kapitalis agar lebih bersifat realistis dalam menempatkan diri ditengah-tengah situasi baru sehingga tidak mengalami perkembangan menuju situasi krisis seperti yang diramalkan Marx. Tidak jadi runtuhnya kapitalisme ini juga melemahkan validitas teori Marx yang daya ramalnya tidak terbukti. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan berkembangnya dunia usaha dan meningkatnya standar hidup kelas buruh di negara kapitalis, merupakan data empiris yang menyangkal kebenaran teori Marx.

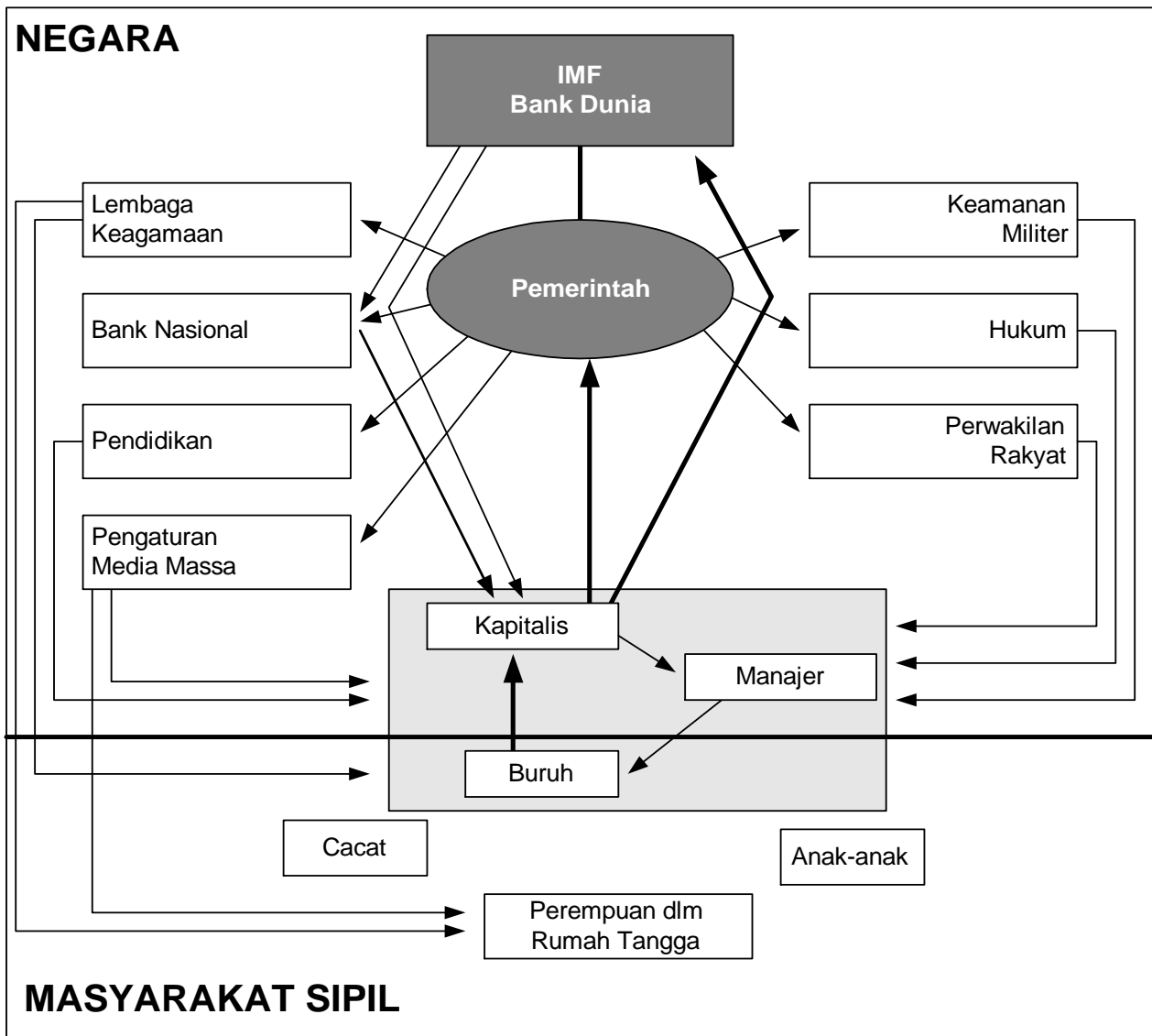
¹³⁶ Rahadrjo, 1983, *loc.cit.*, hlm. 105-108.

¹³⁷ Lihat ‘Pembangunan: Pelajaran Apa yang Kita Peroleh,’ *Teori Pembangunan Alternatif*, dalam pengantar Jurnal Wacana Edisi 7 tahun 2001, Yogyakarta: Insist Press, hlm 3.

¹³⁸ Keseluruhan hubungan ekonomi dan politik ini juga mempengaruhi kondisi perempuan karena pelanggaran eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan berlangsung dengan ideologi patriarki dan paradigma positivistic yang menjadi dasar bagi tradisi liberal pembangunan, lihat Mansour Fakih, 1996, *loc.cit.*, hlm. 79-80.

Diagram 1 Analisa Struktural Developmentalisme

Sumber: Mansour Fakih, 1996, hlm. 80.



Dari skema itu tampak bahwa dari perspektif dialektis, masalah Dunia Ketiga tampak sangat kompleks dan saling terkait. Pembangunan menciptakan masalah struktural dan sebaliknya proses ekonomi, politik dan kultural di Dunia Ketiga juga membentuk konsep pembangunan. Overdeterminisme antara pembangunan dengan proses ekonomi, politik, dan kultural ini berlangsung berkaitan secara kompleks melalui proses kelas dan kondisi yang melanggengkan seperti ideologi gender, kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, perdagangan internasional, tekanan politik, hegemoni kultural Bank Dunia dan negara-negara kapitalis maju dan banyak hal lainnya. Sejak digulirkannya terminologi pembangunan di Dunia Ketiga pasca PD II hingga memasuki permulaan millenium ketiga, masalah pembangunan menurut Fakih (1996) dapat dikategorikan menjadi empat isu besar:

(1) Eksploitasi Ekonomi dan Ketergantungan

Meski proses pembangunan terus berlangsung, tetapi angka kemiskinan rakyat di Dunia Ketiga ternyata terus meningkat. Jika demikian, kemiskinan berarti erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang ada dalam pembangunan. Untuk memahami masalah ekonomi dalam konteks pembangunan, uraian berikut akan meminjam analisis kelas dan teori ketergantungan. Dengan kata lain, pembahasan selanjutnya akan melihat pembangunan dari perspektif ekonomi-politik, dan teori ketergantungan.

Teori ekonomi-politik yang menggunakan perspektif kelas, sebagaimana yang disampaikan oleh Fakih (1996), lebih mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari proses pembangunan di Dunia Ketiga. Namun, sebelum melihat hubungan pembangunan dan ekonomi, terlebih dulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan teori kelas. Resnick dan Wolf (1987) mendefinisikan kelas sebagai proses di mana anggota masyarakat menduduki posisi tertentu dalam proses tersebut, yakni mereka bekerja dan menghasilkan nilai lebih (buruh maupun buruh tani) dan mereka yang tidak bekerja (majikan) tetapi mengambil nilai lebih dan mendistribusikannya. Mereka yang mengambil dan mendistribusikan nilai lebih tersebut dalam formasi sosial kapitalis disebut sebagai kaum kapitalis. Dengan demikian masyarakat dipahami terbagi dalam dua proses kelas yang berbeda, antara pengambil nilai lebih (kapitalis) dan penghasil nilai lebih tersebut (buruh). Proses kelas ini disebut sebagai proses kelas utama (*fundamental class process*). Hubungan antara posisi dua kelas menentukan keberadaan kelas menengah perantara atau (*subsumed class*).¹³⁹

Dalam pengertian ini, proses kelas berarti suatu proses dimana nilai lebih diambil dari buruh penghasil langsung nilai lebih tersebut. Dalam proses kelas utama, Sritua Arief (1998) melihat bahwa, pihak buruh berada dalam posisi *undercompensated*, sedangkan faktor modal berada dalam posisi *overcompensated*. Pihak buruh dibayar jauh dibawah produktivitasnya sehingga tingkat upah yang terbentuk mungkin hanya sama dengan nilai subsisten saja atau bahkan dibawah nilai subsisten. Dalam hal ini terjadi transfer nilai yang berlebihan dari pihak buruh kepada pemilik faktor produksi yang tak lain adalah refleksi eksploitasi. Lalu timbul pertanyaan kenapa pihak buruh berada dalam posisi seperti itu? Ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, secara sadar atau tidak buruh telah dianggap sebagai suatu kelompok paria atau kuli oleh pihak berkuasa sehingga mereka tidak dimungkinkan untuk mempunyai suatu posisi tawar yang kuat dalam proses produksi. Kedua, situasi surplus buruh dalam ekonomi secara keseluruhan yang telah mengakibatkan banyaknya orang yang bersedia dibayar murah asal mendapat pekerjaan secara kelembagaan telah tidak dinetralisir dengan suatu ketentuan yang menjamin tingkat upah minimum yang wajar, sehingga tingkat kemakmuran buruh yang minimum tidak dapat dipertahankan.¹⁴⁰

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi yang dipakai oleh pembangunan berarti mengandung ketidakadilan, di mana ada kelompok masyarakat yang memproduksi nilai lebih yang (kemudian) diambil oleh mereka yang tidak bekerja. Mereka tidak diajak negosiasi tentang berapa upah mereka, serta tidak diberi kebebasan untuk berorganisasi mendidik diri untuk mampu memperjuangkan nasibnya.¹⁴¹

¹³⁹ Keunikan teori ini dalam memahami kelas dan perannya dalam formasi struktur sosial dan perubahan sosial adalah terletak pada analisis hubungan antara penghasil dan pengambil nilai lebih (proses kelas utama) dan hubungannya dengan bagian nonkelas dalam masyarakat, yakni mereka yang berfungsi sebagai pendistribusi nilai lebih tersebut yang disebut sebagai proses kelas menengah perantara. Kelas menengah perantara tidak mengontrol produksi atau tidak terlibat dalam pengambilan nilai lebih secara langsung, melainkan hanya sebagai pendistribusi nilai lebih. Interaksi antara proses kelas utama dan kelas menengah perantara terjadi dalam formasi sosial tertentu. Namun demikian keberadaan proses kelas utama sangat tergantung kepada kelas menengah perantara dan sebaliknya. Dalam perusahaan misalnya, posisi pedagang perantara, yakni mereka yang menduduki kelas menengah perantara adalah distributor. Gaji mereka berasal dari sumber yang sama yaitu nilai lebih yang dihasilkan buruh. Keberadaan kelas menengah perantara inilah yang memungkinkan proses kelas utama berlangsung. Dengan kata lain, proses kelas utama sangat tergantung pada keberadaan kelas menengah perantara. Kaitan antara kelas utama dan kelas menengah perantara tersebut dikenal sebagai proses kontradiksi tapi berkaitan. Kontradiksi juga terjadi antara kelompok kelas menengah perantara. Tiap-tiap kelas menengah perantara pada dasarnya saling bersaing untuk mendapatkan lebih banyak nilai lebih yang dihasilkan oleh proses kelas utama, lihat Fakih, 1996, *loc.cit.*, hlm. 82-84.

¹⁴⁰ Sritua Arief lebih jauh melihat terjadinya proses eksploitasi disebabkan etika sosial atau moralitas ekonomi telah tidak menjadi landasan dalam hubungan dan proses ekonomi. Terbukti dengan tumbuhnya secara kukuh kelas pemupuk rente ekonomi yang umumnya disebut konglomerat yang merupakan pemikiran ekonomi kapitalis abad 19 yang pada hakekatnya adalah sistem kapitalisme rampok yang merupakan ciri kapitalisme muda. Lihat Sritua Arief, 1998, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, hlm. 226-227.

¹⁴¹ Sistem ekonomi liberal yang dianut suatu negara untuk mengintegrasikan diri dalam sistem ekonomi pasar, telah menyebabkan makin meningkatnya angka kesenjangan dan kemiskinan di mana lebih dari 1,2 milyar penduduk bumi ini hidup dalam kemiskinan yang ekstrem—kurang dari satu dollar AS/ hari karena repatriasi keuntungan investasi dan utang yang ditanamkan di negara-negara miskin—sementara pemilik perusahaan Microsoft Bill Gates, berpendapatan US\$95 per detik. Bahkan kekayaan perusahaan-perusahaan multinasional—General Motors pada tahun 1997 telah mencapai US\$ 164 milyar—sementara GDP Norwegia mencapai US\$ 153 milyar, dan GDP Indonesia US\$ 52,3 milyar.

Jikalau ekonomi-politik melihat hubungan kelas antara penghasil nilai lebih dan pengambil nilai lebih maupun bagian distributor nilai lebih, yakni kelas menengah perantara, teori ketergantungan lebih melihat kepada hubungan makro antara pembangunan dan keterbelakangan baik antara negara-negara dominan (pusat) dan Dunia Ketiga (pinggiran), maupun antara kaum elit dan kaum miskin negara pinggiran. Para penganjur teori ini meliputi Andre Gunder Frank (1973), Celco Furtado (1973), Samir Amin (1971) serta Cardoso dan Faletto (1979). Fakih memandang bahwa, asumsi teori ketergantungan adalah: pembangunan dan keterbelakangan merupakan konsep yang berkaitan. Keterbelakangan daerah atau masyarakat berkaitan dengan pembangunan daerah lain yang sering kali berada di luar daerah atau masyarakat itu.¹⁴² Sementara Hadiz (1999) melihat teori dependensi memandang perekonomian internasional ditandai hubungan yang tidak seimbang antara negara-negara kapitalis industri maju di satu pihak dan terbelakang di pihak lain. Dapat dikatakan bahwa, suatu premis umum yang dipegang oleh semua teoretisi dependensi menetapkan bahwa hubungan "pusat-periferi" tersebut sejak periode ekspansi kapitalisme melalui kolonialisme, hingga kini, ditandai oleh persistensi mekanisme-mekanisme "pertukaran yang tidak seimbang" yang melestarikan penyerapan surplus ekonomi dari periferi ke pusat. Implikasinya masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga berada dalam kondisi "perkembangan yang terhambat" (*blocked development*) yang bersifat permanen.¹⁴³

Dalam hubungan ketergantungan antarnegara, tidaklah penting bagi negara kaya harus secara fisik menguasai atau menjajah negara miskin sebagaimana terjadi dalam masa atau model imperialisme klasik. Kiranya cukup dengan melakukan usaha untuk menciptakan agar pemimpin atau elit negara miskin (*lumpen bourgeois*), memegang sikap, nilai atau kepentingan yang sama dengan pemimpin atau elit negara kaya (Frank, 1972).¹⁴⁴ Hal senada diungkapkan oleh Kay, Rey, dan Amin yang berpendapat bahwa perluasan ekonomi kapitalis dunia, pertama-tama bersentuhan dengan negara-negara pinggiran dengan menciptakan kelas kapitalis pedagang (Kay, 1997; Amin, 1976; Rey, 1976). Kelas ini memungkinkan pengiriman komoditi Dunia Ketiga ke negara-negara kapitalis maju pada tingkat pertukaran yang menguntungkan negara maju, namun kelas ini tidak terlibat atau mengelola proses produksi.

Di Indonesia misalnya, selama kurun waktu 1973-1990, nilai akumulatif keuntungan investasi asing yang direpatriasi ke luar negeri mencapai US\$ 56,9 milyar untuk masuknya arus investasi asing sebesar US\$ 5,8 Milyar. Dengan membandingkan kedua angka ini, maka setiap satu dolar Amerika Serikat yang dimasukan investor asing ke Indonesia telah diikuti oleh mengalirnya sumber keuangan dalam nilai sepuluh kali lipat dari ekonomi Indonesia.¹⁴⁵ Sementara itu akibat diberlakukannya Putaran Uruguay, Goldin (1993) dan kawan-kawan untuk OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) memproyeksikan bahwa pada tahun 2002 sesudah terjadinya penurunan tarif dan subsidi sebesar 30 persen, manfaat ekonomi tahunan yang diperoleh seluruh anggota GATT di dunia diproyeksikan akan bernilai sekitar US\$ 213 milyar. Dari keseluruhan pertambahan manfaat ekonomis ini, sebesar US\$ 141,8 dolar atau 67 persen akan jatuh ke negara-negara maju.¹⁴⁶ Tambahan lagi, banyak terjadi pelarian modal yang dibiayai dengan hutang luar negeri yang berdampak negatif terhadap distribusi kekayaan dan pendapatan. Di Indonesia saja pada kurun waktu 1970-1980 terjadi pelarian modal sebesar US\$ 9,4 milyar rata-rata hampir US\$ 1 milyar setahun. Dan selama periode 1988-1991 pelarian modal telah ditaksir sebesar US\$ 11,17 milyar atau sebesar US\$ 3,7 milyar setahun.¹⁴⁷

Sampai saat ini, kita bisa memahami bahwa penjajahan baru negara kaya pada negara miskin sudah bergeser dari model penjajahan fisik dan geografis menuju model yang lebih halus dan tak kentara, yakni cukup dengan menciptakan ketergantungan ekonomi negara miskin pada negara

¹⁴² Fakih, 1996, *loc.cit.*, hlm. 85.

¹⁴³ Vedi R. Hadis, 1999, *Politik Pembebasan: Teori-teori Negara Pasca Kolonial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, hlm. 35.

¹⁴⁴ Di samping itu, mereka juga membangun kader-kader ideologis yang luar biasa efisiennya karena mereka memahami apa yang disampaikan oleh pemikir Itali, Antonio Gramsci ketika ia bicara tentang konsep hegemoni kultural. "Bila kamu dapat menguasai kepala orang (pikiran), maka hati dan tangan mereka akan ikut," kata Susan George.

¹⁴⁵ Lihat Sritua Arief, 1998, *loc.cit.*, hlm. 171-172.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 163.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 128.

kaya. Ketergantungan pada kapitalisme ini menyebabkan penderitaan, keterbelakangan, suburnya ketidakadilan dan kediktatoran militer, yang sebenarnya bukan warisan feodalisme atau modernisasi yang salah tempat. Bukti paling konkret adanya neo-kolonialisme atau neo-imperialisme ini adalah dengan kehadiran lembaga-lembaga dunia yang dijadikan simbolisasi kapitalisme dengan dalih membantu kesulitan ekonomi negara berkembang atau terbelakang. International Monetary Funds (IMF), International Bank of Reconstruction Development (IBRD) atau sekarang bernama World Bank dan berbagai badan PBB lain yang kesemuanya didominasi oleh Amerika, merupakan simbol kapitalis.¹⁴⁸

(2) Hegemoni Kultural, Ideologi, dan Politik

Proses pembangunan dan industrialisasi yang terjadi di negara Dunia Ketiga bukan berarti kehadiran barang, jasa, teknologi dan informasi belaka. Tapi konsep pembangunan itu sarat dengan beban berat nilai-nilai dan budaya negara maju yang pada akhirnya menciptakan hegemoni kultural pada negara-negara Dunia Ketiga. Modernisasi adalah contoh terbaik bagaimana hegemoni berlangsung. Karena modernisasi pada dasarnya menciptakan ideologi baru dengan pengaruh kultural dan politik, melalui penciptaan diskursus sistemik dan terstruktur, serta propaganda yang canggih untuk mengganti ideologi, kultur dan politik rakyat yang ter subordinasi.

Proses ini bekerja dengan baik di negara Dunia Ketiga ketika modernisasi dipahami sebagai perubahan perilaku tradisional secara kolektif kepada perilaku yang cenderung mengadopsi nilai dan budaya negara kapitalis maju atau negara Barat. Dan ini berakibat terjadinya perombakan tatanan sistem sosio-budaya dan ekonomi masyarakat Dunia Ketiga. Sistem ekonomi yang semula bersifat fatalistik dan subsistensial didekonstruksikan secara total oleh perangkat-perangkat kapitalisme dengan orientasi pemenuhan kebutuhan individu sebesar-besarnya. Budaya lokal dinegasikan dan diganti dengan nilai dan budaya barat (westernisasi). Karena itu pola, gaya hidup serta tingkah laku masyarakat Dunia Ketiga hampir sama (identik) dengan pola dan gaya hidup masyarakat kapitalis yang *profit oriented* untuk mencapai *high mass consumption* (Rostow) yang mengagungkan budaya konsumtif di dalam masyarakat yang berprestasi (masyarakat kapitalis-McClelland).¹⁴⁹

Globalisasi gaya hidup yang acap ditunjukkan sebagai determinasi imperialisme budaya atau imperialisme media ini, boleh dikatakan sebagai hedonisasi masyarakat Dunia Ketiga, terutama untuk elit kelas menengahnya. Dennis Goulet mengibaratkan industrialisasi dan teknologisasi yang terjadi di negara Dunia Ketiga bagaikan sebilah pedang bermata dua, yakni sebagai pembawa dan penghancur nilai-nilai.¹⁵⁰ Sebagai pembawa nilai-nilai yang borjuis kapitalis barat yang rasionalistik, individualistik, positivistik tapi juga sekaligus penghancur nilai budaya lokal yang religius-asketis, fatalis serta memegang teguh prinsip-prinsip *collective colligia*. Negara Dunia Ketiga terjebak pada upaya mengejar ketinggalan dan bisa sejajar dengan negara maju melalui pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada pemusatan yang berlebih pada pembangunan ekonomi. Konsentrasi berlebih ini, cenderung me-lupa-kan aspek pembangunan nilai-nilai dan budaya lokal dan lebih menikmati kehadiran budaya asing yang ter-infiltrasi lewat teknologi informasi.

Masyarakat Dunia Ketiga mengalami *cultural shock* karena imitasi budaya yang mereka lakukan tidak memiliki kemampuan kreatif untuk menggagas sendiri kebudayaan yang mereka kehendaki. Bahkan nilai-nilai sejarah dan kebesaran budaya lokal yang dikorbankan untuk komoditi dan konsumsi Barat, telah memporak-porandakan realitas budaya lokal sehingga tak lagi mampu mencirikan kekhasan lokalnya sebagai identitas dan harga diri. Wacana kapitalisme global mendobrak seluruh tatanan tradisional-agraris yang secara ideologi memang kontra-produktif

¹⁴⁸ Menurut catatan Development GAP (NGO yang berbasis di Washington DC), sejak 20 tahun terakhir, IMF dan World Bank merawat pasien 83 negara dengan SAP (*Structural Adjustman Program*). Hasilnya terjadi pengangguran yang meningkat, ekonomi tidak merata (timpang), kemiskinan meningkat, harga-harga naik, produksi perkapita turun, hutang meningkat, pajak mencekik, subsidi orang miskin dihapus, negara tidak lagi melayani rakyat karena privatisasi BUMN. Kajian yang mengupas secara mendalam tentang globalisasi dan dampaknya bisa dilihat dalam Jurnal Media Kerja Budaya edisi 07, 2001; Bonnie Setiawan, 2001, *Menggugat Globalisasi*, Jakarta: INFID dan IGJ; Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, 2002, *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan*, Jakarta: INFID, Konphalindo, dan IGJ; Patricia Adams, 2002, *Odious Debt (Utang Najis)*, Jakarta: INFID; Mansour Fakih, 2000, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.

¹⁴⁹ Lihat Saiful Arief, 2000, *loc.cit.*, hlm. 137-138 dan Fakih, 1996, *loc.cit.*, hlm 86-87.

¹⁵⁰ Nezar Patria dan Andi Arief, 1999, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 17.

dengan ornamen-ornamen kapitalis. Pembangunan juga telah menjadikan manusia sebagai makhluk uni-dimensional, yaitu hanya terfokus pada pencarian ekonomi, dengan mengabaikan peran dia sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya.

Proses hegemoni kultural di negara Dunia Ketiga itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi melalui berbagai macam strategi yang bisa menopang berkembangnya ideologi kapitalis, yaitu meliputi jenis pendidikan yang diberikan di sekolah, media massa—cetak, radio, dan TV—dan semua jenis lembaga, gereja dan lembaga keagamaan lainnya. Dengan berbagai strategi yang ditanamkan itu, akhirnya gagasan dan ideologi kelas berkuasa diambil oleh rakyat yang dikuasai dan mereka menerima gagasan tersebut (Kruijer, 1987).

Para ahli ilmu-ilmu sosial memainkan peran yang besar dalam mengglobalkan ideologi pembangunan dengan mengajukan gagasan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menggunakan berbagai cara dalam rangka mendeseminasikan ideologi *development* dan modernisasi dengan target khusus negara Dunia Ketiga.¹⁵¹ Sarana pertama dengan menggunakan pengaruh Amerika Serikat terhadap kebijakan dan perencanaan ekonomi negara yang dibantunya. Para ahli ilmu sosial Amerika sangat memahami bahwa USAID sangat efektif mempengaruhi kebijakan dan perencanaan ekonomi. Sarana kedua, adalah mendidik pemimpin Dunia Ketiga, baik dalam bentuk *training* maupun perjalanan observasi ke Amerika Serikat. Strategi ini konon diusulkan berdasar pengalaman pemimpin mahasiswa dalam menghancurkan pemerintahan nasionalis di Indonesia tahun 1966 (Millikan dan Pye: 136). Sarana ketiga yaitu dengan menggunakan agama. Banyak studi agama diarahkan pada peran penyebarluasan diskursus dan penafsiran yang mendukung developmentalisme, sehingga perlunya 'sekulerisasi' menjadi bahasa resmi pemimpin agama Dunia Ketiga. Hal inilah yang pada akhirnya menggusur ajaran agama yang bercorak egalitarian, anti eksploitasi, teologi pembebasan serta agama keadilan sosial lainnya. Sedangkan sarana yang terakhir, adalah dengan menggunakan fungsi *training* dan *riset* dari tenaga universitas Amerika Serikat yang bekerja di luar negeri atas biaya USAID (Millikan dan Pye: 165).

Invasi kultural dan modernisasi juga dibantu oleh bantuan keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia (Hayter, 1985) mencatat bahwa ada beberapa prinsip dasar filosofi Bank Dunia yang terbukti konsisten sepanjang sejarahnya selama sepuluh tahun terakhir. Filosofi itu adalah mendukung kepercayaan kepada kekuatan pasar dan sektor swasta; mendorong investasi asing dan perlindungan terhadap investasi asing yang ada; mendukung prinsip perdagangan bebas dan keunggulan komparatif; keengganan untuk menggunakan pengendalian harga, impor dan pergerakan modal; keengganan untuk mensubsidi dan mendukung *full cost recovery* pada proyek investasi keuangan dan publik umumnya; mendukung kebijakan stabilisasi keuangan yang dicapai melalui berbagai program IMF, termasuk permintaan reduksi dan devaluasi; dan persyaratan bahwa utang-utang diperbaiki dan dibayar kembali (Heyter, 1985). Tentu saja Bank Dunia menolak dengan tegas segala bentuk subsidi dan pemilikan masyarakat secara komunal atas tanah dan menyambut baik penghentian *land reform* meskipun telah diundangkan oleh suatu negara.

Development Aid sering kali dikembangkan dalam rangka menjaga *status quo*, dan untuk mengikat negara Selatan pada ekonomi negara kaya. Bahkan bagian terbesar bagian terbesar dari apa yang disebut *aid* atau bantuan biasanya digunakan oleh pemerintah Dunia Ketiga untuk melayani kepentingan Bank Dunia. Sebagaimana yang lain dijatahkan oleh pemberi bantuan dalam rangka melicinkan eksportir serta dukungan kepentingan bisnis mereka sendiri yang mereka tanamkan di Dunia Ketiga. Bantuan pembangunan juga digunakan untuk membeli pasokan bahan baku yang diperlukan dan untuk memberangus subversi (Kruijer, 1987). Demikianlah *discourse development* tersebut berkembang, dimasing-masing negara berkembang secara mendalam hingga sampai di pedesaan dengan pendekatan masing-masing.

(3) Hegemoni Pengetahuan

Semula orang beranggapan bahwa pengetahuan (*knowledge*) adalah bidang yang netral, objektif dan tak berdosa. Kesadaran orang tumbuh ketika Foucault, lewat analisis diskursus (*discourse analysis*) untuk pertama kalinya mempersoalkan bahwa pengetahuan ternyata mengandung kekuasaan (*power*). Kecenderungan memandang kekuasaan hanya terpusat pada

¹⁵¹ Lihat Fakih, 1996, *loc.cit.*, hlm 87-88

negara atau kelas, bagi Foucault merupakan pengingkaran kenyataan, karena relasi kekuasaan terdapat pada setiap aspek kehidupan. Pengetahuan bukan sesuatu yang ada tanpa hubungan kekuasaan. Menurutnya, hubungan pengetahuan adalah hubungan kekuasaan. Pengetahuan adalah peredaran dengan mana perwakilan negara, perusahaan multinasional, universitas, dan organisasi formal lainnya memajukan masyarakat kapitalis.

Pengetahuan pembangunan dan modernisasi bukan sekedar hasrat untuk mengetahui, tetapi juga terkandung maksud untuk mengendalikan dan menguasai. Jadi antara pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan dijadikan sebagai sarana dan alat untuk melanggengkan ideologi dan kultur dominan melalui proses *hegemoni*.¹⁵² Di sini, peran lembaga-lembaga ilmu pengetahuan berjasa melanggengkan proses kelas. Misalnya ketika Taylor menciptakan ilmu manajemen, ternyata atas pesanan kaum industrialis. Tujuan ilmu manajemen Taylor adalah untuk memotivasi buruh (baca: menjinakkan) demi keuntungan perusahaan melalui peningkatan produktivitas kerja. Bukankah hakekat ilmu kepemimpinan dan motivasi dalam manajemen yang dikembangkan McGregor adalah agar buruh yang menjual tenaganya itu “merasa memiliki perusahaan” yang dalam kenyataannya bukan milik mereka?

Hasrat itulah yang menurut Foucault memberi pengaruh terhadap relasi ‘kekuasaan’ antara birokrat dan intelektual universitas yang ‘modern, ilmiah dan positivistik’ dan masyarakat adat atau masyarakat ‘awam, yang tradisional suku terasing, perambah hutan, tidak ilmiah, tahayul, tidak mampu mengelola SDA dan belum berbudaya’ sehingga perlu dibudayakan atau diberdayakan. Pengetahuan pembangunan yang dikirimkan kepada negara Dunia Ketiga pada dasarnya bukanlah pengetahuan netral. Bahkan sejak diskursus pembangunan mendominasi Dunia Ketiga, diskursus menjadi satu-satunya bentuk pengetahuan, ekonomi, politik dan kultur yang sah. Oleh karena itu diskursus pembangunan mengharamkan bentuk-bentuk cara mengetahui yang non-positivistik lainnya, seperti cara-cara pertanian tradisional digantikan oleh tipe pertanian modern. Diskursus pembangunan juga menghancurkan formasi sosial non-kapitalistik. Kesimpulan sederhana yang dapat ditarik adalah bahwa pengetahuan, modernisasi, kekuasaan, dan pembangunan bermuara pada satu mata rantai, yaitu diskursus *developmentalisme*. Yang menyebabkan hancurnya bentuk proses politik lokal dan menggantinya dengan doktrin modernisasi politik yang menjadi gagasan dominan tentang pembangunan politik di Dunia Ketiga. Semua itu menunjukkan hubungan yang saling terkait—intelektual, politik, ideologi—yang termasuk bagian integral dari diskursus pembangunan.¹⁵³

(4) Kerusakan Lingkungan dalam Pembangunan

Pembangunan ekonomi yang menjadikan pertumbuhan setinggi-tingginya sebagai dasar filosofi, berimbas pada karakter anti lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dalam pembangunan, adalah suatu yang tidak terhindarkan. Sebab apabila saja konsep ekologi dan konsep ekonomi dipertemukan, maka kepentingan keduanya berbenturan satu sama lain. Fakta ini menimbulkan pertanyaan, apakah memang kedua prinsip tersebut memang saling menegasikan, sehingga pembangunan ekonomi harus mengorbankan kelestarian lingkungan?¹⁵⁴

Dan yang terkena imbas dari pelaksanaan industrialisasi seiring perkembangan diskursus pembangunan di Dunia Ketiga, adalah bidang pertanian. Industrialisasi adalah kekuatan progresif yang memanfaatkan teknologi kepada sumber daya alam dan membolehkan pengurangan ketergantungan kepada pertanian. Dengan mengikuti logika industrialisasi, pembangunan pertanian

¹⁵² Dalam pengertian umum, *hegemoni* adalah loyalitas dari suatu kelompok ekonomi ditujukan untuk kelompok sosial dan ekonomi yang dominan. Gramsci (1972) menggunakan istilah hegemoni sebagai pengertian persekutuan kelas yang mendominasi kelas lain. Dominasi kultur yang tidak adil, dominasi politik yang harus dilegitimasi—merupakan proses penjinakan masyarakat sehingga mereka secara suka rela (*consent*) menerima tatanan *status quo* dan hubungan yang tidak adil tersebut, lihat Mansour Fakih, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 54.

¹⁵³ Tentang hegemoni pengetahuan dalam pembangunan, lihat Mansour Fakih, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, hlm. 193, lihat juga Fakih, 1996, *loc.cit.*, hlm. 55, juga *Masyarakat Sipil*, *loc.cit.*, hlm. 92-93, lihat juga Saiful Arief, 2000, *loc.cit.*, hlm. 146.

¹⁵⁴ Lihat Saiful Arif, 2000, *loc.cit.*, hlm. 171.

khususnya Revolusi Hijau dipraktekkan sebagai proses linear yang mengubah pengolahan ladang, metode penggunaan buruh dan tabungan kapital menjadi cara pengolahan ladang permanen dan melalui stimulus percepatan penduduk, menghasilkan pengaruh arus balik dari industri. Penelitian tanaman, pestisida, pupuk, mekanisasi, jalan dan fasilitas kredit, semuanya membantu memperbesar tabungan buruh, pertanian modal intensif.¹⁵⁵ Produk industri yang berhasil menembus wilayah pertanian adalah bahan-bahan kimia seperti pestisida atau produk-produk bioteknologi lainnya. Namun kehadiran bioteknologi bersamaan dengan Revolusi Hijau justru dianggap sebagai biang kerusakan ekosistem dan tata lingkungan.

Bibit unggul (buatan) misalnya, ternyata tidak unggul dihadapan hama, maka diperlukan *pest control* dan *plant protection* dengan memakai pestisida secara besar-besaran. Kenyataannya, pestisida bukan racun yang mampu mengontrol hama seperti resep mereka, malah melahirkan hama baru, disamping meningkatkan daya tahan hama lama yang cenderung mendatangkan serangan baru. Belum lagi bahaya residu racun bagi manusia. Namun perang melawan hama itu sesungguhnya tidak perlu. Para petani selama ratusan tahun sesungguhnya paham, bahwa mekanisme kontrol terhadap hama sudah ada dalam ekologi tanaman, yakni dengan cara menyeimbangkan antara *pest* dan predator dengan melalui diversitas tanaman itu sendiri. Maka bibit baru unggul jenis baru dan racun kimia yang menjadi masukan utama Revolusi Hijau telah mengakibatkan tercemarnya lingkungan yang tak ternilai kerugiannya.¹⁵⁶

Hal senada dikemukakan Arief yang mengutip W.C. Clarke (1978), yang mengatakan bahwa kesalahan besar (*big mistake*) jika pertanian diindustrialisasikan, sambil menunjuk bebaikan-kebaikan pertanian pra-industrialisasi.¹⁵⁷ Selain dampak bioteknologi pada Revolusi Hijau di bidang pertanian, persoalan lain yang mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah pemanasan global. Pemanasan global sebagai gejala ekologi akibat industrialisasi, efek rumah kaca dan dampak teknologi lain yang bersifat destruktif. Pengaruh pemanasan global pada pertanian Dunia Ketiga berpengaruh pada persediaan air, polusi atmosfer, penyusutan tanah. Hal ini akan mengurangi keanekaragaman hayati spesies tumbuh-tumbuhan. Di bidang kelautan, dengan hadirnya teknologi pukat modern di Dunia Ketiga sebagai instrumen atau alat untuk meningkatkan hasil produksi, berakibat rusaknya ekosistem kehidupan laut. Penangkapan ikan dengan pukat modern yang diperkenalkan melalui program-program bantuan bilateral dan multilateral, mengurus ikan dengan cara destruktif yang menyebabkan menipisnya persediaan sumber daya perikanan. Bahkan berjuta-juta nelayan tradisional juga ikut termarginalisir karena hasil tangkapan dan pendapatannya terus merosot. Ledakan penduduk dan emisi industri juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Peningkatan populasi penduduk secara cepat di desa-desa negara Dunia Ketiga membuat SDA semakin terbatas, karena kebutuhan akan bahan bakar kayu meningkat, pembukaan jalan baru menyebabkan kerusakan hutan, kualitas tanah juga merosot, erosi dan banjir di daerah hilir.¹⁵⁸ Ledakan penduduk yang kebanyakan terjadi di negara-negara miskin Dunia Ketiga, menurut Kennedy mustahil menghadapinya dengan cara menghentikan laju pertumbuhannya. Sedangkan cara mencegah emisi industri dengan membalikan industrialisasi, dinilai juga sulit dilakukan oleh Dunia Ketiga karena industrialisasi dinilai sebagai cara mutlak melepaskan diri dari kemiskinan sebagaimana yang pernah dilakukan negara maju dulu. Akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan sebenarnya tidak hanya menyerang lingkungan itu sendiri, akan tetapi juga pada manusia sebagai pelaku maupun resipien pembangunan.¹⁵⁹

Kerusakan lingkungan, industrialisasi, dan kemiskinan adalah tiga serangkai yang saling berkaitan. Kemiskinan memaksa untuk mengadakan industrialisasi dan industrialisasi menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun meski tanpa industrialisasi, tapi jika ada kemiskinan, maka sebenarnya kerusakan lingkungan bisa terjadi seperti yang terjadi di Afrika, Asia dan negara-negara miskin lainnya yang mengeksploitasi sumber daya alamnya untuk mempertahankan hidup. Di sisi

¹⁵⁵ Lihat Fakhri, 1996, *Masyarakat Sipil, loc.cit.*, hlm. 100.

¹⁵⁶ Lihat Fakhri, 1996, *Analisis Gender, loc.cit.*, hlm. 63-64.

¹⁵⁷ W.C. Clarke, 'Kemajuan Masa Lampau: Suatu Sistem Pertanian Tradisional Menunjang Lingkungan,' dalam Joachim Metzner dan N. Daldjoeni, *Ekofarming*, 1987, *Bertani Selaras Alam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 129-130.

¹⁵⁸ Lihat Michael Carley dan Ian Christie, 1992, *Managing Sustainable Development*, London, Earthscan Publication, p. 22.

¹⁵⁹ Lihat Arief, 2000, *loc.cit.*, hlm. 176-177.

lain, kemiskinan juga telah mengakibatkan degradasi ekologis di mana penduduk miskin terpaksa membabat hutan dan menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi dan secara subsistensi untuk mempertahankan hidupnya. Akibatnya terjadilah kerusakan tanah, erosi, banjir, dan sebagainya.

Ini adalah kealpaan dalam memperhitungkan secara teoretis (termasuk kealpaan moral) di dalamnya yang menjadikan praktek pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga kacau. Paradigma pertumbuhan ekonomi dan mekanisme pasar yang selama ini diagung-agungkan ternyata memiliki kelemahan mendasar dalam mempertimbangkan penggunaan aset faktor produksi yang berasal dari alam. Mereka terus-menerus menerapkan paradigma pertumbuhan ekonomi secara konsisten, meski konsekwensinya ialah eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Pilar sistem lingkungan hidup dunia berada di ambang kehancuran. Perhatikan saja, 42% dari jumlah total hutan tropis di dunia sebelum masa kolonisasi telah rusak tanpa bisa diperbaiki kembali. Di Afrika Barat dan Timur, rusak sekitar 72%, di Afrika Tengah dan Amerika Selatan 37%. Di daerah padat penduduknya seperti Asia Selatan, hutan telah rusak sekitar 63 persen dan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina) telah rusak sekitar 38 persen.¹⁶⁰

Bahkan dari data tentang keberadaan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia dan kebanyakan berada di negara Dunia Ketiga, diperkirakan akan musnah dalam kurun waktu kurang dari 200 tahun jika kerusakan tersebut tidak segera ditangani secara serius. Musnahnya hutan tropis ini akan diikuti oleh punahnya sekitar 1,2 juta spesies, atau seperempat dari spesies yang ada di dunia pada tahun 2020. Ini kenyataan yang sungguh sangat mengkhawatirkan. Kepunahan spesies dan hilangnya habitat dalam lingkungan hidup juga akan berakibat pada degradasi tanah, air tidak mengalir dan erosi. Di Phillpina, kemelaratan dan kematian ratusan orang dalam banjir bandang tahun 1991 ada hubungannya dengan kerusakan hutan di daerah tersebut. Di Elsalvador, tiga seperempat penduduknya menderita karena erosi dan kerusakan hutan secara sempurna sudah dekat. Alasan lain yang cukup signifikan bagi pengrusakan hutan adalah tanaman perkebunan (misalnya minyak kelapa sawit), peternakan sapi dalam skala besar, penggalian mineral, konstruksi jalan dan bendungan dan perubahan pertanian skala kecil, dan pengumpulan kayu bakar. Di Amazonia dan Amerika Tengah pendirian peternakan sapi skala besar untuk memenuhi permintaan daging sapi Amerika Utara, memberi sumbangan signifikan bagi kerusakan hutan. Sejak 1965-1983, pendirian 470 peternakan sapi dengan luas rata-rata 23.000 hektar tercatat 30% atas total kerusakan hutan di Amazonia. Pertambangan juga berperan dalam kerusakan hutan. Di Grande Carajas salah satu wilayah di Bazil, proyek pertambangan besi yang mendapat subsidi dana dari World Bank dan Masyarakat Eropa menyebabkan pembabatan hutan 30.000 km persegi untuk peternakan, pertambangan besi, jalan, dan konstruksi kereta api dan pendirian industri berat. Lebih Jauh lagi, tiap tahun sekitar 15.000 km persegi hutan dibabat untuk menghasilkan arang guna peleburan besi gibal rel kereta api baru sepanjang 900 km ke pelabuhan air bagian dalam.¹⁶¹

Kerusakan hutan, meluasnya padang pasir, punahnya binatang dan tumbuh-tumbuhan, erosi, polusi udara, naiknya kandungan CO₂ akibat rumah kaca dan menipisnya lapisan ozon, semua adalah realitas dari dekomposisi ekologi. Penebangan hutan dalam skala besar telah membawa perubahan iklim secara global dan tentu saja akan mengakibatkan menurunnya curah hujan tiap tahun. Kerusakan lingkungan sebagai eksis industrialisasi merupakan permasalahan global. Seperti developmentalisme dan kapitalisme yang sudah menjadi wacana global, masalah kerusakan lingkungan juga sudah tidak lagi mengenal batas wilayah nasional geografik tertentu. Persoalan gawat sehubungan dengan polusi udara dan pencemaran air, pemanasan global, *biodiversity*, penipisan sumber daya alam menuntut penanganan yang mendesak secara global.¹⁶² Lalu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap semua persoalan ini? Kok Peng berkomentar bahwa sistem ekonomi kapitalis dan anteknya-lah yang harus bertanggung jawab. Sebab sistem ekonomi kapitalis telah mendorong manusia memiliki motivasi eksploitasi total sumber daya alam yang ada. Hadirnya kapitalisme dan developmentalisme akhinya menjadikan lingkungan kehilangan kemampuan

¹⁶⁰ Lihat Rudolf H. Strahm, 1999, *Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, diterjemahkan Rudy Bagindo dkk. Jakarta: Pustaka Cidesindo, hlm. 63.

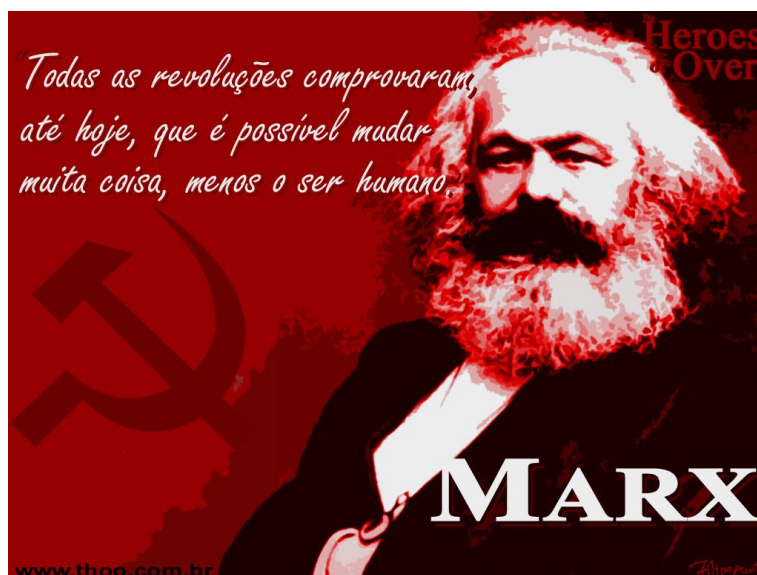
¹⁶¹ Lihat Carley, 1992, *loc.cit.*, hlm. 23.

¹⁶² Untuk keterangan lebih detail, lihat Robert Garner, 1998, *Environmental Politics*, London: University of Leicester, MacMillan Press Ltd., hlm. 15-28.

keseimbangan alami karena eksploitasi besar-besaran.

Lingkungan hidup adalah universal dan karenanya perlu dikelola bersama. Pada satu sisi proses globalisasi seharusnya mampu mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Seyogianya keprihatinan bersama membuat negara manapun tidak bisa melakukan tindak kerusakan tanpa di protes masyarakat dunia. Namun pada sisi lain, karena globalisasi tidak berlangsung setara dan seimbang, keprihatinan ekologis justru dipakai oleh Utara untuk mengendalikan Selatan. Utara selalu menganggap sumber kerusakan lingkungan ada di Selatan, dan Utara yang mempunyai jawabannya. Padahal itu hanyalah akal-akalan negara kapitalis guna menipu negara-negara Dunia Ketiga. Sebuah memo internal yang diterbitkan media *The Economist* pada tanggal 8 Februari 1992, dibuat oleh Ahli Utama Bank Dunia, Lawrence Summers, seolah-olah membuktikan itu semua. Secara Singkat, memo tersebut berbunyi, "Tidakkah sebaiknya Bank Dunia mendorong lebih banyak migrasi industri kotor ke negara-negara kurang berkembang?" ada tiga alasan: pertama, ukuran biaya kerusakan kesehatan akibat pencemaran tergantung pendapatan yang hilang akibat meningkatnya morbiditas dan mortalitas, yang juga terkait tingkat upah. Logika ekonomi di balik dumping limbah beracun ke negara dengan tingkat upah paling rendah tidak terbantahkan; kedua, bahwa negara-negara Afrika belum cukup mendapat pencemaran (*under-polluted*); tingkat pencemaran udaranya mungkin amat rendah "secara tidak efisien" dibandingkan Mexico City dan Los Angeles; ketiga, tuntutan akan lingkungan bersih untuk alasan keindahan dan kesehatan kemungkinan berasal dari masyarakat yang kaya. Masyarakat yang mengalami kematian balita 200 per seribu tidak perlu mendapatkan barang mewah berupa udara bersih."¹⁶³

Pada dasarnya memo tersebut menyatakan memindahkan industri pencemar dan beracun ke Dunia ketiga merupakan langkah ekonomi yang logis. Maka, Bank Dunia diminta mengambil langkah tersebut melalui pengaruhnya dalam pemberian pinjaman pembangunan Dunia Ketiga. Secara sederhana, alasannya adalah: pertama, nyawa orang di Dunia Ketiga bernilai lebih rendah akibat upah yang rendah di bandingkan negara maju; kedua, pencemaran di negara-negara Dunia Ketiga masih di bawah standar, ketiga, lingkungan yang bersih adalah barang mewah yang hanya dicari oleh negara-negara kaya di mana harapan hidup lebih tinggi, jadi memindahkan industri pencemar akan menurunkan biaya di seluruh dunia. Memang negara-negara Utara mempunyai standar ganda dalam hal lingkungan (juga hak asasi manusia). Pada suatu sisi mereka meminta Selatan melestarikan alam demi kebaikan seluruh dunia, tapi pada segi lain mereka melakukan dumping teknologi pencemar dengan dalih alih teknologi dan pembangunan. Shiva menyebut fenomena ini sebagai "apartheid lingkungan." Dan kasus Summers bukan satu-satunya yang terjadi di dunia ini.[]



¹⁶³ John B. Foster, 1993, *Let Them Eat Pollution, The Logist of Free Market*, Third World Resurgence, No.34, Juni.

[illegible]

Globalisasi dapat dianalisa secara kultural, ekonomi, politik, dan atau institusional. Dalam masing-masing kasus, perbedaan kuncinya adalah apakah seseorang melihat meningkatnya homogenitas atau heterogenitas. Pada titik ekstrem, globalisasi *kultur* dapat dilihat sebagai ekspansi transnasional dari kode dan praktik bersama (homogenitas), atau sebagai proses di mana banyak input kultural lokal dan global saling berinteraksi untuk menciptakan semacam perpaduan yang mengarah ke pencangkakan kultur (heterogenitas). Trend menuju homogenitas seringkali diasosiasikan dengan *imperialisme kultural* atau dengan kata lain, bertambahnya pengaruh internasional terhadap kultur tertentu. Dampak perkembangan

manifesto wacana kiri

Hand-Out 48

GLOBALISASI EKONOMI & POLITIK INTERNASIONAL

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.

Pengertian

Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Sebagai fenomena baru, globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Mitos yang hidup selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal atau etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Anggapan atau jalan pikiran di atas tersebut tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang dan tak berguna. John Naisbitt (1988), dalam bukunya yang berjudul *Global Paradox* ini memperlihatkan hal yang justru bersifat paradoks dari fenomena globalisasi. Naisbitt (1988) mengemukakan pokok-pokok pikiran lain yang paradoks, yaitu semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin kesukuan, dan berpikir lokal, bertindak global. Hal ini dimaksudkan kita harus mengkonsentrasikan kepada hal-hal yang bersifat etnis, yang hanya dimiliki oleh kelompok atau masyarakat itu sendiri sebagai modal pengembangan ke dunia Internasional.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama.

Ciri Globalisasi

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antar negara menunjukkan keterkaitan antarmanusia di seluruh dunia. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam pariwisata memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.

Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO). Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Setiap beberapa ratus tahun dalam sejarah manusia, transformasi hebat terjadi. Dalam beberapa dekade saja, masyarakat telah berubah kembali baik dalam pandangan mengenai dunia, nilai-nilai dasar, struktur politik dan sosial, maupun seni. Lima puluh tahun kemudian muncullah sebuah dunia baru.

Teori Globalisasi

Cochrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu: Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut.

Para globalis positif dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi). Para tradisional tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau, jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan perdagangan kapital.

Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisional. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai "seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung". Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau, setidaknya, dapat dikendalikan.

Sejarah Globalisasi

Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu, para pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut untuk berdagang.

Fenomena berkembangnya perusahaan McDonald di seluruh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Cina, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia. Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antarbangsa dunia. berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan

internet. Pada saat itu, berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia.

Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indonesia misalnya, sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini.

Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika perang dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuhan. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antarnegara pun mulai kabur.

Globalisasi Perekonomian

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Menurut Tenri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

1. *Globalisasi produksi*, di mana perusahaan memproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja
2. *Globalisasi pembiayaan*. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari manca negara.
3. *Globalisasi tenaga kerja*. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
4. *Globalisasi jaringan informasi*. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh: KFC, celana jeans Levi's, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.
5. *Globalisasi Perdagangan*. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair.

Thompson mencatat bahwa kaum globalis mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam investasi dan perdagangan internasional. Misalnya, secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia. Globalisasi kebudayaan sub-kebudayaan Punk, adalah contoh sebuah kebudayaan yang berkembang secara global.

Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarinya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world culture) telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini (Lucian W. Pye, 1966). Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.

Ciri Berkembangnya Globalisasi Kebudayaan

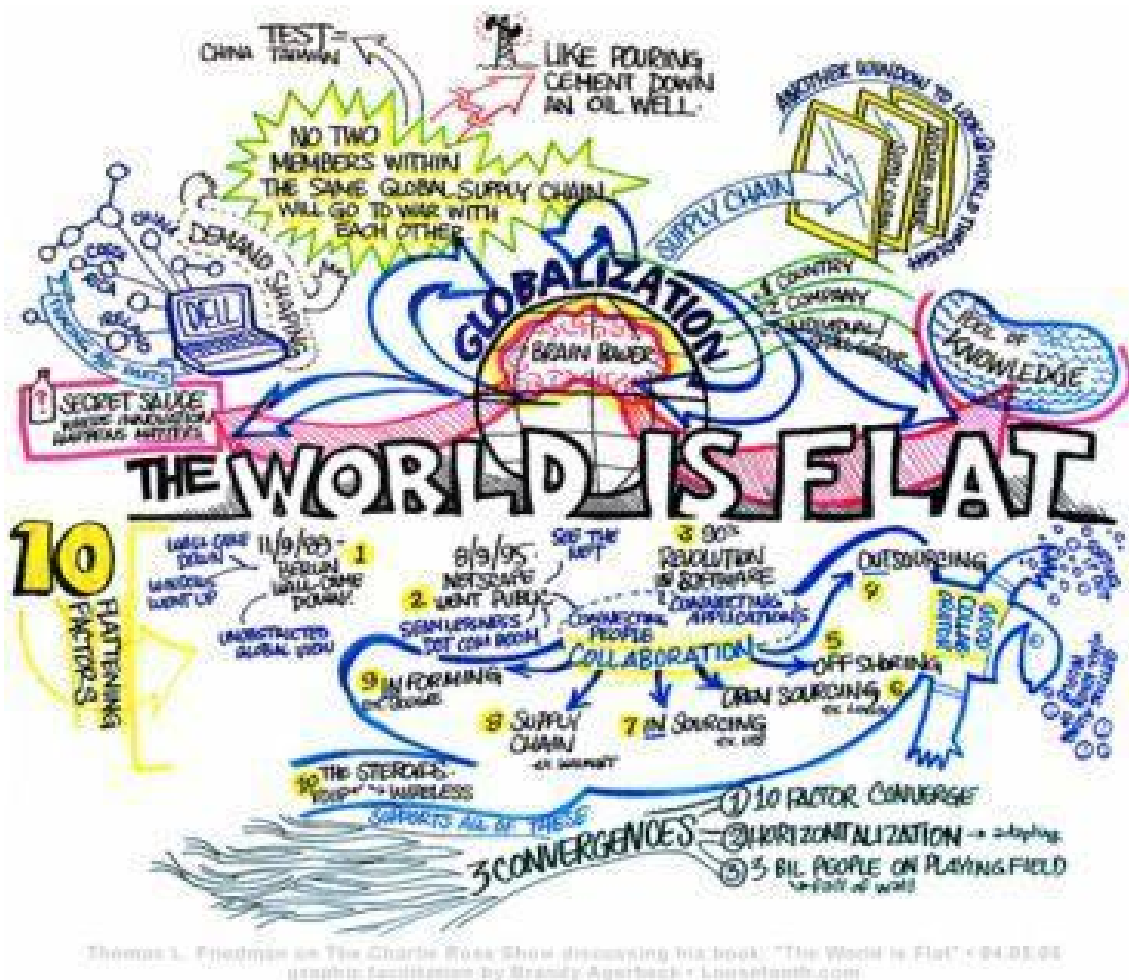
1. Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
2. Penyebaran prinsip multikebudayaan (multiculturalism), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
3. Berkembangnya turisme dan pariwisata.
4. Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
5. Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
6. Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA.

Reaksi Masyarakat: Gerakan Pro-Globalisasi

Pendukung globalisasi (sering juga disebut dengan pro-globalisasi) menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dengan negara lain saling bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lainnya, dan salah satu bentuknya adalah ketergantungan dalam bidang ekonomi. Kedua negara dapat melakukan transaksi pertukaran sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Misalnya, Jepang memiliki keunggulan komparatif pada produk kamera digital (mampu mencetak lebih efisien dan bermutu tinggi) sementara Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada produk kainnya. Dengan teori ini, Jepang dianjurkan untuk menghentikan produksi kainnya dan mengalihkan faktor-faktor produksinya untuk memaksimalkan produksi kamera digital, lalu menutupi kekurangan penawaran kain dengan membelinya dari Indonesia, begitu juga sebaliknya.

Salah satu penghambat utama terjadinya kerjasama diatas adalah adanya larangan-larangan dan kebijakan proteksi dari pemerintah suatu negara. Di satu sisi, kebijakan ini dapat melindungi produksi dalam negeri, namun di sisi lain, hal ini akan meningkatkan biaya produksi barang impor sehingga sulit menembus pasar negara yang dituju. Para pro-globalisme tidak setuju akan adanya proteksi dan larangan tersebut, mereka menginginkan dilakukannya kebijakan perdagangan bebas sehingga harga barang-barang dapat ditekan, akibatnya permintaan akan meningkat. Karena permintaan meningkat, kemakmuran akan meningkat dan begitu seterusnya.

Beberapa kelompok pro-globalisme juga mengkritik Bank Dunia dan IMF, mereka berpendapat bahwa kedua badan tersebut hanya mengontrol dan mengalirkan dana kepada suatu negara, bukan kepada suatu koperasi atau perusahaan. Sebagai hasilnya, banyak pinjaman yang mereka berikan jatuh ke tangan para diktator yang kemudian menyelewengkan dan tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, meninggalkan rakyatnya dalam lilitan hutang negara, dan sebagai akibatnya, tingkat kemakmuran akan menurun. Karena tingkat kemakmuran menurun, akibatnya masyarakat negara itu terpaksa mengurangi tingkat konsumsinya; termasuk konsumsi barang impor, sehingga laju globalisasi akan terhambat dan—menurut mereka—mengurangi tingkat kesejahteraan penduduk dunia. (Gerakan Antiglobalisasi). Antiglobalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Antiglobalisasi” dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional, dunia ketiga, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya. Namun, orang-orang yang dicap “antiglobalisasi” sering menolak istilah itu, dan mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai Gerakan Keadilan Global, Gerakan dari Semua Gerakan atau sejumlah istilah lainnya.[]



THE WORLD IS FLAT: Pendukung globalisasi (sering juga disebut dengan pro-globalisasi) menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif.

Hand-Out 49 GLOBALISASI; TEORI MODERNITAS KONTEMPORER

Prawacana

Tampaknya tak ada yang memperoleh begitu banyak perhatian populer dan akademik sebesar yang didapatkan oleh globalisasi. Dalam kenyataannya, sebagian besar perhatian akademik dimotivasi oleh begitu besarnya ketertarikan dan kecemasan publik terhadap globalisasi. Akan tetapi, ada juga alasan internal dari dunia akademik yang membuatnya terobsesi dengan globalisasi. Teoritis sosial, termasuk para teoritis yang didiskusikan dalam tulisan ini dan di tempat lain dalam tulisan ini, tanpa terkecuali cenderung sama-sama memperhatikan globalisasi. Di sini tidak akan diberikan tinjauan menyeluruh atas karya dari teoritis-teoritis utama dalam topik ini, apalagi tinjauan seluruh literatur tentang globalisasi (lihat Antonio dan Bonanno, 2000) untuk tinjauan yang sangat bagus; lihat juga Lechner dan Boli, 2000). Berikut ini hanya akan disajikan tinjauan ringkas atas karya-karya tersebut dan kemudian meringkaskan diskusi tentang kontribusi dari sejumlah teoritis yang sudah didiskusikan (satu tambahan adalah pemikiran Arjun Appadurai yang sangat berpengaruh).

Sesungguhnya setiap bangsa dan kehidupan miliaran orang di seluruh dunia sedang ditransformasikan, sering kali secara dramatis, oleh globalisasi. Derajat dan signifikansi dari dampaknya ini dapat disaksikan di mana-mana, dan yang paling mencolok adalah di dalam protes-protes yang mengiringi pertemuan tingkat tinggi organisasi global seperti WTO (World Trade Organization) dan IMF (International Monetary Fund). Seperti tersirat dalam begitu besarnya isu yang dihadapi organisasi ini dan luasnya protes yang menentanginya, orang-orang di seluruh dunia merasa bahwa mereka sedang menghadapi persoalan besar.

Teori globalisasi juga muncul sebagai akibat dari serangkaian perkembangan internal teori sosial, khususnya reaksi terhadap perspektif terdahulu seperti teori modernisasi (Tiryakian, 1992). Di antara karakteristik dari teori ini adalah Western-nya: disesuaikan dengan perkembangan di Barat dan bahwa ide di luar dunia Barat tak punya pilihan kecuali menyesuaikan diri dengan ide Barat. Sementara ada banyak versi teori globalisasi yang berbeda-beda, ada kecenderungan terjadi pergeseran dramatis dari fokus ke Barat ke pengkajian proses transnasional yang mengalir ke arah yang berbeda-beda dan pengkajian terhadap negara atau kawasan otonom dan independen lainnya di seluruh dunia (Appadurai, 1996; lihat di bawah).

Globalisasi dapat dianalisa secara kultural, ekonomi, politik, dan atau institusional. Dalam masing-masing kasus, perbedaan kuncinya adalah apakah seseorang melihat meningkatnya homogenitas atau heterogenitas. Pada titik ekstrem, globalisasi *kultur* dapat dilihat sebagai ekspansi transnasional dari kode dan praktik bersama (homogenitas), atau sebagai proses di mana banyak input kultural lokal dan global saling berinteraksi untuk menciptakan semacam perpaduan yang mengarah ke pencangkakan kultur (heterogenitas). Trend menuju homogenitas seringkali diasosiasikan dengan *imperialisme kultural* atau dengan kata lain, bertambahnya pengaruh internasional terhadap kultur tertentu. Ada banyak variasi imperialisme kultural termasuk yang menekankan peran yang dimainkan oleh kultur Amerika (Kuisel, 1993; Ritzer, 1995, 2000), Barat (Giddens, 1990) atau negara-negara pusat. (Hannerz, 1990). Robertson (1992) meskipun dia tak menggunakan istilah imperialisme kultural, menentang ide tersebut melalui konsepnya yang sangat terkenal, *glocalization*, di mana dunia global dilihat berinteraksi dengan dunia lokal untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda—yakni *glocal*. Selain Robertson, orang lain yang menekankan keragaman kultural adalah Garcia Canclini (1995) dan Pie terse (1995). Yang juga dalam kategori umum ini adalah karya-karya dari sarjana seperti Friedman (1994), mendeskripsikan dunia yang dicirikan oleh percampuran kultural (*pastiche cultural*).

Teoritis yang memfokuskan pada faktor-faktor *ekonomi* cenderung menekankan arti penting ekonomi dan efeknya yang bersifat *homogenizing* terhadap dunia. Mereka umumnya melihat globalisasi sebagai penyebab ekonomi pasar ke seluruh kawasan dunia yang berbeda-beda. Misalnya, George Stiglitz (2002), seorang pemenang Nobel Ekonomi dan bekas Dewan Penasehat Ekonomi, mengeluarkan kecaman tajam kepada Bank Dunia, WTO, khususnya IMF karena peran mereka yang bukannya memperbaiki tetapi malah memperburuk krisis ekonomi global.

Di antara kritik itu, Stiglitz (2002: 34) mengecam IMF karena menyamaratakan pendekatan "*one-size-fits-all*" yang tidak mempertimbangkan perbedaan nasional. Meski orang-orang yang memfokuskan pada ekonomi cenderung menekankan homogenitas, namun ada yang mengakui beberapa perbedaan (heterogenitas) di pinggiran ekonomi global. Stiglitz menyatakan perlunya kebijakan yang tidak seragam (*differentiated*) di IMF dan organisasi global lainnya. Bentuk lain dari heterogenitas dalam dunia ekonomi menyangkut, misalnya, komodifikasi kultur lokal dan eksistensi spesialisasi yang fleksibel yang bisa mengaitkan berbagai produk dengan kebutuhan dari beragam spesifikasi lokal. Yang lebih umum, mereka yang menekankan pada heterogenisasi akan mengatakan bahwa interaksi pasar global dengan pasar lokal akan menciptakan pasar glocal yang unik, yang mengintegrasikan tuntutan pasar global dengan realitas pasar lokal.

Orientasi *politik* atau *institusional* juga menekankan entah itu homogenitas atau terogenitas. Contoh-contoh dari mereka yang beroperasi dengan perspektif homogenitas dalam domain ini antara lain Meyer et.al. (1997), yang memfokuskan pada penyebaran model *nation-state* di seluruh dunia, dan munculnya bentuk isomorfis dari tata pemerintahan di seluruh dunia, atau dengan kata lain, tumbuhnya model tata pemerintahan di seluruh dunia yang kurang lebih serupa. Yang lebih luas, Keohane dan Nye (1989) memfokuskan pada pengaruh global dari multiplisitas institusi. Hobsbawm (1997) dan Appadurai (1996) melihat tumbuhan institusi dan organisasi transnasional banyak menghilangkan kuasa negara-bangsa dan struktur sosial lokal lainnya untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang. Hardt dan Negri (2000), dalam buku *Empire*, mendiskusikan kemunculan bentuk global baru kedaulatan imperial yang independen dari setiap bangsa, tetapi mengontrol semua bangsa dan penduduknya. Mereka menempatkan penekanan khusus pada perkembangan sistem institusional supranasional. Salah satu pandangan yang paling ekstrim tentang homogenisasi dalam dunia politik adalah pemikiran Barber (1995) tentang "McWorld", atau berkembangnya orientasi politik tunggal yang semakin pervasif di seluruh dunia.

Yang menarik, Barber juga mengaitikulasikan perspektif alternatif, yakni cita-cita "jihad", kekuatan politik reaksioner, etnis, dan lokal (termasuk "*rogue states*") yang mengintensifkan nasionalisme dan menimbulkan heterogenitas politik yang lebih besar di seluruh dunia. Interaksi McWorld dan jihad di tingkat lokal dapat menghasilkan formasi politik *glocal* yang unik yang mengintegrasikan lemen-elemen dari McWorld (misalnya, penggunaan internet untuk menarik pendukung) dan jihad (misalnya, penggunaan ide-ide dan retorika tradisioal Setelah tinjauan singkat ini, kita beralih ke beberapa ringkasan dari teori globalisasi, semuanya ditawarkan oleh pemikir yang telah dibahas disini, kecuali satu orang (Appadurai).

Perspektif Neo-Marxian Kellner tentang Globalisasi

Kita mendiskusikan versi kontemporer dari teori kritis Douglas Kellner terhadap tekno-kapitalisme. Kellner memfokuskan pada kapitalisme sekarang di mana teknologi memegang peran yang semakin peting. Yang lebih baru, Kellner (2002) mengalihkan perhatiannya kepada globalisasi dari perspektif ini dan, yang lebih umum, beralih ke orientasi neo-Marxian yang kritis. Tidaklah mengejutkan, Kellner (2002:286; cetak miring ditambahkan mengatakan bahwa "kunci untuk memahami globalisasi adalah menentanginya sebagai produk dari *revolusi teknologi* sekaligus restrukturisasi global *kapitalisme*". Akan tetapi, perubahan-perubahan ini saling berkaitan faktor-faktor politik dan sosial. Jadi, kita harus menengok kepada hubungan dialektis antara teknologi, ekonomi, politik, dan kultur. Ini tentu saja menyesuaikan diri bukan hanya dengan kesalinghubungan itu, tetapi juga konflik, kontradiksi, dan ambiguitasnya. Perspektif dialektis juga menjelaskan bahwa ada ciri-ciri progresif dan emansipatoris dari globalisasi dan kita harus mempertimbangkan keduanya. Perbedaan kuncinya, sekali lagi dari dialektis, adalah perbedaan antara globalisasi yang dipaksakan dari globalisasi yang muncul dari bawah. Yang disebut belakangan adalah persaingan dan penyusunan ulang masyarakat di bawah. Demokrasi bawah, dan ia dibenturkan di panggung global dengan kekuatan otoriter dari atas.

Kutipan berikut ini memberikan tinjauan perspektif Kellner tentang pandangan teori sosial kritis:

Globalisasi melibatkan pasar kapitalis dan seperangkat relasi sosial dan komoditas, kapital, teknologi, ide-ide, bentuk-bentuk kultur, dan penduduk melewati batas-batas nasional via jaringan masyarakat global. teknologi dan kapital bekerja sama menciptakan dunia baru

dan saling terhubung. Revolusi teknologi yang menghasilkan komunikasi komputer, transportasi, dan pertukaran merupakan pra (*presupposition*) dari ekonomi global, bersama dengan perluasan dari sistem kapitalis dunia yang menarik lebih banyak area dunia dan ruang perdagangan dan konsumsi ke dalam orbitnya (Kellner, 2002:287).

Meskipun ekonomi kapitalis masih penting untuk memahami globalisasi sainslah (techno-science) yang memberikan infrastrukturnya. Jadi, kuncinya terletak dalam hubungan dialektis antara tekno-sains dengan ekonomi kapitalis, atau tekno-kapitalisme (techno-capitalism). Kellner berusaha untuk menghindari ekstremitas determinisme ekonomi dan teknologi yang dianggap sebagai pemikiran dominan tentang globalisasi. Yang merupakan hal penting bagi Kellner, dan refleksi dari perspektif dialektikanya, adalah pemikirannya tentang internet. Teknologi baru ini dipakai dengan berbagai macam cara untuk mempromosikan globalisasi kapitalis. Akan tetapi, internet juga dipakai untuk memobilisasi orang-orang yang menentang globalisasi. Jadi, Kellner melihat potensi demokrasi utopian di dalam teknologi baru ini, tetapi pada tingkat minimum teknologi baru itu mengubah globalisasi menjadi daerah persaingan.

Giddens tentang “Runaway World” dari Globalisasi

Pandangan Giddens (2000) tentang globalisasi jelas terkait erat dan tumpang tindih (overlap) dengan pemikirannya tentang juggernaut modernitas. Globalisasi ga’ mengandung dampak besar terhadap isu-isu yang merupakan perhatian lama Giddens dan isu-isu yang telah didiskusikan seperti keintiman (intimacy) an aspek lain dari kehidupan sehari-hari. Dan Giddens melihat kaitan erat antara obalisasi dan risiko, khususnya munculnya apa yang dia namakan manufactured. Banyak dari perkembangan ini di luar kontrol, tetapi Giddens (2000:23) tidak luruhnya pesimis: “Kita tak akan pernah mampu menjadi penguasa sejarah kita sendiri, tetapi kita dapat dan harus mencari cara untuk membuat dunia yang tak terkendali ini menjadi terkendali.” Dia menempatkan beberapa harapannya alam demokrasi, khususnya bentuk demokrasi internasional dan transnasional seperti Uni Eropa.

Giddens (2000: 22) adalah salah satu dari orang-orang yang menekankan eran Barat pada umumnya, dan Amerika Serikat pada khususnya, dalam obalisasi: “Globalisasi adalah restrukturisasi cara-cara di kita menjalani hidup, dengan cara yang sangat mendalam. Ia berasal dari barat, membawa jejak. kekuasaan ekonomi dan politik Amerika”. Akan tetapi, dia juga mengakui bahwa globalisasi adalah proses dua arah, dengan Amerika dan Barat sebagai wasan yang paling banyak terkena pengaruhnya. Lebih jauh dia mengatakan, globalisasi menjadi semakin decentred” (Giddens, 2000:34), dengan bangsa-bangsa di luar Barat memainkan peran yang semakin besar di dalamnya. Dia juga mengakui bahwa globalisasi melemahkan kultur lokal sekaligus membangkitkannya kembali. Dia mengatakan bahwa globalisasi “menyelinap di samping”, menghasilkan area baru yang mungkin melintasi bangsa-bangsa. Ia memberikan contoh area di sekitar Barcelona di Spanyol utara yang daerahnya meluas masuk Perancis.

Perbenturan utama yang terjadi di tingkat global dewasa ini adalah fundamentalisme dengan kosmopolitanisme. Pada akhirnya, Giddens (2000: melihat kemunculan “masyarakat kosmopolitan global.” Tetapi, bahkan kekuatan utama yang menentangnya-tradisionalisme-merupakan produk dari glosasi. Lebih jauh, fundamentalisme menggunakan kekuatan-kekuatan glosasi (misalnya, media massa) untuk memperluas tujuan-tujuannya. Fundament dapat mengambil bermacam-macam bentuk-agama, etnis, nasionalis, politik. tetapi apa pun bentuknya, Giddens (2000:68) berpikir “bahwa adalah benar menganggap fundamentalisme sebagai sebuah problem. Fundamentalisme dengan kemungkinan kekerasan, dan fundamentalisme adalah lawan dari nilai kosmopolitan.”

Beck don Politik Globolisasi

Kita bisa mendapatkan esensi dari pemikiran Beck tentang isu ini dengan mendiskusikan pembedaannya antara globalisme, globalitas (globality), globalisasi. Globalisme adalah pandangan bahwa dunia didominasi perekonomian dan kita menyaksikan munculnya hegemoni pasar dunia kapitalisme dan ideologi neoliberal yang menopangnYa. Menurut Beck, ini melibatkan pemikiran linier dan monokausal. Multidimensionalitas dari perkembangan global-teknologi, politik, kultur,

dan masyarakat sipil-direduksi menjadi ekonomi saja. Dan dimensi ekonomi itu dilihat, lagi-lagi secara keliru, baru dalam arah linier menuju pada semakin menguatnya ketergantungan pada pasar dunia. Jelas, Beck melihat dunia dari sudut pandang yang lebih dimensional dan multidireksional. Selain itu, dia sangat sensitif terhadap apa yang diasosiasikan dengan pasar dunia kapitalis, termasuk fakta bahwa segala macam rintangan untuk perdagangan bebas dan bahwa dalam pasar ini bukan hanya ada pemenang, tetapi juga (banyak) pecundang.

Sementara Beck mengkritik globalisme, dia melihat lebih banyak ke dalam ide tentang globalitas, di mana ruang-ruang tertutup, khususnya diasosiasikan dengan bangsa, semakin ilusi (illusory). Ruang-ruang itu m ilusi karena globalisasi atau "proses-proses yang melaluinya negara berdaulat dimasuki dan dilemahkan oleh aktor-aktor transnasional di berbagai macam prospek kekuasaan, orientasi, identitas dan jaringan" (2000:11). Proses transnasional ini bukan hanya ekonomi, tetapi juga melalui ekologi, kultur, politik, dan masyarakat sipil. Proses transnasional terlintasi batas-batas negara, merapuhkannya, jika bukannya malah menjadikannya makin tak relevan: "Globalitas berarti bahwa mulai sekarang tak ada di planet kita yang hanya pada situasi lokal terbatas; semua temuan, kemenangan dan bencana memengaruhi seluruh dunia" (Beck, 2000:11).

Sementara proses-proses transnasional telah lama ada, globalitas adalah proses baru setidaknya karena tiga alasan. Pertama, pengaruhnya atas ruang geografis jauh lebih ekstensif. Kedua, pengaruhnya atas waktu jauh lebih stabil; pengaruhnya terus berlanjut dari waktu ke waktu. Ketiga, ada densitas (density) yang lebih besar untuk "jaringan transnasional, hubungan dan arus pekerjaan jaringan" (Beck, 2000:12). Beck juga mendaftar sejumlah hal lainnya yang mencolok yang berkaitan dengan globalitas ketika membandingkannya dengan manifestasi lain dari transnasionalitas (Beck, 2000:13):

- Kehidupan sehari-hari dan interaksi lintas batas negara semakin terpengaruh.
- Ada persepsi diri tentang transnasionalitas ini dalam bidang-bidang seperti media massa, konsumsi, dan pariwisata (tourism).
- Komuniuas, tenaga kerja, kapital semakin tak bertempat (placeless).
- Bertambahnya kesadaran tentang bahaya ekologi global dan tindakan yang harus diambil untuk menanganinya.
- Meningkatnya persepsi transkultural dalam kehidupan kita.
- Industri-industri kultur global beredar pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
- Peningkatan dalam jumlah dan kekuatan aktor-aktor, institusi, dan kesepakatan transnasional.

Ini membuat Beck memperbaiki pemikirannya yang terdahulu tentang odernitas dan menyatakan bahwa globalitas, bersama dengan ketidak mampuan untuk membalikkannya, diasosiasikan dengan apa yang dia sebut sebagai second odernity. Akan tetapi, yang paling utama, apa-apa yang mendefinisikan odernitas kedua (second modernity) itu adalah menurunnya kekuatan bangsa-bangsa dan batas-batas nasional yang merupakan inti modernitas pertama (first odernity). Seperti dikatakan Beck (2000:20), premis sentral dari modernitas pertama adalah bahwa "kita hidup dan bertindak dalam ruang tertutup (selfclosed) dari negara-negara nasional dan masyarakat nasional masing-masing". Beck mengabaikan ini sebagai sebuah "container theory" tentang masyarakat) di globalitas dan modernitas kedua terutama berarti denationalization dan, Beck memperkirakan berarti pula bangkitnya organisasi transnasional dan mungkin negara transnasional.

Buman tentang Konsekuensi Globalisasi Manusia

Bauman (1998) melihat globalisasi dari segi "perang ruang". Dalam pandangannya, "mobilitas menjadi faktor penstratifikasi yang paling kuat paling diharapkan" di dunia sekarang ini (Bauman, 1998:9). Jadi, pemenang perang ruang ini adalah mereka yang mobile: mampu untuk bergerak secara ke seluruh dunia dan dalam proses untuk menciptakan makna bagi diri mereka sendiri. Mereka dapat mengembang relative bebas di atas ruang, dan ketika mereka harus "mendarat" di suatu tempat, mereka mengisolasi diri mereka dalam ruang yang tertutup dan terjaga di mana mereka aman dari gangguan orang yang kalah dalam peperangan ruang tersebut. Pecundang tidak hanya kekurangan mobilitas, tetapi juga turun dan terkungkung di daerah yang gersang dan bahkan tidak mampu memberi makna. Seperti dikatakan Bauman (1998). "Jika

ekstrateritorialitas baru dari elite merasa seperti mabuk kebebasan, teritori. Selebihnya merasa seperti di dalam rumah, bahkan di dalam penjara merasa terhina melihat kebebasan orang lain untuk bergerak". Akibatnya, tentu menjadi medan perang di mana pecundang dan pemenang perang ruang menghadapi konflik yang tak seimbang.

Pemenang dapat dikatakan "hidup dalam waktu". Yakni, "ruang masalah bagi mereka, karena jarak yang jauh menjadi dekat bagi mereka, sebaliknya, pihak yang kalah "hidup di ruang berat, kenyal, tak tersentuh, yang mengikat waktu, dan menjaganya di luar kontrol penghuninya" (Bau 1998:88). Akan tetapi, adalah penting untuk membedakan di antara orang-orang yang setidaknya punya mobilitas. Turis adalah mereka yang bergerakkan mereka menginginkannya. Mereka tertarik oleh sesuatu, dan merasa tak menolak, dan bergerak ke arah sesuatu itu. Kemudian ada para pengembara (vagabonds), yang bergerak karena merasa lingkungannya tak tertahankan, bersahabat, karena sejumlah alasan. Bauman (1998:93) menempatkan perbedaan ini dalam konteks perhatian utama kita di sini: "Apa yang sekarang diklaim sebagai globalisasi disesuaikan dengan mimpi-mimpi dan keinginan turis. Efek keduanya-efek sampingnya yang tak terelakkan adalah transformasi pada banyak orang menjadi pengembara." Akan tetapi, sebagian besar orang berdiri antara dua titik ekstrem ini dan "merasa tidak pasti di mana mereka berdiri pada saat itu dan bahkan tidak pasti bahwa mereka akan bisa melihat esok hari" (Bauman, 1998:97). Jadi, globalisasi berarti kegelisahan bagi setiap orang.

Bagaimana pun juga, bahkan pemenang dalam globalisasi-turis mempunyai problem tersendiri. Pertama, terdapatnya sejumlah beban yang diasosiasikan dengan ketidakmungkinan untuk memperlambat dan adalah sangat sulit untuk terus bergerak dalam kecepatan tinggi pula. Kedua; mobilitas berarti rangkaian pilihan yang tiada habis dan setiap pilihan memiliki kadar ketidakpastian. Ketiga, setiap pilihan yang ada membawa rangkaian resiko dan bahaya. Mobilitas tiada akhir dan pilihan tiada ujung akan menjadi tumpukan persoalan, kalau tidak tumpukan beban.

Ritzer tentang "Globalization of Nothing"

Selain karyanya tentang McDonaldisasi dan eksportasi global dari alat-alat konsumsi baru, Ritzer (2004) menyatakan bahwa kita menyaksikan globalisasi "nothing" (globalization/ nothing). Perhatikan bahwa dia tidak mengatakan bahwa globalisasi adalah bukan-sesuatu (globalization is nothing); sesungguhnya, jelas bahwa proses itu sangat signifikan. Argumen sesungguhnya adalah, dengan menggunakan istilah yang dipinjam dari Weber, bahwa ada elective affinity antara globalisasi dan "bukan-sesuatu" (nothing). Yakni, sesuatu bukan akibat dari sesuatu yang lain, tetapi cenderung bervariasi bersama-sama. Jadi, globalisasi cenderung menyebarkan nothing ke seluruh dunia. Tentu saja, yang penting di sini adalah makna dari nothing.

Yang dimaksud nothing oleh Ritzer (secara umum) adalah bentuk yang dibayangkan dan dikontrol secara sentral yang (sebagian besar) kosong dari isi yang distingtif. (Sebaliknya, sesuatu [something] didefinisikan sebagai bentuk yang dibayangkan dan dikontrol secara indigenous yang [sebagian besar] kaya dalam isi distingtif.) Jadi, adalah lebih mudah untuk mengeksport bentuk-bentuk kosong ke seluruh dunia ketimbang mengeksport bentuk-bentuk yang penuh dengan isi (sesuatu atau something). Yang disebut belakangan ini lebih besar kemungkinannya untuk ditolak oleh setidaknya beberapa kultur dan masyarakat karena isinya bertentangan dengan isi lokal. Sebaliknya, karena kosong dari isi yang distingtif, bentuk-bentuk kosong lebih kecil kemungkinannya berkonflik dengan isi lokal. Selain itu, bentuk-bentuk kosong mempunyai keuntungan lain dari sudut pandang globalisasi, termasuk fakta bahwa karena mereka sangat minimalis, mereka mudah bereplikasi terus-menerus dan lebih menguntungkan karena produksinya relatif murah. Contoh yang baik dari nothing dalam pengertian tersebut di atas adalah mall perbelanjaan, yang merupakan struktur yang bagian besar kosong yang mudah direplikasi ke seluruh dunia dan dapat diisi dengan berbagai isi spesifik tanpa batas (toko lokal, makanan lokal, dan lain-lain-yakni diisi something) yang dapat berbeda-beda dari satu lokasi dengan lokasi lainnya.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Ini merupakan proses global. Akan tetapi, bertentangan dengan sebagian besar teori globalisasi karena kebanyakan kekuatannya berasal dari Amerika dan Barat. Jadi, pada saat ini, McDonaldisasi lebih tepat dilihat sebagai "Amerikanisasi" atau "Westernisasi." Akan tetapi, di masa depan (dan pada tingkat tertentu sudah terjadi di masa sekarang). McDonaldisasi akan mengalir dari bagian lain belahan bumi menuju Amerika dan Barat. Meski McDonaldisasi

Ada empat subtype nothing, dan semuanya sebagian besar kosong dari distingtif dan sedang mengglobal. Keempat tipe itu adalah non-places (Auge, 1995). atau setting yang sebagian besar kosong dari isi (misalnya, mall yang didiskus di atas); non-things, seperti kartu kredit, di mana tak banyak berbeda dari sa kartu kredit seseorang dengan jutaan kartu kredit orang lain dan cara penggunaannya persis sama; non-people, atau jenis karyawan yang diasosiasikan dengan, misalnya, telemarketer dan yang berinteraksi dengan semua konsumen dengan cara yang hampir sama, mengandalkan pada scripts; dan non-services seperti yang disediakan oleh ATM (pelayanan yang disediakan sama; ikon mengerjakan semuanya untuk mendapatkan pelayanan) yang berbeda dengan seorang karyawan teller bank.

Ada lima hal yang dipakai untuk membedakan nothing dengan something dan lebih khusus lagi, untuk membedakan antara non-places-places, things-non-things, people-non-people, dan services-non-services. Kutub sebelah kiri dari perbedaan berikut ini adalah ujung dari kontinum "sesuatu" (something sedangkan yang sebelah kanan adalah ujung "bukan-sesuatu" (nothing):

1. *Unique-Generic*. Yang unik cenderung menjadi something. Misalnya, Oldenburg telah menulis apa yang dia namakan "great good places" seperti kedai dan kafe 10 Persimil, makanan, pelanggan, dan suasananya berada pada ujung uniqueness dari kontinum ini. Gerai rantai fast-food jelas merupakan contoh dari ujung generic.
2. *Local-Ties-Lack of Local Ties*. Ikatan kepadakomunitas lokal cenderung diasosiasikan dengan something, sedangkan kurangnya ikatan semacam itu cenderung diasosiasikan dengan nothing. Misalnya, department store GUM yang terkenal (mall indoor arcade ketinggalan zaman [Benjamin, 1999]), sampai ambuknya komunisme di Soviet, penuh dengan barang dan toko lokal; ia mempunyai ikatan lokal yang menda Sekarang GUM merupakan jaringan toko internasional tanpa ikatan lokal komposisinya sama seperti mall-mall lain di seluruh dunia.¹⁶⁵
3. *Temporally Specific-Time-less*. Seperti halnya yang terikat dengan ruang, hal-hal terikat dengan periode waktu tertentu cenderung menjadi something, sedangkan tidak terikat dengan waktu tertentu cenderung menjadi nothing. Colonial Williams terikat dengan periode waktu tertentu dan karena itu adalah something meski kenyataan ia pada dasarnya adalah tempat hiburan bertema (theme park). Sebaliknya Disney World adalah self-comsciously time-less karena ia mencoba merepresent.
4. *Humanized-Dehumanized*. Hal yang banyak memuat hubungan antarmanusia cenderung menjadi something, sedangkan yang kurang hubungan manusia itu (dehumanized) cenderung menjadi nothing. Jadi, pinjaman personal yang dinegosiasikan antara pihak bank dan konsumennya, dan pinjaman kartu kredit yang sepenuhnya impersonal yang disetujui oleh program komputer, masing-masing merupakan contoh yang sangat bagus dari dua ekstrem dari kontinum ini.
5. *Enchanted-Disenchanted*. Kontinum akhir ini cenderung mengumpulkan semua yang sudah ada. Yang merupakan something cenderung mempunyai kualitas magis dan memikat, sedangkan yang nothing lebih mungkin bersifat tak memikat, kurang misterius atau magis. Jadi, makanan yang diberikan kepada kita dari Domino dan dalam paket yang dapat dimasak dalam microwave untuk makan malam tampaknya kecil kemungkinannya untuk membuat kita terpesona dengan makanan itu. Di lain pihak, makanan yang dibuat sendiri oleh ahlinya mungkin akan lebih menarik. Melihat bagaimana berbagai campuran bumbu dan makanan diubah menjadi hidangan tampaknya bersifat magis. Novel dan *Like Water for Chocolate* memberikan contoh yang baik dari daya tarik yang diasosiasikan dengan penyajian makanan dan konsumsi makanan buatan tangan yang memikat. (Film *Chocolate* itu juga menampilkan permen buatan tangan yang juga mengandung kualitas yang memikat).

Jadi, argumen dasarnya adalah bahwa globalisasi membawa penyebaran nothingness ke seluruh dunia. Secara lebih spesifik, kita menyaksikan proliferasi global menuju nothing, yang

dapat diasosiasikan dengan imperialisme kultural, diakui bahwa ada banyak kekuatan lain yang bekerja secara global yang menghasilkan campuran kompleks dari homogenitas dan heterogenitas (Watson, 1997).

¹⁶⁵ Di luar itu, di Moscow sekarang semakin banyak mall bergaya Amerika (Baker, 2002). Berbagai perbedaan waktu (riil dan imajiner) atau bahkan tanpa periode waktu sama sekali.

dicirikan oleh konsepsi dan kontrol terpusat, kurangnya isi yang distingtif, generik, kurangnya ikatan lokal, time-lessness, dehumanisasi, dan kekecewaan (disenchantment). Tentu saja, hal-hal yang cenderung menjadi something juga diglobalkan (globalized), tetapi pada tingkat yang lebih rendah dan dampaknya tidak begitu besar pada dunia. Lebih jauh, sementara barang-barang yang mahal bisa menjadi nothing (satu juta tas Cucci dalam pengertian ini tak banyak bedanya dengan satu juta Big Mac), yang murah jauh lebih mungkin menjadi nothing, atau dijadikan murah (karena ekonomi skala) dan dijadikan nothing setelah ditransformasi menjadi komoditas yang diproduksi jutaan atau miliaran kali dan dijual ke seluruh dunia. Jadi, meski internet dan berbagai bentuk sarana telekomunikasi memungkinkan untuk menjual karya seni besar ke seluruh dunia, namun dampak dari penjualan karya seni besar itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan distribusi global karya seni Disney.

“Landscape” Appadurai

Salah satu buku paling terkenal dan paling sering dikutip di bidang ini adalah *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization* (1996) karya Arjun Appadurai. Yang paling sering dibahas adalah diskusi Appadurai tentang arus-arus global dan keterputusan di antara arus-arus tersebut. Ada lima arus global *ethnoscapes*, *mediascapes*, *technoscapes*, *financescapes*, dan *ideoscapes*. Pengguna sufiksnya *-scape*, membuat Appadurai bisa mengomunikasikan ide bahwa proses ini berbentuk cair, tak teratur (irregular), dan variabel.

Yang lebih penting arus-arus itu tidak secara objektif bukan relasi yang tampak sarna dari setiap sudut pandang visi, tetapi mereka dikonstruksi secara perspektival, diakibatkan oleh keadaan politis, linguistik, dan historis dari beraneka aktor: negara-bangsa, multinasional, komunitas diasporik, serta kelompok dan gerakan subnasional dan bahkan kelompok yang berhadap-hadapan secara dekat aktor individual adalah lokus terakhir dari serangkaian lanskap (landscape) perspektival ini, karena lanskap-lanskap ini pada akhirnya dikemudikan oleh agen-agen yang mengalami sekaligus menyusun formasi yang lebih besar, terlepas dari pemahaman mereka tentang apa-apa yang diberikan oleh lanskap tersebut (Appadurai, 1996:33). Appadurai (1996:33) melihat lanskap ini sebagai basis dari apa yang dinamakan *imagined worlds*, atau “berbagai macam dunia yang terdiri dari orang-orang dan kelompok-kelompok di seluruh dunia yang diletakkan set historis. Karena banyak orang di berbagai tempat di dunia ini tinggal di imagi world, mereka memiliki kapasitas untuk menumbangkan dunia semacam itu.

Ada lima lanskap dalam inti pemikiran Appadurai:

1. *Ethnoscapes*. Ini adalah kelompok atau aktor yang mobile (turis, pengungsi, pe tamu) yang memainkan peran penting dalam pergeseran-pergeseran di dunia di kita tinggal. Ini melibatkan gerakan aktual dan fantasi-fantasi tentang pergerakan jauh, dalam dunia yang terus berubah orang-orang tidak dapat membiarkan mereka diam terlalu lama dan karena itu harus menjaga fantasi-fantasi itu agar hidup.
2. *Technoscapes*. Yang dimaksud Appadurai (1996:34) adalah konfigurasi global “teknologi dan fakta bahwa teknologi, baik teknologi tinggi maupun rendah, baik mekanistik maupun informasional, kini bergerak dengan kecepatan tinggi melalui berbagai jenis batasan yang dulu ada.
3. *Financescapes*. Ini melibatkan proses yang dengannya “pasar, bursa saham nasional, spekulasi komoditas menggerakkan megamonies melalui batas-batas nasional dengan kecepatan tinggi” (Appadurai, 1996:34-35).
4. *Mediascapes*. Yang terlibat di sini adalah ‘distribusi kapabilitas elektronik untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi (koran, majalah, televisi, studio pembuatan film), yang sekarang tersedia untuk kepentingan publik dan swasta yang semakin banyak dan imaji dunia-dunia yang diciptakan oleh media ini (Appadurai, 1996:35).
5. *Ideoscapes*. Seperti mediascapes, ideoscapes adalah serangkaian imaji tetapi bersifat politis dan berhubungan langsung dengan ideologi negara dan kontra-ideologi dari gerakan-gerakan yang secara eksplisit berorientasi untuk merebut kekuasaan negara atau sebagian dari kekuasaan itu (Appadurai 1996:36).[]

Hand-Out 50

GLOBALISASI, SEJARAH EKONOMI INTERNASIONAL DAN KRIRIS MASYARAKAT KAPITALISME

Globalisasi Ekonomi Internasional

Globalisasi kegiatan ekonomi dan persoalan pengelolaannya sering dianggap baru muncul setelah Perang Dunia II, khususnya pada tahun 1960-an. Masa sesudah tahun 1960-an adalah masa munculnya perusahaan multinasional (MNC) dan berkembangnya perdagangan internasional. Kemudian, setelah sistem nilai tukar setengah-tetap Bretton Woods ditinggalkan pada tahun 1971-1973, investasi dalam bentuk surat-surat berharga internasional dan pemberian kredit oleh bank mulai berkembang dengan cepat, seiring dengan meluasnya pasar modal ke seluruh dunia, yang menambah rumit hubungan ekonomi internasional dan membuka jalan bagi globalisasi ekonomi dunia yang terintegrasi dan saling tergantung.

Sejarah meluasnya kegiatan perusahaan ke seluruh dunia adalah sejarah yang teramat panjang, dan bukannya baru dimulai pada tahun 1960. kegiatan dagang, misalnya, telah ada sejak zaman peradaban kuno, tetapi pada Abad Pertengahan, barulah di Eropa, muncul kegiatan dagang yang teratur lintas Negara, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sifatnya korporasi swasta, meski seringkali mendapat dukungan dan bantuan yang besar dari pemerintahannya. Pada abad ke-14, para pedagang petualang memperdagangkan wol dan tekstil yang dihasilkan Inggris ke Belanda, Belgia, Luxemburg, dan Negara-negara lain. Selain itu, di Italia, perusahaan-perusahaan dagang dan bank-bank memainkan peran penting dalam kegiatan perdagangan ke seluruh dunia pada masa-masa awal Renaissance. Pada akhir abad ke-14, di Italia, ada sekitar 150 bank yang sudah melakukan kegiatan di berbagai Negara (Duning, 1993, hlm. 97-98). Dalam abad ke-17 dan ke-18 dukungan oleh Negara meluas dengan berdirinya perusahaan-perusahaan dagang besar kolonial, seperti Dutch East India Company, British East India Company, Muscovy Company, Royal Africa Company dan Hudson Bay Company. Semua perusahaan ini memelopori perdagangan berskala besar di wilayah yang kelak menjadi wilayah jajahan yang penting.

Tetapi, penyebaran industri ke seluruh dunialah, sebagai akibat dari revolusi industri, yang paling dekat dengan perusahaan multinasional di zaman modern. Di sini peranan perusahaan Inggris sebagai perusahaan multinasional pertama penghasil barang pabrik tampak jelas. Mula-mula Amerika Utara dan Amerika Selatan membuka peluang untuk penanaman modal yang paling menguntungkan, disusul kemudian oleh Afrika & Australia. Muncul perdebatan apakah "investasi kolonial" dapat dianggap pendahulu penanaman modal asing, tetapi yang pasti produksi untuk pasar lokal mulai dengan cara ini. Perkembangan teknik & organisasi setelah tahun 1870-an memungkinkan berbagai jenis barang yang sama dapat dihasilkan di dalam & di luar negeri oleh perusahaan yang sama, eksplorasi & pengelolaan bahan tambang & bahan baku lainnya juga menarik penanaman modal asing dalam jumlah besar (Dunning, 1993, Bab 5).

Namun, salah satu masalah dengan klasifikasi yang berlaku surut seperti itu adalah konsep model "penanaman modal asing" di satu pihak (ada pengendalian dari luar) dan investasi "potofolio" di pihak lain (jual beli surat berharga yang diterbitkan lembaga luar negeri untuk mendapat keuntungan tanpa ikut serta mengendalikan atau mengelola) baru pada tahun 1960-an muncul, bersamaan dengan munculnya istilah MNC (*multinational corporation*). Meski tidak ada klasifikasi data yang konsisten, pada umumnya disepakati, MNC sudah ada dalam ekonomi dunia setelah pertengahan abad ke-19 dan berdiri kokoh tidak lama sebelum Perang Dunia I. kegiatan bisnis internasional tumbuh pesat pada tahun 1920-an ketika perusahaan multinasional yang benar-benar terdiversifikasi dan terintegrasi kokoh, tetapi kemudian menurun selama masa depresi tahun 1930-an, hancur lebur karena perang pada tahun 1940-an, dan bangkit kembali setelah tahun 1950.¹⁶⁶

Sejarah bangsa-bangsa adalah sejarah perang berbasis kepentingan ekonomi. Perang meliputi perang senjata, perang ekonomi, dan perang budaya. Perang senjata adalah perangnya antar Negara penjajah dalam memperebutkan daerah jajahan yang kaya sumberdaya alam. Perang yang demikian adalah perwujudan dari kerakusan sistem kapitalisme-kolonialisme dalam akumulasi modal melalui peperangan, akibatnya adalah Negara-negara terjajah bangkit rasa nasionalismenya

¹⁶⁶ Paul Hirst & Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah Mitos*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001. Hlm. 31-34.

melawan penjajah dan melahirkan Negara-negara merdeka, yang lazim disebut Negara Sedang Berkembang (NSB).¹⁶⁷

Kapitalisme sebagai suatu sistem dunia bermula pada akhir abad 15 dan awal abad 16 ketika orang-orang Eropa yang menguasai pengetahuan pelayaran jarak jauh, menghambur keluar dari sudut kecil dunia mereka dan mengarungi tujuh lautan, untuk melanklukan, merampas dan berniaga. Sejak itu kapitalisme terdiri dari dua bagian yang berbeda tajam: di satu pihak ada sejumlah kecil Negara-negara dominan yang memeras, dan di pihak lain, dengan jauh lebih besar Negara-negara yang dikuasai dan diperas. Keduanya terjalin secara tak terpisahkan dan tidak ada kejadian dalam kedua Negara itu yang dapat dimengerti jika dilihat terpisah dari sistem itu yang menjadi sebuah keharusan. Penting untuk menekankan bahwa hal itu benar, baik untuk "*kapitalisme modern*", dalam arti sistem kapitalisme masa kini, maupun ketika ia masih merupakan kapitalisme merkantilis dari masa sebelum revolusi industri.¹⁶⁸

Seperti sejarah yang mengalir mengikuti perubahan zaman, pola eksploitasi kapitalisme internasional pun mengalami perubahan wujud eksploitasinya. Pada awal abad ke-16 di Inggris terjadi revolusi industri yang memacu laju perkembangan kapitalisme awal. Proses ini didorong lagi oleh munculnya revolusi Prancis pada tahun 1789, yaitu revolusi yang mengakhiri hegemoni kaum feodal di Eropa Barat dan mendorong matangnya kekuasaan kaum borjuis. Di tangan para borjuis Eropalah kapitalisme mulai menanamkan kuku eksploitasinya sampai ujung dunia.¹⁶⁹

Ketika di Eropa Barat terjadi over-produksi akibat maraknya industrialisasi, maka yang kemudian harus dilakukan oleh Negara-negara Eropa adalah ekspansi ke daerah-daerah terbelakang seperti Asia, Afrika, Pasifik dan Amerika. Maka lahirlah pembagian kekuasaan atas wilayah-wilayah tersebut untuk memasarkan hasil industri dari Eropa dan juga untuk mengambil bahan-bahan mentah bagi kepentingan industrialisasi di Eropa. Daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang ketika itu belum mengalami proses perubahan sejarah masyarakat seperti Eropa Barat zaman itu. Karena perubahan kepentingan pula, maka dua Perang Dunia dihasilkan oleh kepentingan kapitalisme internasional, Perang Dunia Pertama pada tahun 1918-1939 dan kemudian Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-1945 adalah sejarah nyata di mana kapitalisme Vs kapitalisme berperang untuk menanamkan pengaruhnya terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Jadi perang yang dilakukan antara Blok Sekutu dan Blok Fasis adalah perang antara dua kapitalis yang ingin melebarkan sayap eksploitasinya terhadap Negara-negara dunia ketiga.

James Petras mengatakan bahwa globalisasi telah dimulai pada abad 15, yaitu sejak mulai berkembangnya kapitalisme yang ditandai dengan ekspansi, penaklukan dan penghisapan Negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan bahkan Amerika Utara dan Australia oleh kekaisaran global pada waktu itu, Spanyol dan Portugis. Karena itulah globalisasi selalu diasosiasikan dengan imperialisme, yaitu hubungan global yang didasarkan pada akumulasi untuk Eropa, penghisapan dunia ketiga untuk akumulasi dunia pertama.¹⁷⁰ Menurut Pieterse, globalisasi dimulai sejak 1950-an. Menurut Marx dimulai 1500-an dengan tema kapitalisme modern. Wallerstein mencatat mulai 1500-an dengan tema sistem dunia baru. Robertson menilai globalisasi mulai 1870-1920-an dengan tema multidimensional, Giddens tahun 1800-an dengan tema modernitas, dan Tomilson tahun 1960-an dengan tema planetarisasi budaya.¹⁷¹

Sementara Scholte, menyatakan bahwa globalisasi berlangsung sejak tahun 1960-an, hal ini telah membantu memperluas jangkauan dalam tiga komodifikasi dalam tiga wilayah. *Pertama*, konsumerisme yang terhubung dengan produk-produk global yang diperluas oleh kapitalisme industri. *Kedua*, pertumbuhan lembaga-lembaga yang beroperasi dalam lingkup global (*supra territorial*) seperti *global banking* dan *global securities* sehingga memperluas jangkauan modal uang. *Ketiga*, globalisasi telah mendorong perluasan komodifikasi dalam wilayah baru yang melibatkan

¹⁶⁷ Liaht Darsono P, dalam Globalisasi Suatu Strategi Penjajahan Bentuk Baru, <http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2006-november/000189.htm>.

¹⁶⁸ Paul M Sweezy, "Kapitalisme Modern", dalam *Kapitalisme: Dulu dan Sekarang: Kumpulan Karangan dari berbagai sumber asing*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 5

¹⁶⁹ Lihat www.westpapua.net/doc/paper/paper6/capitalism.htm

¹⁷⁰ Lihat, Links, International Journal of Socialist Renewal, No. 7 tahun 1996, hlm. 59

¹⁷¹ Jan Nederveen Pieterse, "*Globalization as Hybridization*", individu Mike Featherstone et all. Edt, *Global Modernities*, Sage Publications, London, 1995, hlm. 47

informasi dan komunikasi sebagai akibatnya, item-item *software* komputer dan telepon panggil telah menjadi objek akumulasi.¹⁷² Sebenarnya sejak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) berdiri pada tahun 1944 serta GATT (sekarang WTO) pada tahun 1947, praktis dunia sudah memasuki globalisasi ekonomi, karena masalah pembangunan menjadi tanggung jawab internasional. Bank Dunia mengucurkan dana pinjaman berbunga rendah bagi proyek-proyek pembangunan di berbagai Negara untuk memajukan ekonominya, sedangkan IMF memberikan pinjaman bagi Negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran luar negeri dan GATT berfungsi untuk mengatur perdagangan global.¹⁷³

Pada fase pasca PD II, strategi ekonomi politik yang dilancarkan oleh AS dan para sekutunya adalah strategi *Developmentalisme*¹⁷⁴ (pembangunanisme), untuk mengamankan investasi modalnya, kapitalisme internasional memberikan dukungan bagi orang-orang kuat di sejumlah negara dunia ketiga yang berasal dari jajaran militernya. Di Amerika Latin kita jumpai sejumlah regime yang dipimpin oleh militer (otoriter), di Asia Tenggara dan Selatan juga dijumpai regime otoriter yang kebanyakan dipimpin oleh militer. Militer pada zaman ini adalah anak emas yang dibesarkan oleh kapitalisme dengan tujuan mengamankan investasi modal. Pada fase ini (1960-1970-an)¹⁷⁵ dekolonisasi ditawarkan pada sejumlah Negara-negara jajahan Eropa Barat dan Amerika Serikat di Asia, Afrika dan Pasifik serta sebagian Negara-negara Amerika Latin.¹⁷⁶

Setelah perang dingin berakhir, komunis runtuh, Uni Sovyet pudar dan blok komunisme hancur, secara riil AS menghadapi musuh barunya: Negara-negara Eropa. Kelompok politik dan ekonomi ini telah menjadi musuh baru AS, sebab di satu sisi mereka memang mempunyai kemampuan untuk menyaingi AS dalam perdagangan dunia. Di sisi lain, Negara-negara Eropa itu telah mulai bergerak untuk menggabungkan Negara-negara Eropa Timur ke dalam Uni Eropa setelah Negara-negara itu berpindah dari sosialisme ke sistem kapitalisme. Pergeseran dan perubahan konstelasi politik internasional itu telah mendorong AS untuk mengumumkan kelahiran Tata Dunia Baru. Prinsip utama Tata Dunia Baru di bidang ekonomi, tak lain adalah perdagangan bebas dan pasar bebas. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terbukanya pasar dunia bagi perdagangan dan pendapatan AS. Untuk mewujudkan strategi ekonominya ini, AS berupaya memperlemah dan memperlambat gerak pasar bersama Eropa dengan membentuk blok-blok perdagangan baru, menghidupkan kesepakatan-kesepakatan lama dan mengaktifkan kembali, mendirikan NAFTA yang beranggotakan Kanada, AS, dan Meksiko dan juga, membentuk APEC.

Pada bulan November 1992, atas undangan Presiden Clinton, telah diadakan pertemuan puncak untuk membentuk organisasi kerjasama ekonomi bagi Negara-negara Asia Pasifik itu (APEC). Pendirian organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas, membuka pasar-pasar, dan menekan bea masuk. Pendiriannya tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan ekonomi dan mata uang sebagaimana pasar bersama Eropa. Pendirian APEC justru untuk tetap mengamankan pasar Asia Pasifik bagi AS dari persaingannya dengan pasar bersama Eropa.¹⁷⁷

AS melihat bahwa Uni Eropa merupakan saingan kuat untuk menantang dan menyaingi AS di bidang ekonomi. Alasan-alasan AS itu adalah: *Pertama*, kesatuan Eropa secara politik dan ekonomi. *Kedua*, Eropa memiliki kemampuan bersaing di bidang perdagangan, sebab Eropa mempunyai kemampuan tinggi dalam produksi barang dan jasa. *Ketiga*, setelah berakhirnya perang dingin dan hancurnya Uni Sovyet, lenyaplah momok komunisme yang sebelumnya digunakan AS untuk mengancam Eropa. Eropa seluruhnya lalu berkonsentrasi dan bersiap-siap dengan serius

¹⁷² Budi Winarno, "Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi", dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Edisi 1, Februari 2004, hlm. 7

¹⁷³ Lihat <http://www.theindonesianinstitute.org/gglob02.htm>.

¹⁷⁴ Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi pembangunanisme. *Developmentalisme* adalah sebuah istilah ekonomi-politik. Sebuah konsep atau kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang dicetuskan pada masa Presiden Harry S Truman pada tahun 1949 untuk menjawab berbagai permasalahan kemiskinan atau keterbelakangan (*Underdevelopment*) yang terjadi di Negara-negara dunia ketiga, sekaligus sebagai alat ideologi untuk membendung sosialisme.

¹⁷⁵ Fase di mana dekolonisasi ditawarkan bagi dunia ketiga dan terjadi proses eksploitasi kapitalisme dari yang bersifat kolonialistik kepada fase yang bersifat lunak

¹⁷⁶ Lihat www.westpapua.net/doc/paper/paper6/capitalism.htm

¹⁷⁷ <http://www.al-islam.or.id/tampil.php?halaman=buletin&id=24>

untuk terjun ke dalam kancah ekonomi internasional. Diantara persiapan Eropa nampak dari fakta bahwa seluruh Eropa yang merupakan Negara-negara industri yang produktif telah menghilangkan hambatan bea masuk di antara mereka, membuka tapal batas Negara masing-masing untuk memudahkan pemindahan tenaga kerja, dan berusaha mewujudkan kesatuan mata uang.¹⁷⁸ Hal ini kemudian mendorong Eropa untuk memasuki pasar-pasar di Asia dan Afrika, di samping faktor utama bahwa Eropa memang mempunyai kapabilitas untuk bersaing dalam pasar bebas. Di samping itu AS terdorong pula untuk memperkuat pasarnya di Asia dan Eropa dengan membentuk kelompok-kelompok ekonomi seperti APEC. Dan AS pun dalam hal ini telah sukses pula menunggangi WTO (*World Trade Organization*) untuk semakin melicinkan jalannya menguasai ekonomi dunia.

APEC mulai muncul ke permukaan sejak tahun 1989 atas prakarsa Australia. APEC menghimpun 17 negara yang berasal dari tiga benua; AS, Canada, Mexico, Australia, Selandia Baru, RRC, Jepang, Hongkong, Papua Nugini, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, Philipina, Korea Selatan, dan Thailand. Organisasi ekonomi internasional ini menggabungkan keanggotaan dua kelompok ekonomi besar, yaitu NAFTA yang beranggotakan Negara-negara Amerika Utara, dan ASEAN yang beranggotakan Negara-negara Asia Tenggara.

Negara-negara anggota APEC menguasai 40 % dari keseluruhan volume perdagangan dunia, sekaligus merupakan pasar yang jumlah konsumennya mencapai lebih dari 1 milyar jiwa. Dari seluruh penjelasan tersebut, nampak bahwa AS telah berhasil mencapai target-targetnya untuk merealisasikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan ekonominya. AS nampak terus mengembangkan dan membangunnya hingga stabil dan mantap, bahkan menjadikan prinsip-prinsipnya itu sebagai realitas global yang tidak bisa dihindari lagi. Akan tetapi, terwujud dan terbukanya pasar bebas secara internasional itu, niscaya akan menambah semangat untuk bersaing secara internasional pula. Di samping itu, produksi melimpah dari banyak Negara dan blok ekonomi akan terus melestarikan sikap saling bersaing, mendominasi, dan menguasai, yang didukung oleh kekuatan militer dan perluasan pengaruh untuk melindungi penimbunan-penimbunan produk yang melimpah.¹⁷⁹

Dalam analisis Friedman, dunia saat ini adalah dalam era globalisasi kedua, yang dimulai sejak tahun 1989 setelah AS, Inggris dkk, memenangkan perang dingin. Jadi setelah era perang dingin itulah tonggak globalisasi dengan tahapan yang lebih massif. Globalisasi kedua hakikatnya adalah suatu proses dunia menjadi satu atap di bawah hegemoni dan dominasi pemenang perang dingin. Negara-negara dunia ketiga atau Negara-negara sedang berkembang mau tidak mau harus menerima kenyataan yang demikian, yaitu menjadi bawahan AS dkk. Thomas L Friedman menyatakan bahwa globalisasi diberi makna modernitas (*the lexis*) di mana masyarakat harus berpersepsi fungsional melalui solidaritas organik¹⁸⁰ yaitu menempatkan manusia (bangsa) sebagai fungsi manusia lain (bangsa lain) untuk mencapai tujuannya. Lawan dari *the lexis* (modernisasi) adalah *the olive tree* yaitu masyarakat yang berpersepsi mistis, di mana mereka merasa menikmati hidup dalam kungkungan tradisi. *The lexis* adalah symbol dari Negara-negara maju (Canada, AS, Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris) dan *the olive tree* adalah symbol dari negara-negara sosialis dan Negara-negara sedang berkembang. *The olive tree* harus menyesuaikan diri dengan *the lexis*, jika mereka ingin tetap eksis.¹⁸¹

Globalisasi kedua ini ditandai oleh lahirnya revolusi teknologi, revolusi telekomunikasi, dan revolusi informasi. Ketiga revolusi itu mengakibatkan biaya produksi kapitalis rendah dan kapital bisa menjelajah dunia tanpa kendala sehingga kapital dan komoditi Negara-negara maju (*the lexis*) dapat menguasai dunia. Bagi dunia kedua (blok sosialis) dan dunia ketiga harus menerima kenyataan ini. Anthony Giddens, bahkan mengatakan jika globalisasi yang ditopang oleh revolusi teknologi komunikasi tersebut tidak hanya baru, melainkan revolusioner.¹⁸²

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ *Ibid*

¹⁸⁰ Istilah yang digunakan Talcot Person.

¹⁸¹ Thomas L Friedman, *The Lexus and The Olive Tree*, Harper Collins Publisher, London, 2000, hlm. 31

¹⁸² Anthony Giddens, *Run Way World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 5

Akhirnya, globalisasi adalah bentuk baru hegemoni ekonomi, legitimasi baru terhadap pasar, kompetisi dan profit. Setelah dekolonisasi dan runtuhnya blok sosialis, globalisasi menjadi bentuk baru hegemoni atas nama pasar bebas, revolusi informasi, dunia sebagai satu dunia dan lain sebagainya. Akhir sejarah juga merupakan legitimasi baru kapitalisme setelah runtuhnya komunisme, seolah-olah sejarah berhenti dan waktunya habis. Revolusi informasi merupakan dalih baru untuk menyatukan dunia atas nama teknologi komunikasi baru, dunia sebagai satu desa dan hukum pasar.¹⁸³

Teori Sistem Dunia

Teori yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein, merupakan reaksi atas teori ketergantungan yang dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Dalam perspektif sistem dunia, setiap Negara atau kawasan dilihat sebagai entitas yang tak terpisahkan dari sistem dunia seperti sistem ekonomi global. Berdasarkan pandangan ini, fenomena mobilitas antar Negara merupakan dampak dari proses perkembangan ekonomi kapitalis di berbagai Negara. Semenjak kapitalisme tumbuh dan berkembang ke luar dari Negara intinya di Eropa, Amerika Utara, Oceania dan Jepang, belahan bumi ini seolah-olah terus membesar tanpa batas yang jelas dan akhirnya melahirkan suatu masyarakat yang global.¹⁸⁴

Immanuel Wallerstein mendefinisikan sistem dunia sebagai *"A Unit With A Single Division of Labour And Multiple Cultural System"*.¹⁸⁵ Ini merupakan sistem yang lahir dari proses transformasi struktural yang pernah ada dalam sejarah. Dalam bahasa Wallerstein, sistem ini merupakan sistem yang menyejarah (*Historical System*): suatu sistem yang dengan isinya lahir, berkembang dan mati serta timbul kembali sebagai akibat adanya semacam proses pembagian kerja terus-menerus dan lebih canggih. Dalam perkembangan itulah Wallerstein menyebut adanya 3 sistem yang menyejarah: Sistem Mini (*The Mini System*), Sistem Kekaisaran Dunia (*The World Empires*) dan Sistem Ekonomi Dunia (*The World Economic System*).

Farchan Bulkin menyebutkan empat hal mengapa pendekatan sistem dunia penting dalam memahami dunia ketiga. *Pertama*, sebagai usaha untuk meletakkan perkembangan politik dan ekonomi dunia ketiga ke dalam pergolakan ekonomi dan politik, serta dinamika dan potensi untuk perubahan dan transformasinya. Hal ini menjadi penting mengingat hampir sebagian besar Negara dunia ketiga telah terintegrasi ke dalam pergolakan dan ekonomi dunia. *Kedua*, watak dan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Negara dunia ketiga juga bisa diuraikan logikanya dan diurut pertumbuhannya dalam kaitannya dengan interaksinya dengan perekonomian dunia. *Ketiga*, pendekatan sistem dunia telah menawarkan suatu logika atas perbedaan-perbedaan substansial antara kekuatan-kekuatan politik yang tumbuh di wilayah kapitalisme pusat dan pinggiran (*peripheri*), sehingga hubungan-hubungan antara kekuatan-kekuatan di kedua wilayah menjadi jelas, sekalipun tidak langsung dan masing-masing memainkan perannya dalam jaringan sistem ekonomi dunia. *Keempat*, dengan pendekatan ini kita dapat menempatkan kekuatan-kekuatan politik di dunia ketiga dalam suatu dinamika perubahan yang menyeluruh dan global sifatnya.¹⁸⁶

Proyek perang Amerika atas Irak memiliki kecenderungan imperialistik, perang ini sejak awal tidak dilandasi oleh sebuah alasan masuk akal yang bisa digunakan untuk membenarkan invasi bersenjata sebuah Negara terhadap Negara lain. Karena perang tersebut dalam banyak hal bersandar pada kepentingan Amerika untuk mempertahankan dominasinya dalam dunia internasional. Kepentingan untuk memperoleh keuntungan, terutama atas minyak, pembangunan ekonomi pasca perang, dan kontrol serta penguasaan terhadap pemerintah Irak yang baru oleh pemerintah Bush atau Amerika tanpa batas waktu. Dalam politik internasional, imperialisme sering didefinisikan sebagai penguasaan satu Negara kuat atas suatu wilayah atau Negara yang lebih lemah dengan maksud untuk mengambil dan menguasai penduduknya. Dalam pandangan kaum sosialis, imperialisme tidak dapat dipisahkan dari ideologi kapitalisme yang dianut oleh Amerika Serikat dan

¹⁸³ Hasan Hanafi, *Cakrawala Baru Peradaban Global: Revolusi Islam Untuk Globalisme, Pluralisme, Egalitarianisme Antar Peradaban*, IRCISoD, Yogyakarta, 2003, hlm. 69

¹⁸⁴ Lihat M Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, Penerbit Alami, Bandung, 1999, hlm. 65

¹⁸⁵ Wallerstein, seperti dikutip Roland H Chilcote, *Theories of Development and Under-Development*, Westview Press, Colorado, 1994, hlm. 94

¹⁸⁶ Frachan Bulkin, dalam pengantarnya untuk *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1985

sekutunya, orang-orang kapitalis harus menguasai dan mengeksploitasi wilayah atau Negara lain agar modal atau kapital yang dimiliki tetap berjumlah banyak. Pandangan ini pernah secara eksplisit dikatakan Vladimir Ilych Lenin, pencetus Revolusi Bolshevik di tahun 1917 dan pendiri Republik Sosialis Uni Sovyet dalam bukunya *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism* yang terbit di tahun 1919. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa Negara-negara kapitalis harus menjadi imperialis untuk mempertahankan pasar atas barang mereka dan akses atas sumberdaya alam. Bahwa penguasaan Negara kuat atas Negara lemah akan menyebabkan perang. Perang juga dapat ditimbulkan karena persaingan antar Negara kapitalis dalam memperebutkan wilayah jajahan. Irak dipilih sebagai Negara tujuan untuk dikuasai mengingat Negara ini mempunyai banyak kelebihan yang diperlukan untuk mempertahankan kebesaran Amerika. Cara-cara Amerika untuk menguasai dunia termasuk Irak bukan terjadi demikian saja, tetapi penuh dengan perencanaan dan strategi dalam kerangka politik global.

Faktor Pendorong Globalisasi

Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dalam saling keterhubungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Paham yang demikian itu disebut globalisasi atau neo-liberalisme. Beberapa faktor pendorong globalisasi yaitu: *Pertama*, kekuatan kaum kapitalis internasional, yaitu Negara-negara imperialis pusat, Negara menjadi motor penggerak globalisasi karena ia memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global termasuk MNC. MNC yang mampu beroperasi hampir di seluruh dunia, dan merupakan sumber kekuatan dari globalisasi itu sendiri dikemudian hari yang pada akhirnya peran MNC dalam dinamika globalisasi ini begitu kuatnya seolah-olah MNC telah menjadi parasit yang memakan induk semangnya dan menjadi lebih kuat dan lebih besar. Kekuatannya ini didukung oleh *Bretton Woods Institution*, yaitu: Bank Dunia (*World Bank*), Dana Moneter Internasional (IMF) dan GATT/WTO kemudian diaplikasikan pada tiga sistem yaitu liberalisasi perdagangan, keuangan, investasi. *Kedua*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi. *Ketiga*, dukungan pemerintah Negara-negara sedang berkembang (NSB) terhadap ekspansi kaum kapitalis internasional di Negara mereka.

1. Kekuatan Kaum Kapitalis Internasional

Sejak lima abad yang lalu perusahaan-perusahaan di Negara-negara yang perekonomiannya telah maju, telah meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan, yang semakin intensif di masa penjajahan ke berbagai belahan dunia. Namun, sejak dua atau tiga dekade yang lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan tersebut sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi dan terutama kebijakan-kebijakan liberalisasi yang telah menjalar ke seluruh dunia.

Liberalisasi perdagangan berarti menghilangkan segala peraturan yang bersifat melindungi industri dan pasar domestik. Menurut logika neo-liberal, ekonomi Negara akan berkembang bila ada kebebasan pasar. Liberalisasi ini juga berarti penghapusan beban-beban yang harus ditanggung oleh swasta. Liberalisasi berarti kebebasan yang seluas-luasnya bagi kapitalis untuk mengeruk keuntungan.¹⁸⁷ Aspek-aspek terpenting yang tercakup dalam proses globalisasi ekonomi adalah runtuhnya hambatan-hambatan ekonomi nasional, meluasnya aktivitas-aktivitas produksi, keuangan dan perdagangan secara internasional serta semakin berkembangnya kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional dan institusi-institusi Moneter Internasional. Walaupun globalisasi ekonomi merupakan proses yang terjadinya tidak secara merata, dengan peningkatan perdagangan dan investasi hanya terfokus di segelintir Negara saja, namun hampir semua Negara di dunia sangat dipengaruhi oleh proses tersebut. Sebagai contoh, sebuah Negara berpendapatan rendah yang pangsa perdagangannya sangat kecil dalam perdagangan dunia, namun perubahan permintaan atau harga komoditas-komoditas eksportnya atau kebijakan untuk secara cepat menurunkan bea-bea impornya dapat secara sosial dan ekonomi berpengaruh besar pada Negara tersebut. Negara tersebut mungkin hanya memiliki peran yang kecil dalam perdagangan dunia, namun perdagangan dunia

¹⁸⁷ Lihat http://www.pds.or.id/globalisasi_penghisapan_rakyat_htm.

memiliki pengaruh yang sangat besar atas Negara tersebut, yang mungkin saja pengaruhnya jauh lebih luas dibandingkan dengan pengaruhnya atas perekonomian-perekonomian yang telah maju.¹⁸⁸

Liberalisasi eksternal dari perekonomian nasional mencakup penghapusan hambatan-hambatan nasional atas aktivitas ekonomi, meningkatkan keterbukaan dan integrasi dari Negara-negara ke dalam pasar dunia. Di kebanyakan Negara, hambatan-hambatan nasional dalam bidang moneter dan pasar uang, perdagangan dan investasi asing langsung secara umumnya telah dihapus. Liberalisasi moneter adalah persoalan yang paling mendapat perhatian. Selama ini telah terjadi liberalisasi yang ekstensif dan progresif atas berbagai kontrol terhadap aliran dan pasar uang. Gugurnya sistem Bretton Woods pada tahun 1972-1973, telah membuka peluang perdagangan valuta asing, dan kegiatan tersebut telah berkembang secara spektakuler. Volume yang diperdagangkan di pasar valuta asing dunia meningkat dari \$ 5 milyar per hari di tahun 1973 menjadi melebihi \$ 900 milyar di tahun 1992, dan saat ini bahkan telah melampaui \$ 1000 milyar. Banyak dari transaksi tersebut merupakan transaksi spekulatif, dan diperkirakan hanya sebagian kecil (kurang dari 2 %) dari total valuta asing yang diperdagangkan digunakan sebagai pembayaran perdagangan. Sehubungan dengan saling terkaitnya antara pasar uang, sistem moneter dan aliran uang yang sangat besar, secara umum terdapat keprihatinan yang semakin meningkat mengenai kerentanan dan ketidakstabilan maupun resiko dari melemahnya bagian-bagian atau keseluruhan sistem yang ada, pada suatu saat kesalahan terjadi dan berkembang di satu bagian dunia atau suatu bagian sistem, dan dampaknya dapat tersebar luas.

Nilai tukar mata uang telah menciptakan ketidakstabilan nilai tukar yang sangat tajam yang berbalik mendorong terciptanya sebuah masa yang sangat besar pada dunia uang. Uang tersebut tidak memiliki eksistensi di luar ekonomi global dan itu adalah pasar-pasar uang utama. Hal itu belum pernah ada sebelumnya dalam praktek ekonomi tradisional mengenai definisi uang, apakah itu standar ukurannya, muatan nilainya, atau media pertukarannya. Benar-benar baru, tidak dikenal. Hal tersebut tampak maya (*virtual*) dibanding dengan hal yang nyata (*real*). Tetapi kekuatannya begitu nyata. Volume peredaran uang dunia begitu besar pergerakannya yang masuk maupun yang keluar, mata uang memiliki dampak yang besar dan jauh dibandingkan arus keuangan di sektor perdagangan, atau investasi. Dalam satu hari uang maya (*virtual money*) yang diperdagangkan senilai dengan seluruh uang yang dibutuhkan dalam transaksi keuangan sektor perdagangan dan investasi selama satu tahun penuh. *Virtual money* ini memiliki daya gerak yang sangat tinggi karena tidak terkait dengan fungsi-fungsi ekonomi yang sudah ada. Masalah tersebut dimungkinkan karena hal tersebut tidak memiliki kaitannya dengan fungsi ekonomi maupun fungsi keuangan sama sekali, uang ini bahkan tidak mengikuti logika ekonomi maupun hal-hal yang rasional. Hal itu begitu rentan dan mudah panik oleh isu-isu dan rumor atau sesuatu peristiwa yang tidak diperkirakan. Satu contoh adalah ketika dollar Amerika diburu pada musim gugur 1995 yang membuat tekanan terhadap Presiden Clinton mengabaikan rencana dia tentang rencana pengeluaran dan neraca belanja seimbang. Kekacauan dimulai oleh kegagalan para politikus Partai Republik di senat untuk meloloskan amandemen konstitusi mengenai neraca belanja. Meskipun amandemen tersebut lolos hal itu tidak akan berarti apa-apa. Hal tersebut akan sulit karena harus melalui upaya ratifikasi di 38 negara bagian untuk dibuat menjadi peraturan yang biasanya akan memakan waktu selama satu tahun. Tentu saja hal itu membuat para pedagang mata uang menjadi panik dan mulailah kekacauan dollar Amerika. *Virtual money* selalu muncul sebagai pemenangnya, ini membuktikan bahwa ekonomi global telah menunjukkan kemampuannya menjadi penengah yang baik disektor keuangan dan kebijakan dalam sektor fiskal. Kekacauan mata uang, bagaimanapun juga bukan hal yang baik bagi ketidakstabilan fiskal suatu Negara. Kasus di Mexico sesuatu yang mengerikan telah terjadi yang konon lebih parah dari epidemik penyakit. Pada tahun 1995 kekacauan yang menimpa Peso menghempaskan perjuangan ekonomi selama enam tahun yang berhasil mengangkat Mexico dari Negara miskin menjadi Negara yang makmur. Sejauh ini belum ada yang dapat mengontrol ketidakstabilan fiskal.

¹⁸⁸ Martin Koor, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2000, hlm. 10.

Satu-satunya sistem yang dapat bekerja ialah kebijakan fiskal dan keuangan satu Negara yang terbebas dari hutang jangka pendek. Mudah berubahnya uang yang mampu menutupi defisit. Jelas ini sepertinya membutuhkan suatu neraca seimbang atau sesuatu yang lebih cenderung ke bentuk keseimbangan, selama tiga atau lima tahun periode berjalan. Dan hal ini lalu menempatkan keterbatasan kepada otonomi kebijakan keuangan dan fiskal *nation-state* yang pada tahun 1973 nilai tukar mengambang telah terlepas sepanjang masa. Proses perbaikan di tingkat non nasional dan supranasional sedang berjalan. Bahwa keputusan ekonomi yang mendasar diputuskan oleh pengaruh ekonomi global daripada pengaruh yang terjadi di dalam negeri *nation-state*. Bentuk tidak mengekangnya keuangan dan kedaulatan kebijakan keuangan yang diberikan *nation-state* dalam nilai tukar mengambang 25 tahun yang lalu sama sekali tidak baik lagi bagi pemerintah. Terjadi pemindahan pengaruh, pengambil keputusan bukan lagi pemerintah tetapi malah para kelompok yang lebih khusus. Sehingga pemerintah kehilangan kewibawaannya dan hal itu tentu saja mengganggu jalannya kebijakan-kebijakan yang lain. Dan itu hampir terjadi di setiap Negara di dunia. Ada fenomena menarik, yaitu ketika *nation-state* kehilangan kedaulatan atas sistem keuangan dan fiskal malah terjadi penguatan.

Keprihatinan-keprihatinan terhadap kemungkinan krisis moneter global diperkuat oleh krisis keuangan di Asia Timur, yang dimulai pada paruh kedua tahun 1997 dan menjalar hingga Rusia, Brasil dan Negara-negara lain, menyebabkan kekacauan moneter dan resesi ekonomi terburuk dalam periode pasca Perang Dunia II. Liberalisasi perdagangan juga meningkat secara gradual, namun tidak seperti yang terjadi pada liberalisasi moneter. Peran perdagangan yang meningkat dibarengi dengan pengurangan tarif secara umum, baik di Negara-negara maju maupun di NSB (Negara sedang berkembang), sebagian sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan otonom dan sebagian lagi sebagai akibat dari babak-babak putaran perdagangan multilateral di bawah GTT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Namun demikian, tarif-tarif yang tinggi tetap masih muncul di Negara-negara maju, dalam sektor-sektor seperti pertanian, tekstil dan produk-produk manufaktur tertentu, yang merupakan sektor dimana (NSB) memiliki keunggulan komparatif. Lebih jauh lagi, terdapat peningkatan penggunaan hambatan non tarif yang mempengaruhi akses dari NSB ke pasar Negara-negara maju.¹⁸⁹

Juga telah terjadi pertumbuhan yang mantap dalam liberalisasi investasi asing langsung (FDI), meski pada skala yang lebih kecil dari aliran moneter internasional. Kebanyakan FDI dan peningkatannya merupakan akibat dari aliran-aliran dana investasi langsung di antara Negara-negara maju. Akan tetapi, sejak awal tahun 1990-an, aliran FDI ke NSB telah meningkat secara relatif, dari rata-rata 17 % pada tahun 1981-1990 menjadi 32 % pada tahun 1991-1995. Hal tersebut sejalan dengan liberalisasi kebijakan-kebijakan investasi asing di kebanyakan NSB dalam waktu belakangan ini. Namun, banyak dari FDI tersebut memusat hanya di beberapa NSB. Secara khusus, Negara-negara terbelakang (*Least Developed Countries*) menerima bagian yang sangat kecil dari aliran-aliran FDI tersebut, meskipun mereka telah meliberalisasi kebijakan-kebijakannya. Dengan demikian, FDI bukan merupakan suatu sumber keuangan eksternal yang signifikan kebanyakan NSB, yang benar, kemungkinan masih tetap berlangsung dalam beberapa tahun mendatang.

Ciri utama dari globalisasi adalah peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumberdaya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan transnasional, maupun oleh perusahaan-perusahaan keuangan dan dana global. Proses ini sering diistilahkan sebagai transnasionalisasi, di mana semakin sedikit perusahaan transnasional yang mampu meraih pangsa besar atau peningkatan proporsi secara cepat dari pembagian sumberdaya ekonomi, produksi dan pangsa pasar. Jika dulu perusahaan multinasional mendominasi pasar dari sebuah produk tunggal, saat ini perusahaan transnasional yang besar secara khusus memproduksi dan menjual berbagai produk, pelayanan di bidang-bidang yang kian beragam. Melalui merger dan akuisisi, makin sedikit perusahaan transnasional yang saat ini mampu menguasai pangsa pasar global yang lebih besar, baik dalam komoditas, barang-barang manufaktur ataupun jasa.

¹⁸⁹ Martin Khor, *Op. Cit.*, hlm. 11

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pada permulaan abad 21 ini, trend global semakin variatif. Barang, uang, manusia, teknologi, dan informasi dalam era globalisasi telah menyebar secara luas melewati batas Negara (*nation state cross border*), yang berimplikasi terhadap semakin saling terhubungnya setiap dinamika perubahan global saat ini, dan mengikat semakin kuat membentuk suatu komunitas tunggal yang terintegrasi dan dalam hal ekonomi telah menjadi semacam pasar tunggal. Hal ini telah menjadikan dunia sebuah *global village*. Kehadiran teknologi komputer yang merupakan terobosan baru sebagai infrastruktur global, bahkan sampai saat ini komputer telah menyandang sebagai simbol kedua dari globalisasi. Tidak ada satu arenapun (ekonomi, politik, sosial dan budaya) di dunia ini yang kebal dari teknologi komputer.¹⁹⁰ Pada saat ini lebih dari 400 juta komputer digunakan di dunia,¹⁹¹ dan pertumbuhan penggunaan komputer saat ini menembus angka 18 sampai 20 juta pertahun. Salah satu penyebab utama dari pertumbuhan itu adalah teknologi mikroarsitektur yang memungkinkan komputer dapat dibuat dengan ukuran mini yang praktis.

Perusahaan multinasional (MNC) merupakan salah satu topik yang menarik dalam wacana kompetisi global. Karakteristik utama dari sebuah MNC adalah pengelolaan jaringan bisnis yang rumit dan mempunyai skala global oleh perusahaan induk, agar perusahaan cabang dapat melakukan proses-proses produksi dan juga pemasaran sehingga tercapai suatu bisnis secara global.¹⁹² MNC sebagai salah satu pemain terbesar dalam kompetisi global tumbuh dengan cepat setelah era Perang Dunia II, kunci keberhasilan itu adalah temuan berbagai inovasi teknologi yang selalu direspon dengan positif oleh mereka.¹⁹³ Teknologi informasi sebagai perkembangan terbaru dalam dunia teknologi juga mendapatkan tempat yang strategis dalam dunia bisnis berskala global, seperti yang dilakukan oleh *Microsoft Corporation*. Dengan adanya teknologi komunikasi yang memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi, telah menyebabkan berakhirnya dominasi Negara-negara dalam melakukan monopoli dalam dunia telekomunikasi,¹⁹⁴ dengan adanya internet perusahaan dapat menyelenggarakan sistem informasi mereka sendiri secara lebih efisien tanpa campur tangan yang berarti dari Negara. Pemotongan birokrasi dalam proses-proses perdagangan antar Negara yang dapat dilakukan oleh teknologi ini akan berimplikasi terhadap efisiensi yang cukup tinggi.

Sistem syaraf digital yang merupakan suatu upaya eksplorasi teknologi informasi yang dibangun Microsoft layak disebut sebagai salah satu infrastruktur terjadinya globalisasi, karena sistem tersebut dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan hubungan komunikasi secara global dengan sistem yang tunggal yang melewati batas-batas Negara tanpa campur tangan yang berarti dari Negara yang bersangkutan. Di masa datang jika sistem syaraf digital dapat dibangun dengan sempurna, maka akan terciptalah pola hubungan yang sangat kompleks antar manusia di bumi di mana kegiatan sekelompok orang, individu maupun sebuah institusi di tempat lain dapat dipantau dengan kecepatan teknologi informasi tersebut. Di sinilah kemudian akan terjadi apa yang disebut *complex interdependence*, di mana jika sudah mencapai tahap *interlocking*, kehidupan manusia di bumi harus senantiasa selaras dengan meminimalisasi konflik, sebab jika pada tahap ini terjadi sebuah konflik yang besar akan memicu sebuah efek yang destruktif. Era digital atau sering disebut dengan abad informasi yang ditandai dengan kehadiran teknologi internet, telah merubah segalanya, dan salah satu perubahan itu terjadi pada dunia bisnis. Terobosan-terobosan yang dapat dilakukan oleh teknologi informasi telah terbukti mampu meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Teknologi ini kemudian dijadikan sebagai salah satu infrastruktur utama di sebuah perusahaan ataupun pemerintahan suatu Negara dalam rangka menyusun strategi kompetisi global. Teknologi Informasi (TI) yang kini berkembang amat pesat, tak bisa dipungkiri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seluruh proses globalisasi ini.

¹⁹⁰ Charles W. Kegley, Jr & Eugene R. Wittkopt, *World Politics: Trend and Transformation* 7th Edition, Worth Publishers, London, 1999, hlm. 249

¹⁹¹ *Kompas*, "Lengser a'la Bill Gates", 22 Januari 2000

¹⁹² Charles W. Kegley & Eugene R. Wittkopt, *Op. Cit*, hlm. 196

¹⁹³ David Held & Anthony Mc Grew, David Goldblat & Jonathan Peraton, *Global Transformation: Politics, Economics and Culture*, Polity Press, Great Britain, 1999, hlm. 260

¹⁹⁴ *Ibid.* hlm. 253

Mulai dari wahana TI yang paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga internet dan telepon genggam dengan protocol aplikasi tanpa kabel (WAP), informasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak orang. Perubahan informasi kini tidak lagi ada dalam skala minggu atau hari atau bahkan jam, melainkan sudah berada dalam skala menit dan detik. Perubahan harga saham sebuah perusahaan farmasi di Bursa Efek Jakarta hanya membutuhkan waktu kurang dari sepersepuluh detik untuk diketahui di Surabaya. Indeks nilai tukar dollar yang ditentukan di Wall Street, AS, dalam waktu kurang dari satu menit sudah dikonfirmasi oleh Bank Indonesia di Medan Merdeka.

Hal ini akhirnya menuju pada sebuah *Global Brain* yang memungkinkan akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Dunia penelitian, bisnis, industri dimungkinkan untuk menggunakan suberdaya manusia maupun fasilitas lainnya tanpa terikat pada dimensi-dimensi ruang dan batas-batas Negara.¹⁹⁵ Sebuah Negara, perusahaan, ataupun organisasi untuk memikirkan sebuah alternatif dalam tingkat persaingan yang tinggi yaitu mengembangkan sistem informasi dan menggunakan teknologi informasi semaksimal mungkin sebagai alat untuk melakukan persaingan dengan yang lainnya. Karena di era global ini setiap informasi yang didapat tidaklah dapat dilepaskan dari rantai teknologi, informasi adalah hasil pengolahan data mentah, sedangkan teknologi informasi merupakan tulang punggung pengolahan dan penyimpanan informasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu.

Hanya pihak yang menguasai teknologi informasi yang dapat eksis dalam era revolusi global saat ini. Joseph S. Nye menjelaskan bahwa globalisasi bukan menyengsarakan masyarakat miskin, tetapi justru menguntungkan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan modal internasional, manusia bisa mendapatkan keuntungan besar. Argumen ini dikuatkan oleh beberapa hasil penelitian di beberapa Negara berkembang, misalnya perbandingan antara Korea Selatan dan Ghana, pada tahun 1960-an kedua Negara tersebut mempunyai pendapatan perkapita yang sama, tetapi sekarang Korea Selatan lebih mampu memanfaatkan globalisasi, sehingga lebih kaya 30 kali lipat dibanding Ghana, dan dapat menghilangkan ketimpangan tingkat kesejahteraannya, dapat mengirit ongkos dan mempermudah informasi dengan Negara-negara industri yang telah lama maju.¹⁹⁶ Meskipun globalisasi berhasil mengembangkan berbagai teknologi dan komunikasi yang memudahkan atau dapat memecahkan persoalan-persoalan, tak urung pula secara faktual keberhasilan tersebut makin mempertajam kemiskinan, baik ditingkat nasional maupun hubungan antar Negara.

3. Dukungan Pemerintah Negara-negara Sedang Berkembang

Pelaku utama dari globalisasi adalah Negara imperialis yang berkuasa¹⁹⁷ artinya Negara yang mempunyai prinsip ekonomi *world competitive* dan mereka tidak mempunyai kerugian apa-apa karena semua biaya yang dikeluarkan berasal dari pembukaan pasar (*open market*). Kelompok ini hendak memperjuangkan globalisasi yang bebas (*unrestricted globalization*), mereka cenderung untuk membuka perekonomian mereka dan sebagai gantinya mereka juga menuntut Negara lain agar membuka perekonomiannya. Kelompok kedua yang pro globalisasi adalah Negara-negara pelayan (*clients*) dari kelompok pertama. Kelompok kedua (NSB) ini mengkhususkan dirinya pada ekspor barang-barang agromineral, kelautan, dan kehutanan yang semua itu mendukung produk dan memberi keuntungan bagi kelompok pertama.¹⁹⁸

Negara imperialis juga memainkan peran penting dalam membuka pintu perekonomian dunia dengan menciptakan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan GATT/WTO. Lembaga-lembaga ini dikontrol oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Negara imperialis di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa. Fungsi mereka adalah menggantikan

¹⁹⁵ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/28/nasional/280846.htm>

¹⁹⁶ Lihat. Kita, Dunia dan Globalisasi: Menelisik Pemikiran Joseph S. Nye, dalam <http://isac.blogdrive.com/archive/10.htm>

¹⁹⁷ Dari Negara-negara imperialis inilah muncul korporasi-korporasi global yang menjadi pelaku utama juga pada saat ini, dan agen utama eksploitasi berbagai sumberdaya di berbagai belahan dunia ketiga, yang pada akhirnya hasilnya dibawa kembali ke Negara-negara metropolis

¹⁹⁸ Lihat: James Petras, "Negara Sebagai Agen Imperialis", dalam *Globalisasi Perspektif Sosialis*, Ali Sugihardjanto, dkk, Penerbit Cubuc, Jakarta, 2001, hlm. 164

peran pasar domestik dan produsen lokal serta menghancurkan lembaga sosial setempat dengan tujuan memfasilitasi masuknya MNC dan terjaminnya ekspor barang-barang kebutuhan Negara dunia pertama. Negara imperialis memainkan peran penting dalam pembangunan kembali ekonomi perusahaan-perusahaan raksasa, mereka memberikan bantuan militer dan perlindungan politik bagi perluasan MNC, sementara MNC tersebut membiayai lembaga keuangan internasional yang bertugas untuk membuka pasar baru dan tempat investasi yang baru. Di bawah bayang-bayang modal multinasional korporasi, Negara imperialis juga ikut mensubsidi dan membiayai ekspansi modal, sementara di sisi lain penghisapan terhadap pasar domestik terus dilakukan untuk membiayai ekspansi tersebut.¹⁹⁹

Kebijakan domestik maupun internasional pemerintah Negara-negara berkembang itu ditransformasikan melalui introduksi dan adopsi semacam reformasi liberalisasi ekonomi yang diniatkan untuk menata kembali peran dan keterlibatan Negara dalam ekonomi.²⁰⁰ Reformasi ini didukung dengan berbagai derajat antusiasme yang berlainan di berbagai Negara berkembang, tapi jelas efeknya mengarah pada sebuah reduksi internasional terhadap intervensi pemerintah dalam perekonomian, mengarah pada meningkatnya kepercayaan atas mekanisme pasar dan kebebasan yang lebih besar bagi sektor swasta, yaitu makin banyak dianutnya marketisasi dan privatisasi. Bahkan di Negara seperti India, Brasil, dan Nigeria di mana nasionalisme ekonomi mengakar secara historis, investor asing tidak hanya disambut dengan penghapusan pembatasan penanaman modal asing, melainkan juga dengan tawaran insentif bagi investasi baru.²⁰¹

Sementara itu di Dunia Ketiga, peran Negara tidak bisa dihilangkan. Ada relasi yang dialektis antara peran Negara di pasar domestik dan proses globalisasi. Dengan kebijakan upah rendah, pengurangan subsidi, dan pemupukan modal swasta, Negara Dunia Ketiga mengonsentrasikan pendapatannya untuk ekspansi ke luar (globalisasi ataupun *capital relocation*). Proses ini sudah terlihat jelas dalam program yang dikenal dengan istilah *Struktural Adjustment Programs* (SAPs) atau program pengetatan ekonomi. Program ini dirancang oleh Bank Dunia dan IMF yang bekerja sama dengan elite Negara Dunia Ketiga, tujuannya adalah meningkatkan arus keluar modal dan kesiediaan pasar nasional untuk melakukan swastanisasi bagi kepentingan MNC.²⁰² Berikut adalah contoh beberapa persyaratan SAP:²⁰³

1. *Penghapusan tarif-tarif yang membantu industri-industri kecil lokal agar tetap mampu bertahan hidup berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar global.* Padahal, tarif-tarif tersebut sesungguhnya memberi ruang bernafas bagi Negara-negara miskin untuk berkembang secara internal dalam menghadapi pesaing-pesaing yang lebih besar dan lebih kaya.
2. *Penghapusan berbagai peraturan dalam negeri yang mungkin dapat menghambat atau terlalu banyak mengatur masuknya investasi luar negeri.* Dengan demikian ini memungkinkan para pemodal dan korporasi global untuk secara bebas masuk dan dengan mudah menguasai bisnis-bisnis di tingkat lokal, bahkan tak jarang di seluruh lini perekonomian.
3. *Penghapusan kontrol harga (bahkan berkenaan dengan kebutuhan pokok seperti pengadaan air sekalipun) dan secara tidak adil mewajibkan pemberlakuan terhadap kontrol atas upah.* Alhasil, sudah dapat dipastikan para *pekerja yang upahnya sudah teramat kecil, menjadi semakin kecil kemampuannya untuk bertahan hidup.*
4. *Pengurangan secara drastis berbagai pelayanan sosial dan badan-badan yang menjalankannya, seperti pelayanan kesehatan, perawatan medis, pendidikan, bantuan pangan, bantuan usaha kecil, angkutan, sanitasi, air dll.* Kerap kali berbagai pelayanan tersebut diprivatisasi sehingga bantuan yang sebelumnya diterima Cuma-Cuma oleh rakyat, kini memerlukan biaya yang

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 166

²⁰⁰ Stephan Haggard & Robert R. Kaufman, ed., *Introduction: Institution and Economic Adjustment*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1992, hlm. 3

²⁰¹ Thomas J Bierstecker., "The Logic of Unfulfilled Promise of Privatization in Developing Countries", individu Louis Puterman & Dietrich Rueschmeyer, eds, *State and Market in Development: Synergy of Rivalry?*, Boulder, CO: Liene Rienr, Publisher, Inc, 1992, hlm. 106

²⁰² James Petras, *Negara Sebagai Agen Imperialis*, Op. Cit., hlm. 166-167

²⁰³ Jerry Mander, Debi Barker & David Korten, "Globalisasi Membantu Kum Miskin", dalam *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan*, Cindelar Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hlm. 10-12

- ujung-ujungnya harus dibayarkan kepada korporasi global. Akibatnya, begitu banyak orang tidak mampu membayarnya, sehingga secara otomatis mereka tersingkir keluar dari sistem.
5. *Penghancuran secara agresif atas program-program rakyat*, yang menjadi sarana bagi bangsa-bangsa untuk bisa mencapai kemandirian dalam hal kebutuhan pokok. Tentu saja, korporasi-korporasi global tidak bisa mendapatkan keuntungan jika bangsa-bangsa mampu memecahkan persoalan dalam negeri mereka sendiri, keuntungan korporasi global itu sendiri berasal dari pengembangan proses-proses penciptaan nilai tambah, khususnya melalui perdagangan global.
 6. *Perubahan yang dilaksanakan secara cepat atas perekonomian dalam negeri untuk menekankan produksi ekspor*, yang biasanya dikelola tanpa ketatalaksanaan langsung dari investor asing dan korporasi global. Produksi yang terdiversifikasi secara lokal dan berskala kecil, seperti dalam bidang industri atau pertanian, akan digantikan dengan produksi berorientasi ekspor yang terspesialisasi dalam skala besar. Dalam hal ini, teori yang berlaku adalah ketika Negara-negara memusatkan produksi mereka pada sejumlah kecil produk ekspor, maka mereka akan mendapatkan cadangan devisa (*foreign exchange*) dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dengan demikian mereka akan mampu membeli barang-barang kebutuhan mereka di pasar-pasar asing.

Globalisasi dan Krisis Masyarakat Kapitalisme

Dampak perkembangan konstelasi politik-ekonomi internasional adalah efek globalisasi yang telah masuk ke segala sendi kehidupan manusia di dunia internasional. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan telah timbul berbagai masalah. Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan tidak mampu mengatasi, jurang yang besar antara Negara kaya dan miskin, masyarakat marginal, kelaparan, kemiskinan internasional, dan masalah perkembangan *indigeneous technology* di dunia ketiga.²⁰⁴ Jelaslah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, dinamik yang menguasai jurusan-jurusan pertumbuhannya serta pilihan-pilihan masalahnya seperti juga teknologi, tidak berdiri sendiri, merupakan bagian dari sistem sosial, lengkap dengan tujuan-tujuan, kepentingan, prioritas, serta sistem nilainya.²⁰⁵ Oleh karena itu pilihan teknologi tidak boleh diambil hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai implikasi sosialnya.²⁰⁶

Dalam hal ini ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan krisis di masyarakat kapitalisme. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang masyarakat kapitalisme, penulis paparkan lebih mendetail perihal relasi Negara, globalisasi dan logika neo-liberalisme. Karena paham tersebut merupakan sebuah ideologi sebagai dampak dari krisis kapitalisme. Dan tentunya seluruh sistem sosial.

Globalisasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor globalisasi yakni perusahaan-perusahaan transnasional (TNC, Trans-National Corporations) dan Bank Dunia/IMF melalui kesepakatan yang dibuat di World Trade Organization (WTO, Organisasi Perdagangan Dunia) sesungguhnya dilandaskan pada suatu ideologi yang dikenal dengan sebutan "neo-liberalisme". Neo-liberalisme pada dasarnya tidak ada bedanya dengan liberalisme. Para penganut neo-liberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hasil normal "kompetisi bebas". Mereka percaya bahwa 'pasar bebas' itu efisien, dan cara yang tepat untuk mengalokasikan sumberdaya alam yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa menjadi indikator apakah sumberdaya telah habis atau masih banyak. Kalau harga murah, berarti persediaan memadai. Harga mahal artinya produksinya mulai langka. Harga tinggi maka orang akan menanam modal ke sana. Oleh sebab itu, harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi. Itulah alasan mengapa neo-liberalisme tidak ingin pemerintah ikut campur tangan dalam ekonomi. "Serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar", demikian keyakinan mereka. Keputusan individual atas interest pribadi diharapkan mendapat bimbingan dari *invisible hand* (tangan yang tidak tampak), sehingga masyarakat akan mendapat

²⁰⁴ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan tentang Agama Kebudayaan Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, LP3ES, 1984. hlm. 277.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 282.

berkah dari ribuan keputusan individual tersebut. Kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut pada akhirnya akan *trickle down* (menetes ke bawah) kepada anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu sedikit orang tersebut perlu difasilitasi dan dilindungi. Kalau perlu jangan dipajaki.

Krisis berkepanjangan yang menimpa kapitalisme awal abad 19, yang berdampak depresi ekonomi 1930-an berakibat tenggelamnya paham liberalisme. Pendulum beralih memperbesar pemerintah sejak Roosevelt dengan "*New Deal*" tahun 1935. Tetapi dalam perjalanan kapitalisme, di akhir abad 20 pertumbuhan dan akumulasi kapital menjadi lambat. Kapitalisme memerlukan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi kapital. Strategi yang ditempuh adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi dan pasar bebas, dengan memberlakukan perlindungan hak milik intelektual, *good governance* (pemerintahan yang baik), penghapusan subsidi dan program proteksi rakyat, deregulasi, penguatan *civil society*, program anti-korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan suatu tatanan perdagangan global, dan sejak itulah gagasan globalisasi dimunculkan. Dengan demikian globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali paham liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neo-liberalisme. Neo-liberalisme sesungguhnya ditandai dengan kebijakan pasar bebas, yang mendorong perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggungjawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrat dan "parasit" pemerintah, yang tidak akan pernah mampu meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum neo-liberal adalah "Liberalisasikan perdagangan dan keuangan", "Biarkan pasar menentukan harga", "Akhiri inflasi, Stabilisasi ekonomi-makro, dan privatisasi", "Pemerintah harus menyingkir dari menghalangi jalan". Paham inilah yang saat ini mengglobal dengan mengembangkan "*consensus*" yang dipaksakan yang dikenal dengan "Globalisasi", sehingga terciptalah suatu tata dunia. Arsitek tata dunia ini ditetapkan dalam apa yang dikenal "*The Neo-Liberal Washington Consensus*", yang terdiri dari para pembela ekonomi swasta terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik.

Pokok-pokok pendirian neo-liberal meliputi, *pertama*, bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang perburuhan, investasi, harga serta biarkan perusahaan itu mengatur diri sendiri untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan. *Kedua*, hentikan subsidi Negara kepada rakyat karena bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Negara harus melakukan swastanisasi semua perusahaan Negara, karena perusahaan Negara dibuat untuk melaksanakan subsidi Negara pada rakyat. Ini juga menghambat persaingan bebas. *Ketiga*, hapuskan ideologi "kesejahteraan bersama" dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat "tradisional" karena menghalangi pertumbuhan. Serahkan manajemen sumberdaya alam kepada ahlinya, bukan kepada masyarakat "tradisional" (sebutan bagi masyarakat adaptif) yang tidak mampu mengelola sumberdaya alam secara efisien dan efektif.[]



Dampak perkembangan konstelasi politik-ekonomi internasional adalah efek globalisasi yang telah masuk ke segala sendi kehidupan manusia di dunia internasional. Maka, terjadi pertarungan ideologi dunia!

Hand-Out 51

GLOBALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKONOMI INDONESIA DAN KRITIKNYA

Latar Belakang Globalisasi

Untuk memahami Globalisasi dan mekanisme dunia sekarang, orang perlu memahami Neo-Liberalisme. Inilah ideologi mutakhir kapitalisme yang saat ini sedang jaya-jayanya, terutama slogan TINA (*There is No Alternatives*) dari mulut Margaret Thatcher. Semenjak 1970-an hingga kini, Neo-Liberalisme mulai menanjak naik menjadi kebijakan dan praktek negara-negara kapitalis maju, dan didukung oleh pilar-pilar badan dunia: Bank Dunia, IMF dan WTO. Neo-Liberal tidak lain adalah antitesa welfare state, antitesa neo-klasik, dan antitesa Keynesian. Dengan kata lain antitesa kaum liberal sendiri, yaitu Liberal Baru atau kaum Kanan Baru (*New-Rightist*).

Sejarah Neo-Liberal bisa dirunut jauh ke masa-masa tahun 1930-an. Adalah Friedrich von Hayek (1899-1992) yang bisa disebut sebagai Bapak Neo-Liberal. Hayek terkenal juga dengan julukan ultra-liberal. Muridnya yang utama adalah Milton Friedman, pencetus monetarisme. Kala itu adalah masa kejayaan Keynesianisme, sebuah aliran ilmu ekonomi oleh John Maynard Keynes. Keynesian dianggap berjasa dalam memecahkan masalah Depresi besar tahun 1929-1930. Terutama setelah diadopsi oleh Presiden Roosevelt dengan program "New-Deal" maupun Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia ke-II, maka Keynesian resmi menjadi mainstream ekonomi. Bahkan Bank Dunia dan IMF kala itu terkenal sebagai si kembar Keynesianis, karena mempraktekkan semua resep Keynesian. Dasar pokok dari ajaran Keynes adalah kepercayaannya pada intervensi negara ke dalam kehidupan ekonomi. Menurutnyanya, kebijakan ekonomi haruslah mengikis pengangguran sehingga tercipta tenaga kerja penuh (*full employment*) serta adanya pemerataan yang lebih besar. Dalam bukunya yang terkenal di tahun 1926 berjudul "The End of Laissez-Faire", Keynes menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kepentingan individual yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. Katanya, "Sama sekali tidak akurat untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip ekonomi politik, bahwa kepentingan perorangan yang paling pintar sekalipun akan selalu bersesuaian dengan kepentingan umum". Keynesianisme masih tetap menjadi *dominant economy* sampai tahun 1970-an.

Sementara itu neo-liberal belum lagi bernama. Akan tetapi Hayek dan kawan-kawan sudah merasa gelisah dengan mekarnya paham Keynes ini. Pada masa itu pandangan semacam neo-liberal sama sekali tidak populer. Meskipun begitu mereka membangun basis di tiga universitas utama: London School of Economics (LSE), Universitas Chicago, dan Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI) di Jenewa. Para ekonom kanan inilah yang kemudian setelah PD-II mendirikan lembaga pencetus neo-Liberal, yaitu *Societe du Mont-Pelerin*, Pertemuan mereka yang pertama di bulan April 1947 dihadiri oleh 36 orang dan didanai oleh bankir-bankir Swiss. Termasuk hadir adalah Karl Popper dan Maurice Allais, serta tiga penerbitan terkemuka, *Fortune*, *Newsweek* dan *Reader's Digest*. Lembaga ini merupakan "semacam *freemasonry* neo-liberal, sangat terorganisir baik dan berkehendak untuk menyebarluaskan kredo kaum neo-liberal, lewat pertemuan-pertemuan internasional secara reguler".

Pandangan Neo-Liberal dapat diamati dari pikiran Hayek. Bukunya yang terkenal adalah "The Road to Serfdom" (Jalan ke Perbudakan) yang menyerang keras Keynes. Buku tersebut kemudian menjadi kitab suci kaum kanan dan diterbitkan di *Reader's Digest* di tahun 1945. Ada kalimat di dalam buku tersebut: "Pada masa lalu, penundukan manusia kepada kekuatan impersonal pasar, merupakan jalan bagi berkembangnya peradaban, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa itu. Dengan melalui ketertundukan itu maka kita bisa ikut serta setiap harinya dalam membangun sesuatu yang lebih besar dari apa yang belum sepenuhnya kita pahami". Neo-liberal menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Regulator utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Mekanisme pasar akan diatur oleh persepsi individu, dan pengetahuan para individu akan dapat memecahkan kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi, sehingga mekanisme pasar dapat menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial. Menurut mereka, pengetahuan para individu untuk memecahkan persoalan masyarakat tidak perlu ditransmisikan melalui lembaga-lembaga

kemasyarakatan. Dalam arti ini maka Neo-liberal juga tidak percaya pada Serikat Buruh atau organisasi masyarakat lainnya.

Dengan demikian Neo-liberal secara politik terus terang membela politik otoriter. Ini ditunjukkan oleh Hayek ketika mengomentari rejim Pinochet di Chili, "Seorang diktator dapat saja berkuasa secara liberal, sama seperti mungkin demokrasi berkuasa tanpa liberalisme. Preferensi personal saya adalah memilih sebuah kediktatoran liberal ketimbang memilih pemerintahan demokratis yang tidak punya liberalisme". Demokrasi politik, menurut neo-Liberal, dengan demikian adalah sistem politik yang menjamin terlaksananya kebebasan individu dalam melakukan pilihan dalam transaksi pasar, bukan sistem politik yang menjamin aspirasi yang pluralistik serta partisipasi luas anggota masyarakat. Bahkan salah seorang pentolan neo-Liberal, William Niskanen, menyatakan bahwa suatu pemerintah yang terlampaui banyak mengutamakan kepentingan rakyat banyak adalah pemerintah yang tidak diinginkan dan tidak akan stabil. Bila terjadi konflik antara demokrasi dengan pengembangan usaha yang kapitalistis, maka mereka memilih untuk mengorbankan demokrasi.

Salah satu benteng neo-liberal adalah Universitas Chicago, di mana Hayek mengajar di situ antara tahun 1950 sampai 1961, dan Friedman menghabiskan seluruh karir akademisnya. Karena itu mereka juga terkenal sebagai "Chicago School". Buku Friedman adalah "The Counter Revolution in Monetary Theory", yang menurutnya telah dapat menyingkap hukum moneter yang telah diamatinya dalam berabad-abad dan dapat dibandingkan dengan hukum ilmu alam. Friedman percaya pada freedom of choice (kebebasan memilih) individual yang ekstrim. Dengan demikian, neo-Liberal tidak mempersoalkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Pertumbuhan konglomerasi dan bentuk-bentuk unit usaha besar lainnya semata-mata dianggap sebagai manifestasi dari kegiatan individu atas dasar kebebasan memilih dan persaingan bebas. Efek sosial yang ditimbulkan oleh kekuasaan ekonomi pada segelintir kelompok kuat tidak dipersoalkan oleh neo-Liberal. Karenanya demokrasi ekonomi tidak ada di dalam agenda kaum neo-Liberal.

Pandangan kaum neo-Liberal pada dasarnya tidak populer di masyarakat Barat. Mereka anti terhadap welfare state (negara kesejahteraan) dan mereka juga anti demokrasi. Tetapi mengapa mereka bisa berjaya sekarang? Susan George menjawabnya, bahwa mereka berasal dari sebuah kelompok kecil rahasia dan mereka sangat percaya pada doktrin tersebut, yang kemudian dengan bantuan para pendananya, membangun jaringan yayasan-yayasan internasional yang besar, lembaga-lembaga, pusat-pusat riset, berbagai publikasi, para akademisi, para penulis, serta humas yang mengembangkan, mengemas dan mempromosikan ide dan doktrin tersebut tanpa henti. Kata Susan, "mereka membangun kader-kader ideologis yang luar biasa efisiennya karena mereka memahami apa yang disampaikan oleh pemikir marxis Itali Antonio Gramsci ketika ia berbicara tentang konsep hegemoni kultural. Bila kamu dapat menguasai kepala orang, maka hati dan tangan mereka akan ikut". Salah seorang yang menjadi ujung tombaknya adalah Anthony Fisher, seorang pengusaha sukses yang kemudian mendirikan Institute of Economic Affairs (IEA) pada tahun 1955 dengan bantuan dana dari kaum industrialis lainnya. Tujuan lembaga ini adalah "menyebarkan pemikiran ekonomi yang kuat di berbagai universitas dan berbagai lembaga pendidikan mapan lainnya". IEA inilah yang kemudian memberi pengaruh besar kepada Margaret Thatcher, seperti dikatakan Milton Friedman, "Tanpa adanya IEA, maka saya meragukan akan bisa terjadi revolusi Thatcherite". Salah satu koran yang menjadi corong neo-Liberal di Inggris adalah The Daily Telegraph. Lembaga lain juga didirikan, yaitu Centre for Policy Studies (CPS) di tahun 1974 yang sangat berpengaruh kepada para politisi di Inggris. IEA kemudian melahirkan Adam Smith Institute (ASI) di tahun 1976. Kerjasama mereka dengan Heritage Foundation, didirikan di Washington tahun 1973 oleh lulusan LSE "guna membuat hal yang sama bagi politik Amerika yang dilakukan oleh CPS kepada politik Inggris". Anthony Fisher kemudian menjadi presiden pertama dari lembaga Fraser Institute di Kanada di tahun 1974. Di tahun 1977, ia mendirikan International Centre for Economic Policy Studies di New York, di mana salah satu pendirinya adalah Bill Casey, yang kemudian menjadi Direktur CIA. Tahun 1979, Fisher mendirikan Institute for Public Policy di San Francisco. Fisher juga terlibat dalam mendirikan Centre for International Studies (CIS) di Australia, di mana Direktornya Greg Lindsay merupakan kontributor penting berkembangnya ide pasar bebas di politik Australia. Dalam rangka memudahkan mengelola berbagai lembaga tersebut, Fisher mendirikan Atlas Economic Research Foundation yang menyediakan struktur kelembagaan pusat, yang di tahun 1991

mengklaim membantu, mendirikan, membiayai sekitar 78 lembaga serta mempunyai hubungan dengan 81 lembaga lainnya, di 51 negara. Ketika tembok Berlin rubuh, maka banyak personelnnya yang pindah ke Eropa Timur guna “merubah ekonomi-ekonomi yang sakit menjadi kapitalisme”.

Para ekonom neo-Liberal di tahun 1970-an berhasil menembus dominasi ilmu ekonomi. Di tahun 1974, Hayek dianugerahi Nobel Ekonomi. Sesudahnya Friedman mendapat Nobel Ekonomi di tahun 1976. Juga Maurice Allais, seorang anggota Mont-Pelerin Society, mendapat Nobel Ekonomi di tahun 1988. Sejak tahun 1970-an, neo-Liberal mulai berkibar. Sejak itu pulalah seluruh paradigma ekonomi secara perlahan masuk ke dalam cara berpikir neo-Liberal, termasuk ke dalam badan-badan multilateral, Bank Dunia, IMF dan GATT (kemudian menjadi WTO).

Dengan demikian Margaret Thatcher menjadi pengikut dari Hayek, sedangkan murid dari Friedman adalah Ronald Reagan. Inilah yang menghantar neo-Liberal menjadi ekonomi mainstream di tahun 1980-an lewat Thatcherism dan Reaganomics. Thatcher sebenarnya adalah seorang social-darwinist, sampai akhirnya ia menemukan buku Hayek, dan kemudian menjadi salah satu pengikutnya. Doktrin pokok dari Thatcher adalah paham kompetisi-kompetisi di antara negara, di antara wilayah, di antara perusahaan-perusahaan, dan tentunya di antara individu. Kompetisi adalah keutamaan, dan karena itu hasilnya tidak mungkin jelek. Karena itu kompetisi dalam pasar bebas pasti baik dan bijaksana. Kata thatcher suatu kali, “Adalah tugas kita untuk terus mempercayai ketidakmerataan, dan melihat bahwa bakat dan kemampuan diberikan jalan keluar dan ekspresi bagi kemanfaatan kita bersama”. Artinya, tidak perlu khawatir ada yang tertinggal dalam persaingan kompetitif, karena ketidaksamaan adalah sesuatu yang alamiah. Akan tetapi ini baik karena berarti yang terhebat, terpandai, terkuat yang akan memberi manfaat pada semua orang. Hasilnya, di Inggris sebelum Thatcher, satu dari sepuluh orang dianggap hidup di bawah kemiskinan. Kini, satu dari empat orang dianggap miskin; dan satu anak dari tiga anak dianggap miskin. Thatcher juga menggunakan privatisasi untuk memperlemah kekuatan Serikat Buruh. Dengan privatisasi atas sektor publik, maka Thatcher sekaligus memperlemah Serikat-Serikat Buruh di BUMN yang merupakan terkuat di Inggris. Dari tahun 1979 sampai 1994, maka jumlah pekerja dikurangi dari 7 juta orang menjadi 5 juta orang (pengurangan sebesar 29%). Pemerintah juga menggunakan uang masyarakat (para pembayar pajak) untuk menghapus hutang dan merekapitalisasi BUMN sebelum dilempar ke pasar. Contohnya Perusahaan Air Minum (PAM) mendapat pengurangan hutang 5 milyar pounds ditambah 1,6 milyar pounds dana untuk membuatnya menarik sebelum dibeli pihak swasta. Demikian pula di Amerika, kebijakan neo-Liberal Reagan telah membawa Amerika menjadi masyarakat yang sangat timpang. Selama dekade 1980an, 10% teratas meningkat pendapatannya 16%; 5% teratas meningkat pendapatannya 23%; dan 1% teratas meningkat pendapatannya sebesar 50%. Ini berkebalikan dengan 80% terbawah yang kehilangan pendapatan; terutama 10% terbawah, jatuh ke titik nadir, kehilangan pendapatan 15%.

Sejak 1980-an pula, bersamaan dengan krisis hutang Dunia Ketiga, maka paham neo-Liberal menjadi paham kebijakan badan-badan dunia multilateral Bank Dunia, IMF dan WTO. Tiga poin dasar neo-Liberal dalam multilateral ini adalah: pasar bebas dalam barang dan jasa; perputaran modal yang bebas; dan kebebasan investasi. Sejak itu Kredo neo-Liberal telah memenuhi pola pikir para ekonom di negara-negara tersebut. Kini para ekonom selalu memakai pikiran yang standard dari neo-Liberal, yaitu deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan segala jampi-jampi lainnya. Kaum mafia Berkeley UI yang dulu neo-klasik, kini juga berpindah paham menjadi neo-liberal. Sekarang ini praktis kredo neo-liberal telah dipeluk oleh para menteri ekonomi saat ini. Menko perekonomian Aburizal Bakri, selain pengusaha besar juga punya Freedom Institute, lembaga pengibar paham neo-liberalisme. Menteri-menterinya juga satu paham dengan IMF, Bank Dunia dan ADB.

Globalisasi Neo-Liberal

Globalisasi adalah pasar yang meng-global, atau kapitalisme global. Pasar bukanlah konsep netral, tetapi nama lain dari kapitalisme. Kalau dulu bernama kapitalisme internasional, sekarang berubah nama menjadi kapitalisme global, karena secara kuantitatif telah membesar secara luar biasa. Kalau dulu sekitar tahun 1980-an, transaksi keuangan dunia hanya sekitar 300 juta dollar sehari, sekarang di tahun 1990-an meningkat tajam menjadi 1 trilyun dollar sehari! Kalau dulu transaksi memerlukan waktu berhari-hari, sekarang cukup dalam hitungan per-detik, maka milyaran dollar bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berkat electronic mail. Jadi arti kata global

mengandung arti lingkupnya yang kompak, terintegrasi dan menyatu; menggantikan ekonomi nasional dan regional. Globalisasi versi neo-liberal seperti ini mengandung dua ciri utama, yaitu :

(1) *Multilateralisme*, yaitu kekuasaan badan-badan antar pemerintah yang telah menjadi kepanjangan tangan ekspansi global kapitalisme, yaitu tiga bersaudara (triumvirat) Bank Dunia-IMF-WTO. Lembaga-lembaga Bretton Woods semula dimaksudkan untuk menstabilkan perekonomian setelah perang dunia ke-II guna membangun kesejahteraan negara-negara anggotanya. Paham dasarnya adalah Keynesian. Akan tetapi semenjak 1980-an bersamaan dengan dominannya paham neo-liberal, maka multilateralisme telah bertukar paham ikut memeluk neo-liberal. Dan bersamaan dengan kapitalisme global, multilateralisme telah menempatkan dirinya menjadi supra-negara. Operasi badan-badan ini telah melabrak kedaulatan nasional negara, mengintervensi kebijakan domestik, dan memfasilitasi masuknya TNC untuk menguasai ekonomi suatu negara bersangkutan. Multilateralisme juga berarti koherensi atau kerjasama erat di antara Bank Dunia-IMF-WTO dalam operasi-operasinya, khususnya dengan menggunakan cross-conditionalities (prasyarat bersilang) kepada negara-negara Dunia Ketiga. Akan tetapi perlu diingat bahwa di balik badan-badan ini, dikuasai sepenuhnya oleh kepentingan negara-negara maju, khususnya hegemoni AS dan negara-negara G-7 (AS, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Italia).

(2) *Transnasionalisasi*, yaitu menguatnya monopoli dan konsentrasi modal serta kekuasaan ekonomi kepada korporasi-korporasi besar dunia. Semua mekanisme kapitalisme global berujung pada keuntungan di pihak TNC (Trans-National Corporation). Globalisme dan multilateralisme adalah sistem dan mekanisme guna menempatkan TNC pada kedudukan utama. Ini memudahkan TNC untuk melakukan ekspansi ke berbagai negara dengan mendapat berbagai kemudahan, seperti tarif bea masuk yang rendah atau malahan nol persen; kemudahan investasi lewat penanaman modal asing 100%; penguasaan dan monopoli HAKI sehingga teknologi terus menerus dikuasai mereka; kemudahan untuk menguasai dan memonopoli berbagai sektor usaha di berbagai negara, bahkan yang bersifat barang publik (public goods). Hal ini semua yang diatur oleh WTO, IMF dan Bank Dunia. Semua kemudahan tersebut dan penghapusan atas berbagai hambatan usaha di suatu negara, akan semakin memperbesar TNC dan membuatnya sebagai penguasa dunia yang sebenarnya.

Poin-poin Pokok Neo-liberal

1. *Aturan Pasar*. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.
2. *Memotong Pengeluaran Publik dalam Hal Pelayanan Sosial*. Ini seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 'jaring pengaman' untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak (tax benefits) untuk kalangan bisnis.
3. *Deregulasi*. Mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.
4. *Privatisasi*. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.
5. *Menghapus Konsep Barang-Barang Publik (Public Goods) atau Komunitas*. Menggantinya dengan "tanggungjawab individual", yaitu menekan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF ini, maka program neo-Liberal, mengambil bentuk sebagai berikut:

1. *Paket kebijakan Structural Adjustment (Penyesuaian Struktural)*, terdiri dari komponen-komponen: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.
2. *Paket kebijakan deregulasi*, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena dianggap telah mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.
3. Paket kebijakan yang direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS, yang merupakan gabungan dua paket di atas ditambah tuntutan-tuntutan spesifik disana-sini.

Di Indonesia, paham neo-liberal mulai terasa pengaruhnya di tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi, yang berujud dalam berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983. Paralel dengan masa itu adalah terjadinya krisis hutang dunia Ketiga di tahun 1982, ketika Mexico default. Setelah itu Bank Dunia dan IMF masuk ke dalam perekonomian negara-negara yang terkena krisis hutang lewat perangkat SAP. Saat itu terutama di negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Indonesia belumlah terkena krisis, dan karenanya jauh dari hiruk-pikuk SAP. Akan tetapi sejak itu jelas pola pembangunan Indonesia mulai mengadopsi kebijakan neo-liberal, khususnya karena keterikatan Indonesia kepada IGGI, Bank Dunia dan IMF.

Program neo-liberal di masa Orde Baru tersebut, meski demikian, merupakan juga alat bagi kroni-kroni Suharto dan keluarganya untuk menguasai perekonomian. Dengan demikian liberalisasi ekonomi tersebut pada dasarnya mengukuhkan struktur konglomerasi yang mampu menguasai berbagai sektor ekonomi dari hulu sampai hilir di tangan segelintir kelompok pengusaha. Bagi neo-Liberalisme, dalam hal ini Bank Dunia dan IMF, hal ini tidaklah mengganggu. Kapitalisme dapat bersesuaian dengan otoriterisme, dan malahan merupakan pilihan terbaik, sebagaimana resep kaum neo-Liberal. Karena itulah Indonesia selalu mendapat puja-puji dari para pejabat Bank Dunia dan IMF. Indonesia dianggap sebagai contoh keberhasilan, sebagai "good-boy", dinaikkan derajadnya menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah-bawah, dan digolongkan sebagai NICs (New Industrialized Country) baru, sebagai 'Macan Asia' bersama-sama Thailand, Malaysia dan Filipina. Bahkan laporan Bank Dunia di awal tahun 1997, masih memuja-muji ekonomi Indonesia dan menyatakannya sebagai contoh yang paling baik dengan fundamental ekonomi yang bagus pula.

Tidak dinyana terjadilah krisis moneter Juli 1997, yang dimulai dari Thailand. Kini mulailah Indonesia masuk ke dalam krisis berkepanjangan yang tidak berkesudahan hingga kini. Sejak itu dimulailah babak baru ekonomi politik pembangunan Indonesia, yaitu Indonesia masuk ke dalam skema SAP dari Bank Dunia dan IMF. SAP bertujuan: (1) menurunkan inflasi; (2) menurunkan defisit anggaran; (3) memacu ekspor; dan (4) membuat jadwal pembayaran hutang luar negeri lancar. Untuk itu, pemerintah harus melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) devaluasi mata uang; (b) deregulasi sektor keuangan; (c) pemotongan subsidi; (d) menjual perusahaan publik, yaitu privatisasi BUMN; (e) memotong anggaran sosial dan tenaga kerja; (f) liberalisasi sektor perdagangan; dan (g) penurunan upah. Dengan melihat lingkup bidang SAP, maka hampir seluruh sektor penting harus direstrukturisasi. Ini nampak sekali di dalam isi Letter of Intent dan Memorandum yang menyertainya, yang mengatur hampir seluruh sektor yang ada, mulai dari sektor perbankan, sektor pengairan, sektor utilities (listrik, air dan energi) dan banyak lainnya. Sebenarnya skema SAP di Indonesia sudah mirip dengan ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility—kemudian berubah menjadi PRGF—Poverty Reduction Growth Facility), sebuah skema SAP bagi negara-negara LDC (miskin). Mengingat Indonesia masih tidak bisa dikategorikan miskin, maka diadakan modifikasi. Sementara itu Bank Dunia mulai memasukkan komponen pinjamannya dengan SAP, yaitu lewat SSNAL (Social Safety-Net Adjustment Loan) dan PRSL (Policy Reform Structural Loan). Selain itu Bank Dunia juga memberikan pinjaman secara sektoral, yaitu lewat Sectoral Adjustment Loan

(SECAL), yaitu program SAP untuk sektor-sektor tertentu. Ini merupakan program baru dari Bank Dunia yang diturunkan bila suatu negara dianggap tidak layak secara ekonomi dan politik. SECAL di Indonesia diberikan pada sektor pengairan (WATSAL-Water Sectoral Adjustment Loan) dan dalam waktu dekat untuk sektor pertanian, dan kemudian menyusul pada sektor perdagangan, industri dan energi. Sementara ADB memberikan SECAL untuk sektor-sektor listrik, kesehatan dan gizi, komunitas, pemerintahan daerah, deregulasi usaha menengah, dan pemberantasan korupsi di BUMN.

Indonesia sebagai Korban Globalisasi

Kita bisa mencatat banyak kejadian kasus globalisasi yang kemudiannya telah menghancurkan dan mengorbankan Indonesia, baik dari segi kedaulatan nasional, kedaulatan hukum, dan korban berjuta-juta rakyat Indonesia memasuki masa depan yang gelap. Krisis yang terus berlanjut hingga kini adalah gambaran bahwa Indonesia merupakan korban terparah globalisasi. Ini yang tidak mau diakui oleh IMF, Bank Dunia dan para ekonom neo-liberal, yang selalu menyalahkannya kepada pemerintah dan negara bersangkutan, baik dari segi KKN, korupsi, bad-governance dan lainnya; karena hendak menutupi kepentingan mereka yang sebenarnya. Seharusnya selain kita harus mendukung adanya sebuah pemerintahan yang bersih, akan tetapi kita juga harus menyalahkan sebuah sistem liberalisme ekonomi dan kapitalisme global. Baru itu seimbang namanya. Contoh kasus-kasus dampak globalisasi yang bisa kita catat adalah sebagai berikut:

1. Perampokan Besar-besaran Bank Sentral

Ini sesungguhnya adalah skandal keuangan Bank Sentral terbesar di dunia. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, adalah skema program bail-out (penalangan) utang perbankan (swasta dan pemerintah) untuk dialihkan menjadi beban pemerintah lewat penerbitan obligasi. Ini adalah bagian dari program pemulihan krisis ekonomi Indonesia yang dipaksakan oleh IMF lewat LoI, bersama-sama dengan Bank Dunia dan ADB sejak bulan Oktober 1997. Semula BLBI bernama KLBI yang bersifat "Kredit"; kini diganti menjadi bersifat "Bantuan", sehingga tidak jelas lagi aspek pertanggungjawabannya. BLBI secara jelasnya adalah bantuan dana yang diberikan oleh BI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, jadi merupakan utang bank-bank penerima kepada BI. Akan tetapi melalui program penjaminan pemerintah, hak tagih BI dialihkan kepada pemerintah. Untuk membayar hak tagih tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Utang (Obligasi) senilai Rp 164,53 triliun dan juga menerbitkan Surat Utang untuk penyediaan dana dalam rangka program penjaminan senilai Rp 53,77 triliun.

Meskipun hakekatnya adalah pinjaman dengan persyaratan suku bunga, jangka waktu dan jaminan tertentu, pada akhirnya menjadi pengurasan uang negara yang diduga dilakukan baik oleh bank penerima maupun oleh pejabat-pejabat BI sendiri. Pengurasan tersebut diperkirakan telah mencapai Rp 144,53 triliun (per-29 Januari 2000). Laporan audit investigasi BPK tanggal 31 Juli 2000 mengungkapkan dugaan penyimpangan tersebut. Potensi kerugian negara yang ditimbulkannya adalah Rp 138,44 triliun (95,78%) dari dana penyaluran BLBI. Sementara penyimpangan dari bank penerima dana BLBI berupa berbagai pelanggaran yang mencapai nilai Rp 84,84 triliun (59,7%) dari dana BLBI, dilakukan oleh 48 bank penerima. Sementara itu kerugian dan dampaknya terhadap APBN juga luar biasa. Pemerintah dengan ini mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dan bunga obligasi tersebut, yang dibayar dari dana APBN. Di tahun 2001 diperkirakan angsuran dan bunga obligasi tersebut mencapai Rp 55,7 triliun, artinya sekitar 18,9% dari APBN hanya akan dipakai untuk membayar beban utang BLBI. Sementara bila kita tengok pengeluaran APBN untuk keperluan subsidi masyarakat hanya mencapai 16,4% (Rp 48,2 triliun) dan untuk keperluan pembangunan hanya 11,3% (Rp 33,3 triliun). Dengan skandal keuangan BLBI ini, yang disarankan oleh IMF, maka telah mengorbankan berbagai subsidi yang seharusnya diterima oleh rakyat lewat APBN.

2. Tambal Sulam Kemiskinan Lewat Utang

Program pinjaman dari Bank Dunia dan ADB dengan nama SSNAL (Social Safety Net Adjustment Loan) atau pinjaman untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilaksanakan sejak

terjadinya krisis. Besarnya US\$ 600 juta yang tahap pertamanya telah dikucurkan sebesar US\$ 300 juta pada Januari 2000. Merupakan politik etis dari Bank Dunia agar krisis yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan yang tidak diinginkan yang bisa merugikan kepentingan Bank Dunia sendiri. Sejak awal telah ditentang oleh para aktivis, karena hanya menambah beban utang dan bersifat tamal sulam. Skema program JPS ini dibagi ke dalam 12 program, diantaranya OPK (Operasi Pasar Khusus), PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Ekonomi), DBO (Dana Bantuan Operasional), dan PKP (Padat Karya Perkotaan). Sampai tahun anggaran 1999/2000 program JPS telah menghabiskan dana Rp 15 triliun.

Dalam kenyataannya, terbukti terjadi banyak penyimpangan. Salah satu bukti yang jelas adalah sebesar Rp 8 triliun dari Rp 17,9 triliun dana JPS di tahun anggaran 1998/1999 malah digunakan untuk kampanye otonomi luas Timor Timur dan Kampanye Pemilu 1998. Demikian pula, dugaan penyelewengan dana JPS tahun 1999/2000 hampir sebanyak Rp 4,5 milyar dana OPK dan Rp 500 juta dana PDM-DKE untuk 15 propinsi di Indonesia, di mana sebagian besar penyelewengan (49%) terjadi di tingkat kecamatan. Demikian pula dari hasil audit BPK, ditemukan bahwa dana JPS bidang pendidikan tahun 1998/1999 dan 1999/2000 terdapat pengeluaran sebesar Rp 5,4 milyar yang diragukan kebenarannya, dan terdapat dana untuk Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DPO) sebesar Rp 12,3 milyar yang tidak disalurkan ke siswa dan sekolah. Juga ditemukan 21 kasus yang merugikan negara sebesar Rp 1,5 milyar, kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 75,6 juta, dan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (6 temuan) sebesar Rp 227,9 juta. Meskipun jelas ada banyak penyimpangan, Bank Dunia dan pemerintah terus melanjutkan program ini. Baru kemudian setelah terlihat bahwa program ini dapat menghancurkan kredibilitas Bank Dunia sendiri, akhirnya pada Juli 2001 oleh Bank Dunia program ini dibatalkan sama sekali.

3. Penghancuran Ketahanan Pangan

Lewat Lol Oktober 1997 dan MEFP 11 September 1998, IMF menuntut diberlakukannya tariff impor beras sebesar 0%. Ini juga berlaku bagi jagung, kedele, tepung terigu dan gula. Selain itu Lol juga mengatur agar BULOG tidak lagi mengurus kestabilan harga pangan dan agar melepaskannya ke mekanisme pasar. BULOG dibatasi menjadi sebatas perdagangan beras, itupun harus bersaing dengan pedagang swasta. Demikian pula BULOG harus mengambil pinjaman dari bank komersial, tidak lagi dari dana BLBI yang sangat ringan. Liberalisasi juga telah diberlakukan dalam hal harga pupuk dan sarana produksi padi lainnya yang tidak lagi disubsidi pemerintah, melainkan diserahkan pada mekanisme pasar. Sementara itu subsidi petani lewat KUT (kredit usaha tani) hanya sebesar Rp 1,8 triliun (bandingkan dengan dana BLBI). Dengan demikian kini petani menghadapi harga produksi yang mahal, sementara harga jual padi hancur. Liberalisasi pertanian sebenarnya juga bagian dari ratifikasi Indonesia atas Agreement on Agriculture (AOA) dari WTO, yang mengatur penghapusan dan pengurangan tarif serta pengurangan subsidi.

Sejak itu masuklah secara besar-besaran impor beras dari luar dengan harga lebih murah dari beras hasil petani lokal. BULOG dan pihak swasta kini berlomba untuk mendatangkan beras dari mancanegara. HKTI mencatat bahwa hingga akhir Maret 2000, beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai 9,8 juta ton, 6 juta ton diantaranya sudah masuk pasar. Padahal produksi beras dalam negeri sekitar 30 juta ton, sementara kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 32 juta ton; sehingga sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan impor 2 juta ton. Karena jeritan para petani dan kritik yang berdatangan, akhirnya bea masuk impor dinaikkan menjadi 30%, itupun semula IMF berkeberatan. Akan tetapi ternyata hal ini tetap bukan penghalang bagi importir untuk mengimpor beras dari Thailand, Vietnam dan Australia dengan tetap meraih untung. Harga beras impor dari Thailand misalnya, setelah keluar dari Tanjung Priok dijual Rp 1.600/kg, dan beras dari Australia dijual Rp 1.400/kg; dan tetap masih meraih laba sekitar Rp 600. Meskipun kemudian pemerintah menghentikan impor beras pada Maret 2000, ternyata belum dapat mengangkat harga gabah di tingkat petani. Beras impor terus saja masuk dengan deras. Akibatnya yang parah, adalah harga padi lokal terus merosot tajam, sehingga kini hanya mencapai sekitar Rp 600/kg. Padahal harga pupuk sudah sekitar Rp 700/kg. Inilah awal dimulainya tragedi kehancuran ketahanan pangan Indonesia, bila tidak ada langkah-langkah protektif dengan segera. Petani pedesaan mengalami kebangkrutan dan akan menyebabkan kerawanan ekonomi masyarakat pedesaan yang tak terduga. Dengan liberalisasi pertanian ini, maka akan habislah petani Indonesia dilibas oleh TNC dan importir besar.

4. Penciptaan Pasar Tanah

Pemerintah (dan BPN) bersama dengan Bank Dunia dan AusAid sedang menjalankan suatu mega-proyek yang disebut sebagai Land Administration Project (LAP). Ini adalah suatu proyek ambisius mengenai deregulasi pertanahan dengan istilah "Land Resource and Management Planning" yang akan berlangsung selama 25 tahun (1995-2020) yang hendak merancang suatu desain perubahan manajemen dan administrasi pertanahan yang tujuan akhirnya adalah terciptanya pasar tanah (land market). Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap lima tahun. LAP I (1995-2000) menelan biaya sebesar US\$ 140,1 juta, didanai dari anggaran nasional sebesar US\$44,9 juta (32%), pinjaman dari Bank Dunia US\$ 80 juta (57%) dan sisanya US\$ 15,2 juta (11%) adalah grant dari AusAid. Meskipun program ini telah ditentang oleh aktivis, akan tetapi mereka tetap jalan terus. Terakhir LAP II akan kembali dilaksanakan, dan akan mulai memasukkan obyek tanah masyarakat adat, karena sudah adanya pilot proyek sebelumnya yang dijalankan di Sumatera Barat. Rencananya LAP II akan bernilai sebesar US\$ 110 juta, yaitu US\$ 20 juta dari pemerintah Indonesia dan US\$ 90 juta dari pinjaman Bank Dunia.

Pelaksanaan LAP I, sebagaimana sudah diduga, telah menimbulkan banyak masalah. Registrasi tanah LAP I yang katanya menggunakan prinsip transparansi, partisipasi dan kontrol masyarakat, ternyata tidak terjadi. Penemuan di lapangan oleh KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) memperlihatkan adanya peluang bagi petugas untuk korupsi dan menipu warga. Warga juga tidak mengetahui keberadaan LAP sampai petugas BPN datang mengukur tanah mereka. Juga tidak ada standard biaya registrasi. Sebuah kasus di Depok, warga dikenakan biaya Rp 50.000, sementara kwitansi dari BPN hanya tertera Rp 11.500. Bahkan hasil analisis dari Bank Dunia sendiri berjudul "The Social Assessment of the Land Certification Program: The Indonesia Land Administration Project", LAP I mempunyai banyak masalah, diantaranya adalah: proyek tersebut tidak sustainable, karena 62% dari Tim Ajudikasi Tanah telah bubar sesudah proyek selesai. Selain itu di Jawa ada jutaan hektar tanah yang merupakan "residual claims", yaitu tanah yang diambil secara paksa dari rakyat pada zaman Orde Baru. Masalah "residual claims" ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, sebelum ada proses sertifikasi. LAP I juga mempunyai dampak negatif terhadap kaum perempuan, karena nama-nama perempuan tidak dimasukkan di dalam sertifikat tanah. Sementara itu BPN berkilah mengenai beban hutang. Menurutnyanya pembayaran utang akibat program LAP ini akan diambil dari pemasukan UU PHTB (Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), di mana ditentukan setiap transaksi tanah atau bangunan senilai di atas Rp 30 juta sejak Januari 1998 akan dikenai pajak 5%. Dengan demikian, rakyat kembali yang akan dibebankan pembayaran utang. Secara keseluruhan, LAP akan meliberalisasi pertanahan di Indonesia, karena tanah kini dijadikan obyek komoditas (barang dagangan). Dampaknya, tanah akan dijadikan obyek penguasaan pemodal besar dan TNC, dengan legalitas yang dijamin.

5. Penguasaan Air Minum

Air minum telah dijadikan incaran banyak TNC dunia. Sektor Air disebut juga sebagai "emas biru" (blue gold), merupakan sektor yang strategis sekaligus bisnis besar. Liberalisasi air didorong pula oleh Bank Dunia. Dalam laporannya tentang kerangka kebijakan untuk sektor air di perkotaan (Urban Water Supply Sector Policy Framework), Bank Dunia merekomendasikan agar Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya-milik Pemda DKI-diswastakan. Tujuannya untuk meringankan beban utang pemerintah. Dengan itu, Bank Dunia lalu memberikan pinjaman sebesar Rp 2,4 trilyun untuk pengembangan Jakarta, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan pengelolaan air minum. Hasilnya tanggal 12 Juni 1994, dikeluarkan instruksi presiden (Suharto) untuk mengalihkan pengelolaan usaha air minum di Jakarta dan sekitarnya kepada swasta (privatisasi). Proses privatisasi ini melalui proses KKN, di mana akhirnya dikuasai oleh PT Kekarpola Airindo milik Sigit Harjojudanto dan Bambang Trihatmojo yang menggandeng perusahaan air Inggris, Thames Water International (TWI); dan oleh PT Garuda Dipta Semesta milik Anthony Salim yang menggandeng perusahaan air dari Perancis, Lyonnaise des Eaux (LDE). Padahal privatisasi ini jelas-jelas melanggar Konstitusi UUD 45 pasal 33 dan UU No. 1 tahun 1961 yang melarang swastanisasi bisnis air minum. Setelah Suharto turun tahta, akhirnya diambil alih oleh Pemda Jakarta lewat instruksi Gubernur Sutiyoso No. 131 tanggal 22 Mei 1998, tetapi dua perusahaan asing tersebut semakin dikukuhkan sebagai pengelola. Dua perusahaan asing tersebut kemudian berganti nama menjadi PT PAM

Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (TPJ). Pemda DKI mengambil alih dengan saham 10 persen, sementara Thames dan Lyonnaise sebagai pemilik saham mayoritas yaitu 90%. Mereka juga mendapatkan hak eksklusif untuk mengelola seluruh asset PAM Jaya selama 25 tahun, tanpa perlu membangun jaringan infrastruktur dan pelanggan, sehingga bisa langsung menanggung keuntungan. Bayangkan saja captive market (pasar yang sudah pasti) dari PAM Jaya, yaitu 2,3 juta pelanggan.

Akan tetapi dalam penetapan harga air untuk semester I tahun 1999, PT TPJ menetapkan harga Rp 2.400 per-meter kubik, dan Palyja Rp 2.900 per-meter kubik. Padahal harga jual air PAM Jaya ke konsumen jauh di bawah itu, yakni Rp 2.130 per-meter kubik. Hasilnya, kekurangan tersebut harus ditutupi oleh perusahaan daerah ini. Sampai Oktober 2000, defisit yang harus ditanggung pemerintah adalah sebesar Rp 86,4 milyar dengan beban utang Rp 394,6 milyar. Jadi alhasil sebenarnya pemerintah mensubsidi rakyat atau mensubsidi TNC? Dan siapa yang membayar semua itu? Sampai kini pun layanan dan harga air tetap tidak memuaskan. Akan tetapi PAM kini tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah terikat kontrak selama 25 tahun. Serikat Pekerja PAM yang juga telah berjuang untuk menentang proses ini, justru 20 aktivisnya ditahan dan terus-menerus ditekan. Meskipun sudah berjuang lebih dari dua tahun, nampaknya TNC dan pemerintah jalan terus. Nampaknya proses privatisasi ini akan menjadi contoh bagi privatisasi air minum berikutnya di daerah-daerah lain.

6. Mafia Utang lewat Kredit Ekspor

Facilitas kredit ekspor disediakan oleh ECA (Export Credit Agencies and Investment Insurance Agencies), yang merupakan badan milik pemerintah di negara-negara maju. Perannya adalah merealisasikan berbagai proyek investasi dan infrastruktur berskala besar di negara-negara berkembang. Badan ini memberikan asuransi risiko politik apabila ada "jaminan balik" (counter guarantee) dari pemerintah Indonesia. Pemerintah diwajibkan untuk menjamin keamanan politik dan membayar kembali investasi yang sudah dikeluarkan apabila proyek gagal akibat situasi politik. Meskipun merupakan proyek antar swasta, tetapi karena dijamin oleh pemerintah, maka risiko hutang swasta bisa menjadi hutang pemerintah. Cara kerja ECA ini mirip mafia, karena di negara asalnya tidak dapat dikontrol parlemen, tidak transparan, dan tidak membuka informasi kepada publik mengenai proyek-proyeknya. Sementara di Indonesia, mega proyek yang didanainya, adalah proyek-proyek berbiaya tinggi yang penuh dengan KKN. Di Indonesia proyek-proyek yang dibiayainya sebanyak 33 buah, yang biasanya merupakan mega-proyek milik konglomerat, kroni dan anak-anak Suharto. Diantaranya adalah berbagai pabrik pulp and paper, yaitu PT Tanjung Enim Lestari, PT Indah Kiat Pulp and Paper di Sumatera Selatan, dan PT Riau Andalan Pulp and Paper di Riau; tambang tembaga dan emas PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa; proyek PLTGU Paiton I di Jawa Timur; serta berbagai proyek semen, teknologi satelit, serta teknologi dan transport militer.

Dalam kenyataannya, semua mega-proyek ini bermasalah karena mark-up proyek dan korupsi besar-besaran; serta membawa bencana, karena merusak lingkungan, menggusur rakyat dan menambah beban hutang. Pada masa Suharto, dari tahun 1992-1996, hutang dari ECA sebanyak US\$ 28,2 milyar, atau 24% dari stok hutang Indonesia. Tiga besar ECA yang aktif di Indonesia adalah Bank Exim Jepang (JEXIM, sekarang merger dengan OECF menjadi JBIC), Bank Exim AS, dan Hermes dari Jerman. JBIC (Japan Bank for International Cooperation) kini adalah ECA terbesar di dunia, yang juga mengelola proyek-proyek pinjaman bilateral pemerintah Jepang. JBIC mendanai 10 proyek besar di Indonesia, yaitu PLTGU Paiton, Tambang Batu Hijau, LNG Pertamina, Semen Indo-Kodeco, penyulingan minyak Pertamina, Indocement, proyek listrik Jawa dan Jawa Barat, listrik Tambak Lorok, Tanjung Enim Lestari pulp and paper, dan tambang INCO. ECA kini cenderung semakin menggantikan mekanisme ODA (Overseas Development Assistance), karena besarnya kepentingan TNC-TNC di negara maju untuk mengerjakan berbagai mega-proyek infrastruktur lewat pembiayaan bilateral maupun multilateral. ECA juga aman bagi TNC, karena akan digaransi oleh pemerintah. Artinya rakyat juga yang harus membayar hutangnya.

7. Penjarahan Kekayaan Intelektual Masyarakat/ Komunitas

Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights), salah satu perjanjian di dalam WTO, telah diratifikasi oleh pemerintah. Ini adalah perjanjian HAKI (Hak Atas

Kekayaan Intelektual) terkait perdagangan, yang memberikan hak istimewa bagi individu atau perusahaan atas karya ciptanya, dalam bentuk Paten, Merk, dan Hak Cipta; juga untuk Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis. Indonesia telah membuat 5 UU HAKI sebagaimana di atas, karena harus bersesuaian dengan TRIPs. Dengan UU Paten, maka berbagai barang temuan dapat dikuasai siapa saja yang mendaftarkannya terlebih dahulu. Syaratnya adalah merupakan temuan baru, mengandung langkah inovatif, dan dapat diterapkan dalam industri (produksi massal). Paten atas makhluk hidup, yaitu mikro-organisme dan jasad renik juga dapat dipatenkan. Ini adalah kepentingan TNC bioteknologi yang telah memantapkan berbagai benih dan tanaman hasil rekayasa genetik. Dengan TRIPs ini maka akan terjadi bahaya besar lewat pematenan atas kekayaan intelektual milik publik /komunitas. HAKI komunitas dapat saja dirampok oleh perusahaan-perusahaan asing maupun para peneliti/individu, dengan sekedar merubah proses dan produknya. Ini disebut sebagai bio-piracy (pembajakan hayati).

Hal ini telah terjadi dengan rempah-rempah Indonesia. Perusahaan kosmetik besar Jepang, Shiseido, telah mematenkan kosmetiknya yang berasal dari berbagai bahan rempah di Indonesia, seperti kayu rapet, kemukus, lempuyang, pelantas, pulowaras, diluwih, cabe jawa, brotowali, kayu legi, dan bunga cangkok. Sementara itu Tempe, makanan tradisional Jawa, juga telah dipatenkan. Tercatat ada 19 paten tentang tempe, di mana 13 buah paten adalah milik AS, yaitu: 8 paten dimiliki oleh Z-L Limited Partnership; 2 paten oleh Gyorgy mengenai minyak tempe; 2 paten oleh Pfaff mengenai alat inkubator dan cara membuat bahan makanan; dan 1 paten oleh Yueh mengenai pembuatan makanan ringan dengan campuran tempe. Sedangkan 6 buah milik Jepang adalah 4 paten mengenai pembuatan tempe; 1 paten mengenai antioksidan; dan 1 paten mengenai kosmetik menggunakan bahan tempe yang diisolasi. Paten lain untuk Jepang, disebut Tempeh, temuan Nishi dan Inoue (Riken Vitamin Co. Ltd) diberikan pada 10 Juli 1986. Tempe tersebut terbuat dari limbah susu kedelai dicampur tepung kedele, tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, dekstrin, N-kaseinat dan putih telur. Demikian pula kasus pematenan disain kerajinan perak hasil kerja Suwarti di Bali, oleh pengusaha asal AS. Justru kemudian Suwarti yang dituntut oleh pengusaha tersebut, ketika dia masuk ke pasar Amerika. Suwarti tidak bisa berbuat apa-apa, karena biaya peradilan HAKI sangat mahal untuk pengrajin seperti dirinya. Ini adalah kasus nyata pembajakan HAKI komunitas Indonesia oleh pemodal besar. Kecenderungan ini akan semakin meningkat. Padahal bagi orang Indonesia, berbagai kekayaan budaya itu tidak mungkin dipatenkan, karena merupakan milik publik. Dalam kasus lain, paten atas benih dan tanaman transgenik oleh TNC, akan mengancam keberlangsungan benih tradisional dan kelestarian tanaman. Petani akan semakin tergantung kepada benih-benih milik TNC. Di lain pihak, TNC tersebut akan masuk langsung untuk menanamnya di negara bersangkutan, sebagaimana yang terjadi dengan kasus Monsanto yang menanam kapas Bt di Sulawesi Selatan. Pertanian lama-kelamaan akan menjadi lahan bisnis dan monopoli (paten) teknologi oleh TNC-TNC.

Globalisasi Utang

Mekanisme globalisasi yang juga merupakan bentuk kolonialisme baru adalah utang. Utang pada dasarnya bukanlah sebuah kedermawanan atau bantuan negara maju kepada negara berkembang. Kebalikannya, utang merupakan bagian utama dari kolonialisme baru. Semenjak 1950-an, sudah disadari bahwa utang merupakan instrumen bagi pendiktean kepentingan negara-negara Barat kepada negara miskin peminjamnya. Meskipun dalihnya adalah bunga lunak yang meringankan, kenyataannya nilai politisnya jauh lebih besar. Jadi nilai dominasi negara maju untuk mendikte apa yang boleh dan apa yang tidak, atau kebijakan apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka, merupakan dasar dari strategi pembangunanisme yang salah kaprah. Utang merupakan alat ampuh hegemoni negara Barat atas klien-kliennya, sehingga posisi negara-negara miskin tersebut ada di bawah (disubordinasi). Utang telah memainkan peran yang luar biasa dalam menjaga suatu negara tunduk pada orbit kapitalisme Barat.

Utang juga menguntungkan, karena tingkat pengembaliannya lebih pasti ketimbang utang komersial, karena dijamin negara. Negara pasti membayar. Utang adalah bisnis yang stabil. Dan makin lama jangka waktu peminjamannya, maka semakin menguntungkan, karena berarti pokok dan bunganya akan berlipat-lipat dalam jangka waktu lama. Dalih bahwa bunga utang dari Bank Dunia dan IMF sangat ringan, juga menyesatkan. Saat ini bunga utang komersial di tingkat domestik

negara-negara Barat juga kecil, berkisar antara 2-5%; bahkan di Jepang pernah bunga utang bank komersial sampai minus. Jadi dengan memberikan utang kepada negara-negara berkembang, mereka sebenarnya diuntungkan. Mereka memang harus mencari pasar di luar, karena pasar domestik mereka stagnan. Apalagi dana pensiun dan dana-dana yang parkir dari orang-orang kaya negara berkembang tidak bisa diserap oleh mereka, sehingga mereka harus mencari peminjam di luar negeri mereka. Utang juga menghidupkan perekonomian mereka sendiri, karena berarti terbuka luas order untuk perusahaan-perusahaan di negara maju. Ini karena utang tidak berbentuk tunai dan juga tidak bebas digunakan. Utang adalah in-natura (barang) dan mengikat (tied-aid) dalam arti penggunaannya harus sesuai dengan kepentingan si pemberi pinjaman. Ini berarti supplier-nya harus dari negara pemberi utang, barang-barangnya juga sama, harus dibeli dari negeri si pemberi utang. Begitu pula dengan konsultan-konsultannya, harus dari mereka juga. Jadi utang pada dasarnya memberi kehidupan kepada mereka sendiri. Yang disebut sebagai bantuan atau grant jumlahnya sangat kecil, dan hanya dipakai sebagai "pancingan" atau gula-gula pemikat untuk proyek utang yang lebih besar. Grant juga dipakai untuk memastikan bahwa si penghutang betul-betul akan membayar utangnya. Utang juga tutup mata mengenai korupsi, yang penting "business must go on". Jadi pada dasarnya korupsi direstui, karena mereka terus saja mengucurkan utang, meskipun tahu bahwa setiap tahun uang pinjaman tersebut bocor. Utang dengan demikian adalah sebuah bisnis kotor, dan juga kepanjangan bagi kolonialisme baru.

Contohnya adalah mengenai dana pinjaman yang diorganisir IMF sebesar US\$ 43 milyar, disebutkan sebagian besar akan digunakan untuk membiayai defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran. Ini artinya, menurut Sritua Arief, sebagian besar akan digunakan untuk membiayai kepentingan asing dalam impor, repatriasi keuntungan investasi asing, bunga hutang luar negeri, dan jasa-jasa asing lainnya. Jadi utang ini kembali dinikmati oleh pihak asing dan bebannya ditanggung rakyat Indonesia. Ini sama dengan penggunaan pinjaman dari ADB untuk Indonesia sebesar US\$ 1,5 milyar, di mana sebesar US\$ 1,4 milyar harus digunakan untuk impor. Kata Sritua, "Sungguh ketololan luar biasa jikalau pemerintah Indonesia mengucapkan 'matur nuwun' atau 'hatur nuhun' kepada IMF". Demikian pula keadaan yang sama berlaku untuk pinjaman CGI. Adalah naif pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh pinjaman akan masuk menjadi penerimaan dalam APBN dan akan dikonversikan ke Rupiah sehingga Rupiah membanjir. Sebagaimana diketahui ada tiga komponen pokok dalam pinjaman CGI, yaitu pinjaman program, technical assistance dan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa. Pinjaman program terdiri dari nilai barang-barang keperluan proyek yang diimpor dari negara kreditor, di mana nilai sebenarnya kita tidak tahu. Technical assistance adalah nilai jasa-jasa asing, yaitu para konsultan asing yang bergentayangan di Indonesia dan pembayaran atas jasa-jasa para birokrat asing yang mengelola pinjaman. Sedangkan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa masuk menjadi cadangan pinjaman (borrowed reserve) di Bank Indonesia dan terbenam di sana. Arti ini semua, katanya, adalah Indonesia kembali di bawah kekuasaan asing!

Contoh lain adalah program bail-out (penalangan) utang swasta yang diambil-alih oleh pemerintah, seperti dengan obligasi rekap hasil dari BLBI kepada para konglomerat Indonesia, yang akhirnya berbuah pada utang domestik Indonesia yang menggelembung hingga mencapai Rp 600 triliun sekarang ini. Bayangkan dahsyatnya utang ini. Pada tahun 2038, menurut scenario yang telah diteliti BPPN, maka utang Indonesia akan membengkak menjadi Rp 13.000 triliun! Ini angka fantastis luar biasa, yang bukan pendapatan, tetapi utang. Jadi Indonesia sudah pasti nanti suatu waktu akan bangkrut karena tidak mampu bayar utang dalam negerinya sendiri. Tetapi siapa yang bertanggungjawab? Tidak lain adalah IMF. Mengapa? Karena IMF-lah yang memaksakan diadakannya kebijakan bail-out tersebut. Kebijakan bail-out ini adalah resep generic yang dipaksakan IMF dimana-mana, mulai dari Mexico dan Argentina, sampai Korea dan Thailand. Untuk apa? Untuk membayar utang ke kreditor, yaitu para perbankan asing, lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara kreditor. Sedangkan ini berarti beban dialihkan ke rakyat, mereka tidak mau tahu. Pokoknya piutang mereka selamat. Bisnis mereka tidak terganggu. Inilah inti dari krisis ekonomi sekarang. Bukan problem insolvency (ketidakmampuan membayar), tetapi problem likuiditas (keuangan). Utang membengkak karena anarkisme pasar, yaitu volatilitas pasar uang. Utang jangka pendek tiba-tiba membengkak sehingga tidak mampu dibayar, karena kurs uang mudah digoyang dan dijadikan ajang spekulasi mengeruk keuntungan. Hal ini didiamkan saja oleh

otoritas keuangan dunia, yaitu IMF, bahkan dijaga ketat agar para pemodal tetap bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dengan korban perekonomian kecil-kecil di negara berkembang. IMF memaksakan Obligasi rekap, memaksakan BLBI, memaksakan adanya BPPN; yang kesemuanya untuk melayani dipastikannya membayar utang saja. Sungguh ironis! Privatisasi dilakukan agar mampu membayar utang, bukan untuk menciptakan kesejahteraan. Semua hal dilakukan untuk bayar utang luar negeri dan dalam negeri, tidak lagi untuk pembangunan. Dan pemerintah kita tetap seperti budak hamba sahaya, yang sudah babak belur, masih setia pada tuannya dan tetap menganggap harus terus dengan tuannya itu karena merasa hidupnya bisa selamat. Kezaliman luar biasa bila skenario utang Rp 13.000 trilyun itu didiamkan saja, dan masih saja mau ikut dengan skema IMF itu. Jangan heran, bila tidak lama lagi Indonesia akan default, akan bangkrut, karena tidak mampu membayar, persis sama seperti Mexico atau Argentina; dan setelah itu kita akan menggadaikan negeri ini pada ekonomi asing.

Globalisasi Privatisasi

Bentuk nyata Globalisasi adalah privatisasi. Privatisasi atau swastanisasi secara umum berarti pengalihan BUMN kepada perusahaan swasta. Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan aset publik lewat lelang publik atau penjualan langsung, yaitu termasuk juga berbagai cara lain, seperti pemberian sub-kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen; perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau aset; perjanjian usaha patungan (joint-venture); serta skema BOT (Build-Operate-Transfer). Privatisasi baru berkembang pesat dalam 15 tahun terakhir ini, khususnya setelah Bank Dunia menjalankan program penyesuaian struktural (structural adjustment) dan setelah IMF menjalankan program poverty reduction and growth facility (PRGF) di tahun 1980-an. Kedua lembaga ini menekankan kepada liberalisasi perdagangan, pengurangan defisit anggaran, dan memperbaiki kemampuan pemerintah dalam membayar utang-utangnya. Dari sinilah privatisasi dijadikan sebagai pilihan strategi global; dan sejak itu dijalankan oleh berbagai negara berkembang, khususnya yang menderita ketidakseimbangan ekonomi makro dan terlilit hutang. IMF secara instrumental menerapkannya melalui Letter of Intent, sementara Bank Dunia menyediakan pinjaman khusus untuk proyek-proyek privatisasi lewat asistensi teknis dan finansial.

Privatisasi dalam kenyataannya bukan sekedar mengatasi masalah fiskal, tetapi adalah komponen utama dari sebuah paradigma governance baru, yang disebut neo-liberal: yaitu tuntutan akan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang saat ini dianggap berada di bawah standard dan mengalami tekanan anggaran. Privatisasi adalah paradigma korporatis, berorientasi ke pasar, mencari keuntungan, dan meminimalkan peran negara dalam perekonomian. Dalam prakteknya, privatisasi adalah penjualan aset-aset pemerintah secara murah kepada pihak swasta, bahkan aset yang termasuk hajat hidup publik, seperti air, listrik, jalan raya dan lain-lain. Dalam periode antara tahun 1988-1995 penerimaan pemerintah negara berkembang dari penjualan perusahaan-perusahaan negara berjumlah US\$ 132 milyar, yang berasal dari pengalihan kontrol atas 3.800 perusahaan dari tangan pemerintah kepada swasta. Pada periode yang sama pula terjadi kenaikan jumlah negara yang menjalankan privatisasi, dari 14 negara menjadi 60 negara. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa pada awal 1990-an saja sudah ada 80 negara yang disebut "launched ambitious efforts to privatise their state owned companies", dengan nilai penjualan mencapai US\$ 185 milyar pada tahun 1990. Di Amerika Latin, privatisasi sektor infrastruktur didominasi oleh perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, energi, transportasi dan pengairan. Sedangkan di Asia Tengah dan Eropa Timur, pelepasan kontrol pemerintah banyak terjadi di sektor industri manufaktur, seperti baja dan kimia. Hal lainnya yang terkait, adalah privatisasi mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk merampingkan strukturnya melalui pengurangan staf dan pekerja secara tajam.

Bagi Indonesia privatisasi sudah dijalankan sejak jaman Suharto, yaitu dengan alasan bagi pengikutsertaan pihak swasta di berbagai bidang usaha dalam pengembangan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam kenyataannya privatisasi tersebut dimaksud untuk memfasilitasi penguasaan ekonomi kepada para Konglomerat kroni-kroni Suharto dan kepada perusahaan-perusahaan milik Cendana (keluarga Suharto). Di tahun 1980-an dimulai penerbitan beberapa UU, PP dan Keppres, yaitu: UU No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan; Keppres No. 15 tahun 1987 tentang Jalan Tol; UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi; UU No. 13 tahun 1992 tentang

Perkeretaapian; UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan; dan UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Intinya peraturan-peraturan tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta ikut serta dalam penyelenggaraan jasa di berbagai bidang usaha. Selanjutnya peran swasta asing didorong lebih lanjut lewat PP No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA. Dengan berbagai peraturan yang memudahkan privatisasi tersebut, maka sejak itu berbagai BUMN strategis mulai dikuasai perusahaan asing, seperti dalam kasus Paiton dengan PLN, Palyja dan Thames Jaya dengan PDAM, Cemex dengan Semen Gresik, dan Grosbeak dengan JICT. Ternyata privatisasi tersebut menyebabkan banyak kasus sengketa/ perselisihan antara pihak pemerintah atau Serikat Pekerja di BUMN dengan pihak asing. Demikian pula sejak adanya reformasi, terkuak banyaknya praktek KKN dalam privatisasi tersebut. Oleh karenanya di tahun 1998 dikeluarkan Keppres No. 72 tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi BUMN dengan mencabut Keppres No. 55 tahun 1996 tentang Tim Privatisasi BUMN. Akan tetapi hasil kerja Tim Evaluasi tersebut tidak pernah terdengar.

Akibat krisis ekonomi 1997 yang terus berlanjut, maka Indonesia sudah terjebak hutang dan mengalami krisis utang. Kini berdasarkan conditionalities yang diterapkan oleh Bank Dunia, ADB dan IMF, maka pemerintah diminta untuk menjual 144 BUMN-nya. Privatisasi BUMN masuk di dalam persyaratan pinjaman yang dituntut oleh IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Letter of Intent. Privatisasi di sini diartikan sebagai proses swastanisasi BUMN, di mana pemilikan sahamnya sebagian besar dikuasai oleh swasta atau pengelolaan operasionalnya dilakukan dengan cara kerjasama antara pemerintah dengan investor swasta. Dalam Lol IMF tanggal 15 Januari 1998 butir no. 5 disebutkan bahwa "... the 49 percent limit on foreign holdings of listed shares was abolished". Menyangkut privatisasi perbankan, dalam butir no. 26 disebutkan: "With technical assistance from the World Bank, the government has also taken steps to resolve the problems of the state banks and ensure their safety and soundness. The aim of this program is to improve their efficiency and subsequently privatise them... The state banks will not be recapitalised except in conjunction with privatisation." Sementara poin no. 27 dituntut: "In support of the ultimate goal of full privatisation of all state banks, the government will introduce legislation by the end-June 1998 to amend the Banking law in order to remove the limit on private ownership". Dalam hal sektor listrik, Lol IMF tanggal 14 Mei 1999 butir 37 disebutkan: "the government is overseeing PLN's restructuring effort. A working group of senior government and PLN officials is defining the framework of principles within which PLN conducts the renegotiations of contracts with independent power producers (IPPs) and to ensure that fair, well-structured, and transparent procedures are followed. However, all negotiations with the IPPs are being conducted by PLN on a commercial basis, without direct government involvement".

Tuntutan dari IMF, Bank Dunia dan ADB tersebut pada akhirnya melahirkan Keppres No. 96 tahun 2000. Dalam Keppres tersebut ditetapkan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri, di mana dibagi ke dalam dua kelompok: (a) kepemilikan saham warga negara / Badan Hukum Asing maksimal sebesar 95%; dan (b) kepemilikan saham warga negara / Badan Hukum Asing maksimal sebesar 45%. Dari daftar itu, hanya tinggal dua bidang usaha yang masih terlindungi dalam arti saham asing dibatasi maksimal 45%, yaitu bidang usaha telekomunikasi dan angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal. Bidang-bidang lain sudah terbuka untuk dikuasai badan asing, meskipun itu menyangkut bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak sekalipun. Keppres no. 96 tahun 2000 ini adalah dasar dari dijalankannya privatisasi BUMN di Indonesia saat ini. Peraturan terakhir ini dengan sendirinya telah menabrak UUD 1945 pasal 33 yang dalam penjelasannya menyebutkan: "Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang". Demikian pula dalam UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) tetap jelas dinyatakan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh, yaitu bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut pasal 6 UU PMA tersebut adalah sebagai berikut: (1) pelabuhan-pelabuhan; (2) produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; (3) telekomunikasi; (4) pelayaran; (5) penerbangan; (6) air minum; (7) kereta api umum; (8) pembangkit tenaga atom; (9) media massa; (10) dan bidang-bidang yang meduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Dalam perkembangannya, pemerintahan Megawati kembali membentuk Kementerian Pendayagunaan BUMN, dengan target-target sebagaimana yang dikehendaki di dalam Lol IMF tanggal 27 Agustus 2001 pada butir 6, yaitu "Pemerintah berupaya melaksanakan program privatisasi yang telah disusun dengan persetujuan DPR. Program privatisasi tahun 2001 telah dipublikasikan 6 Agustus 2001 dan diharapkan menghasilkan Rp 6,5 trilyun. Pemerintah akan memusatkan privatisasi pada perusahaan di bidang telekomunikasi, industri, transportasi, dan pertanian". Nyatanya program privatisasi tahun 2001 kembali nihil. Ini tidak lepas dari adanya tentangan di masyarakat, baik itu yang berasal dari kalangan status-quo yang merasa terancam posisinya, kalangan pekerja yang terancam dengan PHK, kalangan masyarakat daerah yang merasa asset BUMN-nya bisa hilang, kalangan ornop yang selalu menyuarakan penentangannya terhadap ide privatisasi dan berbagai kalangan lain di masyarakat. Ini merupakan kekuatan beragam di masyarakat yang tidak menghendaki adanya privatisasi.

Globalisasi Perdagangan

Isu-isu perdagangan global akhir-akhir ini semakin menonjol, terutama setelah Konferensi WTO ke-III di Seattle tahun 1999. Kenyataannya, perdagangan yang diatur oleh GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) dengan yang sekarang diatur oleh WTO (World Trade Organization) mengalami perubahan luar biasa. Perdagangan yang diatur oleh WTO sejak berdirinya, 1994, merambah ke bidang-bidang non-perdagangan. Ini dapat dilihat dari adanya TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property's Rights), TRIMS (Trade Related Investment Measures), AOA (Agreement on Agriculture) maupun New Issues yang sejak Konferensi WTO I di Singapura, terus menerus coba dipaksakan oleh negara maju, yaitu Government Procurement (Belanja Pemerintah), Investasi, Competition Policy (Kebijakan Persaingan), Lingkungan Hidup dan Perburuhan.

Dengan melebarnya lingkup kerja WTO, ditambah dengan kekuatan legal binding dari agreements yang dihasilkannya, membuat WTO menjadi lembaga dunia yang sangat berkuasa. Para anggota WTO kini harus tunduk sepenuhnya pada agreements tersebut yang intinya membuat mereka harus meliberalisasikan perekonomiannya secara terjadual, disiplin, mengikat, progresif dan total. Ini membuat ekonomi negara berkembang harus menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonominya kepada mekanisme pasar bebas dan liberalisme ekonomi. Tidak ada lagi kebebasan dan kemandirian untuk merancang dan menyusun sendiri model perekonomiannya yang cocok dengan situasi dan kondisi negaranya masing-masing. Di lain pihak, berbagai implementasi agreements tersebut kenyataannya lebih banyak merugikan negara berkembang dan sementara itu sangat sulit untuk diterapkan. Ini akan memposisikan mereka dalam keadaan kalah dan lemah dalam menghadapi perekonomian negara maju. Hal ini nampak dari ketidakpuasan para delegasi negara berkembang di dalam Konferensi WTO III di Seattle tahun 1999 dan Konferensi WTO IV di Doha, Qatar tahun 2001 yang lalu.

Perundingan-perundingan yang terus berlangsung hingga kini, nampaknya tidak membawa banyak kemajuan. Apa yang terjadi di WTO telah membawa kepada dimensi internasional baru, yaitu kesadaran akan ketimpangan dan ketidakadilan di WTO. Kekritisan orang terhadap WTO kini mulai terbuka, berkat perlawanan terus menerus masyarakat sipil internasional terhadap WTO dan terhadap agen-agen globalisasi lainnya. WTO adalah bukan sekedar masalah perdagangan global, melainkan masalah power dan dominasi negara maju ke negara berkembang.

Implementasi WTO menggambarkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan yang semakin lebar antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan miskin (LDC). Negara berkembang meminta adanya tinjauan atas implementasi yang ada, sehingga di dapat kesimpulan bagi pembenahan-pembenahan. Akan tetapi hal tersebut selalu ditolak oleh negara-negara maju. Implementasi yang terjadi bahkan menunjukkan kecurangan-kecurangan dari negara maju. Hal ini nampak dalam berbagai negosiasi, klausul dan aturan-aturan yang pada kenyataannya hanya menguntungkan negara maju dan memberi jalan bagi kepentingan bisnis dan korporasi-korporasi raksasa di negara maju. Berbagai manuver dan move terus menerus diupayakan negara maju yang semakin mengarah pada ketidak-seimbangan luar biasa dan gap disparitas yang semakin melebar.[]



BAGIAN KEDUABELAS

DISKURSUS ANALISIS SOSIAL DAN STRATEGI GERAKAN SOSIAL



Paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Berkembangnya suatu paradigma erat kaitannya dengan seberapa jauh suatu paradigma mampu melakukan konsolidasi dan mendapat dukungan dari berbagai usaha seperti penelitian, penerbitan, pengembangan, dan penerapan kurikulum oleh masyarakat ilmiah pendukungnya. Oleh karena itu, untuk memahami berkembang maupun runtuhnya suatu teori perubahan sosial dan pembangunan erat kaitannya dengan persoalan yang dihadapi oleh paradigma masing-masing yang menjadi landasan teori tersebut. Analisa sosial merupakan upaya untuk mengurai logika, nalar, struktur, atau kepentingan dibalik sebuah fenomena sosial. Analisa sosial bukan semata deskripsi sosiologis dari sebuah fenomena sosial. Analisa sosial hendak menangkap logika struktural atau nalar dibalik sebuah gejala sosial. Analisa sosial dengan demikian material, empiris, dan bukan sebaliknya, mistis, atau spiritualistik. Analisa sosial menafsirkan gejala sosial sebagai gejala material. Kekuatan dan gagasan ideologis dibalik gejala sosial harus dianalisa.

Hand-Out 52
PETA ANALISIS SOSIAL
Uraian tentang Paradigma Sosiologi, Teori Perubahan Sosial,
Langkah Praxis Analisis Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat

Prawacana

Sebelum dibahas lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya mengenai berbagai aliran ideologi dan keyakinan serta teori tentang perubahan sosial dan kritik pembangunan, maka terlebih dahulu dalam bagian ini diuraikan dan dijelaskan mengenai apa latar belakang yang mempengaruhi terbentuknya teori-teori tersebut. Salah satu dari banyak hal yang sangat mempengaruhi dan membentuk suatu teori adalah apa yang dikenal dengan istilah paradigma (*paradigm*). Untuk itu uraian pada bagian kedua buku ini akan memfokuskan pembahasan untuk memahami apa yang sesungguhnya dimaksud dengan paradigma, mengapa dan bagaimana suatu paradigma terbentuk, serta apa pengaruh paradigma terhadap terbentuknya teori-teori perubahan sosial dan praktik pembangunan. Pembahasan mengenai masalah paradigma ini perlu dilakukan mengingat pentingnya paradigma dalam membentuk dan mempengaruhi teori maupun analisis seseorang. Pada dasarnya tidak ada suatu pandangan atau teori sosial pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan salah satunya bergantung pada paradigma yang dipergunakan. Namun, sebelum melangkah lebih lanjut, uraian ini akan dimulai dengan menjawab pertanyaan dasar apa sesungguhnya yang dimaksud dengan paradigma itu?

Sebagaimana diuraikan Mansour Faqih²⁰⁷, paradigma secara sederhana dapat diartikan bagai kacamata atau alat pandang. Namun, pengertian yang lebih akademis dapat dipahami dari beberapa pemikiran yang akan diuraikan berikut. Pada dasarnya, istilah paradigma menjadi sangat terkenal justru setelah Thomas Khun menulis karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Dalam buku itu Khun menjelaskan tentang model bagaimana suatu aliran teori ilmu lahir dan berkembang menurutnya disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma, di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh pandangan teori yang lain. Paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Berkembangnya suatu paradigma erat kaitannya dengan seberapa jauh suatu paradigma mampu melakukan konsolidasi dan mendapat dukungan dari berbagai usaha seperti penelitian, penerbitan, pengembangan, dan penerapan kurikulum oleh masyarakat ilmiah pendukungnya. Oleh karena itu, untuk memahami berkembang maupun runtuhnya suatu teori perubahan sosial dan pembangunan erat kaitannya dengan persoalan yang dihadapi oleh paradigma masing-masing yang menjadi landasan teori tersebut.

Selain Khun, peneliti pemikir lain seperti Patton (1975) juga memberikan pengertian paradigma yang tidak jauh dengan apa yang didefinisikan oleh Khun, yakni sebagai *"a world view, a general perspective, a way of breaking down the complexity of the real world"*²⁰⁸. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, selain dipergunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. Konstelasi ini dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaan sosial, untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial.²⁰⁹ Paradigma merupakan tempat kita berpijak dalam melihat suatu realitas. Justru kekuatan sebuah paradigma terletak pada kemampuannya membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat sesuatu, apa yang kita anggap masalah, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta apa metode yang kita gunakan dalam meneliti dan berbuat. Paradigma, sebaliknya, mempengaruhi apa yang tidak kita pilih, tidak ingin kita lihat, dan tidak ingin kita ketahui.²¹⁰ Oleh karena itu, jika ada dua orang

²⁰⁷ Mansour Faqih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press, Cet. I., 2001) h. 17-43.

²⁰⁸ Lihat: Michael Quin Patton, *Alternative Evaluation Research Paradigm*. Grand Forks: University North Dakota, 1970.

²⁰⁹ Definisi ini meminjam uraian Popkewitz. Lihat Popkewitz, Thomas. *Paradigm and Ideology in Educational Research*. New York: Palmer Press, 1984.

²¹⁰ Thomas Khun (1970) dikenal orang pertama yang membuat terkenal istilah paradigma. Ia tertarik pada perkembangan dan revolusi ilmu pengetahuan, dengan menganalisis hubungan antara berbagai paradigma dan penelitian

melihat suatu realitas sosial yang sama, atau membaca ayat dari sebuah kitab suci yang sama, akan menghasilkan pandangan berbeda, menjatuhkan penilaian dan sikap yang berbeda pula. Paradigma pulalah yang akan mempengaruhi pandangan seseorang tentang apa yang "*adil dan yang tidak adil*", bahkan paradigma mempengaruhi pandangan seseorang ataupun teori tentang baik buruknya suatu program kegiatan. Misalnya saja hubungan lelaki perempuan pada suatu masyarakat, atau hubungan antara majikan dan buruh, oleh suatu paradigma pemikiran disebutkan sebagai "*harmonis saling membantu*" dan tidak ada masalah, oleh paradigma yang lain, akan dilihat sebagai hubungan hegemonik, dominasi gender ataupun bahkan dianggap eksploitatif. Dalam hal perbedaan paradigma seperti itu, tidak relevan membicarakan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena masing-masing menggunakan alasan, nilai, semangat, dan visi yang berbeda tentang fenomena tersebut.

Oleh karena itu, dominasi suatu paradigma terhadap paradigma yang lain sesungguhnya bukanlah karena urusan "salah atau benar, yakni yang benar akan memenangkan paradigma yang lain. Ritzer (1975) mengungkapkan bahwa kemenangan satu paradigma atas paradigma yang lain lebih disebabkan karena para pendukung paradigma yang menang ini lebih memiliki kekuatan dan kekuasaan (*power*) dari pengikut paradigma yang dikalahkan, dan sekali lagi bukan karena paradigma yang menang tersebut lebih benar atau 'lebih baik dari yang dikalahkan'.²¹¹ Demikian halnya dalam memahami dipilihnya atau diterapkannya suatu aliran teori perubahan sosial maupun pembangunan juga erat kaitannya dengan kekuasaan penganut paradigma perubahan sosial yang bersangkutan untuk memenangkannya. Dengan demikian, dominasi atau berkuasanya suatu teori perubahan sosial ataupun teori pembangunan, adalah lebih karena teori tersebut yang merupakan hasil atau dibentuk oleh suatu paradigma tertentu, ada kaitannya dengan kekuatan dan kekuasaan bagi penganut teori tersebut, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kebenaran teori tersebut. Lantas pertanyaannya mengapa dan bagaimana kita harus memilih satu paradigma atau teori perubahan sosial tertentu?

Meskipun penjelasan Kuhn sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana paradigma mempengaruhi terciptanya teori, tetapi penjelasan Kuhn tentang proses pergantian paradigma menurutnya berjalan secara revolusioner. Dengan kata lain, bergantinya suatu paradigma melalui pergantian, paradigma lama mati dan diganti oleh paradigma baru. Penjelasan mengenai pergantian paradigma ini sudah banyak dibantah orang. Dalam kenyataannya telah terjadi berbagai fenomena yang tidak dibayangkan oleh Kuhn dalam teorinya. Pertama telah terjadi pluralitas dan konvergensi teori. Kuhn berpendapat bahwa paradigma akan selalu menggantikan posisi paradigma lama, dan jika tidak, para ilmuwan tidak memiliki kerangka kerja yang mapan. Dalam ilmu alam, pandangan seperti ini memang terjadi. Namun, dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial menunjukkan kecenderungan semakin menguatnya pertikaian antar paradigma, atau bahkan terjadi dialog antara dua paradigma atau lebih pada era yang sama. Bahkan, proses teori pada dasarnya adalah terjadinya saling dialog antar teori dan proses kemampuan teori untuk menyesuaikan diri. Marxisme, misalnya, telah berkembang setelah berdialog dengan semakin canggihnya kapitalisme. Sebaliknya, terjadi penguatan gejala dimana teori-teori sosial yang bersandar pada keyakinan kapitalisme berkembang ke arah penyesuaian diri terhadap kritik. Dalam perkembangan Marxisme, misalnya, perkembangan dan kritik interen terhadap praktik perkembangannya, hal ini menghasilkan masuknya analisis hegemoni kultur dan ideologi dalam Marxisme, sesuatu yang membuat analisis Marxisme saat ini telah bergeser dari pikiran Marx pertama kali yang lebih memfokuskan pada analisis ekonomi. Demikian halnya maraknya perkembangan teologi pembebasan (*liberation theology*) di Amerika Latin dan tempat-tempat lain adalah suatu adaptasi akibat dari suatu dialog paradigma. Demikian halnya, perkembangan paham dan teori kapitalisme dalam perkembangannya hingga seperti saat ini justru belajar dan mendapat keuntungan dari kritik yang dilakukan oleh teori Marxisme. Kapitalisme sesungguhnya banyak belajar dan menyesuaikan diri karena mendapat kritikan dari Marxisme.

ilmiah. Untuk uraian mengenai paradigma lihat: Thomas Kuhn. *The Structures of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.

²¹¹ Lihat Ritzer, "Sociology: A Multiple Paradigm Science" dalam *Jurnal The American Sociologist* No. 10, 1975. hal: 156-157.

Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa manfaat dan sikap yang diperlukan dalam memahami paradigma sosial. Pada dasarnya memahami paradigma dan teori perubahan sosial seharusnya tidak sekedar untuk mempelajari dan memahaminya. Suatu teori ataupun paradigma dipelajari dan dipahami dalam rangka menegakkan komitmen untuk suatu proses emansipasi, keadilan sosial dan transformasi sosial. Persoalan pilihan terhadap paradigma dan teori perubahan sosial maupun teori pembangunan pada dasarnya bukanlah karena alasan benar dan salahnya teori tersebut, pilihan suatu teori lebih karena dikaitkan dengan persoalan mana teori yang akan berakibat pada penciptaan emansipasi dan penciptaan hubungan-hubungan dan struktur yang secara mendasar lebih baik. Oleh karena itu, memilih paradigma dan teori perubahan sosial adalah suatu pemihakan dan berdasarkan nilai-nilai tertentu yang dianut. Pertanyaan yang penting diajukan di sini adalah siapa dan dengan tujuan apa sesungguhnya kegiatan dan aksi kita diabdikan? Masalah siapa yang ingin kita pecahkan melalui aksi dan program kegiatan kita? Jadi, masalahnya bukanlah apakah kita harus memihak, karena pemihakan adalah mustahil untuk dapat dihindarkan bagi semua teori perubahan sosial dan teori pembangunan, tetapi masalahnya adalah kepada siapa atau kepada apa pemihakan tersebut diabdikan.²¹² Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan pemahaman paradigma sosiologi yang menjadi kacamata dan dasar bertindak dibalik setiap teori perubahan sosial maupun pembangunan.

BAGIAN I

Paradigma-paradigma Ilmu-ilmu Sosial

Untuk memberikan bingkai bagaimana memahami teori perubahan sosial, termasuk di dalamnya teori pembangunan, kita perlu mengenal peta paradigma dalam ilmu sosial. Ada beberapa peta pendekatan yang telah dihasilkan oleh para ahli ilmu sosial. Dalam rangka itu, berikut diuraikan beberapa model paradigma dalam melihat masalah sosial. Pertama adalah model pemetaan paradigma sosial yang diuraikan oleh salah seorang penganut mazhab Frankfurt, terutama Jurgen Habermas. Model pembagian paradigma kedua adalah dengan mengikuti tokoh pemikir pendidikan kritis asal Brazil, Paulo Freire. Sedangkan model ketiga adalah peta paradigma sosiologi yang dibuat oleh Barnet dan Morgan (1979).

Ilmu Sosial Paradigma Dominatif Lawan Emansipatoris

Meminjam analisis Habermas yang secara sederhana membagi paradigma ilmu-ilmu sosial menjadi tiga paradigma, dapat digunakan untuk memahami suatu sudut perbedaan paradigma dalam ilmu-ilmu sosial. Habermas pada dasarnya membagi paradigma ilmu sosial dalam pembagian yang secara sederhana dapat dipahami sebagai berikut. Menurutnya ilmu sosial dapat dibedakan menjadi tiga paradigma yang dapat secara sederhana diuraikan sebagai berikut;

Pertama, yang disebutnya sebagai *instrumental knowledge*. Dalam perspektif paradigma '*instrumental*' ini, pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi objeknya. Yang dimaksud Habermas dengan paradigma pengetahuan instrumental ini sesungguhnya adalah *paradigma positivisme*. *Positivisme* pada dasarnya adalah ilmu sosial yang dipinjam dari pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Positivisme adalah aliran filsafat yang berakar pada tradisi ilmu sosial yang dikembangkan dengan mengambil cara ilmu alam menguasai benda, yakni dengan kepercayaan adanya *universalisme* dan *generalisasi*, melalui metode determinasi, *fixed law* atau kumpulan hukum teori (Schoyer, 1973). Positivisme berasumsi bahwa penjelasan sifat universal, artinya cocok atau *appropriate* untuk semua, kapan saja, di mana saja suatu fenomena sosial. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa riset sosial harus didekati dengan metode ilmiah, yakni obyektivitas, netral, dan bebas nilai. Pengetahuan selalu menganut hukum ilmiah yang bersifat universal, prosedur harus dikuantifikasi dan diverifikasi dengan metode scientific atau ilmiah. Dengan kata lain, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dan nilai (*values*) dalam rangka menuju pemahaman objektif atas realitas sosial.

²¹² Pertanyaan ini kami adaptasi dan pinjam dari Becker, yang membahas tentang pilihan-pilihan dalam paradigma dan teori penelitian. Lihat tulisan Becker, "*Whose side are we on?*" dalam buku yang di edit oleh W.J. Fiske (Ed.). *Qualitative Methodology* Chicago: Markham, 1970.

Sebutan "*kaum positivist*" berkesan sentimen dan merupakan diskursus yang di dalamnya memuat suatu strategi daripada mengacu pada pengertian bahasa yang mendalam dan bermanfaat untuk menjelaskan kata positif lawan yang negatif dari konsep itu. Istilah itu digunakan untuk mengacu pada suatu sikap dan pendirian epistemologis tertentu. Positivisme sering dicampuradukkan dengan '*empirisme*' sehingga membuat rancu beberapa pengertian pokoknya. Pendirian epistemologis kaum positivis kalau ditelaah lebih dalam didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam "ilmu alam," atau dengan kata lain, lebih jelas dapat dikatakan bahwa ilmu sosial positivistik, pada dasarnya meminjam cara, metodologi, sikap dan visi bagaimana ilmu alam menghadapi objek studi mereka yakni benda dan fenomena alam. Perbedaan utamanya terletak pada istilah yang digunakan dan objek yang dihadapi. Dalam ilmu alam objeknya adalah benda dan fenomena alam, sedangkan positivisme memberlakukan masyarakat atau manusia seperti ilmu alam memperlakukan benda dan fenomena alam. Tatanan sosial dapat dibuktikan kebenarannya melalui penelitian eksperimental, atau laboratorium, meskipun sering terjadi hipotesis keliru yang tak pernah dapat dibuktikan kebenarannya. Kaum *verifikasionis* (membuktikan kebenaran, dan *falsifikasionis* (membuktikan kekeliruan) hipotesis tentang tatanan sosial, sependapat bahwa pengetahuan hakikatnya merupakan proses akumulasi di mana pemahaman baru diperoleh sebagai tambahan atas kumpulan pengetahuan atau penghapusan atas hipotesis salah yang pernah ada.

Dengan pendekatan seperti itu, ilmu sosial dengan paradigma positivisme lebih mensyaratkan sikap-sikap tertentu yang tercermin dalam metodologi dan teknik kajian mereka. Di antara banyak sikap yang kemudian disebutkan sebagai sikap "ilmiah" tersebut adalah bahwa ilmu sosial dan penelitian sosial haruslah bersikap netral dan tidak memihak. Selain itu, ilmu sosial bagi paradigma positivisme juga tidak boleh bersifat subjektif, melainkan harus objektif, rasional, tidak boleh emosional, komitmen dan empati. Ilmu sosial juga harus mampu menjaga jarak (*detachment*) terhadap objek studi dan hasil kajian, bersikap universal, dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja.

Untuk memahami lebih lanjut pendirian paradigma positivisme, kita dapat memahaminya melalui pendirian teori-teori anti-positivisme. Meskipun epistemologis kaum antipositivis beragam jenisnya, semuanya tidak menerima berlakunya kaidah-kaidah universalitas, bahwa yang terjadi pada suatu tatanan sosial tertentu tidak secara serta merta akan berlaku pada semua tatanan atau peristiwa sosial. Realitas sosial adalah nisbi, hanya dapat dipahami dari pandangan orang per orang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial tertentu. Mereka menolak kedudukan sebagai '*peneliti* dan *pengamat*' atau pengembang masyarakat ahli luar seperti layaknya kedudukan kaum positivis. Seorang hanya bisa "*mengerti*" dengan '*memasuki*' kerangka pikir orang yang terlibat langsung atau diri mereka sendiri sebagai peserta atau pelaku dalam tindakan. Seseorang hanya mengerti dari sisi dalam, bukan dari luar realitas sosial, betapa pun ahlinya karena ilmu sosial bersifat subjektif, dan menolak anggapan bahwa ilmu pengetahuan dapat ditemukan sebagai pengetahuan objektif.

Kalau kita pelajari secara mendalam, sesungguhnya ada dua tradisi pemikiran besar yang mewamai perkembangan ilmu dan analisis sosial selama lebih dari dua ratus tahun terakhir, yakni pertikaian antara positivisme dan idealisme Jerman. Aliran ini mewakili pandangan yang berusaha menerapkan cara dan bentuk penelitian alam ke dalam pengkajian peristiwa kemanusiaan. Realitas sosial disamakan dengan realitas alam. Dengan meniru kaum realis dalam ontologinya, epistemologi kaum positivis, pandangan deterministik mengenai sifat manusia dan nomotetis metodologinya. Sementara itu, lawannya adalah tradisi "idealisme Jerman". Aliran ini menyatakan bahwa realitas tertinggi bukan kenyataan lahir yang dapat dilihat indera, tetapi justru pada "ruh" atau gagasan". Oleh karena itu epistemologi mereka anti-positivis di mana sifat subjektivitas dari peristiwa kemanusiaan lebih penting dan menolak cara dan bentuk penelitian ilmu alam.

Kedua, adalah paradigma interpretative. Latar belakang perkembangan paradigma interpretatif ini dapat ditelusuri dari pergumulan dalam teori ilmu sosial sebelum tahun 1970 ketika telah mulai berkembang suatu tradisi besar terutama di bidang filsafat sosial dengan munculnya fenomenologi, etnometodologi dan teori-teori aksi. Aliran-aliran filsafat sosial ini selain menyatakan pendiriannya sendiri sering juga menentang aliran sosiologi positivisme. Aliran-aliran ini dapat dipahami dengan baik dengan mengenali perbedaan-perbedaan anggapan dasarnya masing-masing. Aliran *hermeneutic knowledge* atau juga dikenal dengan *paradigma interpretative*, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pengetahuan dan khususnya ilmu-ilmu sosial dan penelitian sosial dalam

paradigma ini 'hanya' dimaksud untuk memahami secara sungguh-sungguh. Dasar filsafat paradigma interpretative adalah phenomenology dan hermeneutics, yaitu tradisi filsafat yang lebih menekankan minat yang besar untuk memahami. Semboyan yang terkenal dari tradisi ini adalah "*biarkan fakta bicara atas nama dirinya sendiri*". Namun dalam paradigma ini pengetahuan tidak dimaksudkan sebagai proses yang membebaskan. Misalnya saja yang termasuk dalam paradigma ini adalah ethnography dalam tradisi kalangan antropolog.

Ketiga, adalah paradigma yang disebut sebagai "*paradigma kritik*" atau *critical/emancipatory knowledge*. Ilmu sosial dalam paradigma ini lebih dipahami sebagai proses *katalisasi* untuk membebaskan manusia dari segenap ketidakadilan. Melalui kritik yang mendasar terhadap ilmu sosial yang mendominasi (*instrumental knowledge*), paradigma kritis ini menganjurkan bahwa ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu sosial tidak boleh dan tidak mungkin bersifat netral. Paradigma kritis memperjuangkan pendekatan yang bersifat holistik, serta menghindari cara berpikir deterministik dan reduksionistik. Oleh sebab itu, mereka selalu melihat realitas sosial dalam perspektif kesejarahan. Paradigma kritis tidak hanya terlibat dalam teori yang spekulatif atau abstrak, tetapi lebih dikaitkan dengan pemihakan dan upaya emansipasi masyarakat dalam pengalaman kehidupan mereka sehari-hari.

Implikasi dari kritik paradigma ini terhadap positivisme menyadarkan kita akan perlunya perenungan tentang moralitas ilmu dan penelitian sosial. Oleh karena teori dan penelitian sosial begitu berpengaruh terhadap praktik perubahan sosial seperti program pembangunan, maka paradigma ilmu dan penelitian sosial adalah faktor penting yang menentukan arah perubahan sosial. Itulah mengapa paradigma kritik selalu mempertanyakan "mengapa rakyat dalam perubahan sosial" selalu diletakkan sebagai *passive objects* untuk diteliti, dan selalu menjadi objek "*rekayasa sosial*" bagi penganut positivisme. Positivisme percaya bahwa rakyat tidak mampu memecahkan masalah mereka sendiri. Perubahan sosial harus didesain oleh ahli, perencana yang bukan rakyat, kemudian dilaksanakan oleh para teknisi. Rakyat dalam hal ini dilihat sebagai masalah dan hanya para ahli yang berhak untuk memecahkannya.

Sebaliknya, pandangan paradigma kritik justru menempatkan rakyat sebagai subjek utama perubahan sosial. Rakyat harus diletakkan sebagai pusat proses perubahan dan penciptaan maupun dalam mengontrol pengetahuan mereka. Inilah yang menjadi dasar sumbangan teoretik terhadap perkembangan participatory research. Kritik terhadap positivisme dilontarkan karena pengetahuan tersebut menciptakan dominasi yang irasional dalam masyarakat modern. Ilmu sosial harus mampu memungkinkan setiap orang untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya. Pemikiran tersebut mempengaruhi arah ilmu sosial kritis yang menekankan pentingnya subjektivitas manusia, pemihakan dan kesadaran dalam proses membangun teori. Paradigma kritis inilah yang memberikan legitimasi terhadap ilmu sosial pembebasan, yang tadinya dianggap 'tidak ilmiah' tersebut. Itulah sebabnya paradigma kritik sekaligus merupakan kritik terhadap paradigma dominasi dan interpretasi.

Dengan kerangka peta pembagian paradigma seperti itu, kita dapat memahami dan menyadari segenap perkembangan, asumsi, dan konflik antar berbagai teori perubahan sosial dan kritik terhadap teori-teori pembangunan yang menjadi fokus utama pembahasan-pembahasan dalam berbagai uraian pada bagian-bagian berikutnya.

Dari Paradigma Reformasi ke Transformasi: Peta Kesadaran Freire

Arena perbedaan paradigma yang lain yang juga berpengaruh dalam perkembangan dan kajian teori perubahan sosial dan teori pembangunan adalah dengan meminjam pembagian paradigma yang dikembangkan oleh Paulo Freire. Ketika Freire (1970) menerbitkan buku *Pedagogy of the Oppressed* yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris tahun 1970, umumnya orang menyangka bahwa ia sedang melakukan kritik terhadap dunia pendidikan. Namun, dengan membaca karya Freire lainnya, terutama mendengar dialognya dengan tokoh *social movement* Amerika Serikat, Miles Horton, yang dibukukan dengan judul *We Making the Road by Walking* (1990), orang baru sadar bahwa Freire sedang berbicara soal yang lebih luas dari dunia pendidikan yakni mengenai paradigma perubahan sosial. Dia mengakui sangat dipengaruhi oleh Gramsci, seorang pemikir kebudayaan yang radikal yang pertama kali mengupas bahwa sesungguhnya peperangan yang terpenting pada abad modern ini adalah ideologi, yang disebutnya sebagai proses

'hegemony'. Dari situlah orang baru menyadari bahwa Freire sedang membicarakan pendidikan dalam kaitannya dengan struktur dan sistem budaya, ekonomi, dan politik yang lebih luas.

Tugas teori sosial menurut Freire adalah melakukan apa yang disebutnya sebagai *conscientizacao* atau proses penyadaran terhadap sistem dan struktur yang menindas, yakni suatu sistem dan struktur. Proses dehumanisasi yang membunuh kemanusiaan. Gramsci menyebut proses ini sebagai upaya *counter hegemony*. Proses dehumanisasi tersebut terselenggara melalui mekanisme kekerasan, baik yang fisik dan dipaksakan, maupun melalui cara penjinakan yang halus, yang keduanya bersifat struktural dan sistemik. Artinya kekerasan dehumanisasi tidak selalu berbentuk jelas dan mudah dikenali. Kemiskinan struktural, misalnya, pada dasarnya adalah suatu bentuk kekerasan yang memerlukan analisis untuk menyadarinya. Bahkan, kekerasan sebagian besar terselenggara melalui proses hegemoni: cara pandang, cara berfikir, ideologi, kebudayaan, bahkan selera, golongan yang mendominasi telah dipengaruhi dan diterima oleh golongan yang didominasi. Dengan begitu, pendidikan dan ilmu pengetahuan, sebagaimana kesenian, bukanlah arena netral tentang estetika belaka. Kesenian dan kebudayaan tidaklah berada dalam ruang dan masa yang steril, melainkan dalam sistem dan struktur yang bersifat hegemonik.

Freire (1970) membagi ideologi teori sosial dalam tiga kerangka besar yang didasarkan pada pandangannya terhadap tingkat kesadaran masyarakat.²¹³ Tema pokok gagasan Freire pada dasarnya mengacu pada suatu landasan bahwa pendidikan adalah "*proses memanusiakan manusia kembali*". Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, menjadikan masyarakat mengalami proses '*dehumanisasi*'. Pendidikan, sebagai bagian dari sistem masyarakat, justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi tersebut. Secara lebih rinci Freire menjelaskan proses dehumanisasi tersebut dengan menganalisis tentang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (*magical consciousness*), kesadaran naif (*naïval consciousness*) dan kesadaran kritis (*critical consciousness*). Bagaimana kesadaran tersebut dan kaitannya dengan sistem pendidikan dapat secara sederhana diuraikan sebagai berikut.²¹⁴

Pertama, *kesadaran magis*, yakni suatu keadaan kesadaran, suatu teori perubahan sosial yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya saja suatu teori yang percaya akan adanya masyarakat miskin yang tidak mampu, kaitan kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih mengarahkan penyebab masalah dan ketakberdayaan masyarakat dengan faktor-faktor di luar manusia, baik *natural* maupun *super natural*. Dalam teori perubahan sosial jika proses analisis teori tersebut tidak mampu mengaitkan antara sebab dan musabab suatu masalah sosial, proses analisis teori sosial tersebut dalam perspektif Freirean disebut sebagai teori sosial *fatalistik*. Suatu teori sosial bisa dikategorikan dalam model pertama ini jika teori yang dimaksud tidak memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap satu permasalahan masyarakat. Masyarakat secara dogmatik menerima 'kebenaran' dari teoretisi sosial tanpa ada mekanisme untuk memahami 'makna' ideologi setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

Yang *kedua* adalah apa yang disebutnya sebagai "*Kesadaran Naif*". Keadaan yang dikategorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat 'aspek manusia' sebagai akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini 'masalah etika, kreativitas, '*need for achievement*' dianggap sebagai penentu dalam perubahan sosial. Jadi, dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi analisis kesadaran ini, adalah disebabkan oleh kesalahan masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki jiwa kewiraswastaan, atau tidak memiliki budaya 'pembangunan', dan seterusnya.²¹⁵ Oleh karena itu, *man power development* adalah sesuatu yang diharapkan, akan

²¹³ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Praeger, 1986.

²¹⁴ Lihat Smith, *Themaning of Conscientacao: The Goal of Paulo Freire's Pedagogy* Amherst: Center for International Education, UMASS, 1976.

²¹⁵ Pemikiran yang bisa dikategorikan dalam analisis ini adalah para penganut modernisasi dan developmentalisme. Paham modernisasi selanjutnya menjadi aliran yang dominan dalam ilmu-ilmu sosial. Misalnya saja dalam antropologi, pikiran Kuncaraningrat tentang budaya pembangunan sangat berpengaruh bagi kalangan akademik dan birokrat. Paham modernisasi juga '*berpengaruh*' dalam pemikiran Islam di Indonesia. Adanya yang salah dalam teologi fatalistik yang dianut umat Islam dianggap sebagai penyebab keterbelakangan. Asumsi itu dianut oleh kaum modernis sejak Muhammad Abduh atau Jamaluddin Afgani sampai kelompok pembaharu saat ini seperti Nurcholish Madjid c.s. Lihat: Dr. Harun Nasution,

menjadi pemicu perubahan. Teori perubahan sosial dalam konteks ini berarti suatu teori yang tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik dan benar, merupakan faktor given dan, oleh sebab itu, tidak perlu dipertanyakan. Tugas teori sosial adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut. Paradigma inilah yang dikategorikan sebagai paradigma perubahan yang bersifat reformatif dan bukanlah paham perubahan yang bersifat transformatif.

Kesadaran *ketiga* adalah yang disebut sebagai kesadaran kritis. Kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari *blaming the victims* dan lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan bagaimana kaitan tersebut berakibat pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam teori perubahan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi 'ketidakadilan' dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas teori sosial dalam paradigma kritis adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar masyarakat terlibat dalam suatu proses dialog "penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik atau lebih adil". Kesadaran ini pula yang disebut sebagai kesadaran transformatif.

Diagram 1

Peta analisis kesadaran masyarakat, Paulo Freire (1970)

KESADARAN MAGIS	KESADARAN NAIIF	KESADARAN KRITIS
Magical Consciousness	Naïval Consciousness	Critical Consciousness
Perubahan sosial ditentukan oleh: NATURAL, SUPERNATURAL	Perubahan sosial ditentukan oleh: ETIKA, KREATIFITAS, NEED FOR ACHIEVEMENT	Perubahan sosial ditentukan oleh: SISTEM SOSIAL, EKONOMI, POLITIK & BUDAYA
Berimplikasi pada: Kesadaran Fatalistik	Berimplikasi pada: Kesadaran Reformatif	Berimplikasi pada: Kesadaran Transformatif

Dengan menggunakan paradigma yang dikembangkan Freire ini membantu kita untuk dapat memahami bagaimana logika berbagai teori sosial yang akan dibahas dikembangkan. Dengan demikian, teori modernisasi dan pembangunan serta berbagai teori pendukung setelahnya dalam epistemologi, atau menurut paradigma kesadaran Freire dapat digolongkan dalam kesadaran naif, karena bukan struktur yang lebih dipersoalkan melainkan manusianya dan oleh karenanya bersifat reformatif. Sementara itu, paradigma dan teori perubahan sosial kritik yang dibahas dalam bab berikutnya dalam perspektif Freire dapat digolongkan dalam kesadaran kritis dan merupakan proses perubahan sosial menuju lebih adil yang bersifat transformatif.

Uraian pembagian peta paradigma yang dipinjam dari analisis Freire tersebut, selain dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami dan memetakan teori-teori perubahan sosial dan teori-teori pembangunan, peta paradigma tersebut juga sangat berpengaruh terhadap para praktisi pengembangan masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat di akar rumput. Banyak praktisi pembangunan dalam berhadapan maupun mengembangkan program-programnya di masyarakat dipengaruhi oleh jenis kesadaran yang mendominasi pemikiran dan analisis para praktisi sehingga sangat berpengaruh terhadap pendekatan maupun metodologi program mereka. Para praktisi pengembangan masyarakat yang mengembangkan program "pemberdayaan masyarakat", tetapi dalam melakukan analisis terhadap "masalah kemiskinan" masyarakat bersandar pada analisis kesadaran naif dan reformatif, akan melahirkan program yang berbeda dengan jika mereka dipengaruhi oleh analisis yang bersandar pada kesadaran kritis untuk transformasi sosial.

Pembaharuan dalam Islam, Jakarta; Bulan Bintang, 1978. serta majalah ulasan tentang "Gerakan Pembaharuan Islam" dalam *Ulumul Quran* tahun 1993.

Paradigma-paradigma Sosiologi

Untuk lebih mempertajam pemahaman dan seluk-beluk peta paradigma yang dapat digunakan untuk memahami teori-teori perubahan sosial dan teori pembangunan, maka perlu juga kita memetakan secara lebih luas paradigma dalam ilmu sosiologi. Untuk itu dalam bagian ini dikemukakan dan disajikan peta paradigma sosiologi yang dikembangkan oleh Burnell dan Morgan (1979). Burnell dan Morgan membuat suatu pemetaan paradigma sosiologi yang dapat membantu kita untuk memahami 'cara pandang' berbagai aliran dan teori ilmu-ilmu sosial. Mereka membantu memecahkan sumber utama keruwetan peta teori ilmu sosial dengan mengajukan peta filsafat dan teori sosial.²¹⁶ Secara sederhana mereka mengelompokkan teori sosial ke dalam empat kunci paradigma. Empat paradigma itu dibangun atas pandangan yang berbeda mengenai dunia sosial. Masing-masing pendirian dalam kebenarannya dan melahirkan analisis tentang kehidupan sosial. Sejak tahun 1960-an sesungguhnya telah muncul berbagai aliran pemikiran sosiologi yang dalam perkembangannya justru tidak membantu untuk memperjelas peta paradigma sosiologi. Namun pada awal tahun 1970-an terjadi kebutuhan dalam perdebatan sosiologi mengenai sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat seperti halnya terjadi pada tahun 1960-an. Untuk memecahkan kebuntuan itu mereka usulkan untuk menggunakan kembali unsur penting dari perdebatan 1960-an, yakni cara baru dalam menganalisis empat paradigma sosiologi yang berbeda. Empat paradigma itu ialah: Humanis Radikal, *strukturalis radikal*, interpretatif dan Fungsionalis. Keempat paradigma itu satu dengan yang lain memiliki pendirian masing-masing, karena memang memiliki dasar pemikiran yang secara mendasar berbeda.

Sifat dan kegunaan empat paradigma tersebut adalah selain untuk memahami dan menganalisis suatu praktik sosial, juga untuk memahami ideologi dibalik suatu teori sosial. Paradigma sebagai anggapan-anggapan meta-teoretis yang mendasar yang menentukan kerangka berpikir, asumsi dan cara bekerjanya teori sosial yang menggunakannya. Di dalamnya tersirat kesamaan pandangan yang mengikat sekelompok penganut teori mengenai cara pandang dan cara kerja dan batas-batas pengertian yang sama pula. Jika ilmuwan sosial menggunakan paradigma tertentu, berarti memandang dunia dalam satu cara yang tertentu pula. Peta yang digunakan di sini adalah menempatkan empat pandangan yang berbeda mengenai sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat yang didasarkan pada anggapan-anggapan meta-teoretis. Empat paradigma itu merupakan cara mengelompokkan kerangka berpikir seseorang dalam suatu teori sosial dan merupakan alat untuk memahami mengapa pandangan-pandangan dan teori-teori tertentu dapat lebih menampilkan sentuhan pribadi dibanding yang lain. Demikian juga alat untuk memetakan perjalanan pemikiran teori sosial seseorang terhadap persoalan sosial. Perpindahan paradigma sangat dimungkinkan terjadi, dan hal ini sama bobotnya dengan pindah agama. Misalnya, apa yang pernah terjadi pada Karl Marx yang dikenal Marx tua dan Marx muda, yakni perpindahan dari humanis radikal ke strukturalis radikal. Perpindahan ini disebut *epistemological break*.

Paradigma Fungsionalis

Paradigma fungsionalisme sesungguhnya merupakan aliran pemikiran yang paling banyak dianut di dunia. Pandangan fungsionalisme berakar kuat pada tradisi sosiologi keteraturan. Pendekatannya terhadap permasalahan berakar pada pemikiran kaum obyektivis. Pemikiran fungsionalisme sebenarnya merupakan sosiologi kemapanan, ketertiban sosial, stabilitas sosial, kesepakatan, keterpaduan sosial, kesetiakawanan, pemuasan kebutuhan, dan hal-hal yang nyata (empirik). Oleh karenanya, kaum fungsionalis cenderung realis dalam pendekatannya, positivis, deterministik dan nomotetik. Rasionalitas lebih diutamakan dalam menjelaskan peristiwa atau realitas sosial. Paradigma ini juga lebih berorientasi pragmatis, artinya berusaha melahirkan pengetahuan yang dapat diterapkan, berorientasi pada pemecahan masalah yang berupa langkah-langkah praktis untuk pemecahan masalah praktis juga. Mereka lebih mendasarkan pada "*filsafat rekayasa sosial*" (*social engineering*) sebagai dasar bagi usaha perubahan sosial, serta menekankan pentingnya cara-cara memelihara, mengendalikan atau mengontrol keteraturan, harmoni, serta stabilitas sosial.

²¹⁶ Burnell & Morgan, *Sociological Paradigms & Organizational Analysis* London: Heinemann, 1979.

Paradigma ini pada dasarnya berusaha menerapkan metode pendekatan pengkajian masalah sosial dan kemanusiaan dengan cara yang digunakan ilmu alam dalam memperlakukan objeknya. Paradigma ini dimulai di Prancis pada dasawarsa pertama abad ke-19 karena pengaruh karya Comte, Spencer, Durkheim, dan Pareto. Aliran ini berasal dari asumsi bahwa realitas sosial terbentuk oleh sejumlah unsur empirik nyata dan hubungan antar semua unsur tersebut dapat dikenali, dikaji, diukur dengan pendekatan dan menekankan alat seperti yang digunakan dalam ilmu alam. Menggunakan kias ilmu mekanika dan biologi untuk menjelaskan realitas sosial pada dasarnya adalah prinsip yang umumnya digunakan oleh aliran ini. Namun demikian, sejak awal abad ke-20, mulai terjadi pergeseran, terutama setelah dipengaruhi oleh tradisi pemikiran idealisme Jerman seperti pemikiran Max Weber, Geroge Simmel dan George Herbert Mead. Sejak saat itu banyak kaum fungsionalis mulai meninggalkan rumusan teoretis dari kaum objektivis dan mulai bersentuhan dengan paradigma interpretatif yang lebih subjektif. Kias mekanika dan biologi mulai bergeser melihat manusia atau masyarakat, suatu pergeseran pandangan menuju para pelaku langsung dalam proses kegiatan sosial.

Pada tahun 1940-an pemikiran sosiologi “perubahan radikal” mulai menyusupi kubu kaum fungsionalis untuk meradikalisasi teori-teori fungsionalis. Sungguhpun telah terjadi persentuhan dengan paradigma lain, paradigma fungsionalis tetap saja secara mendasar menekankan pemikiran objektivisme dan realitas sosial untuk menjelaskan keteraturan sosial. Karena persentuhan dengan paradigma lain itu sebenarnya telah lahir beragam pemikiran yang berbeda atau campuran dalam paham fungsionalis.

Paradigma Interpretatif (Fenomenologi)

Paradigma interpretatif sesungguhnya menganut pendirian sosiologi keteraturan seperti halnya fungsionalisme, tetapi mereka menggunakan pendekatan objektivisme dalam analisis sosialnya sehingga hubungan mereka dengan sosiologi keteraturan bersifat tersirat. Mereka ingin memahami kenyataan sosial menurut apa adanya, yakni mencari sifat yang paling dasar dari kenyataan sosial menurut pandangan subjektif dan kesadaran seseorang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial bukan menurut orang lain yang mengamati.

Pendekatannya cenderung nominalis, antipositivis dan ideografis. Kenyataan sosial muncul karena dibentuk oleh kesadaran dan tindakan seseorang. Karenanya, mereka berusaha menyelami jauh ke dalam kesadaran dan subjektivitas pribadi manusia untuk menemukan pengertian apa yang ada di balik kehidupan sosial. Sungguhpun demikian, anggapan-anggapan dasar mereka masih tetap didasarkan pada pandangan bahwa manusia hidup serba tertib, terpadu dan rapat, kemapanan, kesepakatan, kesetiakawanan. Pertentangan, penguasaan, benturan sama sekali tidak menjadi agenda kerja mereka. Mereka terpengaruh langsung oleh pemikiran sosial kaum idealis Jerman yang berasal dari pemikiran Kant yang lebih menekankan sifat hakikat rohaniah daripada kenyataan sosial. Perumus teori ini yakni mereka yang penganut filsafat fenomenologi antara lain Dilthey, Weber, Husserl, dan Schutz.

Paradigma Humanis Radikal

Para penganut humanis radikal pada dasarnya berminat mengembangkan sosiologi perubahan radikal dari pandangan subjektivis yakni berpijak pada kesadaran manusia. Pendekatan terhadap ilmu sosial sama dengan kaum interpretatif yaitu nominalis, antipositivis, volunteris dan ideografis. Kaum humanis radikal cenderung menekankan perlunya menghilangkan atau mengatasi berbagai pembatasan tatanan sosial yang ada. Namun demikian, pandangan dasar yang penting bagi humanis radikal adalah bahwa kesadaran manusia telah dikuasai atau dibelenggu oleh supra struktur ideologis di luar dirinya yang menciptakan pemisah antara dirinya dengan kesadarannya yang murni (*alienasi*), atau membuatnya dalam kesadaran palsu (*false consciousness*) yang menghalanginya mencapai pemenuhan dirinya sebagai manusia sejati. Karena itu, agenda utamanya adalah memahami kesulitan manusia dalam membebaskan dirinya dari semua bentuk tatanan sosial yang menghambat perkembangan dirinya sebagai manusia. Penganutnya mengecam kemapanan habis-habisan. Proses-proses sosial dilibat sebagai tidak manusiawi. Untuk itu mereka ingin memecahkan masalah bagaimana manusia bisa memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka dalam pola-pola sosial yang mapan untuk mencapai harkat kemanusiaannya. Meskipun

demikian, masalah-masalah pertentangan struktural belum menjadi perhatian mereka Paulo Freire misalnya dengan analisisnya mengenai tingkatan kesadaran manusia dan usaha untuk melakukan "konsientisasi", yang pada dasarnya membangkitkan kesadaran manusia akan sistem dan struktur penindasan, dapat dikategorikan dalam paradigma humanis radikal.

Paradigma Strukturalis Radikal

Penganut paradigma strukturalis radikal seperti kaum humanis radikal memperjuangkan perubahan sosial secara radikal tetapi dari sudut pandang objektivisme. Pendekatan ilmiah yang mereka anut memiliki beberapa persamaan dengan kaum fungsionalis, tetapi mempunyai tujuan akhir yang saling berlawanan. Analisisnya lebih menekankan pada konflik struktural, bentuk-bentuk penguasaan dan pemerosotan harkat kemanusiaan. Karenanya, pendekatannya cenderung realis, positivis, determinis, dan nomotetis.

Kesadaran manusia yang bagi kaum humanis radikal penting, justru oleh mereka dianggap tidak penting. Bagi kaum strukturalis radikal yang lebih penting justru hubungan-hubungan struktural yang terdapat dalam kenyataan sosial yang nyata. Mereka menekuni dasar-dasar hubungan sosial dalam rangka menciptakan tatanan sosial baru secara menyeluruh. Penganut paradigma strukturalis radikal terpecah dalam dua perhatian, pertama lebih tertarik pada menjelaskan bahwa kekuatan sosial merupakan kunci untuk menjelaskan perubahan sosial. Sebagian mereka lebih tertarik pada keadaan penuh pertentangan dalam suatu masyarakat.

Paradigma strukturalis radikal diilhami oleh pemikiran setelah terjadinya perpecahan epistemologi dalam sejarah pemikiran Marx, di samping pengaruh Weber. Paradigma inilah yang menjadi bibit lahirnya teori sosiologi radikal. Penganutnya antara lain Luis Althusser, Polantzas, Colletti, dan beberapa penganut kelompok kiri baru.

Diagram 2
Peta Analisis Sosial Barnet & Morgan (1979)

SUBYEKTIVIS	Keteraturan Subyektif	PARADIGMA INTERPRETATIF (FENOMENOLOGI)	PARADIGMA FUNGSIONALISME	Keteraturan Objektif	OBYEKTIVIS
	Pertentangan Subyektif	PARADIGMA HUMANIS RADIKAL	PARADIGMA STRUKTURALIS RADIKAL	Pertentangan Objektif	

Catatan Kritis

Paradigma-paradigma sosiologi tersebut sangat mempengaruhi bagaimana seorang pemikir sosial dalam mengembangkan teori sosial. Misalnya saja, penganut paradigma interpretatif atau sosiologi fenomenologis akan mengembangkan teori perubahan sosial yang sama sekali berbeda dengan penganut fungsionalisme. Penganut aliran fenomenologis, karena dasar filsafatnya adalah mencoba memahami dan mendengarkan kehendak masyarakat, maka perubahan sosial lebih diutamakan ke arah yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut. Berbagai metodologi dikembangkan, seperti "*etnografi*" ataupun "*riset observasi*", untuk menangkap dan memahami simbol-simbol kehendak masyarakat.

Sementara bagi penganut fungsionalisme yang bersandarkan pada paradigma positivisme, mereka merasa berhak untuk melakukan "rekayasa sosial" sehingga akan berpengaruh ketika mereka berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat dalam proses perubahan sosial model positivisme dan rekayasa sosial, ditempatkan sebagai "objek" perubahan. Oleh karenanya, mereka diarahkan,

dikontrol, direncanakan, serta dikonstruksi oleh kalangan ilmuwan, birokrat, dan bahkan koordinator program LSM yang menganut paham positivisme tersebut. Mereka memisahkan antara masyarakat sebagai objek perubahan, ilmuwan dan peneliti atau bahkan tenaga lapangan sebagai tenaga-tenaga ilmiah yang objektif, rasional, tidak memihak, dan bebas nilai, dan birokrat atau negara dalam proses perubahan sosial berperan sebagai pengambil-pengambil keputusan. Dengan demikian, proses perubahan sosial penganut paradigma ini, teori perubahan sosialnya bersifat elitis. Demikian halnya, penganut paradigma struktural akan memahami masalah sosial dan mengajukan teori perubahan sosial yang berbeda dibanding teori yang diajukan para penganut fungsionalis maupun fenomenologis. Bagi para penganut paradigma kritis transformatif, teori perubahan sosial dimaksudkan sebagai proses yang melibatkan korban untuk perubahan transformasi sistem dan struktur menuju ke sistem yang lebih adil. Dengan demikian proses perubahan sosial berwatak subjektif, memihak, tidak netral, dan untuk terciptanya keadilan sosial dan oleh karenanya berwatak populis.

Dengan memahami berbagai peta paradigma perubahan sosial tersebut, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami apa motivasi dan dasar pikiran suatu teori perubahan sosial dan pembangunan. Dengan memahami paradigma sosiologi yang dianut oleh pencetusnya, kita juga dapat memahami berbagai metodologi dan pendekatan proyek pembangunan maupun aksi sosial di akar rumput. Hal ini karena, pada dasarnya, metodologi dan teknik program perubahan sosial maupun pembangunan, serta teori-teori perubahan sosial yang dikembangkan oleh seseorang atau suatu organisasi sangat konsisten dalam mengikuti paradigma yang diyakini maupun yang dianutnya. Paradigma sosiologis yang dianut tidak saja mempengaruhi bagaimana suatu teori sosial memberi makna terhadap realitas sosial, tetapi juga mempengaruhi visi dan misi suatu teori sosial, bahkan mempengaruhi pula penentuan pendekatan ketika seseorang atau suatu organisasi melakukan penelitian serta aksi praktik manajemen pelaksanaan suatu teori sosial dalam bentuk program pengembangan masyarakat ataupun pembangunan, maupun pilihan pendekatan evaluasi terhadap program tersebut.

BAGIAN II

Langkah Praxis Analisis Sosial

Apakah Analisa Sosial Itu?

Suatu proses analisa sosial adalah usaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultural dan historis. Sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi. Suatu analisis pada dasarnya "mirip" dengan sebuah "penelitian akademis" yang berusaha menyingkap suatu hal atau aspek tertentu. Dalam proses ini yang dilakukan bukan sekedar mengumpulkan data, berita atau angka, melainkan berusaha membongkar apa yang terjadi sesungguhnya, bahkan menjawab mengapa demikian, dan menemukan pula faktor-faktor apa yang memberikan pengaruh kepada kejadian tersebut. Lebih dari itu, analisis sosial, seyogyanya mampu memberikan prediksi ke depan: kemungkinan apa yang terjadi.

Analisa sosial merupakan upaya untuk mengurai logika, nalar, struktur, atau kepentingan dibalik sebuah fenomena sosial. Analisa sosial bukan semata deskripsi sosiologis dari sebuah fenomena sosial. Analisa sosial hendak menangkap logika struktural atau nalar dibalik sebuah gejala sosial. Analisa sosial dengan demikian material, empiris, dan bukan sebaliknya, mistis, atau spiritualistik. Analisa sosial menafsirkan gejala sosial sebagai gejala material. Kekuatan dan gagasan ideologis dibalik gejala sosial harus dianalisa.

Wilayah Analisa Sosial

1. Sistem-sistem yang beroperasi dalam suatu masyarakat.
2. Dimensi-dimensi obyektif masyarakat (organisasi sosial, lembaga-lembaga sosial, pola perilaku, kekuatan-kekuatan sosial masyarakat)
3. Dimensi-dimensi subyektif masyarakat (ideologi, nalar, kesadaran, logika berpikir, nilai, norma, yang hidup di masyarakat).

Pendekatan Dalam Analisa Sosial

1. **Historis:** dengan mempertimbangkan konteks struktur yang saling berlainan dari periode-periode berbeda, dan tugas strategis yang berbeda dalam tiap periode.
2. **Struktural:** dengan menekankan pentingnya pengertian tentang bagaimana masyarakat dihasilkan dan dioperasikan, serta bagaimana pola lembaga-lembaga sosial saling berkaitan dalam ruang sosial yang ada.

Bagaimana Hasil Analisa Sosial?

Apakah hasil kesimpulan dari analisa sosial bersifat final? tentu saja tidak. Karena hasil dari analisa tersebut dapat dikatakan hanya merupakan kebenaran tentatif, yang bisa berubah sesuatu dengan fakta atau data dan temuan-temuan yang baru. Dengan demikian, analisa ini bersifat dinamis, terus bergerak, memperbarui diri, dikaji ulang dan terus harus diperkuat dengan fakta-fakta pendukung. Hasil analisa bukan suatu dogma, atau sejenis kebenaran tunggal.

Batas Analisa Sosial

1. Analisa sosial bukanlah kegiatan monopoli intelektual, akademisi, atau peneliti. Siapapun dapat melakukan analisa sosial.
2. Analisa sosial tidaklah bebas nilai.
3. Analisa sosial memungkinkan kita bergulat dengan asumsi-asumsi kita, mengkritik, dan menghasilkan pandangan-pandangan baru.

Siapa Pelaku Analisa Sosial?

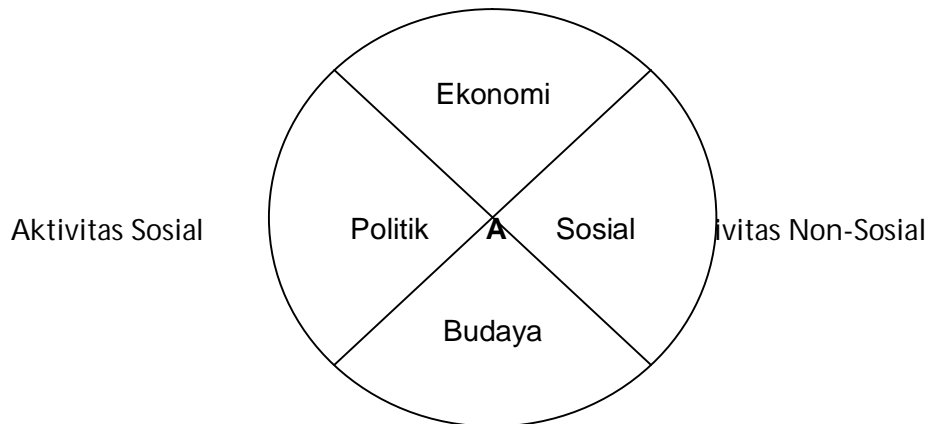
Semua pihak atau pelaku sosial yang menghendaki untuk mendekati dan terlibat langsung dengan realitas sosial. Bicara tentang analisis sosial, pada umumnya selalu dikaitkan dengan dunia akademik, kaum cendekiawan, ilmuwan atau kalangan terpelajar lainnya. Ada kesan yang sangat kuat bahwa analisis sosial hanya milik "mereka". Masyarakat awam tidak punya hak untuk melakukannya. Bahkan kalau melakukan, maka disediakan mekanisme sedemikian rupa, sehingga hasil analisis awam itu dimentahkan.

Pemahaman yang demikian, bukan saja keliru, melainkan mengandung maksud-maksud tertentu yang tidak sehat dan penuh dengan kepentingan. Pengembangan analisis sosial di sini, justru ingin membuka sekat atau dinding pemisah itu, dan memberikannya kesempatan kepada siapapun untuk melakukannya. Malahan mereka yang paling dekat dengan suatu kejadian, tentu akan merupakan pihak yang paling kaya dengan data dan informasi. Justru analisis yang dilakukan oleh mereka yang dekat dan terlibat tersebut akan lebih berpeluang mendekati kebenaran. Dengan demikian, tanpa memberikan kemampuan yang cukup kepada masyarakat luas untuk melakukan analisis terhadap apa yang terjadi di lingkungan mereka, atau apa yang mereka alami, maka mereka menjadi sangat mudah "dimanipulasi", "dibuat bergantung" dan pada gilirannya tidak bisa mengambil sikap yang tepat.

Mengapa Gerakan Sosial Membutuhkan Analisa Sosial ?

Kalau kita pahami secara lebih mendalam, aktivitas sosial adalah sebuah proses penyadaran masyarakat dari suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang lain yang lebih baik (baca: kesadaran kritis) Kalau kita menggunakan istilah yang lebih populer, aktivitas semacam itu bisa juga disebut sebagai aktivitas pemberdayaan (Empowerment) untuk suatu entitas atau komunitas masyarakat tertentu. Dari statemen tersebut, maka akan termuat suatu makna bahwa sebenarnya kesadaran kritis atas realitas sosial ini pada dasarnya ada pada setiap diri manusia. Hanya saja tingkat kesadaran kritis pada masing-masing orang itu kadarnya berbeda-beda. Dan aktivitas sosial adalah alat untuk menyadarkan atau memotivasi bagi munculnya kesadaran tersebut. Meskipun, sebagaimana kita ketahui, bahwa membangun kesadaran kritis atas realitas sosial itu tidaklah semudah membalik tangan, karena kesadaran itu dilingkupi oleh persoalan-persoalan (sosial dan sebagainya), yang senantiasa membelenggunya. Kalau kita gambarkan, maka persoalan yang melingkupi kesadaran kritis akan realitas sosial itu adalah sebagai berikut:

Diagram 3
Peta Aktivitas Analisis Sosial, H.A. Taufiqurrahman (1999)



A: Kesadaran Kritis

Out-put: Aktivist Gerakan Sosial yang Kritis akan Realitas Sosial

Oleh karena itu, untuk masuk pada titik sentral kesadaran kritis atas realitas sosial sebagaimana dimaksud dalam gerakan sosial di atas, maka tidak mungkin untuk tidak membongkar, mengurai dan menganalisa persoalan-persoalan yang ada disekitarnya. Pada konteks inilah kompetensi analisis sosial dalam gerakan sosial.

Signifikansi Analisa Sosial

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami persoalan-persoalan yang berkembang (ada) secara lebih mendalam dan seksama (teliti); berguna untuk membedakan mana akar masalah (persoalan mendasar) dan mana yang bukan, atau mana yang merupakan masalah turunan.
2. Akan dapat dipakai untuk mengetahui potensi yang ada (kekuatan dan kelemahan) yang hidup dalam masyarakat.
3. Dapat mengetahui dengan lebih baik (akurat) mana kelompok masyarakat yang paling dirugikan (termasuk menjawab mengapa demikian).
4. Dari hasil analisa sosial tersebut dapat proyeksikan apa yang mungkin akan terjadi, sehingga dengan demikian dapat pula diperkirakan apa yang harus dilakukan.

Orientasi Analisa Sosial

1. Analisa sosial jelas didedikasikan dan diorientasikan untuk keperluan perubahan.
2. Analisa sosial adalah watak mengubah yang dihidupkan dalam proses identifikasi. Justru karena itu pula, maka menjadi jelas bahwa analisa sosial merupakan salah satu titik simpul dari proses mendorong perubahan.
3. Analisa sosial akan menghasilkan semacam peta yang memberikan arahan dan dasar bagi usaha-usaha perubahan.

Prinsip-Prinsip Analisa Sosial

1. Analisa sosial bukan suatu bentuk pemecahan masalah, melainkan hanya diagnosis (pencarian akar masalah), yang sangat mungkin digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah, karena analisa sosial memberikan pengetahuan yang lengkap, sehingga diharapkan keputusan atau tindakan yang diambil dapat merupakan pemecahan yang tepat.
2. Analisa sosial tidak bersifat netral, selalu berasal dari keberpihakan terhadap suatu keyakinan. Soal ini berkait dengan perspektif, asumsi-asumsi dasar dan sikap yang diambil dalam proses melakukan analisa. Karena pernyataan di atas, maka analisa sosial dapat digunakan oleh siapapun.
3. Analisa sosial lebih memiliki kecenderungan mengubah; tendensi untuk menggunakan gambaran yang diperoleh dari analisa sosial bagi keperluan tindakan-tindakan mengubah,

maka menjadi sangat jelas bahwa analisa sosial berposisi sebagai salah satu simpul dan siklus kerja transformasi.

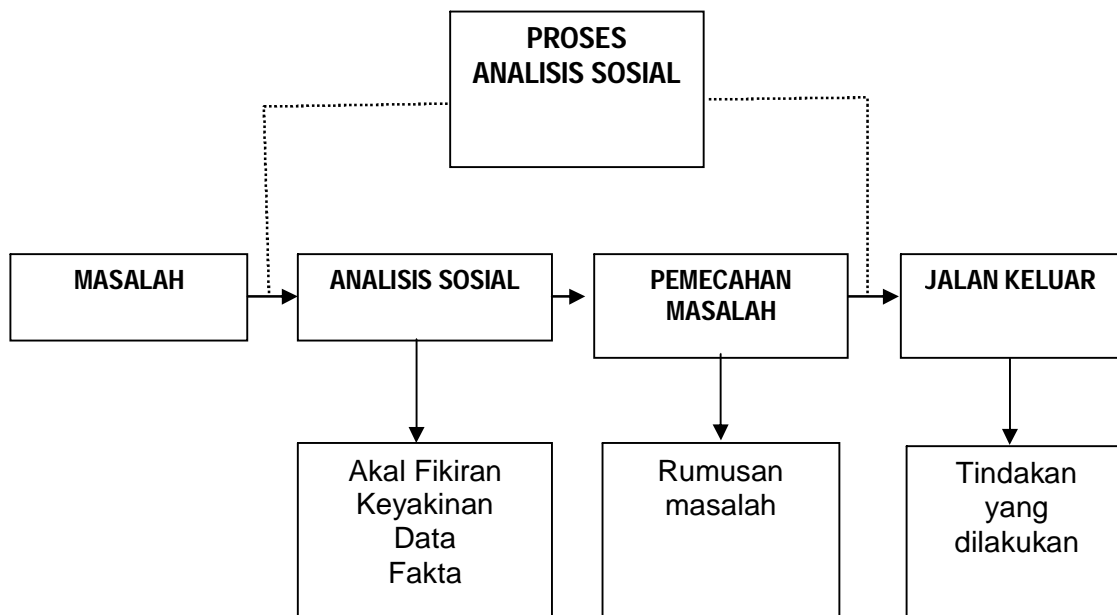
4. Analisa sosial selalu menggunakan 'tindakan manusia' sebagai sentral atau pusat dalam melihat suatu fenomena nyata.

Tahap-Tahap Analisa Sosial

1. Tahap menetapkan posisi, orientasi: pada intinya dalam tahap ini, pelaku analisa perlu mempertegas dan menyingkap motif serta argumen (ideologis) dari tindakan analisa sosial.
2. Tahap pengumpulan dan penyusunan data: tujuan dan maksud dari tahap ini, agar analisa memiliki dasar rasionalitas yang dapat diterima akal sehat. Ujung dari pengumpulan data ini adalah suatu upaya untuk merangkai data, dan menyusunnya menjadi diskripsi tentang suatu persoalan.
3. Tahap analisa: pada tahap ini, data yang telah terkumpul diupayakan untuk dicari atau ditemukan hubungan diantaranya.

Diagram 4

Peta Proses Analisis Sosial, H.A. Taufiqurrahman (1999)



Apa Yang Penting Ditelaah dalam Melakukan Analisa Sosial

1. Kaitan Historitas (Sejarah Masyarakat).
2. Kaitan Struktur.
3. Nilai.
4. Reaksi yang berkembang dan arah masa depan.

Model Telaah dalam Analisa Sosial

1. **Telaah Historis**, dimaksudkan untuk melihat ke belakang. Asumsi dasar dari telaah ini bahwa suatu peristiwa tidak dengan begitu saja hadir, melainkan melalui sebuah proses sejarah. Dengan ini, maka kejadian, atau peristiwa dapat diletakkan dalam kerangka masa lalu, masa kini dan masa depan.
2. **Telaah Struktur**. Biasanya orang enggan dan cemas melakukan telaah ini, terutama oleh stigmatisasi tertentu. Analisa ini sangat tajam dalam melihat apa yang ada, dan mempersoalkan apa yang mungkin tidak berarti digugat. Struktur yang akan dilihat adalah: ekonomi (distribusi sumberdaya); politik (bagaimana kekuasaan dijalankan);

- sosial (bagaimana masyarakat mengatur hubungan di luar politik dan ekonomi); dan budaya (bagaimana masyarakat mengatur nilai).
3. **Telaah Nilai.** Penting pula untuk diketahui tentang apa nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Mengapa demikian. Dan siapa yang berkepentingan dengan pengembangan nilai-nilai tersebut.
 4. **Telaah Reaksi.** Melihat reaksi yang berkembang berarti mempersoalkan mengenai siapa yang lebih merupakan atau pihak mana yang sudah bereaksi, mengapa reaksi muncul dan bagaimana bentuknya. Telaah ini penting untuk menuntun kepada pemahaman mengenai "peta" kekuatan yang bekerja.
 5. **Telaah Masa Depan.** Tahap ini lebih merupakan usaha untuk memperkirakan atau meramalkan, apa yang terjadi selanjutnya. Kemampuan untuk memberikan prediksi (ramalan) akan dapat menjadi indikasi mengenai kualitas tahap-tahap sebelumnya.

Diagram 5
Peta Kerangka Pikir Analisis Sosial

Paradigma Konsensus		Paradigma Konflik
Konservatif	Liberal	Konflik/ Transformis
Dalam masyarakat ada kelas-kelas sosial, dan ada kerukunan kelas		Ada kelas sosial, ada konflik antar-kelas
Struktur sosial merupakan hasil konsensus antar anggota masyarakat, struktur sosial tidak pernah dipemasalahkan, bahkan dipertahankan		Struktur sosial adalah hasil konstruksi kelas sosial tertentu, yang dipaksakan untuk ditaati oleh masyarakat. Struktur sosial selalu dipemasalahkan
Akar pemasalahan terletak pada manusia itu sendiri, atau karena sesuatu kekuatan suprasejarah	Akar permasalahan terletak pada kesenjangan kesadaran, kurangnya kesempatan, kurangnya keterampilan, kesempatan, dan lainnya.	Akar permasalahan berakar pada struktur sosial yang tidak adil, menindas.
Meringankan beban korban	Modernisasi sosial	Mentransformasikan struktur yang tidak adil ke struktur yang adil
Pembagian sembako, bakti sosial, pengobatan gratis, khotbah, bantuan untuk kelaparan, pelayanan kaum cacat, himbauan moral, dan lainnya	Pelatihan, kurus, pembangunan infrastruktur	Pengorganisasian masyarakat, pendidikan politik, gerakan sosial, advokasi kebijakan, gerakan massa, pemogokan, pemboikotan, gagasan-gagasan sosial dan struktur alternatif
Masyarakat itu sendiri	Kaum elite, pemerintah, agamawan, LSM, dan lainnya	Masyarakat dan kepemimpinan perubahan/gerakan
Otoritas	Instruktif, konsultatif	Delegatif, kepeemanduan, transformatif
Kasih sayang, menolong orang miskin, kepedulian, rasa kemanusiaan	Persamaan hak dan kesempatan	Kesadaran struktural
Karitatif	Reformatif	Transformatif

Diagram 6
Model-Model Perubahan dan Implikasinya

Implikasi	Model EKonomi	Model Sosial	Model Politik
Ekonomi	Akumulasi kapital/kapitalisasi	(Re)Distribusi	Transformasi struktural
Politik	Stabilitas	Bantuan	Mobilisasi/trasnformasi politik
Kebudayaan	Pertumbuhan	Kesamaan	Trasnformasi kultural/Imajinasi
Transformasi	Pertumbuhan infrastruktur	Penguatan daya beli	Struktural
Missi	Panggilan kelas menengah	Bekerja dengan masyarakat marjinal	Mendorong trasnformasi struktural dalam semua level
Pendidikan	Peningkatan infrastruktur sekolah	Pemberian atau pencarian beasiswa	Akses struktural Pendidikan

Diagram 7
Model Perubahan Interpretatif

Variabel	Tradisional	Liberal	Radikal
Pandangan waktu	Siklis	evolusioner	Transformatif
Pandangan ruang	organis	pluralis	Interdependen
Prinsip pengatur	Otoritarian/ketertiban	Managerial/Keseimbangan	Partisipatif/masyarakat
Perubahan utama	Biologis/ Tubuh	mekanistik	Transformasional
Sikap terhadap konflik	Menyerap atau menolak	Mengawasi	Mengelola konflik

Keterangan:

Tradisional

- Siklis: kepingan-kepingan episode (masa lalu, kini, masa depan) dintegrasikan dalam keseluruhan sejarah
- Organis: hanya ada susunan tunggal yang diatur sesuai kepentingan umum
- Otoritarian: masyarakat dipandang seperti piramida yang dikendalikan dari puncak dengan sedikit partisipasi bawah
- Biologis: masyarakat dipandang seperti organisme yang analog dengan tubuh manusia
- Menyimpang: perubahan yang mengubah siklus sejarah dianggap menyimpang

Liberal

- Evolusioner: perkembangan sejarah bersifat linear. Gerak sejarah bukan siklis, tapi kemajuan/progresif
- Pluralis: ruang sosial disusun berdasarkan berbagai macam bagian yang tidak terpisah dan tak berhubungan
- Manajerial: menjaga keseimbangan semua unsur atau bagian
- Mekanistik: masyarakat dipandang sebagai mesin yang bekerja
- Pengawasan: perubahan sosial merupakan kehendak sejarah, namun tidak mengubah struktur dasar yang mendasarinya. Perubahan selalu diawasi agar tidak menyimpang

Transformatif

- Transformatif: setiap peristiwa sejarah dipandang secara fundamental menimbulkan tahapan baru, masa lalu, sekarang, dan masa depan, terkait secara dialektik
- Interdependen: masyarakat dianggap sebagai keseluruhan sistem yang kreatif, dialektik.
- Partisipasi: kepentingan umum merupakan input masyarakat, hasil definisi masyarakat
- Transformasi kultural: masyarakat terbentuk secara kreatif melalui dialog maupun cita-cita utopis anggotanya.
- Kreatif: konflik merupakan penggerak sejarah, dan kemajuan.

Tahap Penarikan Kesimpulan Analisa Sosial

Pada tahap ini, setelah berbagai aspek tersebut ditemukan, maka pada akhirnya suatu kesimpulan akan diambil; kesimpulan merupakan gambaran utuh dari suatu situasi, yang didasarkan kepada hasil analisa. Dengan demikian kualitas kesimpulan sangat bergantung dari proses tahap-tahap analisa, juga tergantung pada kompleksitas isu, kekayaan data dan akurasi data yang tersedia, ketepatan pertanyaan atau rumusan terhadap masalah, dan kriteria yang mempengaruhi penilaian-penilaian atas unsur-unsur akar masalah.

Dasar Penarikan Kesimpulan Analisa Sosial

Yang tidak kalah penting adalah menemukan apa yang menjadi akar masalah. Untuk menemukan akar masalah dapat dituntun dengan pertanyaan: *mengapa?* Untuk sampai kepada akar masalah, maka penting dilakukan kualifikasi secara ketat, guna menentukan faktor mana yang paling penting. Kesimpulan tidak lain berbicara mengenai faktor apa yang memberikan pengaruh paling dominan (paling kuat) dan demi kepentingan siapa unsur akar tersebut bekerja. Sebagaimana diungkapkan di depan, kesimpulan tidak menjadi sesuatu yang final, melainkan akan mungkin diperbaiki menurut temuan-temuan atau data baru.[]



Bagan: PENAMPANG DARI SISI ANALISIS PIRINGAN KOMPLEKSITAS SOSIAL.

Hand-Out 53 TEKNIK LOBBY DAN NEGOSIASI

Teknik Negosiasi Untuk Sukses

Seringkali orang awam akan menangkap kesan bahwa negosiasi merupakan istilah lain untuk mengatakan “keterlibatan dalam konflik”. Namun menurut Oxford Dictionary negosiasi didefinisikan sebagai: “pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kompromi atau kesepakatan, untuk mengatur atau mengemukakan.” Istilah-istilah lain kerap digunakan pada proses ini seperti: pertawaran, tawar-menawar, perundingan, perantaraan atau barter.

Dengan kata lain negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang dapat diterima kedua belah pihak. Negosiasi diperlukan ketika kepentingan seseorang atau suatu kelompok tergantung pada perbuatan orang atau kelompok lain yang juga memiliki kepentingan-kepentingan tersebut harus dicapai dengan jalan mengadakan kerjasama. Negosiasi adalah pertemuan antara dua pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan atas pokok-pokok masalah yang :

1. Penting dalam pandangan kedua belah pihak
2. Dapat menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak
3. Membutuhkan kerjasama kedua belah pihak untuk mencapainya.

Dalam konteks bisnis/ kerja, negosiasi terjadi secara ajeg antara:

1. Majikan dan karyawan [upah, fasilitas]
2. Duta penjualan dengan pembeli di seputar harga dan kontrak
3. Departemen sehubungan dengan alokasi sumber daya

Negosiasi tidaklah untuk mencari pemenang dan pecundang; dalam setiap negosiasi terdapat kesempatan untuk menggunakan kemampuan sosial dan komunikasi efektif dan kreatif untuk membawa kedua belah pihak ke arah hasil yang positif bagi kepentingan bersama. Berdasarkan uraian singkat di atas, bisa dikatakan bahwa negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu:

1. Senantiasa melibatkan orang–baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok;
2. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu–baik berupa tawar menawar (bargain) maupun tukar menukar (barter);
3. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi;
4. Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.
5. Hampir selalu berbentuk tatap-muka –yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah;
6. Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi;

Walau mengandung konflik, lobby atau negosiasi sejatinya merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Dengan mengembangkan kemampuan lobby dan negosiasi, setiap pihak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya tanpa harus melakukan cara-cara ekstrim, seperti perang, pemaksaan, atau perebutan. Secara umum, suatu proses lobby atau negosiasi akan menghasilkan 4 kemungkinan:

1. **Kuadran Kalah-kalah (Menghindari konflik).** Kuadran keempat ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan

2. **Kuadran Menang-kalah (Persaingan).** Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak menyenangkan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas.
3. **Kuadran Kalah-menang (Mengakomodasi).** Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kita kalah–mereka menang ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya kita bersama bisa menuju ke kuadran pertama.
4. **Menang-menang (Kolaborasi).** Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh. Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut.



Pentingnya Sikap Terhadap Perselisihan Dan Konflik

Negosiator yang berhasil memiliki sikap yang positif. Mereka dapat memandang konflik sebagai sesuatu yang normal dan konstruktif. Keterampilan yang mereka gunakan untuk memecahkan konflik bukanlah “sulap”. Keterampilan tsb dapat dipelajari. Sikap kita selalu penting, dan ini terutama berlaku dalam bernegosiasi. SIKAP mempengaruhi sasaran kita, dan sasaran mengendalikan cara orang bernegosiasi. Cara kita bernegosiasi menentukan hasilnya.

Mengembangkan Filosofi Sama-Sama Menang Dalam Negosiasi

Masing-masing pihak di dalam suatu negosiasi tentu ingin menang. Negosiasi yang berhasil berakhir dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh kedua pihak. Setiap kali seorang negosiasi mengancam suatu situasi pertawaran dengan gagasan, “ Saya harus menang, dan benar-benar tidak peduli tentang pihak lawan”, maka bencana pun sudah diambang pintu. Konsep negosiasi sama-sama menang tidak sekadar didasarkan pada pertimbangan etika. Pihak yang mengakhiri suatu negosiasi dengan perasaan bahwa ia telah tertipu mungkin berusaha membalas dendam belakangan.

Negosiasi sama-sama menang secara sederhana adalah “bisnis yang baik”. Ketika pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu perjanjian merasa puas dengan hasilnya, mereka akan berusaha membuat perjanjian itu berhasil, tidak sebaliknya. Mereka pun akan bersedia untuk bekerja sama satu sama lain pada masa datang. Barangkali anda bertanya, “Bagaimana saya bisa menang di dalam suatu negosiasi bila saya membolehkan pihak lawan juga memenuhi kebutuhan mereka?”. Jawaban pertanyaan ini terletak pada kenyataan bahwa orang yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Bagi sebagian orang, kata kompromi mempunyai maknayang negatif. Bagi yang lain, kata ini menggambarkan prinsip beri/ terima yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya tidak mungkin untuk mendapatkan sesuatu secara gratis—tampaknya selalu ada harga atau konsesi yang harus dibuat untuk menerima apa yang anda inginkan. Kata kompromi secara sederhana berarti membuat dan/ atau menerima konsesi [kelonggaran]. Keberhasilan negosiasi pada intinya dapat ditingkatkan dengan sudut pandang pendekatan yang tepat. Bagian-bagian berikut memberikan tuntunan yang memadai di bawah sub-sub judul :

a) Pokok masalah yang dinegosiasikan

Waspada! adanya beberapa konteks dimana negosiasi tidak tepat untuk diadakan:

1. Menegosiasikan syarat-syarat perdagangan yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan aturan yang tegas.
2. Menegosiasikan pokok-pokok yang mengabaikan peraturan mengenai diskriminasi ras, jenis kelamin, atau diskriminasi lainnya.
3. Menegosiasikan prosedur dan tata-tertib perusahaan.
4. Menegosiasikan keputusan perusahaan yang telah diumumkan.
5. Mengadakan negosiasi ketika semua pihak tidak hadir.

b) Persiapan negosiasi

Setelah memastikan persoalan yang dapat Anda negosiasikan, maka selanjutnya adalah menentukan apa yang Anda ingin capai, dan dengan siapa, pada setiap tahap negosiasi. Kenalilah tujuan-tujuan Anda, faktor-faktor yang sangat penting, dan hal-hal yang dapat Anda relakan dalam kondisi tertentu. Hanya setelah Anda menentukan sasaran Anda, maka dapat dimulai mempersiapkan negosiasi. Dengan waktu yang Anda miliki, usahakanlah untuk mengetahui sebanyak-banyaknya tentang pihak lain :

1. Apakah dia independen atau bagian dari suatu tim?
2. Apakah dia memiliki wewenang untuk membuat keputusan tanpa harus mengadakan rujukan balik?
3. Jenis orang seperti apakah dia?
4. Bagaimana tingkat pengalamannya sebagai seorang negosiator?
5. Jenis pendekatan apa yang mungkin digunakan untuk mencapai hasil terbaik?
6. Apakah kepentingan-kepentingannya, dan dengan urutan prioritas yang bagaimana?
7. Perilaku seperti apa yang dapat Anda harapkan dari orang tersebut?

c) Mencapai suasana yang tepat

Suasana diciptakan dalam waktu yang sangat singkat : beberapa detik atau menit. Suasana dipengaruhi oleh hubungan antara pihak-pihak pada waktu lampau, harapan mereka saat ini, sikap persepsi, dan keahlian yang mereka miliki dalam bernegosiasi. Suasana dipengaruhi oleh konteks pertemuan, lokasi, penataan tempat duduk, tingkat formalitas, penataan ‘domestik’. Pada periode ice-breaking, Anda hendaknya berupaya untuk menciptakan suasana yang hangat, bersahabat, penuh kerja sama, dan praktis. Komunikasi verbal maupun non verbal [spt kontak mata] yang bersahabat dapat membantu menciptakan kondisi yang membuat orang-orang termotivasi untuk bekerja sama; demikian pula sebaliknya.

d) Taktik-Taktik Negosiasi

Negosiator yang berpengalaman akan mencari kerjasama dalam topik-topik yang netral; negosiasi yang mencari kekuasaan, akan berusaha untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Anda, serta prioritas dan perhatian Anda. Setelah menentukan tujuan-tujuan Anda, strategi dan kekuatan relatif tawar menawar Anda, pendekatan apa yang Anda ingin gunakan dalam proses negosiasi? Taktik-taktik apa yang akan Anda gunakan?

1. Apakah Anda membuka dengan mengajukan permintaan-permintaan Anda terlebih dahulu atau belakangan?
2. Bagaimana Anda mengambil inisiatif?
3. dengan bersiteguh atau tidak mau berkompromi?
4. Dengan mengajukan argumen yang kuat, bersungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang adil?
5. Rencana cadangan apa yang Anda miliki untuk menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan? Menghentikan negosiasi? Kembali pada unsur pokok untuk mendapatkan tuntunan? Menyetujui, tetapi kemudian tidak menepati kesepakatan tersebut? Apakah konsekuensi dari setiap tindakan ini dalam jangka pendek/ dalam jangka panjang, dalam kaitan dengan kredibilitas Anda dan kekuatan tawar menawar pihak lain?
6. Apakah yang Anda ketahui mengenai individu-individu dalam tim lain? Kekuatan dan kelemahan mereka? Kepribadian mereka? Apakah mereka memilih gaya tertentu yang dapat Anda serang?
7. Bagaimana kemahiran mereka dalam menggertak? Bagaimana dengan kemahiran Anda sendiri? Apakah gertakan merupakan taktik yang bermanfaat dalam situasi tertentu?
8. Apakah Anda yakin dapat membedakan antara fakta, opini, asumsi, dan rumor? Akankah pihak lain menerima fakta-fakta yang Anda miliki?
9. Bagaimana Anda dapat menjual keuntungan-keuntungan proposal Anda dengan sebaik-baiknya?
10. Bagaimana Anda dapat menjelaskan dengan sebaik-baiknya konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan apabila pihak lain menolak usul Anda?
11. Bagaimana Anda menangani kelemahan proposal/ argumen Anda?
12. Apakah argumen Anda masuk akal / logis, atau lebih bersifat emosional? Atau di antara keduanya? Dimana Anda dapat menggunakan salah satu argumen di atas dengan sebaik-baiknya.
13. Kapan saat terbaik untuk mengajukan proposal Anda? Bagaimana agar Anda dapat menggunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya?
14. Dimana Anda ingin negosiasi tersebut diadakan? Dikandang sendiri? Di kandang mereka [lawan]? Di tempat netral?
15. Siapakah yang Anda inginkan untuk memimpin pertemuan? Anda atau mereka?
16. Bagaimana seharusnya tingkat realitas permintaan pertama Anda? Anda ingin mengajukan suatu permintaan pembukaan? atau menggunakan pendekatan problem solving ?
17. Pada tahap apa sebaiknya Anda memberikan informasi? atau menahannya?
18. Apakah Anda memiliki kemampuan teknis/ know how dalam menegosiasikan pokok-pokok persoalan secara efektif? di mana Anda dapat memperoleh dukungan dalam bidang tersebut, jika perlu?
19. Apakah Anda memiliki kemampuan sosial dalam mengelola hubungan Anda dengan pihak lain?

Berkali-kali laporan media massa dipenuhi dengan berita-berita emosional, seperti negosiasi mengalami 'jalan buntu'/ deadlock, tuntutan-tuntutan, walk-out, dsb. Situasi-situasi semacam itu sebagian besar terjadi karena pihak-pihak yang bernegosiasi bersikeras menyatakan dan mempertahankan posisi mereka, jelas, dalam situasi demikian negosiasi sama sekali tidak akan mencapai kemajuan. Pendirian ini lebih sering disertai kepentingan pihak-pihak yang dilalaikan, dengan hasil kesepakatan akhir yang tidak memuaskan pihak manapun. Oleh karena itu, golden rule dalam bernegosiasi adalah selalu menegosiasikan kepentingan bukan pendirian [position]; jangan

mengambil suatu pendirian kecuali jika hal itu bermanfaat bagi kepentingan-kepentingan tsb. Bukan tujuan-tujuan pribadi anda dalam negosiasi – Anda adalah seorang duta bukan seorang individu.

e) Gaya-gaya negosiasi

Dalam gaya negosiasi dapat dijelaskan dalam dua dimensi, yaitu arah dan kekuatan.

1) Arah berbicara tentang cara kita menangani informasi.

- Mendorong [push] : memberi informasi, mengajukan usul, melalaikan kontribusi orang lain, mengkritik, bertindak sebagai pengganggu–semua taktik yang berlaku tergantung sifat dan konteks negosiasi.
- Menarik [pull] : mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi, meminta saran, memastikan pemahaman, meminta kejelasan, menyatakan perasaan kita.

2) Kekuatan berbicara tentang keluwesan kita untuk beranjak dari kedudukan kita yang semula.

- Bersikap keras: kita ingin menang berapapun harganya, tidak akan mengalah atau mundur, tidak akan menerima tawaran apapun. Kita mengejar sasaran yang tinggi
- Bersikap lunak: kita mengalah, ragu-ragu, sulit untuk berkata tidak, menyesuaikan diri–sasaran yang kita kejar rendah. Kita dapat mengambil sikap keras dalam beberapa persoalan dan bersikap lunak dalam persoalan-persoalan yang lain: hal ini memberikan petunjuk jelas mengenai hasil yang menjadi prioritas.

f) Mencari penyelesaian

Dalam mencari penyelesaian, tujuan Anda hendaknya agar kedua pihak memperoleh kemenangan, atau seburuk-buruknya dinyatakan seri. Analogi berikut ini adalah contoh pilihan-pilihannya.

1. KALAH/ KALAH Singkirkan kue tsb agar tidak satu pihakpun mendapatkannya.
2. MENANG/ KALAH Berikan kue tsb kepada salah satu pihak atau iris dengan tidak sama rata.
3. SERI Iris kue tsb tepat di tengah-tengah
4. MENANG/ MENANG Buat dua buah kue atau buat kue yang jauh lebih besar.

Temukan dulu kepentingan yang sama, baru kemudian mencari kepentingan yang saling bersaing dengan metode berikut:

1. Ciptakan suasana yang memungkinkan kedua pihak untuk sebanyak mungkin mengemukakan buah pikiran yang relevan bagi suatu pemecahan.
2. Hindari penilaian dini sehingga semua buah pikiran telah dikemukakan.
3. Pusatkan perhatian pada masalah, bukan pada pribadi yang terlibat.
4. Ketahui apa yang hendak Anda capai.
5. Jangang menanggapi pertanyaan-pertanyaan retorik yang dimanfaatkan untuk mendukung kedudukan, bukan untuk mengemukakan kepentingan.

g) Situasi fall back

Sering terjadi dalam negosiasi pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai kemajuan dalam negosiasi, betapapun besar keinginan kedua pihak untuk mencapai suatu solusi. Maka Anda perlu mempersiapkan dan menerapkan BATNA [suatu situasi dimana Anda berada dalam posisi harus mencapai kesepakatan, dan mitra Anda menyadari hal tsb]. BATNA = BEST ALTERNATIF TO A NEGOTIATED AGREEMENT atau Alternatif Terbaik untuk Mencapai Kesepakatan melalui Negosiasi [Fisher dan Urg, *Getting to Yes*, Hutchinson]. Dengan adanya BATNA, anda mungkin tertolong untuk meneruskan negosiasi secara fleksibel yaitu:

1. Mengetahui alternatif terbaik dari kegagalan mencapai kepentingan utama Anda.
2. Memperkirakan nilai BATNA Anda dalam hubungan dengan tawaran terbaik yang ada.
3. Contoh : Dalam negosiasi harga dengan seorang pembeli, Anda disiapkan [dan diijinkan] untuk memberikan rabat hingga 20 % harga yang ditawarkan. Anda membuka penjualan dengan rabat 10 %, yang segera ditolak, dan ditawarkan 30%. Sebenarnya, pihak lain bersedia menerima 10%, namun Anda tidak mengetahui hal itu. Di sini terjadi tumpang tindih posisi fall back, jadi hasil optimal jatuh dalam taksiran realistis kedua pihak mengenai kesepakatan

yang dapat dicapai dan hasil antara 15 % hingga 20 % dapat disepakati. Besar rabat yang akhirnya disepakati tergantung pada :

4. Kelihaihan penjual maupun pembeli dalam bernegosiasi.
5. Berapa banyak yang dibutuhkan penjual untuk melepaskan penjualan.
6. Tingkat desakan kebutuhan pembeli terhadap barang tsb.
7. Menaksir posisi fall back

h) Perilaku dalam negosiasi

Dalam negosiasi seringkali kita berhadapan dengan dengan orang-orang yang lebih suka mempertahankan pendirian yang kaku, dengan gaya garis keras, tanpa menyadari adanya alternatif yang lebih efektif. Jika hal ini terjadi, petunjuk berikut perlu Anda perhatikan:

1. Pertahankan pendekatan yang sopan dan profesional
2. Jangan membalas perilaku yang tidak menyenangkan
3. Terus menegosiasikan kepentingan Anda, sambil bertanya tentang alasan pendirian mereka dan cobalah untuk memperlihatkan kelemahan pendirian mereka dengan diskusi yang logis dan masuk akal.
4. Mintalah pandangan dan kritikan terhadap pendirian Anda, sarankan lawan Anda untuk mencoba melihat situasi dari sudut pandang Anda.
5. Pusatkan pada permasalahan yang sedang dibahas
6. Jangananggapi serangan yang bersifat pribadi dan tidak masuk akal dengan tetap berdiam diri.
7. Mintalah kriteria, alasan-alasan, data-data pendukung, kesimpulan atau petunjuk yang obyektif.
8. Perlihatkan antusiasme Anda untuk suatu solusi yang adil dan ungkapkan kembali kesediaan Anda untuk mencapai dan menyetujui kriteria yang obyektif.
9. Perhatikan tanda-tanda adanya kerjasama dan beri dukungan, sambutan, pujian, dan kepastian bahwa kerjasama akan menjadi pusat perhatian Anda.
10. Secara periodik buatlah ringkasan bidang-bidang yang telah mencapai kesepakatan, dengan memperlihatkan antusiasme Anda pada langkah-langkah yang telah berhasil membawa kesepakatan.

Jangan menanggapi trik-trik berikut :

1. Serangan terhadap pribadi, nama orang, dll
2. Komentar-komentar yang menyesatkan, rumor, dan kebenaran yang tidak utuh.
3. Pertanyaan-pertanyaan retorik
4. Hal-hal yang menyerempet bahaya
5. Tuntutan yang tinggi dan mustahil
6. Sarkasme
7. Upaya-upaya untuk membuat Anda stress
8. Diperkenalkannya pada menit terakhir orang baru yang berwenang membuat keputusan, setelah sebelumnya Anda mendapat penjelasan bahwa Anda tengah bernegosiasi dengan pembuat keputusan.

Jika semua upaya gagal, bersiaplah untuk menunda diskusi. Gunakan waktu penundaan untuk:

1. Menurunkan ketegangan
2. Mempelajari kembali pokok-pokok yang telah disetujui dan item-item yang belum dibahas
3. Mempelajari kembali situasi negosiasi
4. Mengamati lebih lanjut mitra negosiasi Anda.
5. Mencari persetujuan atau otorisasi lebih lanjut yang mungkin Anda butuhkan.

j) Mengakhiri Negosiasi

Untuk memantau perkembangan negosiasi, hal-hal berikut perlu diperhatikan:

1. Apakah semua pihak memahami dengan jelas apa yang telah disepakati?
2. Apakah semua pihak berkomitmen terhadap kesepakatan tsb?
3. Apakah diperlukan pertemuan lain untuk membahas pokok-pokok yang kecil [atau yang besar? kapan?
4. Bagaimana perasaan kedua pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat? Apakah dirasa adil?
5. Apakah kita puas? Apakah justru kita saling mengecam? Saling mempertahankan pendirian ? kecewa?

Tahapan-tahapan Negosiasi

Pada dasarnya negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Di sinilah seringkali banyak di antara kita tidak menyadari bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Ini seperti gambaran sebuah gunung es, di mana puncak yang kelihatan merupakan hal-hal yang formal, tuntutan yang dinyatakan dengan jelas, kebijakan atau prosedur perusahaan, maupun hubungan atau relasi bisnis yang didasarkan pada hitungan untung rugi.

Sedangkan yang sering dilupakan dalam proses negosiasi adalah hal-hal yang tidak kelihatan, seperti misalnya hasrat, keinginan, perasaan, nilai-nilai maupun keyakinan yang dianut oleh individual yang terlibat dalam konflik atau yang terlibat dalam proses negosiasi. Hal-hal yang di dalam inilah justru seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif. Negosiasi sebenarnya melibatkan tiga hal pokok yang kami sebut sebagai Negotiation Triangle, yaitu terdiri dari HEART (yaitu karakter atau apa yang ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi), HEAD (yaitu metoda atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi), HANDS (yaitu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi).

Jadi sebenarnya tidaklah cukup melakukan negosiasi hanya berdasarkan hal-hal formal, kebijakan dan prosedur, atau teknik-teknik dalam negosiasi. Justru kita perlu menggunakan ketiga komponen tersebut yaitu: karakter, metoda dan perilaku. Dalam banyak hal, negosiasi justru tidak terselesaikan di meja perundingan atau meja rapat formal, tetapi justru dalam suasana yang lebih informal dan relaks, di mana kedua pihak berbicara dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya. Karena pada dasarnya selain hal-hal formal yang ada dalam proses negosiasi, setiap manusia memiliki keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap langkah pengambilan keputusan yang dilakukannya.

Langkah-langkah Bernegosiasi Persiapan

Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah langkah persiapan. Tahap ini sangat penting karena persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Hal tersebut akan memberikan rasa percaya diri yang kita butuhkan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama harus kita lakukan dalam langkah persiapan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Tanpa tujuan yang terukur, kita tidak memiliki pegangan untuk melakukan tawar-menawar atau berkompromi dengan pihak lainnya.

Kedua, kenali karakter dan latar belakang lawan negosiasi kita. Gali informasi sebanyak mungkin mengenai siapa dia/mereka, kekuatan dan kelemahannya, apa tujuan atau kepentingannya. Tujuan yang jelas dan terukur disertai pengetahuan atas lawan negosiasi akan memudahkan kita menyusun elemen ketiga, yaitu beberapa alternatif skenario. Menyusun alternatif ini penting dilakukan agar kita selalu tanggap menghadapi berbagai kemungkinan situasi. Dalam hal ini, menyangkut juga apa tawaran maksimum dan minimum yang bisa kita berikan sesuai tujuan kita. Hal terakhir yang tak kalah pentingnya adalah kesiapan mental kita. Usahakan kita dalam kondisi relaks dan tidak tegang. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan relaksasi. Bagi kita yang menguasai teknik pemrograman kembali bawah sadar (subconscious reprogramming) kita dapat

melakukan latihan negosiasi dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga setelah melakukannya berkali-kali secara mental, kita menjadi lebih siap dan percaya diri.

Pembukaan.

Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu menciptakan atmosfir atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, kita perlu memiliki rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan kita melakukan negosiasi. Ada tiga sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi yaitu: pleasant (menyenangkan), assertive (tegas, tidak plin-plan), dan firm (teguh dalam pendirian). Senyum juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi, sehingga hal tersebut akan memberikan perasaan nyaman dan terbuka bagi kedua pihak. Berikut ada beberapa tips dalam mengawali sebuah negosiasi: Jangan memegang apa pun di tangan kanan anda ketika memasuki ruangan negosiasi;

1. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dulu;
2. Jabat tangan dengan tegas dan singkat;
3. Berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan.

Selanjutnya dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun rasa percaya.

Memulai proses negosiasi. Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan (proposing) apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan kita tersebut adalah:

1. Tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi;
2. Sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak anda secara jelas, singkat dan penuh percaya diri;
3. Tekankan bahwa anda atau organisasi anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka;
4. Sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi, jangan membuat hanya dua pilihan ya atau tidak;
5. Sampaikan bahwa "jika anda memberi kami itu, kami akan memberi anda ini– *if you'll give us this, we'll give you that.*" Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan.
6. Hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Mendengar dengan efektif memerlukan kebiasaan dan teknik-teknik tertentu. Seperti misalnya bagaimana mengartikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah pembicara. Usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan kita berada dalam kondisi yang relaks namun penuh perhatian.

Zona Tawar Menawar (The Bargaining Zone).

Dalam proses inti dari negosiasi, yaitu proses tawar menawar, kita perlu mengetahui apa itu The Bargaining Zone (TBZ). TBZ adalah suatu wilayah ruang yang dibatasi oleh harga penawaran pihak penjual (Seller's Opening Price) dan Tawaran awal oleh pembeli (Buyer's Opening Offer). Di antara kedua titik tersebut terdapat Buyer's Ideal Offer, Buyer's Realistic Price dan Buyer's Highest Price pada sisi pembeli dan Seller's Ideal Price, Seller's Realistic Price dan Seller's Lowest Price pada sisi penjual. Kesepakatan kedua belah pihak yang paling baik adalah terjadi di dalam wilayah yang disebut Final Offer Zone yang dibatasi oleh Seller's Realistic Price dan Buyer's Realistic Price. Biasanya kesepakatan terjadi ketika terdapat suatu overlap antara pembeli dan penjual dalam wilayah Final Offer Zone. Menurut G. Richards Shell, ada tiga macam tipe negosiator dalam etika penawaran yaitu: Poker school, Idealist School, dan Pragmatist School.

The “It’s a Game” Poker School

1. Orang yang mempunyai pandangan poker school memandang bahwa negosiasi adalah sebuah permainan dengan aturan pasti. Bertindak sesuai aturan dianggap etis sedangkan apabila bertindak sebaliknya dianggap tidak etis
2. Orang yang berpandangan tersebut terkadang mengizinkan cara-cara curang dalam memenangkan negosiasi asal cara-cara tersebut tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.
3. Orang yang memiliki pandangan “poker school” memiliki tiga masalah pokok yaitu: (1) Mereka beranggapan bahwa penawaran dengan cara mengancam adalah sebuah permainan (2) Semua orang dianggap memiliki aturan yang sama (setiap orang dianggap akan melakukan hal yang sama), (3) Aturan tersebut dianggap bertentangan dengan sebuah aturan yurisdiksi tunggal yang berlaku (Aturan apapun akan diabaikan jika bertentangan dengan satu aturan pokok negosiasi: MENANG!).

The “Do the Right Thing Even If It Hurts” Idealist School.

1. Orang yang mempunyai pandangan Idealis berpendapat bahwa proses penawaran adalah salah satu aspek kehidupan sosial bukan sebuah aktivitas spesial dengan keunikannya sendiri dalam membuat aturan.
2. Seorang idealis tidak akan mengizinkan penggunaan cara – cara curang walaupun tidak melanggar aturan dalam sebuah negosiasi.
3. Seorang idealis dalam melakukan suatu negosiasi mendasarkan pandangannya pada filosofi dan agama yang dianut.
4. Seorang idealis mengizinkan anggapan bahwa kecurangan pada negosiasi akan menurunkan moralitas dan kepercayaan dengan teman, menghilangkan rasa tanggung jawab pada orang lain, dsb.
5. Seorang idealist sangat tidak menyetujui bahwa sebuah negosiasi dianggap sebagai permainan. Negosiasi adalah sesuatu hal yang dianggap serius dan memiliki konsekuensi pada masa yang akan datang.
6. Seorang idealis juga menganggap bahwa seorang poker school dianggap predator yang akan mematikan lawannya dan egois karena lebih mementingkan dirinya sendiri. The “ What Goes Around Comes Around” Pragmatist School.
7. Karakter orang seperti ini masih menyadari tentang tidak etisnya sebuah kecurangan dalam bernegosiasi tetapi pada situasi tertentu dia tetap melakukannya karena dianggap tidak melanggar aturan.
8. Mereka lebih sering melakukan dan mengizinkan kebohongan sebagai salah satu trik negosiasi dibanding seorang idealis.
9. Ada lima cara yang dilakukan seorang pragmatisme untuk memblok dan menghindari bencana untuk melindungi kepentingan mereka, yaitu: (1) Menyatakan bahwa pertanyaan itu di luar batas; (2) Menjawab dengan pertanyaan yang berbeda; (3) Menghindar dari pertanyaan tersebut; (4) Memberi pertanyaan pada diri anda sendiri; (5) Mengubah subyek dari pertanyaan tersebut.

Membangun Kesepakatan. Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan (deal or agreement) telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Yang perlu kita ketahui dalam negosiasi tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing atau salah satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan harus dibangun dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak, sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan. Karena itu, penting sekali dalam awal-awal negosiasi kita memahami dan mengetahui sikap dari pihak lain, melalui apa yang disampaikan secara lisan, bahasa gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Karena jika sejak awal salah satu pihak ada yang tidak memiliki niat atau keinginan untuk mencapai kesepakatan, maka hal tersebut berarti membuang waktu dan energi kita. Untuk itu perlu dicari jalan lain, seperti misalnya: conciliation, mediation dan arbitration melalui pihak ketiga.[]

Hand-Out 54 TEKNIK AGITASI DAN PROPAGANDA

Pengantar

Istilah agitasi, propaganda, dan retorika atau orang sering menyebutnya AGITOP (Agitasi, Orasi dan Propaganda) adalah bagian dari “cara” berkomunikasi. Sebetulnya ada banyak cara berkomunikasi lainnya seperti penerangan, jurnalistik, humas, publisitas, pameran, dll. Seperti apa yang menjadi tujuan umum dari komunikasi maka AGITOP ditujukan juga untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku orang lain seperti yang diharapkan oleh komunikator (pengirim pesan).

Karena terkait masalah perilaku individu dalam situasi sosial, AGITOP tidak lepas dari masalah psikologi sosial. AGITOP akan menjadi efektif apabila disertai dengan pemahaman atas faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi sikap, maupun perilaku individu maupun kelompok. Faktor internal seperti kepribadian, sistem nilai, motivasi, serta sikap terhadap sesuatu yang ada disekitarnya, sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh sistem nilai yang hidup ditengah masyarakat, kondisi lingkungan alam, tata ruang dan kondisi sosial ekonomi.

AGITOP menjadi penting bagi organisasi masyarakat (ormas) maupun partai politik (parpol) hingga perusahaan komersial sekalipun karena menyangkut upaya-upaya untuk mencapai kemenangan maupun mempengaruhi sikap, pendapat maupun perilaku dari pihak-pihak lain baik itu pihak musuh (politik, ideologi, saingan bisnis), pihak netral maupun kawan. Bagi ormas atau Parpol, muara dari AGITOP ditujukan bagi sasaran pencapaian ke arah cita-cita perubahan sosial dari ideologi ormas, atau parpol yang bersangkutan.

Seorang Komunikator (agitator, propagandator, ataupun orator) yang baik, setidaknya harus mengerti unsur-unsur dasar komunikasi. Pakar komunikasi Harold Lasswell (1972) menyebutnya dalam pertanyaan: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect ?. (Siapa mengatakan apa melalui apa untuk siapa dan pengaruhnya apa ?). Siapa (Komunikator), mengatakan apa (Pesan), melalui apa (Media), untuk siapa (komunikas/penerima pesan), pengaruhnya apa (efek). Analisa yang mendalam terhadap unsur-unsur komunikasi diatas juga akan turut mempertajam strategi komunikasi bagi sebuah organisasi.

Agitasi

Dalam makna denotatifnya, agitasi berarti hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan dan lain sebagainya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh tokoh/aktivis partai politik, ormas dan lain sebagainya dalam sesi pidato maupun tulisan. Dalam praktek, dikarenakan kegiatan agitasi yang cenderung “menghasut” maka seringkali disebut sebagai kegiatan “provokasi” atau sebagai perbuatan untuk membangkitkan kemarahan. Bentuk agitasi sebetulnya bisa dilakukan secara individual maupun dalam basis kelompok (massa). Beberapa perilaku kolektif yang dapat dijadikan sebagai pemicu dalam proses agitasi adalah:

1. Perbedaan kepentingan, seperti misalnya isu SARA (Suku, Agama, Ras). Perbedaan kepentingan ini bisa menjadi titik awal keresahan masyarakat yang dapat dipicu dalam proses agitasi
2. Ketegangan sosial, ketegangan sosial biasanya timbul sebagai pertentangan antar kelompok baik wilayah, antar suku, agama, maupun pertentangan antara pemerintah dengan rakyat.
3. Tumbuh dan menyebarnya keyakinan untuk melakukan aksi, ketika kelompok merasa dirugikan oleh kelompok lainnya, memungkinkan timbul dendam kesumat dalam dirinya. Hal ini bisa menimbulkan keyakinan untuk dapat melakukan suatu aksi bersama;

Dalam politik, ketiga perilaku kolektif diatas akan menjadi ledakan sosial apabila ada faktor penggerak (provokator)nya. Misalnya ketidakpuasan rakyat kecil terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada mereka juga bisa menjadi sebuah alat pemicu yang efektif untuk mendongkel sebuah rezim. Dalam tahap selanjutnya, mobilisasi massa akan terbentuk apabila ledakan sosial yang muncul dapat memancing solidaritas massa. Hingga pada eskalasi tertentu mabisa munculkan kondisi *collaps*.

Dalam proses agitasi pemahaman perilaku massa menjadi penting. Agar agitasi dapat dilakukan secara efektif maka perlu diperhatikan sifat orang-orang dalam kelompok(massa) seperti ; massa yang cenderung tidak rasional, mudah tersugesti, emosional, lebih berani mengambil resiko, tidak bermoral. Kemampuan seorang agitator untuk mengontrol emosi massa menjadi kunci dari keberhasilan proses agitasi massa. Sedangkan pendekatan hubungan interpersonal merupakan kunci sukses dalam agitasi individu.

Propaganda

Propaganda sendiri berarti penerangan (paham, pendapat, dsb) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang lain agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Kegiatan propaganda ini banyak dipakai oleh berbagai macam organisasi baik itu orgnisasi massa, parpol, hingga perusahaan yang berorientasi profit sekalipun baik kepada kawan, lawan maupun pihak netral. Propaganda juga merupakan inti dari kegiatan perang urat syaraf (nerve warfare) baik itu berupa perang ideologi, politik, ide, kata-kata, kecerdasan, dll. Kegiatan propaganda menurut bentuknya seringkali digolongkan dalam dua jenis, yaitu propaganda terbuka dan tertutup. Propaganda terbuka ini dilakukan dengan mengungkapkan sumber, kegiatan dan tujuannya secara terbuka. Sebaliknya, propaganda tertutup dilakukan dengan menyembunyikan sumber kegiatan dan tujuannya.

Para pakar organisasi menggolongkan 3 (tiga) jenis model propaganda. Menurut William E Daugherty, ada 3 (tiga) jenis propaganda :

1. *Propaganda putih* (white propaganda), yaitu propaganda yang diketahui sumbernya secara jelas, atau sering disebut sebagai propaganda terbuka. Misalnya propaganda secara terang-terangan melalui media massa. Biasanya propaganda terbuka ini juga dibalas dengan propaganda dari pihak lainnya (counter propaganda).
2. *Propaganda Hitam* (black propaganda), yaitu propaganda yang menyebutkan sumbernya tapi bukan sumber yang sebenarnya. Sifatnya terselubung sehingga alamat yang dituju sebagai sumbernya tidak jelas.
3. *Propaganda abu-abu* (gray propaganda), yaitu propaganda yang mengaburkan proses indentifikasi sumbernya.

Penerbit Harcourt, Brace and Company menyebarkan publikasi berjudul *The Fine Art of Propaganda* atau yang sering disebut sebagai *the Device of Propaganda* (muslihat propaganda) yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis propaganda sebagai berikut:

1. *Penggunaan nama ejekan*, yaitu memberikan nama-nama ejekan kepada suatu ide, kepercayaan, jabatan, kelompok bangsa, ras dll agar khalayak menolak atau mencercanya tanpa mengkaji kebenarannya.
2. *Penggunaan kata-kata muluk*, yaitu memberikan istilah muluk dengan tujuan agar khalayak menerima dan menyetujuinya tanpa upaya memeriksa kebenarannya.
3. *Pengalihan*, yaitu dengan menggunakan otoritas atau prestise yang mengandung nilai kehormatan yang dialihkan kepada sesuatu agar khalayak menerimanya.
4. *Pengutipan*, yaitu dilakukan dengan cara mengutip kata-kata orang terkenal mengenai baik tidaknya suatu ide atau produk, dengan tujuan agar publik mengikutinya.
5. *Perendahan diri*, yaitu teknik propaganda untuk memikat simpati khalayak dengan meyakinkan bahwa seseorang dan gagasannya itu baik.
6. *Pemalsuan*, yaitu dilakukan dengan cara menutup-nutupi hal-hal yang faktual atau sesungguhnya dengan mengemukakan bukti-bukti palsu sehingga khalayak terkecoh.
7. *Hura-hura*, yaitu propaganda dengan melakukan ajakan khalayak secara beramai-ramai menyetujui suatu gagasan atau program dengan terlebih dahulu meyakinkan bahwa yang lainnya telah menyetujui.

Seperti halnya komunikasi lainnya maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan propaganda:

1. Siapa yang dijadikan sasaran propaganda, kawan, lawan, atau pihak netral
2. Media apa yang akan dipergunakan, surat kabar, radio, majalah, televisi, sms, buku, film, pamlet, poster dll. Untuk musuh misalnya melalui desas-desus dan pihak netral dengan negosiasi atau diplomasi
3. Pesan apa yang akan disebarkan
4. Apa yang menjadi tujuan dari propaganda, misalnya ketakutan, kekacauan, ketidakpercayaan dsb.

Retorika

Retorika menurut arti katanya adalah ilmu bicara (rhetorica). Menurut Cleanth Brooks dan Robert Penn Warren adalah seni penggunaan bahasa secara efektif. Namun sebagian besar pakar komunikasi mengartikan retorika tidak hanya menyangkut pidato (public speaking), tapi juga termasuk seni menulis. Menurut A. Hitler hakekat retorika adalah senjata psikis untuk untuk memelihara massa dalam keadaan perbudakan psikis.

Retorika sebagai seni berbicara sudah dipelajari sejak abad ke lima sebelum masehi, yaitu sejak kaum Sophis di Yunani mengajarkan pengetahuan mengenai politik dan pemerintahan dengan penekanan utama dalam kemampuan berpidato. Georgias (480-370 SM) sebagai tokoh aliran Sophisme menyatakan kebenaran suatu pendapat hanya dapat dibuktikan jika tercapai kemenangan dalam pembicaraan.

Namun karena dalam praktek retorika lebih cenderung dimaksudkan untuk memutarbalikan fakta demi kemenangan, maka Plato mendirikan akademi sebagai proses pencarian kebenaran dengan pengembangan thesa dan antithesa. Menurut Plato sendiri retorika bertujuan untuk memberikan kemampuan menggunakan bahasa yang sempurna dan merupakan jalan bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan dalam terutama dalam bidang politik.

Menurut Effendy, dengan mencontohkan pada figur Bung Karno, seorang orator politik yang baik setidaknya harus memiliki tiga prasyarat sebagai berikut : Ethos, kredibilitas sumber. Pathos, menunjukkan imbauan emosional. Logos, menunjukkan imbauan logis.

Menurut teori, setidaknya ada empat bagian dalam pidato :

1. *Exordium* (kepala), adalah bagian pendahuluan. Fungsinya sebagai pengantar ke arah pokok persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk menyiapkan mental para hadirin. Yang terpenting adalah membangkitkan perhatian. Beberapa cara untuk mengundang perhatian adalah sebagai berikut: Mengemukakan kutipan, mengajukan pertanyaan, menyajikan ilustrasi yang spesifik, memberikan fakta yang mengejutkan, menyajikan hal yang mengundang rasa manusiawi, menengahkan pengalaman yang ganjil. Tentu dari sekian cara tersebut juga harus disesuaikan dengan latar belakang kebudayaan dan pendidikan.
2. *Protesis* (Punggung), adalah bagian pokok pembahasan yang ditampilkan dengan terlebih dahulu mengemukakan latar belakangnya.
3. *Argumenta* (Perut), adalah batang tubuh dari pidato yang merupakan satu kesatuan dengan punggung atau pokok pembahasan. Argumenta adalah alasan yang mendukung hal-hal yang dikemukakan pada bagian protesis.
4. *Conclusio* (ekor), adalah bagian akhir dari naskah pidato yang merupakan kesimpulan dari uraian keseluruhan sebelumnya. Konklusia adalah merupakan sebuah penegasan, hasil pertimbangan yang mengandung justifikasi si orator. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun conclusio : jangan mengemukakan fakta baru, jangan menggunakan kata-kata mubazir, jangan menampilkan hal-hal yang menimbulkan antiklimaks.

Pidato dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan teks dan tanpa teks. Namun semuanya harus tetap dipersiapkan dengan baik. Pepatah tua mengatakan "*Qui ascendit sine labore, descendit sine honore*" (siapa yang naik tanpa kerja, akan turun tanpa penghormatan").[]

Hand-Out 55 PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Prawacana

Proses membangun organisasi masyarakat disebut pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian dalam masyarakat mungkin bagi sebagian warga merupakan istilah yang baru, tetapi konsep ini sudah dikenal luas di kalangan organisasi umum yang lain. Pengorganisasian bisa menjadi kebutuhan ketika realitas kehidupan sosial masyarakat sudah berkembang sedemikian kompleksnya, sehingga sebuah usaha tidak bisa dilakukan secara individual lagi (warga-perwargaan) melainkan harus menjadi usaha bersama dalam bentuk kelompok. Dengan demikian, pada pengertian yang paling sederhana, Konsep serba bersama ini merupakan batas pembeda antara upaya pengorganisasian masyarakat dengan upaya perwargaan maupun strategi menyerahkan segala sesuatunya pada pemimpin yang sudah pasti dilakukan secara individual. Dalam membangun organisasi masyarakat ada beberapa penekanan dan pemisahan secara manajemen pengorganisasiannya. Pemisahan manajemen pengorganisasian ditujukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul di tingkatan masyarakat. Permasalahan yang muncul bisa dibedakan dalam dua hal, secara internal dan eksternal. Begitu pula cara membangun organisasi masyarakat dengan internal dan eksternal dengan harapan organisasi mampu mengatasi dua persoalan ini secara baik.

Landasan & Tujuan pengorganisasian Landasan Pengorganisasian

Landasan filosofis dari kebutuhan untuk membangun organisasi adalah membangun kepentingan secara bersama-sama pada seluruh masyarakat, karena masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang mendasar dari kondisi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Dalam konteks masyarakat, perubahan sosial juga menyangkut multidimensional. Dalam dimensi ekonomi seringkali 'dimimpikan' terbentuknya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat. Dalam segi politik selalu diinginkan keleluasaan dan kebebasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berkompetisi serta diakui hak-hak sipil dan politiknya. Sedangkan dalam sisi budaya, dirasakan ada keinginan untuk mengekspresikan kearifan kebudayaan lokal. Landasan filosofis pengorganisasian lainnya adalah melakukan adalah *pemberdayaan*. Karena pada dasarnya masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan perubahan sosial. Pengorganisasian masyarakat bertujuan agar masyarakat menjadi penggagas, pemrakarsa, pendiri, penggerak utama sekaligus penentu dan pengendali kegiatan-kegiatan perubahan sosial yang ada dalam organisasi masyarakat.

Tujuan Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam sebuah organisasi masyarakat ditujukan untuk membangun dan mengembangkan organisasi. Pengorganisasian mempunyai peranan yang luar biasa bagi organisasi secara internal dan eksternal. Secara internal tujuan pengorganisasian adalah membangun organisasi masyarakat. Secara eksternal tujuan pengorganisasian adalah membangun jaringan antar organisasi masyarakat untuk menghadapi masalah-masalah bersama atau lebih ditujukan untuk membangun kekuatan bersama yang lebih besar lagi. Selain itu, tujuan pengorganisasian adalah menyelesaikan konflik-konflik atau masalah-masalah yang terjadi di tengah warga masyarakat yang setiap saat muncul dan harus segera diselesaikan untuk menuju perubahan sosial yang lebih baik.

Manfaat Melakukan Pengorganisasian

Mengorganisir diri punya manfaat dan organisasi diri punya manfaat dalam *jangka pendek*, mengorganisir diri adalah suatu alat efektif untuk membuat sesuatu terlaksana; memperbaiki pelayanan pada masyarakat, termasuk pelayanan dalam bidang ekonomi (modal-teknologi), menurunkan beban pajak, memastikan jaminan lapangan kerja, perubahan kebijakan di tingkat masyarakat atau di luar, memperbaiki pelayanan angkutan umum dan kesehatan, melindungi

lingkungan hidup dan alam sekitarnya, serta sebagainya. Intinya, banyak diantara masalah keseharian yang kita hadapi saat ini dapat dipecahkan dan dirubah dengan cara mengorganisir diri.

Mengorganisir diri juga punya manfaat *jangka panjang* yang mungkin jauh lebih penting. Melalui proses-proses pengorganisasian, masyarakat bisa belajar sesuatu yang baru tentang diri sendiri. Masyarakat akan menemukan bahwa harga diri dan martabat mereka selama ini selalu diabaikan dan diperdayakan. Dengan pengorganisasian, masyarakat, warga dapat menemukan bahwa kehormatan dan kedaulatan mereka selama ini justru tidak dihargai *karena ketiadaan kepercayaan diri di antara warga masyarakat sendiri*. Warga masyarakat dengan demikian akan mulai belajar bagaimana caranya mendayagunakan semua potensi, kemampuan dan ketrampilan yang mereka miliki dalam proses-proses pengorganisasian; bagaimana bekerja bersama dengan warga lain, menyatakan pendapat dan sikap mereka secara terbuka, mempengaruhi kebijakan resmi, menghadapi lawan atau musuh bersama. Akhirnya, melalui pengorganisasian, masyarakat mulai mengenal dan menemukan diri mereka sendiri. Warga masyarakat akan bisa menemukan siapa mereka sebenarnya selama ini, berasal dari mana, seperti apa latar belakang mereka, sejarah mereka, cikal-bakal mereka, akar budaya mereka serta kepentingan bersama mereka. Warga masyarakat akan menemukan kembali sesuatu yang bermakna dalam lingkungan keluarga mereka, kelompok suku atau bahasa asal mereka yang memberi mereka kembali martabat dan kekuatan baru.

Kerja Pengorganisasian (Pengorganisir)

Salah satu kerja penting dari pengorganisasian adalah pengorganisir. Hal menakjubkan dalam keseluruhan proses mengorganisir adalah ternyata hal itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Pengorganisir seringkali dikesankan sulit atau bahkan musykil. Tetapi dalam kenyataannya, mengorganisir adalah suatu proses yang sebenarnya tidak ruwet. Itu tergantung pada *ketrampilan dasar* yang sebagian besarnya sebenarnya sudah dimiliki oleh masyarakat dalam kadar yang sama dan memadai. Salah satu contoh yang cukup relevan dengan hal ini adalah ketrampilan sehari-hari untuk hidup bersama yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pelembagaan kerja bersama sudah terwujud ke dalam berbagai macam kerja organisasi asli seperti "upacara", "gotong-royong", dan sebagian. Memang tidak ada resep serba jadi dalam proses pengorganisir, ada beberapa langkah tertentu yang perlu dilakukan dalam keadaan tertentu pula. Tetapi semua langkah itu sebenarnya sederhana dan mudah dipelajari oleh warga sekalipun. Dengan demikian, semua warga dapat mengorganisir. Semua warga dapat belajar tentang asas-asas pengorganisasian. Tidak ada yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain.

Mengapa Warga Mengorganisir Diri atau Menolak untuk itu?

Warga-warga masyarakat mengorganisir diri karena beberapa alasan yang mungkin berbeda. Adakalanya diperlukan pendekatan agar alasan yang beragam itu bisa dijadikan satu landasan untuk menghimpun diri bersama-sama. Dengan demikian salah satu landasan awal dari upaya mengorganisir diri adalah tersedianya landasan bersama (*common platform*), baik berupa nilai, institusi dan mekanisme bersama. Misalnya, pengorganisasian harus jelas visi dan misi yang ingin dicapai dari upaya pengorganisasian itu. Visi dan Misi itulah kemudian diturunkan ke dalam strategi dan program yang bisa menjawab kebutuhan anggota secara lebih jelas.

Mengapa sebagian warga tidak mengorganisir diri? Tidak semua warga yang mempunyai masalah lantas mengorganisir diri. Beberapa warga akan tetap berkutat mencoba menyelesaikannya sendirian, meskipun sudah terbukti berkali-kali gagal atau kurang berhasil. Ada banyak alasan mengapa warga menolak berhimpun dengan warga lain: ada sebagian warga pengorganisasian merupakan hal baru, merasa cemas karena akan dimintai sesuatu atau melakukan sesuatu yang mereka yakini belum pasti, takut dimintai pertanggungjawaban atau menyatakan pendapatnya di depan umum. Alasan lain adalah takut pada apa yang bakal terjadi jika pengorganisasi itu nanti sudah berjalan, mereka akan mendapatkan tantangan, rintangan ataupun akibat-akibat lain yang dirasakan memberatkan. *Karena alasan-alasan tersebut di atas menyebabkan banyak warga lebih memilih untuk menggunakan cara-cara pemecahan persoalan secara perwargaan, terhadap banyak persoalan yang sebnarnya dirasakan oleh banyak warga.*

Dimana melakukan Kerja-Kerja Pengorganisasian

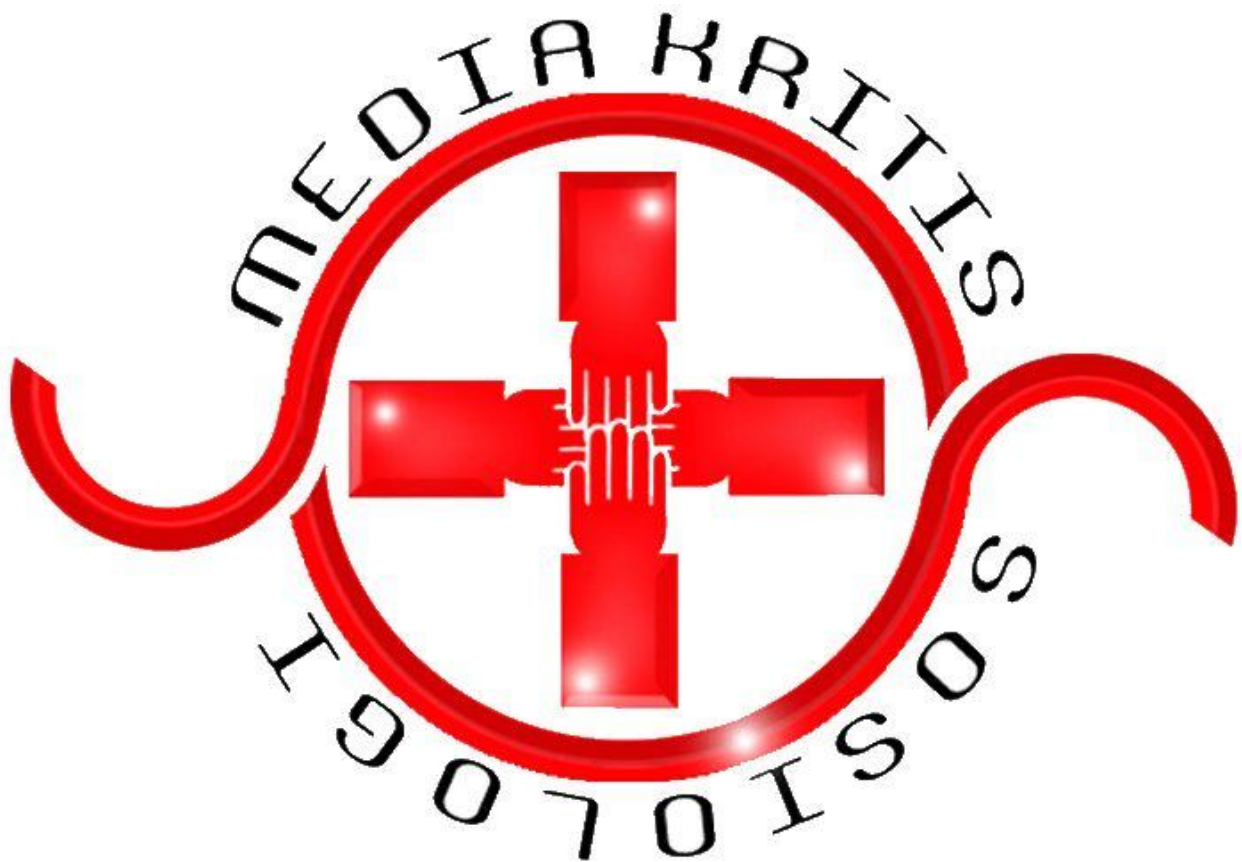
Tempat terbaik untuk untuk memulai suatu pengorganisasian adalah dengan warga-warga yang ada di sekitar anda, tentang masalah yang memang oleh warga diprihatinkan bersama, tentang sesuatu yang oleh warga masyarakat menginginkan terjadi perubahan atasnya. Mulailah dengan bekerja dan hidup bersama warga. Pengorganisasian tidak perlu merupakan sesuatu yang serba besar pada awal mulanya, jika ingin berhasil. Pengorganisasian bisa dimulai dari kelompok yang kecil.

Apa yang harus Kita Kerjakan dalam Pengorganisasian ?

Langkah Pertama, salah satu yang bisa dilakukan adalah mempelajari situasi sosial kemasyarakatan di masing-masing. sebagai entitas politik, ekonomi bisa dipilah berdasarkan kategori; region (dusun), profesi (petani-pengrajin-pengusaha), ataupun kekerabatan (trah). Di sebuah masyarakat yang meletakkan konteks kewilayahan sebagai sesuatu yang penting, maka pengorganisasian bisa menggunakan pemilihan regional yang berbasis dusun. **Langkah Kedua**, pengorganisasian juga seharusnya memperhatikan titik masuk institusional (kelembagaan). Pertanyaan yang relevan adalah apakah upaya pengorganisasian dilakukan dengan menggunakan lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti kelompok masyarakat, assosiasi lembaga ekonomi atau lembaga lain resmi yang seringkali dalam pembentukannya '*dibidani*' oleh pemerintah. Atau upaya pengorganisasian dilakukan dengan membentuk wadah baru sama sekali. Tentu saja kedua jalan itu mempunyai sejumlah kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penggunaan lembaga yang sudah ada adalah relatif tersedianya prasarana dan sarana bagi kerja-kerja pengorganisasian. Kelemahan jalan ini adalah bentuknya yang sangat kaku karena *diin* dari atas. Sedangkan jalan pembentukan wadah baru mempunyai kelebihan karena relatif lebih mandiri dan partisipatif namun mempunyai kelemahan yang bersumber dari belum terlembaganya mekanisme organisasi sehingga bersifat *trial and error*. **Langkah Ketiga**, melakukan dan memperkuat kerja-kerja basis. Yang dimaksud dengan kerja-kerja basis adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh kelompok inti (yang mengorganisir diri terus menerus) secara internal berupa; Upaya membangun basis warga masyarakat (melakukan rekrutmen dan pendekatan pada komunitas yang senasib agar mau bergabung dalam pengorganisasian). Pendidikan pada anggota mengenai visi, misi, dan kepentingan bersama dari organisasi masyarakat. Merumuskan strategi untuk memperjuangkan kepentingan bersama organisasi masyarakat.

Membangun Jaringan

Untuk mencapai tujuan bersama, sebuah pengorganisasian memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan berbagai spesifikasi yang berbeda dalam suatu koordinasi yang terpadu dan sistematis. Tidak ada satupun organisasi yang mampu mencapai tujuannya tanpa bantuan dari pihak-pihak lain yang juga mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama. Semakin banyak warga masyarakat /organisasi menyuarakan hal yang sama maka, semakin kuat kepercayaan bagi timbulnya perubahan yang diinginkan. Hal ini secara sederhana disebut sebagai kebutuhan untuk membangun jaringan. Secara garis besarnya kerja-kerja jaringan dapat dipilah menjadi tiga bentuk: **1] Kerja Basis**. Kerja basis merupakan kerja yang dilakukan oleh kelompok inti (pengorganisir) dengan melakukan langkah-langkah; membangun basis masa, pendidikan dan perumusan strategi. **2] Kerja Pendukung**. Kerja pendukung ini dilakukan oleh kelompok-kelompok sekutu yang menyediakan jaringan dana, logistik, informasi data dan akses. Kelompok sekutu bisa berasal dari kalangan LSM, kelompok intelektual/ akademisi, Lembaga pendana (donor) dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap persoalan yang diperjuangkan. **3] Kerja Garis Depan**. Kerja garis depan dilakukan terutama berkaitan dengan advokasi kebijakan, mobilisasi massa, mempeluas jaringan sekutu, lobi dan melaksanakan fungsi juru runding. Kerja-kerja garis depan bisa dilakukan oleh kelompok organisasi/individual yang memiliki keahlian & ketrampilan tentang hal ini. Dengan pembagian tugas maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari individu dan kelompok yang bersedia membantu warga dalam melakukan perubahan sosial, baik melalui strategi advokasi, maupun penguatan komunitas basis. Akhirnya, pembangunan jaringan merupakan salah satu cara untuk menambah "kawan", sekaligus mengurangi "lawan" dalam memperjuangkan perubahan yang diinginkan.[]



Belajar Sosiologi

Bila Anda Mengetahui Sesuatu ,katakanlah Anda Tau.
Bila Anda Tidak Tau Sesuatu Katakanlah Tidak Tau, itulah Pengetahuan"



Referensi Primer

A

- Al-Jabiri, M. Abed, *Al-Aql Al-Siyasi Al-Arabi: Muḥaddidat wa Tajalliyatuh (Nalar Politik Arab: Faktor-faktor Penentu & Manifestasinya)*, Beirut, Markaz Dirasah Al-Wihdah Al-Arabiyyah, 1995.
- Al-Jabiri, M. Abed, *Post Tradisionalisme Islam*, Yogyakarta, LKiS, 2000.
- Arkoun, Moh., *Nalar Islami dan Nalar Modern*, Inis, Jakarta
- Arief, Saiful, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar & Pustaka Averroes, 2000.
- Arief, Sritua, 1998, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Bandung: Zaman Wacana Mulia
- Arief, Andi, *Politik Hegemoni Gramsci*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 19992.
- Arendt, Hannah, *Pembangunan Ekonomi, Studi Tentang Sejarah Pemikiran*, Jakarta, LP3ES, 1991
- Adorno, Theodore W., *Contemporary German Sociology*, Vol.1, London, 1959
- Adorno, Theodor W., 1994. *Hegel: Three Studies*. MIT Press. Terjemahan oleh Shierry M. Nicholsen, dengan pengantar oleh Nicholsen dan Jeremy J. Shapiro.
- Arato, Andrew, dan Eike Gebhardt (ed.), *The Essential Frankfurt School Reader* (New York: Urizen Book, 1978)
- Adelman dan C. Morris, *Economics Growth and Social Equaity in Developing Countries*, Standford, Standford University Press, 1973.
- Alfas, Fauzan, *PMII Dalam Simpul-simpul Sejarah Perjuangan*, Jakarta, PB PMII, Cet.II., 2006.
- Avineri, Shlomo, 1974. *Hegel's Theory of the Modern State*. Cambridge University Press. Pengantar terbaik ke dalam filsafat politik Hegel.
- Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisa Politik*. Cet. Ke-4. Jakarta: LP3ES.
- Abrahamsen, Rita, *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan* (terj. Heru Prasetya). Yogyakarta: Lafadl. 2004
- Allan, Kenneth, *Contemporarty Social and Sociological Theories: Visualizing*
- Amin, S *Accumulation on A World Scale: A Critique of The Theory of Underdevelopment* (New York: Monthly Review Press, 1974)

B

- Budiman, Arief, *State And Development*, Jakarta, Yayasan Padi & Kapas, 1991.
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia, Cet. IV., 2000.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia, 1996
- Berger, P., *Revolusi Kapitalis*, (terjemahan), LP3ES, Jakarta 1990.
- Beck, Ulrich, *What is Globalization?* Cambridge, Polity Press, 2000.
- Bauman, Zygmunt, *Globalization: the Human Qonsequences*, NY, Columbia Univ. Press, 1998
- Barton, Greg, (ed.), *Radikalisme Tradisional*, Yogyakarta, LKiS, 1999.
- Baihaqi, Imam, (ed.), *Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan & Reinterpretasi*, Yogyakarta, LKiS, Cet.II., 2000.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, (ed.), *Wacana Teologi Feminis, Perspektif Agama, Geografis & Teori-teori*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.I., 1997.
- Burke, Kevin F., *The Ground Beneath The Cross: The Theology of Ignacio Ellacuria*, Washington D.C., Georgetown University Press, 2000.
- Bertens, K. *Filsafat Barat abad XX* (Inggris-Jerman). PT. Graha Media, Jakarta, 1983.
- Baloyra, Enrique, *El Savador in Transition*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1982.
- Binder, Leonard, *Islamic Liberalism*, Chicago, 1988
- Berman, Marsal, *Berpetualang dalam Marxisme*, Pustaka Promethea, 2002.
- Beiser, Frederick C., ed., 1993. *The Cambridge Companion to Hegel*. Cambridge University Press.
- Bairoch, Paul, *Commerce exterieur er developement economique de l'Europe au XIXe siecle*, Paris, 1976.
- Bell, Daniel, *The Cultural Contradictions of Capitalism*, New York: Basic Books, 1976.
- Bell Daniel, dan Irving Kristol (ed.), *Model dan Realita di Dalam Wacana Ekonomi, Dalam Krisis Teori Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1988.

- Bell, *The End of Ideology*, New York: Free Press, 1960; (2) *The Coming of Post Industrial Society*, New York: Penguin Books Edition, 1973; (3) *The Cultural Contradictions of Capitalism*, New York: Basic Books, 1976.
- Bhabha, Homi K, *The Location of Culture*. London: Routledge. 1994
- Bendix, Reinhard, *Max Weber*, Berkeley University of California Press, 19975.
- Berstein, H., "*Sociology of Underdevelopment Versus Sociology of Development*", Makalah mengenai *Dar Es Salaam*
- Berstein, H. D.C. O'Brien dan W. Nagziger, *Development Theory: There Critical Essays* (London: Cass, 1975).
- Baran, Paul, *The Political of Growth* (New York: Monthly Review Press, 1957)
- Bulkin, Frachan, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1985
- Bierstecker, Thomas J., "*The Logic of Unfulfilled Promise of Privatization individu Developing Countries*", in Louis Puterman & Dietrich Ruesameyer, eds, *State and Market individu Development: Sinergy of Rivalry?*, Boulder, CO: Liene Riener, Publisher, Inc, 1992
- Burnell & Morgan, *Sociological Paradigms & Organizational Analysis* London: Heinemann, 1979.
- Becker, "*Whose side are we on?*" W.J. Fisltead (Ed.). *Qualitative Methodology* Chicago: Markham, 1970.
- Brenner, R., "*The Origins of Capitalist Development: A Criticue of Neo-Smithian Marxism*", *New Left Review*, No. 104, July/ August 1977.

C

- Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern*, CV. Rajawali, Jogjakarta, 1966
- Craib, Ian,, 2000, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Carley, Michael, dan Ian Christie, 1992, *Managing Sustainable Development*, London, Earthscan Publication
- Clements, K. P., "*The Limitations of a National Perspective*", dalam *Australian and New Zealand Journal of Sociology*, Vol. 15, No. 1, March 1979.
- Carter, A. Foster, "From Rostow to Gunder Frank: Conflcting Paradigm in The Analysis of Underdevelopmet", *World Development*, Vol. 4, No. 3, 1976.
- Cammet, John M., *Antonio Gramsci and the Origins of Italian Comunism*, California, 1967.
- Clements, Kevin, *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan*, Yogyakarta, PP, 1997.
- Collingwood, R.G. 1946. *The Idea of History*. Oxford: Oxford University Press.
- Clarke, W.C., '*Kemajuan Masa Lampau: Suatu Sistem Pertanian Tradisional Menunjang Lingkungan*,' Joachim Metzner dan N. Daldjoeni, Ekofarming, 1987, *Bertani Selaras Alam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Chomsky, Noam, *Neo Imperialisme Amerika Serikat* (Yogyakarta: Resist, 2008)
- Charles W. Kegley, Jr & Eugene R. Wittkopt, *World Politics: Trend and Transformation 7th Edition*, Worth Publishers, London, 1999

D

- Darmaningtiyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I., 1999.
- David, John A., *Gramsci and Itali's Passif Revolution*, Croom Helm, 1979.
- Desmond, William, 2003. *Hegel's God: A Counterfeit Double?*. Ashgate.
- Dickey, Laurence, 1987. *Hegel: Religion, Economics, and the Politics of Spirit, 1770-1807*. Cambridge University Press.
- Darsono, P, dalam *Globalisasi Suatu Strategi Penjajahan Bentuk Baru*, <http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2006-november/000189.htm>.
- Diamond, L., Seymour M. Lipset dan J.J. Linz (eds). *Democracy in Developing Countries*. Boulder: Westview Press. 1988
- Debord, Guy, *The Society of The Spectacle*, seperti dikutip oleh Fredric Jameson, *Postmodernism or The Cultural of The Late Capitalism*, London, Verso, 1990

E

- El-Sadawi, Nawal, *Perempuan dalam Budaya Pratriarki*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I., 2001.
- El-Sadawi, Nawal, *Kabar Dari Penjara*, Yogyakarta, Tarawang, Cet. I., 2000.
- Escobar, M., *Sekolah Kapitalisme yang Licik*, Yogyakarta, LKiS, Cet. III., 2001.
- Ellacuria, Ignacio, *Freedom Made Flesh*, New York, Orbis Book, 1976.
- Ellacuria, Ignacio, *Utopia ad Prophecy in Latin America, in Mysterium Liberations: Fundamental Concepts of Liberation Theology*, ed., Ignacio Ellacuria and Jon Sabrino, Trans, James R. Brockmen, Maryknoll, New York, Orbis Book, 1993.
- Esack, Farid, *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, Bandung, Kelompok Penerbit Mizan, 2000.
- Engineer, Asghar, Ali *Islam and Liberation Theology: Essai on Libetive Elements individu Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
- Engels, Friedrich, 'Preface' dalam buku Marx, *The Poverty of Phylosophy*
- Ebenstein, W., *Isme-Isme Dewasa Ini*, (terjemahan), Erlangga, Jakarta, 1990.
- Emmanuel, A., *Unequal Exchange* (New York Monthly Review Press, 1972),

F

- Freire, Paulo, *Pedagogi Pengharapan, Menghayati Kembali Pedagogi Kaum Tertindas*, Yogyakarta, Kanisius, Cet. I., 2001.
- Freire, Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta, LP3ES, Cet. III., 2000.
- Freire, Paulo, *Pendidikan Sebagai Proses*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I., 2001.
- Freire, Paulo, & Ira shor, *Menjadi Guru Merdeka*, Yogyakarta, LKiS, Cet. I., 2001.
- Freire, Paulo, *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Praeger, 1986.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Faqih, Mansour, *Menggeser Konsepsi Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, PP, 1996.
- Fakih, Mansour, 1996, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakih, Mansour, 2000, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Faqih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press, Cet. I., 2001).
- Foster, John B., 1993, *Let Them Eat Pollution, The Logist of Free Market, Third World Resurgence*, No.34, Juni.
- Forster, Michael, 1989. *Hegel and Skepticism*. Harvard University Press.
- Forster, 1998. *Hegel's Idea of a Phenomenology of Spirit*. University of Chicago Press.
- Frank, Andre Gunder, *Capitalism and Underdevelopmentin Latin America* (London: Penguin, 1969); *Dependent Accumulation and Underdevelopment* (London: Mcmillan, 1978).
- Fukuyama, Francis, *The End of History and Last Man*, London: Hamish Hamilton, 1992.
- Frobel, F., J. Heinrichs, and O. Kreye, "Tendency Toward s a New International Devision of Labour, "Economic and Political Weekly, February 1976
- Friedman, Thomas L., *The Lexus and The Oleive Tree*, Harper Collins Publisher, London, 2000
- Findlay, John N., 1958. *Hegel: A Re-examination*. Oxford University Press.
- Fromm, Erich, *Konsep Manusia Menurut Marx*, Yogyakarta, PP, Cet.II., 2002.
- Feith, Herbert. "Repressive-Developmentalist Regimes in Asia: Old Strenghts, New.
- Feilrad, Andree, *NU vis a vis Negara*, LKiS, Jogjakarta, 1992-4.

G

- Gramsci, Antonio, *Selection from the Prison Notebooks*, NY, International Publisher, 1971.
- Gramsci, Antonio, *Letter from Prison*, London, 1975
- Gramsci, Antonio, *A Gramsci Reader*, Diunting oleh David Forgacs dkk., 1988.
- Gramsci, Antonio, *Sejarah & Budaya*, Surabaya, Pustaka Promethea, Cet. I., 2000.
- Giddens, Anthony, *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta, Gramedia, 1999.
- Giddens, Anthony, *Runway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- Giddens, Anthony, *Kapitalisme & Teori Sosial Modern*, Jakarta, UI Press, 1986.
Gill, Richard T., *Evolution of Modern Economics*, New Delhi: Prentice-Hall of India Private Ltd., 1972
Grant, Ted & Woods Alan, *Melawan Imperealisme*, Yogyakarta, Sumbu, 2001.
Galbraith, Kenneth, *The New Industrial State*, New York: Mentor Book Paperback Edition, 1972
Galbraith, J.K. & Nicole Solinger, 1979, *Almost Everyone Guide to Economics*, Chicago: Bantam Books
Galtung, J., "A Structural Theory of Imperealism", *Journal of Peace Research* 1971,
Garner, Robert, 1998, *Environmental Politics*, London: University of Leicester, MacMillan Press Ltd.
Gutierrez, Gustavo, *The Truth Shall Make You Free, Cofrontations*, New York, Orbis Book, 1991

H

- Habermas, Jurgen, *Philosophisch*, Frankfurt, 1971.
Habermas, Jurgen, *Knowledge and Human Interests*, Boston, 1971
Habermas, Jurgen, *Communication and the Evolution of Society*, Boston, Beacon Press, 1979.
Habermas, Jurgen, *Toward a Rational Society*, Boston, Beacon Press, 1970.
Habermas, Jurgen, *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES, Tahun 1990.
Habermas, Jurgen, *Legitimation Crisis*, Polity Press, Cambridge Oxford, 1988.
Horkheimer, Max, *Kritische Theorie*, Vol. 1-2, Frankfurt, 1968.
Horkheimer, Max, "One The Problem of Truth" dalam Andrew Arato dan Eike Gebhardt (ed.).
Hanafi, Hasan, *Min Al-Aqidah ila Al-Tsaurah, (Dari Teologi Ke Revolusi)* Vol. I-IV., Kairo, Maktabah, Madbuli, 1988.
Hanafi, Hasan, *Kiri Islam* dalam Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam: Antara Modernisme & Postmodernisme, Telaah Kritis atas Pemikiran Hasan Hanafi*, Yogyakarta, LKIS, 1993.
Hanafi, Hasan, *Dirasat Falsafiyah*, Maktabatu Al-Anjalu al-Misriyyah, Qahira, 1987.
Hasan Hanafi, *Al-Turats wa al-Tajdid, Mauqifuna min al-Turats al-Qadim*, Al-Muassasah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi', Beirut, Cet. IV., 1992.
Hanafi, Hasan, *Perlunya Oksidentalisme*, Jurnal Ulumul Qur'an, No.5-6, Vol. IV, 1994.
Hanafi, Hasan, *Cakrawala Baru Peradaban Global: Revolusi Islam Untuk Globalisme, Pluralisme, Egalitarianisme Antar Peradaban*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2003
Hayek, F.A., *The Principles of A Liberal Social Order*, dalam Anthony de Crespigny and Jeremy Cronin, *Ideologies of Politics*, Oxford University Press, London, 1978.
Heilbroner, R.L., *Hakikat dan Logika Kapitalisme*, (terjemahan), LP3ES, Jakarta, 1991.
Hegel, G.W.F., *The Phenomenology of Mind*, translate, with an introduction and notes by J.B. Baillie (London: George Allen and Unwin Ltd., 1966)
Hegel, *Science of Logic*, The McMillan, NY, 1929.
Hegel, *Hegel's Doctrine of Formal Logic*, Clarendon Press, Oxford, 1912.
Hiariej, Eric, *Teori Negara Marxis*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas ISIPOL UGM, Volume 7, Nomor 2, November 2003 (261-282).
Hardiman, Franscis Budi, *Menuju Masyarakat Komunikatif, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Kanisius, Jogjakarta, 19926.
Hardiman, Franscis Budi, *Kritik Ideologi*, Kanisius, Jogjakarta, 19908.
Hadis, Vedi R., 1999, *Politik Pembebasan: Teori-teori Negara Pasca Kolonial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press
Hartnack, Justus, 1998. *An Introduction to Hegel's Logic*. Indianapolis: Hackett.
Hyppolite, Jean, 1979. Genesis and Structure of "Hegel's Phenomenology of Spirit." Northwestern University Press.
Hayter, T., *Aid as Imperealism* (London: Penguin, 1974)
Hirst, Paul, & Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah Mitos*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Haggard, Stephan, & Robert R. Kaufman, ed., *Introduction: Institution and Economic Adjustment*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1992
Hikam, Muhammad A.S., *Demokrasi & Civil Society*, Jakarta, LP3ES, 1996.
Hatta, Moh., *Ajaran Marx*, Bulan Bintang, 1976.
Hart, Michael H. 2000. *100 Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*. Cet. Ke-20. Jakarta: Pustaka Jaya.

Held, David, & Anthony Mc Grew, David Goldblat & Jonathan Peraton, *Global Transformation: Politics, Economics and Culture*, Polity Press, Great Britain, 1999
Heidegger, Martin, 1988. *Hegel's Phenomenology of Spirit*. Bloomington: Indiana University Press.

I

Ithaca: Cornell University Peace Studies Program. 2007

J

Jurnal Wacana Edisi 7 tahun 2001, *Pembangunan: Pelajaran Apa yang Kita Peroleh,' Teori Pembangunan Alternatif*, dalam pengantar Yogyakarta: Insist Press
Jurnal Media Kerja Budaya edisi 07, 2001; Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, 2002, *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan*, Jakarta: INFID, Konphalindo, dan IGJ; Patricia Adams, 2002, *Odious Debt (Utang Najis)*, Jakarta: INFID
Jahmtani, Hira, *Ancaman Globalisasi & Imperealisme Lingkungan*, Yogyakarta, INSIST, 2003.
Jhamtani Hira, dan Lutfiyah Hanim, 2002, *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan*, Jakarta: INFID
Jameson, Fredric, *Postmodernism or The Cultural of The Late Capitalism*, London, Verso, 1990.
Jerry Mander, Debi Barker & David Korten, *Globalisasi Membantu Kaum Miskin*, dalam *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan*, Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.
Jay, Martin, *The Dialectical Imagination, A History of The Frankfurt School and The Institute of Social Research 1923-50* (London: Heinemann Educational Books, 1973)
Jenkins, Rhys, "Underdevelopment" dalam F. Green, P. Nove, eds., *Economic: An anti-Text* (London: Mcmillan, 1977)
Joseph, *Kita, Dunia dan Globalisasi: Menelisik Pemikiran*, dalam <http://isac.blogdrive.com/archive/10.htm>
Jhingan, M.L., *The Economics Development and Planning*, Vikas Publishing House Ltd., 1976

K

Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Negara Marxis & Revolusi Proletariat*(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Manifesto Wacana Kiri: Membentuk Solidaritas Organik* (2007) Buku Panduan Pelatihan Basis 1.
Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Teori Analisis Geo-Ekosopol* (2009) Buku Panduan Pelatihan Basis 2.
Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Marxisme untuk Revolusi Demokratik* (2007). Buku Panduan Sekolah Marxis 1.
Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Pemikiran Marx Tentang Kritik Ekonomi-Politik; Melacak Gagasan Dasar Kapitalisme* (2009) Buku Panduan Sekolah Marxis 2.
Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Seri Ideologi Dunia* (2008) Buku Panduan Sekolah Ideologi 1.
Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Manifesto Ideologi kiri: Melacak Akar Ideologi Dunia dan Epistemologi Perubahan Sosial Revolusioner-Subversif* (2007) Buku Panduan Sekolah Ideologi 2.
Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Refleksi Paradigma Pendidikan Kritis; dari Tatahan Ekonomi Global Sampai Kapitalisasi Pendidikan* (2007) Buku Panduan Pelatihan Pendidikan Kritis.
Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Paradigma dan Sosiologi Perubahan Sosial* (2007) Buku Panduan Sekolah Analisis Sosial.
Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Merebut Alat Produksi Pengetahuan; Transformasi dari Student Movement Menuju Social Movement* (2008) Buku Panduan Sekolah Gerakan Sosial.
Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Metodologi Pelatihan, Fungsi dan Peranan Fasilitator* (2009) Buku Panduan Training Fasilitator Transformatif.
Kunio, Yoshihara, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1991)
Kleden, Ignas, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang, Indonesiatara, 2004.
Kahin, George McTurnan, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme & Revolusi Indonesia*, Jakarta, UNS Press-Pustaka Sinar Harapan, Cet.II., 1995.
Khoor, Martin, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2000
Kuhn, Thomas, *The Structures of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.

- Komaruddin, *Pengantar untuk Memahami Pembangunan*, Bandung, Angkasa, 1985.
- Kuncaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas & Pembangunan*, Jakarta, Gmd, Cet. XVIII., 1997.
- Kadvany, John, 2001, *Imre Lakatos and the Guises of Reason*. Duke University Press.
- Kojeve, Alexandre, *Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenomenology of Spirit*.
- Kainz, Howard P., 1994, *Hegel's Phenomenology of Spirit: Selections* Terjemahan dan anotasi oleh Howard P. Kainz. The Pennsylvania State University Press.
- Kayam, Umar. "Transformasi Budaya Kita." Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 19 Mei 1989. Jogjakarta: UGM Press.
- Konphalindo, dan IGJ; Patricia Adams, 2002, *Odious Debt (Utang Najis)*, Jakarta: INFID

L

- Lerner, R.E., *Western Civilization*, Volume 2, W.W. Norton & Company, New York-London, 1988.
- Lerner, R.E., *Western Civilization*, Volume 2, W.W. Norton & Company, New York-London, 1988.
- Liputan khusus KTT Bumi 2002, 'Menuju Istana Kristal "Pembangunan Berkelanjutan," Kompas, 26 Agustus 2002.
- Liputan Pokok Tim Media Kerja Budaya, 'Merayakan Kesengsaraan,' *Neoliberalisme*, Media Kerja Budaya No. 07 dan Bonnie Setiawan, 2001, *Menggugat Globalisasi*, Jakarta: Infid dan IGJ.
- Larrrain, J., *Theories of Development, Capitalism, Colonialism & Dependensy*, Dalas Brewely, 1989.
- Larrrain, Jorge, *The Concept of Ideology*, Forteword by Tom Bottomore, First Published, Australia: Hotchinson Publishing Group, 1979, versi Indonesia oleh Ngatawi al Zastrouw (editor) dan Ryadi Gunawan (penerjemah), Yogyakarta: LKPSM, 1997
- Lowy, Michael, *Teologi Pembebasan*, Yogyakarta, INSIST, 1999.
- Lucia, Jose Sols, *The Legacy of Ignacio Ellacuria; Ten Years After Martyrdom*, Alamat Situs: <http://www.fespinal.com/espinal/english/visual/en86>
- Lobkowicz, Nicholas, *Theory and Practice: History of a Concept from Aristotle to Marx* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1967)
- Leys, Colin, "Underdevelopment and Dependency: Critical Notes", *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 7, No. 1, 1977.
- Laclau, E., "Feodalism and Capitalism in Latin America, *New Left Review*, May/ June 1971.
- Louck, William N. dan William G. Whitney, *Comparative Economic System*, New York: Harper & Row Publishers
- Links, *International Journal of Socialist Renewal*, No. 7 tahun 1996

M

- Marx, Karl, *Capital*, Vol. I & II, London 1957.
- Marx, Karl, *Capital*, Volume I: *The Process of Production of Capital*-Proses Produksi Modal
- Marx, Karl, *Capital*, Volume II: *The Process of Circulation of Capital*-Proses Sirkulasi Modal
- Marx, Karl, *Capital*, Volume III: *The Process of Capitalist Production as a Whole*- Proses Produksi Kapitalis secara Keseluruhan
- Marx, Karl, *Capital*, Volume IV: *Theories of Surplus Value*-Teori-teori tentang Nilai Surplus
- Marx, Karl, *Wages, Price & Profit*, Moscow, 1943.
- Marx, Karl, Engels, *The Comunist Manifesto*, 1975.
- Marx, Karl, Engels, *Selected Work*, Moscow, 1962.
- Marx, Karl, Engels, *The German Ideology*, NY, 1942.
- Marcuse, Herbert, *Rasio & Revolusi, Menyuguhkan Kembali Doktrin Hegel untuk Umum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I., 2004
- Marcuse, Herbert, 1941. *Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory*.
- Marcuse, Herbert, *The Critical Spirit: Essay in Honor of Herbert Marcuse*, Boston, 1967.
- Marcuse, Herbert, *One Dimensional Man*, Beacon Press, Boston, 1991.
- Marcuse, Lies M., *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual & Kontekstual*, Jakarta, INIS, 1993.
- Moore, Samuel dan Edward Aveling, *Capital: A Critique of Political Economy* (1984): *The Rate of surplus-value is therefore an expression for the degree of exploitation of labour-power by capital, or of the labourer by capitalist.*

- Moore Samuel, dan Edward Aveling, *Das Capital* (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh menjadi: *Capital: A Critique of Political Economy* (1984): *The Rate of surplus-value is therefore an expression for the degree of exploitation of labour-power by capital, or of the labourer by capitalist.*
- Martin, van Bruinessen, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, & Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta, LKiS, Cet.II., 1996.
- Moeljarto, Tjokrowinoto, (t.t) *Konsep dan Isu Pembangunan Nasional*, Diklat Kuliah MAP UGM
- Moeljarto, Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Materi Kongres XV PMII*, Jakarta, PB PMII, 2005.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin & Peradaban*, Jakarta, Paramadina, 1992.
- Maguire, Pat, *Women in Development: An- Alternative Analysis*, Amherst MA: Center for International Education. tt.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, Terjemah Hartian Sulawati, Yogyakarta, 1996.
- Montgomery, Tommy Sue, *Revolusion individu El-Savador, from Civil Strife to Civil Peace*, Boulder Westview Press, Inc., 1995.
- Mill, C. Wright, *Kaum Maxis, Ide-ide Dasar & Sejarah Perkembangan*, Yogyakarta, PP, 2003.
- McCarthy, Thomas, *Teori Kritis Jurgen Habermas*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, Cet. I., 2006.
- Mander, Jerry, Debi Barker & David Korten, *Globalisasi Membantu Kaum Miskin*, dalam *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan*, Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.
- Mangunwijaya, Y.B., *Mencari Landasan Sendiri*, Esei Pada Harian Kompas 1 September 1998, Jakarta.
- Murchland, B., *Humanisme dan Kapitalisme*, (terjemahan), Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.
- Muller, Jerry Z., 2002. *The Mind and the Market: Capitalism in Western Thought*. Anchor Books. Chpt. 6 devoted to Hegel and the market economy.
- Mangunwijaya, Y.B., *Mencari Landasan Sendiri*, Esei Pada Harian Kompas 1 September 1998, Jakarta.
- Murchland, B., *Humanisme dan Kapitalisme*, (terjemahan), Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.
- Martinussen, John. *Society, State & Market: A Guide to Competing Theories of Development*. London: Zed Books. 1997
- Mudhofir, Ali, *Kamus Istilah Filsafat*, Liberty, Yogyakarta, 19923.
- Mas'ud, Mohtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Mangunwijaya, (Y.B. ed.), *Tekhnologi dan Dampak Lingkungannya*, Volume II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985;
- Mander, Jerry, Debi Barker & David Korten, "Globalisasi Membantu Kum Miskin", dalam *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan*, Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003
- Mustafid, Muhammad, *Kerangka Analisa Sosial Kemasyarakatan*, Outline Pelatihan BEM UGM, Author 15 September 2008.
- Martinjay, *Sejarah Mazhab Frankfurt*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, Cet., I., 2005.
- McDonald, Lee Cameron. 1968. *Western Political Philosophy*. Part 3, Bab 21. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Milliband, R. *The State in Capitalist Society* (London: Quartet Books, 1978).

N

- Nasution, Harun, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah, Analisis Perbandingan*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1972.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1978. serta majalah ulasan tentang "Gerakan Pembaharuan Islam" dalam *Ulumul Quran* tahun 1993.
- Nasution, M. Arif, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, Penerbit Alami, Bandung, 1999
- Nasr, Sayyid Husein, *Knowledge & the Sacred*, Suhail Academi, Lahore, Pakistan, 1998.
- Nasr, Sayyid Husein, *Three Moslem Seges: Avicenna Shuhrawadi—Ibnu Arabi*, Harvard University Press, Cambridge, 1964.
- Nasr, Sayyid Husein, *Tradition Islam in the Modern World, Foundation for Traditional Studies*, Kuala Lumpur, 1978.
- Nugroho, Heru, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.

O

- Outhwaite, William, *Habermas, A Critical Introduction*, Stanford, California, Stanford University Press, 1994.
- O'Regan, Cyril, 1994. *The Heterodox Hegel*. State University of New York Press, Albany.
- O'Connor, J., *The Fiscal Crisis of The State* (New York: St. Martin's Press, 1976)

P

- Philpott, Simon. *Meruntuhkan Indonesia; Politik Poskolonial & Otoritarianisme*, Jogjakarta, LKiS, Cet.I., 2003.
- Palmer, Joy A., *50 Pemikir Pendidikan*, Yogyakarta, Jendela, Cet. I., 2003.
- Popper, Karl, *The Open Society and Its Enemies*, 2 Jilid, G. Rotledge, London, 1945.
- Patria, Nezar, dan Andi Arief, 1999, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Petras, James "Negara Sebagai Agen Imperialis", dalam *Globalisasi Perspektif Sosialis*, Ali Sugihardjanto, dkk, Penerbit Cubuc, Jakarta, 2001
- Popkewitz, Thomas. *Paradigm and Ideology in Educational Research*. New York: Palmer Press, 1984.
- Patton, Michael Quin, *Alternative Evaluation Research Paradigm*. Grand Forks: University North Dakota, 1970.
- Popkewitz, Thomas, *Paradigm and Ideology in Educational Research*. New York: Palmer Press, 1984.
- Pambudi, Himawan S., dkk., *Pendidikan Politik Perempuan Pedesaan*, Yogyakarta, Kp4 LAPPERA, Cet. I., 2003.
- Pinkard, Terry P., 2000. *Hegel: a Biography*. Cambridge University Press.
- Pippin, Robert B., 1989. *Hegel's Idealism: the Satisfactions of Self-Consciousness*. Cambridge University Press.
- Pieterse, Jan Nederveen, "Globalization as Hybridization", individu Mike Featherstone et all. Edt, *Global Modernities*, Sage Publications, London, 1995
- Piliang, Yasraf Amir, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan Mesin-mesin Kekerasan dalam Jagat Raya Chaos*, Mizan, Bandung, 2001.

Q

- Qomar, Mujamil, *NU Liberal, Dari Tradisionalisme Ahlussunah Wal Jama'ah ke Universalisme Islam*, Bandung, Mizan, Cet.I., 2002.

R

- Ritzer, George, "Sociology: A Multiple Paradigm Science" dalam *Jurnal The American Sociologist* No. 10, 1975.
- Ritzer, "Sociology: A Multiple Paradigm Science" dalam *Jurnal The American Sociologist* No. 10, 1975
- Ritzer, George-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Ramly, Andy Muawiyah, *Peta Pemikiran Marx*, Yogyakarta, LKiS, Cet. IV., 2004.
- Rand, A., *Capitalism: The Unknown Ideal*, A Signet Book, New York, 1970.
- Rockmore, Tom, 1993. *Before & After Hegel: A Historical Introduction to Hegel's Thought*. Hackett.
- Ritter, Joachim, 1984. *Hegel and the French Revolution*. MIT Press.
- Ricardo, David, *Principles of Political Economy*
- Raharjo, Dawam, 1983, *Esai-Esai Ekonomi Politik*, Jakarta: Pustaka LP3ES
- Ricklefs, M.C. 2001. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Stanford: Percetakan Universiti Stanford.
- Radice, H., ed., *The International Firm and Modern Imperialism* (London: Penguin, 1975.)
- Rosenberg, W. "New Zealand Foreign Debt and Some Aspects of The Relation between Foreign Debt and Internal Economic Policies", Christchurch, 21 March 1979.

S

- Smith, Adam, 1937, *The Wealth Of Nation*, New York: The Modern Library
- Smith, *Themaning of Conscientacao: The Goal of Paulo Freire's Pedagogy* Amherst: Center for International Education, UMASS, 1976.

- Suseno, Franz Magnis, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Suseno, Franz Magnis, *Manusia & Pekerjaannya, Berfalsafah Bersama Hegel & Marx, dalam sekitar Manusia*, Jakarta, Gramedia, 1978.
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisian Revisionisme*, Jakarta, Gramedia, 2000.
- Seda, Frans, 1996, *Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Indonesia
- Salmi, Jamil, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru dalam Melihat HAM*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2003.
- Sritua, Arif, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia, Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi* (Bandung: CPSM, Cet. I., 1998).
- Setiawan, Bonnie, 1999, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga: Teori-teori Radikal dari Klasik sampai Kontemporer*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar
- Setiawan, Bonnie, 2001, *Menggugat Globalisasi*, Jakarta: INFID dan IGJ
- Soedjatmoko, *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan tentang Agama Kebudayaan Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, LP3ES, 1984
- Soedjatmoko, dkk., *Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta, PLP2M, Cet. I., 1984.
- Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Sanit, Arbi, *Pergolakan Melawan Kekuasaan, Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral & Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar & INSIST, 1999.
- Saptari, Ratna, *Perempuan, Kerja & Perubahan Sosial*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Saputra, Asep Sabar, *Dekonstruksi Paradigma Kritis Komunitas Tradisional*, Jakarta, PB PMII, Cet.I., 2000.
- Stewart, Jon, ed., 1996. *The Hegel Myths and Legends*. Northwestern Univ. Press. Georg Lukacs, *The Young Hegel*.
- Stern, Robert, 2002, "Hegel and the Phenomenology of Spirit" Routledge.
- Strahm, H. Rudolf, *Kemiskinan Dunia Ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, Jakarta, Pustaka Cidesindo, 1999.
- Simogaki, Kazuo, *Kiri Islam ; Antara Modernisme dan Post-Modernisme* (Telaah Kritis Pemikiran Hasan Hanafi), Lk/S, Jogjakarta, 1993/10.
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional; Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt* (Jakarta: Gramedia, 1982)
- Simon, Roger, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, INSIST, Cet.I., 1999.
- Sungkel, Osvaldo, "Transnasional Capitalism and National Disintegration in Latin America", *Social and Economic Studies*, Vol. 22, No. 1, 1973.
- Sukirno, Sudono, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Makalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1985
- Soerojo, Soegiarso, *Siapa Manabur Angin Akan Menuai Badai (G30S/PKI dan Apa Peran Bung Karno)*, Jakarta, Rola Sinar Perkasa, Cet.I., 1988.
- Social Worlds. California: Pine Forge Press. 2006
- Senghaas, Dieter, *The European Experience, A Historical Critique of Development Theory*. Leamington Spa/ Dover, New Hamshire, 1985).
- Schwarz, Adam. 1994. *A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability*. Edisi ke-2. St Leonards, NSW : Allen & Unwin.
- Sweezy, Paul M, "Kapitalisme Modern", dalam *Kapitalisme: Dulu dan Sekarang: Kumpulan Karangan dari berbagai sumber asing*, LP3ES, Jakarta, 1987
- Sjahrir, *Formasi Mikro-Makro ekonomi Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1995

T

- Taylor, Jean Gelman. 2003. *Indonesia: Peoples and histories*. New Haven: Percetakan Universiti Yale.
- Taylor, Charles, 1975. Hegel. Cambridge Univ. Press.
- Tokyo: *Pasific Asia Resources Centre*, 1977, *Free Trade Zones and Industrialization of Asia* mengenai beberapa studi kasus tentang fenomena ini di Malaysia, Indonesia dan Filipina.

- Topatimasang, Roem, *Sekolah Itu Candu*, Yogyakarta, PP., INSIST, Cet. III., 2001.
- Tilaar, H.A.R., *Kukuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang, Indonesiatera, Cet. I., 2003.
- Thomas, L.S, *Liberation Ethics: Sources, Models, & Norms*, Fortress Press, Minneapolis, 1993.
- Taufiqurrahman, *Mengintegrasikan Analisa Sosial dalam Gerakan Sosial*, Makalah yang pada Pelatihan Da'i Mahasiswa VII KORDISKA UIN Sunan Kalijaga. Tanggal 3-11 Oktober 1999.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Konsep dan Isu Pembangunan Nasional*, Diklat Kuliah MAP UGM, t.t.

U

- Umar, Nasarudn *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Seri Disertasi), Jakarta, Paramadina, Cet. I., 1999.

V

- Vivekananda, Franklin (ed.), 1987, *Promises and Process of Maldevelopment*, Stockholm: Bethany Books.
- Vulnerabilities." *Prisma-The Indonesian Indicator* 19 December 1980.
- Vivekananda Franklin, (ed.), 1987, *Promises and Process of Maldevelopment*, Stockholm: Bethany Books.

W

- Wallerstein, Immanuel, *Theories of Development and Under-Development*, Westview Press, Colorado, 1994,
- Wallerstein, Immanuel, *The Modern World System*, Vol. 1 (London: Academic Press, 1994) dan *The Capitalist World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).
- Weber, Max, *The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism*, Univin, Hymn, London, 1990.
- Wahid, Abdurahman, *Konsep-Konsep Keadilan*, dalam B. Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta, Para, 1994.
- Wahono, Francis, *Kapitalisme Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.I., 2001.
- William, Gwym, *Proletarian Order, Antonio Gramsci. Factory Councils and the Origins of Italian Comunism 1911-1921*, Plato Press, 1975.
- Westphal, Kenneth R., 2003. *Hegel's Epistemology: A Philosophical Introduction to the Phenomenology of Spirit*. Indianapolis: Hackett.
- Wallace, Robert M., 2005. *Hegel's Philosophy of Reality, Freedom, and God*. Cambridge University Press.
- Winarno, Budi, *"Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi"*, dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Edisi 1, Februari 2004

Z

- Zamjani, Irsyad. *"Abad Korupsi"*. Kompas, 8 November 2005.
- Zinecker, Heidrun. *Democracy, Diversity, And Conflict: Regime-Hybridity and Violent Civil Societies in Fragmented Societies – Conceptual Considerations*.
- Zimmerman, L. J., *Sejarah Pendapat-pendapat tentang Ekonomi*, Bandung: N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, 'S-Gravenhage, 1995 Edisi Indonesia dikerjakan oleh K. Siagian. Periksa buku aslinya yang berjudul *Geschiedenis Van Het Economisch Denken*.

TENTANG PENULIS



Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A. lahir di Cilacap 27 Juli 1980 dari keluarga petani miskin di pesisir selatan kota Cilacap Jawa Tengah. Berkat ketekunan dan kegigihannya mencari ilmu sejak tahun 1999 ia melanjutkan studi di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melahirkan karya ilmiah berbentuk skripsi kontroversial dan dianggap keluar dari tradisi akademik UIN, dengan judul: *"Emansipasi Keterasingan Manusia Menurut Karl Marx:*

Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam" yang kini menjadi buku ini. Alumnus pada Program Pascasarjana Sosiologi Fisipol UGM dan sedang menyusun tesis dengan judul: *"Negara Marxis & Revolusi Proletariat: Ajaran Marxis Tentang Negara & Tugas-Tugas Proletariat di Dalam Revolusi Sosial"* diterbitkan Pustaka Pelajar Jogjakarta 2011.

Perjalanan akademis dari sekolah dasar sampai sekolah menengah ditempuh di desa kelahirannya Cilacap. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah sekaligus menjadi santri dan Lurah di Pondok Pesantren Pendidikan Islam (PPPI) Miftahussalam Al-Haditsah Banyumas. Kegemarannya melahap buku kiri, filsafat dan sosial sejak SMU telah menciptakan pemikiran dan pengaruh di lingkungan organisasi dan kelompok studi, sehingga selain menjadi lurah pondok ia juga dipercaya sebagai ketua OSIS MA dan MTS PPPI Miftahussalam Banyumas dan masuk terpilih sebagai siswa teladan tingkat SMU se-eks Karesidenan Banyumas.

Kegemarannya berorganisasi, berdiskusi dan berdialektika terus dilanjutkan selama menjadi mahasiswa. Di Intra kampus ia terlibat secara politik di PRM dan didelegasikan untuk menjabat posisi prestisius sebagai Sekjend DEMA UIN Sunan Kalijaga. Aktif di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Paradigma Fakultas Tarbiyah, Komunitas Studi Ilmu Pendidikan (KSIP) Fakultas Tarbiyah, Dewan Senat Presidium Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, dan karena nalar pemberontakan jalanan gerakan intra kampus ia terlibat demonstrasi pembubaran seminar nasional dan penolakan konversi IAIN menjadi UIN, aksi penolakan SISDIKNAS dan aksi pembubaran partai Golkar setelah penumbangan Rezim Orba '98.

Kemudian di gerakan ekstra kampus pernah aktif secara kultural di PMII Rayon Fakultas Tarbiyah dan terus berproses di PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga, Pengurus Cabang PMII D.I. Yogyakarta dan kemudian secara kultural berproses di Bidang Kaderisasi PB PMII. Pernah terlibat advokasi petani di Klaten bersama dengan jaringan Katholik. Terlibat advokasi anak jalanan dengan LSM Humana. Menjadi peserta vouletir diskusi di LKIS. Di kampus dan luar kampus ia gigih membetuk forum diskusi pembebasan. Forum diskusi yang pernah digelar antara lain Forum Diskusi para seniornya; Forum Diskusi Sosial *"T-Visionary Club"*, Forum Diskusi Filsafat *"Kipas"* dan membidani Forum Diskusi *"Komunitas Kultural"* serta Forum Diskusi *"Lintas Organ Ekstra"*. Di organisasi etnis ia pernah menjabat sekjend HIMMAH SUCI dan ketua umum Himpunan Mahasiswa Cilacap-Jogjakarta (HIMACITA), ia juga membidani berdirinya organ-organ etnis dilingkungan UIN. Menjadi deklarator sekaligus menjabat sebagai dewan presidium Komite Mahasiswa Cilacap se-Indonesia (KMCI).

Selepas studi sebagai sarjana muda ia melanjutkan untuk mengaji kitab kuning di Ponpes Al-Madaniah Cilumpung-Cilacap terutama mengkaji ilmu alat, fiqih, tauhid dan tafsir, juga untuk mengobati kekeringan spiritualitas selama menjadi aktivis. Selain mengaji kitab kuning ia juga menjadi dosen muda progressif di Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap dan tetap aktif di pembasisan kader dan gerakan sosial. Terlibat di Jaringan Kultural PMII Jawa Tengah, khususnya di *Jaringan Inti Ideologis Sayap Kiri Pesisir Selatan*—yang dianggap sebagai gerakan sparatis dan subversif oleh sebagian pengurus Korcab PMII Jateng. Selain itu bersama SETAM dan aktivis PMII Cilacap terlibat perebutan (*reclaiming*) tanah petani dengan Perhutani di tumpang Sari Cilacap. Terlibat aktif di LAKPESDAM NU, IPNU, Gerakan Pemuda Anshor, Lembaga Advokasi Buruh Migran Cilacap, Yapeknas, Lajnah Bahsul Masail, Dialog Antar Agama FKUB, LP Ma'arif. Membidani sekolah kader kultural: Pelatihan Basis, Sekolah Ideologi, Sekolah Marxis, Sekolah

Gerakan Sosial, Sekolah Pendidikan Kritis, Sekolah Filsafat dan menginisiasi pembentukan organ taktis Front Aksi Mahasiswa Cilacap (FAM-C) untuk memekikkan aspirasi perlawanan dan isu-isu polulis.

Jaringan intelektual yang pernah dan sedang digelutinya antara lain: Center for Asia Pasific Studies Gadjah Mada University (PSAP) Jogjakarta, Institute for Islamic and Social Studies (LKIS) Jogjakarta, Indonesia Sanitation Sector Development Program (WSP/ BAPPENAS) Jakarta, Institute for Human Resources Studies and Development (LKPSM) Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LAPPERA) Jogjakarta, Institute for Women and Children's Studies & Development (LSPPA) Jogjakarta, Institute for Human Resources Studies and Development (LKPSM) Cilacap, Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Cilacap, Institute for Research and Empowerment (IRE) Jogjakarta, Institute Sosiologi Dialektis (INSIDE) Gadjah Mada University, Institute for Philosophical and Social Studies (INPHISOS) Yogyakarta, Forum Diskusi Eye on The Revolution + Revdem Yogyakarta.

Sampai saat ini masih laten mendampingi pembasisan kader secara kultural di lingkungan PMII Yogyakarta, Jaringan Gerakan Prodem Jawa Tengah + Jawa Barat dan Jaringan PMII Jawa Tengah Sayap Kiri Pesisir Selatan. Untuk mewadahi dan menjaga spirit intelektual di Jogjakarta ia telah membentuk Lembaga Kajian Sosiologi Dialektis (LKSD), Institute for Philosophical and Social Studies (INSPHISOS), Forum Diskusi EYE ON THE REVOLUTION + REVDEN, dan sampai saat ini ditengah keseriusan menyusun tesis, ia terus berusaha membunuh waktu dan terus produktif untuk melahirkan karya intelektual karena terinspirasi oleh karya-karya hebat seperti: *Shahihain* Bukrari Muslim, *Al-Ihya Ulumuddin* Ghozali, Magnum Opus *Das Capital* Karl Marx, *Tetralogi* Pramoedya Ananta Toer dan Master Peace *Madilog* Tan Malaka. Karena karya-karya besar dan berpengaruh tersebut maka, penulis berusaha terus menggerus pikiran dalam membuat manuskrip buku panduan praxis aktivis gerakan sosial untuk jaringan revolusi demokratik (revdem) dan untuk Pembasisan Kader Gerakan PMII, antara lain: *Manifesto Wacana Kiri: Membentuk Solidaritas Organik* (2007) Buku Panduan Pelatihan Basis 1. *Teori Analisis Geo-Ekosospol* (2009) Buku Panduan Pelatihan Basis 2. *Marxisme untuk Revolusi Demokratik* (2007). Buku Panduan Sekolah Marxis 1. *Pemikiran Marx Tentang Kritik Ekonomi-Politik; Melacak Gagasan Dasar Kapitalisme* (2009) Buku Panduan Sekolah Marxis 2. *Seri Ideologi Dunia* (2008) Buku Panduan Sekolah Ideologi 1. *Manifesto Ideologi kiri: Melacak Akar Ideologi Dunia dan Epistemologi Perubahan Sosial Revolusioner-Subversif* (2007) Buku Panduan Sekolah Ideologi 2. *Refleksi Paradigma Pendidikan Kritis; dari Tataan Ekonomi Global Sampai Kapitalisasi Pendidikan* (2007) Buku Panduan Pelatihan Pendidikan Kritis. *Paradigma dan Sosiologi Perubahan Sosial* (2007) Buku Panduan Sekolah Analisis Sosial. *Merebut Alat Produksi Pengetahuan; Transformasi dari Student Movement Menuju Social Movement* (2008) Buku Panduan Sekolah Gerakan Sosial. *Metodologi Pelatihan, Fungsi dan Peranan Fasilitator* (2009) Buku Panduan Training Fasilitator Transformatif. *Materi Dasar Pelatihan Jurnalistik* (2009) Buku Panduan Pelatihan Jurnalistik.[]

*Bunuhlah waktumu dengan aktifitas produktif dan
progressif, Jangan engkau terbunuh waktu karena
aktifitas yang mengasingkan rasionalitas.
(Nur Sayyid Santoso Kristeva)*

MANIFESTO WACANA KIRI

HANYA UNTUK MAHASISWA CERDAS DAN TERCERAHKAN

diterbitkan khusus untuk amunisi intelektual jaringan inti ideologis

Bunuhlah waktumu dengan aktifitas produktif dan progressif,
Jangan engkau terbunuh waktu karena aktifitas yang mengasingkan rasionalitas.

(Nur Sayyid Santoso Kristeva)

Hancurkan kapitalisme yang dibantu
oleh budaknya imperealisme.

(Ir. Soekarno)

Dalam negeri ini akan terdapat tugu peringatan manusia najis, penghianat Negara, penjual rakyat, kusta masyarakat. Puluhan ya ratusan nama dan gelar manusia najis yang dituliskan di semua sisi tugu raya ini. Yang masuk golongan manusia najis nomor satu ialah mereka yang langsung membantu penjajah, penindas, penghisap, atau pembunuh rakyat Indonesia.

(Tan Malaka)

Sejarah dari setiap masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah pertentangan kelas. Orang merdeka atau budak, bangsawan dan gembel, tuan dan pelayan, kepala tukang dan pekerja ahli, pendeknya yang menindas dan tertindas, berada dalam pertentangan yang tiada akhirnya.

(Karl Marx)

Progresifitas sejarah akan berjalan dengan hukum-hukumnya sendiri. Progresifitas sejarah adalah gerak hidup manusia diselingkupan bumi, garis hidup kemanusiaan. Yang menentang, apakah itu kelompok, suku, bangsa atau perorangan akan kalah. Dan aku tahu betul, itulah yang akan terjadi, entah kapan, entah cepat, entah lambat.

(Pramoedya Ananta Toer)



Anti-Copyright: dengan mencantumkan penulis sebagai hak dan pengakuan intelektual penulis, maka penulis dan penerbit memperbolehkan untuk mengutip, mereproduksi atau memperbanyak, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini dengan cara elektronik, mekanik, fotokopi, perekaman, scanner, microfilm, vcd & cd-room, rekaman suara atau dengan teknologi apapun dengan izin atau tanpa seizin penulis dan penerbit. Dokumen intelektual ini diterbitkan dan disebarakan demi kebutuhan gerakan sosial. Edisi khusus komunitas untuk agitasi & propaganda wacana kiri. Untuk kader inti ideologis jaringan sayap kiri. Sebarkan dan berorganisasilah! **BACA & LAWAN!**